Pemerintah Kabupaten Balangan

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Tahun Anggaran 2024

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN BALANGAN

TAHUN2025



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian arah kebijakan dalam melaksanakan pembangunan di daerah yang berkesinambungan;

b. bahwa dalam rangka mengakomodir aspirasi dan usulan dari masyarakat, kalangan dunia usaha serta jajaran Pemerintah Daerah dalam pembangunan di Daerah perlu disusun rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambagan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga

kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

6. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Rencana kerja pembangunan daerah di Kabupaten Balangan.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.
9. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Balangan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diingin pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Perangkat Daerah.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
18. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan

19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
20. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
21. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagi pengurangan nilai kekayaan bersih dalam periode tanhun anggaran yang bersangkutan.

BAB II
RKPD

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran, dari tanggal 1 Januari 2024 sampai tanggal 31 Desember 2024.

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
a. BAB I : Pendahuluan.
b. BAB II : Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah.
d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah.
e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.
f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
g. BAB VII : Penutup.

(3) Uraian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan RKPD penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, yang disusun berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan, penjaringan aspirasi masyarakat melalui

(2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang sinergis dengan perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten.

(3) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan :
   a. pedoman penyempurnaan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
   b. landasan dalam menyusun KUA dan PPAS Tahun 2025; dan
   c. pedoman dalam menyusun Rancangan APBD Tahun 20254.

Pasal 4

Dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025:
a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 sebagai bahan pembahasan KUA dan PPAS dengan DPRD; dan
b. Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2025 dalam melakukan pembahasan RKA-PD Tahun Anggaran 2025 dengan DPRD.

BAB III
KAIDAH PELAKSANAAN RKPD

Pasal 5

Kaidah-kaidah dalam pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :
a. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan kewenangannya;
b. Kepala Perangkat Daerah wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja Perangkat Daerah yang belum sesuai dengan RKPD;
c. dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah berupa pelaksanaan program dan kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh Pemerintah dan/atau perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil *reses* yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2025 dapat dilakukan penyesuaian.
d. kerangka pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;

e. target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
f. penyesuaian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan Perencanaan Daerah setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
g. RKPD Tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan KUA serta PPAS Tahun 2025 serta bahan arahan penyusunan RKA-PD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RKPD

Pasal 7

(1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila terjadi:
   a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat Nasional maupun di tingkat Pemerintah Daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
   b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
   c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2025.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 3 Juli 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 3 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 28

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan perkenan dan pertolongan-Nya maka dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat tersusun sebagaimana yang diharapkan. RKPD ini diharapkan dapat dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini disusun sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 16 (1) b. Adapun materi RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 terdiri dari analisis gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, analisis kapasitas riil keuangan daerah, penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah, perumusan permasalahan pembangunan daerah, penelaahan terhadap sasaran RPJMD, penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional, penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD, perumusan prioritas pembangunan daerah, serta perumusan rencana kerja program dan pendanaan dengan memperhatikan saran maupun masukan para pemangku kepentingan dalam Forum Konsultasi Publik.

RKPD Kabupaten Balangan ini merupakan pelaksanaan tahun keempat pada Periode RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021 - 2026 yang mengambil tema pada tahun 2025 yaitu **“** “***Percepatan Pemenuhan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian Dalam Menunjang Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan“.***

Sesuai fungsinya, dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan teknis operasional tahunan yang haus dipedomani oleh semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Peningkatkan koordinasi dan sinergi diperlukan dalam proses perencanaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal.

Akhirnya kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya dalam proses penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kepeduliannya diucapkan terima kasih.

Paringin, Juli 2024

BUPATI BALANGAN,

H. ABDUL HADI, S.Ag., M.I.Kom.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ..... **i**

Daftar Isi ..... **ii**

Daftar Tabel ..... **v**

Daftar Gambar ..... **xv**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**

1.1. Latar Belakang I-1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-2

1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6

1.4 Maksud dan Tujuan I-8

1.5 Sistematika Dokumen RKPD I-8

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI UMUM DAERAH **II-1**

2.1 Kondisi Umum Daerah II-1

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-39

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum II-85

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah II-201

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-241

2.2.1 Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2023 ..... II-240

2.3 Pencapaian Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan II-251

2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia II-252

2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi II-252

2.3.3 Indeks Gini II-253

2.3.4 Angka Pengangguran II-255

2.3.5 Pendapatan Per Kapita II-258

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD II-258

2.4.1 Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023 ..... II-258

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah II-304
2.5.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah II-304
2.5.2 Indentifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... II-307

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Balangan Tahun 2023 ..... III-2
3.1.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) III-2
3.1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah..... III-4
3.1.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) III-8
3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan..... III-9
3.1.1.5 Rasio Gini III-11
3.2. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Balangan III-12
3.3 Perkembangan Inflasi Daerah III-17
3.4 Ketenagakerjaan III-18
3.5 Nilai Tukar Petani III-20
3.6 Kebijakan Keuangan Daerah III-26
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... IV-2
4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 ..... IV-7
4.2.1 Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Nasional Dalam Rkp Tahun 2025..... IV-7
4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional..... IV-10
4.2.3 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025..... IV-21
4.2.4 Prioritas dan sasaran Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2025..... IV-23
4.2.4.1 Isu Strategis Pembangunan IV-23
4.2.4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten

Balangan Tahun 2025 ..... IV-23
4.2.4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD IV-50
4.2.5 Sinkronisasi Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 ..... IV-51
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
5.1 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025 ..... V-1
5.2 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD V-97
5.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2025 ..... V-98
5.3.1 Program yang mendukung Stunting, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi V-99
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1
6.1 Indikator Kinerja Makro Daerah VI-1
6.2 Inovasi Pembangunan Daerah VI-3
6.3 Indikator Kinerja Utama Daerah VI-4
6.4 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah VI-6
BAB VII PENUTUP VII-1
7.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan VII-1
7.2 Kaidah-Kaidah Pendanaan VII-2
LAMPIRAN .....

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Satuan Geomorfologi Dirinci Tiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2008 . ..... II-2
Tabel 2. 2 Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan II-7
Tabel 2. 3 Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan II-11
Tabel 2. 4 Wisata Alam Kabupaten Balangan Tahun 2023 ..... II-14
Tabel 2. 5 Wisata Agro Dan Buatan Kabupaten Balangan Tahun 2023 ..... II-14
Tabel 2. 6 Wisata Sejarah Dan Budaya Kabupaten Balangan Tahun 2023 ..... II-15
Tabel 2. 7 Wisata Religius Kabupaten Balangan Tahun 2023 ..... II-15
Tabel 2. 8 Objek wisata Yang Mendapatkan SK Pokdarwis II-15
Tabel 2. 9 Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan II-18
Tabel 2.10 Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-28
Tabel 2. 11 Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-30
Tabel 2. 12 Daerah Potensi Banjir Di Wilayah Kabupaten Balangan II-30
Tabel 2. 13 Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatatan Kabupaten Balangan II-32
Tabel 2. 14 Jumlah desa yang mengalami Bencana Tanah Longsor menurut Kecamatan Kabupaten Balangan II-33
Tabel 2.15 Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-33
Tabel 2. 16 Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-34
Tabel 2. 17 Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019-2023 ..... II-36
Tabel 2. 18 Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan Semester II Tahun 2023 ..... II-37
Tabel 2.19 Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif dan Non Produktif II-37

Tabel 2.20 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Angkatan Kerja II-39
Tabel 2.21 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2019-2023 ..... II-40
Tabel 2.22 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2019-2023. II-41
Tabel 2.23 Peranan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%), 2019-2023 ..... II-43
Tabel 2.24 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan (miliar rupiah), 2019-2023..... II-45
Tabel 2.25 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan 2019-2023 ..... II-46
Tabel 2.26 Perkembangan Inflasi Per Tahun Di Kalimantan Selatan II-48
Tabel 2.27 Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023 ..... II-51
Tabel 2.28 Rekap Rencana Aksi Tahunan PPKE 2022 - 2024 ..... II-53
Tabel 2.29 Rekapitulasi Realisasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem..... II-54
Tabel 2.30 Dimensi IPM Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 ..... II-58
Tabel 2.31 Prevalensi Stunting..... II-61
Tabel 2.32 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-64
Tabel 2.33 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan Tahun 2019- 2023 ..... II-64
Tabel 2.34 Gedung Olahraga di Kabupaten Balangan II-66
Tabel 2.35 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Tahun 2019-2023 ..... II-68
Tabel 2.36 Rincian Hasil Evaluas Indeks RB Pemerintah Kabupaten Balangan..... II-70
Tabel 2.37 Capaian Predikat LAKIP Kabupaten Balangan Tahun 2017-2023..... II-73
Tabel 2.38 Rincian Penilaian Hasil Evaluasi Tahun 2023..... II-73
Tabel 2.39 Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Balangan Tahun

2017-2023 ..... II-79
Tabel 2.40 Top 10 Besar Bailang Tahun 2023 ..... II-84
Tabel 2.41 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan Tahun 2023 ..... II-86
Tabel 2.42 Jumlah Putus Sekolah II-86
Tabel 2.43 Rata-rata Lama sekolah II-87
Tabel 2.44 Umur Harapan Hidup (UHH) II-89
Tabel 2.45 Angka Kematian Bayi II-90
Tabel 2.46 Angka Kematian Ibu (AKI) II-92
Tabel 2.47 Prevalensi Stunting II-94
Tabel 2.48 Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) II-96
Tabel 2.49 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria II-97
Tabel 2.50 Tenaga Kesehatan II-99
Tabel 2.51 Pelayanan Rumah Sakit II-104
Tabel 2.52 Jumlah Kunjungan Pasien RSUD Balangan II-108
Tabel 2.53 Data Kepegawaian II-108
Tabel 2.54 Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-111
Tabel 2.55 Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023. ..... II-112
Tabel 2.56 Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-113
Tabel 2.57 Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-115
Tabel 2.58 Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-117
Tabel 2.59 PPKS Yang Tertangani Tahun 2023 ..... II-118
Tabel 2.60 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-121
Tabel 2.61 Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-121
Tabel 2.62 Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-122
Tabel 2.63 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan anak Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-125
Tabel 2.64 Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023 ..... II-128
Tabel 2.65 Penatagunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Balangan
Tahun 2023 .....II-129
Tabel 2.66 Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023 ..... II-131
Tabel 2.67 Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023..... II-132
Tabel 2.68 Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2023 ..... II-135
Tabel 2.69 Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa..... II-136
Tabel 2.70 Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan..... II-139
Tabel 2.71 Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Balangan
Tahun 2020 - 2023 ..... II-139
Tabel 2.72 Penggunaan CPR Tahun 2023 ..... II-140
Tabel 2.73 Penggunaan mCPR Tahun 2023 ..... II-141
Tabel 2.74 Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern
Contraceptive (mCPR)..... II-142
Tabel 2.75 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) II-143
Tabel 2.76 *Total Fertility Rate* (TFR)..... II-144
Tabel 2.77 Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*) II-145
Tabel 2.78 Daftar Pengadaan II-146
Tabel 2.79 Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Balangan
Tahun 2018-2023 .....II-147
Tabel 2.80 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2023 .....II-149
Tabel 2.81 Capaian Indikator Koperasi dan UKM Kabupaten Balangan
Tahun 2019 – 2023 .....II-150
Tabel 2.82 Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Balangan
Tahun 2019 – 2023 .....II-151
Tabel 2.83 Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun
2019-2023 .....II-152

Tabel 2.84 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-152
Tabel 2.85 Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi..... II-152
Tabel 2.86 Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 ..... II-155
Tabel 2.87 Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2023 ..... II-155
Tabel 2.88 Jumlah organisasi pemuda aktif di Kabupaten Balangan tahun 2023 ... II-156
Tabel 2.89 Pelatih Yang Bersertifikat II-157
Tabel 2.90 Cabang Olahraga dan Mendali yang didapatkan II-158
Tabel 2.91 Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2021 dan 2023 ..... II-159
Tabel 2.92 Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-160
Tabel 2.93 Persentase Pengembangan Seni dan Budaya II-161
Tabel 2.94 Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023 ..... II-162
Tabel 2.95 Cagar Budaya Atau Diduga Cagar Budaya Di Kabupaten Balangan II-164
Tabel 2.96 Kinerja Dispersip Tahun 2023 ..... II-166
Tabel 2.97 Kinerja Dispersip 2023..... II-169
Tabel 2.98 Capaian Indikator Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023..... II-171
Tabel 2.99 Tempat Makan Kabupaten Balangan Tahun 2023 ..... II-172
Tabel 2.100 Capaian Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani Petani (NTP) Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-173
Tabel 2.101 Jumlah Petani di Kabupaten Balangan Menurut Kecamatan 2023..... II-174
Tabel 2.102 Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan 2019-2023 (Ha) II-175
Tabel 2.103 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Ton) II-175
Tabel 2.104 Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Ton/Ha)..... II-176
Tabel 2.105 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sawah

di Setiap Kecamatan Tahun 2023 ..... II-177
Tabel 2.106 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang–Kacangan dan Umbi-umbian DI Setaip Tahun 2023 ..... II-177
Tabel 2.107 Luas Panen Sayuran di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Ha) II-178
Tabel 2.108 Produksi Sayuran di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Kwintal) II-178
Tabel 2.109 Produktivitas Sayuran di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Kwintal/Ha) II-179
Tabel 2.110 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan di Kabupaten Balangan 2023 ..... II-180
Tabel 2.111 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat di Kabupaten Balangan 2019-2023 ..... II-180
Tabel 2.112 Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Semua Tanaman Obat-Obatan Di Setiap Kecamatan Tahun 2023 ..... II-181
Tabel 2.113 Banyaknya Hewan Ternak Besar dan Kecil di Kabupaten Balangan, 2019-2023 (Ekor) II-182
Tabel 2.114 Banyaknya Produksi Daging Ternak di Kabupaten Balangan, 2019-2023 ..... II-182
Tabel 2.115 Banyaknya Unggas di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023(Ekor) II-182
Tabel 2.116 Produksi Daging Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging dan Itik di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Kg) ..... II- 183
Tabel 2.117 Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan Tahun 2019- 2023 (Ha) II-183
Tabel 2.118 Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan 2016-2022 (Ton) II-184
Tabel 2.119 Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-184
Tabel 2.120 Capaian Indikator Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-186
Tabel 2.121 Capaian Indikator Perindustrian Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-187
Tabel 2.122 Capaian Indikator Transmigrasi Kabupaten Balangan Tahun 2019-

2023 ..... II-188
Tabel 2.123 Jumlah RTP, Pembudidaya, dan Luas Lahan Tahun 2024 ..... II-189
Tabel 2.124 Produksi Perikanan (ton) menurut Tempat Pemeliharaan di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-190
Tabel 2.125 Jumlah Nelayan (orang) berdasarkan Alat Tangkap yang Beroperasi di Perairan Kabupaten Balangan Tahun 2023 ..... II-191
Tabel 2.126 Luas Areal Budidaya Perikanan (m2) di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-191
Tabel 2.127 Produksi Benih Ikan Tahunan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) Gunung Manau Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023 ..... II-192
Tabel 2.128 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (POKLAHSAR) Di Kabupaten Balangan Tahun 2023 ..... II-192
Tabel 2.129 Perencanaan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 II-193
Tabel 2.130 Capaian Indikator Keuangan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 II-194
Tabel 2.131 Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Balangan Tahun 2016-2023 ..... II-197
Tabel 2.132 Capaian Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-199
Tabel 2.133 Capaian Indikator Pengawasan Kabupaten Balangan Tahun 2019 - 2023 ..... II-200
Tabel 2.134 Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2019-2023 ..... II-202
Tabel 2.135 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2019-2023 ..... II-203
Tabel 2.136 Capaian Indikator SPM Kesehatan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023 ..... II-205
Tabel 2.137 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil II-206
Tabel 2.138 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin II-208
Tabel 2.139 Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir II-210
Tabel 2.140 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita II-211
Tabel 2.141Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar II-213
Tabel 2.142 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif II-214

Tabel 2.143 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut II-215
Tabel 2.144 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi II-217
Tabel 2.145 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus II-218
Tabel 2.146 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat II-220
Tabel 2.147 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis II-221
Tabel 2.148 Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar II-223
Tabel 2.149 Capaian Indikator SPM Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023 ..... II-224
Tabel 2.150 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-227
Tabel 2.151 SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman II-228
Tabel 2.152 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan II-229
Tabel 2.153 SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum II-241
Tabel 2.154 Rekapitulasi Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan Triwulan IV Tahun 2023 ..... II-243
Tabel 2.155 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023 ..... II-247
Tabel 2.156 Realisasi Program II-247
Tabel 2.157 Realisasi Kegiatan II-248
Tabel 2.158 Realisasi Indikator Sub Kegiatan II-249
Tabel 2.159 Evaluasi Capaian Kinerja Program – Sub Kegiatan SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 (Terlampir) II-250
Tabel 2.160 Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ..... II-251
Tabel 2.161 Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan tahun 2023 ..... II-253
Tabel 2.162 Angka Pengangguran Terbuka Kab/Kota II-257
Tabel 2.163 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 pada Tahun 2023 ..... II-259
Tabel 2.164 Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi RPJMD Kabupaten Balamgan s.d Tahun 2023 ..... II-264

Tabel 2.165 Permasalahan Pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Kabupaten Balangan II-307
Tabel 3.1 PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Balangan (Milyar Rupiah), 2020-2023 ..... III-3
Tabel 3.2 PDRB Balangan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah) III-3
Tabel 3.3 PDRB Kabupaten Balangan 2019-2023 ..... III-4
Tabel 3.4 Asumsi-Asumsi Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2024 ..... III-6
Tabel 3.5 Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan III-9
Tabel 3.6 Proyeksi/Target Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Balangan Tahun 2024-2025 ..... III-10
Tabel 3.7 Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan III-12
Tabel 3.8 Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Balangan Tahun 2045-2025 ..... III-12
Tabel 3.9 LPE Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... III-14
Tabel 3.10 LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 Menurut Lapangan Usaha III-14
Tabel 3.11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan, 2021-2023 ..... III-19
Tabel 3.12 LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024 Menurut Pengeluaran III-24
Tabel 3.13 Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Balangan Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Tahun 2021-2024 Menurut Pengeluaran III-24
Tabel 3.14 Distrubusi PDRB ADHB Kabupaten Balangan Tahun 2021-2022 dan Proyeksi Tahun 2023-2024 Menurut Lapangan Usaha III-25
Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Balangan Tahun 2022-2025 (dalam juta) III-27
Tabel 3.16 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Balangan Tahun 2021-2025 (dalam juta) III-29
Tabel 3.17 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2025 (dalam juta) III-31
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ..... IV-4

Tabel 4.2 Sasaran, Prioritas Daerah, Sub Prioritas dan Program Prioritas pada RKPD Tahun 2025 ..... IV-29
Tabel 4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Balangan IV-50
Tabel 4.4 Sandingan Agenda Pembangunan/Program Pembangunan dengan Prioritas Daerah/Program Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2025 . IV-52
Tabel 5.1 Matrik Rencana Program Prioritas Per Urusan Kabupaten Balangan Tahun 2025 ..... V-3
Tabel 5.2 Konsistensi Program Dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 Dan RPJMD Tahun Pelaksaan 2025 Kabupaten Balangan V-33
Tabel 5.3 Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 ..... V-98
Tabel 5.4 Penganggaran terkait Stunting V-99
Tabel 5.5 Penganggaran terkait Kemiskinan Ekstrim V-100
Tabel 5.6 Penganggaran terkait Inflasi V-100
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Makro Kabupaten Balangan 2025 ..... VI-2
Tabel 6.2 Top 10 Besar Bailang Tahun 2023 ..... VI-3
Tabel 6.3 Indikator Kinerja Utama Kabupaten Balangan 2025 ..... VI-5
Tabel 6.4 Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ..... VI-7
Tabel 6.5 Target Indikator Per Urusan Berdasarkan Hasil Rakortekbang Antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Provinsi Kalimantan Selatan . VI-18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan I-7
Gambar 2.1 Peta Geologi Kabupaten Balangan II-3
Gambar 2.2 Peta Geomorfologi Kabupaten Balangan II-4
Gambar 2.3 Batas Administrasi Kabupaten Balangan II-6
Gambar 2.4 Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km2 ..... II-6
Gambar 2.5 Persentase Luas Penggunaan lahan 2020 ..... II-11
Gambar 2.6 RTRW Kabupaten Balangan 2013-2032 ..... II-25
Gambar 2.7 Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ..... II-26
Gambar 2.8 Peta Rawan Banjir Kabupaten Balangan II-28
Gambar 2.9 Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2023 ..... II-29
Gambar 2.10 Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Jiwa) II-35
Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2023 ..... II-35
Gambar 2.12 Persentase Penduduk Kabupaten Balangan Per Kecamatan Tahun 2023 (jiwa) II-36
Gambar 2.13 Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2022 ..... II-38
Gambar 2.14 Pangsa PDRB Balangan Tahun 2023 ..... II-42
Gambar 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019– 2023 ..... II-46
Gambar 2.16 PDRB Per Kapita Kabupaten Balangan dengan dan Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2017-2023 ..... II-47
Gambar 2.17 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-49

Gambar 2.18 Jumlah Keluarga dan Individu Pada Desil 1 Kab/Kota di Kalimantan Selatan II-52
Gambar 2.19 Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Ekstrem Provinsi Kalimantan Selatan II-55
Gambar 2.20 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-56
Gambar 2.21 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ..... II-56
Gambar 2.22 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan II-57
Gambar 2.23 Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Selatan Tahun 2023 ..... II-58
Gambar 2.24 Grafik Prevalensi Stunting II-61
Gambar 2.25 Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan 2017-2023 ..... II-70
Gambar 2.26 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan 2017-2023 ..... II-71
Gambar 2.27 Pendapatan Transfer Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023 ..... II-72
Gambar 2.28 Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Balangan 2017-2023 ..... II-72
Gambar 2.29 Grafik Prevalensi Stunting II-94
Gambar 2.30 Grafik Indeks Risiko Bencana II-114
Gambar 2.31 Grafik Indeks Ketahanan Daerah II-115
Gambar 2.32 Grafik Sertifikasi Tanah Pemda 2023 ..... II-130
Gambar 2.33 Grafik Hasil Inventarisasi Tanah Pemda Tahun 2023 ..... II-131
Gambar 2.34 Capaian s.d 2023 terhadap Akhir Resntra Tahun 2026 ..... II-153
Gambar 2.35 Realisasi Investasi Triwulanan Berdasarkan PMDN dan PMA Tahun 2023 ..... II-153
Gambar 2.36 Sebaran Investasi berdasarkan Sektor II-154
Gambar 2.37 Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2023 ..... II-154
Gambar 2.38 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan s.d Maret 2024 ..... II-204
Gambar 2.39 Grafik Pelayanan Pada Ibu Hamil II-207
Gambar 2.40 Grafik Pelayanan Kesehatan Pada Lansia II-216

Gambar 2.41 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 ..... II-252
Gambar 2.42 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-254
Gambar 2.43 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023 ..... II-256
Gambar 3.1 LPE Kab Balangan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran Pada Tahun 2023 ..... III-13
Gambar 3.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2011-2023 ..... III-14
Gambar 3.3 Pangsa PDRB Balangan Tahun 2023 ..... III-17

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kabupaten Balangan tahun 2025 memuat rancangan penyusunan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Dalam penyusunan ini selain berpedoman pada RPJMD tahun 2016-2021, juga mengacu pada hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 serta evaluasi tahun 2023 sampai Triwulan I, perkembangan sosial dan ekonomi daerah tahun berjalan dan realisasi dari pendapatan daerah di RKPD Tahun 2023 serta dengan memperhatikan keterkaitan, sinergi, dan konsistensi dengan berbagai dokumen perencanaan yang lebih tinggi baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Rumusan sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam RKPD juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dengan berdasarkan data dan asumsi-asumsi yang tepat dan akurat.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyusunan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 dilaksanakan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) pada Tahun 2023. Proses Musrenbang dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten, termasuk di dalamnya penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah (Forum PD). Selanjutnya untuk mengawal usulan ke tingkat pemerintah yang lebih tinggi baik di tingkat provinsi maupun pusat, pemerintah Kabupaten Balangan juga berperan aktif dalam Forum PD Daerah Kalimantan Selatan , Musrenbang Daerah Kalimantan Selatan , dan Musrenbang Nasional.

RKPD Tahun 2025 yang tersusun akan menjadi pedoman dan acuan bagi Bupati bersama DPRD dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran Sementara yang menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat. RKPD juga merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan

pemerintahan daerah, sehingga dapat diketahui capaian kinerja RPJMD sebagai wujud kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun yang bersangkutan. Realisasi dari perencanaan yang dituangkan dalam dokumen RKPD Tahun 2025 akan tercermin pada program dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Rancangan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 disusun dengan landasan hukum:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kab. Tanah Bumbu dan Kab. Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256);
3. Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, beserta ketentuan pelaksanaannya;
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tatib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

22. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelaksaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
26. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
28. Peraturan Presiden nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan nasional;
29. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
30. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019;
31. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
32. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
33. Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
34. Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
35. Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

36. Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
37. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 1447);
38. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
39. Permendagri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pemberian SDM Penanggulan gan Kemiskinan Daerah;
40. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
41. Permendagri Nomor 17 tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
42. Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
43. Permendagri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
44. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 tahun 2023 tentang tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
45. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 16);
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana tata ruang wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2035;
47. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);

48. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 071 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan;
49. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 (Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 95);
50. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kab. Balangan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2018);
51. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021);
52. Peraturan Bupati Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 25 Tahun 2021).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dalam kaitannya dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004, maka keberadaan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Balangan merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2021-2026 yang diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Tahun 2021-2026 dan RPJMN 2020-2024.

1. RKPD – RPJMD

   Dokumen RPJMD dituangkan ke dalam RKPD sebagai dokumen operasional tahunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas, sasaran pembangunan, dan rencana program kegiatan prioritas pembangunan daerah.
2. RKPD – Renja PD

   Dokumen RKPD sebagai Pedoman penyusunan dan penetapan anggaran Rencana Kerja PD. Selanjutnya rencana PD digunakan sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
3. RKPD – RKPD Kalimantan Selatan – RKP

Dokumen RKPD Kabupaten harus mengacu, disinkronkan dan diserasikan dengan dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RKP (Nasional). Sinkronisasi dilakukan terkait dengan tema, prioritas, sasaran, target kinerja pembangunan, dan juga indikasi program-program pembangunan prioritas.

4. RKPD – RTRW

   RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 mengacu kepada dokumen RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032 hal ini karena Perencanaan tata ruang dan pola ruang dalam rentang waktu hingga tahun 2024 perlu diakomodir dalam RKPD tahun 2024 sebagai bagian untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

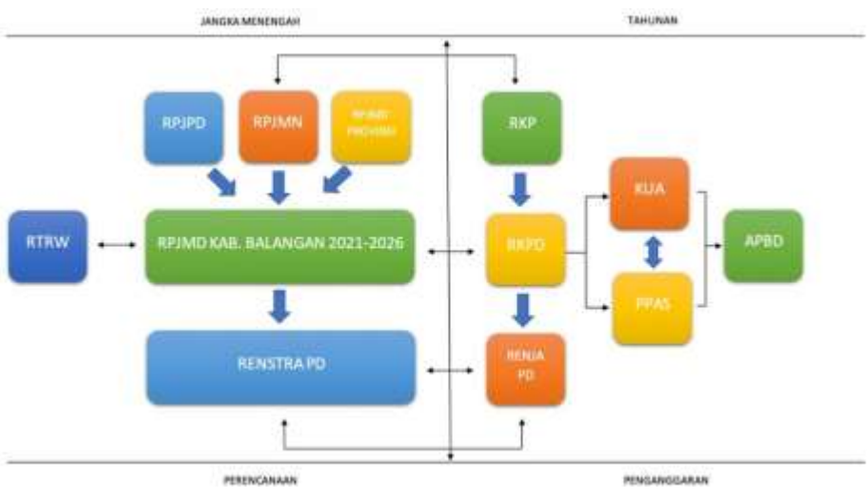
5. RKPD – SDGs

   Suistanable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ditetapkan dan menjadi komitmen bersama dunia Internasional dalam meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi selanjutnya. RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 dalam penyusunannya juga berpedoman pada pengarusutamaan pencapaian SDGs dalam bentuk rumusan kebijakan, porgram, kegiatan, sub kegiatan indikator dan target serta penganggaran terkait target SDGs yang telah ditetapkan.

Gambaran tentang hubungan antara RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1.
Hubungan Antar-Dokumen Perencanaan

Alur Perencanaan dan Penganggaran



1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman resmi dan acuan pelaksanaan pembangunan daerah dalam tahun 2025 sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Balangan secara berjenjang. Dengan tersusunnya RKPD tahun 2025 akan mempermudah untuk mengarahkan semua sumber daya yang dimiliki untuk terlibat di dalam pelaksanaan segenap program dan kegiatan pembangunan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya, tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah untuk :

1 Menyesuaikan program dan kegiatan prioritas pembangunan mengikuti Perubahan Perangkat Daerah.
2 Untuk mengintegrasikan, mewujudkan keterpaduan, keserasian, dan menyinergikan program-program pembangunan di daerah.
3 Sebagai pedoman dan acuan bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD.
4 Sebagai pedoman dan acuan bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2025.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan Antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD Tahun 2025

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

2.2 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs

2.3 Pencapaian Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan

2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.5. Permasalahan Pembangunan Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Program Dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

5.2 Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

5.3 Kerangka Pendanaan Tahun 2025

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Makro Daerah

6.2. Indikator Kinerja Utama Daerah

6.3 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

BAB VII PENUTUP

7.1. Kaidah Pelaksanaan

7.2. Kesimpulan

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah

Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah otonom baru pada wilayah Provinsi Kalimantan Seprogralatan, yang merupakan hasil pemekaran wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dengan ibukota berada di Kota Paringin. Pembentukan Kabupaten Balangan secara hukum didasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Balangan berasal dari nama sebuah sungai yang mengalir dari daerah Pegunungan Meratus hingga ke Sungai Barito. Kabupaten Balangan mempunyai motto "SANGGAM" yaitu singkatan dari Sanggup Bagawi Gasan Masyarakat, yang berarti Kesanggupan melaksanakan pembangunan yang didasari oleh keikhlasan untuk masyarakat.

Dalam upaya untuk lebih mendekati pada kondisi riil dan paling akhir, maka Gambaran Umum Kondisi Daerah pada dokumen RKPD ini dilakukan penambahan berupa data dan informasi tahun terakhir.

2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Wilayah Kabupaten Balangan secara umum merupakan dataran, perbukitan dan pegunungan (klasifikasi bentuk lahan absolut Van Zuidam, 1985). Dari klasifikasi tersebut, dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Balangan mempunyai nilai kemiringan lereng berkisar antara 2% sampai 30%. Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1-3, Neopleosin Tf-Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1-3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 %) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah-jenis Paleogen To, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong.

Jenis batuan pada bagian utara formasi Tanjung (Tet) memiliki sebaran sekitar 5%, tersusun atas perselingan antara batu pasir, batu lempung, batu lanau, batu gamping, dan konglomerat aneka bahan. Sedangkan bagian timur sebaran formasi Berai (Tomb) ada di sekitar Gunung Berai Kecamatan Awayan, tersusun oleh batu gamping bersisipan napal dan batu lempung dengan ketebalan lapisan

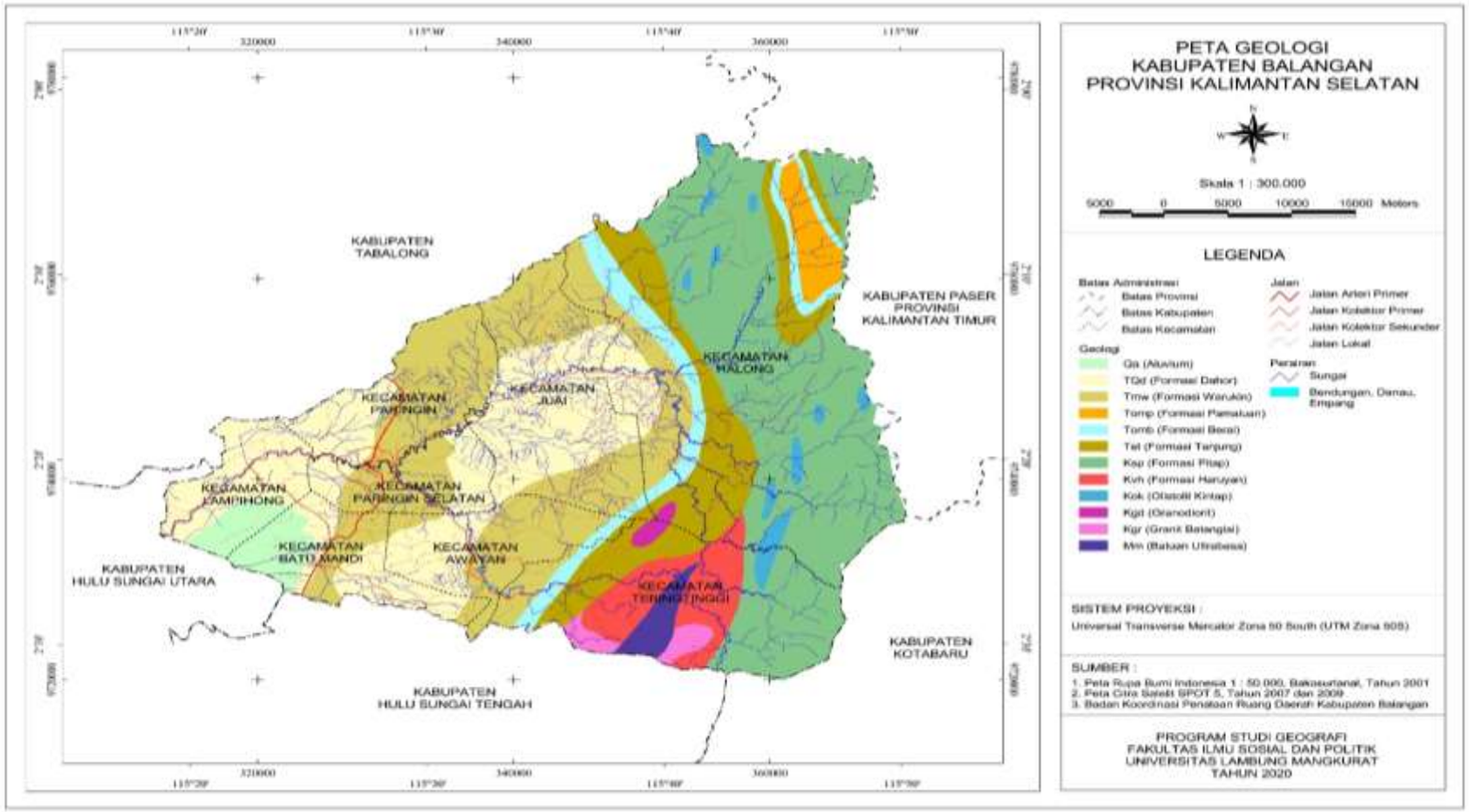
rata-rata 1-6 meter. Formasi Warukin (Tmw) merupakan tutupan dominan yang hampir mencapai 70% tersebar di bagian utara dan timur Paringin, tersusun dengan perselingan batu pasir kuarsa dan batu lempung bersisipan serpih dan batu bara dengan ketebalan lapisan rata-rata 2 meter. Formasi Dahor tersebar sekitar 15% di bagian tengah dan barat, tersusun oleh batu pasir kuarsa bersisipan lempung dan limonit. Endapan Quarter (Qa) tersebar di daerah dataran bagian selatan (Gambar 2.1).

Berdasarkan sebaran satuan geomorfologi pada tiap-tiap wilayah kecamatan, Kecamatan Halong dan Juai tercatat sebagai wilayah kecamatan dengan kondisi geomorfologi yang bervariatif. Sedangkan Kecamatan Tebing Tinggi merupakan wilayah kecamatan yang memiliki kondisi geomorfologi dengan satuan perbukitan relatif curam dan pegunungan curam. Wilayah kondisi landau hamper terdapat di setiap kecamatan kecuali Tebing Tinggi. Luas wilayah Kabupaten Balangan berdasarkan satuan geomorfologi, dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan Gambar 2.2.

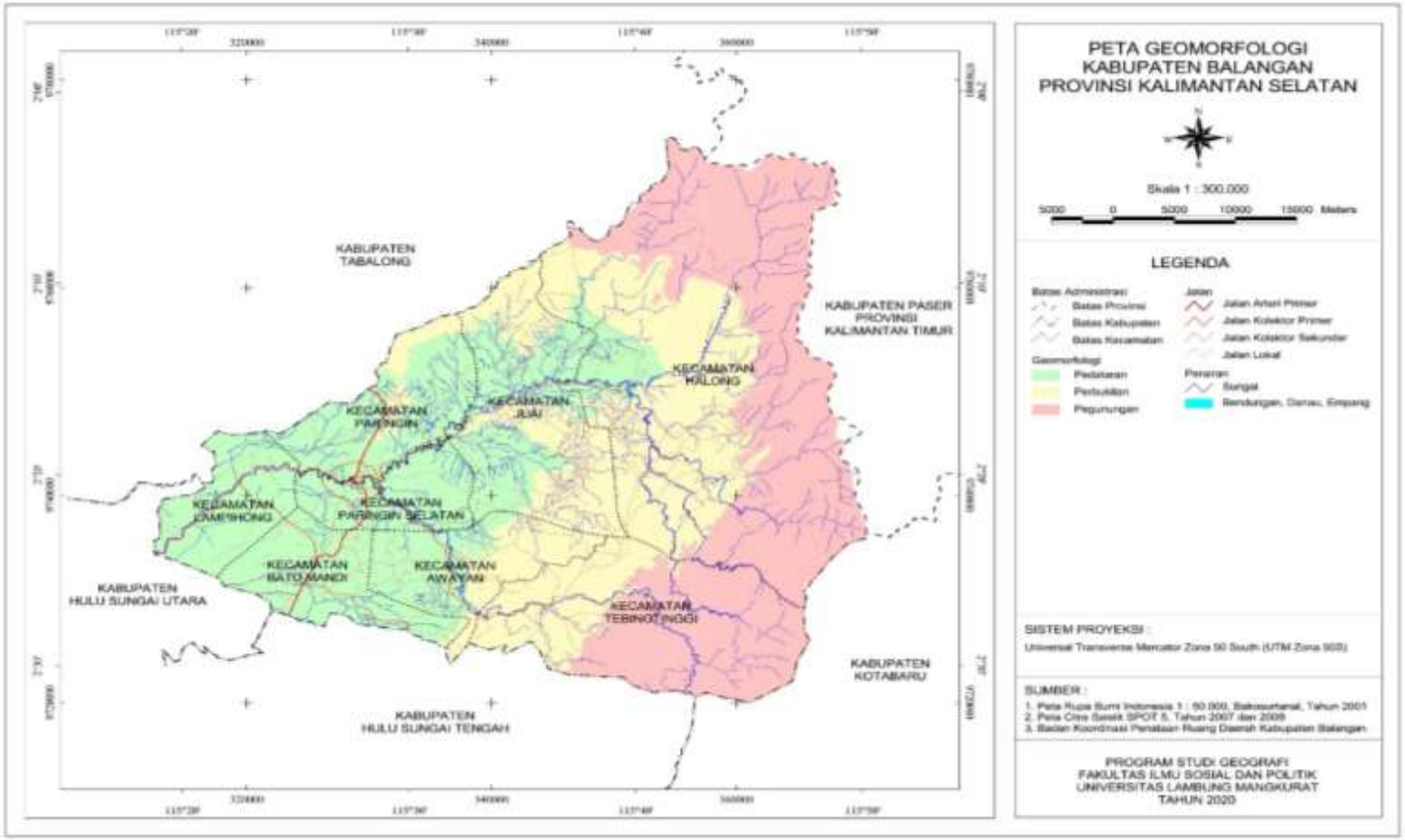
Tabel 2. 1
Luas Wilayah Menurut Satuan Geomorfologi Dirinci Tiap Kecamatan Kabupaten Balangan Tahun 2008

No.	Kecamatan	Luas Satuan Geomorfologi					
		Dataran (Landai)		Perbukitan (Relatif Curam)		Pegunugan (curam)	
		Km²	%	Km2	%	Km2	%
1.	Halong	12,09	1,90	154,21	33,60	485,99	63,00
2.	Juai	141,71	21,80	150,11	32,80	1,80	0,20
3.	Tebing Tinggi	-	-	66,20	14,40	283,21	36,70
4.	Batu Mandi	181,01	27,90	4,86	1,10	-	-
5.	Awayan	55,32	8,50	67,65	14,80	-	-
6.	Lampihong	70,58	10,90	-	-	-	-
7.	Paringin	126,71	19,50	15,29	3,30	-	-
8.	Paringin Selatan	61,62	9,50	-	-	-	-
Total		**649,01**	**100**	**458,30**	**100**	**770,99**	**100**

Sumber: SRTM Data V4 (Path 60 Row 13), CIAT-CSI 2008 (Diolah Menggunakan Software Global Mapper 8.0 Dengan Metode Interpolasi Reuter Et Al. (2007); Diolah 2010. Luasan Satuan Geomorfologi Dihitung Menggunakan Piranti Lunak Berbasis GIS, Mapinfo 8.0 SCP. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) 2016, Kab. Balangan



Gambar 2.1
Peta Geologi Kabupaten Balangan



Gambar 2.2
Peta Geomorfologi Kabupaten Balangan

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1.1 Kondisi Geografis

A. Letak, Luas, dan Batas Wilayah Administrasi

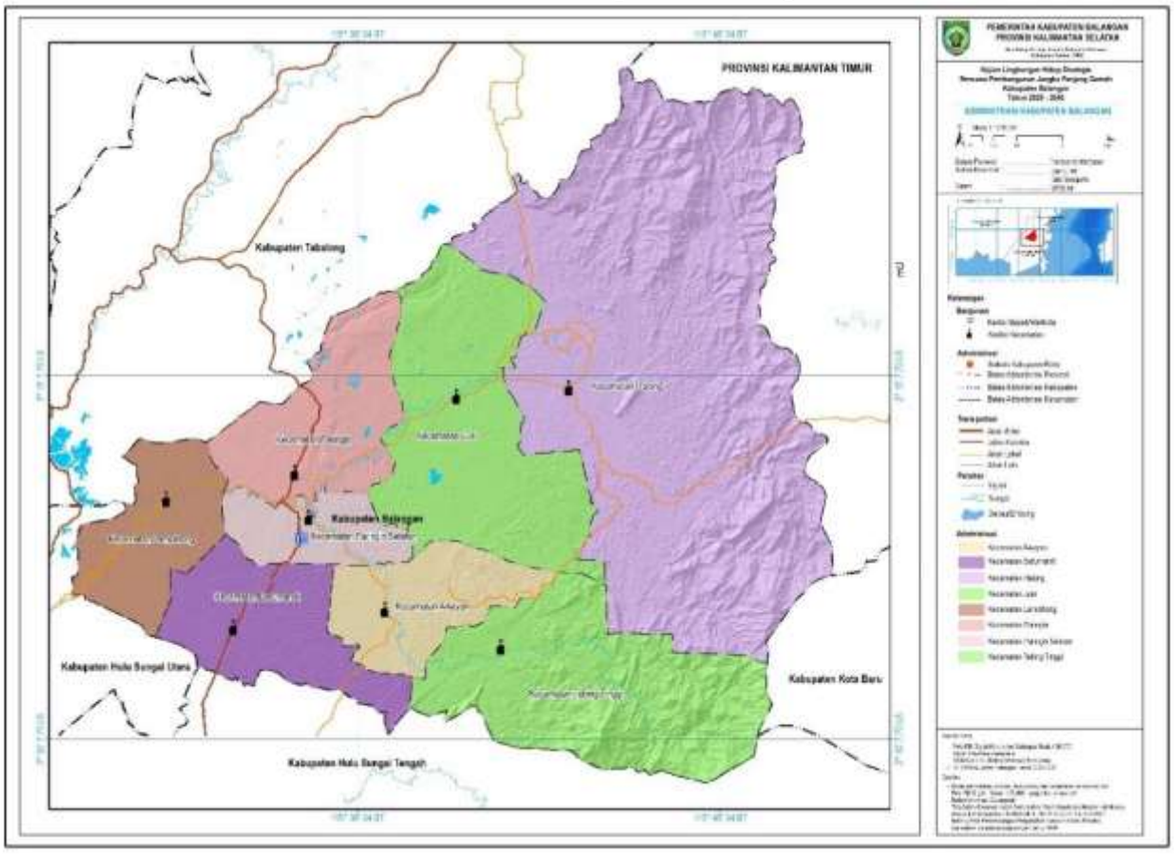
Balangan sebagian besar merupakan daerah dataran dengan ketinggian antara 25-100 meter diatas permukaan laut, secara geografis terletak pada 2° 01’ 37” sampai dengan 2° 35’ 58” Lintang Selatan dan 114° 50’ 24” sampai dengan 115° 50’ 24” Bujur Timur. Luas wilayah Balangan, adalah berupa daratan seluas 1828,10 km^2 dengan batas administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur
Sebelah Selatan	: Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Sebelah Barat	: Kabupaten Hulu Sungai Utara
Sebelah Timur	: Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Pasir Provinsi Kalimantan Timur

Wilayah administrasi Kabupaten Balangan terdiri dari 8 wilayah kecamatan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan no. 23 tahun 2006 luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu: Lampihong (100,09 km^2), Batumandi (112,25 km^2), Awayan (122,73 km^2), Tebing Tinggi (285,15 km^2), Paringin (138,65 km^2), Paringin Selatan (85,48 km^2), Juai (230,82 km^2), serta Halong (752,91 km^2).

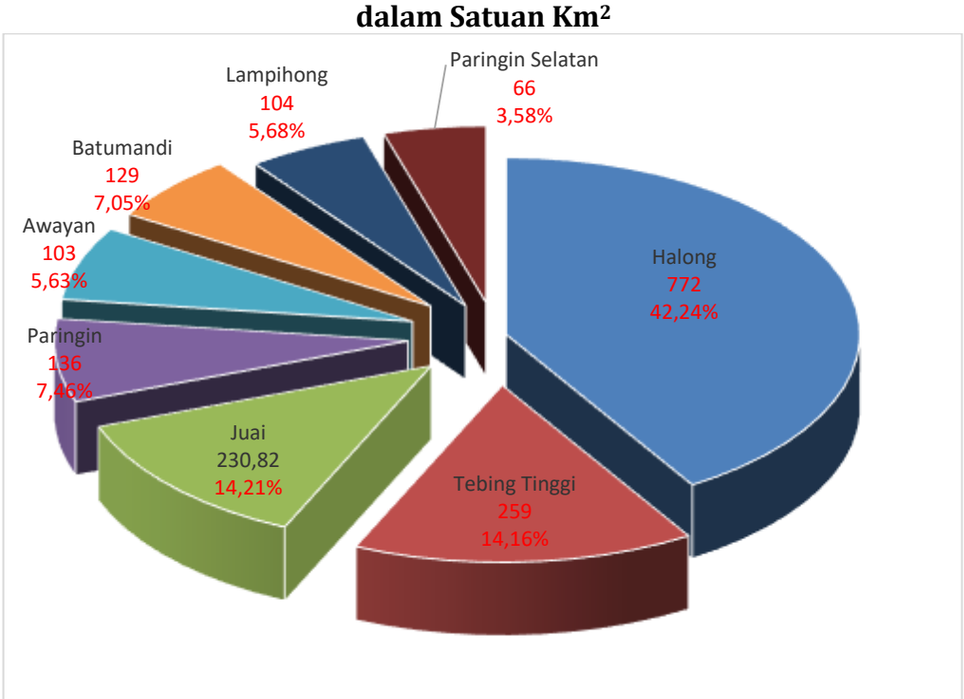
Kabupaten Balangan secara administrasi pemerintahan saat ini terdiri atas 153 desa dan 3 kelurahan (berdasarkan Perda No. 24 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan). Hal ini dapat dilihat pada Gambar 2.3, 2.4, dan Tabel 2.2 berikut.

Gambar 2.3
Batas Administrasi Kabupaten Balangan



Sumber: KLHS Kabupaten Balangan Tahun 2025-2045

Gambar 2.4
Luas Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Balangan dalam Satuan Km²



Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka, 2023

Tabel 2.2
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Kabupaten Balangan

No	Kecamatan	Kelurahan (Buah)	Desa (Buah)
1	Lampihong	-	27
2	Paringin	2	14
3	Juai	-	20
4	Halong	-	24
5	Batu Mandi	-	18
6	Paringin Selatan	1	15
7	Awayan	-	23
8	Tebing Tinggi	-	12
	Jumlah	3	153

Sumber : Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023

B. Topografi

Kabupaten Balangan memiliki kondisi topografi yang cukup variatif. Sebagian besar wilayah di Kabupaten Balangan berada di ketinggian antara 25-100 m dpl (38 %). Ketinggian yang paling kecil adalah ketinggian 0-7 meter, yaitu hanya 19 %. Ketinggian 0-7 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi sedangkan ketinggian di atas 500 meter dpl hanya terdapat di Kecamatan Awayan, Tebing Tinggi dan Halong. Wilayah dengan ketinggian lebih dari 500 meter dpl merupakan wilayah yang jika digunakan untuk budidaya pertanian memerlukan tindakan-tindakan khusus karena pada ketinggian tersebut banyak lereng yang terjal dan mudah erosi. Ketingggian kurang dari 500 meter sangat cocok untuk budidaya pertanian dan harus tetap memperhitungkan bahwa pada ketinggian tersebut juga masih banyak lereng yang terjal.

Kemiringan lahan di Kabupaten Balangan bervariasi dalam enam kelas kemiringan, yaitu < 2 %, 2-8 %, 8-15 %, 15-25 %, 25-40 % dan lebih besar dari 40 %. Hal ini sangat jelas terlihat dari kondisi fisik lingkungan yang cukup bergelombang di beberapa Kecamatan yang merupakan bagian wilayah kabupaten. Kemiringan suatu lahan berkaitan dengan kepekaan terhadap erosi tanah. Semakin tinggi/terjal lerengnya, semakin peka terhadap, erosi. Kelas lereng paling luas di Kabupaten Balangan adalah kelas lereng 0-2 % yaitu mencapai 69 % dari luas wilayah Kabupaten Balangan yang terdapat di semua kecamatan, di mana yang terbesar terdapat di Kecamatan Halong. Kelas lereng ini sangat cocok untuk budidaya pertanian, maupun untuk kegiatan perkotaan (terbangun).

Kelas lereng yang luasnya paling kecil adalah kelas 25-40 m yaitu hanya 2 %, yang terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Wilayah yang curam dengan kemiringan di atas 40 m cukup luas yaitu mencapai 16 % dan terdapat di Kecamatan Awayan dan Halong. Kawasan yang memiliki kelas lereng tersebut pada umumnya dipertahankan sebagai Kawasan lindung. Perbedaan kondisi kemiringan lahan ini berimplikasi terhadap wilayah yang cukup seragam, sementara Kecamatan yang lain kondisi fisiknya cukup beragam. Kecamatan Lampihong, misalnya, memiliki karakter fisik datar, tanpa wilayah

bergelombang. Tidak seperti Kecamatan Awayan dan Halong, yang memiliki semua kelas lereng, mulai dari topografi yang datar hingga kemiringan tajam (terjal).

C. Geologi

Kondisi geologis di salah satu wilayah kabupaten diasumsikan cukup mewakili kondisi geologis lingkup kawasan tersebut, karena proses ekologi yang terjadi secara alami pada umumnya berlangsung dalam rentang waktu yang panjang di lingkup wilayah yang cukup luas. Tinjauan kondisi geologi terdiri dari tinjauan terhadap jenis batuan, jenis tanah dan tekstur tanah yang terdapat di Kabupaten Balangan.

Jenis batuan yang ada di Kabupaten Balangan terdiri dari enam jenis, yaitu Paleogen To,b,c,d, batuan beku dalam, Miosen bawah (Aketania Fe), Miosen Tf 1 3, Neopleosin Tf Tgh, Misozoikum tak diuraikan dan Quarfer. Jenis batuan yang paling luas di Kabupaten Balangan adalah jenis miosen Tf 1 3 yaitu mencapai 71.277 Ha (37,25 %) dari luas wilayah. Jenis batuan ini terdapat di semua Kecamatan. Sedangkan jenis batuan yang paling sedikit adalah jenis Paleogen'Ta, b, c, d yang hanya terdapat di Kecamatan Halong. Untuk jenis tanah yang terdapat di kabupaten Balangan adalah latosol, podsolik merah kuning, komplek podsolik merah kuning dan latosol, litosol, serta alluvial. Jenis tanah yang mempunyai tingkat kesuburan tanah cukup tinggi adalah tanah alluvial yang sangat potensial unfuk budidaya pertanian karena di samping subur juga tidak peka terhadap erosi. Jenis tanah yang lain mempunyai tingkat kesuburan yang rendah dan peka terhadap erosi. Jenis tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian tetapi disertai teknologi pengolahan tanah yang tepat, sehingga erosi dapat ditekan sekecil mungkin. Jenis tanah yang terbanyak adalah podsolik merah kuning, yaitu mencapai 78.723 Ha (42,73 %), sedangkan jenis tanah yang paling sedikit adalah latosol, yaitu hanya 4.491 Ha (2,44 %). Luas tanah alluvial hanya mencapai 6.703 Ha (3,64 %). Tanah aluvial paling banyak terdapat di Kecamatan Halong dan paling sedikit di Kecamatan Juai. Jenis tanah alluvial ini tidak terdapat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Awayan dan Paringin.

Tekstur tanah di Kabupaten Balangan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu halus, sedang, dan kasar. Tekstur tanah akan berpengaruh terhadap kesuburan fisik tanah, kemampuan menyerap dan menyimpan air dan kepekaan terhadap erosi. Sebagian besar tanah di Kabupaten Balangan bertekstur halus, yaitu mencapai 91,76 % dari luas wilayah. Tanah yang bertekstur sedang dan kasar hanya 6,98 % dan 1,26 % dari luas wilayah. Lahan bertekstur halus paling banyak terdapat di Kecamatan Halong. Dengan demikian di Kabupaten Balangan tersedia lahan yang cukup luas untuk ditanami semua tanaman dengan baik dan tahan terhadap erosi.

D. Hidrologi

Kondisi Hidrologi dapat ditinjau dari beberapa hal, diantaranya sumberdaya air dan pola drainase. Sumber daya air di Kabupaten Balangan berupa sungai dan embung (kolam-kolam retensi). Sungai-sungai utama yang mengalir didaerah Kabupaten Balangan adalah Sungai Pitap, Sungai Balangan, Sungai Mantuyan, Sungai Tabuan, Sungai Galumbang, Sungai Halong, Sungai Uren, Sungai Ninian, Sungai Jauk, Sungai Batumandi, Sungai Lokbatu dan Sungai Juai. Berdasarkan pola pengaliran sungai utama dan anak sungai, maka daerah Kabupaten Balangan dibagi menjadi 4 pola pengaliran sungai, yaitu : pola pengaliran anastomatik, pola pengairan dendritik, pola pengaliran rektangular dan pola pengaliran subdentritik.

1. Pola Pengaliran Anastomatik

   Pola pengaliran anastomatik adalah pola pengaliran modifikasi yang membentuk meander yang terbentuk di dataran banjir, delta ataupun rawa. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan dengan luas kira-kira 25 %. Pola pengaliran ini terdapat dibagian barat-selatan daerah kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh Sungai Pitap, Sungai Muning, Sungai Lok Batu, Sungai Juuh, Sungai Batumandi, Sungai Jauk, Sungai Pelasan serta Sungai Kambiyain dengan anak-anak sungainya

2. Pola Pengaliran Dendritik

   Pola pengaliran dendritik adalah pola pengaliran dasar yang bentuk umum seperti daun, berkembang pada batuan dengan kekerasan relatif sama, perlapisan batuan sedimen relatif datar serta tahan akan pelapukan, kemiringan landai, kurang dipengaruhi struktur geologi, pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 25 %. Pola Pengaliran ini terdapat di bagian barat hingga bagian tengah daerah kabupaten Balangan. Pola Pengaliran ini terdapat di sungai Balangan, sungai Ninian, sungai Juai, sungai Jungkal serta sungai Jingan dengan anak-anak sungainya

3. Pola Pengaliran Rektangular

   Pola pengaliran rekrangular adalah pola pengaliran dasar dimana induk sungai dengan anak sungai yang memperlihatkan arah lengkungan menganan, pengontrol struktur atau sesar yang memiliki sudut kemiringan, tidak memiliki perulangan perlapisan batuan dan sering memperlihatkan pola. Pengaliran yang tidak menerus. Pola pengaliran ini menempati daerah Kabupaten Balangan sekitar 30 %. Pola pengaliran terdapat dibagian timur daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Balangan, sungai Halong, sungai Uren, sungai Mantuyan, serta sungai Tabuan dengan anak-anak sungainya.

4. Pola Pengaliran Subdendritik

Pola pengaliran subdendritik adalah pola pengaliran modifikasi yang berbentuk mendaun yang umumnya terbentuk didaerah yang mempunyai kekerasan batuan relative sama yang berkembang pada batuan beku, sedimen, maupun metamorf. Pola pengaliran ini menempati daerah kabupaten Balangan sekitar 20 %. Pola pengaliran ini terdapat dibagian utara daerah Kabupaten Balangan. Pola pengaliran ini dibentuk oleh sungai Galumbang, sungai Lalayau serta sungai Tutupan dengan anak-anak sungainya.

Kondisi Hidrologi ditinjau dari pola drainase tanah di Kabupaten Balangan sebagian besar kecamatan di Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan yang baik karena Sebagian besar kecamatan yang ada ternasuk pada kelas tidak pernah tergenang kecuali Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Batumandi. Wilayah dengan jenis drainase kering sangat cocok untuk lahan budidaya tanaman pangan lahan kering dan perkebunan, sementara wilayah dengan jenis drainase tergenang periodik dapat digunakan sebagai lahan budidaya basah dan kering.

E. Klimatologi

Keadaan iklim di Kalimantan Selatan menurut Sistem Koppen dapat digolongkan ke dalam Iklim Hutan Tropika Humid dengan rata-rata curah hujan tahunan berkisar antara 2000 mm hingga 3000 mm serta suhu udara rata-rata harian 32,0°C dan minimal 133,3°C. Kelembaban udara relatif rata-rata harian di wilayah ini pada tahun yang sama mencapai 201,5%. Curah hujan terendah jatuh sekitar bulan Juni, Juli, Agustus, dan September. Sedangkan curah hujan tertinggi jatuh sekitar bulan Desember, Januari, Februari, dan Maret. Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim dan perputaran arus udara. Oleh karena itu, jumlah curah hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Masing-masing memiliki angka yang berbeda. Dalam lingkup wilayah Kabupaten Balangan, tinggi curah hujan antara 2.000 mm/tahun hingga 2.500 mm/tahun dialami oleh sebagian wilayah Kecamatan Halong, Juai, Paringin, Batumandi, dan sebagian besar wilayah Kecamatan Lampihong. Sebagian dari wilayah kecamatan-kecamatan tersebut dan seluruh wilayah Kecamatan Awayan dan Tebing Tinggi memiliki tinggi curah hujan yang berkisar antara 2.500 mm/tahun hingga 3.000 mm/tahun. Dilihat dari 3 (tiga) stasiun pengamatan yang terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu Paringin, Batu Mandi dan Juai, rata-rata curah hujan per hari pada tahun 2015 di Kabupaten Balangan sebesar 16,5 mm dengan ratarata jumlah hari hujan sebanyak 117,7 hari atau sekitar lebih dari 3 bulan.

F. Penggunaan Lahan

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Balangan belum mengalami perubahan yang begitu signifikan, dengan dominasi penggunaan lahan adalah berupa kegiatan untuk tanah perkebunan 29 %, tanah bukan sawah 25 %, hutan negara 21 %, dan tanah sawah 18

%. Dengan dominasi perkebunan dan persawahan pada penggunaan lahannya, kabupaten balangan dapat dikatakan memiliki lahan terbuka (tidak terbangun) yang relatif besar, dibandingkan dengan lahan yang terbangun. Perubahan yang cukup siginifikan terutama terjadi pada kegiatan sawah, hutan, serta kegiatan lain-lain. Hal ini dimungkinkan dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat migrasi dan kelahiran. Konsentrasi lahan terbangun yang tertinggi dapat ditemukan di pusat Ibukota Kabupaten Balangan, dan disepanjang jalan berupa perumahan penduduk, sementara dominasi hutan dimaksud bukan lagi hutan murni yang belum terjamah, melainkan berupa hutan karet yang cukup padat.

Tabel 2. 3
Luas Tiap Pengguna Lahan Kabupaten Balangan

No	Jenis Penggunaan Lahan (*Land Utilization*)	Luas (Ha)
1	Tanah Sawah/*Wetland*	14.100,19
2	Tanah Bukan Sawah	94.750,81
	a. Kebun Campuran	163,03
	b. Ladang	196,38
	c. Kelapa Sawit	2.755,55
	d. Perkebunan Karet	90.701,69
	e. Kolam	934,16
3	Bukan Lahan Pertanian	73.998,92
	a. Permukiman	2.897,40
	b. Hutan Lahan Kering Sekunder	13.801,52
	c. Hutan Lahan Kering Primer	46.844,17
	d. Rawa	348,35
	e. Semak Belukar	1,71
	f. Lahan Terbuka	305,17
	g. Bendung/Waduk	45,07
	h. Sungai	415,24
	i. Gosong sungai	13,60
	j. Pertambangan	9.315,67
	k. Timbunan Sampah	11,02

Sumber : DPUPRKP, Peta RBI Kab. Balangan Skala 1:50.000, Tahun 2021

Gambar 2.5
Persentase Luas Penggunaan lahan 2020



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang, data dan grafik diolah 2021

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Kabupaten Balangan memiliki potensi pengembangan wilayah di sektor pertanian, sektor perikanan, sektor kehutanan, sektor pertambangan, sektor pariwisata. dan potensi sebagai Kawasan agropolitan sesuai dalam RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032. Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Balangan adalah :

A. Sektor Pertanian

Wilayah potensial untuk pengembangan pertanian tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Balangan. Oleh sebab itu apabila dikembangkan seluruh lahan potensial pertanian, maka pendapatan daerah dari sektor pertanian dapat ditingkatkan. Berdasarkan gambar 2.5 diketahui bahwa penggunaan tanah sawah pada tahun 2022 adalah 7,71%, penggunaan lahan berupa kegiatan untuk tanah perkebunan karet 49,60% dan perkebunan kelapa sawit adalah sebesar 1,51%. Guna meningkatkan produksi pertanian, maka perlu menggalakan program penggunaan bibit unggul serta menciptakan prasarana irigasi, agar pengembangan pertanian lahan basah tidak tergantung pada musim, dan pengembangan irigasi harus memperhatikan kemampuan dan bentuk alam guna tetap terjangganya bentang alam yang berarti kecilnya biaya fisik, maupun resiko yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

Sektor pertanian di Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dibagi menjadi:

1) Sektor pertanian tanaman pangan dapat dilihat komoditi unggulan tanaman pangan kabupaten Balangan adalah padi, jagung, kedelai serta tanaman holtikultura lainnya.
2) Sektor Perkebunan dapat dilihat bahwa komoditi unggulan tanaman perkebunan adalah *Karet* dengan lokasi prioritas Kecamatan Awayan, Sawit dengan lokasi prioritas di Kecamatan Juai, Lampihong dan Batu Mandi dan Kelapa (Gula Aren) dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Lampihong dan Kecamatan Awayan.
3) Sektor Peternakan dapat dilihat bahwa peternakan dikembangkan di seluruh kecamatan di Kabupaten Balangan. Komoditi unggulan peternakan di Kabupaten Balangan adalah Ayam Buras dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Paringin, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong dan Sapi Potong dengan lokasi prioritas pengembangannya yaitu di wilayah Kecamatan Awayan, Kecamatan Batumandi dan Kecamatan Lampihong.
4) Sektor Perikanan dikembangkan di seluruh kecamatan dengan prioritas utama yaitu perikanan darat di Kecamatan Lampihong dan Juai. Untuk perikanan maka jenis komoditi yang utama diunggulkan adalah ikan nila dengan skor pertama, patin, lele/mujair skor kedua dan ikan mas skor ketiga. Sektor perikanan potensi sebagai Kawasan agropolitan.

B. Sektor Pertambangan

Sejak tahun 1992 Kabupaten Balangan merupakan salah satu daerah penghasil batu bara yang mempunyai kontribusi cukup besar terhadap ekspor batu bara di Kalimantan Selatan. Sektor pertambangan dan galian merupakan sektor yang cukup penting dalam menunjang perekonomian wilayah Kabupaten Balangan dan merupakan sektor dengan kontribusi terhadap PDRB terbesar (60,69%).

Potensi bahan galian di Kabupaten Balangan berupa bahan galian golongan C, terutama yang terdapat dalam kawasan hutan di Kabupaten Balangan. Berbagai jenis bahan tambang lainnya tersebar hampir di seluruh wilayah Kabupaten Balangan seperti bijih besi, kaolin, lempung, pasir kuarsa, batu gamping sirtu bahkan batu bara. Berdasarkan hasil pemetaan neraca Sumber Daya Alam, Kabupaten Balangan memiliki potensi batubara yang tersebar di beberapa kecamatan terutama di Kecamatan Paringin, Tebing Tinggi, Halong, Juai, Awayan dan Batu Mandi. Diperlukan upaya-upaya pengawasan dan pengendalian pada kawasan pertambangan pada cara atau teknik pengolahannya dalam rangka menjaga keseimbangan Kawasan pertambangan.

C. Sektor Pariwisata

Pariwisata adalah sektor industri atau kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan dan kunjungan seseorang ke suatu tempat atau daerah yang berbeda dari tempat tinggalnya untuk tujuan rekreasi, liburan, bisnis, pendidikan, atau alasan lainnya. Tujuan utama dari pariwisata adalah memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermanfaat bagi wisatawan, serta berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu daerah. Pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah, mempromosikan warisan budaya dan alam, serta meningkatkan pemahaman dan toleransi antarbudaya. Pengelolaan pariwisata yang baik melibatkan upaya untuk menjaga lingkungan alam, melestarikan warisan budaya, serta memastikan manfaat yang adil bagi masyarakat setempat. Hal ini melibatkan perencanaan yang baik, pengaturan kebijakan yang tepat, dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata. Dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata juga telah berkembang dengan adanya perkembangan teknologi dan digitalisasi. Internet dan media sosial memainkan peran penting dalam mempromosikan tujuan wisata, memfasilitasi reservasi dan pembayaran, serta memberikan informasi yang berguna bagi wisatawan. Sektor pariwisata di Kabupaten Balangan banyak terdapat objek wisata alam yang tersebar di beberapa kecamatan. Kawasan wisata yang ada di Kabupaten Balangan jika dikelompokkan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu wisata alam pegunungan, wisata agro dan buatan, wisata sejarah dan budaya, serta wisata religius. Tabel dibawah ini adalah objek wisata yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2. 4
Wisata Alam Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Air Terjun Tayak	Desa Uren Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tumate	Desa Aniungan Kecamatan Halong
3.	Air Terjun Pemandian Anggang	Desa Uren Kecamtan Halong
4.	Air Terjun Buntar Sawang	Desa Mamigang Kecamatan Halong
5.	Gunung Batu Kiras	Desa Kapul Kecamatan Halong
6.	Wisata Goa Belawan	Desa Kapul Kecamatan Halong
7.	Telaga Pemujaan	Desa Kapul Kecamatan Halong
8.	Gunung Braii	Desa Kapul Kecamatan Halong
9.	Puncak Baringin Wanai	Desa Hauwai Kecamatan Halong
10.	Gua Berangin Belawan	Desa Kapul Kecamatan Halong
11.	Banyu Babau	Desa Liyu Kecamatan Halong
12.	Air Panas	Desa Liyu Kecamatan Halong
13.	Air Terjun Sidandu	Desa Liyu Kecamatan Halong
14.	Puncak Gunung Hauk	Desa Marajai Kecamatan Halong
15.	Arus Deras Nanai	Desa Ajung Kecamatan Tebing Tinggi
16.	Air Terjun Batu Bainggi	Desa Liyu Kecamatan Halong
17.	Danau Baruh Bahinu	Desa Binjai Kecamatan Parsel
18.	Gunung Batu Sungsum	Desa Gunung Batu Sungsum Kec.Tebing Tinggi
19.	Air Terjun Batarius	Desa Mamigang, Halong
20.	Puncak Belawanai	Desa Ajung, Tebing Tinggi
21.	Gunung Hantanung	Tebing Tinggi
22.	Sungai Maranting	Desa Sungsum, Tebing Tinggi
23.	Air Terjun Desa Liyu	Desa Liyu, Halong
24.	Air Terjun Riam Mandian	Binuang Santang, libaru Sungkai
25.	Watu Badinding	Desa Liyu, Kec. Halong
26.	Riam Jalatik	Desa Kambiyain, Kec. Halong
27.	Air Terjun Mengway	Mamigang, Kec. Halong
28.	Goa Nomio	Marajai. Kec. Halong
29.	Sungai Bataliyan	Mamigang, Kec. Halong

Tabel 2. 5
Wisata Agro Dan Buatan Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Tugu Perjuangan Rakyat Paringin	Kecamatan Paringin
2.	Hutan Kota Balangan	Kecamatan Paringin
3.	Taman Hijau Balangan	Kecamatan Paringin Selatan
4.	Waterpark Ar-Raudah	Kelurahan Paringin Kota, Paringin
5.	Al Fatah Stabel	Batu Mandi

Tabel 2. 6
Wisata Sejarah Dan Budaya Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Benteng Tundakan	Desa Tundakan, Kec. Awayan
2.	Aruh Adat Dayak Meratus Halong	Desa Kapul, Kec. Halong
3.	Aruh Adat Dayak Deah	Desa Liyu, Kec. Halong
4.	Rumah Bubungan Tinggi Tarangan	Desa Tarangan Kec. Paringin Selatan
5.	Pahajatan	Desa Tungkap, Kec. Paringin Selatan
6.	Desa Wisata Budaya Wadian Tambai	Desa Kapul Kecamatan Halong

Tabel 2. 7
Wisata Religius Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Nama Tempat Wisata	Lokasi
1.	Makam Datu Kandang Haji	Desa Teluk Bayur Kec. Juai
2.	Makam Datu Martika	Desa Tampang Kec. Lampihong
3.	Mesjid Syuhada Kyai Martasura	Desa Hujan Mas Kec. Paringin
4.	Mesjid Al-Akbar (Islamic Centre)	Kel. Batupiring Kec. Paringin Selatan
5.	Makam Datu Amir Husin	Desa Lampihong Kanan Kec. Lampihong
6.	Mesjid Jannatul Ma'wa	Desa Buntu Karau, Kec. Juai
7.	Mesjid Bangkal	Desa Bangkal, Kec. Halong
8.	Kubah Makam K.H.Tarmiji	Desa Nungka Kecamatan Awayan

Tabel 2. 8
Objek wisata Yang Mendapatkan SK Pokdarwis

No.	Nama Objek Wisata	Lokasi
1.	Desa Wisata Wadian Tambai	Desa Kapul, Kecamatan Halong
2.	Air Terjun Tayak	Desa Uren, Kecamatan Halong
3.	Karang Bintang	Desa Ajung, Kecamatan Tebing Tinggi
4.	Riam Bainggi	Desa Dayak Pitap, Kecamatan Tebing Tinggi
5.	Gua gunung batu	Desa Sungsum, Kecamatan Tebing Tinggi
6.	Desa Wisata Rano Liyu	Desa Liyu, Kecamatan Halong
7.	Baruh Bahinu Binjai	Desa Binjai, Kecamatan Paringin Selatan
8.	Taman Bunga	Desa Tampang, Kecamatan Lampihong
9.	Racah Mampulang	Desa Balida, Kecamatan Paringin
10.	Gunung Belawan	Desa Kapul, Kecamatan Halong
11.	Bontar Batarius	Desa Mamigang, Kec. Halong

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2023

D. Pengembangan Kawasan yang mendukung IKN

Kabupaten Balangan merupakan daerah perbatasan antara Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur menjadi daerah penyangga ibukota negara baru. Dalam Mendukung IKN Pemerintah Kabupaten Balangan merencanakan penyediaan konektivitas dan penataan kawasan yang tepat dan terpadu yang dapat mendongkrak daya saing kabupaten. Pemerintah Kabupaten Balangan akan membangun infrastruktur, seperti Jembatan Kembar Paringin, Jalan Kembar Ahmad Yani, serta pembangunan berbagai infrastruktur lainnya.

Disisi lain, Kabupaten Balangan memiliki letak yang strategis dalam pembangunan IKN di Kalimantan Timur, oleh karena itu, potensi tersebut akan bertambah besar seiring

hadirnya IKN. Selain Peningkatan infrastruktur Kabupaten Balangan juga mempersiapkan terkait peluang yang dapat menguntungkan adanya potensi ekonomi khususnya sektor Pertanian dan Perikanan dalam menyediakan kebutuhan Pangan lokal.

2.1.1.3 Rencana Penggunaan Lahan

A. Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan di Indonesia umumnya memilki karakteristik urban (perkotaan) dan rural (perdesaan) yang saling berkaitan. Kondisi tersebut juga terjadi di wilayah perencanaan, berdasar pada karakteristik Kabupaten Balangan tersebut maka perlu untuk dilakukan arahan sistem penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan agar kegiatan perkotaan dan perdesaan di wilayah perencanaan dapat saling bersinergi sehingga disparitas pertumbuhan wilayah perdesaan dan perkotaan dapat tereliminir. Sistem penetapan kawasan perkotaan dan perdesaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Balangan ini menggunakan pendekatan teoritis dan konseptual yang dikemukan oleh beberapa ahli tata ruang. Berikut akan dipaparkan konsep-konsep serta teori yang digunakan sebagai dasar dalam penetapan kawasan perdesaan dan perkotaan di wilayah perencanaan.

1. Kawasan Perdesaan

Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Pengertian desa menurut Kamus Tata Ruang (1997) adalah permukiman kecil di luar kota, jumlah penduduknya terbatas, luas daerah geografisnya terbatas, kepadatan penduduk rendah, berpola hubungan tradisional, mata pencaharian utama dibidang pertanian. Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak otomatis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan.

2. Kawasan Perkotaan

Menurut Draft RPP pengelolaan dan Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (2001), pengertian Kota adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah bercirikan perkotaan, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kota menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasar hasil kajian dengan menggunakan pendekatan konsep dan teori mengenai kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan diatas, maka ditetapkan kawasan perkotaan dan perdesaan di Kabupaten Balangan sebagai berikut.

a) Kawasan perkotaan ditetapkan adalah perkotaan Paringin.
b) IKK pada masing-masing kecamatan di wilayah Kabupaten Balangan.

c) Kawasan perdesaan adalah seluruh wilayah administrasi desa di Kabupaten Balangan, selain dari wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan perkotaan.

Arahan pengembangan sistem perdesaan adalah penataan struktur ruang perdesaan sebagai sistem pusat kegiatan di perdesaan yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan di perdesaan. Sistem pusat kegiatan di desa pusat pertumbuhan secara spasial sudah dapat dikembangkan dalam subcluster of services, dengan infrastruktur/kegiatan pelayanan yang dikembangkan antara lain pelayanan kegiatan finansial seperti kantor kas, kegiatan perdagangan dalam bentuk kawasan pertokoan yang dapat melayani wilayah yang lebih luas. Permukiman disekitar pusat desa dapat dikembangkan dalam sistem cluster, sehingga tidak mengganggu lahan pertanian yang ada disekitarnya. Intensitas kegiatan dikelola dalam perpektif pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal yang terintegrasi dengan kawasan produksi di sekitarnya ataupun di desa lain yang secara struktural menjadi wilayah belakang yang dilayani oleh pusat kegiatan desa ini.

Pengelolaan struktur ruang perdesaan merupakan upaya untuk mempercepat efek pertumbuhan di kawasan perdesaan. Pengelolaan sistem perdesaan di Kabupaten Balangan akan dikembangkan dengan konsep pengembangan desa-desa agropolis. Pengembangan desa agropolis secara struktural akan terkait pula dengan pengembangan interaksi desa-kota, dan membuat keterkaitan antar pusat-pusat permukiman tersebut dalam pola sistem jaringan (network system), sesuai dengan konsep penataan struktur tata ruang wilayah Kabupaten Balangan dan pola pengembangan kegiatan ekonomi lokal yang diarahkan dapat memicu perkembangan wilayah yang berbasis pada sektor primer.

Pengembangan sistem perdesaan dibedakan atas tipologi kegiatan yang akan dikembangkan, yaitu pengembangan sistem pusat permukiman pada desa pertanian, desa industri, dan desa wisata.

Desa-desa pertanian secara umum akan berada pada kawasan dengan karakter rural murni dengan kegiatan murni produksi pertanian (sektor basis). Sehingga pada desa pertanian sistem pusat permukiman akan berkembang untuk skala unit desa. Fungsi pusat permukiman pada desa pertanian diarahkan untuk pelayanan permukiman yang menyebar di sekitar daerah pertanian (*farm village type*), maka pada kawasan tersebut dapat difungsikan sebagai pusat permukiman pada desa pertanian, berupa pusat pelayanan pemerintahan, pengembangan pasar/perdagangan skala desa, pelayanan kesehatan setara puskesmas/puskesmas pembantu.

Desa industri dimungkinkan akan berkembang dengan kegiatan industri berbasis pertanian. Desa industri ini lebih prospektif dikembangkan untuk menjadi desa pusat pertumbuhan. Sistem pusat permukiman diarahkan dapat melayani skala beberapa pusat permukiman desa pertanian. Sehingga secara hirarki pusat permukiman desa industri lebih tinggi dari pusat permukiman di desa pertanian murni.

Pusat-pusat permukiman di desa industri diarahkan terhubung satu dengan yang lainnya, dan secara struktural diarahkan berinteraksi kuat dengan kota-kota kecil atau besar di sekitarnya. Pusat permukiman di desa yang dimungkinkan dikembangkan kegiatan industri pengolahan pertanian, juga diarahkan untuk dikembangkan kegiatan perdagangan dan sebagai pusat koleksi hasil produksi dari berbagai desa pertanian yang ada disekitarnya. Setiap pusat pelayanan dikembangkan melalui penyediaan berbagai fasilitas sosial-ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan.

Desa wisata kedepan merupakan kawasan perdesaan yang sangat potensial untuk berkembang dan dikembangkan di wilayah perencanaan, mengingat potensi sektor pariwisata yang dimiliki di wilayah perencanaan cukup besar. Pengembangan desa wisata diharapkan dapat saling bersinergi dan berinteraksi dengan desa pertanian dan desa industri, baik secara spasial dan khususnya secara ekonomi.

Tabel 2. 9
Sistem Perkotaan Perdesaan di Kabupaten Balangan

Peran	Perkotaan
Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Paringin (Kecamatan Paringin dan Kecamatan Paringin Selatan
Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp)	Batumandi (Kecamatan Batumandi)
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)	1. Muara Pitap berada di Kecamatan Paringin Selatan 2. Simpang Tiga berada di Kecamatan Lampihong 3. Putat Basiun berada di Kecamatan Awayan 4. Tebing Tinggi berada di Kecamatan Tebing Tinggi 5. Mungkur Uyam berada di Kecamatan Juai 6. Halong berada di Kecamatan Halong
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)	1. Mantimin berada di Kecamatan Batumandi 2. Pudak berada di Kecamatan Awayan 3. Bihara berada di Kecamatan Awayan 4. Tabuan berada di Kecamatan Halong 5. Mauya berada di Kecamatan Halong 6. Haur Batu berada di Kecamatan Paringin 7. Gunung Pandau berada di Kecamatan Paringin Selatan 8. Layap berada di Kecamatan Paringin 9. Bungin berada di Kecamatan Paringin Selatan

Sumber : RTRW Kabupaten Balangan, 2014

Dalam Sistem Perkotaan, di dalam RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, mengarahkan Kota Paringin sebagai PKL. Kota Paringin sebagai PKL harus memenuhi kriteria :

a) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.
b) Kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten dan atau beberapa kecamatan.

Kawasan Perkotaan Paringin, meliputi perkotaan secara fungsional, yaitu Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur di Kecamatan Paringin, dan Kelurahan Batu

Piring di Kelurahan Paringin Selatan. Kawasan Perkotaan Batumandi meliputi Desa Batumandi dan Desa Teluk Mesjid di Kecamatan Batumandi merupakan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), yang dipromosikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp).

Dalam sistem struktur ruang yaitu pembentukan peran dan fungsi perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai pengembangan perkotaan. Prioritas pembangunan sistem perkotaan di Kabupaten Balangan meliputi:

a) Mempercepat pengembangan Perkotaan Paringin dan Batumandi sebagai PKL dan PKLp melalui pengembangan paringin baru dan Batumandi sebagai Kota Agropolitan.
b) Mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Batumandi sebagai fungsi PKLp dan PPK sebagai kota tani dan jasa industri agribisnis (pengolahan pertanian) dengan daerah hinterland nya.
c) Mendorong pengembangan perkotaan Halong dan Tebing Tinggi sebagai perkotaan dengan fungsi PPK yang didukung dengan pengembangan Kawasan Strategis Bidang Sosial Budaya dan Pengembangan Industri Ekowisata berbasis sumberdaya alam.
d) Meningkatkan pengembangan kota-kota yang berperan sebagai PPL yang ada disekitar pertumbuhan perkotaan dengan fungsi PPK maupun desa-desa pendukungnya, melalui pengembangan sistem jaringan jalan dan sistem jaringan transportasi.

Sesuai dengan potensi dan kondisi fisik alami daerah lingkungan yang ada serta prioritas wilayah, maka Kabupaten Balangan dalam kerangka pembangunan jangka panjang terbagi beberapa fungsi dan peran wilayah sesuai dengan potensi dan kondisi wilayahnya, yaitu

a) Wilayah Kecamatan sebelah selatan dan barat yang meliputi kecamatan Batumandi dan Lampihong dengan kegiatan utama yang dikembangkan di wilayah ini antara lain: mendorong pertanian berkelanjutan pada dan agroindustri (investasi industri pengolahan dan industri pertanian), mendorong pertumbuhan aktivitas pertanian tanaman pangan.
b) Wilayah Kecamatan Paringin dan Paringin Selatan sebagai pusat kota yang dilayani oleh sistem jaringan jalan lingkar timur dan lingkar barat, perlu dilakukan pengendalian terhadap meningkatkan aktivitas pembangunan kawasan-kawasan perumahan.
c) Kecamatan Paringin, perlu dilakukan pengendalian dampak aktivitas pertambangan dari perusahaan-perusahaan pertambangan.
d) Wilayah Batumandi, Lampihong, Paringin Selatan dan sepanjang DAS Sungai Balangan perlu didorong pertumbuhan aktivitas perikanan.
e) Wilayah kecamatan Awayan dan Juai merupakan basis komoditas karet di Kabupaten Balangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), diatur melalui Sistem Jaringan Transportasi

Nasional (Sistranas) mengenai jaringan jalan nasional terdiri atas jalan arteri primer, kolektor primer, jalan strategis nasional, dan jalan tol.

Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi darat di Kabupaten Balangan meliputi :

a) Jaringan jalan dan jembatan
b) Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
c) Jaringan layanan lalu lintas

Rencana pengembangan terminal penumpang di Kabupaten Balangan meliputi :

a) terminal penumpang tipe C di Kelurahan Paringin Kota, Kecamatan Paringin;
b) rencana pengembangan terminal penumpang tipe B di Kelurahan Batu Piring atau Desa Haur Batu; dan
c) rencana pengembangan sub terminal penumpang di Desa Batu Mandi, Desa Halong, Desa Simpang Tiga, Desa Mungkur Uyam, Desa Putat Basiun, Desa Simpang Nadung;

Rencana prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi rencana pengembangan terminal barang di Desa Haur Batu di Kecamatan Paringin dan rencana jaringan layanan lalu lintas di Kabupaten Balangan antar kecamatan.

B. Jaringan Energi

Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan meliputi standar kebutuhan perencanaan listrik yang mencapai kapasitas rumah tangga mencapai 900 watt, untuk fasilitas umum mencapai 30% dari fasilitas rumah tangga, untuk penerangan jalan mencapai 2% dari rumah tangga. Kebutuhan listrik di Kabupaten Balangan disuplai oleh 2 (dua) Gardu Induk yaitu GI Tanjung di Kabupaten Tabalong dan GI Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan jaringan transmisi adalah Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan GI Amuntai dan dan GI Tanjung.

Adapun perencanaan pengembangan jaringan energi di Kabupaten Balangan dalam rangka meningkatkan jangkauan pelayanan kepada masyarakat diantaranya dilakukan dengan :

a) Penambahan daya dan jaringan energi listrik di seluruh kecamatan disesuaikan dengan demand;
b) Pengembangan sistem distribusi tenaga listrik di Kabupaten Balangan;
c) Pembangunan jaringan energi listrik; (di sebagian Kecamatan Halong dan sebagian Kecamatan Tebing Tinggi);
d) Pengusahaan listrik masuk desa dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat;
e) Prasarana energi dapat dibangun bersamaan dengan dan atau memanfaatkan jaringan jalan guna memudahkan distribusi pada wilayah-wilayah pelayanan;
f) Pengusahaan partisipasi badan-badan usaha (negeri dan swasta) untuk berperan dalam pelayanan listrik; dan

g) Mengusahakan sumber energi sebagai pengganti energi bahan bakar minyak, meliputi energi tidak terbarukan (batubara, gas metan, dll), dan terbarukan (tenaga air, tenaga matahari, bio gas, bio diesel dan limbah);
h) Penyediaan lahan untuk pembangunan prasarana energi dan sistem jaringan energi disiapkan dengan bekerjasama dengan pemerintah kabupaten.

C. Jaringan Telekomunikasi

Sistem jaringan telekomunikasi kabupaten terdiri dari sistem jaringan kabel dan nirkabel. Adapun perencanaan untuk peningkatan pelayanan jaringan kabel berupa pelayanan telepon umum dan layanan sambungan tak bergerak (fixed/mobile telephone) dilakukan oleh PT. Telkom yaitu meningkatkan sistem jaringan telekomunikasi pada pusat-pusat kegiatan dan kawasan strategis meliputi Kecamatan Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan, Kecamatan Juai, dan Kecamatan Batu Mandi dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi bagi masyarakat dan dunia usaha.

Eksisting menara BTS di Kabupaten Balangan ada di Kecamatan Lampihong (Desa Simpang Tiga dan Desa Lajar), Juai (Desa Marias, Desa Mungkur Uyam, Desa Tawahan, Desa Bata, Desa Sumber Rezeki), Halong (Desa Halong, Desa Aniungan, Desa Binuang Santang, Desa Gunung Riut, Desa Liyu, Desa Mamantang, Desa Mantuyan, Desa Mauya,Desa Puyun, Desa Sumber Agung), Paringin Selatan (Desa Margo Mulyo, Desa Harapan Baru), Paringin (Desa Balida, Kelurahan Paringin Kota, Desa Lesung Batu dan Desa Dahai), Awayan (Desa Pandam, Desa Pulantan, Desa Putat Basiun, Desa Ambakiang, Desa Sikontan), Batumandi (Desa Batumandi, Desa Mampari, Desa Palajau) dan Tebing Tinggi (Desa Auh, Desa Dayak Pitap, Desa Juuh, Desa Kambiyain, Desa Langkap. Direncanakan untuk kedepannya pembangunan menara BTS di setiap desa-desa pusat pertumbuhan dan desa-desa pelosok dalam rangka meningkatkan pelayanan telekomunikasi.

Sedangkan untuk perencanaan sistem jaringan nirkabel dalam hal ini adalah *mobile cellular service* oleh operator cellular berupa peningkatan jaringan dan cakupan pelayanan melalui pembangunan *base transceiver station* (BTS) yang dapat diuraikan sebagai berikut

a) Rencana Pembangunan menara jaringan telekomunikasi/ BTS meliputi Paringin Selatan (Desa Halubau Utara, Desa Lingsir, Desa Murung Jambu) Paringin (Desa Kalahiang) Awayan (Desa Kedondong,Desa Tangalin, Desa Sungai Pumpung, Desa Tundi, Desa Pudak) Batumandi (Desa Kasai, Desa Guha, Desa Munjung, Desa Karuh, Desa Mampari) Juai (Desa Buntu Karau, Desa Sirap,Desa Sumber Rezeki, Desa Hukai, Desa Gulinggang, Desa Bata, Desa Mihu, Desa Pamurus) Lampihong (Desa Jungkal, Desa Kupang,Desa Papuyuan, Desa jimamun) Halong (Desa Marajai, Desa Uren, Desa Liyu) ;
b) Rencana pengembangan menara jaringan telekomunikasi untuk melayani kebutuhan telekomunikasi pada desa-desa dan Puskesmas pusat pertumbuhan dan terutama pada wilayah yang belum terjangkau layanan telekomunikasi, yaitu Awayan(Desa Tangalin,

Desa Tundakan)Halong (Desa Buntu Pilanduk, Desa Hauwai, Desa Karya, desa Mamantang, Desa Mamigang, Desa Marajai, desa Binuang santang, Desa Surya Tama) Batumandi (Desa Guha dan Desa Hamparaya)

D. Jaringan Sumber Daya Air

Jaringan sumber daya air meliputi wilayah sungai, cekungan air tanah, jaringan irigasi, jaringan air baku untuk air minum, dan sistem pengendalian banjir. Wilayah sungai (WS) Kabupaten Balangan adalah WS Barito mencakup Daerah Aliran Sungai Barito. Cekungan Air Tanah Kabupaten Balangan adalah Cekungan Air Tanah Palangkaraya-Banjarmasin. Jaringan irigasi Kabupaten Balangan dibagi menjadi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi yaitu D.I. Bendung Pitap di Kecamatan Awayan yang merupakan penggabungan dari beberapa jaringan irigasi, meliputi : D.I. Paringin;D.I. Putat Basiun;D.I. Lok Batu; dan D.I. Sikuntan.

Sedangkan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten yang terdiri dari : D.I. Batu Mandi; D.I. Lok Batu; D.I. Paran; D.I. Suapin; dan D.I .Tundakan. Untuk meningkatkan ketersediaan jaringan irigasi direncanakan pembangunan Bendung Bihara dalam rangka mengatasi permasalahan air pada daerah hulu agar pembagian aliran ke daerah hilir dapat terbagi dengan baik. Bendung Pitap yang merupakan bendung nasional dalam jaringan irigasi nasional yang meliputi saluran irigasi primer dan sekunder.

Rencana pengembangan jaringan irigasi meliputi :

a. rencana pengembangan kapasitas jaringan irigasi provinsi di Bendungan Balangan;
b. rencana pengembangan daerah irigasi (DI) Provinsi berupa D.I Bendung Pitap;
c. rencana pengembangan saluran rawa provinsi di Kecamatan Batu Mandi;
d. rencana pengembangan daerah rawa di Kecamatan Batu Mandi;
e. Rehabilitasi, pemeliharaan dan peningkatan jaringan irigasi yang ada; dan
f. Pengembangan daerah irigasi pada seluruh daerah potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan.

Rencana jaringan air baku untuk air minum meliputi :

a) rencana pengembangan sumber air baku, (Bendung Pitap, Bendung Bihara; dan Sungai Balangan
b) Saluran Air Baku (SAB) Perusahaan Air Minum di Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional.

Sistem pengendalian banjir, meliputi : pembangunan, rehabilitasi serta operasi dan pemeliharaan bangunan-bangunan pengendali banjir di seluruh sungai rawan banjir; dan normalisasi sungai-sungai di kabupaten meliputi sungai Balangan.

E. Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari sistem pengelolaan persampahan, sistem jaringan air minum, sistem drainase, sistem jaringan air limbah, jalur evakuasi bencana, sistem proteksi kebakaran.

1) Rencana sistem pengelolaan persampahan

Sistem pengelolaan persampahan meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana persampahan berupa Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Batu Merah di Desa Batu Merah, Kecamatan Lampihong dengan cakupan pelayanan Kabupaten Balangan. Sistem pengelolaan direncanakan menggunakan sistem *sanitary landfill* untuk sampah domestik dan sampah non domestik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPA sistem *sanitary landfill* dan TPA sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;

Rencana pengembangan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) diarahkan untuk diletakkan di pusat-pusat permukiman dan pusat kegiatan di seluruh kawasan perkotaan di Kabupaten Balangan. Sedangkan pada fasilitas- sosial dan fasilitas umum wajib dilengkapi dengan menempatkan sarana persampahan berupa container minimal tempat sampah/ bak sampah. Untuk memudahkan pembuangan sampah dan penerapan konsep 3R maka untuk TPS diterapkan sistem pemilahan sampah, untuk sampah kering, sampah basah, sampah yang bisa didaur ulang.

Rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dengan konsep 3 R (*Reduce, Reuse* dan *Recycle*) yaitu mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang yang terdapat di seluruh kecamatan dan di pusat" permukiman. Kondisi saat ini dalam hal pengurangan sampah sudah ada sarana TPS 3R, yang terbangun 11 buah, sedangkan target minimal 2 buah TPS 3R di setiap kecamatan dan di permukiman padat penduduk sehingga untuk tahun 2023 ini sedang proses dibangung lagi 3 buah TPS 3R yang nanti akan menjadi 14 buah di Kabupaten Balangan. Dengan demikian hanya satu kecamatan yang belum memiliki TPS 3R yaitu kecamatan Lampihong. Disamping itu mengaktifkan pemilahan sampah sebelum dibuang ke TPA juga harus diprioritaskan mengingat volume sampah yang dibuat ke TPA sangat banyak dan menyebabkan umur TPA menjadi lebih pendek dari seharusnya. Pengembangan ulat magot dari bank sampah saat ini mulai digalakkan untuk mengurangi kasus sampah organik yang menggunung. Disamping itu permintaan akan ulat magot sebagai pakan ternak juga semakin meningkat.

Kondisi TPA Batu merah yang sudah hampir penuh atau lebih singkat dari umur rencana perlu segera disikapi dengan manajemen operasional, terutama pemenuhan akan alat berat bulldozer untuk memadatkan tumpukan sampah. Kemudian dari segi pengangkutan diperlukan adanya sistem pengaturan dan penjadwalan untuk pengambilan sampah sehingga sampah tidak sempat menumpuk karena tidak terangkut. Selain itu juga perlu diperhatikan manajemen organisasi operasional kebersihan dan persampahan yaitu

peningkatan koordinasi dan kerjasama instansi operasional kebersihan dan peningkatan peran masyarakat dan swasta untuk pengelolaan persampahan.

2) Rencana sistem jaringan air minum

Rencana sistem jaringan air minum dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Saluran Air Baku (SAB) perusahaan air minum Balangan yang merupakan Saluran Air Baku (SAB) nasional dalam jaringan air bersih nasional;
b. rencana jaringan air bersih ke kelompok pengguna berupa Rencana Instalasi Pengolahan Air (IPA) bersih,
c. penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat berupa penyediaan sarana air bersih meliputi sumur bor, sumur gali dan hidran umum di seluruh Kecamatan di Kabupaten Balangan.

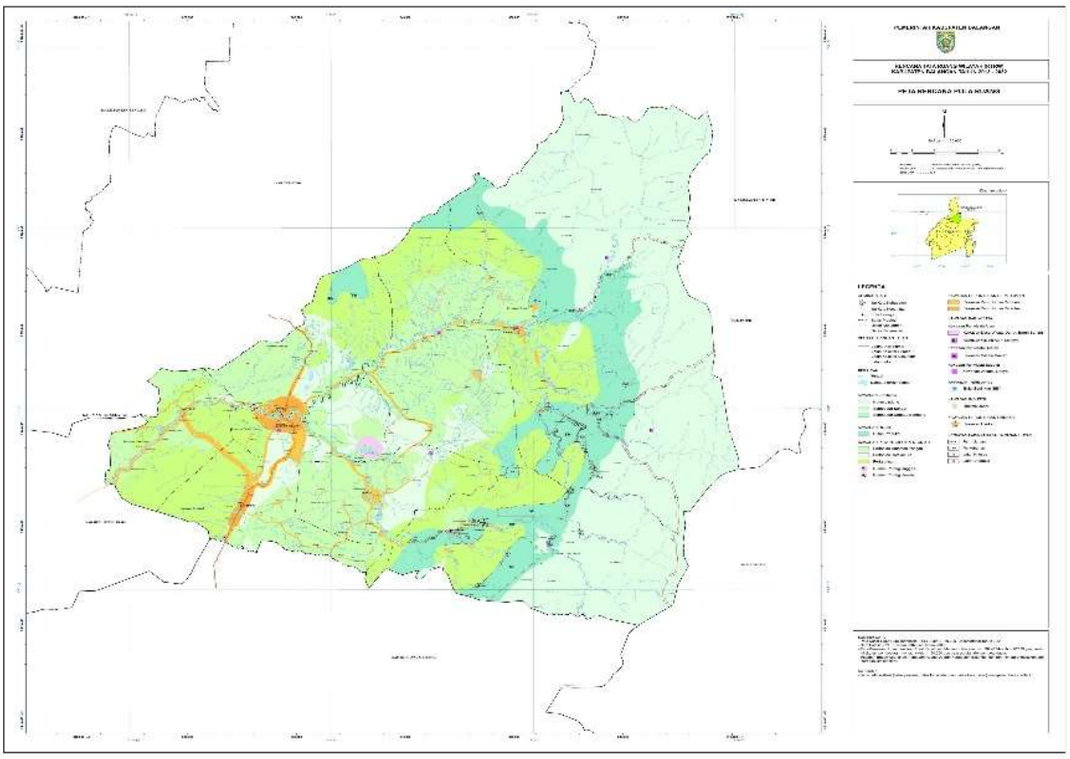
F. Rencana Kawasan Lindung

Kawasan lindung menurut Keppres No. 32/1990, adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung meliputi kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan suaka alam, kawasan suaka laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana. Berdasarkan Kemenhut No.453/Kpts-II/1999 Kawasan Hutan di Kabupaten Balangan seluas 90.643 Ha yang terdiri atas HL = 51.938 Ha; HP = 31.195 Ha; dan HPT = 7.510 Ha. Dan jika berdasarkan Kemenhut No.435/Kpts-II/2009 Kawasan Hutan di Kabupaten Balangan seluas 90.373 Ha yang terdiri atas HL = 65.791 Ha; HP = 24.568 Ha; dan HPT = 24 Ha.

Sedangkan jika berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 Wilayah Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan berdasarkan daerah limitasi yang meliputi 77.840,77 ha atau sekitar 41,44 % dari keseluruhan luas Kabupaten Balangan. Kawasan Lindung di Kabupaten Balangan tersebar di seluruh bagian Kabupaten Balangan meliputi Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Rawan Banjir, dan Rawan Longsor di Kecamatan Awayan 18.698,7 (24 %); Kecamatan Batu Mandi 766,8 (0,9 %); Kecamatan Halong 41.676,9 (53,5 %); Kecamatan Juai 5.254,7 (6,7 %); Kecamatan Lampihong 3.345,2 (4,3 %); Kecamatan Paringin Selatan 3.836,7 (4,9 %); Kecamatan Paringin 3.143,3 (4 %); dan Kecamatan Tebing Tinggi 1.118,2 (1,4 %).

G. Rencana Kawasan Budidaya

Gambar 2.6
RTRW Kabupaten Balangan 2013-2032

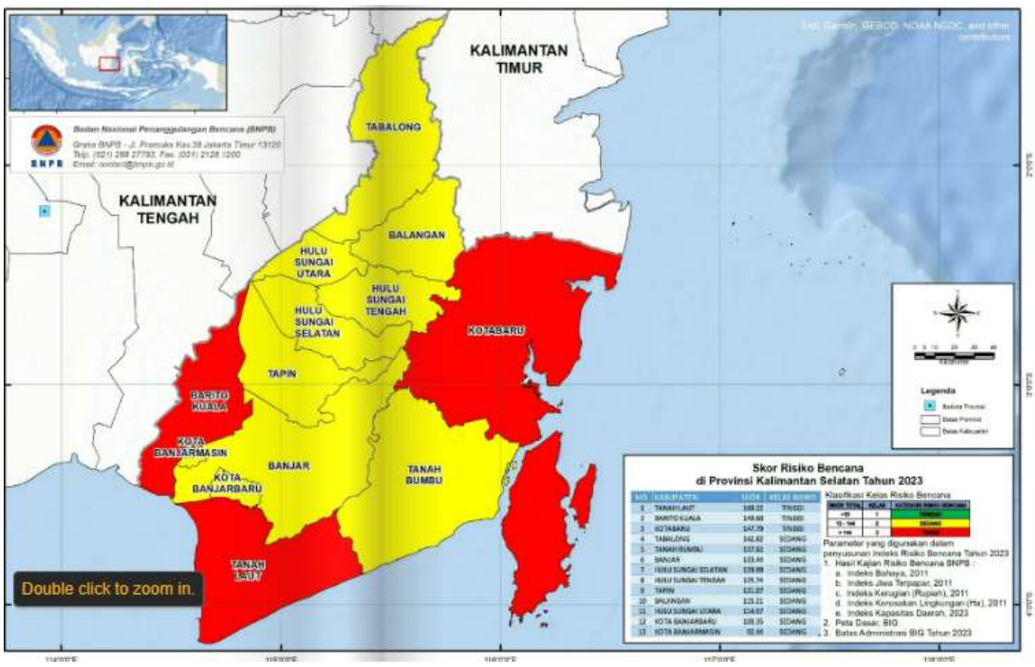


Pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya di Kabupaten Balangan masih tetap memperhatikan kecenderungan pemanfaatan ruang saat ini. Berdasarkan interpretasi citra satelit pada tahun 2007 rencana kawasan budidaya di Kabupaten Balangan sebesar 109.989,23 ha atau sebesar 58,56 %, yang tersebar diseluruh daerah di Kabupaten Balangan. Adapun sebaran kawasan budidaya meliputi Kecamatan Awayan 11.162 Ha (10 %); Kecamatan Batu Mandi 10.519 Ha (9,56 %); Kecamatan Halong 31.553 Ha (28,69 %); Kecamatan Juai 17.546 Ha (15,95 %); Kecamatan Lampihong 7.895 (7,18 %); Kecamatan Paringin Selatan 6.539 Ha (5,59 %); dan Kecamatan Paringin 11.073 Ha (10,07 %) dan Kecamatan Tebing Tinggi 13.698 Ha (12,45 %).

Perwujudan pola ruang kawasan budidaya dalam RTRW Kabupaten Balangan adalah meliputi Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Pertanian, Kawasan Perkebunan/Tanaman Tahunan, Kawasan Peternakan dan Perikanan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Pariwisata dan Kawasan Permukiman.

2.1.1.4 Wilayah Rawan Bencana

Gambar 2.7
Peta Indeks Risiko Bencana Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023



Sumber: Buku IRBI, 2023

Secara umum wilayah Kabupaten Balangan memiliki kerentanan bencana yang disebabkan oleh fenomena hidrolometeorologi atau yang disebabkan oleh siklus hidrologi seperti banjir, tanah longsor, angin puyuh serta kebakaran hutan dan lahan. Merujuk pada data Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari delapan kecamatan yang ada di Kabupaten Balangan, resiko keterpaparan merata pada potensi bencana banjir dan potensi kebakaran hutan dan lahan. Guna meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap bencana, terdapat indikator yang mendukung resiliensi masyarakat terhadap keterpaparan yaitu Indeks Resiko Bencana dan Indeks Ketahanan Daerah.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Balangan terdiri dari kawasan rawan bencana tanah longsor berada di Bagian utara timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yaitu Kecamatan Halong kemudian Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Awayan. Potensi tanah longsor dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah.

Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan. Daerah rawan bencana di Kabupaten Balangan berupa tanah longsor atau gerakan tanah (erosi dan abrasi akibat tekanan arus air sungai) dan banjir. Kawasan bencana tanah longsor berada di bagian selatan timur Kabupaten Balangan yang berbatasan dengan Kalimantan Timur yakni Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Awayan, potensi dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25 - 40% dan lebih dari 40% dengan ketinggian 500 mdpl. Jumlah desa yang mengalami kejadian tanah longsor di Kabupaten Balangan paling banyak di Tahun 2018 (lihat Tabel 2.14). Faktor yang mempengaruhi proses gerakan tanah (mass movement) adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki stabilitas lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan.

Bencana Tanah Longsor di Kabupaten Balangan terjadi disebagian besar kecamatan yaitu Kecamatan Halong, Juai, Awayan, Tebing Tinggi, Paringin, Paringin Selatan, Lampihong. Kecamatan yang tidak ditemukan bencana tanah amblas hanya di Kecamatan Batumandi dari Tahun 2016-2020 (lihat Tabel 2.15). Bencana tanah amblas paling tinggi terjadi pada Tahun 2018. Jumlah kejadian tanah amblas di Kabupaten Balangan dari Tahun 2015-2020 adalah sebanyak 52 kali, dan pada tahun 2021 jumlah kejadian tanah amblas berjumlah 10 Kali.

1. Kebakaran

Potensi bencana kebakaran pada kawasan perumahan bisa terjadi karena adanya faktor pemicu bencana. Diantaranya adalah kawasan yang padat penduduk, bahan bangunan yang mudah terbakar, dan kurang memiliki fasilitas mitigasi yang memadai pada wilayah sekitar perumahan. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Balangan, sepanjang kurun waktu lima tahun (2019-2023) semua kecamatan mengalami bencana kebakaran. Tahun 2019 masih menjadi tahun dimana frekuensi kebakaran paling tinggi yaitu 29 kejadian kebakaran dengan kecamatan yang terdampak paling tinggi yaitu Kecamatan Paringin. Pada tahun 2023 total intensitas kejadian kebakaran sebanyak 16 kali, dengan kecamatan yang paling sering terdampak yaitu Kecamatan Halong. Secara geografis kecamatan Halong merupakan daerah yang jauh dari pusat kota, dan infrastruktur jalan yang masih memerlukan perbaikan. Kedua kendala ini berdampak terhadap keparahan bencana yang bisa menghanguskan lebih dari satu buah rumah. Data intensitas kejadian kebakaran dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

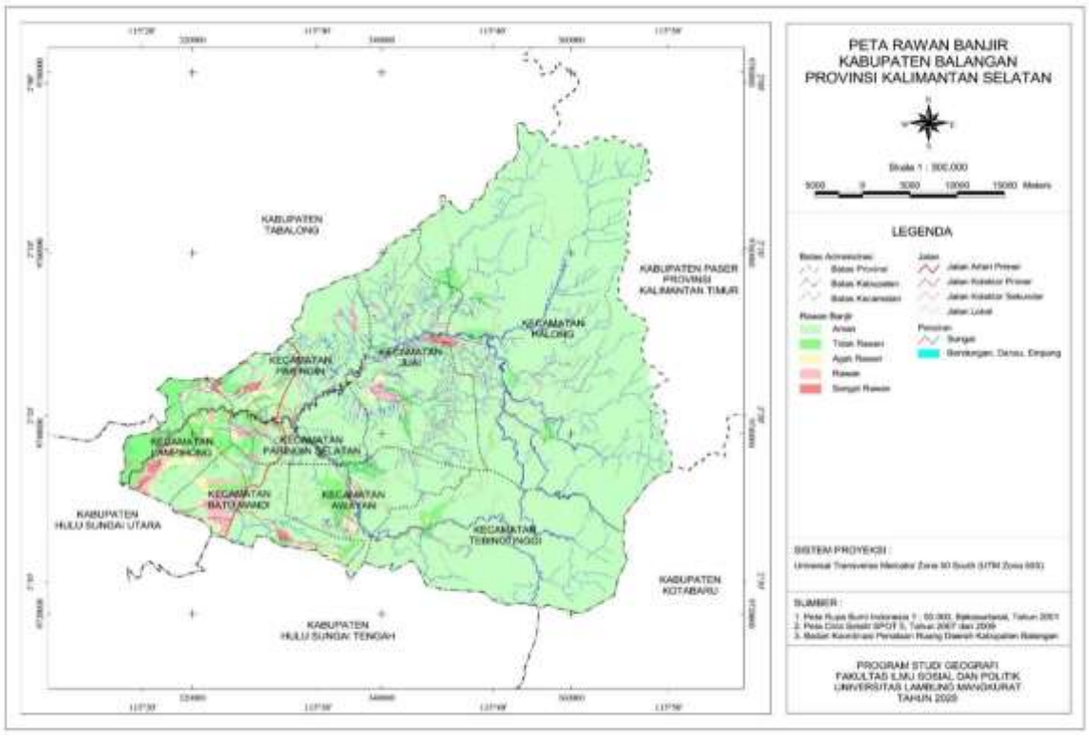
Tabel 2.10
Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran di Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Kebakaran Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2019	4 Kali	6 Kali	-	2 Kali	3 Kali	7 Kali	1 Kali	6 Kali	29 Kali
2020	4 Kali	2 Kali	-	2 Kali	1 kali	2 kali	3 Kali	5 Kali	19 Kali
2021	3 Kali	-	-	2 Kali	-	1 Kali	3 Kali	3 Kali	12 Kali
2022	3 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	8 Kali	-	5 Kali	1 Kali	20 Kali
2023	8 Kali	-	-	3 Kali	1 Kali	3 Kali	-	1 Kali	16 Kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2019-2023 data diolah 2023

2. Banjir

Gambar 2.8
Peta Rawan Banjir Kabupaten Balangan



Sumber: BPBD Kabupaten Balangan, 2023

Bencana banjir terjadi akibat beberapa faktor, berkaitan dengan jumlah curah hujan yang terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada di daerah Kabupaten Balangan. Indeks Risiko Banjir Kabupaten Balangan pada tahun 2023 menurut data yang dihimpun dalam buku IRBI sebesar 21.79 atau kelas risiko tinggi dan pada tahun 2022 Indeks Resiko Bencana Banjir sebesar 26.35 atau risiko tinggi. Meskipun mengalami penurunan daripada tahun 2022, resiko banjir di Kabupaten Balangan masih termasuk tinggi.

Gambar 2.9
Indeks Risiko Bencana Banjir Tahun 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	PROVINSI	SKOR	KELAS RISIKO
168	PATI	JAWA TENGAH	23.68	TINGGI
169	TUBAN	JAWA TIMUR	23.29	TINGGI
170	CIREBON	JAWA BARAT	23.15	TINGGI
171	KETAPANG	KALIMANTAN BARAT	23.12	TINGGI
172	PESISIR SELATAN	SUMATERA BARAT	22.95	TINGGI
173	TANAH LAUT	KALIMANTAN SELATAN	22.92	TINGGI
174	SUBANG	JAWA BARAT	22.84	TINGGI
175	PONOROGO	JAWA TIMUR	22.84	TINGGI
176	BLORA	JAWA TENGAH	22.79	TINGGI
177	SAMBAS	KALIMANTAN BARAT	22.53	TINGGI
178	KOTA TUAL	MALUKU	22.40	TINGGI
179	KOTA PASURUAN	JAWA TIMUR	22.35	TINGGI
180	BENGKULU SELATAN	BENGKULU	22.34	TINGGI
181	EMPAT LAWANG	SUMATERA SELATAN	22.26	TINGGI
182	MAJENE	SULAWESI BARAT	22.25	TINGGI
183	KUTAI KARTANEGARA	KALIMANTAN TIMUR	22.17	TINGGI
184	SIAK	RIAU	22.15	TINGGI
185	KOTA SUBULUSSALAM	ACEH	22.05	TINGGI
186	PIDIE	ACEH	21.97	TINGGI
187	PENAJAM PASER UTARA	KALIMANTAN TIMUR	21.95	TINGGI
188	WAY KANAN	LAMPUNG	21.91	TINGGI
189	BEKASI	JAWA BARAT	21.83	TINGGI
190	TABALONG	KALIMANTAN SELATAN	21.82	TINGGI
191	BANGKALAN	JAWA TIMUR	21.81	TINGGI
192	BALANGAN	KALIMANTAN SELATAN	21.79	TINGGI
193	SRAGEN	JAWA TENGAH	21.72	TINGGI
194	MANOKWARI	PAPUA BARAT	21.60	TINGGI
195	MANOKWARI SELATAN	PAPUA BARAT	21.60	TINGGI
196	PEGUNUNGAN ARFAK	PAPUA BARAT	21.60	TINGGI
197	FAK FAK	PAPUA BARAT	21.60	TINGGI
198	YALIMO	PAPUA	21.60	TINGGI
199	DOMPU	NUSA TENGGARA BARAT	21.45	TINGGI
200	ASAHAN	SUMATERA UTARA	21.39	TINGGI
201	JEPARA	JAWA TENGAH	21.39	TINGGI

Sumber : Buku IRBI 2023, BNPB

Bencana banjir terjadi akibat dari beberapa faktor, hal ini berkaitan dengan jumlah curah hujan, dan dampak sosial ekonomi lainnya. Bencana banjir umumnya berhubungan dengan curah hujan terjadi dengan daya tampung dari akuifer dan cekungan-cekungan ataupun alur sungai yang ada didaerah kabupaten Balangan. Akumulasi air hujan yang lebih besar dari kapasitas tampungan akan mengakibatkan banjir. Kapasitas tampung yang kurang disebabkan porositas yang buruk pada batuan setempat, berkurangnya vegetasi akibat penebangan hutan yang kurang terencana dan terkendali ataupun bencana kebakaran dan semakin dangkalnya cekungan ataupun alur sungai akibat proses sendimentasi. Kerentanan banjir di wilayah Kabupaten Balangan secara keseluruhan berada pada rentang sedang, namun bila menilik pada kawasan hulu sungai terdapat kecamatan yang kerentanannya sedang ke tinggi yang mana patut diwaspadai dan dipenuhi fasilitas mitigasi bencananya diantaranya area Kecamatan Halong dan Kecamatan Juai sebagai wilayah yang dialiri atau masih berhubungan dengan wilayah hulu sungai. Data dari BPBD Kabupaten Balangan pada tahun 2023 mencatat wilayah Kecamatan Halong dua kali terjadi banjir dan Kecamatan Juai sebanyak tujuh kali kejadian dengan total frekuensi diseluruh kecamatan sebanyak 16 kali kejadian. Kecamatan Juai merupakan kecamatan yang intensitas banjirnya paling tinggi daripada kecamatan lainnya. Apabila dibandingkan kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu 2021 hingga 2023 Jumlah frekuensi bencana banjir di Kabupaten Balangan paling tinggi berada pada tahun 2021, dikarenakan adanya bencana banjir dan tanah longsor yang menimpa seluruh wilayah Kalimantan Selatan hingga status

bencana dinaikkan menjadi tanggap darurat banjir. Kemudian pada tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Catatan intensitas kejadian bencana banjir yang dihimpun oleh BPBD dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Jumlah Kejadian Bencana Banjir di Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Banjir Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2019	3 Kali	4 Kali	1 Kali	2 Kali	2 Kali	-	1 Kali	-	13 Kali
2020	2 Kali	10 Kali	2 Kali	2 Kali	4 Kali	3 Kali	3 Kali	5 kali	31 kali
2021	9 kali	8 Kali	4 kali	7 Kali	3 Kali	4 Kali	10 Kali	3 Kali	47 Kali
2022	11 Kali	9 Kali	3 Kali	9 Kali	2 Kali	2 Kali	4 Kali	2 Kali	42 Kali
2023	2 Kali	7 Kali	-	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	16 Kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2023

Desa di Kabupaten Balangan berjumlah 154 Desa dengan 3 Kelurahan, terdapat 11 desa yang memiliki potensi banjir tinggi, 35 desa dengan potensi banjir sedang, dan 37 desa dengan potensi banjir rendah. Wilayah yang memiliki potensi tertinggi yaitu Kecamatan Lampihong dengan peta potensi sebanyak 17 desa berpotensi dari tinggi hingga rendah, dari jumlah keseluruhan 27 desa yang ada. Diikuti Kecamatan Juai yang berjumlah 21 desa memiliki desa berpotensi banjir dari tinggi ke rendah sebanyak 10 desa kemudian Tebing Tinggi yang memiliki 12 desa 6 desa diantaranya berpotensi banjir dari rendah ke tinggi.

Tabel 2.12
Daerah Potensi Banjir Di Wilayah Kabupaten Balangan

Kecamatan	Potensi Banjir		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Halong	-	Bangkal	Marajai
	-	Binju	Binuang Santang
	-	Binjai Punggal	Halong
	-	Baruh Panyambaran	Kapul
	-	Gunung Riut	-
	-	Tabuan	-
	-	Mauya	-
	-	Mantuyan	-
	-	Buntut Pilanduk	-
Juai	Teluk Bayur	Bata	Tawahan
	Mungkur Uyam	Mihu	Muara Ninian
	Buntu Karau	Lalayau	-
	-	Juai	-
	-	Galumbang	-

Kecamatan	Potensi Banjir		
	Tinggi	Sedang	Rendah
Tebing Tinggi	Auh	Langkap	Gunung Batu
	Ju'uh	Mayanau	Sungsum
Awayan	-	Tundakan	Putat Basiun
	-	Ambakiang	Piyait
	-	Badalungga	Muara Jaya
	-	Badalungga Hilir	Pulantan
	-	Awayan Pasar	Putat Basiun
	-	Awayan	Pematang
Paringin Selatan	Baruh Bahinu Dalam	Baruh Bahinu Dalam	Halubau Utara
	Murung Abuin	Lingsir	Telaga Purun
	-	Batu Piring	Tarangan
	-	-	Bungin
	-	-	Batu Piring
Paringin	-	Paringin Timur	Layap
	-	-	Paringin Kota
	-	-	Hujan Mas
	-	-	Lamida Bawah
	-	-	Kalahiang
	-	-	Lok Batung
Batumandi	-	Banua Hanyar	Riwa
	-	Teluk Mesjid	Kasai
	-	Tariwin	Bungur
	-	Batumandi	Pelajau
Lampihong	Matang Hanau	Tanah Habang Kiri	Teluk Karya
	Papuyuan	Tanah Habang Kanan	Lok Hamawang
	Pimping	Lampihong Kanan	Kusambi Hilir
	Matang Lurus	Panaitan	Kusambi Hulu
	-	Mundar	Sungai Awang
	-	-	Simpang Tiga
	-	-	Kandang Jaya
	-	-	Sungai Tabuk

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2023

Secara rinci menurut jumlah kejadian banjir dalam tingkat desa/kelurahan, bencana banjir tertinggi data tahun 2023 berada di wilayah desa di Kecamatan Juai, hal ini sejalan dengan jumlah kejadian banjir tingkat kecamatan tertinggi pada Kecamatan Juai yakni 7 kali kejadian. Hal ini perlu menjadi catatan terhadap rencana penanggulangan kebencanaan pada tahun kedepan apakah terdapat factor yang mempengaruhi yang berdampak pada masih adanya kecenderungan kejadian bencana banjir, dan perlunya peninjauan apa yang menjadi penyebab meningkatnya intensitas banjir di kecamatan Juai. Jumlah desa yang mengalami bencana banjir di Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.13
Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir
Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan

Tahun	Jumlah Desa yang Mengalami Bencana Banjir Menurut Kecamatan Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2019	3 Kali	5 Kali	1 Kali	1 Kali	4 Kali	2 Kali	1 Kali	-	16 Kali
2020	6 Kali	11 Kali	-	4 Kali	5 Kali	3 Kali	1 Kali	6 Kali	36 Kali
2021	17 Kali	13 Kali	9 Kali	11 Kali	7 Kali	10 Kali	11 Kali	20 Kali	91 Kali
2022	25 Kali	14 Kali	7 Kali	34 Kali	3 Kali	2 Kali	4 Kali	2 Kali	91 Kali
2023	2 Kali	7 Kali	-	2 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	2 Kali	16 Kali

Sumber : BPBD kabupaten Balangan, 2022

3. Tanah Longsor/ Tanah Amblas

Rawan bencana di Kabupaten Balangan selain banjir, berupa tanah longsor atau gerakan tanah erosi dan abrasi akibat tekanan arus air sungai) dan banjir. Secara teoritis tanah longsor merupakan suatu fenomena berupa bentuk hasil pergerakan massa atau *mass movement* yang disepanjang bidangnya mengalami kritis lahan. Potensi tanah longsor dapat terjadi pada sekitar daerah kemiringan lereng 25-40 persen dan lebih dari 40 persen dengan ketinggian 500 mdpl. Faktor lainnya yang mempengaruhi proses gerakan tanah adalah kemiringan lereng yang curam sehingga memiliki lereng yang rendah, curah hujan yang tinggi pada suatu daerah, gravitasi, vegetasi dan daya dukung tanah yang rendah atau lemah yang dimiliki oleh batuan atau tanah, dan struktur geologi yang berkembang di daerah Kabupaten Balangan. Faktor ini saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan menentukan besar dan luasnya gerakan tanah. Berdasarkan tipe gerakan tanah dan jenis materialnya dapat dibagi menjadi longsoran mendatar dan jatuhan batuan.

Tanah longsor dengan tanah amblas memiliki perbedaan dari segi keparahan dan penyebab. Tanah longsor disebabkan adanya pelemahan pada lapisan atas tanah akibat tidak adanya penahanan aliran air yang mengalir ke bawah dan juga minimnya sumber resapan pada lapisan tanah sehingga tidak adanya penahan dan resapan pada bagian atas tanah tersebut menyebabkan pergerakan tanah bergerak turun ke bawah. Tanah amblas, merupakan bencana yang disebabkan pelemahan lapisan tanah akibat erosi pada lapisan bagian bawah tanah akibat tidak adanya penahan atau minimnya vegetasi sebagai tumpuan penahan pada lapisan bawah tanah sehingga, lapisan yang ada diatasnya bergerak ke bawah. Di Kabupaten Balangan masih dikategorikan sebagai tanah amblas yang kejadiannya berada di siring Sungai atau pinggir Sungai.

Tabel 2.14
Jumlah desa yang mengalami Bencana Tanah Longsor menurut Kecamatan Kabupaten Balangan

Kecamatan	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Halong	2	4	4	-	-
Juai	-	2	-	4	-
Tebing Tinggi	-	-	6	-	-
Batu Mandi	-	-	-	-	-
Awayan	-	-	-	-	-
Lampihong	3	2	1	1	3
Paringin	1	2	-	-	-
Paringin Selatan	2	-	-	3	-
TOTAL	**8**	**10**	**10**	**8**	**3**

Sumber : BPBD kabupaten Balangan, 2023

Frekuensi kejadian bencana tanah amblas sepanjang lima tahun terakhir berada pada kondisi fluktuatif. Pada tahun 2020 dan 2021 merupakan frekuensi kejadian yang tertinggi dan konstan secara jumlah. Pada tahun 2023 freuensi kejadian tanah amblas jauh menurun dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2021. Namun lokasi terjadi tanah amblas yang paling tinggi frekuensinya berada di Kecamatan Lampihong yang mana secara geografis banyak wilayah yang berada di daerah dekat sungai atau bantaran, kemudian diikuti oleh Kecamatan Halong yang juga merupakan daerah bantaran hulu aliran sungai.

Tabel 2.15
Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas di Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Tanah Amblas Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2019	1 Kali	-	-	-	-	-	3 Kali	4 Kali	8 Kali
2020	3 Kali	1 kali	-	-	-	4 Kali	-	2 Kali	10 kali
2021	4 kali	-	6 kali	-	-	-	-	-	10 Kali
2022		4 kali	-	-	-	-	3 Kali	1 Kali	8 Kali
2023	-	-	-	-	-	-	-	3 Kali	3 Kali

Sumber : BPBD Kabupaten Balangan, 2023

4. Cuaca Ekstrim

Cuaca Ekstrim termasuk salah satu jenis bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang drastis salah satunya disebabkan oleh puncak musim penghujan dan pemanasan global. Kabupaten Balangan dalam kurun waktu lima tahun mengalami bencana akibat cuaca ekstrem dengan frekuensi tertinggi pada tahun 2020. Pada tahun 2020, 32 kali kejadian

dengan wilayah yang paling tinggi terdampak yaitu Kecamatan Lampihong, diikuti Paringin Selatan, Awayan, dan Batumandi. Berangsur-angsur menurun pada tahun 2021, sebanyak 17 kali kejadian dengan wilayah yang paling tinggi terdampak yaitu Kecamatan Lampihong kemudian tahun 2022 sebanyak 15 kali dengan intensitas tertinggi di wilayah Kecamatan Paringin Selatan dan terendah pada tahun 2023 sebanyak enam kali dengan intensitas tertingi berada pada wilayah Kecamatan Lampihong. Adapun bencana cuaca ekstrem salah satunya angin kencang yang menyebabkan pohon tumbang maupun terputusnya aliran listrik yang berada di wilayah Kecamatan Lampihong. Kecamatan Lampihong menjadi wilayan yang memiliki intensitas tinggi terpapar bencana cuaca ekstrem diikuti Kecamatan Paringin.

Tabel 2.16
Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem di Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023

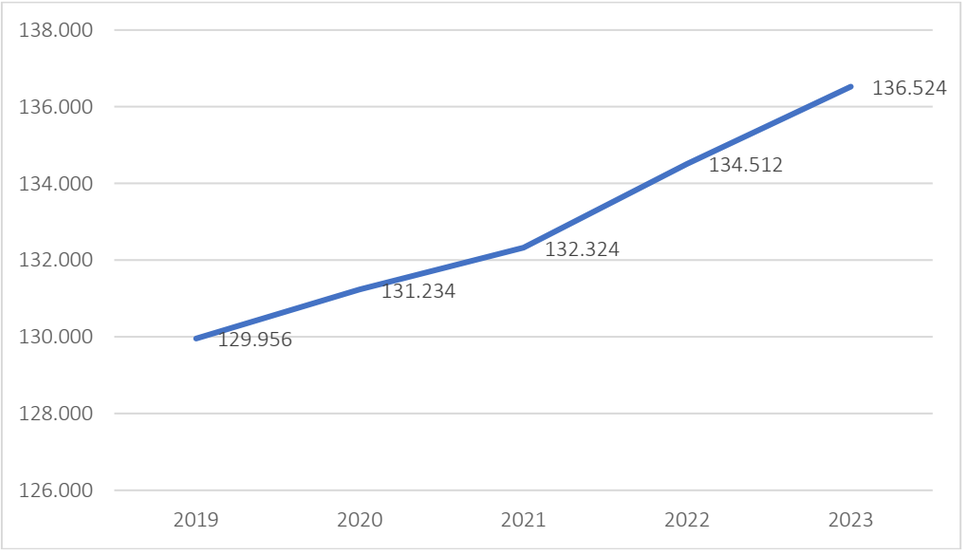
Tahun	Jumlah Kejadian Bencana Cuaca Ekstrem Tiap Kecamatan di Kabupaten Balangan								
	Halong	Juai	Tebing Tinggi	Awayan	Batumandi	Paringin	Paringin Selatan	Lampihong	Jumlah
2019	4 Kali	1 Kali	-	1 Kali	5 Kali	3 Kali	8 Kali	4 Kali	26 Kali
2020	2 Kali	-	-	6 Kali	4 Kali	3 Kali	7 Kali	10 kali	32 kali
2021	2 Kali	-	-	3 Kali	3 Kali	3 Kali	2 Kali	4 Kali	17 Kali
2022	2 Kali	1 Kali	-	1 Kali	2 Kali	4 Kali	3 Kali	2 Kali	15 Kali
2023	1 Kali	1 Kali	-	-	-	2 Kali	-	2 Kali	6 Kali

Sumber : BPBD Kabupaten

2.1.1.5 Kondisi Demografis

Data penduduk di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 sejumlah 134.512 jiwa, jumlah penduduk kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi sejumlah 136.524 sehingga dapat dilihat terdapat penambahan 2.012 jiwa atau terdapat peningkatan 1,50% penduduk di tahun 2023. Kondisi peningkatan jumlah penduduk dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.

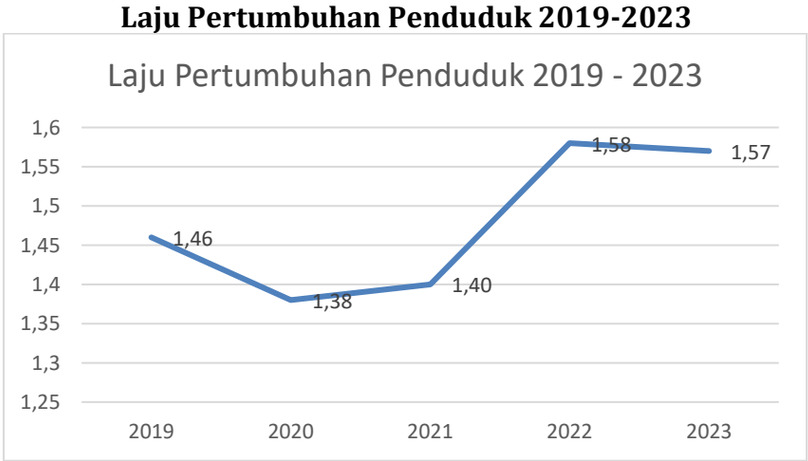
Gambar 2.10
Jumlah Penduduk Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023 (Jiwa)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2024

Jumlah penduduk Kabupaten Balangan kemudian dapat ditelaah melalui Laju Pertumbuhan Penduduk untuk melihat gambaran kondisi demografi Kabupaten Balangan secara umum. Laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kecepatan perubahan atau perkembangan suatu penduduk pada suatu daerah dan bisa menggambarkan populasi untuk mendukung keputusan kebijakan perencanaan pembangunan. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Balangan kurun waktu 2019 hingga 2023 menunjukkan perkembangan yang variatif, pada tahun 2019 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan pertumbuhan penduduk dengan penurunan sebanyak 0,08% kemudian kembali meningkat pada tahun 2021 ke tahun 2022 dengan peningkatan sebanyak 0,18% dan pada tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,01%. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Balangan kurun waktu lima tahun terakhir berada dalam kategori laju pertumbuhan sedang. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Balangan dapat diilihat melalui grafik dibawah ini.

Gambar 2. 11
Laju Pertumbuhan Penduduk 2019-2023



Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 di Kabupaten Balangan terdapat 69.146 laki-laki dan 67.378 perempuan. Kurun waktu 2019 hingga 2023 jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berada di posisi lebih banyak daripada penduduk yang berjenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Balangan dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.

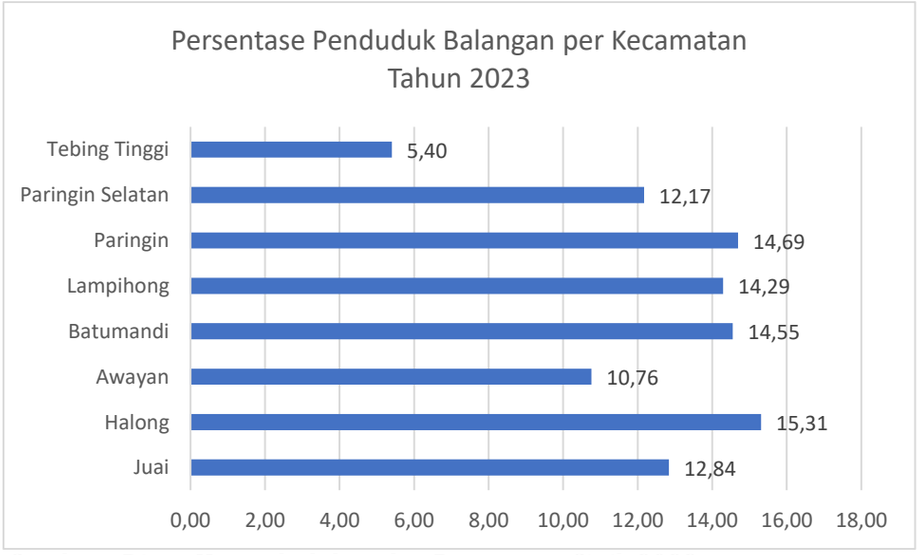
Tabel 2. 17
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin 2019-2023

Jenis Kelamin	2019	2020	2021	2022	2023
Laki-laki	66.325	65.905	66.821	67.958	69.146
Perempuan	65.103	64.450	65.392	66.554	67.378
Jumlah	**131.428**	**130.355**	**132.213**	**134.512**	**136.524**

Sumber : Kabupaten Balangan dalam Angka, 2024

Persentase penduduk per kecamatan pada Kabupaten Balangan juga mengalami konsentrasi tertinggi pada Kecamatan Halong yaitu sebanyak 15,31% atau sebanyak 20.889 jiwa dengan luas wilayah 42,24% atau 772 km^2. Apabila dilihat dalam aspek kepadatan penduduk, luas wilayah Kecamatan Halong merupakan wilayah paling luas berbanding dengan jumlah penduduk dengan kepadatan 27/ km^2 sehingga belum bisa dikatakan sebagai wilayah yang padat penduduk sedangkan Kecamatan Paringin Selatan yang memiliki kategori kepadatan penduduk tinggi dengan angka kepadatan penduduk 254/ km^2.

Gambar 2. 12
Persentase Penduduk Kabupaten Balangan Per Kecamatan Tahun 2023 (jiwa)



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Selain persentase penduduk, jumlah kepala keluarga di Kabupaten Balangan juga menarik untuk diketahui. Kepala keluarga di Kabupaten Balangan tahun 2023 berjumlah 46.145 Kepala Keluarga terdiri dari 35.641 Kepala Keluarga laki-laki dan 10.504 Kepala Keluarga Perempuan. Pada tahun 2022 kepala keluarga berjumlah 44.354 kepala keluarga

terdiri dari 35.027 Kepala Keluarga laki-laki dan 10.061 Kepala Keluarga Perempuan, sementara pada tahun 2021 jumlah kepala keluarga di Kabupaten Balangan berjumlah 43.342 terdiri dari 33. 984 Kepala Keluarga laki-laki dan 9. 358 Kepala Keluarga Perempuan. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah kepala keluarga di Kabupaten Balangan terdapat peningkatan 1.000 kepala keluarga baru. Kepala keluarga Perempuan juga mengalami peningkatan sehingga perlu dilakukan tindaklanjut pemilahan berdasarkan kelompok usia maupun kelas ekonomi, agar menerima manfaat program ataupun kebijakan pemerintah daerah yang menguatkan kemampuan resiliensi kepala keluarga Perempuan dalam situasi ekonomi maupun sosial yang cenderung tidak pasti saat ini. Jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Balangan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.18
Jumlah Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin Per Kecamatan
Semester II Tahun 2023

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
		Jiwa	Jiwa	
1	Juai	4.612	1.243	5.855
2	Halong	5.499	1.586	7.085
3	Awayan	3.803	1.299	5.102
4	Batumandi	5.244	1.590	6.834
5	Lampihong	4.953	1.621	6.574
6	Paringin	5.312	1.447	6.759
7	Paringin Selatan	4.329	1.171	5.500
8	Tebing Tinggi	1.889	547	2.436
KAB. BALANGAN		**35.641**	**10.504**	**46.145**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Selain jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin, data penduduk menurut usia produktif dan non produktif di Kabupaten Balangan mengalami kondisi meningkat di usia produktif juga pada usia tua, dan penurunan pada usia muda. Usia produktif di Kabupaten Balangan meningkat dari tahun 2022 sejumlah 93.441 menjadi 95.735 atau ada peningkatan sebanyak 2.294 jiwa. Usia tua juga mengalami peningkatan, data dibawah ini bisa berkorelasi dengan piramida penduduk Kabupaten Balangan yang mana pada tahun 2023 dan 2022 didominasi pada usia produktif yang menggambarkan wilayah Kabupaten Balangan merupakan kategori wilayah berkembang. Perbandingan antar tahun pada jumlah penduduk menurut usia produktif dan non produktif dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.19
Jumlah Penduduk Menurut Usia Produktif dan Non Produktif

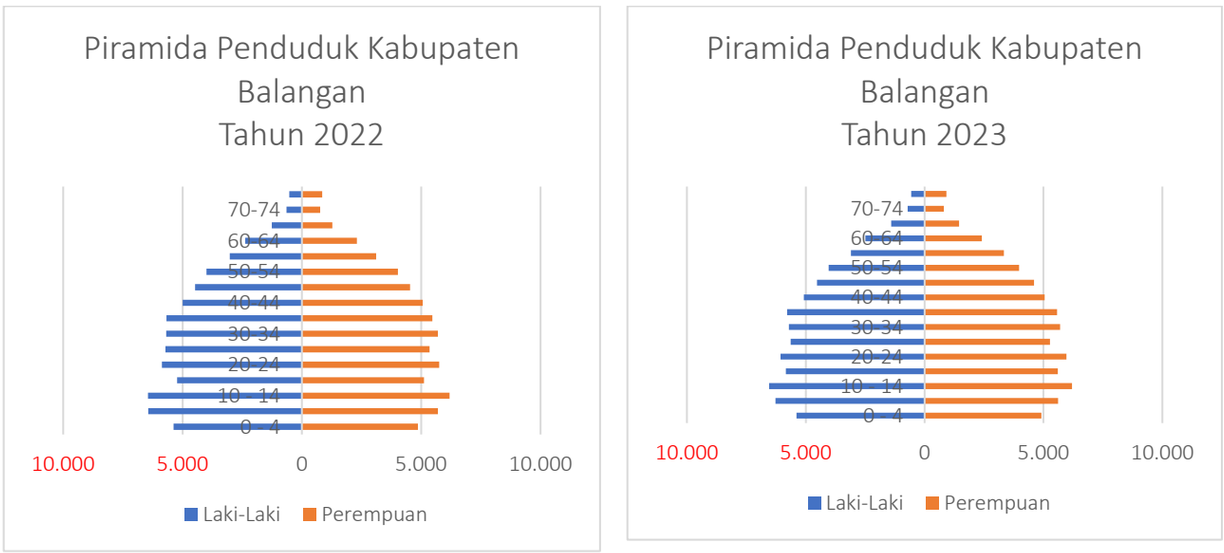
No	Kecamatan	Kategori Usia Tahun 2022			Kategor Usia Tahun 2023		
		Muda	Muda	Muda	Muda	Produktif	Tua
1	Juai	4.474	4.410	4.410	4.410	12.936	722
2	Halong	5.387	5.308	5.308	5.308	14.756	826

No	Kecamatan	Kategori Usia Tahun 2022			Kategor Usia Tahun 2023		
		Muda	Muda	Muda	Muda	Produktif	Tua
3	Awayan	3.713	3.710	3.710	3.710	10.246	729
4	Batumandi	4.949	4.498	4.498	4.498	13.923	993
5	Lampihong	4.948	4.961	4.961	4.961	13.673	881
6	Paringin	5.229	5.228	5.228	5.228	14.002	822
7	Paringin Selatan	4.384	4.429	4.429	4.429	11.541	642
8	Tebing Tinggi	1.930	1.930	1.930	1.930	5.189	250
Balangan		**35.014**	**93.441**	**34.924**	**34.924**	**95.735**	**5.865**

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun 2023

Penduduk usia tua di Kabupaten Balangan juga mengalami peningkatan pada tahun 2023. Hal ini didukung oleh beberapa faktor diantaranya, angka harapan hidup yang menunjukkan pergerakan positif di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 68.13 tahun menjadi 68.40 tahun di 2023. Kecenderungan usia tua yang meningkat juga dapat mempengaruhi rasio ketergantungan antara usia produktif yang menanggung lansia atau usia tua dimana semakin meningkat usia tua kedepan akan semakin besar yang ditanggung oleh usia produktif tersebut.

Gambar 2.13
Perkembangan Penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2023



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2023

Piramida penduduk Kabupaten Balangan Tahun 2022 dan Tahun 2023 berada pada kategori piramida ekspansif, dimana piramida tersebut menggambarkan suatu wilayah yang sedang berkembang. Piramida penduduk tipe ekspansif memiliki ciri-ciri usia tua yang mengerucut atau lebih sedikit, sementara pada usia muda dan usia produktif cenderung lebih lebar atau lebih banyak jumlahnya. Sehingga hal ini menggambarkan potensi sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Balangan sangat potensial dan terkait dengan bonus

demografi. Pemerintah Daerah juga harus memiliki perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi perencanaan terkait optimalisasi pelaksanaan pendidikan yang merata, peningkatan sarana pendidikan, dan peningkatan sarana kesehatan serta layanan kesehatan, maupun komponen lain yang mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia untuk memenuhi kesiapan sumber daya manusia yang mampu bersaing.

Banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Balangan berdasarkan klasifikasi bukan Angkatan kerja menurun pada tahun 2023 daripada tahun sebelumnya, hal ini dapat dilihat dari tabel yang tersaji seperti dibawah ini.

Table 2.20
Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
Berdasarkan Angkatan Kerja

Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja	2019	2020	2021	2022	2023
Bukan Angkatan Kerja	25924	22341	23676	26929	26542
Bekerja	65072	70928	70707	68313	70395
Pengangguran Terbuka	1549	1789	1768	2830	1955

Sumber : Kab. Balangan dalam Angka, 2023

Ketiga indikator diatas memiliki korelasi dengan kesiapan pemerintah daerah dalam kebijakan yang mendukung kesejahteraan dan kemandirian Masyarakat. Salah satunya pada angka pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan yang sudah mengalami penurunan daripada tahun sebelumnya. Kelompok bekerja juga mengalami peningkatan daripada tahun sebelumnya. Angka ini diiringi oleh angka kelompok bekerja yang mengalami peningkatan sebanyak 70.395 telah masuk menjadi kelompok bekerja atau selisih peningkatannya sebanyak 2.082 individu yang telah bekerja. Ketiga indikator tersebut memiliki korelasi dimana berpengaruh terhadap tingkat pengangguran terbuka maupun angka pengangguran.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah dalam suatu periode tertentu yang dihitung berdasarkan 17 sektor strategis dan diterbitkan setiap tahun. PDRB yang diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah dan capaian keberhasilan pembangunan, baik secara nasional maupun daerah. Penghitungan PDRB dilakukan atas harga berlaku (harga-harga pada tahun penghitungan) dan harga konstan (harga-harga pada tahun yang dijadikan tahun dasar penghitungan) untuk dapat melihat pendapatan yang dihasilkan dari lapangan usaha (sektoral) maupun dari sisi penggunaan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha pada tahun 2023 mencapai 20.876,19 milyar rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini

mengalami kenaikan sebesar 1.028,35 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2022 yang mencapai 19.847,84 milyar rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya semua sector PDRB terutama pada sector pertambangan yang naik cukup signifikan ditahun 2023. Namun Jika dilihat PDRB tanpa Batu Bara pada tahun 2023 sebesar 5.478,96 milyar rupiah naik sebesar 521,45 milyar dibandingkan tahun 2022.

Berdasarkan harga konstan angka PDRB mengalami kenaikan, dari 9.974,65 triliun rupiah pada tahun 2022 menjadi 10.390,60 triliun rupiah pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Balangan mengalami peningkatan ekonomi sekitar 8,68 %.

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat ke arah mana pembangunan berjalan dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu kategori lapangan usaha yang mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Tabel 2. 21
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah) 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertani, Kehutanan, dan Perikanan	1.326,25	1.311,57	1.406,44	1 .474,32	1.603,24
B	Pertambangan dan Penggalian	6.680,77	6.317,73	7.741,21	14.869,78	15.391,23
C	Industri Pengolahan	213,25	212,25	231,37	252,75	262,89
D	Pengadaan Listrik, Gas	4.14	4,42	4,68	5,09	5,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	25,99	28,20	30,15	30,50	31,90
F	Konstruksi	500,03	501,84	525,05	582,78	643,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	641,00	640,39	671,41	751,05	867,76
H	Transportasi dan Pergudangan	219,82	216,77	221,15	249,09	300,28
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	39,45	40,27	41,73	45,07	49,51
J	Informasi dan Komunikasi	149,41	157,48	165,84	178,87	191,97
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	39,09	40,66	40,79	44,93	48,59
L	Real Estate	111,12	115,76	121,72	127,58	137,87
M,N	Jasa Perusahaan	8,62	8,68	9,12	10,19	11,62
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	520,17	551,73	545,47	572,28	627,29
P	Jasa Pendidikan	378,60	396,31	416,00	445,99	474,10

Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	103,49	110,86	122,26	132,09	144,46
R, S, T, U	Jasa Lainnya	64,45	65,42	66,85	74,07	82,69
PDRB		**11.027,66**	**10.722,30**	**12.361,61**	**19.847,84**	**20.876,19**
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		**4.346,89**	**4.404,57**	**4.620,40**	**4.978,06**	**5.478,96**

Sumber : Kab. Balangan dalam Angka, 2024

Tabel 2. 22
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar rupiah) 2019-2023

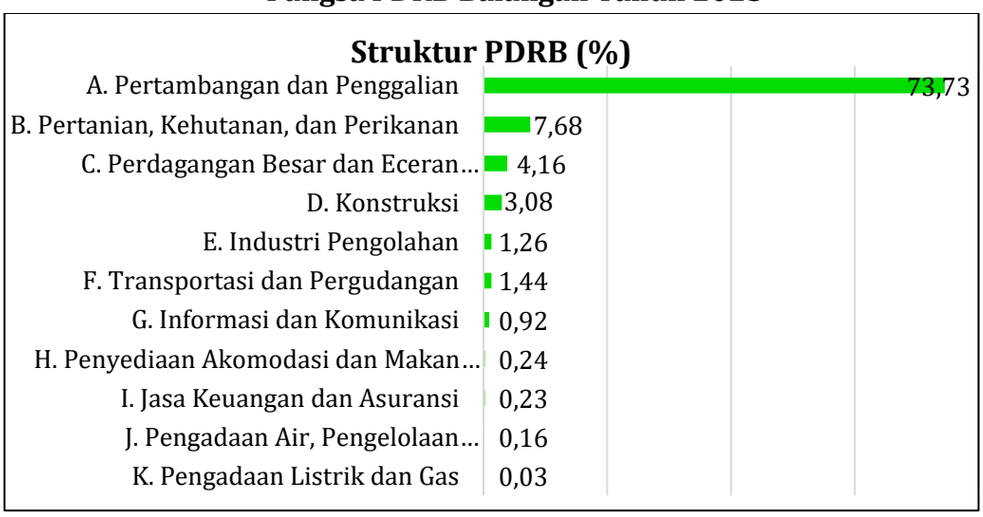
Kategori	Lapangan Usaha	TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.010,08	991,90	1.027,02	1 030,66	1.071,80
B	Pertambangan dan Penggalian	6.382,36	6.143,65	6.379,57	6.774,16	7.019,43
C	Industri Pengolahan	144,75	140,77	231,37	153,47	158,90
D	Pengadaan Listrik, Gas	2,34	2,45	4,68	2,85	3,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	20,05	21,27	30,50	22,03	22,68
F	Konstruksi	340,00	339,68	525,05	356,72	382,85
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	412,45	407,92	671,41	435,79	464,84
H	Transportasi dan Pergudangan	148,58	145,31	147,55	156,52	166,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27,35	27,28	41,73	29,15	31,80
J	Informasi dan Komunikasi	114,59	122,32	128,69	135,69	143,44
K	Jasa Keuangan da Asuransi	25,78	26,94	40,79	26,27	27,95
L	Real Estate	79,14	81,40	83,42	86,25	89,43
M,N	Jasa Perusahaan	5,42	5,28	9,12	5,91	6,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	328,66	340,48	545,47	341,82	360,56
P	Jasa Pendidikan	255,91	265,57	416,00	286,14	299,85
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	68,28	72,28	122,26	83,75	88,88
R, S, T, U	Jasa Lainnya	41,75	41,26	66,85	44,30	47,04
PDRB		**9.409,83**	**9.177,87**	**12.361,61**	**9.974,65**	**10.390,60**
PDRB TANPA SEKTOR PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN		**3.026,64**	**3.034,22**	**5.982,04**	**3.200,49**	**7.190,11**

Sumber : Kab. Balangan dalam Angka, 2024

Ketika kondisi tersebut terjadi, maka sebenarnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama.

Namun demikian, pada kenyataannya kondisi di lapangan tidak selalu berjalan dengan baik. Dari yang dijelaskan di atas, terjadi pada tahun 2021. Dimana terlihat dari mulai menurunnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dan kategori lapangan usaha pertambangan. Pada tahun 2017 share kelompok kategori primer ini mencapai 74,01 %, dan di tahun 2021 share-nya hanya 72,66 % atau berkurang sebesar 1,35% selama kurun waktu 5 tahun. Namun pada akhirnya di tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan di angka 82,06% kelompok kategori primer khususnya di dominasi sektor pertambangan. Jika dilihat secara jumlah, postur PDRB Kabupaten Balangan tahun 2022 per kategori lapangan usaha seluruhnya mengalami peningkatan namun memang yang perlu menjadi perhatian adalah kategori pertambangan yang mencapai angka 74,52% sedangkan kategori pertanian, kehutanan dan perikanan hanya di angka 7.54% artinya terjadi ketimpangan yang cukup jauh antara kategori tertinggi pertama dan kedua sehingga perlu kerja keras bersama dalam mendorong sektor pertanian, kehutanan dan perikanan kedepan agar Balangan tidak bergantung pada sektor tambang yang nantinya bisa habis. Berikut postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan tahun 2023.

Gambar 2.14
Pangsa PDRB Balangan Tahun 2023



Sumber : Kabupaten Balangan Dalam angka, 2023

PDRB Kabupaten Balangan masih sangat didukung oleh komoditas pertambangan. Rata-rata peranan komoditas pertambangan selama tahun 2019-2023 sebesar 66,154 %. Tahun ini ada kecenderungan terjadi kenaikan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2019 sebesar 60,58% naik menjadi 73,73% pada tahun 2023. Hingga tahun 2019 sampai 2023 komoditas pertambangan merupakan kategori komoditas tertinggi yang sangat berpengaruh pada PDRB Balangan.

Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan

ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke India, China dan beberapa Negara di kawasan Asia Utara. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa ekonomi kabupaten Balangan ini memiliki korelasi cukup kuat dengan dinamika global yang terkait tata niaga dan pertumbuhan ekonomi negara importir komoditas tersebut. Akibatnya, pada saat pertumbuhan ekonomi Negara tujuan ekspor mengalami perlambatan akan berimbas pada komoditas ekspor Kabupaten Balangan. Aktivitas ekonomi Kabupaten Balangan yang masih tergantung pada komoditas pertambangan membuat Kabupaten Balangan menjadi rentan terhadap risiko penurunan harga dan permintaan Komoditas yang berimbas pada PDRB Kabupaten Balangan.

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori ini mencapai 4,16 %. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

Tabel 2.23
Peranan PDRB Kabupaten Balangan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%), 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan / Agriculture, Forestry and Fishery	12.03	12.23	11.38	7.43	7.68
B	Pertambangan dan Penggalian /Mining and Quarrying	60.58	58.92	62.62	74.92	73.73
C	Industri Pengolahan /Manufacturing	1.93	1.98	1.87	1.27	1.26
D	Pengadaan Listrik, Gas / Electricity and Gas	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang / Water Supply. Sewerage, Waste Management And Remediation Activities	0.26	0.28	0.25	0.16	0.16
F	Konstruksi / *Construction*	4.53	4.68	4.25	2.94	3.08
G	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor / Wholesale And Retail Trade; Repair of Motor Vehicles And Motorcycles	5.81	5.97	5.43	3.78	4.16
H	Transportasi dan Pergudangan /Transportation And Storage	1.99	2.02	1.79	1.25	1.44
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation And Food Service Activities	0.36	0.38	0.34	0.23	0.24

Kategori	Lapangan Usaha	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
J	Informasi dan Komunikasi /Information And Communication	1.35	1.47	1.34	0.90	0.92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi /Financial And Insurance Activities	0.35	0.38	0.33	0.23	0.23
L	Real Estate / Real Estate Activities	1.01	1.08	0.98	0.64	0.66
M,N	Jasa Perusahaan / Bussiness Activities	0.08	0.08	0.07	0.05	0.06
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib / Public Administration and Defence, Compulsory Social Security	4.72	5.15	4.41	2.88	3.00
P	Jasa Pendidikan / Education	3.43	3.70	3.37	2.25	2.27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial / Human Health Services And Social Work Activities	0.94	1.03	0.99	0.67	0.69
R,S,T,U	Jasa lainnya / Other Service Activities	0.58	0.61	0.54	0.37	0.40
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO / GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT		**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber : Kab. Balangan dalam Angka, 2023

Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat selama tahun 2018-2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, dan dapat kembali meningkat pada tahun 2021 dan 2022. Peningkatan dan penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) yang selama periode 2018 - 2019 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan produksi barang dan jasa. Adapun kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 dan tahun 2022 karena terjadinya pemulihan ekonomi dan berkurangnya pandemi covid-19.

Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negative setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan hingga tahun 2018. Kemudian, kedua komponen tersebut mengalami peningkatan yang cukup siginifikan di tahun 2021 di angka Rp. 5.449,15 Milyar bahkan pada tahun 2022 meningkat kembali secara drastis di angka Rp. 12.486,79 Milyar. Hal tersebut terjadi karena adanya adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai,

terutama nilai batubara yang meningkat siginifikan di tahun 2022. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran di Balangan.

Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2018 – 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2022, seluruh komponen mengalami peningkatan nilai tambah yang signifikan. Sehingga, kenaikan seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total.

Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Balangan (miliar rupiah), 2019-2023

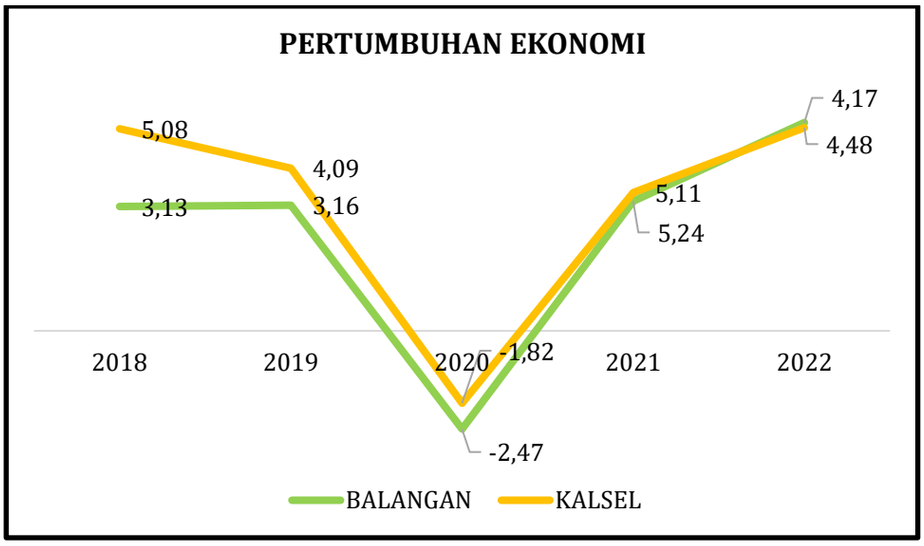
Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.488,04	2.503,01	2.586,19	2.949,93	3236,01
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	112,58	109,74	113,21	121,53	139,32
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.108,12	1.118,07	1.109,31	1.179,70	1.315,44
Pembentukan Modal Tetap Bruto	2.464,84	2.451,22	2.516,05	2.809,28	3.088,17
Perubahan Inventori	50,92	1,97	2,66	-29,91	-27,3
Net Ekspor Barang dan Jasa	4.803,16	4.538,29	5.449,15	12.486,79	13.124,55
Produk Domestik Regional Bruto	**11.027,66**	**10.722,30**	**12.361,61**	**19.847,84**	**20.876,19**

Catatan :* Angka Sementara
** Angka Sangat Sementara
Sumber : BPS, Berbagai sensus, survei dan sumber lain

B. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu pertumbuhan ekonomi Balangan adalah 4,17. PDRB Kabupaten Balangan tahun 2023 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 20.876,19 milyar rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 10.390,60 Milyar rupiah. Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2023, terbesar pada kategori Pertambangan dan Penggalian yaitu 73,73% disusul oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,68%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 4,16%, konstruksi 3,08%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib 3%, jasa Pendidikan 2,27%, transportasi dan pergudangan 1,44% dan industri pengolahan 1,26%.

Gambar 2.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019 – 2023



Sumber : Kab. Balangan dalam Angka, 2023

Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif karena kontribusi ekonomi daerah terbesar yang masih berada di sektor pertambangan batu bara dimana tahun 2023 terjadi penurunan harga dan penurunan permintaan pasar luar negeri sehingga berdampak pada PDRB Balangan dan sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan.

Tabel 2.25
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan 2019-2023

KABUPATEN	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
KALIMANTAN SELATAN	4,08	-1,81	3,48	5,11	4,84
TANAH LAUT	3,76	-1,99	3,47	5,12	4,78
KOTABARU	4,19	-1,87	3,36	4,58	4,29
BANJAR	4,54	-1,96	3,21	4,48	4,35
BARITO KUALA	5,06	-1,04	3,17	3,59	3,91
TAPIN	4,26	-1,50	3,41	4,91	4,88
HULU SUNGAI SELATAN	5,32	-1,19	4,18	4,02	5,27
HULU SUNGAI TENGAH	4,80	-1,01	3,01	3,93	4,11
HULU SUNGAI UTARA	5,54	-0,67	3,23	4,09	4,51
TABALONG	3,69	-2,62	3,28	5,30	4,90
TANAH BUMBU	3,64	-1,46	4,23	5,45	4,84
BALANGAN	3,18	-2,47	3,26	5,24	4,17
KOTA BANJARMASIN	6,13	-1,91	3,41	5,69	5,62
KOTA BANJAR BARU	6,93	-1,88	3,32	7,93	6,81

Sumber : BPS Kalimantan Selatan, 2023

C. PDRB Per Kapita

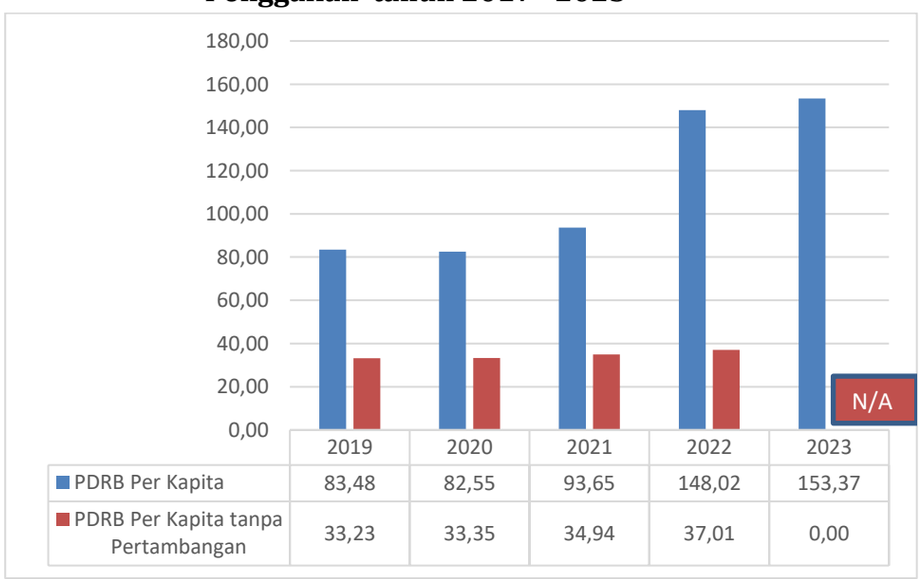
Tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat, sehingga banyak dimensi yang tercakup dan target yang perlu dicapai. Oleh karenanya, pembangunan tidak hanya cukup pada pencapaian pertumbuhan ekonomi saja.

Pertumbuhan hanyalah salah satu syarat bagi tercapainya kesejahteraan. Tanpa pertumbuhan, tujuan pembangunan akan sulit terwujud. Ukuran kesejahteraan memang sulit tercakup dalam satu indikator yang komprehensif, karena masalah aspek multidimensi yang melatar belakanginya. Namun demikian, banyak literatur dan kajian akademik yang menggunakan berbagai alternatif, diantaranya adalah dengan pendekatan variabel PDRB perkapita.

Besaran PDRB Perkapita diperoleh dari nilai PDRB dibagi dengan jumlah penduduk. Peningkatan PDRB Perkapita dapat dijadikan ukuran untuk menilai dan membandingkan sejauh mana tingkat kesejahteraan penduduk dari tahun ke tahun. Pertumbuhan PDRB Perkapita dari tahun ke tahun merupakan cerminan dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menggambarkan penerimaan pendapatan masing-masing masyarakat dalam peran serta mereka pada aktifitas produksi barang/jasa. Nilai PDRB Perkapita menggambarkan besaran pendapatan yang dapat dinikmati oleh setiap penduduk secara rata-rata.

Perkembangan PDRB perkapita di Balangan dapat dilihat pada gambar 2.13. Selama kurun tahun 2017 - 2022 PDRB perkapita Balangan dengan sektor Pertambangan dan Penggalian meningkat dari 76,17 juta rupiah pada tahun 2017 menjadi 83,48 juta rupiah pada tahun 2019 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 82,54 juta rupiah dan meningkat lagi di tahun 2021 menjadi 93,645 juta. Pada tahun 2022 PDRB meningkat secara signifikan di angka 148,028 juta rupiah dan di tahun 2023 adalah sebesar 153,371 juta rupiah. Namun jika dilihat dari sisi PDRB perkapita tanpa Sektor Pertambangan dan Batu Bara pendapatan perkapita Kabupaten Balangan cukup rendah yaitu 37,01 juta rupiah ditahun 2022.

Gambar 2.16
PDRB Per Kapita Kabupaten Balangan dengan dan Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian tahun 2017– 2023



	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB Per Kapita	83,48	82,55	93,65	148,02	153,37
PDRB Per Kapita tanpa Pertambangan	33,23	33,35	34,94	37,01	0,00

Sumber : Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023

D. Inflasi

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Meskipun inflasi merugikan, tetapi ada sejumlah pihak yang diuntungkan. Sebut saja eksportir atau penjual, debitur atau pihak yang memiliki utang, spekulan, dan masyarakat berpenghasilan tinggi. Sementara itu, importir atau pembeli, kreditur, masyarakat berpenghasilan tetap dan rendah menjadi pihak yang dirugikan dalam peristiwa tersebut.

Daerah di Kalimantan Selatan diwakili dan diukur oleh 3 kota yaitu kota Tanjung, Banjarmasin dan Kotabaru. Wilayah Balangan sendiri diwakili oleh kota Tanjung Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 mengalami inflasi di angka 2,39.

Tabel 2.26
Perkembangan Inflasi Per Tahun di Kalimantan Selatan

	2019	2020	2021	2022	2023 (per juli)
Kalsel	4.01	1.68	2.55	6.99	2,43
Kotabaru	-	1.44	2.68	8.65	3,81
Tanjung	2.15	2.05	2.43	5.01	2,39
Banjarmasin	4.15	1.67	2.54	6.98	2,28

Sumber : BPS Provinsi Kalsel 2023

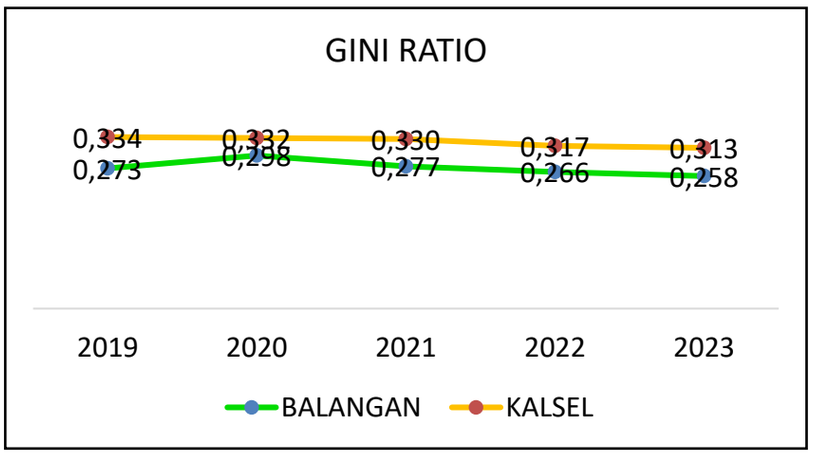
Untuk wilayah Banua Anam yang diwakili Kota Tanjung terjadinya Inflasi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, seperti beras, tarif air minum PAM, bensin, rokok kretek filter, tarif kendaraan travel, emas perhiasan, angkutan antar kota, mie kering instan, telur ayam ras, dan solar. Sedangkan komoditas yang menahan laju inflasi diantaranya minyak goreng, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, ikan layang atau ikan benggol, cabai merah, ikan baung, kacang panjang, daster, dan ikan patin. intervensi dari pemerintah daerah dan provinsi baik berupa pasar murah hingga subsidi sejumlah bahan pokok menjadi salah satu faktor penurunan angka inflasi.

E. Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks gini dipengaruhi berbagai hal yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan pertumbuhan investasi.

Koefisien gini (*gini ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Gambar 2.17
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 0,258 yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan rendah dan bisa dikatakan merata.

Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun lalu, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,266 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan rendah. Dibandingkan dengan Indeks Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan, Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan jauh lebih baik.

Faktor pendorong :

a. Mudahnya akses permodalan bagi pengusaha pemula
b. Adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah diantaranya bantuan uang tunai, permakanan, peralatan kerja, bedah rumah, dan sebagainya
c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif serta pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja

d. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan yang sudah masuk kategori tinggi di angka 72,97 poin (2023) sehingga mampu menekan ketimpangan angka indeks gini yang semakin merata
e. Semakin meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berorientasi pasar kerja dengan adanya pelatihan-pelatihan kerja oleh instansi terkait
f. Pertumbuhan investasi daerah yang terus tumbuh

Faktor penghambat :

a. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang belum dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup secara optimal
b. Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif karena kontribusi ekonomi daerah terbesar yang masih berada di sektor pertambangan sehingga perlu kontribusi lebih dari sektor lain seperti pertanian, perdagangan, jasa dan pariwisata dalam mengatasi ketergantungan terhadap sektor pertambangan

F. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang melibatkan aspek multidimensi yang tidak hanya disebabkan oleh masalah sosial saja. Kemiskinan merupakan bagaimana individu atau keluarga tidak mendapat kemudahan mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat berteduh yang layak, dan ketahanan pangan. Keluarga maupun individu miskin yang tidak mendapatkan bangku sekolah akan sulit mengembangkan kemampuannya dan bersaing di dunia kerja. Ibu hamil dan menyusui yang berada dalam kondisi miskin juga rawan tidak mendapatkan asupan yang cukup sehingga berpeluang memiliki anak stunting. Keluarga maupun individu yang miskin, apabila tidak memiliki ketahanan pangan akan berada pada kondisi kurang gizi, dan kelaparan. Sehingga elemen-elemen tersebut perlu melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, kolaborasi dengan swasta, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Indikator makro kemiskinan terdapat 3 indikator dalam mengukur kemiskinan suatu wiayah yaitu P0 merupakan persentase penduduk miskin terhadap total penduduk; P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan; P2 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks ketimpangan pengeluaran semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menekan angka kemiskinan berada dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menyentuh angka 7.266 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 7.064, namun pada tahun 2021 meningkat cukup tajam sebanyak 8.062 sebagai dampak pandemic covid 19. Dampak pandemic covid 19 yang menyebabkan lesunya ekonomi, rendahnya daya beli dan minimalnya pergerakan masyarakat berdampak

kepada penambahan penduduk miskin. Tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan meskipun belum signifikan yaitu 7.852 atau sebanyak 210 jiwa bisa keluar dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin sebanyak 7.074 atau sebanyak 778 jiwa bisa graduasi dari garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang fluktuatif *inline* terhadap persentase penduduk miskin. Pada tahun 2023 persentase penurunan penduduk miskin di Kabupaten Balangan mengalami percepatan yang cukup tinggi yaitu 0,61% penurunan. Upaya bersama pemerintah daerah Kabupaten Balangan tidak lepas dari program prioritas daerah dalam berbagai aspek yaitu bedah rumah yang melibatkan organisasi (Baznas), Forkopimda, dan OPD. Salah satunya dari Dinas PUPR Perkim yang hingga akhir 2023 menargetkan 500 rumah dibedah, Dinas Sosial sebanyak 15 rumah berasal dari APBD II dan empat rumah bersumber dari APBD I, Polres Balangan pada tahun 2023 juga merehab 10 buah rumah dengan sasaran keluarga miskin ekstrem. Sektor ekonomi juga terdapat terobosan dari Bupati Balangan yaitu program Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun yang bekerjasama dengan bank daerah guna mendorong kredit usaha yang mudah dan murah.

Tabel 2.27
Persentase dan Jumlah Masyarakat Miskin Kabupaten Balangan
Tahun 2019 – 2023

Jumlah Penduduk Miskin				
'(000)				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
7266	7064	8062	7825	7074
Garis Kemiskinan				
(Rupiah/Kapita/Bulan)				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
396.532	441.488	453.928	476.190	508.157
Persentasi Penduduk Miskin				
P0				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
5,55	5,32	6,07	5,83	5,22
Tingkat Kedalaman				
P1				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
0,870	0,880	0,785	0,667	0,554
Tingkat Keparahan				
P2				
2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
0,200	0,240	0,187	0,119	0,128

Sumber : Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023

a) Situasi Kemiskinan Kabupaten Balangan

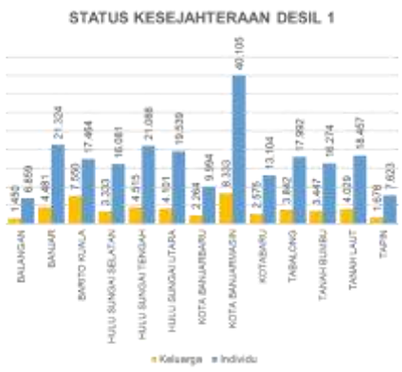
Kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi dimana keadaan individu atau kelompok miskin berada dibawah rata-rata garis kemiskinan. Kemiskinan ekstrem ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 04 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang diharuskan menjadi 0 persen diseluruh Kabupaten/Kota. Kemiskinan ekstrem merupakan suatu kondisi dimana individu maupun keluarga pada situasi yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan akses informasi. Hal-hal tersebut merupakan pemenuhan kebutuhan dasar berdasarkan definisi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam hal ini, berdasarkan Bank Dunia melalui konsep *purchasing power parity* (PPP) individu dikatakan miskin apabila kemampuan daya beli dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebesar USD 1,9 PPP atau Rp. 10.739-, per harinya atau berada di kisaran Rp. 300.000-, per bulannya.

Kabupaten Balangan sendiri tercatat menurut data P3KE (Pensasaran Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem) sejumlah 9.568 keluarga atau 37.998 individu. Jumlah penduduk miskin ekstrem pada data P3KE secara umum dan di Kabupaten Balangan juga ditentukan menurut Desil 1, 2, dan 3. Secara rinci Desil 1 atau kelompok terendah dalam kemiskinan ekstrem, 1.450 keluarga atau 6.859 individu. Data P3KE kemudian telah dilaksanakan sosialisasi dan verifikasi pada Triwulan III 2023 dengan mengundang aparatur desa yang terdapat miskin ekstrem melalui inovasi (Sistem Integrasi .....) SIAP PD. Inovasi SIAP-PD hadir sebagai hasil kerja keras dan kolaborasi bidang-bidang di Bapperida sebagai upaya Bapperida agar menjadi *tools* yang sangat membantu verifikasi data dan intervensinya.

Gambar 2. 18

Jumlah Keluarga dan Individu Pada Desil 1 Kab/Kota di Kalimantan Selatan

No.	Kabupaten/Kota	Keluarga Desil 1	Individu Desil 1
1.	BALANGAN	1.450	6.859
2.	BANJAR	4.481	21.324
3.	BARITO KUALA	7.550	17.464
4.	HULU SUNGAI SELATAN	3.333	16.081
5.	HULU SUNGAI TENGAH	4.515	21.088
6.	HULU SUNGAI UTARA	4.101	19.539
7.	KOTA BANJARBARU	2.264	9.994
8.	KOTA BANJARMASIN	8.333	40.105
9.	KOTABARU	2.575	13.104
10.	TABALONG	3.842	17.992
11.	TANAH BUMBU	3.447	16.274
12.	TANAH LAUT	4.029	18.457
13.	TAPIN	1.678	7.623
	Total (13)	51.598	225.904



Gambar diatas merupakan kondisi awal situasi kemiskinan ekstrem sebelum dilaksanakannya verifikasi data di lapangan dibantu oleh aparat desa Kabupaten Balangan. Setelah dilaksanakan verifikasi dan validasi didapatkan sejumlah 4.934 keluarga dengan rincian 807 keluarga desil 1, 1.490 keluarga desil 2, dan 2.640 keluarga desil 3. Pada individu,

terdapat 19.134 orang/jiwa yang terdaftar dengan rincian 3.840 desil 1, 6.031 desil 2, dan 9.263 desil 3. Intervensi kebijakan pemerintah daerah menyasar pada tiga pilar penanggulangan kemiskinan ekstrem. Pertama, pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Kedua, pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan ketiga yaitu peningkatan pendapatan masyarakat miskin. Pensasaran melalui tiga pilar tersebut berdasarkan pada data yang sudah diinput dalam aplikasi SIAP-PD dan setelah dilakukan verifikasi oleh aparatur desa juga diverifikasi kembali oleh OPD untuk kelayakan memperoleh bantuan. Beberapa bentuk intervensi yang diberikan, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan memberi bantuan bibit ternak, sarana dan prasarana pertanian, serta bibit tanaman. Dinas PUPRPERKIM memberikan intervensi melalui bedah rumah dan sanitasi layak, Dinas Sosial melalui program permakanan dan BLT miskin ekstrem APBD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan beasiswa melalui program unggulan Kartu Balangan Pintar dan pembiayaan sekolah non formal bagi masyarakat yang putus sekolah. Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja memberikan intervensi dengan bantuan peralatan dan fasilitas berusaha seperti rombong atau etalase berjualan, serta pelatihan agar SDM siap kerja. Rekap intervensi penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dilihat melalui sub bab dibawah ini.

b) Pelaksanaan Intervensi Kemiskinan Ekstrem

Tabel 2.28
Rekap Rencana Aksi Tahunan PPKE 2022 - 2024

NO	SKPD	PAGU TAHUN (BERDASARKAN PENYUSUNAN RAT)		
		2022	2023	2024
1	DKUKMPP	906.273.950,00	2.834.053.800	-
2	DINKESPPKB	28.356.700.800,00	43.652.375.100	-
3	DKP3	17.343.220.627,00	21.342.398.300	137.823.227.674,00
4	DPMPTSPTTK	2.970.102.100,00	2.177.406.600	-
5	DISDIKBUD	15.003.850.000,00	935.000.000	1.393.750.000,00
6	DPUPRPERKIM	8.119.254.450,00	16.460.000.000	11.518.500.000,00
7	DSP3APMD	5.796.833.103,00	695.623.200	-
8	SETDA	-	187.500.000	187.500.000,00
9	BPBD	-	230.045.000	264.828.000,00
10	DISKOPUKMNAKER	-		4.015.758.128,00
11	DINSOS	-		21.184.818.000,00
12	DP3APPKBPMD	-		99.715.000,00
13	DINKES	-		33.907.190.425,00
14	DISPERINDAG	-		187.500.000,00
	TOTAL	78.496.235.030,00	88.514.402.000	210.582.787.227,00

Sumber : Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem SKPD, 2022-2023

Melalui data rencana aksi tahunan penanggulangan kemiskinan diatas yang dikumpulkan melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten

Balangan, rencana aksi yang disusun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pemetaan sub kegiatan terkait penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan ekstrem pada tahun 2023. Keterlibatan OPD yang sebelumnya masih belum optimal terjaring, saat ini terdapat penambahan intervensi dari OPD dan penambahan program kegiatan mendukung kemiskinan ekstrem sehingga berpengaruh terhadap penambahan anggaran yang disusun saat perumusan rencana aksi tahunan. Kemudian realisasi penanggulangan kemiskinan ekstrem dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.29

Rekapitulasi Realisasi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

NO	SKPD	REALISASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
		2022	2023
1	DKUKMPP	-	466.435.500
2	DINKESPPKB	203.480.820.825,00	39.053.615.195
3	DKP3	14.148.114.800,00	99.401.624.760
4	DPMPTSPTTK	408.915.200,00	18.426.276.803
5	DISDIKBUD	488.650.000,00	716.000.000
6	DPUPRPERKIM	10.264.160.000,00	12.975.160.300
7	DSP3APMD	85.986.400,00	5.377.236.200
8	SETDA	-	187.500.000
9	BPBD	-	83.840.000
10	DISHUB	531.618.580,00	-
	TOTAL	229.408.265.805,00	176.687.688.758

Sumber: Rencana Aksi Tahunan PPKE data diolah, 2023

Berdasarkan data diatas realisasi rencana aksi tahunan sepanjang 2022 dan 2023 melebihi daripada rencana aksi tahunan sebagai dampak dari adanya tahapan penganggaran perubahan, sehingga berpengaruh terhadap adanya penambahan cakupan berupa target penerima manfaat maupun kegiatan pendukung intervensi kemiskinan. Namun begitu, penambahan anggaran pada saat realisasi belum bisa optimal mencerminkan efektivitas terhadap penanggulangan kemiskinan ekstrem, hal ini merujuk kepada surat dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI tentang Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Esktrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023 mengalami peningkatan terhadap angka kemiskinan ekstrem secara persentase 0,60% pada tahun 2022 menjadi 0,78% pada tahun 2023. Sehingga perlu evaluasi lebih jauh agar intervensi yang dilaksanakan dan dapat efisien, dan efektif serta berdampak di masyarakat. Upaya yang dilakukan melalui Bapperida mengoptimalkan inovasi SIAP PD sebagai wadah maupun alat yang dapat mempermudah dari tahapan verifikasi, perencanaan, hingga pelaksanaan di lapangan.

Gambar 2.19

Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Ekstrem Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel Estimasi Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem

Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2023

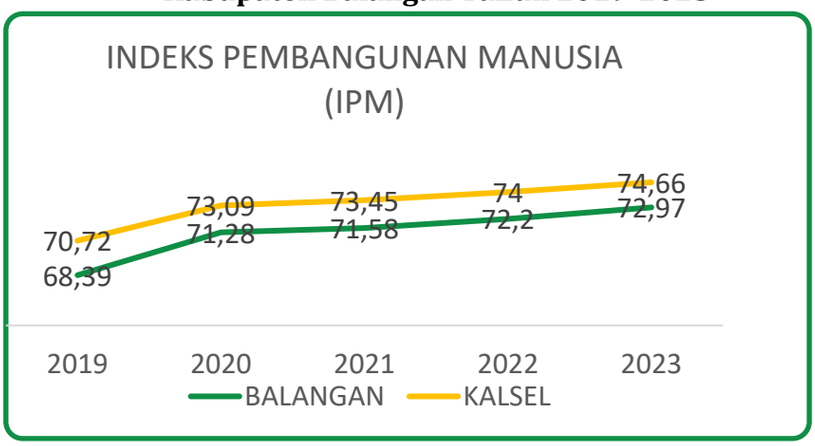
No	Kode	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan Ekstrem (ribu Jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
			2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
1	**63.00**	**Provinsi Kalimantan Selatan**	**16.53**	**24.57**	**20.53**	**0.38**	**0.56**	**0.47**
2	6301	Tanah Laut	1.95	2.23	3.24	0.56	0.64	0.91
3	6302	Kota Baru	0.00	1.29	0.18	0.00	0.37	0.05
4	6303	Banjar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	6304	Barito Kuala	2.83	3.72	6.10	0.90	1.17	1.91
6	6305	Tapin	0.00	1.35	1.97	0.00	0.70	1.01
7	6306	Hulu Sungai Selatan	0.00	1.86	1.55	0.00	0.78	0.65
8	6307	Hulu Sungai Tengah	0.83	0.53	0.00	0.31	0.19	0.00
9	6308	Hulu Sungai Utara	0.40	0.83	0.66	0.17	0.35	0.27
10	6309	Tabalong	2.71	2.08	1.82	1.05	0.80	0.69
11	6310	Tanah Bumbu	0.77	1.04	0.00	0.19	0.26	0.00
12	6311	Balangan	1.40	0.80	1.06	1.05	0.60	0.78
13	6371	Kota Banjarmasin	4.01	8.84	3.29	0.56	1.23	0.45
14	6372	Kota Banjar Baru	1.63	0.00	0.66	0.60	0.00	0.23

Keterangan
* : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
** : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

G. Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran terkait bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Report* (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak.

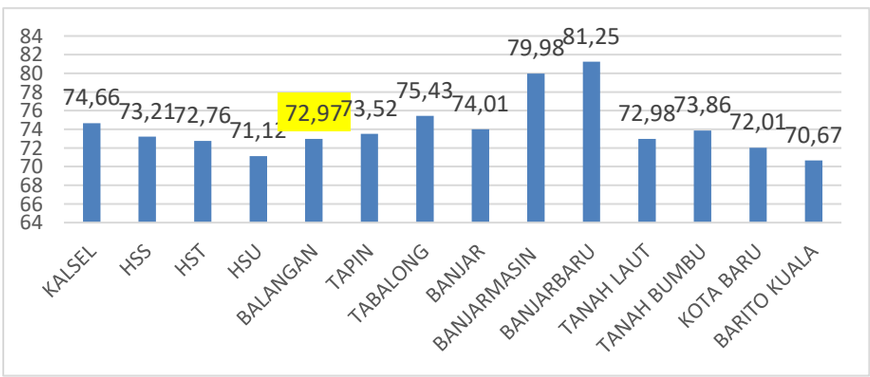
Gambar 2. 20
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 68,39 dan terus meningkat menjadi 72,97 pada tahun 2023, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan namun sudah berada pada dikategori tinggi. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan.

Gambar 2. 21
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kota di
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

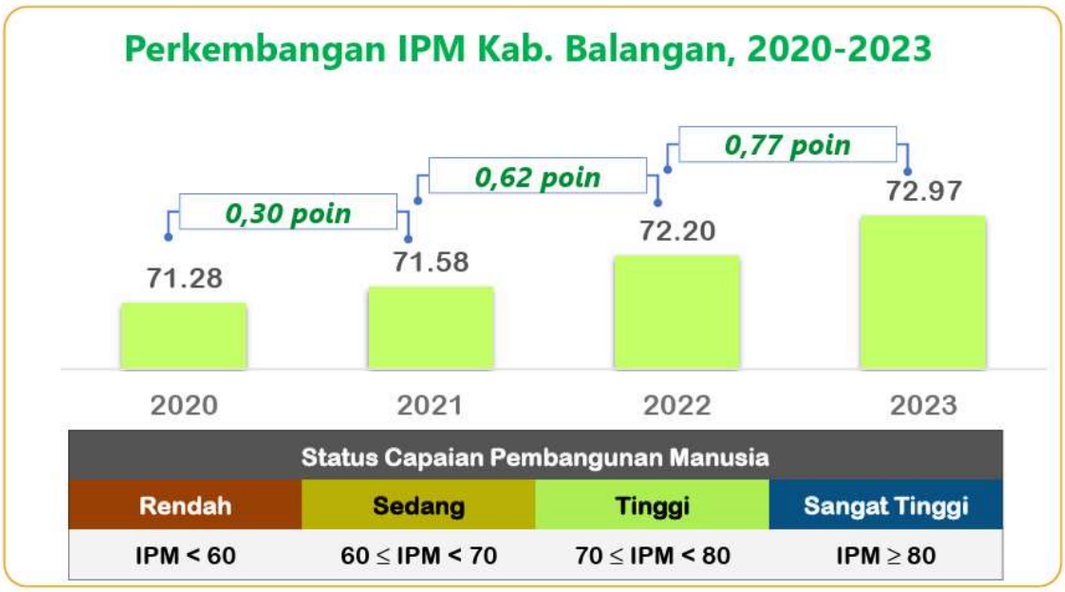
Peningkatan IPM didorong oleh peningkatan semua indikator pembentuk, yaitu Angka harapan Hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran perkapita. Khusus data Tahun 2020-2023 menggunakan data hasil LF SP 2020 yang lebih berkualitas sehingga nilai IPM semua Kab/Kota jauh meningkat. Adanya update sumber

data berdasarkan Hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang lebih berkualitas dimana adanya perubahan karakteristik demografi dalam 10 tahun terakhir, penggunaan statistik yang terbaru sehingga meningkatkan kualitas data dan tersedianya data parameter kependudukan terbaru. Dari hasil long form Sensus Pendudukan 2020 inilah nilai Angka Harapan Hidup meningkat yaitu 73,69 tahun.

Perkembangan IPM Kabupaten Balangan dari tahun 2020 sampai tahun 2023 berdasarkan sumber data Long Form Sensus Penduduk 2020 adalah sebagai berikut :

Gambar 2. 22

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Perkembangan IPM pada tahun 2023 adalah 0,77 poin, lebih tinggi dibandingkan dari tahun 2022 yaitu 0,62 poin dan tahun 2021 sebesar 0,30 poin. IPM Kabupaten Balangan berada pada posisi ke 9 dari 13 kabupaten/kota se Kalimantan Selatan. Adanya perubahan sumber data angka harapan hidup pada tahun 2023 berpengaruh terhadap dinamika peringkat IPM. Berdasarkan perhitungan lama pada tahun 2022 posisi Kabupaten Balangan berada pada posisi ke 10. Pertumbuhan IPM Kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023.

Gambar 2. 23
Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota
Se-Kalimantan Selatan Tahun 2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Pertumbuhan IPM Kabupaten Balangan Tahun 2023 berada di posisi ke-4 yakni sebesar 1,07%. Pertumbuhan IPM tertinggi tahun 2023 terjadi di Kab. Tapin (1,25%), sementara pertumbuhan terendah terjadi di Kota Banjarbaru (0,53%).

Peningkatan IPM didorong oleh peningkatan semua indikator pembentuk, yaitu Angka harapan Hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran perkapita.

Tabel 2. 30
Dimensi IPM Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023

Komponen Pembentuk IPM	Pemerintah	Tahun						Dimensi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Angka Harapan Hidup	Balangan	67,37	67,59	67,72	67,85	68,13	73,69	Kesehatan
	Kalimantan Selatan	68,23	68,49	68,66	68,83	69,13	73,97	
Harapan Lama Sekolah	Balangan	12,36	12,37	12,46	12,47	12,61	12,82	Pendidikan
	Kalimantan Selatan	12,50	12,52	12,68	12,81	12,82	12,86	
	Balangan	7,04	7,27	7,55	7,69	7,85	8,03	

Komponen Pembentuk IPM	Pemerintah	Tahun						Dimensi
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Rata-rata Lama Sekolah	Kalimantan Selatan	8,00	8,20	8,29	8,34	8,46	8,55	
Pengeluaran Perkapita (ribu/tahun)	Balangan	11.442	11.557	11.452	11.500	11.659	11.888	Ekonomi
	Kalimantan Selatan	12.062	12.253	12.032	12.143	12.469	12.953	

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Faktor Penghambat

1. Dalam pencapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah terbatasnya kewenangan urusan pada Pemerintah Daerah hanya pada Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP. Sedangkan RLS tidak terbatas hanya pada jenjang PAUD, SD dan SMP namun sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan hanya bisa maksimal melaksanakan pemenuhan pelayanan pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP.
2. Dalam pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah adalah masih adanya kasus putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena masih adanya pernikahan dini pelajar, faktor ekonomi keluarga serta letak geografis Kabupaten Balangan yang masih ada daerah terpencil.
3. Dalam pencapaian Angka Harapan Hidup :
   - Kegiatan monitoring penyelenggaraan SPM belum berjalan optimal.
   - Sumber Daya Kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar masih belum terpenuhi secara jumlah maupun kompetensinya.
   - Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan atau pos pelayanan kesehatan di Desa seperti Posbintu PTM maupun pelayanan kesehatan layanan dasar lainnya.
   - masih kurangnya skrining saat awal kehamilan dan masih rendah nya deteksi risiko pada saat hamil baik dari tenaga kesehatan ataupun masyarakat.
   - kurangnya kelengkapan dari sarana dan parasarana yang di miliki bidan.
4. Dalam Pencapaian Pengeluaran Perkapita :
   - Distribusi pendapatan masyarakat yang tidak merata karena masih didominasi oleh sektor pertambangan
   - Masih rendahnya penggunaan produk lokal
   - Masih rendahnya konektivitas untuk distribusi produk dan bahan baku antar wilayah
   - Sebagian besar desa belum memiliki produk unggulan UMKM/Pertanian/Pariwisata.

- Belum adanya peta potensi hasil pertanian dan perikanan dalam mendukung perekonomian daerah
- Belum adanya pasar agro yang mendukung perputaran ekonomi daerah

Faktor Pendorong

1. Dalam pencapaian Angka Rata-rata Lama Sekolah adalah adanya dukungan program dan anggaran dari Kepala Daerah serta Adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan, yang sering berkoordinasi melaksanakan perpanjangan Program Kementerian Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah seperti Program Sekolah Penggerak, Program Kurikulum merdeka yang telah dilaksanakan di Kabupaten Balangan.
2. Dalam pencapaian Angka Harapan Lama Sekolah adalah adanya dukungan program dan anggaran dari Kepala Daerah serta adanya dukungan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dari Pemerintah Pusat melalui dana DAK yang diterima Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan.
3. Dalam pencapaian Angka Harapan Hidup :
   - Adanya Dukungan anggaran yang menjadi prioritas terhadap penyelenggaraan setiap jenis pelayanan dasar (SPM) dengan memperhatikan mutu pelayanan dasar tersebut.
   - Tersedianya sarana pendukung penyelenggaraan pelayanan dasar serta adanya dukungan sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa yang menyelenggarakan Posbindu PTM aktif.
4. Dalam Pencapaian Pengeluaran Perkapita :
   - Meningkatnya pendapatan masyarakat Balangan
   - Pemulihan ekonomi pasca pandemic covid-19 sehingga berdampak pada tumbuhnya sektor UMKM dan ekonomi kreatif
   - Adanya event-event yang melibatkan usaha local
   - Adanya kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong penggunaan produk local
   - Bantuan pemerintah daerah kepada masyarakat diberbagai sektor diantaranya pertanian, perkebunan, perikanan dan UKM

H. Stunting

Kejadian Balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang di hadapi Indonesia karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan dating. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur penurunan kejadian stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah lima tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis

sehingga anak terlalu pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

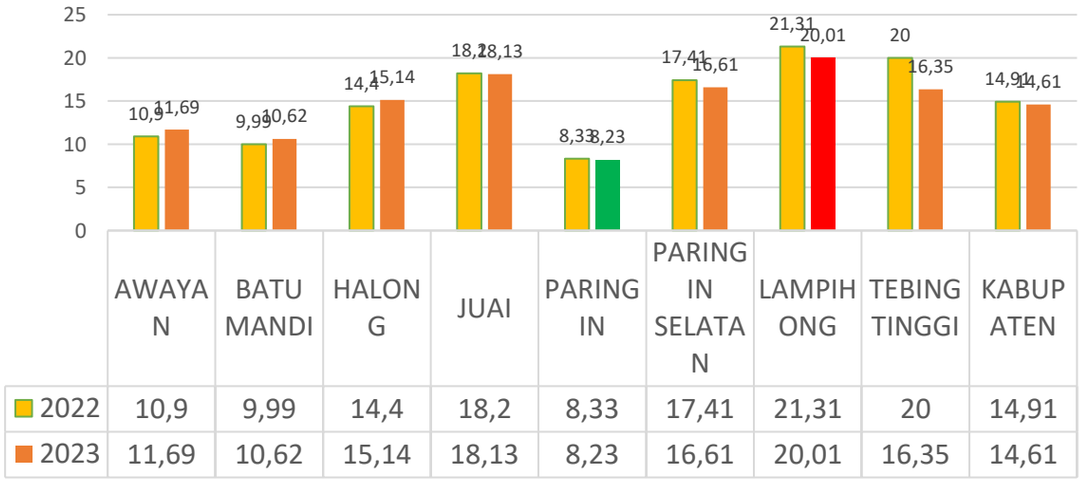
Berdasarkan hasil surveilans gizi melalui elektronik– pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e- PPGBM) Balita pendek dan sangat pendek tahun 2023 sebesar 14,61 %, dari 9.236 balita yang di entry di aplikasi e-PPGBM terdapat 1.349 balita yang pendek dan sangat pendek, hal ini memberikan gambaran masalah gizi yang bersifat kronis.

Tabel 2.31
Prevalensi Stunting

Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023
Prevalensi Stunting	14,91%	14,61%

Berdasarkan tabel diatas prevalensi stunting di tahun 2023 terjadi penurunan hanya sebesar 0,30% atau menjadi 14,61% sedangkan target yang diinginkan sebesar 14%. Berdasarkan grapik dibawah *prevalensi stunting* terendah adalah Kecamatan Paringin dan yang tertinggi adalah Kecamatan Juai, sedangkan *prevalensi stunting* yang turun di Kecamatan Paring, Paringin Selatan, Lampihong dan Tebing Tinggi.

Gambar 2.24
Grafik *Prevalensi Stunting*



Untuk menurunkan *prevalensi stunting* tidak hanya dari urusan kesehatan saja akan tetapi juga terkait berbagai urusan yaitu intervensi sensitif sebesar 70% untuk seluruh SKPD terkait dan intervensi spesifik untuk urusan Kesehatan. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 HPK dari remaja putri, Pasangan Usia Subur (PUS), calon penganting, ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas serta anak Balita. Tidak signifikannya penurunan prevalensi stunting antara lain disebabkan oleh :

1. Masih banyak ibu hamil yang kekurangan energi kronik (273 orang) dan anemia (438 orang)

2. Masih banyak balita gizi buruk (12 anak) dan balita gizi kurang (855 anak) dan Bayi Berat lahir rendah (BBLR) (178 anak)
3. Tingginya pernikahan anak (313 anak)
4. Tingginya unmet need (12,14%)
5. Rendahnya ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan (66,61%)
6. Masih banyak keluarga yang tidak akses air minum layak (89 %)
7. Rendahnya keluarga berisiko stunting mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi (1,7 %)
8. Rendahnya keluarga berisiko stunting mendapatkan promosi gemar makan ikan (3,16%)
9. Rendahnya remaja putri menerima layanan pemeriksaan HB (12,67%)
10. Belum optimalnya Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap (71,81%)
11. Rendahnya keluarga yang melaksanakan PHBS (32,66%)
12. Rendahnya pelayanan keluarga berencana pasca salin (52,99%)
13. Rendahnya keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan (17,84%)
14. Rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (7,53%)
15. Rendahnya bayi usia 6 bulan mendapat ASI ekslusif (66,42%)
16. Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan *prevalensi stunting* dengan sasaran keluarga berisko stunting khususnya untuk remaja putri, ibu hamil dan Balita. Intervensi spesifik dan sensitive yang dilakukan sebanyak 17 program dengan aktifitas kegiatan antara lain :

1. Pemberian tanaman pekarangan untuk keluarga berisiko stunting dan Pemberian makanan pengolahan ikan untuk keluarga berisiko stunting
2. Pembangunan tangka septik individu perdesaan, Pembangunan wc umum, Pembangunan reserviuer, pembangunan broncaptering, pembangunan sumur dalam terlindungi, pemasangan jaringan dan instalasi air minum
3. Penyuluhan pencegahan perkawinan usia anak/penyuluhan paar/seminar parenting
4. Sosialisasi implementasi gizi remaja dan resiko anemia pada remaja putri
5. Pelayanan konseling puspaga bagi caten dan layanan pendampingan
6. Pendampingan keluarga berisiko stunting
7. Orientasi kb pkb/pkr/bkl/oppka

8. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil anemia dan kek, balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bblr
9. Pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi kepuskesmas oleh dokter spesialis kandungan
10. Pemberian tanaman pekarangan untuk keluarga berisiko stunting dan Pemberian makanan pengolahan ikan untuk keluarga berisiko stunting
11. Pembangunan tangka septik individu perdesaan, Pembangunan wc umum, Pembangunan reserviuer, pembangunan broncaptering, pembangunan sumur dalam terlindungi, pemasangan jaringan dan instalasi air minum
12. Penyuluhan pencegahan perkawinan usia anak/penyuluhan paar/seminar parenting
13. Sosialisasi implementasi gizi remaja dan resiko anemia pada remaja putri
14. Pelayanan konseling puspaga bagi caten dan layanan pendampingan
15. Pendampingan keluarga berisiko stunting
16. Orientasi kb pkb/pkr/bkl/oppka
17. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil anemia dan kek, balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bblr
18. Pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi kepuskesmas oleh dokter spesialis kandungan

Selain upaya tersebut diatas Bapperida juga gencar mendorong SKPD untuk berinovasi terkait percepatan penurunan *prevalensi stunting* antara lain : Balangangan Lawan Stunting (Balanting) oleh Bapperida, Keluarga Sehati (Keluarga Sedia Tanaman Pekarangan Untuk Hadapi Stunting) dan Berani Gesit (B2SA Sejak Dini Untuk Generasi Bebas Stunting) oleh Dinas KP3, Kaminting (Kelola Limbah Lawan stunting) oleh Dinas PUPR, Kaminting (Kelola Limbah Lawan stunting) sedangkan dari Dinas Kesehatan beserta puskesmas yaitu Pasti BLA (Pantau Resiko Tinggi Bayi dan Balita), Pita Tambang (Pijat balita Pantau Tumbuh Kembang), Selamat pagi (Sentral Pelayanan dan Kesehatan Gizi), Kapal Tacenting (Kumpulan Pelihara Tanaman cegah stunting), Makan Apel (Mari Nyalakan Alarm Kehamilan), Kadut Gita (Kartu Data Umum Terpantau Gizi Balita), Gemar Cheting (Gerakan Cegah Stunting), Jeli KIA (Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, Jeli KIA (Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, Sepekan (Sistem Edukasi Pemenuhan Asupan Gizi Anak), Badatang (Balita dan Anaka Sehat Bebas Stunting), Badatang (Balita dan Anaka Sehat Bebas Stunting), Badatang (Balita dan Anaka Sehat Bebas Stunting), Sepekan (Sistem edukasi pemenuhan asupan gizi anak anemia), Sehati (Aksi Rematri Sehat Tanpa Anemia), Mutar (Temukan Tangani Anemia Pada Remaja Putri), Panting Gemateri (Paringin Selatan Lawan stunting Dengan Gerakan Gemar Makan Telor/Ikan Tiap Hari) dan Panting Gemateri (Paringin Selatan Lawan stunting Dengan Gerakan Gemar Makan Telor/Ikan Tiap Hari).

I. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah rasio jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di Kabupaten Balangan. Semakin tinggi TPAK, maka semakin tinggi pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa.

Tabel 2. 32
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Balangan
Tahun 2019 – 2023

Uraian	Tahun				
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
	69,63	76,50	75,38	72,54	73,16

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan 2024

Berdasarkan tabel tersebut, TPAK Kabupaten Balangan dari tahun 2019 -2023 mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami sedikit peningkatan. Hal ini memperlihatkan bahwa semakin bertambahnya pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian di Kabupaten Balangan. Peningkatan TPAK di kabupaten Balangan kemungkinan juga dapat disebabkan karena angka penduduk usia kerja banyak yang termasuk dalam golongan angkatan kerja.

Sedangkan untuk TPAK Kabupaten Balangan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 berdasarkan data BPS Kabupaten Balangan telah mengalami peningkatan menjadi 73,16 %. Artinya pada tahun 2023 di antara 100 penduduk usia kerja, terdapat 75 hingga 76 orang merupakan angkatan kerja. Sisanya 26,84 % bukan termasuk angkatan kerja seperti mereka yang sekolah dan mengurus rumah tangga.

J. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Balangan memberikan konsekuensi terhadap meningkatnya jumlah penduduk usia kerja. Pertambahan penduduk usia kerja yang tidak diiringi dengan lapangan pekerjaan yang memadai memberikan dampak peningkatan pengangguran terbuka.

Tabel 2. 33
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Balangan
Tahun 2019 – 2023

URAIAN	TAHUN				
	2019	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2.28	2,46	2,44	3,98	2,70

Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Balangan

Berdasarkan tabel 2.33 diatas, Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Balangan pada tahun 2022 sebesar 3,98 % dan terjadi penurunan pada tahun 2023 menjadi sebesar 2,70%.

Banyak fator yang mempengaruhi menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Balangan, salah satunya karena sudah berakhirnya pandemi covid-19 yang menyerang seluruh dunia serta dengan adanya Program dari Pemerintah Daerah yang mengadakan program pelatihan keterampilan, serta dengan adanya *Job Fair*. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga kerja tentunya sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menekan peningkatan angka pengangguran terbuka tersebut dengan berbagai upaya, diantaranya dengan peningkatan keterampilan pekerja dan juga memberikan informasi-informasi peluang kerja bagi masyarakat.

K. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Saat ini kebudayaan menjadi identitas suatu daerah. Perkembangan kebudayaan dimaksud sangat ditentukan oleh interaksi tiga pilar utama antara lain nilai-nilai seni budaya yang berlaku di masyarakat, kegiatan yang dilakukan oleh pemangku seni budaya atau tokoh adat dan peran pemerintah daerah.

Persoalan seni budaya adalah persoalan melestarikan dan melakukan revitalisasi budaya daerah untuk kemudian dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman sehingga dapat bersaing dengan perkembangan kebudayaan global. Untuk pengembangan seni budaya di Kabupaten Balangan maka pada tahun 2022 pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan berbagai upaya antara lain dengan melaksanakan event seni dan budaya yang bersifat langsung/tatap muka yaitu workshop musik tradisional, workshop tari tradisional, jelajah cagar budaya dan lawatan sejarah bagi siswa siswi SMP, pembinaan seni budaya yang terdiri dari seni tari pesisir, seni tari pedalaman, seni teater, seni rupa, seni kriya, seni perfilman, seni sastra dibeberapa tempat seperti sanggar seni budaya dan di SMP/SMA Kabupaten Balangan.

Selain berfokus pada seni budaya pemerintah daerah juga fokus pada olahraga untuk mempersiapkan bibit-bibit atlet yang berprestasi agar nantinya melahirkan atlet yang berpeluang untuk mendapatkan medali di berbagai kejuaraan baik daerah maupu nasional sehingga pemerintah daerah melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2022 melaksanakan pembinaan terhadap atlet muda dalam mempersiapkan POPDA dan PORPROV 2023. Terkait hal tersebut untuk lebih meningkatkan prestasi dan pembinaan atlet yang sesuai dengan prosedur latihan olahraga, maka 43 orang pelatih dari 36 cabang olahraga yang bersertifikasi diberikan Bonus, begitu juga dengan Atlet yang berprestasi sebanyak 115 atlet diberikan Bonus atas prestasinya meraih medali dalam Kejuaraan Olahraga baik Tingkat Daerah maupun Tingkat Nasional.

Dari upaya yang dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata untuk meningkatkan kompetensi pelatih dari berbagai cabang olahraga untuk membina atlet pada akhirnya sebanyak 115 atlet di Kabupaten Balangan mampu bersaing dibeberapa kejuaraan baik di daerah maupun nasional dengan medali emas sebanyak 17 medali, medali perak sebanyak 18 medali dan medali perunggu sebanyak 32 medali dari berbagai cabang olahraga antara lain angkat besi, balap motor, billiard, E-sport, gulat, judo, panahan, loncat indah, sambo, arung jeram, muaythai, pencak silat, atletik, anggar, bina raga, bola voli pasir, bridge, catur, panjat dinding, sepak takraw.

Selain memiliki 43 pembina atlet yang berlisensi untuk memberikaan pembinaan pada atlet sehingga mampu bersaing dibeberapa kejuaraan, kedepannya untuk meningkatkan peraihan medali diberbagai cabang olahraga tentu perlunya penambahan maupun pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang ada di Kabupaten Balangan khusunya untuk arena lapangan atau gedung olahraga karena atlet terbanyak dari cabang olahraga lapangan. Berikut Gedung olahraga yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2. 34
Gedung Olahraga di Kabupaten Balangan

No.	GEDUNG OLAHRAGA	ALAMAT / KECAMATAN
1	FUTSAL BSR	PARINGIN
2	FUTSAL Tahap 2	PARINGIN SELATAN
3	BULU TANGKIS	KOMP. CAHAYA MUHIBIN, PARINGIN
4	BULU TANGKIS	TANAH HABANG
5	BULU TANGKIS	LAMPIHONG
6	BULU TANGKIS	LAJAR
7	BULU TANGKIS	MURUNG JAMBU
8	BULU TANGKIS	HARAPAN BARU
9	BULU TANGKIS	BARUH BAHINU
10	BULU TANGKIS	BATUMANDI
11	BULU TANGKIS	MUARA JAYA
12	BULU TANGKIS	PULANTAN
13	BULU TANGKIS	AWAYAN
14	BULU TANGKIS	HALONG
15	BULU TANGKIS	SURYATAMA
16	BULU TANGKIS	LASUNG BATU
17	BULU TANGKIS	DAHAI
18	BULU TANGKIS	GALUMBANG, JUAI
19	BULU TANGKIS	BUNTU KARAU
20	BULU TANGKIS	BABAYU
21	BULU TANGKIS	TEBING TINGGI
22	FUTSAL	LAMPIHONG KIRI

No.	GEDUNG OLAHRAGA	ALAMAT / KECAMATAN
23	FUTSAL AFC	BARU PANYAMBARAN, HALONG
24	PANAHAN + TEMBAK	BATU PIRING, PARINGIN SELATAN
25	BULU TANGKIS	
26	BULU TANGKIS	BIHARA, AWAYAN
27	GEDUNG OLAHRAGA	TEBING TINGGI, TEBING TINGGI
28	BULU TANGKIS	HUJAN MAS, PARINGIN
29	BULU TANGKIS	HALUBAU UTARA, PARINGIN SELATAN
30	GEDUNG OLAHRAGA	LESUNG BATU, PARINGIN
31	GEDUNG OLAHRAGA	SUNGSUM, TEBING TINGGI
	SANGGAM SPORT	BATU PIRING, PARINGIN SELATAN
32	GEDUNG OLAHRAGA	
33	FUTSAL	PARINGIN KOTA, PARINGIN
34	FUTSAL	BARUH PANYAMBARAN, HALONG
35	VOLLY	AUH, TEBING TINGGI
36	VOLLY	TABUAN, HALONG
37	FUTSAL	TEBING TINGGI, TEBING TINGGI
38	OLAHRAGA	BANUA HANYAR RT 1, BATU MANDI
39	BULU TANGKIS	MAUYA, HALONG
40	FUTSAL	BARAMBAN, AWAYAN
41	FUTSAL	BANUA HANYAR, BATU MANDI
42	LAPANGAN TEMBAK DAN	JUAI RT.4, JUAI
	PANAHAN	BATU PIRING, PARINGIN SELATAN

Sumber: Disporapar Kabupaten Balangan, 2023

2.1.2.1 Pelayanan Publik

K.1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Nilai IKM Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 85,07. Pada tahun 2023 ini SKM dilakukan oleh hampir seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Balangan baik UPP ataupun non UPP. Dari Tabel di atas terlihat masih ada beberapa SKPD/UPP yang menyelenggarakan Survey SKM bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan survey masih dilakukan dalam 1 Tahun sekali. Selain itu, ada satu SKPD yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang tidak melaporkan capaian SKM semester 1. Sebagai bentuk evaluasi SKPD pelaku SKM harus melakukan input data kinerja dan data realisasi kinerja atas janji perbaikan layanan yang mereka lakukan melalui E-Kino (Aplikasi Kinerja Organisasi) yang memuat *feedback* hasil perbaikan janji layanan atas laporan IKM tahun sebelumnya dan janji perbaikan tersebut dilakukan pemantauan oleh Bagian Organisasi secara online.

Untuk melakukan peningkatan Nilai SKM Pemerintah Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan yang menghasilkan beberapa kinerja yakni adanya beberapa kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup terkait pelayanan publik sebagai

tindaklanjut UU Nomor 25 Tahun 2009, adanya Roadmap Reformasi Birokrasi Pemda Balangan dimana pelayanan publik merupakan salah satu dari 8 area perubahan, adanya komitmen SKPD UPP untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada anggaran tahun 2023 ini telah dianggarkan pembangunan Mall Pelayanan Publik, adanya SOP Pelayanan Publik sebagai turunan dari Proses Bisnis dan adanya komitmen untuk pemenuhan data kepatuhan pelayanan publik dari ombudsman.

Adapun kendala yang masih dihadapi antara lain adalah masih banyak sarana prasarana yang belum memadai pada SKPD UPP sesuai standar dalam IPP sehingga belum bisa memberikan pelayanan prima seperti tersedianya ruangan khusus pengaduan layanan, ruangan khusus laktasi, dan lain-lain, masih belum terbentuknya Mall Pelayanan Publik (MPP), masih belum optimalnya tindaklanjut rekomendasi perbaikan janji layanan sesuai

indeks kepuasan masyarakat khususnya pada unsur layanan yang masih rendah, masih belum terlaksananya evaluasi internal SKPD atas SOP pelayanan publik masing-masing SKPD secara triwulan dan masih belum banyak SKPD yang memiliki inovasi yang kontinue dan direplikasi oleh unit pelayanan publik lainnya di Balangan. Akan tetapi dengan adanya gagasan Kepala Daerah dalam pemberian reward atas inovasi ASN baik dalam bentuk uang

Tabel 2. 35
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten Balangan
Tahun 2019 -2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai IKM	84,59	82,53	81,05	84,07	85,07

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2023

Berdasarkan data pada tabel di atas, setiap tahunnya kabupaten Balangan telah terdapat survei mengenai IKM.Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai indeks kepuasan layanan masyarakat pada dua tahun terakhir menunjukan penurunan. Pada tahun 2019 telah mencapai nilai indeks tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 84,59, sedangkan untuk tahun 2023 yakni sebesar 85,07 dengan kualitas mutu B dan berada pada kategori Baik. Berdasarkan tabel diatas IKM Kabupaten Balangan untuk tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2021, yaitu terjadi kenaikan sebesar 3,02 poin atau dari 81,05 menjadi 84,07. Terkait IKM tersebut didapatkan dari rata-rata hasil survey kepuasan masyarakat di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Balangan yang dilaksanakan di 43 SKPD atau Unit Kerja yang melaksanakan pelayanan. Berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat dari 43 SKPD atau Unit Kerja tersebut didapatkan nilai IKM terendah pada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup sebesar 73,46 dengan kualitas mutu B dengan kategori Baik, sedangkan nilai IKM tertinggi di Kecamatan Lamiphong dengan nilai 91,91 dengan kualitas mutu A dengan kategori Sangat Baik. Nilai ini didapat dari hasil

kuesonir yang dibagikan kepada masyarakat penerima pelayanan di 43 SKPD atau Unit Kerja dengan menggunakan unsur pelayanan yang berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB no.14 Tahun 2017. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga tetap dapat bertahan dengan kualitas mutu B antara lain memperbaiki fasilitas dan sarana pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), inovasi pelayanan, meningkatkan kinerja sumber daya manusia, meningkatkan arahan dan dorongan yang diberikan kepada unit penyelenggara pelayanan yang melaksanakan survey kepuasan masyarakat.

Harapannya, adanya penilaian kinerja pelayanan publik setiap tahunnya, Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya untuk dapat melakukan tindak lanjut terhadap hasil penilaian yang ada. Dilakukan berbagai pembenahan dengan evaluasi pelayanan yang bertujuan supaya pelayanan publik yang ada dapat terus membaik dan nilai IKM pun dapat terus meningkat.

K.2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2020 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, Tim Penilai Nasional (TPN) telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Balangan. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Evaluasi Reformasi Birokrasi dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 739 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Evaluasi Reformasi Birokrasi Tahun 2023. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah penekanan pada reformasi birokrasi berdampak dan kolaboratif.

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dalam rangka mencapai sasaran Terciptanya tata Kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif serta terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas RB di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, kesimpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Indeks RB Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023 adalah 70,01 dengan kategori **"BB".** Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 36

Rincian Hasil Evaluasi Indeks RB Pemerintah Kabupaten Balangan

No	Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	57,81
B	RB Tematik	20	12,20
C	Indeks RB	120	70,01
			BB

Hasil evaluasi tahun 2023 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Demikian laporan hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi birokrasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi.

A. Persentase PAD terhadap Pendapatan

Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan dalam kurun waktu tahun 2017 -2023 menunjukkan fluktuatif, dari sebesar 1.112 miliar tahun 2017, 1.287 miliar tahun 2018, 1.514 miliar tahun 2019, 1,171 miliar tahun 2020, Rp 1.085 miliar pada tahun 2021, tahun 2022 di angka Rp. 1.785 miliar dan pada tahun 2023 naik signifikan di angka Rp. 2,760 miliar.

Gambar 2.25
Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan 2017-2023



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
PENDAPATAN ASLI DAERAH	88.095.992.053,00	68.679.415.232,00	82.522.529.225,07	86.176.610.153,81	130.605.127.359,71	92.767.033.520,54	137.007.406.232,01
PENDAPATAN TRANSFER	1.015.138.767.329,00	1.205.782.807.938,00	1.408.720.240.239,00	1.048.781.967.969,00	928.215.278.041,00	1.686.057.079.199,00	2.622.936.320.422,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	8.954.501.429,00	12.741.560.000,00	23.005.955.503,00	36.212.413.348,00	26.657.242.826,00	6.539.410.279,00	600.000.000,00
TOTAL	1.112.189.260.811,00	1.287.202.983.170,00	1.514.248.723.967,07	1.171.170.991.467,81	1.085.377.648.226,71	1.785.363.522.998,54	2.760.543.725.654,01

Sumber : APBD Perubahan 2023, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024

Pendapatan Daerah Kabupaten Balangan masih didominasi oleh Pendapatan Transfer. PAD pada Tahun 2017 sebesar Rp. 88,095 miliar, naik menjadi sebesar Rp. 137,007 miliar pada tahun 2023 dengan pertumbuhan naik sebesar 64,3 % pada tahun 2022-2023 disebabkan kenaikan cukup signifikan pada pos Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Untuk tahun 2023 selain pada pos lain-lain PAD yang sah semuanya terjadi kenaikan, di angka 78,44 % pada pos pendapatan pajak daerah dan adanya pertumbuhan yang cukup tinggi pada pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 98,2 % seperti telihat pada gambar grafik berikut.

Gambar 2.26
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Balangan 2017-2023



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Pajak Daerah	10.910.153.810,00	11.015.165.463,00	13.420.168.379,00	13.378.574.067,00	11.417.071.564,50	12.308.860.393,50	13.907.676.851,00
Pendapatan Retribusi Daerah	1.919.401.286,00	1.809.629.386,00	1.865.673.675,00	1.675.985.562,00	1.890.123.585,00	1.908.662.405,00	2.366.139.331,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	14.609.202.938,00	15.713.201.757,00	6.896.245.816,00	9.827.731.257,00	12.391.951.413,00	13.573.275.479,00	14.874.367.772,00
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	60.657.234.019,00	40.144.418.626,00	60.640.440.655,07	61.294.319.267,81	104.805.980.827,21	64.976.235.243,04	105.859.221.278,01
TOTAL	88.095.992.053,00	68.679.415.232,00	82.522.528.225,07	86.176.610.153,81	130.505.127.389,71	92.767.033.520,54	137.007.405.232,01

Sumber : APBD Perubahan 2023, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024

Pada tahun 2023 struktur Pendapatan Transfer terdiri atas pos Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya serta Transfer Pemerintah Provinsi dengan jumlah sebesar Rp 2.622 miliar.

Gambar 2.27
Pendapatan Transfer Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023



	2022	2023
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	1.462.584.501.792,00	2.380.860.170.980,00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA	121.169.306.240,00	129.064.886.300,00
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	102.303.271.167,00	113.011.263.142,00
TOTAL	1.686.057.079.199,00	2.622.936.320.422,00

Sumber : APBD Perubahan 2023, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024

Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp. 936,8 miliar, hal ini karena terjadi penambahan jumlah transfer pemerintah pusat-dana perimbangan sebesar Rp. 918,2 miliar atau mencapai 162 %. Khusus pos Pendapatan Hibah sebenarnya hanya mengalami penurunan dari 6,537 miliar pada tahun 2022 menjadi 600 miliar pada tahun 2023 seperti pada gambar berikut.

Gambar 2.28
Lain-Lain Pendapatan yang Sah Kabupaten Balangan 2017-2023



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pendapatan Hibah	550.000.000,00	12.741.560.000,00	23.005.955.503,00	18.000.810.000,00	6.776.710.373,00	6.537.075.079,00	600.000.000,00
Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-	-
Pendapatan Lainnya	8.404.501.429,00	-	-	18.211.603.345,00	19.880.532.455,00	2.335.200,00	-
TOTAL	8.954.501.429,00	12.741.560.000,00	23.005.955.503,00	36.212.413.345,00	26.657.242.828,00	6.539.410.279,00	600.000.000,00

Sumber : APBD Perubahan 2023, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024

B. Opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

Audit eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas mandiri. Berdasarkan laporan Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Balangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 adalah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP adalah opini terbaik setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Opini ini berarti laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintahan Kabupaten Balangan sudah sesuai dengan pedoman atau standar akutansi keuangan yaitu laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standard umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prisip akutansi yang berlaku dan konsisten.

Harapannya WTP ini akan selalu dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan ini sudah dibuktikan dari upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mempertahankan Opini BPK dengan WTP 11 (sepuluh) tahun berturut-turut.

C. Predikat SAKIP

Tabel 2. 37
Capaian Predikat LAKIP Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2023

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai SAKIP	56,83 (CC)	62,64 (B)	65,45 (B)	66,04 (B)	66,67 (B)	67,04 (B)	70,17 (BB)

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan, 2023

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan memperoleh nilai 70,17 atau predikat BB dengan komposisi terdiri dari perencanaan kinerja (23,19), Pengukuran Kinerja (20,21), Pelaporan Kinerja (10,99), dan Evaluasi Internal (15,78). Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 38
Rincian Penilaian hasil evaluasi tahun 2023

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	23,19
2	Pengukuran Kinerja	30	20,21
3	Pelaporan Kinerja	15	10,99
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15,78
Nilai Hasil Evaluasi		**100**	**70,17**
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			**BB**

Sumber : Kemenpan RB, 2024

Hasil evaluasi atas akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Balangan menunjukkan bahwa nilai sebesar 70,17 dengan predikat “BB”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Sangat Baik”, yaitu Implementasi SAKIP sudah sangat baik pada Pemerintah Daerah dan Sebagian besar unit kerja, ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, serta memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Perencanaan kinerja**

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

D. Belum seluruh rumusan sasaran strategis dan indikatorkinerja pada perencanaan instansi pemerintah memenuhi kriteria yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis;

E. Pemerintah Kabupaten Balangan telah Menyusun penjejangan kinerja dengan berpedoman pada Permen PANRB 89 tahun 2021, namun penjejangan yang dilakukan masih perlu dilakukan penyempurnaan, utamanya pada kinerja pada level tektikal yang belum sepenuhnya menggambarkan hubungan sebab akibat serta memiliki rumusan kinerja yang sama/ redundant dengan kinerja di atasnya;

F. Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara menyeluruh pada setiap perangkat daerah sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan yang ada belum tergambar dengan baik;

G. Aktifitas dalam rencana aksi yang disusun oleh beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya relevan dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama pemerintah daerah.

2. **Pengukuran Kinerja**

Pemerintah Kabupaten Balangan telah rencana aksi yang digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja, karena terdapat target yang di-breakdown secara triwulanan. Dan pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara elektronik di ekino.baIangankab.go.id untuk memonitoring capaian kinerja PD dan monev.balangankab.go.id untuk memonitoring pelaksanaan program dan kegiatan PD. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja di antaranya sebagai berikut:

a. Data kinerja yang menunjang pengukuran kinerja belum sepenuhnya relevan dengan formulasi perhitungannya, sebagai contoh, pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki data

kinerja “Indeks Infrastruktur Urusan ke PUPR", namun formulasi perhitungannya menjadi tidak relevan karena proporsi perhitungan indeksnya tidak terbentuk utuh;

b. Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik, namun belum terlihat komitmen dari seluruh PD untuk mau memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik. Hal ini terlihat dari masih terlambatnya pengisian data kinerja yang disampaikan oleh PD dan juga belum terlihat feedback perbaikan dari pimpinan PD jika terdapat pencapaian kinerja yang tidak tercapai;
c. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan program dan kegiatan yang tidak berdampak peningkatan pencapaian kinerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa target kinerja yang realisasinya tidak tercapai tiap tahunnya, namun yang program dan kegiatan yang dilakukan tetap sama;

3. Pengukuran Kinerja

Dari sisi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagaimana berikut :

a. Sistem pengukuran kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi terjadinya ketidaksesuaian antara kinerja unit kerja dengan kinerja individu pegawai;
b. Dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat data kinerja yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;
c. Setiap pegawai sudah merumuskan kinerja individu masing-masing yang tertuang pada sasaran kinerja pegawai (SKP), namun SKP yang disusun belum sepenuhnya memberikan gambaran kinerja individu yang menunjang pencapaian kinerja organisasi.

4. Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor penghambat/pendukung. Bberapa unit kerja memiliki informasi tersebut sebagai dasar pelaporan, namun ada juga yang tidak. Hal ini mengindentifikasikan implementasi standar pelaporan belum secara merata pada seluruh unit kerja;
b. Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja pemerintah daerah dan unit kerja belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan.

5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi internal kepada Perangkat Daerah, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan pencapaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian evaluasi kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai;
b. Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan atau rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.

6.Akuntabilitas Kinerja Penanggulangan Kemiskinan

a. Berdasarkan data SIPD, besaran alokasi belanja dengan tagging penanganan kemiskinan ekstrem pada Pemerintah Kabupaten Balangan adalah sebesar Rp. 287.376.020.624 atau 13,90% dari total pos belanja APBD. Alokasi tersebut digunakan untuk membiayai 101 Sub Kegiatan;
b. Belanja terbesar penanganan kemiskinan ekstrem dialokasikan pada Sub Kegiatan "Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian" yaitu sebesar 27,26% dan terkecil adalah pada Sub Kegiatan "Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT" yaitu sebesar 0,33928%;
c. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikeluarkan pada September 2023, tingkat kemiskinan Kabupaten Balangan adalah sebesar 5,22% atau turun 0,61% dibandingkan dengan tahun 2022;
d. Hasil analisis tim evaluator masih menemukan banyaknya sub kegiatan yang tidak terkait langsung dengan kemiskinan ekstrem, serta alokasi anggaran pendukung (konsumsi rapat, biaya operasional, perjalanan dinas dan lainnya) yang masih cukup besar.

Inspektorat Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di seluruh PD. Dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sudah menggunakan pedoman evaluasi sendiri, namun pedoman yang digunakan belum mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal di antaranya sebagai berikut:

a. Laporan hasil evaluasi belum memberikan rekomendasi yang cukup untuk memperbaiki kualitas implementasi AKIP pada setiap PD, hal ini terlihat dari ketidaksesuaian antara hasil rekomendasi evaluasi dengan catatan penilaian hasil

evaluasi;

b. Monitoring atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi internal yang disampaikan belum dilakukan secara berkala, sehingga belum terjadi perbaikan pada pelaksanaan akuntabilitas kinerja pada PD.

Selanjutnya dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, berikut rekomendasi beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap tingkat organisasi dengan memperhatikan berbagai kaidah dalam penyusunan dokumen perencanaan kinerja seperti memastikan tujuan dan sasaran strategis telah berorientasi hasil (result oriented), serta memastikan kualitas indikator kinerja agar memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound) terutama pada kriteria spesifik, relevan dan terukur;
2. Menyempurnakan penjenjangan kinerja yang telah disusun dengan memastikan penjabaran hubungan sebab akibat antar jenjang kinerja sedari level strategis hingga ke operasional sehingga bisa menggambarkan bagaimana keterlibatan setiap individu dalam mendukung kinerja organisasi;
3. Mendorong pemanfaatan pohon kinerja yang telah disusun dengan menuangkannya ke dalam dokumen perencanaan, sehingga keselarasan antara pohon kinerja dan dokumen perencanaan dapat tergambar dengan baik;
4. Meningkatnya kualitas rencana aksi pada setiap Perangkat daerah agar memuat aktivitas yang irrelevant dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama pada pemerintah daerah;
5. Mengintegrasikan seluruh sistem pengukuran kinerja baik tingkat unit kerja dan individu pegawai sehingga akan terjaga kesesuaian antara kinerja unit kerja dan kinerja individu pegawai;
6. Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;
7. Memastikan perumusan kinerja individu setiap pegawai benar-benar terkait dengan kinerja organisasi yang tergambar pada matriks pembagian peran hasil kemudian memastikan hasil dari matriks tersebut dituangkan ke dalam SKP sehingga dapat dipastikan kinerja individu menunjang kinerja organisasi;
8. Mengimplementasikan standar pelaporan kinerja berdasarkan Permenpan Nomor 53 Tahun 2024 secara merata pada setiap unit kerja dengan memastikan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskripstif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja;

9. Memanfaatkan informasi kinerja yang ada dalam laporan kinerja perangkat daerah maupun unit kerja sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan target, strategi serta aktivitas dan diharapkan agar dituangkan dalam dokumen perencanaan ke depan, sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja kedepan, terkhusus kinerja yang memiliki realisasi rendah di tahun sebelumnya;
10. Mendorong hasil evaluasi akuntabilitas kinerja untuk dapat memberikan gambaran langkah-langkah perbaikan nyata untuk meningkatkan pencapaian seluruh target kinerja;
11. Memastikan bahwa temuan dan rekomendasi yang diberikan saat evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar menggambarkan hal yang menjadi kekurangan dan memberikan solusi yang efektif yang perlu dilakukan guna meningkatkan kualitas implementasikan SAKIP di setiap Perangkat Daerah;
12. Terkait dengan tema kemiskinan, Pemerintah Kabupaten Balangan agar menyempurnakan pohon kinerja kemiskinan yang sudah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lapangan yang menyebabkan kemiskinan di wilayah Kabupaten Balangan, sehingga dapat diketahui permasalahan kinerja mana saja yang perlu menjadi fokus utama dalam pengentasan kemiskinan;
13. Mendorong keterlibatan seluruh stakeholder di wilayah Kabupaten Balangan, baik internal Pemda maupun eksternal, dengan berdasarkan informasi crosscutting dan strategi kinerja yang sudah disusun berdasarkan pohon kinerja kemiskinan yang dimiliki;
14. Pimpinan Daerah beserta Bappeda agar melakukan reviu atas seluruh program, kegiatan serta aktivitas yang ada beserta anggarannya dengan memanfaatkan pohon kinerja kemiskinan yang telah disusun, sehingga dapat diketahui sejauh mana perencanaan dan penganggaran yang telah direncanakan dapat berdampak dalam menurunkan kemiskinan.

D. Tingkat Maturitas SPIP

Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah mengamanatkan bahwa kepala perangkat daerah wajib melakukan penilaian risiko. Hal ini sejalan dengan tujuan organisasi perangkat daerah yang sudah seharusnya dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Selanjutnya Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah menetapkan target Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Level 3 sebagai salah satu indikator keberhasilan Proyek Prioritas Penguatan Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Organisasi. BPKP memiliki target maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Level 3 pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah

Daerah (K/L/D) sebagai kelanjutan dari target penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP yang sebelumnya tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019. Untuk mengetahui tingkat maturitas penyelengggaraan SPIP dilakukan penilaian implementasi unsur dan sub unsur SPIP.

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2022/2023 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Kabupaten Balangan berada pada level "terdefinisi" atau tingkat 3 dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar "3,202". Dengan tingkat maturitas "terdefinisi", maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif. Level tersebut merupakan hasil QA (Quality Assurance) atas penilaian maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan. Bapperida bersama Inspektorat Kabupaten Balangan telah melaksanakan pembinaan ke SKPD mengenai penyusunan SPIP dan membuat database dokumen atas hasil penilaian maturitas yang akan dijadikan referensi dalam penilaian maturitas SPIP lingkup Kabupaten Balangan. Disamping itu Inspektorat Kabupaten Balangan juga telah melakukan evaluasi secara berkala atas efektifitas kebijakan dan implementasi rencana tindak pengendalian secara berkesinambungan serta memiliki program kerja pengawasan yang berbasis resiko.

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat "terdefinisi" adalah perlu melakukan "finalisasi penyusunan kebijakan dan prosedur/sosialisasi atau diseminasi kebijakan dan prosedur kepada seluruh pegawai/mengintegrasikan dan menginternalisasikan pengendalian intern sebagai proses yang melekat/integral dengan proses kegiatan lainnya/evaluasi secara berkala atas efektivitas prosedur pengendalian/pemantauan yang terintegrasi dalam kegiatan secara otomatis".

Tabel 2. 39
Capaian Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Balangan Tahun 2017-2023

Tahun	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Maturitas SPIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat Kabupaten Balangan Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian lebih rinci terhadap kesesuaian skor dan kriteria penilaian, kami menemukan beberapa kelemahan yang menyebabkan

berkurangnya nilai yang perlu menjadi *area of improvement* (AOI) Pemerintah Kabupaten Balangan, yaitu sebagai berikut:

1) Maturitas Penyelenggaraan SPIP

a) Penetapan Tujuan

Kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan sasaran strategis/program tingkat OPD belum sepenuhnya berorientasi hasil. Selain itu, terdapat indikator kinerja tingkat pemerintah daerah dan tingkat OPD yang tidak tepat dan tidak cukup mengukur sasaran yang akan dicapai serta terdapat target kinerja tingkat pemerintah daerah dan tingkat OPD yang belum memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant,* dan *time-bound goals (SMART)*.

b) Struktur dan Proses Kelemahan pada:

(1) Sub unsur 1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika, disebabkan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan infrastruktur anti korupsi yang mencakup tiga proses pengelolaan risiko korupsi, yakni cegah, deteksi, dan respons, belum dikelola secara memadai;

(2) Sub unsur 1.3 Kepemimpinan yang Kondusif, disebabkan pimpinan organisasi belum menyediakan sumber daya yang memadai untuk penerapan manajemen risiko, belum menggunakan informasi terkait risiko sebagai dasar pengambilan keputusan (baik risiko operasional maupun strategis), belum mendorong penerapan manajemen risiko sebagai bagian dari indikator penilaian kinerja, dan belum terdapat program antikorupsi yang didukung dengan penyediaan alokasi sumber daya yang secara eksplisit memadai, baik anggaran, personil, dan sarana prasarana.

(3) Sub unsur 1.6 Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, disebabkan pegawai belum mendapatkan fasilitas untuk memperoleh *workshop* ataupun diklat terkait manajemen risiko dan pencegahan kejahatan keuangan.

(4) Sub unsur 1.8 Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, disebabkan bahwa dalam menjalin hubungan kerja yang baik, belum seluruh risiko kemitraan, pencegahan, dan pengendalian kejahatan keuangan telah diidentifikasi dan dikelola;

(5) Sub unsur 2.1 Identifikasi Risiko, disebabkan proses manajemen risiko belum melekat pada proses bisnis pemerintah daerah;

(6) Sub unsur 2.2 Analisis Risiko, disebabkan tindak pengendalian belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan risiko dan belum seluruhnya diimplementasikan;

(7) Sub unsur 4.1 Informasi yang Relevan, disebabkan pengomunikasian register risiko dan rencana tindak pengendalian kepada para pihak terkait belum sepenuhnya dilakukan;

(8) Sub unsur 4.2 Komunikasi yang Efektif, disebabkan komunikasi yang efektif dengan internal dan eksternal secara terstruktur dan berkala belum dievaluasi;

(9) Sub unsur 5.1 Pemantauan Berkelanjutan, disebabkan proses manajemen risiko belum ditelaah secara memadai dan dilakukan monitoring berkala atas keterjadian risiko beserta efektivitas rencana tindak penanganan risiko yang telah disusun; dan

(10) Sub unsur 5.2 Evaluasi Terpisah, disebabkan reviu independen oleh pihak di luar organisasi/APIP terhadap proses manajemen risiko belum dilakukan sampai dengan risiko strategis OPD maupun pemerintah daerah.

c) Pencapaian Tujuan

(1) Sasaran strategis tingkat pemerintah daerah dan sasaran strategis/program tingkat OPD belum seluruhnya berorientasi hasil;

(2) Terdapat indikator kinerja tingkat pemerintah daerah dan OPD yang tidak rutin;

(3) Terdapat target kinerja tingkat pemerintah daerah dan tingkat OPD yang belum memenuhi kriteria SMART; dan

(4) Terdapat temuan berulang atas keandalan pelaporan keuangan, pengamanan atas aset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

E. Inovasi

Berdasarkan tabel persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 sebesar 100% atau sebanyak 32 SKPD sedangkan jumlah inovasi yang terjaring sebanyak 355 inovasi, baik yang masih berupa gagasan atau ide maupun inovasi yang sudah jalan. Sebanyak 277 inovasi yang di uploud atau dilaporkan oleh admin inovasi pada Sistem Inovasi Daerah (Sinovda) dan hanya 24 inovasi yang memenuhi kriteria untuk ikut dalam ajang Bailang tahun 2023. Dari hasil verifikasi dan validasi menghasilkan sebanyak 10 karya inovasi yang masuk kedalam tahapan presentasi dan penilaian inovasi, yang sudah melakukan Presentasi karyanya pada tanggal 04 September 2023. Dari hasil penilaian Tim Juri pada saat presentasi tersebut di hasilkan 6 karya inovasi dari SKPD dan BLUD/UPT Puskesmas dengan predikat Terbaik I,II dan III, Juara harapan I, II dan harapan III. Upaya fasilitasi penerapan inovasi bertujuan untuk meningkatkan capaian indeks inovasi daerah sebagai bentuk diseminasi dalam mendorong budaya inovasi di setiap perangkat daerah.

Adapun permasalah Umum yang dihadapi dalam pemenuhan indeks inovasi daerah di kabupaten Balangan diantaranya :

1. Belum optimalnya penerapan *Culture Of Innovation* dilingkungan kerja
2. Belum optimalnya metode penjaringan inovasi secara terpadu yang didukung oleh pemangku kebijakan dan stakeholder.

3. Belum adanya pemicu yang menarik munculnya inovasi dalam bentuk reward dan punishment.
4. Kurangnya kesadaran dalam pemenuhan indikator dan kurangnya pengetahuan dalam membuat proposal terutama rancang bangun inovasi dan probis inovasi
5. Belum terciptanya ekosistem inovasi melalui kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah, praktisi, akademisi, swasta, media masa dan masyarakat sebagai aktor inovasi.

Permasalahan khusus pelaksanaan Inovasi yang dihadapi dalam pemenuhan indeks inovasi daerah di kabupaten Balangan diantaranya :

1. Jumlah inovasi terjaring masih kurang
   a. Terbatasnya waktu penjaringan inovasi dan ketidaktepatan *schedule* pelaksanaan
   b. Kapasitas tim penjaringan inovasi daerah perlu ditingkatkan lagi
   c. Kurang luasnya sasaran penjaringan inovasi
2. Pengadministrasian inovasi masih perlu ditingkatkan lagi
   a. Rendahnya kemampuan penyusunan proposal dan kedisiplinan pengumpulan bukti/data dukung inovasi
   b. Peran dan keterlibatan anggota tim Klinik Inovasi Balangan masih kurang
   c. Itensitas pendampingan oleh tenaga ahli dan kemendagri masih kurang
3. Sarana dan prasarana inovasi masih kurang
   a. Perlu dibangun lagi database inovasi yang terintegrasi, mudah diakses, dan mengikuti perkembangan aplikasi inovasi nasional
   b. Perlunya sarana pembuatan video atraktif
4. Rendahnya budaya inovasi di Kabupaten Balangan
   a. Upaya penyadaran, motivasi secara intensif dan terus menerus
   b. Diperlukan dukungan komitmen dari pengambil kebijakan/pimpinan
   c. Perlunya pembaharuan komitmen dari calon innovator secara terus menerus
5. Rendahnya tingkat replikasi inovasi Kabupaten Balangan
   a. Sarana publikasi inovasi masih kurang
   b. Kesempatan/ peluang melakukan MOU replikasi perlu ditingkatkan lagi
6. Belum terjaringnya inovasi dari masyarakat, sekolah, desa, DPRD
   a. Skor inovasi Kabupaten Balangan perlu ditingkatkan
   b. Kapabilitas inovator dan admin inovasi perlu ditingkatkan melalui pendampingan tenaga ahli Kemendagri
   c. Jumlah keterampilan SDM pendukung inovasi perlu ditingkatkan

Sehingga kedepannya perlu lebih didorong lagi indeks inovasi Kabupaten Balangan melalui berbagai upaya diantaranya adalah :

a) Tahapan Pemenuhan indeks inovasi daerah tahun 2023

Dalam rangka pemenuhan indeks inovasi daerah tahun 2023 sebagai bentuk disseminasi dalam mendorong budaya inovasi di setiap organisasi perangkat daerah (OPD) serta meningkatkan capaian indeks inovasi daerah Kabupaten Balangan ada beberapa langkah yang dilakukan :

1. Penandatanganan Pernyataan Komitmen semua Kepala SKPD Penandatangan pernyataan komitmen inovasi oleh semua kepala SKPD dilaksanakan pada saat kegiatan bimbingan teknis inovasi daerah pada tanggal 9 Mei 2023. Semua kepala SKPD berkomitmen akan mendorong budaya inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di SKPd masing-masing melalui :
    a. Penerapan Culture Of Innovation dengan berperan aktif dalam pemenuhan lndeks lnovasi Daerah melalui Lomba lnovasi Salangan (SAILANG) dan Penilaian Innovative Government Award (IGA) oleh Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia;
    b. Melaporkan inovasi pada Sinovda Kabupaten Salangan Minimal 2 (dua) inovasi dengan nilai kematangan minimal 94 dan 3 (tiga) inovasi untuk persiapan tahun berikutnya dengan melaporkan 6 indikator wajib (Regulasi lnovasi Daerah, Ketersediaan SOM lnovasi, Dukungan Anggaran, Kecepatan Penciptaan lnovasi, Kemudahan Proses lnovasi dan Video lnovasi), total inovasi yang wajib dilaporkan minimal 5 (lima) inovasi;
    c. Melakukan pengembangan dan pembaharuan inovasi yang sudah ada atau sudah berjalan; dan
    d. Melakukan sosialisasi inovasi melalui media sosial dan media massa
2. Pembaharuan Tim Klinik inovasi dengan membentuk Tim Pelaksana, Aktor dan Jejaring Klinik Inovasi Balangan (Klinik Inoba) tahun 2023 berdasarkan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/134/Kum TAHUN 2023
3. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi inovasi daerah;
4. Menerbitkan surat perintah Bupati Balangan perihal Penginputan Data Dukung Inovasi Tahun 2023 (Surat No.073/606/Bappedalitbang tanggal 12 April 2024);
5. Melaksanakan Bimtek Inovasi Daerah dimana di tahun 2023 diikuti oleh 100 orang (pamong/admin/innovator inovasi)
6. Melakukan replikasi inovasi dengan daerah lain tahun 2023 dengan Kabupaten Tanah Laut;
7. Mengikuti ajang Kalsel Inovation Award (KIA) 2023 dengan mengikutkan 2 (dua) inovasi unggulan;
8. Melaksanakan Sosialisasi dan Penjaringan Inovasi Daerah Lingkup SKPD; Kecamatan, RSUD dan UPT Puskesmas;

9. Menyelenggarakan Lomba Inovasi Balangan (BAILANG) 2023 (Bulan Maret – Agustus 2023) diikuti oleh 24 peserta dan 10 besar inovasi sebagai berikut :

Tabel 2. 40
Top 10 Besar Bailang Tahun 2023

No.	Nama Inovasi	Pengusul
1	LAYAR SI BALANG (Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SI PETRUK)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Pengumpulan Data Wisatawan (PANDAWA)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4	Aplikasi E-Kino (Elektronik Kinerja Organisasi) Reformasi Birokrasi)	Sekretariat Daerah
5	" KULARAKAT " (Kolaborasi Usulan, Laporan Dan Aduan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Terpadu)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
6	LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa)	Kecamatan Tebing Tinggi
7	Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Balangan Terpadu (SEPEDA BARU) V.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
8	PAPAH MODIS DALANG BATIK (Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik)	RSUD Datu Kandang Haji
9	GALUH SANGGAM (Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai Dalam Genggaman)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	SMART KIDS (Kerjasama Penerbitan Kia Dengan Sekolah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Bapperida Kabupaten Balangan Tahun 2024

Hasil dari penilaian Lomba Inovasi Balangan (Bailang) 2023 dietapkan dengan Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/579/Kum Tahun 2023 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan Lomba Inovasi Balangan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Pelaksanaan pemberian penghargaan Lomba inovasi Balangan kepada Juara 1,2 dan 3 , Juara Harapan 1, 2 dan 3, berupa Piala, Piagam penghargaan dan Uang pembinaan pada tanggal 13 November 2023 bertepatan dengan peringatan pelaksanaan hari Pahlawan.

b) Kemanfaatan Indeks Inovasi Daerah

Manfaat dari terpenuhnya indeks inovasi daerah Kabupaten Balangan adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Balangan

a. Mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah
b. Sarana dalam mengakselerasikan kinerja terhadap kebutuhan masyarakat terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
c. Meningkatnya capaian indeks inovasi nasional sebagai salah satu indikator peningkatan kinerja pemerintah, kesejahteraan PNS melalui besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat
d. Sebagai media apresiasi dan penghargaan bagi inisiator dan/atau innovator baik yang bersumber dari perangkat daerah, pemerintahan desa dan masyarakat.

2. Bagi inisiator dan/ atau innovator adalah merupakan acuan dalam membangun dan mengembangkan inovasi yang dimiliki serta menjadi sarana ukur dalam mencapai kualitas inovasi yang dibangun.
3. Bagi masyarakat sebagai media sosialisasi tentang diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam pembangunan daerah.
4. Bagi stakeholder sebagai media sosialisasi tentang diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif sehingga menumbuhkan kemitraan-kemitraan baru yang sinergi terhadap pembangunan di daerah.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

A. Urusan Pendidikan

Urusan pendidikan adalah urusan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan manusia. Keberhasilan pendidikan akan berakibat pada peningkatan kualitas dasar pelaku pembangunan yang berdampak pada keberhasilan pembangunan.

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Tabel 2. 41
Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Balangan Tahun 2023

Indikator	2021	2022	2023
Harapan Lama sekolah	12,47 tahun	12,61 tahun	12,82 tahun

Sumber : BPS Kabupaten Balangan, 2023

Berdasarkan tabel diatas HLS Kabupaten Balangan tahun 2023 yang di rilis oleh BPS pada Desember 2023 dalam Berita Resmi BPS terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu meningkat menjadi 12,82 tahun atau meningkat sebesar 0,21 tahun. HLS 12,82 tahun artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,82 tahun atau setara dengan diploma semester dua. HLS Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berada diperingkat 9 se Propinsi kalimantan Selatan.

Walaupun HLS mengalami peningkatan namun sangat kecil, hal ini dikarenakan masih adanya kasus putus sekolah, putus sekolah pada jenjang pendidikan SD, SDLB & MI, jenjang SMP, SMPLB, SMPT dan MTs dan jenjang SMA, SMK, SMLB dan MA yang dapat dilihat pada tabel dibawah. Adapun putus sekolah tersebut antara lain dikarenakan faktor pernikahan anak, faktor ekonomi keluarga, letak geografis Kabupaten Balangan yang masih ada daerah terpencil.

Tabel 2. 42
Jumlah Putus Sekolah

Jenjang Sekolah	Tahun 2022/2023	Tahun 2023/2024
SD	29	20
SMP	24	13
SMA	17	12

Sumber : Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Selain disebabkan karena masih adanya putus sekolah juga karena masih belum 100% Angka Partisipasi Kasar (APK) dibeberapa jenjang. Adapun APK SD/sederajat yaitu hanya 98,78% dan APK SMP/sederajat tahun 2023 sebesar 83,05% dengan rincian jumlah siswa di jenjang SMP/MTs. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan HLS tersebut antara lain :

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan, pada tahun 2023 ada 186 paket pekerjaan rehabilitasi dan pembangunan sarana dan prasarana Sekolah dari jenjang PAUD, SD dan SMP. Untuk jenjang PAUD terealisasi 53 paket pekerjaan, SD 114 paket pekerjaan serta SMP 19 paket pekerjaan
2. Program Wajib Belajar 12 tahun dengan kegiatan

3. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terutama yang bersumber dari dana APBN untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs juga merupakan salah satu kunci keberhasilan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan di Kabupaten Balangan. Dana BOS diberikan pemerintah pusat kepada satuan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan meringankan beban orang tua peserta didik terutama bagi keluarga ekonomi tidak mampu.
4. Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar sarana sebagai pelaksanaan Asesment Nasional Berbasis Komputer (ANBK)
5. Pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP)
6. Pelaksanaan program beasiswa berprestasi untuk peringkat terbaik 1, 2 dan 3
7. Pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah
8. Peningkatan kemampuan kompetensi guru seperti pelaksanaan bimbingan teknis
9. Pembinanan Minat Bakat dan kreativitas serta Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi tentang pendidikan.
10. Menaikkan kesejahteraaan para PTK/Pendidik dan Tenaga Kependidikan yaitu Kenaikan Insentif dan Honor
11. Pelaksanaan program sekolahp penggerak
12. Pelaksanaan program kurikulum merdeka
13. Kerjasama dengan *english education* yaitu Briton.

(2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

RLS adalah didefinisikan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 25 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Tabel 2.43
Rata – Rata Lama Sekolah

Indikator	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Sekolah	7,69 tahun	7,85 tahun	8,03 tahun

Sumber : BPS Kabupaten Balangan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2023 capaian RLS yang di rilis oleh BPS pada desember 2023 dalam berita resmi BPS meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 8.03 tahun atau meningkat sebesar 0,18 tahun. Artinya secara rata-rata

penduduk Balangan usia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 hanya menempuh pendidikan hingga kelas VIII SMP.

RLS Kabupaten Balangan berada pada peringkat 7 di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan dan secara progres kenaikan capaian, capaian RLS Kabupaten Balangan termasuk dalam 5 kabupaten tertinggi dengan progres kenaikannya dibanding Kabupaten Kota lainnya.

Walaupun terjadi peningkatan RLS ditahun 2023 namun sangat kecil yaitu hanya 0,18 tahun, hal ini karena rendahnya minat usia 25 tahun keatas yang putus sekolah untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, jikapun ada hanya karena kepentingan untuk menjadi aparat desa, selain itu juga masih adanya putus sekolah sehingga ketika sampai usia 25 tahun menjadi perhitungan RLS.

Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan RLS Kabupaten Balangan antara lain :

1. Peningkatan pelayanan pendidikan kesetaraan berupa pemberian dan dukungan dana dari Pemerintah Daerah dan APBN untuk operasional pendidikan kesetaraan dengan jumlah PKBM sebanyak 12 lembaga dan kelompok belajar yang tersebar hampir pada setiap Desa di Kecamatan sebanyak (Paket A, 3 Pokjar, Paket B ,21 Pokjar dan Paket C ada 33 Pokjar).
2. Peningkatan pelaksanaan SKB dengan membuka kelas dan pelatihan pengembangan kreatifitas warga belajar, bukan hanya melaksanakan ditempat bahkan sampai ke Kecamatan dan sekolah keagamaan/pesantren non formal.
3. Pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah sehingga tidak putus sekolah yang akan berdampak ketika sampai usia 25 tahun.

B. Urusan Kesehatan

Pembangunan bidang Kesehatan di Kabupaten Balangan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Balangan. Pembangunan tersebut diarahkan kepada peningkatan fasilitas kesehatan dan akses pelayanan kesehatan dasar yang didukung oleh sumber daya yang memadai, seperti rumah sakit, puskesmas, tenaga kesehatan dan ketersediaan obat, peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK).

1) Umur Harapan Hidup (UHH)

Badan Pusat Statistik mendefinisikan UHH adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani ole h seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan

kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi UHH adalah pendapatan perkapita, pendidikan, pengeluaran pemerintah di bidang kesehatan, pengangguran dan nilai tukar, hubungan langsung dengan kesejahteraan sosial, kesehatan manusia dan pembangunan ekonomi.

Tabel 2. 44
Umur Harapan Hidup (UHH)

Indikator	2021	2022	2023
Umur Harapan Hidup	67,85 tahun	68,13 tahun	73,69 tahun

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa UHH di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022. UHH tahun 2022 adalah 68,13 tahun dan terjadi peningkatan sebesar 5,56 tahun atau menjadi 73,69 tahun pada tahun 2023.

Walau terjadi peningkatan kinerja UHH dari 68,13 tahun pada 2022 menjadi 73,69 tahun di 2023, namun jika dibandingkan dengan UHH Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 73,97 tahun maka Kabupaten Balangan termasuk sebagai penyumbang negatif karena berada dibawah UHH Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan pencapaian ini, Kabupaten Balangan berada di urutan ke 8 dari 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan sehingga berda di urutan ke 9 dari 13 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Walapun UHH di Kabupaten Balangan sebagai penyumbang negatif di Provinsi Kalimantan Selatan namun jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga yang berdekatan dengan Kabupaten Balangan seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan kabupaten Hulu Sungai Utara maka UHH Kabupaten Balangan lebih baik atau lebih tinggi dari pada kedua kabupaten tersebut.

Banyak hal yang melatari keberhasilan suatu daerah pada posisi tinggi atau rendah, keberhasilan meningkatnya UHH tidak hanya dipengaruhi oleh faktor keberhasilan dari program kesehatan saja namun juga dipengaruhi oleh pendidikan dan pendapatan domestik regional broto (PDRB). Keberhasilan Kabupaten Balangan meningkatkan UHH sebesar 5,56 tahun dilihat dari faktor kesehatan karena dipengaruhi oleh penurunan AKB dan AKI dari tahun 2021 ke 2022 yang merupakan indikator komposit penentu UHH, dengan demikian menurunkan AKB dan AKI adalah sesuatu yang mutlak untuk meningkatkan UHH. Adapun AKB tahun 2022 sebesar 8,8/1.000 Kelahiran Hidup (KH) dari 13,2/1.000 KH ditahun 2021 dan untuk AKI tahun 2022 sebesar 147/100.000 KH dari 309/100.000 KH. Selain dipengaruhi penurunan AKI dan AKB juga terjadinya penurunan prevalensi stunting menjadi 14,91% pada tahun 2022 dan terkendalinya penyakit menular dan tidak menular.

Upaya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Balangan untuk meningkatkan UHH pada tahun 2023 selain penurunan AKB dan AKI juga optimalisasi pengendalian penyakit menular dan tidak menular sesuai standar serta perbaikan gizi masyarakat.

Sehubungan UHH Kabupaten Balangan masih dibawah capaian rata-rata Propinsi Kalimantan Selatan dan berada diperingkat ke 8 se Propinsi Kalimantan Selatan maka Pemerintah Kabupaten Balangan perlu meningkatkan kinerjanya. Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja UHH dari pada tahun 2024 antara lain :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan baik di puskesmas dan poskesdes dan rumah sakit
2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui optimalisasi implementasi Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), Optimalisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan Optimalisasi pelayanan kesehatan sesuai standar.
3. Perbaikan gizi masyarakat khususnya untuk ibu hamil dan balita.

Seperti disebutkan diatas bahwa faktor yang mempengaruhi UHH tidak hanya dari sisi kesehatan tapi juga dipengaruhi oleh pendidikan, terkait hal tersebut untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Balangan terjadi peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,21 tahun atau menjadi 12,82 tahun dan untuk Rata-rata Lama Sekolah (RLS) juga terjadi peningkatan sebesar 0,18 tahun atau menjadi 8,04 tahun. Meningkatnya HLS dan RLS tersebut tentu berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semestinya pengetahuannya juga baik yang berdampak terhadap implementasi berperilaku hidup bersih dan sehat.

2) Angka Kematian Bayi

AKB banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi ada 2 (dua) macam yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen biasa disebut disebut dengan kematian neonatal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah dilahirkan dan umumnya disebabkan oleh faktor-faktor yang dibawa anak sejak lahir, yang diperoleh dari orang tuanya pada saat konsepsi atau didapat selama kehamilan. Sedangkan kematian bayi eksogen atau kematian bayi post natal adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar.

Tabel 2. 45
Angka Kematian Bayi

Indikator	2021	2022	2023
Angka Kematian Bayi (AKB)	13,20/1.000 KH	137,14/1.000 KH	15,54/1.000 KH

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas AKB di Kabupaten Balangan tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 yaitu 15,54/1.000 KH atau sebanyak 30 orang bayi. Kasus tertinggi AKB di kabupaten Balangan di dominasi kasus Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yaitu berjumlah 12 orang, asfiksia 6, diare 6 orang, sepsis 2 orang kelainan bawaan 1 orang, lain-lain 3 orang. Dari 30 orang kematian bayi sebanyak 25 kematian terjadi di rumah sakit dan sebanyak 4 orang terjadi di rumah serta 1 orang di perjalanan menuju RS.

Faktor yang memicu terjadinya kematian bayi antara lain masih banyaknya ibu hamil resiko tinggi, kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang proses kehamilan, persalinan maupun pola asuh bayi, kurangnya alat-alat kesehatan untuk penangan bayi, ruang perinatologi RSUD Balangan yang masih terbatas dalam menanganani bayi dengan komplikasi. Untuk menurunkan kematian bayi upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan antara lain :

1. Mengupayakan bayi mendapatkan pelayanan sesuai standar diseluruh fasilitas Kesehatan.
2. Kunjungan dokter spesialis anak ke 12 puskesmas untuk mendeteksi risiko tinggi pada bayi dan memberikan penanganan sedini mungkin.
3. Peningkatkan pengetahuan ibu tentang pola asuh anak melalui kelas balita
4. Pelaksanaan oreintasi penanganan BBLR kepada 24 orang bidan, oreintasi asfiksia kepada 24 orang bidan.
5. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) untuk 45 orang bidan
6. Pemenuhan alat kesehatan yaitu Oxygen Consentrat 46 buah.
7. Pemberian susu formula untuk BBLR sesuai dengan rekomendasi dokter.
8. Monitoring MTBS terintegrasi Gizi buruk ke 12 puskesmas.
9. Kerja sama dengan CSR Adaro untuk peningkatan kapasitas petugas kesehatan (dokter, petugas gizi dan bidan) dalam penanganan kasus BBLR sebanyak 175 orang.
10. Penyediaan dokter spesialis anak di RSUD Balangan.
11. Mengadakan pengkajian kasus–kasus kematian bayi mulai dari tingkat puskesmas sampai tingkat kabupaten dengan tim manajemen dan pengkaji kasus.
12. Pembinaan oleh seksi kesehatan keluarga kepada bidan koordinator dan bidan didesa.

3) Angka Kematian Ibu (AKI)

AKI atau Maternal Mortality Rate (MMR) adalah Jumlah kematian ibu akibat dari proses kehamilan persalinan dan pasca persalinan per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) pada masa tertentu. Kematian ibu adalah kematian wanita dalam masa kehamilan,

persalinan dan dalam masa 42 hari (6 minggu) setelah berakhirnya kehamilan tanpa memandang usia kehamilan maupun tempat melekatnya janin, oleh sebab itu apapun yang berkaitan dengan atau diperberatnya oleh kehamilan atau pengelolaannya bukan akibat kecelakaan.

Tabel 2. 46
Angka Kematian Ibu (AKI)

Indikator	2021	2022	2023
Angka Kematian Ibu (AKI)	309/100.000 KH	147/100.000 KH	247/100.000 KH

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas AKI di tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 247/100.000 KH tahun 2023. Kematian ibu tahun 2023 di Kabupaten Balangan jika di absolutkan berjumlah 4 orang yaitun 2 orang dari Puskesmas Halong yang disebabkan 1 orang karena Post SC cito Impending Ekalmasia H6 + Hipertyroid on terapi dan 1 orang di sebabkan Salpingectomy + ALo + Severe sepsis + Iskemik Hepatitis. 1 orang di Puskesmas Lampihong dengan penyebab Post Apendictomy + realease adhion a.i peritoninis, generalisate e.c perforasi appendix POD 6 + post partum IUFD H0, 1 dari puskesmas Paringin Dengan penyebab post SC Cito a.i impending ekslamsia rawatan H1 + Hipoalbuminemia.

Berdasarkan hasil pengakajian kasus maternal oleh tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kabupaten Balangan karena masih kurangnya skrining saat awal kehamilan dan masih rendah nya deteksi risiko pada saat hamil baik dari tenaga kesehatan ataupun masyarakat, masih kurang nya kesadaran masayarakat untuk mengerti dan memahami deteksi risiko ibu hamil serta tindak lanjut setelah mengetahui bahwa kehamilannya berisiko, belum semua masyarakat atau ibu hamil ketika di nyatakan tidak layak hamil tapi tetap hamil.

Selain disebabkan oleh hal tersebut diatas juga dipengaruhi oleh banyaknya ibu hamil resiko tinggi sebanyak 696 orang yang terdiri ibu hamil dengan anemia sebanyak 469 orang dan ibu hamil KEK sebanyak 269 orang yang dapat menyebabkan komplikasi maternal. Kelengkapan sarana dan prasarana serta kompetensi bidan di poskesdes dan puskesmas juga sangat mempengaruhi terjadinya kematian ibu. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk menurunkan kematian ibu antara lain :

1. Mengupayakan ibu hamil, bersalin dan nifas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar diseluruh fasilitas Kesehatan.
2. Kunjungan dokter SPOG ke 12 puskesmas untuk mendeteksi risiko maternal di tingkat puskesmas, sehingga ibu hamil berisiko lebih terdeteksi dan tertangani sedini mungkin

3. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK dan anemia.
4. Kemitraan paraji dengan bidan untuk pertolongan persalinan
5. Pelaksanaan kelas ibu hamil sebanyak 115 kelas untuk meningkatkan pengetahuan keluarga akan kehamilan dan persalinan
6. Pemenuhan alat kesehatan yaitu pengadaan bidan kit 12 buah dan USG 3 unit.
7. Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN) untuk 45 orang bidan
8. Penambahan poskesdes sebanyak 9 buah, total jumlah poskesdes atau polindes 143 buah sedang jumlah desa sebanyak 154 desa. Adanya poskesdes akan memudahkan akses ibu hamil, bersalin dan nifas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
9. Pengadaan kendaraan bermotor untuk bidan di desa sebanyak 91 buah sehingga mempermudah bidan untuk melaksanakan kunjungan rumah dalam rangka optimalisasi pelayanan Kesehatan ibu.
10. Mengadakan pengkajian kasus–kasus kematian ibu mulai dari tingkat puskesmas sampai tingkat kabupaten dengan tim manajemen, pengkaji, dan tim komunitas pelayanan SPOG
11. Penyediaan dokter SPOG di RSUD Balangan
12. Pembinaan oleh seksi kesehatan keluarga kepada bidan koordinator dan bidan didesa.

4) Prevalensi Stunting

Kejadian Balita stunting (pendek) merupakan masalah gizi utama yang di hadapi Indonesia karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan dating. Indikator kinerja ini digunakan untuk mengukur penurunan kejadian stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada anak usia dibawah lima tahun, akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek dari anak normal seusianya dan memiliki keterlambatan dalam berpikir.

Berdasarkan hasil surveilans gizi melalui elektronik– pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat (e- PPGBM) Balita pendek dan sangat pendek tahun 2023 sebesar 14,61 %, dari 9.236 balita yang di entry di aplikasi e-PPGBM terdapat 1.349 balita yang pendek dan sangat pendek, hal ini memberikan gambaran masalah gizi yang bersifat kronis.

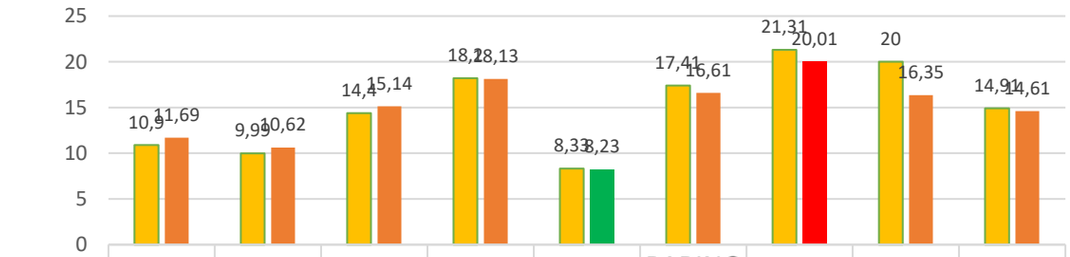
Tabel. 2. 47
Prevalensi Stunting

Indikator	Tahun 2022	Tahun 2023
Prevalensi Stunting	14,91%	14,61%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan

Berdasarkan tabel diatas prevalensi stunting di tahun 2023 terjadi penurunan hanya sebesar 0,30% atau menjadi 14,61% sedangkan target yang diinginkan sebesar 14%. Berdasarkan grapik dibawah *prevalensi stunting* terendah adalah Kecamatan Paringin dan yang tertinggi adalah Kecamatan Juai, sedangkan *prevalensi stunting* yang turun di Kecamatan Paring, Paringin Selatan, Lampihong dan Tebing Tinggi.

Gambar 2. 29
Grafik Prevalensi Stunting



	AWAYAN	BATU MANDI	HALONG	JUAI	PARINGIN	PARINGIN SELATAN	LAMPIHONG	TEBING TINGGI	KABUPATEN
2022	10,9	9,99	14,4	18,2	8,33	17,41	21,31	20	14,91
2023	11,69	10,62	15,14	18,13	8,23	16,61	20,01	16,35	14,61

Untuk menurunkan *prevalensi stunting* tidak hanya dari urusan kesehatan saja akan tetapi juga terkait berbagai urusan yaitu intervensi sensitif sebesar 70% untuk seluruh SKPD terkait dan intervensi spesifik untuk urusan Kesehatan. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi stunting adalah intervensi yang dilakukan pada 1.000 HPK dari remaja putri, Pasangan Usia Subur (PUS), calon penganting, ibu hamil, ibu melahirkan dan ibu nifas serta anak Balita. Tidak signifikannya penurunan prevalensi stunting antara lain disebabkan oleh :

1. Masih banyak ibu hamil yang kekurangan energi kronik (273 orang) dan anemia (438 orang)
2. Masih banyak balita gizi buruk (12 anak) dan balita gizi kurang (855 anak) dan Bayi Berat lahir rendah (BBLR) (178 anak)
3. Tingginya pernikahan anak (313 anak)
4. Tingginya unmet need (12,14%)
5. Rendahnya ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan (66,61%)
6. Masih banyak keluarga yang tidak akses air minum layak (89 %)
7. Rendahnya keluarga berisiko stunting mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi (1,7 %)
8. Rendahnya keluarga berisiko stunting mendapatkan promosi gemar makan ikan (3,16%)
9. Rendahnya remaja putri menerima layanan pemeriksaan HB (12,67%)

10. Belum optimalnya Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap (71,81%)
11. Rendahnya keluarga yang melaksanakan PHBS (32,66%)
12. Rendahnya pelayanan keluarga berencana pasca salin (52,99%)
13. Rendahnya keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan (17,84%)
14. Rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (7,53%)
15. Rendahnya bayi usia 6 bulan mendapat ASI ekslusif (66,42%)
16. Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi

Berbagai upaya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan untuk menurunkan *prevalinsi stunting* dengan sasaran keluarga berisko stunting khususnya untuk remaja putri, ibu hamil dan Balita. Intervensi spesifik dan sensitive yang dilakukan sebanyak 17 program dengan aktifitas kegiatan antara lain :

1. Pemberian tanaman pekarangan untuk keluarga berisiko stunting dan Pemberian makanan pengolahan ikan untuk keluarga berisiko stunting
2. Pembangunan tangka septik individu perdesaan, Pembangunan wc umum, Pembangunan reserviuer, pembangunan broncaptering, pembangunan sumur dalam terlindungi, pemasangan jaringan dan instalasi air minum
3. Penyuluhan pencegahan perkawinan usia anak/penyuluhan paar/seminar parenting
4. Sosialisasi implementasi gizi remaja dan resiko anemia pada remaja putri
5. Pelayanan konseling puspaga bagi caten dan layanan pendampingan
6. Pendampingan keluarga berisiko stunting
7. Orientasi kb pkb/pkr/bkl/oppka
8. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil anemia dan kek, balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bblr
9. Pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi kepuskesmas oleh dokter spesialis kandungan
10. Pemberian tanaman pekarangan untuk keluarga berisiko stunting dan Pemberian makanan pengolahan ikan untuk keluarga berisiko stunting
11. Pembangunan tangka septik individu perdesaan, Pembangunan wc umum, Pembangunan reserviuer, pembangunan broncaptering, pembangunan sumur dalam terlindungi, pemasangan jaringan dan instalasi air minum
12. Penyuluhan pencegahan perkawinan usia anak/penyuluhan paar/seminar parenting
13. Sosialisasi implementasi gizi remaja dan resiko anemia pada remaja putri
14. Pelayanan konseling puspaga bagi caten dan layanan pendampingan
15. Pendampingan keluarga berisiko stunting
16. Orientasi kb pkb/pkr/bkl/oppka

17. Pemberian makanan tambahan pada ibu hamil anemia dan kek, balita gizi buruk, balita gizi kurang dan bblr
18. Pemeriksaan ibu hamil resiko tinggi kepuskesmas oleh dokter spesialis kandungan

Selain upaya tersebut diatas Bapperida juga gencar mendorong SKPD untuk berinovasi terkait percepatan penurunan *prevalensi stunting* antara lain : Balangangan Lawan Stunting (Balanting) oleh Bapperida, Keluarga Sehati (Keluarga Sedia Tanaman Pekarangan Untuk Hadapi Stunting) dan Berani Gesit (B2SA Sejak Dini Untuk Generasi Bebas Stunting) oleh Dinas KP3, Kaminting (Kelola Limbah Lawan stunting) oleh Dinas PUPR, Kaminting (Kelola Limbah Lawan stunting) sedangkan dari Dinas Kesehatan beserta puskesmas yaitu Pasti BLA (Pantau Resiko Tinggi Bayi dan Balita), Pita Tambang (Pijat balita Pantau Tumbuh Kembang), Selamat pagi (Sentral Pelayanan dan Kesehatan Gizi), Kapal Tacenting (Kumpulan Pelihara Tanaman cegah stunting), Makan Apel (Mari Nyalakan Alarm Kehamilan), Kadut Gita (Kartu Data Umum Terpantau Gizi Balita), Gemar Cheting (Gerakan Cegah Stunting), Jeli KIA (Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, Jeli KIA (Jejaring Peduli Kesehatan Ibu dan Anak, Sepekan (Sistem Edukasi Pemenuhan Asupan Gizi Anak), Badatang (Balita dan Anaka Sehat Bebas Stunting), Badatang (Balita dan Anaka Sehat Bebas Stunting), Badatang (Balita dan Anaka Sehat Bebas Stunting), Sepekan (Sistem edukasi pemenuhan asupan gizi anak anemia), Sehati (Aksi Rematri Sehat Tanpa Anemia), Mutar (Temukan Tangani Anemia Pada Remaja Putri), Panting Gemateri (Paringin Selatan Lawan stunting Dengan Gerakan Gemar Makan Telor/Ikan Tiap Hari) dan Panting Gemateri (Paringin Selatan Lawan stunting Dengan Gerakan Gemar Makan Telor/Ikan Tiap Hari).

5) *Age Specific Fertility Rate* (ASFR)

Age Specific Fertility Rate (ASFR) adalah Banyaknya kelahiran tiap 1.000 perempuan pada kelompok umur tertentu.

Tabel 2. 48
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)

Indikator	Satuan	Target			Capaian		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	19	19	19	28	18	20

Sumber : Data diolah dengan Elsimil Balangan, 2023

Angka kelahiran Remaja usia 15-19 tahun pada umumnya dapat dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Faktor sosial diantaranya masih kentalnya adat istiadat yang mempengaruhi keputusan remaja untuk menjalani pernikahan dan faktor ekonomi seperti

pola pikir orang tua yang masih menganggap pernikahan sebagai salah satu solusi terhadap pengurangan beban ekonomi yang ditanggung. Pola asuh kepada remaja juga berpengaruh terhadap sosialisasi di lingkungan sekitar, dan dukungan pemahaman terhadap pemilihan lingkungan positif maupun negative. Kemudahan akses mengenyam pendidikan juga mempengaruhi keputusan remaja untuk menunda pernikahan. Faktor eksternal angka kelahiran remaja juga dapat dipengaruhi oleh tingkat keterpaparan terhadap media sosial yang tidak berbanding dengan kemampuan remaja dalam memanfaatkan media secara positif ataupun negatif. Sehingga hal ini juga tidak hanya menjadi aspek pengaruh namun juga menjadi tantangan untuk menekan angka kelahiran remaja. Remaja yang hamil dan melahirkan diusia 15-19 tahun memiliki resiko lebih tinggi terhadap Angka Kematian Ibu dan bayi yang lahir dengan kategori stunting. Dampak angka kelahiran remaja juga diiringi oleh masih adanya pernikahan dini di Kabupaten Balangan yang datanya pada tahun 2023 masih terdapat pasangan yang mengajukan dispensasi nikah melalui data Puspaga Sanggam yang pada tahun 2023 sudah melayani rujukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Amuntai sebanyak 13 layanan konseling dispensasi nikah.

Kabupaten Balangan pada kurun waktu tiga tahun terakhir mengalami perkembangan yang dinamis dalam penurunan angka kelahiran. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, masih membutuhkan upaya serius dan kerjasama lintas sektor dalam penurunan angka kelahiran pada usia remaja. Capaian pada tahun 2021 sebanyak 28 kelahiran yang terjadi pada usia 15-19 tahun, angka ini tertinggi dibandingkan pada tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022 target angka kelahiran sejumlah 19 dan yang tercapai sebanyak 18 kelahiran sementara pada tahun 2023 target sebanyak 19 kelahiran sementara capaian sebanyak 20% kelahiran. Masih adanya angka kelahiran pada remaja di Kabupaten Balangan berhubungan dengan masih adanya angka pernikahan dini di Kabupaten Balangan, pada tahun 2023 sebanyak 10 pengajuan dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Amuntai, sehingga hal ini mengartikan masih adanya pernikahan dini di Kabupaten Balangan.

6) Malaria

Tabel 2. 49

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria

Indikator	Tahun		
	2021	2022	2023
Annual Parasite Incidence (API) malaria per 1000 penduduk	0,29	0,51	0,38

Berdasarkan tabel diatas penemuan kasus malaria positif di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 terjadi penurunan dibandingkan tahun 2022 yaitu penemuan kasus malaria tahun 2022 sebanyak 67 kasus atau API sebesar 0,51 dari target API sebesar <1/1.000 penduduk dan menurun pada tahun 2023 menjadi sebanyak 53 kasus atau dengan API sebesar : 0,38/1.000 penduduk dengan tidaka da kematian atau CFR sebesar 0%.

Dari data tersebut menunjukan bahwa adanya upaya mempertahankan keberhasilan dalam menurunkan angka kesakitan malaria <1/1.000 penduduk serta melakukan percepatan eliminasi. Berbagai upaya dilakukan untuk eliminasi malaria antara lain :

1. Pelatihan Mikroskopis Malaria
2. Uji Kompetensi untuk Pengelola Program Malaria
3. Workshop Mikroskopis
4. Pembagian Kelambu Kepada Penduduk yang Melapor untuk Pergi ke Hutan
5. Penyuluhan di daerah tinggi kasus dan banyak warga kehutan
6. Pemetaan Reseptif
7. OJT Kepada Pengelola program malaria fasyankes yang baru
8. Advokasi kepada pimpinan daerah terkait eliminasi malaria
9. Semua puskesmas sudah terpapar tentang eSISMAL V2 dan V3

7) Tenaga Kesehatan

Pembangunan kesehatan perlu didukung antara lain oleh sumber daya tenaga kesehatan yang memadai sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Oleh karena itu pola pengembangan sumber daya tenaga kesehatan perlu disusun secara cermat yang meliputi perencanaan, pengadaan dan penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan.

Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga Teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lain. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, mikrobiolog kesehatan, penyuluh kesehatan, administrator kesehatan dan sanitarian. Tenaga gizi meliputi nutrisionis dan dietisien. Tenaga keterapian fisik meliputi fisioterapis, okupasiterapis dan terapis wicara. Tenaga keteknisian medis meliputi radiografer, radioterapis, teknisi gigi, teknisi elektromedis, analis kesehatan, refraksionis optisien, otorik prostetik, teknisi transfusi dan perekam medis.

Tabel 2. 50
Tenaga Kesehatan

No.	Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio dokter umum per 100.000 penduduk	20,5	19,5	29,5	27,5	33
2	Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk	7,6	9,8	9,8	9,7	10,3
3	Rasio Dokter gigi per 100.000 penduduk	5,3	6	8,3	10,4	10,3
4	Rasio apoteker per 100.000 penduduk	16,7	15	9,1	20,1	24,9
5	Rasio tenaga teknis kefarmasian per 100.000 penduduk	37,3	19,5	7,6	29	33
6	Rasio Perawat per 100.000 penduduk	241,1	182,3	189,1	217,1	249
7	Rasio bidan per 100.000 penduduk	210	188,3	184,6	232,7	246,8
8	Rasio nutrisionis per 100.000 penduduk	22,8	21,8	19,7	23,8	26,4
9	Rasio sanitarian per 100.000 penduduk	27,4	26,3	22,7	26	27,1
10	Rasio penyuluh Kesehatan per 100.000 penduduk	27,4	27	29,5	39,4	35,9
11	Rasio Perawat gigi per 100.000 penduduk	13,7	11,2	10,6	20,8	16,1

Sumber: Profil Dinas Kesehatan 2023

Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Dalam rangka untuk melaksanakan upaya kesehatan dengan optimal tentu harus tersedia tenaga kesehatan sesuai standar. Indikator yang digunakan dalam membandingkan rasio ketersediaan dokter adalah medical dokter per 100.000 penduduk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan kebutuhan SDMK, standar kebutuhan dokter umum adalah 50/100.000 penduduk. Berdasarkan tabel diatas untuk rasio ketersediaan dokter di Kabupaten Balangan selama 5 tahun bersipat fluktuatif dan masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang mana pada tahun 2021 ratio ketersedian dokter di Kabupaten Balangan baik yang ada di RS maupun puskesmas sebesar 29,7/100.000 penduduk, dengan jumlah dokter sebanyak 40 orang, sedangkan pada tahun 2022 ratio ketersediaan dokter sebesar 27,5/100.000 penduduk dengan jumlah dokter sebanyak 37 orang, sedangkan tahun 2023 ketersediaan dokter sebesar terjadi peningkatan yaitu dengan rasio 33/100.000 penduduk dengan jumlah dokter sebanyak 45 orang. Terjadi penurunan ratio ditahun 2022 disebabkan karena adanya tenaga dokter umum yang melanjutkan sekolah menjadi dokter spesialis, sedangkan tahun 2023 terjadi peningkatan karena adanya penambahan dokter umum dengan status Program Interinsip Dokter Indonesia (PIDI) sebanyak 12 orang dan 2 orang habis masa kontrak program nusantara sehat dari Puskesmas Uren dan Puskesmas Halong.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan dokter spesialis adalah 12/100.000 penduduk. Berdasarkan tabel diatas untuk rasio ketersediaan dokter spesialis di Kabupaten Balangan selama 5 tahun bersifat fluktuatif dan masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang mana pada tahun 2018 ratio ketersedian dokter spesialis yang ada di RS sebesar 11,6/100.000 penduduk, pada tahun 2019 terjadi penurunan ratio ketersediaan dokter spesialis sebesar 7,6/100.000 penduduk. Pada tahun 2020 terjadi peningkatan ratio ketersediaan dokter spesialis sebesar 7,6/100.000 penduduk. ditahun 2020 dan 2021 kembali terjadi peningkatan ratio ketersediaan dokter spesialis sebesar 9,8/100.000 penduduk dan di tahun 2022 terjadi penurunan kembali ratio ketersediaan dokter spesialis sebesar 9,7/100.000 penduduk, sedangkan tahun 2023 meningkat menjadi sebesar 10,3/100.000 penduduk atau sebanyak 14 orang. Walaupun terjadi peningkatan rasio dokter spesialis tahun 2023 namun masih belum sesuai semestinya yaitu 12/100.000 penduduk. penambahan dokter spesialis tersebut antara lain dokter spesialis anastesi untuk rumah sakit.

Untuk melihat kondisi ketersediaan dokter gigi, indikator yang digunakan adalah dentist per 100.000 penduduk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan dokter gigi adalah 14/100.000 penduduk. Berdasarkan tabel diatas rasio ketersediaan dokter gigi di Kabupaten Balangan selama 5 tahun terjadi peningkatan yang signifikan ditahun 2021 dan 2022 namun masih dibawah standar yang ditetapkan oleh Kepmenkes yang mana pada tahun 2021 ratio ketersedian dokter di Kabupaten Balangan baik yang ada di RS maupun Puskesmas sebesar 8,9/100.000 penduduk dengan jumlah dokter gigi sebanyak 12 orang dan ratio ketersediaan dokter gigi tahun 2022 sebesar 10,4/100.000 penduduk dengan jumlah dokter gigi sebanyak 14 orang. Terjadi penambahan ratio pada tahun 2022 disebabkan adanya penambahan tenaga kontrak untuk dokter gigi, sedangkan tahun 2023 terjadi penurunan sedikit rasio dokter gigi yaitu 10,3/100.000 penduduk hal ini karena penambahan jumlah penduduk sementara jumlah dokter gigi tetap sebanyak 14 orang.

Untuk melihat kondisi ketersediaan apoteker, indikator yang digunakan adalah apoteker per 100.000 penduduk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan apoteker adalah 15/100.000 penduduk. Selama 5 tahun rasio ketersediaan apoteker terjadi peningkatan yang signifikan namun terjadi penurunan ditahun 2020 dan tahun 2021. Pada tahun 2022 terjadi peningkatan rasio lagi yang semula tahun 2021 rasio ketersediaan apoteker sebesar 9,1/100.000 pendudk dan pada tahun 2022 menjadi 20,1/100.000 penduduk, sedangkan tahun 2023 terjadi peningkatan rasio apoteker yaitu menjadi 24,9/100.000 penduduk atau sebanyak 34 orang. Penambahan apoteker tersebut dengan status tenaga kontrak. Berdasarkan tabel diatas maka untuk ketersediaan apoteker di Kabupaten Balangan sudah terpenuhi atau sudah diatas yang

ditargetkan sebesar 15/100.000 penduduk dan tersebar diseluruh puskesmas serta rumah sakit. Sudah terpenuhinya ketersediaan apoteker karena tidak hanya terhitung di puskesmas dan rumah sakit namun juga tersedia di apotek-apotek Kabupaten Balangan sebanyak 4 apotek, klinik pelayanan kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Balangan sebanyak 1 orang dan gudang farmasi sebanyak 3 orang.

Untuk melihat kondisi tenaga teknis kefarmasian, indikator yang digunakan adalah tenaga teknis kefarmasian per 100.000 penduduk. Tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yang membantu apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dan tenaga menengah farmasi/asisten apoteker. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan tenaga teknis kefarmasian adalah 30/100.000 penduduk. Selama 5 tahun rasio ketersediaan tenaga teknis kefarmasian terjadi penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2019 tejadi kenaikan ratio ketersediaan tenaga teknis kefarmasian sebesar 37,3/100.000, kemudian terjadi penurunan pada tahun 2020 sebesar 19,5/100.000, pada tahun 2021 terjadi penurunan lagi dengan ratio ketersediaan menjadi 7,6/100.000 dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan kembali ratio ketersediaan menjadi 29/100.000 penduduk, sedangkan tahun 2023 juga terjadi peningkatan 33/1.00.000 penduduk atau sebanyak 45 orang yang tersebar diseluruh puskesmas serta rumah sakit. Untuk ketersediaan tenaga kefarmasian tahun 2023 sudah melebihi kebutuhan 30/100.000 penduduk.

Untuk melihat kondisi ketersediaan perawat, indikator yang digunakan adalah perawat per 100.000 penduduk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan perawat adalah 200/100.000 penduduk. Pada tahun 2021 ratio ketersedian perawat sebesar 185,9/100.000 penduduk dengan jumlah perawat 250 orang dan ratio ketersediaan perawat tahun 2022 sebesar 217,1/100.000 penduduk dengan jumlah perawat 294 orang, sedangkan tahun 2023 terjadi peningkatan rasio perawat yaitu menjadi 249/100.000 penduduk atau sebanyak 340 orang. Terjadi penambahan ratio yang pada tahun 2022 berasal dari tenaga kontrak untuk optimalisasi pelayanan *home care* di seluruh kecamatan yang merupakan prioritas kepala daerah agar masyarakat yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan dasar dapat tetap mendapatkan perawatan dan pengobatan, selain itu juga optimalisasi *Public Safety Care* (PSC) untuk memberikan pelayanan gawat darurat secara cepat, tepat dan cermat bagi masyarakat Balangan yang diselenggarakan 24 jam sehari secara terus menerus khususnya didaerah jalan Provinsi seperti Kecamatan Batumandi, Kecamatan Paringin Selatan dan Kecamatan Paringin. Penambahan perawat sebanyak 46 orang tersebar di rumah sakit dan di puskesmas sebanyak 10 orang dengan status PTT. Adanya penambahan perawat tersebut maka ketersedian perawat di Kabupaten Balangan tahun 2023 sudah melebihi dari kebutuhan 200/100.000 penduduk.

Untuk melihat kondisi ketersediaan bidan, indikator yang digunakan adalah bidan per 100.000 penduduk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan bidan adalah 130/100.000 penduduk. Berdasarkan tabel diatas selama 5 tahun rasio ketersedian bidan terjadi peningkatan, ditahun 2021 ratio ketersedian bidan sebesar 182,9/100.000 penduduk dengan jumlah bidan sebanyak 246 orang dan ratio ketersediaan bidan tahun 2022 sebesar 232,7/100.000 penduduk dengan jumlah bidan sebanyak 313 orang. Walaupun rasio bidan sudah diatas jumlah penduduk namun untuk memenuhi ketersediaan 1 desa 1 bidan di desa maka bidan sebanyak 246 orang pada tahun 2021 belum dianggap mencukupi sehingga untuk memenuhi ketersediaan tersebut Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB melakukan pengangkatan penugasan khusus bidan desa.

Tidak terpenuhinya ketersedian bidan di desa secara merata untuk seluruh desa tentu berdampak pada pemenuhan SPM untuk pelayanan kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di Kabupaten Balangan sehingga masih ditemukan adanya kematian bayi dan kematian ibu serta lambatnya penurunan *prevalensi stunting* di Kabupaten Balangan tahun 2022. Terkait hal tersebut maka tahun 2023 untuk memenuhi kebutuhan ketersediaan bidan maka Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menambahkan tenaga bidan dengan status PTT sebanyak 24 orang atau menjadi 246,8/100.000 penduduk.

Untuk melihat kondisi ketersediaan tenaga nutrisionis, indikator yang digunakan adalah nutrisionis per 100.000 penduduk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan nutrisionis adalah 18/100.000 penduduk. Selama 5 tahun rasio ketersediaan nutrisionis terjadi peningkatan yang signifikan namun terjadi penurunan ditahun 2020 yaitu yaitu ratio ketersediaan nutrisionis sebesar 21,8/100.000 penduduk dan tahun 2021 dengan ratio ketersediaan nutrisionis sebesar 19,7/100.000. kemudian pada tahun 2022 terjadi peningkatan rasio ketersediaan nutrisionis lagi menjadi 23,8/100.000 penduduk, sedangkan tahun 2023 terjadi peningkattan rasio nutrisionis menjadi 26,4/100.000 penduduk atau sebanyak 36 orang.

Keberadaan nutrisionis di kabupaten Balangan sudah melebihi yang ditargetkan sebesar 18/100.000 penduduk, namun karena perlunya percepatan penurunan *prevalensi stunting* yang ditargetkan dari pemerintah pusat sebesar 15% tahun 2024 maka keberadaan nutrionis menjadi prioritas daerah, sehingga keberadaan nutrisionis tersebut tidak hanya ditempatkan dipuskesmas namun juga tersebar dibeberapa desa di Kabupaten Balangan.

Untuk melihat kondisi ketersediaan tenaga sanitarian, indikator yang digunakan adalah sanitarian per 100.000 penduduk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan Sanitarian adalah 20/100.000 penduduk. Selama 5 tahun rasio ketersediaan sanitarian terjadi peningkatan yang signifikan namun terjadi penurunan ditahun 2021 yaitu ratio ketersediaan sanitarian sebesar 22,7/100.000 penduduk dan

tahun tahun 2022 kembali terjadi peningkatan dengan ratio ketersediaan sanitarian sebesar 26/100.000 penduduk, sedangkan tahun 2023 ada penambahan sebanyak 3 orang PTT sehingga ketersediaan tenaga sanitarian kembali meningkat menjadi 27,1/100.000 penduduk atau berjumlah 37 orang.

Ketersediaan tenaga sanitarian di Kabupaten Balangan sudah melebihi dari yang ditargetkan 20/100.000 penduduk. Pentingnya ketersediaan tenaga sanitarian sesuai rasio penduduk karena pemicu munculnya berbagai penyakit baik menular ataupun tidak menular selain disebabkan oleh prilaku atau gaya hidup terkait kesehatan juga tidak kalah penting dipengaruhi oleh kondisi lingkungan.

Untuk melihat kondisi ketersediaan tenaga penyuluh kesehatan, indikator yang digunakan adalah penyuluh kesehatan per 100.000 penduduk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan penyuluh kesehatan adalah 18/100.000 penduduk. Selama 5 tahun rasio ketersediaan penyuluh kesehatan terjadi peningkatan yang signifikan setiap tahunnya dan terakhir pada tahun 2022 ratio ketersediaan penyuluh kesehatan menjadi 39,4/100.000 penduduk, sedangkan tahun 2023 terjadi penurunan yag signifikan menjadi 35,9/1.000.000 penduduk atau hanya sebanyak 49 orang. Walaupun ketersediaan penyuluh kesehatan di Kabupaten Balangan tahun 2023 terjadi penurunan namun masih melebihi dari target 18/100.000 penduduk.

Untuk melihat kondisi ketersediaan perawat gigi, indikator yang digunakan adalah terapis gigi dan mulut per 100.000 penduduk. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 standar kebutuhan perawat gigi adalah 21/100.000 penduduk. Selama 5 tahun rasio ketersediaan perawat terjadi peningkatan yang signifikan namun terjadi penurunan ditahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Pada tahun 2021 ratio ketersedian terapis gigi dan mulut sebesar 11,2/100.000 penduduk dengan jumlah 15 orang dan ratio ketersediaan terapis gigi dan mulut tahun 2022 sebesar 10,4/100.000 penduduk dengan jumlah 12 orang, sedangkan tahun 2023 meningkat signifikan menjadi 16,1/100.000 penduduk atau menjadi 22 orang. Walaupun terjadi peningkatan yang signifikan untuk ketersedian perawat gigi di Kabupaten Balangan hingga tahun 2023 namun belum terpenuhi dari target 21/100.000 penduduk.

Untuk perencanaan pengadaan kesehatan di kabupaten Balangan dilakukan melalui perhitungan kebutuhan (Renbut) yang dihitung bedasarkan Analisis Beban Kerja (ABK). Perhitungan kebutuhan ini dilakukan setiap tahunnya sebagai dasar acuan usulan pengadaan tenaga kesehatan baik itu untuk formasi CPNS, PPPK, Kontrak ataupun Penugasan Khusus (Tugsus).

Pada tahun 2022 pemenuhan kebutuhan nakes di fasilitas kesehatan dilakukan lewat pengadaan tenaga kontrak, tugsus dan PPPK. Pada pengadaan PPPK tahun 2022 formasi kesehatan yang diusulkan sebanyak 60 formasi yang meliputi dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, perawat, bidan, terapis gigi dan mulut, nutrisionis, penyuluh

Kesehatan Masyarakat, sanitarian, radiografer, pranata laboratorium Kesehatan, fisioterapis, dan perekam medis. Dari hasil seleksi PPPK tahun 2022 hanya 47 yang lulus memenuhi persyaratan diantaranya asisten apoteker, bidan, perawat, pranata laboratorium, sanitarian, nutrisionis, terapis gigi dan mulut, fisioterapis, radiographer, perekam medis dan penyuluh Kesehatan Masyarakat yang penempatan tersebar di beberapa puskesmas dan rumah sakit yang ada di kabupaten Balangan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Untuk formasi tenaga dokter umum, dokter spesialis dan dokter gigi tidak terisi disebabkan karena pelamar dokter umum dan dokter gigi tidak memenuhi persyaratan sehingga terjadi kekosongan pada formasi tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis yang tidak didapatkan pada seleksi PPPK maka dilakukan pengadaan tenaga melalui kontrak dan tugsus. Dilakukan juga pengadaan dokter spesialis melalui pengusulan Pendayagunaan Dokter Spesialis (PDGS).

Di tahun 2023 ini untuk 9 jenis tenaga kesehata strategis meliputi dokter umum, dokter gigi, farmasi, perawat, bidan, nutrisionis, sanitarian, penyuluh kesehatan masyarakat, pranata laboratorium kesehatan untuk puskesmas di Kabupaten Balangan masih ada yang tidak terpenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan kebutuhan SDMK. Terkait hal tersebut maka untuk mencukupi pemenuhan kebutuhan di fasilitas kesehatan dilakukan lewat pengadaan PTT daearah dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

8) Pelayanan Rumah Sakit

Untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu dan efisiensi rumah sakit maka digunakan berbagai indikator. Indikator yang digunakan antara lain *Bed Occupancy Rate* (BOR), *Average Length of Stay* (AVLOS), *Turn Over Interval* (TOI), *Bed Turn Over* (BTO), *Net Death Rate* (NDR) dan *Gross Death Rate* (GDR).

Tabel 2. 51
Pelayanan Rumah Sakit

NO	INDIKATOR	2019	2020	2021	2022	2023
1	BOR (60-85%)	57,5	57,5	38,2	44,1	76,4
2	AVLOS (< 12 Hari)	3,1	3,1	3,9	3,2	3,3
3	TOI (1-3 Hari)	2,3	2,3	6,4	4,1	1,0
4	BTO 40-50 Kali)	66,1	66,1	33,1	49,3	82,5
5	NDR (Maks 25 Permil)	12,8	12,8	22,6	13,2	10,3
6	GDR (Maks 45 Permil)	22,8	23,4	48,4	26,5	21,2

Sumber : Data Rekam Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Bor (Bed Occupancy Rate) adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. BOR bertujuan memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit. Nilai Parameter BOR yang ideal adalah 60-85 %.

Semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi penggunaan tempat tidur di rumah sakit yang digunakan untuk pelayanan.

BOR (Bed Occupancy Rate) di RSUD Balangan masih rendah dimana pada tahun 2019-2022 masih kurang dari target yakni 60%. Kondisi tersebut kemungkinan disebabkan oleh fasilitas atau sarana dan prasarana yang masih belum lengkap, kondisi pandemi covid-19 yang melanda Indonesia juga menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya capaian BOR RSUD Balangan dimana adanya kekhawatiran masyarakat untuk berobat ke rumah sakit, hal ini dikarenakan adanya hoax yang berkembang di masyarakat mengenai pasien yang dicovidkan ketika berobat ke rumah sakit.

Berdasarkan tabel diatas trend BOR rumah sakit selama 4 tahun terjadi flugtuatif namun tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 76,4%. Walaupun terjadi peningkatan namun masih dalam batas wajar dan hal ini juga patut menjadi perhatian oleh pihak manajemen rumah sakit untuk merencanakan penambahan ruangan dan penambahan jumlah tempat tidur, terutama untuk pasien dengan jaminan pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) hak rawat kelas 3, hal ini dikarenakan pada kondisi atau situasi tertentu terkadang bisa terjadi penumpukan pasien di UGD yang tidak bisa masuk ruang rawat inap, dikarenakan ruang rawat inap masih penuh, terutama pasien dengan jaminan pembiayaan BPJS.

AVLOS (*average Length of Stay)* adalah rata-rata lama rawat seorang pasien. LOS menunjukkan berapa hari lamanya seorang pasien dirawat inap pada satu periode perawatan. Indikator ini disamping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan. Secara umum nilai AVLOS yang ideal antara 6-9 hari. Berdasarkan tabel diatas AVLOS rumah sakit tahun 2023 hanya sebesar 3,3 hari, hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya :

1. Tingginya angka pasien rawat inap, khususnya pasien anak, sehingga terkadang DPJP mengambil keputusan segera memulangkan pasien yang sudah stabil dan sudah memenuhi kriteria pasien pulang, walaupun untuk lebih optimalnya sebenarnya masih perlu pemantauan klinis sederhana dan selanjutnya melakukan perawatan lanjutan mandiri di rumah.
2. Adanya pasien poliklinik yang memerlukan tindakan bedah, yang secara keilmuan tindakan bedah tersebut bisa dilakukan di poliklinik, namun karena ketersediaan alat kesehatan untuk memfasilitasi pembedahan dan ruangan tindakan khusus bedah dipoliklinik belum tersedia, maka sebagian tindakan dilakukan di kamar operasi dan pasien di rawat inapkan. Untuk pasien dengan kriteria tersebut, waktu yang diperlukan untuk proses penyembuhan relatif pendek, sehingga pasien dipulangkan tanpa perlu berlama-lama dirawat inap.

Terkait hal tersebut, perlu kiranya dilakukan pengembangan poliklinik khususnya penyediaan ruang tindakan untuk pasien yang memerlukan tindakan bedah ringan di poliklinik dilengkapi dengan peralatan /alat kesehatan dan tenaga pendukung lainnya.

Tahun 2023 rata-rata terdapat 1 hari tempat tidur tidak ditempati. Hal ini sejalan dengan tingginya angka BOR dan pendeknya AVLOS pasien, dimana semakin banyak pasien baru yang rawat inap /datang berobat ke UGD untuk rawat inap maka akan semakin pendek hari perawatan pasien-pasien lama yang sudah ada dirawat inap. Secara sederhananya adalah untuk memasukan pasien baru rawat inap yang menunggu di UGD, maka pasien lama yang sudah berada dirawat inap harus dipulangkan terlebih dahulu. Pergantian pasien atau tenggang waktu perputaran penempatan pasien dirawat inap ini, terkadang hanya memakan waktu beberapa jam. Berdasarkan hal ini maka sangat diperlukan penambahan ruang rawat inap dan penambahan tempat tidur disertai dengan kelengkapan alat kesehatan dan tenaga kesehatan, agar rumah sakit dapat melayani masyarakat dengan optimal

TOI (*Turn Over Interval*) atau tenggang perputaran adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1-3 hari. Rumus untuk menghitung TOI = [(jumlah tempat tidur x periode) – hari perawatan]/jumlah pasien keluar. Berdasarkan tabel diatas TOI terjadi penurunan yang signifikan menjadi 1,1 hari, meskipun TOI masih dalam kategori ideal, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah kunjungan pasien rawat inap setiap hari dan tidak ada penolakan terhadap pasien yang dirawat.

BTO (*Bed Turn Over*) adalah frekuensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu. Idealnya dalam satu tahun, satu tempat tidur rata-rata dipakai 40-50 kali. Rumus untuk menghitung BTO = Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / jumlah tempat tidur. Berdasarkan tabel diatas BTO tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan menjadi 82,5 kali hal. Hal ini sejalan dengan tingginya nilai BOR, pendeknya AVLOS dan TOI, yang berarti untuk mengakomodir semakin banyak pasien yang dirawat inap di rumah sakit, maka semakin pendek hari rawat dan semakin pendek/cepat perputaran penggunaan tempat tidur serta semakin tinggi juga frekuensi pemakaian tempat tidur di rawat inap rumah sakit.

NDR (*Net Death Rate*) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan di rumah sakit. Nilai NDR yang dianggap masih dapat ditolerir adalah kurang dari 25 per 1000. tingkat net death rate terendah (11,2‰) tahun 2018 dan tertinggi (22,6‰), yang memenuhi standar net death rate adalah (23‰). Kesimpulan ini adalah tingkat net death rate belum memenuhi standart pelayanan minimal yaitu ≤ 25‰. Hal ini menunjukkan bahwa, pasien-pasien di rawat inap memang ditangani oleh SDM yang kompeten sesuai dengan kondisi dan jenis penyakit pasien. Selain itu sistem jejaring rujukan yang baik antara puskesmas dan rumah

sakit, juga mempunyai andil dalam menurunkan angka NDR, karena untuk saat ini kendala rujukan dari puskesmas ke rumah sakit sangat kecil. Saat ini sarana untuk melaksanakan rujukan dari puskesmas ataupun langsung dari desa ke rumah sakit sudah tersedia diseluruh puskesmas dan desa yang ada diwilayah Kabupaten Balangan, sehingga rujukan bisa dilakukan dengan cepat. Mudahnya proses rujukan antara Rumah Sakit Balangan ke rumah sakit rujukan dengan fasilitas kesehatan yang lebih tinggi juga mempengaruhi capaian NDR. Saat pasien dirawat, jika berdasarkan penilaian profesional dokter penanggungjawab pasien perlu dilakukan rujukan, maka proses rujukan akan segera dilakukan. Rujukan dapat segera dilakukan karena adanya dukungan sarana prasarana dan alat kesehatan yang memadai. Sedangkan untuk SDM yang melakukan rujukan, dinilai perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kompetensi petugas khusus rujukan pasien. Sebagaimana di rumah sakit lain, memang tersedia tenaga khusus dengan kompetensi khusus untuk melakukan rujukan, sehingga proses rujukan tidak mengganggu pelayanan di rawat inap dan penanganan pasien dapat dilakukan dengan optimal.

GDR (*Gross Death Rate*) adalah angka kematian umum untuk setiap 1000 penderita keluar. Nilai GDR seyogyanya tidak lebih dari 45 per 1000 penderita keluar. Pada tahun 2023 nilai GDR 21,2. Nilai ini dapat dikatakan baik, karena masih dibawah batas maksimal. Secara umum kematian pasien di ruang perawatan, baik NDR maupun GDR sebagian besar di sebabkan oleh penyakit yang terkait dengan sistem syaraf, penyakit metabolik, jantung pembuluh darah, paru dan ginjal. Hal ini selaras dengan ketersediaan jenis dokter spesialis yang dimiliki oleh rumah sakit. Pada 2023 Rumah Sakit Balangan belum memiliki dokter spesialis jantung, paru dan ginjal. Untuk dokter spesialis syaraf sudah tersedia, namun masih memiliki kendala dalam hal pemeriksaan penunjang untuk menentukan ketepatan diagnosa pasien, seperti CT Scan. Perencanaan kedepan rumah sakit akan melengkapi ketersediaan dokter spesialis jantung, paru dan ginjal. Selain ketersediaan SDM juga harus didukung oleh ketersediaan alat kesehatan termasuk alat kesehatan penunjang diagnostik. Hal ini selaras dengan tujuan Rumah Sakit Balangan ingin menjadi locus untuk Rumah Sakit Madya yang melayani Kanker, Jantung, Syaraf dan Urologi (Ginjal dan Perkemihan).

Indikator-indikator diatas adalah indikator untuk mengukur tingkat pemanfaatan rumah sakit, mutu dan efisiensi pelayanan rumah sakit. Berdasarkan data capaian tahun 2023 jauh mengalami peningkatan/perbaikan dibandingkan capaian tahun 2022, sehingga dapat diasumsikan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Balangan terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit semakin baik. Hal ini sejalan dengan meningkatnya capaian nilai Survei Kepuasan Pasien dari tahun 2022 sebesar 81,88% menjadi 88,16% pada tahun 2023. Untuk mempertahankan apa yang sudah dicapai dan mewujudkan tujuan yang belum tercapai, tentunya perlu didukung dengan penambahan /perbaikan sarana prasarana, alat kesehatan, penambahan SDM dan peningkatan kompetensi SDM kesehatan yang memadai.

Tabel 2. 52
Jumlah Kunjungan Pasien RSUD Balangan

NO	DATA KUNJUNGAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	RAWAT INAP	8.365	5.051	4.795	6.249	8.262
2	RAWAT JALAN	30.663	20.113	21.518	35.656	51.691
3	IGD	3.733	4.008	2.708	7.552	7.834
	JUMLAH	**42.761**	**29.172**	**29.021**	**49.457**	**67.787**

Sumber : data rekam medik

Berdasarkan data rekam medik jumlah kunjungan pasien RSUD Balangan tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi jumlah kunjungan pasien, pada tahun 2018 total kunjungan pasien berjumlah 36.689 kunjungan dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan jumlah kunjungan yakni berjumlah 42.761 kunjungan, namun pada tahun 2020 dan 2021 terjadi penurunan jumlah kunjungan pasien dikarenakan terjadi pandemi covid-19 dikarenakan pasien takut berobat ke rumah sakit/takut dicovidkan, jumlah kunjungan pasien tahun 2020 adalah 29.172 dan tahun 2021 berjumlah 29.021 kunjungan, kemudian pada tahun 2022 kunjungan pasien kembali meningkat dikarenakan status pandemi covid 19 sudah dicabut sehingga menyebabkan kunjungan pasien menjadi normal kembali bahkan mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2023 jumlah kunjungan pasien baik itu kunjungan pasien rawat jalan, kunjungan pasien di UGD dan jumlah pasien rawat inap mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga Rumah Sakit Datu Kandang Haji sangat perlu untuk melakukan penambahan ruangan baik itu ruang perawatan,ruang poli rawat jalan, perluasan ruang UGD,penambahan ruang lainnya,tenaga dokter spesialis, tenaga medis, para medis dan tenaga kesehatan serta tenaga non kesehatan lainnya Alat Kesehatan, sarana prasarana yang sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada masyarakat yang berobat ke rumah sakit datu Kandang haji Kabupaten Balangan baik itu pasien yang berasal dari kabupaten Balangan maupun pasien yang berasal dari Kabupaten tetangga, karena pasien yang datang berobat ke Rumah sakit Datu Kandang Haji juga ada yang berasal dari kabupaten Tetangga sehingga sangat perlu untuk dilakukan pengembangan Rumah Sakit agar semua pasien yang datang bisa terlayani dengan baik.

Tabel 2. 53
Data Kepegawaian

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Direktur	1	1	1	1	1
2	Kabag TU	1	1	1	1	1
3	Kepala Bidang	3	3	3	3	3
4	Kepala Seksi	7	8	8	9	9
5	Dokter Spesialis	10	11	13	16	14
6	Dokter Umum	11	14	14	14	14
7	Dokter Gigi	1	1	1	1	2
8	Apoteker	8	8	8	8	14
9	D3 Farmasi	14	13	18	17	22
10	Asisten Apoteker	6	6	3	3	
11	Perawat	138	130	124	126	131

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
12	Bidan	63	60	60	59	68
13	Perawat Gigi	3	2	2	3	4
14	Sanitarian	7	7	6	6	5
15	Nutrisionis	8	8	8	8	9
16	Teknisi Elektromedik	3	3	2	2	3
17	Analis Kesehatan	22	22	20	24	25
18	Fisioterpis	2	3	2	2	3
19	Radiografer	6	6	6	8	10
20	Refraksionis Opt.	2	2	1	1	1
21	Rekam Medis	13	13	11	11	12
22	Tenaga Administrasi/staf	62	61	65	65	82
23	Tenaga Lainnya	117	101	109	102	89
	JUMLAH TOTAL	**508**	**484**	**486**	**490**	**522**
	PNS	94	92	90	96	113
	PTT	414	392	396	394	409

Sumber : data kepegawaian

Berdasarkan data jumlah kepegawaian dari tahun ketahun jumlah karyawan RSUD Balangan selalu mengalami kenaikan namun masih terdapat kendala yakni sebagian besar karyawan RSUD Balangan masih berstatus PTT (tidak tetap).

9) PPK BLUD (Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah) Puskesmas

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang berkualitas semakin tinggi, dan itu dapat diwujudkan dengan terpenuhinya sarana prasarana dan alat kesehatan serta sumber daya manusia yang memadai dan sesuai standar sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima yang dapat memanfaatkan anggaran dari berbagai sumber agar lebih maksimal sehingga memperkuat pelaksanaan manajemen puskesmas agar mampu berkompetisi dan berdaya saing, hal ini dapat diwujudkan dengan penerapan PPK BLUD di puskesmas.

BLUD adalah SKPD /UK SKPD yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Saat ini kabupaten Balangan telah menerapkan UHC (Universal Health Coverage) yaitu merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga dalam populasi memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, bermutu dengan biaya terjangkau yang saat ini diwujudkan dengan program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dan dalam pelaksanaan program ini BPJS bekerjasama dengan fasilitas kesehatan yang ada di kabupaten Balangan, dan untuk fasilitas Kesehatan tingkat pertama BPJS bekerja sama dengan 12 puskesmas yang ada dikabupaten Balangan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS yang merupakan warga Kabupaten Balangan. Dari kerjasama puskesmas mendapatkan atau dibayar oleh BPJS

sesuai dengan kapitasi yang mereka terima. Untuk saat ini Puskesmas dalam menjalankan pelayanan mendapatkan sumber dana dari APBD dan Dana kapitasi.

Kementerian Kesehatan RI tahun 2024 menargetkan sebesar 90% puskesmas di Indonesia menjadi PPK BLUD dan sumber dana yang mendukung penerapan PPK BLUD tersebut masih dari sumber dana APBD dan dana kapitasi dengan harapan kedepannya pendanaan dari APBD semakin kecil apabila dalam PPK BLUD nanti puskesmas sudah dapat mandiri dengan sumber dana yang sah. Terkait hal tersebut agar selaras dengan Rencana Strategi Kementrian Kesehatan RI maka pada tahun 2025 Kabupaten Balangan menerapkan PPK BLUD di seluruh puskesmas dengan dasar hukum pelaksanaan penerapan PPK BLUD di puskkesmas antara lain :

1. UU Nomor 1 tahun 2004 pasal 68 dan pasal 69 tentang Perbendaharaan Negara
2. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 346
3. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Permendagri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD
5. Permenkes Nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas Pasal 60

Adapun manfaat puskesmas menerapkan PPK BLUD antara lain dapat melaksanakan perbaikan sarana prasarana, pemenuhan alat kesehatan dan obat-obatan,tidak ada silpa, inovasi program dan penetapan tarif, dapat merekrutmen SDM, dapat berkerjasama dengan pihak swasta maupun pihak lain, kinerja puskesmas membaik dan meningkatkan kesejahteraan pegawai.

C. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mencakup bina marga, cipta karya dan penataan ruang, serta sumber daya air. Salah satu capaian kinerja bina marga yaitu persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap. Persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap adalah panjang jalan dalam kondisi mantap dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan. Hal tersebut mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan. Secara umum tren panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan secara kontinyu.

Pada Tahun 2023 SK jalan Kabupaten mengalami perubahan sehingga panjang jalan Kabupaten Balangan adalah sebesar 567,396 km dan tidak seluruhnya dalam kondisi mantap. Pada tahun 2023 panjang jalan dalam kondisi mantap 344,423 km atau 60,70% yang kondisinya mantap, sedangkan 16,890 km atau 2,98% kondisinya rusak ringan dan 206,083 km atau36,32% dalam kondisi rusak berat.

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, dimana pada tahun 2022 sebesar 0,34 dan meningkat menjadi 0,50 di tahun 2023. Guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Balangan, upaya peningkatan kualitas jalan perlu terus dilaksanakan disertai dengan perencanaan dan pengawasan yang baik.

Drainase, sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Balangan, terdapat di beberapa ruas saja terutama di sepanjang jalan yang tersedia. Pada tahun 2023, drainase berkondisi baik tercatat sebesar 89,79%. Keberadaan drainase sangat diperlukan agar tidak terjadi genangan serta aliran air di badan jalan yang dapat merusak struktur bangunan jalan itu sendiri.

Kabupaten Balangan yang memiliki sejumlah areal persawahan, telah dilengkapi dengan jaringan irigasi. Sampai tahun 2023, jaringan irigasi dengan kondisi baik tercatat sebesar 33,28%.

Selain untuk kegiatan pertanian, air juga digunakan untuk keperluan rumah tangga termasuk air minum. Sampai tahun 2023, sebanyak 87,76% penduduk telah memiliki akses terhadap air minum layak, naik dari 84,05% di tahun 2022, kenaikan ini dikarenakan pemerintah daerah memperioritaskan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat untuk standar hidup layak, namun yang menjadi kendala adalah masih banyaknya masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di perdesaan yang belum dapat mengakses air bersih karena ketidakmampuan dalam membayar biaya per bulannya. Hal ini menjadi permasalahan disamping masih tingginya idle capacity PDAM Balangan (57,71%) Capain ini menunjukkan besarnya penduduk yang terlayani oleh jaringan air minum perpipaan dan non perpipaan terlindungi yang disediakan oleh PDAM dan program Pamsimas. Sementara untuk akses sanitasi terjadi penurunan dimana pada tahun 2022 sebesar 98,85 % menurun menjadi 98,75% di tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena tingginya tingkat pertumbuhan masyarakat yang ada di Kabupaten Balangan yang tidak seimbang dengan pembangunan yang ada, namun capaian akses sanitasi yang tinggi ini masih dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu akses aman, layak dan tidak layak. Untuk akses aman masih sangat rendah, yaitu 0,59%, akses layak sebesar 10,84% dan akses tidak layak sebesar 88,01%. Sehingga masih banyak yang harus dilakukan guna meningkatkan akses tidak layak menjadi akses layak dan akses layak menjadi aman. Dan yang harus menjadi perhatian adalah masih adanya masyarakat yang melakukan praktek BABS yaitu sebesar 1,15% atau 508 KK.

Tabel 2.54
Capaian Indikator Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan Kabupaten Balangan	672,253	672,253	672,253	672,253	567,396
2	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,379	0,417	0,202	0,34	0,50
3	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,0051	0,0050	0,0051	0,20	4,16

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
4	Kondisi Jalan (km) a. Baik b. Sedang c. Rusak Ringan d. Rusak Berat	254,634 44,608 74,390 298,621	280,114 44,608 74,390 273,141	135,760 302,860 89,630 144,003	229,839 129,628 26,289 286,497	286,344 58,079 16,890 206,083
5	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap	44,51	48,30	65,24	53,47	60,70
6	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	37,87	41,67	20,19	27,56	50,47
7	Persentase irigasi kabupaten dlm kondisi baik	46,99	19,10	23,43	30,43	33,28
8	Rasio Jaringan Irigasi	52.67	55.88	58,16	48,79	83,61
9	Persentase penduduk berakses air minum	95,45	80,59	81,72	84,05	87,76
10	Persentase akses sanitasi	80.45	95,09	92,61	98,85	98,75

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Balangan, 2023

Berdasarkan hasil penilaian peninjauan kembali terhadap RTRW Kabupaten Balangan No. 24 tahun 2013-2032 terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang, 96% pelaksanaan pemanfaatan ruang telah terealisasi. Hal ini mengindikasikan adanya percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Balangan sehingga program dan kegiatan yang masuk dalam program jangka menengah dari tahun 2013-2019 telah terlaksana dan terealisasi. Sehingga didapatkan persentase ketaatan terhadap RTRW adalah 96%.

Tabel 2.55
Capaian Indikator Sub Urusan Penataan Ruang Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	0.03912	0.039112	0.039112	0.0392	0,0392
2	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	-	85 %	85 %	85%	85%
3	Ketaatan terhadap RTRW	96 %	96 %	96%	96%	96%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

D. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Salah satu indikator urusan perumahan rakyat adalah indikator rumah layak huni, dihitung berdasarkan Cakupan ketersediaan rumah layak huni yaitu jumlah rumah layak huni pada

tahun yang bersangkutan dibagi jumlah seluruh rumah pada tahun yang bersangkutan dikali 100% sehingga pada pada tahun 2023 sebesar 95,02%, angka ini bertambah dari tahun 2022 yang hanya 93,91%. Keberadaan rumah tidak layak huni di lingkungan masyarakat sangat berkaitan dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial masing-masing keluarga.

Tabel 2.56
Indikator Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Cakupan ketersediaan rumah layak huni (%)	89,00	90,27	93,75	93,91	95,02
2	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau (%)	84,50	85,89	92,68	93,74	94,34
3	Persentase kawasan kumuh yang tertangani (%)	87.87	96,37	74,08	78,49	84,78
4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan(%)	0.002	0,001	0,000	0,0001	0,0001
5	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU(%)	72.73	74.75	86,63	86,90	87,61

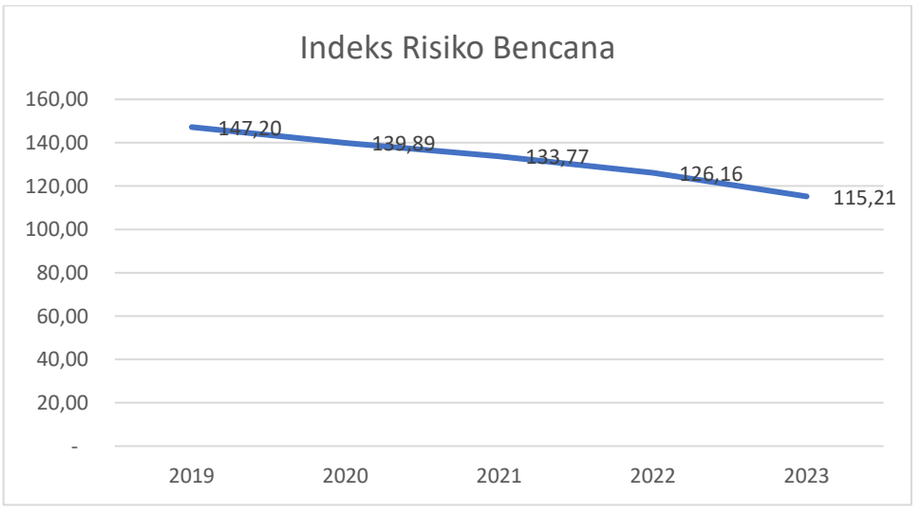
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2023

Cakupan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada tahun 2023 sebesar 95,02%, pendanaan peningkatan RTLH ini didanai baik APBD II, APBD I maupun APBN. Keberadaan kawasan kumuh di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2023 yang tertangani menggunakan dana APBD II, APBD I dan APBN mencapai 100%. Untuk Kawasan kumuh ini menggunakan SK terbaru yang berjumlah sebesar 12,35 Ha dimana tahun 2023 luasan Kawasan kumuh ditargetkan sebesar 3 ha atau sebesar 84,78% dari total Kawasan kumuh yang sesuai SK baru dan SK lama (35,30 + 12,35 = 47,65 ha) yang sudah tertangani sampai dengan tahun 2023 sebesar 35,30 + 5,1 ha = 40,40 ha atau sebesar 84,78%. Guna menekan luasan, upaya penataan terhadap permukiman kumuh seperti melalui peningkatan kualitas dan penataan lingkungan perlu terus dilaksanakan, diiringi dengan sosialisasi dan pembinaan terhadap perilaku hidup bersih dan sehat kepada masyarakat untuk mencegah kumuh Kembali.

E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Gambar 2. 30

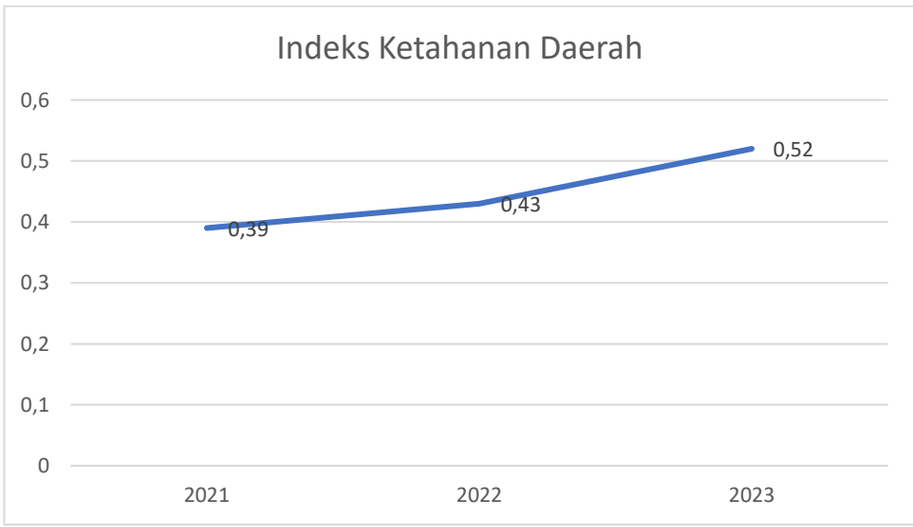
Grafik Indeks Risiko Bencana



Sumber : Buku Indeks Risiko Bencana BNPB, 2023

Indeks Risiko Bencana (IRB) merupakan indikator kinerja lima tahunan atau yang tertuang dalam RPJMD guna mengukur capaian pengendalian risiko bencana atau mitigasi dan dampak bencana di Masyarakat. Indeks resiko bencana merupakan indikator yang dihitung berdasarkan bahaya, kerentanan dan kapasitas. Bahaya berdasarkan frekuensi kejadian suatu bencana, kemudian kerentanan dihitung berdasarkan aspek sosial, budaya, ekonomi dan infrastruktur lingkungan. Kapasitas merupakan pendekatan berdasarkan ketahanan daerahyang diturunkan melalui penguatan kelembagaan, kajian kebencanaan, dan pengembangan sistem informasi. Indeks risiko bencana di Kabupaten Balangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami tren positif, yakni penurunan meskipun masih dalam kategori risiko sedang. Indeks risiko bencana didukung oleh indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dan diampu oleh daerah. Indeks ketahanan daerah merupakan komponen penilaian yang melihat kemampuan atau segi kapasitas suatu daerah dalam kebencanaan. Semakin tinggi nilai IKD, maka kemampuan suatu daerah dalam menangani kebencanaan semakin matang, dan berdampak pada menurunnya nilai IRB yang mana hal tersebut adalah menandakan kinerja yang baik. Adapun perkembangan indeks ketahanan daerah Kabupaten Balangan dapat dilihat melalui grafik dibawah ini.

Grafik 2. 31
Grafik Indeks Ketahanan Daerah



Indeks ketahanan daerah Kabupaten Balangan secara umum mengalami peningkatan meskipun indeks ketahanan daerah masih belum mencapai target yaitu 0,56. Semakin meningkatnya indeks ketahanan daerah diharapkan semakin baik kesiapsiagaan SDM penanganan bencana dan masyarakatnya. Guna mencapai target dalam jangka waktu pendek BPBD telah berupaya memenuhi sarana prasarana penanganan bencana seperti pemenuhan peralatan penanganan kebakaran pada setiap desa, pemenuhan mobil damkar yang diletakkan disetiap kecamatan, dan peletakkan EWS atau Early Warning System pada wilayah yang rentan banjir. Selain pemenuhan sarana prasarana, BPBD juga melatih sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan bencana agar penyelamatan berjalan aman dan sesuai SOP yang mana hal ini juga merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) kebencanaan. Pelatihan berupa pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC), yang berisi pemahaman secara teoritis maupun praktik. Sejalan dengan upaya tersebut, dalam pemenuhan indikator Trantibumlinmas dalam kurun waktu lima tahun terakhir telah menunjukkan trend yang positif. *Response time rate* pada lingkup Kabupaten Balangan mampu diatasi dalam kurun waktu delapan menit, setelah empat tahun sebelumnya berada dalam angka 15 menit. Cakupan layanan kebakaran yang sudah mencakup seluruh desa, sehingga desa yang mengalami kejadian kebakaran dapat dilayani.

Tabel 2. 57
Capaian Indikator Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	2355	2355	2355	2338	2355
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	130 (100%)	29 (100%)	23 (100%)	22 (100%)	20 (100%)

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	189 Desa	61 Desa	10 Desa	20 Desa	10 Desa
5.4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	8 Menit
5.5	Persentase Penegakan PERDA	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja & BPBD Kabupaten Balangan, 2023

Indikator ketentraman dan ketertiban umum Terkait Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) tahun 2022 berjumlah sebanyak 2338 Orang yang tersebar 157 Desa dan Kelurahan yang ada di seluruh Kabupaten Balangan dengan sebaran 15 (lima belas) di setiap Desa dan Kelurahan terjadi penurunan di tahun 2023 menjadi sebanyak 2335 Orang di karenakan sebaran petugas perlindungan masyarakat menyesuaikan dengan luas wilayah Desa dan Kelurahan sehingga terjadi penurunan sebanyak 12 Orang.

Untuk penyelesaian Pelanggaran K3 di kabupaten Balangan pada Tahun 2022 terdapat 22 kasus yang masuk dan 22 kasus yang tertangani dengan persentase 100% sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak duau kasus menjadi 20 Kasus Pelanggaran yang masuk dan yang 20 Kasus Pelanggaran yang tertangani terdiri dari pelanggaran PP No 10 Tahun 2026 Tentang Penyelenggaran Administrasi kependudukan sebanyak 15 Kasus yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Paringin Selatan Desa Lingsir 4 Kasus, Kecamatan Paringin Desa Sungai Ketapi 5 kasus, Kelurahan Paringin Kota 1 Kasus Desa Dahai 2 Kasus Kecamatan Batu Mandi Desa Mampari sebanyak 3 kasus dan Pelanggaran Perda No 5 Tahun 2066 Tentang pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol terdiri dari 7 kasus yang tersebar pada 2 Kecamatan Yaitu kecamatan Paringin Desa sungai ketapi 3 Kasus Desa Dahai 1 Kasus dan Kecamatan Paringin Selatan Desa Lingsir sebanyak 3 Kasus. Penurunan Angka pelanggran K3 tidak terlepas dari Patroli pengamanan wilayah secara rutin dan berkala yang dilakukan oleh pihak jajaran Satpol PP Kabupaten Balangan dan juga Sosialisasi tentang Perda dan Perkada pada Daerah Daerah rawan Pelanggaran Perda dan Perkada.

Upaya meningkatkan lingkungan yang waspada atau tanggap bencana, diantaranya BPBD telah melaksanakan sosialisasi dan edukasi ke beberapa sekolah, dan menggandeng unsur lembaga kemasyarakatan seperti PKK, aparatur desa, dan Satlinmas. Harapan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi dapat menambah wawasan masyarakat terhadap pentingnya mitigasi bencana secara mandiri, dan langkah awal dalam membentuk Desa Tangguh Bencana (DESTANA). Meskipun begitu, masih terdapat kendala diantaranya masih ada titik yang belum terjangkau oleh sinyal sehingga informasi kejadian diterima terlambat. Kendala lainnya infrastruktur yang kurang memadai, apabila terjadi bencana jangkauan tim pemadam kebakaran tidak bisa cepat dan leluasa mencapai area kejadian seperti wilayah yang padat penduduk, jalanan yang rusak, dan wilayah yang jauh dari pusat

kota. Guna meminimalisir keparahan kejadian, maka diperlukan pembuatan titik hydrant mandiri dan urgensi pembentukan DESTANA menjadi penting agar mencapai masyarakat yang waspada, mandiri dan tangguh bencana.

F. Urusan Sosial

Tabel 2. 58
Capaian Indikator Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2019 - 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6. Sosial						
6.1	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	65.84%	40.95%	54,91%	68,72%	59,40%
6.2	Persentase PPKS yang tertangani	65.84%	40.95%	54,91%	68,72%	59,40%
6.3	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	53.01%	20.66%	54,91%	68,72%	59,40%
6.4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	13.60%	149.80%	267.36%	100%	100%
6.4	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah PPKS (Jiwa)	18,286	47,523	96.059	68.334	60.942
6.5	Persentase PPKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	53.01	20.66	54.91	68.72	59,40%
	Rantra/BPNT	6,082	6,214	7.138	6.669	5.467
	PKH	3,612	3,604	3.652	3.687	2.996
		9,694	9,818	10.790	10.356	8.463

Sumber : Dinas Sosial data diolah, 2023

Realisasi indikator sosial mengalami kondisi fluktuatif pada beberapa indikator kinerja yang disebabkan oleh adanya perhitungan kembali pada beberapa indikator, maupun kondisi jumlah PPKS yang fluktuatif. Hal tersebut berpengaruh kepada persentase perolehan PPKS yang dibantu, tertangani, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Meskipun realisasi berada pada angka 59,40% namun dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 58,95% sehingga capaian bisa memenuhi pada angka 100,76%. Indikator diatas juga terkait dengan indikator kinerja utama yang masuk ke dalam dokumen RPJMD. Indikator persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat memiliki kondisi fluktuatif dimana pada tahun 2021 melampaui dari 100% sebagai dampak

adanya banjir besar yang menimpa hampir seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Kondisi pada saat itu banyaknya korban yang terdampak bencana banjir membuat kinerja Dinas Sosial meningkat secara drastis dalam hal penyaluran bantuan bahkan dukungan pelayanan lainnya bagi masyarakat terdampak bencana. Pada indikator Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikelola oleh pemerintah daerah mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang dipengaruhi oleh jumlah PPKS yang juga mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi kepada PPKS yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ikut mengalami penurunan pada tahun 2023 sebanyak 1.202 individu yang sudah keluar dari kelompok penerima BPNT.

Tabel 2. 59
PPKS Yang Tertangani Tahun 2023

No	PPKS	Jumlah PPKS (orang)	Jumlah PPKS yang Tertangani (orang)
1	Anak Terlantar	33	33
2	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	8	8
3	Lanjut Usia	3.701	284
4	Penyandang Disabilitas	1.129	39
5	Korban Bencana Alam	21	21
6	Korban Bencana Sosial	37	37
7	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	62	52
8	Fakir Miskin	54.289	35.578
9	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.636	150
	Jumlah	60.942	36.202

Sumber : Dinas Sosial Data Diolah, 2023

PPKS yang tertangani pada tahun 2023 terealisasi sebesar 36. 202 orang, jumlah yang terlayani didapatkan melalui penelusuran mandiri bekerjasama dengan TKSK Kecamatan dan PSKS di delapan kecamatan serta adanya inovasi Layar Si Balang yang menjadi media pelaporan mandiri Masyarakat langsung ke Dinas Sosial. Dari 36.202 orang tersebut diantaranya yaitu :

1. penanganan anak terlantar yang ditindaklanjuti mengikuti pendidikan dan pelatihan keterampilan di panti perlindungan sosial dan rehabilitasi anak dan remaja Mulia Satria agar kedepannya dapat hidup mandiri. Bantuan lainnya juga berupa uang saku kepada anak tersebut selama mengikuti pelatihan.
2. Kedua, anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana anak tersebut berusia dibawah 18 tahun dengan keadaan tidak memiliki tempat tinggal dan tidak ada yang mengasuhnya sehingga memiliki permasalahan dengan hukum. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial diantaranya berupa pendampingan dan membantu penyelesaian kasus tersebut diantaranya kecelakaan lalu lintas, anak dengan perilaku menyimpang, dan kasus pelecehan seksual. Penyelesaian kasus dibantu Pekerja Sosial yang juga menjadi SDM di Dinas Sosial.

3. Ketiga, berupa pelayanan terhadap lanjut usia terlantar, Lanjut usia terlantar adalah orang lanjut usia yang tidak mempunyai bekal hidup, pekerjaan, penghasilan bahkan tidak mempunyai sanak keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Lanjut usia terlantar di Kabupaten Balangan sebanyak 3.701 orang dan yang mendapatkan pelayanan berupa pemberian sembako sebanyak 18 orang yang diberikan oleh Kabupaten Balangan atau bersumber dari APBD II, dan 29 orang dari Kementerian Sosial atau APBN sehingga total lansia yang mendapatkan bantuan sembako sebanyak 47 orang. Kemudian bantuan berupa alat bantu yaitu kursi roda, alat bantu dengar, dan tongkat lansia diberikan sebanyak 8 buah dari APBD II dan 2 buah dari Kementerian Sosial atau APBN. Pemberian bantuan berupa sarana kamar diberikan kepada 4 orang dari Kabupaten Balangan dan 223 dari Kementerian Sosial, sehingga total lansia terlantar yang dibantu sebanyak 284 orang.
4. Keempat yaitu pelayanan kepada penyandang disabilitas. Penyandang Disabilitas seseorang yang memiliki hambatan fisik atau mental yang sifatnya mengganggu atau merupakan suatu kesulitan baginya untuk melakukan kegiatan sehari – hari secara layak. Jumlah penyadang disabilitas di Kabupaten Balangan yaitu 1.240 Orang, selanjutnya layanan yang diperoleh berupa bantuan alat disabilitas yang terdiri dari kursi roda, alat bantu dengar, tongkat kruk, dan tongkat netra yang mana 48 Buah berasal dari pemerintah daerah dan 10 Buah nberasal dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya layanan yang diberikan berupa bantuan permakanan sebanyak 600 orang yang berasal dari pemerintah daerah. Sehingga penyandang disabilitas yang mendapatkan pelayanan berupa bantuan alat bantu dan permakanan berjumlah 658 orang dengan capaian 53,06%.
5. Kelima yaitu layanan terhadap korban bencana alam. Korban bencana alam ialah orang atau keluarga yang mengalami suatu peristiwa alam yang berdampak besar bagi kehidupannya atau kesehariannya yang terjadi karena fenomena alam berupa banjir, longsor, dan puting beliung. Tahun 2023 di Kabupaten Balangan terdapat 21 orang terdampak bencana yang telah mendapatkan bantuan berupa kebutuhan pokok sehari-hari untuk mengurangi beban pengeluarannya. Layanan ini didukung oleh Tagana dan PSKS Kabupaten Balangan. Keenam, memberikan layanan atau bantuan kepada korban bencana sosial. Bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh faktor non alam seperti adanya konflik sosial, situasi sosial yang tidak kondusif atau terror. Hal ini dapat berdampak kepada meningkatnya angka kriminalitas, kemiskinan, dan stabilitas ekonomi yang terganggu. Dinas Sosial Kabupaten Balangan telah memberikan bantuan terhadap individu yang terdampak bencana sosial sebanyak 37 orang yang didukung penyalurannya oleh Tagana Kabupaten Balangan sebagai PSKS.

6. Keenam, yaitu pelayanan terhadap Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Wanita Rawan Sosial Ekonomi, merupakan Wanita dewasa berusia minimal 18 tahun dan maksimal 59 tahun dengan kondisi sudah menikah atau tidak menikah lagi atau belum menikah namun tidak mempunyai penghasilan yang cukup. Fenomena Wanita Rawan Sosial Ekonomi biasanya ialah mereka yang menjadi tulang punggung, mengalami gangguan fungsional dalam kehidupan sosial dan atau ekonominya sehingga yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk menjalankan peranan sosialnya. Terdapat 52 Orang yang mendapatkan pelayanan dari Dinas Sosial, sebanyak 6 Orang mendapatkan pelayanan Pendidikan dan pelatihan keterampilan di panti sosial bina wanita dan 46 orang menerima bantuan usaha ekonomi produktif sehingga jumlah perempuan rawan sosial ekonomi yang dibantu sebanyak 52 orang.
7. Ketujuh yaitu pelayanan terhadap fakir miskin sejumlah 35.578 orang dengan bantuan berupa Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rehab RTLH) sebanyak 15 buah dari Pemerintah Kabupaten Balangan dan 4 buah dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebanyak 7 buah dari Pemerintah Kabupaten Balangan, Program Keluarga Harapan (PKH) kepada 11.984 Jiwa, Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang diberikan kepada 21.668 jiwa, usaha ekonomi produktif sebanyak 54 orang dari pemerintah Kabupaten Balangan dan terakhir yaitu Santunan Kematian kepada 919 orang. Dinas Sosial juga memberikan bantuan kepada Komunitas Adat Terpencil (KAT) di wilayah Desa Marajai Kecamatan Halong, berupa layanan pendampingan pemberian bantuan peralatan stimulan sehingga tersedianya sebuah lokasi, sarana dan prasarana untuk memudahkan beraktifitas oleh KAT tersebut kepada 54 Kepala Keluarga atau 150 orang. Terlayaninya PPKS yang ada di Kabupaten Balangan masih memiliki beberapa catatan, yaitu tingkat kemapanan data yang bisa dimanfaatkan kapan saja dan oleh individu yang membutuhkan masih belum siap, sehingga dari jumlah sasaran atau penerima manfaat akan membutuhkan waktu untuk survey dan verifikasi Kembali. Masih adanya warga yang membutuhkan dan tergolong sebagai PPKS namun belum memiliki administrasi yang sesuai sehingga tidak dapat mendapat pelayanan sosial, perlunya optimalisasi sumber SDM sosial lainnya yang berada di desa seperti pendamping PKH yang masih belum optimal menjadi penyambung antara apa yang terjadi di desa untuk dijadikan bahan kebijakan di ranah OPD.
8. Upaya yang sudah dilakukan oleh Dinas Sosial yaitu dengan memanfaatkan PSKS dan TKSK yang berada di kecamatan, serta meningkatan kolaborasi dengan OPD terkait dalam pemenuhan layanan sosial lainnya, adanya inovasi yang membuka layanan pelaporan langsung oleh masyarakat, dan dukungan kepala daerah melalui program-program prioritas untuk PPKS.

2.1.3.1 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

A. Urusan Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja pada perusahaan perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) mencerminkan besar kecilnya daya tampung proyek Investasi PMDA/PMDN semakin besar pula jumlah tenaga kerja yang dapat terserap pada perusahaan tersebut.

Tabel 2. 60
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah tenaga kerja yang berkerja pada perusahaan PMA/PMDN	1.654	3.174	3.442	4.317	4.034
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	8	89	93	93	374
3	Rasio daya serap tenaga kerja	206,75 : 1	35,66 : 1	37,01 : 1	46,42 : 1	10,79 : 1

Sumber : DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2024

Pada tahun 2023 Jumlah perusahaan PMDN yang tercatat di Kabupaten Balangan yang termasuk dalam Wajib Lapor ketenagakerjaan adalah sebanyak 374 Perusahaan. Pada 374 Perusahaan tersebut terserap tenaga kerja sebanyak 4.034 orang. Dari Hal ini diketahui rasio daya serap tenaga kerja pada tahun 2023 adalah sebesar 10,79 : 1. Dengan tingkat rasio daya serap tenaga kerja tersebut, maka rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Balangan mmenurun dari tahun sebelumnya tahun 2022 sebesar 46,42 : 1 menjadi 10,79 : 1 pada tahun 2023. Sedangkan beberapa capaian indikator urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 61
Capaian Indikator Tenaga Kerja Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Tenaga Kerja						
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	4	9	7	3	1
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	4	4	5	2	1
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	2,989	453	164	770	1,056
1.4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	2,931	5,898	2931	2931	4034
1.5	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	18	7	8	9	10
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	544	192	192	32	144

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis Masyarakat	60	128	160	48	144
1.8	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan Kewirausahaan	350	32	-	48	155
1.9	Rasio lulusan S1/S2/S3	3566/818	705/81	2331/260	2137 / 234	1669/139
		4,36 : 1	8,7 : 1	8,97 : 1	9,13 : 1	12,0 / 1

Sumber : DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2024

Angka sengketa pengusaha-pekerja untuk tahun 2023 berjumlah 1 kasus/sengketa, dengan rincian sebagai berikut : 1 Kasus dari PT. Bakti Putra Meratus. Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB) berjumlah 1 kasus. Besaran pencari kerja yang terdaftar yang di tempatkan berjumlah 1056 orang pada tahun 2023, lebih besar di bandingkan dengan tahun 2022 yang hanya berjumlah 770 orang.

Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek, berdasarkan hasil laporan perusahaan di Kabupaten Balangan melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan secara online pada www.wajiblapor.kemnaker.go.id terdapat 4.034 orang karyawan perusahaan yang didaftarkan oleh perusahaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2023 Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi berjumlah 144 orang, dan tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kemasyarakatan berjumlah 144 orang, serta jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan berjumlah 155 orang.

B. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2. 62
Capaian Indikator Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2019– 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	IPG	92,12%	92,22%	92,33%	92,33%**	93.21%
2	IDG	69,55%	70,14%	70,57%	70,57%**	73.27%
3	Persentase ARG terhadap Belanja Langsung APBD	7,25%	12,35%	28,65%	28,65%	22,92%
4	Persentase Perkawinan Anak Usia Dini	1%	1,48%	1,01%	0,64%	0,68%

Sumber : Dinas P3APPKBPMD data diolah, 2023

Isu terkait gender pada masa kini merupakan hal yang semakin intens mendapat perhatian di masyarakat. Sebelumnya, bila kita tentunya hafal bagaimana kisah Kartini

dalam memperjuangkan hak-hak esensial wanita agar setara dengan pria, maka sampai saat ini upaya mengurangi kesenjangan tersebut dituangkan melalui beberapa indikator diatas. Terdapat Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan gambaran atas kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki yang diambil tolak ukurnya melalui data IPM. Perkembangan IPG Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir berdasarkan data diatas, terus menerus mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2019 92,12% menjadi 92.22% atau terdapat peningkatan sebanyak 1,11%, kemudian pada tahun 2022 sebesar 92,33% menjadi 93,21%. Angka yang menunjukkan peningkatan terus menerus pada indikator IPG tidak lepas dari upaya OPD terkait dalam meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya perempuan untuk tetap mendapatkan hak-hak dasarnya dalam dunia pendidikan, kesehatan, dan kemudahan mendapatkan akses yang mendukung derajat kelayakan hidupnya. Salah satu diantaranya pada tahun 2023 Bidang P3A Dinas P3APPKBPMD menyelenggarakan pelatihan pada kelompok perempuan seputar wirausaha bekerjasama dengan NGO, pelatihan tidak hanya praktik membuat produk namun juga dari awal memulai usaha, membuat produknya, dan memasarkannya. Para perempuan juga diberi kesempatan membangun jejaring sosial dan belajar berkomunikasi dikhalayak umum sehingga merasa menjadi lebih percaya diri dan mandiri.

Selain Indeks Pembangunan Gender (IPG), juga terkait dengan bagaimana peran perempuan didalam aspek ekonomi, politik, maupun perempuan yang dapat menduduki posisi strategis. Beberapa aspek diatas dituangkan dalam Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Kabupaten Balangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir memperlihatkan peningkatan yang terus menerus, mulai tahun 2019 IDG mencapai 69,55% kemudian tahun 2020 mencapai 70,14%, tahun 2021 hingga 2022 stagnan pada angka 70,57% dan tahun 2023 mencapai 73,27%. Meningkatnya capaian IDG didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender dan pentingnya kesetaraan gender dalam kehidupan sehingga Masyarakat antusias dalam mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas P3APPKBPMD, selain itu mulai meningkatnya kesadaran dalam lingkungan kerja yang melibatkan aspek ramah perempuan juga menjadi dukungan atas terbukanya peluang perempuan untuk lebih berdaya. Meningkatnya capaian IDG bukan berarti tidak ada hambatan, masih adanya perlakuan yang bersifat patriarki dalam lingkungan terdekat perempuan yang tumbuh secara sadar maupun tidak, masih memerlukan intervensi mendukung peningkatan self awareness.

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) terhadap belanja langsung APBD merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran atau Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Situasi PPRG pada

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan mengalami kondisi fluktuatif. Pada tahun 2109 hingga 2022 besaran APBD terhadap ARG mengalami peningkatan, namun pada tahun 2023 menurun sebesar 22,92% atau terdapat penurunan sebesar 5%. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan OPD masih belum optimal meskipun secara umum kondisi keuangan daerah dalam keadaan baik. Upaya yang telah dilakukan diantaranya melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi dengan OPD yang berperan menyumbang persentase ARG, selain itu jumlah yang ditargetkan pada tahun 2023 juga cenderung masih rendah yaitu 21,05%. Meskipun terjadi tren menurun, namun secara kinerja sudah mencapai target 108,05%. Target disesuaikan pada penyusunan Renstra penyesuaian pada tahun 2024 yaitu 30% dan 2025 32%.

Isu yang masih memerlukan penanganan intensif selain kekerasan terhadap anak, juga masih adanya pernikahan dini di Kabupaten Balangan. Angka pernikahan dini di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan pada tahun 2023 meskipun tidak signifikan seperti pada tahun 2020. Pernikahan dini sering kali menjadi jalan keluar bagi keluarga dengan kategori menengah kebawah maupun miskin. Hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang semakin tidak pasti, sehingga mengurus anak menjadi beban tersendiri terhadap kondisi ekonomi keluarga pada kelas rentan miskin (menengah kebawah) maupun miskin. Anak yang menikah Ketika usia dini memiliki risiko terhadap kematian ibu, kematian bayi, anak yang stunting, dan keberlanjutan keluarga dalam kondisi ekonomi rentan. Angka pernikahan dini di Kabupaten Balangan tercatat pada tahun 2020 merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir yaitu 1,48%. Pada tahun tersebut dinama fenomena penyebaran virus covid-19 sehingga segala aktifitas yang mendukung perkembangan anak seperti sekolah dan aktifitas produktif yang menunjang keterampilan anak juga terhambat. Kemudian pada tahun 2022 sempat menurun sebesar 0,64% namun mengalami peningkatan 0,8% pada tahun 2023 atau sebesar 0,68%. Faktor sosial budaya juga berpengaruh terhadap dorongan anak untuk menikah di usia dini.

Guna mendorong percepatan penurunan angka perkawinan anak, Dinas P3APPKBPMD membuka pelayanan PUSPAGA, dimana ketika terdapat pengajuan dispensasi nikah PUSPAGA akan melakukan reviu terlebih dahulu sebelum masuk ke ranah pengadilan agama. Terlaksananya MoU dan kesepakatan bersama dalam hal pencegahan perkawinan anak dengan Dinas Kesehatan, Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama Kabupaten Balangan terkait layanan konseling pra nikah juga diharapkan dapat menekan angka pernikahan dini. Kendala yang masih ada yaitu, terdapat data pernikahan dini yang tidak tercatat atau diluar pengajuan dispensasi nikah sehingga OPD harus berkoordinasi dengan pemerintah desa lebih intens untuk dapat menyampaikan informasi apabila ada warganya yang melaksanakan pernikahan usia anak.

Tabel 2. 63
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Layanan Urusan Wajib Non Dasar						
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	80,20%	94,88%	94,92	80,43	-
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	16%	16%	16%	16%	20%
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	19,80%	5,12%	5,08%	19,57%	-
2.4	Rasio KDRT	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	57,12%	44,85%	65,55%	61,66%	58,94%
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100%	100%	100%	100%
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100%	100%	100%	100%
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	100%	100%	100%	100%
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100%	100%	100%	100%
2.10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%
2.11	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	1,01	90,94	0,97	0,99	1,01
2.12	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	1,01	58,61	1,22	1,21	0,84
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	0,99	-	0,99	0,89	0,95

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi	-	-	-	-	0,96
2.15	Rasio kemampuan membaca huruf latin perempuan terhadap laki-laki pada kelompok 15-24 tahun	-	-	-	-	0,98
2.16	Rasio kemampuan membaca huruf lainnya Perempuan terhadap laki-laki pada kelompok 15-24 tahun	-	-	-	-	0,15

Sumber : Dinas P3APPKBPMD data diolah, 2023

Capaian indikator urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2019 hingga tahun 2023 terdapat banyak indikator yang tren positif namun ada pula pada indikator yang mengalami tren menurun. Beberapa indikator menurun yang justru menandakan pencapaian yang baik diantaranya, rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada tahun 2021 hingga 2022 sempat meningkat 0,1% yaitu 0,2% daripada tahun 2020 dan 2019 yang sudah mencapai 0,1%, pada tahun 2023 membaik yakni kembali menjadi 0,1% yang menandakan menurunnya jumlah KDRT. Rasio KDRT merupakan indikator yang menggambarkan jumlah keseluruhan kasus yang terjadi pada waktu tertentu atau prevalensi kekerasan dalam rumah tangga disuatu wilayah. Rasio KDRT dihitung dengan membandingkan jumlah kasus KDRT yang terlaporkan atau terdokumentasikan. Sehingga, dengan konsep indikator tersebut perlu adanya upaya bidang PPPA untuk meningkatkan kewaspadaan dan kepekaan masyarakat terhadap bentuk-bentuk kasus KDRT baik yang ringan hingga berat, dan berani melaporkannya. Tidak jarang, masih ada yang menganggap melaporkan kekerasan rumah tangga di lingkungan sekitarnya merupakan hal yang tabu atau ikut campur terhadap urusan rumah tangga orang lain. Guna meningkatkan awareness masyarakat terhadap pentingnya melindungi anggota keluarga sebagai korban KDRT, bidang PPPA telah melaksanakan sosialisasi yang bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dan peningkatan kapasitas kelompok perempuan agar mampu mandiri dan berdaya.

Selanjutnya indikator yang menggambarkan keberdayaan perempuan pada tatanan profesi, yaitu partisipasi Angkatan Kerja Perempuan dan Persentase Perempuan yang duduk di kursi parlemen atau DPR. Angkatan kerja Perempuan di Kabupaten Balangan mengalami penurunan, secara umum penurunan Angkatan kerja Perempuan bisa disebabkan oleh kurangnya kesempatan Perempuan dalam menduduki bagian-bagian tertentu pada pekerjaan atau masih tingginya persepsi pekerjaan tersebut dengan gender tertentu. Secara umum, hal yang menjadi hambatan Perempuan untuk tetap bekerja atau melamar pekerjaan yaitu kurang mendukungnya fasilitas ramah perempuan di lingkungan kerja dan penyokong

diluar pekerjaan seperti adanya lembaga pendidikan formal maupun non formal untuk menitipkan anaknya, sulitnya mencari tenaga bantuan untuk mengurus pekerjaan rumah. Faktor kesenjangan upah antara pekerja laki-laki dan perempuan, tingkat pendidikan yang masih belum bisa sesuai dengan kriteria minimal melamar pekerjaan dan pekerja perempuan yang masih mengalami diskriminasi bisa menjadi pemicu untuk perempuan enggan bekerja lagi atau memasuki dunia kerja. Hal yang perlu menjadi perhatian lebih, yaitu keberadaan Perempuan yang pada tahun 2022 sebanyak 12.349 masuk dalam kelompok pekerja Perempuan berstatus tidak dibayar atau pekerja keluarga tidak dibayar. Mereka adalah kelompok yang harus mendapatkan perhatian lebih agar mampu memiliki penghasilan sendiri, dengan diberikan bekal keterampilan, pendidikan non formal, maupun pelatihan kerja agar terhindar dari ketergantungan dan tidak mampu menambah penghasilan untuk keluarga atau diri sendiri. Indikator Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan, hal ini tergambar dari jumlah Perempuan yang mencalonkan diri sebagai DPRD untuk Pemilu tahun 2024 sebanyak 110 orang dengan persentase keterwakilan Perempuan dalam daftar calon legislative tetap pada pemilu tahun 2024 sebanyak 42,47%. Proporsi kursi yang diduduki perempian di DPRD Kabupaten Balangan sudah meningkat dibandingkan kurun waktu empat tahun terakhir konstan berada pada angka 16%.

Indikator Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki pada jenjang pendidikan dasar hingga tinggi mengalami tren fluktuatif. Pada indikator Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP mengalami penurunan, Angka Partisipasi Murni atau APM merupakan proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Capaian Rasio APM Perempuan terhadap Laki-Laki pada jenjang sekolah menengah pertama mengalami penurunan pada kurun waktu tiga tahun terakhir yaitu dari 1,22 di tahun 2021, 1,21 di tahun 2022, dan 0,84 pada tahun 2023.

Kemudian indikator rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun mengalami perbedaan perhitungan dikarenakan adanya penyesuaian rumus oleh BPS. Tahun 2023, jumlah kemampuan membaca huruf latin pada Perempuan terhadap laki-laki mencapai 0,98 apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya angka pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Dalam mendukung kecakapan membaca atau rasio melek huruf, melalui pemberdayaan Perempuan yang bekerjasama dengan NGO berupaya mengadakan pelatihan selain dapat mempererat jejaring Perempuan, memupuk rasa percaya diri agar Perempuan bisa memajukan dirinya dalam kelompok tersebut.

C. Urusan Pangan

Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan

sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan dan minuman. Sementara itu, Ketahanan Pangan menurut UU tersebut didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Ruang lingkup ketahanan pangan meliputi akses, ketersediaan, pemanfaatan dan stabilitas.

Tabel 2.64
Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023

No.	Komoditi	Ketersediaan Produksi (Ton)					Kebutuhan Tahun (Ton)					Surplus/ Defisit (Ton)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beras	96.558	103.633	100.088	74,741	22.588,95	14.450	14.643	14.740	8.036	12.950	82.108	88.990	85.348	7.961	9.638,95
2	Gula Pasir*	1.253	1.248	1.256	1,401	0	1.216	1.232	1.240	831	1.311	37	16	16	830	-1.311,00
3	Minyak Goreng*	1.255	1.315	1.273	1272	0	1.242	1.259	1.267	905	1.446	13	56	6	-367	-1.446
4	BawangMerah*	453	471	460	663	0	431	437	440	225.72	441	22	34	20	219	-441
6	Cabai Merah/rawit	15.125	15.432	14.752	798	408,50	14.450	14.643	14.740	125	149	675	789	12	-673	259,50
8	Daging Sapi	207	248	225	5,232	384,69	236	239	240	497,97	38	(29)	9	(15)	493	346,69
9	Daging Ayam	1.088	1.410	1.785	76,983	2.399,54	934	946	952	773,19	1.190	154	464	833	696	1.209,54
10	Telur Ayam Ras	1.268	1.281	1.189	83,202	13.685,81	929	941	947	672,21	950	339	340	235	589	12.735,81
11	Jagung	94.683	16.374	38.660	16,815	6.834,69	194,25	896,33	159	64,02	98,2	94.488,75	15.477,67	38.501	47	6.736,49
12	KacangKedelai	325,54	306,70	-	61	0	712,25	479	321	0	0	(386,71)	(172,3)	(321)	-61	0
13	Kacang Hijau	37,30	93	-	-	0	12,75	-	40	0	0	24,55	-	(40)	0	0
14	Kacang Tanah	293,90	199,07	41,02	-	0	129,5	-	212	0	0	164,4	-	(170,98)	0	0
15	Ubi Kayu	5.963	2.396	490	478	0	1.359,75	-	373	0	0	4.603,25	-	117	0	0
16	Ubi Jalar	915	275	-	-	0	777	-	185	0	0	138	-	(185)	0	0

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan, 2024

Capaian ketersediaan pangan Kabupaten Balangan pada tahun 2019 - 2023 cukup baik namun di tahun 2023 ada beberapa komoditas yang mengalami penurunan maupun kenaikan yang signifikan. Komoditi yang mengalami surplus terbesar adalah telor ayam ras dan beras. Komoditi yang mengalami defisit terbesar yaitu Bawang merah. Untuk komoditi Minyak goreng dan cabe merah pada tahun 2022 mengalami kekurangan, di tahun 2023 sudah meningkat signifikan dan mencukupi kebutuhan di Kabupaten Balangan.

D. Urusan Bidang Pertanahan

Penatagunaan tanah pada Pemerintah Kabupaten Balangan ditekankan pada seberapa banyak bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemerintahan Kabupaten Balangan, termasuk seberapa banyak bidang

tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah mendapatkan sertifikat penggunaan hak pakai dari Badan Pertanahan Nasional. Pengukuran kinerja penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan diukur dari persentase perbandingan jumlah bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan atau kepentingan umum terhadap keseluruhan bidang tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Balangan. Data penatagunaan tanah Pemerintah Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 65
Penatagunaan Tanah Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2023

Jumlah Bidang Tanah Pemerintah Kabupaten Balangan	Jumlah Bidang Tanah Yang Digunakan	Jumlah Bidang Tanah Yang Belum Digunakan	Persentase Penatagunaan Tanah
2.258	2.222	36	98,41%

Sumber : Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Tahun 2024

Faktor penghambat dalam penatagunaan tanah di Pemerintah Kabupaten Balangan adalah:

a. Jumlah bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan yang sudah bersertifikat masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan bidang tanah aset Pemerintah Kabupaten Balangan. Hal ini berakibat pada kurangnya kredibilitas Pemerintah Kabupaten Balangan dalam hal penatagunaan tanahnya.
b. Terdapat beberapa bidang tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang masih belum digunakan sehingga kondisinya masih berupa tanah kosong dengan kondisi masih ditumbuhi tanaman dan rerumputan liar.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan urusan pertanahan adalah sebagai berikut;

1. Kegiatan Inventarisasi & Penatagunaan Tanah dan Penegasan Batas Tanah Milik Daerah:
    a. Memfasilitasi sertifikasi lahan milik Pemkab. Balangan sebagai tindak lanjut perjanjian kerjasama PemerintahKabupaten Balangan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan. Persentase luasan lahan yang bersertifikat dibandingkan dengan luasan lahan yang seharusnya bersertifikat dalam daerah di Kabupaten adalah sebesar 7%, atau seluas 69.339.970 m^2 dari 985.503.630 m^2.
    b. Pemasangan patok dan plang nama dan juga dilaksanakan pemasangan pagar batas tanah di beberapa lahan/tanah milik Pemerintah Kabupaten Balangan terutama yang telah selesai sertifikatnya dan hasil pengadaan tanah tahun sebelumnya dalam rangka pengamanan aset tanah milik daerah.
2. Kegiatan Fasilitasi Penanganan Konflik Pertanahan

a. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan aset-aset tanah, khususnya tanah sekolah (SDN & SMP) dan layanan kesehatan (Puskesmas & Pustu) dengan melakukan inventarisasi dan identifikasi administrasi surat menyurat tanah serta tinjauan fisik bidang tanah masing-masing aset.
   - Jumlah objek/bidang tanah diinventarisasi serta tinjauan lapangan sebanyak : 216 bidang tanah
   - Dapat dilanjutkan ke sertifikasi tanah : 119 bidang tanah
   - Terdapat permasalahan : 97 bidang tanah

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten terkait penanganan permasalahan pertanahan diantaranya adalah tidak adanya bukti dukung terkait surat menyurat asli asal usul perolehan tanah, tanda batas pasti atas luasan tanah yang tercatat, dan tidak adanya tanda kepemilikan/plang nama aset daerah atas tanah yang tercatat sebagai asset daerah sehingga menimbulkan pemasalahan dengan warga masyarakat, dan masih tidak validnya informasi yang tersaji dalam buku Inventaris Barang khususnya Tanah.

Dari keseluruhan aset tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang sebanyak 1.937 persil, baru terdapat 194 persil yang bersertifikat dan 132 persil tanah yang diproses untuk didaftarkan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Balangan.

Gambar 2.32
Grafik Sertifikasi Tanah Pemda Tahun 2023



Sumber : Dinas Pertanahan dan LH Kabupaten Balangan, 2023

Dari 216 persil aset tanah Pemerintah Kabupaten Balangan yang dilakukan inventarisasi oleh Bidang Pertanahan, terdapat 97 persil tanah yang dikategorikan bermasalah. Bermasalah dalam konteks ini adalah persil tanah tersebut diklaim sebagai tanah milik oleh masyarakat dan tidak dihibahkan sebelumnya kepada Pemerintah Daerah.

Gambar 2.33
Grafik Hasil Inventarisasi Tanah Pemda Tahun 2023



Sumber : Dinas Pertanahan dan LH Kabupaten Balangan, 2023

E. Urusan Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan sangat berpengaruh terhadap kualitas kehidupan manusia. Sumber daya alam yang diperlukan untuk mendukung kelangsungan hidup manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas, kualitas, ruang dan waktu. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam yang baik dan bijaksana. Pengelolaan tersebut yang berupa pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan adalah menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan peran pemerintahan. Upaya-upaya pengelolaan lingkungan ditunjukkan dengan beberapa indikator sebagai berikut.

Tabel 2.66
Capaian Indikator Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan
Tahun 2019 - 2023

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hasil PengukuranIndeks KualitasAir	40,83	53,33	50,95	51,33	50
2	Hasil PengukuranIndeks PencemaranUdara	93,33	91,17	91,09	91,93	93,97
3	Hasil PengukuranIndeks Tutupan Lahan	52,76	56,45	51,60	51,60	51,94
4	Pembinaandan Pengawasanterkaitketaatanpenanggungjawabusahadan/ataukegiatan yang diawasiketaatannyaterhadapPPLH dan PUULH yang diterbitkanoleh PemerintahDaerah	13	19	19	7	7
5	Timbunansampah yang tertangani	173,53	175,46	5.162,93	20.576,25	20.980,81
6	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	10%	2,65%	12,07%	22,04%	20,37%

No.	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
7	Persentasecakupan area pelayanan	-	65%	75,18%	89,43%	92,56
8	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	1	2	4	1	3
9	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA dikabupaten	1	1	1	1	1
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	50,82%	71,74%	75,18%	71,84%	72,05

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Balangan, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan IKLH dan di bandingkan dengan tabel kategori IKLH diatas, maka diperoleh kesimpulan bahwa status IKLHKabupaten Balangan tahun 2023 berada dalam Kriteria **Sedang** dengan nilai IKLH **68.24,** sehingga pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup diKabupaten Balangan harus lebih ditingkatkan.

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasari pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Pembagian ini masih dapat disempurnakan lagi seiring upaya pencapaian dalam membangun IKLH yang ideal. Kategorisasi penjelasan kualitatif ini dapat juga dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan penggunaan bahasa yang digunakan lebih mudah dipahami sebagai bahasa komunikasi, terutama bagi publik. Hal ini dapat dijadikan bahasa bersama dari seluruh pemangku kepentingan untuk berbuat sesuai dengan proporsi dan kemampuan masing-masing untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Secara konsepsi, perhitungan indeks termasuk Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) memiliki sifat komparatif yang berarti nilai satu provinsi relatif terhadap provinsi lainnya. Dalam perspektif IKLH, angka indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

Peningkatan angka terjadi pada persentase jumlah sampah yang tertangani dari 71,84 % di tahun 2022 menjadi 72,05 % di tahun 2023.

F. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.67
Capaian Indikator Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					

No	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun									
		2019		2020		2021		2022		2023	
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	89.820	0,98	91.997	0,98	91842	0,98	93758	0,99	96019	0,99
		92.085		93.659		93707		94706		96472	
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	1.340	0,61	1.326	0,59	1385	0,61	1077	0,55	1366	0.70
		2.209		2.253		2265		1956		1930	
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	542	0,33	595	0,36	1300	0.40	35293	0,56	37338	0,58
		1.650		1.648		3288		63382		63908	
6.4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah		sudah		sudah		sudah		sudah	
6.5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	97,54%		98,23%		98,01%		99%		99,53%	
6.6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	53,32%		55,16%		58,16%		60,41%		62,52%	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan layanan langsung ke masyarakat dalam upaya memenuhi kepemilikan dokumen kependudukan dari individu baru lahir hingga yang meninggal dunia. Beberapa bentuk layanan pemenuhan dokumen kependudukan, yang pertama yaitu indikator Rasio Penduduk ber KTP. Rasio Penduduk ber KTP pada tahun 2023 berada di angka 0,99. Capaian indikator urusan kependudukan dan pencatatan sipil pada tahun 2023 sama seperti tahun sebelumnya yang juga mencapai 0.99. Rasio penduduk ber KTP merupakan indikator yang menjelaskan jumlah penduduk yang wajib memiliki KTP.

Kedua, yaitu Rasio Bayi Berakte Lahir yang mana indikator ini menjelaskan jumlah keseluruhan akte kelahiran yang dimiliki oleh bayi dengan kategori usia bayi 0 s/d 1 tahun di tahun x. Cakupan penerbitan akta kelahiran mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya pada tahun 2022 sebanyak 0.55 menjadi 0.70 pada tahun 2023, hal ini didukung oleh adanya inovasi SKPD yang berkolaborasi dalam meningkatkan cakupan pelayanan melalui kerjasama atau MoU dengan Rumah Sakit, Puskesmas, serta Bidan sehingga bayi yang baru lahir bisa dipermudah didaftarkan akta kelahirannya dengan fasilitasi petugas rumah sakit, puskesmas, maupun bidan yang kemudian diproses oleh pihak kependudukan dan pencatatan sipil. Kemudian yang ketiga, indikator cakupan penerbitan akta kelahiran dari tahun 2019 hingga tahun 2023 terus mengalami peningkatan meskipun belum mendekati 100%. Rendahnya Cakupan penerbitan akta kelahiran ini disebabkan adanya dua macam proses penerbitan, yaitu secara manual dan

melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Penerbitan akta kelahiran melalui SIAK dimulai tahun 2011 sehingga akta yang diterbitkan sebelum tahun tersebut atau secara manual masih banyak yang belum dimasukkan ke dalam database SIAK. Mulai tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melaksanakan pengumpulan fotokopi akta kelahiran para siswa sekolah SD, SMP, SMA atau sederajat untuk dimasukkan ke dalam database kependudukan. Hal ini diharapkan bisa meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran pada SIAK agar mendekati jumlah sebenarnya penduduk yang telah memiliki akta kelahiran.

Keempat yaitu Rasio pasangan yang berakta nikah juga mengalami peningkatan yang sebelumnya 0.56 menjadi 0.58. Rasio pasangan berakte nikah adalah menggambarkan jumlah penduduk non muslim berstatus kawin memiliki akta kawin dengan jumlah penduduk non muslim berstatus kawin. Rasio pasangan berakte nikah dalam kurun waktu lima tahunan dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan. Rasio peningkatan masih dalam kategori rendah dikarenakan adanya berbagai faktor, yaitu dari segi aspek sosial budaya dimana nikah yang berlangsung secara adat masih belum tercatat di pencatatan sipil atau masih banyaknya penduduk non muslim yang kawin hanya melaporkan kepada ketua adat tanpa melaporkan kepada pemuka agama dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Aspek masih rendahnya kesadaran penduduk tentang pentingnya kepemilikan akta kawin bagi penduduk yang telah tinggal bersama antara lelaki dewasa dengan perempuan dewasa, sehingga perlu dilaksanakan sosialisasi maupun pelayanan komprehensif ke wilayah terpencil untuk memenuhi segala jenis dokumen kependudukan selain KTP, KIA, dan Kartu Keluarga.

Indikator peningkatan rasio cakupan penerbitan kartu tanda penduduk disebabkan oleh perekaman KTP yang bersifat dinamis, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan-pelayanan yang bersifat proaktif berupa penjaringan mandiri untuk KTP pemula atau penduduk yang dikategorikan baru memasuki usia 17 tahun bekerjasama dengan sekolah sehingga siswa/siswi tidak perlu meluangkan waktu untuk datang ke kantor untuk mendapatkan pelayanan. Pelayanan melalui jalur dalam jejaring sehingga mempermudah masyarakat dan mendekatkan pelayanan. Selain itu pencatatan dokumen kependudukan juga dilaksanakan melalui layanan menuju wilayah-wilayah terpencil dikarenakan Kabupaten Balangan memiliki Komunitas Adat Terpencil dan wilayah dengan medan sulit sehingga sebagai bentuk pemenuhan hak atas kepemilikan dokumen kependudukan dilaksanakan pelayanan jemput bola ke wilayah terpencil, wilayah yang ramai kegiatan kemasyarakatan, juga upaya perekaman melalui kantor kecamatan.

G. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun adalah indeks komposit yang dibentuk guna penguatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa agar dapat mencapai taraf sejahtera dan mandiri dari segi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Indeks Desa Membangun juga didukung seiring terbentuknya Undang-Undang Desa No. 06 Tahun 2004 yang memberikan ruang guna terciptanya desa yang mandiri dan (Indeks Desa Membangun Kementerian Desa & Daerah Tertinggal, Kemendesa 2015). Indeks Desa Membangun memiliki sejumlah klasifikasi status desa yang mengkategorikan perkembangan pembangunan sebuah desa, diantaranya Desa Sangat Tertinggal IDM ≤ 0,4907, Desa Tertinggal 0,4907 < IDM ≤ 0,5989, Desa Berkembang 0,5989 < IDM ≤ 0,7072, Desa Maju 0,7072 < IDM ≤ 0,8155, Desa Mandiri IDM > 0,8155 (Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun, Kemendesa 2019). Indeks komposit yang membentuk penilaian IDM yaitu dimensi kesehatan, pendidikan, modal sosial, dan pemukiman atau kategori Ketahanan Sosial. Kemudian terdapat dimensi ekologi, yaitu kualitas lingkungan, bencana alam, dan tanggap bencana atau Ketahanan Lingkungan. Ketiga, dimensi ekonomi yaitu keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan masyarakat atau pasar, akses logistic, akses fasilitas perbankan, dan keterbukaan wilayah atau Ketahanan Ekonomi.

Perkembangan Indeks Desa Membangun Kabupaten Balangan dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pergerakan progresif. Peningkatan selama lima tahun terakhir terlihat dari tingkat capaian tahun 2023 terhadap target akhir RPJMD sebanyak 107,61%. Tingkatan status IDM Kabupaten Balangan saat ini sudah berada pada kategori maju yang mana sebelumnya berada pada kategori berkembang. Terdapat 22 desa yang sudah berada pada kategori mandiri, 103 desa dengan kategori maju, 28 desa dengan kategori berkembang, dan satu desa dengan kategori sangat tertinggal. Desa yang masih masuk kategori sangat tertinggal merupakan desa Wonorejo yang mana saat ini pada tahapan penghapusan. Alur yang panjang pada tahapan penghapusan desa berpengaruh terhadap skor IDM Kecamatan Juai yang masih berada pada level berkembang dan skor IDM level kabupaten. Tabel capaian atau skor indeks desa membangun Kabupaten Balangan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.68
Indeks Desa Membangun Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Desa Membangun	0,6311	0,6395	0,6674	0,7293	0,7527

Sumber : E-Book Peringkat IDM, 2019-2023

Terkait dengan peningkatan indeks desa membangun, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas P3APPKBPMD diantaranya perekrutan Sarjana Penggerak Desa (SP3) yang harapannya dapat mengoptimalkan kegiatan-kegiatan strategis di desa dan pemanfaatan dana desa yang lebih terarah. Kedua, adanya penempatan tenaga ahli pendamping desa (TAPMD) yang dapat menjadi

penyambung antara domain perencanaan dan domain teknis urusan pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat lebih tergali isu-isu yang menjadi urgensi bersama di tingkat desa maupun pemerintah daerah. Ketiga, adanya dukungan dari aparatur pemerintahan desa yang aktif dalam menggerakkan pembangunan desa dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Selain menambah SDM dalam hal perbantuan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, perbaikan infrastruktur juga dilaksanakan bekerjasama dengan TNI-AD dalam program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) pada tahun 2022 yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Lampihong, dan perbaikan infrastruktur pendukung pertanian di wilayah Kecamatan Batumandi melalui program Karya Bakti TNI pada tahun 2023.

Tabel 2.69
Capaian Indikator Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Indikator	Satuan	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar	Desa	153	153	153
2	Jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi	Orang	22	16	98
3	Jumlah BUMDes Berkembang	Bumdes	28	3	3
4	Jumlah BUMDes Maju	Bumdes	1	0	0

Sumber : Dinas P3APPKBPMD data diolah, 2023

Selain upaya meningkatkan Indeks Desa Membangun berdasarkan indeks kompositnya, upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas pada pemerintahan desa didukung melalui indikator jumlah kelembagaan desa yang ditata sesuai standar. Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, sekaligus optimalisasi tugas dan fungsi setiap lembaga desa. Dari 154 desa yang ada di Kabupaten Balangan, hanya tersisa satu desa yang belum memperoleh penataan yaitu desa Wonorejo yang mana sedang dalam proses penghapusan desa di tingkat kementerian. Pembinaan kelembagaan desa didukung antusiasme apparat desa untuk mengetahui pentingnya penataan lembaga desa, namun pada pelaksanaannya masih belum optimal dikarenakan masih adanya desa yang lambat mengumpul SK Kelembagaan Desa sebagai dasar data tersebut. Kedua, indikator jumlah aparatur dan pengurus kelembagaan desa yang memiliki kompetensi. Indikator ini berhubungan dengan indikator pertama, dari target yang ditetapkan kondisi terakhir pada tahun 2023 belum bisa mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 150 orang dengan capaian sebanyak 98 orang. Belum mampu mencapai target disebabkan oleh kurangnya SDM pengurus kelembagaan desa dari jumlah yang disyaratkan.

Terkait Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes juga menjadi lembaga yang berperan terhadap kemajuan dan kemandirian ekonomi desa. BUMDes di Kabupaten Balangan prosesnya sedang dalam tahapan sosialisasi agar dapat diterapkan secara luas di desa lainnya. Kondisi BUMDes berkembang memiliki capaian yang fluktuatif, diantaranya pada

tahun 2021 dari target yang ditetapkan yaitu sebanyak 20 BUMDes berkembang, tercapai 28 desa yang memiliki BUMDes berkembang. Kemudian pada tahun 2022 dari target sebanyak 30 BUMDes berkembang tercapai sebanyak tiga BUMDes berkembang, capaian yang sangat menurun dibandingkan tahun sebelumnya disebabkan oleh terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sehingga klasifikasi BUMDesa yang sebelumnya hanya 3 klasifikasi yaitu Tumbuh, Berkembang dan Maju berubah menjadi 4 klasifikasi yaitu Perintis, Pemula, Berkembang dan Maju dengan nilai di tiap klasifikasinya yang berubah pula hal ini berdampak pada turunnya klasifikasi BUMDesa-BUMDesa yang ada di Kabupaten Balangan.

Upaya yang telah dilakukan dalam hal mengaktifkan ekonomi pedesaan dengan BUMDes Bersama melalui sosialisasi secara massif melalui daring ataupun luring, ketertarikan wirausaha muda didesa untuk memanfaatkan peluang berusaha melalui BUMDes/BUMDesma. Kemudian jumlah BUMDes Maju di Kabupaten Balangan masih memiliki banyak tugas untuk membuat satu desa satu BUMDes maju setiap tahunnya. Perlunya meningkatkan kemampuan SDM desa dalam rangka berwirausaha dalam kelompok, keterampilan pencatatan keuangan, dan hal-hal lain dalam pengelolaan usaha perlu dilaksanakan.

H. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)

Fenomena kependudukan yang kian mengemuka belakangan ini dan merupakan indikator kependudukan lain yang penting selain jumlah penduduk yaitu pertumbuhan penduduk. Penduduk dapat menjadi modal dasar dalam pembangunan, tetapi di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk, seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk, harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

Bahasan kependudukan di daerah penelitian mencakup beberapa aspek, yakni jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat pendidikan penduduk, tenaga kerja, fertilitas, mortalitas, dan penduduk miskin. Pendidikan penduduk terkait pengetahuan, yaitu

menentukan pemahaman terhadap suatu hal yang pada akhirnya mampu mengubah suatu tindakan nyata. Tingkat kesejahteraan penduduk berpengaruh terhadap jangkauan relasi sosial yang pada akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan pengetahuan.

Dari laju pertumbuhan penduduk, pemerintah daerah perlu menyiapkan perencanaan untuk meningkatkan usia perkawinan pertama, mensosialisasikan program Keluarga Berencana (KB), serta meningkatkan pemerataan kesejahteraan baik pangan, kesempatan kerja, pendidikan, kesehatan maupun perumahan di masa mendatang. Maka diperlukan strategi khusus untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Indikator sasaran dapat menurunkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia karena laju pertumbuhan penduduk berbanding lurus dengan kuantitas penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi pangan, kebutuhan perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Apabila pertambahan penduduk tidak disiapkan dengan matang oleh pemerintah, maka akan berpengaruh terhadap pemenuhan akses fasilitas dasar yang akan berdampak terhadap tingkat Indeks Pembangunan Manusia, Angka Kemiskinan, dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

Laju pertumbuhan penduduk secara sederhana terjadi adalah hasil dari jumlah angka kelahiran dikurangi dengan jumlah angka kematian. Apabila angka kelahiran tinggi sedangkan angka kematian rendah maka laju pertumbuhan penduduk akan banyak. Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Kegunaan LPP ini adalah untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk dasar antara dua periode waktu. Laju Pertumbuhan Penduduk dapat dikelompokkan atau dikategorikan apakah masuk ke kategori cepat, yaitu apabila laju pertumbuhan dikategorikan mencapai 2% lebih setiap tahunnya. Kategori laju pertumbuhan sedang, yaitu laju pertumbuhan yang mencapai 1%-2% setiap tahunnya. Laju pertumbuhan lambat, yaitu apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1%.

Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan bahwa penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pada pasal 11 disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga. Untuk itu, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mengamanatkan pemberian tanggung jawab pengendalian penduduk di Indonesia kepada BKKBN dan Bidang yang menangani tentang Keluarga Berencana sehingga salah satu indikator sasaran yang ditetapkan adalah persentase laju pertumbuhan penduduk (LPP). Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.

Tabel 2.70
Laju Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Tahun 2022	Jumlah Penduduk Tahun 2023	LPP 2020-2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Lampihong	18.661	19.177	**1.27**
2	Batu Mandi	19.448	19.490	**1.00**
3	Awayan	14.169	14.366	**1.47**
4	Tebing Tinggi	7.338	7.235	**0.51**
5	Paringin	20.354	19.689	**1.42**
6	Paringin Selatan	16.429	16.448	**3.16**
7	Juai	17.063	17.227	**-0.19**
8	Halong	20.050	20.557	**0.26**
KAB. BALANGAN		**133.512**	**134.189**	**1.10**

Sumber data : Balangan dalam Angka, 2024

Laju pertumbuhan penduduk berdasarkan kecamatan lingkup Kabupaten Balangan memiliki laju pertumbuhan dengan kategori sedang. Namun terdapat fenomena yang cukup menarik yaitu di Kecamatan Juai. Laju pertumbuhan di Kecamatan Juai pada tahun 2023 mencapai – 0.19 sementara pada tahun 2022 laju pertumbuhan mencapai 0.89. Secara umum, laju pertumbuhan yang bergerak minus menandakan adanya fenomena penurunan pertumbuhan yang dapat dipengaruhi oleh faktor mortalitas dan migrasi. Laju pertumbuhan yang cukup tinggi berada pada Kecamatan Paringin Selatan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2022 sebesar 3.53 dan di tahun 2023 terdapat sedikit penurunan laju pertumbuhan sebesar 3.16. Laju pertumbuhan di wilayah Kecamatan Paringin Selatan juga diiringi oleh kepadatan penduduk sebesar 254/km^2 yang mana secara geografis Kecamatan Paringin Selatan merupakan wilayah yang dekat dengan pusat kota Kabupaten Balangan, dekat dengan wilayah pemerintahan, dan wilayah yang terjangkau oleh layanan fasilitas dasar sehingga menjadi pilihan masyarakat bermukim.

Hasil perhitungan laju pertumbuhan penduduk yang diolah oleh Badan Pusat Statistik dengan DP3APPKBPMD memiliki perbedaan. Apabila BPS menghitung laju pertumbuhan Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebesar 1.10, sementara DP3APPKBPMD menghitung laju pertumbuhan sebesar 1.57.

Tabel 2. 71
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Balangan
Tahun 2020 - 2023

IKU	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	1,46	1,38	1,40	1,58	1,57

Sumber: DP3APPKBPMD, 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa capaian IKU persentase Laju Pertumbuhan Penduduk pada tahun 2022 sudah tercapai sangat baik yaitu 1,58%. Menurun 0.01% pada tahun 2023 menjadi 1.57%, Laju pertumbuhan penduduk sangat dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, kematian, dan imigrasi penduduk. Dalam hal ini penurunan laju pertumbuhan penduduk lebih berfokus pada pengendalian tingkat kelahiran dengan berbagai macam upaya melalui promosi peningkatan usia perkawinan (PUP) melalui program Generasi Berencana (GenRe), peningkatan pelayanan KB berkualitas melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan pelayanan KB, dan memudahkan Masyarakat mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional (JKN). Dukungan pemerintah daerah terhadap optimalnya layanan KB yang berkualitas melalui menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, advokasi dan sosialisasi isu kependudukan pada masyarakat umum, dan upaya pemenuhan sarana prasarana penunjang pelayanan ber Kb.

Laju pertumbuhan Kabupaten Balangan kurun waktu lima tahunan berada dalam kategori pertumbuhan sedang. Terbaru pada tahun 2023 capaian berada pada angka 1.57 dengan persentase capaian 0.01% sehingga secara kategori Kabupaten Balangan masuk dalam kategori laju pertumbuhan penduduk sedang atau pertumbuhan berada pada 1% hingga 2% setiap tahunnya. Dibanding antara realisasi tahun 2021 dengan target tahun 2022, realisasi tahun 2021 adalah 78,98%.

2. Persentase *Contraceptive Prevalence Rate* (CPR)

CPR (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah presentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) disuatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. CPR merupakan salah satu indicator untuk mengukur keberhasilan program Keluarga Berencana pada suatu daerah. Bila capaian CPR baik maka merupakan tanda keberhasilan program KB dalam upaya pengendalian jumlah penduduk (kuantitas penduduk). Indikator ini merupakan factor yang berkontribusi terhadap penurunan tingkat kelahiran, jumlah kelahiran yang tinggi adalah penyumbang besar pada penambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk yang tinggi memiliki konsekuensi terhadap bidang lainnya seperti Kesehatan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan sebagainya.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat penggunaan CPR diantaranya angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin, persentase wanita usia 15 tahun keatas yang jenjang pendidikannya belum sampai wajib belajar 12 tahun, dan persentase wanita dengan riwayat pernikahan dini dan pernah melahirkan diusia dini.

Tabel 2.72
Penggunaan CPR Tahun 2023

No	Kecamatan	∑ PUS	∑ KB Aktif	Persentase
1	JUAI	3376	2844	84,37
2	HALONG	4857	4106	86,64

No	Kecamatan	∑ PUS	∑ KB Aktif	Persentase
3	AWAYAN	2284	1863	81,57
4	BATUMANDI	3544	2996	84,54
5	LAMPIHONG	3009	2357	78,33
6	PARINGIN	4026	3288	81,71
7	PARINGIN SELATAN	3669	3088	84,14
8	TEBING TINGGI	1504	1255	83,95
Total		**26.269**	**21.797**	**83,40**

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Jumlah Pasangan Usia Subur di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 sebanyak 26.269 sementara jumlah KB aktif 21.797 atau persentase sebanyak 83.40%. Target pada tahun 2023 terhadap indikator persentase penggunaan CPR adalah 72% sehingga capaian sebesar 116% yang mana sudah cukup tinggi pasangan usia subur yang mendapatkan pelayanan ber KB. Meskipun capaian pada tahun 2023 sudah cukup tinggi, upaya yang terus dilakukan SKPD dalam optimalisasi penggunaan CPR diantaranya koordinasi dan Kerjasama oleh lintas sektor untuk memudahkan Masyarakat utamanya yang berkategori pasangan usia subur mendapatkan layanan kontrasepsi, distribusi alat dan obat kontrasepsi ke 13 Puskesmas di Kabupaten Balangan, kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan terhadap layanan ber Kb yang membutuhkan tindakan medis operasi kepada wanita ataupun pria.

3. MCPR/Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern

Tabel 2.73
Penggunaan mCPR Tahun 2023

No	Kecamatan	∑ PUS	∑ PA Modern	Persentase
1	JUAI	3376	2833	81,71
2	HALONG	4857	4093	81,72
3	AWAYAN	2284	1861	81,67
4	BATUMANDI	3544	2993	81,69
5	LAMPIHONG	3009	2343	81,70
6	PARINGIN	4026	3286	81,65
7	PARINGIN SELATAN	3669	3086	81,66
8	TEBING TINGGI	1504	1249	81,68
Total		**26269**	**21.744**	**83,20**

Sumber : SIGA BKKBN, 2023

MCPR merupakan indikator tingkat prevalensi kontrasepsi modern, prevalensi wanita usia subur yang menggunakan (atau pasangannya menggunakan) suatu metode kontrasepsi modern pada waktu tertentu. MCPR merupakan indikator untuk mengukur perbaikan kesehatan ibu melalui pengaturan jarak kelahiran. Indikator ini juga digunakan

sebagai proksi untuk mengatur akses terhadap pelayanan reproduksi kesehatan yang sangat essensial. Prevalensi kontrasepsi modern adalah proporsi pasangan usia subur (15-49 tahun) yang sedang menggunakan salah satu obat/alat kontrasepsi modern berupa MOW, MOP, IUD, Implant, Suntik, Pil dan Kondom dibandingkan dengan jumlah Pasangan Usia Subur dalam periode tertentu. Perhitungan MCPR menggunakan data New SIGA BKKBN. Laporan data pada New SIGA dilakukan secara rutin setiap bulan oleh Penyuluh KB di kecamatan.

Tabel 2. 74
Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)

Indikator	Satuan	Capaian		
		2021	2022	2023
Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	Persen (%)	76,67	77.12	83,20

Sumber : New SIGA BKKBN, 2023

Realisasi peserta KB aktif menggunakan metode kontrasepsi modern Kabupaten Balangan tahun 2023 sebesar 83,20 persen, sementara target pada tahun 2023 yang ditetapkan adalah sebesar 72 persen. Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa apabila dibandingkan target, maka realisasi MCPR Kabupaten Balangan pada triwulan IV adalah 83,47 persen atau dengan capaian 116 persen. Capaian ini sudah baik guna memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2023, meskipun capaian sudah sangat baik pemerintah daerah tetap berupaya memudahkan pelayanan Masyarakat yang ingin mendapatkan kontrasepsi modern. Upaya optimalisasi yang dilakukan diantaranya kerjasama lintas sektor bersama Bidan, penyuluh KB, dan Ikatan Bidan Indonesia guna mendekatkan layanan kontrasepsi modern. Pembinaan kepada peserta KB supaya tidak putus pakai dalam penggunaan kontrasepsi, memantau ketersediaan kontrasepsi dan mencegah terjadinya *stock out* atau kehabisan stok kontrasepsi melalui aplikasi Sistem Informasi Rantai Pasok Alokon (SIRIKA), meningkatkan *awareness* Masyarakat terhadap pentingnya berkontrasepsi setelah melahirkan untuk menjaga jarak kelahiran dan meningkatkan Kesehatan ibu pasca melahirkan melalui organisasi POGI, IBI, dan IDI.

Adapun kendala yang perlu menjadi perhatian diantaranya jam pelayanan dalam mendapatkan layanan ber KB yang masih terbatas, semua kecamatan mendapatkan kesempatan yang sama untuk menggunakan dana penggerakan KB MKJP, namun tidak semua kecamatan memiliki upaya yang sama dalam meningkatkan jumlah akseptor KB MKJP di wilayahnya. Keterbatasan dalam penggunaan IT untuk system pelaporan online pada New SIGA yang seharusnya selalu update setiap saat. Khususnya untuk pelaporan pelayanan KB oleh Pemberi layanan (Faskes, jaringan dan jejaringnya). Belum terjalinnya Kerjasama dengan pelayanan Kesehatan khususnya KB di perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Balangan.

4. iBangga

Tabel 2. 75
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indikator	Satuan	Capaian		
		2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	54.54	54.24	66.60

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Pembangunan keluarga merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keluarga berkualitas melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Kemajuan pembangunan keluarga dapat diukur melalui Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), yang terdiri dari 3 (tiga) dimensi, yakni; ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Hasil dari Indeks tersebut digunakan untuk mengklasifikasikan status pembangunan keluarga melalui kategori tangguh, berkembang, atau rentan. Adapun target Nasional yang harus di capai untuk Indeks Pembangunan Keluarga tahun 2024 adalah sebesar 61.0. Di tahun 2022, ditargetkan sebesar 57 dari baseline yang ditetapkan pada tahun 2018 yakni sebesar 53,6. Lingkup Kabupaten Balangan menargetkan untuk indikator iBangga tahun 2023 sebesar 58,11% dengan capaian 58,11% atau 100% tercapai. Meskipun capaian pada tahun 2023 sudah terpenuhi, tantangan optimalisasi indikator iBangga yaitu masih adanya pengaruh sosial dan faktor ekonomi yang menghambat Perempuan atau pasangan usia subur mendapatkan layanan ber KB. Perlunya peningkatan kapasitas kader dalam melaksanakan pendataan.

5. *Total Fertility Rate* (TFR)

Pada aspek kependudukan hal paling mendasar dalam pembangunan apabila dilihat dari nilai universal, dimana penduduk merupakan pelaku dan sasaran pembangunan sekaligus yang menikmati hasil pembangunan. Peran penduduk tersebut, kualitas penduduk perlu ditingkatkan melalui berbagai sumber daya yang melekat, dan perwujudan keluarga kecil yang berkualitas, serta upaya untuk meningkatkan kuantitas penduduk dan persebaran kependudukan. Untuk menunjang keberhasilan pembangunan dan menangani permasalahan penduduk antara lain meliputi jumlah, komposisi dan distribusi penduduk maka diperlukan adanya upaya pengendalian jumlah penduduk. Pengendalian fertilitas merupakan salah satu cara untuk mengendalikan jumlah penduduk. Dan pengendalian jumlah penduduk lainnya adalah mortalitas (kematian) dan migrasi(perpindahan tempat). Dalam melakukan pengukuran terhadap tingkat fertilitas, terdapat beberapa persoalan yang dihadapi, sehingga pengukuran terhadap fertilitas ini dilakukan melalui dua macam pendekatan yaitu Yearly Performance dan Reproductive History, salah satu teknik yang termasuk dalam pendekatan Yearly Performanceadalah *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Kelahiran Total.

TFR adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya. Banyak faktor yang mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat urbanisasi. Seperti telah disebutkan di atas bahwa tujuan dari pertumbuhanpenduduk di Indonesia adalah Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan indikator TFR 2,1 anak per perempuan pada akhir periode RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh karena itu, di masa mendatang TFR pada masing-masing wilayah semakin mengerucut ke arah 2,1. Untuk wilayah-wilayah yang telah mencapai TFR dibawah 2,1 maka fokus pembangunan kependudukannya bukan lagi penurunan TFR melainkan ke arah peningkatan kualitas penduduk dan pembangunan keluarga. Setiap pemerintah daerah perlu menyadari bahwa tujuan ideal dari pengendalian penduduk bukanlah menurunkan angka TFR serendah- rendahnya, tetapi mencapai penduduk tumbuh seimbang dengan angka ideal dimana TFR 2,1 anak per perempuan dengan *Net Reproductive Rate* (NRR) sebesar 1. *Total Fertility Rate* (TFR) merupakan parameter fertilitas untuk mengetahui angka kelahiran total per wanita subur (15-49) tahun. Nilai TFR yang semakin rendah menunjukan makin terkendalinya jumlah kelahiran penduduk., diperoleh data 5 tahun terakhir sebagai berikut.

Tabel 2. 76
***Total Fertility Rate* (TFR)**

TFR	2021		2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
	2,29%	2,49%	2,26%	2,36%	2.24%	2.31%

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Berdasarkan data diatas, perkembangan yang fluktuatif menggambarkan pertumbuhan penduduk yang belum stabil. Dipengaruhi oleh kabupaten Balangan yang sedang berkembang mengundang banyak tenaga kerja dari luar wilayah dan juga terjadinya pandemi Covid 19 yang mempengaruhi kenaikan TFR Balangan sebesar 2,49% pada tahun 2021. TFR yang merupakan gambaran jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan sampai pada akhir masa reproduksinya. Untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang maka harus menurunkan TFR secara bertahap. Angka TFR salah satu bahan pertimbangan dan sebagai dasar dalam perencanaan kebijakan program dan pengendalian penduduk diwilayahnya. Perlu komitmen bersama untuk menciptakan generasi unggul bebas stunting untuk menyongsong bonus demografi mendatang. TFR yang ideal untuk mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang.

6. *Unmet Need*/ Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi

Indikator *unmet need* berkaitan erat dengan kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat meningkatkan risiko pada aborsi, kehamilan berisiko, kematian bayi, kematian ibu, kurangnya persiapan karena tidak mengharapkan kehamilan tentunya

dapat berdampak pada Kesehatan, pemenuhan gizi anak di masa depan, dan minimnya pemahaman orang tua pada pola asuh anak. Setiap kelahiran merupakan hal yang sangat berharga terutama pada era dimana penurunan fertilitas sedang terjadi. Oleh karena itu, setiap kelahiran diharapkan memang benar-benar direncanakan, dengan begitu bayi-bayi yang dilahirkan adalah bayi-bayi sehat dan menjadi bibit unggul yang siap menghadapi tantangan masa depan. Indonesia menduduki urutan ketiga tertinggi angka kematian ibu (AKI) dibandingkan negara-negara Asean pada tahun 2017 yaitu dengan 177 kematian per-100 ribu kelahiran. Berdasarkan data Bank Dunia tersebut, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk menurunkan AKI.

Tabel 2. 77
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)

Indikator	Satuan	Capaian		
		2021	2022	2023
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	Persen (%)	5,97	12.17	4,66

Sumber : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi di Kabupaten Balangan sebesar 4.66%. Tingginya angka unmet need di Indonesia berpeluang terhadap tingginya angka kematian ibu, hal itu dikarenakan akibat kehamilan yang tidak diinginkan. Untuk menurunkan AKI maka kebutuhan KB khususnya pemenuhan alat kontrasepsi harus terpenuhi. Di samping itu, optimalisasi KB melalui pendampingan dan bimbingan kepada calon peserta KB serta peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB mutlak diperlukan. Disamping upaya mendekatkan pelayanan dan sosialisasi, juga diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia para penyuluh atau pendamping pada saat konseling agar bisa menjelaskan dengan baik dari manfaat ber KB. Harapannya ,dengan kita bisa menurunkan unmet need dapat menurunkan angka kematian ibu. Oleh karena itu upaya yang bisa dilakukan ialah dengan melakukan konseling dan juga harus ada semacam role model yang akan diikuti oleh masyarakat. Penurunan *unmet need* selain berkontribusi terhadap peningkatan CPR dan penurunan TFR, juga dapat berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu (AKI) yang disebabkan oleh kehamilan tidak diinginkan.

I. Urusan Perhubungan

Pada urusan Perhubungan, hal yang masih menjadi kendala di Kabupaten Balangan adalah sudah tidak adanya Badan Usaha/Perseorangan yang menyelenggarakan usaha angkutan umum orang. Angkutan yang beroperasi di Kabupaten Balangan yaitu angkutan gratis yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan dengan trayek Paringin - Juai - Halong. Pada tahun 2022 ditargetkan untuk trayek Paringin - Awayan - Tebing Tinggi namun masih belum terlaksana, dikarenakan keterbatasan armada mobil

angkutan, untuk itu pada tahun 2024 Dinas Perhubungan telah menganggarkan tambahan armada sebanyak 5 (lima) unit, guna penambahan trayek yang belum ada, serta dengan proyeksi penambahan armada mobil angkutan yang direncanakan sebanyak 12 (dua belas) unit lagi.

Pada Tahun 2023 Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan lebih diarahkan ke pada Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU), terbukti dengan jumlah paket pengadaan sebanyak 1.354 Unit pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota telah direalisasikan. Dengan daftar pengadaan , sebagai berikut :

Tabel 2.78
Daftar Pengadaan

NO	URAIAN	VOLUME	
1	Upgrade Lampu PJU	45	Unit
2	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light)	7	Unit
3	Pengadaan dan Pemasangan PJU	175	Unit
4	Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light	4	Unit
5	Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas	21	Unit
6	Pengadaan dan Pemasangan Deliniator	50	Unit
7	Belanja Lampu Sorot Persimpangan	10	Unit
8	Belanja Lampu Sorot PJU	24	Unit
9	Upgrade Lampu Batas Kabupaten dan Perkotaan	223	Unit
10	Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Satu Warna	6	Unit
11	Pengadaan dan Pemasangan PJU Konvensional Pedesaan	500	Unit
12	Pengadaan dan Pemasangan PJU Konvensional Smart System Batas Kabupaten	180	Unit
13	Pengadaan dan Pemasangan PJU Median Jalan	26	Unit
14	Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya Smart System	73	Unit
15	Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan	10	Unit
JUMLAH		**1.354**	**Unit**

Kemauan menjadikan Balangan lebih terang sesuai dengan Kebijakan Kepala Daerah dan Tujuan dan sasaran dari Dinas Perhubungan yaitu meningkatnya Keselamatan Lalu Lintas Transportasi. Selain itu, transportasi masih belum terintegrasi dengan seluruh moda yang ada, sehingga menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan transportasi umum masih rendah. Paradigma masyarakat terhadap penggunaan transportasi umum juga belum berubah, yaitu masih banyak masyarakat yang memilih menggunakan kendaraan pribadi jika dibandingkan dengan menggunakan kendaraan umum. Perkembangan masyarakat yang semakin modern memunculkan dinamika dalam eksistensi angkutan umum. Terbukti dengan semakin berkembangnya zaman, membuat masyarakat tidak lagi menggunakan jasa angkutan umum pedesaan sebagai sarana transportasi mereka. Kondisi

perekonomian yang semakin stabil menjadikan banyak masyarakat yang lebih memilih untuk memiliki kendaraan pribadi yang lebih mudah diakses dan fleksibel. Akibatnya, semakin lama, keberadaan angkutan umum semakin berkurang dan eksistensinya terancam punah.

Kemajuan suatu wilayah sangat ditentukan keberadaan sistem, sarana dan prasarana transportasi di wilayah tersebut. Dalam kaitannya dengan kondisi Kabupaten Balangan dapat dicermati bahwa secara umum kondisi transportasi Kabupaten Balangan kurang mampu merespon dinamika perkembangan wilayah sehingga pada tahap tertentu kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat perkembangan wilayah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 bahwa untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu dilakukan dengan pengembangan Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menghubungkan semua wilayah di daratan. Pembenahan sektor transportasi perlu dilakukan, salah satunya ialah perlu pembangunan Sistem Transportasi Angkutan Massal guna memperbaiki layanan angkutan di Kabupaten Balangan saat ini.

Kabupaten Balangan merupakan wilayah yang strategis dalam sektor ekonomi karena berada di perlintasan antar Kabupaten dan antar Provinsi. Hal ini memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam area sekelilingnya, ditambah lagi dengan adanya sektor usaha Pertambangan yang semakin menunjukkan pertumbuhan setiap tahunnya. Sebagai kota yang mempunyai peran besar dalam menopang perekonomian tingkat regional, ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pergerakan penduduk merupakan hal yang penting untuk memperlancar kegiatan ekonomi di Wilayah Kabupaten Balangan.

Adapun perkembangan capaian indikator urusan perhubungan tahun 2018- 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 79
Capaian Indikator Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2018-2023

No	Indikator	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah uji kir angkutan umum	1.040	1.210	1.423	2.886	1.475	1.568
2	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0.37	0,127	0,120	0,118	0,29	0,32
3	Pemasangan Rambu-rambu	35.53%	42.03%	42.84%	42.84%	19,48%	24,25%
4	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	164.383	137.748	130.872	29.669	21.470	16.820

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan Tahun 2023

Hal-hal lain yg menyangkut urusan perhubungan bisa dilihat dari analisa sebagai berikut:

a. Pada tahun 2023 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR mengalami penurunan dari tahun 2022, hal ini dikarenakan pada tahun 2022 ada beberapa unit pengujian kendaraan bemotor di kabupaten tetangga yang ditutup, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara yang

tidak dapat melaksanakan pelayanan pengujian karena tidak terakreditasi dan Unit Pengujian Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengalami kebanjiran sehingga harus melakukan numpang uji di Kabupaten Balangan. Sedangkan pada tahun 2022 kendaraan yang numpang uji di Kabupaten Balangan berkurang karena Unit Pengujian Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah dapat melakasanakan pelayanan. Di samping itu yang menyebabkan turunnya 2022 dan 2023 jumlah kendaraan yang melakukan uji KIR adalah adanya Aturan tentang ODOL (over dimension and over loading) terkait pengawasan terhadap mobil barang pelanggaran muatan/ukuran lebih sehingga tidak meluluskan pengujian terhadap mobil barang yang melakukan pelanggaran ukuran lebih.

b. Layanan angkutan pelajar pada tahun 2021 dapat dilaksanakan namun tidak mencapai target dimana angkutan pelajar gratis yang melayani desa yang menjadi lintasan trayek pada tahun 2022 sebanyak 21 desa dari target yang telah ditetapkan sebanyak 38 desa. 21 Desa adalah desa dengan trayek angkutan Paringin – Juai – Halong, dan 17 Desa dengan trayek Paringin - Awayan - Tebing Tinggi. Realisasi tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan keterbatasan armada mobil angkutan
c. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum Jumlah sebesar 57,08 % merupakan total jumlah kepemilikan KIR angkutan pribadi (plat hitam), dan angkutan umum (plat kuning).
d. Pada tahun 2023, Realisasi pemasangan rambu rambu dimana di dalamnya meliputi pemasangan fasilitas keselamatan jalan sebesar 103,28%. Realisasi ini mengalami peningkatan dibandingkan dari realisasi tahun 2022. Pada tahun 2023, Dinas Perhubungan telah melaksanakan pemasangan Upgrade Lampu PJU sebanyak 45 Unit, Pengadaan dan Pemasangan Lampu Peringatan (Warning Light) sebanyak 7 Unit, Pengadaan dan Pemasangan PJU sebanyak 175 Unit, Pengadaan dan Pemasangan Traffic Light sebanyak 4 Unit, Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas sebanyak 21 Unit, Pengadaan dan Pemasangan Deliniator sebanyak 50 Unit, Belanja Lampu Sorot Persimpangan sebanyak 10 unit, Belanja Lampu Sorot PJU sebanyak 24 Unit, Upgrade Lampu Batas Kabupaten dan Perkotaan sebanyak 223 Unit, Pengadaan dan Pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Satu Warna sebanyak 6 unit, Pengadaan dan Pemasangan PJU Konvensional Pedesaan sebanyak 500 Unit, Pengadaan dan Pemasangan PJU Konvensional Smart System Batas Kabupaten sebanyak 180 Unit, Pengadaan dan Pemasangan PJU Median Jalan sebanyak 26 Unit, Pengadaan dan Pemasangan PJU Tenaga Surya Smart System sebanyak 73 unit dan Pengadaan dan Pemasangan Cermin Tikungan sebanyak 10 Unit.
e. Pada tahun 2023 jumlah orang/barang yang melalui terminal menurun bahkan tidak ada, hal ini disebabkan karena ada kegiatan revitalisasi jembatan Paringin dan juga Pembongkaran Terminal. Kemudian Terminal ini pada tahun 2023 sudah dilaksanakan

Pekerjaan Jasa Konsultan Perencanaannya oleh Dinas PU dengan rencana pembagunan kembali pada Tahun 2024 dilokasi yang baru yaitu sekitar Mesjid Al Akbar Paringin.

J. Urusan Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.80
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan
Tahun 2017-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	75.83%	53,26 %	45,58%	80,44%	84,45%
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	90%	60,70 %	92,36%	92.36%	94.26%
3	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	31.77%	83,35%	99,36%	46,96%	64,22%
4	Proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	75.83%	13,24%	15,74%	12,34%	10,95%
5	Jumlah Rumah tangga menggunakan TV	-	61,29%	93,91%	93,97%	-

Sumber: BPS Kab. Balangan 2023

Persentase penduduk yang menggunakan HP di kabupaten Balangan mengalami kenaikan pada tahun 2022 sebesar 80,44% menjadi 84,45% ditahun 2023 ini disebabkan pesatnya pertumbuhan teknologi yang membuat HP/telepon sudah menjadi kebutuhan pokok di masyarakat. Sedangkan cakupan layanan telekomunikasi naik menjadi 94,26% dari tahun 2022 yaitu 92.36% dikarenakan adanya pembangunan jaringan menara komunikasi sebagai solusi daerah/desa yang tidak terlayani telekomunikasinya atau disebut desa Blankspot. Untuk proporsi rumah tangga yang memiliki dengan akses internet mengalami peningkatan dari 46,96% menjadi 64,22%. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari peningkatan kepemilikan HP/telepon seluler yang mampu memberikan akses internet yang digunakan baik sebagai sarana komunikasi, juga sarana informasi, hiburan, dan lainnya. Hal ini juga ditunjang dengan banyaknya fasilitas publik di Kabupaten Balangan yang menyediakan free WIFI .

Sedangkan proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi juga berkurang 12,34% menjadi 10,95%. Hal ini diantaranya bisa disebabkan karena banyaknya teknologi canggih seperti Smart Phone yang bisa menggantikan kedudukan komputer.

Jumlah rumah tangga yang menggunakan TV datanya tidak dapat di ukur karena BPS tidak melakukan sensus untuk menyediakan data tersebut, hal tersebut karena tingkat komunikasi hanya di ukur dengan penggunaan internet.

K. Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Pada tahun 2023, koperasi di Kabupaten Balangan berjumlah 113 buah. Hal ini menunjukkan bahwa ada penambahan koperasi baru sebanyak 1 (satu) buah koperasi dari tahun sebelumnya (2022) yang berjumlah 112 buah. Dengan demikian, maka koperasi aktif di Kabupaten Balangan pun berjumlah 72 buah koperasi atau setara dengan 63,71% dari total koperasi.

Peningkatan jumlah ini merupakan representasi dari pemahaman masyarakat terhadap koperasi yang bertambah baik. Meskipun demikian, perkembangan koperasi di Kabupaten Balangan masih kurang menggembirakan. Adanya asumsi bahwa keberadaan koperasi dianggap belum mampu menawarkan nilai lebih secara ekonomi kepada masyarakat.

Di sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 terdapat 10.904 pelaku usaha yang semuanya adalah pelaku Usaha Mikro. Hal ini didasarkan pada hasil pendataan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan dimana kategori Usaha Mikro adalah memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Hambatan yang umumnya dihadapi oleh pelaku Usaha Mikro adalah akses permodalan yang terbatas serta jangkauan pemasaran yang belum maksimal.

Pada tahun 2023, jumlah Usaha Mikro di Balangan adalah 10.904 pelaku usaha. Dibandingkan dengan tahun 2022, jumlah Usaha Mikro adalah 11.030 pelaku. Dengan demikian ada terdapat Penurunan jumlah pelaku usaha sebanyak 126 pelaku atau 1,14%. Data ini bersumber dari Pendataan UMKM Kabupaten Balangan Tahun 2023 dengan melibatkan peran dari para Aparatur Desa sebagai petugas pendata, adapun penurunan jumlah Usaha Mikro pada tahun ini dipengaruhi oleh karena adanya kenaikan insflasi dan kenaikan harga barang yang menyebabkan banyak pelaku usaha yang gulung tikar.

Perkembangan koperasi dan usaha mikro kecil di Kabupaten Balangan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81
Capaian Indikator Koperasi dan UKM Kabupaten Balangan
Tahun 2019 – 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
11.1	Jumlah koperasi aktif (unit)	69	69	69	71	72

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
11.2	Jumlah koperasi (unit)	110	110	110	112	113
11.3	Persentase Koperasi aktif	62,73%	62,73%	62,73%	63,39%	63,71%
11.4	Jumlah Usaha Mikro (unit)	4.838	11.217	8.209	11.030	10.904
11.5	Jumlah UMKM (unit)	5.124	11.335	8.209	11.030	10.904
11.6	Persentase usaha mikro dan kecil	94,41%	98,95%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Balangan, 2024

L. Urusan Penanaman Modal

Aktivitas penanaman modal dan investasi memperlihatkan peran yang penting sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak/efek ganda (*multiplier effect*) yang ditimbulkan dari aktivitas tersebut memungkinkan terjadinya dorongan pertumbuhan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian. Aktivitas investasi pada berbagai sektor memungkinkan perekonomian menghasilkan output yang banyak, pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dan terjadinya dinamika dalam proses pertukaran produksi antar daerah maupun lintas sektor.

Pertumbuhan penanaman modal di Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Kabupaten Balangan. Yang mana untuk jumlah investor berskala nasional (PMDN) tahun 2023 sebanyak 1.809, yang terdiri dari 1.772 pelaku usaha mikro dan 37 pelaku usaha kecil (sumber NSWI per Januari 2024) dengan nilai rencana investasi yang didapat sebesar Rp. 441,085.000.000. Tahun 2023 ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022, yang mana pada tahun 2022 jumlah sebanyak 44 investor berskala nasional (PMDN). Peningkatan ini disebabkan karena berakhirnya masa pandemi covid 19 mempengaruhi kebangkitan pelaku usaha dan juga karena bantuan program Bupati Balangan untuk warga Balangan yang mau berusaha bisa mendapat pinjaman di Bank Kalsel tanpa bunga, yang mempersyaratkan pelaku usaha memiliki NIB yang diterbitkan oleh BKPM/ Kementerian Investasi RI sehingga investasi menjadi meningkat.

Tabel 2.82

Capaian Indikator Penanaman Modal Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	111	89	37	44	1.809
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	93,125,000,000	1,651,394,241,459	21,722,200,000	149.736.112.210	183,890,000,000
12.3	Rasio daya serap tenagakerja	17.07 : 1	35.66 : 1	37,01 : 1	3,09 : 1	1,34 : 1

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
12.4	Kenaikan /penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	27,988,279,555	216,466,328,218	115,122,788,614	288,478,592,007	67.625.480.457
12.5	Kenaikan /penurunan Nilai RealisasiPMDN (persentase)	-34.73%	673.41%	- 46,82 %	351 %	16,76%

Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2024

Tabel 2.83
Jumlah Investor PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Uraian Ijin Prinsip	PMDN	PMA	Total
2019	NIB	85	-	85
2020	NIB	112	-	112
2021	NIB	303	-	303
2022	NIB	1.120	1	1.121
2023	NIB	1.809	-	1.809

Sumber: DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2024

Tabel 2.84
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

Tahun	Persetujuan		Realisasi	
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi
2019	41	57,580,000,000	24	27,988,279,555
2020	67	120,378,000,000	29	216,466,328,218
2021	630	226,317,465,000	79	115,122,788,614
2022	136	443,423,896,338	128	403.601.380.621
2023	645	441,085,000,000	602	471,226,861,079

Sumber : DPMPTSPTTK Kabupaten Balangan, 2023

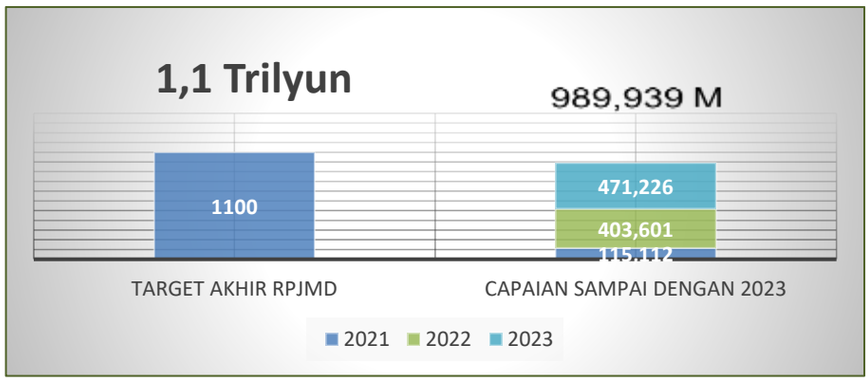
Tabel 2.85
Capaian Kinerja Indikator Realisasi Investasi

Indikator	2022	2023			Capaian s.d 2023 terhadap 2026
	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
Realisasi Investasi	169,19 %	600 M	471,226 M	78,53%	89,99%
Rata-rata Capaian				78,53%	89,99%

Target Realisasi Investasi semula hanya 252,50 M diperubahan ditingkatkan menjadi 600 M berdasarkan hasil reviu karena pada Riilis LKPM Triwulan 2 sudah tercapai 100%, kemudian untuk realisasi Investasi sampai akhir Tahun 2023 diangka 471,226 M, dengan capaian kinerja 78,53%.

Gambar 2. 34

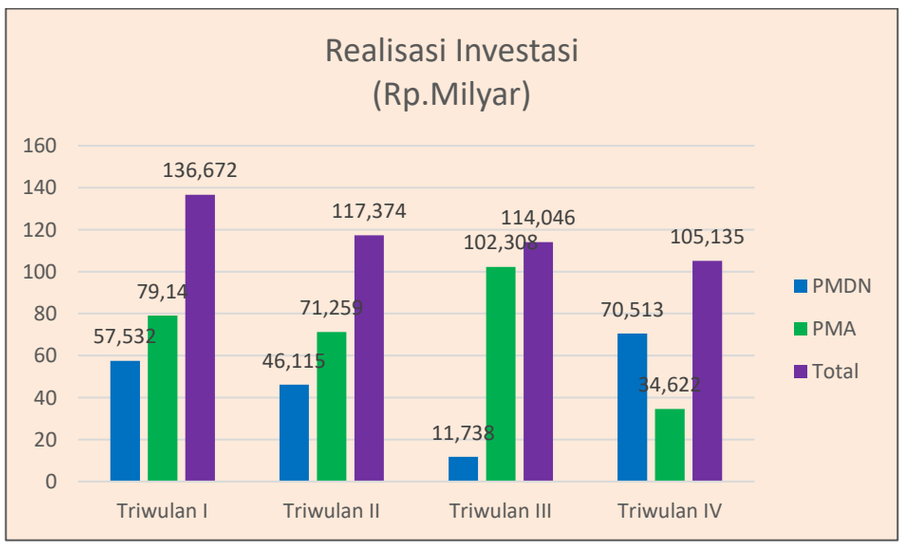
Capaian s.d 2023 terhadap Akhir Renstra Tahun 2026



Jika dibandingkan capaian kinerja Realisasi Investasi sampai dengan tahun 2023 yang mencapai 989,939 Milyar terhadap target capaian akhir RPJMD tahun 2026 yang sebesar 1,1 Trilyun maka pencapaian sudah mencapai angka **89,99%.**

Gambar 2.35

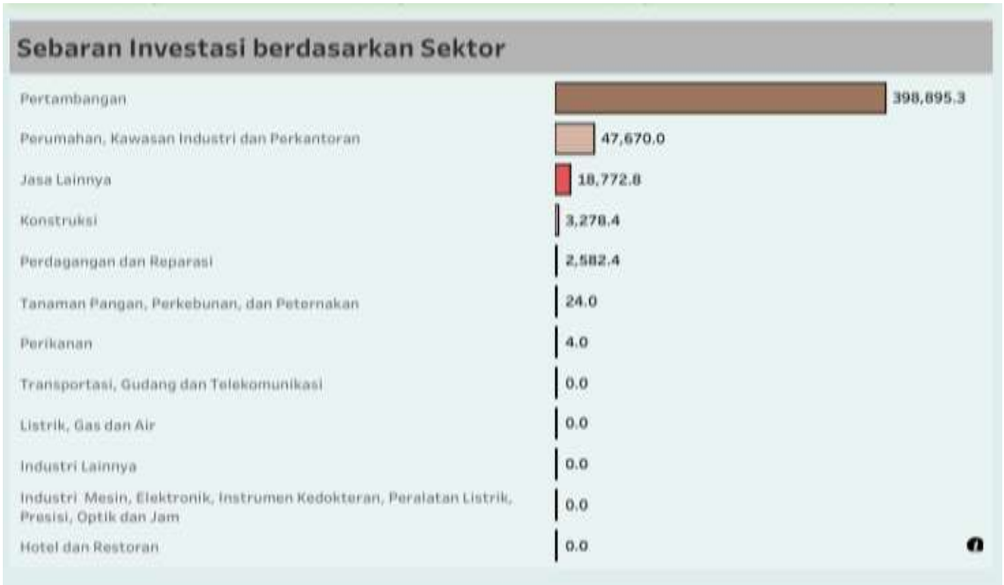
Realisasi Investasi Triwulanan Berdasarkan PMDN dan PMA Tahun 2023



Realisasi Investarsi dihasilkan dari LKPM secara periodik baik PMDN dan PMA. Tren realisasi investasi dari Triwulan 1 sampai dengan 4 cenderung menurun, hal ini berbeda dengan tren Tahun 2021 dan Tahun 2022 yang mana realisasi pada Triwulan 4 pada Tahun tersebut meningkat dari 3 triwulan sebelumnya. Penurunan realisasi pada Triwulan 4 Tahun 2023 ini disebabkan angka dari realisasi yang dilaporkan oleh 3 Perusahaan (PMA) potensi penyumbang Nilai yang tinggi ditolak karena pelaporan melebihi batas waktu penyampaian LKPM.

Gambar 2.36

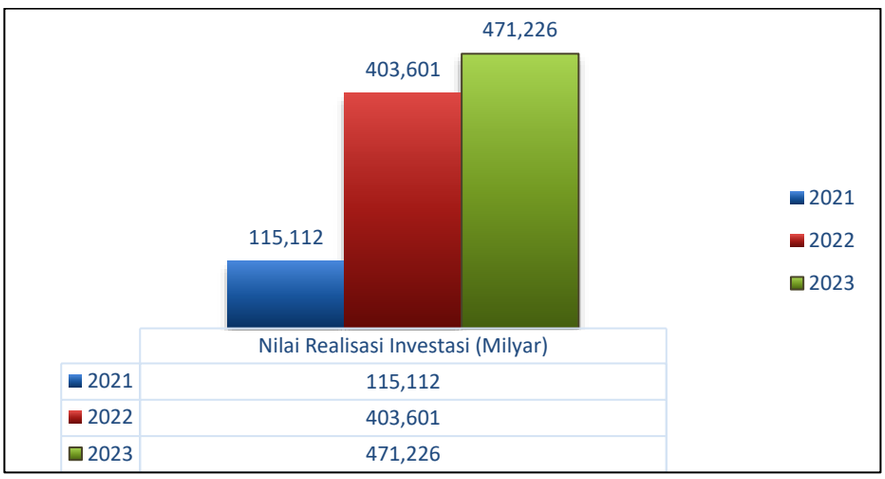
Sebaran Investasi berdasarkan Sektor



Seperti tahun sebelumnya Investasi di Kabupaten Balangan masih dominan pada sektor Pertambangan yang menyumbang sebesar 398,895 Milyar atau lebih dari 50% diikuti sektor perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran sebesar 47,670. Sementara sektor yang potensi menyerap Tenaga Kerja yaitu Pertanian masih belum ada investasi yang masuk.

Gambar 2.37

Nilai Realisasi Investasi di Kabupaten Balangan Tahun 2021 s.d 2023.



Tren realisasi investasi selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu meningkat. Pencapaian kinerja tahun 2023 didapat berdasarkan data yang didapat pada LKPM online jumlah pelaku usaha yang sudah menyampaikan LKPM sampai dengan triwulan 4 adalah sebesar Rp. 471.226.861.079,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Milyar Dua Ratus Dua Pulu Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Tujuh Puluh Sembilan Rupiah). Sedangkan untuk tahun 2022 realisasi investasinya sebesar Rp. 403.601.380.621,- (Empat Ratus Tiga Milyar Enam Ratus Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Pulu Satu Rupiah). Disini terjadi mengalami peningkatan sebesar Rp.67.625.480.457 atau 16,76% dari capaian tahun 2022. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 atau periode pertama Renstra

yang capaiannya 115,112 M, maka capaian sampai dengan tahun ini mengalami peningkatan sebesar 356,114 M.

M. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.86
Capaian Indikator Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun		
		2021	2022	2023
13. Kepemudaan dan Olah Raga				
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	75%	100%	100%
13.2	Persentase wirausaha muda	70%	100%	4,75 %
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	60%	100%	100%
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	12	43	73
13.5	Cakupan pembinaan atlet muda	76%	62%	80%
13.6	Jumlah atlet berprestasi	17	116	111
13.7	Jumlah prestasi olahraga	13	72	94

Sumber : Disporapar Kabupaten Balangan, 2023

Tabel 2.87
Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2023

No	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Peningkatan Pemuda Berprestasi	30 %	33,23 %
2	Persentase Cabor yang Berprestasi	40 %	68,75 %

Sumber : Disporapar, 2024

Ada dua Indikator Utama untuk urusan Kepemudaan dan Keolahragaan, di Bidang Kepemudaan indicator utamanya yaitu Peningkatan Pemuda Berprestasi. Dan pada Bidang keolahragaan indicator utamanya yaitu Persentase Cabor yang Berprestasi. Realisasi peningkatan pemuda berprestasi pada tahun 2023 yaitu 33,23% dari target kinerja 30% sehingga capaian pada indikator tersebut yaitu 110,7%. Sedangkan untuk indikator Persentase Cabor yang berprestasi realisasi pada tahun 2023 yaitu 68,75% dari target 40% sehingga capaian kinerja nya adalah sebesar 172%.

Meskipun kategori capaian kinerja untuk persentase daya saing kepemudaan karena organisasi kepemudaan termasuk kategori tinggi namun tetap perlu kita tingkatkan karena

hal ini sebagai wadah untuk berkumpul dalam menyalurkan hobby, pendapat dan aspirasi mereka serta kepekaan mereka terhadap masyarakat masih belum maksimal menjadikan daya tarik bagi generasi muda sekarang yang masih cenderung bermain dengan aplikasi permainan pada smartphone mereka. Hal sama juga terlihat pada daya tarik wirausaha bagi generasi masih belum optimal hal ini karena masih kurangya modal dan peluang pasar yang merupakan alasan mereka dalam terjun ke dunia wirausaha, walaupun dalam setiap tahunnya selalu disertakan dalam pelatihan.

Terkait hal tersebut maka perlu adanya terobosan untuk lebih menarik generasi muda dalam mengikutserakan mereka pada organisasi yang tentunya sangat berguna bagi mereka serta perlu adanya tambahan modal bagi mereka dan adanya upaya untuk membuka peluang pasar sehingga dapat sejajar dengan daerah lain. Dan juga adanya bantuan support dana untuk organisasi-organisasi yang menaungi mereka. Jumlah organisasi pemuda aktif di Kabupaten Balangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.88
Jumlah organisasi pemuda aktif di Kabupaten Balangan tahun 2023

No.	Jumlah Organisasi Aktif	Jumlah Anggota
1	104	5495

Sumber : Disporapar, 2024

Pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda di Kabupaten Balangan didasarkan untuk lebih mempersiapkan bibit-bibit atlet yang berprestasi agar nantinya melahirkan atlet yang berpeluang untuk mendapatkan medali di berbagai kejuaraan baik daerah maupun nasional. Selain itu untuk kejuaraan provinsi (Kejurprov) dan Porprov pada beberapa cabang olah raga dilaksanakan dengan persyaratan pada pembatasan umur, sehingga pembinan atlet muda perlu dilaksanakan. Apalagi setiap tahun adanya Pekan Olah Raga Pelajar, maka atlet muda yang siap tanding mutlak diperlukan. Belum optimalnya pembinaan olahraga dan pembinaan atlet muda di Kabupaten Balangan tahun 2023 karena masih terdapat berberapa kendala terutama belum adanya beberapa pelatih yang bersertifikat dalam beberapa cabang olahraga dan sarana prasarana olahraga yang belum lengkap seperti *Sport Center*.

Untuk lebih meningkatkan prestasi dan pembinaan atlet yang sesuai dengan prosedur latihan olahraga, maka ada beberapa pelatih yang dikirim dalam bimbingan teknis pelatih yang kemudian pelatih tersebut mendapatkan sertifikat sebagai lisensinya sebagai pelatih olah raga. Berikut tabel jumlah pelatih yang sudah mendapatkan lisensi pada cabang olah raga.

Tabel 2.89

Jumlah Pelatih Yang Bersertifikat

No.	Kompetisi	Organisasi Olahraga	Jumlah Pelatih
1	PENCAK SILAT	IPSI	2
2	KARATE	AMURA	1
3	BOLA BASKET	Perbasi	1
4	BOLA VOLI	PBVSI	2
5	DAYUNG	PODSI	2
6	FISIK	-	1
7	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Atletik	1
8	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Balap Motor	1
9	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Binaraga	1
10	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Bulutangkis	2
11	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Dayung	3
12	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Futsal	1
13	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Ikasi	2
14	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Judo	1
15	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Panahan	2
16	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Panjat Tebing	1
17	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	PELTI	1
18	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Pencak Silat	1
19	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	POBSI	1
20	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	PRSI	2
21	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Sepak Bola	5
22	FISIK DAN PERTOLONGAN PERTAMA CIDERA	Volly	2
23	SEPAK BOLA	PSSI	2
24	Tenis Lapangan	PELTI	1

Sumber : Disporapar, 2023

Di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 jumlah atlet yang berprestasi pada beberapa kejuaraan baik daerah maupun nasional sebanyak 111 atlet dengan 15 cabang olahraga. Pada tahun 2023 ini Cuma ada 15 Cabor dipertandingkan yang diikuti oleh Kabupaten Balangan. Cabang olah raga yang berprestasi dan jumlah atlet yang berprestasi pada beberapa kejuaraan baik daerah maupun nasional tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.90

Cabang Olahraga dan Medali yang didapatkan

No.	Cabang Olahraga	Event	Medali		
			Emas	Perak	Perunggu
1	ARUNG JERAM	BK PON XXI	2	7	4
2	BOCCIA / NPC	PEPARNAS	-	-	1
3	BULU TANGKIS / NPC	PEPARNAS	-	-	1
4	Catur	Pra-PON Kalsel	1	-	-
5	Catur	Pra-PON Zona Kalimantan	-	-	1
6	Catur	HUT RI-78 di Tanah Laut	-	-	1
7	Catur	Piala Hari Amal Bakti Kemenag HSU	-	1	-
8	Catur	Piala Ketua KNPI Kabupaten Balangan Sebenua Enam	-	1	-
9	Judo	POPDA	3	2	3
10	Karate	POPDA	-	-	1
11	Panahan	POPDA	1	1	1
12	PANAHAN / NPC	KEJURPROV	2		
13	PASI	KEJURPROV		1	
14	SAMBO	BK PON XXI		1	1
15	SAMBO	KEJURPROV SERI 2	4	1	
16	SAMBO	KEJURPROV SERI 3	6	3	3
17	SAMBO	KEJURNAS SERI 4	1		1
18	TAEKWONDO	Banjarbaru Taekwondo Festival	5	9	
19	TAEKWONDO	Martapura Taekwondo Festival	5	9	
20	TAEKWONDO	Tanah Laut Taekwondo Festival	5	2	
21	TAEKWONDO	POMNAS			1
22	TAEKWONDO	POPDA	1		1
JUMLAH			**36**	**38**	**20**
TOTAL MEDALI			**94**		

Sumber : Disporapar, 2023

N. Urusan Statistik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu pemerintah wajib menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas, akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, data dan informasi juga dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan antara lain untuk pengembangan usaha, penelitian dan kebutuhan lainnya.

Merujuk pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang statistik, bahwa statistik terbagi menjadi statistik dasar, sektoral, dan khusus, pada lingkup pemerintahan hanya mencakup statistik dasar dan sektoral. Statistik dasar merupakan statistik yang merupakan ranah Badan Pusat Statistik. Hasil dari statistik dasar ini merupakan data yang sangat penting bagi perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, sehingga untuk mendapatkan beberapa data, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan BPS. Produk statistic yang merupakan hasil kerjasama dengan BPS adalah IPM, IPG, Indeks NTP, Indeks Gini, Inflasi, dan ICOR. Sedangkan statistik sektoral juga telah dilakukan oleh beberapa instansi di Pemerintah Daerah dalam rangka memperoleh data baik untuk keperluan perencanaan pembangunan maupun untuk evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. Kegiatan statistik sektoral ini antara lain termuat dalam buku Indeks Williamson, buku penduduk pertengahan tahun, dan buku sistem informasi pembangunan daerah.

Diakui bahwa tuntutan data dan informasi yang dibutuhkan dapat dipenuhi seluruhnya, namun secara bertahap tata kelola dan pemenuhan kebutuhan data lebih baik harus diupayakan. Oleh karena itu, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia, sebagai upaya dalam mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan yang didukung dengan data dan informasi yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tabel 2.91
Capaian Indikator Urusan Statistik Tahun 2021 - 2023

No.	Bidang urusan/indikator	2021	2022	2023
14	Statistik			
14.1	Tersedianya system data dan statistic yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada
14.2	Buku “Balangan Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada
14.3	Buku PDRB	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan, 2023

Tahun 2022 Diskominfo telah meluncurkan portal satu data pada 25 November 2022 Kabupaten Balangan yang bisa diakses pada : dakukeren.balangankab.go.id, sebagai portal Satu Data Kabupaten Balangan. Kondisi existing penyelenggaran data pemerintah sekarang ini masih belum standar dan valid, karena sebagian besar data belum memiliki metadata; duplikasi dan minimnya keterpaduan data pemerintah; kurangnya SDM talenta digital dan efektifitas anggaran data di instansi pemerintah; ego sektoral dalam penyelenggaraan data dan flatform data yang beragam; serta keengganan berbagipakai data antar instansi pemerintah dan tidak adanya metadata; data disimpan secara individu dan tersebar sehingga sulit untuk didapatkan. Dan kalaupun ada, data tersebut masih terkelola secara internal saja, bukan mengacu kepada pengelolaan data statistik sektoral dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.

Untuk memenuhi ini semua, selain dilaksanakan kegiatan pendampingan pengelolaan data pada SKPD yang ada di Kabupaten Balangan dengan harapan dapat menjadi menjadi sarana untuk meningkatkan kemampuan SKPD dalam pengelolaan dan penyediaan data yang Memenuhi standar data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan/atau kode induk,. Sambil terus berupaya mengembangkan portal satu data Kabupaten Balangan, maka digunakan pula e-Walidata SIPD sebagai portal data perencanaan di Kabupaten Balangan, sebagai salah satu bagian penggunaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang bersifat umum, dalam artian bahwa aplikasi tersebut tidak saja digunakan di daerah, namun juga digunakan oleh pemerintah pusat.

O. Urusan Persandian

Urusan persandian merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan ini merupakan urusan baru yang berdiri sendiri sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan kabupaten berkaitan dengan urusan persandian adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kabupaten dan penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten.

Pengamanan informasi terutama pada era digital perlu mendapat perhatian lebih. Era keterbukaan serta saling terkoneksinya system jaringan di Kabupaten Balangan, karena itu menjadi rentan terhadap potensi serangan *ciber* ini dan perlu meningkatkan upaya pengamanan melalui pengelolaan dan pengembangan persandian daerah.

Government – Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Indonesia, disingkat Gov-CSIRT Indonesia merupakan CSIRT sektor Pemerintah Indonesia yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ciber dan Sandi Negara dalam Keputusan Kepala Badan Ciber dan Sandi Negara Nomor 570 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018.

Tabel 2.92
Capaian Indikator Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber:Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Balangan,2023

P. Urusan Kebudayaan

Tabel 2.93
Persentase Pengembangan Seni dan Budaya

No	INDIKATOR	2021	2022	2023
1	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	51,61	58,06	70,97

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas untuk pengembangan seni dan budaya mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 yaitu menjadi 70,97%. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain dengan melaksanakan event seni dan budaya yang bersifat langsung/tatap muka yaitu workshop musik tradisional, workshop tari tradisional, jelajah cagar budaya dan lawatan sejarah bagi siswa siswi SMP, pembinaan seni budaya yang terdiri dari seni tari pesisir, seni tari pedalaman, seni teater, seni rupa, seni kriya, seni perfilman, seni sastra dibeberapa tempat seperti sanggar seni budaya dan di SMP/SMA Kabupaten Balangan.

Pada segi pengembangan dan pemanfaatan benda atau bangunan bersejarah di Kabupaten Balangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemeliharaan terhadap cagar budaya dengan menugaskan juru pelihara cagar budaya untuk membersihkan cagar budaya agar tetap bersih dan terpelihara, selain itu ada juga kegiatan yang mengedukasi siswa-siswi SMP seperti kegiatan Jelajah cagar budaya, lawatan sejarah, lomba cerdas cermat museum SMP/MTs tingkat Kabupaten Balangan, dan melakukan pendokumentasian berupa buku sejarah nama-nama desa sekecamatan Lampihong dan Awayan.

Selain itu, untuk melestarikan kembali permainan rakyat, tradisi, sejarah dan seni budaya Balangan tahun 2023 diselenggarakannya festival budaya banua sanggam yang dilaksanakan di ruang terbuka hujau komplek perkantoran dengan berbagai macam seni budaya, permainan rakyat, lomba sumpit, pawai budaya, puisi, lukis tameng, balogo, pameran budaya, jelajah cagar budaya, pagelaran teater kuyang, penampilan kesenian dari sanggar-sanggar se Kabupaten Balangan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan pembinaan, pengembangan dan pemeliharaan budaya Balangan dengan memberikan dana hibah untuk menunjang fasilitas sarana dan prasarana lembaga kebudayaan daerah yaitu 2 balai adat, 10 sanggar/kelompok seni budaya.

Sebagai event terakhir dari bidang kebudayaan untuk mengangkat dan mempromosikan seni dan budaya Balangan yakni dengan melakukan pagelaran seni tari dayak dan pesisir di acara calender of event pariwisata di Balikpapan yang dihadiri oleh berbagai provinsi dan negara luar.

Tabel 2.94
Capaian Indikator Kebudayaan Kabupaten Balangan
Tahun 2018-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	17	1	22	33	46
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	10	11	11	11
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	-	34	34	70
Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	5	8	9	9	9

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan, 2023

Setiap daerah harus memiliki unggulan pengembangan seni dan budaya lokal termasuk juga di Kabupaten Balangan. Berdasarkan tabel diatas penyelenggaraan festival seni dan budaya dari tahun ketahun terus meningkat, tahun 2023 penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 46 penyelenggaraan. Seni dan budaya di Kabupaten Balangan antara lain tari tradisional, tari pesisir, tari topeng, musik tradisional Dayak, teater, cabaret, mamanda, kuda gepang, kuda lumping, karawitan, wayang orang, wayang kulit, wayang gong, kuntau, musik panting, sinoman hadrah, pahat patung, seni Lukis, puisi, basyair, seni kriya, habsy, sisingaan, madihin dan teatrikal musikalisasi puisi.

Dari berbagai seni dan budaya yang ada di Kabupaten Balangan tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan festival seni dan budaya sebanyak 46 penyelenggaraan antara lain workshop musik tradisional, workshop tari tradisional, Pelatihan/pembinaan seni tari dayak, seni tari pesisir, seni musik, seni teater mamanda, seni rupa (lukis), seni kriya (anyaman), seni perfilman, Jelajah cagar budaya, lomba cerdas cermat museum SMP/MTs tingkat Kabupaten Balangan, lawatan sejarah, Sidang Penetapan Cagar Budaya, penelitian pengembangan cagar budaya, 2 kali kegiatan seminar toponimi, lomba permainan rakyat, sosialisasi penerima hibah lembaga adat/sanggar/kelompok kesenian, pemilihan nanang galuh Kabupaten Balangan, sosialisasi pemilihan nanang galuh 8 kali.

Pada tahun ini juga dilaksanakannya event skala besar yaitu festival budaya banua sanggam yang dilaksanakan di ruang terbuka hujau komplek perkantoran dengan berbagai macam kegiatan seperti lomba balogo kategori umum dan pelajar, pawai budaya diikuti oleh lebih 1000 peserta, puisi, lukis tameng, pameran budaya, jelajah cagar budaya, pagelaran teater kuyang, penampilan pagelaran seni musik, pagelaran mamanda, sinoman hadrah, silat tradisional, pagelaran tari pedalaman dan pagelaran tari pesisir.

Adapun kegiatan yang berskala provinsi seperti festival karya tari daerah ke 30 tahun 2023 di banjarmasin dengan meraih juara 3 penyaji unggulan tanpa jenjang, Parade Tari Kalimantan Tapin Art Festtival meraih juara 3, pemilihan nanang galuh Provinsi Kalimantan

selatan meraih galuh persahabatan, dan parade busana daerah di Banjarmasin meraih juara 3. Selain itu kebudayaan juga melakukan promosi kebudayaan di tingkat provinsi seperti melakukan pagelaran tari pesisir pada kegiatan festival saijaan Kotabaru, aruh sastra di Banjarmasin, tadarus puisi ke XVIII di Banjarbaru. Kegiatan yang berskala nasional seperti pagelaran tari dikegiatan calender of event pariwisata di Balikpapan Kalimantan Timur.

Dari 46 penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Balangan melalui 50 lembaga kesenian yang ada diseluruh kecamatan di Kabupaten Balangan diharapkan dapat menambah kecintaan masyarakat terhadap seni budaya daerah, sehingga dapat bisa terus mengembangkan seni dan budaya, khususnya budaya lokal dan memadukan potensi yang dimiliki agar memiliki ciri khas dan akhirnya dapat mengangkat perekonomian masyarakat.

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya didarat/atau diair yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Pelaestarian cagar budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat, meningkatkan harakat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Suatu benda dapat dikatakan cagar budaya jika sudah melalui proses penetapan. Tanpa proses penetapan suatu warisan budaya yang memiliki nilai penting tidak dapat dikatakan sebagai cagar budaya. Penetapan berdasarkan UU RI tahun 2010 adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya berdasarkan UU RI no 11 tahun 2010 adalah kelompok ahli pelestari dari berbagai ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.

Tabel 2.95
Cagar Budaya Atau Diduga Cagar Budaya
Di Kabupaten Balangan

NO	NAMA	ALAMAT	KECAMATAN
1	MAKAM RAKSASINA SINGA JAYA	PARINGIN KOTA	PARINGIN
2	KAWASAN SUMUR MINYAK	PARINGIN TIMUR	PARINGIN
3	MESJID HUJAN MAS	DESA HUJAN MAS	PARINGIN
4	RUMAH ADAT BANJAR BUBUNGAN TINGGI	DESA TARANGAN	PARSEL
5	RUMAH BATU	DESA MUARA NINIAN	JUAI
6	MAKAM DATU KANDANG HAJI	DESA TELUK BAYUR	JUAI
7	BENTENG TUNDAKAN	DESA TUNDAKAN	AWAYAN
8	MAKAM TEMENGGUNG JALIL	DESA TUNDAKAN	AWAYAN
9	MERIAM LILA	DESA TUNDAKAN	AWAYAN
10	RUMAH KUNA PERDAGANGAN KARET MASA BELANDA	DESA SIMPANG TIGA	LAMPIHONG
11	JEMBATAN BESI BELANDA	DESA HILIR MESJID	LAMPIHONG
12	MAKAM DATU MARTIKA	DESA TAMPANG	LAMPIHONG
13	MAKAM KH. ABDUL GHANI	DESA JIMAMUN	LAMPIHONG
14	RUMAH ADAT BANJAR	DESA RIWA	BATUMANDI
15	RUMAH ADAT BANJAR (PANDAM)	DESA TELUK MESJID	BATUMANDI
16	GOA DEBU	DESA SUNGSUM	TEBING TINGGI
17	GOA SIDABONG	DESA KAPUL	HALONG

Dari 17 situs cagar budaya atau yang diduga cagar budaya yang ada di Kabupaten Balangan hingga 2021 ada 13 situs cagar budaya yang sudah dilestarikan, sebanyak 11 cagar budaya yang dikelola oleh Kabupaten Balangan yaitu makam raksasina singa jaya di Desa Teluk Keramat, rumah batu di Desa Muara Ninian, makam datu kandang haji di Desa Teluk Bayur, benteng tundakan di Desa Tundakan, makam Temenggung Jalil di Desa Tundakan, rumah kuna perdagangan karet masa belanda di Desa Simpang Tiga, makam Datu Martika di Desa Tampang, rumah adat banjar di Desa Riwa dan goa debu di Desa Sungsum yang di jaga oleh 9 juru pelihara sedangkan Jembatan Besi Belanda diperbaiki oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dan Makam KH. Abdul Ghani mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Daerah. Selain 11 cagar budaya yang dikelola kabupaten ada 2 cagar budaya yang dikelola oleh Propinsi Kalimantan Selatan yaitu mesjid syuhada di Desa Hujan Mas dan bubungan tinggi di Desa Tarangan yang dijaga oleh 2 juru pelihara.

Terkait hal tersebut diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari tahun ketahun dapat meningkatkan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Balangan sebagai bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati zaman sekarang dan dapat menambah pendapatan Kabupaten Balangan melalui kegiatan wisata, serta dapat dapat membantu dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan di Kabupaten Balangan

Persoalan kebudayaan adalah persoalan melestarikan dan melakukan revitalisasi budaya daerah untuk kemudian mengembangkan seiring dengan perkembangan zaman sehingga dapat bersaing dengan perkembangan kebudayaan global. Oleh karena itu kita perlu mendokumentasikan agar tidak kehilangan jejak dan tidak diambil pihak lain (luar). Selain diinventarisasi karya budaya juga perlu direvitalisasi.

Terkait hal tersebut untuk jumlah karya budaya yang diinventarisasi di Kabupaten Balangan antara lain cagar budaya atau yang diduga cagar budaya sebanyak 17 jenis yang dikelola oleh juru pelihara kabupaten dan propinsi. Sedangkan adat tradisi masyarakat Balangan yang terinventarisasi sebanyak 19 jenis antara lain aruh adat nimbak, ma'iwu, aruh adat bawanang, itatamba banua, minyaulahan, nimbuk/membatur, ngatet nahi, buanang, aruh adat baharin, jajampian, momen/kematian, manugal, bepalas/baancak, menyalamat, menatu wini, aruh adat bawanang, bahayaga, balimit, baburdah, bamaulid, bayasinan, menyalamat, mearuah, mehaul, bemandi-mandi, beusung penganting, bejalan liuk, begunung api, basunat binian, mengayu, bamumula, bearak pengantin kepala andaro, bepantul, ondel-ondel Balangan, manugal dan mengatam.

Dari 34 karya budaya yang diinventarisasi di Kabupaten Balangan hingga tahun 2023 tidak ada yang yang direvitalisasi, padahal dari banyaknya karya budaya yang ada di Kabupaten Balangan perlu kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting cagar budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian nilai budaya masyarakat.

Selain karya budaya yang diinventarisasi juga ada banyak lembaga atau balai adat di Kabupaten Balangan yang sudah diinventarisasi, yaitu sebanyak 50 lembaga adat. 30 lembaga adat di Kecamatan Halong yaitu di Desa Mamigang, Kapul, Uren, Marajai dan Desa Binuang Santang dan 20 lembaga adat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu Desa Mayanau, Langkap, Dayak Pitap, Kambiyain dan Desa Ajung.

Cagar budaya yang ada di kabupaten Balangan perlu dikelola secara terpadu oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Cagar budaya yang dikelola secara terpadu di kabupaten balangan sebanyak 13 cagar budaya yang dikelola oleh juru pelihara kabupaten sebanyak 9 orang, 2 dilakukan pelestarian dan juru pelihara propinsi sebanyak 2 orang. Terkelolanya cagar budaya secara terpadu maka diharapkan dapat melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat, meningkatkan harakat dan martabat bangsa melalui cagar budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan bangsa dan mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Q. Urusan Perpustakaan

Prioritas pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 menitikberatkan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Untuk mencapai ke arah tersebut memerlukan pembangunan manusia yang berkarakter lewat penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreatifitas. Kemampuan literasi bukan sebatas bisa baca-tulis. Literasi adalah kecakapan. Setidaknya, ada empat

tingkatan literasi yang dijadikan parameter kemajuan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan ataupun informasi yang bermutu. Kedua, kemampuan memaknai yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide-ide, gagasan, inovasi, ataupun kreativitas baru. Dan keempat, literasi adalah kemampuan menciptakan barang/jasa untuk khalayak.

Dalam perkembangannya, definisi literasi selalu berevolusi sesuai dengan tantangan zaman. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menekankan pentingnya pemberdayaan perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Terkait hal tersebut maka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menjadi indikator dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan.

Tabel 2.96
Kinerja Dispersip Tahun 2023

NO	INDIKATOR	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	49,47	67,73
2	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	23,47%	56,46%	62,88%
3	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	38,98%	39,37%	36,68%
4	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0,0010 per 1.000 penduduk	0,0010 per 1.000 penduduk	0,0010 per 1.000 penduduk
5	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	19,55%	56,46%	62,88%
6	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	11.691 Judul	12.838 Judul	12.494 judul

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat merupakan kegiatan perpustakaan yang berupa sensus atau pendataan untuk mengetahui tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diperoleh dari unsur-unsur pembangunan. Berdasarkan tabel diatas Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Balangan tahun 2022 sebesar 49,47 dan meningkat ditahun 2023 menjadi 67,73. Literasi masyarakat, dalam pelaksanaannya IPLM Kabupaten Balangan memperoleh skor IPLM 67,73 dengan urutan ke 7 dari 13 kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Selatan yang mana skor ini meningkat dari tahun sebelumnya urutan terakhir dari 13 kabupaten.

Meningkatnya IPLM ini disebabkan karena adanya kerjasama dengan berbagai pihak terkait dalam mendukung meningkatnya IPLM di Kabupaten Balangan seperti kegiatan pembinaan perpustakaan, pendataan perpustakaan, akreditasi perpustakaan serta sosialisasi kepada pustakawan se Kabupaten Balangan, menoptimalkan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, menyediakan berbagai koleksi judul buku, dan lainnya.

Berdasarkan tabel diatas yang dimaksud dengan jumlah pengunjung perpustakaan per tahun adalah jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun di bagi jumlah orang

dalam populasi yang harus dilayani. Terkait hal tersebut untuk jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2023 di kabupaten Balangan hanya sebesar 62,88% yang didapatkan dari jumlah kunjungan perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 37.729 orang dibagi dengan populasi masyarakat Kabupaten Balangan tahun 2023 yang harus dilayani sebanyak 60.000 orang.

Walaupun terjadi peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan ditahun 2023 namun masih dianggap belum optimal. Belum optimalnya jumlah pengunjung perpustakaan tahun 2023 dipengaruhi oleh kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan, seperti perpustakaan desa beserta koleksi bukunya yang kurang update sehinggan bahan bacaan kurang diminati oleh masyarakat, kurangnya armada mobil perpustakaan keliling beroperasi untuk melayani kesekolah-sekolah yang ada di 8 kecamatan dan juga dipengaruhi oleh lokasi perpustakaan daerah yang tidak strategis karena jauh dari pusat kota, padahal berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) perpustakaan untuk provinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan menyatakan bahwa lokasi perpustakaan berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Yang tidak kalah penting kurangnya perpustakaan desa sedikitnya koleksi buku yang tersedia di perpustakaan padahal koleksi buku yang beragam dan sesuai perkembangan zaman terutama kaum milenial sangatlah penting untuk memicu sehingga mau datang berkunjung ke perpustakaan baik perpustakaan daerah maupun perpustakaan desa yang tentunya akan berdampak terhadap meningkatnya IPLM Kabupaten Balangan. Untuk rasio perpustakaan tahun 2023 sebesar 0,0010 per 1.000 penduduk.

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Perpustakaan dan Kepustakaan, Perpustakaan Nasional Tahun 2022 menyatakan bahwa penambahan koleksi buku sekurang-kurangnya 5% dari jumlah judul per tahun atau minimal 100 judul per tahun dan berdasarkan UNESCO bahwa setiap tahun orang membaca minimal 3 buku baru. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan di Kabupaten Balangan ditahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 36,68% atau turun sebesar 2,69%. Menurunya koleksi buku karena sedikitnya penambahan judul buku ditahun 2023 dibandingkan jumlah buku yaitu hanya 344 judul buku, sehingga berjumlah 12.838 judul buku dibagi dengan jumlah buku sebanyak 34.998 buah buku. Masih sedikitnya koleksi buku yang ada di perpustakaan daerah tentu sangat mempengaruhi tidak optimalnya pengunjung perpustakaan tahun 2023 yang hanya 37.729 kunjungan atau rata-rata 62,88% dari jumlah orang dalam populasi yang dilayani di Kabupaten Balangan.

Pada dasarnya perpustakaan itu memiliki peran dan posisi yang strategis di dalam kehidupan seluruh masyarakat, baik didesa maupun kota-kota kecil dan besar, namun dalam prakteknya belum semua orang menyadari pentingnya perpustakaan karena mereka masih menganggap hanyalah sebuah tumpukan buku. Sedikitnya penambahan koleksi buku tahun 2023 di perpustakaan daerah karena kurangnya anggaran di Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan sehingga penambahan koleksi buku hanya dari sumbangan individu dan dari bantuan hibah. Selain itu juga anggaran dana desa tidak menjadi prioritas untuk penambahan buku di perpustakaan desa padahal minimal buku yang ada diperpustakaan desa berjumlah 1.000 judul buku. Selain itu di zaman yang serba modern ini diharapkan perpustakaan juga mampu memberikan pelayanan yang praktis atau serba digital agar mampu bersaing dengan maraknya kemajuan saat ini.

Selain hal yang disebutkan diatas tidak adanya pustakawan, tenaga teknis, dan penilaian yang memiliki sertifikasi di perpustakaan daerah tentu sangat mempengaruhi pengelolaan pelayanan perpustakaan secara optimal sesuai standar karena perpustakaan yang menerapkan prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penataan staf, pengarahan, pengawasan, pelaporan dan penganggaran. Terkait hal tersebut berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Bidang Perpustakaan dan Kepustakaan, Perpustakaan Nasional Tahun 2022 seharusnya untuk perbandingan jumlah sumber daya manusia yang diperlukan adalah dengan rasio 3:4, yaitu 3 (tiga) tenaga pustakawan, 4 (empat) tenaga teknis yang bersertifikasi.

R. Urusan Kearsipan

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan menekankan pentingnya arsip sebagai bukti pertanggungjawaban kepada generasi penerus. Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan yang bertujuan untuk kemudahan pencarian data, mengantisipasi kehilangan dokumen/file, mendukung keberhasilan organisasi dan apabila diperlukan data lama dapat dicari atau digunakan kembali.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Balangan mempunyai kompetensi melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan. Terkait hal tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menjadikan IPK sebagai indikator tujuan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik. Capaian IPK Kabupaten Balangan berdasarkan Laporan Hasil Audit Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan yang dilakukan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan adalah kategori CC atau dengan nilai 52,68 (lima puluh dua koma enam puluh delapan) yang merupakan penjumlahan dari nilai pengawasan eksternal sebesar 33,25 dan pengawasan internal sebesar 19,43. Rendahnya capaian kinerja IPK tersebut tentu sangat mempengaruhi capaian kinerja dari tata kelola pemerintahan yang baik yaitu dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi (IRB).

Terkait hal tersebut maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Balangan perlu mengoptimalkan pengawasan internal terhadap Perangkat Daerah (pencipta arsip) berkaitan dengan ketaatan terhadap Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah,

mengoptimalkan bagaimana pencipta arsip melaksanakan pengelolaan arsip di lingkungan masing-masing secara prosedural dan sistemik serta perlu mengoptimalkan pilar pengelolaan arsip dinamis yang harus dilakukan Perangkat Daerah yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, JRA, sistem klasifikasi keamanan, juga perlunya arsip dikumpulkan dan disampaikan salinan otintek naskah arsip terjaga ke ANRI. Seperti disebut diatas penyebab pengelolaan arsip yang kurang baik berkaitan dengan adanya kualitas SDM arsiparis yang bersertifikasi, minimnya sarana dan prasarana salah satu diantaranya tidak adanya depo arsip daerah yang sesuai standar ANRI sehingga untuk hal tersebut perlu dioptimalisasi dan perlu penambahan bangunan gedung untuk depo arsip daerah.

Tabel 2.97
Kinerja Dispersip 2023

NO	INDIKATOR	2022	2023
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	66,67%	23,33%

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2023

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, pengertian arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang diterima oleh Lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menurut peraturan arsip nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2018 tentang pedoman pemeliharaan arsip dinamis, arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat berbangsa, dan bernegara.

Pengelolan arsip secara baku sangat penting dilakukan agar dokumen yang ada terjamin keamanannya dan memudahkan apabila suatu saat membutuhkan arsip dokumen. Pemerintah Daerah melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melakukan pembinaan untuk mengelola arsip secara baku yang artinya agar mengelola arsip sesuai dengan aturan yang berlaku ke SKPD secara bertahap dari tahun ke tahun. Sampai tahun 2022 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalukan pembinaan sebanyak 20 SKPD atau 66.67% dari 30 SKPD yang ada di Kabupaten Balangan. SKPD yang di bina yaitu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas PU PR, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas PMPTSP, Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi, Dinas Sosial, Dinas Koperasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perhubungan, Kecamatan Batumandi, Kecamatan Awayan, Kecamatan Halong,

Kecamatan Juai, Kecamatan Lampihong, Kecamatan Tebing Tinggi, Kecamatan Paringin, Kecamatan Paringin Selatan.

Sedangkan tahun 2023 dari 20 SKPD yang sudah dibina tahun 2022, ada penambahan pembinaan terhadap SKPD yang belum pernah dibina yaitu Sekretariat Dewan Perwakilan rakyat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulan Bencana, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup.

Syarat mengelola arsip secara baku adalah terkelolanya pengelolaan arsip yang sesuai dengan 4 (empat) pilar kearsipan yaitu tata naskah dinas, klasifikasi arsip, jadwal retensi arsip dan system klasifikasi keamanan akses arsip. Berdasarkan tabel diatas perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku dari 30 SKPD ditahun 2023 hanya 7 SKPD sehingga persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku hanya sebesar 23,33%. Terjadinya penurunan kinerja ditahun 2023 dibandingkan tahun 2022 karena adanya perbedaan cara perhitungan. Rendahnya pengelolaan arsip secara baku dikarenakan selain tidak lagi melaksanakan bimbingan teknis oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga kesulitan melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaporan kondisi situasi arsip, pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah dan lainnya karena faktor support dari daerah kurang mendukung.

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2022 maupun 2023 tidak ada peningkatan SDM pengelola kearsipan dan penambahan arsiparis di SKPD yang bersertifikasi ataupun arsiparis biasa sehingga berdampak untuk SKPD menerapkan pengelolaan arsip secara baku.

2.1.3.2 Layanan Urusan Pilihan

A. Urusan Pariwisata

Kunjungan wisata adalah sebagai perjalanan atau bepergian untuk kesenangan mengunjungi berbagai tempat yang menarik, atau kunjungan singkat, atau kunjungan lewat suatu tempat. Target persentase peningkatan kunjungan wisata di Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 sebesar 13% atau seharusnya terjadi penambahan kunjungan wisata sebanyak 8.083 orang dari tahun 2022. Perhitungan persentase peningkatan kunjungan wisata didapatkan dari jumlah kunjungan wisata tahun 2023 dikurang jumlah kunjungan wisata tahun 2022 dibagi kunjungan wisata tahun 2022.

Kunjungan wisata di Kabupaten Balangan selama tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu sebanyak 45.678 orang dari 40.147 orang ditahun 2022 atau terjadi persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 13,78%, meskipun ada penambahan kunjungan namun nilai ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 20%. Peningkatan kunjungan wisata tahun 2023 dikarenakan faktor bebasnya masayarakat melakukan kegiatan diluar setelah pandemi covid di Tahun 2021-2022, selain itu juga tentu dipengaruhi gencarnya promosi wisata yang dilakukan melalui pamflet, spanduk, website dan media sosial seperti youtube dan facebook. Namun belum tercapainya target peningkatan

kunjungan wisata di Kabupaten Balangan karena beberapa destinasi wisata baru melakukan pembenahan setelah 2 tahun dilanda covid, sehingga beberapa destinasi masih dalam tahap renovasi dan penambahan fasilitas-fasilitas umum, sehingga pengunjung tidak begitu nyaman dengan kondisi proyek ditempat wisata.

Faktor pendukung yang lain juga dipengaruhi oleh adanya pelaksanaan pagelaran yang dilakukan di luar daerah Balangan seperti ikut serta dalam festival pasar terapung, festival budaya, *Calender Of Event* dan ikut serta dalam pameran-pameran di seluruh Indonesia. Sedangkan pergelaran di dalam daerah dilaksanakan Pemilihan putra-putri pariwisata Balangan, sehingga dengan adanya kegiatan ini akan semakin membantu promosi pariwisata Balangan dimana remaja Balangan ditanamkan rasa cinta terhadap keindahan alam di Balangan dan juga dijadikan sebagai Duta Pariwisata Kabupaten Balangan. Selain faktor tersebut juga tentu dengan memberikan fasilitas pariwisata yang memadai dibeberapa objek wisata dan pembinaan terhadap Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang ada di Kabupaten Balangan.

Tabel 2.98
Capaian Indikator Pariwisata Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No.	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.1	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisata	11.960	20.139 (40,6%)	32.407 (37,8 %)	40.147 (19,27%)	45.678 (13,78%)
1.2	Rata-rata Lama Kunjungan Wisata	4 s.d 5 hari	1 s.d 2 hari	1 hari	1 hari	1 hari

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Balangan, 2023

Kunjungan wisata di Kabupaten Balangan tahun 2023 sebanyak 45.678 orang dari yang ditargetkan sebanyak 48.176 orang atau sebesar 94,81% dengan rata-rata lama kunjungan wisata selama 1 hari. Untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama wisata pemerintah daerah melakukan berbagai upaya antara lain beberapa lokasi/objek wisata terus dibenahi baik yang mudah dijangkau seperti yang di seputaran kota Paringin, maupun yang lokasinya jauh dari kota Paringin sebagai ibukota Kabupaten Balangan seperti di Kecamatan Halong dan Tebing Tinggi. Dibeberapa objek wisata mulai dibangun beberapa sarana seperti gazebo dan sarana lainnya sepeti MCK agar wisatawan betah di lokasi wisata untuk menikmati indahnya alam di Kabupaten Balangan.

Seperti telah disebutkan diatas rata-rata lama kunjungan wisata di Kabupaten Balangan selama 1 hari. Kunjungan wisatawan selama 1 hari antara lain kunjungan di seputaran Kota Paringin seperti di Taman Hijau, Taman Palidangan, Water Park dan Al Fatah Stable, demikian juga dengan wisata religi dan budaya. Sedangkan untuk wisata alam pengunjung wisata ada yang melakukan kunjungan selama 2 hari (menginap), ini disebabkan lokasi yang jauh dan perjalanan yang cukup melelahkan (tapi penuh tantangan yang disukai oleh kaum muda yang hoby petualang). Objek wisata alam tersebut misalnya adalah Puncak Berangin, Puncak Gunung Hauk dan Air Terjun Tayak.

Terjadinya peningkatan kunjungan wisata ditahun 2023 tentu mempengaruhi PAD sektor pariwisata di Kabupaten Balangan. PAD di sektor pariwisata diambil dari pajak tahunan untuk sewa hotel dan penginapan serta pajak makan minum dari rumah makan yang ada di Kabupaten Balangan. Terjadi peningkatan kunjungan wisata tentu juga berdampak terhadap peningkatan jumlah warung makan dan restoran di Kabupaten Balangan selama tahun 2023.

Tahun 2022 PAD sektor pariwisata sebesar 3,8 % dan tahun 2023 terjadi peningkatan yaitu menjadi 4,43%. PAD sektor pariwisata tersebut didapat dari pajak untuk penginapan (akomodasi) tahun 2023 sebesar Rp 10.955.453,-, pajak rumah makan/restoran sebesar 298.975.249,-, pajak jasa boga/catering Rp 4.921.209.953,- dan pajak hiburan Rp 785.000,- total pajak daerah tahun 2023 adalah Rp 5.231.925.655,-.

Tabel 2.99
Tempat Makan Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Nama Tempat Makan	Lokasi
1.	Warung Makan Habibi	Kecamatan Paringin Selatan
2.	Warung Makan Padang Roda Baru	Jln.A.Yani Batu Piring
3.	Rumah Makan Padang Ampera	Jln.A.Yani Paringin
4.	Warung Makan Upik	Jln.A.Yani Belakang Pasar Paringin
5.	Depot Yasin	Paringin Kota
6.	Warung Makan Tulungagung	Batu Piring
7.	Depot Bakso Solo	Jln.A.Yani Batu Piring
8.	Depot Pikaco	Jln.A.Yani Batu Piring
9.	Soto Soroboyo	Depan Mesjid Al Akbar
10.	Bebek dan Ayam Kremes	Jln.A.Yani Batu Piring
11.	Depot Itik Panggang Mama Reyhan Amuntai	Jln.A.Yani Paringin
12.	Wong Solo	Jln.A.Yani Batu Piring
13.	Warung Makan Bebek Kremes Akbar	Jln.A.Yani Batu Piring
14.	Warung Makan Eva	Jln.A.Yani Batu Piring
15.	Warung Makan Amanda	Jln.A.Yani Batu Piring Km.5
16.	Rocket Chicken	Jln,A.Yani Batu Piring
17.	Rocket Chicken	Rica Paringin
18.	Bakso Malang	Terminal Paringin
19.	Warung Makan Salsabila	Jln.A.Yani Batu Piring
20.	Rumah Makan Mama Cindy	Rica Paringin
21.	Ar Raudhah Resto	Gunung Pandau Paringin Timur
22.	Ayam Campus Express Balangan	Jl. Ahmad Yani, Batu Piring
23.	Ayam Bakar Purnomo	Jl. Ahmad Yani, Gampa
24.	Sambal Gumy Adinda	Jl. Ahmad yani, Batumandi
25.	Sambal Gumi mama Apri	Jl. Ahmad Yani, Batu Piring
26.	Watung Paliat Ratna	Jl. Ahmad Yani, Batu Piring
27.	Warung Masakan Arab-Banjar	Jl. Ahamd Yani, Batu Piring
28.	Warung Simpang 2	Jl. Ahamd Yani Riwa, Batumandi
29.	Warung Mama Iki	Jl. Ahamd Yani Gampa
30.	Warung Pecel Ibu Siti	Jl. Ahmad Yani, Gampa
31.	BFC Polres	Jl. Ahamd Yani, Gampa
32.	Nasi Goreng Wahyu	Jl. Ahmad Yani, Batu Piring
33.	Warung Desa	Jl. Ahmad Yani, Batu Piring
34.	Coffetamin	Paringin Kota

Sumber : Disporapar, 2023

B. Urusan Pertanian

Pada tabel 2.98 menjelaskan capaian kinerja sasaran pada target RKPD Kabupaten Balangan.

Tabel 2.100
Capaian Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB dan Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No	Sasaran	INDIKATOR KINERJA	REALISASI				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	11.71	12.14	11,97	7,54	7,68
2	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani	95.31	105.37	110,87	107,37	109,48
3	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	90.08	90.66	86,80	58.49	57,38
4	Meningkatnya pendapatan petani	Nilai Tukar Petani	96.76	106.81	111,92	106,31	108,35

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Capaian indikator kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2023 sebesar 7,68 dengan capaian kinerja sebesar 57,38. Sedangkan Tahun 2022 sebesar 7,54 dengan dengan capaian sebesar 58,49, dari data capaian kinerja tersebut turun sebesar 1,11. Capaian indikator nilai tukar petani (NTP) pada Tahun 2023 sebesar 109,48 dengan capaian kinerja sebesar 108,35. Sedangkan Tahun 2022 NTP sebesar 107,37, dengan capaian kinerja sebesar 106,31 dari data capaian kinerja tersebut naik sebesar 2,04. Selain produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar, Kabupaten Balangan merupakan kabupaten yang memiliki kekayaan mineral berupa batubara, dan ini berimbas pada kontribusi sektor pertambangan dan penggalian pada PDRB mencapai sekian 73,73 %. Adapun sektor lain yang dominan sekaligus merupakan mata pencaharian sebagian besar penduduk adalah sektor pertanian, mulai dari pertanian, kehutanan, perikanan, sektor ini secara total memiliki kontribusi sebesar 7,68 %.

Selanjutnya sumberdaya manusia di sektor pertanian adalah salah satu isu utama dalam pembangunan sektor pertanian di suatu daerah. Jumlah petani di suatu daerah sangat tergantung pada struktur ekonomi di daerah tersebut. Apabila suatu daerah dominan di sektor pertanian, maka jumlah petani di daerah tersebut cenderung lebih banyak. Tabel berikut memperlihatkan jumlah petani di Kabupaten Balangan pada tahun 2023. Pada tahun 2023 jumlah petani di Kabupaten Balangan sebanyak 27.885 orang yang tersebar di 8 kecamatan. Petani terbanyak ada di Kecamatan Awayan yang berjumlah sebanyak 4.380

orang sedangkan yang paling sedikit ada di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu sebanyak 1.881 orang.

Tabel 2.101
Jumlah Petani di Kabupaten Balangan Menurut Kecamatan 2023

Kecamatan	Jumlah Petani (Orang)
Awayan	4.380
Batu mandi	4.363
Halong	3.506
Juai	4.180
Lampihong	4.323
Paringin	2.739
Paringin Selatan	2.512
Tebing Tinggi	1.881
Jumlah	**27.885**

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan SIMLUHTAN, 2024

Sebagian besar petani berusia >55 tahun. Di Kabupaten Balangan, proporsi petani yang berusia > 55 tahun jumlahnya paling banyak yaitu 44,14 %, lalu diikuti oleh petani yang berusia < 34 tahun yaitu 25,95% dan > 65 tahun sebesar 19,99 %. Hampir sama dengan Provinsi Kalimantan Selatan, proporsi petani yang berusia < 25 tahun lebih tinggi daripada petani yang berusia 25-64 dan 35-54 tahun. Berdasarkan klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya menurut Undang-undang Tenaga Kerja Nomor 13 Tahun 2003, yang dikelompokkan sebagai tenaga kerja yaitu mereka yang berusia 15-64 tahun, dan berdasarkan batas kerja, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yaitu berusia 15-64 Tahun. Sehingga diketahui bahwa kelompok usia petani di Balangan dari 15-55 tahun adalah petani usia produktif.

B.1. Tanaman Pangan

Jenis tanaman pangan yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah padi sawah, padi Gogo/ladang, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar. Tabel berikut menunjukkan luas panen masing-masing komoditi tanaman pangan tersebut dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa dimulai pada Tahun 2021 terjadi penurunan luas panen semua komoditi tanaman pangan kecuali padi gogo luas panennya tetap sama dengan luas panen tahun 2020. Pada Tahun 2023 terjadi kenaikan luas panen pada komoditi padi gogo dimana pada tahun 2022 hanya seluas 5.203 Ha dan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan luas panen sebesar 66 Ha menjadi 5.269 Ha. Komoditi lainnya yang mengalami peningkatan luas panen adalah kedelai, Kacang tanah dan ubi kayu. Komoditi kedelai dibanding Tahun 2022 hanya sebesar 183 Ha dan mengalami kenaikan seluas 191 Ha menjadi 374 Ha pada Tahun 2023. Begitu pula komoditi kacang tanah dan ubi kayu mengalami peningkatan sebesar 70 Ha dan 6 Ha. Dimana pada Tahun 2023 luas panennya masing2 komoditi tersebut adalah 0 Ha.

Tabel 2.102
Luas Panen Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan 2019-2023 (Ha)

No.	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	35.746	43.256	33.872	12.141	11.117,21
2	Padi Gogo	11.593	5.200	5.203	5.203	5.269,10
3	Jagung	18.917	2.896	5.867	3.987	1.685
4	Kedelai	278	270	0	183	374
5	Kacang Tanah	325	165	34	0	70
6	Kacang Hijau	36	100	0	0	-
7	Ubi Kayu	250	176	36	0	6
8	Ubi Jalar	100	30	0	0	-

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Tabel berikut menunjukkan produksi masing-masing komoditi tanaman pangan di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2023 produksi Padi Sawah dan jagung mengalami penurunan. Sedangkan untuk kedelai, Kacang Tanah, dan Ubi Kayu mengalami peningkatan produksi dibanding Tahun 2023. Dan komoditi tanaman pangan lainnya yaitu kacang hijau dan ubi jalar tidak ada produksi yang dihasilkan pada Tahun 2023 ini sama dengan pada Tahun 2022 yang lalu. Hal tersebut selaras dengan luas panen dan produksi. Dimana jika luas panen meningkat diharapkan produksi juga meningkat.

Tabel 2.103
Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Ton)

No.	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	155.903,71	196.240,77	189.010,53	70.161,04	64.965,13
2	Padi Gogo	41.498,65	15.626,10	15.609,00	15.609,00	15.807,30
3	Jagung	107.447,9	18.581,93	43.871,82	29.918,00	12.635,50
4	Kedelai	352,8	324	0	219,6	448,8
5	Kacang Tanah	309,37	209,55	43,18	0	88,90
6	Kacang Hijau	40,11	100,00	0	0	-
7	Ubi Kayu	6.220	2.499,2	511,20	0	85,2
8	Ubi Jalar	3.086,57	312,00	0	0	-

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Tabel berikut menunjukkan produktivitas masing-masing komoditi tanaman pangan di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga Tahun 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa produktivitas rata-rata untuk tanaman pangan meningkat, terutama padi sawah selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya. Untuk padi gogo terlihat bahwa produktifitas tidak mengalami peningkatan namun tetap setiap tahunnya, antara tahun 2019-2020 terjadi peningkatan produktifitas tanaman pangan lainnya yaitu jagung, kedelai, kacang taah dan ubi kayu. Pada rentang waktu 2021-202 angka produktifitas pada ketiga komoditi tanaman pangan tersebut sama yaitu masing-masing 7,5 Ton/Ha, 1,2 Ton/Ha dan 1,42 Ton/Ha.

Dengan demikian, dari tiga tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan efisiensi produksi jagung dan padi sawah karena mampu menghasilkan lebih banyak dengan lahan yang semakin sedikit/turun. Di samping itu, luas panen, produksi dan produktivitas padi gogo, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar mengalami penurunan selama periode tersebut. Penurunan luas panen padi sawah harus menjadi perhatian karena disebabkan oleh adanya alih fungsi lahan pertanian yang semakin tinggi di Kabupaten Balangan. Sedangkan luas panen, produksi dan produktifitas lainnya menurun disebabkankan oleh kesulitannya petugas penyuluh pertanian di lapangan khususnya Mantri Tani dalam melakukan pelaporan dikarenakan pelaporan tanam dan panen berdasarkan laporan langsung ke pusat melalaui aplikasi e-PDPS, dimana pencatatannya mencantumkan luas tanam atau luas panen langsung dengan foto dilapangan. Dan pelaporan tersebut dilakukan setiap hari. Namun kendala di lapangan adalah bahwa tidak semua PPL ataupun Mantri Tani mempunyai HP sebagai alat utama pelaporan dan kesulitan jaringan seluler yang menyebabkan laporan tidak dilakukan. Sehingga angka Panen tidak ada. Namun pada kenyataannya dilapangan semua tetap ada pertanaman.

Tabel 2.104
Produktivitas Tanaman Pangan di Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023 (Ton/Ha)

No	Jenis Tanaman Pangan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi Sawah	4,4	4,5	5,5	5,7	5,8
2	Padi Gogo	3,6	3,0	3,0	3,0	3
3	Jagung	5,7	6,4	7,4	7,5	7,5
4	Kedelai	1,3	1,2	0	1,2	1,2
5	Kacang Tanah	1,0	1,2	1,2	0	1,2
6	Kacang Hijau	1,1	1,0	0	0	0
7	Ubi Kayu	24,9	14,2	1,42	0	1,42
8	Ubi Jalar	30,9	10,4	0	0	0

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman pangan di setiap kecamatan tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut Luas panen padi sawah terbesar terdapat pada Kecamatan Lampihong, Batumandi dan Juai. Komoditas padi gogo, luas panen terbesar pada Kecamatan Halong, Tebing Tinggi dan Juai. Untuk komoditas jagung, luas panen terbesar terdapat di Kecamatan Halong dan Paringin Selatan.Angka produktifitas tertinggi padi sawah ada pada 4 Kecamatan yaitu Awayan, Batumandi, Juai dan Halong. Angka produktifitas terendah padi sawah di Kecamatan Paringin. Sedangkan produktifitas padi gogo sama disemua Kecamatan pada angka 3,0 Ton/Ha. Untuk Jagung produktifitas tertinggi di Kecamatan Halong yaitu 7,5 Ton/Ha dan Produktifitas Jagung terendah di Kecamatan Paringin Selatan yaitu 7,0 Ton/Ha.

Tabel 2.105
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Sawah
Di Setiap Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Padi Sawah			Padi Gogo			Jagung		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Awayan	1.052,31	6.310,20	6,0	542,0	1.626,00	3	-	-	-
2	Batu mandi	1.999,95	11.995,50	6,0	20,0	60,00	3	-	-	-
3	Halong	785,01	4.709,26	6,0	2.503,1	7.509,30	3	1.681	12.607,50	7,5
4	Juai	1.203,90	7.217,40	6,0	748,0	2.244,00	3	-	-	-
5	Lampihong	4.586,60	26.656,40	5,8	281,0	843,00	3	-	-	-
6	Paringin	762,44	3.961,90	5,2	50,0	150,00	3	-	-	-
7	Paringin Selatan	497,14	2.851,24	5,7	20,0	60,00	3	4	28,00	7,0
8	Tebing Tinggi	229,86	1.263,23	5,5	1.105,0	3.315,00	3	-	-	-
Jumlah			11.117,21	64.965,13	5,8	5.269,1	15.807,30	3	1.685	12.635,50

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Data Luas Panen, Produksi dan produktifitas Tanaman Pangan lainnya berupa kacang-kacangan dan umbi-umbian di setiap kecamatan pada Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Untuk komoditas Kacang Tanah Kecamatan Halong mempunyai luas panen, produksi terbesar dibanding 7 Kecamatan lainnya pada Tahun 2023. Namun untuk komoditas Ubi kayu berbanding terbalik karena luas panen dan produksi serta produktifitas lainnya adalah 0.

Tabel 2.106
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Kacang-kacangan dan Umbi-umbian
Di Setiap KecamatanTahun 2023

No.	Kecamatan	Kacang Tanah			Ubi Kayu		
		Luas Panen	Produksi	Produkvitas	Luas Panen	Produksi	Produkvitas
1	Awayan	10	12,70	1,27	0	0,0	0
2	Batu mandi	12	15,24	1,27	4	56,8	14,2
3	Halong	20	25,40	1,27	0	0,0	0
4	Juai	4	5,08	1,27	1	14,2	14,2
5	Lampihong	6	7,62	1,27	0	0,0	0
6	Paringin	0	-	0	0	0,0	0
7	Paringin Selatan	6	7,62	1,27	1	14,2	14,2
8	Tebing Tinggi	12	15,24	1,27	0	0,0	0
Jumlah			**70**	**88,90**	**1,27**	**6**	**85,2**

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

B.2. Hortikultura

Hortikultura terdiri dari sayuran, buah-buahan dan obat-obatan. Jenis sayuran yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah bawang merah, bayam, buncis, kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, jamur, tomat, terong, ketimun dan kangkung. Tabel berikut menunjukkan luas panen komoditi sayuran tersebut dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa luas panen semua jenis sayuran mengalami fluktuasi, ada yang

mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun ada juga yang meningkat. Luas panen yang terus meningkat yaitu bayam, buncis, jamur, kacang panjang, dan terongsejak tahun 2019-2022. Namun pada Tahun 2023 mengalami penurunan luas panen. Komoditi yang meningkat luas panen pada Tahun 2023 hanya Cabe Rawit. Luas panen yang mengalami penurunan pada Tahun 2023 yaitu bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, jamur, kacang panjang, kangkung, ketimun, lobak, cabe besar, kangkung, ketimun. Dan 2 komoditi hortikultura yang 0 luas panen pada Tahun 2023 adalah Ketimun dan lobak/labu siam.

Tabel 2.107
Luas Panen Sayuran di Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023 (Ha)

No.	Jenis Sayuran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bawang Merah	0,5	2	11	3	1
2	Bayam	23	14	25	25	19
3	Buncis	19,5	20	26	50,5	23,5
4	Cabai Besar	84,5	83	70,5	59	54,5
5	Cabai Rawit	159	146	145,5	156	199
6	Jamur	0	0	0,035	6	2
7	Kacang Panjang	68	55	66	75,5	54,5
8	Kangkung	20,5	21,5	29,5	15	13
9	Ketimun	49,5	41,5	104	77,5	47
10	Lobak/Labu Siam	25,75	0	-	-	0
11	Petsai/sawi	9	0	-	-	0
12	Terong	56,5	51	62	73	51,5
13	Tomat	51	49	82,5	80,5	57,5

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Tabel berikut menunjukkan produksi masing-masing komoditi sayuran di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa produksi yang mengalami peningkatan pada Tahun 2023 hanya cabe besar, cabe rawit. dan jamur. Sedangkan komoditi hortikultura lainnya mengalami penurunan produksi.

Tabel 2.108
Produksi Sayuran di Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023 (Kwintal)

No.	Jenis Sayuran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bawang Merah	50	100	207	140	8
2	Bayam	1.220	115	130	148	211
3	Buncis	1.365	1.620	1.243	2.980	1.423
4	Cabai Besar	6.200	5.255	3.282	3.165	3.391
5	Cabai Rawit	10.450,5	8.273	7.128	8.279	10.591
6	Jamur	0	0	0,15	0,25	0,93
7	Kacang Panjang	3.650,5	2.216	2.945,5	4.181	3.165
8	Kangkung	1.910	332	159	94	91
9	Ketimun	5.915,5	4.570	2.700	4.552	2.630
10	Lobak/Labu Siam	10.601	0	-	-	0

No.	Jenis Sayuran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
11	Petsai/sawi	360	0	-	-	0
12	Terong	4.320	3.940	3.262	4.351	2.935
13	Tomat	7.510	7.002	4.920	6.002	3.679

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Tabel berikut menunjukkan produktivitas masing-masing komoditi sayuran di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa hampir semua produktivitas sayuran di Kabupaten Balangan meningkat dibanding tahun 2022, produktivitas yang mengalami fluktuasi yaitu bawang merah, bayam, buncis, cabai besar, cabai rawit, terong dan tomat. Dengan demikian, dari tiga tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi efisiensi produksi adalah kacang panjang karena luas panen, produksi dan produktivitasnya meningkat.

Tabel 2.109
Produktivitas Sayuran di Kabupaten Balangan
Tahun 2019-2023 (Kwintal/Ha)

No.	Jenis Sayuran	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Bawang Merah	100,00	50	20	46,6	8
2	Bayam	53,04	8,21	5,2	5,92	11,1
3	Buncis	70,00	81	50	59	60,55
4	Cabai Besar	73,37	63,31	50	53,54	52,54
5	Cabai Rawit	65,73	56,66	50	53	53,22
6	Jamur	0	0	-	0,04	0,46
7	Kacang Panjang	53,68	40,29	50	55,37	58,07
8	Kangkung	93,17	15,44	5,4	6,26	7
9	Ketimun	119,51	110,12	50	58,73	55,95
10	Lobak/Labu Siam	411,69	0	0	0	0
11	Petsai/sawi	40,00	0	0	0	0
12	Terong	76,46	77,25	52	59,6	56,99
13	Tomat	147,25	142,89	60	74,55	63,98

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Sementara itu, jenis buah-buahan yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah alpukat, belimbing, duku, durian, jambubiji, jambu air, jeruk siam, jeruk besar, mangga, manggis, nangka, nanas, pepaya, pisang, rambutan, salak, sawo, sirsak, sukun, melinjo, petai, jengkol dan semangka. Tabel berikut menunjukkan luas panen dan produktivitas komoditi buah-buahan tersebut pada tahun 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa luas panen terbesar adalah buah nangka/cempedak, durian dan pisang sebesar 2.773 Ha, 287 Ha dan 200 Ha. Produksi terbesar pada tahun 2023 adalah yaitu buah nangka/cempedak, pisang, dan durian masing-masing 73725,20 kwintal, 29852,60 kwintal dan 7998 kwintal. Produktivitas terbesar yaitu buah pisang, jengkol , dan sirsak yaitu masing-masing sebesar 149,26 kwintal/ha, 60,29 kwintal/ha dan 48.09 kwintal/ha.

Tabel 2.110
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Buah-buahan
di KabupatenBalangan 2023

No	Jenis Buah Buahan	Luas Panen (Ha)	Produksi (Kuintal)	Produktivitas (Kwintal/Ha)
1	Alpukat	0,05	6	12
2	Belimbing	2	8,25	4,12
3	Duku/Langsat	13	85	5,85
4	Durian	287	7998	27,86
5	Jambu Biji	8	196,11	24,51
6	Jambu Air	4	20,38	5,09
7	Jeruk Siam/Keprok	44	482,35	10,96
8	Jeruk Besar	1	10,70	10,7
9	Mangga	65	70,20	1,08
10	Manggis	1	10	10
11	Nangka/Cempedak	2773	73725,20	26,58
12	Nenas	8	42,90	1,47
13	Pepaya	3	776	25
14	Pisang	200	29852,60	149,26
15	Rambutan	80	3466,30	9,98
16	Salak	57	123,10	2,15
17	Sawo	77	72,10	0,93
18	Sirsak	11	529	48,09
19	Sukun	15	640	42,66
20	Melinjo	6	0,90	0,15
21	Petai	9	49,66	5,51
22	Jengkol	53	3195,80	60,29
23	Semangka	17	787	46,29

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Jenis tanaman obat-obatan yang diproduksi di Kabupaten Balangan adalah jahe, laos/lengkuas, kencur dan kunyit. Tabel 2.109 berikut menunjukkan luas panen, produksi dan produktivitas tanaman obat tersebut dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa luas panen jahe dan laos/lengkuas, kencur dan kunyit tahun 2023 tersebut menurun. Produksi Jahe dan laos/lengkuas, kencur dan kunyit di tahun 2023 meningkat dibandingkan tahun 2021. Kecamatan Batu mandi merupakan tempat dimana tanaman obat-obatan banyak dibudidayakan.

Tabel 2.111
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Tanaman Obat
di KabupatenBalangan 2019-2023

No.	Jenis Tanaman Obat	Luas Panen (Ha)					Produksi (Kwintal)					Produktivitas (Kwintal/Ha)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jahe	3,013	48,016	6	3	1,5	9,039	147,5	175	249,64	176,98	3,00	3,07	25	40	43
2	Laos/Lengkuas	3,807	14,72	3,5	1	1	60,021	43,0	66	68,53	101,155	15,77	2,92	20	30	36
3	Kencur	1,61	4,46	2,5	2	1	3,22	133,86	54,5	104,73	80,77	2,00	3	30	30	38
4	Kunyit	2,603	4,7	1,5	1	0,5	75,309	124,85	30	55,71	55,4	28,93	2,65	20	25	41

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Tabel berikut menunjukan data luas panen, produksi dan produktivitas tanaman obat-obatan di setiap kecamatan tahun 2023. Luas panen tanaman obat-obatan baik jahe, laos/lengkuas, kencur dan kunyit yang terbesar di Kecamatan Batu mandi dan Halong. Dan luas panen terkecil adalah Kecamatan paringin Selatan dan Tebing Tinggi.

Tabel 2.112
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Semua Tanaman Obat-Obatan
Di Setiap Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jahe			Laos / Lengkuas			Kencur			Kunyit		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Awayan	210	12,4	5,9	0	0	0	250	9,5	3,8	148	5,9	3,9
2	Batu mandi	1.968	88,64	45	581	21,74	3,7	1.075	41,4	3,8	726	29,04	4
3	Halong	850	35	4,1	1.650	61	3,6	375	13,75	3,6	275	10,5	5
4	Juai	400	14,5	3,6	175	8	4,5	75	4	5	20	1	5
5	Lampihong	580	23,8	4,1	285	8,55	3	296	10,44	3,5	160	5,3	3,3
6	Paringin	65	3,85	5,9	50	1,75	3,5	35	1,4	4	0	0	0
7	Paringin Selatan	9	1,27	3	5	0,19	3	4	1,42	3,5	4	3,51	5
8	Tebing Tinggi	15	0,7	4,6	5	0,22	4,4	2	0,06	3	5	0,15	3
Jumlah		**4.097**	**180**	**76**	**2.751**	**101**	**26**	**2.112**	**82**	**30**	**1.338**	**55**	**29**

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

B.3. Peternakan

Hewan yang termasuk kategori ternak besar adalah sapi dan kerbau. Sementara itu, hewan yang termasuk kategori ternak kecil adalah kambing, domba dan babi. Tabel berikut menunjukkan banyaknya ternak besar dan ternak kecil di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga Tahun 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa jumlah ternak di Kabupaten Balangan yang meningkat adalahsapi, kerbau dan kambingdan yang mengalami penurunan adalah Babi.Peningkatan jumlah hewan ternak ternyata tidak sejalan dengan peningkatan jumlah daging yang dihasilkan. Hal ini disebabkan jumlah daging bukan dari ternak yang dipelihara di Kabupaten Balangan. Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Balangan belum berfungsi sebagaimanamestinya. Akibatnya ternak besar dan kecil dijual keluar Kabupaten Balangan. Jumlah sapi dan kambing selama periode 2016-2019 mengalami sedikit peningkatan, pada tahun 2020-2022 jumlah ternak sapi menurun, jumlah populasi ternak menurun karena pemotongan ternak sapi cukup tinggi terutama pada hari besar umat Islam. Kebutuhan hari raya qurban dan maulid Nabi sekitar 482 ekor, sedangkan untuk tahun 2021 di kabupaten Balangan untuk ternak sapi gagal pengadaan sehingga ternak sapi di kabupaten Balangan menurun dari tahun 2020 yaitu dari 1.953 ekor menjadi 1.507 ekor bahkan ditahun 2022 menurun lagi menjadi 863 ekor saja. Selain itu pasokan sapi menurun karena pembatasan impor sapi yang dilakukan pemerintah sehingga pasokan atau suplai sapi juga menurun ke kabupaten Balangan. Sementara itu konsumsi masyarakat terhadap daging sapi justru

meningkat setiap tahun dan kebutuhan masih tetap tinggi sehingga sapi lokal banyak yang dijual dan dipotong. Sedangkan jumlah ternak kambing menurun dan produksi dagingnya juga menurun. Jumlah daging pada tabel di bawah ini adalah jumlah daging sapi dan kambing yang dijual di pasar Kabupaten Balangan.

Tabel 2.113
Banyaknya Hewan Ternak Besar dan Kecil di KabupatenBalangan, 2019-2023 (ekor)

No	Tahun	Ternak Besar (Ekor)		Ternak Kecil (Ekor)	
		Sapi	Kerbau	Kambing	Babi
1	2023	1348	22	762	256
2	2022	863	13	559	409
3	2021	1.507	18	632	228
4	2020	1.953	7	674	58
5	2019	2.110	6	620	54

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Tabel 2.114
Banyaknya Produksi Daging Ternak di Kabupaten Balangan, 2019-2023

No.	Tahun	Daging (Kg)	
		Sapi	Kambing
1	2019	115.544	4.553
2	2020	105.278	4.553
3	2021	155.078	3.130
4	2022	137.167	2.021
5	2023	152.238	2.675

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Selain hewan ternak sebagaimana dijelaskan di atas, peternak di Kabupaten Balangan juga mengusahakan ayam buras, ayam ras pedaging dan itik. Tabel berikut menunjukkan banyaknya unggas di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga 2023. Selama periode tersebut jumlah ayam buras mengalami penurunan, namun pada tahun 2023 jumlah ayam buras mengalami peningkatanyang sangat besar dari 20.729 ekor menjadi 66.120 ekor. jumlah itik menurun drastis di tahun dari tahun 2019-2023. Begitu pula Jumlah ayam ras pedaging mengalami penurunan sepanjang tahun 2019-2023.

Tabel 2.115
Banyaknya Unggas di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Ekor)

Tahun	Jenis Unggas (Ekor)		
	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik
2023	66.120	1.673.938	12.159
2022	20.729	1.710.000	13.521
2021	25.474	1.869.000	13.140
2020	40.826	1.820.793	107.576
2019	42.300	1.771.275	197.410

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Tabel berikut menunjukkan produksi daging ayam buras, ayam ras pedaging dan itik di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga 2023. Berdasarkan tabel tersebut diketahui

bahwa produksi daging ayam ras pedaging mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun 2022, begitu pula dengan produksi ayam buras dan itik mengalami penurunan dibanding tahun 2022.

Tabel 2.116
Produksi Daging Ayam Buras, Ayam Ras Pedaging dan Itik di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Kg)

Tahun	Produksi Daging (Kg)		
	Ayam Buras	Ayam Ras Pedaging	Itik
2023	34.965	1.627.043	60.819
2022	137.167	791.340	65.574
2021	41.958	1.697.664	82.294
2020	59.610	1.629.484	123.776
2019	100.267	1.509.584	170.506

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

B.3. Perkebunan

Tanaman perkebunan rakyat yang ada di Kabupaten Balangan antara lain karet, kelapa, kopi, cengkeh, kakao dan aren. Tabel berikut menunjukkan luas areal tanaman perkebunan tersebut dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa hampir semua luas areal tanaman perkebunan mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Hanya kelapa sawit dan kelapa yang luas areal tanamannya meningkat.

Tabel 2.117
Luas Areal Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023 (Ha)

No.	Jenis Tanaman	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Karet	37.915	37.454	37.887	37.901	37411
2	Kelapa	589	591	591	591	639
3	Kelapa Sawit	1.055	1.055	1.085	1.085	1206
4	Kopi	207	526	526	526	526
5	Lada	17	25	25	25	25
6	Sagu	365	365	365	365	365
7	Kemiri	118	118	118	118	118
8	Pinang	54	54	54	54	54
9	Kapuk	25	25	25	25	25
10	Aren	559	559	559	559	559
11	Purun	27	27	27	27	27

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Tabel berikut menunjukkan produksi masing-masing tanaman perkebunan di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa pada tahun 2019 hingga 2023 produksi tanaman karet, sawit dan aren meningkat, sedangkan produksi Kopi dan lada menurun pada Tahun 2023.

Tabel 2.118
Produksi Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan, 2019-2023 (Ton)

No.	Jenis Tanaman	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Karet	31.994	30.959	29.091	24.375	27.169
2	Kelapa	150	263	301	324	324
3	Kelapa Sawit	1.359	311	520	689	824
4	Kopi	19	28	36	42	28
5	Lada	4	2,2	3,7	3,7	1,8
6	Sagu	102	59	55	55	57
7	Kemiri	68	39	31	31	31
8	Pinang	8	4	9	9	9
9	Kapuk	5	5	5	5	5
10	Aren	538	294	218	229	234
11	Purun	0,6	1	1	1	1

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Tabel berikut menunjukkan produktivitas masing-masing tanaman perkebunan di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga 2023. Dari tabel ini terlihat bahwa pada tahun 2019-2023 produktivitas tanaman karet, kelapa, sagu, kemiri, dan aren meningkat selama periode tersebut, sedangkan produktivitas tanaman lada, Pinang dan purun menurun pada tahun 2023. Dan pada Tahun 2023 produktifitas yang tetap dan sama dengan angka produktifitas pada tahun 2022 adalah kelapa sawit, kopi dan kapuk.

Tabel 2.119
Produktivitas Tanaman Perkebunan di Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No.	Jenis Tanaman	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Karet	0,84	0,83	1,102	0,850	0,95
2	Kelapa	0,25	0,45	0,746	0.755	0,755
3	Kelapa Sawit	1,29	0,29	2,63	2.65	0,265
4	Kopi	0,09	0,05	0,15	-	0,105
5	Lada	0,24	0,09	0,41	0,411	0,1
6	Sagu	0,28	0,16	0,347	0,307	0,34
7	Kemiri	0,58	0,33	0,389	0,369	0,389
8	Pinang	0,15	0,07	0,22	0,236	0,22
9	Kapuk	0,20	0,2	0,25	0,25	0,25
10	Aren	0,96	0,53	0,62	0,62	0,65
11	Purun	0,02	0,04	0,057	0,04	0,1

Sumber : DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

C. Urusan Perdagangan

Perekonomian Kabupaten Balangan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat pada tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020, dan dapat kembali meningkat pada tahun 2021 hingga 2023. Peningkatan dan penurunan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan, serta pertumbuhan ekonomi. Nilai PDRB Kabupaten Balangan (atas dasar harga berlaku) yang pada periode 2019 menunjukkan peningkatan yang dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan peningkatan produksi barang dan jasa. Adapun kontraksi (penurunan) pada tahun 2020 terjadi terutama akibat adanya pandemi COVID-19. Berbagai aktivitas pembatasan kegiatan baik skala nasional maupun internasional pada musim pandemi tahun 2020 menjadikan kondisi perekonomian Balangan mengalami kontraksi pada tahun ini. Namun nilai tersebut kembali mengalami peningkatan di tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan PDRB ADHB, komponen Ekspor Impor selama 2 tahun berturut-turut, yaitu 2019 dan 2020, mengalami pertumbuhan negatif setelah beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami perbaikan hingga tahun 2018. Namun, kedua komponen tersebut kembali mengalami peningkatan yang sangat siginifikan di tahun 2021 hingga 2023. Hal tersebut terjadi karena adanya peningkatan baik secara volume maupun nilai, terutama nilai batubara yang meningkat cukup siginifikan di tahun tersebut. Di sisi lain, impor menjadi pengurang dalam komponen PDRB pengeluaran dan ini juga menjadi penyebab perlambatan ekonomi di Balangan. Nilai PDRB Balangan (atas dasar harga berlaku) selama periode tahun 2018 – 2022 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020. Pada tahun 2020, nilai PDRB Balangan atas dasar harga berlaku mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, sebagai dampak dari pandemi yang terjadi pada tahun tersebut. Dari seluruh komponen di tahun 2021 hingga 2023, hanya Komponen Konsumsi pemerintah yang mengalami penurunan nilai tambah, sedangkan komponen yang lainnya seluruhnya mengalami peningkatan. Dengan demikian, kenaikan hampir seluruh komponen tersebut mampu menaikkan nilai PDRB Pengeluaran atas dasar harga berlaku secara total.

Nilai net ekspor, merupakan selisih dari nilai ekspor barang dan jasa dengan nilai impor barang dan jasa. Bila surplus/positif, berarti daerah tersebut lebih banyak ekspor ke luar. Dan begitupula sebaliknya bila negative, artinya dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya daerah tersebut banyak membutuhkan barang dan jasa dari daerah lain (impor). Dalam kurun waktu 2019 – 2023 net ekspor barang dan jasa Kabupaten Balangan berfluktuasi. Net ekspor Kabupaten Balangan yang terjadi antara tahun 2019 sampai dengan 2023 tercatat masing-masing sebesar 4,80 triliun rupiah (2019); 4,54 triliun rupiah (2020); 5,45 triliun rupiah (2021) dan 12,49 triliun rupiah (2022); 13,1 triliun rupiah (2023).

Tabel 2.120
Capaian Indikator Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5.1	Ekspor Barang dan Jasa(Milyar rupiah)	22.069,75	20,076.52	15,699.34	22.794,14	N/a
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	4	4	4	4	4
5.3	Net Ekspor barang danJasa (Milyar rupiah)	4,803.16	4,538.29	5,449.15	12,486.79	13.124,55

Sumber: Dinas Perdagangan, 2023

Sedangkan cakupan bina kelompok usaha informal Kabupaten Balangan sampai dengan tahun 2023 adalah sebanyak 4 (empat) kelompok pedagang/usaha informal, yaitu:

1. Persatuan Pedagang Pasar Modern Adaro;
2. Persatuan Pedagang Pasar Paringin;
3. Persatuan Pedagang Pasar Batu mandi; dan,
4. Persatuan Pedagang Pasar Halong.

Meskipun hanya 4 (empat) kelompok, namun pembinaan ini sangat penting sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan perekonomian terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Akan tetapi, keberadaan sektor informal diharapkan tidak menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum lainnya seperti berjualan yang menutup akses masyarakat terhadap fasilitas trotoar serta terawasi dalam hal pelayanan terhadap konsumen.

D. Urusan Perindustrian

Pengembangan kegiatan industri sangat bermanfaat di dalam proses pembangunan terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja dan perputaran arus modal. Sektor industri selama 5 tahun terakhir yaitu periode 2019 – 2023 rata- rata memberi kontribusi sebesar 1,98%. Padahal sektor Industri juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat mengganti peran sektor pertambangan di masa mendatang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan berkomitmen untuk terus berupaya meningkatkan peran sektor industri sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No 8 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang merupakan rumusan pokok-pokok kebijakan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan industri Kabupaten Balangan. Dalam RPIK dijelaskan bahwa tujuan pembangunan industri Kabupaten Balangan adalah tumbuh dan berkembangnya industri yang berbasis sumber daya lokal dan menguatnya daya saing industri melalui penerapan teknologi dan inovasi. Dalam RPIK sendiri dibuat sasaran pembangunan industri salah satunya adalah peran sektor industri terhadap PDRB ditahun 2022 sebesar 5,09 %. Namun sampai saat ini sasarannya belum memenuhi target. Permasalahan yang dihadapi oleh sektor industri antara lain

disebabkan karena belum adanya pengembangan industri hulu dan industri antara berbasis SDA, kualitas SDM Industri yang dimiliki terutama penguasaan teknologi belum optimal, dan belum tersedianya sarana dan prasarana industri (Kawasan Industri) yang dapat menarik minat investor.

Adapun data perkembangan perindustrian di Kabupaten Balangan tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.121
Capaian Indikator Perindustrian Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	96	97	98	99	99
6.2	Jumlah usaha industri kecil dan rumah tangga (unit)	2.239	2.312	2.349	2381	2421
6.3	Pertumbuhan Industri (%)	9,4	3,3	1,6	1.36	1.68
6.4	Kontribusi sektor industri PDRB harga berlaku (%)	1,94	1,98	1.87	1.27	1.26

Sumber: BPS 2023 dan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, 2023

Walaupun berdasarkan data cakupan bina kelompok pengrajin hanya memperlihatkan tren yang stabil tanpa ada peningkatan namun realisasi dilapangan membuktikan bahwa para pengrajin tetap bertahan dan mengalami kenaikan omset pemesanan. Peningkatan tersebut karena meningkatnya minat dan ketertarikan masyarakat atas hasil karya dari para pengrajin selain itu para pengrajin sendiri selalu optimis untuk terus mengaktifkan dan meningkatkan kreatifitas hasil usaha mereka berupa hasil hutan seperti bambu, bamban, purun serta hasil hutan lainnya untuk dijadikan kerajinan yang bernilai ekonomis. Begitu pula dengan jumlah usaha industri yang terus meningkat setiap tahunnya, meskipun hanya sebatas usaha kecil dan rumah tangga. Pada tahun 2023 jumlah IKM sebesar 2.421 unit dengan pertumbuhan industri dari tahun 2022 yaitu 1,68 % Kehidupan global saat ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas, inovasi, pemanfaatan teknologi dan informasi. Perubahan tersebut telah mendisrupsi berbagai sendi kehidupan global, termasuk persaingan dalam bidang ekonomi. Proses inovasipun menjadi sangat cepat bahkan cenderung revolusioner karena dukungan perkembangan teknologi. Maka strategi untuk memenangkan persaingan global, ditandai dengan terus dilakukannya inovasi dan kreativitas guna meningkatkan nilai tambah ekonomi.

Potensi ekonomi lokal yang mampu menjawab fenomena tersebut dan memperlihatkan perkembangan pesat di Kabupaten Balangan adalah industri kain sasirangan, industri kerajinan anyaman serta industri pangan. Produk-produk yang dihasilkan merupakan hasil karya cipta yang mengangkat lokalitas, keunikan dan memiliki nilai jual. Kesiapan untuk berkompetisi di pasar global masih diperlukan, salah satu yang utama adalah meningkatkan daya saing produk dengan kemampuan berinovasi dalam segala proses dari hulu hingga ke

hilirnya. Perkembangan usaha Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Balangan diharapkan mampu meningkatkan perannya dan memberikan kontribusi yang besar dan signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah. Pendekatan sistem klaster sangat tepat diterapkan pada program pengembangan IKM di Balangan karena pendekatan ini memiliki kekuatan yang terbentuk dari kelompok usaha yang berkaitan, baik secara geografis berada di wilayah yang berdekatan, terhubung dan saling melengkapi dalam proses produksi. Pendekatan klaster ini dapat mendorong IKM di Balangan memiliki orientasi pasar global sehingga keinginan untuk meraih daya saing semakin kuat.

Diharapkan dengan adanya pembinaan, pemberdayaan dan penguatan modal pada pelaku industri kecil dapat meningkatkan Pendapatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sehingga dapat menurunkan indeks gini ratio di Kabupaten Balangan. Kendala yang dihadapi para pelaku IKM di Kabupaten Balangan adalah tidak terlepas dari permodalan, bahan baku, pengemasan dan pemasaran. Dukungan dan peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya yang telah dilakukan ialah dengan memfasilitasi para IKM untuk memasukkan produk-produk mereka ke Ritel Modern.

E. Urusan Transmigrasi

Tabel 2.122
Capaian Indikator Transmigrasi
Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
Transmigrasi						
1	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	16.5	17,54	18,77	18,83	18,84

Sumber : Disnakertrans – BLK Kabupaten Balangan, 2024

Untuk Tahun 2023 lahan usaha yang dikelola mengalami penambahan sekitar 0.01 % dikarenakan ada beberapa faktor-faktor :

1. Adanya pemberian sarana dan prasarana pemanfaatan lahan usaha yakni bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan dan bibit serta pakan ikan.
2. Adanya pemberian sarana dan prasarana pemanfaatan lahan usaha yakni bantuan sarana dan prasarana budidaya daun sop.
3. Selain itu juga adanya bantuan domba dari Provinsi Kalimantan Selatan, dengan harapan dapat dijadikan sentra domba dan ikan dipermukiman eks transmigrasi Matang Hanau dan Papuyuan.

F. Urusan Perikanan

Tabel 2. 123
Jumlah RTP, Pembudidaya, dan Luas Lahan Tahun 2024

JENIS PEMBESARAN	JUMLAH RTP (BUAH)	JUMLAH PEMBUDIDAYA (ORANG)	LUAS LAHAN (M^2)
JARING APUNG TAWAR	25	25	695
JARING TANCAP TAWAR	34	20	365
KARAMBA	565	395	6.274
KOLAM AIR TENANG	226	385	262.079
KOLAM AIR DERAS	-	-	-
TAMBAK SEDERHANA	-	-	-
TAMBAK SEMI INSENTIF	-	-	-
MINA PADI	2	2	5.313
RUMPUT LAUT	-	-	-
BIOFLOK / KOLAM TERPAL	52	35	364

Sumber : Data RTP dan Pembudidaya 2023-2024

Rumah tangga perikanan tangkap/budidaya adalah rumah tangga yang melakukan kegiatan penangkapan/budidaya ikan dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya untuk dijual. Berikut gambaran Jumlah Rumah Tangga Perikanan di Kabupaten Balangan.

Di bidang perikanan, Kabupaten Balangan hanya mengandalkan budidaya dan penangkapan di perairan umum karena lokasinya tidak bersinggungan dengan laut dan secara kewenangan kabupaten tak lagi mengelola wilayah laut menurut UU No. 23 Tahun 2014. Budidaya perikanan budidaya darat berupa kolam, keramba dan bioflok. Jumlah rumah tangga perikanan budidaya di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah rumah tangga perikanan budidaya mencapai 3.953 orang dan pada tahun 2023 jumlahnya makin meningkat menjadi 4.270 orang dibanding tahun 2022 jumlahnya 4.095 orang. Jika dirinci menurut kecamatan, maka rumah tangga perikanan budidaya di Kecamatan Lampihong adalah yang paling banyak jumlahnya sebanyak 804 orang. Rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 hingga 2023 jumlahnya tidak mengalami peningkatan, yaitu 4.022 orang dan pada tahun 2022 menurun menjadi 3.917 orang . Jika dirinci menurut kecamatan, maka rumah tangga perikanan tangkap terbanyak juga ada di Kecamatan Lampihong.

Sementara itu, produksi perikanan di Kabupaten Balangan dari tahun 2019 – 2023 berfluktuatif. Pada tahun 2019, produksi perikanan di Kabupaten Balangan mencapai654 ton, lalu pada tahun 2020 meningkat sedikit menjadi 883 ton. Tahun 2021 meningkat

menjadi 928 ton, pada tahun 2022 meningkat menjadi 1.191,5 ton dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 1648,75 ton, Jika dirinci produksi menurut tempat pemeliharaan/penangkapan, maka sebagian besar ikan yang dihasilkan di Kabupaten Balangan berasal dari keramba. Produksi ikan di keramba tahun 2023 mencapai 709 ton, dari kolam jumlah produksi mencapai 695 ton dan dari bioflok hanya 125 ton. Jenis ikan yang dipelihara dari lokasi budidaya kolam yaitu ikan nila, mas, patin, lele dan gurame. Untuk keramba yang komoditas ikan yang dihasilkan yaitu nila, mas, gurame, jelawat dan bawal tawar. Sedangkan bioflok untuk jenis ikan lele, nila, patin dan papuyu/betok.

Tabel 2.124
Produksi Perikanan (ton) menurut Tempat Pemeliharaan di KabupatenBalanganTahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	Tahun														
		2019			2020			2021			2022			2023		
		Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof
1	Juai	18	6	-	25	9	-	28	29	-	38	51	-	80,79	56,72	13,19
2	Lampihong	21	336	-	27	452	-	55	58	-	58	139	-	121,18	262,32	-
3	Paringin	7	11	17	10	65	9	49	52	48	50	82	69	113.10	92,16	36,93
4	Paringin Selatan	24	34	32	44	49	9	46	49	98	50	80	74	96,95	141,79	26,38
5	Tebing Tinggi	23	-	-	28	-	-	31	32	-	41	44	28	56,55	42,54	6.60
6	Awayan	18	11	-	28	14	-	34	36	-	46	60	-	88,87	49,63	13,19
7	Batumandi	19	-	16	22	-	9	40	42	65	103	71	-	169,65	28,36	25,06
8	Halong	61	-	-	84	-	-	24	26	86	29	38	40	80,79	35,45	10,55
Jumlah		191	398	65	267	589	27	**307**	**324**	**297**	415	565.5	211	695	709	125
Total Budidaya		654			883			928			1.191.5			1648,75		
Total Penangkapan		991			952			885			833			810		
Total Produksi		1.645			1.836			1.813			2.024.5			2458,75		

Keterangan: Klm: Kolam, Krb: Keramba, Biof: Bioflok
Sumber: DKPPP Kab. Balangan, 2024

Produksi ikan dari penangkapan di perairan umum jumlahnya lebih besar daripada yang dari budidaya. Produksi penangkapan pada tahun 2019 mencapai 991 ton dan hingga tahun 2023 terus mengalami penurunan produksi yaitu 810 ton. Hal ini terjadi karena terjadi penyempitan wilayah tangkapan akibat pembukaan lahan. Disamping itu, penangkapan ikan bukan menjadi mata pencaharian utama bagi RTP tangkap, namun hanya sambilan. Lokasi tangkap nelayan yaitu di perairan rawa dan sungai di Kabupaten Balangan.

Adapun alat tangkap yang digunakan dalam penangkapan ikan yaitu pancing berjoran, jaring insang, anco, jala tebar dan bubu. Beberapa nelayan penangkap ada yang memiliki lebih dari 1 (satu) alat tangkap, menyesuaikan dengan target tangkapan. Jumlah nelayan dengan alat tangkap yang beroperasi di perairan umum Kabupaten Balangan dan

Jenis ikan yang ditangkap adalah ikan gabus, sepat siam, betok, seluang, sepat rawa, baung dan nilam.

Tabel 2.125
Jumlah Nelayan (orang) berdasarkan Alat Tangkap yang Beroperasi di Perairan Kabupaten Balangan Tahun 2023

No	Jenis Alat Tangkap	Jenis Perairan	
		Rawa	Sungai
1	PancingBerjoran	1.098	1.186
2	JaringInsang	180	360
3	Anco	367	0
4	Jala Tebar	347	330
5	Bubu	70	70
Jumlah		**2.063**	**1.946**

Sumber : DKPPP Kab. Balangan, 2024

Luas areal budidaya perikanan di Kabupaten Balangan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, baik kolam, karamba maupun bak bioflok. Penambahan areal yang cukup signifikan yaitu jenis kolam. Di akhir tahun 2022 dan 2023 dimana luas kolam 2022 mencapai 123.045 m^2. dan tahun 2023 luas kolam mencapai 148.139 m^2. Sebelumnya total luas kolam ikan yang ada di tahun pada tahun 2021 sebesar 71.050 m^2.

Tabel 2.126
Luas Areal Budidaya Perikanan (m^2) di KabupatenBalanganTahun 2019 – 2023

No	Kecamatan	Tahun														
		2019			2020			2021			2022			2023		
		Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Biof	Klm	Krb	Bioflok
1	Lampihong	1.600	4.116	-	1,600	4,413	-	1.600	4.413	-	15,634	206	-	2.505	192	
2	Batumandi	24.300	-	24	24,300	-	32	24.300	-	32	5,513	30	-	19.023	-	28
3	Awayan	11.300	111	-	12,800	111	36	12.800	111	36	16,051	45	-	33.947	90	112
4	Tebing Tinggi	900	-	-	900	-	-	900	-	-	3,677	-	23	8.555	150	-
5	Paringin	1.800	720	51	1,800	720	51	1.800	720	51	15,338	90	56	7.263	42	202
6	Paringin Selatan	1.600	381	168	1,800	381	168	1.800	381	168	37,131	12	112	18.945	48	644
7	Juai	1.200	198	-	1,200	198	-	1.200	198	-	13,257	-	-	6.497	30	-
8	Halong	13.000	36	-	13,400	36	48	13.400	36	48	16,444	-	-	51704	552	986
Jumlah		55.700	5.562	243	57,800	5,859	335	71.050	5.859	335	123,045	383	191	148.439	1.104	1.972

Keterangan: Klm: Kolam, Krb: Keramba, Biof: Bioflok
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Balangan, 2024

Untuk menunjang ketersediaan benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan memiliki ada 3 (tiga) Unit Pelaksana Teknis yakni :

a) UPTD Balai BenihHamparaya
b) UPTD Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau
c) Pos Kesehatan Hewan dan Inseminasi Buatan di Lampihong

UPTD Balai Benih Ikan Lokal Gunung Manau di Kecamatan Batumandi berdiri diatas lahan seluas ± 3,45 hektar (2,5 Ha + 0,95 Ha). Saat ini BBI Gunung Manau mengembangkan komoditas Nila, Patin Siam, Mas, Lele Sangkuriang, Papuyu dan Baung. Pada tahun 2021produksi sebesar 2.251.342 ekor benih, melebihi target sebanyak 1.600.000 ekor benih. Namun tahun 2019, 2020, 2022 hingga 2023, produksi yang dihasilkan tidak bisa memenuhi target. Kemudian di tahun 2022 produksi benih ikan menurun menjadi 1.000.000 benih. Perkembangan produksi benih ikan di BBI Gunung Manau serta kontribusi PAD tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada berikut.

Tabel 2.127
Produksi Benih Ikan Tahunan Balai Benih Ikan Lokal (BBIL)
Gunung Manau Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

No	Komoditas	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	NILA	77.840	221847	639.991	229.550	235700
2	PATIN SIAM	87.580	357485	258.013	191.350	67000
3	LELE SANGKURIANG	108.400	636965	124.196	258.500	552500
4	PAPUYU	43.580	98359	11.100	73.000	72500
5	BAUNG	1.000	33170	1.218.042	752.400	-
JUMLAH		359.600	1.347.826	2.251.342	1.000.000	1.000.000
TARGET		1.600.000	1.600.000	1.600.000	6.311.825	63.118.250
PERSENTASE		19,9 %	84,24%		75,2%	75,20%

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

Selain penangkapan dan budidaya, sektor perikanan di Kabupaten Balangan juga didukung dengan keberadaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (POKLAHSAR). Saat ini ada 25 kelompok pengolah dan 7 kelompok pemasar di Kabupaten Balangan. Bidang usaha pengolahan ikan yang dihasilkan yaitu bakso ikan, abon ikan, kerupuk ikan, roti isi abon ikan, nugget ikan, empek-empek, amplang patin, resoles ikan, stik ikan, crispy kulit pisang ikan patin, kerupuk waluh ikan patin, dan kerupuk udang. Sedangkan pemasar yaitu pedagang ikan yang menampung hasil tangkapan nelayan dan pembudidaya.

Tabel 2.128
Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
(POKLAHSAR) Di Kabupaten Balangan Tahun 2023

No.	Nama Kelompok	Bidang Usaha	Kelompok Usaha	Jumlah Anggota	SK Badan Hukum
I.	Kecamatan Lampihong				
1	Ulam Sari	Abon dan Kepupuk Ikan	Pengolah	9 Orang	ADA
2	Karya Usaha Bersama	Abon dan Kepupuk Ikan	Pengolah	10 Orang	ADA
3	Tirta Jaya	Kerupuk Ikan	Pengolah	15 Orang	ADA

No.	Nama Kelompok	Bidang Usaha	Kelompok Usaha	Jumlah Anggota	SK Badan Hukum
4	Berkah	Olahan Ikan	Pengolah	11 Orang	ADA
5	Cita Rasa	Amplang Ikan	Pengolah	10 Orang	TIDAK
6	Berkah Bersama	Amplang Ikan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
7	Hidayah	Kerupuk Udang	Pengolah	10 Orang	TIDAK
II.	Kecamatan Paringin Selatan				
1	Teratai	Bakso Ikan	Pengolah	8 Orang	ADA
2	Mawar	Nugget Ikan	Pengolah	9 Orang	ADA
3	Sejahtera I	Ikan olahan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
4	Sejahtera II	Abon olahan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
III.	Kecamatan Paringin				
1	Cipta Rasa	Bakso Ikan, Nugget Ikan,Mpek-mpek	Pengolah	10 Orang	ADA
2	An-Nisa	Ikan olahan	Pengolah	11 Orang	ADA
3	Melati	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	TIDAK
4	Hasil Usaha Bersama	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	TIDAK
5	Hasil Rezeki Bersama	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	TIDAK
6	Matahari Bersinar	Abon Ikan dan Sambal Sepat	Pengolah	10 Orang	TIDAK
IV.	Kecamatan Batumandi				
1	UKM Keluarga Sejahtera	Stik Ikan	Pengolah	11 Orang	ADA
2	Mawar	Olahan Ikan	Pengolah	11 Orang	TIDAK
3	Jelawat	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	ADA
4	Haruan	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	ADA
V.	Kecamatan Juai				
1	Tirta sari	Bakso Ikan	Pengolah	15 Orang	ADA
2	Kantil	Abon Ikan	Pengolah	10 Orang	TIDAK
3	Berlian	Pentol Ikan	Pengolah	17 Orang	ADA
4	Pelangi I	Crispy Kulit Pisang Ikan Patin, Kerupuk Waluh Ikan Patin	Pengolah	15 Orang	ADA
5	Pelangi II	Abon Ikan	Pengolah	15 Orang	TIDAK
VI.	Kecamatan Awayan				
1	Sepakat	Nugget Ikan	Pengolah	15 Orang	ADA
2	Cahaya Indah	Kerupuk, Resolis Ikan	Pengolah	10 Orang	TIDAK
3	Sumber Rezeki	Pedagang Ikan	Pemasar	10 Orang	ADA
4	Budi Mulya	Pedagang Ikan	Pemasar	7 Orang	ADA
VII	Kec. Halong				
1	Lokal Sama Mandiri	Abon Ikan lele dan Bakso Ikan	Pengolah	10 Orang	Ada
2	Kepatil Surya	Abon Ikan lele dan Bakso Ikan	Pengolah	21 Orang	Ada

Sumber: DKPPP Kabupaten Balangan, 2024

2.1.3.3 Penunjang Urusan

A. Perencanaan Pembangunan

Tabel 2.129
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1. Perencanaan Pembangunan						
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	Ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada	ada	ada	ada	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bapperida Kabupaten Balangan, 2024

Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia yang dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Perencanaan Pembangunan Daerah dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pada orientasi proses, perencanaan pembangunan daerah yang menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas bawah dan bawah-atas. Pada orientasi substansi, penyusunan perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

B. Keuangan

Tabel 2.130

Capaian Indikator Keuangan Kabupaten Balangan Tahun 2017-2023

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2. Keuangan								
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.2	Persentase SILPA	16,74%	7,28%	10.74%	21,40%	9,95%	11,66%	8,54%
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	16,74%	7,28%	10.74%	21,40%	9,95%	11,66%	8,54%
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	20,38%	22,57%	20,18%	20,22%	20,73%	20,34%	20%
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	13,61%	12,42%	14,26%	20,87%	13,71%	17,79%	12,83%
	Persentase belanja kesehatan (10%) tanpa memperhitungkan alokasi belanja Gaji	9,72%	9,74%	10,39%	14,97%	9,60%	15,60%	11,62%

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung (BL : BTL)	55% : 45%	56% : 44%	56% : 44%	49,44% : 50,56%	52,54% : 47,46%	Tidak ada lg BL dan BTL	Tidak ada lagi BL dan BTL
2.8	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (Belanja bagi hasil ke pemerintah desa : Total APBD)	0,06%	0,08%	0,08%	0,09%	0,17%	0,07%	0,07%
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa (Belanja bagi hasil ke pemerintah desa : Total PAD + Retribusi) Minimal 10% dari yang telah dianggarkan	10,00%	10,00%	10,02%	10,01%	10,01%	10,20%	12,52% (Belanja bagi hasil ke pemerintah desa : Total Pajak + Retribusi)
2.9	Penetapan APBD (Murni/Perubahan)	30 Desember 2016 /13 September 2017	27 Desember 2017 /16 Oktober 2018	28 Desember 2018 /10 September 2019	17 Desember 2019 /25 September 2020	23 Desember 2020 /30 Agustus 2021	31 Desember 2021/ 14 September 2022	28 Desember 2022/ 2 Oktober 2023

Sumber : BPKDAD Balangan, 2024

Pelaksanaan audit eksternal pemerintah yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai perwujudan dari pasal 23E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu badan pemeriksaan keuangan yang bebas mandiri. Berdasarkan table diatas Opini BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Balangan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023 adalah dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). WTP adalah opini terbaik setelah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Opini ini berarti laporan keuangan yang disusun oleh Pemerintahan Kabupaten Balangan sudah sesuai dengan pedoman atau standar akutansi keuangan yaitu laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standard umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja dan laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akutansi yang berlaku dan konsisten.

Kedepannya WTP ini akan selalu dipertahankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan dan ini sudah dibuktikan dari upaya Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mempertahankan Opini BPK dengan WTP 11 (sebelas) tahun berturut-turut. Dalam rangka menjaga sustainable Laporan Keuangan Pemerintah Daerah agar lebih baik dan optimal ke depan maka pemerintah daerah harus lebih meningkatkan lagi berbagai upaya berikut:

1) Melaksanakan kegiatan sensus aset untuk mengetahui aset yang dimiliki pemerintah daerah yang belum dimanfaatkan pengunaanya sehingga aset bisa dijadikan nilai tambah untuk meningkatkan pendapatan daerah (PAD).

2) Melakukan koordinasi/kerjasama dengan BPN untuk mempercepat proses penerbitan legalitas penguasaan atas tanah yang dimiliki pemerintah daerah.
3) Mempercepat proses legalitas standar operasional prosedur pengelolaan aset, sehingga bisa diinformasikan secara luas ke seluruh SKPD pengelola aset.
4) SILPA dapat diartikan dengan sisa lebih pembiayaan tahun berjalan atau sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan. SILPA diberikan batasan sebagai selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Dalam penyusunan APBD angka SILPA ini seharusnya sama dengan 0 (nol). Persentase SILPA ditahun 2022 dimaknai dua hal, pertama bahwa daya serap pelaksanaan APBD kurang maksimal atau lebih sering kita kenal dengan kinerja birokrasi kurang maksimal, kedua perencanaan APBD disusun dengan estimasi yang kurang matang sehingga antara target pendapatan dan belanja tidak balance.

Berdasarkan tabel diatas persentase SILPA terhadap APBD Kabupaten Balangan dari tahun 2016 sampai 2023 bersifat fluktuatif, tahun 2023 terjadi penurunan SILPA dibandingkan tahun 2022 dari persentase SILPA tahun 2022 sebesar 11,66 % menjadi sebesar 8,54 % di tahun 2023.

Berdasarkan tabel diatas persentase program dan kegiatan yang tidak terlaksana adalah 0%. Persentase 0% menggambarkan bahwa program dan kegiatan yang ada di Renja tahun 2023 untuk masing-masing SKPD sudah dilaksanakan sesuai dengan Renja tahun 2023 untuk masing-masing SKPD.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 4 mengamanatkan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20 %. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, salah satu bentuknya adalah dengan mengalokasikan anggaran dari tahun 2016 - 2023 diatas 20%.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mandatory spending atau belanja wajib kesehtan tidak lagi dikunci 10% dari APBD di luar gaji. Belanja kesehatan tetap menjadi mandatory spending, meskipun besarannya secara angka tak lagi ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam Pasal 409 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Kesehatan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan Kesehatan daerah yang mengacu pada program Kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang Kesehatan dengan memperhatikan penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan tabel diatas, Belanja Bagi hasil kabupaten/kota dan desa Kabupaten Balangan tahun 2022 sebesar 10,20%. Belanja bagi hasil kabupaten/kota dan desa sudah melewati batas minimal 10% dari yang sudah dianggarkan. Besaran belanja langsung

merupakan gambaran dari komitmen pemerintah terhadap pembangunan masyarakat. Awalnya proporsi ideal belanja langsung dan tidak langsung minimal 60%:40%. Namun saat ini berdasarkan tabel diatas belanja langsung dan belanja tidak langsung sudah tidak lagi ada.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam Pasal 117 ayat (2) disebutkan bahwa Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya. Berdasarkan tabel di atas penetapan APBD Kabupaten Balangan Tahun 2023 sudah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Tabel 2.131
Indikator Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Balangan Tahun 2016-2023

No.	Bidang Urusan / Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
3. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan						
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	20 JP	32,79 JP	31,23 JP	11,29	20 JP
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	35.59 %	21,97%	76,25 %	17,57 %	27,85 %
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	47.77 %	39,83%	35,70 %	35,08 %	45,89 %
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	39	31	24	24	24
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	165	150	133	1009	139
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	1.822	1.752	2014	1903	1777

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Balangan, 2024

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 beserta perubahannya telah mengamanatkan bahwa setiap PNS berhak memperoleh pengembangan kompetensi paling sedikit 20 (dua puluh) Jam Pelajaran (JP) setiap tahun. Amanat tersebut secara kuantitatif dapat dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Khusus pada tahun 2023, rata-rata lama pegawai memperoleh pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan sebanyak 20 JP. Angka rata-rata dimaksud menunjukkan bahwa JP minimal pengembangan kompetensi pegawai yang

harus dipenuhi oleh instansi pemerintah sesuai amanat peraturan perundangan telah dapat dipenuhi. Akan tetapi, pemenuhan hak tersebut secara kualitatif masih harus mendapatkan perhatian serius dari pimpinan dan pemangku kepentingan. Pengembangan yang dilaksanakan harus dapat dipastikan terlaksana secara merata dan proporsional bagi setiap pegawai.

Di samping pemenuhan JP minimal, terjadi kenaikan pada indikator persentase aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal jika dibandingkan tahun 2022. Definisi operasional indikator tersebut mengacu pada diklat wajib yang harus diikuti oleh calon atau pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan. Capaian indikator dimaksud pada tahun 2023 adalah 27,85 % (tidak termasuk Jabatan Fungsional Guru dan Tenaga Kesehatan). Adapun capaian indikator Pejabat Struktural yang telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan pada tahun 2023 sebesar 45,89 %.

Tren jumlah dan keterisian formasi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT), administrator, dan pengawas mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Balangan melakukan perampingan jumlah SKPD, sebagai konsekuensi pemberlakukan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021. Praktis jumlah SKPD pada Pemerintah Kabupaten Balangan hanya berjumlah 30 (tiga puluh) satuan kerja (sudah termasuk 8 kecamatan). Tren dimaksud berbanding terbalik dengan Jabatan Fungsional yang cenderung mengalami peningkatan signifikan dengan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi, salah satunya penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai implikasi terbit dan berlakunya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021.

Pimpinan Daerah telah berkomitmen bahwa pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, khususnya jabatan struktural, dilakukan berdasarkan prinsip sistem merit yang menonjolkan aspek kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang adil tanpa diskriminasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Balangan melalui satuan kerja terkait melakukan *assessment* untuk pengisian JPT yang bekerja sama dengan lembaga profesional ataupun perguruan tinggi. Hasilnya akan dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk memperoleh rekomendasi. Sedangkan untuk jabatan-jabatan di bawah level JPT, seperti Adminstrator dan Pengawas, fungsi dan peran Tim Penilai Kinerja Kabupaten Balangan akan dioptimalkan. Apabila suatu saat dimungkinkan secara anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan lainnya tersedia, maka akan dilakukan pula *assessment* untuk pengisian jabatan-jabatan tersebut.

D. Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2.132
Capaian Penelitian dan Pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023

No.	Bidang Urusan/ Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
4. Penelitian dan pengembangan						
4.1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	100%	70%	100%	100%	100%
4.2	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	100%	100%	100%	100%	100%
4.3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Bapperida Kabupaten Balangan, 2023

Dalam rangka percepatan pencapaian tujuan pembangunan, sebagaimana dibunyikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 386 ayat 1 “dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi”. Daerah harus mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mensejahterakan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, dan daya saing daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, dan diturunkan ke dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah.

Sama pentingnya dengan inovasi, kegiatan penelitian dan pengembangan diharapkan selalu dijadikan dasar landasan dalam pengambilan kebijakan pembangunan. Diperlukan upaya penelitian dan pengembangan terhadap berbagai isu aktual dan strategis sebagai upaya pemecahan persoalan-persoalan serta tantangan pembangunan daerah. Terkait hal tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Balangan perlu memfasilitasi kegiatan kelitbangan dan mendorong akselerasi inovasi daerah.

Berdasarkan tabel persentase pemanfaatan hasil kelitbangan tahun 2023 dengan capaian sebesar 100%, maksud dari capaian tersebut adalah hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti yang dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan sebanyak 15 dokumen kajian dari 10 dokumen kajian yang ditargetkan dalam Renja Bappedalitbang Kabupaten Balangan tahun 2023.

Adapun delapan hasil kajian kelitbangan yang ditindaklanjuti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kajian persepsi publik terhadap pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Balangan tahun 2023
2. Studi Kelayakan Ruang Potong Hewan Kabupaten Balangan
3. Kajian pemetaan potensi lahan karet di Kabupaten Balangan

4. Kajian Penambahan penyertaan modal BPD Kalsel
5. Kajian jalan lingkar luar barat dan timur Kabupaten Balangan
6. Kajian dampak/ pengaruh program CSR terhadap capaian kinerja pemerintah kabupaten balangan
7. Kajian Penanganan Banjir di kawasan transmigrasi
8. Kajian Resiko Bencana Kabupaten Balangan
9. Penyusunan Siteplan Pengembangan Kawasan Pasar Adaro
10. Penyusunan Kajian Relokasi Pasar Lampihong
11. Kajian potensi pendapatan daerah dari sektor pertambangan di wilayah Kabupaten Balangan
12. Kajian Kinerja Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Pembangunan Kabupaten Balangan
13. Kajian Peningkatan PAD dengan mengembangkan ekonomi kreatif melalui wisata kota
14. Kajian Penambahan Penyertaan modal PT. Air Minum Sanggam
15. Pengembangan inovasi Bappedalitbang Kabupaten Balangan (online sistem)

Hasil kelitbangan tersebut diatas adalah berupa rekomendasi dan dokumen perencanaan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh SKPD teknis dalam bentuk perencanaan pada level teknis dan program kegiatan SKPD di tahun selanjutnya.

E. Pengawasan

Urusan pengawasan dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkueren sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan.

Tabel 2.133
Capaian Indikator Pengawasan
Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

NO	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
5. Pengawasan						
5.1	Persentase tindak lanjut temuan	87,82%	90%	91%	92%	33,3%
5.2	Jumlah temuan BPK	75	47	53	102	24

Sumber : Inspektorat dan BKPSDM Kabupaten Balangan, 2024

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia No. 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan bahwa pemerintah daerah dalam hal ini pejabat daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah hasil pemeriksaan diterima.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah berkomitmen untuk menindak lanjuti rekomendasi dalam hasil pemeriksaan setelah pemeriksaan diterima. Berdasarkan tabel diatas untuk persentase tindak lanjut temuan terus meningkat dari tahun 2016 sampai

tahun 2023. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti berdasarkan berita acara rekonsiliasi dengan BPK RI Perwakilan Kalimantan Selatan tahun 2023 dari jumlah rekomendasi sebanyak 552 terdapat 446 rekomendasi yang selesai ditindak lanjuti atau sebesar 81%.

Pada Tahun 2023 BPK melaksanakan pemeriksaan ke Kabupaten Balangan dengan menghasilkan 2 Laporan Hasil Pemeriksaan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Pada Pemerintah Kabupaten Balangan di Paringin dan Instansi Terkait Lainnya di Paringin dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan Tahun 2022.

F. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perkawilan Rakyat Daerah (DPRD) dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah . Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Data laporan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Balangan terkait dengan pelaksanaan Propemperda di tahun 2023 berjumlah total 27 usulan yang masuk baik dari usulan pemerintah daerah maupun inisiatif anggota dewan dengan total 12 usulan yang sudah di paripurnakan di tahun 2023 dan sisanya Raperda akan diusulkan kembali pada Propemperda di tahun 2024. Adapun yang menjadi kendala sehingga Raperda yang tersisa tidak di paripurnakan karena harus memerlukan kajian yang lebih dalam lagi oleh DPRD Kabupaten Balangan agar bisa menghasilkan Perda yang bermanfaat dan dilaksanakan oleh masyarakat serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang belaku.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi pangan rumah tangga di Kabupaten Balangan antara tahun 2019 hingga 2023 secara konsisten mengalami kenaikan dari angka 55,24% pada tahun 2019, kemudian naik menjadi 55,27% pada tahun 2020. Namun pada tahun 2021 konsumsi pangan menurun menjadi 52,88%. Kemudian di tahun 2022 terjadi peningkatan di angka 54,23, kemudian pada tahun 2023 menurun menjadi 52,75% .

Masyarakat Kabupaten Balangan menjadikan makanan dan minuman jadi sebagai jenis konsumsi yang paling diminati, dengan tingkat pengeluaran sebesar 19,18% di tahun 2022, cukup meningkat dibanding tahun 2021 di angka 18,08%. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding konsumsi utama masyarakat pada umumnya seperti padi-padian dan jenis pangan lain seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayur-sayuran dan lain sebagainya yang angkanya di bawah 7%. Ini menunjukan masyarakat Balangan cenderung memilih cara praktis dalam memenuhi kebutuhan pangannya. Hal ini dapat disebabkan jumlah jam kerja masyarakat semakin tinggi, meningkatnya produksi dan ketersediaan makanan dan minuman jadi, serta gaya hidup masyarakat Kabupaten Balangan yang sudah mulai berubah.

Faktor gaya hidup juga berpengaruh pada peningkatan konsumsi rokok yang juga cenderung naik secara konsisten dari 4,67% pada tahun 2016 hingga 6,42% pada tahun 2021 dan baru mengalami sedikit penurunan di tahun 2022 di angka 5,02%. Angka tersebut tergolong tinggi dibanding jenis pangan lain seperti umbi-umbian, daging, sayur-sayuran, kacang-kacangan, telur, susu dan buah-buahan.

Tabel 2.134
Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga
Kabupaten Balangan 2019-2023

No	Kelompok Barang	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Rata-rata Pengeluaran Konsumsi (Ribu Rp)	547,068	627,078	638,764	675,742	654.043
B	Distribusi Pengeluaran Konsumsi (%)	55,24	55,27	52,88	54,23	52,75
1	Padi-padian	6.34	6,35	5,95	5,56	7,22
2	Umbi-umbian	0.18	0,18	0,27	0,32	0,31
3	Ikan / udang / cumi / kerang	5.66	5,66	5,78	6,28	5,46
4	Daging	1.74	1,74	1,73	2,05	1,8
5	Telur dan Susu	3.2	3,2	2,81	3,35	3,21
6	Sayur-sayuran	2.89	2,89	3,40	3,19	3,14
7	Kacang-kacangan	0.83	0,84	0,83	0,82	0,73
8	Buah-buahan	3.09	3,1	1,65	1,98	2,22
9	Minyak dan Kelapa	1.54	1,54	1,42	1,89	1,51
10	Bahan Minuman	1.95	1,95	1,89	1,79	1,62
11	Bumbu-bumbuan	0.96	0,96	1,10	1,16	1,03
12	Konsumsi Lainnya	1.5	1,5	1,55	1,64	1,39
13	Makanan dan Minuman Jadi	19.8	19,8	18,08	19,18	17,43
14	Rokok	5.56	5,56	6,42	5,02	5,69
Jumlah		**55.24**	**55,27**	**52,88**	**54,23**	**52,75**

Sumber : Kabupaten Balangan dalam Angka, 2023

Tabel 2.135
Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Rumah Tangga Kabupaten Balangan 2019 – 2023

No	Kelompok	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
A	Rata-rata Pengeluaran (Ribu Rp)	442,870	559,112	569,272	570,370	585.873
B	Distribusi Pengeluaran (%)	44.73	44,73	47,12	45,77	47,25
1	Perumahan & Fasilitas Rumah tangga	22.08	22.08	24,66	23,36	23,84
2	Aneka Barang dan Jasa	8.89	8,89	9,84	9,84	8,99
3	Pakaian, Alas kaki dan Tutup Kepala	3.03	3,03	3,03	3,00	2,77
4	Barang Tahan Lama	5.06	5,06	4,54	3,20	5,74
5	Pajak, Pungutan dan Asuransi	3.82	3,82	4,57	4,89	4,96
6	Keperluan Pesta dan Upacara / Kenduri	1.85	1,85	0,48	1,49	0,95
Jumlah		44.73	44,73	47,12	45,77	47,25

Sumber : Kabupaten Balangan Dalam Angka 2024

B. Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani merupakan nilai tukar (*term of trade*) antara barang/produk pertanian dengan barang-barang konsumsi dan faktor produksi yang dibutuhkan petani yang dinyatakan dalam %. NTP berfluktuasi dari waktu ke waktu tergantung dari perkembangan harga barang yang dijual petani (It) dan barang dan jasa yang dikonsumsi petani (Ib). Apabila harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik dengan persentase lebih besar dari persentase kenaikan barang dan jasa yang dibayar petani, dengan asumsi volume produksi tidak berkurang, maka NTP naik dan dengan sendirinya pendapatan petani naik relatif lebih besar dari kenaikan pengeluaran atau terjadi surplus. Dengan demikian secara konseptual, hubungan antara NTP dan pertambahan pendapatan petani sangat erat. Karena pendapatan petani sangat erat kaitannya dengan tingkat kesejahteraan, maka NTP merupakan indikator yang relevan untuk menunjukkan perkembangan tingkat kesejahteraan petani.

Secara umum ada tiga macam pengertian NTP yaitu:

- NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya.

- NTP = 100, berarti petani mengalami impas/breakeven. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan
- NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga barang produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahtaraan petani pada periode sebelumnya.

Nilai NTP di Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 NTP adalah sebesar 109,48.%, yang berati bahwa petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsi dan biaya produksi. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Nilai ini lebih besar dari target nilai NTP RPJMD sebesar 102,23%. Hal tersebut karena nilai NTP tanaman perkebunan rakyat yang memberikan peningkatan nilai yang tinggi.

Peningkatan nilai NTP perkebunan ini disebabkan tingginya harga komoditas perkebunan terutama komoditas yang bernilai ekspor. Namun yang menjadi permasalahan adalah NTP tanaman pangan yang semakin mengalami penurunan beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan Susenas tahun 2013, hampir 72% rumah tangga tani Kalimantan Selatan, merupakan petani padi. Sementara sisanya, tersebar pada usaha perkebunan (45,4%), peternakan (28,52%), dan holtikultura (24,75%). Sehingga sub sektor tanaman pangan perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan NTP ini.

Gambar 2. 38

Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan s.d Maret 2024



Sumber : Ranhir RKPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025

2.1.4.2 Iklim Berinvestasi

A. Kemudahan Perijinan

Pelayanan publik yang memuaskan masyarakat adalah tujuan akhir dari reformasi birokrasi, sejalan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya meningkatkan kualitas berbagai jenis pelayanan publik, termasuk di antaranya pelayanan di bidang perizinan, baik berupa penyederhanaan proses pengurusan perizinan, pemberian informasi yang cepat dan akurat maupun respon dan penyelesaian terhadap aduan yang masuk. Kebijakan ini perlu dilaksanakan untuk meningkatkan standar pelayanan perizinan berusaha yang efisien, mudah dan terintegrasi tanpa mengabaikan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga proses penerbitan perizinan berusaha menjadi lebih cepat namun sesuai dengan standar pelayanan yang ada sekaligus memberikan kepastian waktu dan biaya yang diperlukan.

Sebagai wujud komitmen Pemerintah untuk menciptakan iklim yang lebih kondusif dalam bidang pelayanan perizinan tersebut, maka dibentuklah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Balangan. Dalam perkembangannya pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2018 tanggal 21 Juni 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*online single submission*-OSS). Sistem ini memungkinkan investor dan calon investor mengurus izin usaha secara online tanpa dibatasi waktu dan tempat, disamping juga memangkas birokrasi panjang dan memakan waktu yang semula diberlakukan. Segala bentuk usaha dapat menggunakan sistem OSS mulai dari PT, Firma, CV, hingga UKM. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut maka jenis pelayanan perizinan yang dikelola oleh DPMPT tahun 2019 dipilah menjadi pelayanan perizinan berusaha sebanyak 375 bidang, pelayanan perizinan non berusaha sebanyak 24 bidang serta pelayanan perizinan non izin sebanyak 10 bidang.

Standar Pelayanan Minimal (SPM)

1. SPM Bidang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdiri atas 12 pelayanan kesehatan. Adapun data kesehatan berdasarkan standar pelayanan minimal tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2. 136
Capaian Indikator SPM Kesehatan
Kabupaten Balangan Tahun 2021-2023

NO.	Jenis Layanan Dasar (SPM)	Target	Realisasi		
			2021	2022	2023
1	Pelayanan Kesehatan Ibu hamil	100	79.18	81.67	78
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	88.29	91.36	95,96

NO.	Jenis Layanan Dasar (SPM)	Target	Realisasi		
			2021	2022	2023
3	Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	100	92.76	95.03	97,73
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	97.34	97	100
5	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	66.99	98.36	99
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	15.19	51	72
7	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100	94.34	98.73	99,98
8	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100	26.3	79.49	92,54
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	29.33	87.55	92,93
10	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	188.77	132.62	133
11	Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	17.68	36.72	57
12	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang meleahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiecy Virus)	100	88	92.43	99,42

Sumber : Profil Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan Tahun 2024.

Berdasarkan tabel diatas dari 12 indikator pemenuhan mutu pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan hanya 1 yang sesuai dengan target yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Capaian kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu hamil dinilai dari cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Seluruh ibu hamil di Kabupaten Balangan berhak memperoleh pelayanan kesehatan berkenaan dengan kehamilannya, baik di pelayanan dasar seperti Poskesdes dan Puskesmas maupun pelayanan rujukan di RS antara lain pemenuhan standar kualitas 10 T yaitu pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran lingkar lengan atas, pengukuran tinggi puncak rahim, penentuan presentase janin dan denyut jantung janin, pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tanbah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus dan temu wicara (konseling).

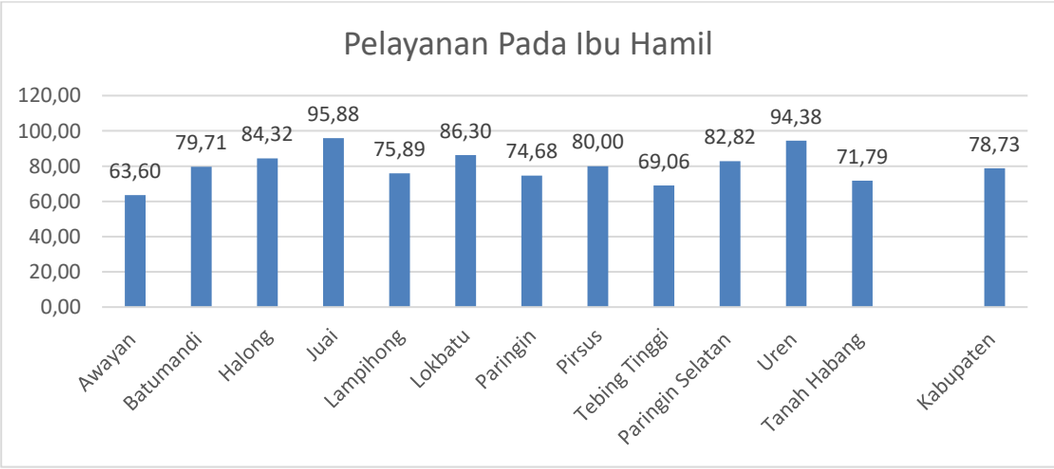
Tabel 2. 137
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Indikator	2021	2022	2023
1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	79,18%	81,67%	78%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil tahun 2023 terjadi penurunan sebesar 3,67% atau dari 81,67% menjadi 78%. Adapun berdasarkan grafik dibawah untuk pelayanan pengelolaan ibu hamil yang tertinggi di Puskesmas Juai sebesar 95,88% dan yang terendah di Puskesmas Tebing Tinggi hanya sebesar 69,06%.

Gambar 2.39
Grafik Pelayanan Pada Ibu Hamil



Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Faktor terjadinya penurunan kinerja pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain masih kurangnya pengetahuan ataupun kesadaran ibu dan keluarga untuk memeriksakan kehamilannya sesuai standar, tidak semua ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil dan masih ada desa yang tidak memiliki poskesdes padahal poskesdes merupakan akses terdekat bagi ibu hamil untuk memeriksakan kehamilannya terutama desa yang jauh dari puskesmas serta faktor tempat tinggal ibu hamil berpindah-pindah dihutan sehingga sulit mendapatkan ibu hamil baru.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil antara lain :

1. Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk pelayanan ibu hamil oleh bidan didesa.
2. Jaminan biaya pemeriksaan kehamilan untuk seluruh ibu hamil melalui BPJS agar ibu hamil yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan pelayanan kehamilan sesuai standar.
3. Pelaksanaan kelas ibu hamil sebanyak 115 kelas.
4. Penggunaan alarm kehamilan sebagai pengingat pemeriksaan kehamilan dan tafsiran persalinan.
5. Pembinaan tehadap bidan koordinator dan bidan di desa untuk meningkatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar dengan kriteria 10 T

6. Bimbingan teknis ke bidan puskesmas dan bidan di desa untuk meningkatkan pengetahun dan pemahaman tentang SPM.
7. Deteksi dini risiko oleh SPOG ke 12 puskesmas
8. Pengadaan roda dua sebanyak 91 buah untuk pelayanan kesehatan ibu dengan kunjungan rumah
9. Pembangunan poskesdes dan penempatan bidan didesa untuk desa yang tidak memiliki poskesdes maupun bidan didesa karena poskesdes sebagai akses terdekat untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu.
10. Melaksanakan orientasi Antenatal care (ANC) sesuai standar
11. Penyediaan kebutuhan untuk pengadministrasian seperti buku kesehatan Ibu dan Anaka (KIA) dan kohort ibu untuk PWS.
12. Penyedian kebutuhan obat-obatan seperti tablet tambah darah dan vitamin dan penyediaan Bahan Habis Pakai (BHP).
13. Pengadaan PMT untuk ibu hamil KEK dan anemia.

2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Pemerintah Daerah tingkat Kabupaten/Kota wajib memberikan pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar kepada semua ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun. Berdasarkan SPM untuk pelayanan kesehatan ibu bersalin maka setiap ibu di Kabupaten Balangan berhak memperoleh pelayanan persalinan. Pelayanan yang diperoleh setiap ibu bersalin dilakukan di fasilitas pelayanan Kesehatan dengan tenaga penolong minimal 2 orang yang terdiri dari dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat.

Tabel 2. 138
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	88,29%	91,36%	95,96%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan 2022 sebesar 4,6% atau menjadi 95,96%. Walaupun pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan 2022 namun masih belum sesuai target yang dinginkan sebesar 100% atau belum seluruh ibu bersalin mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar difasilitas kesehatan sehingga menyebabkan kematian ibu ditahun 2023 meningkat.

Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu bersalin dipengaruhi oleh faktor masih adanya keberadaan paraji (dukun beranak) yang berani menolong persalinan tanpa pendampingan tenaga kesehatan, masih kurangnya pengetahuan ataupun kesadaran ibu dan keluarga untuk melahirkan difasilitas kesehatan, tidak semua ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil sehingga tidak mendapatkan informasi tentang persalinan yang aman.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin untuk menurunkan kematian ibu pada waktu persalinan antara lain :

1. Peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga akan pentingya persalinan yang aman difasilitas kesehatan melalui kelas ibu hamil.
2. Jaminan biaya persalinan untuk seluruh ibu hamil melalui BPJS agar ibu bersalin yang tidak mampu secara finansial untuk membiayai persalinan dengan tenaga kesehatan tetap dapat bersalin di fasilitas kesehatan yang di tolong oleh tenaga Kesehatan.
3. Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk pelayanan ibu bersalin oleh bidan didesa.
4. Kemitraan antara paraji (dukun beranak) dengan bidan didesa ataupun puskesmas untuk menolong persalinan.
5. Pelaksanaan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi.
6. Penyediaan kebutuhan obat-obatan dan BHP untuk ibu bersalin
7. Pelatihan APN sebanya 45 bidan untuk peningkatan kompetensi dalam pertolongan persalinan.
8. Bimbingan teknis kebidan puskesmas dan bidan di desa untuk meningkatkan pengetahun dan pemahaman tentang persalinan sesuai standar
9. Pengadaan partus set untuk pemenuhan alat dalam menolong persalinan.
10. Penyediaan partograph yang berfungsi untuk deteksi dini persalinan dengan komplikasi sehingga mencegah kematian ibu akibat komplikasi seperti partus lama maupun kala II lama.

3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan neonatal esensial sesuai standar. Pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar kepada semua bayi usia 0-28 hari di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan bayi baru lahir sesuai standar tersebut antara lain terdiri atas standar kuantitas dan standar kualitas. Standar kuantitas adalah kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal, dengan ketentuan Kunjungan Neonatal 1 (KN1) 6-48 jam, Kunjungan Neonatal 2 (KN2) 3-7 hari, Kunjungan Neonatal 3 (KN3) 8-28 hari. Sedangkan untuk standar kualitas antara lain Pelayanan Neonatal Esensial saat lahir (0-6 jam) yang meliputi

pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi Menyusu Dini (IMD), injeksi vitamin K1, pemberian salep/tetes mata antibiotic dan pemberian imunisasi (injeksi vaksin Hepatitis B0). Sedangkan untuk Pelayanan Neonatal Esensial setelah lahir (6 jam–28 hari) meliputi konseling perawatan bayi baru lahir dan ASI eksklusif, memeriksa kesehatan dengan menggunakan pendekatan MTBM, pemberian vitamin K1 bagi yang lahir tidak di fasilitas pelayanan kesehatan atau belum mendapatkan injeksi vitamin K1, imunisasi Hepatitis B injeksi untuk bayi usia < 24 jam yang lahir tidak ditolong tenaga kesehatan dan penanganan dan rujukan kasus neonatal komplikasi.

Tabel 2. 139
Pengeloaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	92,76%	95,03%	97,73%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan 2022 sebesar 4,6% atau menjadi 95,96%. Walaupun pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan 2022 namun masih belum sesuai target yang dinginkan sebesar 100% atau belum seluruh bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sehingga kematian bayi tahun 2023 terjadi peningkatan.

Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan bayi baru lahir dipengaruhi oleh faktor masih adanya keberadaan paraji (dukun beranak) yang berani memberikan pelayanan bari baru lahir tanpa pendampingan tenaga kesehatan, masih kurangnya pengetahuan ataupun kesadaran ibu dan keluarga untuk melahirkan difasilitas kesehatan sehingga bayinya tidak mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar, tidak semua ibu mengikuti kelas ibu hamil dan kelas balita sehingga tidak mendapatkan informasi tentang pelayanan bayi baru lahir sesuai standar dan tentang pola asuh anak yang benr.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir untuk menurunkan kematian bayi antara lain :

a. Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk pelayanan bayi baru lahir oleh bidan didesa.
b. Jaminan biaya pelayanan bayi baru lahir melalui BPJS agar bayi baru lahir yang tidak mampu secara finansial untuk tetap mendapatkan pelayanan bayi baru lahir sesuai standar.
c. Melaksanakan Kelas Ibu Hamil sebanyak 115 kelas dan kelas bayi
d. Peningkatan kapasitas bidan di desa berupa oreintasi asfikasi dan oreintasi BBLR

e. Kerja sama dengan CSR Adaro pelaksanaan peningkatan kapasitas petugas kesehatan dalam Penanganan BBLR
f. Bimbingan teknis ke bidan puskesmas dan bidan di desa untuk meningkatkan pemahaman tentang SPM Bayi baru lahir.
g. Koordinasi dengan dinas kesehatan Propinsi memberikan pelayanan neonatus antara lain pemeriksaan neonatus, pemantauan kesehatan neonates termasuk neonatus resiko tinggi, pemeriksaan dan tindak lanjut *Screening Hipothyroid Kongenital* (SHK).
h. Meningkatan Kapasitas Bidan dalam Kunjungan Neontus (MTBM)

4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Capaian Kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan dinilai dari cakupan balita yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pelayanan kesehatan balita sehat adalah pelayanan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan menggunakan buku KIA dan skrining tumbuh kembang, meliputi pelayanan kesehatan Balita usia 0 -11 bulan antara lain pnimbangan minimal 8 kali setahun, pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali /tahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali/tahun, pemberian kapsul vitamin A pada usia 6-11 bulan 1 kali setahun, pemberian imunisasi dasar lengkap. Pelayanan kesehatan Balita usia 12-23 bulan antara lain penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun, pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun, pemberian Imunisasi lanjutan. Pelayanan kesehatan Balita usia 24-59 bulan antara lain penimbangan minimal 8 kali setahun (minimal 4 kali dalam kurun waktu 6 bulan), pengukuran panjang/tinggi badan minimal 2 kali/tahun, pemantauan perkembangan minimal 2 kali/ tahun, pemberian kapsul vitamin A sebanyak 2 kali setahun, selain itu juga pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin A, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan, edukasi dan informasi. Sedangkan untuk pelayanan kesehatan balita sakit adalah pelayanan balita menggunakan pendekatan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).

Tabel 2. 140
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	97,34	97%	100%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir tahun 2023 mengalami kenaikan dibandingkan 2022 sebesar 3% atau menjadi 100%.

Walaupun pengelolaan pelayanan kesehatan seluruh balita sudah sesuai target yang dinginkan sebesar 100 namun masih ditemukan kematian Balita ditahun 2023 karena diare hal ini dikarenakan keterlambatan keluarga untuk mengenali tanda bahaya ketika anaknya sakit sehingga keterlambatan membawa anaknya kefasilitas Kesehatan untuk mendapatkan penangan yang komprehensif.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan Balita untuk menurunkan kematian Balita antara lain :

1. Pelaksanaan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) untuk pelayanan Balita oleh bidan didesa
2. Kunjungan dokter spesialis anak ke 12 puskesmas untuk deteksi dini dan memberikan pelayanan Kesehatan kepada Balita resiko tinggi.
3. Melaksanakan kelas Balita
4. Melakukan pembinaan kepada bidan koordinator dan bidan desa untuk meningkatkan pengetahuan dan pelayanan Stimulasi Deteksi Dini Tumbuh Kembang (SDDTK)
5. Melaksanakan Pelatihan Guru PAUD dan Kader dalam Pemantauan Pertumbuhan dan erkembangan.
6. Pemberian pelayanan kesehatan balita di posyandu dan PAUD balita untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita.
7. Bimbingan teknis kebidan puskesmas dan bidan di desa untuk meningkatkan pemahaman tentang SPM Pelayanan Balita
8. Kader dilibatkan dalam pemantauan perkembangan dengan menggunakan BUKU KIA sebagai skrining awal perkembangan balita.

5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pelayanan kesehatan sesuai standar pada anak usia pendidikan dasar di dalam dan luar satuan pendidikan dasar di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran.

Seluruh anak usia sekolah Pendidikan dasar di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar meliputi skrining kesehatan dan tindaklanjut hasil skrining kesehatan yang dilakukan pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun diluar sekolah.

Tabel 2. 141
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	66,99%	98,36%	99%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar ditahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 98,36% menjadi 99%. Meningkatnya capaian dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi anak sekolah telah direncanakan dilakukan sejak triwulan pertama sampai triwulan keempat. Setiap triwulan ditetapkan target capaian yang harus dilaksanakan, sehingga pelayanan kesehatan bagi usia pendidikan dasar dapat terlaksana semua secara terjadwal dan terpantau namun ketidakhadiran remaja putri pada saat pelaksanaan pelayanan kesehatan disekolah dapat menjadi faktor pelayanan kesehatan tidak mencapai 100%.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar antara lain :

1. Menghimbau kepada remaja putri yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan di sekolah diharapkan dapat mengunjungi puskesmas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khususnya mendapatkan Tablet Tambah Darah (TTD).
2. Penyedian raport kesehatan sebagai alat untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak
3. Pelayanan kesehatan bagi anak sekolah telah direncanakan dilakukan sejak triwulan pertama sampai triwulan keempat.
4. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan seluruh sekolah dasar untuk pelaksanaan pelayanan bagi anak sekolah.
5. Pemenuhan sarana dan prasarana UKS.
6. Lomba UKS antar sekolah.

6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Setiap warga negara usia 15 tahun sampai 59 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining kesehatan sesuai standar kepada warga negara usia 15-59 tahun di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Skrining Kesehatan Penyakit Tidak Menular terdiri atas wawancara riwayat kesehatan, penimbangan berat badan, pegukuran tinggi badan, pengukuran lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat pada penduduk

yang memiliki faktor risiko dan konseling. Seluruh usia produktif di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar yang meliputi edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular.

Tabel 2. 142
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	15,19	51%	72%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas pelayanan kesehatan paeda usia produktif tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 72% dan hal ini menggambarkan masih jauh dari yang diharapkan karena semestinya seluruh usia produktif di Kabupaten Balangan mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Masih rendahnya pelayanan kesehatan usia produktif dipengaruhi antara lain karena keterbatasan logistik serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM), tempat tinggal warga yang cukup jauh dari lokasi Posbindu PTM menyebabkan warga mengalami kendala untuk datang ke Posbindu PTM yang mengakibatkan tidak semua desa dapat melaksanakan Posbindu PTM tersebut, sebagian besar sasaran skrining kesehatan usia produktif adalah remaja dan anak sekolah, sehingga sulit untuk dilakukan skrining, dikarenakan mereka tidak mau datang ke posbindu atau masih berada di sekolah pada saat posbindu dilaksanakan, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat Posbindu PTM untuk kesehatan, masyarakat beranggapan bahwa Posbindu PTM hanya untuk orang yang mempunyai keluhan sakit atau gangguan pada kesehatannya.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk terus meningkatkan pelayanan pada usia produktif sehingga seluruh usia produktif mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar antara lain :

1. Mengaktifkan Posbindu PTM keliling dengan cara lokasi posbindu yang berpindah-pindah setiap bulan agar warga yang belum pernah datang ke posbindu dapat dijangkau.
2. Dukungan kepala desa dalam hal anggaran dalam rangka memaksimalkan capaian target skrining kesehatan pada usia produktif.
3. Dukungan pembentukkan Posbindu PTM di Desa yang belum memiliki Posbindu PTM.
4. Melaksanakan kegiatan skrining kesehatan ke sekolah dan SKPD di wilayah Kabupaten Balangan.
5. Petugas kesehatan melakukan upaya promotif dan preventif agar masyarakat mau diperiksa.

6. Peran aktif dari kader kesehatan untuk mengajak masyarakat agar tidak takut Melakukan sosialisasi, konseling, informasi dan edukasi kepada masyarakat serta lintas sektor terkait tentang pentingnya Posbindu PTM dan pentingnya deteksi dini faktor risiko penyakit tidak menular.

7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Usia Lanjut

Setiap Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar. Pemerintah Daerah Tingkat kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan dalam bentuk edukasi dan skrining usia lanjut sesuai standar pada Warga Negara usia 60 tahun ke atas di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Seluruh usia lanjut di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan skrining faktor risiko penyakit menular dan penyakit tidak menular yang dilakukan minimal 1 kali dalam setahun untuk penyakit menular dan tidak menular yang dilakukan di fasilitas kesehatan dan/atau UKBM dan/atau kunjungan rumah yang meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gangguan mental, emeriksaan gangguan kognitif, pemeriksaan tingkat kemandirian usia lanjut dan anamnesa perilaku berisiko. Selain skrining faktor risiko usia lanjut juga berhak mendapatkan tindaklanjut hasil skrining kesehatan meliputi rujukan jika diperlukan dan mendapatkan penyuluhan kesehatan.

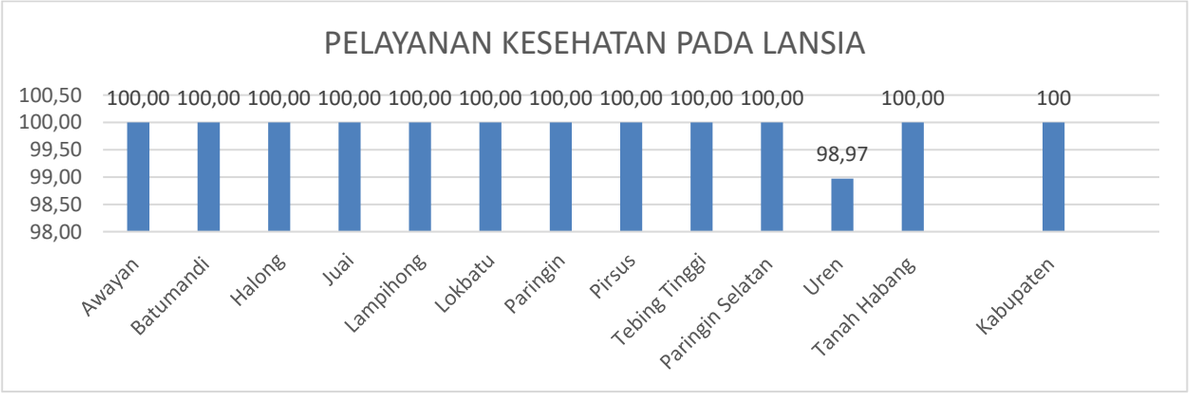
Tabel 2. 143
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	94,34%	98,73%	99,98%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut di tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 99,98% hal ini menggambarkan hampir seluruh usia lanjut yang berusia sama dengan atau lebih dari 60 tahun di Kabupaten Balangan sudah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Berdasarkan grafik dibawah hanya Puskesmas Uren yang tidak memberikan pelayanan kesehatan pada usia lanjut sebesar 100% hal ini karena kondisi geografis karena adanya beberapa wilayah terpencil yang sulit untuk diakses oleh tenaga Kesehatan untuk memberikan pelayanan daerah terpencil.

Gambar 2.40
Grafik Pelayanan Kesehatan Pada Lansia



Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan sehingga hampir seluruh usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar antara lain :

a. Pembentukan pembinaan kelompok usia lanjut di kabupaten yang berkoordinasi dengan TP PKK kabupaten.
b. Pertemuan pengelola usia lanjut puskesmas per triwulan di Dinas Kesehatan guna meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam memberikan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar, pencatatan dan pelaporan yang benar dalam pencapaian target SPM.
c. Penyediaan obat, BHP untuk pelayanan usia lanjut, cetak buku usia lanjut sebagai salah satu catatan perkembangan kesehatan usia lanjut dan penyediaan instrumen P3G untuk skrining Usia lanjut
d. Melaksanakan bimbingan tekhnis pada kepala puskesmas dan pengelola usia lanjut untuk memberikan pelayanan sesuai standar.
e. Mengaktifkan Posyandu usia lanjut didesa.

8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi

Capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi usia 15 tahun keatas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun.

Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi pengukuran tekanan darah dan edukasi. Pelayanan kesehatan hipertensi sesuai standar meliputi : monitoring takanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik dan pengelolaan farmakologis.

Pelayanan kesehatan berstandar ini dilakukan untuk mempertahankan tekanan darah pada < 140/90 mmHg untuk usia di bawah 60 tahun dan < 150/90 mmHg untuk penderita 60 tahun ke atas dan untuk mencegah terjadinya komplikasi jantung, stroke, diabetes melitus dan penyakit ginjal kronis. Jika tidak dapat dipertahankan atau mengalami komplikasi makan penderita perlu dirujuk ke FKTL yang berkompeten.

Tabel 2. 144
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Hipertensi	26,3%	79,49%	92,54%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk pengelolaan pelayanan kesehatan pada hipertensi di tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 92,54%, walaupun terjadi peningkatan namun belum semua penderita hipertensi di kabupaten Balangan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Faktor signifikannya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan pada hipertensi dipengaruhi oleh petugas kesehatan bersama dengan kader posbindu di desa rutin melaksanakan kegiatan Posbindu 1 kali dalam 1 bulan untuk deteksi dini penyakit hipertensi dan pelayanan kontrol tekanan darah bagi penderita hipertensi, adanya partisipasi dari kepala desa, aparat desa dan anggota TP PKK. dan adanya dukungan sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa yang menyelenggarakan Posbindu PTM.

Walaupun terjadi peningkatan yang signifikan namun masih ada penduduk Balangan yang belum menerima pelayanan tersebut antara lain dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Posbindu PTM, kecendringan menurunnya keinginan masyarakat untuk melakukan kontrol tekanan darah karena tidak adanya pengobatan yang diberikan secara langsung di Posbindu, masih kurangnya kader terlatih dan terampil untuk membantu pelaksanaan Posbindu PTM di Desa, pusat pelayanan Posbindu PTM terpusat di satu tempat sehingga masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi pelaksanaan posbindu atau di desa terpencil sulit untuk dijangkau dan penderita hipertensi usia lanjut tidak dapat melakukan kontrol tekanan darah ke Posbindu secara rutin jika tidak ada anggota keluarga yang mendampingi.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan Kesehatan pada hipertensi antara lain :

1. Melakukan sosialisasi, konseling, informasi dan edukasi kepada masyarakat serta lintas sektor terkait tentang pentingnya Posbindu PTM dan risiko pada penderita hipertensi.
2. Berkoordinasi dengan kepala desa untuk dukungan dalam pembentukkan Posbindu PTM serta penyediaan sarana dan prasarana yang digunakan.

3. Memberikan pembinaan keterampilan pada kader Posbindu PTM di Desa.

9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Setiap penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh penderita Diabetes Melitus (DM) usia 15 tahun ke atas sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan, edukasi perubahan gaya hidup dan/atau nutrisi, melakukan rujukan jika diperlukan.

Setiap penderita DM di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebagai upaya pencegahan sekunder dengan target 100% dengan perhitungan jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama.

Tabel 2. 145
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	29,33%	87,55%	92,93%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus di tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 92,93%, walaupun terjadi peningkatan namun belum semua penderita diabetes melitus di kabupaten Balangan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Faktor signifikannya peningkatan pengelolaan pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus karena petugas kesehatan bersama dengan kader posbindu di desa rutin melaksanakan kegiatan Posbindu 1 kali dalam 1 bulan untuk melakukan deteksi dini penyakit diabetes melitus dan pelayanan kontrol gula darah bagi penderita diabetes melitus, adanya partisipasi dari kepala desa, aparat desa dan anggota TP PKK dan danya dukungan ligistik pemeriksaan gula darah yang disediakan oleh desa yang menyelenggarakan Posbindu PTM.

Walaupun terjadi peningkatan yang signifikan namun masih ada penduduk Balangan yang belum menerima pelayanan tersebut antara lain dipengaruhi oleh faktor kurangnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi Posbindu PTM, kecendrungan menurunnya keinginan masyarakat untuk melakukan kontrol diabetes melitus karena tidak adanya

pengobatan yang diberikan secara langsung di Posbindu, masih kurangnya kader terlatih dan terampil untuk membantu pelaksanaan Posbindu PTM di Desa, pusat pelayanan Posbindu PTM terpusat di satu tempat sehingga masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari lokasi pelaksanaan posbindu atau di desa terpencil sulit untuk dijangkau dan penderita diabetes melitus usia lanjut tidak dapat melakukan kontrol tekanan darah ke Posbindu secara rutin jika tidak ada anggota keluarga yang mendampingi dan deteksi dini penyakit diabetes melitus belum dilaksanakan di seluruh sekolah tingkat SLTP maupun SLTA.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada penderita diabetes melitus antara lain :

1. Melakukan sosialisasi, konseling, informasi dan edukasi kepada masyarakat serta lintas sektor terkait tentang pentingnya Posbindu PTM dan risiko pada penderita diabetes melitus.
2. Berkoordinasi dengan kepala desa untuk dukungan dalam pembentukkan Posbindu PTM serta penyediaan sarana dan prasarana serta dukungan logistik pemeriksaan gula darah yang digunakan.
3. Memberikan pembinaan keterampilan pada kader Posbindu PTM di Desa untuk melakukan pemeriksaan gula darah secara mandiri kepada penderita diabetes melitus.
4. Pelaksanaan Posbindu PTM dilakukan secara bergantian di wilayah tertentu agar semua masyarakat Desa dapat menjangkau pelayanan Posbindu PTM.
5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan pada masyarakat untuk pemeriksaan gula darah di tempat umum, sekolah dan unit kerja.
6. Penyediaan logistik pemeriksaan gula darah sesuai kebutuhan.

10. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Kesehatan Jiwa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesehatan secara umum serta merupakan dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Kesehatan Jiwa membuat perkembangan fisik, intelektual dan emosional seseorang berkembang optimal selaras dengan perkembangan orang lain (UU No 36 Tahun 2009).

Gangguan jiwa dapat terjadi pada siapa saja, baik yang berusia muda, dewasa maupun lansia. Gangguan jiwa dapat juga terjadi pada orang yang tinggal di perkotaan maupun di pedesaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia terbanyak yang mengalami gangguan jiwa adalah usia dewasa. Usia dewasa merupakan usia produktif dimana mereka harus mampu secara mandiri menghidupi dirinya sendiri. Usia ini juga usia dimana seseorang telah bekeluarga, sehingga masalah yang dihadapi juga semakin banyak, bukan hanya masalahnya sendiri namun harus memikirkan masalah anggota keluarganya.

Semua orang berisiko terjadinya gangguan jiwa. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama dari semua pihak untuk mengurangi atau mencegah angka kekambuhan atau terjadinya

gangguan jiwa. Setiap orang dengan gangguan jiwa berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan *skizofrenia* meliputi pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi.

Tabel 2. 146
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan gangguan Jiwa Berat	188,77%	132,67%	133%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas untuk pengelolaan pelayanan kesehatan ODGJ pada tahun 2021 mencapai 188% dikarenakan tidak hanya ODGJ namun semua orang dengan gangguan jiwa menjadi target sasaran pelayanan kesehatan, sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 132% karena sasaran kesehatan jiwa lebih di fokuskan kepada ODGJ berat yang dilayani sesuai standar dan pada tahun 2023 naik lagi menjadi 133% dikarenakan ditemukannya kasus baru karena aktifnya petugas puskesmas melakukan pendataan/kunjungan rumah dan adanya program *homecare*.

Jika diabsolutkan ODGJ di Kabupaten Balangan tahun 2022 mencapai 376 orang, meningkat menjadi 378 orang ditahun 2023 dan ODGJ yang dirujuk ke Rumah Sakit Sambang Lihum sebanyak 5 orang, sedangkan yang dapat pengobatan rutin sebanyak 248 orang dengan pendampingan kader PMO jiwa berjumlah 10 orang kader. Adapun pengobatan pada pasien jiwa saat ini tidak ada terafi lain selain dalam bentuk farmakologi yang diberikan setiap bulan karena penderita harus minum obatnya setiap hari.

Meningkatnya kasus gangguan jiwa di Kabupaten Balangan di sebabkan oleh beberapa faktor yang saling berhubungan antara lain faktor biologis, faktor psikologis dan faktor lingkungan, disamping itu beberapa orang dengan kondisi tertentu memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan gangguan jiwa antara lain genetik dan riwayat kesehatan jiwa keluarga, pengalaman hidup yg tidak baik seperti stres, cedera otak dan lainnya.

Berbagai permasalahan untuk pelayanan kesehatan jiwa orang dengan gangguan jiwa berat antara lain kurangnya dukungan keluarga dalam kesembuhan pasien ODGJ, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung untuk rujukan ODGJ, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penderita ODGJ, tidak ada kader terlatih dan terampil untuk membantu pelaksanaan Pelayanan ODGJ dan tidak ada ruang rawat inap untuk penderita ODGJ di RSUD Balangan

Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan ODGJ antara :

1. Melakukan sosialisasi, konseling, informasi dan edukasi kepada masyarakat serta lintas sektor terkait tentang pentingnya pelayanan pada penderita ODGJ.
2. Berkoordinasi dengan kepala desa untuk dukungan dalam pelayanan ODGJ.
3. Pembentukan kader jiwa di desa untuk melakukan pemantauan dan pengawasan pada penderita ODGJ.
4. Meningkatkan kerjasama lintas program dalam pelayanan kesehatan ODGJ
5. Pengadaan mobil operasional ODGJ untuk rujukan.
6. Membuat perjanjian kerjasama dengan RS Sambang Lihum dalam Upaya pelayanan kesehatan ODGJ.

11. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Pengendalian TBC merupakan salah satu program prioritas Nasional untuk program pengendalian penyakit karena berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi serta sering mengakibatkan kematian. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberikan pelayanan sesuai standar bagi orang dengan terduga TBC dinilai dari persentase jumlah orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Orang terduga TBC adalah seseorang yang menunjukkan gejala batuk > 2 minggu disertai dengan gejala lainnya.

Setiap orang dengan terduga TBC di Kabupaten Balangan berhak mendapatkan pelayan kesehatan sesuai standar, sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengendalian TBC salah satunya adalah dengan penemuan secara aktif melalui kegiatan deteksi dini/ skrining TBC.

Tabel 2. 147
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis

Indikator	2021	2022	2023
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	17,68%	36,72%	57%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas pelayanan kesehatan orang terduga TBC di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu menjadi 57%. Walaupun terjadi peningkatan namun masih jauh dari yang diharapkan sehingga memerlukan kerja keras agar seluruh masyarakat Balangan menerima pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis sesuai standar yang ditetapkan.

Berbagai persoalan maupun kendala yang dihadapi dalam upaya memberikan pelayanan sesuai standar dikarenakan yang salah satunya adalah belum optimalnya

pelaksanaan investigasi kontak, pelacakan kasus, skrining TB dan lainnya. Persoalan lain yang perlu menjadi perhatian penting dalam keberlangsungan pelayanan tuberkulosis yaitu adanya sistem rujukan sampel scrining orang terduga tuberculosis dari puskesmas ke rumah sakit yang belum optimal, sampel diperiksa hanya dalam jumlah terbatas (waktu pemeriksaan sampel hanya satu hari dalam seminggu yaitu pada hari sabtu) melalui pemeriksaan Test Cepat Molekuler (TCM) TB dan juga belum tersedia Alat TCM di Puskesmas sebagai gold standar dalam penegakan diagnosa TB.

Berbagai upaya dan strategi tetap dilakukan Dinas Kesehatan,PPKB beserta jejaring untuk memenuhi standar pelayanan pada penderita Tuberkulosis dengan melakukan program percepatan eliminasi Tuberkulosis yang salah satunya penyediaan dukungan peralatan penunjang penegakan diagnosa tuberkulosis yaitu pengadaan alat TCM Tuberkulosis yang ditempatkan di Puskesmas Awayan yaitu sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama yang melayani pemeriksaan sampel terduga tb sebagai gold standar penegakan diagnosa tuberkulosis. Puskesmas Awayan merupakan Puskesmas yang menjadi rujukan beberapa Puskesmas untuk pemeriksaan sampel TCM tersebut. Dalam meminimalisir persoalan dan optimalisasi upaya dimaksud Dinas Kesehatan dan jejaringnya dapat melakukan strategi lain dengan memanfaatkan modalitas kampanye melalui saluran komunikasi (media elektronik) dan media-media lainnya yang dapat memberikan informasi maupun edukasi terhadap masyarakat. Kegiatan- kegiatan lainnya dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit tuberkulosis antara lain :

1. Penemuan aktif TB yang salah satunya adalah melakukan skrining pada pondok-pondok pesantren
2. Peningkatan kapasitas petugas kesehatan yang menangani tubercolusis dan kader
3. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pengendalian penyakit Tuberkolosis
4. Pemberian terapi atau pengobatan TB.
5. Pengawasan dan Pematauan pengobatan penderita TB
6. Pengendalian faktor risiko salah satunya dengan pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi penderita tuberkolosis dan petugas TB Puskesmas yang bertujuan untuk meningkatkan status gizi dan imunitas.

12. Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) adalah adanya virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan manusia namun belum menimbulkan gejala, sedangkan AIDS (*Acquired Immunodeficiency Syndrome)* merupakan sekumpulan gejala yang terjadi ketika HIV

menyebabkan kerusakan serius pada sistem imun. Artinya, orang yang terinfeksi HIV bisa saja hidup sehat, namun orang yang sudah pada kondisi AIDS pasti memiliki Virus HIV.

Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada setiap orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV) di wilayah kerjanya dalam kurun waktu satu tahun. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi edukasi perilaku berisiko dan skrining orang dengan risiko terinfeksi virus HIV.

Tabel 2. 148
Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

Indikator	2021	2022	2023
Pelayanan Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar	88%	92,43%	99,42%

Sumber : Profil Dinas Kesehatan tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas pelayanan orang dengan risiko terinfeksi hHIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun 2023 terjadi peniingkatan menjadi 99,43% dibandingkan tahun 2022. Data tersebut menunjukkan hampir semua sasaran berisiko di Kabupaten Balangan sudah mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Tingkat perkembangan penyakit menular seksual terutama HIV/AIDS di Kabupaten Balangan terus menunjukkan peningkatan, meskipun berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan terus dilakukan. Semakin tingginya mobilitas penduduk antar wilayah, menyebarnya sentra-sentra pembangunan ekonomi, meningkatnya perilaku seksual yang tidak aman dan menyimpang, meningkatnya penyalahgunaan NAPZA melalui suntikan, secara simultan telah memperbesar tingkat risiko penyebaran penyakit ini. Berbagai upaya pengendalian terus ditingkatkan untuk meminimalisir terjadinya penularan HIV terutama dalam hal memperkuat upaya promosi, upaya perluasan konseling, serta upaya perawatan, dukungan dan pengobatan dengan di puskesmas dan rumah sakit sebagai bagian dari standar pelayanan.

Walaupun pelayanan orang dengan risiko terinfeksi HIV sudah optimal dilakukan namun masih ditemukan berbagai permasalahan antara lain belum tersedianya ruang konseling HIV di puskesmas, salah satu kelompok berisiko HIV yaitu pada kelompok populasi kunci belum terpetakan dengan lengkap, faktor keterjangkauan layanan ARV dimana RS Balangan sebagai akses layanan rujukan belum tersedia layanan untuk ARV, faktor sosial masyarkat yang mana masih adanya stigma di masyarakat yang beranggapan bahwa pengidap HIV adalah aib, yang sehingga menjadikan diskriminasi terhadap orang

yang mengidap HIV/AIDS dan hal ini juga berdampak pada kemauan orang untuk melakukan test HIV rendah khususnya terhadap kelompok berisiko populasi kunci. dan tingkat pemahaman kelompok resiko maupun masyarakat umum terhadap IMS atau pendidikan kesehatan reproduksi yang masih minim. Oleh karena itu dibutuhakan variasi kegiatan kampanye dan penyuluhan yang lebih intensif agar mampu menyentuh kelompok masyarakat yang lebih luas dan dapat memahaminya.

2. SPM Bidang Sosial

Tabel 2. 149
Capaian Indikator SPM Sosial Kabupaten Balangan Tahun 2019 – 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pelaksanaan program/ kegiatan bidang sosial						
	a. Pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial						
	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.		53.01%	20.66%	54.91%	68,72%	59,40%
	b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial						
	Persentase (%) PPKS skala kab/kota yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya		3.60%	0.08%	0.05%	0,0003	0,10%
2	Penanggulangan korban bencana						
	a. Bantuan sosial bagi korban bencana						
	Presentase (%) korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggal darurat		13.60%	149.80%	267.36%	100%	100%
	b. Evaluasi korban bencana						
	Presentase (%) korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		-	-	-	-	-
3	Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial		-	-	-	-	-
	- Penyelenggaraan jaminan sosial skala Kabupaten/Kota						
	Presentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : .Dinas Sosial Data Diolah, 2023

Standar Pelayanan Minimal atau SPM sebagai suatu kewajiban yang tidak boleh tidak dilaksanakan oleh OPD pengampu SPM. Capaian keseluruhan SPM bersumber dari SPM

Kemendagri sudah mencapai 81,27% dengan capaian masing-masing indikator SPM 100% untuk pemberian bantuan korban bencana alam selama masa tanggap darurat dan penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang memperoleh jaminan sosial. Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar tercapai 59,40% dikarenakan tidak semua PPKS atau cakupan PPKS yang terbatas untuk dibantu sehingga belum mencapai 100%. Beberapa catatan ketika pelayanan SPM diantaranya, disabilitas terlantar yang tidak memiliki keluarga maupun tempat tinggal tidak ada di wilayah Kabupaten Balangan. Disabilitas terkendala biaya untuk memperolah pelatihan keterampilan maupun membeli alat bantu. Anak terlantar dengan kategori tidak memiliki tempat tinggal maupun tanpa orang tua atau pengasuh tidak ada, melainkan hanya keterlantaran disebabkan oleh keterbatasan biaya mengenyam pendidikan. Lansia yang terlantar dengan kategori tidak memiliki tempat tinggal di Kabupaten Balangan tidak ditemukan, melainkan lansia dengan keadaan kurang mampu atau kurang biaya untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ketika pelaksanaan pemulangan orang terlantar harus mempunyai surat keterangan dari pihak kepolisian sedangkan orang terlantar tersebut tidak memiliki data diri berupa KTP sehingga dalam kondisi tersebut tidak dapat di proses.

Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh OPD lintas sektor yang berkaitan dengan penanganan fakir miskin diantaranya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang telah melaksanakan program Kartu Balangan Pintar khusus bagi siswa/siswi tidak mampu, pemenuhan layanan Kesehatan bagi lansia melalui program homecare. Perlunya optimalisasi seperti menjalin MoU dengan instansi vertical dalam rangka memudahkan kebijakan pelayanan terhadap fakir miskin pada kondisi tertentu dan untuk menghindari hambatan pelayanan dikemudian hari.

3. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bagi Pemerintah Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari

   SPM Bidang Cipta Karya Air Minum mencakup Pelayanan Akses Air Minum Yang Aman, yaitu terkait dengan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan, dengan indikator pencapaian meliputi :

   a) Nilai SPM cakupan akses terhadap air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi adalah peningkatan jumlah unit pelayanan melalui Sambungan Rumah.
   b) Target pencapaian SPM air minum yang aman melalui SPAM dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

2. Penyediaan air limbah domestik

   Standar Pelayanan Minimal untuk urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi masyarakat dengan indikator pencapaian meliputi :

   a) Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai.
   b) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.

Jenis pelayanan dasar air limbah domestik yang diberikan kepada masyarakat dapat diberikan melalui dua cara yang terdiri dari Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), untuk pengelolaan air limbah di Kabupaten Balangan dengan sistem Pengelolaan air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S), untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) belum dibangunan dikarenakan kondisi Topografi dan kondisi rumah penduduk yang belum memungkinkan untuk dibangun SPALD-T. Adapun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terdiri dari komponen sebagai berikut:

1. Sub-sistem pengolahan setempat Sub-sistem pengolahan setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengolahan setempat berupa pembangunan unit pengolahan setempat skala individual dan komunal.
2. Sub-sistem pengangkutan Sub-sistem pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik untuk sub-sistem pengangkutan berupa penyediaan sarana pengangkutan untuk menyediakan jasa layanan penyedotan lumpur tinja.

3. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja Sub-sistem pengolahan lumpur tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah dometik untuk sub-sistem pengolahan lumpur tinja berupa pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja.

Tabel 2. 150
SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Pembiayaan (Rp)
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	44.222	37.170	Kepala Rumah Tangga	12.068.548.000
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	44.222	43.714	Kepala Rumah Tangga	11.236.311.000

Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari :

1. Jumlah masyarakat yang terlayani air minum jaringan perpipaan pada akhir tahun pencapaian SPM sebanyak 29.920 Sambungan Rumah Tangga
   Proyeksi Total masyarakat kabupaten pada tahun pencapaian SPM adalah 43.507 Rumah Tangga, maka Capaian Pelayanan air minum jaringan perpipaan adalah 68,77%.
2. Jumlah masyarakat yang terlayani air minum bukan jaringan perpipaan pada akhir tahun pencapaian SPM sebanyak 8.260 Sambungan Rumah Tangga
   Proyeksi Total masyarakat kabupaten pada tahun pencapaian SPM adalah 43.507 Rumah Tangga, maka Capaian Pelayanan air minum bukan jaringan perpipaan adalah 18,99%.
   Jadi untuk jumlah Cakupan SPM Air Minum adalah Jumlah Rumah Tangga Akses
   = Sambungan Rumah air minum jaringan perpipaan + Sambungan Rumah air minum bukan jaringan perpipaan
   = 29.920 SR + 8.260 SR = 38.180 SR (87,76%).
   Maka jumlah Capaian SPM Air Minum (jaringan perpiaan + bukan jaringan perpipaan) adalah 87,76% dari target 43.507 (83,27%).

Penyediaan air limbah domestik :

1. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk, Lumpur Tinjanya telah diolah di PLS (Pengolahan Limbah Setempat) dan memiliki sambungan Rumah dan Air Limbahnya diolah di SPALDS (Sistem Pengolahan Limbah Daerah Setempat) adalah 43.714 (98,85%) dari target 44.222 (92,75%) Rumah Tangga;

2. Jumlah Rumah Tangga yang mengakses sanitasi Aman (Tangki Septik sudah disedot) sebanyak 262 Rumah Tangga;
3. Proyeksi Total Rumah Tangga kabupaten pada tahun pencapaian SPM adalah 44.222 Rumah Tangga (Data Inventarisasi/Catpilduk).

Maka jumlah Capaian SPM Sanitasi/ Air Limbah adalah 98,85% dari target 44.222 (92,75%).

4. SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Indikator kinerja Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang Perumahan Rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang perumahan rakyat yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dalam Peraturan Menteri ini Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu :

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana.
   - Jenis Pelayanan Dasar Penyediaan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban Bencana yang di laksanakan di daerah Desa Mihu, Juai, Lalayau (Kecamatan Juai) dan Murung Abuin (Kecamatan Paringin Selatan). Daerah ini merupakan daerah yang terendah bila musim hujan datang (banjir). Hal ini menyebabkan rapuhnya rumah masyarakat yang semuanya terbuat dari kayu.
   - Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menargetkan pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana sebanyak 8 unit. Adapun realisasi capaian kinerja Dinas tersebut pada tahun 2023 sebanyak 8 unit.
2. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah.

   Pada tahun 2023 Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman menargetkan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah sebanyak 1 Lahan. Adapun realisasi capaian kinerja Dinas tersebut pada tahun 2023 sebanyak 1 Lahan.

Tabel 2. 151
SPM Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Pembiayaan (Rp)
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh	8	8	Rumah	Rp. 205.000.000

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Pembiayaan (Rp)
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan	1	1	Lahan	Rp. 1.247.400.000,00

Permasalahan

1. Dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengalami permasalahan, penerapan indikator SPM yang berdasarkan Permen PUPR tahun 2018 terutama point (1) ini cukup berat, hal ini disebabkan untuk wilayah Kalimantan jarang sekali terjadi bencana alam seperti halnya di pulau-pulau lain di Indonesia. Apalagi jenis pelayanan dasar untuk tingkat kabupaten sama dengan tingkat provinsi.Hal ini berberda dengan standar Pelayanan Minimal sebelumnya yang menekankan pada cakupan ketersediaan rumah layak huni, cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) (Permenpera No. 22 tahun 2008).
2. Sedangkan Jenis pelayanan yang kedua juga cukup berat karena harus melakukan negosiasi Panjang yang dilaksanakan di lapangan dengan pemilih lahan yang akan di beli. Di Kabupaten Balangan sangat jarang adanya kegiatan pemerintah yang menyebabkan terjadinya relokasi.

5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Tabel 2. 152
Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Indikator SPM	2022	2023
Kemampuan Literasi SD	53,44	57,09
Kemampuan Literasi SMP	51,16	65,07
Kemampuan Numerasi SD	25,69	45,70
Kemampuan Numerasi SMP	41,83	58,03
Angka Partisipasi Sekolah (5-6)	88,48	91,20
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-15	89,37	99,34
Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 tahun	90,85	93,25
Proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B	47,26	54,30
Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4	73,24	68,77
Iklim inklusivitas SD	51,50	55,35
Iklim inklusivitas SMP	51,41	56,51

Indikator SPM	2022	2023
Iklim keamanan SD	64,08	72,68
Iklim keamanan SMP	68,95	70,90
Iklim kebinekaan SD	58,66	71,49
Ikllim kebinekaan SMP	58,85	72,43

Sumber : Lampiran Surat Mendikbudristek tahun 2023 dan 2024

1. Kemampuan Literasi

Kemampuan literasi (*literacy skills*) menjadi kemampuan yang maha penting yang harus dikuasai oleh peserta didik secara aplikatif di era disrupsi sebagai keterampilan utama untuk menghadapi puncak gelombang tarnsformasi digital di abad 21. Melalui pembelajaran multiliterasi yang dipadukan dengan kompetensi yang harus dimiliki pada abad-21 yaitu kompetensi kreativitas, kompetensi komunikasi, kompetensi berpikir kritis, dan kompetensi kolaborasi serta lima nilai karakter dalam penguatan pendidikan karakter menjadi bekal peserta didik dalam menghadapi abad-21.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa literasi merupakan kemampuan yang mengarah pada kegiatan mengakses informasi melalui kegiatan membaca, menulis, menelaah, megobservasi, dan memaknai informasi secara kritis, idealis, dialektis, dan otokratis dimana teknoligi dapat dijadikan sebagai salah satu untuk meningkatkan efektifitas kegiatan berliterasi. Untuk itu, intervensi pendidikan, baik formal maupun non formal harus dijadikan sebagai prioritas untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa sejak sekolah dasar karena hal ini akan dapat menunjang kualitas pendidika itu sendiri dan kemajuan suatu bangsa.

Manfaat kemampuan literasi dasar bagi siswa sekolah dasar antara lain untuk meningkatkan pengetahuan kosa kata siswa, agar otak mampu bekerja secara optimal, menambah wawasn siswa, mempertajam diri dalam menangkap satu informasi dari sebuah bacaan, mengembangkan kemampuan verbal; (6) melatih kemampuan berfikir dan menganalisa siswa; serta (7) melatih fokus dan konsentrasi siswa.

Pada tahun 2023 untuk nilai rata-rata literasi SD realisasi sebesar 57,09 dari target 56,76 sedangkan untuk SMP realisasi 65,07 dari target 65,64. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar murid telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak murid menjadi mahir.

Belum optimalnya kemampuan literasi karena faktor kelangkaan bahan bacaan di sekolah-sekolah khususnya di daerah-daerah terpencil, belum adanya ruang baca

seperti perpustakaan dan pojok baca yang diperlukan untuk pelaksanaan gerakan literasi sekolah dan kurangnya minat baca peserta didik, serta guru belum terlalu fokus kepada bagaimana tingkat kemampuan literasi siswa dalam proses pembelajaran.

Untuk meningkatkan kemampuan literasi SD dan SMP di Kabupaten Balangan maka perlu intensitas keterlibatan orang tua, intensitas sosialisasi, dan intensitas penggunaan media massa terhadap literasi baca tulis yang tinggi dan tersedianya buku bacaan di perpustakaan sekolah. Selain hal tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024 yang diinisiasi dari tahun 2023 bekerjasama dengan *english education* yaitu Briton dengan meningkatkan kompetensi guru untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi guru bahasa inggris SD (*Cambrige dan English For Teachers*), pengadaan buku penunjang MaPEK Bahasa Inggris SD dan SMP, pelaksanaan ujian internasional dan sertifikasi dari C*ambrige* untuk siswa kelas 6 dan 9, pelatihan Trainer of Trainers (ToT) guru bahasa inggiris di *Cambrige*

2. Kemampuan Numerasi SD dan SMP

Numerasi adalah kemampuan memahami dan menggunakan berbagai macam angka dan simbol-simbol yang terkait dengan matematika dasar dan menganalisis informasi yang ditampilan dalam berbagai bentuk (grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya) untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai macam konteks kehidupan sehari-hari.

Numerasi adalah istilah yang tidak sama dengan kompetensi matematika. Numerasi adalah kemampuan yang berlandaskan pada pegetahuan dan keterampilan yang sama dengan kompetensi matematika, namun perbedaannya terletak pada pemberdayaan pengetahuan dan keterampilan tersebut. Pengetahuan matematika saja tidak membuat seseorang memiliki kemampuan numerasi. Numerasi adalah mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Numerasi adalah keterampilan yang muncul pada saat permasalahannya sering tidak terstruktur, memiliki banyak cara penyelesaian, atau bahkan tidak ada penyelesaian yang tuntas, serta berhubungan dengan faktor nonmatematis.

Masalah numerasi siswa merupakan salah satu masalah pada kemampuan siswa yang berkaitan dengan kemampuan berhitung dalam pelajaran matematika. Masalah ini perlu diatasi agar siswa memiliki kemampuan berhitung dengan baik. Dalam konteks kemampuan numersai di Kabupaten Balangan tahun 2023 pada jenjang SD berada di angka 45,70. Ini berarti bahwa kemampuan numerasi siswa SD belum

optimal. Sedangkan pada jenjang SMP berada pada angka 58,03, Ini berarti bahwa kemampuan numerasi siswa SMP juga masih belum optimal.

Untuk meningkatkan kemampuan numerasi antara lain menggunakan metode pembelajaran matematika yang menekankan pemahaman konsep melalui konteks dunia nyata. Konsep pembelajaran realistis dapat membantu siswa mengaitkan konsep matematika dengan situasi yang dapat mereka pahami, sehingga membantu meningkatkan kemampuan numerasi mereka secara signifikan. Selain metode di atas, penggunaan permainan sebagai media pembelajaran juga efektif untuk mengembangkan kemampuan numerasi siswa, karena melibatkan cara berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah. Oleh karena itu, dirasakan perlu untuk melatih para guru di Kabupaten Balangan untuk memahami beberapat konsep metode pembelajaran tersebut di atas agar kemampuan numerasi siswa terus meningkat. Terkait hal tersebut maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 bekerjasama dengan *english education* yaitu Briton untuk meningkatkan kompetensi guru yaitu pelatihan dan sertifikasi guru matematika di Australia.

3. Angka Partisipasi Sekolah Anak Usia 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah.

Berdasarkan tabel diatas APS anak usia 5-6 tahun terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2023 menjadi 91,20%. Jumlah siswa usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berjumlah 4.357 siswa sedangkan jumlah penduduk usia 5-6 tahun yang ada di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah 4.625 siswa. Walaupun terjadi peningkatan APS usia 5-6 tahun namun belum optimal karena masih ada sebesar 8,8% yang belum berpartisipasi yang disebabkan belum seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Balangan memiliki PAUD, kurangnya guru dan keterbatasan bantuan peralatan belajara PAUD hanya 200 orang saja, serta keterbatasan kemampuan di bidang IT (IT Illeterated).

Untuk meningkatkan APS usia 5-6 tahun berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain berupa pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi ruang kelas dimana pada tahun 2023 sebanyak 54 gedung yang dibangun serta dilakukan rehabilitasi yang meliputi 43 gedung bangunan dari APBD Murni 2023, 6 gedung bangunan dari DAK serta 5 gedung bangunan dari APBD perubahan

tahun 2023 dan adanya bantuan peralatan belajar PAUD (tas, buku gambar, pensil warna).

Upaya kedepan untuk meningkatkan APS usia 5-6 tahun antara lain memaksimalkan peran pengawas satuan pendidikan PAUD dan penilik pelaksanaan pendidkan jenjang PAUD, menginisiasi penerbitan aturan daerah tentang penyaluran dan pemanfaatan BOP Daerah agar dapat meningkatkan kinerja satuan pendidikan penerima BOP Daerah dalam memberikan layanan pendidikan dan meningkatkan kompetensi para guru dan tenaga kependidikan PAUD dan melalui bimbingan teknis, FGD maupun pendidikan dan pelatihan.

4. Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Dasar (7-15)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) pendidikan dasar adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia 7-15 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang ada di Kabupaten Balangan yang dinyatakan dalam persentase.

Berdasarkan tabel diatas APS pendidikan dasar terjadi peningkatan yang signifikan ditahun 2023 yaitu dari 89,37% menjadi 99,34%. Pada tahun 2023 jumlah siswa usia 7-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar dan menengah pertama berjumlah 20.822 siswa sedangkan jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang ada di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah 22.445 siswa.

Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan APS pendidikan dasar antara lain peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan dasar berupa pembangunan gedung dan rehabilitasi gedung yang terdiri dari 138 gedung yang meliputi :

a. Pembangunan dan rehap Gedung Pendidikan Sekolah Dasar sebanyak 119 gedung bangunan (82 gedung dari APBD Murni 2023, 14 gedung dari DAK serta 23 gedung dari APBD Perubahan Tahun 2023)
b. Pembangunan dan rehap Gedung Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 19 gedung bangunan (13 gedung dari APBD Murni 2023, 5 gedung dari DAK serta 1 gedung dari APBD Perubahan Tahun 2023)

Selain disebutkan diatas untuk meningkatkan APS pendidikan dasar maka agar tidak putus sekolah karena faktor ekonomi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan program “Balangan Pintar” yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1.580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku

tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah, menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) dan memberikan beasiswa untuk siswa berprestasi.

Walaupun terjadi peningkatan yang signifikan untuk APS pendidikan dasar namun masih ada sebesar 0,66% usia 7015 tahun yang tidak bersekolah hal ini antara lain dikarenakan faktor masih adanya kasus putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena masih adanya pernikahan dini pelajar, faktor ekonomi keluarga, letak geografis Kabupaten Balangan yang masih ada daerah terpencil dan adanya beberapa yang melanjutkan ke pesantren dan sekolar di luar Kabupaten Balangan.

5. Angka Partisipasi Sekolah 7-18 Tahun

Pendidikan dasar adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia 7-18 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang ada di Kabupaten Balangan yang dinyatakan dalam persentase.

Berdasarkan tabel diatas APS usia 7-18 tahun meningkat ditahun 2023 menjadi 93,25%. Hal ini menggambarkan sebesar 6,75% penduduk usia 7-18 tahun tidak sekolah. Masih banyaknya pendudk usia 7-18 tahun yang tidak bersekolah di Kabupaten Balangan maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengatasinya dengan membuka pendidikan kesetaraan.

Partisipasi pendidikan kesetaraan adalah perbandingan antara Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dengan penduduk kelompok usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan ditambah anak putus sekolah yang ada di Kabupaten Balangan yang dinyatakan dalam persentase. Pada tahun 2023, Jumlah penduduk usia 7-18 tahun yang belajar di pendidikan kesetaraan sebanyak 622 orang sedangkan jumlah jumlah warga yang belajar di Pendidikan kesetaraan usia 7-18 tahun ditambah jumlah siswa putus sekolah yang ada di Kabupaten Balangan pada tahun 2023 berjumlah 667 orang sehingga didapat capaian kinerja sebesar 93,25%.

Berbagai faktor yang mempengaruhi belum optimalnya APS 7-18 tahun antara lain masih banyaknya masyarakat yang berfikir akan pendidikan kesetaraan hanya untuk mendapat ijazah paket C setara SMA dengan cara yang mudah sehingga masyarakat memandang sebelah mata pendidikan kesetaraan, kurangnya pemberian honor yang pantas untuk tutor karena minimnya sumber dana masukan program pendidikan kesetaraan sehingga tutor kurang maksimal dalam

memberikan pelayanan dan kurang efektifnya waktu belajar peserta didik karena banyak peserta didik yang memiliki beban pekerjaan.

Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengoptimalkan APS 7-18 tahun antara lain pemberian dan dukungan dana untuk Operasional pendidikan kesetaraan dengan jumlah PKBM sebanyak 12 lembaga dan kelompok belajar yang tersebar hampir pada setiap desa di Kecamatan sebanyak (Paket A, 3 Pokjar, Paket B ,21 Pokjar dan Paket C ada 33 Pokjar) dan kualifikasi pendidikan sarjana oleh tutor pendidikan kesetaraan sehingga menarik untuk mengikuti kelompok belajar.

6. Proporsi Jumlah Satuan PAUD terakreditasi minimal B

Permendikbudristek No 38/2023 ini juga mewajibkan satuan PAUD, sekolah dan madrasah, serta program pendidikan kesetaraan untuk melakukan akreditasi. PAUD yang terakreditasi B adalah PAUD dengan kriteria memiliki Izin penyelenggaraan/izin Operasional Pendidikan Nonformal (PAUD-LKP-PKBM) dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota, UPT perijinan, atau lembaga pemerintah lainnya yang berwenang, akte pendirian dari notaris atau SK pimpinan Instansi/lembaga/institusi yang berwenang di atasnya, telah beroperasi minimal 2 tahun, memiliki Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSPN), menggunakan prasarana yang didukung dengan dokumen yang sah (sertifikat kepemilikan tanah dan bangunan, surat perjanjian sewa, surat perjanjian pemanfaatan prasarana) dan memiliki pemetaan mutu untuk 8 standar. 8 Standar Nasional PAUD meliputi standar tingkat pencapaian perkembangan anak, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.

Berdasarkan tabel diatas untuk proporsi jumlah satuan PAUD terakreditasi minimal B pada tahun 2023 terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 54,30%. Walaupun terjadi peningkatan namun masih jauh dari yang diharapkan karena sekitar 45,70% PAUD di Kabupaten Balangan belum terakreditasi B.

Masih banyaknya PAUD yang belum terakreditasi di Kabupaten Balangan karena faktor kurangnya pemahaman tentang akreditasi dan tujuan dari akreditasi lembaga PAUD, panjangnya proses untuk akreditasi yaitu dimulai dari proses permohonan pengajukan akrditasi dari Dapodik dan visitasi lapangan dan kurangnya kesiapan sekolah untuk akreditasi (terkait administrasi sekolah dan sarana prasarana sekolah).

Adanya persyaratan pengusulan untuk mendapatkan Dana Alokasi Khusus (minimal akreditasi B) sehingga berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan akreditasi PAUD menjadi B antara lain melaksanakan kegiatan sosialisasi akreditisai kepada lemabaga PAUD yang belum terakreditasi , berkoordinasi dengan Tim BAN PDM (Badan Akreditasi Nasional) Tk Provinsi dan Asesor BAN.

7. Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4

Pendidikan Anak Usia Dini merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mengembangkan keterampilan yang merupakan pendidikan dasar serta mengembangkan diri secara utuh sesuai dengan asas pendidikan sedini mungkin dan sepanjang hayat. Aspek yang dikembangkan dalam pendidikan anak usia dini adalah aspek pengembangan pembiasaan meliputi sosial, emosi, kemandirian, moral, dan nilai-nilai agama, serta pengembangan kemampuan dasar yang meliputi pengembangan bahasa, kognitif, dan fisik motorik.

Kreativitas anak usia dini dapat diupayakan melalui permainan yang dirancang oleh pendidik di lembaga PAUD, karena dengan permainan anak dapat mengembangkan serta mengintergrasikan semua potensinya, sehinga mereka lebih kreatif. Peran pendidik dalam kegiatan permainan anak adalah memberikan dorongan, membimbing bermain bagi anak dan membantu anak mengembangkan potensinya, sehingga mereka menjadi anak yang kreatif.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan standar kualifikasi tenaga pendidik anak usia dini melalui Peraturan Menteri Nomor 137 tahun 2014 tentang Standard Nasional PAUD. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai hasil maksimal dalam mencapai tumbuh kembang optimal anak usia dini di Indonesia. Namun pada kenyataan nya dinamika serta polemik terkait realisasi dari peraturan tersebut utamanya menyangkut kualifikasi tenaga pendidik pada beberapa lembaga anak usia dini masih menjadi kendala utama dalam dunia pendidikan anak usia dini.

Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Tenaga pendidik PAUD, meliputi guru PAUD, guru pendamping dan/atau guru pendamping muda. Adapun tenaga kependidikan ialah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelaksanaan teknis proses pendidikan anak usia dini. Terkait hal tersebut,

antara Permendikbud No 137 tahun 2014 dan Permendiknas No. 58 Tahun 2009 mempunyai persamaan, diantaranya:

1. Untuk menjadi guru PAUD harus memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau sarjana kependidikan lain yang relevan (psikologi) dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG). Selain itu, guru PAUD harus memeliki empat kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial dan profesional.
2. Untuk guru pendamping harus memiliki ijazah D-II PGTK dari program studi terakreditasi atau minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), tetapi telah memiliki sertifikat pelatihan/ pendidikan/ kursus PAUD. Di samping itu, mempunyai empat kompetensi, yakni kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional.
3. Untuk guru pendamping muda harus memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) serta memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh PAUD dari lembaga yang berkompeten atau diakui oleh pemerintah. Selain itu diwajibkan memiliki kompetensi dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan berperilaku

Berdasarkan tabel diatas Proporsi guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 terjadi penurunan ditahun 2023 yaitu menjadi 68,77% dengan jumlah tenaga, yang masih proses kejenjang S1/D4 sebanyak 92, dan yang belum S1/DIV sebanyak 243 orang. Adapun jumlah pendidik PAUD di Kabupaten Balangan sebanyak 764 dengan status ASN sebanyak 79 orang, P3K sebanyak 40 orang, status kontrak sebanyak 126 orang, dan yang mendaptakan insentip pendidik non PNS sebanyak 453 orang.

Masih minimnya guru PAUD dengan kualifikasi S1/D4 karena faktor kurangnya motivasi tenaga pendidik untuk melanjutkan pendidikan S1/DIV dan faktor keterbatasan biaya untuk melanjutkan kejenjang S1/DIV sementara status hanya sebagai guru kontrak dan honorer dengan gaji yang minim.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan antara lain motivasi guru PAUD untuk mendapatkan tunjangan profesi pendidik, ikut dalam seleksi P3K dan CPNS bagi guru PAUD dengan status kontrak ataupun honorer sehingga nantinya berdampak terhadap penghasilan, memotivasi juga memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompotensi guru PAUD seperti pelatihan *parenting*, selain itu juga mengupayakan ditahun 2024 untuk menjadi sasaran/peserta penerima beasiswa program 1.000 sarjana.

8. Iklim Inklusivitas

Iklim inklusivitas sekolah menjadi salah satu elemen penting yang diukur pemerintah secara nasional. Ikim inklusivitas mewujudkan akses setara bagi warga masyarakat untuk mendapatkan hak akses pendidikan. Hal ini diatur dalam UUD 1945 Pasal 28H Ayat (2) yang menyebutkan setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Dalam konteks dunia pendidikan di Kabupaten Balangan, rapor pendidkan Tahun 2023 menunjukkan bahwa ada kesenjangan indeks iklim inklusivitas baik berdasar kelompok sosial ekonomi maupun antar wilayah urban dan rural. Dari data yang ada, untuk jenjang SD capaiannya berkategori sedang dengan skor rapor 3,43 pada tahun 2023. Sedangkan untuk jenjang SMP, capaiannya berkategori sedang dengan skor rapor 0,71 pada Tahun 2023.

Iklim kelas inklusif mengacu pada lingkungan di mana semua siswa merasa didukung secara intelektual dan akademis, dan diperluas rasa memiliki di kelas tanpa memandang identitas, preferensi belajar, atau pendidikan.Pendidikan Inklusif memberikan kesempatan yang sama kepada setiap anak untuk mendapat pendidikan tanpa memandang kondisi anak. Hal ini memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus bersekolah di sekolah reguler.

Berdasarkan tabel diatas untuk iklim inklusivitas SD maupun SMP pada tahun 2023 mengalami peningkatan namun tidak signifikan yaitu menjadi 55,35% untuk iklim inklusivitas SD dan 56,51% untuk iklim inklusivitas SMP. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan untuk meningkatkan iklim inklusivitas tersebut antara lain membentuk kelompok kerja implementasi kebijakan pendidikan iInklusif pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Balangan. Pembentukan Tim ini bertujuan memenuhi hak penyandang disabilitas dalam pendidikan sesuai yang diamanatkan pada UU Nomor 8 Tahun 2026, Pemerintah perlu memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan Inklusif dan pendidikan khusus untuk mempelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan sebagai bekal kemandirian serta berpartisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dan pengembangan sosial.

9. Iklim Keamanan

Iklim keamanan sekolah menjadi penentu penting terhadap prestasi sekolah yang akan dilaporkan dalam rapor pendidikan sekolah. Beberapa indikator yang menentukan iklim keamanan sekolah anatara lain indikator kesejahteraan, psikologi murid, indikator kesejahteraan psikologi guru, indikator perundungan, indikator hukuman fisik, indikator kekerasan seksual dan indikator narkoba. Indikator kesejahteraan psikologi murid menunjukkan kesejahteraan psikologis siswa di sekolah. Kesejahteraan psikologis yang baik dapat meningkatkan motivasi belajar siswa dan hasil belajar mereka. Indikator kesejahteraan psikologi guru menunjukkan kesejahteraan psikologis guru di sekolah. Kesejahteraan psikologis guru yang baik dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan interaksi antara guru dan siswa. Indikator perundungan perundungan menunjukkan tingkat perundungan yang terjadi di sekolah. Indikator hukuman fisik menunjukkan tingkat penggunaan hukuman fisik di sekolah. Sedangkan indikator kekerasan seksual menunjukkan tingkat kekerasan seksual yang terjadi di sekolah.

Berdasarkan tabel diatas untuk iklim keamanan SD maupun SMP pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan pada iklim keamanan SD yaitu menjadi 72,68%, sedangkan pada iklim keamanan SMP juga terjadi peningkatan namun tidak signifikan yaitu menjadi 70,90% dengan kategori capaian baik. Hal ini menunjukkan bahwa ini bermakna bahwa satuan pendidikan memiliki lingkungan satuan pendidikan yang aman, terlihat dari kesejahteraan kesejahteraan psikologis yang baik dan rendahnya kasus perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, dan penyalahgunaan narkoba. Satuan pendidikan dapat mempertahankan kualitas warga satuan pendidikan dalam mencegah dan menangani kasus untuk menciptakan iklim keamanan dilingkungan satuan pendidikan.

10. Iklim Kebinekaan

Iklim Kebhinekaan diberi pengertian/makna dengan mengadaptasi konsep multikulturalisme, yaitu adanya kesediaan untuk menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa mempedulikan perbedaan budaya, etnik, jender, bahasa, ataupun agama. Kebihnekaan dibatasi pada ruang lingkup keberagaman yang bersifat kodrati terutama etnis, agama, dan budaya di satuan pendidikan.

Implementasi model pembelajaran kebinekaan di sekolah ditunjukkan dengan suasana kelas yang dikembangkan mencerminkan keanggotaan kelompok belajar siswa lintas sektoral/kultur, proses belajar memberikan kesempatan kepada siswa dari berbagai ras, suku, etnis untuk berinteraksi dengan mengurangi

rasa ketakutan dan semua aturan kelas diputuskan secara bersama dan berlaku untuk semua.

Selain itu, Implementasi model pembelajaran kebinekaan di sekolah ditunjukkan pula oleh peran guru dalam pembelajaran kebinekaan, antara lain mendorong siswa belajar tentang hal-hal yang terkait stereotype dan hubungan lainnya yang dianggap bias serta dampak negatif yang dihasilkannya, mendorong siswa belajar berbagi nilai kebajikan dalam internal kelompok maupun antar-kelompok seperti nilai kebajikan, keadilan, kebebasan, perdamaian, kepedulian sosial dan lainnya, guru membantu siswa dalam berinteraksi secara efektif dengan siswa lain dari berbagai ras, suku, etnis dan agama, guru menggunakan teknik dan pendekatan budaya yang beragam dalam menilai pengetahuan siswa dan keterampilan sosialnya.

Berdasarkan tabel diatas untuk iklim kebinekaan SD dan SMP pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2022 yaitu menjadi 71,49% untuk kebinekaan SD dan 72,43% untuk kebinekaan SMP dengan kategori capaian baik. Ini bermakna bahwa satuan pendidikan sudah mampu menghadirkan suasana proses pembelajaran yang menjunjung tinggi toleransi agama/kepercayaan dan budaya, mendapatkan pengalaman belajar yang berkualitas, mendukung kesetaraan agama/kepercayaan, dan budaya, serta memperkuat nasionalisme.

Walaupun terjadi peningkatan yang signifikan untuk iklim kebinekaan namun hal yang harus mendapat perhatian dalam implementasi model pembelajaran kebinekaan disekolah adalah adanya pembelajaran transformasi informasi dengan menggunakan anggota masyarakat dan orang tua sebagai sumber belajar.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan iklim keamanan dan iklim kebinekaan adalah dengan merumuskan SK Bupati tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) di Satuan Pendidikan mulai jenjang PAUD, SD, SMP, serta satuan pendidikan kesetaraan. TPPK ini bertujuan untuk memastikan adanya respon cepat penanganan kekerasan ketika terjadi kekerasan di satuan pendidikan. Selain itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga merumuskan dan membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD) merupakan bagian integral dari suatu institusi atau lembaga yang memiliki peran sebagai penyelenggara layanan dan fasilitas bagi individu dengan disabilitas yang bertujuan untuk memberikan akses dan layanan yang setara serta inklusif bagi

seluruh warga Negara yang ditetapkan oleh Bupati Balangan. Jadi, dengan dibentuknya TPPK dan ULD diharapkan dapat memastikan bahwa setiap siswa berhak mendapatkan hak yang sama untuk belajar di lingkungan yang aman tanpa diskriminasi.

6. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

Cakupan pelayanan dasar yang menjadi Indikator SPM Satpol PP Kabupaten Balangan berdasarkan amanat permendagri nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 2. 153
SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum

Indikator	Target	Realisasi	Satuan	Capaian (%)
Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	8000	8000	Orang	100%

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1 Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2023

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. mengamanatkan bahwa Evaluasi dan pengendalian RKPD perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi semua stakeholder.

Hasil evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Semester II Tahun 2023 Kabupaten Balangan diperoleh bahwa total 30 SKPD eselon II lingkup Pemerintah

Kabupaten Balangan selaku pengelola anggaran berkewajiban untuk memasukkan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2023 per triwulan dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan DPA SKPD masing-masing sebagai bahan evaluasi.

Dalam mengukur pencapaian hasil rencana kerja SKPD. dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan 4 Tahun 2023 mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi Capaian Kinerja Program – Sub Kegiatan SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Selengkapnya jumlah SKPD dengan kriteria kinerja dan anggaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 154
Rekapitulasi Evaluasi RKPD Kabupaten Balangan Triwulan IV Tahun 2023

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan '(2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			
1	2	3		4				5			
		K	APBD-P (Rp)	K (Output)	K (Kegiatan)	K (Outcome)	Rp	K (Output)	K (Kegiatan)	K (Outcome)	APBD-P (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	100	398.393.943.396	95,87	60,85	98,27	327.473.758.405	95,87	60,85	98,27	82,20
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	100	307.846.820.740,00	99,24	105,14	102,19	263.915.010.163	99,24	105,14	102,19	85,73
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	100	572.082.979.723	96,95	94,54	96,40	484.722.012.213	96,95	94,54	96,40	84,73
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100	31.011.079.398	157,13	131,33	100,00	28.976.571.846	157,13	131,33	100,00	93,44
5	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	100	17.530.914.109	99,53	100,00	100,33	16.564.936.177	99,53	100,00	100,33	94,49
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	100	33.138.442.066	99,98	100,00	100,00	32.113.042.961	99,98	100,00	100,00	96,91
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100	44.152.753.567	97,71	92,22	81,96	41.169.187.284	97,71	92,22	81,96	93,24

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan '(2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			
1	2	3		4				5			
		K	APBD-P (Rp)	K (Output)	K (Kegiatan)	K (Outcome)	Rp	K (Output)	K (Kegiatan)	K (Outcome)	APBD-P (Rp)
	Serta Pemberdayaan Masyarakat Desa										
8	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	100	34.777.134.530	105,53	98,67	99,60	32.070.637.124	107,72	98,67	99,60	92,22
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	100	6.962.697.488	91,39	95,65	97,65	6.712.431.719	91,39	95,65	97,65	96,41
10	Dinas Perhubungan	100	37.747.266.461	93,22	90,54	72,56	36.122.030.617	93,22	90,54	72,56	95,69
11	Dinas Komunikasi, Informatika, Stastik dan Persandian	100	25.932.795.061	100,58	100,66	98,93	23.698.362.187	100,58	100,66	98,93	91,38
12	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	100	19.570.526.816	100,75	97,21	91,76	17.938.103.598	100,75	97,21	91,76	91,66
13	Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	100	38.424.373.297	94,11	97,29	216,69	37.125.487.907	94,11	97,29	216,69	96,62
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata	100	34.903.988.070	96,19	98,69	87,28	31.719.175.855	96,19	98,69	87,28	90,88
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	13.259.629.256	107,28	88,36	87,37	11.381.497.773	107,28	88,36	87,37	85,84

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan '(2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			
1	2	3		4				5			
		K	APBD-P (Rp)	K (Output)	K (Kegiatan)	K (Outcome)	Rp	K (Output)	K (Kegiatan)	K (Outcome)	APBD-P (Rp)
16	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	100	201.061.782.780,00	109,47	100,00	102,60	182.228.355.448,00	109,47	100,00	102,60	90,63
17	Sekretariat Daerah	100	203.756.090.549	98,11	101,36	80,00	188.014.767.019	98,11	101,36	80,00	92,27
18	Inspektorat Kabupaten	100	25.002.883.060	124,44	96,59	81,50	21.665.401.766	124,44	96,59	81,50	86,65
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	100	21.056.536.066	98,87	102,00	104,67	19.971.580.789	98,87	102,00	104,67	94,85
20	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	100	359.520.937.817	94,90	100,00	96,91	341.389.410.640	94,90	100,00	96,91	94,96
21	Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	100	19.076.062.212	99,22	114,49	35,60	17.797.565.535	99,22	114,49	35,60	93,30
22	Sekretariat DPRD	100	62.644.362.476	84,93	88,89	92,42	55.638.722.423	84,93	88,89	92,42	88,82
23	Kecamatan Lampihong	100	5.399.575.291	91,67	91,67	100,00	5.115.111.377	91,67	91,67	100,00	94,73
24	Kecamatan Batumandi	100	5.714.687.973	99,95	95,61	101,68	5.472.611.561	99,95	95,61	101,68	95,76
25	Kecamatan Awayan	100	4.948.760.470	97,60	92,37	85,71	4.779.033.458	97,60	92,37	85,71	96,57

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan '(2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi (Tahun 2023)				Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2023 (%)			
1	2	3		4				5			
		K	APBD-P (Rp)	K (Output)	K (Kegiatan)	K (Outcome)	Rp	K (Output)	K (Kegiatan)	K (Outcome)	APBD-P (Rp)
26	Kecamatan Halong	100	4.921.582.520	99,53	100,00	100,48	4.549.462.508	99,53	100,00	100,48	92,44
27	Kecamatan Juai	100	4.812.649.341	100,14	92,86	86,93	4.432.197.076	100,14	92,86	86,93	92,09
28	Kecamatan Paringin	100	10.897.613.266	80,95	93,33	100,11	9.634.023.697	80,95	93,33	100,11	88,40
29	Kecamatan Tebing Tinggi	100	3.673.367.000	139,17	87,77	87,50	3.649.009.752	139,17	87,77	87,50	99,34
30	Kecamatan Parsel	100	8.536.824.894	98,52	90,38	83,68	7.548.598.242	98,52	90,38	83,68	88,42
		100	**2.556.759.059.693**				**2.263.588.097.120**	**101,84**	**96,62**	**95,69**	**88,53**
								SANGAT TINGGI	**SANGAT TINGGI**	**SANGAT TINGGI**	**TINGGI**

Sumber : Monev Bapperida Tahun 2024

Tabel 2.155
Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Uraian	Rata-rata tingkat capaian (%)	Predikat Kinerja
1	Kinerja Sub Kegiatan	101,84	Sangat Tinggi
2	Kinerja Kegiatan	96,62	Sangat Tinggi
3	Kinerja Program	95,69	Sangat Tinggi
4	Anggaran	88,53	Tinggi

Berdasarkan tabel di atas rata-rata capaian kinerja sub kegiatan adalah sebesar 101,84%, kinerja kegiatan adalah 96,62% dan rata-rata tingkat capaian kinerja program adalah 95,69% dengan semua predikat kinerja adalah sangat tinggi dan capaian anggaran sebesar 88,53% dengan predikat kinerja tinggi.

Berdasarkan hasil telaahan evaluasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang mencakup realisasi yang tidak memenuhi target, memenuhi target maupun yang melebihi target disajikan pada tabel 2. 156

Tabel 2. 156
Realisasi Program

No	SKPD	Tercapai	Tidak Tercapai	Melebihi Target
1	Sekretariat Daerah	1	4	0
2	Inspektorat	2	2	4
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8	0	2
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	1	1	4
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	2	2	0
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	2	1
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	0	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	0	0
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	4	0	1
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32	1	0
11	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	15	2	4
12	Dinas Sosial Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14	3	1
13	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	2	3	0
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	1	0
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10	5	0
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6	3	0
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	5	5	5
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	8	5	11
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	14	1	1

No	SKPD	Tercapai	Tidak Tercapai	Melebihi Target
20	Dinas Perhubungan	2	2	1
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	18	1	0
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	5	9	6
23	Kecamatan Paringin	5	0	1
24	Kecamatan Paringin Selatan	2	2	2
25	Kecamatan Lampihong	6	0	0
26	Kecamatan Batumandi	3	2	1
27	Kecamatan Awayan	6	0	0
28	Kecamatan Juai	5	0	1
29	Kecamatan Halong	5	0	1
30	Kecamatan Tebing Tinggi	5	1	0
Total		**200**	**57**	**47**

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator program yang memenuhi target berjumlah 200 program , yang tidak memenuhi target 57 program, dan yang melebihi target berjumlah 47 program.

Tabel 2. 157

Realisasi Kegiatan

No	SKPD	Tercapai	Tidak Tercapai	Melebihi Target
1	Sekretariat Daerah	22	0	2
2	Inspektorat	11	2	2
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16	1	0
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	14	1	1
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	13	0	0
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	5	4
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11	0	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	8	0	4
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	12	1	0
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23	18	0
11	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25	12	3
12	Dinas Sosial, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	27	4	2
13	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	9	3	1
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	12	3	0
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	23	6	1
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	15	3	1
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	19	6	3
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	30	15	5

No	SKPD	Tercapai	Tidak Tercapai	Melebihi Target
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	18	2	3
20	Dinas Perhubungan	13	1	0
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	12	1	1
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	13	11	6
23	Kecamatan Paringin	14	1	0
24	Kecamatan Paringin Selatan	9	5	0
25	Kecamatan Lampihong	11	1	0
26	Kecamatan Batumandi	4	8	0
27	Kecamatan Awayan	11	0	1
28	Kecamatan Juai	13	0	0
29	Kecamatan Halong	12	0	0
30	Kecamatan Tebing Tinggi	10	3	
Total		**433**	**113**	**40**

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator kegiatan yang memenuhi target berjumlah 433 kegiatan , yang tidak memenuhi target 113 kegiatan, dan yang melebihi target berjumlah 40 kegiatan.

Tabel 2.158

Realisasi Indikator Sub Kegiatan

No	SKPD	Tercapai	Tidak Tercapai	Melebihi Target
1	Sekretariat Daerah	51	2	0
2	Inspektorat	18	4	11
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	54	13	0
4	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	58	1	0
5	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	58	5	0
6	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	5	2
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	33	1	0
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19	5	9
9	Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	19	1	0
10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	86	8	0
11	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	72	19	9
12	Dinas Sosial, Peberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	51	9	3
13	Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	18	6	1
14	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	36	3	1
15	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	50	8	3
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	29	6	0
17	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	45	14	0

No	SKPD	Tercapai	Tidak Tercapai	Melebihi Target
18	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	63	19	8
19	Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	35	3	2
20	Dinas Perhubungan	25	2	3
21	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	27	0	1
22	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	24	9	5
23	Kecamatan Paringin	26	4	0
24	Kecamatan Paringin Selatan	26	1	0
25	Kecamatan Lampihong	18	1	0
26	Kecamatan Batumandi	27	1	0
27	Kecamatan Awayan	23	1	0
28	Kecamatan Juai	25	1	1
29	Kecamatan Halong	18	2	1
30	Kecamatan Tebing Tinggi	17	9	0
Total		**1075**	**163**	**60**

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi indikator sub kegiatan yang memenuhi target berjumlah 1075 sub kegiatan , yang tidak memenuhi target 163 sub kegiatan, dan yang melebihi target berjumlah 60 sub kegiatan.

Tabel 2.159

Evaluasi Capaian Kinerja Program – Sub Kegiatan SKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 (Terlampir)

2.3 Pencapaian Indikator Tujuan RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2023

Evaluasi adalah sebuah penilaian yang obyektif dan sistematik terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung valuasi ex-post atau pasca pelaksanaan dimaksudkan untuk melihat pencapaian kegiatan atau program (output/outcome/impact) mampu mengatasi masalah pembangunan serta menilai efisiensi, efektivitas dan manfaat. Dengan evaluasi, akan didapatkan review perkembangan setiap indikator kinerja. Kemudian dengan data yang ada, dapat dilakukan identifikasi masalah baik dalam perencanaan maupun implementasinya serta berbagai kemungkinan solusi.

Demikian juga proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, harus memperhatikan evaluasi capaian kinerja rencana pembangunan periode sebelumnya, seperti evaluasi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang paling tidak harus dilaksanakan 1 kali dalam 5 (lima) tahun serta evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun.

Indikator kinerja makro merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders) dalam mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

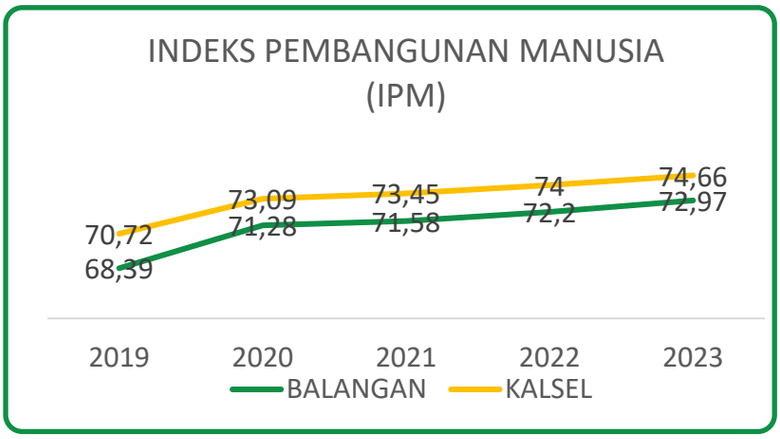
Tabel 2. 160
Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No	Indikator	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	Status	Capaian dari tahun 2022
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	69,73	70,16	72,97	Tercapai	Naik
2	Angka Kemiskinan	5,83	5,2 - 5,0	5,22	Tercapai	Naik
3	Angka Pengangguran Terbuka (%)	3,98	2.4	2,7	Tidak Tercapai	Naik
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	5,24	3 - 3,3	4,17	Tercapai	Turun
5	Indeks Gini	0,266	0,287	0,258	Tercapai	Naik
6	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	67,83	68,02	68,24	Tercapai	Naik

2.3.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu gambaran bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Report* (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk).

Gambar 2.41
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Balangan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 68,39 dan terus meningkat menjadi 72,97 pada tahun 2023, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan namun sudah berada pada dikategori tinggi. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan.

2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Balangan pada tahun 2023 menurun dibandingkan tahun 2022 yaitu pertumbuhan ekonomi Balangan adalah 4,17. PDRB Kabupaten Balangan tahun 2023 atas dasar harga berlaku adalah sebesar 20.876,19 milyar rupiah dan atas dasar harga konstan sebesar 10.390,60 Milyar rupiah. Distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha tahun 2023, terbesar pada

kategori Pertambangan dan Penggalian yaitu 73,73% disusul oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,68%, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 4,16%, konstruksi 3,08%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib 3%, jasa Pendidikan 2,27%, transportasi dan pergudangan 1,44% dan industri pengolahan 1,26%.

Tabel 2. 161
Pertumbuhan Ekonomi kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan tahun 2023

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi
	KALIMANTAN SELATAN	4,69
1	HULU SUNGAI SELATAN	5,27
2	BANJAR	4,35
3	HULU SUNGAI TENGAH	4,11
4	BARITO KUALA	3,91
5	BALANGAN	4,17
6	TAPIN	4,88
7	TANAH LAUT	4,78
8	TABALONG	4,90
9	HULU SUNGAI UTARA	4,51
10	KOTA BANJAR BARU	6,81
11	KOTABARU	4,29
12	TANAH BUMBU	4,84
13	KOTA BANJARMASIN	5,62

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2024

Faktor pendorong :

a. Terjadi Peningkatan PDRB sektor non pertambangan menjadi salah satu pendorong penguatan bantalan dasar ekonomi Balangan sehingga tidak selalu bergantung pada salah satu sektor saja.

Faktor Penghambat :

a. Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif karena kontribusi ekonomi daerah terbesar yang masih berada di sektor pertambangan batu bara dimana tahun 2023 terjadi penurunan harga dan penurunan permintaan pasar luar negeri sehingga berdampak pada PDRB Balangan dan sangat mempengaruhi besar kecilnya pertumbuhan ekonomi Balangan.

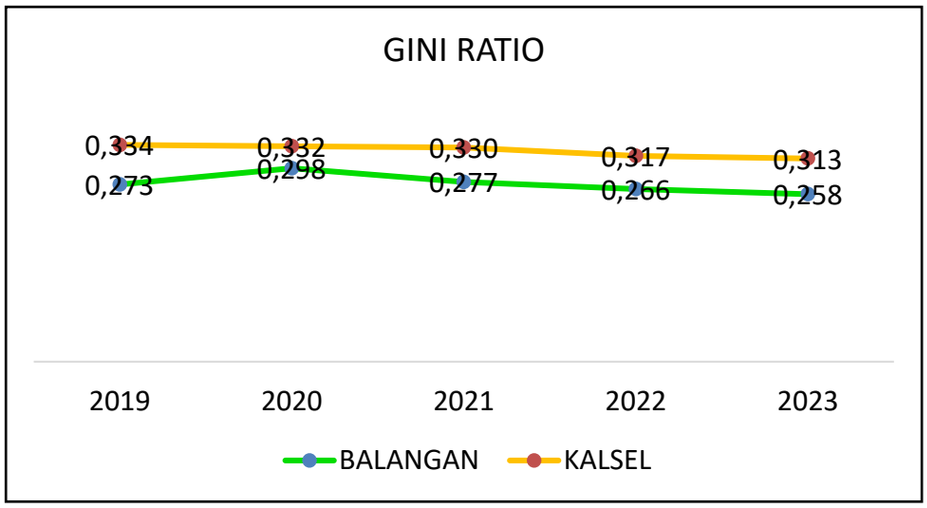
2.3.3 Indeks Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial

di masyarakat. Indeks gini dipengaruhi berbagai hal yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan pertumbuhan investasi.

Koefisien gini (*gini ratio*) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai *gini ratio* berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan *gini ratio* dibagi menjadi 3 bagian, *gini ratio* antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai *gini ratio* antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai *gini ratio* kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Gambar 2.42
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Balangan
dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 0,258 yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan rendah dan bisa dikatakan merata.

Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun lalu, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,266 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa distribusi pengeluaran penduduk pada periode tersebut semakin membaik, dalam ketimpangan rendah. Dibandingkan dengan Indeks Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan, Indeks Gini Ratio Kabupaten Balangan jauh lebih baik.

Faktor pendorong :

a. Mudahnya akses permodalan bagi pengusaha pemula
b. Adanya bantuan sosial dari pemerintah pusat dan daerah diantaranya bantuan uang tunai, permakanan, peralatan kerja, bedah rumah, dan sebagainya
c. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya pada sektor UMKM dan ekonomi kreatif serta pertanian yang menyerap banyak tenaga kerja
d. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan yang sudah masuk kategori tinggi di angka 72,97 poin (2023) sehingga mampu menekan ketimpangan angka indeks gini yang semakin merata
e. Semakin meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas dan berorientasi pasar kerja dengan adanya pelatihan-pelatihan kerja oleh instansi terkait
f. Pertumbuhan investasi daerah yang terus tumbuh

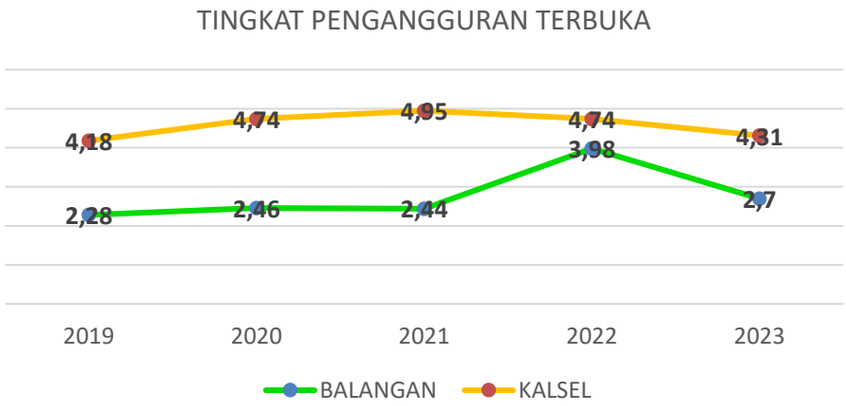
Faktor penghambat :

a. Peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun yang belum dibarengi dengan peningkatan kualitas hidup secara optimal
b. Pertumbuhan ekonomi cenderung fluktuatif karena kontribusi ekonomi daerah terbesar yang masih berada di sektor pertambangan sehingga perlu kontribusi lebih dari sektor lain seperti pertanian, perdagangan, jasa dan pariwisata dalam mengatasi ketergantungan terhadap sektor pertambangan

2.3.4 Angka Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2023, dimana pada tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan sebesar 3,98% menjadi 2,7% di tahun 2023, bahkan jika dibandingkan Provinsi Kalsel kita jauh lebih baik dan menjadi penyumbang positif angka pengangguran di Kalsel.

Gambar 2.43
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Adapun Faktor yang mempengaruhi penurunan angka pengangguran terbuka, diantaranya :

a. Dilihat dari Jumlah penduduk Angkatan Kerja mengalami kenaikan yang semula pada tahun 2022 sebanyak 71.143 orang menjadi 72.350 orang pada tahun 2023 atau meningkat 1.207 orang. Peningkatan Jumlah angkatan kerja sejalan dengan jumlah penduduk usia kerja yang terus naik. Meningkatnya angkatan kerja ini akibat beralihnya bukan angkatan kerja menjadi angkatan kerja ini terlihat dengan menurunnya jumlah bukan angkatan kerja yang semula pada tahun 2022 sebanyak 26.929 orang menjadi 26.542 orang pada tahun 2023. Hal ini merupakan indikasi pada akses pekerjaan penduduk khususnya perempuan yang pada awalnya tidak bekerja menjadi bekerja, akibat kondisi ekonomi yang kian membaik dan pandemi yang telah berakhir.
b. Meningkatnya kesempatan bagi para pencari kerja, ini dapat dillihat dari jumlah lowongan kerja yang tersedia baik melalui kegiatan Bursa Kerja Online ataupun lowongan yang dilaporkan perusahaan pemberi kerja serta lowongan PPPK dan Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Balangan Tahun 2023.
c. Jumlah laporan Penempatan Tenaga Kerja di Sektor Swasta yang terdaftar pada Bursa Kerja/ Informasi Pasar Kerja sebanyak 1.056 Orang
d. Meningkatnya kualitas pencari kerja yang memiliki pendidikan dan keterampilan sehingga mampu untuk bersaing di dunia kerja ataupun berusaha mandiri dengan keterampilan yang telah dimiliki

e. Tersedianya LPK Swasta yang berkualitas dan melaksanakan pelatihan kerja sesusi kebutuhan dunia kerja.
f. Kebijakan Padat Karya pada setiap proyek pekerjaan di Desa-Desa yang melibatkan masyarakat setempat yang mengakibatkan serapan tenaga kerja tinggi.
g. Selain itu juga warga masyarakat Balangan banyak menggeluti pekerjaan pada sector pertanian, perkebunan, peternakan dan usaha kecil dan menengah, serta pertambangan.
h. Berkembangnya teknologi dan informasi yang bisa dimanfaatkan dalam mempermudah penjualan dan pemasaran produk dan menciptakan peluang kerja baru

Faktor Penghambat :

a. Masih adanya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja
b. Masih banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar
c. Belum maksimalnya peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menyalurkan/ menyampaikan informasi pasar kerja
d. Mayoritas tenaga kerja enggan ataupun tidak berani untuk berwirausaha mandiri.
e. Mindset Pekerja local masih belum siap bila ditempatkan jauh dari Domisili
f. Masih belum maksimal nya peran Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Kabupaten Balangan sehingga mengurangi kesempatan bagi Pekerja lokal.
g. Potensi pekerjaan non formal sector jasa kurang dilirik oleh angkatan kerja misalnya barbershop dll.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Indikator Kinerja Sasaran pada Sasaran Strategis Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 162
Angka Pengangguran Terbuka Kab/Kota

No	Kabupaten/Kota	Angka Pengangguran Terbuka
	KALIMANTAN SELATAN	4.31
1	HULU SUNGAI SELATAN	2.12
2	BALANGAN	2.7
3	BANJAR	2.73
4	HULU SUNGAI TENGAH	3.26
5	BARITO KUALA	3.42
6	TANAH LAUT	3.58
7	TABALONG	3.6

No	Kabupaten/Kota	Angka Pengangguran Terbuka
8	HULU SUNGAI UTARA	3.85
9	TAPIN	3.93
10	KOTA BANJAR BARU	5.01
11	KOTABARU	6.08
12	TANAH BUMBU	6.56
13	KOTA BANJARMASIN	6.7

Sumber : BPS Kabupaten Balangan dan Prov KalSel, data diolah 2023

Pada tabel diatas menunjukkan tingkat pengangguran Kabupaten Balangan berada di posisi nomor 2 (dua) terendah se-provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar 2,7 persen dan dibawah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada posisi nomor 1 (satu) yaitu sebesar 2,12 persen. Tingkat pengangguran Kabupaten Balangan menjadi penyumbang positif menurunnya angka pengangguran Provinsi Kalimantan Selatan.

2.3.5 Pendapatan Perkapita

Pengeluaran perkapita masyarakat di suatu daerah menentukan tingkat/kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya akan mencermikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada dasarnya angka pengeluaran tersebut bukan satu-satunya variabel penentu kesejahteraan, masih ada variabel lain seperti tingkat inflasi, ketersediaan produksi lokal dan ketersedian komponen produksi lokal.

Produk Domestik Regional Bruto per kapita Kabupaten Balangan atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp. 153.371,69 Ribu. Artinya, pendapatan setiap penduduk Balangan mencapai Rp 153.371,69 ribu per tahun atau sebesar 12,781 ribu per bulan.

2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.4.1. Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023

Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja daerah dilakukan penilaian rata-rata capaian kinerja dan predikat kinerja terhadap 13 Sasaran Daerah dengan 29 Indikator yang ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023 sesuai sasaran strategis pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Angka-angka realisasi masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 163
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 pada Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Status
1	2	3		5	6	7	8
1	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Publik	1	Indeks Infrastruktur Publik	41,58	43,69	105,07%	Tercapai
2	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur Permukiman	2	Indeks Infrastruktur Permukiman	31,42	31,43	100,03%	Tercapai
3	Meningkatnya Indeks Kualitas Air, Udara dan Lahan	3	Indeks Kualitas Air	50,3	50	99,40%	Tidak Tercapai
		4	Indeks Kualitas Udara	91,16	93,97	103,08%	Tercapai
		5	Indeks Kualitas Lahan	55,67	51,94	93,30%	Tidak Tercapai
4	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	13,14%	7,68%	58,45%	Tidak Tercapai
		7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	6,40%	4,16 %	65%	Tidak Tercapai
		8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,44%	0,24 %	55 %	Tidak Tercapai
		9	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	600 M	471,227 M	78,54 %	Tidak Tercapai
5	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	10	Angka Pengangguran Terbuka	2,40	2,70	87,50 %	Tidak Tercapai
6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11	Angka Rata-rata Lama Sekolah	8,36	8,03	96,05%	Tidak Tercapai
		12	Angka Harapan Lama Sekolah	12,85	12,82	99,77%	Tidak Tercapai
7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13	Usia Harapan Hidup	68,32	73,69	107,86 %	Tercapai
		14	Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran)	132	207	43,18 %	Tidak Tercapai

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		2023			
				Target	Realisasi	Capaian	Status
1	2	3		5	6	7	8
		15	Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran)	8,8	15,54	23,41 %	Tidak Tercapai
		16	Prevalensi Stunting	14 %	14,61 %	95,64 %	Tidak Tercapai
		17	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	18	20,80	84,44 %	Tidak Tercapai
8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18	Nilai SAKIP	72,40 (BB)	70,17	96,92 %	Tidak Tercapai
		19	Opini BPK	WTP	WTP	100,00%	Tercapai
		20	Nilai EKPPD	3,5900	2,8600	79,67 %	Tidak Tercapai
		21	Indeks Pelayanan Publik	3,51 (B)	4,01 (A-)	114 %	Tercapai
		22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	85,07	100.08 %	Tercapai
9	Menurunnya Angka Kemiskinan	23	Angka Kemiskinan	5,2-5,0	5,22	99,62 %	Tidak Tercapai
		24	Angka PPKS yang tertangani	70,95 %	59,40 %	83,70 %	Tidak Tercapai
10	Terjaganya Kehidupan Sosial yang Kondusif	25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	100,00%	Tercapai
11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100,00%	Tercapai
		27	Indeks Resiko Bencana	126,16	115,21	108,68%	Tercapai
12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	68 %	70,97 %	104,37 %	Tercapai
13	Meningkatnya Status Desa Kabupaten Balangan	29	Indeks Desa Membangun	0,6695	0,7527	112,43%	Tercapai
Rata-rata capaian						**93,69%**	

Sumber : Monev Bapperida, 2024 data diolah

Hasil evaluasi menunjukkan rata-rata capaian kinerja sasaran strategis adalah sebesar 93,69%. Terdapat 12 Indikator Kinerja sasaran yang tercapai lebih dari 100% dari 29 Indikator sasaran yang ditetapkan. Namun terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya masih rendah yaitu Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Tabel 2.164
Evaluasi Pelaksanaan dan Realisasi RPJMD Kabupaten Balamgan s.d Tahun 2023

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
Indeks Infrastruktur Publik		a. adanya penguatan program pembangunan infrastruktur baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, b. adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten, c. adanya peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan, d. tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, e. tersedianya forum SKPD untuk koordinasi, f. adanya kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan tenaga terampil, dan g. tersedianya SDM dengan motivasi kerja yang tinggi dan adanya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan.	Tindaklanjut yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka pengembangan infrastruktur desa dan pengembangan infrastruktur perkotaan adalah optimalisasi pengawasan terhadap kualitas bangunan infrastruktur, mengikuti sosialisasi dan bimtek terkait pengadaan barang dan jasa, melakukan FGD antar SKPD yang terkait, melakukan sosialisasi terhadap para penyedia atau pihak ketiga.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
Indeks Infrastruktur Permukiman		a. Adanya program prioritas bedah rumah dan Kawasan kumuh b. adanya dukungan dana dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten c. Adanya perluasan RTH d. Adanya inovasi kepala daerah terkait bedah rumah, sanitasi dan air bersih	Dalam upaya peningkatan kinerja infrastruktur permukiman Pemerintah Kabupaten Balangan dapat melakukan multisharing dana APBD dan APBDes. Tahapan ini bisa dimulai melalui Musrenbang tingkat desa dan Musrenbang tingkat kecamatan.
Indeks Kualitas Air	a. Pencemaran Sumber Air : 1. Aktivitas Industri: Limbah industri, seperti limbah kimia dan logam berat, dapat mencemari sumber air. 2. Limbah Pertanian: Penggunaan pupuk dan pestisida dalam pertanian dapat mencemari air sungai dan danau. 3. Limbah Perkotaan: Pembuangan limbah domestik dan industri dari perkotaan dapat menjadi sumber pencemaran. b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: 1. Kurangnya Pemahaman: Masyarakat yang kurang memahami pentingnya menjaga kualitas air dapat		1. Pemantauan Kualitas Air 2. Pengelolaan sampah dan limbah 3. Konservasi Vegetasi 4. Pengendalian Pncemaran dari Pertanian 5. Perlibatan Masyarakat 6. Kebijakan Lingkungan 7. Pengelolaan Drainase Urban 8. Investasi Infrastruktur 9. Kerjasama Antar Pihak

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	kurang berpartisipasi dalam upaya pelestarian dan pembersihan sumber air. 2. Praktik Buruk: Pembuangan sampah sembarangan, pembakaran sampah, dan perilaku buruk lainnya dapat merusak ekosistem air. c. Keterbatasan Sumber Daya Finansial dan Teknis: 1. Keterbatasan Dana: Proyek-proyek untuk meningkatkan kualitas air memerlukan dana yang cukup besar untuk penelitian, monitoring, dan implementasi tindakan perbaikan. 2. Keterbatasan Teknologi: Beberapa wilayah mungkin tidak memiliki akses atau kemampuan untuk menggunakan teknologi tinggi yang diperlukan untuk pemantauan dan pengolahan air secara efektif. d. Perubahan Iklim: 1. Perubahan Pola Curah Hujan: Perubahan iklim dapat mempengaruhi pola curah hujan, yang dapat mengakibatkan banjir, erosi tanah, dan pencemaran air. e. Ketidak seimbangan Pembangunan: 1. Perencanaan Pembangunan Yang Tidak Tepat: Pembangunan tanpa mempertimbangkan		

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	dampaknya terhadap lingkungan dapat merusak sumber air. 2. Pertumbuhan Populasi yang Cepat: Pertumbuhan populasi yang cepat dapat menyebabkan peningkatan tekanan terhadap sumber daya air. f. Ketidakmampuan Penegakan Hukum: 1. Ketidakmampuan Penegakan Regulasi: Hukum dan regulasi terkait lingkungan seringkali tidak ditegakkan secara efektif, yang dapat mengakibatkan pelanggaran dan pencemaran terus menerus. g. Masalah Sosial Ekonomi: 1. Ketidaksetaraan Akses Air: Beberapa komunitas mungkin tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber air bersih, yang dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam pemenuhan kebutuhan air		
Indeks Kualitas Udara		Kenaikan indeks kualitas udara dipengaruhi oleh curah hujan yang lebih sering pada tahun 2022. Air hujan secara alamiah dapat mengurangi partikel pencemar di udara.	1. Pengurangan Emisi Kendaraan; 2. Pengurangan Emisi Industri 3. Pengelolaan Limbah 4. Pencegahan Kebakaran Hutan 5. Penggunaan Energi Bersih 6. Penanaman Pohon

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			7. Peningkatan Penyuluhan Masyarakat 8. Pengawasan dan Regulasi 9. Teknologi Pembersih 10. Pengukuran dan Pemantauan
Indeks Kualitas Lahan	belum ada penambahan lokasi ruang terbuka hijau		1. Melakukan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait langsung dan tidak langsung dengan lingkungan hidup. 2. Memasukkan program atau kegiatan langsung yang berkaitan dengan perhitungan IK, IKU dan IKL. 3. Melaksanakan program reboisasi pada daerah-daerah yang teridentifikasi adanya penangan reboisasi. 4. Mengatur dan mengelola sampah 5. Membuat regulasi tentang pembuangan limbah 6. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bijaksana

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			sehingga mengurangi dampak negative IPTEK terhadap lingkungan alam karena seperti diketahui bahwa IPTEK dapat mempengaruhi percepatan proses penguraian limbah. 7. Membuat konsep wacana desa digital hijau
Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	a. Kemarau Panjang tahun 2022 lebih lama dibanding tahun 2022, di beberapa wilayah sentra terjadi kekeringan b. yang menyebabkan gagal panen dan mundur jadwal tanam yang berakibat pada penurunan produktivitas. c. Luas pertanaman padi yang puso akibat banjir dan kekeringan seluas 33.483 ha dari 166.657 ha yang terkena. d. Adanya alih fungsi lahan sawah sehingga terjadi penurunan luas panen 21.731 ha untuk tanaman padi e. Penerapan teknologi budidaya jagung oleh petani yang semakin baik.		1. melaksanakan pendampingan dan pembinaan untuk kelompok pembudidaya. 2. melaksanakan restocking ikan untuk perikanan tangkap di wilayah perairan lepas.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	f. Harga jual jagung yang cukup tinggi di tingkat petani sehingga petani terdorong untuk menanam jagung. g. Pengembangan Budidaya Jagung Untuk Pangan Target Pengembangan Budidaya		
Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	a. Ketersediaan modal yang masih terbatas pada setiap sektor indutri. b. Ketersediaan tenaga kerja yang belum memenuhi permintaan pasar. c. Masih bergantungnya bahan mentah atau bahan baku di luar lokasi industry. d. Transportasi yang masih terbatas karena ada beberapa sarana prasarana jalan yang sering mengalami bencana seperti banjir. e. Pemasaran yang belum optimal menjangkau pada seluruh aspek baik pada pemasaran online ataupun pemasaran offline.		Adapun hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka memperkuat laju pertumbuhan ekonomi sektor indutri pengolahan terletak pada perkembangan jumlah tenaga kerja dan bantuan modal usaha. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Balangan telah bekerjasama dengan Bank Kalsel melalui inovasi pinjaman kredit tanpa Bunga (Sanggam Babungas) untuk para pelaku usaha di Balangan termasuk pelaku usaha industri.
Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Dari sisi pangsa PDRB, kategori akomodasi dan makan minum memiliki kontribusi yang cukup kecil. Selama 5 tahun terakhir, rata-rata kontribusi kategori ini rata-rata hanya mencapai 0,35 persen per tahun. Namun demikian,		a. Kaji ulang RIPPADA Kbupaten Balangan untuk disesuaikan dengan Pengembangan Destinasi Wisata.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	laju pertumbuhan kategori ini setiap tahunnya cukup tinggi. Secara ringkas, pertumbuhan kategori ini dari tahun 2017 ke 2021 sangat tinggi yaitu mencapai 15,76 persen. Kondisi daya beli masyarakat yang cukup baik dan kecenderungan masyarakat Balangan yang konsumtif menjadi pendorong tumbuhnya kategori ini. Namun, tahun 2020 terjadi penurunan pertumbuhan untuk kategori ini karena terjadinya pandemi Cov``id-19 yang menyebabkan penurunan perilaku konsumtif tersebut. Kemudian, di tahun 2021 pertumbuhannya kembali meningkat mencapai 1,34 persen akibat perbaikan kegiatan perekonomian yang terjadi.		b. Peningkatan daya tarik destinasi wisata melalui promosi serta pemenuhan sarana prasarana wisata.
Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	a. Tim Pengawasan Penanaman Modal belum optimal. b. Tidak terangkatnya potensi investasi di setiap sector yang menyebabkan Investasi masih didominasi sector pertambangan dan penggalian. c. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) belum dijadikan pegangan dalam pengembangan ekonomi daerah. d. Belum lengkapnya informasi pada peta potensi tentang sector usaha prioritas Daerah yang siap ditawarkan kepada Investor (IPRO).		1. Peningkatan kepastian hukum atau regulasi dan jaminan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Balangan. 2. Pemangkasan birokrasi yang terlalu panjang dalam pemberian pelayanan perizinan berinvestasi. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyederhanaan

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	e. Belum adanya penanaman modal besar yang bermitra dengan UMKM. f. Belum adanya keselarasan antara tata ruang dengan kebutuhan investasi. g. Belum terjadinya sinergitas antar SKPD terkait event/ kegiatan promosi potensi daerah. h. Belum selesainya Peraturan daerah tentang Pemberian Failitas /insenti Kemudahan Berusaha. i. Masih belum terpetakan berapa Jumlah Pelaku Usaha yang mempunyai kewajiban melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal j. Belum adanya Pejabat Fungsional penata Laksana Penanaman Modal/ Pengawas Penanaman Modal. k. Sebagian Pelaku usaha belum menyampaikan LKPM karena ketidaktahuan adanya kewajiban penyampaian LKPM dan ketidaktahuan tata cara penyampaian LKPM. l. Kewenangan untuk pelaporan LKPM ada di kantor pusat perusahaan sehingga untuk lokasi cabang di Kabupaten Balangan tidak memiliki hak akses untuk menyampaikan pelaporan hal ini yang menjadipermasalahan di daerah sehingga laporan terkendala.		struktur organisasi SKPD yang melakukan urusan pelayanan dan perizinan dengan melakukan restrukturisasi dari jabatan struktural ke fungsional sesuai amanah perundang-undangan. 3. Keadaan politik dan keamanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan harus dalam kondisi yang stabil dan kondusif. 4. Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia harus dalam kondisi yang semakin baik sehingga menarik minat investor untuk menyuntikkan dana ke pihak penyedia sarana dan prasarana.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	m. Belum tersedia sistem informasi investasi yang mudah, interaktif dan komprehensif.		
Angka Pengangguran Terbuka	a. Masih adanya kualitas tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja b. Masih banyaknya ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga tidak dibayar c. Belum maksimalnya peran Bursa Kerja Khusus (BKK) dalam menyalurkan/ menyampaikan informasi pasar kerja d. Mayoritas tenaga kerja enggan ataupun tidak berani untuk berwirausaha mandiri. e. Mindset Pekerja local masih belum siap bila ditempatkan jauh dari Domisili. f. Masih belum maksimal nya peran Perusahaan Penyalur Tenaga Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta di Kabupaten Balangan sehingga mengurangi kesempatan bagi Pekerja local. g. Potensi pekerjaan non formal sector jasa kurang dilirik oleh angkatan kerja misalnya barbershop dll.		1. Meningkatkan kesempatan kerja 2. Menurunkan angka pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Balangan 3. Menentukan arah pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada di Kabupaten Balangan

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
Angka Rata-rata Lama Sekolah	Dalam mencapai ARLS adalah terkait terbatasnya dengan kewenangan urusan pada Pemerintah Daerah hanya pada Pendidikan jenjang PAUD, SD dan SMP. Sedangkan target dari ARLS ini adalah tidak terbatas hanya pada jenjang PAUD, SD dan SMP tapi sampai pada tingkat Perguruan Tinggi. Jadi Pemerintah Daerah khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Balangan hanya bisa maksimal melaksanakan pemenuhan pelayanan pendidikan pada jenjang PAUD, SD dan SMP.		1. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana pendidikan 2. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kegiatan belajar mengajar dan sarana. 3. peningkatan program beasiswa, prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat Perguruan Tinggi sebagai pemberi motivasi kepada putra dan putri Balangan untuk melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi 4. pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional kepada kurang lebih 1.580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			diharapkan meringankan beban untuk sekolah. 5. Peningkatan kemampuan kompetensi guru dengan mengadakan kerjasama dengan Lembaga Luar 6. Pemerataan sebaran guru pada sekolah sekolah didaerah 7. Aktif menjaring minat bakat siswa melalui lomba-lomba didaerah dan diprovinsi 8. Menaikkan kesejahteraan para PTK (Kenaikan Inseftif dan Honor)
Angka Harapan Lama Sekolah	Masih adanya kasus putus sekolah pada jenjang SD dan SMP karena masih adanya pernikahan dini pelajar, faktor ekonomi keluarga, letak geografis Kabupaten Balangan yang masih ada daerah terpencil.		1. Peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas dan prasarana Pendidikan 2. Peningkatan pelaksanaan SKB 3. Peningkatan pelayanan Pendidikan kesetaraan

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			4. Peningkatan program beasiswa , prestasi dan tidak mampu sampai pada tingkat perguruan tinggi sebagai memberikan motivasi kepada putra putri Balangan untuk melanjutkan Pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi 5. Pelaksanaan program Balangan Pintar yaitu memberikan bantuan operasional keada kurang lebih 1.580 siswa SD dan SMP yang tergolong dalam siswa kurang mampu dalam bentuk barang kebutuhan dasar sekolah seperti sepatu, tas dan buku tulis yang diharapkan meringankan beban untuk sekolah.
Usia Harapan Hidup		a. Signifikannya penurunan AKI dan AKB b. Penurunan prevalensi stunting	1. Menurunkan AKB dan AKI antara lain :

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
		c. Terkendalinya penyakit menular dan tidak menular d. Optimalisasi pelayanan dasar dipuskesmas dan optimalisasi pelayanan rujukan di rumah sakit umum daerah e. Optimalisasi akreditasi puskesmas dan RSUD f. Jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Balangan (UHC) g. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia sesuai standar ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 4 Tahun 2019	a. kunjungan dokter spesialis anakdan kandungan ke seluruh puskesmas sebanyak 1 kali setahun untuk pemeriksaan ibu hamil balita resiko tinggi. b. Pelatihan Asuha Persalinan Normal (APN) untuk bidan sebanyak 60 orang untuk meningkatkan c. Pelatihan puskesmas mampu PONED untuk puskesmas Halong d. Pelathan pengguaan alat USG untuk dokter di puskesmas sebanyak 9 orang untuk peningkatan kompetensi dalam penggunaan alat USG untuk deteksi dini resiko tinggi dan tindak lanjutnya ditingkat pelayanan primer.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			e. Pelatihan penanganan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan asfiksia untuk bidan dalam rangka peningkatan kompetensi bidan. f. Pelaksanaan kelas balita sebanyak 93 kelas dan kelas ibu hamil sebanyak 115 kelas untuk meningkatkan pengetahuan keluarga terkait kesehatan ibu dan anak. g. Optimalisasi pelayanan bayi baru lahir, bayi, balita dan ibu hamil serta ibu bersalin sesuai standar di RS, puskesmas dan jaringannya. h. Kemitraan bidan dan paraji untuk 50 orang persalinan. i. Pelaksanaan Scrining Hipoteriod Kongenital (SHK)

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			pada seluruh bayi-bayi baru lahir. j. Optimalisasi sarana dan prasarana antara lain pengadaan oksigen konsentrat sebanyak 78 buah, ambubek sebanyak 50 duah, dopler 160 buah, bidan kit 18 buah, roda dua untuk bidan di desa dan coordinator sebanyak 45 buah, petugas imunisasi dan survelans sebanyak 24 buah, dokter sebanyak 31 buah. k. Pembangun dan rehabilitasi poskesdes sebanyak 30 buah. 2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular melalui : a. Pelaksanaan homecare diseluruh puskesmas

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			b. Pelaksanaan posbindu sebanyak 132 posbindu. c. Pelaksanaan posyandu Lansia diseluruh desa. d. Optimalisasi pelayanan penyakit menular dan tidak menular sesuai standar di RS, puskesmas dan jaringannya. e. Pembinaan untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di kantor dan sekolah. f. Optimalisasi Germas di SKPD dan desa. g. Optimalisasi Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBABS). h. Pelatihan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) untuk petugas kesehatan. 3. Perbaikan gizi masyarakat khususnya untuk ibu hamil dan balita

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			a. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk ibu hamil KEK dan ibu hamil anemia, balita gizi buruk dan kurang. b. Optimalisasi sarana dan prasarana antara lain pengadaan antrometri sebanyak 12 buah untuk seluruh puskesmas, pengadaan roda dua untuk petugas gizi sebanyak 12 buah. c. Pelayanan kesehatan balita, ibu hamil, dan pasangan subur (PUS) di seluruh posyandu.
Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu	a. Masih tingginya ibu hamil yang berisiko (ibu hamil KEK dan Anemia); b. Masih tingginya BBLR (Bayi Berat Badan Lahir Rendah); c. Kurangnya pengetahuan ibu dan keluarga tentang pola asuh anak (Balita); d. Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak;		Angka Kematian Bayi : a. Melaksanakan kunjungan dokter spesialis anak di beberapa puskesmas seperti Puskesmas Lampihong, Tebing Tinggi, Pirsus,

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	e. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan; f. Belum optimalnya sistem rujukan berencana ibu dan anak; g. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang;		Halong, Juai Batmandi, Awayan, Gina mendeteksi komplikasi neonatal sedini mungkin, pemberian imunisasi, dasar lengkap kepada bayi baik di puskesmas dan jaringannya serta rumah sakit sehingga dapat mencegah kematian bayi akibat penyakit berbahaya yang dapat dicegah dengan imunisasi. Pemberian vitamin A dosis tinggi sesuai usia untuk usia dibawah 59 bulan setiap bulan Februari dan Agustus pada tahun berjalan juga dilakukan oleh Dinas Kesehatan, hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan mencegah rabun senja bahkan kebutaan akibat kekurangan vitamin A dan pemberian pelayanan kepada balita di posyandu untuk

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			memantau tumbuh kembang balita serta pelayanan kesehatan balita. Angka Kematian Ibu : Mengadakan pengkajian kasus–kasus kematian ibu mulai dari tingkat puskesmas sampai tingkat kabupaten dengan tim manajemen, pengkaji, dan tim komunitas pelayanan SPOG juga merupakan upaya untuk menurunkan kematian ibu oleh seksi kesehatan keluarga dan gizi, karena dengan adanya pengkajian kasus Audit Maternal Perinatal (AMP) dapat dimanfaatkan untuk menggali permasalahan yang berperan atas kejadian ataupun morbiditas yang berakar pada pasien dan keluarga, petugas kesehatan manajemen pelayanan serta kebijakan pelayanan. Melalui kegiatan ini diharapkan para

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			pengelola program KIA di kabupaten kota dan pemberi pelayanan di tingkat dasar (puskesmas dan jajarannya) dan di tingkat rujukan dapat menetapkan prioritas untuk mengatasi faktor yang berpengaruh tersebut.
Prevalensi Stunting	a. Masih banyak ibu hamil yang kekurangan energi kronik (273 orang) dan anemia (438 orang) b. Masih banyak balita gizi buruk (12 anak) dan balita gizi kurang (855 anak) dan Bayi Berat lahir rendah (BBLR) (178 anak) c. Tingginya pernikahan anak (313 anak) d. Tingginya unmet need (12,14%) e. Rendahnya ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah darah minimal 90 tablet selama masa kehamilan (66,61%) f. Masih banyak keluarga yang tidak akses air minum layak (89 %) g. Rendahnya keluarga berisiko stunting mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi (1,7 %)		Pemerintah Kabupaten Balangan sudah berkomitmen untuk mengurangi stunting melalui pembentukan Tim Percepatan Penanganan Stunting di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan SK Bupati Balangan Nomor 188.45/277/Kum tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023, Desa lokus stunting tahun 2024 di tetapkan 55 desa lokus, pada tahun 2022 terbentuk Tim Kelompok kerja Balangan Lawan Stunting yang melibatkan pihak 3 sesuai Keputusan Bupati Balangan No 188.45/207/Kum/Tahun 2023 dan Keputusan Bupati Balangan No 188.45/317/Kum/Tahun 2022 tentang

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	h. Rendahnya keluarga berisiko stunting mendapatkan promosi gemar makan ikan (3,16%) i. Rendahnya remaja putri menerima layanan pemeriksaan HB (12,67%) j. Belum optimalnya Balita memperoleh imunisasi dasar lengkap (71,81%) k. Rendahnya keluarga yang melaksanakan PHBS (32,66%) l. Rendahnya pelayanan keluarga berencana pasca salin (52,99%) m. Rendahnya keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan (17,84%) n. Rendahnya rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak (7,53%) o. Rendahnya bayi usia 6 bulan mendapat ASI ekslusif (66,42%) p. Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi.		pembentukan POKJA Balanting (Balangan Lawan Stunting) yang merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Balangan dengan Adaro Group. Dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Balangan, untuk menvegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Balangan dengan daerah binaan 4 desa.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR)	Faktor sosial diantaranya masih kentalnya adat istiadat yang mempengaruhi keputusan remaja untuk menjalani pernikahan dan faktor ekonomi seperti pola pikir orang tua yang masih menganggap pernikahan sebagai salah satu solusi terhadap pengurangan beban ekonomi yang ditanggung. Pola asuh kepada remaja juga berpengaruh terhadap sosialisasi di lingkungan sekitar, dan dukungan pemahaman terhadap pemilihan lingkungan positif maupun negative. Kemudahan akses mengenyam pendidikan juga mempengaruhi keputusan remaja untuk menunda pernikahan. Faktor eksternal angka kelahiran remaja juga dapat dipengaruhi oleh tingkat keterpaparan terhadap media sosial yang tidak berbanding dengan kemampuan remaja dalam memanfaatkan media secara positif ataupun negatif.		1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 3. Sediaan Farmasi, alat Kesehatan dan Makanan Minuman 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan 5. Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
Nilai SAKIP	a. Belum seluruh rumusan sasaran strategis dan indikatorkinerja pada perencanaan instansi pemerintah memenuhi kriteria yang SMART (specific, measurable, achievable, relevant and time-bound) serta cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis; b. Pemerintah Kabupaten Balangan telah Menyusun		salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan adalah dengan melakukan penjajakan kerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya terkait implementasi integrasi Aplikasi

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	penjejangan kinerja dengan berpedoman pada Permen PANRB 89 tahun 2021, namun penjejangan yang dilakukan masih perlu dilakukan penyempurnaan, utamanya pada kinerja pada level tektikal yang belum sepenuhnya menggambarkan hubungan sebab akibat serta memiliki rumusan kinerja yang sama/ redundant dengan kinerja di atasnya; c. Pemanfaatan pohon kinerja sebagai dasar untuk penyusunan dokumen perencanaan belum dilakukan secara menyeluruh pada setiap perangkat daerah sehingga keselarasan antara pohon kinerja yang telah disusun dengan dokumen perencanaan yang ada belum tergambar dengan baik; d. Aktifitas dalam rencana aksi yang disusun oleh beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya relevan dan cukup untuk mendukung pencapaian kinerja utama pemerintah daerah. e. Data kinerja yang menunjang pengukuran kinerja belum sepenuhnya relevan dengan formulasi perhitungannya,		(Replikasi Inovasi Aplikasi SAKIP) melalui zoommeeting dan studi lapangan replikasi ke Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu Pemerintah Kabupaten Balangan juga telah melakukan tindaklanjut hasil evaluasi SAKIP Kementerian PANRB.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	f. Meskipun telah memiliki pengukuran dan pengumpulan data kinerja secara elektronik, namun belum terlihat komitmen dari seluruh PD untuk mau memanfaatkan aplikasi tersebut dengan baik. Hal ini terlihat dari masih terlambatnya pengisian data kinerja yang disampaikan oleh PD dan juga belum terlihat feedback perbaikan dari pimpinan PD jika terdapat pencapaian kinerja yang tidak tercapai; g. Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya mampu dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan program dan kegiatan yang tidak berdampak peningkatan pencapaian kinerja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa target kinerja yang realisasinya tidak tercapai tiap tahunnya, namun yang program dan kegiatan yang dilakukan tetap sama; h. Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Balangan sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi tahun sebelumnya, target jangka menengah		

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	i. Informasi kinerja yang telah dituangkan dalam laporan kinerja pemerintah daerah dan unit kerja belum dimanfaatkan dengan baik, terutama pada proses penentuan target maupun strategi serta aktivitas dalam perencanaan tahunan untuk mendukung pencapaian kinerja kedepan. j. Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan evaluasi internal kepada Perangkat Daerah, namun hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan pencapaian kinerja pada level pusat, hal ini ditunjukkan dari masih terdapat sebagian evaluasi kinerja yang capaian target kinerjanya belum tercapai; k. Hasil evaluasi internal yang dituangkan dalam bentuk laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan atau rekomendasi yang cukup dan menyasar secara langsung akar permasalahan yang dialami oleh perangkat daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.		

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
Opini BPK		a. belum optimalnya implementasi sistem pengendalian internal, bahkan masih banyak SKPD yang belum memiliki petunjuk teknisnya. b. masih kurangnya tenaga dibidang keuangan yang berkompeten dalam bidang keuangan, ini terbukti dari tingkat pemahaman pegawai/staf tentang pengetahuan dasar keuangan/akuntansi belum memadai. c. kurangnya sarana yang terkait dengan teknologi informasi keuangan, hal ini tergambar Sistem Aplikasi Pengelolaan Keuangan dan Aset termasuk aplikasi pendapatan masih belum terintegrasi seluruhnya sehingga data belum disajikan secara handal.	1. Pengoptimalan rekonsiliasi internal SKPD yang melibatkan semua bidang/unit terkait (PPK-SKPD, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan Pembantu, Verifikator Keuangan, Pengurus Barang, Staf Penyusun Laporan dan Sebagainya) , juga melakukan rekonsiliasi antara SKPD dengan bidang teknis terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kabupaten Balangan secara periodic dan sesuai ketentuan yang telah diatur dalam peraturan bupati balangan tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. 2. Melaksanakan peningkatan kompetensi pejabat pengelola

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			aset dan keuangan melalui Pendidikan dan pelatihan shingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab. 3. Menerapkan penggunaan teknologi informasi yang mendukung penerapan Akuntansi Berbasis Akrual seperti Aplikasi FMIS, SIPD-RI, Sipanda BMD Kabupaten Balangan, Sicaper (Sistem Pencatatan Persediaan), Sistem PBB dan BPHTB serta SP2D Online. 4. Membangun aplikasi pengelolaan kas daerah (Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah) 5. Menyusun Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berdasarkan

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 6. Menyusun dan Menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi yang berlaku.
Nilai EKPPD	a. Kendala yang sering dihadapi dalam penilaian EKPPD adalah ketidaksesuaian data dukung yang disampaikan dengan nilai capaian kinerja atau tidak adanya data dukung yang menguatkan nilai capaian kinerja pelaksanaan urusan, sehingga sebagian besar SKPD hanya menunjukkan surat keterangan untuk menyatakan bahwa indikator kinerja kunci (outcome) pada EKPPD tersebut telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Yang harus diperhatikan, surat keterangan ini cukup berpengaruh dalam penilaian EKPPD, karena nilai yang didapat dengan data dukung hanya surat keterangan tidak dapat maksimal. b. Belum maksimalnya pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing urusan, terutama terkait anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.		1. Adanya komitmen yang baik dari pimpinan OPD pengampu terhadap penyusunan LPPD 2. Pelaksanaan koordinasi dengan OPD dan stakeholder terkait yang berjalan baik dan intensif dalam rangka pengumpulam data dan penyusunan laporan 3. Adanya kegiatan pra evaluasi atau workshop dengan mengundang narasumber Kementrian Dalam Negeri kepada tim Penyusun LPPD

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
Indeks Pelayanan Publik		a. Adanya pembinaan secara menyeluruh terhadap SKPD pemangku pelayanan publik secara umum dan khusunya pada locus penilaian PEKPP. b. rapat koordinasi teknis dengan SKPD locus dengan melibatkan Kementerian PAN RB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Biro Organisasi) sebagai narasumber atau pendamping. c. adanya monitoring tindaklanjut pelayanan public melalui aplikasi elektronik kinerja organisasi atau e-Kino. Monitoring dilakukan secara berkala yakni triwulan. d. Rapat koordinasi teknis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait prioritas penganggaran SKPD locus dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pub lik.	Upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Balangan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan public adalah : a. Melakukan pembinaan secara menyeluurh terhadap SKPD pemangku pelayanan public secara umum dan khususnya pada locus penilaian PEKPP b. Melakukan rapat koordinasi teknis dengan SKPD locus dengan melibatkan Kementerian PAN RB dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Biro Organisasi) sebagai narasumber atau pendamping. c. Melakukan monitoring tindaklanjut pelayanan public melalui aplikasi elektronik kinerja organisasi atau e-Kino. Monitoring dilakukan secara berkala yakni triwulan.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			d. Rapat koordinasi teknis dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah terkait prioritas penganggaran SKPD locus dalam hal pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik.
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		a. SKM dilakukan oleh hampir seluruh SKPD di Pemerintah Kabupaten Balangan baik UPP ataupun non UPP b. kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup terkait pelayanan publik sebagai tindaklanjut UU Nomor 25 Tahun 2009, c. adanya Roadmap Reformasi Birokrasi Pemda Balangan dimana pelayanan publik merupakan salah satu dari 8 area perubahan, d. adanya komitmen SKPD UPP untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, e. adanya kajian pembentukan Mall Pelayanan Publik, f. adanya SOP Pelayanan Publik sebagai turunan dari Proses Bisnis dan	Melaksanakan kegiatan yang menghasilkan beberapa kinerja yakni adanya beberapa kebijakan daerah dalam bentuk Perda dan Perbup terkait pelayanan publik sebagai tindaklanjut UU Nomor 25 Tahun 2009, adanya Roadmap Reformasi Birokrasi Pemda Balangan dimana pelayanan publik merupakan salah satu dari 8 area perubahan, adanya komitmen SKPD UPP untuk melakukan Survey Kepuasan Masyarakat, sebagai bentuk komitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Pada anggaran tahun 2023 ini telah dianggarkan pembangunan Mall

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
		g. adanya komitmen untuk pemenuhan data kepatuhan pelayanan publik dari ombudsman	Pelayanan Publik, adanya SOP Pelayanan Publik sebagai turunan dari Proses Bisnis dan adanya komitmen untuk pemenuhan data kepatuhan pelayanan publik dari ombudsman.
Angka Kemiskinan	a. Terbatasnya lapangan pekerjaan di sektor formal. b. Belum adanya media updating yang mumpuni untuk mengelola data kemiskinan. c. Masih adanya kepala keluarga perempuan tanpa suami yang memerlukan pemberdayaan untuk ekonomi yang mandiri. d. Masih adanya PPKS di Kabupaten Balangan sejumlah 34.256 PPKS. e. Masih adanya rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 810 KK pada Desil 1. f. Tingkat pendidikan yang masih rendah. g. Masih adanya pernikahan dini yang ditandai dengan banyaknya pengajuan dispensasi nikah sehingga menjadi penyumbang angka kemiskinan. h. Harga jual produk pertanian yang masih rendah.		Bertanggung jawab mengintervensinya agar tercipta akselerasi penurunan angka kemiskinan pada tahun kedepan. Sejatinya, intervensi kemiskinan dibutuhkan dengan pola yang holistic, integrative, tematik, dan spasial. Sejatinya, intervensi kemiskinan dibutuhkan dengan pola yang holistic, integrative, tematik, dan spasial. Menilik kembali perkembangan angka kemiskinan daerah cukup baik terjadi dari tahun 2019 di angka 7266 orang menjadi 7074 orang di tahun 2023. Pada level Kalsel, Balangan masih cukup tinggi diperingkat 10 besar dengan angka kemiskinan tertinggi di tahun 2023.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
Angka PPKS yang tertangani	a. Keterbatasan dari Sumber Daya Manusia yang membidangi kesejahteraan sosial sehingga kurang seimbang dengan banyaknya pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial b. Belum optimalnya dalam ketersediaan data dimana lambatnya data yang terbaru tersedia c. Belum berjalan secara optimal dalam kerjasama yang dijalin dengan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten Balangan dalam hal keaktifan dari masing-masing PSKS. d. Kelembagaan yang bergabung dengan urusan lainnya sehingga masih belum optimalnya dalam pelaksanaan penanganan PPKS dikarenakan beban dinas yang besar tidak sebanding dengan dukungan secara materil baik berupa anggaran terutama dalam pemenuhan kegiatan memberikan layanan kepada PPKS yang ada di Kabupaten Balangan. e. Dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial, masih memerlukan layanan kedaruratan berupa kendaraan khusus rehabilitasi sosial dasar diluar panti serta f. Dalam pemenuhan SPM Bidang Sosial, masih memerlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki		Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 tahun 2012 tentang PMKS dan PKSK terdiri dari 26 jenis dan salah satu kriterianya adalah miskin. Kategori miskin untuk PPKS yang dapat diberikan penanganan dan pelayanan kesejahteraan sosial yaitu : 1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar 2. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental 3. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tidak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal, dan terpencil) 4. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia (rendahnya pendidikan dan keterampilan, sakit-sakitan) dan keterbatasan sumberdaya alam

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
	kemampuan atau keahlian dalam memberikan layanan dukungan psikososial setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana baik alam dan sosial.		(tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik dan air 5. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat
Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA		a. Faktor Internal 1. Adanya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan secara aturan. 2. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/72/Kum Tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2023 3. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/70/Kum Tahun 2023 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2023. 4. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/71/Kum Tahun 2023 tentang	1. Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan 2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik 3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi masyarakat 4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya 5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
		Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023. 5. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/69/Kum Tahun 2023 tentang Pembentukan Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2023 6. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/73/Kum Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Pemantauan Orang asing dan Tenaga Kerja Asing Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2023 7. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/414/Kum Tahun 2023 tentang Kepengurusan Forum Kewaspadaan dini Masyarakat Tingkat Kabupaten Balangan Periode Tahun 2023-2024. 8. Keputusan Bupati Balangan Nomor : 188.45/617/Kum Tahun 2023 tentang Kader Pelopor Revolusi Mental	dan fasilitasi penanganan konflik sosial

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
		Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Balangan Tahun 2023 9. Adanya dukungan APBD Murni Tahun 2023 dan APBD Perubahan Tahun 2023. 10. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. b. Faktor Eksternal : 1. Terjalinnya kerjasama yang baik dan berkesinambungan dari instansi vertikal sebagai mitra dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam koordinasinya untuk membantu Pemerintah Daerah menyelesaikan permasalahan potensi konflik yang akan ataupun yang sudah terjadi dalam tahun 2023. 2. Peran serta masyarakat dalam hal lapor cepat kepada Tim Koordinasi Kewaspadaan dan Penanganan Konflik Daerah terhadap permasalahan, baik	

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
		yang menyangkut potensi-potensi permasalahan yang berkembang di lingkungannya sehingga akan menimbulkan konflik yang akan meluas. 3. Terjalinnya koordinasi dan konsultasi yang baik dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan terkait pelaksanaan maupun penyampaian laporan hasil kegiatan tersebut.	
Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum		a. Tata Kelola Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang optimal b. Peran aktif Satuan Perlindungan Masyarakat menuju terwujudnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. c. Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. d. Terjalinnya hubungan yang baik dengan mitra kerja dan instansi lainnya dalam mendukung kinerja instansi.	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam memahami ketentuan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui kegiatan sosialisasi tentang perda dan perkada secara menyeluruh 2. Meiningkatkan dan pengembangan sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan melalui pendiidkan dan pelatihan formal, dan pembinaan fisik dan

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
			mental anggota Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan 3. Melakukan koordinasi secara intensif bersama instansi dan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan untuk mensinergikan Penegakan Perda dan Perkada dengan Instansi Terkait 4. Memberdayakan Anggota Satlinmas desa dan kelurahan sebagai tenaga bantu dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban umum 5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang refresentatif dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
Indeks Resiko Bencana		a. Adanya peraturan perundang – undangan baik yang bersifat nasional maupun daerah (PERDA) yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana (draft Perda PB); b. Dukungan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan; c. Semangat gotong-royong dan kebersamaan masyarakat yang tinggi; d. Antusias aparat desa dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat tanggap darurat bencana; e. Keberhasilan evakuasi bencana didukung dengan adanya alat perlindungan diri yang cukup memadai untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan evakuasi korban; f. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui Program Daerah dan Pusat g. Penambahan dan Peningkatan Kapasitas Personil TRC melalui program internal	1. Melakukan Percepatan regulasi kelembagaan 2. Membangun koordinasi dengan stakeholder terkait melalui FGD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk peningkatan nilai peningkatan nilai indeks kapasitas daerah 3. Membangun koordinasi sinergitas dengan aparat di tingkat desa dalam peningkatan pengetahuan dan kapasitas tentang penanggulangan bencana 4. Memfasilitasi tim reaksi cepat (TRC) BPBD induk dalam peningkatan kapasitas evakuasi korban bencana 5. Melaksanakan simulasi penanggulangan bencana bersama-sama aparat pemerintah daerah maupun masyarakat

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
		BPBD Kabupaten Balangan dan juga BPBD Provinsi	
Persentase Pengembangan Seni dan Budaya		a. Adanya kegiatan belanja pemeliharaan rutin seperti penggajihanjuru pelihara cagar budaya di setiap cagar budaya. b. Adanya penyediaan sarana prasarana cagar budaya. c. Pemerintah daerah selalu melakukan koordinasi cagar budaya ke Provinsi yang mengalami kerusakan yang diluar kewenangannya. d. Adanya kegiatan pembinaan yang masif di berbagai kalangan, baik di sekolah, kelompok seni maupun sanggar kesenian. e. Adanya kegiatan workshop tari dan musik tradisional. f. Adanya kegiatan festival budaya Banua Sanggam yang melibatkan semua kalangan seniman dan budayawan. Kegiatan ini juga menjadi wadah ekspresi bagi mereka baik yang dibina maupun yang tidak, semua	1. Tersedianya organisasi seni dan budaya di Kabupaten Balangan yang jumlah dan minatnya untuk pengembangan kebudayaan semakin meningkat 2. Mengoptimalkan pengembangan seni dan budaya Balangan 3. Peningkatan penyelenggaraan festival seni dan budaya 4. Pemeliharaan fisik cagar budaya

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
		mendapat andil dalam melakukan pelestarian kebudayaan daerah. g. Adanya kegiatan lomba permainan rakyat yang diselenggarakan, baik tingkat pelajar sebagai regenerasi kedepan maupun masyarakat umum.	
Indeks Desa Membangun		a. Adanya dukungan pemerintah pusat yang sangat peduli dan konsentrasi melalui kebijakan penguncuran dana desa secara umum, baik regulasi maupun kebijakan lainnya sehingga dapat mendukung dalam pembangunan desa. b. Adanya kebijakan penempatan tenaga pendamping desa yang berasal dari dana dekonsentrasi seperti Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten (TA KAbupaten), Pendamping Desa Kecamatan (PD), dan Pendamping Lokal Desa. c. Adanya dukungan dan semangat yang tinggi dari jajaran Pemerintah Desa dalam menggerakkan pembangunan di Desa	Diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Indikator	Permasalahan Indikator Tidak Tercapai	Evaluasi Keberhasilan Indikator Melampaui Target	Tindak Lanjut
		dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki.	

Sumber : Evaluasi RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2023

2.5 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.5.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

1. Pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan belum optimal dan merata

Pengembangan infrastruktur perdesaan dan perkotaan ditunjukkan dengan indikator indeks infrastruktur wilayah dan indeks kualitas lingkungan hidup dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya infrastruktur wilayah perdesaan dan perkotaan serta meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Dalam pelaksanaannya sendiri pengembangan infrastruktur saat ini masih harus dimaksimalkan perannya sehingga bisa optimal dan merata guna mendukung pertumbuhan dan penggerak perekonomian daerah. Kondisi saat ini terkait infrastruktur yang perlu terus ditingkatkan diantaranya persentase jaringan jalan dalam kondisi mantap yang masih sebesar 51,10%, presentase prasarana perlengkapan jalan sebesar 64,65%, persentase sarana prasarana terminal yang memadai sebesar 33,33%, persentase sarana prasarana perparkiran yang memadai sebesar 56,55%, persentase panjang infrastruktur pengendali banjir sebesar 19,98%, persentase luas jaringan daerah irigasi permukaaan sebesar 33,28%, persentase pengurangan sampah sebesar 20,37%, persentase sampah yang tertangani sebesar 72,05 %, persentase luasan RTH di Kabupaten Balangan adalah 5,78%.

Konsep pembangunan berkelanjutan juga harus menjadi perhatian bersama guna menciptakan lingkungan yang mampu diwariskan dan berkelanjutan untuk masa depan. Berdasarkan pengukuran pada kualitas lingkungan hidup di Balangan pada tiga aspek air, udara dan lahan hanya kualitas udara yang memiliki kategori sangat baik sementara air dan lahan pada kategori sedang. Permasalahan yang perlu diatasi yaitu kualitas air dimana parameter *Fecal Coli* masih tinggi karena masih banyak masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) ke sungai dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan air sungai serta kualitas lahan yang masih dikategori sedang karena belum ada penambahan lokasi ruang terbuka hijau.

2. Perekonomian berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif yang belum kuat dan berkelanjutan

Peningkatan Perekonomian berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta ekonomi kreatif ditunjukkan dengan indikator angka

pertumbuhan ekonomi dan angka pengangguran terbuka dimana terdapat dua tujuan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menurunnya angka pengangguran terbuka. Dalam pelaksanaannya sendiri pertumbuhan ekonomi Balangan masih sangat ditopang oleh Pertambangan khususnya batu bara dimana kecenderungan terjadi kenaikan peranan komoditas pertambangan dari tahun 2018 sebesar 62,14% naik menjadi 74,52% pada tahun 2022 dan turun menjadi 73.73% pada tahun 2023. Masih tingginya kontribusi sektor pertambangan dan penggalian harus menjadi perhatian mengingat sektor tersebut merupakan sektor yang tidak dapat diperbaharui sumber dayanya. sehingga perlu kebijakan riil terkait transformasi struktur ekonomi ke sektor lain seperti Industri, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata serta Ekonomi Kreatif dalam rangka mempertahankan kinerja perekonomian daerah untuk kedepannya. Kondisi saat ini terkait perekonomian non pertambangan yang perlu terus dibenahi diantaranya persentase kontribusi PDRB sektor pertanian dan perikanan hanya sebesar 7,68%, persentase kontribusi PDRB sektor perdagangan, pengolahan dan jasa sebesar 4,16%, serta persentase kontribusi PDRB sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 0,24%.

Selanjutnya untuk tujuan penurunan angka pengangguran terbuka di Balangan masih perlu kerja keras dan upaya lebih besar walaupun angka pengangguran turun dimana tahun 2022 karena masih berada angka 3,98 sedangkan tahun 2023 menjadi 2,70.

3. Kualitas pendidikan dan kesehatan yang masih belum optimal

Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan ditunjukkan dengan indikator angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah serta usia harapan hidup dimana terdapat satu tujuan yaitu meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang bekualitas. Dalam pelaksanaannya sendiri untuk kualitas pendidikan jika dilihat pada IPM secara umum kualitas pembangunan manusia di Balangan semakin membaik dari tahun ke tahun. Namun jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota se Kalsel Balangan masih berada di urutan ke 9 (Sembilan), naik dibandingkan tahun 2022, adanya perubahan sumber data angka harapan hidup pada tahun 2023 berpengaruh terhadap dinamika peringkat IPM. Pada tahun ini angka rata-rata lama sekolah capaiannya 8,03 naik sekitar 0,18 dari tahun 2022 sedangkan harapan lama sekolah capaiannya 12,82 naik sekitar 0,21 dari tahun 2022. Berdasarkan data

diatas, perlunya peningkatan kualitas pendidikan sehingga IPM Kabupaten Balangan bisa sejajar dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan.

Selanjutnya untuk kualitas kesehatan masyarakat Balangan dalam rangka mewujudkan peningkatan usia harapan hidup secara umum sudah menujukkan taraf kesehatan yang baik, namun terjadi peningkatan AKI, AKB dan ASFR di tahun 2023. Hal-hal yang perlu terus ditingkatkan diantaranya kelengkapan sarana dan parasarana kesehatan serta edukasi khususnya terhadap penanganan dan pengurangan angka kematian ibu dan bayi, Penurunan prevalensi stunting yang lebih massif serta penurunan angka kelahiran remaja yang masih tinggi di Balangan.

4. Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan yang belum optimal

Peningkatan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan diukur dengan indeks reformasi birokrasi dengan tujuan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dibenahi baik dari kualitas SDM aparatur maupun sarana dan prasarana pelayanan publik. Kondisi saat ini menujukkan berdasarkan indikator penyusunnnya hal yang harus dioptimalkan diantaranya nilai SAKIP Pemerintah Balangan pada poin perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Begitu juga dengan nilai EKPPD yang perlu mendapatkan perhatian terutama dalam pemenuhan data dukung terkait capaian kinerja.

5. Perwujudan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif yang belum optimal

Mewujudkan kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif diukur dengan angka kemiskinan, angka konflik sosial bernuansa SARA, indeks ketentaraman dan ketertiban umum, persentase pengembangan seni dan budaya, serta indeks desa membangun dengan dua tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif dan meningkatnya nilai indeks desa membangun. Kondisi saat ini menujukkan berdasarkan untuk tujuan meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif menunjukkan masih perlu kerja keras di berbagai lini diantaranya angka kemiskinan di angka 5,22 poin, serta menurunnya angka PPKS yang tertangani sebesar 59,40%.

Selanjutnya untuk nilai indeks desa membangun dimana indeks komposit yang dibentuk dari 3 (tiga) jenis indeks yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Pada tahun 2023 berjumlah 154 yaitu desa mandiri sejumlah 22, desa maju 103, desa berkembang 28, desa sangat tertinggal 1. Meskipun terjadi peningkatan tentu masih perlu lebih dioptimalkan lagi kedepannya agar indeks desa membangun semakin meningkat.

2.5.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan pada urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat Daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Balangan sebagai berikut :

Tabel 2.165
Permasalahan Pembangunan berdasarkan urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Kabupaten Balangan

URUSAN	PERMASALAHAN
Pendidikan	a. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai berdampak pada angka partisipasi sekolah dan angka partisipasi murni juga angka putus sekolah b. Kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih kurang yaitu kualifikasi pendidikan S1/DIV c. Masih belum tercapainya Standar Pelayanan Minimal bidang Pendidikan d. Belum optimalnya pendidikan kesetaraan dalam melayani masyarakat e. Tingginya angka pernikahan anak f. Masih adanya putus sekolah
Kesehatan	a. Belum optimalnya pelayanan kesehatan dasar sehingga capaian SPM kesehatan belum optimal b. Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masih kurang c. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM dalam memberikan pelayanan kesehatan d. Masih rendahnya cakupan rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) e. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	a. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pengendali banjir dan irigasi b. Belum Optimalnya konektivitas wilayah dan antar wilayah jaringan jalan dan jembatan c. Belum optimalnya bangunan/gedung pemerintah yang sesuai standart

URUSAN	PERMASALAHAN
	d. Belum optimalnya penataan dan pemanfaatan ruang e. Rendahnya penyediaan air minum dan air limbah domestik yang aman f. Belum optimalnya pembinaan penyedia jasa konstruksi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	a. Belum tertatanya bangunan dan lingkungannya b. Belum adanya sistem pengelolaan persampahan c. Belum optimalnya Infrastruktur publik dan perumahan permukiman d. Belum optimalnya proteksi kebakaran dikawasan perumahan
Ketenteraman. Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	a. Belum Optimalnya Sistem dan Budaya Politik yang Demokratis di Daerah
Sosial	a. Belum optimalnya jangkauan pada PPKS yang ada di Kabupaten Balangan b. Belum optimalnya pemanfaatan tenaga pendamping sebagai perpanjangan tangan antara masyarakat dengan dinas sosial dalam rangka mendukung penjangakauan PPKS yang optimal c. Belum optimalnya pembentukan SOP sebagai baku mutu pelayanan dalam penyaluran bantuan
Tenaga Kerja	a. Kurangnya kompetensi tenaga kerja b. Terbatasnya lapangan pekerjaan c. Meningkatnya Angka Pengangguran Terbuka d. Belum optimalnya hubungan kondusif antara pekerja dan pemberi kerja/perusahaan e. Pendidikan angkatan kerja masih rendah f. Rendahnya tingkat kesehatan tenaga kerja
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	a. Belum optimalnya ARG pada beberapa SKPD b. Belum optimalnya kerjasama dengan aparatur desa dalam hal melaporkan adanya pernikahan dini yang tidak tercatat di pengadilan, sehingga berdampak kepada data yang dimiliki merupakan data pernikahan dini yang terlaporkan saja melalui pengadilan agama.
Pangan	a. Rendahnya ketersediaan pangan b. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian c. Belum adanya standarisasi produk dan proses sertifikasi d. Perlunya peningkatan kualitas mutu dan keamanan pangan e. Akses pangan yang tidak merata karena faktor ekonomi (miskin) dan fisik
Pertanahan	Penatagunaan tanah pemerintah daerah yang belum maksimal
Lingkungan Hidup	a. Belum Optimalnya Pengendalian Dan Pelestarian Lingkungan Hidup b. Nilai IKLH yang masih rendah c. Pengelolaan Sampah yang belum Maksimal
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Kualitas SDM petugas pelayanan masih belum memadai;

URUSAN	PERMASALAHAN
	b. Penduduk belum memahami Standar Pelayanan dan SOP pelayanan; c. Sarana dan prasarana yang masih perlu ditingkatkan (komputer , printer dan jaringan serta parkir, ruang pelayanan); d. Belum optimalnya sistem pelayanan daring/online yang dimanfaatkan masyarakat; e. Peraturan baru yang membutuhkan sosialisasi untuk dapat diterapkan; f. Masih rendahnya kesadaran penduduk untuk tertib administrasi kependudukan; g. Masih banyak penduduk yang pengurusan layanan melalui Aparat Desa, enggan mengurus sendiri.
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	a. Belum optimalnya pembinaan terhadap kelembagaan desa b. Kurangnya SDM pengurus kelembagaan desa c. Terbitnya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama sehingga klasifikasi BUMDesa yang sebelumnya hanya 3 klasifikasi yaitu Tumbuh, Berkembang dan Maju berubah menjadi 4 klasifikasi yaitu Perintis, Pemula, Berkembang dan Maju dengan nilai di tiap klasifikasinya yang berubah pula hal ini berdampak pada turunnya klasifikasi BUMDesa-BUMDesa yang ada di Kabupaten Balangan. Selain itu, kurangnya kemampuan SDM dalam mengelola BUMDesa/BUMDesa Bersama menjadikan sulitnya BUMDesa/BUMDesa Bersama di Kabupaten Balangan untuk menjadi lebih berkembang
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	a. Pengaruh perkembangan teknologi informasi yang cepat memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak dan remaja; b. Jumlah Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang masih sedikit; c. Kehadiran fasilitator Remaja INI GENTING masih terbatas; d. Kurangnya informasi pendata dalam menyusun data iBangga; e. Belum optimalnya kader dalam melaksanakan pendataan. f. Terbatasnya metode dan jumlah kegiatan pemberian pengetahuan tentang jumlah anak, pemanfaatan alat dan obat kontrasepsi, sampai dengan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang
Perhubungan	a. Belum optimalnya Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berkualitas b. Rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap moda transportasi c. Rendahnya keselamatan trasnportasi
Komunikasi dan Informatika	a. Belum Optimalnya infrastruktur TIK yang berkualitas b. Rendahnya indeks SPBE Kabupaten Balangan c. Rendahnya indeks keamanan informasi d. Rendahnya SDM tenaga ahli keamanan informasi

URUSAN	PERMASALAHAN
	e. Masih kurangnya jumlah tenaga statistisi f. Masih rendah kualitas SDM Statistisi g. Belum oftimalnya sarana dan prasarana penunjang h. Masih banyak SKPD yang belum informatif dalam pelaksanaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi Publik) i. Tidak optimal pengelolaan KIM (Kelompok Informasi Masyarakat)
Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah	a. Belum optimalnya Produktifitas Koperasi dan Usaha Mikro b. Masih Rendahnya Peran Sektor Koperasi dan Usaha Mikro terhadap PDRB c. Belum optimalnya branding dan pemasaran produk Usaha Mikro d. Sebagian pelaku Usaha mikro masih terkendala permodalan untuk pengembangan usaha e. Kurangnya keterampilan pelaku koperasi dan UKM dalam manajemen keuangan, Pemasaran dan Sumber daya manusia f. Kebanyakan koperasi di Balangan masih berfokus pada Usaha Simpan Pinjam
Penanaman Modal	a. Belum optimalnya iklim investasi di Kabupaten Balangan (karna masih didominasi sektor pertambangan)
Kepemudaan dan Olah Raga	a. Belum efektifnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada Induk Organisasi Keolahragan. Peranan Induk Organisasi Keolahragaan ini mempunyai kedudukan yang strategis sebagai ujung tombak pemerintah dalam membantu melakukan pola-pola pembinaan untuk mencapai olahraga. Pembentukan dilakukan dengan restrukturisasi organisasi, baik untuk organisasi oalahraga prestasi (KONI), olahraga masyarakat (FORMI) dan olahraga pendidikan/pelajar (BAPOPSI). Hal tersebut berdasarkan amanat undang-undang Republik Indonesia Nomer: 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Pasal 40 bahwa Pengurus Komite Olahraga Nasioanal, Komite Olahraga Provinsi, dan Komite Olahraga Kabupaten/Kota Bersifat Mandiri dan tidak terikat dengan jabatan struktural dan jabatan publik. b. Belum adanya sarana dan prasarana olahraaga (Sport Center) yang berskala Nasional untuk wadah para Atlet di Kab. Balangan dalam menghadapi Kejuaraan di Tingkat Nasional
Kebudayaan	a. Minimnya penyelenggaraan festival kesenian b. Belum optimalnya perawatan dan pemeliharaan cagar budaya c. Kurang optimalnya pengembangan seni dan budaya Balangan d. Belum Optimalnya minat membaca masyarakat

URUSAN	PERMASALAHAN
Perpustakaan	a. Kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan seperti perpustakaan desa yang masih minim b. Masih sedikitnya koleksi buku yang ada diperpustakaan daerah dan perpustakaan desa c. Kurangnya armada mobil perpustakaan keliling d. Letak perpustakaan daerah kabupaten tidak strategis karena tidak berada diwilayah perkotaan e. Tidak ada tenaga pustakawa dan tenaga teknis yang memiliki sertifikasi
Kearsipan	a. Belum optimalnya pengelolaan arsip dinamis, arsip aktif, dan arsip inaktif karena adanya mutasi pejabat kersipan disetiap bidang b. Belum optimal memahami tentang kearsipan yang sesuai dengan standar c. Belum optimalnya SDM kearsipan sebagai arsiparis yang bersertifikasi di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan maupun disetiap OPD d. Minimnya sarana dan prasarana salah satu diantaranya tidak adanya depo arsip daerah yang sesuai standar ANRI
Pariwisata	a. Belum optimal nya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB, hal ini dikarenakan belum adanya Akomodasi Hotel Berbintang untuk menginap para pengunjung wisata maupun pelaku usaha yang berkunjung ke Kabupaten Balangan, b. Destinasi wisata yang belum maksimal pengelolaannya c. Belum adanya Perbup Retriusi di Objek Wisata
Perikanan	d. Belum optimalnya pertumbuhan PDB Perikanan e. Belum optimalnya produksi dan produktifitas perikanan f. Belum optimalnya industri pengolahan hasil perikanan g. Belum optimalnya pengendalian Hama Penyakit Ikan (HPI) h. Belum optimalnya pengawasan kegiatan ilegal fishing dan kawasan lestari i. Rendahnya kesadaran petani terkait administrasi kelompok dan izin berusaha
Pertanian	a. Belum optimalnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB b. Belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas c. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani d. Belum optimalnya pengendalian OPT e. Belum optimalnya kelembagaan petani f. Dampak perubahan iklim terhadap pola tanam, potensi produksi, serangan OPT dan ketersediaan air. g. Skala usaha pertanian yang didominasi oleh usahatani kecil disertai laju konversi lahan yang cukup tinggi. h. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang belum merata.

URUSAN	PERMASALAHAN
	i. Inovasi dan diseminasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan adaptasi tanaman belum dilaksanakan secara massif j. Regenerasi petani berjalan lambat / minat petani milenial terhadap usaha pertanian sangat kurang k. Pola Pikir petani yang selalu tergantung dengan bantuan dari Pemerintah l. Masih rendahnya Pendapatan Asli Daerah dari hasil Pertanian m. Belum optimalnya keterpaduan antar sektor atau koordinasi serta sinergi antar sektor.
Perdagangan	a. Terbatasnya Pelaku Usaha yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar. b. Belum optimalnya penataan dan Pengelolaan Pasar Tradisional. c. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. d. Belum adanya regulasi tentang Penataan Pedagang kaki lima dan asongan. e. Belum maksimalnya penataan dan pembinaan pedagang. f. Belum maksimalnya pemasaran produk dan komoditi unggulan.
Perindustrian	a. Belum adanya perusahaan besar yang bergerak dalam sektor industri b. Belum optimalnya upaya komunikasi untuk menarik para investor c. Belum adanya kerjasama antara perusahaan besar/industri menengah-besar dengan industri kecil dalam menjalankan pro ses produksinya
Transmigrasi	Kurangnya pelatihan atau peningkatan SDM untuk pengembangan produktivitas pada pengolahan lahan dan pengembangan perekonomian sehingga kesadaran dalam pengelolaan bantuan yang telah diberi oleh pemerintah daerah atau pun provinsi belum maksimal untuk di kelola oleh warga transmigrasi.

Sumber : Seluruh SKPD Kabupaten Balangan, 2024

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah terdiri arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah. Kebijakan ekonomi daerah digunakan untuk menggambarkan hubungan antara tujuan utama pembangunan daerah dengan capaian indikator makro ekonomi daerah dan bagaimana antar komponen saling mempengaruhi.

Arah kebijakan keuangan daerah berisikan uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Tujuannya untuk meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisienkan penggunaannya

3.1. Kebijakan Ekonomi Daerah

a. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dirumuskan tidak lepas dari melihat pencapaian pembangunan ekonomi dan evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya serta prospek dan tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Hal ini karena setiap negara terhubung untuk melakukan perdagangan global di mana antara satu negara dan negara lain saling terhubung yang biasa disebut merupakan rantai pasok. Secara luas untuk suatu negara, rantai pasok adalah dimana satu negara mendapat pasokan perekonomian dari negara lain dan negara tersebut memberikan pasokan ke negara lain. Ketika ada satu negara bermasalah, maka jaringan pasokan tersebut terganggu dan membuat dampak ke negara lain yang saling terhubung. Sedangkan dalam lingkup mikro, rantai pasok, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai supply chain, merujuk pada serangkaian proses bisnis yang menghubungkan beberapa aktor untuk peningkatan nilai tambah bahan baku/produk dan mendistribusikannya kepada konsumen. Tujuan utama dari rantai pasok adalah peningkatan nilai tambah, memenuhi permintaan konsumen, peningkatan daya saing, peningkatan keuntungan, dan membangun relasi yang baik antar aktor dalam rantai pasok. Rantai pasok melibatkan sejumlah kegiatan, termasuk perencanaan, pengadaan, produksi, pengelolaan gudang, distribusi, dan manajemen aliran informasi. Hal ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga konsumen, dan melibatkan integrasi

aktivitas pengadaan bahan, pengubahan menjadi barang jadi, serta pengiriman ke pelanggan.

3.1.1 Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Balangan Tahun 2023

Kondisi pembangunan ekonomi daerah Balangan membahas gambaran mengenai capaian kerangka ekonomi makro daerah tahun – tahun sebelumnya beserta proyeksinya untuk tahun 2023 dan 2024. Gambaran kerangka ekonomi makro daerah ini terdiri atas Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Kemiskinan diuraikan sebagai berikut.

3.1.1.1 Produksi Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pada Sub Bab ini disampaikan PDRB pada Tahun 2023 selama empat tahun yaitu Tahun 2020, 2021, 2022, dan 2023. PDRB tersebut antara lain berdasarkan harga konstan, harga berlaku, lapangan usaha, dan pengeluaran.

Secara umum, PDRB Balangan pada Tahun 2023 adalah senilai Rp. 20.876,19 Milyar rupiah, atas dasar harga berlaku (ADHB) dan senilai Rp. 10.390,60 Milyar rupiah atas dasar harga konstan (ADHK). Pada PDRB ini, ada beberapa hal yang dapat disoroti sebagai berikut.

1. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga lapangan usaha dengan share terbesar dari PDRB Kabupaten Balangan secara berurutan adalah sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, serta sektor Perdagangan Besar dan Eceran.
2. Berdasarkan harga berlaku tersebut, dapat juga disoroti bahwa nilai produk sektor Pertambangan dan Penggalian tumbuh sangat signifikan, demikian juga dengan share-nya.
3. Berdasarkan harga berlaku, maka tiga jenis komponen pengeluaran dengan share terbesar dari PDRB Kalimantan Selatan secara berurutan adalah sektor Ekspor, sektor Konsumsi Rumah Tangga, dan sektor Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto).
4. Tingginya nilai share ekspor sangat berkaitan dengan lapangan usaha sektor Pertambangan dan Penggalian serta sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Rincian PDRB menurut lapangan usaha disampaikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
PDRB Balangan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Balangan (Milyar Rupiah), 2020-2023

Keterangan	Atas Dasar Harga Berlaku				Atas Dasar Harga Konstan			
Lapangan Usaha	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.311,57	1.406,44	1.474,32	1.603,24	991,90	1.027,02	1.030,66	1.071,80
Pertambangan dan Penggalian	6.317,13	7.581,21	14.562,33	15.391,23	6.143,65	6.379,57	6.774,16	7.019,43
Industri Pengolahan	212,25	231,37	252,75	262,89	140,77	146,76	153,47	158,90
Pengadaan Listrik dan Gas	4,42	4,48	5,09	5,53	2,55	2,65	2,85	3,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	30,15	30,50	31,90	33,96	21,27	21,38	22,03	22,68
Konstruksi	501,84	525,05	582,78	643,20	339,68	342,18	356,72	382,85
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	640,39	671,41	751,05	867,76	407,92	412,95	435,79	464,84
Transportasi dan Pergudangan	216,77	221,15	249,09	300,28	145,31	147,55	156,52	166,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	40,27	41,73	45,07	49,51	27,28	27,64	29,15	31,80
Informasi dan Komunikasi	157,48	165,84	178,87	191,97	122,32	128,69	135,69	143,44
Jasa Keuangan dan Asuransi	40,66	40,79	44,93	48,59	26,94	25,86	26,27	27,95
Real Estate	115,76	121,72	127,58	137,87	83,42	86,25	89,43	94,38
Jasa Perusahaan	8,68	9,12	10,19	11,62	5,28	5,51	5,91	6,41
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	551,73	545,47	572,28	627,29	340,48	331,63	341,82	360,56
Jasa Pendidikan	396,31	416,00	445,99	474,10	265,57	271,28	286,14	299,85
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	110,86	122,26	132,09	144,46	72,28	78,70	83,75	88,88
Jasa Lainnya	65,42	66,85	74,07	82,69	41,26	41,69	44,30	47,04
Total	10.722,30	12.201,61	19.540,39	20.876,19	9.177,87	9.477,29	9.974,65	10.390,60

Sumber: Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun, 2024

Tabel 3.2
PDRB Balangan Menurut Pengeluaran (Milyar Rupiah)

	Atas Dasar Harga Berlaku				Atas Dasar Harga Konstan			
Lapangan Usaha	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2.503,01	2.584,69	2.948,93	3.236,01	1.761,02	1.776,38	1.874,40	1.972,51
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	109,74	113,21	121,53	139,32	70,41	70,91	73,07	79,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.118,07	1.125,20	1.200,12	1.315,44	682,59	659,08	673,46	723,75
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	2.451,22	2.516,05	2.809,28	3.088,17	1.614,79	1.619,72	1.705,82	1.793,84
Perubahan Inventori	1,97	2,66	-26,26	27,30	1,46	1,90	(16,65)	16,70
Ekspor Barang dan Jasa	4.538,29	5.859,80	12.486,79	13.124,55	5.047,60	5.349,29	5.664,54	5.837,90
Total	**10,722,30**	**12.201,61**	**19.540,39**	**20.876,19**	**9.177,87**	**9.477,29**	**9.974,65**	**10.390,60**

Sumber: Kabupaten Balangan Dalam Angka Tahun, 2024

Sama hal nya dengan PDRB, selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023, PDRB ADHK Perkapita terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 ke 2023, PDRB ADHK Perkapita yakni dari Rp. 74,39 juta menjadi Rp. 76,34 juta.

Tabel 3.3
PDRB Kabupaten Balangan 2019 – 2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB (Rp. milyar)	11.027,66	10,722,30	12.361,61	19.847,84	20.876,19
PDRB ADHK (Rp. milyar)	9.409,83	9.177,87	9.477,29	9.974,65	10.390,60
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,16	-2,47	3,27	5,24	4,17
Jumlah Penduduk (orang)	129.956	129,89	132,01	134.08	136,12
PDRB ADHK Perkapita (Rp. juta)	72,41	70,66	71,80	74,39	76,34
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Perkapita (%)	2,66	2,28	1,61	3,61	2,61

Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha, 2019-2023

3.1.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Tantangan dan prospek perekonomian dapat bervariasi tergantung pada konteksnya. Beberapa tantangan umum yang dihadapi oleh perekonomian termasuk perlambatan pertumbuhan, inflasi, ketidakpastian politik, dan perubahan iklim. Sementara itu, prospek perekonomian mencakup berbagai faktor seperti pertumbuhan ekonomi, investasi, dan kebijakan fiskal. Untuk Indonesia, beberapa tantangan yang dihadapi termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan ketidakpastian politik terkait Pemilu, sementara prospeknya mencakup langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dalam pengelolaan ekonomi sektor publik, terdapat tantangan seperti ketidakseimbangan anggaran, perubahan iklim, dan pengaturan kebijakan, sementara peluangnya meliputi pembangunan berkelanjutan, penguatan sumber daya manusia, dan kemitraan publik-swasta.

Tantangan dan prospek perekonomian sangat bergantung pada kondisi ekonomi, baik secara global maupun domestik, dan memerlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Tantangan yang dihadapi perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dan Kabupaten Balangan secara khusus pada tahun 2023 antara lain adalah potensi

peningkatan tekanan inflasi, penurunan persepsi investor di tengah ketidakpastian kondisi global, dan pengendalian inflasi khususnya bahan pangan. Selain itu, terdapat upaya untuk mendorong hilirisasi sumber daya alam dan diversifikasi dan intensifikasi pertanian selain itu juga terus memantapkan APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya tahun 2024 diprakirakan tetap tumbuh positif dengan adanya kegiatan pemilu serentak untuk Presiden, DPR, DPRD, dan DPD pada awal tahun 2024 serta pemilihan Kepala Daerah serentah pada akhir tahun 2024. Meskipun pada tahun 2023 melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan eksternal. Di sisi penawaran, perlambatan pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh penurunan kinerja LU Pertambangan dan LU PHR. Hal tersebut sejalan dengan pertumbuhan produksi batu bara yang diprakirakan lebih rendah seiring dengan perlambatan perekonomian negara mitra dagang utama. Di sisi permintaan, perlambatan ekonomi didorong oleh kinerja net ekspor yang lebih rendah. Hal tersebut sejalan dengan harga komoditas global yang terus menurun. Selain itu, impor juga diprakirakan melambat seiring dengan penurunan impor barang modal seperti alat berat dan kapal.

Pada saat ini per April 2024, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS terus mengalami pelemahan. Jika nilai tukar rupiah melemah, ada beberapa dampak yang dapat terjadi:

1) Kenaikan biaya impor : Pelemahan rupiah akan menyebabkan kenaikan biaya impor, yang akan berimbas pada harga barang impor yang lebih mahal. Hal ini akan mempengaruhi konsumen karena ada kenaikan harga.
2) Mengancam obligasi dan Surat Utang Negara (SUN) : Melemahnya nilai tukar rupiah akan mendorong investor untuk menjual obligasi dan SUN, yang akan menyebabkan harga keduanya bisa menurun drastis .
3) Kenaikan suku bunga acuan : Melemahnya nilai tukar rupiah akan mendorong percepatan kenaikan suku bunga acuan, yang akan menahan aliran modal keluar. Namun, adanya kenaikan suku bunga acuan ini menjadi dilema karena jika ada kenaikan, akan berimbas pada pinjaman, seperti cicilan KPR dan kendaraan bermotor, yang akan lebih mahal.
4) Inflasi domestik atau imported inflation : Pelemahan rupiah akan berdampak terhadap potensi kenaikan inflasi domestik atau imported inflation, yang akan mempengaruhi harga barang dalam negeri.

5) Kenaikan harga barang impor: Jika pelaku usaha masih bisa memperkecil margin keuntungan tanpa harus menaikkan harga, dampak kemasyarakat relatif. Namun, jika ternyata kenaikkan nilai atau harga barang impor sangat tinggi dan memaksa para pelaku usaha yang melakukan impor tidak mengikuti, maka dampak kemasyarakat akan lebih besar
6) Stabilitas kurs dalam jangka pendek : Pelemahan nilai tukar rupiah akan menjadi momen yang tepat bagi investasi ekspor, seperti kerajinan tangan, yang bisa menembus pasar internasional.
7) Peningkatan penggunaan transportasi publik : Penggunaan transportasi publik sangat efektif untuk menghemat pemakaian BBM, yang akan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah BBM yang harus diimpor.
8) Meningkatkan stabilitas kurs : Pemerintah dapat mengurangi keinginan untuk jalan-jalan ke luar negeri serta mendorong pengembangan sektor pariwisata dalam negeri, yang akan mempercepat penerimaan devisa dan mendorong stabilitas kurs dalam jangka pendek.

Tabel 3. 4
Asumsi Asumsi Perekonomian Kabupaten Balangan Tahun 2024

KETERANGAN	ASUMSI-ASUMSI
	TAHUN 2024
Pertanian	Produksi padi diperkirakan lebih baik pascaserangan hama tungro. Peningkatan nilai jual harga karet dan hortikultara yang stabil
Pertambangan	Produksi batubara diperkirakan meningkat sejalan dengan membaiknya permintaan negara mitra dagang utama dan penyerapan domestik yang lebih baik
Industri Pengolahan	Produksi olahan dan rumah tangga dan UKM yang meningkat.
Kontruksi	Berlanjutnya proyek konstruksi Pemerintah seperti jalan, jembatan dan bendungan serta fasilitas umum dan perkantoran.
Hotel dan Reklame	Aktivitas perdagangan lebih kuat seiring dengan perkiraan membaiknya perekonomian global dan domestik setelah ketidakpastiaan global di tahun 2023.
Konsumsi Rumah Tangga	Peningkatan daya beli masyarakat sejalan dengan membaiknya perekonomian global dan domestik serta penurunan risiko dari ketidakpastian global
Konsumsi Pemerintah	Peningkatan belanja operasional Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.
Investasi	Alokasi belanja modal yang meningkat untuk mendukung proyek konstruksi Pemerintah. Selain itu, investasi swasta diprakirakan meningkat sejalan membaiknya risiko investasi.

KETERANGAN	ASUMSI-ASUMSI
	TAHUN 2024
Ekspor	Kinerja ekspor diperkirakan membaik sejalan dengan perekonomian global yang diprakirakan kembali pulih serta meingkatnya kinerja ekspor batubara dan karet alam.
Impor	Kinerja impor diperkirakan lebih kuat sejalan dengan membaiknya konsumsi Rumah Tangga dan berpotensi mendorong impor barang konsumsi, bahan baku industri, dan barang modal.

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya tahun 2024 diperkirakan akan menjadi lebih baik dibandingkan tahun 2024, dengan kinerja lapangan usaha utama yang lebih baik dan pertumbuhan konsumsi masyarakat yang menjadi faktor pendorong perekonomian setempat. Pertumbuhan ekonomi global juga diprakirakan akan mencapai titik terendah tahun ini sebelum naik secara moderat menjadi pada tahun 2026. Tetapi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti gangguan ekonomi yang disebabkan oleh geopolitik dan pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang juga terindikasi mengalami pertumbuhan yang kuat.

Prospek perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khususnya pada tahun 2025 antara lain :

- Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khsuusnya pada tahun 2025 diprakirakan akan tumbuh positif dibandingkan tahun 2024.
- Kinerja lapangan usaha utama dan pertumbuhan konsumsi masyarakat menjadi faktor pendorong perekonomian setempat.
- Pembiayaan daerah, serta pengembangan akses keuangan dan UMKM intermediasi perbankan Provinsi Kalimantan Selatan pada umumnya dan Kabupaten Balangan pada khsuusnya pada tahun 2025 tetap tumbuh dan berada pada level yang terjaga.

Tantangan perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2025 antara lain:

- Gangguan ekonomi yang disebabkan oleh geopolitik mulai mereda.
- Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang yang juga terindikasi mengalami pertumbuhan yang kuat.

Untuk mengatasi tantangan perekonomian Kabupaten Balangan pada khsuusnya pada tahun 2025, perlu dilakukan strategi pengembangan ekonomi yang lebih berkelanjutan, seperti peningkatan infrastruktur, pengembangan industri pengolahan dan jasa, dan peningkatan keterampilan masyarakat.

3.1.1.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan gambaran terkait bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Report (HDR) merupakan ukuran untuk melihat kualitas dan dampak kinerja pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life); (2) Pengetahuan (knowledge); (3) Standar hidup layak (decent standard of living). Angka IPM suatu daerah mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses hasil pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan standar kehidupan yang layak.

Komponen dasar kualitas hidup yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi:

a) Umur Panjang dan Sehat: Diukur dengan harapan hidup saat lahir. Hal ini mencerminkan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.

b) Pengetahuan: Diwakili oleh rata-rata tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk dewasa dan ekspektasi tahun-tahun sekolah bagi anak-anak yang masih bersekolah. Hal ini mencerminkan akses dan partisipasi dalam pendidikan.

c) Kehidupan Layak: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Hal ini mencerminkan standar hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar.

d) Ketiga komponen ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat pembangunan manusia di berbagai negara.

Perkembangan capaian IPM Kabupaten Balangan selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang semakin meningkat. Pada tahun 2019 angka IPM Kabupaten Balangan sebesar 68,39 dan terus meningkat menjadi 72,97 pada tahun 2023, meskipun angkanya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan namun sudah berada pada dikategori tinggi. Secara umum, perkembangan angka ini menggambarkan kualitas pembangunan manusia yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Balangan menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Balangan telah berusaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Balangan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target IPM Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 5
Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Balangan

Proyeksi / Target	2024	2025
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	70,61	74,33
Harapan Lama Sekoah (Tahun)	12,98	13,17-13,87
Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,63	8,37-9,05
Pengeluaran Per Kapita (juta)	12,088	75,15
Umur Harapan Hidup (Tahun)	73,69	74,19-74,26

Berdasarkan tabel diatas, Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Balangan diupayakan mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2024 hingga 2025. yang mana IPM naik dari 70,61 menjadi 74,33. Harapan lama sekolah meningkat dari 12,98 tahun pada tahun 2024 menjadi antara 13,17- 13,87 pada tahun 2025. Rata-rata lama sekolah dari 8,63 tahun menjadi antara 8,37- 9,05 tahun. Pengeluaran per kapita juga diproyeksikan meningkat dari 12,088 juta menjadi 75,15 juta. Umur harapan hidup naik dari 73,69 tahun menjadi antara 74,19 - 74,26 tahun. Data ini menunjukkan tren positif dalam berbagai aspek pembangunan manusia di Kabupaten Balangan yang mencakup pendidikan, kesehatan, dan standar hidup.

3.1.1.4 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu yang melibatkan aspek multidimensi yang tidak hanya disebabkan oleh masalah sosial saja. Kemiskinan merupakan bagaimana individu atau keluarga tidak mendapat kemudahan mengakses berbagai layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat berteduh yang layak, dan ketahanan pangan. Keluarga maupun individu miskin yang tidak mendapatkan bangku sekolah akan sulit mengembangkan kemampuannya dan bersaing di dunia kerja. Ibu hamil dan menyusui yang berada dalam kondisi miskin juga rawan tidak mendapatkan asupan yang cukup sehingga berpeluang memiliki anak stunting. Keluarga maupun individu yang miskin, apabila tidak memiliki ketahanan pangan akan berada pada kondisi kurang gizi, dan kelaparan. Sehingga elemen-elemen tersebut perlu melibatkan tidak hanya pemerintah daerah, kolaborasi dengan swasta, Forkopimda, dunia usaha, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat.

Indikator makro kemiskinan terdapat 3 indikator dalam mengukur kemiskinan suatu wiayah yaitu P0 merupakan persentase penduduk miskin terhadap total

penduduk; P1 Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan; P2 Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan indeks ketimpangan pengeluaran semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kinerja pemerintah Kabupaten Balangan dalam menekan angka kemiskinan berada dalam kondisi fluktuatif. Pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin menyentuh angka 7.266 dan menurun pada tahun 2020 menjadi 7.064, namun pada tahun 2021 meningkat cukup tajam sebanyak 8.062 sebagai dampak pandemic covid 19. Dampak pandemic covid 19 yang menyebabkan lesunya ekonomi, rendahnya daya beli dan minimalnya pergerakan masyarakat berdampak kepada penambahan penduduk miskin. Tahun 2022 angka kemiskinan mengalami penurunan meskipun belum signifikan yaitu 7.852 atau sebanyak 210 jiwa bisa keluar dari garis kemiskinan.

Pada tahun 2023 kembali terjadi penurunan pada jumlah penduduk miskin sebanyak 7.074 atau sebanyak 778 jiwa bisa graduasi dari garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin yang fluktuatif inline terhadap persentase penduduk miskin. Pada tahun 2023 persentase penurunan penduduk miskin di Kabupaten Balangan mengalami percepatan yang cukup tinggi yaitu 0,61% penurunan. Upaya bersama pemerintah daerah Kabupaten Balangan tidak lepas dari program prioritas daerah dalam berbagai aspek yaitu bedah rumah yang melibatkan organisasi (Baznas), Forkopimda, dan OPD. Salah satunya dari Dinas PUPR Perkim yang hingga akhir 2023 menargetkan 500 rumah dibedah, Dinas Sosial sebanyak 15 rumah berasal dari APBD II dan empat rumah bersumber dari APBD I, Polres Balangan pada tahun 2023 juga merehab 10 buah rumah dengan sasaran keluarga miskin ekstrem. Sektor ekonomi juga terdapat terobosan dari Bupati Balangan yaitu program Sanggam Babungas dan Sanggam Bakabun yang bekerjasama dengan bank daerah guna mendorong kredit usaha yang mudah dan murah. Mempertimbangkan hal tersebut maka Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Proyeksi/Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Balangan tahun 2024-2025

Proyeksi/Target	2024	2025
Persentase Penduduk Miskin (P0)	5,1	4,23 - 4,62

Berdasarkan tabel diatas, Proyeksi/Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Kabupaten Balangan tahun 2024-2025, terdapat penurunan yang signifikan. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin diproyeksikan sebesar 5,1%. Pada tahun 2025, angka ini menurun menjadi antara 4,23% - 4,62%. Proyeksi ini menunjukkan upaya yang menyeluruh dalam mengurangi kemiskinan di Kabupaten Balangan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode tersebut.

3.1.1.5 Rasio Gini

Penilaian kinerja ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari sejauh mana tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita penduduk, akan tetapi pemerataan distribusi pendapatan daerah harus menjadi fokus utama dalam melihat tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Ketimpangan distribusi pendapatan antar penduduk yang tinggi dapat menimbulkan masalah-masalah sosial di masyarakat. Indeks gini dipengaruhi berbagai hal yaitu jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, IPM, tenaga kerja dan pertumbuhan investasi.

Koefisien gini (gini ratio) merupakan salah satu ukuran yang sering digunakan untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di masyarakat. Nilai gini ratio berkisar antara dari 0 sampai dengan 1, klasifikasi ketimpangan berdasarkan gini ratio dibagi menjadi 3 bagian, gini ratio antara 0,5 atau lebih termasuk ke dalam ketimpangan tinggi, nilai gini ratio antara 0,40-0,49 termasuk kategori ketimpangan sedang, dan nilai gini ratio kurang dari 0,40 termasuk ketimpangan rendah.

Nilai koefisien gini rasio Kabupaten Balangan pada tahun 2023 adalah 0,258 yang berarti ketimpangan pendapatan di wilayah Balangan dapat digolongkan dalam kelompok ketimpangan rendah dan bisa dikatakan merata. Dinamika angka gini rasio mengindikasikan adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini rasio juga digunakan untuk melihat apakah pemerataan pengeluaran penduduk semakin baik atau buruk. Dibandingkan tahun lalu, gini rasio Kabupaten Balangan mengalami penurunan dari 0,266 pada tahun 2022 menjadi 0,258 pada tahun 2023. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Rasio Gini Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.7
Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2024 -2025

Proyeksi/Target	2024	2025
Rasio Gini	0,266	0,194 – 0,262

Berdasarkan tabel diatas, Proyeksi/Target Rasio Gini Kabupaten Balangan Tahun 2024-2025, Rasio Gini Kabupaten Balangan diupayakan mengalami penurunan. Pada tahun 2024, Rasio Gini diproyeksikan sebesar 0,266. Pada tahun 2025, turun menjadi antara 0,194 - 0,262. Proyeksi ini menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi Kabupaten Balangan semakin berkurang, menandakan adanya peningkatan kesetaraan pendapatan di wilayah tersebut selama periode tersebut.

Tabel 3.8
Proyeksi Indikator Makro Kabupaten Balangan Tahun 2024-2025

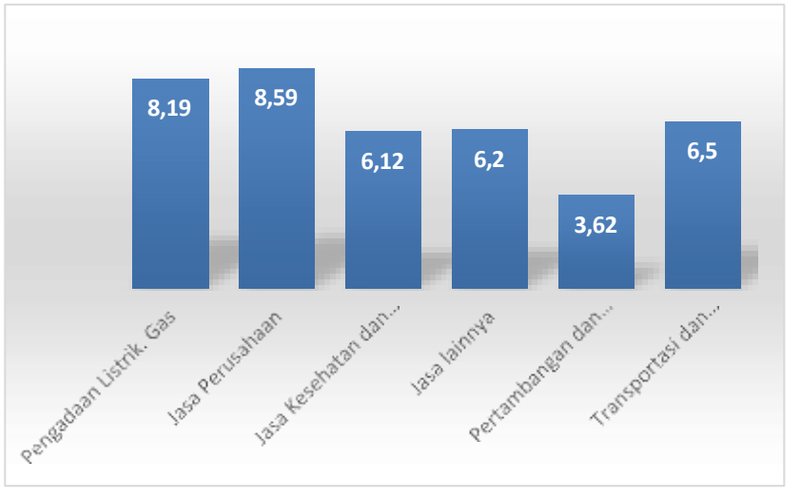
No.	Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kabupaten tahun 2024	Target Capaian Kabupaten Tahun 2025
1	2	3	4	5
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,61	74,33
2	Angka Kemiskinan	Angka	5,1	4,23 - 4,62
3	Angka Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,17 – 2,37	1,84-2,67
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	5,4 - 6	4,22 - 5,01
5	Indeks Gini	Indeks	0,266	0,194 - 0,262
6	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,48	72,1

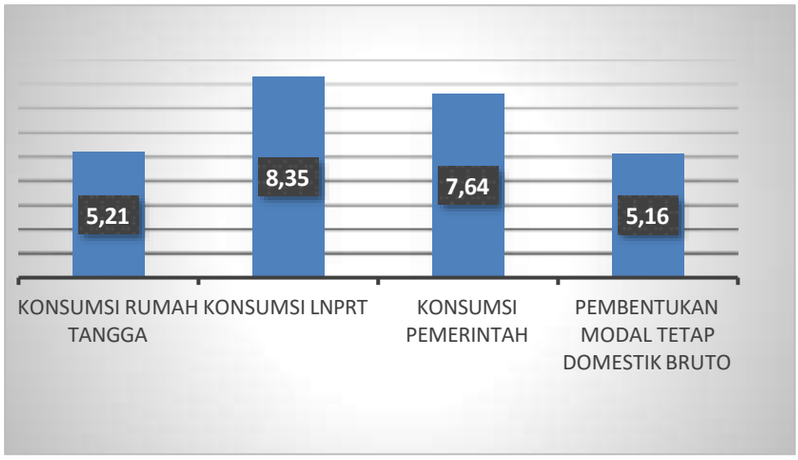
3.2. Perkembangan Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Balangan

Perubahan struktur ekonomi sering dijadikan sebagai salah satu sinyal untuk mengetahui ke arah mana pembangunan berlangsung dalam periode waktu tertentu. Kondisi tersebut disandarkan pada kekuatan efisiensi dan eksploitasi sumber daya yang terjadi. Saat suatu lapangan usaha mampu menciptakan efisiensi yang lebih tinggi, maka lapangan usaha tersebut akan tumbuh lebih cepat dalam memproduksi barang dan jasa dibandingkan dengan lapangan usaha lain yang belum mampu berkinerja secara efisien. Implikasinya, kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang lebih cepat tersebut akan meningkatkan pangsa lapangan usahanya dan menyusutkan pangsa lapangan usaha lain dalam memproduksi barang dan jasa.

Gambar 3.1

LPE Kab. Balangan Menurut Lapangan Usaha dan Komponen Pengeluaran Pada Tahun 2023

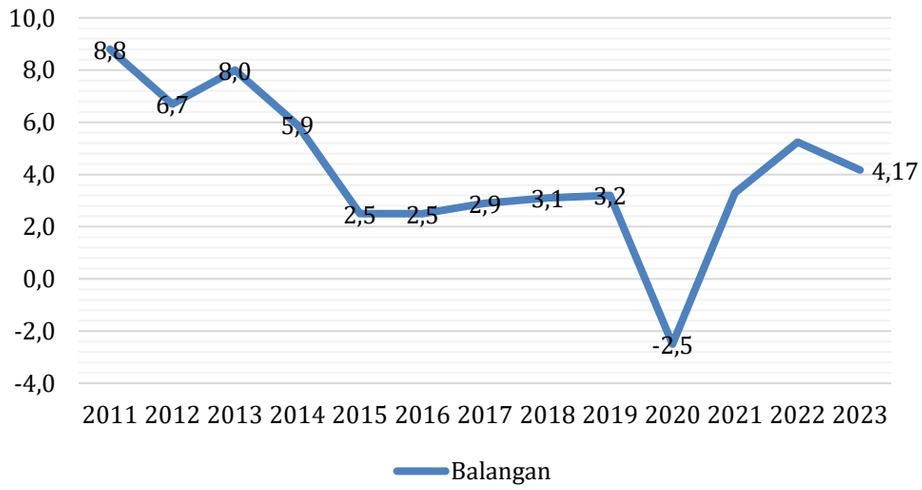




Sumber : Balangan Dalam Angka, 2024

Adapun fluktuasi LPE di Kabupaten Balangan pada periode 2011 – 2023 dijelaskan pada Gambar 3.2 berikut.

Gambar 3.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) Kabupaten Balangan Tahun 2011 - 2023



Tabel 3.9
LPE Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran	LPE (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Konsumsi Rumah tangga	4,76	-0,37	1,21	5,39	5,21
Konsumsi LNPRT	7,70	-3,97	0,72	3,04	8,35
Konsumsi Pemerintah	3,32	-0,85	-3,19	1,75	7,64
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,52	-1,34	0,30	5,32	5,16
Perubahan Inventori	-61,20	-95,20	30,14	-976,32	-
Ekspor Barang dan Jasa	2,83	-3,18	5,98	5,89	-
Laju Pertumbuhan	**3,16**	**-2,47**	**3,26**	**5,25**	**4,17**

Sumber : Balangan Dalam Angka, 2023

Tabel 3.10
LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2019–2023 Menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,05	-1,80	3,54	0,35	3,99
Pertambangan dan Penggalian	2,59	-3,74	3,84	6,19	3,62
Industri Pengolahan	2,23	-2,75	4,26	4,57	3,54

Komponen Lapangan Usaha	LPE (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Pengadaan Listrik. Gas	4,70	4,08	3,92	7,55	8,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,62	6,08	0,52	3,04	2,94
Konstruksi	2,30	-0,09	0,74	4,25	7,33
Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,01	-1,10	1,23	5,53	6,67
Transportasi dan Pergudangan	5,01	-2,20	1,54	6,08	6,50
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,47	-0,26	1,32	5,46	9,11
Informasi dan Komunikasi	3,84	6,75	5,21	5,44	5,71
Jasa Keuangan	7,96	4,50	-4,01	1,59	6,38
Real Estate	2,86	2,48	3,39	3,69	5,54
Jasa Perusahaan	7,97	-2,58	4,36	7,26	8,59
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,68	3,60	-2,60	3,07	5,48
Jasa Pendidikan	4,70	3,77	2,15	5,48	4,79
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,32	5,86	8,88	6,42	6,12
Jasa lainnya	6,89	-1,17	1,04	6,26	6,20
Laju Pertumbuhan	**3,16**	**-2,47**	**3,26**	**5,25**	**4,17**

Sumber : Balangan dalam angka, 2024

Pada saat kondisi tersebut terjadi, maka sebetulnya telah berjalan proses restrukturisasi / rebalancing dalam perekonomian wilayah. Pada umumnya, seiring pembangunan yang berlangsung, proses tersebut berjalan diawali dengan membesarnya pangsa kelompok kategori primer kemudian berangsur menurun bergeser kepada membesarnya pangsa kelompok kategori sekunder dan tersier (misalnya kategori industri dan jasa). Proses perubahan struktur tersebut idealnya akan diikuti dengan perubahan pergeseran dalam pasar tenaga kerja dalam arah yang sama. Namun demikian, pada prakteknya, kondisi tersebut tidak selalu berjalan.

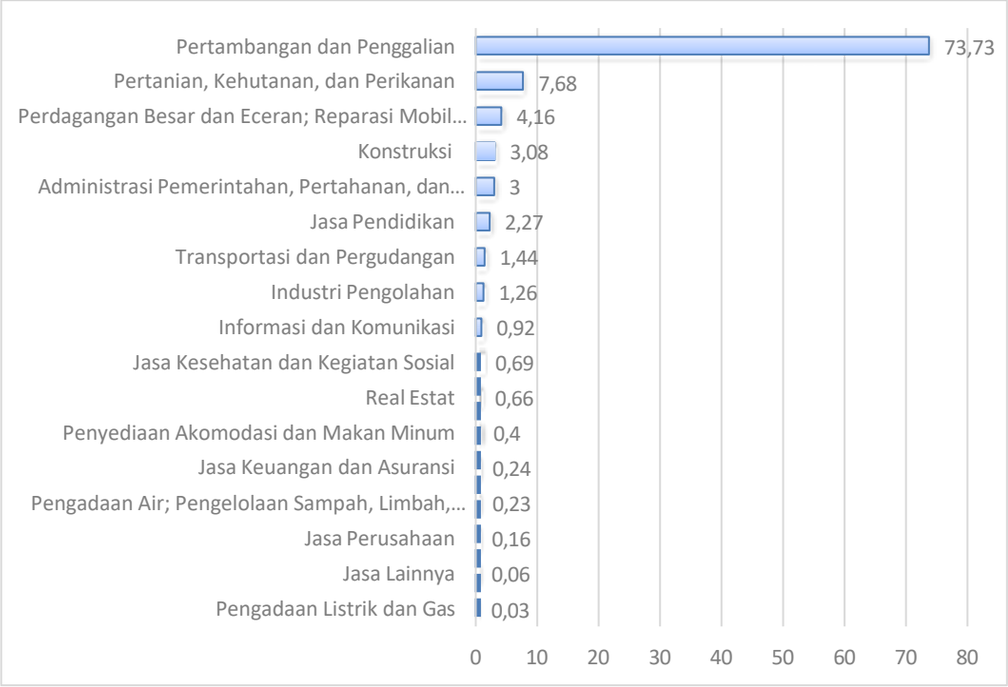
Kondisi yang dijelaskan di atas kurang lebih berlangsung juga di Kabupaten Balangan. Bukti nyatanya terlihat dari menyusutnya distribusi PDRB kelompok kategori primer yakni kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan,

kemudian semakin kuatnya peranan kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa). Pada tahun 2019 share kelompok kategori primer ini sekitar 12,03 persen, sempat meningkat di tahun 2020, kemudian menurun kembali tahun 2021 dan akhirnya tahun 2023 hanya mampu berkontribusi sekitar 7,68 persen. Penurunan share kategori lapangan usaha primer dalam ini diikuti oleh meningkatnya share kelompok kategori sekunder dan tersier (industri dan jasa) meskipun masih fluktuatif. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa proses pembangunan yang telah dicanangkan pemerintah daerah telah mengurangi dominasi kategori pertanian di Balangan dalam penciptaan nilai tambah. Postur ekonomi (dilihat dari share PDRB) Balangan mengindikasikan bahwa corak perekonomian Kabupaten Balangan masih bersifat agraris dan di sisi lain masih sangat bergantung pada sektor pertambangan.

Nilai PDRB Kabupaten Balangan masih sangat bergantung pada komoditas pertambangan. Pada tahun 2023, dengan pangsa mencapai 73,73 persen masih menempatkan kategori lapangan usaha ini sebagai yang paling berpengaruh dalam estimasi nilai PDRB Balangan. Kategori lapangan usaha pertambangan menjadi satu-satunya sektor penyumbang nilai tambah terbesar sekaligus menjadi pintu penghubung perekonomian Balangan dengan ekonomi global. Hal tersebut mengingat sebagian besar komoditas tambang yang diproduksi Balangan mengalir melalui keran ekspor ke luar negeri. Share kategori pertambangan terhadap PDRB ADHB Balangan tahun 2023 mengalami sedikit penurunan dibanding tahun lalu utamanya disebabkan oleh harga acuan batubara dunia yang agak menurun di tahun 2023 meski begitu kategori ini masih menjadi penyumbang terbesar dalam PDRB Balangan. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada harga jual batubara hasil penambangan di dalam wilayah Balangan yang juga ikut meningkat. Selain itu, produksi batubara tahun 2023 juga meningkat untuk memenuhi permintaan konsumen dari dalam maupun luar negeri. Adanya kenaikan harga yang sangat tinggi dan produksi yang juga meningkat tersebutlah yang diindikasikan menjadi penyebab utama peranan kategori pertambangan dalam PDRB ADHB Balangan tahun 2023 masih sangat tinggi.

Gambar. 3.3

Pangsa PDRB Balangan Tahun 2023



Sumber data: BPS Kabupaten Balangan, 2024 diolah

Data distribusi PDRB Balangan memperlihatkan bahwa kategori lapangan usaha perdagangan masih menjadi penyumbang nilai tambah dalam produksi barang dan jasa ketiga terbesar setelah kategori lapangan usaha pertambangan dan pertanian. Pada tahun 2023, pangsa PDRB kategori perdagangan mencapai 4,16 persen. Besarnya pangsa kategori ini di Balangan sebagian besar didukung oleh kinerja subkategori perdagangan besar dan eceran (bukan mobil dan motor) dan dukungan dari kinerja kategori lapangan usaha pertanian dan pertambangan.

3.3. Perkembangan Inflasi Daerah

Secara tahunan, inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 2,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan triwulan III 2023 sebesar 2,72% (yoy). Inflasi tersebut lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang sebesar 2,61% (yoy) maupun rata-rata inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan selama tiga tahun terakhir sebesar 2,61% (yoy)

Inflasi gabungan kota di Provinsi Kalimantan Selatan merupakan yang terendah kedua setelah Kalimantan Barat, diikuti oleh Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur . Sementara itu, secara spasial, Kotabaru mencatatkan inflasi tertinggi yaitu sebesar 3,81% (yoy), diikuti oleh Kota Tanjung sebesar 2,39% (yoy) dan Kota Banjarmasin sebesar 2,28% (yoy)

Inflasi pada Triwulan IV 2023 utamanya bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat inflasi sejalan dengan tingginya inflasi harga komoditas rokok kretek filter, emas perhiasan dan beras. Kenaikan Cukai Harga Tembakau (CHT) dengan rerata kenaikan sebesar 10% mendorong kenaikan harga jual tembakau terutama rokok kretek filter. Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya didorong oleh meningkatnya harga komoditas emas perhiasan, seiring dengan tren kenaikan harga emas dunia di tengah kondisi ketidakpastian global. Tekanan inflasi beras berada pada level moderat disebabkan oleh *base effect* kondisi pasokan yang masih belum kembali ke titik normal akibat adanya kendala produksi seperti hama tungro dan bencana banjir yang menyebabkan sebagian area panen mengalami puso pada periode Triwulan III dan IV 2022 yang lalu.

Meskipun demikian, kenaikan inflasi yang lebih tinggi tertahan oleh deflasi pada beberapa komoditas kelompok makanan, minuman dan tembakau serta komoditas perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga, antara lain mangga, bahan bakar rumah tangga, telur ayam ras, ikan tongkol, ikan selangat, cumi-cumi asin, tv berwarna, kacang panjang, bawang merah dan ikan kembung.

Dengan perkembangan pada bulan Januari 2024 dan beberapa indikator harga, tekanan inflasi tahunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Triwulan I 2024 diprakirakan lebih tinggi dibandingkan dengan Triwulan IV 2023. Kenaikan tekanan inflasi terutama disebabkan oleh kenaikan bahan pangan dan komoditas inti. Kenaikan harga pada komoditas beras diprakirakan masih berlanjut sejalan dengan menurunnya produktivitas tanaman pangan terdampak kondisi cuaca ekstrim dengan curah hujan ynag masih tinggi. Daging dan telur ayam ras diprakirakan naik sejalan dengan kenaikan permintaan di level konsumen di tengah harga pakan yang terus meningkat. Selanjutnya, harga gula diprakirakan meningkat akibat penyesuaian HAP di tengah penurunan pasokan. Sementara itu, tarif angkutan udara diprakirakan meningkat seiring masuknya siklus festive season menjelang HBKN Idul Fitri.

3.4. Ketenagakerjaan

Kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Balangan pada Semester I 2023 menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan Semester I 2022. Hal tersebut terkonfirmasi dari perbaikan jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sejalan dengan perbaikan mobilitas dan aktivitas ekonomi Balangan.

Optimisme daya beli masyarakat dalam 6 bulan ke depan menunjukkan peningkatan sejalan dengan hasil Survei Konsumen Bank Indonesia. Sejalan dengan hal

tersebut, kondisi kesejahteraan petani Provinsi Kalimantan Selatan tercatat meningkat, tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada triwulan IV 2023 yang tercatat sebesar 113,16; lebih tinggi dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 108,65. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Balangan tercatat sebesar 72,97 meningkat dari tahun 2022 sebesar 72,2. Peningkatan IPM Balangan bersumber dari peningkatan seluruh dimensi umur panjang dan hidup sehat (UHH), serta pengetahuan (HLS dan RLS) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Balangan menurun diiringi dengan perbaikan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Hal ini tercermin dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 2,7%, menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 3,98%. Pada level Provinsi, TPT seluruh provinsi di Kalimantan juga mengalami perbaikan. Hal ini sejalan dengan kondisi TPT Nasional yang juga mengalami penurunan dari 5,86% menjadi 5,32% pada Semester II 2023 (Agustus 2023).

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Balangan menunjukkan kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. TPAK pada periode Agustus 2023 tercatat sebesar 73,16% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 72,54%. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan populasi usia kerja. Berdasarkan jenis kelamin, TPAK pekerja laki-laki mengalami kenaikan sebesar 3,64% menjadi 87,11%, sementara TPAK pekerja perempuan mengalami penurunan sebesar 2,59% menjadi 59,07%.

Tabel 3.11
Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan, 2021-2023

Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)		
	2021	2022	2023
Balangan	2,44	3,98	2,70

Sumber : BPS Kabupaten Balangan 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Balangan 2021-2023, mengalami variasi selama periode tersebut. Pada tahun 2021, TPT di Kabupaten Balangan sebesar 2,44%, meningkat menjadi 3,98% pada tahun 2022, dan kemudian turun menjadi 2,70% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan fluktuasi dalam kondisi pasar tenaga kerja di Kabupaten Balangan selama periode yang diamati.

3.5. Nilai Tukar Petani

Pada triwulan IV 2023, Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Selatan tercatat sebesar 113,16; meningkat dibandingkan dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 108,65. Peningkatan indeks harga yang diterima (It) oleh petani mengalami peningkatan yang lebih cepat dibandingkan dengan peningkatan indeks harga yang dibayar (Ib) oleh petani pada seluruh subsektor penyusunnya sehingga menyebabkan naiknya NTP. Lebih rinci, kenaikan Indeks Konsumsi Rumah Tangga tercatat sebesar 2,66% (yoy) disebabkan oleh fluktuasi harga barang dan jasa yang di konsumsi dan diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. Disamping itu, indeks BPPBM mengalami kenaikan sebesar 3,36% (yoy) didorong oleh kenaikan subkelompok sewa dan pengeluaran lainnya (sewa tanah/lahan) serta subkelompok bibit/benih. Akan tetapi, kenaikan tersebut dapat diminimalisir oleh peningkatan Indeks harga yang diterima petani (It) sejalan dengan kenaikan harga pada sebagian besar komoditas sepeti pada komoditas padi, sayur-sayuran, karet, kelapa sawit, kerbau, unggas, hasil unggas, ikan sepat, ikan gabus dan beberapa komoditas perikanan tangkap dan budidaya air tawar.

Secara umum, kenaikan indeks harga yang diterima petani didorong oleh kinerja seluruh subsektor penyusun NTP terutama pada NTP subsektor Tanaman Pangan (NTPP) dengan indeks sebesar 114,05 dan meningkat secara tahunan sebesar 10,66% (yoy). Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan harga pada komoditas padi seiring dengan stok gabah varietas unggul menipis dan tingginya permintaan dari luar daerah, sementara gabah yang dikuasai petani oleh petani mengalami penurunan khususnya pada bulan Desember 2023. Peningkatan tersebut terkonfirmasi dari kenaikan harga gabah kualitas GKP di tingkat petani dan penggilingan pada bulan Desember 2023 masing-masing sebesar 20,36% (mtm) dan 20,16% (mtm) dibandingkan bulan September, dengan tingkat harga saat ini masing-masing sebesar Rp9.457,-/kg dan Rp9.571,-/kg.

Kondisi yang sama juga terjadi pada NTP Tanaman Hortikultura, yang mengalami akselerasi secara tahunan sebesar 7,62% (yoy) dengan indeks mencapai 106,81. Hal ini didorong oleh kenaikan harga kelompok sayur-sayuran, khususnya pada komoditas tomat, terong, cabai rawit, sawi hijau, dan cabai merah yang tercatat meningkat. Peningkatan indeks yang diterima lebih lebih lanjut tertahan oleh peningkatan indeks KRT dan indeks kelompok BPPBM.

NTP Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) pada triwulan IV 2023 juga mencatatkan akselerasi tahunan sebesar 6,63% (yoy) dengan indeks berada pada level 117,66. Peningakatan NTP pada subsektor ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga

yang diterima lebih tinggi dibandingkan dengan indeks harga yang dibayarkan oleh petani terutama pada komoditas karet dan kelapa sawit. Disisi lain, kenaikan indeks lebih lanjut pada subsektor ini tertahan oleh kenaikan indeks kelompok KRT seiring dengan pergerakan inflasi dan kenaikan indeks kelompok BPPBM khususnya pada subkelompok barang modal, bibit/benih, transportasi dan komunikasi dan pupuk serta pestisida.

NTP subsektor Peternakan (NTPT), yang mengalami akselerasi secara tahunan sebesar 1,79% (yoy) dengan indeks mencapai 104,31. Hal ini didorong oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok, kecuali harga pada kelompok ternak kecil (komoditas kambing). Peningkatan indeks yang diterima petani pada sebagian besar kelompok tertahan oleh peningkatan pengeluaran barang modal, bibit dan bakalan, serta obat-obatan dan pakan ternak yang berada pada level yang tinggi terutama pada komoditas telur itik/bebek dan telur ayam kampung/buras.

NTP Perikanan (NTNP) mencatatkan indeks sebesar 99,22 dengan peningkatan sebesar 0,39% (yoy) seiring naiknya harga berbagai komoditas perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Pada perikanan tangkap kenaikan harga pada kelompok komoditas perairan umum dan laut seperti ikan sepat, gabus, tenggiri kepiting laut, cumi-cumi, rajungan, kakap dan bawal menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani. Sementara pada kelompok perikanan budidaya kenaikan harga komoditas ikan patin, nila, mas, lele dan ikan bawal menjadi pendorong kenaikan indeks pada kelompok ini. Kenaikan NTP pada kelompok perikanaan juga didukung oleh penurunan indeks BPPBM seiring dengan penurunan harga komoditas pakan pada subkelompok pengeluaran pupuk, obat-obatan dan pakan ikan.

Berdasarkan beberapa data tersebut di atas, maka secara umum kebijakan ekonomi Kabupaten Balangan yang fokus kepada upaya peningkatan kontribusi PDRB dari sektor pertanian, perdagangan dan sektor tersier lainnya sudah tepat dan namun perlu percepatan dan akselerasi lebih lanjut sehingga target pertumbuhan ekonomi dan besaran kontribusi per sektor dapat tercapai.

Jika dirinci, perbaikan ekonomi di tingkat global menjadi faktor pendorong utama membaiknya perekonomian Kalimantan Selatan dan Balangan. Hal tersebut terlihat dari tingginya tingkat pertumbuhan komponen ekspor barang dan jasa pada PDRB dengan nilai 13.124,55 miliar rupiah. Hal ini dikonfirmasi dengan tingginya pertumbuhan dan share lapangan usaha utama Balangan yang berorientasi ekspor seperti lapangan usaha pertambangan dan penggalian dengan komoditas utama ekspor batubara, dan lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan dengan komoditas utama ekspor karet dan kelapa sawit.

Di tingkat domestik, perbaikan ekonomi Balangan ditandai dengan

membaiknya konsumsi rumah tangga. Setelah pada Tahun 2022 hanya mampu tumbuh di angka 2.949,33 milyar rupiah, komponen konsumsi rumah tangga pada PDRB mampu tumbuh di angka 3.236,01 milyar rupiah di Tahun 2023. salah satu faktor peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga adalah semakin massif nya aktivitas masyarakat pasca pandemi. Perbaikan konsumsi rumah tangga juga terlihat dari bertumbuhnya 2 sektor lain. 2 sektor yang dimaksud adalah sektor perdagangan serta sektor konstruksi yang meningkat tinggi.

Perekonomian Balangan diprakirakan tetap tumbuh positif dengan adanya kegiatan pemilu serentak untuk Presiden, DPR, DPRD, dan DPD pada awal tahun 2024 serta pemilihan Kepala Daerah serentah pada akhir tahun 2024. Meskipun pada tahun 2023 melambat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini sejalan dengan perlambatan perekonomian global yang berdampak terhadap permintaan domestik dan Eksternal.

Di tingkat global, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024 dimana semakin jelas dengan kemungkinan belum berakhirnya konflik Rusia – Ukraina serta konflik baru Israel dan Hamas-Iran bahkan merambat ke berbagai negara lainnya . Konflik tersebut berpengaruh terhadap beberapa hal sebagai berikut.

- Kenaikan harga minyak dan komoditas energi pada umumnya.
- Merosotnya beberapa pasokan komoditas pangan
- Lonjakan inflasi global akibat 2 hal di atas.
- Krisis energi di Eropa yang disusul dengan memburuknya perekonomian. Data menyebutkan bahwa inflasi telah mencapai 10 persen yang membuat Bank Sentral Eropa dan Bank Sentral Inggris menaikkan suku bunga sampai pada level 2,5 persen dan 3,5 persen secara berturut-turut. Bayang-bayang resesi ekonomi di Eropa tercermin dari memburuknya perekonomian Jerman dan Inggris.
- Keadaan di Eropa tersebut kemudian berpengaruh terhadap pasar ekspor Amerika Serikat dan Tiongkok yang juga berpotensi buruk terhadap perekonomian mereka.
- Merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS

Selain karena konflik antar negara, bayangan resesi ekonomi di Tahun 2025 juga disinyalir akan terjadi karena adanya pengetatan likuiditas di Amerika Serikat. Selain itu, ada fenomena transformasi ekonomi di Tiongkok yaitu transformasi menuju ekonomi berbasis digital dan ekonomi hijau yang ramah lingkungan serta transformasi

menuju produksi yang berorientasi pasar domestik.

Di tingkat nasional beberapa fenomena yang diproyeksikan terjadi adalah sebagai berikut.

- Implementasi peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Cipta Kerja, Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, serta Undang Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Transformasi ekonomi dalam bentuk dalam bentuk hilirisasi komoditas sumber daya alam, transisi energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
- Pelonggaran pandemi akan meningkatkan mobilitas masyarakat yang akan berdampak positif pada tingkat konsumsi rumah tangga.
- Insentif kendaraan listrik
- Kebijakan B35
- Pemerintah Pusat akan menjaga tingkat konsumsi

Fenomena-fenomena penting yang disampaikan di atas diproyeksikan akan berpengaruh terhadap perekonomian Balangan dan kapasitas keuangan daerah. Pengaruh tersebut terjadi dalam dua sisi, yaitu sisi positif sebagai prospek dan sisi negatif sebagai tantangan.

Prospek yang nyata yang dapat berpengaruh positif pada perekonomian Balangan adalah pelonggaran aktivitas masyarakat pasca pandemi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pelonggaran ini diproyeksikan akan meningkatkan tingkat konsumsi dan permintaan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan di Balangan secara keseluruhan.

Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, akan meningkatkan tingkat produksi di negara-negara produsen. sejalan dengan peningkatan tingkat produksi tersebut, maka kebutuhan energi juga akan meningkat sehingga akan berpengaruh positif terhadap permintaan batubara khususnya di Balangan dan lapangan usaha pertambangan dan penggalian secara umum.

Peningkatan aktivitas masyarakat secara global, juga diproyeksikan akan berpengaruh positif terhadap ekspor komoditas pertanian seperti karet dan kelapa sawit. Hal ini diharapkan dapat berpengaruh positif secara umun pada lapangan usaha pertanian, perikanan, dan kehutanan.

Namun, peningkatan aktivitas ini akan terkoreksi dengan bayangan resesi dunia beserta fenomena-fenomena dampaknya. Oleh karena hal tersebut, peningkatan permintaan produk di lapangan usaha tersebut di Tahun 2025 diproyeksikan tidak akan setinggi peningkatan di Tahun 2022. Sehingga potensi perlambatan pada pertumbuhan perekonomian di Balangan cukup besar hal ini sudah terlihat dari penurunan pertumbuhan ekonomi Balangan yang hanya 4,17 persen di tahun 2023.

Tabel berikutnya untuk penjabaran proyeksi Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara detail beserta angka per sektor – sektor untuk mendukung pertumbuhan Laju pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Tabel 3.12
LPE (%) Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 -2024 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran		LPE (%)/ *Growth* (%)					
		2021	2022	2023 Out-look	2024 Base-line	2024 Mode-rate	2024 High
1	Konsumsi Rumah tangga	0,87	5,52	6,20	6,15	6,74	7,33
2	Konsumsi LNPRT	0,71	3,05	7,36	6,15	6,74	7,33
3	Konsumsi Pemerintah	-3,44	2,18	2,25	2,28	2,41	2,53
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	0,31	5,32	8,10	7,05	7,78	8,51
5	Perubahan Inventori	30,14	-976,32	-112,99	7,02	7,77	8,51
6	Ekspor Barang dan Jasa	5,98	5,89	4,08	5,19	5,76	6,34
PDRB ADHK 2010		**3,26**	5,25	5,27	**5,51**	6,09	6,67

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

Tabel 3.13
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 Menurut Pengeluaran

Komponen pengeluaran		Share (%)					
		2021	2022	2023 Out-look	2024 Base-line	2024 Mode-rate	2024 High
1	Konsumsi Rumah tangga	21,18	15,09	23,48	24,29	26,92	29,54
2	Konsumsi LNPRT	0,93	0,62	1,03	1,07	1,09	1,11

Komponen pengeluaran		Share (%)					
		2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Out-look	Base-line	Mode-rate	High
3	Konsumsi Pemerintah	9,22	6,14	9,55	9,60	9,61	9,62
4	Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	20,62	14,38	23,55	24,68	22,35	20,02
5	Perubahan Inventori	0,02	-0,13	0,02	0,03	0,03	0,03
6	Ekspor Barang dan Jasa	48,02	63,90	42,36	40,32	40,01	39,69
PDRB ADHB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Kalsel (2023) diolah, KEMD 2023

Tabel 3.14
Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Balangan Tahun 2021 - 2022 dan Proyeksi Tahun 2023 - 2024 menurut Lapangan Usaha

Komponen Lapangan Usaha		Share (%)					
		2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Out-look	Base-line	Mode-rate	High
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11,53	7,54	10,82	10,82	10,82	10,82
2	Pertambangan dan Penggalian	62,13	74,52	67,05	66,90	66,89	66,88
3	Industri Pengolahan	1,90	1,29	1,54	1,54	1,54	1,54
4	Pengadaan Listrik. Gas	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,25	0,16	0,23	0,23	0,23	0,23
6	Konstruksi	4,30	2,98	3,79	3,88	3,89	3,90
7	Perdagangan Besar dan Eceran. dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,50	3,84	4,53	4,63	4,64	4,64
8	Transportasi dan Pergudangan	1,81	1,27	1,59	1,61	1,61	1,61
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,23	0,31	0,31	0,31	0,31
10	Informasi dan Komunikasi	1,36	0,92	1,31	1,29	1,29	1,29
11	Jasa Keuangan	0,33	0,23	0,28	0,28	0,28	0,28
12	Real Estate	1,00	0,65	0,99	1,03	1,04	1,04

Komponen Lapangan Usaha		Share (%)					
		2021	2022	2023	2024	2024	2024
				Out-look	Base-line	Mode-rate	High
13	Jasa Perusahaan	0,07	0,05	0,06	0,07	0,07	0,07
14	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,47	2,93	3,33	3,23	3,22	3,21
15	Jasa Pendidikan	3,41	2,28	2,85	2,84	2,84	2,83
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,00	0,68	0,84	0,85	0,85	0,85
17	Jasa lainnya	0,55	0,38	0,45	0,46	0,46	0,46
PDRB ADHB		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber: BPS Blg, 2023 diolah, KEMD 2023

3.6. Kebijakan Keuangan Daerah

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 1,16%, dibandingkan tahun 2021 dari Rp.1.085,293 Milyar menjadi Rp.1.098,008 Miliar. Tahun 2024 diasumsikan pendapatan daerah akan menjadi sebesar Rp. 2.101,91 Miliar atau naik sebesar 2,04% jika dibandingkan dengan tahun 2023. Kenaikan pendapatan daerah di asumsikan dari perhitungan Kurang Bayar dan Lebih Bayar transfer Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam yang akan di masukkan dalam penetapan Dana Transfer Umum Bagi Hasil kepada Daerah Penghasil.

Tahun 2023 dan tahun 2024 pandemi Covid-19 sudah berakhir dan perekonomian kembali pulih sehingga diproyeksikan pendapatan daerah mengalami pertumbuhan positif yakni sebesar 7,92 % tahun 2023. Komponen terbesar pembentuk pendapatan daerah di Kabupaten Balangan adalah bersumber dari dana transfer yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, rata-rata proporsi dana transfer diproyeksikan sebesar 92,08%, proporsi pendapatan asli daerah sebesar 7,36% dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 0,55%. Rincian realisasi dan proyeksi/target pendapatan Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.15
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan
Kabupaten Balangan Tahun 2022-2025

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	92.767.033.520,54	137.007.405.232,01	84.459.582.433	121.089.541.224
1.1.1	Pajak Daerah	12.308.860.393,50	13.907.676.851,00	12.895.500.000	28.902.958.032
1.1.2	Retribusi Daerah	1.908.662.405,00	2.366.139.331,00	1.481.891.666	2.012.511.666
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.573.275.479,00	14.874.367.772,00	21.117.190.767	30.000.000.000
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	64.976.235.243,04	105.859.221.278,01	48.965.000.000	60.174.071.526
1.2	Pendapatan Transfer	-	-	3.364.146.506.947	3.064.703.636.024
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	-	3.274.146.506.947	2.986.908.278.384
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	-	90.000.000.000	77.795.357.640
1.3	Dana Perimbangan	1.462.584.501.792,00	2.380.860.170.980,00	1.671.045.160.000,00	2.513.378.309.384,00
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	994.362.274.685,00	1.899.001.975.914,00	1.236.301.370.000	2.059.940.753.000
1.3.2	Dana Alokasi Umum	345.185.535.241,00	361.821.744.450,00	-	-
1.3.3	Dana Alokasi Khusus	123.036.691.866,00	120.036.450.616,00	-	-
1.4	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	108.840.346.246,00	113.611.263.142,00	7.512.634.179	-
1.4.1	Hibah	6.537.075.079,00	600.000.000,00	-	-
1.4.2	Dana Darurat	-	-	-	-
1.4.3	Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Dari Pemerintah Daerah Lainnya	102.303.271.167,00	113.011.263.142,00	-	-
1.4.4	Dana Penyesuaian Dan	-	-	-	-

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2025
	Otonomi Khusus				
1.4.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	129.064.886.300,00	121.169.306.240,00	-	-
	Dana Insentif Daerah	13.333.129.000,00	16.166.958.000,00	-	-
	Dana Desa	107.836.177.240,00	112.897.928.300,00	-	-
	Pendapatan Lainnya	-	2.335.200,00	-	-
	Jumlah Pendapatan Daerah	2.759.943.725.654,01	1.778.826.447.919,54	3.456.118.723.559	3.193.305.811.427

Sumber : BPKPAD Kabupaten Balangan, 2024 (diolah)

Selain bersumber dari APBD pendapatan daerah juga didukung oleh program CSR (*Corporate Social Responsibilty*) yang dimaksudkan sebagai upaya keterlibatan perusahaan dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat Balangan. Berikut perusahaan dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terlibat pada program CSR Kabupaten Balangan diantaranya :

1. Adaro Indonesia
2. Saptaindra Sejati (SIS)
3. BUMA
4. Balangan Coal
5. Bank Kalsel
6. BPR Sanggam Cipta Sejahtera

Pembiayaan CSR meliputi Bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan keagamaan. Dalam rangka mengembangkan perekonomian di Kabupaten Balangan khususnya di Desa-Desa sekitar perusahaan diberikan bantuan dan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Contohnya seperti pela tihan pengolahan produk makanan, bantuan modal, pembinaan UMKM, Implementasi Pengembangan Potensi Desa, Pemberian Pelatihan Promosi Produk & Digital Marketing untuk UMKM di Desa Ring 1 Balangan, Bantuan Permodalan, Peningkatan Volumen Penjualan Produk UMKM (Expo/Pemasaran/Pelatihan), serta pelatihan adaro spectaprenuer. Hal ini dapat membantu masyarakat balangan dalam potensi usaha, bisa membangun usahanya

sendiri, seperti usaha dari kedai kopi, warung makan, minuman boba, peralatan bangunan, alat bengkel dan lain sebagainya.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah Kabupaten Balangan dalam rancangan belanja daerah tahun 2024 akan mengalami peningkatan, sebesar (5,19%) dibandingkan tahun 2022. Proporsi belanja tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan pada komponen belanja modal yaitu sebesar 1,33% dan belanja tak terduga sebesar 0,11 %. Dalam belanja operasi distribusi didalamnya ada kenaikan pada belanja pegawai yang merupakan akibat dari rekrutmen PPPK yang ditahun 2023 dan 2024 nanti, Belanja Barang, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial. Kenaikan belanja tak terduga terkait dengan asumsi darurat kebencanaan dan perubahan iklim serta untuk mengakomodir santunan kematian. Rincian realisasi dan proyeksi/target belanja daerah Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.16
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja
Kabupaten Balangan Tahun 2021-2025

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.1	Belanja Tidak Langsung				
2.2	Belanja Opeasi	-	-	1.929.705.789.033	1.778.925.562.274
2.2.1	Belanja Pegawai	386.952.974.398,00	437.938.657.742,00	585.974.298.108	631.049.275.225
2.2.2	Belanja Bunga	-	-	-	-
2.2.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2.2.4	Belanja Hibah	47.703.693.560,85	165.622.074.354,00	208.662.602.940	108.593.266.847
2.2.5	Beanja Bantuan Sosial	4.471.225.000,00	5.226.190.000,00	12.557.427.400	16.205.075.000
2.2.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Desa*	242.402.786.355,00	306.086.953.047,00	-	-
2.2.8	Belanja Tidak Terduga	1.203.971.500,00	1.602.500.000,00	35.367.506.100	25.000.000.000

No	Uraian	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2025
B	Jumlah Belanja Tidak Langsung	682.734.650.813,85	916.476.375.143,00	-	-
2.3	Belanja Modal	**391.771.955.326,03**	**580.674.088.157,03**	957.747.789.416	1.014.376.735.271
2.3.1	Belanja Modal Tanah	5.115.127.000,00	-	26.046.370.000	20.000.000.000
2.3.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	94.619.742.724,00	161.050.737.928,00	232.866.550.987	113.245.397.796
2.3.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	47.238.414.493,82	99.741.722.125,39	291.255.696.029	393.396.486.332
2.3.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	244.145.726.258,21	13.533.424.903,64	406.160.432.400	482.948.467.243
2.3.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	652.944.850,00	5.354.696.000,00	232.815.000	4.646.383.900
2.3.6	Belanja Modal Aset Lainnya	-	993.507.200,00	1.185.925.000	140.000.000
2.4	Belanja Transfer	**242.402.786.355,00**	**306.086.953.047,00**	426.661.135.733	421.612.860.301
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	-	-	1.496.598.376	3.417.702.541
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	425.164.537.357	418.195.157.760
2.4.3	Jumlah Belanja Transfer	**242.402.786.355,00**	**306.086.953.047,00**	3.349.482.220.282	3.239.915.157.846
	Total Jumlah Belanja	**1.644.691.137.033,11**	**2.292.344.562.265,65**		
	Total Surplus/(Defisit)	-	-	106.636.503.277	-46.609.346.419

Sumber : BPKPAD Kabupaten Balangan, 2024 (diolah)

c. Pembiayaan Daerah

Realisasi dan proyeksi pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 menunjukkan kondisi yang defisit tentunya diperlukan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, dalam proyeksi pembiayaan untuk

tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 pembiayaan daerah Kabupaten Balangan bersumber dari dari penerimaan kembali penyertaan modal pemerintah daerah. Rincian realisasi dan proyeksi/target pembiayaan Kabupaten Balangan dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.17
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan
Kabupaten Balangan Tahun 2022-2025

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	**131.899.986.648,54**	**222.572.372.613,97**	223.363.496.723	146.609.346.419
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	131.899.486.648,54	222.572.372.613,97	223.363.496.723	146.609.346.419
3.1.2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-
3.1.7	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	500.000,00	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	131.899.986.648,54	222.572.372.613,97	223.363.496.723	146.609.346.419
3.2	Pengeluaran pembiayaan	-	-	330.000.000.000	100.000.000.000
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	330.000.000.000	100.000.000.000

No	Jenis Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	Jumlah			
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Proyeksi/Target Tahun 2024	Proyeksi/Target Pada Tahun Rencana 2025
3.2.3	Pembayaran pokok utang	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	330.000.000.000	100.000.000.000
	Pembiayaan Netto	-	-	-106.636.503.277	46.609.346.419
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO				

Sumber : BPPAKD Kabupaten Balangan, 2024 (diolah)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, tingkat kemendesakan dan daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Prioritas pembang unan juga dapat dikategorikan sebagai operasional dari tujuan strategis daerah mendasarkan pada urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan secara keseluruhan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan tahun 2025 disusun berdasarkan pedoman :

1. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPN tahun 2025 – 2045;
2. Rancangan RKP TAHUN 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat mengacu pada RPJMN tahun 2025 – 2029;
3. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimatan Selatan tahun 2025;
4. Sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun 2025 – 2045 dan RPJMD 2021-2026 Provinsi Kalsel;
5. RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2021-2026 Kabupaten Balangan;
6. Identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional;
7. Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan
8. Serta Dokumen RTRW Kabupaten Balangan Tahun 2013-2032

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas memperhatikan beberapa kriteria, antara lain:

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti SDGs, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja;
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD;

3. Korelasinya terhadap pengembangan sektor/bidang yang terkait keunggulan kompetitif daerah; dan
4. Korelasinya terhadap isu strategis daerah

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

Dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, saat ini rencana pembangunan daerah Kabupaten Balangan telah memasuki tahapan keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Balangan Tahun 2005-2025 dan proses transisi dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serentak se Indonesia Tahun 2025-2045. Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025 berpedoman pada visi, misi, tujuan, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Adapun visi pembangunan daerah yang akan diwujudkan adalah :

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA
MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA"

Perngertian dari visi tersebut sebagai berikut:

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakikatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang Iebih ba ik. lstilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang Iebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang Iebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang Iebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakikatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang Iebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, serta masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang Iebih luas adalah hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menuju masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi Iain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang

mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan Iebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten tetangga, Iebih maju dan sejahtera.

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan pemerintahan daerah, rumusan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025, secara umum berpedoman pada sasaran dan tujuan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ini juga mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam pelaksanaannya desentralisasi penataan daerah ditujukan pada upaya untuk :

a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
e. Meningkatkan daya saing nasional dan daya saing daerah;
f. Memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Rumusan tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut ini.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja 2025
1	Meningkatnya Infrastruktur Wilayah Perdesaan dan Perkotaan	1	Indeks infrastruktur wilayah	1	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik	1	Indeks infrastruktur publik	49,42
				2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	2	Indeks infrastruktur permukiman	32,75
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	2	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	3	Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	3	Indeks Kualitas Air	74,62
						4	Indeks Kualitas Udara	71,11
						5	Indeks Kualitas Lahan	69,61
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	3	Pertumbuhan Ekonomi	4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	13,64%
						7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	6,6%
						8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48%
						9	Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	615 M

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja 2025
4	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	4	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	5	Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	10	Angka Pengangguran Terbuka	1,84-2,67
5	Meningkatnya pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas	5	Angka Rata-rata lama Sekolah	6	Meningkatnya Indeks Pendidikan	11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,37 - 9,05
		5	Angka Harapan Lama Sekolah			12	Angka Harapan Lama Sekolah	13,17 - 13,87
		5	Usia Harapan Hidup	7	Meningkatnya Indeks Kesehatan	13	Usia Harapan Hidup	74.19-74.26
						14	Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 kelahiran	120
						15	Angka Kematian Bayi (AKB)/per 1000 kelahiran	11
						16	Prevalensi Stunting	18,8
						17	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	17
6	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	6	Indeks Reformasi Birokrasi	8	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	18	NILAI SAKIP	76,40 (BB)
						19	Opini BPK	WTP
						20	Nilai EKPPD	3,41
						21	Nilai Indeks Pelayanan Publik	4.01 (-A)
						22	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN			SASARAN		INDIKATOR SASARAN	Target Kinerja 2025
7	Meningkatnya kualitas kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif	7	Angka Kemiskinan	9	Menurunnya Angka Kemiskinan	23	Angka Kemiskinan	4,23 - 4,62
						24	Angka PPKS yang tertangani	70,95%
		8	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	10	Terjaganya Kehidupan Sosial Yang Kondusif	25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0
		9	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	26	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum	100%
		10	Indeks Resiko Bencana			27	Indeks Resiko Bencana	98,2
		11	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	12	Meningkatnya Budaya Balangan yang Terlestarikan	28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	87%
7	Meningkatnya nilai Indeks Desa membangun	12	Indeks Desa Membangun	13	Meningkatnya status Desa Kabupaten Balangan	29	Indeks Desa Membangun	0,8186

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025

4.2.1. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM RKP TAHUN 2025

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025

"Aklerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Iklusif dan Berkelanjutan",

Sasaran pembangunan tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Target indikator sasaran pembangunan tahun 2025 ditunjukkan pada infografis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Ekonomi (%) : 5,3 – 5,6
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : 4,5 – 5,0
3. Tingkat Kemiskinan (%) : 7,0 – 8,0
4. Nilai Tukar Petani (Kumulatif) : 113-115
5. Rasio Gini (Nilai) : 0,379-0,382
6. Indeks Modal Manusia (Nilai) : 0,56
7. Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) : 38,6
8. Nilai Tukar Nelayan (Kumulatif) : 104-105

Kebijakan dan strategi pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 diterjemahkan ke dalam lima agenda pemb angunan, yaitu :

1. Transformasi Sosial, dengan arah kebijakan:
   1) Meningkatkan akses kesehatan untuk semua, melalui : a) Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat; b) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat; c) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan; d) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola.

2) Meningkatkan akses pendidikan berkualitas yang merata, melalui: a) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah); b) Pemerataan Akses Pendidikan Tinggi Berkualitas dan Pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics (STEAM); c) Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran; d) Penguatan Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berkualitas; e) Penguatan Sistem Tata Kelola Pendidikan; f) Peningkatan Produktivitas, Daya Saing, dan Kemampuan Kerja.
3) Perlindungan sosial yang adaptif yang berfokus pada peletakan fondasi awal reformasi perlindungan sosial menjadi lebih adaptif dan inklusif, sehingga dapat memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk sesuai kondisi kerentanan, serta mendorong penduduk miskin dan rentan untuk mencapai kesejahteraan yang berkesinambungan, melalui: a) Satu Sistem Registrasi Sosial Ekonomi; b) Integrasi Bantuan Sosial, Jaminan Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat yang Adaptif; c) Reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional; d) Pengembangan Ekonomi Perawatan (Care Economy) untuk Perluasan Perlindungan Sosial dan Kesejahteraan; e) Inklusi sosial untuk Kesejahteraan Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, dan Kelompok Rentan Lainnya.

2. Transformasi Ekonomi, dengan arah kebijakan :
   1) Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui (a) penguatan industri dasar, (b) hilirisasi industri berbasis mineral penting, (c) hilirisasi industri berbasis sumber daya hayati, (d) pengembangan industri medium-high technology, (e) penguatan produktivitas industri padat karya terampil, (f) produktivitas UMKM dan koperasi, (g) pengembangan ekonomi biru Indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru; (h) pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, (i) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, (j) peningkatan produktivitas BUMN, (k) penguatan ekonomi dan keuangan syariah, (l) peningkatan produktivitas tenaga kerja, (m) peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional, serta (n) peningkatan produktivitas sektor pertanian.
   2) Penerapan Ekonomi Hijau dilaksanakan melalui (a) percepatan transisi energi, (b) ekonomi sirkular industri, (c) pengembangan pekerjaan hijau (green jobs), dan (d) pengelolaan hutan lestari.
   3) Percepatan transformasi digital dilaksanakan melalui (a) penguatan fondasi utama transformasi digital; (b) digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis;

(c) pemerintah digital; (d) penguatan faktor pendukung dan akselerator transformasi digital.

4) Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, dilakukan melalui (a) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi; (b) optimalisasi backbone integrasi ekonomi; (c) perkuatan sistem logistik nasional; (d) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global; serta (e) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global.
5) Mewujudkan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi melalui (a) wilayah metropolitan, (b) pembangunan Ibu Kota Nusantara, dan (c) peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan.

3. Transformasi Tata Kelola, dengan arah kebijakan :
   1) Penguatan Tata Kelola Regulasi dan Pembentukan Lembaga Tunggal Pengelola Regulasi
   2) Transformasi dan Digitalisasi Pelayanan Publik
   3) Penataan Proses Bisnis dan Kelembagaan Pembangunan
   4) Transformasi Manajemen ASN
   5) Transformasi Kesejahteraan, Sistem Penggajian Tunggal dan Pensiunan ASN
   6) Sistem Anti Korupsi dan Akuntabilitas Pembangunan
   7) Penguatan Integritas Partai Politik
4. Supermasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia, dengan arah kebijakan :
   1) Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial berfokus pada penguatan fondasi transformasi melalui pembaharuan substansi, dan transformasi kelembagaan hukum pada isu-isu strategis seperti sistem penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penghormatan dan pelindungan hak asasi manusia, serta budaya hukum.
   2) Stabilitas Ekonomi Makro diarahkan untuk menjadi pemampu (enabler) dalam rangka mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkualitas melalui bauran kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, dan sektor keuangan.
   3) Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan, diarahkan kepada penguatan tata kelola bagi pelaksanaan kebijakan ke depan, yaitu berupa fondasi dan modalitas diplomasi, termasuk di antaranya penguatan infrastruktur diplomasi dan kelembagaan, konsolidasi kebijakan, serta

langkah-langkah untuk memperkuat sinergi diplomasi yang didukung oleh berbagai pemangku kepentingan.

5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, dengan arah kebijakan :
   1) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju. Pencapaian indicator dilakukan melalui dua upaya. Upaya pertama yakni, penguatan beragama maslahat dan layanan keagamaan transformatif,
   2) Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif dengan kebijakan yang diarahkan pada penguatan ketangguhan keluarga, peningkatan kesetaraan gender, serta perwujudan masyarakat inklusif yang memperhatikan perbedaaan karakteristik dan kebutuhan berbagai kelompok.
   3) Lingkungan Hidup Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman, persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah.
   4) Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.

4.2.2 PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut : (Sumber : Dokumen PMPPN/Bappenas, 2024)

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertanahan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.

   Terdapat lima arah kebijakan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 3 yang tertuang dalam sasaran dan indikator pada tabel di atas, antara lain (1) melanjutkan pembangunan infrastruktur, (2) mendorong kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya, (3) penguatan koperasi, (4) mengembangkan industri kreatif, serta (5) pendalaman sektor keuangan.

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.

   Prioritas Nasional 5 ditujukan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian. Dalam mewujudkan sasaran pembangunan Prioritas Nasional 5 di tahun 2025, arah kebijakan difokuskan pada (1) pengembangan hilirisasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru; (2) penguatan industri padat karya berkelanjutan, industri dasar, dan industri strategis nasional; serta (3) pengembangan integrasi ekonomi domestik dan global.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.

   Prioritas Nasional 6 ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan. Pembangunan dilakukan melalui tiga arah kebijakan yaitu (1) membangun desa dan membangun dari desa; (2) pemerataan ekonomi; serta (3) memberantas kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyeludupan
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.

   Pada tahun 2025 kebijakan Prioritas Nasional 8 diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur yang difokuskan pada (1) Masyarakat adil, makmur, dan harmonis, (2) Melestarikan budaya, (3) Penanganan bencana.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

a. Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
   2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
   3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
   4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
   5) pengembangan industri pendukung Energi Baru Terbarukan (EBT).

b. Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pemantapan Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif);
   2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
   3) penyediaan air untuk pertanian;
   4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
   5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
   6) pengembangan waduk multiguna.

c. Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
   2) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;
   3) peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
   4) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
   5) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.

d. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
   2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
   3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu, dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;

4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
5) peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan.

e. Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
2) peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi; dan
4) peningkatan penciptaan start-up dan peluang usaha.

f. peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir;
2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
6) pengembangan industri halal.

g. peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
3) pengelolaan impor;
4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;

6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
7) peningkatan efektivitas Prefrential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi.

h. penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industry 4.0;
3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata; dan
5) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

a. pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
b. distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
c. peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
d. memperkuat kemampuan sumber daya manusia (SDM) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
e. meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata

2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing

sumber daya manusia (SDM) yaitu sumber daya manusia (SDM) yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

a. pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
c. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
e. peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
f. pengentasan kemiskinan; dan
g. peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan, yaitu:
    1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
    2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
    3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
    4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) sistem jaminan sosial nasional;
    2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran; dan
    3) kesejahteraan sosial.
c. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
    1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
    2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
    3) peningkatan pengendalian penyakit;
    4) penguatan gerakan masyarakat (Germas) hidup sehat; dan
    5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, mencakup:
        - Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan,
        - Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan,
        - Pemenuhan dan peningkatan daya saing sediaan farmasi dan alat kesehatan,

- Peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan, dan
- Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan Kesehatan.

d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
   2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
   3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
   4) penjaminan mutu pendidikan; dan
   5) peningkatan tata kelola pendidikan.

e. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
   2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan pe rempuan; dan
   3) kualitas pemuda.

f. Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) akselerasi penguatan ekonomi kelua rga;
   2) keperantaraan usaha dan dampak sosial;
   3) reforma agraria; dan
   4) perhutanan sosial.

g. Peningkatan produktivitas dan daya saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
   2) penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
   3) peningkatan kapabilitas ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan penciptaan inovasi; dan
   4) prestasi olahraga.

3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

   Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

   a. revolusi mental dalam sistem pendidikan;
   b. revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan

c. revolusi mental dalam sistem sosial. Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk memperkukuh ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
   2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;
   3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
   4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
   5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
   6) pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme;
b. meningkatkan pemajuan Dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
   2) pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
   3) pelindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
   4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia; dan
   5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.

c. memperkuat moderasi beragama untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan dan harmoni sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
   2) penguatan harmoni dan kerukunan umat Beragama;
   3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
   4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
   5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.

d. peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, dan berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) peningkatan budaya literasi;
   2) pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
   3) pengembangan budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
   4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

   Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

   a. menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
   b. peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
   c. pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
   d. rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
   e. mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

   Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

   a. infrastruktur pelayanan dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
4) keselamatan dan keamanan transportasi;
5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
6) waduk multipurpose dan modernisasi irigasi.

b. infrastruktur ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) konektivitas jalan;
2) konektivitas kereta api;
3) konektivitas laut;
4) konektivitas udara; dan
5) konektivitas darat.

c. infrastruktur perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) transportasi perkotaan; dan
2) infrastruktur dan ekosistem teknologi informasi dan komunikasi (TIK) perkotaan.

d. energi dan ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.

e. transformasi digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
1) penuntasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
2) pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK); dan
3) fasilitas pendukung transformasi digital.

5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup;

b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
c. pembangunan rendah karbon

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
   4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
b. peningkatan ketahanan bencana dan iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penanggulangan bencana; dan
   2) peningkatan ketahanan iklim.
c. pembangunan rendah karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) pembangunan energi berkelanjutan;
   2) pemulihan lahan berkelanjutan; dan
   3) pengembangan industri hijau

6. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik. Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:
   a. reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
   b. meningkatkan hak politik dan kebebasan sipil;
   c. memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
   d. mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
   e. mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Iuar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

a. konsolidasi demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
   2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
   3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
b. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri; dan
   2) penguatan kerjasama pembangunan internasional.
c. reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan implementasi manajemen ASN;
   2) transformasi pelayanan publik;
   3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
   4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
d. menjaga stabilitas keamanan nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
   1) penguatan keamanan dalam negeri;
   2) penguatan keamanan laut; dan
   3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4.2.3 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

Pada tahun ini Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan yaitu ***"Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan".***

Berdasarkan tema RKPD tersebut ditetapkan Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk perencanaan di tahun 2025 sebagai berikut :

1. Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
   a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Teknologi Pertanian
   b. Peningkatan Rantai Pasok Untuk Mendukung Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam Berkelanjutan
   c. Peningkatan Pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM Berbasis Digital dan Berdaya Saing

d. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja yang Berdaya Saing
e. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT)

2. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
   a. Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah
   b. Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda
   c. Pemerataan Akses Layanan Kesehatan
   d. Penurunan Prevalensi Stunting
   e. Penurunan Angka Pernikahan Anak
   f. Peningkatan Prestasi Olahraga
   g. Pengembangan Budaya Daerah
3. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi. Dengan upaya yang dilakukan sebagai berikut :
   a. Pemenuhan Pencapaian Infrastruktur Dasar
   b. Pembangunan Sarana dan Prasarana menunjang Konektivitas antar Wilayah
   c. Pengembangan Kawasan Prioritas dan pedesaan yang terintegrasi dengan infrastruktur sebagai Gerbang Logistik Kalimantan
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi.
   a. Penguatan Reformasi Birokrasi
      Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender dan Inklusif
   b. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
   c. Pengembangan Satu Data Kalsel
   d. Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN)
5. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana
   a. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup
   b. Penguatan Mitigasi dan Pemulihan Pasca Bencana

4.2.4 PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

4.2.4.1 Isu Strategis Pembangunan

Berdasarkan gambaran permasalahan terkini daerah serta melihat hasil evaluasi pembangunan tahun 2023 maka isu strategis daerah untuk pembangunan di tahun 2025 adalah :

1. **Isu infrastruktur dan lingkungan hidup**

   Dengan focus pada peningkatan pemenuhan infrastruktur serta konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

2. **Isu ekonomi**

   Dengan focus pada peningkatan perekonomian berbasis pemanfaatan sumber daya alam, kemudahan investasi, daya saing ukm

3. **Isu sumber daya manusia**

   Dengan focus pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia

4. **Isu tata kelola pemerintahan**

   Dengan focus pada peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis inovasi

5. **Isu sosial dan trantibum**

   Berfokus pada percepatan penangangan kemiskinan, pemantapan kehidupan sosial, budaya dan kemasyarakatan serta kondusifitas daerah

4.2.4.2 Prioritas dan Sasaran Kabupaten Balangan Tahun 2025

Penyusunan dalam Perencanaan pembangunan daerah kabupaten tidak terlepas dari arah dan kebijakan perencanaan pembangunan pusat maupun provinsi. Perencanaan pembangunan daerah kabupaten merupakan penjabaran pelaksanaan pembangunan provinsi dan pusat. Dengan berpedoman pada arah pembangunan berdasarkan RPJPD Kabupaten Balangan, RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2023, permasalahan di Kabupaten Balangan, serta kerangka ekonomi daerah dan pendanaan maka tema RKPD Kabupaten Balangan tahun 2025 adalah ***"Percepatan Pemenuhan Infrastruktur dan Peningkatan Perekonomian Dalam Menunjang Daya Saing Daerah Untuk Pembangunan Berkelanjutan".*** Berdasarkan tema Kabupaten Balangan jika dikaitkan dengan Nasional yaitu ***"Aklerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Iklusif dan Berkelanjutan",***dan Provinsi Kalimantan Selatan *yaitu* ***"Pemantapan Daya Saing Daerah Dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana Untuk Mendukung Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Kalimantan".*** menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan sudah mengacu dan berkesesuaian dengan tema Provinsi dan

Nasional khususnya berkaitan dengan perekonomian yang berkelanjutan. Dari tema tersebut Balangan ingin berfokus pada percepatan pemenuhan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi dalam rangka menunjang daya saing daerah agar sejajar dengan daerah-daerah lainnya serta mendukung pembangunan Ibu Kota Negara yang berdekatan dengan Kabupaten Balangan dan tentunya tetap memperhatikan keseimbangan kondisi lingkungan. Langkah-langkah strategis ini akan memastikan bahwa Kabupaten Balangan tidak hanya berkembang saat ini tetapi juga manjadi daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan di masa depan, memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah.

Perencanaan pembangunan Tahun 2025 juga sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 berpedoman pada Pencapaian Pembangunan Global (SDGs)". Sehingga, dalam perumusan prioritas juga telah diselaraskan terhadap dokumen TPB/SDGs melalui pengintegrasian 17 goal SDGs kedalam 7 Prioritas Daerah RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025. Selain pengintegrasian 17 Goal SDGs kedalam prioritas daerah, menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu pembangunan Bersama juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi capaian TPB/SDGs Kabupaten Balangan yang telah dilakukan. Di dalam isu SDGs/TPB Kabupaten Balangan sebagai bagian dan mengacu pada Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana tahun 2023 yang menjadi fokus perhatian ada pada 2 pilar, tujuan TPB dengan status capaian tidak tercapai terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan masih terus ada pada Tujuan 4 Pendidikan yang Berkualitas serta pada Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.

Berdasarkan tema diatas, maka dibuat 7 (tujuh) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

1. Prioritas 1 : Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan. Dengan sasaran sebagai berikut :
    a. Pembangunan Sarana Air Bersih
    b. Pembangunan Sarana Air Limbah Domestik
    c. Optimalisasi Sanitasi Layak
    d. Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) / Bedah Rumah
    e. Pembangunan Sarpras pada Pemukiman Kumuh untuk hunian layak
    f. Pembangunan Jalan dan Jembatan
    g. Penambahan armada angkutan umum

h. Penyediaan prasarana dan sarana perlengkapan jalan (PJU, Halte, Marka, Rambu, dll)
i. Sarana dan Prasarana Terminal Baru
j. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
k. Revitalisasi dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana RTH
l. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kebun Raya dan Hutan Kota
m. Pembebasan Lahan dan Appresial Hutan Kota, RTH dan Kebun Raya
n. Pemenuhan SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Prioritas 2 : Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Pengembangan Pariwisata. Dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Pembangunan BBI Satelit
   b. Pengadaan Benih Padi dan pengadaan Cadangan Benih Padi
   c. Pengadaan dan Bantuan Sarpras Pertanian dan Perikanan
   d. Peningkatan populasi ternak dengan pelaksanaan inseminasi buatan
   e. Pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
   f. Bantuan alat-alat pengolahan hasil perikanan
   g. Pengembangan Destinasi Wisata
   h. Pemeliharaan Sarana Prasarana Destinasi Wisata
   i. Pelatihan Pokdarwis dan Tenaga Kerja Pariwisata
   j. Calender Of Event
3. Prioritas 3 : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Pelatihan SDM Ekonomi Kreatif
   b. Sapras Mall Pelayanan Publik
   c. Pelatihan kewirausahaan, Branding & Digital Marketing serta Pembinaan Gerakan Kewirausahaan Nasional UMKM
   d. Fasilitasi bantuan peningkatan kualitas produk / peningkatan teknologi usaha dan bantuan peralatan kepada pelaku UMKM
   e. Promosi Investasi/Event Investasi di Luar Daerah
   f. Pembuatan Konten/Media Promosi Investasi
   g. Penyusunan Profil Peta/Peluang Investasi
   h. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pasar
   i. Fasilitasi sertifikasi halal dan hak merek
   j. Peningkatan perekonomian khas desa melalui optimalisasi BUMDes

4. Prioritas 4 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia. dengan sasaran sebagai berikut :
    a. Optimalisasi digitalisasi perpustakaan
    b. Kerjasama peningkatan kualitas Pendidikan dengan Brighton dan Australia
    c. Pembangunan/rehabilitasi/utilisasi, sarana prasarana sekolah PAUD, SD dan SMP
    d. Balangan pintar untuk siswa miskin
    e. Program Beasiswa
    f. Peningkatan kompetensi guru
    g. Pelatihan kelas parenting
    h. Penyelenggaraan paket A, B dan C
    i. BOS untuk seluruh SD dan SMP dan BOP untuk seluruh sekolah PAUD
    j. Honorarium Pengajar Ponpes
    k. Fasilitasi BPJS Naker bagi tenaga kerja rentan
    l. Pelatihan Clening Service, costumer service, Office boy, Operator Sarana Ro da 4, Balai Latihan Kerja, Operator Alat berat exavator & Tronton
    m. UHC dan Pembiayaan kapitasi untuk jasa bidan dalam pelayanan ibu hamil dan ibu bersalin
    n. Homecare
    o. Pengembangan RSUD Datu Kandang Haji, Relokasi puskesmas (Puskesmas Pirsus dan Tebing Tinggi) dan Rehabilitasi puskesmas pembantu (Pustu Inan, Kalahiyang, Baruh Bahinu Dalam) dan Rehabilitasi Poskesdes
    p. Pengadaan alat-alat Kesehatan
    q. Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
    r. Optimalisasi Germas dan PHBS
    s. Peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan
    t. Penyelenggaraan kabupaten sehat
    u. Optimalisasi pelayanan dasar SPM Pendidikan dan Kesehatan
5. Prioritas 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi. Dengan sasaran sebagai berikut :
    a. Optimalisasi sarana prasarana perpustakaan dan kearsipan
    b. Optimalisasi pelaksanaan srikandi
    c. Optimalisasi perlindungan dan penyelamatan arsip

d. Digitalisasi Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja
e. Optimalisasi Predikat SAKIP dan RB
f. Jaringan Internet Ditempat umum (free wifi)
g. Command Center
h. Peremajaan perangkat perekaman KTP-el di kecamatan
i. Peningkatan SPM
j. Perluasan Penjaringan Inovasi
k. Integrasi Aplikasi Pelayanan Publik
l. Optimalisasi Pelayanan Kependudukan Mobile dan Wilayah Terpencil
m. Peningkatan Manajemen Talenta (IP ASN)
n. BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas dan optimalisasi akreditasi puskesmas
o. Layanan Adminduk di Daerah Terpencil
p. Penyelenggaraan Pilkades
q. Penegasan dan Penetapan Batas Desa
r. Penguatan dan Pengembangan Satu Data Balangan

6. Prioritas 6 : Percepatan Penangangan Kemiskinan. Dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Optimalisasi Bansos
   b. Rehab Rumah Tidak Layak Huni
   c. Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
   d. Balangan pintar SD SMP untuk siswa miskin
   e. Beasiswa Tidak mampu
   f. Pemenuhan SPM Bidang Sosial
7. Prioritas 7 : Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah. Dengan sasaran sebagai berikut :
   a. Sunatan Massal
   b. Pemberian Makanan Tambahan untuk ibu hamil dan balita
   c. Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Anak
   d. Pemeliharaan Balai adat
   e. Festival Dayak Meratus
   f. Pengembangan cagar budaya Benteng Tundakan
   g. Jelajah cagar budaya untuk seluruh SMP
   h. Seminar dan pengadaan buku sejarah local
   i. Pembinaan kesenian tradisional
   j. Pengendalian Rawan Bencana

k. Pembangunan Gudang/Workshop Alat Kebencanaan
l. Peningkatan Kapasitas SDM Penanganan/Relawan Bencana
m. Terciptanya Masyarakat Taat Perda
n. Patroli Pengamanan dan Pengawalan
o. Bantuan Parpol
p. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
q. Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
r. Pemetaan Wilayah Rawan Konflik
s. Karya Bakti TNI
t. Pemenuhan SPM Kententraman dan Ketertiban Umum

Tabel 4.2

Sasaran, Prioritas Daerah, Sub Prioritas dan Program Prioritas pada RKPD tahun 2025

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
1	• Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur publik • Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman • Meningkatnya indeks kualitas Air, Udara dan Lahan	PD 1 : Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	1	peningkatan pemenuhan sarana dan prasaran infrastruktur publik	Indeks infrastruktur publik	49,42	Persen	1.Program Penyelenggaraan Jalan 2.Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan 3.Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 4.Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda) 5.Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	DINAS PUPR DAN PERKIM, DINAS KOMINFOSAN
					Persentase kerusakan jalan	31,53	Persen		
					Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	100%	Persen		
					Persentase moda transportasi yang laik jalan	95%	Persen		
					Jumlah pelanggaran moda transportasi	11	Kejadian		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
					Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	100	Persen		
					Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	60	Persen		
					Persentase tebing rusak	20,68	Persen		
					Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	39,24	Persen		
					Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfosan	93	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
					Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	87	Persen		
			2	Meningkatnya sarana dan prasarana infrastruktur permukiman	Indeks infrastruktur permukiman	32,75	Persen	6.Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 7.Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh 8.Program Kawasan Permukiman 9.Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (psu)	DINAS PUPR DAN PERKIM
					Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	88,89	Persen		
					Persentase rumah tidak layak huni	2	Persen		
					Luas kawasan kumuh yang tertangani	3	Ha		
					Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	91	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
			3	Peningkatan indeks kualitas Air, udara, dan lahan	Indeks Kualitas Air	74,62	Nilai	10.Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 11.Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 12.Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 13.Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 14.Program Pengelolaan Persampahan 15.Program	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
					Indeks Kualitas Udara	71,11	Nilai		
					Indeks Kualitas Lahan	69,61	Nilai		
					Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100	Persen		
					Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	100	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
					Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100	Persen	Perencanaan Lingkungan Hidup	
					Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	100	Persen		
					Persentase pengelolaan sampah	99	Persen		
					Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100	Persen		
2	• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi • Menurunnya Angka Pengangguran Terbuka	PD 2 : Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Pengembangan Pariwisata	1	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	13,64	Persen	16.Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 17.Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DINAS KETAPANG PERTANIAN DAN PERIKANAN
					Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	6	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
					Target	Satuan		
				Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	1.15	Persen		
				Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura	1.15	Persen		
				Persentase Peningkatan Produktifitas Perkebunan	1.15	Persen		
				Persentase Peningkatan Populasi Ternak	10	Persen		
				Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	8	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
					Persentase peningkatan prasarana pertanian	20	Persen		
			2	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,48%	Persen	18.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 19.Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata 20.Program Pemasaran Pariwisata 21.Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISPORAPAR
					Persentase Destinasi Wisata yang mempunyai Daya Tarik	90%	Persen		
					Cakupan promosi pariwisata	80%	Persen		
					Persentase Peningkatan Kelompok Ekonomi Kreatif dan Persentase Produk Kreasi Unggulan	20%	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
3	Meningkatnya Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	PD 3 : Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	1	Peningkatan Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Pengolahan dan Jasa	6,60%	Persen	22.Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 23.Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 24.Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) 25.Program Pengembangan Umkm 26.Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 27.Program Promosi Penanaman Modal 28.Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 29.Program Pelayanan Penanaman Modal 30.Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal 31.Program Pelatihan Kerja Dan	DKUKMTK,DPMPTSP
					Persentase Koperasi Aktif	30	Persen		
					Pesentase Koperasi dengan SDM yang kompeten	50	Persen		
					Persentase Usaha mikro yang memenuhi kualifikasi standar kempetensi usaha	4	Persen		
					Persentase usaha mikro yang skala usahanya bertambah	4,38	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
					Target	Satuan		
				Pertumbuhan Nilai Investasi (Milyar Rupiah)	615 M	Milyar	Produktivitas Tenaga Kerja 32.Program Penempatan Tenaga Kerja	
				Jumlah sektor potensi investasi baru	1	Potensi		
				Nilai persetujuan investasi/ Rencana Investasi	400	Milyar		
				Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	90	Persen		
				Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	88,7	Nilai		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
					Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola secara elektronik	100	Persen		
					Persentase Tenaga Kerja Terampil sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	60	Persen		
					Persentase Kebutuhan Kerja yang Terpenuhi	60	Persen		
4	• Meningkatnya Indeks Pendidikan • Meningkatnya Indeks Kesehatan	PD 4 : Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	1	Peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,37 - 9,05	Nilai	33.Program Pengelolaan Pendidikan 34.Program Pengembangan Kurukulum 35.Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 36.Program	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
					Angka Harapan Lama Sekolah	13,17 - 13,87	Nilai		
					Nilai rata-rata literasi SD	69,61	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
					Target	Satuan		
				Angka melanjutkan SD ke SMP	79,77	Persen	Pengendalian Perizinan Pendidikan	
				Indeks iklim inklusivitas SD	62,96	Persen		
				Indeks iklim keamanan SD	75,51	Persen		
				Nilai rata-rata numerasi SD	52,51	Persen		
				APM SD/sederajat	92,35	Persen		
				Indeks iklim kebhinekaan SD	73,19	Persen		
				APK SD/sederajat	99,52	Persen		
				Nilai rata-rata literasi SD	69,61	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
					Nilai rata-rata numerasi SD	52,51	Persen		
					Nilai Rata-rata litersasi SMP	62,95	Persen		
					SD Nilai Rata-rata litersasi SMP	43,76	Persen		
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023	65	Persen		
					Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 2023	22,41	Persen		
					Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100	Persen		
			2	Peningkatan Indeks Kesehatan	Usia Harapan Hidup	74.19-74.26	Nilai	37.Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	DINAS KESEHATAN

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
					Target	Satuan		
				Angka Kematian Ibu (AKI)/per 100.000 kelahiran	120	Nilai	Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 38.Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 39.Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 40.Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	
				Angka Kematian Bayi (AKB)/per 1000 kelahiran	11	Nilai		
				Prevalensi Stunting	18,8	Nilai		
				Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	17	Nilai		
				Persentase gedung fasilitas pelayanan kesehatan yang layak	100	Persen		
				MoU antara Pemerintah Daerah dan BPJS, RS daerah dan provinsi	1	MoU		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
					Rasio SDM Kesehatan (9 Jenis Nakes Wajib di FKTP (Dokter)	22	Dokter		
					Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi	100	Persen		
					Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100	Persen		
					Persentase Keluarga yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	65	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
5	Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	PD 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	1	Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi	NILAI SAKIP	76,40 (BB)	Nilai	Program Kesejahteraan Rakyat	SEKRETARIAT DAERAH
					Opini BPK	WTP	Nilai		
					Nilai EKPPD	3,41	Nilai		
					Nilai Indeks Pelayanan Publik	4.01 (-A)	Nilai		
					Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5	Nilai		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
					Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	100	Persen		
					Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	100	Persen		
					Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100	Persen		
6	Menurunnya Angka Kemiskinan	PD 6 : Percepatan Penangangan Kemiskinan	1	Penurunan Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	4,23 - 4,62	Angka	42.Program Pemberdayaan Sosial 43.Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINAS SOSIAL
					Angka PPKS yang tertangani	70,95	%		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
					Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif	87	Persen		
					Persentase PPKS yang terpenuhi perlindungan sosialnya	73	Persen		
					Persentase data PPKS yang valid	60	Persen		
7	• Bertahannya Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA • Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum • Meningkatnya	PD 7 : Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah	1	Bertahannya Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	Angka	44. Program Pemberdayaan Sosial 45. Program Penanggulangan Bencana 46. Program Pengembangan Kebudayaan 47. Program	DINAS SOSIAL , BPBD, DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas		Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
						Target	Satuan		
	Budaya Balangan yang Terlestarikan				Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif	87	Persen	pengembangan kesenian Tradisional 48. Program Pembinaan Sejarah 49. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	
			2	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum	100	Persen		
					Indeks Resiko Bencana	98,2	Persen		
			3	Peningkatan Budaya Balangan	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	87	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
					Target	Satuan		
			yang Terlestarikan	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	100	Persen		
				Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	72	Persen		
				Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	93,33	Persen		

No	Sasaran	Prioritas Daerah	Sub-Prioritas	Indikator	Tahun 2025		Program Prioritas	OPD
					Target	Satuan		
				Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	80	Persen		
				Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	86,67	Persen		

Selain pelaksanaan program prioritas dan program rutin daerah, perlu upaya yang lebih masif untuk mendorong kinerja pencapaian target dimaksud melalui berbagai strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan menyeluruh dan dapat dilaksanakan secara kolaboratif untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan di Kabupaten Balangan. Upaya tersebut diantaranya dapat didorong melalui berbagai inovasi pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun multisektor yang termuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Tahun 2025.

Berdasarkan tabel persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 sebesar 100% atau sebanyak 32 SKPD sedangkan jumlah inovasi yang terjaring sebanyak 355 inovasi, baik yang masih berupa gagasan atau ide maupun inovasi yang sudah jalan. Sebanyak 277 inovasi yang di uploud atau dilaporkan oleh admin inovasi pada Sistem Inovasi Daerah (Sinovda) dan hanya 24 inovasi yang memenuhi kriteria untuk ikut dalam ajang Bailang tahun 2023. Dari hasil verifikasi dan validasi menghasilkan sebanyak 10 karya inovasi yang masuk kedalam tahapan presentasi dan penilaian inovasi, yang sudah melakukan Presentasi karyanya pada tanggal 04 September 2023. Dari hasil penilaian Tim Juri pada saat presentasi tersebut di hasilkan 6 karya inovasi dari SKPD dan BLUD/UPT Puskesmas dengan predikat Terbaik I,II dan III, Juara harapan I, II dan harapan III. Upaya fasilitasi penerapan inovasi bertujuan untuk meningkatkan capaian indeks inovasi daerah sebagai bentuk diseminasi dalam mendorong budaya inovasi di setiap perangkat daerah.

a) Kemanfaatan Indeks Inovasi Daerah

Manfaat dari terpenuhnya indeks inovasi daerah Kabupaten Balangan adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Balangan
    a. Mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah
    b. Sarana dalam mengakselerasikan kinerja terhadap kebutuhan masyarakat terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik
    c. Meningkatnya capaian indeks inovasi nasional sebagai salah satu indikator peningkatan kinerja pemerintah, kesejahteraan PNS melalui besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat

d. Sebagai media apresiasi dan penghargaan bagi inisiator dan/atau innovator baik yang bersumber dari perangkat daerah, pemerintahan desa dan masyarakat.

2. Bagi inisiator dan/ atau innovator adalah merupakan acuan dalam membangun dan mengembangkan inovasi yang dimiliki serta menjadi sarana ukur dalam mencapai kualitas inovasi yang dibangun.
3. Bagi masyarakat sebagai media sosialisasi tentang diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam pembangunan daerah.
4. Bagi stakeholder sebagai media sosialisasi tentang diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif sehingga menumbuhkan kemitraan-kemitraan baru yang sinergi terhadap pembangunan di daerah.

4.2.4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD adalah bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Saran dan masukan dimaksud diperoleh dari hasil pelaksanaan proses perencanaan yaitu pada tahapan Pembukaan dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten dan Dialog Interaktif Rancangan Akhir RKPD serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025. Masukan yang telah masuk dalam SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri kemudian diseleksi berdasarkan kewenangan provinsi dan kemudian dilakukan pemilahan berdasarkan prioritas.

Dari saran masukkan dan usulan DPRD Kabupaten Balangan dalam penyempurnaan RKPD 2025. Berikut hasil pokok-pokok pikiran DPRD.

Tabel 4.3
Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Balangan

NO	NAMA SKPD	JUMLAH USULAN
1	*2*	*3*
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	72
2	DINAS KESEHATAN	8
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	739
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	21

NO	NAMA SKPD	JUMLAH USULAN
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1
7	DINAS SOSIAL	6
8	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18
9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	1080
10	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	6
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1
12	DINAS PERHUBUNGAN	22
13	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	13
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, DAN TENAGA KERJA	47
15	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	105
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	58
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3
19	SEKRETARIAT DAERAH	120
20	SEKRETARIAT DPRD	1
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	7
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	1
23	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0
24	INSPEKTORAT	1
25	KECAMATAN LAMPIHONG	1
26	KECAMATAN BATUMANDI	1
27	KECAMATAN AWAYAN	1
28	KECAMATAN HALONG	1
29	KECAMATAN JUAI	1
30	KECAMATAN PARINGIN	3
31	KECAMATAN TEBING TINGGI	1
32	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	4
	TOTAL	2345

Sumber : SIPD RI, 2024

4.2.5 SINKRONISASI PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 DENGAN RKPD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025 DAN RKP TAHUN 2025

Kabupaten Balangan selalu berupaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021-2026, maka telah dirumuskan Prioritas dan Sasaran pembangunan Kabupaten Balangan tahun 2025. Prioritas dan Sasaran

tersebut dilandaskan pada permasalahan yang ada di Kabupaten Balangan yang berusaha untuk diselesaikan.

Selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program prioritas nasional dan program prioritas Provinsi Kalimantan Selatan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Balangan sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional dan Provinsi dan Daerah.

Prioritas dan Sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2025 tersebut juga tidak lepas dari Prioritas Nasional yang pada tahun 2025 ini dijabarkan dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional serta 5 (lima) Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan 7 prioritas Kabupaten Balangan. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.4
Sandingan Agenda Pembangunan/Program Pembangunan dengan prioritas daerah/ Program prioritas kabupaten Balangan Tahun 2025

NO	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi	No	Prioritas Kabupaten
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila Demokrasi dan Hak Azasi manusia	2	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi	3	Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM
				5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi.
2	Memerntapkan sistem pertahanan keamanan negara yang mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomu biru	1	Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	2	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Pengembangan Pariwisata
		4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada	3	Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM

NO	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi	No	Prioritas Kabupaten
			Pelayanan Publik dan Investasi	5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi.
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	1	Penguatan Sektor Industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	2	Peningkatan Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Pengembangan Pariwisata
		2	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		3	Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi	1	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas	2	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	1	Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	3	Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM
		5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
				7	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan	1	Penguatan sektor industri, UMKM, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjutan	3	Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM

NO	Prioritas Nasional	No	Prioritas Provinsi	No	Prioritas Kabupaten
		4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi	5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi.
				6	Percepatan Penangangan Kemiskinan
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba	2	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		4	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik dan Investasi	5	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi.
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	2	Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	4	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
		5	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mendukung Ketahanan Bencana	1	Peningkatan Pemenuhan Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
				7	Pemantapan Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan serta Kondusifitas Daerah

Sumber : Data diolah (RKP Tahun 2025; Rankhir RKPD Kalsel 2025; Rankhir RKPD Balangan 2025)

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS TAHUN 2025

Program dan kegiatan prioritas yaitu program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal. Rencana program prioritas daerah Kabupaten Balangan tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun 2023, perkiraan kedudukan tahun 2024 dan capaian kinerja yang telah direncanakan dalam RPJMD Kabupaten Balangan tahun 2021-2026 .

Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dilaksanakan melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, *top down*, dan *bottom up* untuk menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dengan tetap memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang saat ini dan mempertimbangkan aspek-aspek teknokratik (Teknokratik, Holistik, Integrasi dan Spasial) dan politis. Bappeda telah melakukan proses sinkronisasi dan verifikasi dengan hasil musrenbang kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD, dan Renstra SKPD yang pada dasarnya adalah merupakan rencana program dan kegiatan prioritas dimana pengalokasiannya mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta telah mengacu pada dokumen perencanaan yang ada yaitu RPJMD Kabupaten Balangan, Prioritas RKP Pusat dan Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Selatan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun bagi masyarakat;
2. Dalam rangka mempercepat capaian sasaran Perangkat Daerah;
3. Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah;

4. Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pagu indikatif setiap program dan kegiatan pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator yang penetapannya dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan.
2. Menentukan keluaran/output setiap sub kegiatan dan kegiatan .
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap output sub kegiatan dan kegiatan untuk setiap program.
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output sub kegiatan dan kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.
5. Menghitung alokasi berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Program dan kegiatan yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya dan dijelaskan pada tabel Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan yang terdapat pada lampiran I RKPD ini. Uraian secara umum Program Prioritas per Urusan RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1.

Matrik Rencana Program Prioritas Per Urusan Kabupaten Balangan Tahun 2025

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			**535.375.654.461**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**522.531.152.221**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			**522.531.152.221**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	72,50 Nilai 86 Nilai	**299.169.081.946**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	Nilai rata-rata numerasi SD Indeks iklim inklusivitas SD Nilai rata-rata literasi SD Indeks iklim keamanan SD Indeks iklim kebhinekaan SD Angka melanjutkan SD ke SMP APM SD/sederajat APK SD/sederajat	52,51 Nilai 62,72 Nilai 69,61 Nilai 78,66 Nilai 79,15 Nilai 79,77 % 92,35 % 99,52 %	**216.455.300.475**
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	Nilai Rata-rata Numerasi SMP Nilai rata-rata numerasi SD Nilai Rata-rata litersasi SMP Nilai rata-rata literasi SD	43,76 Nilai 52,51 Nilai 62,95 Nilai 69,61 Nilai	**699.756.600**
4	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 2023 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023	22,41 % 65 %	**6.027.872.200**
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100 %	**179.141.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**12.844.502.240**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			**12.844.502.240**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	72 %	**673.750.000**
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	93,33 %	**7.649.588.240**
3	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	80 %	**1.643.945.800**
4	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	86,67 %	**2.877.218.200**
	DINAS KESEHATAN			**216.690.131.567**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**216.676.259.667**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**216.676.259.667**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**105.921.394.258**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase gedung Fasyankes yang Layak	100 Persen	**93.602.505.709**
3	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	Rasio SDM Kesehatan (9 Jenis Nakes Wajib di FKTP.(Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Dll)	22,23,24 Angka/Nilai	**16.239.677.500**
4	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100 Persen	**190.000.000**
5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	PERSENTASE KELUARGA YANG MELAKSANAKAN PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)	65 Persen	**722.682.200**
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI			**86.728.537.100**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**86.728.537.100**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**86.728.537.100**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**42.000.000.000**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase gedung Fasyankes yang Layak	100 Persen	**44.728.537.100**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	PUSKESMAS PARINGIN			**982.258.104**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**982.258.104**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**982.258.104**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**808.664.604**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**173.593.500**
	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN			**872.850.741**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**872.850.741**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**872.850.741**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**725.564.781**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**147.285.960**
	PUSKESMAS AWAYAN			**1.268.188.500**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.268.188.500**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**1.268.188.500**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Persen	**1.080.000.000**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**188.188.500**
	PUSKESMAS TEBING TINGGI			**666.243.820**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**666.243.820**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**666.243.820**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**512.537.700**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**153.706.120**
	PUSKESMAS LOKBATU			**582.873.742**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**582.873.742**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**582.873.742**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**463.472.222**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**119.401.520**
	PUSKESMAS BATUMANDI			**815.681.152**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**815.681.152**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**815.681.152**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**664.882.752**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**150.798.400**
	PUSKESMAS TANAH HABANG			**432.893.488**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**432.893.488**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**432.893.488**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**294.023.808**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**138.869.680**
	PUSKESMAS LAMPIHONG			**1.056.397.482**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.056.397.482**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**1.056.397.482**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**807.905.082**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**248.492.400**
	PUSKESMAS JUAI			**1.230.924.368**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.230.924.368**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**1.230.924.368**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**1.080.535.868**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**150.388.500**
	PUSKESMAS PIRSUS			**295.799.234**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**295.799.234**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**295.799.234**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**181.194.134**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**114.605.100**
	PUSKESMAS HALONG			**1.217.328.360**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**1.217.328.360**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**1.217.328.360**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**1.002.000.000**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**215.328.360**
	PUSKESMAS UREN			**574.952.912**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**574.952.912**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			**574.952.912**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES	73 Angka/Nilai	**346.068.392**
2	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Persentase SPM Bidang Kesehatan	100 Persen	**228.884.520**
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN			**31.100.045.850**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**31.100.045.850**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**31.100.045.850**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip SKPD	69 Angka	**23.850.078.050**
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	Persentase jasa konstruksi yang terampil	60 Persen	**5.395.123.000**
3	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	60 Persen	**1.854.844.800**
	BIDANG BINA MARGA			**244.143.072.100**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**244.143.072.100**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**244.143.072.100**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase kerusakan jalan***	31,53 Persen	**244.143.072.100**
	BIDANG CIPTA KARYA			**317.301.910.072**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**317.301.910.072**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**317.301.910.072**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	Persentase rumah tangga yang terakses air bersih layak	88,89 Persen	**10.000.000.000**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak	100 Persen	**10.809.725.700**
3	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	Persentase bangunan/gedung sesuai standart	95,73 Persen	**212.392.184.372**
4	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	Jumlah bangunan yang ditata	5 Unit	**84.100.000.000**
	BIDANG SUMBER DAYA AIR			**42.939.299.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**42.939.299.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			**42.939.299.000**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	Persentase tebing rusak Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	20,68 Persen 39,24 Persen	**42.939.299.000**
	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**60.657.386.813**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**60.657.386.813**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			**60.657.386.813**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 Persen	**1.068.613.600**
2	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	Luas kawasan kumuh yang tertangani	3 Ha	**870.457.500**
3	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96%	**32.302.236.150**
4	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	91%	**26.416.079.563**
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			**18.859.119.635**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**18.859.119.635**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**18.859.119.635**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	72,00 -	**10.326.428.735**
2	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	100 %	**6.050.710.900**
3	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	**2.481.980.000**
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA			**19.784.329.456**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**19.784.329.456**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			**19.784.329.456**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah	76.40 Nilai Sakip	**10.396.265.284**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitanya Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	100 Persen(%) 750 Kegiatan 80 Persen	**9.388.064.172**
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**25.040.759.265**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			9.246.554.865
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			9.246.554.865
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai IKM Perangkat Daerah	85 Nilai	**9.246.554.865**
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			**15.794.204.400**
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			**15.794.204.400**
1	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100%	**6.231.484.100**
2	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	Persentase Parpol yang Aktif	100 %	**1.802.398.600**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	Persentase Ormas yang Aktif	100 %	**581.405.100**
4	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	100%	**1.283.318.000**
5	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan	100 %	**5.597.374.800**
	DINAS SOSIAL			**35.713.962.360**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**35.713.962.360**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			**35.713.962.360**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,40 Nilai	**12.891.334.560**
2	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif	87 %	**11.384.300.000**
3	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100 %	**2.465.111.500**
4	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial	73 %	**7.978.721.400**
5	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	Persentase korban bencana yang terpulihkan kembali	100 %	**867.754.900**
6	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	Persentase makam pahlawan dalam kondisi baik	100 %	**126.740.000**
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**71.805.212.518**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**71.805.212.518**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			**17.414.103.078**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	76,51	**13.266.793.178**
2	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21,5 %	**1.978.426.400**
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	75	
		IPG (Indeks Pembangunan gender)	92,83	
3	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	**298.998.900**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	14,86%	**561.622.100**
5	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100%	**129.167.200**
6	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	Persentase Desa Layak Anak	68,75	**840.894.800**
7	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100%	**338.200.500**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			**47.036.655.940**
1	**PROGRAM PENATAAN DESA**	**-**	-	**537.000.000**
2	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	1 kerjasama	**27.091.929.800**
3	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	95%	**12.536.957.640**
4	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	65%	**6.870.768.500**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			**7.354.453.500**
1	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,99	**4.886.974.500**
2	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	77	**934.351.200**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	15.00	**1.533.127.800**
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,68%	
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN			**277.594.869.744**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**5.966.491.796**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			**5.966.491.796**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi	1 %	**2.602.719.896**
2	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	Skor PPH Ketersediaan Skor PPH Konsumsi	88.24 % 89.16 %	**2.600.000.200**
3	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	Persentase penanganan desa rentan pangan	20 %	**677.674.500**
4	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90 %	**86.097.200**
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**271.628.377.948**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			**86.227.797.550**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%)	5 5 %	**366.461.000**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	3.75 % 50.80 %	**83.799.485.150**
3	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	Persentase Peningkatan Kawasan Perikanan Lestari (%)	20 %	**519.020.800**
4	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (%)	86 %	**1.542.830.600**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			**185.400.580.398**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	74 % 84 %	**37.333.542.999**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Populasi Ternak Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	10 % 1.10 1.10 % 1.10 undefined 6 %	**67.089.408.029**
3	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	Persentase peningkatan prasarana pertanian Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	20 % 8 %	**70.005.531.320**
4	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 %	**1.227.877.850**
5	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	100 100 %	**5.344.024.300**
6	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	4,2 %	**4.400.195.900**
	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP			**44.760.273.570**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**44.760.273.570**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			**1.759.999.500**
1	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	100 %	**178.000.000**
2	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100 %	**20.000.000**
3	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100 %	**776.000.000**
4	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	100 %	**785.999.500**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			**43.000.274.070**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Point	**18.347.522.870**
2	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	**1.523.134.000**
3	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100 %	**2.264.998.900**
4	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	100 %	**10.114.934.500**
5	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100 %	**50.000.000**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	100 %	**500.000.000**
7	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100 %	**49.999.300**
8	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %	**109.940.900**
9	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	**75.000.000**
10	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	Persentase pengelolaan sampah	99 %	**9.964.743.600**
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**12.278.284.544**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**12.278.284.544**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			**12.278.284.544**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,40 Nilai	**9.733.368.644**
2	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	93,33 %	**747.070.500**
3	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100 %	**732.323.800**
4	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	**1.017.503.100**
5	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %	**48.018.500**
	DINAS PERHUBUNGAN			**39.096.187.750**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**39.096.187.750**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			**39.096.187.750**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,25 %	**13.023.542.572**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	Persentase Jalan Yang Tertib Manajemen Lalu Lintas Jumlah Pelanggaran Moda Transportasi Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase moda transportasi yang laik jalan	100 % 11 Kejadian 1400 Unit 95 %	**26.072.645.178**
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN			**28.910.027.497**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**28.910.027.497**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			**27.640.298.097**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik	96.25 %	**11.434.665.545**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarluaskan Informasi Publik	90	**9.234.797.700**
3	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet DiskominfosanPersentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	93	**6.970.834.852**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			**714.606.900**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	Persentase data sektoral yang terakses-Persentase data sektoral yang valid	100 %	**714.606.900**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			**555.122.500**
1	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	Persentasi Gangguan Yang Terselesaikan-Persentasi Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Yang Aman	100 %	**555.122.500**
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA			**71.510.000.216**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**70.317.822.216**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			**66.246.475.716**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Aluntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)	74 Nilai	**13.928.191.692**
2	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	30%	**290.896.000**
		Rasio Ketersediaan Tenaga Kerja Terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja	100%	
3	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ bersertifikat kompetensi	4%	**34.728.500.924**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
		Persentase Tenaga Kerja Terampil Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja	90%	
4	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri	65.00 %	**1.925.691.200**
5	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	Persentase PPHI yang difasilitasi	100%	**15.373.195.900**
		Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100%	
		Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan	100%	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			**4.071.346.500**
1	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Persentase Koperasi Aktif (%)	65%	**585.492.300**
2	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Kompetensi Koperasi (%)	90%	**513.080.000**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	Persentase Usaha Mikro Yang Memenuhi Kualifikasi Standar Kompetensi Usaha (%)	75%	**2.368.974.200**
		Persentase Usaha Mikro Yang Menerapkan E-Comerce (%)	0,20%	
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	Persentase Usaha Mikro Yang Skala Usahanya Bertambah (%)	0,64 %	**603.800.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**1.192.178.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			**1.192.178.000**
1	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase warga transmigrasi yang terampil	16%	**486.148.000**
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	19,35%	**706.030.000**
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			**14.957.199.809**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**14.957.199.809**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			**14.957.199.809**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP	72,60 (BB) Nilai	**8.560.958.909**
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1 Potensi	**547.672.000**
3	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	Nilai persetujuan investasi/ Rencana Investasi	400 M Rp	**713.896.800**
4	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	88,7 Nilai 92 Nilai	**4.505.022.100**
5	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	90 %	**343.000.000**
6	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola secara elektronik	100 %	**286.650.000**
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA			**43.086.574.078**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**36.179.929.878**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			**36.179.929.878**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73 Nilai	**15.596.529.078**
2	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan yang aktif, pemuda pelopor dan persentase wirausaha muda	35%	**2.094.761.100**
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	Persentase pertumbuhan atlet yang berprestasi	70%	**18.171.622.700**
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	60%	**317.017.000**
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**6.906.644.200**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			**6.906.644.200**
1	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	Persentase Destinasi Wisata yang mempunyai Daya Tarik	80%	**3.997.777.900**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	Cakupan promosi pariwisata	20%	**2.020.085.500**
3	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	Persentase Peningkatan Kelompok sadar Wisata dan Persentase Produk Kreasi Unggulan	30%	**888.780.800**
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN			**22.015.610.217**
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			**22.015.610.217**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			**19.448.257.417**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Predikat	**13.342.697.517**
2	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	70	**5.781.243.500**
3	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	Rata-Rata Kunjungan per Hari Rata-Rata IKM Perpustakaan Kewenangan Daerah	119 Orang 82,66 Persen	**324.316.400**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			**2.567.352.800**
1	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	Persentase Revitalisasi Arsip dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan Lokal	100%	**1.331.324.600**
2	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	100%	**1.191.199.800**
3	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penggunaan Arsip	100%	**44.828.400**
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			**19.397.620.546**
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			**19.397.620.546**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			**5.400.022.700**
1	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN PERSENTASE PELAKU USAHA	100 PERSEN 18.42 PERSEN	**237.162.500**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
		PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN		
2	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR	10 PERSEN	**2.109.490.100**
3	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	7.00 PERSEN	**571.534.400**
4	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR	70.00 PERSEN	**329.559.600**
5	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	29.16 PERSEN 76.92 PERSEN	**444.262.400**
6	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL	21.74 PERSEN	**1.708.013.700**
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			**13.997.597.846**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH NILAI SKM PERANGKAT DAERAH	100 PERSEN 80.40 ERSEN 90.00 ERSEN	**11.746.166.746**
2	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	14.00 PERSEN	**836.724.000**
3	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM	2.11 PERSEN	**244.722.500**
4	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG	2.58 PERSEN	**1.169.984.600**
	BAGIAN UMUM			**90.838.277.992**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**90.838.277.992**
	SEKRETARIAT DAERAH			**90.838.277.992**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB (74,4) Nilai	**90.838.277.992**
	BAGIAN ORGANISASI			**2.687.040.500**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**2.687.040.500**
	SEKRETARIAT DAERAH			**2.687.040.500**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Persentase realisasi kebijakan bidang pengadministrasi umum yang terlaksana	100 %	**2.687.040.500**
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN			**5.738.710.700**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**5.738.710.700**
	SEKRETARIAT DAERAH			**5.738.710.700**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Rata-Rata capaian kinerja SKPD dan unit kerja garis koordinasi	100 %	**5.738.710.700**
	BAGIAN PEMERINTAHAN			**2.948.143.000**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**2.948.143.000**
	SEKRETARIAT DAERAH			**2.948.143.000**
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	100 %	**2.948.143.000**
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			**133.852.412.048**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**133.852.412.048**
	SEKRETARIAT DAERAH			**133.852.412.048**
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100 %	**133.852.412.048**
	BAGIAN HUKUM			**2.067.422.000**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**2.067.422.000**
	SEKRETARIAT DAERAH			**2.067.422.000**
1	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	100 %	**2.067.422.000**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			**1.159.378.600**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**1.159.378.600**
	SEKRETARIAT DAERAH			**1.159.378.600**
1	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana	100%	**1.159.378.600**
		Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	100 %	
		Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100 %	
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			**1.591.374.600**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**1.591.374.600**
	SEKRETARIAT DAERAH			**1.591.374.600**
1	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	100 %	**1.591.374.600**
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			**2.890.226.000**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**2.890.226.000**
	SEKRETARIAT DAERAH			**2.890.226.000**
1	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100 %	**2.890.226.000**
	SEKRETARIAT DPRD			**85.000.000.000**
	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			**85.000.000.000**
	SEKRETARIAT DPRD			**85.000.000.000**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,20 Nilai	**45.669.020.121**
2	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	Tingkat Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	85.18 Nilai	**39.330.979.879**
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH			**24.806.537.609**
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**24.175.248.609**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Sakip Prangkat Daerah	74,40 %	**11.246.304.409**
2	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	1. Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD	100,00 %	**3.587.595.900**
		2. Persentase proritas daerah dengan prioritas Nasional	100,00 %	
3	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi & infrastruktur dengan nilai baik	95,00 %	**5.175.405.800**
		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik	95,00 %	
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			**4.165.942.500**
1	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	Tercapainya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	**4.165.942.500**
	NON URUSAN			**631.289.000**
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH			**53.767.258.619**
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**53.767.258.619**
	KEUANGAN			**53.767.258.619**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai Akuntabilitas Kinerja (NIlai SAKIP) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	78	**34.743.582.399**
2	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	88	**10.992.661.920**
3	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	Indeks Pengelolaan Aset	2,7	**4.402.191.900**
4	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	Persentase penerimaan PBB P-2 dan BPHTB % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB dan Persentase Pendapatan non PAD	100%	**3.628.822.400**
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)			**433.589.801.141**
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**433.589.801.141**
	KEUANGAN			**433.589.801.141**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
1	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	88	**433.589.801.141**
	100%			**27.427.709.440**
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			**27.427.709.440**
	KEPEGAWAIAN			**19.282.992.940**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71 BB	**8.653.904.740**
2	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	Persentase Talenta/Calon Talenta yang direkrut melalui jalur CPNS/PPPK Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dapat dilakukan secara daring (online)	0,5 % 19 %	**10.629.088.200**
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			**8.144.716.500**
1	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial-Kepemimpinan	55 %	**8.144.716.500**
	INSPEKTORAT			**20.999.995.816**
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			**20.999.995.816**
	INSPEKTORAT DAERAH			**20.999.995.816**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah	74 (BB) Predikat 88,25 Persen	**16.086.666.016**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	Prosentase SKPD yang selesai TLHP Persentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik	60 Persen 70 Persen	**2.594.738.200**
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB Nilai MCP	28 Persen 90 Persen 93 Persen	**2.318.591.600**
	KECAMATAN LAMPIHONG			**6.740.500.734**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**6.740.500.734**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	KECAMATAN			**6.740.500.734**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,40 Nilai	**5.838.047.534**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	13 Laporan	**197.013.500**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP	6 Laporan	**235.964.500**
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**64.464.800**
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**215.926.200**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**189.084.200**
	KECAMATAN BATUMANDI			**6.857.058.740**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**6.857.058.740**
	KECAMATAN			**6.857.058.740**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,40 Nilai	**6.021.831.740**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	12 Laporan	**41.792.500**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP	4 Laporan	**172.466.500**
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**9.800.000**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**467.307.100**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**143.860.900**
	KECAMATAN AWAYAN			**5.847.982.472**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**5.847.982.472**
	KECAMATAN			**5.847.982.472**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70,40 Nilai	**4.860.196.972**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 laporan	**113.503.300**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1 laporan	**174.317.000**
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 laporan	**89.383.500**
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 laporan	**386.438.300**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 laporan	**224.143.400**
	KECAMATAN HALONG			**6.306.727.216**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**6.306.727.216**
	KECAMATAN			**6.306.727.216**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	73,40 Nilai	**4.885.790.116**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**706.309.600**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**219.818.700**
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**83.060.000**
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**40.220.000**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**371.528.800**
	KECAMATAN JUAI			**5.436.878.676**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**5.436.878.676**
	KECAMATAN			**5.436.878.676**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,00 Nilai	**4.344.661.476**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**420.186.900**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**205.054.000**
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**160.177.000**
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**83.596.400**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**223.202.900**
	KECAMATAN PARINGIN			**11.363.748.054**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**11.363.748.054**
	KECAMATAN			**11.363.748.054**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74 Nilai	**9.662.280.114**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	**458.742.540**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Laporan	**536.930.500**
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**300.834.000**
5	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Disusun Tepat Waktu Dan Sesuai SOP	1 Laporan	**404.960.900**
	KELURAHAN PARINGIN KOTA			**1.357.276.300**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**1.357.276.300**
	KECAMATAN			**1.357.276.300**
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**1.357.276.300**
	KELURAHAN PARINGIN TIMUR			**1.433.314.900**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**1.433.314.900**
	KECAMATAN			**1.433.314.900**
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**1.433.314.900**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
	KECAMATAN TEBING TINGGI			**5.977.073.058**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**5.977.073.058**
	KECAMATAN			**5.977.073.058**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72.40 Nilai	**4.747.790.958**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**232.710.900**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Desa yang Aktif	60 LKD	**483.473.700**
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**124.520.000**
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun tepat waktu dan Sesuai SOP	100 %	**10.970.000**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	Jumlah Lapran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	**377.607.500**
	KECAMATAN PARINGIN SELATAN			**9.641.596.595**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**9.641.596.595**
	KECAMATAN			**9.641.596.595**
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,46 Nilai	**7.879.568.695**
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**290.052.300**
3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**1.208.295.600**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
			TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5
4	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	Jumlah Laporan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**54.340.000**
5	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**11.720.000**
6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	1 Laporan	**197.620.000**
	KELURAHAN BATU PIRING			**987.009.400**
	UNSUR KEWILAYAHAN			**987.009.400**
	KECAMATAN			**987.009.400**
1	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	**987.009.400**

Sumber : SIPD RI, Data Diolah, 2024

Tabel 5.2
Konsistensi Program dan Pagu Pendanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan RPJMD
Tahun Pelaksanaan 2025 Kabupaten Balangan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			106.584.722.460							
01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	77,05	105.056.168.942	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Nilai rata-rata literasi SD	69,61%	151.072.717.349,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	99,09			Indeks iklim kebhinekaan SD	73,19%				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	81,36			Indeks iklim inklusivitas SD	62,96%				
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraaan	88,86			APM SD/sederajat	92,35%				
						Angka melanjutkan SD ke SMP	79,77%				

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Indeks iklim keamanan SD	75,51%				
						APK SD/sederajat	99,52%				
						Nilai rata-rata numerasi SD	52,51%				
01:01:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase pengembangan kurikulum	100%	130.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai Rata-rata litersasi SMP	62,95%	699.756.600,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
						Nilai rata-rata literasi SD	69,61%				
						Nilai rata-rata numerasi SD	52,51%				

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Nilai Rata-rata Numerasi SMP	43,76%				
01:01:04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Sertifikasi	88%	1.178.553.518	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 2023	22,41%	5.508.283.200,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
						Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023	65%				
01:01:05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100%	220.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100%	179.141.000,00			Dinas Pendidikan & Kebudayaan
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		349,24	74.842.966.597	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 kelahiran hidup	131	68.608.557.361	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 kelahiran hidup	132 Kelahiran hidup 27 Persen	59.808.042.878,00			Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	11			Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	12 Kelahiran Hidup	53.000.000.000,00			
		Prevalensi Stunting	15%			Prevalensi Stunting	16 Persen	969.068.906,00			
								834.654.320,00			
								996.549.000,00			
								711.623.156,00			

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								580.350.981,00			
								867.553.034,00			
								457.178.294,00			
								1.022.381.952,00			
								1.062.319.120,00			
								278.576.214,00			

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								1.308.850.340,00			
								675.684.512,00			
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100%	5.747.754.596	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	100 % 100 Persen	12.746.310.300,00			Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%			Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100 Persen				
01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	45.890.460	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	27 Sertifikat 100 Persen 100 %	261.972.000,00			Dinas Kesehatan
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	65%	440.764.180	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	60 Persen 60 %	495.527.400,00			Dinas Kesehatan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			156.858.092.805	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
01:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	85.24%	83.000.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kerusakan jalan	31,53%	137.264.650.400,00			Dinas PUPR PERKIM
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap	87.39%	13.800.000.000							Dinas PUPR PERKIM
01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah dalam kondisi baik	14.27%	4.050.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik	39,24 Persen	15.647.939.000,00			Dinas PUPR PERKIM
		Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik	39.24%	15.260.000.000		Persentase tebing rusak	20,68 Persen				Dinas PUPR PERKIM
01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	85.27%	5.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang terakses air bersih layak	88,89 Persen	0,00			Dinas PUPR PERKIM

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	95.76%	3.264.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak	100 Persen	533.561.700,00			Dinas PUPR PERKIM
01:03:07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Permukiman yang dikembangkan	91.19%	12.234.092.805	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN						Dinas PUPR PERKIM
01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata (buah)	1	4.000.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan yang ditata	5 UNIT	35.400.000.000,00			Dinas PUPR PERKIM
01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89.82%	9.150.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan/gedung sesuai standart	95,73 Persen	81.607.264.941,00			Dinas PUPR PERKIM
01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina	85.0%	1.150.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase jasa konstruksi yang terampil	60 Persen	1.397.838.200,00			Dinas PUPR PERKIM
01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	89%	5.950.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	60 Persen	1.109.923.700,00			Dinas PUPR PERKIM

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			9.086.369.523	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
01:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	1.422.144.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %	1.052.293.600,00			Dinas PUPR PERKIM
01:04:04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96%	867.609.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	96 % 95 %	3.874.236.150,00			Dinas PUPR PERKIM
01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	98.00	1.871.309.401	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luas kawasan kumuh yang tertangani	3 Ha	645.961.000,00			Dinas PUPR PERKIM
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	91%	4.925.307.122	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	89 %	746.740.708,00			Dinas PUPR PERKIM
01:05	KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT			7.551.975.723	KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	16	5.036.179.418	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitanya Persentase Terbentuknya Kelompok Budaya Masyarakat Taat Perda	750 Kegiatan 80 Persen 100 Persen(%) 80 Persen	7.612.652.120,00			SATPOL PP
01:05:03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	2.116.496.305	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana	100 %	3.573.573.963,00			BPBD
01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	100%	399.300.000	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 %	900.000.000,00			BPBD

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			7.155.702.608	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						
01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	87%	525.637.613	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif	87 %	4.479.540.000,00			Dinas Sosial
01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	100%	44.467.500	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam pahlawan dalam kondisi baik	100 %	113.085.000,00			Dinas Sosial
01:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	prosentase cakupan ppks (lansiaDisabilitasAnak Terlantar Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	636.413.143	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	prosentase cakupan ppks (lansiaDisabilitasAnak Terlantar Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100 %	674.146.000,00			Dinas Sosial
01:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi bantuan sosial	73%	5.605.690.702	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi bantuan sosial	71 %	1.432.551.000,00			Dinas Sosial
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	343.493.651	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang terpulihkan kembali	100 %	398.780.000,00			Dinas Sosial

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
02:07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			11.518.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	30.00%	100.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Presentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	-	57.718.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi	4.00%	9.643.500.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi	4 %	4.156.390.200,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri	65%	1.035.000.000,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri	65.00 %	758.649.200,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase PPHI yang difasilitasi	100.00%	739.500.000,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase PPHI yang difasilitasi	100 %	3.418.754.900,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100.00%			Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100%				
02:08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			1.832.119.058	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
02:08:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21.15%	1.027.050.001	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	21.10 %	546.742.000,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	1800:00:00			IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	74,04				
		IPG (Indeks Pembangunan gender)	92.83			IPG (Indeks Pembangunan gender)	92,8%				

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	82.713.362	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100 %	248.858.300,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	14.86%	213.365.350	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	15,76 %	502.972.400,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100%	119.992.373	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100 %	117.387.500,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak	68.75	262.472.595	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak	68.50 indeks	692.347.100,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100%	126.525.377	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100 %	311.120.500,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			1.335.194.200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						
02:09:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	15%	316.006.700	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi	1 Rasio	1.300.000.000,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	87,7	731.769.900	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH Ketersediaan	88.24 p	1.780.934.000,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	5	175.502.300	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan desa rentan pangan	20 %	666.347.500,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasepangan segar asaltumbuhan yang memenuhipersyaratanmutu dan keamananpangan	80%	111.915.300	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	90 undefined	133.952.200,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
02:10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			312.600.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
02:10:02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI						Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	50.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	-	-	40.000.000,00			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100%	3.600.000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100 %	20.000.000,00			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:10:09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100%	220.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100 %	200.000.000,00			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	14.000.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah	100 %	50.000.000			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			11.593.400.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	1.000.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	100 %	800.000.000,00			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	1.900.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup	100 %	1.215.000.000,00			-
02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik	100%	380.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati	100 %	3.250.000.000,00			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	191.200.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3	100 %	50.000.000,00			-
02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	185.400.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan	100 %	200.000.000,00			Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100%	179.900.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	100 %	50.000.000,00			-
02:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	300.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						-
02:11:09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	167.700.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100 %	110.000.000,00			-

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	89.200.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100 %	75.000.000,00			-
02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	100%	7.200.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah	99 %	75.000.000,00			-
02:12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			1.227.080.917	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
02:12:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	-KK 100%	371.494.200	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	93,33 %	192.319.000,00			Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
			- KTP-el 100%								
			- KIA 60%								

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	80%	448.383.844	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100 %	615.423.400,00			
02:12:04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	389.110.953	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan	100 %	1.107.012.600,00			Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan profil kependudukan	100%	18.091.920	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100 %	147.942.000,00			Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
02:13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			13.875.315.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
02:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	65%	5.616.405.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	-	7.401.902.200,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					PROGRAM PENATAAN DESA			537.000.000,00			
02:13:05	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	1 Kerjasama	365.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	1 kerjasama	729.319.488,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:13:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	95%	7.893.910.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	-	10.329.960.400,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			2.036.481.800	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduuduk (LPP)	01:06	596.481.800	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduuduk (LPP)	0,00	0,00			Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk & KBDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan DesaDinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	81.31%	984.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	81.30 %	694.434.000,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	20:03	456.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR)	17 Persen	36.085.800,00			Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,68%			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun					
02:15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			8.163.888.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						
02:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	95%	8.163.888.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	100%	9.911.701.596,00			Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	91.18%			Persentase moda transportasi yang laik jalan	95%				

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	76.67%			Jumlah pelanggaran moda transportasi	11 Kejadian				
		Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	88.89%			Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	100%				
		Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek	100%								
		Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	10:04								
02:16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			4.813.487.288	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
02:16:02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat (%)	95%	3.735.377.288	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi telah disampaikan kepada masyarakat (%)	90 %	7.941.536.600,00			Dinas Kominfo Statistik & Persandian

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%			Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti					Dinas Kominfo Statistik & Persandian
		Persentase Publikasi di Media Massa	95%			Persentase Publikasi di Media Massa					Dinas Kominfo Statistik & Persandian
02:16:03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	80%	1.078.110.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	60 %	4.031.834.652,00			Dinas Kominfo Statistik & Persandian
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	23%			Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	18%				Dinas Kominfo Statistik & Persandian
02:17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH			1.820.587.852	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH						
02:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	6.00	267.276.433	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	5 %	112.099.300,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	10.18	92.872.255	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	10,18 %	46.330.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
		Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	31.00	534.246.576		Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat					
02:17:07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya bertambah	0.36	463.096.294	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya bertambah	30 %	1.018.510.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
02:17:08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Sudah Menerapkan E-Commerce	0,36	463.096.294	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Sudah Menerapkan E-Commerce	0,34 %	700.000.000,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
02:18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			682.581.765	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	2	158.845.970,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru	1 Potensi	547.672.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	1				1 Potensi Investasi Daerah				
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi (Milyar Rupiah)	230	83.396.830,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai persetujuan investasi/ Rencana Investasi	400 M Rp	713.896.800,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	111.624.920,00	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM	90 %	343.000.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	160.620.845,00	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	92 Nilai	1.044.197.800,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100%			Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	88,7 Nilai				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	168.093.200,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola secara elektronik	100 %	286.650.000,00			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
02:19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			2.648.655.741	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						
02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wira usaha muda	25%	781.617.771	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wira usaha muda	20 %	2.750.000.000,00			Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
		Persentase pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan	50%			Persentase pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan	40%				
02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi olahraga yang diraih	60%	1.767.210.973	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi olahraga yang diraih	50 Persen	10.532.800.000,00			Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
02:19:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	60%	99.826.997	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	-	767.000.000,00			Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			1.185.654.800	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						
02:20:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate	90%	1.185.654.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase elemen data dan informasi statistik yang terpublikasikan dan terupdate	80 %	324.976.400,00			Dinas Kominfo Statistik & Persandian
		Persentase OPD yang memiliki sistem aplikasi	70%			Persentase OPD yang memiliki sistem aplikasi					Dinas Kominfo Statistik & Persandian
		Persentase desa telah mengakses sistem informasi data	70%			Persentase desa telah mengakses sistem informasi data					Dinas Kominfo Statistik & Persandian
02:21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			145.843.526	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						
02:21:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan informasi yg berhasil dilaksanakan	28%	145.843.526	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase pengamanan informasi yg berhasil dilaksanakan	100 %	74.218.000,00			Dinas Kominfo Statistik & Persandian

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			3.165.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
02:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	86.67%	500.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	72 %	23.390.000,00			Dinas Pendidikan dan kebudayaan
02:22:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	87.50%	760.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	93,33 %	2.266.092.600,00			Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		Persenatase Kesenian tradisional yang dikembangkan	87.50%								
02:22:04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	83.33%	470.000.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	80 %	561.356.600,00			Dinas Pendidikan dan kebudayaan
02:22:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	86.66%	1.435.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	86,67 %	1.192.976.700,00			Dinas Pendidikan dan kebudayaan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			830.192.979	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						
02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	22%	598.202.220	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Rata-rata kunjungan per hari dan rata-rata IKM perpustakaan kewenangan daerah	undefined undefined	1.669.363.160,00			Dinas Perpustakaan & Kearsipan
02:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	50%	231.990.759	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	40 %	250.252.600,00			Dinas Perpustakaan & Kearsipan
02:24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			317.625.001	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						
02:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip daerah	40%	25.441.763	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip daerah	30 %	431.800.000,00			Dinas Perpustakaan & Kearsipan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02:24:02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	46.67%	289.006.988	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	30 %	698.930.000,00			Dinas Perpustakaan & Kearsipan
02:24:04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentasi Pelayanan Perijinan dan Penggunaan Arsip	80%	3.176.250	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Prosentasi Pelayanan Perijinan dan Penggunaan Arsip	60 %	42.643.000,00			Dinas Perpustakaan & Kearsipan
	URUSAN PILIHAN PEMERINTAH DAERAH				URUSAN PILIHAN PEMERINTAH DAERAH						
03:25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN			5.071.592.487	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN						
03:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Produksi Perikanan Tangkap	10%	133.402.500	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)	5 undefined 5 undefined	118.461.000,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
03:25:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Produksi Budidaya Ikan (ton)	10%	4.407.012.999	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%) Persentase	3.75 undefined 50.80 undefined	3.360.446.100,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
						Peningkatan					

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Produksi Perikanan Budidaya (%)					
03:25:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	4,00%	237.603.988	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	330 Ha 330 Ha	519.020.800,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
03:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	0,26	293.573.000	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	-	1.310.131.000,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
03:26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			2.486.989.220	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
03:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	Persentase Kunjungan Wisata	100%	1.584.683.755	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Kunjungan Wisata	100 %	5.115.000.000,00			Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
03:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama kunjungan wisata	2 hari	551.035.000	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama kunjungan wisata	3 Hari	1.991.339.200,00			Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kelompok sadar wisata	20%	351.270.465	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kelompok sadar wisata	25 Persen	2.179.588.500,00			Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
		Persentase produk kreasi unggulan	40%			Persentase produk kreasi unggulan	30 Persen				
03:27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			28.834.552.979	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						
03:27:02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	18,00%	18.950.210.870	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	1.15 undefined	21.561.269.540,00			Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	19,00%			Persentase Peningkatan Produktifitas Perkebunan	1.15 undefined				Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		persentase Produktifitas Hortikultura (Ton/Ha)	19,00%			Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	6 undefined				Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	54%			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	10 undefined				Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Produksi Daging	3,50%			Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura	1.15 undefined				Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	6%								Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan sarana Pertanian	25%								Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	20,00%	6.707.217.850	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	8 undefined	3.334.879.800,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
		Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	10%			Persentase peningkatan prasarana pertanian	20 undefined				Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03:27:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	10,00%	463.076.730	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	100 undefined	1.727.177.450,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
03:27:05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	23%	565.040.351	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	100% undefined	5.103.454.300,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
		Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	9%			Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan	100% undefined				Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
		Persentase SDM Terampil tanaman pangan dan Hortikultura Di tiap Kecamatan	16%								Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
03:27:07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Pengembangan Korporasi Petani	100,00%	2.149.007.178	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	4,2% undefined	4.400.195.900,00			Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
		Persentasi Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang memperoleh Sertifikat	54,20%								Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03:30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			1.726.327.450	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						
03:30:03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Sapras	80.00	898.027.650	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR	10 PERSEN	25.000.000,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:30:05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah promosi(%)	59.00	288.625.100	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR	70.00 PERSEN	265.600.000,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:30:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga	33.00	54.450.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL	21.74 PERSEN	1.166.700.000,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:30:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	80.00	248.927.600	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	76.92 PERSEN	386.882.560,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase alat – alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	26.00			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN	29.16 PERSEN				

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03:30:04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	7.00	157.260.150	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK	7.00 PERSEN	414.800.000,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:30:02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	18.00	79.036.950	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN	18.42 PERSEN	135.000.000,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN	100 PERSEN				
03:31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			1.312.500.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						
03:31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	10.00	365.500.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI	14.00 PERSEN	300.000.000,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03:31:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal	11.31	235.750.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM	2.11 PERSEN	200.000.000,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Profil Ikm Yang Berkembang	2.58	711.250.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG	2.58 PERSEN	325.191.800,00			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			536.618.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	16%	321.618.000,00	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	-	185.272.400,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	19,35%	215.000.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	-	200.999.700,00			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN											

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04:01	SEKRETARIAT DAERAH			17.846.504.265	SEKRETARIAT DAERAH						
04:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana dan berkualitas	100%	15.875.473.310	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan administrasi kewilayahan dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana dan berkualitas	100%	1.578.464.400,00			Sekretariat Daerah
		Persentase kebijakan di bidang Bina Mental dan Spiritual bidang Kesejahteraan Rakyat dan bidang Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana dan berkualitas	100%			Persentase kebijakan di bidang Bina Mental dan Spiritual bidang Kesejahteraan Rakyat dan bidang Kesejahteraan Masyarakat yang terlaksana dan berkualitas	100%	12.641.003.297,00			
		Persentase kebijakan di bidang Perundang-Undangan bidang Bantuan Hukum dan bidang Dokumentasi dan Informasi yang terlaksana dan berkualitas	100%			Persentase kebijakan di bidang Perundang-Undangan bidang Bantuan Hukum dan bidang Dokumentasi dan Informasi yang terlaksana dan berkualitas	100%	1.142.869.450,00			

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
04:01:03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD bidang perekonomian bidang sumber daya alam terlaksana dan berkualitas	100%	1.971.030.955	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD bidang perekonomian bidang sumber daya alam terlaksana dan berkualitas	100%	689.911.062			Sekretariat Daerah
		Persentase kebijakan di bidang pengelolaan PBJ bidang Pengelolaan LPSE bidang Pembinaan dan advokasi PBJ yang terlaksana dan berkualitas	100%			Persentase kebijakan di bidang pengelolaan PBJ bidang Pengelolaan LPSE bidang Pembinaan dan advokasi PBJ yang terlaksana dan berkualitas	100%	1.276.867.942,00			
		Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program evaluasi serta pelaporan yang terlaksana dan berkualitas	100%			Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program evaluasi serta pelaporan yang terlaksana dan berkualitas	100%	1.916.068.400,00			
04:02	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH			11.043.941.621	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH						
04:02:02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	IKM minimal Baik	11.043.941.621	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD	85.18 Nilai	35.587.632.081,00			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN											
06:01	INSPEKTORAT DAERAH			2.743.765.420	INSPEKTORAT DAERAH						
6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	82%	1.678.938.800	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik Prosentase SKPD yang selesai TLHP Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari 80 %	70 Persen 60 Persen 70 Persen	2.594.738.200,00			Inspektorat
06:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	WBK :2 WBBM : 3	1.064.826.620	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	3 Level 3 Level 39 Unit	2.318.591.600,00			Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	3 (3,15)			Level Maturitas SPIP					

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Level kapabilitas APIP	3			Level kapabilitas APIP					
		Indeks Integritas	81			Indeks Integritas					
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
05:01	PERENCANAAN			6.317.328.993	PERENCANAAN						
05:01:02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional propinsi kabupaten)	99%	3.934.282.635	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional propinsi kabupaten)	98,8 %	3.163.425.600,00			Bapperida
05:01:03	PROGRAMKOORDINASI DAN SINKORONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan	95%	2.383.046.358	PROGRAMKOORDINASI DAN SINKORONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang infrastruktur & kewilayahan	93,4 % 95 %	2.378.168.400,00			Bapperida

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan	95%			Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang infrastruktur & kewilayahan					
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95%			Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renja PD dengan Renstra PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia					
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	95%			Persentase keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran (RKA PD dengan Renja PD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia					
05:02	KEUANGAN			206.898.570.776	KEUANGAN						

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05:02:02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	89	203.839.561.722	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	88 %	5.817.664.820,00			BPKPAD
05:02:03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	48	1.725.279.492	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	45 indeks	3.357.365.700,00			BPKPAD
05:02:04	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan PBB P-2 dan BPHTB % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB dan Persentase Pendapatan non PAD	100%	1.333.729.562	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan PBB P-2 dan BPHTB % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB dan Persentase Pendapatan non PAD	100 persen	2.493.437.400,00			BPKPAD
05:03	KEPEGAWAIAN			2.766.022.500	KEPEGAWAIAN						
05:03:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	90	2.766.022.500	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Implementasi Manajemen Talenta Pegawai ASN	60 %	5.775.922.262,00			BKPSDM

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Profesionalitas (IP) ASN	86								
		Indeks Sistem Merit	300								
		Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	70								
05:04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			2.753.583.129	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
05:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	85%	2.753.583.129	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Nilai Implementasi Manajemen Talenta Pegawai ASN	60 %	2.319.028.861,00			BKPSDM
		Persentasi Calon ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Latsar	100%								

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
05:05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			1.495.724.426	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
05:05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi	70 (Sangat Inovatif)	1.495.724.426	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tercapainya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	100 %	1680000000,00			Bapperida
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	100				penelitian 100 %				
UNSUR KEWILAYAHAN											
7.01	KECAMATAN			8.188.702.155	KECAMATAN						
7.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	100; 100 Persen; Persen	69.429.800,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	13 Laporan	96.850.400,00			Kec. Lampihong

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88%	95.844.995		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	87 %	41.792.500,00			Kec. Paringin
		Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	89	125.000.000		Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100 %	124.965.000			Kec. Batumandi

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	89 Nilai	149.201.168,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	568.596.100,00			Kec. Juai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	8500%	137.775.000		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100 %	420.186.900,00			Kec. Paringin Selatan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84	125.250.000		JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1 Laporan	451.242.540,00			Kec. Halong
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)	100%	186.751.850		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	233.882.400,00			Kec. Tebing Tinggi
		Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	66.185.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	129.159.100,00			Kec. Awayan
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100%	418.153.400,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP	6 Laporan	162.937.800,00			Kec. Lampihong

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100%	312.225.375		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	2 kegiatan	41.792.500,00			Kec. Paringin
		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100%	315.000.000		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan		119.911.000,00			Kec. Batumandi
		Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan	65%	524.723.457,50		Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan		220.728.700,00			Kec. Juai

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Desa	100%	1.118.715.082		Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Desa		205.054.000,00			Kec. Paringin Selatan
						JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1 Laporan	536.930.500,00			
						Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	755.773.500,00			
						Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	700.000.000,00			
						Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Desa yang Aktif	60 LKD	455.474.000,00			
						Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	381.889.000,00			

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	330.370.600,00			
		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif	100%	361.750.000		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif	100 %				Kec. Halong
		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100%	267.740.000		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100 % 100 %				Kec. Awayan
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	38.476.300,00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100 %	35.634.800,00			Kec. Lampihong

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100%	9.719.325		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100 %	9.800.000,00			Kec. Paringin
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan pemerintahan umum dan trantib, koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan wasbang dengan lintas sektor	100%	15.000.000		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan pemerintahan umum dan trantib, koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan wasbang dengan lintas sektor	100 %	78.916.500,00			Kec. Batumandi
		Penurunan jumlah pelnggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	1 keg	60.134.580,00		Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	68.360.000,00			Kec. Juai
		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan ketertiban Dengan Lintas Sektor				Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	160.177.000,00			Paringin Selatan
		Penurunan jumlah pelnggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)	100%	11.500.000		-	-	300.834.000,00			Kec. Halong

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor	100%	17.590.000		Persentase koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP	100 %	124.520.000,00			Kec. Awayan
						Jumlah Laporan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	17.000.000,00			

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	meningkatnya Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	174.856.500,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	meningkatnya Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	167.766.900,00			Kec. Lampihong
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	148.642.148		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100 %	467.307.100,00			Kec. Paringin

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	195.000.000		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100 %				Kec. Batumandi
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	510.218.885,00		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	341.034.000,00			Kec. Juai

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	295.696.170		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	32.960.000,00			Paringin Selatan
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	195.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	83.596.400,00			Halong
		Persentase kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan	100%	368.468.716		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun tepat waktu dan Sesuai SOP	100 %	10.970.000,00			Kec. Tebing Tinggi
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	250.850.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai	1 Laporan	34.000.000,00			Kec. Awayan

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						SOP					
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase RT yang menyampaikan laporan,Persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	62.913.200,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	125.717.000,00			Kec. Lampihong
		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	102.831.094		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100 %	143.360.900,00			Kec. Paringin
		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	32.500.000		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100 %	140.192.100,00			Kec. Batumandi

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							100 %	71.150.000,00			
							100 %	282.265.100,00			
							100 %	306.200.000,00			
							100 %	189.500.000,00			
							100 %	160.797.600,00			
							100 %	230.352.600,00			

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik	100%	245.077.030,00		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP	1 Laporan	390.193.800,00			Kec. Juai
		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik, Persentase desa dengan pencatatan aset desa baik, Persentase hasil musyawarah pembangunan yang disetujui	100%	347.303.880		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	1 Laporan	223.202.900			Kec. Paringin Selatan
		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik dan hasil musyawarah pembangunan yang disetujui	100%	82.445.000		Persentase desa dengan administarsi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik dan hasil musyawarah pembangunan yang disetujui	100 %	407.160.900			KecHalong

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	100%	662.694.200		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	-	377.607.500			Kec.Tebing Tinggi
		Persentase pengelolaan keuangan dan aset desa	100%	88.040.000		Persentase pengelolaan keuangan dan aset desa	100 %	141.186.602,00			Kec. Awayan
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM											

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08:01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			2.754.521.500	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
08:01:02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100%	113.619.000	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100 %	1.580.680.100,00			Badan Kesbangpol
08:01:03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang aktif	100%	1.016.028.000	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Parpol yang aktif	100 %	1.669.898.800,00			Badan Kesbangpol
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	100%	127.110.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT	Persentase Ormas yang aktif	-	481.405.100,00			Badan Kesbangpol

NO.	URUSAN/ PROGRAM (RPJMD/ RPD*)	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM	URUSAN/ PROGRAM RKPD	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	PAGU PROGRAM (RKPD)	SELISIH (BERTAMBAH/ BERKURANG)	KET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08:01:05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	100%	62.799.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	100 %	196.718.000,00			Badan Kesbangpol
08:01:06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	1.434.965.000	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100 %	1.458.600.000,00			Badan Kesbangpol

5.2. TELAAHAN POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

Berangkat dari tema RKPD tahun 2025 yaitu "Peningkatan Infrastruktur dan Perekonomian Daerah dalam Menunjang Ketahanan Sosial serta Pembangunan Berkelanjutan", maka beberapa hal yang menjadi garis besar dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk RKPD Balangan tahun 2025 ini adalah sebagai berikut:

Secara umum dalam Pokok-Pokok Pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Balangan yaitu :

1. Masih Terbuka Luasnya Peluang Pengembangan Sektor Pertanian, Perkebunan, Perikanan Serta Umkm Di Kabupaten Balangan, Tersirat Harapan Masyarakat Untuk Mendapatkan Perbaikan Terhadap Pengembangan Sektor Pertanian Melalui Peningkatan Sarana Produksi Pertanian Dan Perkebunan Berupa Pengadaan Pupuk Dan Infrastuktur Irigasi Serta Jalan Produksi Pertanian Dan Perkebunan Yang Perlu Ditambah Untuk Meningkatkan Distribusi Hasil Produksi Pertanian Di Kabupaten Balangan.
2. Realitas Lapangan Saat Ini Menujukkan, Bahwa Beberapa Ruas Jalan Perlu Menjadi Perhatian Bersama, Yang Notabene Termasuk Jalan Provinsi Dan Jalan Yang Dibangun Daerah. Beberapa Ruas Jalan Dengan Kondisi Jalan Berlubang, Sehingga Dapat Menghambat Alur Distribusi Barang Dan Jasa.
3. Peningkatan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Agar Bisa Dan Siap Bersaing Dalam Keterbukaan Ekonomi. Mewujudkan Sdm Dan Kelembagaan Pariwisata Serta Ekonomi Kreatif Yang Unggul Dan Berdaya Saing. Meningkatkan Kapasitas Dan Daya Saing Koperasi Dan Umkm Serta Meningkatkan Iklim Penanaman Modal, Kualitas Kerja Sama Dan Efektivitas Promosi Penanaman Modal.
4. Pembangunan yang dilaksanakan mempunyai asas manfaat, berkelanjutan serta berkeadilan sehingga sudah menjadi tugas kita sebagai Pengambil kebijakan untuk melakukan koordinasi, mengkomunikasikan dan mensinergikan upaya strategis dalam memaksimalkan peran dan tugas kita dalam melakukan pembangunan daerah.
5. Secara umum dalam Pokok-Pokok Pikiran dari masing-masing unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Balangan, terakomodir dari aspirasi masyarakat baik kelompok maupun perorangan yang telah diinput pada aplikasi SIPD.
6. Kabupaten Balangan cepat atau lambat akan menjadi salah satu wilayah penyangga IKN (Ibukota Nusantara) oleh sebab itu kita harus semakin

meningkatkan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur maupun yang menjadi perhatian yakni peningkatan pelayanan publik berstandar nasional.

5.3. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2025

Berdasarkan hasil analisis keuangan pada bab sebelumnya, maka kerangka pendanaan untuk tahun 2025 adalah sebagaimana tabel 5.3.

Tabel 5.3.
Kerangka Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
4	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.194.486.319.207**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**120.884.109.224**
4.1.01	Pajak Daerah	28.902.958.032
4.1.02	Retribusi Daerah	1.778.128.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	30.000.000.000
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**3.065.635.360.640**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.987.840.003.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	77.795.357.640
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**7.966.849.343**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.966.849.343
	Jumlah Pendapatan	**3.194.486.319.207**
5	**BELANJA DAERAH**	
5.1	**BELANJA OPERASI**	**2.067.077.025.145**
5.1.01	Belanja Pegawai	654.962.980.487
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.134.274.546.281
5.1.05	Belanja Hibah	261.634.423.377
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.205.075.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**740.389.087.995**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	20.093.050.026
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.105.472.268
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	295.677.134.811
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	329.832.375.690
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.796.855.200
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	884.200.000
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**40.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**393.589.801.141**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.417.702.541
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	390.172.098.600
	Jumlah Belanja	**3.241.055.914.281**
	Total Surplus/(Defisit)	**-46.569.595.074**

KODE	URAIAN	JUMLAH
1	*2*	*3*
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**146.569.595.074**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	**146.569.595.074**
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**146.569.595.074**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**100.000.000.000**
6.2.01	Penyertaan Modal Daerah	100.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**100.000.000.000**
	Pembiayaan Netto	**46.569.595.074**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**
	TOTAL APBD	**3.341.055.914.281**

Sumber : Data diolah

5.3.1 Program yang Mendukung Stunting, Kemiskinan Ekstrem dan Inflasi

Tabel 5.4
Penganggaran terkait Stunting

No	Program	Anggaran 2025
		Stunting
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehahatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4,661,949,100
2	Program Pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	
3	Program Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten Kota	
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA	
5	Program Pengelolaan Pendidikan	655,017,600
6	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	580,920,100
7	Program Penanganan kerawanan Pangan	
8	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	539,626,000
9	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	12,316,286,834
10	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	136,600,000
11	PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	89,609,300
12	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	733,616,500
13	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,292,760,000
14	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,961,960,000
	Total	28,968,345,434
	APBD	2,361,084,022,994
	Persentase	1.23

Sumber : SIPD tahun 2023

Tabel 5.5

Penganggaran terkait Kemiskinan Ekstrim

No	Program	Anggaran 2025
		Kemiskinan Ekstrem
1	PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	10,365,654,929
2	PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	11,741,621,700
3	PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	122,852,700.00
4	PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	68,546,500
5	PENEMPATAN TENAGA KERJA	205,993,000
6	PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	552,320,000
7	PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	128,999,700
8	PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO	272,580,000
9	PENGEMBANGAN UMKM	407,430,000
10	PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	939,336,100
11	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	427,670,510
12	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	14,658,730,000
13	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1,917,525,000
14	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	132,385,500
15	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	2,389,250,000
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	3,604,479,180
17	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	7,503,402,400
18	PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1,961,960,000
19	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1,564,310,600
20	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	15,186,896,775
	TOTAL	74,151,944,594
	APBD 2025	2,361,084,022,994
	Persentase	3.14

Sumber : SIPD tahun 2023

Tabel 5.6

Pengangguran Terkait Inflasi

No	Program	Anggaran 2025
		Inflasi
1	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	633,846,100
	TOTAL	633,846,100
	APBD 2025	2,361,084,022,994
	Persentase	0.00027

Sumber : SIPD tahun 2023

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menajdi Indikator Kinerja Utma (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator "hasil" lebih utama daripada sekedar "keluaran" karena "hasil" (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Dalam melihat kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya digambarkan melalui tingkat capaian sasaran dan tingkat efisiensi serta efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada RPJMD. Dengan demikian, penetapan indikator kinerja diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja pemerintah sehingga harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil.

6.1. INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH

Indikator umum (makro) merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial. Berdasarkan uraian

tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 dapat diuraikan dalam tabel 6.1.

Tabel 6.1.
Indikator Kinerja Makro Kabupaten Balangan 2025

No.	Indikator Kinerja Makro Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Kabupaten tahun 2024	Target Capaian Kabupaten Tahun 2025	Target Capaian Provinsi 2024	Target Capaian Provinsi Tahun 2025	Target Capaian Nasional Tahun 2024	Target Capaian Nasional Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rpjmd Kabupaten (2026)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	70,61	74,33	72,65	75,20	N/A	N/A	71,50
2	Angka Kemiskinan	Angka	5,1	4,23 - 4,62	4,40 - 4,22	3,60-3,94	N/A	6,0 -7,0	4,9 - 4,7
3	Angka Pengangguran Terbuka (%)	Persen	2,17 – 2,37	1,84-2,67	4,05	3,86-4,25	N/A	4.50-5,00	2,30
4	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	Persen	5,4 - 6	4,22 - 5,01	4,55 - 5,45	4,97-5,28	N/A	5,30-5,60	5,4 - 6
5	Indeks Gini	Indeks	0,266	0,194 - 0,262	0,324	0,307-0,311	N/A	4,22 - 4,05	0,266
6	Indek Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,48	72,1	....	72,24	....	72.94	69,38

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan Rakortek Tahun 2024

6.2 INOVASI PEMBANGUNAN DAERAH

Berdasarkan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah di Kabupaten Balangan untuk tahun 2023 sebesar 100% atau sebanyak 32 SKPD sedangkan jumlah inovasi yang terjaring sebanyak 355 inovasi, baik yang masih berupa gagasan atau ide maupun inovasi yang sudah jalan. Sebanyak 277 inovasi yang di uploud atau dilaporkan oleh admin inovasi pada Sistem Inovasi Daerah (Sinovda) dan hanya 24 inovasi yang memenuhi kriteria untuk ikut dalam ajang Bailang tahun 2023. Dari hasil verifikasi dan validasi menghasilkan sebanyak 10 karya inovasi yang masuk kedalam tahapan presentasi dan penilaian inovasi, yang sudah melakukan Presentasi karyanya pada tanggal 04 September 2023. Dari hasil penilaian Tim Juri pada saat presentasi tersebut di hasilkan 6 karya inovasi dari SKPD dan BLUD/UPT Puskesmas dengan predikat Terbaik I,II dan III, Juara harapan I, II dan harapan III. Upaya fasilitasi penerapan inovasi bertujuan untuk meningkatkan capaian indeks inovasi daerah sebagai bentuk diseminasi dalam mendorong budaya inovasi di setiap perangkat daerah.

Tabel 6.2
Top 10 Besar Bailang Tahun 2023

No.	Nama Inovasi	Pengusul
1	LAYAR SI BALANG (Layanan Rujukan Rehabilitasi Sosial Kabupaten Balangan)	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Sistem Penilaian Instrumen Kinerja (SI PETRUK)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Pengumpulan Data Wisatawan (PANDAWA)	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4	Aplikasi E-Kino (Elektronik Kinerja Organisasi) Reformasi Birokrasi)	Sekretariat Daerah
5	" KULARAKAT " (Kolaborasi Usulan, Laporan Dan Aduan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Terpadu)	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan
6	LAPOR RAJA PEDE (Pelaporan Rangkap Jabatan Perangkat Desa)	Kecamatan Tebing Tinggi
7	Sistem Penjaringan Inovasi Daerah Balangan Terpadu (SEPEDA BARU) V.2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
8	PAPAH MODIS DALANG BATIK (Pengelolaan dan Pemilahan Limbah Non Medis Dengan Metode Daur Ulang Menjadi Paving Block dan Batako Plastik)	RSUD Datu Kandang Haji
9	GALUH SANGGAM (Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Harus Selesai Dalam Genggaman)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	SMART KIDS (Kerjasama Penerbitan Kia Dengan Sekolah)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber : Bapperida Kabupaten Balangan Tahun 2024

A. Kemanfaatan Indeks Inovasi Daerah

Manfaat dari terpenuhnya indeks inovasi daerah Kabupaten Balangan adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Balangan
   a. Mendorong terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah
   b. Sarana dalam mengakselerasikan kinerja terhadap kebutuhan masyarakat terkait peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan public
   c. Meningkatnya capaian indeks inovasi nasional sebagai salah satu indikator peningkatan kinerja pemerintah, kesejahteraan PNS melalui besaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat
   d. Sebagai media apresiasi dan penghargaan bagi inisiator dan/atau innovator baik yang bersumber dari perangkat daerah, pemerintahan desa dan masyarakat.
2. Bagi inisiator dan/ atau innovator adalah merupakan acuan dalam membangun dan mengembangkan inovasi yang dimiliki serta menjadi sarana ukur dalam mencapai kualitas inovasi yang dibangun.
3. Bagi masyarakat sebagai media sosialisasi tentang diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif sehingga menumbuhkan kepercayaan terhadap pemerintah dalam pembangunan daerah.
4. Bagi stakeholder sebagai media sosialisasi tentang diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif sehingga menumbuhkan kemitraan-kemitraan baru yang sinergi terhadap pembangunan di daerah.

6.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH

Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 3 (tiga) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator

kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Berdasakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan tahun 2016-2021 ditetapkan sebanyak 29 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencanaa Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan pada tahun 2025. Adapun yang menjadi target kinerja utama pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Utama Kabupaten Balangan 2025

Inikator Sasaran		Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1	Indeks Infrastruktur Publik	45,73	49,42	52,71
2	Indeks Infrastruktur Permukiman	32,06	32,75	33,11
3	Indeks Kualitas Air	50,4	74,62	33,11
4	Indeks Kualitas Udara	91,27	71,11	50,6
5	Indeks Kualitas Lahan	57,36	69,61	91,49
6	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	13,39%	13,64%	13,89%
7	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan dan Jasa (%)	6,50%	6,60%	6,70%
8	Kontribusi PDRB Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)	0,46%	0,48%	0,50%
9	Pertumbuhan Nilai Investasi (milyar rupiah)	263,12 M	615 M	1.546 M
10	Angka Pengangguran Terbuka (%)	2,37%	1,84-2,67	2,30%
11	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	8,63	8,37-9,05	9,17
12	Angka Harapan Lama Sekolah	12,98	13,17-13,8 7	13,24
13	Usia Harapan Hidup	68,52 73,69	74.19-74.26	68,92
14	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran)	132	120	130
15	Angka Kematian Bayi (per 1000 kelahiran)	12	11	8,8
16	Prevalensi stunting (%)	23,4	18,8	14%
17	Angka kelahiran remaja umur usia 15 - 19 tahun (ASFR)	18	17	18
18	NILAI SAKIP	74,40 (BB)	76,40 (BB)	78,20 (BB)
19	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
20	Nilai EKPPD	3,5930	3,41	3,6000
21	Indeks Pelayanan Publik	3.80 (B) 4.01 (A-)	4.01 (A-)	4.91 (A)

Inikator Sasaran		Target Capaian Tahun 2024	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Akhir Periode RPJMD (2026)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
22	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,07	85,07	85
23	Angka Kemiskinan	5,1- 4,9	4,23 - 4,62	4,9 - 4,7
24	Angka PPKS yang tertangani (%)	64,95%	70,95%	76,95%
25	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	0	0
26	Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)	100%	100%	100%
27	Indeks Resiko Bencana	139.89 115,21	98,2	139,89
28	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	81%	87%	100%
29	Indeks Desa Membangun	0,7997	0,8186	0,8186

Sumber : RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 dan Rakortek Tahun 2024

6.4 INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Selain, Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah juga digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Penetapan kinerja daerah dilaksanakan berdasarkan pada asas spesifik, obyektif, berkesinambungan, terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Indikator Kinerja Penyelenggaraan Daerah ini akan dipergunakan sebagai acuan dan dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kinerja penyelenggaraan daerah. Adapun Indikator Kinerja Penyelenggaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
1				2	3	4	5
A				**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**			
	A.1			**Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**			
		1		**Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian**			
			1	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB)	-2,47	3,5 - 4	4 - 4,5
			2	Indeks Gini	0,298	0,28	0,275
			3	Angka Kemiskinan	5,32	5,0 - 4,8	4,9 - 4,7
			4	Indek Pembangunan Manusia (IPM)	68,82	71,05	71,5
			5	NILAI SAKIP	66,04 (B)	76,40 (BB)	78,20 (BB)
			6	Nilai IKM (%)	82,53	84,5	85
			7	Indeks RB	53,8	63,8	65,8
			8	Opini BPK	WTP	WTP	WTP
			9	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	3,5620	3,5970	3,6000
	A.2			**Fokus Kesejahteraan Sosial Masyarakat**			
		1		**Pendidikan**			
			1	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.46	13.11	13.24
			2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	7.55	8.9	9.17
		2		**Kesehatan**			
			1	Usia Harapan Hidup (UHH)	67.72	68.72	68.92
			2	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100,000 kelahiran hidup	89	131	130
			3	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7	12	11
			4	Prevalensi stunting	25.7	15	14
		3		**Ketenagakerjaan**			
			1	Angka Pengangguran Terbuka	2.46	2.34	2.3
			2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja (%)	8.73	30	30
			3	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi (%)	6.95	4	4
			4	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri (%)	64.26	65	65
			5	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi (%)	100	90	90
		4		**Keuangan Daerah**			
			1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6	7	8
			2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			3	Indeks pengelolaan keuangan	86	89	90
			4	Indeks pengelolaan asset (%)	38	48	52
			5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan	8	9	10
B				**ASPEK PELAYANAN UMUM**			
	B.1			**Fokus Pelayanan Urusan Wajib Dasar**			
		1		**Pendidikan**			
			1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	66,55	77,05	79,15
			2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	99,09	100
			3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	72,86	81,36	83,06
			4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraaan	80,36	88,86	90,56
			5	Persentase Guru Sertifikasi (%)	83.26	88	89
			6	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV (%):			
				- TK/PAUD	74.36	76.86	77.36
				- SD	79.39	81.89	82.39
				- SMP	96.04	100	100
		2		**Kesehatan**			
			1	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	1	1	1
			2	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk (per 1000)	0.99	1.18	1.18
			3	Persentase keluarga yang melaksanakan PHBS (%)	43	70	75
			4	Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan (%)	83	93	95
			5	Persentase pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan sesuai standar (%)	75	100	100
			6	Persentase pemenuhan sarana prasarana kesehatan sesuai standar (%)	30.64	41	43
			7	Persentase Ibu Hamil mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil (%)	100	100	100
			8	Persentase Ibu Bersalin mendapatkan Pelayanan Persalinan (%)	100	100	100
			9	Presentase Pelayanan Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Bayi Baru Lahir(%)	100	100	100
			10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	100	100
			11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			12	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100
			13	Persentase warga negara usia 60 th keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100
			14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100
			15	Persentase penderita DM Yang mendaptkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100
			16	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	100	100	100
			17	Persentase Orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan deteksi dini HIV sesuai standar (%)	100	100	100
			18	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar (%)	100	100	100
		3		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
			1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap (%)	48.3	85.24	88.47
			2	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	76.9	87.39	90.17
			3	Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik (%)	21.53	39.24	44.39
			4	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang dibangun (%)	11.29	14:27	14.9
			5	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak (%)	78.65	85.27	86.27
			6	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestic (%)	91.88	95.76	96.76
			7	Jumlah Bangunan yang ditata (buah)		1	5
			8	Persentase bangunan/gedung dalam kondisi baik (%)	89.27	89.82	89.93
			9	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina (%)	34.6	85	95
			10	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang (%)	10	89	100
			11	Persentase tersedianya informasi rencana tata ruang wilayah (%)	20	80	100
			12	Persentase tersedianya luasan RTH (%)	3,91	4,05	4,05
		4		**Permukiman dan Perumahan Rakyat**			
			1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	100
			2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90.28	96	97
			3	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%)	84	91	93

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani (%)	71.4	98	100
		5		**Ketenteraman Umum, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat**			
			1	Angka kejadian gangguan ketentraman sosial	4	2	2
			2	Angka Konflik Sosial Bernuansa SARA	0	100	100
			3	Indeks Resiko Bencana	139.89	139.89	139.89
			4	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit	15 menit	15 menit
			5	Indeks Ketentaraman dan Ketertiban Umum (%)	100	100	100
			6	Angka pelanggaran keamanan dan ketertiban masyarakat	29	25	24
		6		**Sosial**			
			1	Angka PPKS yang tertangani (%)	40.95	70.95	76.95
			2	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial (%)	10	15	16
	B.2			**Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar**			
		7		**Tenaga Kerja**			
			1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja(%)	8.73	30	30
			2	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi (%)	6.95	4	4
			3	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri (%)	64.26	65	65
			4	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi (%)	100	90	90
		8		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
			1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92.22	92.83	92.86
			2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	70,14	75	76
			3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15.9	13.7	13.6
			4	Rasio Kekerasan terhadap anak (per 10.000 anak)	2.1	1.6	1.5
			5	Persentase ARG pada belanja langsung APBD (%)	12.35	21.15	21.2
			6	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun (%)	18.36	14.86	13.86
			7	Indeks Ketahanan keluarga	52.67	70	72
		9		**Pangan**			
			1	Persentase cadangan pangan masyarakat (%)	10	10	10
			2	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah (%)	87	87,7	87,8

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			3	Persentase penurunan daerah rentan rawan pangan (%)	5	5	5
			4	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	90	90	90
		10		**Lingkungan Hidup**			
			1	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup (%)	100	100	100
			2	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota (%)	100	100	100
			3	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik(%)	100	100	100
			4	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) (%)	100	100	100
			5	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan. (%)	100	100	100
			6	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH. (%)	100	100	100
			7	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	100	100	100
			8	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	100	100	100
			9	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup (%)	100	100	100
			10	Persentase Pengelolaan Persampahan (%)	98	100	100
		11		**Pertanahan**			
			1	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi (%)	100	100	100
			2	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan (%)	100	100	100
			3	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100	100	100
			4	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah(%)	100	100	100
			5	Persentase Penatagunaan Tanah(%)	100	100	100
		12		**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
			1	Cakupan kepemilikan dokumen penduduk (%)	69	96	97
		13		**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
			1	Persentase Desa Dengan Klasifikasi Minimal Maju	7,79	38,96	44,16
			2	Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	0.2	0.92	1,00
			3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	1	1	1

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			4	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal (%)		100	100
		14		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
			1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1.17	1.06	1.05
			2	Angka kelahiran remaja umur usia 15 - 19 tahun (ASFR)	24.71	20.03	19.32
			3	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	81.21	81.31	81.33
		15		**Perhubungan**			
			1	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan (%)	78	95,00	100
			2	Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan(%)	19.48	91.18	100
			3	Persentase Sarana Prasarana terminal yang memadai (%)	20	76.67	100
			4	Persentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai(%)	33.33	88.89	100
			5	Persentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan trayek(%)	15.8	100,00	100
			6	Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0.29	0.42	0.47
		16		**Komunikasi dan Informatika**			
			1	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfosan tentang Keterbukaan Informasi	0	95	100
			2	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	75	95	100
			3	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	62	80	100
			4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0	23	23
		17		**Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah**			
			1	Persentase Koperasi Berkualitas	2.72	6	7
			2	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	8.18	10.18	10.18
			3	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	26.64	31,00	32,00
			4	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya bertambah	0.43	0.36	0.38
		18		**Penanaman Modal**			
			1	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	100%	2	2
			2	Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan	100%	1	1
			3	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi (Milyar Rupiah)	100%	230	1300
			4	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	100	100	100
			5	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP(%)	100	100	100

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			6	Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP (%)	100	100	100
			7	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal (%)	100	100	100
		19		**Kepemudaan dan Olahraga**			
			1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan & Organisasi Sosial Kemasyarakatan (%)		48	55
			2	Peningkatan Prestasi Olahraga	10	13	14
			3	Jumlah Atlit Berprestasi	19	25	26
		20		**Statistik**			
			1	Persentase Data yang tersedia untuk mengukur target kinerja perencanaan	0	90	100
		21		**Persandian**			
			1	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	0	28	32
		22		**Kebudayaan**			
			1	Persentase Pengembangan Seni dan Budaya	48	87	100
			2	Persentase cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	53.33	86.67	100
		23		**Perpustakaan**			
			1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	50	80	420
			2	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	0.052	0.053	0.053
		24		**Kearsipan**			
			1	Indeks pengawasan kearsipan	83.47	83.57	83.59
	B.3			**Fokus Pelayanan Urusan Pilihan**			
		1		**Kelautan dan Perikanan**			
			1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	952,09	1049,20	1049,20
			2	Jumlah Produksi Budidaya Ikan (ton)	884,92	975,18	975,18
			3	Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	270,00	315,86	328,50
			4	Angka Konsumsi Ikan (Kg/kapita/thn)	46,44	58,51	59,91
		2		**Pariwisata**			
			1	PAD sektor Pariwisata	0,97%	1,64%	1,67%
			2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	100	80.00	100.00
			3	Rata-rata lama kunjungan wisata	0	2 hari	2 hari
			4	Persentase Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	25.00	20.00	20.00
		3		**Pertanian**			
			1	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	1000 Kg/Ha	18,00%	20,00%
			2	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	4,37 Ton/Ha	19,00%	20,00%

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			3	Persentase Produktifitas Hortikultura (Ton/Ha)	8,8 Ton/Ha	19,00%	20,00%
			4	Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	140 Orang	54%	55%
			5	Persentase Peningkatan Produksi Daging	1.933.289Kg	3,50%	3,50%
			6	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	140 ekor	6%	6%
			7	Persentase Peningkatan sarana Pertanian	2824 unit	25%	25%
			8	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	46	20%	20,00%
			9	Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	80 buah	10%	10%
			10	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	99	10,00%	10,00%
			11	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	1000 Ha	23%	30%
			12	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	4000 Ha	9%	10%
			13	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	220 Poktan	100,00%	100,00%
			14	Persentase Peningkatan Petani Peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang memperoleh sertifikat	4400	54,20%	65,50%
		5		**Perdagangan**			
			1	Persentase Peningkatan Sapras	50.00	80.00	90.00
			2	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah promosi(%)	15.00	59.00	68.00
			3	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui MOU dengan retail	20.00	33.00	35.00
			4	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	74.00	80.00	81.00
			5	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	17.00	26.00	30.00
			6	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	8.08	7.00	6.80
			7	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan Ketentuan (%)	4.80	18.00	26.00
		6		**Perindustrian**			
			1	Persentase IKM Yang Menerapkan Teknologi Industri (%)	4.10	10.00	80.00
			2	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal (%)	5.83	11.31	12.61
			3	Profil IKM Yang Berkembang (%)	0.00	2.58	3.58
		7		**Transmigrasi**			
			1	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi (%)	18.82	19.41	19.55
			2	Persentase Jumlah warga transmigrasi di Kabupaten Balangan (%)	60.00	70.00	70.00

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
	B.4			**Fokus Pelayanan Urusan Penunjang**			
		1		**Perencanaan**			
			1	Indeks perencanaan pembangunan daerah	-	97	98
			2	Persentase keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan (nasional, propinsi, kabupaten)	-	99%	99.2 %
			3	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi & infrastruktur dengan nilai baik	-	95%	96.8 %
			4	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik	-	95%	96.8 %
		2		**Keuangan Daerah**	2020	2025	2026
			1	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	6	7	8
			2	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
			3	Indeks pengelolaan keuangan	86	89	90
			4	Indeks pengelolaan asset (%)	38	48	52
			5	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Dana Perimbangan	8	9	10
			6	Persentase APBD disampaikan tepat waktu (%)	100	100	100
			7	Persentase penerimaan PBB-P2 dan BPHTB (%)	_	100	100
			8	Persentase penerimaan PAD selain PBB-P2 dan BPHTB (%)	_	100	100
			9	Persentase pendapatan non PAD (%)	_	100	100
		3		**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**			
			1	Indeks merit system	257	300	325
			2	Indeks profesionalitas ASN	67.06	86	87
			3	Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	-	70	75
			4	Persentase calon ASN yang lulus dan mendapatkan sertifikat diklat manajerial (%)	100	100	100
			5	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi S2/S3 (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) (%)	5,8	22	25
			6	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal (%)	51,13	72,58	80,65
			7	Persentase Pemenuhan kepegawaian sesuai formasi (%)	100	100	100
		4		**Penelitian dan Pengembangan**			
			1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	70	100	100
			2	Indeks Inovasi	1.616	70 (sangat inovatif)	75 (sangat inovatif)
		5		**Administrasi Pemerintahan Umum**			

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			1	Nilai capaian pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai amanat Permendagri No. 4 tahun 2010 (%)	100	100	100
			2	Nilai EKPPD Kabupaten Balangan	3.562	3.593	3.597
			3	Indeks kelembagaan	76.9	78.6	80.1
			4	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa (%)	20	87	87
			5	Indeks Pelayanan Publik	-	4,01 (-A)	4,91 (A)
			6	Persentase Raperda yang dibahas DPRD (%)	82	89	90
		6		**Pengawasan**			
			1	Indeks Integritas kabupaten (SPI)	77.28	81	82
			2	Maturitas SPIP	100	3 (3,15)	3 (3,2)
			3	Tingkat Kapabilitas APIP	100	3	3
			4	Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti (%)	90	82	85
			5	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	0	WBK : 2 WBBM : 3	WBK : 3 WBBM : 4
		7		**Kewilayahan**			
			1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85.72	90.13	89.81
			2	Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif (%)	_	100	100
			3	Persentase koordinasi dan ketentraman dan ketertiban umum (%)	_	100	100
			4	Persentase penyelenggaraan pemerintahan umum (%)	_	100	100
			5	Persentase desa dengan pencatatan aset baik (%)	_	100	100
		8		**Pemerintahan Umum**			
			1	Persentase Koordinasi gugus tugas;Persentase Masyarakat yang mengikuti seminar talkshow, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan (%)	100	100	100
			2	Persentase Parpol yang aktif (%)	100	100	100
			3	Persentase Organisasi Masyarakat dibina yang aktif (%)	100	100	100
			4	Persentase Koordinasi Penyuluhan narkoba; Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif (%)	100	100	100
			5	Persentase Daerah Rawan Gangguan Ketentraman yang terpetakan; persentase daerah rawan konflik yang diawasi; persentase koordinasi deteksi dini konflik sosialisasi yang dilaksanakan (%)	100	100	100
C				**ASPEK DAYA SAING DAERAH**			
	C.1			**Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**			
		1		**Produktivitas Daerah**			
			1	PDRB per kapita (ADHK) (juta)	68,87	82.41	84.47

No.				ASPEK/ FOKUS/ BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2020	Target Capaian Tahun 2025	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD (2026)
			2	PDRB per kapita (ADHB) (juta)	80,46	97,36	99,79
		2		**Pengeluaran Penduduk**			
			1	Rata-Rata Pengeluaran per kapita	1,186,190	1,374,798	1,409,168
		3		**Pertanian**			
			1	Nilai Tukar Petani (NTP)	100,98	101,03	101,04
	C.2			**Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastuktur**			
			1	Indeks Infrastruktur Wilayah	58,24	82,18	85,82
			2	Jumlah rumah tangga pengguna air bersih (PDAM)	22.931	26.431	22.931
			3	Jumlah rumah tangga yang mendapat aliran listrik (PLN)	28.252	30.752	31.252
			4	Jumlah hotel, penginapan dan losmen	4	5	5
	C.3			**Fokus Iklim Berinvestasi**			
			1	Lama Proses Perizinan (hari)	5	5	5

Sumber : Dokumen RPJMD Kabupaten Balangan, 2021-2026

Tabel 6.5
Target Indikator Per Urusan Berdasarkan Hasil Rakortekrenbang Antara Pemerintah Kabupaten Balangan Dengan Provinsi Kalimantan Selatan

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	**Urusan Pendidikan**					
1.1	**Terpenuhinya kebutuhan dasar SPM bidang pendidikan**					
1.1.1	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Persentase	100	91.20	100	100
1.1.2	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	Persentase	100	99.34	100	100
1.1.3	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	Persentase	100	47.45	100	100
1.1.4	Iklim Keamanan SMP	Nilai	72.88	70.90	74.52	78.74
1.1.5	Iklim Kebhinekaan SD	Nilai	81.49	71.49	73.15	79.15
1.1.6	Iklim Kebinekaan SMP	Nilai	81	72.43	74.93	77.43
1.1.7	Iklim Inklusivitas SD	Nilai	57	55.35	61.52	62.72
1.1.8	Iklim Inklusivitas SMP	Nilai	58	56.51	60.30	63.20
1.1.9	Iklim Keamanan SD	Nilai	76	72.68	74.98	78.66
1.1.10	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	100	91.20	100	100
1.1.11	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	100	99.34	100	100
1.1.12	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	59	57.09	59.47	63.93

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
1.1.13	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	Nilai	48	45.70	47.42	49.13
1.1.14	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69	65.07	68.76	73.13
1.1.15	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61	58.03	65.01	66.01
1.1.16	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	62	54.30	55.49	55.52
1.1.17	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D IV	%	62	68.77	69.77	70.77
1.1.18	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	59	51.27	-	-
1.1.19	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun dalam Pendidikan dasar	%	100	99.34	100	100
1.1.20	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	100	91.20	100	100
2	**Urusan Kesehatan**					
2.1	**Penurunan Prevalensi Stunting (Lintas K/L)**					
2.1.1	Prevalensi Stunting (pendek/sangat pendek pada balita)	%	13.5	14.61	11,61	8,61
2.2	**Keberhasilan Pengobatan TB (TBC Succes Rate)**					
2.2.1	Penemuan Kasus TBC	%	90	72,4	90	90
2.3	**Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI)**					
2.3.1	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 Kelahiran Hidup	180	207	125	120
2.3.2	Ketersediaan obat esensial dan vaksin rutin	%	95	100	100	100

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
2.4	**Rumah Sakit dan Puskesmas Terakreditasi Paripurna**					
2.4.1	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna	%	78	100	100	100
2.4.2	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna	%	67.37	33	50	50
2.5	**Rumah Sakit dan Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar**					
2.5.1	Persentase Puskesmas dengan jenis tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar	%	60	100	100	100
2.5.2	Persentase RS Pemerintah dengan jenis tenaga medis sesuai standar	%	75	100	100	100
3	**Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**					
3.1	**Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun**					
3.1.1	Panjang dan Jumlah Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengaman Pantai yang dibangun	Km	200	6,18325	10,59	11,2
3.1.2	Luas Layanan Irigasi yang direhabilitasi dan/atau dimodernisasi	Ha	350000	1,191486	1,000	1,000
3.1.3	Luas layanan irigasi multikomoditas yang dibangun dan/atau ditingkatkan padi dan non padi	Ha	50000	1,68992	1,00	1,500
3.1.4	Kapasitas layanan prasarana air baku yang dibangun	mÂ^3/detik	-	-	-	-
3.2	**Terpenuhinya penyelesaian rencana tata ruang dan rencana detail tata ruang**					
3.2.1	Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Materi Teknis	60	1	-	-
3.2.2	Penyelesaian Materi Teknis RDTR	Materi Teknis	106	1	1	1
3.2.3	Penetapan RTRW	Perda/Perkada	50	-	1	-
3.2.4	Penetapan RDTR	Perda/Perkada	89	1	1	1
3.3	**Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Ruang**					

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
3.3.1	Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Kasus	120	-	-	-
3.3.2	Fasilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi	33	-	-	-
3.4	**Meningkatnya konektivitas wilayah**					
3.4.1	Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota	%	65	60,7	63,47	68,47
3.5	**Terselenggaranya Jasa Konstruksi di Daerah**					
3.5.1	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi ahli terlatih dan tersertifikasi	Orang	7925	-	63	70
3.5.2	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	45300	95	100	100
3.5.3	Persentase ketersediaan data dan informasi jasa konstruksi	%	70	-	100%	100%
3.5.4	Persentase pengawasan tertib usaha jasa konstruksi	%	60	100%	100%	100%
3.5.5	Persentase pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi	%	70	100%		
3.5.6	Persentase pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	%	50	100	100	100
3.6	**Mewujudkan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan**					
3.6.1	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	33	-	-	-
3.6.2	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	%	28	68,77	70,77	72
3.7	**Lingkungan Hidup Berkualitas**					

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
3.7.1	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi aman (%)	%	12.5	-	-	-
3.7.2	Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	24	-	-	-
3.7.3	Persentase angka BABS di tempat terbuka	%	2.5	-	-	-
4	**Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**					
4.1	**Terpenuhinya akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan**					
4.1.1	Persentase rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Persentase	66.94	95.03	96	96
5	**Urusan Sosial**					
5.1	**Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial**					
5.1.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100
5.1.2	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100
5.1.3	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100
5.1.4	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	-	-	-
5.1.5	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100	100	100
5.2	**Meningkatnya Pemanfaatan DTKS dalam Program Pengentasan Kemiskinan**					
5.2.1	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	70	-	-	-

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
5.3	**Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial**					
5.3.1	Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	83	-	-	-
5.3.2	Persentase (%) Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	Persentase	73	100	100	100
5.4	**Meningkatnya Pendapatan Masyarakat Miskin dan Rentan**					
5.4.1	Jumlah PM yang Meningkat Pendapatannya	Orang	100000	-	-	-
5.5	**Berkurang Beban Pengeluaran Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar**					
5.5.1	Persentase (%) KPM yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	Persentase	100	-	-	-
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
6	**Urusan Tenaga Kerja**					
6.1	**Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing**					
6.1.1	Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan kompetensinya dan ditempatkan	%	75	40	50	60
6.1.2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	70	19.74	20	20.50
6.2	**Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang ditempatkan**					
6.2.1	Jumlah orang yang mendapatkan layanan informasi pasar kerja	Orang	2315250	1669	1500	1500
6.2.2	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	Orang	55000	122	120	120
6.2.3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan dalam negeri hasil pelatihan kerja	%	75	60	60	60

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
6.2.4	Jumlah Laporan Informasi Pasar Kerja	Laporan	2	12	12	12
6.2.5	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia yang mendapatkan Sosialisasi Penempatan dan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia	Orang	250000	40	-	40
6.3	**Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-haknya**					
6.3.1	Jumlah tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasarnya	Orang	2100000	40000	43000	44500
6.3.2	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	6648453	3090	3200	3300
6.4	**Meningkatnya pemanfaatan Dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) dalam penyusunan Renstra dan Renja SKPD**					
6.4.1	Persentase Perangkat Daerah yang menyusun Renstra dan Renja SKPD mengacu pada dokumen RTKD	%	60	30	-	60
7	**Urusan Kebudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**					
7.1	**Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Khusus Anak**					
7.1.1	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65.03	62,73	62,73	62,73
7.1.2	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	95	100	100	100
7.2	**Menurunnya ketimpangan gender, meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta meningkatnya layanan terhadap perempuan korban kekerasan dan TPPO**					
7.2.1	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	95	100	100	100
7.2.2	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	91.95	93.10	92.80	92.83
7.2.3	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.43	-	0.53	0.52

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
7.3	**Meningkatnya kualitas dan efektifitas penyelenggaraan PUG dan SPA dalam pembangunan di daerah**					
7.3.1	Nilai Penganugerahan Parahita Ekapraya	Nilai	601	-	Pratama	Madya
7.3.2	Persentase ARG	%	10.0	22.97	30	32
7.3.3	Nilai Kab/Kota Layak Anak (KLA)	Nilai	601	656.28	658.00	658.00
8	**Urusan Pangan**					
8.1	**Meningkatnya ketersediaan pangan strategis dalam negeri**					
8.1.1	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	50	37.415	52	52
8.2	Terentaskannya kerawanan pangan dan gizi					
8.2.1	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	11	17	20	20
8.3	**Terwujudnya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**					
8.3.1	Inflasi pangan bergejolak tambah kurang (plus minus) 1 dari target yang ditetapkan	%	5	-	-	-
8.4	**Meningkatnya Keamanan dan Mutu Pangan**					
8.4.1	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	90	90	90
9	**Urusan Pertanahan**					
9.1	**Terpenuhinya inventarisasi subyek dan obyek redistribusi tanah**					
9.1.1	Jumlah bidang tanah yang diredistribusi	Bidang Tanah	286339	285	500	500
9.1.2	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	148800	278	300	300
10	**Urusan Lingkungan Hidup**					
10.1	**Peningkatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**					
10.1.1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Poin	0.44	-	-	-

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
10.2	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah					
10.2.1	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	%	72	-	-	-
10.3	Peningkatan Penurunan Emisi GRK					
10.3.1	Persentase Penurunan Emisi GRK	%	28.15	-	20.1	23.1
10.4	**Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**					
10.4.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	72.94	68.24	68.48	72.10
11	**Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**					
11.1	**Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan**					
11.1.1	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk usia 0 s.d. 17 tahun	%	99.5	98,09	100	100
11.1.2	Persentase cakupan kepemilikan buku nikah/akta perkawinan pada semua pasangan yang perkawinannya dilaporkan	%	100	100	100	100
11.1.3	Persentase cakupan akta kematian dari peristiwa kematian yang dilaporkan	%	100	100	100	100
11.1.4	Persentase cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu pasangan yang perceraiannya dilaporkan	%	100	100	100	100
11.1.5	Persentase Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	%	62	67,8	75	80
11.2	**Meningkatknya Cakupan Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)**					
11.2.1	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	30	1.06	30	33
11.3	**Terpenuhinya Data Kependudukan yang terintegrasi antar Lembaga**					

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
11.3.1	Jumlah data profil kependudukan yang disusun	Dokumen	2	1	1	1
12	**Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**					
12.1	**Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan kategori "baik"**					
12.1.1	Jumlah BPD yang Mengimplemetasikan Musyawarah Desa dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Secara Partisipatif	Lembaga	1000	154	153	153
12.1.2	Jumlah Desa yang Menerapkan Pelayanan Pemerintahan Desa Berbasis Digital	Desa	1500	-	-	-
12.1.3	Jumlah Desa yang Memanfaatkan Data Regsosek	Desa	3000	-	-	153
12.1.4	Jumlah Desa yang Menginisiasi Pengembangan Kerja Sama Desa	Desa	800	-	-	4
12.1.5	Jumlah Aparatur dan Pengurus Kelembagaan Desa yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemdes	Orang	4350	944	1.227	2,613
12.2	Meningkatnya Jumlah Desa Mandiri					
12.2.1	Persentase Desa Mandiri	Persentase	19.64	14.29	20.78	27.27
12.3	Menurunnya Kemiskinan di Perdesaan					
12.3.1	Persentase Kemiskinan di Perdesaan	Persentase	10.88	-	-	-
12.4	Meningkatnya Daya saing Ekonomi Desa					
12.4.1	Persentase BUM Desa Maju	Persentase	8.28	66.88	72.73	72.73
13	**Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**					
13.1	**Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga**					
13.1.1	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	61	100	60.90	70.00

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
13.2	**Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana**					
13.2.1	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	18	20,8	18	17
13.2.2	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	21	2.31	2.20	2.20
13.2.3	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	63.41	83.47	77.5	77.5
13.2.4	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7.1	4.66	4.7	4.7
14	**Urusan Perhubungan**					
14.1	**Terwujudnya Konektivitas Nasional**					
14.1.1	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Kabupaten/Kota	Rasio	0.763	0,17	0.80	0.80
14.2	**Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perhubungan**					
14.2.1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi	Nilai	88.5	84,75	86.59	90
14.3	**Meningkatnya Keselamatan Transportasi**					
14.3.1	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	Persentase	29	50	0.0020	80
14.3.2	Jumlah Perlintasan Kereta Api yang Telah Ditangani pada Jalan Kabupaten/Kota	Unit	100	-	-	-
14.3.3	Jumlah Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan	Perusahaan	120	-	-	-

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
14.3.4	Jumlah SDM Penguji Kendaraan Bermotor yang Tersertifikasi	Orang	125	6	8	10
14.3.5	Tersedianya Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) dengan Akreditasi Minimal B	Unit	9	1	1	1
14.3.6	Jumlah Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	Unit	1157808	895	1646	1750
15	**Urusan Komunikasi dan Informatika**					
15.1	**Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Digital untuk pertumbuhan ekonomi**					
15.1.1	Persentase (%) perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program inovasi yang mendukung kabupaten/kota cerdas sesuai dengan Masterplan kabupaten/kota cerdas yang sudah ditetapkan	%	100	46.87	40	87
15.2	**Meningkatnya Penguatan tata kelola Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) di Daerah**					
15.2.1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	74	98.46	90	61
15.2.2	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	%	100	79.41	100	12
15.2.3	Persentase ASN pengelola Informasi dan Komunikasi Publik di Pemda yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang difasilitasi oleh Dinas	%	85	338.71	33	33

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
15.2.4	Persentase Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) yang melaksanakan diseminasi informasi Kebijakan dan Program Prioritas Nasional dan Prioritas Daerah	%	85	93.59	8	12
15.2.5	Persentase khalayak yang terpapar informasi terkait program dan kebijakan pemerintah daerah, termasuk konten tematik dan agenda prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (antara lain: Ibu Kota Negara, stunting, dll) sesuai strategi komunikasi	%	85	99.39	39	61
15.3	**Mendorong adopsi digital dalam seluruh layanan publik dan pemerintahan**					
15.3.1	Persentase aplikasi umum SPBE yang digunakan oleh Pemda	%	100	48.21	20	26
15.3.2	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	%	100	84.15	2	1
15.3.3	Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	50	48.21	100	26
15.3.4	Persentase area publik yang memanfaatkan akses internetÂ yang disediakan olehÂ Dinas	%	20	75.71	83	93
15.3.5	Persentase Aplikasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	%	30	84.15	1	1
15.4	**Meningkatkan literasi digital dan kemampuan digital mulai dari level pengguna hingga inovator secara menyeluruh**					

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
15.4.1	Persentase masyarakat (termasuk ASN dan Pelaku Usaha) yang mendapatkan literasi dan/atau sosialisasi SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	20	94.27	1	1
15.4.2	Persentase ASN pengelola SPBE di tingkat Pemerintah Kota/Kab yang mendapatkan pelatihan/bimbingan teknis pengelolaan SPBE yang difasilitasi oleh Dinas	%	100	2.69	3.00	3.20
16	**Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**					
16.1	**Terwujudnya Koperasi Yang Berkualitas dan Modern**					
16.1.1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Persentase	20	3.9	5	5.4
16.2	**Terwujudnya UMKM dan Wirausaha yang Berdaya Saing dan Produktif**					
16.2.1	Jumlah Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Persentase	4	1.45	1.63	1.83
16.2.2	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	Persentase	75	0.15	0.18	0.19
16.2.3	Pertumbuhan Wirausaha	Persentase	2.90	28.23	28.41	28.63
17	**Urusan Penanaman Modal**					
17.1	**Tercapainya Target Realisasi Penanaman Modal**					
17.1.1	Nilai Realisasi Penanaman Modal	Triliun Rupiah	1650	471.226 M	610 M	615 M
18	**Urusan Kepemudaan dan Olahraga**					
18.1	**Peningkatan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri**					
18.1.1	Tingkat Partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Nilai	1.30	0,05	0,07	1,00

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
18.2	**Peningkatan partisipasi organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan**					
18.2.1	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	75.79	16,65	30	35
18.3	Peningkatan prestasi olahraga					
18.3.1	Peningkatan Prestasi Olahraga	Indeks	40.00	68,75	55	70
18.4	**Peningkatan Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan**					
18.4.1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Kepemudaan	%	67.32	33,23	40	45
19	**Urusan Statistik**					
19.1	**Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)**					
19.1.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	2.6	1.35	1.8	2.6
20	**Urusan Persandian**					
20.1	**Menguatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah**					
20.1.1	Jumlah Lulusan Pelatihan SDM Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Orang	300	-	2	2
20.1.2	Jumlah Lulusan Pelatihan dan Sertifikasi Sesuai Standar Kompetensi Keamanan Siber dan Sandi	Orang	325	-	2	2
20.1.3	Jumlah Lulusan Pelatihan Teknis Bidang Keamanan Siber dan Sandi	Orang	275	-	2	2
21	**Urusan Kebudayaan**					
21.1	**Kelestarian Cagar Budaya**					

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
21.1.1	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	%	71.63	7.85	8.21	8.57
21.1.2	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	%	8.6	6.78	8.57	8.92
21.1.3	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1.67	0.58	0.59	0.60
21.1.4	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan upacara adat	%	19.91	-	-	-
21.1.5	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65.50	73.08	84.62	88.46
21.2	Pemajuan Kebudayaan					
21.2.1	Persentase satuan pendidikan yang melaksanakan pengarusutamaan kebudayaan	%	0.66	43.56	62.38	83.17
21.2.2	Persentase penduduk yang memiliki sumber penghasilan sebagai pelaku/pendukung kegiatan seni	%	0.3	0.58	0.59	0.60
22	**Urusan Perpustakaan**					
22.1	**Peningkatan kegemaran membaca masyarakat**					
22.1.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	71.5	60.22%	53%	61%
22.2	**Pembangunan literasi masyarakat meningkat**					
22.2.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	70.5	67,73%	51%	68%
23	**Urusan Kearsipan**					
23.1	**Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional**					
23.1.1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan di lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	60	10	15	20

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
24	**Urusan Kelautan dan Perikanan**					
24.1	**Industrialisasi Kelautan dan Perikanan berdaya saing**					
24.1.1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6000000	810	990.2	999.7
24.1.2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19539705	1648.7	911.5	918.1
24.2	**Ekonomi sektor kelautan dan perikanan yang meningkat**					
24.2.1	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	43.30	55.73	57.12	58.5
24.3	**Pengawasan dan Penegakan Hukum Bidang Kelautan dan Perikanan yang efektif**					
24.3.1	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	98	-	-	-
25	**Urusan Pariwisata**					
25.1	**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terhadap Ketahanan Ekonomi Nasional**					
25.1.1	Nilai Tambah Ekonomi Kreatif	Rp	1347000000000	-	-	-
25.1.2	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1250000000	45651	41500	42500
25.1.3	Rasio PDB Pariwisata	%	4.5	-	-	-
26	**Urusan Pertanian**					
26.1	**Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan**					
26.1.1	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis	%	80.50	100	100	100
26.1.2	Rasio luas serangan OPT tanaman hortikultura yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	99.60	100	100	100

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
26.1.3	Rasio luas serangan OPT tanaman pangan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	98	100	100	100
26.1.4	Rasio luas serangan OPT tanaman perkebunan yang dapat ditangani terhadap luas serangan OPT	%	47	100	100	100
26.1.5	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman hortikultura	%	93.10	100	100	100
26.1.6	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman pangan	%	71	100	100	100
26.1.7	Persentase luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI tanaman perkebunan	%	40	100	100	100
26.2	**Meningkatnya Produksi Pertanian**					
26.2.1	Jumlah Produksi Jagung	Ton	22591512	12635,50	19240,578	19529,18
26.2.2	Jumlah Produksi Padi	Ton	56046664	80772,43	219376,75	222667,407
26.2.3	Jumlah Produksi Kedelai	Ton	334308	129,60	335,483	340,515
26.2.4	Jumlah Produksi Pangan Lokal Non Beras (Ubi Kayu dan Ubi Jalar)	Ton	17037783	85,20	2910,836	2954,498
26.2.5	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	3070000	14399	14007,5	14217,61
26.2.6	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2000000	8	103,53	105,082
26.2.7	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kopi	Ton	772058	28	28.99	29.42

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
26.2.8	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	2893808	324	272.322	276.40
26.2.9	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	641207	-	-	-
26.2.10	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Karet	Ton	2702421	27169	31345.99	31423.39
26.2.11	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Lada	Ton	70520	-	-	-
26.2.12	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Pala	Ton	43877	-	-	-
26.2.13	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Cengkeh	Ton	135448	-	-	-
26.2.14	Jumlah Produksi Daging (sapi, kerbau, domba, kambing, ayam, itik, babi)	Ton	4966247	1879.76	2078.70	2078.70
26.2.15	Jumlah Produksi Susu	Ton	855569	-	-	-
26.2.16	Jumlah Produksi Telur	Ton	7446401	-	-	-
27	**Urusan Perdagangan**					
27.1	**Meningkatnya pertumbuhan ekspor bernilai tambah tinggi**					
27.1.1	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	7.86	0,00	-	7,86
27.2	**meningkatnya perlindungan konsumen di daerah**					
27.2.1	Persentase penanganan pengaduan konsumen	%	92	0,00	80	100
27.3	**meningkatnya tertib ukur**					
27.3.1	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase	60	30,29	33,00	35,00
27.4	**terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan di daerah**					

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
27.4.1	pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	Persentase	5	-	-	5,00
28	**Urusan Perindustrian**					
28.1	**Tercapainya Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas**					
28.1.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	6.62	3.54	5.75	6.08
28.2	**Tercapainya Pertumbuhan Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas**					
28.2.1	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas (USD Miliar)	Nilai	244.79	0.00	-	-
28.3	**Meningkatnya Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas**					
28.3.1	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas (Juta Orang)	Orang	21.21	0.003981	0.004834	0.005525
28.4	**Tercapainya Pertumbuhan Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas**					
28.4.1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	882	0.130	0.131	0.132
28.5	**Meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap PDRB**					
28.5.1	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	18.15	1.26	1.99	1.99
29	**Urusan Transmigrasi**					
29.1	**Meningkatnya status perkembangan kawasan transmigrasi yang direvitalisasi**					
29.1.1	Nilai rata-rata indeks perkembangan 52 kawasan transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	Index	57.50	-	-	-

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
29.1.2	Nilai rata-rata indeks perkembangan 100 kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	Index	46.10	-	-	-
30	**Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik**					
30.1	**Menurunnya peristiwa konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**					
30.1.1	Jumlah Daerah yang melaksanakan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanganan Konflik Sosial yang efektif	Provinsi	38	200	1	1
30.2	**Meningkatnya Implementasi Nilai-nilai Ideologi Dan Wawasan Kebangsaan**					
30.2.1	Jumlah Daerah yang melaksanakan Nilai-nilai Ideologi dan Wawasan Kebangsaan	Provinsi	38	-	2	1
31	**Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyakarakat**					
31.1	**Meningkatnya pelayanan bencana yang terintegrasi**					
31.1.1	Jumlah Daerah yang meningkatkan manajemen pengintegrasian dan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana	Provinsi	38	-	-	-
31.1.2	Jumlah Daerah yang meningkatkan upaya kesiapsiagaan dan melaksanakan pelayanan pemerintah pada saat tanggap darurat dan pasca bencana	Provinsi	38	-	-	-
31.1.3	Persentase pemenuhan capaian kebutuhan dasar SPM sub urusan bencana	Daerah	100	1	1	1
31.1.4	Persentase penyelesaian dan pendampingan dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	80	100	100

No	Aspek/Urusan/Bidang Urusan/Indikator Kerja Pembangunan Daerah Kab/Kota	Satuan	Target Nasional Tahun 2025	Capaian 2023	Target 2024	Target 2025
31.1.5	Persentase pendampingan penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100
31.1.6	Terverifikasinya data penduduk yang berhak menerima SPM, data agregat penduduk yang telah menerima KIE, dan data penduduk yang mengikuti pelatihan pencegahan/gladi kesiapsiagaan di daerah rawan bencana tingkat provinsi	Dokumen	1	1	1	1
31.2	**Meningkatnya pelayanan trantibum yang terintegrasi**					
31.2.1	Terpenuhinya capaian mutu layanan SPM sub urusan trantibum	Daerah	552	1	1	1
31.2.2	Tercapainya indeks penyelenggaraan sub urusan trantibum kategori "baik"	Daerah	552	1	1	1
31.3	**Meningkatnya pelayanan kebakaran yang terintegrasi**					
31.3.1	Terpenuhinya Kebutuhan SPM sub urusan Kebakaran yang sesuai standar*	Daerah	552	1	1	1

Sumber : Rakortekrenbang Tahun 2024

BAB VII
PENUTUP

7.1. KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2025 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di Kabupaten Balangan. Kaidah dan prinsip tersebut adalah :

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.
3. Pokok-pokok pikiran DPRD adalah usulan kegiatan/pekerjaan dari anggota DPRD Kabupaten Balangan berdasarkan hasil reses yang dilaksanakan di daerah pemilihan/daerah konstituen.
4. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik-baiknya.
5. Dalam rangka penyusunan RKPD berbasis spasial, maka akan diterapkan perencanaan yang berbasis geoportal.
6. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Kabupaten Balangan.
7. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap SKPD harus membuat Rencana Kerja (RENJA) yang dapat

menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.

8. Seluruh perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

7.2. KAIDAH-KAIDAH PENDANAAN

Aspek pendanaan dalam RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2025 ini tidak saja bersumber dari dana pemerintah saja, tetapi juga masyarakat dan swasta, baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun dalam skema kemitraan. Dalam rangka upaya peningkatan kemampuan pendanaan daerah dan peningkatan pengelolaan sumber keuangan daerah yang terus menerus dan berkesinambungan. Adapun kaidah-kaidah dalam hal pendanaan antara lain:

1. Peningkatan kemampuan pendanaan pembangunan daerah dengan penggalian pendapatan daerah melalui intensifikasi dan eksentifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
2. Optimalisasi dana perimbangan, dana dekonsentrasi serta sumber dana lain dari Pemerintah Pusat;
3. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip penyusunan APBD yang efisien, efektifitas, akuntabel dan transparan berbasis money follow program;
4. Kemitraan pelaksanaan pembangunan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten, antar pemerintah daerah lainnya, serta dengan masyarakat, dunia usaha maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan;
5. Penetapan dan penerapan Harga Satuan Belanja yang sudah digunakan di dalam aplikasi SIPD Kemendagri.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Kabupaten Balangan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian keberhasilan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Balangan sangat bergantung pada strategi berbagi peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta sehingga “Balangan yang Maju dan Sejahtera” dapat terwujud secara efisien dan efektif.

LAMPIRAN RENJA DALAM RKPD KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025

Penetapan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kabupaten Balangan Tahun 2025

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						**Rp535.375.654.461**							**Rp230.045.674.914**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp522.531.152.221**							**Rp224.859.536.914**	
1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**Rp522.531.152.221**							**Rp224.859.536.914**	
1,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah***	-			**72,50 Nilai 86 Nilai**	**Rp299.169.081.946**						-	**Rp17.054.567.105**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 533.442.700			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Rp429.107.470	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	Rp 170.227.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp142.020.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	Rp 279.815.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp277.087.470	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 41.700.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp5.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	Rp 41.700.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp5.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp285.507.427.346			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Rp3.522.605.785	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2500 Orang/bulan	Rp280.787.498.986	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp283.959.715	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 4.719.928.360	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp3.238.646.070	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 1.079.582.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Rp1.652.048.090	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				6 Dokumen	Rp 202.145.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp265.084.820	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				9 Laporan	Rp 877.437.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp1.386.963.270	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 4.912.817.500			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Rp6.938.480.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	Rp 45.817.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp150.314.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1731 Orang	Rp 4.867.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp6.788.166.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 4.850.655.900			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Rp2.341.311.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				14 Paket	Rp 80.367.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp69.567.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	Rp 763.903.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp39.160.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	Rp 24.999.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp27.400.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				22 Paket	Rp 402.439.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp481.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	Rp 50.976.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp53.524.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				350 Laporan	Rp 3.527.970.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp1.670.660.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 %	Rp 930.268.500			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Rp917.546.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				3 Laporan	Rp 214.268.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp225.022.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	Rp 716.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp692.524.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 1.354.888.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	Rp1.253.468.760	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				188 Unit	Rp 729.588.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp521.350.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				133 Unit	Rp 320.485.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp304.260.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
		Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	Rp 92.332.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp98.186.760	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				9 Unit	Rp 212.482.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		Rp329.672.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1,01,02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	***Nilai rata-rata numerasi SD Indeks iklim inklusivitas SD Nilai rata-rata literasi SD Indeks iklim keamanan SD Indeks iklim kebhinekaan SD Angka melanjutkan SD ke SMP APM SD/sederajat APK SD/sederajat***	**88,25 % 9,17 tahun**			**52,51 Nilai 62,72 Nilai 69,61 Nilai 78,66 Nilai 79,15 Nilai 79,77 % 92,35 % 99,52 %**	**Rp216.455.300.475**						**87,65 % 9,17 tahun**	**Rp202.518.019.109**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	*Persentase Guru atau Tenaga Kependidikan Bersertifikasi Persentase Guru yang Lulus Sebagai Guru Penggerak Persentase Kemudahan dan Akses Layanan Pendidikan Persentase Pendidik yang Menggunakan id Pembelajaran Persentase Sekolah Mendapatkan BOS daerah Persentase Sekolah Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Untuk Pendidikan Persentase Sekolah yang Mendapatkan Pendampingan Persentase Sekolah yang Telah Mengupdate Data Dapodik*	-			65 % 3,74 % 13,35 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Rp110.359.044.775			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan	-	Rp109.067.321.100	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				4 Unit	Rp 1.901.050.026	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp2.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				8 Ruang	Rp 1.820.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp2.360.400.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				13 Unit	Rp 2.758.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp8.859.560.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				16 Ruang	Rp 2.135.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp6.629.760.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	Rp 59.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp120.640.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				176 Paket	Rp 2.258.460.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp1.957.763.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				3520 Peserta Didik	Rp 1.097.336.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp1.039.781.820	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1046 Orang	Rp 24.418.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp21.483.352.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
		Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				176 Satuan Pendidikan	Rp 320.935.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp972.685.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
		Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				176 Satuan Pendidikan	Rp 11.017.920.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														
		Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				202 Orang	Rp 492.815.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp5.684.816.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				176 Dokumen	Rp 8.081.633.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp575.191.980	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				20 Unit	Rp 2.323.748.099	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp1.984.840.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														
		Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				5202 Orang	Rp 25.049.256.250	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp16.472.431.800	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				176 Satuan Pendidikan	Rp 4.210.540.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp547.833.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				10 Ruang	Rp 3.522.800.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp12.451.516.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
		Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				1685 Peserta Didik	Rp 1.468.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp926.750.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				103 Paket	Rp 17.422.450.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp25.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	*Persentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi Persentase guru yang lulus sebagai guru penggerak Persentase kemudahan dan akses layanan pendidikan Persentase Perdidik yang menggunakan id pembelajaran Persentase sekolah mendapatkan BOS daerah Persentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan Persentase sekolah yang mendapatkan pendampingan Persentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik*	-			65 % 0,97 % 11,4 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %	Rp 46.070.996.900			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan	-	Rp26.962.672.350	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)														
		Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun				2 Unit	Rp 6.492.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp7.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				7 Unit	Rp 1.216.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp1.500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
		Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	Rp 1.365.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp1.456.240.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah														
		Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	Rp 82.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp248.996.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														
		Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				1 Ruang	Rp 162.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp200.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Unit	Rp 438.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp865.950.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				26 Paket	Rp 1.435.340.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SMP	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp204.111.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				735 Peserta Didik	Rp 18.603.025.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp662.772.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
		Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				546 Peserta Didik	Rp 963.431.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp575.225.750	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				430 Orang	Rp 10.806.750.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp9.552.840.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
		Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				26 Satuan Pendidikan	Rp 136.248.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp580.515.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
		Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				26 Satuan Pendidikan	Rp 2.889.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK NON FISIK-BOS REGULER	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp2.719.080.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				26 Dokumen	Rp 799.942.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp800.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
		Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				26 Satuan Pendidikan	Rp 449.860.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp268.862.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Ruang	Rp 231.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp328.080.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-SMP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Sekolah Menengah Kabupaten Balangan		Rp-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	*Persentase jumlah PAUD yang berakredetasi minimal B Persentase lembaga PAUD mendapatkan BOP Daerah Persentase lembaga PAUD yang telah dinegerikan Persentase lembaga PAUD yang telah valid dan updating data Dapodik PAUD Persentase pendidik PAUD yang S-1 dan D4*	-			65,69 % 100 % 28,57 % 100 % 93,09 %	Rp 38.981.050.300			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan	-	Rp51.600.831.379	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				30 Unit	Rp 5.301.670.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp11.412.039.099	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
		Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				0 Paket	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp1.582.369.470	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD														
		Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia				1 Paket	Rp 68.792.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp150.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD														
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD				745 Orang	Rp 14.160.060.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp12.566.035.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				79 Orang	Rp 3.308.366.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp665.017.600	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
		Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				245 Satuan Pendidikan	Rp 353.331.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp423.408.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														
		Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP				243 Satuan Pendidikan	Rp 8.594.622.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOP PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp7.724.120.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp984.240.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				3 Ruang	Rp 667.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp6.411.555.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				2 Unit	Rp 290.980.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemantapan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp415.888.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
		Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				1 Paket	Rp 65.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp92.069.010	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														
		Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				42 Satuan Pendidikan	Rp 4.689.267.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	Rp 112.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp3.274.090.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
		Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				9 Ruang	Rp 1.369.960.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga PAUD Kabupaten Balangan		Rp900.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase jumlah sarana dan prasarana kejar paket a, b dan c Persentase peserta didik paket a, b dan c*	-			100 %86,85 %	Rp 21.044.208.500			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan	-	Rp14.887.194.280	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
		Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				320 Orang	Rp 2.765.804.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp2.180.318.030	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				12 Satuan Pendidikan	Rp 110.881.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp198.528.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
		Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				12 Satuan Pendidikan	Rp 6.616.632.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp5.718.636.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
		Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp884.576.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
		Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				2 Ruang	Rp 424.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp500.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
		Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp246.040.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah														
		Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia				0 Paket	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				2386 Peserta Didik	Rp 11.126.890.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp5.000.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah														
		Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				0 Paket	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp-	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan				0 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG PENDIDIKAN-REGULER-PAUD	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga Pendidikan Non Formal Kabupaten Balangan		Rp159.096.050	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1,01,03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	***Nilai Rata-rata Numerasi SMP Nilai rata-rata numerasi SD Nilai Rata-rata litersasi SMP Nilai rata-rata literasi SD***	-			**43,76 Nilai 52,51 Nilai 62,95 Nilai 69,61 Nilai**	**Rp 699.756.600**						-	**Rp455.214.000**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	*Persentase Sekolah yang mendapatkan Buku Teks dan Alat Peraga Edukasi*	-			100 %	Rp 699.756.600			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan	-	Rp455.214.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar														
		Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun				11 Dokumen	Rp 699.756.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar Kabupaten Balangan		Rp455.214.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1,01,04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	***Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten 2023 Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten 2023***	-			**22,41 % 65 %**	**Rp 6.027.872.200**						-	**Rp4.593.016.700**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	*Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	-			100 %	Rp 6.027.872.200			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar, Menengah, Paud dan NonFormal Kabupaten Balangan	-	Rp4.593.016.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
		Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Dokumen	Rp 2.864.064.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar, Menengah, Paud dan NonFormal Kabupaten Balangan		Rp2.998.744.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				3 Laporan	Rp 3.163.807.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sekolah Dasar, Menengah, Paud dan NonFormal Kabupaten Balangan		Rp1.594.272.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1,01,05	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	***Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya***	-			**100 %**	**Rp 179.141.000**						-	**Rp238.720.000**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	*Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya*	-			100 %	Rp 179.141.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga PAUD dan NonFormal Kabupaten Balangan	-	Rp238.720.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat				257 Dokumen	Rp 179.141.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Lembaga PAUD dan NonFormal Kabupaten Balangan		Rp238.720.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 12.844.502.240**							**Rp5.186.138.000**	
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**Rp 12.844.502.240**							**Rp5.186.138.000**	
2,22,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	***Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik***	-			**72 %**	**Rp 673.750.000**						-	**Rp130.590.000**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase peningkatan pembinaan lembaga adat lokal*	-			80 %	Rp 673.750.000			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten Balangan	-	Rp130.590.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.02.2.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat														
		Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				35 Objek	Rp 673.750.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten Balangan		Rp130.590.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2,22,03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	***Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan***	-			**93,33 %**	**Rp 7.649.588.240**						-	**Rp2.437.227.700**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase event kesenian tradisional*	-			80 %	Rp 7.649.588.240			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten Balangan	-	Rp2.437.227.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)				680 Orang	Rp 3.691.697.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten Balangan		Rp1.581.730.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
		Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya				24 Lembaga	Rp 3.957.890.440	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten Balangan		Rp855.497.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2,22,04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	***Persentase sejarah lokal yang dilestarikan***	-			**80 %**	**Rp 1.643.945.800**						-	**Rp1.002.964.900**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota*	-			83 %	Rp 1.643.945.800			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten Balangan	-	Rp1.002.964.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan				170 Orang	Rp 1.215.757.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten Balangan		Rp740.663.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah														
		0				0 0	Rp 55.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten Balangan		Rp60.000.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah														
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat				2500 Dokumen	Rp 373.188.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Kabupaten Balangan		Rp202.301.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2,22,05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	***Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik***	-			**86,67 %**	**Rp 2.877.218.200**						-	**Rp1.615.355.400**	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan*	-			95 %	Rp 399.710.900			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Cagar Budaya Kabupaten Balangan	-	Rp506.209.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				40 Objek	Rp 99.997.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Cagar Budaya Kabupaten Balangan		Rp53.180.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				19 Objek	Rp 299.713.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Cagar Budaya Kabupaten Balangan		Rp453.029.500	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	*Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan*	-			87 %	Rp 2.477.507.300			Revolusi Mental dan Pembangunan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Cagar Budaya Kabupaten Balangan	-	Rp1.109.145.900	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				13 Objek	Rp 718.827.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Cagar Budaya Kabupaten Balangan		Rp451.265.200	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan				1 Objek	Rp 1.177.199.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Cagar Budaya Kabupaten Balangan		Rp95.040.000	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				5 Objek	Rp 581.480.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebud ayaan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Cagar Budaya Kabupaten Balangan		Rp562.840.700	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	DINAS KESEHATAN						**Rp216.690.131.567**							**Rp-**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp216.676.259.667**							**Rp-**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp216.676.259.667**							**Rp-**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp105.935.266.158**						-	**Rp-**	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentasi dokumen perencanaan, penggganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu*	-			100 Persen	Rp 1.183.166.800			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	Rp 583.166.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Rp 500.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				4 Dokumen Dokumen	Rp 100.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku*	-			100 Persen	Rp 97.564.486.202			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				583 Orang/bulan	Rp 96.731.397.202	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4 Dokumen	Rp 833.089.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur*	-			100 Persen	Rp 2.956.160.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	Rp 2.956.160.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Cakupan pelaksanaan administrasi umum*	-			100 Persen	Rp 1.302.018.600			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	Rp 613.037.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	Rp 79.959.500	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1440 Dokumen	Rp 29.947.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	Rp 579.074.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	Rp 997.437.900			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				24 Laporan	Rp 131.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Laporan	Rp 569.342.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				48 Laporan	Rp 296.895.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			12 Bulan	Rp 1.918.124.756			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				63 Unit	Rp 434.693.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	Rp 1.367.779.656	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				10 Unit	Rp 115.651.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase gedung Fasyankes yang Layak***	-			**100 Persen**	**Rp 93.602.505.709**						-	**Rp-**	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Nilai Komulatif Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) diFasilitas Kesehatan*	-			80 Persen	Rp 44.050.283.043			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				6 Unit	Rp 407.832.173	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
		Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				12 Unit	Rp 13.800.487.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
		Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				12 Unit	Rp 12.357.854.684	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				12 Unit	Rp 8.556.088.790	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				12 Unit	Rp 54.050.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
		Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				4 Paket	Rp 7.908.219.996	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga														
		Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas				1000 Keluarga	Rp 905.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														
		Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				144 Paket	Rp 60.250.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap Persentase capaian SPM Bayi Baru Lahir Persentase capaian SPM kesehatan balita Persentase capaian SPM kesehatan bayi Persentase capaian SPM kesehatan ibu Persentase capaian SPM pencegahan dan pengendalian penyakit Persentase operasional pelayanan kesehatan Persentase penyakit yang berpotensi wabah ditangani sesuai standar Persentase persalinan di failitas kesehatan Persentase remaja putri yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar Persentase rumah tangga yang mencapai SBS*	-			4 Dokumen 99 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 96 Persen	Rp 49.101.620.666			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2167 Orang	Rp 1.114.700.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2015 Orang	Rp 259.790.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														
		Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				1960 Orang	Rp 709.880.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
		Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				8100 Orang	Rp 694.180.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20680 Orang	Rp 390.205.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
		Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				79143 Orang	Rp 548.520.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				11317 Orang	Rp 900.029.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
		Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				12827 Orang	Rp 264.040.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														
		Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3618 Orang	Rp 193.940.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				240 Orang	Rp 256.340.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
		Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				2358 Orang	Rp 384.140.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
		Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				3310 Orang	Rp 323.165.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar				8 Dokumen	Rp 223.038.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	Rp 2.429.777.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				26 Dokumen	Rp 517.157.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				4 Dokumen	Rp 1.290.458.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				11 Dokumen	Rp 367.540.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				12 Dokumen	Rp 363.614.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				12 Dokumen	Rp 36.501.969.966	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah														
		Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah				25088 Orang	Rp 154.132.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	Rp 650.415.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis														
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				477 Orang	Rp 281.110.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)														
		Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				10 Orang	Rp 145.337.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				2760 Orang	Rp 138.140.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	*Persentase puskesmas yang menerapkan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik terintegrasi*	-			100 Persen	Rp 226.374.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				3 Dokumen	Rp 226.374.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Puskesmas dengan Kategori Akreditasi Paripurna* *Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar*	-			8 Paripurna 100 Persen	Rp 224.228.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														
		Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				12 Unit	Rp 224.228.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1,02,03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	***Rasio SDM Kesehatan (9 Jenis Nakes Wajib di FKTP.(Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Dll)***	-			**22,23,24 Angka/Nilai**	**Rp 16.239.677.500**						-	**Rp-**	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	*Persentase Puskesmas yang terpenuhi Kebutuhan SDMK*	-			100 Persen	Rp 13.939.846.400			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				13 Orang	Rp 13.939.846.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar*	-			100 Persen	Rp 2.299.831.100			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				76 Orang	Rp 2.299.831.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1,02,04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	***Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan***	-			**100 Persen**	**Rp 190.000.000**						-	**Rp-**	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	*Jumlah sarana P-IRT (Produksi pangan Industri Rumah tangga) yang bersertifikat yang diawasi*	-			15 Sarana	Rp 190.000.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				15 Dokumen	Rp 190.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1,02,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	***PERSENTASE KELUARGA YANG MELAKSANAKAN PRILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS)***	-			**65 Persen**	**Rp 722.682.200**						-	**Rp-**	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan*	-			1 Kebijakan	Rp 425.487.700			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				2 Dokumen	Rp 425.487.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Rumah Tangga (RT) yang telah disurvei PHBS (%)*	-			65 Persen	Rp 297.194.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				4 Dokumen	Rp 297.194.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas, RSUD dan Masyarakat		Rp-	DINAS KESEHATAN
1.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 13.871.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp-	DINAS KESEHATAN
	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI						**Rp 86.728.537.100**							**Rp-**	
						TARGET 2025	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	**LOKASI**	**SUMBER DANA**	**PRIORITAS NASIONAL**	**PRIORITAS DAERAH**		**TARGET**	**PAGU INDIKATIF (Rp)**	
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 86.728.537.100**							**Rp-**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 86.728.537.100**							**Rp-**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 42.000.000.000**						-	**Rp-**	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Angka penggunaan tempat tidur (BOR)* *Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat* *Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk Tingkat Capaian Akreditasi Rumah sakit*	-			60 Angka/Nilai 90 Persen 1 per 1000 1 Paripurna	Rp 42.000.000.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 42.000.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	RSUD dan Masyarakat		Rp-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase gedung Fasyankes yang Layak***	-			**100 Persen**	**Rp 44.728.537.100**						-	**Rp-**	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Nilai Komulatif Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) diFasilitas Kesehatan*	-			80 Persen	Rp 18.009.998.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
		Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				1 Unit	Rp 18.009.998.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	RSUD dan Masyarakat		Rp-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 26.718.538.600			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	RSUD dan Masyarakat	-	Rp-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	Rp 26.718.538.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	RSUD dan Masyarakat		Rp-	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DATU KANDANG HAJI
	PUSKESMAS PARINGIN						**Rp 982.258.104**							**Rp808.664.604**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 982.258.104**							**Rp808.664.604**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 982.258.104**							**Rp808.664.604**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 808.664.604**						-	**Rp808.664.604**	PUSKESMAS PARINGIN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 808.664.604			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp808.664.604	PUSKESMAS PARINGIN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 808.664.604	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp808.664.604	PUSKESMAS PARINGIN
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 173.593.500**						-	**Rp-**	PUSKESMAS PARINGIN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 173.593.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS PARINGIN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 173.593.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS PARINGIN
	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN						**Rp 872.850.741**							**Rp725.564.781**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 872.850.741**							**Rp725.564.781**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 872.850.741**							**Rp725.564.781**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 725.564.781**						-	**Rp725.564.781**	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 725.564.781			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp725.564.781	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 725.564.781	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp725.564.781	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 147.285.960**						-	**Rp-**	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan/Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat*	-			100 Persen	Rp 147.285.960			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 147.285.960	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS PARINGIN SELATAN
	PUSKESMAS AWAYAN						**Rp 1.268.188.500**							**Rp1.080.000.000**	
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 1.268.188.500**							**Rp1.080.000.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 1.268.188.500**							**Rp1.080.000.000**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Persen**	**Rp 1.080.000.000**						-	**Rp1.080.000.000**	PUSKESMAS AWAYAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 1.080.000.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp1.080.000.000	PUSKESMAS AWAYAN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 1.080.000.000	Kab. Balangan, Awayan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp1.080.000.000	PUSKESMAS AWAYAN
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 188.188.500**						-	**Rp-**	PUSKESMAS AWAYAN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 188.188.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS AWAYAN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 188.188.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS AWAYAN
	PUSKESMAS TEBING TINGGI						**Rp 666.243.820**							**Rp512.537.700**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 666.243.820**							**Rp512.537.700**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 666.243.820**							**Rp512.537.700**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 512.537.700**						-	**Rp512.537.700**	PUSKESMAS TEBING TINGGI
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 512.537.700			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp512.537.700	PUSKESMAS TEBING TINGGI
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 512.537.700	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp512.537.700	PUSKESMAS TEBING TINGGI
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 153.706.120**						-	**Rp-**	PUSKESMAS TEBING TINGGI
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 153.706.120			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS TEBING TINGGI
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 153.706.120	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS TEBING TINGGI
	PUSKESMAS LOKBATU						**Rp 582.873.742**							**Rp463.472.222**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 582.873.742**							**Rp463.472.222**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 582.873.742**							**Rp463.472.222**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 463.472.222**						-	**Rp463.472.222**	PUSKESMAS LOKBATU
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 463.472.222			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp463.472.222	PUSKESMAS LOKBATU
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 463.472.222	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp463.472.222	PUSKESMAS LOKBATU
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 119.401.520**						-	**Rp-**	PUSKESMAS LOKBATU
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 119.401.520			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS LOKBATU
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 119.401.520	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS LOKBATU
	PUSKESMAS BATUMANDI						**Rp 815.681.152**							**Rp6.664.882.752**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 815.681.152**							**Rp6.664.882.752**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 815.681.152**							**Rp6.664.882.752**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 664.882.752**						-	**Rp6.664.882.752**	PUSKESMAS BATUMANDI
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 664.882.752			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp6.664.882.752	PUSKESMAS BATUMANDI
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 664.882.752	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp6.664.882.752	PUSKESMAS BATUMANDI
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 150.798.400**						-	**Rp-**	PUSKESMAS BATUMANDI
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 150.798.400			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS BATUMANDI
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 150.798.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS BATUMANDI
	PUSKESMAS TANAH HABANG						**Rp 432.893.488**							**Rp294.023.808**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 432.893.488**							**Rp294.023.808**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 432.893.488**							**Rp294.023.808**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 294.023.808**						-	**Rp294.023.808**	PUSKESMAS TANAH HABANG
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 294.023.808			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp294.023.808	PUSKESMAS TANAH HABANG
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 294.023.808	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp294.023.808	PUSKESMAS TANAH HABANG
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 138.869.680**						-	**Rp-**	PUSKESMAS TANAH HABANG
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 138.869.680			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS TANAH HABANG
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 138.869.680	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS TANAH HABANG
	PUSKESMAS LAMPIHONG						**Rp 1.056.397.482**							**Rp807.353.082**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						Rp 1.056.397.482							Rp807.353.082	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						Rp 1.056.397.482							Rp807.353.082	
1,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES*	-			73 Angka/Nilai	Rp 807.905.082						-	Rp807.353.082	PUSKESMAS LAMPIHONG
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 807.905.082			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp807.353.082	PUSKESMAS LAMPIHONG
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 807.905.082	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp807.353.082	PUSKESMAS LAMPIHONG
1,02,02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 248.492.400**						-	**Rp-**	PUSKESMAS LAMPIHONG
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 248.492.400			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS LAMPIHONG
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 248.492.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS LAMPIHONG
	PUSKESMAS JUAI						**Rp 1.230.924.368**							**Rp1.080.535.868**	
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						Rp 1.230.924.368							Rp1.080.535.868	
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						Rp 1.230.924.368							Rp1.080.535.868	
1,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	*Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES*	-			73 Angka/Nilai	Rp 1.080.535.868						-	Rp1.080.535.868	PUSKESMAS JUAI
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 1.080.535.868			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp1.080.535.868	PUSKESMAS JUAI
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 1.080.535.868	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp1.080.535.868	PUSKESMAS JUAI
1,02,02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 150.388.500**						-	**Rp-**	PUSKESMAS JUAI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 150.388.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS JUAI
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 150.388.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS JUAI
	PUSKESMAS PIRSUS						**Rp 295.799.234**							**Rp181.194.134**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 295.799.234**							**Rp181.194.134**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 295.799.234**							**Rp181.194.134**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 181.194.134**						-	**Rp181.194.134**	PUSKESMAS PIRSUS
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 181.194.134			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp181.194.134	PUSKESMAS PIRSUS
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 181.194.134	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp181.194.134	PUSKESMAS PIRSUS
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 114.605.100**						-	**Rp-**	PUSKESMAS PIRSUS
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 114.605.100			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS PIRSUS
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 114.605.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS PIRSUS
	PUSKESMAS HALONG						**Rp 1.217.328.360**							**Rp1.002.000.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 1.217.328.360**							**Rp1.002.000.000**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 1.217.328.360**							**Rp1.002.000.000**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 1.002.000.000**						-	**Rp1.002.000.000**	PUSKESMAS HALONG
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Puskesmas*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 1.002.000.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp1.002.000.000	PUSKESMAS HALONG
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 1.002.000.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp1.002.000.000	PUSKESMAS HALONG
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 215.328.360**						-	**Rp-**	PUSKESMAS HALONG
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 215.328.360			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS HALONG
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 215.328.360	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS HALONG
	PUSKESMAS UREN						**Rp 574.952.912**							**Rp346.068.392**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 574.952.912**							**Rp346.068.392**	
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**Rp 574.952.912**							**Rp346.068.392**	
1,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) DINKES***	-			**73 Angka/Nilai**	**Rp 346.068.392**						-	**Rp346.068.392**	PUSKESMAS UREN
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	*Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Capaian Akreditasi Paripurna*	-			90 Persen 1 Paripurna	Rp 346.068.392			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp346.068.392	PUSKESMAS UREN
1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	Rp 346.068.392	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp346.068.392	PUSKESMAS UREN
1,02,02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	***Persentase SPM Bidang Kesehatan***	-			**100 Persen**	**Rp 228.884.520**						-	**Rp-**	PUSKESMAS UREN
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase operasional pelayanan kesehatan*	-			100 Persen	Rp 228.884.520			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat	-	Rp-	PUSKESMAS UREN
1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				12 Dokumen	Rp 228.884.520	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Puskesmas dan Masyarakat		Rp-	PUSKESMAS UREN
	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN						**Rp 31.100.045.850**							**Rp33.443.000.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 31.100.045.850**							**Rp33.443.000.000**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**Rp 31.100.045.850**							**Rp33.443.000.000**	
1,03,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sakip SKPD***	-			**69 Angka**	**Rp 23.850.078.050**						-	**Rp26.858.000.000**	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja*	-			2 Dokumen	Rp 328.517.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp395.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 113.167.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	Rp 126.900.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp150.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 62.200.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	Rp 26.250.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp60.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan*	-			14 Bulan	Rp 12.598.043.250			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp11.465.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				65 Orang/bulan	Rp 12.076.501.050	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp11.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 185.827.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp45.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	Rp 335.715.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp420.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Peningkatan disiplin aparatur*	-			100 Persen	Rp 780.177.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp735.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	Rp 248.447.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	Rp 531.730.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp535.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang dilaksanakan*	-			100 Persen	Rp 2.307.381.200			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp2.333.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	Rp 342.626.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				800 Paket	Rp 95.930.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	Rp 486.076.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp230.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	Rp 65.973.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp28.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp 1.316.775.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp1.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase pengadaan barang milik daerah Penunjang urusan pemerintah daerah*	-			100 Persen	Rp 4.459.202.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp9.000.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				7 Unit	Rp 233.202.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp3.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.07.0003	Pengadaan Alat Besar														
		Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				2 Unit	Rp 4.226.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp5.500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD*	-			100 Persen	Rp 1.753.806.500			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp1.630.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 652.491.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp650.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 1.101.314.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp980.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 1.622.951.100			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp1.300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	Rp 283.204.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	Rp 580.512.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp300.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	Rp 139.510.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp200.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	Rp 619.724.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp500.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1,03,11	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	***Persentase jasa konstruksi yang terampil***	-			**60 Persen**	**Rp 5.395.123.000**						-	**Rp5.175.000.000**	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	*Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat*	-			100 orang	Rp 654.155.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Balangan	-	Rp600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				100 Orang	Rp 654.155.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Balangan		Rp600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Nilai capaian SPM SIPJAKI Kab/Kota*	-			90 Persen	Rp 264.295.800			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Balangan	-	Rp125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
		Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan				1 Layanan Informasi	Rp 264.295.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Balangan		Rp125.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	*Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi*	-			1 Dokumen	Rp 4.476.672.200			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Balangan	-	Rp4.450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
		Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				1000 Paket Pekerjaan	Rp 4.476.672.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Balangan		Rp4.450.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1,03,12	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	***Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang***	-			**60 Persen**	**Rp 1.854.844.800**						-	**Rp1.410.000.000**	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	*Persentase kawasan yang memiliki RDTR*	-			87 Persen	Rp 801.041.100			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.12.2.01.0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota														
		Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota				3 Dokumen	Rp 801.041.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp600.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pemanfaatan ruang*	-			2 Dokumen	Rp 640.296.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	kabupaten Balangan	-	Rp460.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.12.2.03.0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang														
		Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang				2 Sistem Informasi	Rp 640.296.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	kabupaten Balangan		Rp460.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang*	-			1 Dokumen	Rp 413.507.700			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang														
		Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				2 Dokumen	Rp 413.507.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp350.000.000	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	BIDANG BINA MARGA						**Rp244.143.072.100**							**Rp262.260.000.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp244.143.072.100**							**Rp262.260.000.000**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**Rp244.143.072.100**							**Rp262.260.000.000**	
1,03,10	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	***Persentase kerusakan jalan***	-			**31,53 Persen**	**Rp244.143.072.100**						-	**Rp262.260.000.000**	BIDANG BINA MARGA
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp244.143.072.100			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp262.260.000.000	BIDANG BINA MARGA
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan														
		Panjang Jalan yang Dibangun				2 KM	Rp 5.112.450.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp11.000.000.000	BIDANG BINA MARGA
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan														
		Panjang Jalan yang Direkonstruksi				25 KM	Rp202.550.444.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Kabupaten Balangan		Rp220.000.000.000	BIDANG BINA MARGA
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
		Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin				10 Jembatan	Rp 350.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp360.000.000	BIDANG BINA MARGA
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi				3 Jembatan	Rp 20.350.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp3.000.000.000	BIDANG BINA MARGA
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan														
		Jumlah Jembatan yang Dibangun				20 Jembatan	Rp 33.391.018.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp26.000.000.000	BIDANG BINA MARGA
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan														
		Panjang Jalan yang Direhabilitasi				0,5 KM	Rp 1.187.610.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp600.000.000	BIDANG BINA MARGA
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan														
		Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				1 KM	Rp 1.531.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp1.300.000.000	BIDANG BINA MARGA
	BIDANG CIPTA KARYA						**Rp317.301.910.072**							**Rp134.050.000.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp317.301.910.072**							**Rp134.050.000.000**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**Rp317.301.910.072**							**Rp134.050.000.000**	
1,03,03	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	***Persentase rumah tangga yang terakses air bersih layak***	-			**88,89 Persen**	**Rp 10.000.000.000**						-	**Rp15.800.000.000**	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah RT yang terhubung dengan air perpipaan*	-			100 RT	Rp 10.000.000.000			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp15.800.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.03.2.01.0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan														
		Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun				50 Unit	Rp 5.000.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp6.000.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
		Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan				5000 Liter/Detik	Rp 5.000.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp9.800.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1,03,05	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	***Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak***	-			**100 Persen**	**Rp 10.809.725.700**						-	**Rp10.900.000.000**	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase RT yang limbah domestik terkelola dengan baik*	-			100 Persen	Rp 10.809.725.700			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp10.900.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
		Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 Unit	Rp 809.725.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp1.000.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat														
		Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar				100 Rumah Tangga	Rp 10.000.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp9.900.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1,03,08	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	***Persentase bangunan/gedung sesuai standart***	-			**95,73 Persen**	**Rp212.392.184.372**						-	**Rp81.350.000.000**	BIDANG CIPTA KARYA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	*Persentase bangunan/gedung publik dalam kondisi baik*	-			95,73 Persen	Rp212.392.184.372			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp81.350.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan				5 Bangunan Gedung	Rp 10.655.870.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp35.000.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung														
		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung				1 Dokumen	Rp 438.534.941	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp350.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				50 Dokumen	Rp201.297.779.431	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp46.000.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1,03,09	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	***Jumlah bangunan yang ditata***	-			**5 Unit**	**Rp 84.100.000.000**						-	**Rp26.000.000.000**	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Bangunan yang ditata*	-			5 Unit	Rp 84.100.000.000			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp26.000.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya														
		Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata				3 Kawasan	Rp 84.100.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp26.000.000.000	BIDANG CIPTA KARYA
	BIDANG SUMBER DAYA AIR						**Rp 42.939.299.000**							**Rp36.960.000.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 42.939.299.000**							**Rp36.960.000.000**	
1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**Rp 42.939.299.000**							**Rp36.960.000.000**	
1,03,02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	***Persentase tebing rusak*** ***Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik***	-			**20,68 Persen 39,24 Persen**	**Rp 42.939.299.000**						-	**Rp36.960.000.000**	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tebing rusak	-			20,68 Persen	Rp 28.785.689.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp16.960.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir														
		Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi				5 Unit	Rp 491.050.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp1.500.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan				47 Lembaga	Rp 545.791.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp460.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing														
		Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Dibangun				3 KM	Rp 27.035.697.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp7.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
		Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				6 Unit	Rp 513.150.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp2.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya														
		Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				2 Dokumen	Rp 200.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp6.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 14.153.610.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp20.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				2 KM	Rp 7.290.900.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp8.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				2 KM	Rp 3.629.130.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp5.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
		Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				1 KM	Rp 2.219.580.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp4.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
1.03.02.2.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														
		Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.50 KM	Rp 1.014.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp3.000.000.000	BIDANG SUMBER DAYA AIR
	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						**Rp 60.657.386.813**							**Rp23.570.000.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 60.657.386.813**							**Rp23.570.000.000**	
1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**Rp 60.657.386.813**							**Rp23.570.000.000**	
1,04,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	***Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni***	-			**100 Persen**	**Rp 1.068.613.600**						-	**Rp970.000.000**	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana*	-			1 Dokumen	Rp 113.951.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp350.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				2 Dokumen	Rp 113.951.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp350.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun*	-			10 Unit	Rp 954.662.600			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp620.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana														
		Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi				5 Unit Rumah	Rp 537.806.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp280.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
		Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				5 Unit Rumah	Rp 416.856.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp340.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1,04,03	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	***Luas kawasan kumuh yang tertangani***	-			**3 Ha**	**Rp 870.457.500**						-	**Rp1.300.000.000**	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Luas kawasan kumuh yang tertangani*	-			3 Ha	Rp 582.426.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp400.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
		Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				2 Dokumen	Rp 582.426.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp400.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	*Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani*	-			98 Persen	Rp 288.031.500			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp900.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.03.2.03.0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU														
		Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU				12 Dokumen	Rp 288.031.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp900.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1,04,04	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	-	-			-	**Rp 32.302.236.150**						-	**Rp10.000.000.000**	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah rumah tidak layak huni pulih kembali*	-			100 Unit	Rp 32.302.236.150			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp10.000.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
		Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				1000 Unit Rumah	Rp 32.302.236.150	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp10.000.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1,04,05	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	-	-			-	**Rp 26.416.079.563**						-	**Rp11.300.000.000**	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	*Persentase kawasan yang memiliki PSU sesuai standar*	-			91 Persen	Rp 26.416.079.563			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan	-	Rp11.300.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan				1 Dokumen	Rp 60.860.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp300.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian														
		Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian				20 Lokasi	Rp 26.355.219.563	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kabupaten Balangan		Rp11.000.000.000	BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						**Rp 18.859.119.635**							**Rp201.200.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 18.859.119.635**							**Rp201.200.000**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**Rp 18.859.119.635**							**Rp201.200.000**	
1,05,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sakip Perangkat Daerah***	-			**72,00 -**	**Rp 10.326.428.735**						-	**Rp201.200.000**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersedia*	-			100 %	Rp 271.915.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan	-	Rp201.200.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 88.784.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp68.200.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 20.931.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp22.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	Rp 162.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp111.000.000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersedia*	-			100 %	Rp 6.659.901.405			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				26 Orang/bulan	Rp 6.603.901.405	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	Rp 10.000.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	Rp 46.000.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 389.899.100			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	Rp 39.499.100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	Rp 350.400.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 572.489.700			-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 7.296.600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	Rp 119.204.100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	Rp 53.261.500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	Rp 10.872.500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	Rp 381.855.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	-			100 %	Rp 682.971.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	Rp 682.971.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	Rp 637.676.710			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	Rp 136.800.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 214.800.050	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	Rp 286.076.660	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	Rp 1.111.575.320			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	Rp 361.417.300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	Rp 15.560.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Rp 622.579.620	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				20 Unit	Rp 112.018.400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	BPBD Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1,05,03	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	***Persentase Warga Negara yang Mendapat Layanan Informasi Rawan Bencana, Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, dan Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana***	-			**100 %**	**Rp 6.050.710.900**						-	**Rp-**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	*Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan Informasi Rawan Bencana*	-			96000 Orang	Rp 847.000.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				1000 Orang	Rp 847.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	*Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana*	-			2500 Orang	Rp 3.837.282.500			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				1 Kegiatan	Rp 63.947.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
		Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				5 Unit	Rp 640.995.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
		Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				200 Orang	Rp 328.999.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
		Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				4 Kawasan	Rp 100.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				83 Orang	Rp 1.943.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	Rp 100.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				6 Kawasan	Rp 660.340.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	*Jumlah Warga Negara yang Mendapat Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana*	-			1000 orang	Rp 473.687.600			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				2 Dokumen	Rp 109.861.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				1300 Orang	Rp 363.826.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	*Jumlah Dokumen Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana*	-			2 Dokumen	Rp 892.740.800			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana				1 Dokumen	Rp 69.400.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				50 Orang	Rp 329.305.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				1 Kegiatan	Rp 236.561.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
		Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal				3 Lembaga	Rp 79.154.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota														
		Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	Rp 178.319.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1,05,04	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	***Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran***	-			**100 %**	**Rp 2.481.980.000**						-	**Rp-**	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah*	-			15 Laporan	Rp 249.950.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				15 Laporan	Rp 199.900.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				32 Unit	Rp 50.050.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	*Jumlah Layanan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran*	-			1000 Orang	Rp 2.232.030.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan	-	Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
		Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				250 Orang	Rp 100.530.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
		Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				6 Desa/Kelur ahan	Rp 2.131.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Kabupaten Balangan		Rp-	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						**Rp 19.784.329.456**							**Rp18.801.200.000**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 19.784.329.456**							**Rp18.801.200.000**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**Rp 19.784.329.456**							**Rp18.801.200.000**	
1,05,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nialai Sakip Perangkat Daerah***	-			**76.40 Nilai Sakip**	**Rp 10.396.265.284**						-	**Rp10.427.282.668**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen (%)d	Rp 322.262.000			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan	-	Rp212.785.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 130.280.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp88.308.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	Rp 57.232.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp 33.022.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	Rp 87.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp 40.920.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				3 Dokumen	Rp 29.808.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp 31.020.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				3 Data	Rp 17.741.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp19.515.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 Persen (%)	Rp 8.591.881.684			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan	-	Rp8.578.091.808	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				40 Orang/bulan	Rp 8.591.881.684	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp8.578.091.808	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 % 100 Persen(%)	Rp 453.300.000			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN	-	Rp498.630.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	Rp 28.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN		Rp31.020.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	Rp 425.100.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	SATPOL PP KABUPATEN BALANGAN		Rp467.610.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 Persen (%)	Rp 409.482.300			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan	-	Rp450.430.530	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	Rp 54.330.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp59.763.550	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	Rp 21.550.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp23.705.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	Rp 8.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp9.350.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp 325.101.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp357.611.980	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	-			100 % 100 Persen (%)	Rp 201.307.700			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan	-	Rp227.510.470	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				6 Unit	Rp 186.480.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp211.200.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	Rp 14.827.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp16.310.470	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 Persen (%)	Rp 135.162.400			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol Pp Kabupaten Balangan	-	Rp148.678.640	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	Rp 135.162.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol Pp Kabupaten Balangan		Rp148.678.640	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 Persen (%)	Rp 282.869.200			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan	-	Rp311.156.120	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				45 Unit	Rp 262.809.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp289.090.120	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				81 Unit	Rp 20.060.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satpol PP Kabupaten Balangan		Rp22.066.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1,05,02	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitanya Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih***	-			**100 Persen(%) 750 Kegiatan 80 Persen**	**Rp 9.388.064.172**						-	**Rp8.373.917.332**	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan kapasitasnya Jumlah SDM Satpol PP yang tersertifikasi Kompetensi Jumlah Temuan pelanggaran trantibum yang di tindak lanjuti Persentase dukungan kerjasama dengan SKPD Pengampu Perda*	-			2355 Orang 20 Orang 60 Kasus 85 %	Rp 8.780.944.272			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat Kabuapten Balangan	-	Rp7.791.005.442	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
		Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				8 Dokumen	Rp 547.364.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat Kabuapten Balangan		Rp572.180.730	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
		Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				20 Orang	Rp 453.269.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat Kabuapten Balangan		Rp468.675.900	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				4 Dokumen	Rp 88.455.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat Kabuapten Balangan		Rp97.300.500	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
		Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				12 laporan	Rp 6.884.636.272	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat Kabuapten Balangan		Rp6.445.836.672	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				7 Unit	Rp 807.219.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat Kabuapten Balangan		Rp207.011.640	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	*Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan* *Jumlah temuan yang di tindaklanjuti sampai ke persidangan*	-			24 Perda 16 Kasus	Rp 607.119.900			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp582.911.890	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				8 Laporan	Rp 199.719.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp134.771.890	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	Rp 407.400.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp448.140.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						**Rp 25.040.759.265**							**Rp-**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 9.246.554.865**							**Rp-**	
1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**Rp 9.246.554.865**							**Rp-**	
1,05,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai IKM Perangkat Daerah***	-			**85 Nilai**	**Rp 9.246.554.865**						-	**Rp-**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	-			2 Dokumen	Rp 213.246.100			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 25.751.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	Rp 11.376.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	Rp 76.118.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0 Dokumen	Rp 50.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				0 Data	Rp 50.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	-			19 Orang/Bulan	Rp 5.427.074.524			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Ma sya rak	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	Rp 5.427.074.524	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	-			2 Paket 2 Paket	Rp 71.634.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Ma sya rak at	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	Rp 71.634.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan*	-			100 %	Rp 972.080.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 479.522.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	Rp 14.288.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	Rp 3.336.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	Rp 474.933.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan*	-			12 Laporan	Rp 444.126.516			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Ma sya rak at	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0 Laporan	Rp 118.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	Rp 137.745.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Laporan	Rp 15.150.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	Rp 173.031.516	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya*	-			22 Unit	Rp 248.348.625			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	Rp 149.233.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	Rp 99.115.125	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**Rp 15.794.204.400**							**Rp-**	
8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**Rp 15.794.204.400**							**Rp-**	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD*	-			2 Dokumen	Rp 283.226.300			Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 283.226.300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Hilirisasi dan Menge mbangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meni ngkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan*	-			100 %	Rp 14.997.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	Rp 14.997.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8,01,02	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	-	-			-	**Rp 6.231.484.100**						-	**Rp-**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	-	-			-	Rp 6.231.484.100			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				0 Dokumen	Rp 71.474.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	Rp 221.004.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Orang	Rp 4.449.011.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0 Laporan	Rp 11.576.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														
		Jumlah Paskibraka				0 Orang	Rp 1.255.055.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila														
		Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Dokumen	Rp 50.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02.2.01.0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila				0 Orang	Rp 173.362.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8,01,03	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	***Persentase Parpol yang Aktif***	-			**100 %**	**Rp 1.802.398.600**						-	**Rp-**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	*Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah , Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan UmumKepala Dearah, serta Pemantauan Situasi Politik di Dearah*	-			750 Orang	Rp 1.802.398.600			-	-	Masyarakat	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				750 Orang	Rp 146.323.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				0 Orang	Rp 330.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				2 Laporan	Rp 1.326.075.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8,01,04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	***Persentase Ormas yang Aktif***	-			**100 %**	**Rp 581.405.100**						-	**Rp-**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	*Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Di Daerah*	-			100 Orang	Rp 581.405.100			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Masyarakat	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				11 Orang	Rp 230.505.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				0 Laporan	Rp 350.900.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8,01,05	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	-	-			-	**Rp 1.283.318.000**						-	**Rp-**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	-	-			-	Rp 1.283.318.000			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Masyarakat	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	Rp 23.722.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	Rp 146.050.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Orang	Rp 1.090.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				0 Laporan	Rp 23.546.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8,01,06	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	***Persentase Potensi Konflik Yang Terselesaikan***	-			**100 %**	**Rp 5.597.374.800**						-	**Rp-**	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	*Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini , Kerjasama Intelijen,Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara , Fasilitasi KelembagaanBidang Kewaspadaan , serta Penanganan Konflik di Daerah yang Di Susun*	-			6 Dokumen	Rp 5.597.374.800			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Masyarakat	-	Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun				0 Dokumen	Rp 115.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	Rp 1.681.700.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Orang	Rp 87.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				0 Laporan	Rp 113.670.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	Rp 3.600.004.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	-	Ma sya rak at		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Rp 3.022.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	Rp 116.422.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	Rp 1.750.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	DINAS SOSIAL						**Rp 35.713.962.360**							**Rp19.667.793.395**	
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 35.713.962.360**							**Rp19.667.793.395**	
1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**Rp 35.713.962.360**							**Rp19.667.793.395**	
1,06,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**74,40 Nilai**	**Rp 12.891.334.560**						-	**Rp13.089.800.395**	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 447.739.200			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	Rp200.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	Rp 127.100.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp115.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Rp 71.300.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp85.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 249.339.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp-	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 9.043.227.600			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	Rp10.084.660.095	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	Rp 8.970.417.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp10.004.580.095	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	Rp 37.930.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp45.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	Rp 34.880.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp35.080.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 136.870.000			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	Rp125.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	Rp 86.870.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp-	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				30 Orang	Rp 50.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp125.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 1.965.291.300			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	Rp1.621.610.500	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 25.110.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp20.110.500	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 47.006.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp181.800.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 60.433.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp30.200.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	Rp 7.150.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp7.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	Rp 1.825.590.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp1.382.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	-			100 %	Rp 66.499.800			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	Rp152.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				20 Unit	Rp 37.349.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp-	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	Rp 29.150.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp152.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 %	Rp 567.195.460			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	Rp268.529.800	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 223.936.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp268.529.800	DINAS SOSIAL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	Rp 343.259.260	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp-	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 664.511.200			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah	-	Rp638.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	Rp 255.332.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp286.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	Rp 409.178.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Satuan Kerja Perangkat Daerah		Rp352.000.000	DINAS SOSIAL
1,06,02	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	***Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Yang Aktif***	-			**87 %**	**Rp 11.384.300.000**						-	**Rp4.500.058.000**	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	*Persentase Komunitas Adat Terpencil yang berdaya*	-			0,1455	Rp 175.260.000			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	-	Rp84.150.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT														
		Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Keluarga	Rp 145.760.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Rp 55.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT														
		Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Keluarga	Rp 29.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Komunitas Adat Terpencil (KAT)		Rp 29.150.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah lembaga/yayasan yang memiliki izin pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang*	-			4 Dokumen	Rp 35.900.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Lembaga/Organisasi/ Kelompok/Yayasan	-	Rp31.300.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang				4 Dokumen	Rp 35.900.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Lembaga/Organisasi/ Kelompok/Yayasan		Rp 31.300.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase PSKS yang Terpenuhi Kapasitasnya*	-			0,87	Rp 11.173.140.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten	-	Rp4.384.608.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				45 Orang	Rp 107.917.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		Rp140.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				8 Orang	Rp 94.550.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		Rp97.500.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				3500 Keluarga	Rp 308.598.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		Rp141.548.000	DINAS SOSIAL
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Lembaga	Rp 10.662.075.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten		Rp4.005.560.000	DINAS SOSIAL
1,06,04	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	***Persentase cakupan PPKS (lansia,Disabilitas,Anak Terlantar ,Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial***	-			**100 %**	**Rp 2.465.111.500**						-	**Rp579.380.000**	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	*Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sosial*	-			1	Rp 2.465.111.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar	-	Rp579.380.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				540 Orang	Rp 1.334.301.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar		Rp-	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
		Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				160 Orang	Rp 453.271.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar		Rp124.080.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				261 Orang	Rp 248.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar		Rp131.010.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				10 Orang	Rp 98.221.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar		Rp95.050.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														
		Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				96 Orang	Rp 226.800.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar		Rp150.200.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat														
		Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Orang	Rp 25.627.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar		Rp22.040.000	DINAS SOSIAL
1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan														
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	Rp 78.391.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Disabilitas Telantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar		Rp57.000.000	DINAS SOSIAL
1,06,05	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	***Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan sosial***	-			**73 %**	**Rp 7.978.721.400**						-	**Rp1.183.570.000**	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase data PPKS yang valid Persentase keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi aktif*	-			60 % 1 %	Rp 7.978.721.400			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Fakir Miskin	-	Rp1.183.570.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				12000 Orang	Rp 25.400.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Fakir Miskin		Rp82.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota				580 Keluarga	Rp 2.221.701.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Fakir Miskin		Rp-	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
		Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Keluarga	Rp 4.807.420.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Fakir Miskin		Rp900.000.000	DINAS SOSIAL
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat														
		Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	Rp 924.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Fakir Miskin		Rp201.570.000	DINAS SOSIAL
1,06,06	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	***Persentase korban bencana yang terpulihkan kembali***	-			**100 %**	**Rp 867.754.900**						-	**Rp201.900.000**	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	*Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya*	-			50 Keluarga	Rp 327.505.000			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten	-	Rp-	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	Rp 327.505.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten		Rp-	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	*Persentase taruna siaga bencana (tagana) yang ikut berpartisipasi dalam penanganan pasca bencana*	-			1	Rp 540.249.900			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Masyarakat	-	Rp201.900.000	DINAS SOSIAL
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana														
		Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				43 Orang	Rp 540.249.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Ma sya rak at		Rp201.900.000	DINAS SOSIAL
1,06,07	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	***Persentase makam pahlawan dalam kondisi baik***	-			**100 %**	**Rp 126.740.000**						-	**Rp113.085.000**	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	*Persentase taman makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya*	-			1	Rp 126.740.000			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	-	Rp113.085.000	DINAS SOSIAL
1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														
		Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota				1 Makam	Rp 126.740.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten		Rp113.085.000	DINAS SOSIAL
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						**Rp 71.805.212.518**							**Rp39.801.054.722**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 71.805.212.518**							**Rp39.801.054.722**	
2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**Rp 17.414.103.078**							**Rp16.669.437.722**	
2,08,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			**-**	**Rp 13.266.793.178**						-	**Rp12.200.009.922**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 307.350.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp237.905.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	Rp 152.770.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp125.455.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	Rp 154.580.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp112.450.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 10.589.827.678			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp9.331.994.632	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	Rp 10.319.231.678	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp9.132.578.632	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	Rp 149.546.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp103.406.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	Rp 121.050.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp96.010.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 303.805.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp353.725.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				260 Paket	Rp 103.805.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp153.725.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	Rp 200.000.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 1.038.660.100			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp980.354.170	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 13.182.200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp13.652.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	Rp 147.614.100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 69.289.900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp71.093.490	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				4 Dokumen	Rp 5.098.800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp5.608.680	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				4 Laporan	Rp 803.475.100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp640.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	Rp -			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp200.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				12 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp100.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 630.098.200			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp654.988.120	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	Rp 234.950.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp258.445.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				4 Laporan	Rp 395.148.200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp396.543.120	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 397.052.200			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp441.043.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	Rp 200.280.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp203.780.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannrya				4 Unit	Rp 196.772.200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp237.263.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,08,02	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	-	-			-	**Rp 1.978.426.400**						-	**Rp2.296.742.000**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 382.213.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp370.879.700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	Rp 249.538.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp234.699.700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota														
		Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG				50 Orang	Rp 132.675.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	-		Rp136.180.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 1.596.212.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp1.925.862.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen Dokumen	Rp 246.212.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp175.862.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
		Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota				4 Organisasi	Rp 1.350.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp1.750.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,08,03	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**-**	-			**-**	**Rp 298.998.900**						-	**Rp248.858.300**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 253.398.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp203.258.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Perangkat Daerah Perangkat Daerah	Rp 253.398.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp203.258.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 45.600.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp45.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan				8 Orang	Rp 45.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp45.600.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,08,04	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**-**	-			**-**	**Rp 561.622.100**						-	**Rp502.972.400**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 182.733.700			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp179.494.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 182.733.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp179.494.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 378.888.400			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp323.478.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				3 Layanan	Rp 378.888.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp323.478.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,08,05	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**-**	-			**-**	**Rp 129.167.200**						-	**Rp117.387.500**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 129.167.200			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp117.387.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia				1 Dokumen	Rp 78.797.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp67.917.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 50.369.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp49.470.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,08,06	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	-	-			-	**Rp 840.894.800**						-	**Rp992.347.100**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 368.252.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp519.705.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha				4 Organisasi	Rp 319.113.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp471.005.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 49.139.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp48.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 472.641.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp472.642.100	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				450 Orang	Rp 96.343.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp96.343.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				2 Dokumen	Rp 85.019.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp85.019.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				6 Dokumen	Rp 241.691.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp241.691.200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 49.588.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp49.588.200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,08,07	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	-	-			-	**Rp 338.200.500**						-	**Rp311.120.500**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 85.810.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp85.810.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA				600 Orang	Rp 85.810.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp85.810.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 103.481.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp103.481.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan				10 Orang	Rp 103.481.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp103.481.500	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 148.909.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp121.829.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/														
		Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK				100 Orang	Rp 148.909.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp121.829.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**Rp 47.036.655.940**							**Rp15.414.515.700**	
2,13,02	**PROGRAM PENATAAN DESA**	-	-			-	**Rp 537.000.000**						-	**Rp-**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	Rp 537.000.000			-	-	-	-	Rp-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
		Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				2 Desa	Rp 537.000.000	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		Rp-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,13,03	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	-	-			-	**Rp 27.091.929.800**						-	**Rp5.794.070.400**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	-	-			-	Rp 27.091.929.800			-	-	-	-	Rp5.794.070.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan				1 Dokumen	Rp 27.091.929.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		Rp5.794.070.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,13,04	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**Rp 12.536.957.640**						-	**Rp2.218.543.400**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	Rp 12.536.957.640			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp2.218.543.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa				154 Dokumen	Rp 1.855.398.240	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				142 Dokumen	Rp 192.300.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp175.700.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				154 Dokumen	Rp 616.100.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp365.980.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				4 Dokumen	Rp 7.948.199.400	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp1.145.450.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				154 Orang	Rp 1.006.411.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa														
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa				1 Laporan	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		Rp-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				1 Laporan	Rp 80.194.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		Rp-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				2 Dokumen	Rp 155.450.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp531.413.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				25 Desa	Rp 521.805.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		Rp-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				0 Dokumen	Rp 161.099.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-		Rp-	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,13,05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	-	-			**-**	**Rp 6.870.768.500**						-	**Rp7.401.901.900**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 6.870.768.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp7.401.901.900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Lembaga	Rp 1.405.672.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp1.977.101.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				1 Dokumen	Rp 3.765.981.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp3.763.300.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				1 Laporan	Rp 219.115.500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp181.500.300	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				1 Dokumen	Rp 1.480.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp1.480.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**Rp 7.354.453.500**							**Rp7.717.101.300**	
2,14,02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	-	-			-	**Rp 4.886.974.500**						-	**Rp5.181.435.000**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	Rp 1.252.475.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp1.780.725.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 209.949.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp250.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	Rp 522.710.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp517.400.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal														
		Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal				8 Satuan Pendidikan	Rp 248.327.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp247.200.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan														
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan				2 Organisasi	Rp 271.487.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp766.125.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 3.634.499.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-	-	Rp3.400.710.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
		Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				12 Laporan	Rp 2.803.738.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp2.590.500.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain														
		Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk				42 Unit	Rp 484.099.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp484.100.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				12 Laporan	Rp 346.660.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Pemantapa n Kehidupan Sosial, Budaya dan Kemas yarakatan serta Kond usifitas Daerah	-		Rp326.110.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,14,03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	-	-			**-**	**Rp 934.351.200**						-	**Rp1.034.369.000**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	Rp 526.445.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp322.795.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				8 Laporan	Rp 507.250.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp252.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														
		Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				7 Laporan	Rp 19.195.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp70.795.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 407.906.200			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp711.574.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
		Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				13 Laporan	Rp 29.109.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp37.250.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				110 Orang	Rp 175.818.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp339.935.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				13 Laporan	Rp 202.979.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp334.389.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2,14,04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	-	-			**-**	**Rp 1.533.127.800**						-	**Rp1.501.297.300**	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	Rp 109.243.100			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp109.243.700	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
		Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				10 Unit	Rp 52.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp52.000.000	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
		Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)				20 Orang	Rp 21.157.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp21.157.900	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.14.04.2.01.0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)														
		Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk				165 kelompok Kelompok	Rp 36.085.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp36.085.800	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	Rp 1.423.884.700			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.392.053.600	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
		Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				4 Laporan	Rp 1.307.875.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.276.044.200	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)														
		Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				2 Organisasi	Rp 116.009.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp116.009.400	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN						**Rp277.594.869.744**							**Rp93.654.469.057**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 5.966.491.796**							**Rp470.500.000**	
2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**Rp 5.966.491.796**							**Rp470.500.000**	
2,09,02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**	***Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi***	-			**1 %**	**Rp 2.602.719.896**						-	**Rp470.500.000**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota*	-			2 Unit	Rp 2.602.719.896			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp470.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
		Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				2 Unit	Rp 2.243.709.396	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp250.000.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				12 Laporan	Rp 359.010.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp220.500.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2,09,03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	***Skor PPH Ketersediaan Skor PPH Konsumsi***	-			**88.24 % 89.16 %**	**Rp 2.600.000.200**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	*Jumlah dokumen pendukung stabilitas pasokan dan harga pangan yang tersedia Jumlah kegiatan pendampingan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan*	-			12 Dokumen 2 Kegiatan 3 Unit	Rp 1.478.031.200			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
		Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia				12 Laporan	Rp 117.389.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				12 Laporan	Rp 4.075.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				551 Keluarga	Rp 746.697.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
		Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				4 laporan	Rp 219.915.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
		Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal				2 Laporan	Rp 3.010.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota														
		Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	Rp 4.565.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				4 Laporan	Rp 81.270.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan														
		Informasi Harga dan Pasokan Pangan				12 Dokumen	Rp 228.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
		Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	Rp 73.110.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	*Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersalurkan Jumlah Ketersediaan Pangan Utama*	-			52 Ton 14277 Ton	Rp 896.540.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal														
		Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1 Dokumen	Rp 4.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				52 Ton	Rp 800.800.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				52 Ton	Rp 91.540.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	*Jumlah dokumen Penentuan perumusan dan rekomendasi terkait harga minimum pangan pokok lokal*	-			1 Dokumen	Rp 5.900.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal														
		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				4 Laporan	Rp 5.900.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	*Jumlah Direktori konsumsi pangan Kabupaten*	-			1 Dokumen	Rp 219.529.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
		Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	Rp 3.640.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
		Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Laporan	Rp 215.889.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2,09,04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	***Persentase penanganan desa rentan pangan***	-			**20 %**	**Rp 677.674.500**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	*Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan*	-			1 Dokumen	Rp 147.010.500			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														
		Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	Rp 147.010.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Kegiatan penanganan kerawanan pangan dan gizi yang terlaksana* *Jumlah Peta dan Analisis Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi*	-			1 Dokumen 1 Dokumen	Rp 530.664.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 182.486.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
		Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				4 Laporan	Rp 334.678.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi				0 Dokumen	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
		Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 13.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2,09,05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	***Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan***	-			**90 %**	**Rp 86.097.200**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Dokumen pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang di uji mutu dan keamanannya*	-			12 Dokumen	Rp 86.097.200			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
		Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	Rp 6.331.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	Rp 50.893.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
		Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				4 Laporan	Rp 28.873.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**Rp271.628.377.948**							**Rp93.183.969.057**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**Rp 86.227.797.550**							**Rp27.565.717.771**	
3,25,03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	***Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%) Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%)***	-			**5 5 %**	**Rp 366.461.000**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah produksi perikanan tangkap*	-			1043.9 Ton	Rp 366.461.000			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
		Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia				4 Dokumen	Rp 118.461.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
		Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				25 Unit	Rp 248.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an	Kelompok Pembudidaya Ikan		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,25,04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	***Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%) Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)***	-			**3.75 % 50.80 %**	**Rp 83.799.485.150**						-	**Rp27.565.717.771**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	*Jumlah kelembagaan kelompok perikanan yang meningkat kelasnya (Kelompok)*	-			6 Kelompok	Rp 381.168.100			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				5 Kelompok	Rp 203.289.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
		Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				8 Kelompok	Rp 177.879.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	*Jumlah peningkatan bibit ikan unggul yang dihasilkan (Ekor)* *Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)*	-			1500000 Ekor 918,1 Ton	Rp 83.418.317.050			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	Rp27.565.717.771	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan				4 Dokumen	Rp 75.160.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan		Rp73.980.973	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				120 Unit	Rp 83.343.157.050	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan		Rp27.491.736.798	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,25,05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	***Persentase Peningkatan Kawasan Perikanan Lestari (%)***	-			**20 %**	**Rp 519.020.800**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	*Luas kawasan perikanan lestari yang terawasi (Ha)*	-			324 Ha	Rp 519.020.800			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk				10 Orang	Rp 519.020.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Pembudidaya Ikan		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,25,06	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	***Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (%)***	-			**86 %**	**Rp 1.542.830.600**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	*Jumlah diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang terstandar*	-			1 Unit Usaha	Rp 43.165.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.02.0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko														
		Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				1 Unit Usaha	Rp 43.165.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang diberikan fasilitas (Unit Usaha)*	-			1 Unit Usaha	Rp 1.499.665.600			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Peningkatan Ketersediaan ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				100 Ton	Rp 750.310.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06.2.03.0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi				10 Pelaku Usaha	Rp 749.355.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**Rp185.400.580.398**							**Rp65.618.251.286**	
3,27,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sakip Perangkat Daerah*** ***Nilai IKM Perangkat Daerah***	-			**74 %** **84 %**	**Rp 37.333.542.999**						-	**Rp36.807.454.378**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik*	-			100 %	Rp 1.320.480.000			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-	-	Rp2.360.261.768	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				12 Dokumen	Rp 1.095.613.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp1.019.004.368	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	Rp 17.705.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp 19.520.865	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	Rp 22.705.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp 25.033.365	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	Rp 13.580.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp 14.971.950	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	Rp 16.080.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp 17.728.200	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Rp 113.601.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp1.252.451.025	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	Rp 10.478.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp11.551.995	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 17.582.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	Rp 13.135.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 23.181.321.642			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas	-	Rp32.531.852.950	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				131 Orang/bulan	Rp 22.831.556.642	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp29.542.296.735	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 306.360.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp2.967.470.465	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Rp 11.902.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp8.397.875	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	Rp 31.502.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp13.687.875	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp -			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas	-	Rp 15.010.375	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				1 Laporan	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp 15.010.375	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 2.295.928.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	Rp 674.728.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				140 Orang	Rp 1.621.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 3.014.861.500			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-	-	Rp1.900.329.285	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 127.723.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp1.758.164.909	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	Rp 827.836.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				7 Paket	Rp 637.463.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Rp 105.478.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp135.440.890	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	Rp 23.790.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp6.723.486	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1861 Laporan	Rp 1.292.570.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	-			100 %	Rp 3.387.101.645			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	Rp 708.583.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				68 Unit	Rp 174.061.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				9 Unit	Rp 281.104.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud														
		Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan				1 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				5 Unit	Rp 2.223.352.845	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				224 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			12 Bulan	Rp 3.225.620.712			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	Rp 13.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 466.175.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 2.746.445.212	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			12 Bulan	Rp 908.229.500			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				526 Unit	Rp 858.206.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				63 Unit	Rp 50.022.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud														
		Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara				1 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Dinas		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,27,02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Populasi Ternak Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan***	-			**10 % 1.10 1.10 % 1.10 undefined 6 %**	**Rp 67.089.408.029**						-	**Rp28.810.796.908**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	*Jumlah Bibit atau Benih Padi BD dan BP yang berserfitikat Jumlah luas peremajaan karet dan luas diversifikasi tanaman perkebunan Jumlah Sarana Hortikultura yang tersedia Jumlah Sarana Produksi untuk Pemeliharaan Kebun Daerah Jumlah Sarana Tanaman Pangan yang tersedia*	-			8.5 Ton 75 Ha 10 Paket 1 Paket 14 Paket	Rp 52.982.411.860			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp28.810.796.908	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														
		Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				4 Laporan	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp300.235.556	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
		Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	Rp 52.115.501.860	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp22.448.392.855	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih														
		Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak				7 Ton	Rp 779.250.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp5.973.968.497	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.01.0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan														
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan				4 Laporan	Rp 33.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp 22.050.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.01.0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan														
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan				4 Laporan	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp 22.050.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.01.0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan														
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan				4 Laporan	Rp 27.080.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp 22.050.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.01.0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura														
		Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura				4 Laporan	Rp 27.080.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp 22.050.000	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah kelahiran ternak hasil IB*	-			220 Ekor	Rp -			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														
		Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Dokumen	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pakan yang beredar	-			69 Ton	Rp -			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak														
		Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				12 Laporan	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	*Jumlah penambahan populasi ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain*	-			7675 Ekor	Rp 14.106.996.169			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				7548 Ekor	Rp 13.643.869.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
		Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				383 Dosis	Rp 463.127.169	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,27,03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	***Persentase peningkatan prasarana pertanian Persentase Peningkatan Produksi Peternakan***	-			**20 % 8 %**	**Rp 70.005.531.320**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan*	-			18 Pekerjaan	Rp 89.439.000			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian														
		Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan				400 Ha	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan														
		Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				5 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan														
		Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				5 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura														
		Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan														
		Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				4 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan														
		Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan				5 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura														
		Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan				2 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan														
		Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				5 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan				5 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota														
		Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan				1 Dokumen	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														
		Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	Rp 89.439.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota														
		Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B				1 Dokumen	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
		Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	*Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpenuhi*	-			37 Unit	Rp 69.916.092.320			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian														
		Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	Rp 266.893.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
		Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				10 Unit	Rp 61.027.695.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit														
		Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air														
		Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya														
		Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	Rp 1.044.640.420	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	Rp 5.859.100.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
		Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi				2 Unit	Rp 689.348.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak														
		Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi				1 Unit	Rp 519.575.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan														
		Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	Rp 508.840.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.03.2.02.0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan														
		Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi				1 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,27,04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	***Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner***	-			**100 %**	**Rp 1.227.877.850**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah kecamatan yang dilakukan surveilans pada Hewan*	-			8 Kecamatan	Rp 106.286.750			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
		Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				12 Laporan	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
		Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				15 Wilayah	Rp 106.286.750	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				0 Laporan	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelayanan Kesehatan Hewan*	-			1800 Ekor	Rp 467.155.600			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
		Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner				12 Laporan	Rp 467.155.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	*Jumlah peningkatan SDM masyarakat dan petugas terhadap kesahatan masyarakat veteriner*	-			1760 Orang	Rp 654.435.500			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
		Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				12 Laporan	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.04.0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan														
		Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi				10 Orang	Rp 220.430.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04.2.04.0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan														
		Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan				1750 Orang	Rp 434.005.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,27,05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	***Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan*** ***Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura***	-			**100** **100 %**	**Rp 5.344.024.300**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	*Jumlah Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan*	-			16,4	Rp 5.344.024.300			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
		Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				635 Ha	Rp 4.942.805.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
		Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				975 Ha	Rp 112.540.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
		Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan				30 Ha	Rp 87.675.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05.2.01.0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan														
		Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan				4 Laporan	Rp 201.003.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3,27,07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	***Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani***	-			**4,2 %**	**Rp 4.400.195.900**						-	**Rp-**	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	*Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani* *Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani dan Pengembangan Korporasi Petani* *Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan*	-			63 Kelompok 16 Kelompok 500 Orang	Rp 4.400.195.900			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani	-	Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				157 Unit	Rp 918.016.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
		Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				63 Unit	Rp 334.160.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	-			157 Unit	Rp 3.148.019.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
		Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				8 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian														
		Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya				100 Orang	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														
		Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				1 Dokumen	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	Kelompok Tani		Rp-	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP						**Rp 44.760.273.570**							**Rp31.760.200.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 44.760.273.570**							**Rp31.760.200.000**	
2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**Rp 1.759.999.500**							**Rp450.000.000**	
2,10,05	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	***Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan***	-			**100 %**	**Rp 178.000.000**						-	**Rp50.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota*	-			1	Rp 178.000.000			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-	-	Rp50.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.05.2.01.0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	Rp 178.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp50.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,10,06	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	***Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee***	-			**100 %**	**Rp 20.000.000**						-	**Rp100.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penetapan Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah*	-			1	Rp 20.000.000			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat	-	Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.06.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah				1 Dokumen	Rp 20.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Ma sya rak at		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,10,09	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	***Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah***	-			**100 %**	**Rp 776.000.000**						-	**Rp200.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	*Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah*	-			1	Rp 776.000.000			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat	-	Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah				1 Dokumen	Rp 776.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Ma sya rak at		Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,10,10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	***Persentase Penatagunaan tanah pemerintah daerah***	-			**100 %**	**Rp 785.999.500**						-	**Rp100.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota*	-			1	Rp 785.999.500			Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.10.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah														
		Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				2 Laporan	Rp 785.999.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Infrastrukt ur Untuk Mendukung Pengemba ngan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**Rp 43.000.274.070**							**Rp31.310.200.000**	
2,11,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**74 Point**	**Rp 18.347.522.870**						-	**Rp12.310.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 133.893.500			-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-	-	Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 66.358.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Rp 67.535.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 9.971.727.760			-	-	-	-	Rp8.450.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/bulan	Rp 9.874.847.760	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		Rp8.300.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Rp 46.880.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				4 Laporan	Rp 50.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana	-		Rp50.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 105.247.500			-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-	-	Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	Rp 55.247.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	Rp 50.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 2.952.902.800			-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-	-	Rp1.660.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	Rp 93.091.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-			Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				13 Paket	Rp 806.331.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-			Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 49.700.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-			Rp50.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	Rp 9.560.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	-	-			Rp10.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				665 Laporan	Rp 1.994.220.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-			Rp1.300.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	-			100 %	Rp 1.935.246.400			-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-	-	Rp650.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	Rp 651.964.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-			Rp650.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	Rp 517.339.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-			Rp-	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	Rp 765.943.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-			Rp-	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 %	Rp 1.924.455.760			-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-	-	Rp750.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	Rp 36.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-			Rp50.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 339.231.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-			Rp150.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 50.998.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp50.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 1.498.026.360	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp500.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 1.324.049.150			-	Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-	-	Rp400.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	Rp 347.299.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Rp 976.750.150	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,11,02	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup***	-			**100 %**	**Rp 1.523.134.000**						-	**Rp400.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota*	-			1	Rp 1.234.576.200			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah	-	Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 190.976.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah		Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.01.0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota														
		jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi				3 Dokumen	Rp 1.043.599.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah		Rp-	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota*	-			1	Rp 288.557.800			-	Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah	-	Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD														
		Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	Rp 117.857.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah		Rp-	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
		Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun				1 Dokumen	Rp 170.700.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah		Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,11,03	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup***	-			**100 %**	**Rp 2.264.998.900**						-	**Rp900.200.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Kualitas Lingkungan yang Memenuhi Baku Mutu*	-			1	Rp 2.164.998.900			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	Rp800.200.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK														
		Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK				1 Dokumen	Rp 100.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp-	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
		Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)				8 Lokasi	Rp 145.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp200.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim				1 Laporan	Rp 449.999.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp-	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														
		Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	Rp 70.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
		Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				1 Dokumen	Rp 1.399.999.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp700.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	*Persentase Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup*	-			1	Rp 100.000.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi														
		jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan				4 Kegiatan	Rp 100.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,11,04	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	***Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati***	-			**100 %**	**Rp 10.114.934.500**						-	**Rp5.000.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	*Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati*	-			1	Rp 10.114.934.500			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	Rp5.000.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya														
		Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				8,4 Ha	Rp 2.684.272.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp2.000.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
		Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				112,221 Ha	Rp 7.430.662.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp3.000.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,11,05	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	***Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3***	-			**100 %**	**Rp 50.000.000**						-	**Rp100.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	*Persentase Pengurangan dan Penanganan Limbah B3*	-			1	Rp 50.000.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah	-	Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3														
		Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				3 Laporan	Rp 50.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,11,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	***Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan***	-			**100 %**	**Rp 500.000.000**						-	**Rp200.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah usaha/kegiatan yang diawasi*	-			1	Rp 500.000.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah	-	Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
		Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				1 Dokumen	Rp 100.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				7 Badan Usaha	Rp 400.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,11,07	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	***Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH***	-			**100 %**	**Rp 49.999.300**						-	**Rp100.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	*Persentase luas kawasan MHA yang diusulkan untuk mendapatkan pengakuan*	-			1	Rp 49.999.300			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah	-	Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				1 Dokumen	Rp 49.999.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,11,09	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	***Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat***	-			**100 %**	**Rp 109.940.900**						-	**Rp200.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten*	-			1	Rp 109.940.900			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah	-	Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
		Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Entitas	Rp 109.940.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah		Rp200.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,11,10	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	***Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup***	-			**100 %**	**Rp 75.000.000**						-	**Rp100.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	*Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat*	-			1	Rp 75.000.000			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
		Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani				3 Pengaduan	Rp 75.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp100.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2,11,11	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	***Persentase pengelolaan sampah***	-			**99 %**	**Rp 9.964.743.600**						-	**Rp12.000.000.000**	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	*Persentase Wilayah yang Bersih*	-			1	Rp 9.964.743.600			Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	-	Rp12.000.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				5 Unit	Rp 1.067.178.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp3.000.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah														
		Jumlah sampah yang terdaur ulang				3300 Ton	Rp 1.499.701.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp2.000.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional														
		jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				1500 Ton	Rp 7.397.864.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n Lingkungan Hidup, Men ingkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	05. Mening katkan Pen gelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Ketahanan Bencana Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Daerah dan Masyarakat		Rp7.000.000.000	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						**Rp 12.278.284.544**							**Rp12.627.466.900**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 12.278.284.544**							**Rp12.627.466.900**	
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**Rp 12.278.284.544**							**Rp12.627.466.900**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2,12,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**76,40 Nilai**	**Rp 9.733.368.644**						-	**Rp9.901.113.900**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 89.050.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL	-	Rp115.567.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 74.450.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp75.567.900	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 14.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 7.208.566.184			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL	-	Rp8.007.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				28 Orang/bulan	Rp 7.123.164.224	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp8.000.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 85.401.960	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp7.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 247.986.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL	-	Rp218.046.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				152 Paket	Rp 54.986.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp68.046.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	Rp 193.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp150.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 604.033.700			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL	-	Rp475.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	Rp 12.829.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp 20.500.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	Rp 34.705.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp 50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	Rp 40.619.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp 55.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				208 Laporan	Rp 515.879.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp350.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	Rp 248.640.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				8 Unit	Rp 248.640.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 257.499.450			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL	-	Rp240.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 186.070.150	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp145.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 71.429.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp95.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 1.077.593.310			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL	-	Rp545.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	Rp 399.629.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp320.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				45 Unit	Rp 29.850.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp25.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Rp 648.113.510	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai DISDUKCAPIL		Rp200.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,12,02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	***Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk***	-			**93,33 %**	**Rp 747.070.500**						-	**Rp736.353.000**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	*Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk*	-			0,9333	Rp 747.070.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp736.353.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				27500 Dokumen	Rp 641.230.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp606.353.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
		Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	Rp 57.402.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp80.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan				3500 Dokumen	Rp 48.438.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp50.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,12,03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	***Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil***	-			**100 %**	**Rp 732.323.800**						-	**Rp570.000.000**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	*Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil*	-			1	Rp 629.798.600			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp490.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
		Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				2500 Dokumen	Rp 275.640.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp90.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														
		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				3 Layanan	Rp 354.157.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp400.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Pencatatan sipil*	-			1 Laporan	Rp 56.852.200			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
		Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				1 Laporan	Rp 56.852.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	*Persentase SDM Pelayanan Pencatatan Sipil yang Telah Mengikuti Bimtek*	-			0,75	Rp 45.673.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				3 Laporan	Rp 45.673.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp40.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,12,04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	***Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan***	-			**100 %**	**Rp 1.017.503.100**						-	**Rp1.365.000.000**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	*Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan*	-			14 OPD	Rp 291.139.200			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp425.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
		Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				2 Dokumen	Rp 114.028.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp350.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.01.0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan														
		Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan				14 Dokumen	Rp 177.111.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp75.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data*	-			2 Laporan	Rp 516.437.700			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp750.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	Rp 217.590.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp450.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	Rp 298.847.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp300.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	*Jumlah ADB/ operator SIAK yang kompetensinya meningkat*	-			35 orang	Rp 209.926.200			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp190.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	Rp 55.121.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp70.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
		Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan				1 Laporan	Rp 154.804.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp120.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2,12,05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	***Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan***	-			**100 %**	**Rp 48.018.500**						-	**Rp55.000.000**	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	*Persentase Penyusunan Profil Kependudukan*	-			1	Rp 48.018.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp55.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														
		Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun				1 Dokumen	Rp 48.018.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp55.000.000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	DINAS PERHUBUNGAN						**Rp 39.096.187.750**							**Rp30.260.000.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 39.096.187.750**							**Rp30.260.000.000**	
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**Rp 39.096.187.750**							**Rp30.260.000.000**	
2,15,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**78,25 %**	**Rp 13.023.542.572**						-	**Rp9.934.000.000**	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 111.825.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaniti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kinerja Perencanaan	-	Rp158.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 102.940.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaniti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kinerja Perencanaan		Rp150.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	Rp 8.885.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromaniti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kinerja Perencanaan		Rp8.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 6.572.468.772			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Pemerintah an Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Administrasi Keuangan	-	Rp4.871.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	Rp 6.483.704.772	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Pemerintah an Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Administrasi Keuangan		Rp4.800.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 88.764.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Pemerintah an Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Administrasi Keuangan		Rp71.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 316.144.500			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Pemerintah an Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan	-	Rp320.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	Rp 61.679.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Pemerintah an Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan		Rp130.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				27 Orang	Rp 254.465.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Pemerintah an Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	ASN Dinas Perhubungan		Rp190.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 1.782.960.600			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Pemerintah an Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Admin Kantor	-	Rp790.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 21.116.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Pemerintah an Infrastruktur serta Konektivitas Wilayah Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	Admin Kantor		Rp15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				8 Paket	Rp 144.565.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Admin Kantor		Rp120.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				8 Paket	Rp 8.545.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Admin Kantor		Rp 25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	Rp 41.947.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Admin Kantor		Rp 25.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	Rp 8.118.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Admin Kantor		Rp5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				433 Laporan	Rp 1.558.669.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Admin Kantor		Rp600.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	-			100 %	Rp 2.151.964.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pengadaan Barang	-	Rp3.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				5 Unit	Rp 2.151.964.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pengadaan Barang		Rp3.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 %	Rp 1.124.116.700			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jasa Penunjang	-	Rp485.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	Rp 688.967.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jasa Penunjang		Rp145.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 157.199.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jasa Penunjang		Rp160.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 277.950.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jasa Penunjang		Rp180.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 964.063.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-	-	Rp310.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	Rp 485.060.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Rp 479.003.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp60.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2,15,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	***Persentase Jalan Yang Tertib Manajemen Lalu Lintas Jumlah Pelanggaran Moda Transportasi Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Persentase moda transportasi yang laik jalan***	-			**100 % 11 Kejadian 1400 Unit 95 %**	**Rp 26.072.645.178**						-	**Rp20.326.000.000**	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jalan yang berkeselamatan*	-			0,88	Rp 21.802.420.428			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jalan Poros Kabupaten	-	Rp15.480.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				300 Unit	Rp 14.689.077.228	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jalan Poros Kabupaten		Rp9.480.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
		Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				600 Unit	Rp 7.113.343.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jalan Poros Kabupaten		Rp6.000.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	*Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang berfungsi sesuai standar*	-			1	Rp 177.546.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Terminal Penumpang	-	Rp100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.03.0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C														
		Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.				2 Orang	Rp 177.546.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Terminal Penumpang		Rp100.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	*Persentase kawasan parkir yang tertib/tertata*	-			1	Rp 380.102.600			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Potensi Parkir Kabupaten Balangan	-	Rp160.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
		Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				12 Dokumen	Rp 380.102.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Potensi Parkir Kabupaten Balangan		Rp160.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	*Persentase moda transportasi yang lulus uji Persentase sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang berfungsi sesuai standar*	-			95 % 100 %	Rp 358.308.300			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji	-	Rp1.081.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				1 Unit	Rp -	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp400.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
		Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				1 Orang	Rp -	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp30.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
		Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar				1646 Unit	Rp 153.178.300	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
		Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Dokumen	Rp 58.800.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
		Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	Rp 7.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp8.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji				1 Laporan	Rp -	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp3.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				10 Unit	Rp 110.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp350.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
		Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				100 Laporan	Rp 29.030.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp 15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
		Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	Rp -	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp 15.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.05.0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				1 Laporan	Rp -	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Kendaraan Bermotor Wajib Uji		Rp5.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase jaringan jalan yang tertib manajemen rekayasa Lalu Lintas*	-			1	Rp 2.013.196.200			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jaringan Jalan	-	Rp2.250.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota				200 Laporan	Rp 1.443.704.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jaringan Jalan		Rp1.500.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.06.0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														
		Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				12 Laporan	Rp 569.492.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Jaringan Jalan		Rp750.000.000	DINAS PERHUBUNGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	*Persentase Rekomendasi ANDALALIN yang tertindaklanjuti*	-			1	Rp 287.261.600			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Permohonan ANDALALIN	-	Rp55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin														
		Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi				2 Orang	Rp 98.292.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Permohonan ANDALALIN		Rp 55.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
		Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi				2 Laporan	Rp 188.969.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Permohonan ANDALALIN		Rp-	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia*	-			20 Unit	Rp 1.053.810.050			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Angkutan Kabupaten	-	Rp1.200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia				12 Unit	Rp 1.053.810.050	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Angkutan Kabupaten		Rp1.200.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN						**Rp 28.910.027.497**							**Rp30.800.186.309**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 28.910.027.497**							**Rp30.800.186.309**	
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**Rp 27.640.298.097**							**Rp30.076.040.940**	
2,16,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik***	-			**96.25 %**	**Rp 11.434.665.545**						-	**Rp10.679.596.969**	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang lengkap, Valid dan Reliabel*	-			100 %	Rp 78.091.700			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan	-	Rp127.582.346	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	Rp 56.707.200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp110.863.163	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	Rp 21.384.500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp16.719.183	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib dan akuntabel*	-			100 %	Rp 6.926.467.661			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan	-	Rp7.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	Rp 6.926.467.661	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp7.000.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan pelayanan publik*	-			100 %	Rp 198.776.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan	-	Rp406.395.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	Rp 23.776.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp31.395.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				52 Orang	Rp 175.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp375.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Jumlah Waktu Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			12 Bulan	Rp 1.676.843.200			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan	-	Rp1.758.408.610	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 17.990.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp20.700.650	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 368.968.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp230.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 25.605.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp29.446.210	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	Rp 18.720.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp21.528.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp 1.245.559.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp1.456.733.750	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	Rp 1.228.674.212			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-	-	Rp629.982.300	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	Rp 413.291.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp450.000.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	Rp 815.383.212	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	-		Rp179.982.300	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang baik*	-			100 %	Rp 1.015.256.672			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan	-	Rp419.234.800	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	Rp 210.700.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp70.357.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 77.393.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp89.010.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 727.163.672	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp259.867.800	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Jumlah Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 % 12 Bulan	Rp 310.556.100			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan	-	Rp337.993.913	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	Rp 310.556.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pegawai Dinas Kominfosan Kabupaten Balangan		Rp337.993.913	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2,16,02	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	***Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarluaskan Informasi Publik***	-			**90**	**Rp 9.234.797.700**						-	**Rp12.981.329.456**	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Menyebarluaskan Informasi secara Berkala -Jumlah Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik-Persentase Sengketa Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan*	-			100	Rp 9.234.797.700			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp12.981.329.456	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media				1 Laporan	Rp 8.022.216.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp11.821.465.250	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														
		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				12 Komunitas	Rp 153.950.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp307.443.300	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				12 Permohonan	Rp 185.261.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp211.628.750	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomen dasi	Rp 192.970.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp135.775.406	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				4 Media	Rp 328.440.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp328.440.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.02.2.01.0023	Penyusunan Konten														
		Jumlah Konten Informasi Publik				48 Konten	Rp 351.960.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp176.576.750	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2,16,03	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**	***Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet DiskominfosanPersentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)***	-			**93**	**Rp 6.970.834.852**						-	**Rp6.415.114.515**	
2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot*	-			93	Rp 6.970.834.852			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan	-	Rp6.415.114.515	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah														
		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	Rp 5.043.904.852	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp5.047.487.135	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah				1 Dokumen	Rp 337.850.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp412.942.000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				26 Perangkat Daerah	Rp 1.589.080.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Masyarakat Kabupaten Balangan		Rp954.685.380	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**Rp 714.606.900**							**Rp613.324.009**	
2,20,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	***Persentase data sektoral yang terakses-Persentase data sektoral yang valid***	-			**100 %**	**Rp 714.606.900**						-	**Rp613.324.009**	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi Data Sektoral Yang Dipublikasi-Jumlah Paduan Penggunaan Data Sektoral-Jumlah Rancangan Metadata-Jumlah Data Yang Memenuhi Standar Satu Data Indonesia (SDI)*	-			1	Rp 714.606.900			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Kabupaten Balangan	-	Rp613.324.009	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				10 Orang	Rp 345.726.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp135.454.895	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral														
		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu				100 Persentase	Rp 228.111.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp309.497.614	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia														
		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata				10 Dokumen	Rp 140.768.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp168.371.500	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**Rp 555.122.500**							**Rp110.821.360**	
2,21,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	***Persentasi Gangguan Yang Terselesaikan-Persentasi Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) Yang Aman***	-			**100 %**	**Rp 555.122.500**						-	**Rp110.821.360**	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	*Persentasi Data Yang Terpilihkan dan Terback-Up secara Berkala-Persentasi Perangkat Lunak Yang Terjamin Keamanannya*	-			1	Rp 555.122.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Kabupaten Balangan	-	Rp110.821.360	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				12 Laporan	Rp 555.122.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Pemenuh an Infrastru ktur serta K onektivitas Wilayah Dan Pengel olaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjut an	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp110.821.360	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA						**Rp 71.510.000.216**							**Rp49.185.044.150**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 70.317.822.216**							**Rp48.798.772.050**	
2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**Rp 66.246.475.716**							**Rp46.921.832.750**	
2,07,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**Rp 13.928.191.692**						-	**Rp8.796.460.450**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 53.253.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp53.813.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 24.050.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp24.610.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	Rp 29.203.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp29.203.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 8.820.524.092			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp6.515.037.650	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				444 Orang/bulan	Rp 8.144.317.384	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp6.137.690.510	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 676.206.708	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp377.347.140	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 2.038.960.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp73.960.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	Rp 2.038.960.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp73.960.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 1.230.833.300			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp941.000.600	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 17.756.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp17.756.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 132.400.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp140.661.300	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 92.134.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp92.134.600	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Rp 64.770.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp64.770.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	Rp 8.136.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp8.136.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	Rp 915.636.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp617.542.700	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 562.079.200			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp488.129.200	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	Rp 306.925.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp232.975.800	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	Rp 255.153.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp255.153.400	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 1.222.542.100			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp724.520.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	Rp 185.480.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp208.280.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	Rp 131.580.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp200.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				54 Unit	Rp 55.840.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp55.840.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Rp 511.976.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp150.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Rp 337.666.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp110.400.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2,07,02	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	-	-			-	**Rp 290.896.000**						-	**Rp57.718.000**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	undefined	-			undefined undefined	Rp 290.896.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp57.718.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro														
		0				1 0	Rp 108.178.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp25.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro														
		Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro				10 Orang	Rp 182.718.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp32.718.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2,07,03	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	-	-			-	**Rp 34.728.500.924**						-	**Rp28.826.210.200**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	-	-			-	Rp 33.015.843.224			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp27.481.560.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														
		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				644 Orang	Rp 28.410.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp25.000.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja														
		Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n				2 Lembaga	Rp 847.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		Rp847.600.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota														
		Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja				5 Unit	Rp 1.691.495.040	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp405.960.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.01.0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi														
		Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n				496 Orang	Rp 2.066.748.184	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp1.228.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	-			-	Rp 832.197.200			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp804.197.200	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.02.0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina				3 Lembaga	Rp 832.197.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp804.197.200	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	-	-			-	Rp 245.373.500			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp245.373.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil														
		Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				20 Perusahaan	Rp 245.373.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp245.373.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 635.087.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp295.080.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokumen	Rp 635.087.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp295.080.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2,07,04	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	***Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri***	-			**65.00 %**	**Rp 1.925.691.200**						-	**Rp758.689.200**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja*	-			750 Orang	Rp 1.712.028.500			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja	-	Rp545.026.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja														
		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				120 Orang	Rp 208.491.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		Rp208.491.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja														
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				60 Orang	Rp 558.219.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		Rp133.987.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan														
		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD				5 Orang	Rp 50.692.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		Rp50.692.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				20 Orang	Rp 894.626.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Tenaga Kerja		Rp151.856.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 14.138.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp14.138.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS														
		Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				2 Lembaga	Rp 14.138.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp14.138.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	-	-			-	Rp 164.160.700			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp164.160.700	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online														
		Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	Rp 84.254.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp84.254.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja														
		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				10 Orang	Rp 79.906.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp79.906.700	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 35.364.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp35.364.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran														
		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				40 Orang	Rp 35.364.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp35.364.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2,07,05	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	-	-			**-**	**Rp 15.373.195.900**						-	**Rp8.482.754.900**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 251.397.200			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp194.320.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan														
		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online				3 Perusahaan	Rp 67.064.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp10.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.05.2.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan														
		Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Laporan	Rp 184.332.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp184.320.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 15.121.798.700			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp8.288.434.900	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perselisihan yang Dicegah				3 Perkara	Rp 454.798.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp148.139.900	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				3 Perkara	Rp 16.735.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp16.690.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lembaga	Rp 366.265.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp59.605.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja														
		Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja				40000 Orang	Rp 14.284.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp8.064.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**Rp 4.071.346.500**							**Rp1.876.939.300**	
2,17,03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	-	-			**-**	**Rp 585.492.300**						-	**Rp112.099.300**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	Rp 585.492.300			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp112.099.300	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				6 Unit Usaha	Rp 585.492.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp112.099.300	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2,17,05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	-	-			**-**	**Rp 513.080.000**						-	**Rp46.330.000**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 513.080.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp46.330.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														
		Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian				40 Orang	Rp 513.080.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp46.330.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2,17,07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	-	-			**-**	**Rp 2.368.974.200**						-	**Rp1.018.510.000**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	-	-			-	Rp 2.368.974.200			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp1.018.510.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				16 Unit Usaha	Rp 822.370.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp459.480.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.07.2.01.0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro														
		Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro				40 Unit Usaha	Rp 828.970.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp278.100.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
		Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				11717 Unit Usaha	Rp 717.633.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp280.930.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2,17,08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	-	-			-	**Rp 603.800.000**						-	**Rp700.000.000**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	-	-			-	Rp 603.800.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp700.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
		Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				509 Unit Usaha	Rp 603.800.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp700.000.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**Rp 1.192.178.000**							**Rp386.272.100**	
3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**Rp 1.192.178.000**							**Rp386.272.100**	
3.32.03	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	-	-			-	**Rp 486.148.000**						-	**Rp185.272.400**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 486.148.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp185.272.400	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
3.32.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				4 Laporan	Rp 140.565.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp20.798.000	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
3.32.03.2.01.0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran														
		Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)				1 Dokumen	Rp 345.583.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp164.474.400	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
3.32.04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	-	-			-	**Rp 706.030.000**						-	**Rp200.999.700**	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	-	-			-	Rp 706.030.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp200.999.700	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
		Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				20 Kepala Keluarga	Rp 630.770.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp15.052.500	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	Rp 75.260.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp185.947.200	DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH SERTA TENAGA KERJA
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						**Rp 14.957.199.809**							**Rp11.057.122.616**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 14.957.199.809**							**Rp11.057.122.616**	
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**Rp 14.957.199.809**							**Rp11.057.122.616**	
2,18,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP***	-			**72,60 (BB) Nilai**	**Rp 8.560.958.909**						-	**Rp8.659.790.616**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 349.624.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah	-	Rp500.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	Rp 92.882.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Rp 106.902.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	Rp 50.720.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 99.120.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 5.575.186.802			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah	-	Rp5.714.790.616	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				23 Orang/bulan	Rp 4.944.936.538	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp4.894.790.616	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 553.537.264	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp720.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				12 Dokumen	Rp 40.507.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp40.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				4 Dokumen	Rp 36.206.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp60.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 295.740.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah	-	Rp300.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	Rp 163.514.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp100.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	Rp 132.226.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp200.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 746.092.207			-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp688.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 43.889.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				20 Paket	Rp 64.676.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp73.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	Rp 10.118.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	Rp 627.407.907	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp550.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	-			100 %	Rp 184.119.800			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp510.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	Rp 74.698.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp50.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	Rp 15.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				20 Unit	Rp 94.421.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 %	Rp 746.269.200			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah	-	Rp488.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 361.822.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp228.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 384.446.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp260.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 663.926.900			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemantapan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi Peningkatan Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah	-	Rp459.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	Rp 490.257.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp309.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				40 Unit	Rp 173.669.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Perangkat Daerah		Rp150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,18,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	***Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru***	-			**1 Potensi**	**Rp 547.672.000**						-	**Rp517.532.000**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Persentase pelaku usaha yang mendapatkan insentif/ kemudahan berusaha*	-			1	Rp 177.672.000			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor	-	Rp197.532.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	Rp 95.766.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor		Rp105.766.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	Rp 81.906.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor		Rp91.766.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	*Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota*	-			1 Potensi	Rp 370.000.000			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor	-	Rp320.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 150.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor		Rp-	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														
		Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	Rp 70.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor		Rp170.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 150.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Investor		Rp150.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,18,03	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	***Nilai persetujuan investasi/ Rencana Investasi***	-			**400 M Rp**	**Rp 713.896.800**						-	**Rp546.000.000**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah proyek investasi yang siap ditawarkan*	-			2 Proyek	Rp 713.896.800			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp546.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				2 Dokumen	Rp 384.811.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp316.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				2 Dokumen	Rp 329.084.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp230.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,18,04	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	***Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat***	-			**88,7 Nilai 92 Nilai**	**Rp 4.505.022.100**						-	**Rp954.800.000**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	*Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Sesuai Standar*	-			1	Rp 4.505.022.100			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp954.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				700 Pelaku Usaha	Rp 4.015.336.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp694.800.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														
		Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	Rp 191.738.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp193.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
		Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				700 Kegiatan Usaha	Rp 297.947.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp67.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,18,05	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	***Persentase pelaku usaha yang menyampaikan LKPM***	-			**90 %**	**Rp 343.000.000**						-	**Rp189.000.000**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaku Usaha yang menyampaikan LKPM*	-			100 Pelaku Usaha	Rp 343.000.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp189.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
		Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				5 Kegiatan Usaha.	Rp 15.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp15.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														
		Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				100 Pelaku Usaha	Rp 119.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp19.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
		Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				40 Kegiatan Usaha	Rp 209.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp155.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2,18,06	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	***Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola secara elektronik***	-			**100 %**	**Rp 286.650.000**						-	**Rp190.000.000**	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi*	-			1	Rp 286.650.000			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp190.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
		Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				6 Dokumen	Rp 286.650.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	03. Pemant apan Infrast ruktur Dasar dan Ekonomi Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp190.000.000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA						**Rp 43.086.574.078**							**Rp36.400.000.000**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 36.179.929.878**							**Rp26.850.000.000**	
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**Rp 36.179.929.878**							**Rp26.850.000.000**	
2,19,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**Rp 15.596.529.078**						-	**Rp12.280.000.000**	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 973.011.084			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp320.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	Rp 637.270.884	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp140.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 50.301.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp85.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	Rp 235.439.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp35.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 25.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp30.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				5 Data	Rp 25.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp30.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 7.769.013.744			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp6.935.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	Rp 7.451.014.144	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp6.600.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 104.999.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp110.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Rp 130.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp135.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	Rp 83.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp90.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 1.890.320.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp600.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				116 Paket	Rp 193.520.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp350.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				339 Orang	Rp 1.696.800.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 1.099.047.700			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp1.305.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	Rp 59.995.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp65.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	Rp 179.092.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp320.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2000 Paket	Rp 89.999.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp95.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	Rp 19.960.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp25.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 Laporan	Rp 750.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	Rp 832.061.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp650.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	Rp 630.851.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	Rp 99.694.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp150.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	Rp 101.515.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 2.277.201.350			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp1.510.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	Rp 34.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 201.538.750	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 2.041.662.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp1.200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 755.874.200			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp960.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 Unit	Rp 359.849.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp450.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	Rp 44.710.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp60.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Rp 251.160.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Rp 100.155.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2,19,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	-	-			-	**Rp 2.094.761.100**						-	**Rp2.950.000.000**	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 865.504.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp1.450.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.19.02.2.01.0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota														
		Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota				1 Dokumen	Rp 322.454.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp350.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota														
		Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				20 Orang	Rp 452.039.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp700.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
		Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				52 Orang	Rp 91.010.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp400.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 1.229.257.100			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp1.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				7 Organisasi	Rp 1.229.257.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp1.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2,19,03	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	-	-			-	**Rp 18.171.622.700**						-	**Rp10.820.000.000**	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 9.569.090.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp900.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia				30 Unit	Rp 9.470.150.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.01.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar				2 Dokumen	Rp 98.940.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp400.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 2.109.182.700			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp1.800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				1 Kegiatan	Rp 2.109.182.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp1.800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	Rp 48.090.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp320.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)														
		Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				2 Pelatda	Rp 48.090.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp120.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				100 Orang	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	Rp 5.000.000.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp6.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.04.0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota														
		Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional				1 Dokumen	Rp 5.000.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp6.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	Rp 1.445.260.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp1.800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				3 Laporan	Rp 500.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp1.100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				5 Dokumen	Rp 945.260.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp700.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2,19,04	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	-	-			-	**Rp 317.017.000**						-	**Rp800.000.000**	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	Rp 317.017.000			-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				8 Organisasi	Rp 317.017.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp800.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**Rp 6.906.644.200**							**Rp9.550.000.000**	
3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**Rp 6.906.644.200**							**Rp9.550.000.000**	
3,26,02	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	-	-			-	**Rp 3.997.777.900**						-	**Rp5.250.000.000**	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 3.997.777.900			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-	-	Rp5.250.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				14 Lokasi	Rp 2.592.243.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp4.500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				4 Unit	Rp 649.986.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp450.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				4 Laporan	Rp 755.548.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp300.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3,26,03	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	-	-			-	**Rp 2.020.085.500**						-	**Rp2.100.000.000**	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	Rp 2.020.085.500			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-	-	Rp2.100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														
		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				10 Kegiatan	Rp 1.382.555.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp1.100.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri														
		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Promosi	Rp 637.529.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp1.000.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3,26,05	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	-	-			-	**Rp 888.780.800**						-	**Rp2.200.000.000**	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	Rp 888.780.800			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-	-	Rp2.200.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01.0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				4 Laporan	Rp 300.641.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp500.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif														
		Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				25 Orang	Rp 588.139.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Nilai Tambah Hasil Produksi Pertanian dan Penge mbangan Pariwisata	-		Rp1.700.000.000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						**Rp 22.015.610.217**							**Rp13.630.410.640**	
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**Rp 22.015.610.217**							**Rp13.630.410.640**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**Rp 19.448.257.417**							**Rp11.251.360.450**	
2,23,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**74 Predikat**	**Rp 13.342.697.517**						-	**Rp9.139.783.114**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	Rp 426.215.700			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp345.155.470	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 296.879.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp208.042.450	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 63.704.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp69.447.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	Rp 24.972.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp 23.665.620	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	Rp 20.302.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp 22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	Rp 20.357.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp 22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	Rp 7.041.308.533			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp6.619.166.620	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	Rp 6.810.441.633	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp6.380.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	Rp 199.165.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp204.369.660	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Rp 15.865.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp17.398.480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	Rp 15.835.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp17.398.480	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 Persen	Rp 382.480.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp345.818.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	Rp 251.240.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp276.914.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				6 Orang	Rp 131.240.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp68.904.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 Persen	Rp 653.761.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp270.525.860	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 39.919.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp13.740.980	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Rp 59.566.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp28.961.680	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	Rp 7.089.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp7.823.200	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp 547.187.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp220.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan*	-			100 Persen	Rp 2.102.861.784			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp999.832.394	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 263.660.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp169.906.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 1.062.642.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp260.440.840	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 776.559.584	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp569.485.554	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	-			100 Persen	Rp 2.736.070.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp559.284.770	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	Rp 324.171.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp225.934.500	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				14 Unit	Rp 2.411.898.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp333.350.270	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2,23,02	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	***Rata-rata kunjungan per hari***	-			**undefined undefined**	**Rp 5.781.243.500**						-	**Rp1.836.299.476**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			70 Persen	Rp 3.617.850.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp1.683.109.076	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
		Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				2 Perpustaka an	Rp 1.141.643.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp22.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
		Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				6 Layanan	Rp 1.323.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp1.455.960.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5 Orang	Rp 14.099.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp15.509.076	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														
		Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				1000 Eksemplar	Rp 622.824.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp134.640.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														
		Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK				2 Perpustaka an	Rp 515.684.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp55.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota*	-			70 Persen	Rp 2.163.393.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-	-	Rp153.190.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				1 Orang	Rp 28.275.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp30.650.400	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustaka an	Rp 1.805.383.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp20.900.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														
		Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat				3 Lokus	Rp 329.734.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	-		Rp101.640.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2,23,03	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	***Rata-Rata Kunjungan per Hari Rata-Rata IKM Perpustakaan Kewenangan Daerah***	-			**119 Orang 82,66 Persen**	**Rp 324.316.400**						-	**Rp275.277.860**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota*	-			40 Persen	Rp 324.316.400			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp275.277.860	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														
		Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				2 Orang	Rp 90.238.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp19.197.860	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
		Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				2 Eksemplar	Rp 234.077.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp256.080.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**Rp 2.567.352.800**							**Rp2.379.050.190**	
2,24,02	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	***Indeks Kearsipan***	-			**55,41 Persen**	**Rp 1.331.324.600**						-	**Rp1.021.823.000**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota*	-			10 Persen	Rp 864.148.800			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp384.450.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				8 Berkas	Rp 548.393.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp208.450.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														
		Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				8 Berkas	Rp 183.335.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp88.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Laporan	Rp 132.420.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp88.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	Rp 176.379.400			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp253.330.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI														
		Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI				13 Arsip	Rp 116.092.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp143.330.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
		Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				13 Arsip	Rp 60.287.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp110.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	*Terkelolanya Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota*	-			100 Persen	Rp 290.796.400			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp384.043.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				10 Pengguna	Rp 53.532.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp220.000.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				2 Laporan	Rp 237.263.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp164.043.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2,24,03	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	***Indeks Kearsipan***	-			**55,41 Persen**	**Rp 1.191.199.800**						-	**Rp1.310.319.890**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	*Terlaksananya Daftar Arsip Yang Dimusnahkan Dilingkungan Pemerintah Daerah*	-			1 Arsip	Rp 597.727.200			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp657.500.030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				1 Arsip	Rp 597.727.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp657.500.030	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	*Terlaksananya Daftar Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Yang Diselamatkan*	-			1 Daftar	Rp 435.061.600			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp478.567.760	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Daftar	Rp 339.631.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp373.594.760	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				1 Arsip	Rp 95.430.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp104.973.000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.04	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota*	-			1 Arsip	Rp 158.411.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	-	Rp174.252.100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip														
		Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip				1 Arsip	Rp 158.411.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		Rp174.252.100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2,24,04	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	***Indeks Kearsipan***	-			**55,41 Persen**	**Rp 44.828.400**						-	**Rp46.907.300**	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	*Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip Yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota*	-			8 Pengguna	Rp 44.828.400			Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp46.907.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														
		Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				4 SOP	Rp 44.828.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Revolusi Mental dan Pembangu nan Kebud ayaan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp46.907.300	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN						**Rp 19.397.620.546**							**Rp18.402.623.886**	
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**Rp 19.397.620.546**							**Rp18.402.623.886**	
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**Rp 5.400.022.700**							**Rp5.077.865.217**	
3,30,02	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	***PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGENDALIAN FASILITAS PENYIMPANAN BAHAN BERBAHAYA DAN PENGAWASAN DISTRIBUSI, PENGEMASAN DAN PELABELAN BAHAN BERBAHAYA DILAKSANAKAN PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN***	-			**100 PERSEN 18.42 PERSEN**	**Rp 237.162.500**						-	**Rp346.767.500**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	*Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan*	-			70 Buah	Rp 50.000.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp41.976.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
		Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	Rp 50.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp 41.976.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	*Jumlah Penerbitan Tanda Daftar Gudang*	-			5 Buah	Rp 50.000.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp80.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
		Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				5 Dokumen	Rp 50.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp 80.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	*Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri*	-			11 Buah	Rp 45.265.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp49.791.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.03.0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik														
		Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik				11 Dokumen	Rp 45.265.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp 49.791.500	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	*Jumlah Pengawasan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Sesuai Ketentuan*	-			3 Kali	Rp 60.000.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				3 Laporan	Rp 60.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp75.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.07	Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	*Jumlah Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA)*	-			1 Buah	Rp 31.897.500			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA														
		Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal				1 Dokumen	Rp 31.897.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,30,03	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	***PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEMENUHI STANDAR KELAYAKAN PASAR***	-			**10 PERSEN**	**Rp 2.109.490.100**						-	**Rp2.317.082.497**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	*Persentase Pasar yang direvitalisasi*	-			91.67 PERSEN	Rp 1.992.790.100			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Sarana dan Prasarana Perdagangan	-	Rp2.155.206.860	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				4 Unit	Rp 592.849.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Sarana dan Prasarana Perdagangan		Rp791.571.660	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														
		Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				11 Unit	Rp 1.399.940.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Sarana dan Prasarana Perdagangan		Rp1.363.635.200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	*Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya*	-			80.00 PERSEN	Rp 116.700.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp161.875.637	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	Rp 76.100.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp79.375.637	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				1 Dokumen	Rp 40.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp82.500.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,30,04	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	***PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK***	-			**7.00 PERSEN**	**Rp 571.534.400**						-	**Rp492.910.920**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	*Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting* *Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah*	-			73 Kali 32 Kali	Rp 571.534.400			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Masyarakat	-	Rp492.910.920	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														
		Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				12 Laporan	Rp 139.234.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Ma sya rak at		Rp147.560.185	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				1 Laporan	Rp 432.300.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Ma sya rak at		Rp345.350.735	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,30,05	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	***PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR***	-			**70.00 PERSEN**	**Rp 329.559.600**						-	**Rp200.000.000**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	*Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor*	-			10 Orang 66.67 Persen	Rp 329.559.600			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha Berpotensi Ekspor	-	Rp200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan														
		Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan				5 Pelaku Usaha	Rp 329.559.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha Berpotensi Ekspor		Rp200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,30,06	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	***PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN***	-			**29.16 PERSEN 76.92 PERSEN**	**Rp 444.262.400**						-	**Rp721.104.300**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	*Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis*	-			1400 Buah 160 Buah 2 Orang	Rp 444.262.400			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp721.104.300	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
		Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				1400 Unit	Rp 297.312.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp454.815.200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06.2.01.0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														
		Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				50 Orang	Rp 146.950.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp266.289.100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,30,07	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	***PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL***	-			**21.74 PERSEN**	**Rp 1.708.013.700**						-	**Rp1.000.000.000**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	*Nilai Transaksi Promosi Perdagangan Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas*	-			1680000000 Rupiah 37.50 Persen	Rp 1.708.013.700			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha	-	Rp1.000.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07.2.01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
		Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				28 UMKM	Rp 1.708.013.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	Pelaku Usaha		Rp1.000.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**Rp 13.997.597.846**							**Rp13.324.758.669**	
3,31,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***PERSENTASE TEMUAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH NILAI SKM PERANGKAT DAERAH***	-			**100 PERSEN 80.40 ERSEN 90.00 ERSEN**	**Rp 11.746.166.746**						-	**Rp10.304.758.669**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	Rp 58.451.500			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN	-	Rp44.011.300	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 16.881.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp 18.888.100	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	Rp 24.880.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp 25.123.200	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	Rp 16.690.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp-	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 Persen	Rp 8.038.987.696			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN	-	Rp7.988.613.369	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				546 Orang/bulan	Rp 7.423.672.117	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp7.667.853.369	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 615.315.579	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp320.760.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 Persen	Rp 509.520.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN	-	Rp190.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	Rp 509.520.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp190.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 Persen	Rp 1.091.974.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN	-	Rp1.017.254.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 24.996.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp20.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	Rp 265.648.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp175.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 64.952.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp65.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Rp 59.999.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp 68.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				3 Dokumen	Rp 8.301.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp 10.254.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	Rp 668.076.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp679.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan*	-			100 Persen	Rp 627.962.700			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN	-	Rp400.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	Rp 413.291.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp250.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				14 Unit	Rp 214.671.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp150.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 Persen	Rp 395.554.650			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN	-	Rp330.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	Rp 157.199.150	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp165.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	Rp 238.355.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	ASN		Rp165.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 Persen	Rp 1.023.716.200			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-	-	Rp334.880.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				55 Unit	Rp 306.489.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp250.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				97 Unit	Rp 34.110.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp40.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Rp 683.117.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	-		Rp44.880.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,31,02	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	***PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTRI***	-			**14.00 PERSEN**	**Rp 836.724.000**						-	**Rp1.320.000.000**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	*Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi*	-			5 IKM 350 IKM	Rp 836.724.000			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	IKM	-	Rp1.320.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				1 Dokumen	Rp 295.995.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	IKM		Rp275.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				1 Dokumen	Rp 540.729.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	IKM		Rp1.045.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,31,03	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**	***PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM***	-			**2.11 PERSEN**	**Rp 244.722.500**						-	**Rp325.000.000**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah IKM yang Memiliki Izin*	-			120 IKM	Rp 244.722.500			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	IKM	-	Rp325.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	Rp 159.461.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	IKM		Rp100.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														
		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	Rp 85.261.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	IKM		Rp225.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3,31,04	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	***PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG***	-			**2.58 PERSEN**	**Rp 1.169.984.600**						-	**Rp1.375.000.000**	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	*Jumlah Produk IKM Bersertifikasi Nilai Pemasaran Produk IKM*	-			156 IKM 284.05 Rupiah	Rp 1.169.984.600			-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	IKM	-	Rp1.375.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	Rp 169.985.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	IKM		Rp175.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
		Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	Rp 999.999.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	01. Penguatan Sektor Industri, Umkm, Pertanian dan Pariwisata Didukung Tenaga Kerja Berkualitas dan Energi Berkelanjut an Peningkata n Investasi, Produk Unggulan dan Daya Saing UKM	IKM		Rp1.200.000.000	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	BAGIAN UMUM						**Rp 90.838.277.992**							**Rp63.832.027.659**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 90.838.277.992**							**Rp63.832.027.659**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**Rp 90.838.277.992**							**Rp63.832.027.659**	
4,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**BB (74,4) Nilai**	**Rp 90.838.277.992**						-	**Rp63.832.027.659**	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentasi dokumen perencanaan, penggganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu*	-			100 %	Rp 1.227.751.700			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.019.543.710	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 937.034.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp937.565.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	Rp 50.589.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp81.978.710	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 184.678.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				2 Data	Rp 55.450.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 23.279.074.380			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp18.775.341.157	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	Rp 22.965.187.280	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp18.449.135.957	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				10 Dokumen	Rp 151.993.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp153.483.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Rp 82.279.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp82.330.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	Rp 79.613.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp90.392.200	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 321.587.200			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp321.725.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	Rp 321.587.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp321.725.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 29.578.593.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp16.175.708.300	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 1.349.846.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp712.383.600	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 9.594.344.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp3.916.598.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	Rp 10.691.980.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.967.933.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 1.797.979.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.086.945.000	BAGIAN UMUM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 1.645.079.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.503.046.200	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				467 Laporan	Rp 4.499.365.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp6.988.802.500	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 %	Rp 13.715.184.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp9.682.916.200	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 7.358.385.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp3.929.198.900	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 2.903.290.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp2.300.000.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 3.453.509.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp3.453.717.300	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 18.753.622.400			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp13.894.329.780	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				50 Unit	Rp 4.108.444.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp2.618.384.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	Rp 1.175.116.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.173.166.900	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	Rp 7.514.650.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp5.894.092.380	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	Rp 3.562.316.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp2.030.310.500	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	Rp 2.393.094.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp2.178.376.000	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	*Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya*	-			1	Rp 3.962.463.512			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp3.962.463.512	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				12 Orang/Bulan	Rp 2.542.463.512	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp2.542.463.512	BAGIAN UMUM
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				1 Paket	Rp 1.020.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.020.000.000	BAGIAN UMUM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
		Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	Rp 400.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp400.000.000	BAGIAN UMUM
	BAGIAN ORGANISASI						**Rp 2.687.040.500**							**Rp2.188.247.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 2.687.040.500**							**Rp2.188.247.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**Rp 2.687.040.500**							**Rp2.188.247.000**	
4,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Persentase realisasi kebijakan bidang pengadministrasi umum yang terlaksana***	-			**100 %**	**Rp 2.687.040.500**						-	**Rp2.188.247.000**	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	*Indeks Komposit Kelembagaan Nilai IPP SKPD Sampel Nilai Laporan Kinerja Pemda Nilai Rata-rata IKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Non UPP yang Bernilai Baik Persentase SKPD dengan Dokumen Jabatan Langkap Persentase SKPD dengan Kualifikasi Nilai Sakip BB Persentase SKPD dengan Nilai Budaya Kerja Baik Persentase SKPD yang Memiliki Dokumen Ketatalaksanaan Baik*	-			P-4 Nilai Prima (A) Nilai 14,26 Nilai 84 Nilai 100 % 75,76 % 36,36 % 100 %	Rp 2.687.040.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp2.188.247.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				65 Dokumen	Rp 1.074.724.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp575.212.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				4 Laporan	Rp 411.121.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp411.240.000	BAGIAN ORGANISASI
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				4 Dokumen	Rp 1.201.195.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.201.795.000	BAGIAN ORGANISASI
	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN						**Rp 5.738.710.700**							**Rp2.103.058.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 5.738.710.700**							**Rp2.103.058.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**Rp 5.738.710.700**							**Rp2.103.058.000**	
4,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Rata-Rata capaian kinerja SKPD dan unit kerja garis koordinasi***	-			**100 %**	**Rp 5.738.710.700**						-	**Rp2.103.058.000**	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	*Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokolan Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana*	-			1	Rp 5.738.710.700			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp2.103.058.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				1 Laporan	Rp 2.485.194.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.026.087.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				1 Laporan	Rp 1.550.070.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp456.125.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
		Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				5 Laporan	Rp 1.703.446.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp620.846.000	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN
	BAGIAN PEMERINTAHAN						**Rp 2.948.143.000**							**Rp1.691.345.200**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 2.948.143.000**							**Rp1.691.345.200**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**Rp 2.948.143.000**							**Rp1.691.345.200**	
4,01,02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana***	-			**100 %**	**Rp 2.948.143.000**						-	**Rp1.691.345.200**	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	*Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang d iimplementasikan/diterapkan oleh SKPD*	-			1	Rp 2.380.023.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.244.230.200	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	Rp 1.431.467.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp646.938.200	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				2 Dokumen	Rp 497.190.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp388.700.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				3 Dokumen	Rp 451.366.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp208.592.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	*Jumlah dokumen kesepakatan kerjasama daerah yang difasilitasi*	-			10 Dokumen	Rp 568.120.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp447.115.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				3 Dokumen	Rp 568.120.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp447.115.000	BAGIAN PEMERINTAHAN
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						**Rp133.852.412.048**							**Rp14.557.071.697**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp133.852.412.048**							**Rp14.557.071.697**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**Rp133.852.412.048**							**Rp14.557.071.697**	
4,01,02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi***	-			**100 %**	**Rp133.852.412.048**						-	**Rp14.557.071.697**	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	*Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana*	-			1	Rp133.852.412.048			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp14.557.071.697	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				5 Dokumen	Rp 12.382.965.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp6.469.457.447	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial														
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB				3 Dokumen	Rp 84.075.801.248	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.049.797.000	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas				2 Dokumen	Rp 37.393.645.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp7.037.817.250	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
	BAGIAN HUKUM						**Rp 2.067.422.000**							**Rp1.142.869.450**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 2.067.422.000**							**Rp1.142.869.450**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**Rp 2.067.422.000**							**Rp1.142.869.450**	
4,01,02	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	***Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terlaksana***	-			**100 %**	**Rp 2.067.422.000**						-	**Rp1.142.869.450**	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	*Persentase pelaksanaan fasilitasi penyusunan produk hukum, bantuan hukum dan penyebarluasan produk hukum daerah*	-			1	Rp 2.067.422.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.142.869.450	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
		Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				500 Dokumen	Rp 990.100.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp603.377.200	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				10 Kasus	Rp 747.085.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp375.900.250	BAGIAN HUKUM
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan														
		Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				500 Dokumen	Rp 330.237.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp163.592.000	BAGIAN HUKUM
	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN						**Rp 1.159.378.600**							**Rp1.356.144.000**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 1.159.378.600**							**Rp1.356.144.000**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**Rp 1.159.378.600**							**Rp1.356.144.000**	
4,01,03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	-	-			-	**Rp 1.159.378.600**						-	**Rp1.356.144.000**	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	-	-			-	Rp 1.159.378.600			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.356.144.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				4 Dokumen	Rp 311.388.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp460.198.000	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	Rp 466.315.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp433.963.200	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				4 Laporan	Rp 381.675.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp461.982.800	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM						**Rp 1.591.374.600**							**Rp1.661.491.350**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 1.591.374.600**							**Rp1.661.491.350**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**Rp 1.591.374.600**							**Rp1.661.491.350**	
4,01,03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana***	-			**100 %**	**Rp 1.591.374.600**						-	**Rp1.661.491.350**	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	*Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana*	-			1	Rp 1.333.303.600			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.414.333.250	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				4 Dokumen	Rp 230.376.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp296.729.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				4 Laporan	Rp 586.927.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp593.163.450	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
		Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	Rp 399.114.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp407.487.700	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD				1 Dokumen	Rp 116.886.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp116.953.100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	*Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana*	-			1	Rp 258.071.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp247.158.100	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	Rp 53.426.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp66.669.000	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	Rp 114.606.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp112.697.200	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	Rp 90.039.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp67.791.900	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM
	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA						**Rp 2.890.226.000**							**Rp1.961.142.890**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 2.890.226.000**							**Rp1.961.142.890**	
4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**Rp 2.890.226.000**							**Rp1.961.142.890**	
4,01,03	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	***Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi***	-			**100 %**	**Rp 2.890.226.000**						-	**Rp1.961.142.890**	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola PBJ	-			1	Rp 2.890.226.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.961.142.890	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				1 Dokumen	Rp 411.408.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp447.408.500	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
		Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				1 Dokumen	Rp 619.466.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.017.915.000	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				6 Orang	Rp 1.859.350.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp495.819.390	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
	SEKRETARIAT DPRD						**Rp 85.000.000.000**							**Rp51.125.261.508**	
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 85.000.000.000**							**Rp51.125.261.508**	
4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**Rp 85.000.000.000**							**Rp51.125.261.508**	
4,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**71,20 Nilai**	**Rp 45.669.020.121**						-	**Rp20.598.338.800**	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tersedianya dokumen perencanaan,Laporan keuangan dan Evaluasi Kinerja tepat waktu*	-			100 Persen 100 Persen	Rp 526.197.700			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD	-	Rp477.183.600	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	Rp 70.004.600	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp 70.009.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 30.310.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp 36.726.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 40.345.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp 44.750.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	Rp 55.434.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp42.850.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	Rp 53.998.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp54.000.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				16 Laporan	Rp 217.655.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp220.957.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	Rp 58.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp7.890.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 5.200.173.824			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD	-	Rp5.711.945.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	Rp 5.135.646.224	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp5.636.799.800	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				6 Dokumen	Rp 17.334.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp21.890.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Rp 15.663.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp17.890.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	Rp 5.019.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp5.566.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				6 Laporan	Rp 26.510.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp29.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 1.180.771.590			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD	-	Rp1.082.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	Rp 518.661.590	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp382.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				25 Orang	Rp 662.110.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp700.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 3.558.313.600			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD	-	Rp4.537.445.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	Rp 73.952.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp108.890.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	Rp 407.014.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp109.189.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	Rp 501.320.100	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp884.720.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	Rp 104.764.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp150.800.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				144 Dokumen	Rp 215.450.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp314.658.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
		Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	Rp 200.334.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp150.988.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Laporan	Rp 110.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp209.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	Rp 1.945.479.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp2.608.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	Rp 9.346.995.370			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD	-	Rp1.070.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	Rp 300.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp350.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	Rp 90.000.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp720.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	Rp 8.956.995.370	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 3.537.944.100			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD	-	Rp3.878.100.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				15 Laporan	Rp 490.402.900	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp591.200.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Laporan	Rp 3.047.541.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp3.286.900.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 2.010.050.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD	-	Rp2.740.863.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	Rp 433.457.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp332.864.900	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	Rp 448.943.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp586.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	Rp 224.150.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp284.360.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				8 Unit	Rp 903.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Sekretariat DPRD		Rp1.537.039.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	Rp 19.315.684.037			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														
		Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				25 Orang/Bulan	Rp 17.401.414.037	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.100.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				6 Paket	Rp 1.441.080.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				25 Orang	Rp 473.190.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	Rp 992.889.400			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp-	SEKRETARIAT DPRD
4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
		Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				5 Paket	Rp 992.889.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	SEKRETARIAT DPRD
4,02,02	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	***Tingkat Pelayanan Pelaksanaan Tugas DPRD***	-			**85.18 Nilai**	**Rp 39.330.979.879**						-	**Rp30.526.922.708**	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	*Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah*	-			84,98 Nilai	Rp 16.399.164.300			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan	-	Rp18.552.209.240	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				8 Dokumen	Rp 4.624.850.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp5.015.714.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				10 Dokumen	Rp 8.372.903.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp8.661.706.950	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				6 Dokumen	Rp 1.373.149.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp1.800.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				8 Dokumen	Rp 433.976.400	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp832.040.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	Rp 307.425.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp435.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.01.0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah				7500 Orang	Rp 1.286.860.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp1.807.148.290	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	Rp 1.012.887.663			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan	-	Rp234.082.420	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	Rp 14.280.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp14.850.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	Rp 6.630.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp13.697.420	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				2 Dokumen	Rp 227.286.235	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp103.400.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	Rp 745.376.428	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp88.935.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	Rp 6.605.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp6.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
		Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	Rp 12.710.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp6.600.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	Rp 950.092.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat	-	Rp173.254.730	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	Rp 61.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp20.446.250	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	Rp 61.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp20.918.480	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
		Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	Rp 15.762.500	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp19.250.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	Rp 61.550.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp17.050.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				2 Laporan	Rp 6.605.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp8.250.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				1 Dokumen	Rp 6.605.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp5.500.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				3 Dokumen	Rp 644.395.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp15.840.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan														
		Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				2 Dokumen	Rp 92.075.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp66.000.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	Rp 4.048.803.486			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan	-	Rp5.100.512.483	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
		Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				4 Dokumen	Rp 2.077.980.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp2.985.792.513	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				12 Dokumen	Rp 81.310.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp89.442.100	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
		Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				12 Dokumen	Rp 161.480.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp177.650.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
		Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				37 Dokumen	Rp 1.728.033.486	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp1.847.627.870	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	Rp 7.288.756.930			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat	-	Rp4.615.341.859	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				45 Laporan	Rp 31.500.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp41.519.500	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														
		Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				2 Dokumen	Rp 445.872.060	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp54.483.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
		Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				50 Dokumen	Rp 4.598.139.070	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp2.424.249.815	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah				7500 Orang	Rp 2.213.245.800	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah ,Seluruh SKPD mitra kerja DPRD serta Masyarakat		Rp2.095.089.544	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-			-	Rp 295.680.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah dan DPRD	-	Rp395.629.059	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
		Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				1 Dokumen	Rp 295.680.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah daerah dan DPRD		Rp395.629.059	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	Rp 9.335.595.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan	-	Rp1.455.892.917	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				300 Dokumen	Rp 9.025.515.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp1.025.517.917	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
		Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				15 Laporan	Rp 48.300.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp58.325.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				24 Dokumen	Rp 60.200.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp70.200.000	SEKRETARIAT DPRD
4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														
		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				20 Dokumen	Rp 201.580.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Seluruh DPRD Balangan		Rp301.850.000	SEKRETARIAT DPRD
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH						**Rp 24.806.537.609**							**Rp4.142.163.000**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 24.175.248.609**							**Rp3.302.146.500**	
5.01	**PERENCANAAN**						**Rp 20.009.306.109**							**Rp3.302.146.500**	
5,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai Sakip Prangkat Daerah***	-			**74,40 %**	**Rp 11.877.593.409**						-	**Rp3.302.146.500**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 342.980.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan	-	Rp219.820.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	Rp 20.750.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				8 Dokumen	Rp 217.050.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan		Rp77.820.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Rp 105.180.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan		Rp142.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 7.853.367.419			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan	-	Rp127.300.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				33 Orang/bulan	Rp 7.620.242.336	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	Rp 211.825.083	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan		Rp106.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	Rp 14.200.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan		Rp14.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	Rp 7.100.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan		Rp7.100.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 346.810.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp108.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				200 Paket	Rp 106.810.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp108.200.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	Rp 240.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 343.587.200			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp962.683.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 38.402.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp71.818.200	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 196.925.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp758.851.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 91.579.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp132.014.300	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	Rp 16.680.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 217.500.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp772.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	Rp -	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp342.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				4 Unit	Rp 217.500.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp430.000.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 1.004.955.100			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp722.191.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	Rp 253.770.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	Rp 751.184.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp722.191.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 1.137.104.690			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp389.952.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	Rp 257.256.100	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	Rp 879.848.590	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp389.952.000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5,01,02	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	-			**-**	**Rp 3.587.595.900**						-	**Rp-**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	-	-			-	Rp 2.869.580.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya														
		Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah				8 Dokumen	Rp 219.410.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
		Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2 Berita Acara	Rp 331.997.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
		Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				3 Berita Acara	Rp 568.300.700	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				9 Dokumen	Rp 1.749.873.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	Rp 285.028.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				3 Dokumen	Rp 268.188.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan				1 Buku	Rp 16.840.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-			-	Rp 432.987.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan				2 Laporan	Rp 355.160.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah				10 Laporan	Rp 77.827.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5,01,03	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**-**	-			**-**	**Rp 5.175.405.800**						-	**Rp-**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-			-	Rp 2.634.667.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	Rp 628.066.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0 Laporan	Rp 378.161.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
		Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				38 Laporan	Rp 159.895.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				100 Laporan	Rp 577.632.100	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	Rp 95.461.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				6 Laporan	Rp 41.450.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				12 Laporan	Rp 61.190.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				100 Laporan	Rp 692.811.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	-	-			-	Rp 884.450.800			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	Rp 231.468.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				12 Laporan	Rp 55.552.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				16 Laporan	Rp 33.342.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian				12 Laporan	Rp 118.199.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				3 Dokumen	Rp 137.042.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				6 Laporan	Rp 244.890.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				8 Laporan	Rp 30.233.400	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA				6 Laporan	Rp 33.723.200	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-	-			-	Rp 1.656.288.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				2 Dokumen	Rp 169.624.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
		Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				2 Laporan	Rp 18.350.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				6 Laporan	Rp 32.586.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				5 Laporan	Rp 226.465.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				5 Laporan	Rp 1.209.263.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**Rp 4.165.942.500**							**Rp-**	
5,05,02	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	***Tercapainya Program Penelitian dan Pengembangan Daerah***	-			**100 %**	**Rp 4.165.942.500**						-	**Rp-**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	*Tingkat pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan* *Tingkat Pemanfaatan Hasil Koordinasi Perencanaan Penelitian Daerah*	-			100 % 100 %	Rp 632.273.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				2 Laporan	Rp 400.120.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
		Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik				1 Laporan	Rp 232.153.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	*Tingkat pemanfaatan hasil kelitbangan yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan*	-			1	Rp 179.880.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja														
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				1 Dokumen	Rp 179.880.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	*Tingkat Pemanfaatan Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan*	-			1	Rp 680.130.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03.0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				1 Dokumen	Rp 170.070.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				1 Dokumen	Rp 180.030.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum														
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				1 Dokumen	Rp 330.030.000	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	*Tercapainya Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tingkat Pemanfaatan Hasil Kelitbangan yang Dimanfaatkan oleh Pemangku Kepentingan*	-			100 % 100 %	Rp 2.673.659.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan	-	Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi														
		Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				2 Dokumen	Rp 306.023.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif														
		Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				1 Laporan	Rp 2.367.636.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	SKPD Pemkab. Balangan Kab. Balangan		Rp-	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	Rp 631.289.000	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Bapperida Balangan		Rp840.016.500	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH						**Rp 53.767.258.619**							**Rp47.176.787.320**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 53.767.258.619**							**Rp47.176.787.320**	
5.02	**KEUANGAN**						**Rp 53.767.258.619**							**Rp47.176.787.320**	
5,02,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	-	-			-	**Rp 34.743.582.399**						-	**Rp34.341.472.608**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 840.382.300			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp330.734.217	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	Rp 423.740.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp50.033.137	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	Rp 116.924.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp194.483.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	Rp 299.717.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp86.217.780	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 26.782.352.337			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp27.420.904.283	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				59 Orang/bulan	Rp 24.987.910.437	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp27.252.831.983	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6 Dokumen	Rp 1.473.875.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp85.493.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				6 Laporan	Rp 107.659.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp35.437.050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				6 Laporan	Rp 212.906.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp47.141.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 2.432.514.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp2.006.038.650	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	Rp 71.218.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp64.350.550	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				300 Orang	Rp 284.246.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp34.288.100	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				350 Orang	Rp 2.077.050.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.907.400.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 1.453.164.700			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp2.598.167.770	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 101.438.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp78.564.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 186.663.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp189.348.390	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 21.461.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp23.124.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				160 Laporan	Rp 1.143.602.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp2.307.130.980	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 1.503.583.024			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp865.077.488	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 601.857.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp429.420.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 17.070.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp18.777.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 884.656.024	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp416.880.288	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 1.731.586.038			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.120.550.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				63 Unit	Rp 596.746.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp655.249.980	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				40 Unit	Rp 1.134.839.238	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp465.300.220	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5,02,02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**-**	-			**-**	**Rp 10.992.661.920**						-	**Rp6.399.431.302**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	Rp 2.733.548.920			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp2.152.168.612	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
		Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	Rp 321.496.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp156.903.780	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
		Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				2 Dokumen	Rp 281.059.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp140.863.030	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
		Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	Rp 56.435.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp125.136.000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														
		Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				30 Dokumen	Rp 51.653.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp63.743.680	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				2 Dokumen	Rp 400.885.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp338.254.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				2 Dokumen	Rp 403.502.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp327.911.320	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
		Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				2 Dokumen	Rp 1.218.518.220	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp999.356.402	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	Rp 5.223.134.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp2.331.835.110	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	Rp 370.170.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp319.457.710	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	Rp 923.985.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp118.784.050	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				100 Dokumen	Rp 1.164.737.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp363.106.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
		Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				3 Laporan	Rp 526.507.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp321.512.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				12 Dokumen	Rp 617.368.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp438.983.600	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														
		Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				2 Dokumen	Rp 589.641.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp311.148.200	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	Rp 1.030.725.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp458.842.450	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	Rp 3.035.978.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp1.915.427.580	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
		Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				768 Dokumen	Rp 105.013.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp257.108.500	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														
		Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				18 Laporan	Rp 171.412.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp153.454.730	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
		Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				608 Laporan	Rp 286.331.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp176.542.300	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				1 Dokumen	Rp 408.120.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp301.749.030	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0008	Penyusunan Analisis Laporan														
		Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				1 Dokumen	Rp 236.892.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp336.153.840	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				150 Orang	Rp 1.828.209.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp690.419.180	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5,02,03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	-	-			-	**Rp 4.402.191.900**						-	**Rp3.693.102.270**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	Rp 4.402.191.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp3.693.102.270	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
		Jumlah Standar Harga yang Disusun				2 Dokumen	Rp 238.819.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp262.701.120	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
		Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah				60 Dokumen	Rp 213.321.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp836.615.890	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah														
		Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	Rp 140.857.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp154.943.690	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				1 Laporan	Rp 108.474.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp119.321.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				1 Laporan	Rp 835.932.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp693.321.640	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				1 Laporan	Rp 51.131.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp56.244.540	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	Rp 980.130.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp445.625.400	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
		Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				1 Laporan	Rp 621.898.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.017.213.340	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Orang	Rp 1.211.626.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp107.115.250	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5,02,04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	-	-			-	**Rp 3.628.822.400**						-	**Rp2.742.781.140**	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	Rp 3.628.822.400			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp2.742.781.140	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				2 Dokumen	Rp 306.418.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp336.628.930	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				3 Laporan	Rp 387.445.100	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp426.189.720	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				1 Laporan	Rp 1.252.257.700	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp332.512.730	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
		Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				42000 Obyek Pajak	Rp 295.557.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp289.487.220	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
		Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah				3500 Layanan	Rp 509.328.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp423.714.610	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														
		Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				12 Dokumen	Rp 151.027.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp166.129.700	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				12 Dokumen	Rp 298.589.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp297.097.900	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				12 Dokumen	Rp 207.254.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp227.979.950	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				12 Dokumen	Rp 220.945.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp243.040.380	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)						**Rp433.589.801.141**							**Rp397.773.212.680**	
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp433.589.801.141**							**Rp397.773.212.680**	
5.02	**KEUANGAN**						**Rp433.589.801.141**							**Rp397.773.212.680**	
5,02,02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	-	-			-	**Rp433.589.801.141**						-	**Rp397.773.212.680**	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	Rp433.589.801.141			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp397.773.212.680	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
		Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				1 Laporan	Rp390.172.098.600	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp330.126.954.466	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				1 Laporan	Rp 40.000.000.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp66.000.000.000	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				1 Laporan	Rp 3.417.702.541	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp1.646.258.214	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (PPKD)
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						**Rp 27.427.709.440**							**Rp28.550.976.228**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 27.427.709.440**							**Rp28.550.976.228**	
5.03	**KEPEGAWAIAN**						**Rp 19.282.992.940**							**Rp20.850.919.846**	
5,03,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**71 BB**	**Rp 8.653.904.740**						-	**Rp9.809.571.180**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 124.873.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Perencanaan Pembangunan Tingkat SKPD	-	Rp109.458.278	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	Rp 48.398.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Perencanaan Pembangunan Tingkat SKPD		Rp 40.054.778	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Rp 44.470.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Perencanaan Pembangunan Tingkat SKPD		Rp 42.370.800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	Rp 32.005.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Perencanaan Pembangunan Tingkat SKPD		Rp 27.032.700	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 7.399.510.796			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pengelolaan Keuangan Tingkat SKPD	-	Rp7.900.260.635	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				36 Orang/bulan	Rp 7.306.451.796	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pengelolaan Keuangan Tingkat SKPD		Rp7.792.433.135	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				750 Dokumen	Rp 76.290.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pengelolaan Keuangan Tingkat SKPD		Rp95.287.500	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	Rp 16.769.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pengelolaan Keuangan Tingkat SKPD		Rp12.540.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 330.455.900			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Administrasi Umum SKPD	-	Rp576.611.444	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	Rp 93.995.900	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Administrasi Umum SKPD		Rp170.073.215	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				36 Dokumen	Rp 43.022.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Administrasi Umum SKPD		Rp49.401.200	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				100 Laporan	Rp 193.438.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Administrasi Umum SKPD		Rp357.137.029	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	-			100 %	Rp 12.920.400			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Barang Milik Daerah Tingkat SKPD	-	Rp287.909.878	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	Rp 12.920.400	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Barang Milik Daerah Tingkat SKPD		Rp287.909.878	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 656.339.644			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat SKPD	-	Rp627.196.265	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 362.500.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat SKPD		Rp244.867.430	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 293.839.644	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat SKPD		Rp382.328.835	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 129.805.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Barang Milik Daerah Tingkat SKPD	-	Rp308.134.680	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	Rp 84.205.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Barang Milik Daerah Tingkat SKPD		Rp177.934.680	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Rp 45.600.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Barang Milik Daerah Tingkat SKPD		Rp130.200.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5,03,02	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	***Persentase Talenta/Calon Talenta yang direkrut melalui jalur CPNS/PPPK Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dapat dilakukan secara daring (online)***	-			**0,5 % 19 %**	**Rp 10.629.088.200**						-	**Rp11.041.348.666**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	*Persentase Pemenuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Beban Kerja Persentase Pengelolaan Data Pegawai yang Terintegrasi*	-			70 % 100 %	Rp 1.103.380.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten	-	Rp757.858.375	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
		Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				1 Dokumen	Rp 546.558.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp144.154.975	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi														
		Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				1 Dokumen	Rp 177.525.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp195.135.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
		Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	Rp 135.728.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp137.425.400	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian				1 Laporan	Rp 243.569.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp281.143.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	*Persentase Jabatan Fungsional yang terisi Persentase Jabatan Pimpinan dan Administrasi yang Terisi*	-			42 % 100 %	Rp 252.385.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten	-	Rp306.444.037	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				1 Dokumen	Rp 117.058.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp96.420.030	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
		Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				6 Dokumen	Rp 135.327.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp210.024.007	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	*Persentase Pegawai yang memenuhi Kompetensi minimal* *Persentase Pegawai yang memenuhi Kualifikasi minimal*	-			75 % 84 %	Rp 8.820.545.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten	-	Rp9.437.606.079	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center														
		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	Rp 2.460.665.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp2.073.569.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN														
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN				1 Dokumen	Rp 1.443.426.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp2.521.016.156	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				215 Orang	Rp 3.243.028.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp3.194.537.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				126 Orang	Rp 801.346.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp374.468.105	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.03.0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN														
		Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN				91 Orang	Rp 872.079.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp1.274.015.818	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	*Persentase Pegawai Berkinerja Minimal Kategori Baik*	-			1	Rp 452.778.200			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten	-	Rp539.440.175	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Laporan	Rp 108.855.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp139.479.000	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
		Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				3 Orang	Rp 123.919.200	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp163.919.280	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				200 Orang	Rp 69.376.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp90.416.800	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				1 Laporan	Rp 75.938.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp73.417.995	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
		Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				1 Dokumen	Rp 74.690.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp72.207.100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**Rp 8.144.716.500**							**Rp7.700.056.382**	
5,04,02	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	***Persentase Pegawai yang memiliki Sertifikat Kompetensi Manajerial-Kepemimpinan***	-			**55 %**	**Rp 8.144.716.500**						-	**Rp7.700.056.382**	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	*Persentase Pegawai yang Lulus Latsar CPNS dan Orientasi PPPK Persentase Pegawai yang Lulus Pelatihan Kepemimpinan*	-			100 % 55 %	Rp 8.144.716.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten	-	Rp7.700.056.382	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan				2 Laporan	Rp 8.144.716.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	PNS dan PPPK Kabupaten		Rp7.700.056.382	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	INSPEKTORAT						**Rp 20.999.995.816**							**Rp20.494.728.152**	
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**Rp 20.999.995.816**							**Rp20.494.728.152**	
6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**Rp 20.999.995.816**							**Rp20.494.728.152**	
6,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah***	-			**74 (BB) Predikat 88,25 Persen**	**Rp 16.086.666.016**						-	**Rp17.299.178.152**	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 Persen	Rp 153.138.324			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan	-	Rp 99.776.760	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 5.000.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp 27.575.160	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Rp 69.091.824	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp 72.201.600	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 40.000.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp-	INSPEKTORAT
6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	Rp 39.046.500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp-	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 Persen	Rp 13.459.091.358			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan	-	Rp14.833.057.907	INSPEKTORAT
6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				630 Orang/bulan	Rp 13.459.091.358	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp14.833.057.907	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 Persen	Rp 850.334.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan	-	Rp939.911.500	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				35 Orang	Rp 490.379.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp541.425.500	INSPEKTORAT
6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	Rp 359.955.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp398.486.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 Persen	Rp 624.510.600			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan	-	Rp512.527.510	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Rp 71.199.600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp56.425.160	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				120 Dokumen	Rp 6.714.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp7.423.350	INSPEKTORAT
6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				71 Laporan	Rp 546.597.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Batu Piring	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp448.679.000	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 348.961.190			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan	-	Rp371.804.345	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	Rp 10.000.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp11.003.850	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				36 Laporan	Rp 185.195.550	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp203.996.595	INSPEKTORAT
6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 153.765.640	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp156.803.900	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 650.630.544			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan	-	Rp542.100.130	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				40 Unit	Rp 591.611.676	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp462.583.330	INSPEKTORAT
6.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Rp 59.018.868	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Inspektorat Kabupaten Balangan		Rp79.516.800	INSPEKTORAT
6,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	***Prosentase SKPD yang selesai TLHP Persentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik***	-			**60 Persen 70 Persen**	**Rp 2.594.738.200**						-	**Rp1.939.224.000**	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Jumlah rekomendasi temuan yang bersifat administrasi dan keuangan yang selesai ditindaklanjuti Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LHE*	-			210 Rekome ndasi 21 SKPD	Rp 2.103.109.200			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan	-	Rp1.042.650.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				33 Laporan	Rp 335.864.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp220.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				10 Laporan	Rp 443.446.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp254.650.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				2 Laporan	Rp 49.995.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp55.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	Rp 60.714.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp33.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				9 Laporan	Rp 473.990.200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp220.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				2 Dokumen	Rp 739.100.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp260.000.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani*	-			4,4 Nilai 100 Persen	Rp 491.629.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan	-	Rp896.574.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian														
		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				2 Laporan	Rp 52.639.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp154.074.000	INSPEKTORAT
6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				73 Laporan	Rp 438.990.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp742.500.000	INSPEKTORAT

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
6,01,03	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB Nilai MCP***	-			**28 Persen 90 Persen 93 Persen**	**Rp 2.318.591.600**						-	**Rp1.256.326.000**	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	*Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI menuju WBK/WBBM Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti Prosentase Indikator MCP yang terjawab/terpenuhi*	-			9 SKPD 84 Persen 93 Persen	Rp 2.318.591.600			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan	-	Rp1.256.326.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				30 perangkat daerah	Rp 115.345.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp384.195.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				21 perangkat daerah	Rp 503.363.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp67.000.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	Rp 1.669.857.600	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp676.452.000	INSPEKTORAT
6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				7 perangkat daerah	Rp 30.026.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintah Kabupaten Balangan		Rp128.679.000	INSPEKTORAT
	KECAMATAN LAMPIHONG						**Rp 6.740.500.734**							**Rp5.825.991.356**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 6.740.500.734**							**Rp5.825.991.356**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 6.740.500.734**							**Rp5.825.991.356**	
7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH***	-			**undefined undefined**	**Rp 5.838.047.534**						-	**Rp5.172.010.836**	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 50.077.000			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Kecamatan Lampihong	-	Rp22.420.200	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	Rp 6.777.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Kecamatan Lampihong		Rp 4.270.200	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	Rp 41.700.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Kecamatan Lampihong		Rp 7.150.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 850.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Kecamatan Lampihong		Rp 5.500.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	Rp 750.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pegawai Kecamatan Lampihong		Rp5.500.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 4.263.184.726			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp3.890.505.573	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				288 Orang/bulan	Rp 4.263.184.726	Kab. Balangan, Lampihong, Simpang Tiga	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp3.890.505.573	KECAMATAN LAMPIHONG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 5.000.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp20.800.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	Rp 5.000.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp20.800.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 402.477.400			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp255.110.458	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 52.550.400	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp34.047.420	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 21.198.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp17.474.150	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp 328.729.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp203.588.888	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 984.956.408			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp879.523.370	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 82.782.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp62.552.600	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 41.794.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp79.463.120	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 860.380.408	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp737.507.650	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 132.352.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp103.651.235	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				19 Unit	Rp 103.932.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp96.221.235	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Rp 28.420.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp7.430.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**13 Laporan**	**Rp 197.013.500**						-	**Rp106.535.440**	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan*	-			100 Persen	Rp 197.013.500			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kecamatan Lampihong	-	Rp106.535.440	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				6 Laporan	Rp 197.013.500	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kecamatan Lampihong		Rp106.535.440	KECAMATAN LAMPIHONG
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP***	-			**6 Laporan**	**Rp 235.964.500**						-	**Rp188.491.200**	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 persen	Rp 91.430.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kecamatan Lampihong	-	Rp44.550.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 91.430.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kecamatan Lampihong		Rp44.550.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	Rp 144.534.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp143.941.200	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				22 Keluarga	Rp 144.534.500	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp143.941.200	KECAMATAN LAMPIHONG
7,01,04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-			**-**	**Rp 64.464.800**						-	**Rp39.198.280**	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan*	-			100 Persen	Rp 64.464.800			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp39.198.280	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 64.464.800	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp39.198.280	KECAMATAN LAMPIHONG
7,01,05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-			**-**	**Rp 215.926.200**						-	**Rp178.266.900**	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Kegiatan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 Persen	Rp 215.926.200			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kepala Desa dan Masyarakat Desa	-	Rp178.266.900	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				6 Dokumen	Rp 215.926.200	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kepala Desa dan Masyarakat Desa		Rp178.266.900	KECAMATAN LAMPIHONG
7,01,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah Laporan Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 189.084.200**						-	**Rp141.488.700**	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya*	-			27 Desa	Rp 189.084.200			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kepala Desa dan Masyarakat Desa	-	Rp141.488.700	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				2 Dokumen	Rp 22.800.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kepala Desa dan Masyarakat Desa		Rp25.707.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				27 Dokumen	Rp 92.356.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kepala Desa dan Masyarakat Desa		Rp39.276.600	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				27 Dokumen	Rp 3.160.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kepala Desa dan Masyarakat Desa		Rp14.500.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				27 Dokumen	Rp 5.750.000	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kepala Desa dan Masyarakat Desa		Rp14.000.000	KECAMATAN LAMPIHONG
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				3 Dokumen	Rp 65.018.200	Kab. Balangan, Lampihong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kepala Desa dan Masyarakat Desa		Rp48.005.100	KECAMATAN LAMPIHONG
	KECAMATAN BATUMANDI						**Rp 6.857.058.740**							**Rp6.295.556.100**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 6.857.058.740**							**Rp6.295.556.100**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 6.857.058.740**							**Rp6.295.556.100**	
7.01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-			-	**Rp 6.021.831.740**						-	**Rp5.586.478.000**	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 22.933.700			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	ASN Lingkup Kec. Batumandi	-	Rp20.328.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	Rp 22.933.700	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp20.328.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 5.052.599.640			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	ASN Lingkup Kec. Batumandi	-	Rp4.528.328.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	Rp 4.243.089.480	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Kualitas Sumberday a Manusia	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp3.900.000.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 785.663.460	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp603.000.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	Rp 23.846.700	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp25.328.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 94.568.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi	-	Rp 68.180.200	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				60 Paket	Rp 19.728.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp 31.760.200	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				10 Orang	Rp 74.840.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp 36.420.000	KECAMATAN BATUMANDI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 310.772.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi	-	Rp501.641.800	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	Rp 13.543.900	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp14.300.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	Rp 86.166.400	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp129.338.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	Rp 28.543.200	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp28.003.800	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150 Laporan	Rp 182.519.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp330.000.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 %	Rp 202.726.400			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi	-	Rp221.100.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 184.761.400	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp202.400.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 17.965.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp18.700.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 338.231.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi	-	Rp246.900.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	Rp 226.532.300	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp137.500.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	Rp 64.900.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp37.350.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	Rp 46.799.200	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Lingkup Kec. Batumandi		Rp72.050.000	KECAMATAN BATUMANDI
7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**12 Laporan**	**Rp 41.792.500**						-	**Rp61.490.000**	KECAMATAN BATUMANDI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan*	-			100 %	Rp 41.792.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Batumandi	-	Rp61.490.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 41.792.500	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Batumandi		Rp61.490.000	KECAMATAN BATUMANDI
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU DAN SESUAI SOP***	-			**4 Laporan**	**Rp 172.466.500**						-	**Rp162.976.000**	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 88.346.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Batumandi	-	Rp 80.476.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				90 Lembaga Kemasyarak atan	Rp 8.760.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Batumandi		Rp 11.176.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 79.586.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Batumandi		Rp 69.300.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	Rp 84.120.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan TP. PKK Desa	-	Rp 82.500.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				2 Keluarga	Rp 84.120.500	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan TP. PKK Desa		Rp 82.500.000	KECAMATAN BATUMANDI
7,01,04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 9.800.000**						-	**Rp 22.000.000**	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 9.800.000			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Forkopimcam dan Pemerintahan Desa	-	Rp 22.000.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 9.800.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Forkopimcam dan Pemerintahan Desa		Rp22.000.000	KECAMATAN BATUMANDI
7,01,05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 467.307.100**						-	**Rp340.901.000**	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 %	Rp 467.307.100			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kecamatan Batumandi	-	Rp340.901.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				25 Orang	Rp 8.760.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kecamatan Batumandi		Rp10.901.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				3 Dokumen	Rp 458.547.100	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kecamatan Batumandi		Rp330.000.000	KECAMATAN BATUMANDI
7,01,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 143.860.900**						-	**Rp121.711.100**	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya*	-			18 desa	Rp 143.860.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat	-	Rp121.711.100	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	Rp 12.651.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp13.916.100	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				4 Dokumen	Rp 17.530.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp29.700.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				4 Dokumen	Rp 23.695.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp11.000.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				4 Dokumen	Rp 8.695.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp12.095.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				4 Dokumen	Rp 8.695.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp8.250.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				4 Dokumen	Rp 23.160.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp8.250.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	Rp 8.760.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp5.500.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				4 Dokumen	Rp 31.784.900	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp27.500.000	KECAMATAN BATUMANDI
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				4 Dokumen	Rp 8.890.000	Kab. Balangan, Batu Mandi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp5.500.000	KECAMATAN BATUMANDI
	KECAMATAN AWAYAN						**Rp 5.847.982.472**							**Rp4.708.845.480**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 5.847.982.472**							**Rp4.708.845.480**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 5.847.982.472**							**Rp4.708.845.480**	
7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**70,40 Nilai**	**Rp 4.860.196.972**						-	**Rp4.020.085.080**	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 52.485.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Rp36.353.080	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 40.351.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp25.943.720	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 3.087.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp2.439.360	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	Rp 3.287.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp2.970.000	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 5.760.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp5.000.000	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 3.790.935.172			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kantor Camat Awayan	-	Rp3.073.589.400	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	Rp 3.657.377.888	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kantor Camat Awayan		Rp2.984.675.850	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 130.548.784	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kantor Camat Awayan		Rp86.253.200	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				2 Laporan	Rp 3.008.500	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kantor Camat Awayan		Rp2.660.350	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 52.375.000			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kantor Camat Awayan	-	Rp43.953.250	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 Paket	Rp 52.375.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kantor Camat Awayan		Rp43.953.250	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	Rp 553.462.600			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp503.317.100	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	Rp 20.020.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp21.989.000	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	Rp 163.298.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp132.300.500	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Rp 39.172.600	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp34.931.600	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				584 Laporan	Rp 330.972.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp314.096.000	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 247.834.400			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp206.019.400	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 60.684.200	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp59.669.200	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 187.150.200	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp146.350.200	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	Rp 163.104.800			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp156.852.850	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	Rp 99.270.800	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp97.158.850	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	Rp 26.510.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp22.370.000	KECAMATAN AWAYAN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Rp 37.324.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp37.324.000	KECAMATAN AWAYAN
7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	-	-			-	**Rp 113.503.300**						-	**Rp124.965.000**	KECAMATAN AWAYAN
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	-	-			-	Rp 113.503.300			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp124.965.000	KECAMATAN AWAYAN
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	Rp 113.503.300	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp124.965.000	KECAMATAN AWAYAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	-	-			-	**Rp 174.317.000**						-	**Rp159.484.000**	KECAMATAN AWAYAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	Rp 174.317.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp159.484.000	KECAMATAN AWAYAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 174.317.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp159.484.000	KECAMATAN AWAYAN
7,01,04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	-	-			-	**Rp 89.383.500**						-	**Rp-**	KECAMATAN AWAYAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	Rp 89.383.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp-	KECAMATAN AWAYAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 89.383.500	Kab. Balangan, Awayan, Awayan Kab. Balangan, Awayan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp-	KECAMATAN AWAYAN
7,01,05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	-	-			-	**Rp 386.438.300**						-	**Rp354.143.300**	KECAMATAN AWAYAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	Rp 386.438.300			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp354.143.300	KECAMATAN AWAYAN
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				4 Dokumen	Rp 386.438.300	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp354.143.300	KECAMATAN AWAYAN
7,01,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**Rp 224.143.400**						-	**Rp50.168.100**	KECAMATAN AWAYAN
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	Rp 224.143.400			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp50.168.100	KECAMATAN AWAYAN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	Rp 179.496.000	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp15.000.000	KECAMATAN AWAYAN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	Rp 44.647.400	Kab. Balangan, Awayan, Awayan	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp35.168.100	KECAMATAN AWAYAN
	KECAMATAN HALONG						**Rp 6.306.727.216**							**Rp6.341.950.067**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 6.306.727.216**							**Rp6.341.950.067**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 6.306.727.216**							**Rp6.341.950.067**	
7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**73,40 Nilai**	**Rp 4.885.790.116**						-	**Rp4.829.427.667**	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 9.770.100			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong	-	Rp15.210.100	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 236.700	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp 1.736.700	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 236.700	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp 1.736.700	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	Rp 236.700	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp 1.736.700	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 9.060.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp10.000.000	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 3.987.968.316			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong	-	Rp3.811.913.567	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				21 Orang/bulan	Rp 3.878.541.900	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp3.772.414.367	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 109.426.416	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp39.499.200	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 439.445.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong	-	Rp451.793.000	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Paket	Rp 12.458.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp32.828.000	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp 426.987.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp418.965.000	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 293.965.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong	-	Rp259.513.800	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 41.339.400	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp38.209.200	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 252.626.100	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp221.304.600	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 154.641.200			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong	-	Rp290.997.200	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	Rp 117.633.200	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp237.541.200	KECAMATAN HALONG
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	Rp 37.008.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Halong		Rp53.456.000	KECAMATAN HALONG
7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 706.309.600**						-	**Rp576.776.300**	KECAMATAN HALONG
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan*	-			100 %	Rp 706.309.600			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Halong	-	Rp576.776.300	KECAMATAN HALONG
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				21 Laporan	Rp 706.309.600	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Halong		Rp576.776.300	KECAMATAN HALONG
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 219.818.700**						-	**Rp367.896.500**	KECAMATAN HALONG
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 48.960.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Halong	-	Rp73.040.000	KECAMATAN HALONG
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 48.960.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Halong		Rp73.040.000	KECAMATAN HALONG
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 170.858.700			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan TP. PKK Desa	-	Rp294.856.500	KECAMATAN HALONG
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				24 Keluarga	Rp 170.858.700	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan TP. PKK Desa		Rp294.856.500	KECAMATAN HALONG
7,01,04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 83.060.000**						-	**Rp69.860.000**	KECAMATAN HALONG
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 83.060.000			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Forkopimcam dan Pemerintahan Desa	-	Rp 69.860.000	KECAMATAN HALONG
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 83.060.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Forkopimcam dan Pemerintahan Desa		Rp 69.860.000	KECAMATAN HALONG
7,01,05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 40.220.000**						-	**Rp 68.190.000**	KECAMATAN HALONG
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 Persen	Rp 40.220.000			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Warga Masyarakat	-	Rp68.190.000	KECAMATAN HALONG
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				200 Orang	Rp 40.220.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Warga Masyarakat		Rp68.190.000	KECAMATAN HALONG
7,01,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 371.528.800**						-	**Rp429.799.600**	KECAMATAN HALONG
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya*	-			24 Desa	Rp 371.528.800			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat	-	Rp429.799.600	KECAMATAN HALONG
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	Rp 48.989.600	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp53.664.600	KECAMATAN HALONG
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				168 Dokumen	Rp 61.040.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp88.260.000	KECAMATAN HALONG
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				4 Dokumen	Rp 28.340.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp 32.870.000	KECAMATAN HALONG
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				4 Dokumen	Rp 17.340.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp 18.010.000	KECAMATAN HALONG
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	Rp 25.360.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp 29.900.000	KECAMATAN HALONG
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				3 Dokumen	Rp 56.909.200	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp 84.030.000	KECAMATAN HALONG
7.01.06.2.01.0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan				4 Dokumen	Rp 50.560.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp 69.245.000	KECAMATAN HALONG
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	Rp 54.270.000	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp 53.820.000	KECAMATAN HALONG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				6 Dokumen	Rp 28.720.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi	Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), Linmas dan Warga Masyarakat		Rp-	KECAMATAN HALONG
	KECAMATAN JUAI						**Rp 5.436.878.676**							**Rp6.481.069.780**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 5.436.878.676**							**Rp6.481.069.780**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 5.436.878.676**							**Rp6.481.069.780**	
7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**68,00 Nilai**	**Rp 4.344.661.476**						-	**Rp4.866.826.280**	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 163.938.400			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai	-	Rp310.819.900	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 22.254.600	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp73.966.100	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 32.086.900	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp74.145.600	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	Rp 104.881.300	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp147.708.200	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	Rp 4.715.600	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp15.000.000	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik*	-			100 %	Rp 3.367.434.700			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai	-	Rp3.434.120.080	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				22 Orang/bulan	Rp 3.208.671.900	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp3.269.842.080	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 158.762.800	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp164.278.000	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 28.613.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai	-	Rp25.893.000	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	Rp 28.613.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp25.893.000	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 152.396.900			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai	-	Rp380.319.400	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 4.311.100	Kab. Balangan, Halong, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp7.204.700	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 107.084.700	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp134.149.500	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp 41.001.100	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp238.965.200	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 %	Rp 373.263.076			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai	-	Rp342.912.200	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	Rp 206.628.176	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp101.085.300	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 131.534.900	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp142.584.900	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	Rp 35.100.000	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp99.242.000	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 259.015.400			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai	-	Rp372.761.700	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	Rp 129.181.900	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp245.550.700	KECAMATAN JUAI
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Rp 129.833.500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Juai		Rp127.211.000	KECAMATAN JUAI
7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 420.186.900**						-	**Rp336.723.900**	KECAMATAN JUAI
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan*	-			100 %	Rp 159.997.800			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat	-	Rp176.723.900	KECAMATAN JUAI
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	Rp 159.997.800	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat		Rp176.723.900	KECAMATAN JUAI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan*	-			100 %	Rp 260.189.100			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp160.000.000	KECAMATAN JUAI
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				1 Laporan	Rp 260.189.100	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp160.000.000	KECAMATAN JUAI
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 205.054.000**						-	**Rp366.530.000**	KECAMATAN JUAI
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 148.946.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp212.230.000	KECAMATAN JUAI
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				70 Lembaga Kemasyarak atan	Rp 44.328.800	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp84.150.000	KECAMATAN JUAI
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	Rp 60.785.000	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp 85.390.000	KECAMATAN JUAI
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	Rp 43.832.700	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp 42.690.000	KECAMATAN JUAI
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 56.107.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp154.300.000	KECAMATAN JUAI
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				60 Keluarga	Rp 56.107.500	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp154.300.000	KECAMATAN JUAI
7,01,04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 160.177.000**						-	**Rp208.534.600**	KECAMATAN JUAI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 160.177.000			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp208.534.600	KECAMATAN JUAI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	Rp 160.177.000	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp208.534.600	KECAMATAN JUAI
7,01,05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 83.596.400**						-	**Rp191.587.000**	KECAMATAN JUAI
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 %	Rp 83.596.400			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp191.587.000	KECAMATAN JUAI
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				130 Orang	Rp 83.596.400	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp191.587.000	KECAMATAN JUAI
7,01,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 223.202.900**						-	**Rp510.868.000**	KECAMATAN JUAI
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Jumlah Desa dan Kelurahan yang Dibina dan Diawasi Kegiatannya*	-			21 Desa	Rp 223.202.900			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp510.868.000	KECAMATAN JUAI
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	Rp 52.360.100	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp163.700.000	KECAMATAN JUAI
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	Rp 33.016.800	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp76.891.600	KECAMATAN JUAI
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	Rp 30.317.700	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp64.224.000	KECAMATAN JUAI
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	Rp 60.017.700	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp74.482.400	KECAMATAN JUAI
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	Rp 47.490.600	Kab. Balangan, Juai, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp131.570.000	KECAMATAN JUAI
	KECAMATAN PARINGIN						**Rp 11.363.748.054**							**Rp9.945.023.789**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 11.363.748.054**							**Rp9.945.023.789**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 11.363.748.054**							**Rp9.945.023.789**	
7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**74 Nilai**	**Rp 9.662.280.114**						-	**Rp8.264.848.849**	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 53.236.600			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan	-	Rp41.486.700	KECAMATAN PARINGIN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	Rp 23.208.400	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp13.708.500	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 13.994.400	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp13.994.400	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	Rp 16.033.800	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp13.783.800	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 6.299.994.168			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan	-	Rp5.694.821.539	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				35 Orang/bulan	Rp 6.299.994.168	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp5.694.821.539	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 108.767.700			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan/ Kelurahan	-	Rp112.367.700	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				40 Paket	Rp 108.767.700	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan/ Kelurahan		Rp112.367.700	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 1.593.242.100			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan	-	Rp1.041.858.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	Rp 45.254.700	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp45.254.700	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				10 Paket	Rp 320.175.500	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp127.500.100	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	Rp 34.364.800	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp36.364.800	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	Rp 5.268.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp7.568.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp 1.188.179.100	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp825.170.400	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 208.353.300			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan	-	Rp86.680.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	Rp 77.802.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp30.080.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				10 Unit	Rp 130.551.300	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp56.600.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	-			12 Laporan	Rp 1.123.003.126			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan	-	Rp1.017.951.790	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 142.691.850	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp145.691.850	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 980.311.276	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan		Rp872.259.940	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	-			100 %	Rp 275.683.120			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan/ Kelurahan	-	Rp269.683.120	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				40 Unit	Rp 170.008.980	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan/ Kelurahan		Rp176.008.980	KECAMATAN PARINGIN
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	Rp 105.674.140	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan/ Kelurahan		Rp93.674.140	KECAMATAN PARINGIN
7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***JUMLAH LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK***	-			**1 Laporan**	**Rp 458.742.540**						-	**Rp444.742.540**	KECAMATAN PARINGIN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan*	-			100 %	Rp 458.742.540			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp444.742.540	KECAMATAN PARINGIN
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	Rp 170.710.240	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp170.710.240	KECAMATAN PARINGIN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	Rp 288.032.300	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp274.032.300	KECAMATAN PARINGIN
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***JUMLAH LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN***	-			**1 Laporan**	**Rp 536.930.500**						-	**Rp567.930.500**	KECAMATAN PARINGIN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan*	-			100 % 100 %	Rp 310.756.700			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp324.756.700	KECAMATAN PARINGIN
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				100 Lembaga Ke masyarakata n	Rp 25.971.700	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp28.971.700	KECAMATAN PARINGIN
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				2 Dokumen	Rp 37.480.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp38.480.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	Rp 247.305.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp257.305.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan*	-			100 %	Rp 226.173.800			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp243.173.800	KECAMATAN PARINGIN
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				16 Keluarga	Rp 226.173.800	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp243.173.800	KECAMATAN PARINGIN
7,01,04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 300.834.000**						-	**Rp292.834.000**	KECAMATAN PARINGIN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan*	-			100 %	Rp 300.834.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp292.834.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 190.247.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp192.247.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				1 Laporan	Rp 110.587.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp100.587.000	KECAMATAN PARINGIN
7,01,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah Laporan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yang Disusun Tepat Waktu Dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 404.960.900**						-	**Rp374.667.900**	KECAMATAN PARINGIN
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Pemerintahan Desa*	-			100 %	Rp 404.960.900			Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp374.667.900	KECAMATAN PARINGIN
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	Rp 111.897.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp111.897.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	Rp 51.135.500	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp21.835.500	KECAMATAN PARINGIN
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	Rp 117.684.600	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp107.684.600	KECAMATAN PARINGIN
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa														
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa				1 Dokumen	Rp 15.030.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp17.430.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				1 Dokumen	Rp 40.525.000	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp50.525.000	KECAMATAN PARINGIN
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	Rp 68.688.800	Kab. Balangan, Paringin, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Membangu n dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertu mbuhan Ekonomi, P emerataan Ekonomi, dan Pembe rantasan Kemiskinan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp65.295.800	KECAMATAN PARINGIN
	KELURAHAN PARINGIN KOTA						**Rp 1.357.276.300**							**Rp1.255.773.500**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 1.357.276.300**							**Rp1.255.773.500**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 1.357.276.300**							**Rp1.255.773.500**	
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 1.357.276.300**						-	**Rp1.255.773.500**	KELURAHAN PARINGIN KOTA
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan*	-			100 %	Rp 1.357.276.300			Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat	-	Rp1.255.773.500	KELURAHAN PARINGIN KOTA
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	Rp 505.470.300	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp510.467.100	KELURAHAN PARINGIN KOTA
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	Rp 851.806.000	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Kota	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Melanjutka n Pengemb angan Infra struktur dan Meningkatk an Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausah aan, Menge mbangkan Industri Kreatif serta Meng embangkan Agromariti m Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp745.306.400	KELURAHAN PARINGIN KOTA
	KELURAHAN PARINGIN TIMUR						**Rp 1.433.314.900**							**Rp1.140.000.000**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 1.433.314.900**							**Rp1.140.000.000**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 1.433.314.900**							**Rp1.140.000.000**	
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 1.433.314.900**						-	**Rp1.140.000.000**	KELURAHAN PARINGIN TIMUR
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan*	-			100 %	Rp 1.433.314.900			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat	-	Rp1.140.000.000	KELURAHAN PARINGIN TIMUR
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	Rp 410.158.100	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp542.450.000	KELURAHAN PARINGIN TIMUR
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				10 Pokmas / Ormas	Rp 1.023.156.800	Kab. Balangan, Paringin, Paringin Timur	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp597.550.000	KELURAHAN PARINGIN TIMUR
	KECAMATAN TEBING TINGGI						**Rp 5.977.073.058**							**Rp5.797.173.244**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 5.977.073.058**							**Rp5.797.173.244**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 5.977.073.058**							**Rp5.797.173.244**	

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**72.40 Nilai**	**Rp 4.747.790.958**						-	**Rp4.552.943.844**	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 207.894.800			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	-	Rp211.929.200	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	Rp 19.688.800	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp21.078.200	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	Rp 19.053.500	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp19.450.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	Rp 29.487.500	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp29.736.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	Rp 139.665.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp141.665.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 3.277.256.458			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Tebing Tinggi	-	Rp3.297.917.494	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	Rp 3.145.878.202	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Tebing Tinggi		Rp3.242.117.494	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	Rp 131.378.256	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Tebing Tinggi		Rp55.800.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 33.978.500			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	-	Rp16.792.500	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				55 Paket	Rp 33.978.500	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp16.792.500	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 750.143.900			Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	-	Rp546.839.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	Rp 23.246.700	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp33.246.700	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	Rp 295.319.600	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp115.796.600	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	Rp 46.988.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp44.891.600	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	Rp 51.860.600	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	02. Pemant apan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Unggul dan Berdaya Saing Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp47.774.100	KECAMATAN TEBING TINGGI

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	Rp 332.729.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjanga n Dan Menjamin P emerataan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp305.130.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 256.141.900			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	-	Rp257.197.250	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	Rp 119.722.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp112.842.200	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 41.893.500	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp35.999.950	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 94.526.400	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp108.355.100	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 222.375.400			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi	-	Rp222.268.400	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				15 Unit	Rp 167.029.400	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp165.898.400	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Unit	Rp 19.346.000	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp20.370.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	Rp 36.000.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Karyawan/i Kantor Kecamatan Tebing Tinggi		Rp36.000.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang disusun Tepat Waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 232.710.900**						-	**Rp220.282.400**	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	*Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan*	-			100 %	Rp 232.710.900			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	-	Rp220.282.400	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan														
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				12 Laporan	Rp 232.710.900	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat		Rp220.282.400	KECAMATAN TEBING TINGGI
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Lembaga Kemasyrakatan Desa yang Aktif***	-			**60 LKD**	**Rp 483.473.700**						-	**Rp497.392.300**	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Terselenggaranya Pemberdayaan Masyarakat Desa*	-			100 %	Rp 349.179.000			Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp377.222.700	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 349.179.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Meningkatk an Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp377.222.700	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 134.294.700			Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp120.169.600	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				25 Keluarga	Rp 134.294.700	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Ketahanan Ekonomi Untuk Pertu mbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp120.169.600	KECAMATAN TEBING TINGGI
7,01,04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Laporan koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dan Ketertiban Umum yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 124.520.000**						-	**Rp100.610.000**	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Terselenggaranya Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan*	-			100 %	Rp 124.520.000			Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at	-	Rp100.610.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				4 Laporan	Rp 124.520.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Stabilitas Polhukhank am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp100.610.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7,01,05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun tepat waktu dan Sesuai SOP***	-			**100 %**	**Rp 10.970.000**						-	**Rp12.370.000**	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum*	-			100 %	Rp 10.970.000			Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat	-	Rp12.370.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.05.2.01.0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal														
		Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal				1 Dokumen	Rp 10.970.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkok oh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Ma sya rak at		Rp12.370.000	KECAMATAN TEBING TINGGI
7,01,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	***Jumlah Lapran Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang disusun tepat waktu dan sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 377.607.500**						-	**Rp413.574.700**	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	*Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*	-			100 %	Rp 377.607.500			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat	-	Rp413.574.700	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	Rp 131.181.400	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat		Rp135.581.400	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				12 Dokumen	Rp 205.569.000	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat		Rp200.145.700	KECAMATAN TEBING TINGGI
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				12 Dokumen	Rp 40.857.100	Kab. Balangan, Tebing Tinggi, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat		Rp77.847.600	KECAMATAN TEBING TINGGI
	KECAMATAN PARINGIN SELATAN						**Rp 9.641.596.595**							**Rp8.715.141.839**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 9.641.596.595**							**Rp8.715.141.839**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 9.641.596.595**							**Rp8.715.141.839**	
7,01,01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	***Nilai SAKIP Perangkat Daerah***	-			**71,46 Nilai**	**Rp 7.879.568.695**						-	**Rp7.616.924.766**	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	*Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah*	-			100 %	Rp 63.343.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp25.961.230	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	Rp 52.873.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp5.961.230	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				2 Dokumen	Rp 5.000.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp10.000.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah				1 Data	Rp 5.470.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp10.000.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 6.087.391.239			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp5.986.633.860	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	Rp 6.002.081.239	Kab. Balangan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp5.928.553.860	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan														
		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Penguijan/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	Rp 85.310.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp58.080.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 64.500.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp116.110.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	Rp 34.500.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp104.610.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2 Orang	Rp 30.000.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp11.500.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 656.701.300			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp562.472.900	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	Rp 10.209.800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp14.923.150	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	Rp 47.075.200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp11.000.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	Rp 26.128.200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp42.535.350	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	Rp 573.288.100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp494.014.400	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan*	-			100 %	Rp 189.013.500			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp206.275.740	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	Rp 18.080.800	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp5.500.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				8 Unit	Rp 170.932.700	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp200.775.740	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik*	-			100 %	Rp 651.716.656			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp547.297.441	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	Rp 172.754.200	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp207.158.600	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	Rp 478.962.456	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp340.138.841	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik*	-			100 %	Rp 166.903.000			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp172.173.595	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	Rp 166.903.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	ASN Kecamatan Paringin Selatan		Rp172.173.595	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7,01,02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 290.052.300**						-	**Rp142.075.010**	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	*Persentase Penyelenggaraan Pelayanan di Tingkat Kecamatan sesuai Standar Pelayanan*	-			100 %	Rp 290.052.300			Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp142.075.010	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	Rp 50.630.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Paringin Selatan		Rp56.463.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	Rp 239.422.300	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memp erkuat Pen cegahan dan Pembe rantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Pe nyeludupan	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Paringin Selatan		Rp85.612.010	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 1.208.295.600**						-	**Rp635.316.800**	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 158.527.500			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp274.987.900	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				1 Dokumen	Rp 37.327.500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Paringin Selatan		Rp162.787.900	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	Rp 121.200.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Pemerintahan Desa dan Masyarakat Kecamatan Paringin Selatan		Rp112.200.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	Rp 778.247.100			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kelurahan Batu Piring	-	Rp311.928.900	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				6 Lembaga K emasyarakat an	Rp 331.800.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kelurahan Batu Piring		Rp48.290.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan														
		Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				2 Laporan	Rp 446.447.100	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kelurahan Batu Piring		Rp263.638.900	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 271.521.000			Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa	-	Rp48.400.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				10 Keluarga	Rp 271.521.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Pembang unan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Pere mpuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandan Disabilitas	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Tim Penggerak PKK Desa		Rp 48.400.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7,01,04	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	***Jumlah Laporan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 54.340.000**						-	**Rp 39.300.000**	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	*Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan yang di Fasilitasi*	-			100 %	Rp 54.340.000			Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Forkopimcam dan Pemerintahan Desa	-	Rp 39.300.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
						TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
										NASIONAL	DAERAH				
2	3	4	5	6	7	8	Rp 9	10	11	12	13	14	15	Rp 16	17
		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	Rp 54.340.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memantapk an Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandiria n Bangsa Melalui Sw asembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi S yariah,Ekon omi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Forkopimcam dan Pemerintahan Desa		Rp 39.300.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7,01,05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	***Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 11.720.000**						-	**Rp 48.400.000**	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	*Persentase Kegiatan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah*	-			100 %	Rp 11.720.000			Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kecamatan Paringin Selatan	-	Rp48.400.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional														
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				100 Orang	Rp 11.720.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	Memperkua t Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kecamatan Paringin Selatan		Rp48.400.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7,01,06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	-	-			-	**Rp 197.620.000**						-	**Rp233.125.263**	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	Rp 197.620.000			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-	-	Rp233.125.263	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	Rp 49.550.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp48.400.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				9 Dokumen	Rp 4.500.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp11.000.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				2 Dokumen	Rp 120.720.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp120.720.000	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
7.01.06.2.01.0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa														
		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa				1 Dokumen	Rp 22.850.000	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	-		Rp53.005.263	KECAMATAN PARINGIN SELATAN
	KELURAHAN BATU PIRING						**Rp 987.009.400**							**Rp1.294.347.440**	
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**Rp 987.009.400**							**Rp1.294.347.440**	
7.01	**KECAMATAN**						**Rp 987.009.400**							**Rp1.294.347.440**	
7,01,03	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	***Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP***	-			**1 Laporan**	**Rp 987.009.400**						-	**Rp1.294.347.440**	KELURAHAN BATU PIRING
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	*Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat Kecamatan yang Difasilitasi*	-			100 %	Rp 987.009.400			-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kelurahan Batu Piring	-	Rp1.294.347.440	KELURAHAN BATU PIRING
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
		Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				2 Unit	Rp 144.922.500	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kelurahan Batu Piring		Rp884.347.440	KELURAHAN BATU PIRING
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
		Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	Rp 842.086.900	Kab. Balangan, Paringin Selatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	04. Mening katkan Tata Kelola Pem erintahan yang Fokus Pada Pelayanan Publik dan Investasi Peningkata n Tata Kelola Pem erintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Inovasi	Masyarakat Kelurahan Batu Piring		Rp410.000.000	KELURAHAN BATU PIRING
	J U M L A H						**Rp3.241.055.914.281**							**Rp1.838.101.142.661**	

LAMPIRAN
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah
Sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Balangan Triwulan IV Tahun 2023

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Balangan Triwulan IV Tahun 2023

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**100%**	**186.243.641.402**	**100%**	**69.747.291.887**	**100%**	**108.423.258.099**	**100%**	**98.661.037.087**	**100**	**91**	**100%**	**98.661.037.087,00**	**100**	**52,97**		Tercapai
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi Dokumen Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	942.436.593	100%	1.382.704.470	100%	2.657.644.700	100%	2.466.870.000	100	92,82	100%	2.466.870.000,00	100	261,75		Tercapai
1.	4.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0 Dokumen	671.530.325	0 Dokumen	1.236.873.270	2 Dokumen	2.456.048.500	2 Dokumen	2.295.298.600	100	93,45	2 Dokumen	3.532.171.870,00	0	525,99	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
2.	4.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0 Laporan	270.906.268	0 Laporan	145.831.200	6 Laporan	201.596.200	6 Laporan	171.571.400	100	85,11	6 Laporan	317.402.600,00	0	117,16	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	89,28			0	321,58		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ktentuan Yang Berlaku	100%	82.139.033.927	100%	11.600.626.297	100%	18.225.034.926	100%	14.931.880.725	100	81,93	100%	14.931.880.725,00	100	18,18		Tercapai
3.	4.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang / Bulan	80.983.239.706	0 Orang / Bulan	11.464.349.197	89 Orang / Bulan	17.079.263.326	89 Orang / Bulan	14.195.516.025	100	83,12	89 Orang / Bulan	14.195.516.025,00	0	17,53	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
4.	4.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0 Dokumen	926.167.767	0 Dokumen	108.325.500	1 Dokumen	574.242.000	1 Dokumen	236.732.700	100	41,23	1 Dokumen	345.058.200,00	0	37,26	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
5.	4.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Dokumen	137.885.447	0 Dokumen	8.886.200	1 Dokumen	239.942.600	1 Dokumen	226.765.700	100	94,51	1 Dokumen	235.651.900,00	0	170,9	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
6.	4.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0 Laporan	91.741.007	0 Laporan	19.065.400	12 Laporan	331.587.000	12 Laporan	272.866.300	100	82,29	12 Laporan	291.931.700,00	0	318,21	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	75,29			0	135,98		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP	0%	0	100%	1.054.125.000	100%	921.725.000	100%	901.550.000	100	97,81	100%	901.550.000,00	0	0		Tercapai
7.	4.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	0	0 Paket	1.054.125.000	1 Paket	921.725.000	1 Paket	901.550.000	100	97,81	1 Paket	1.955.675.000,00	0	0	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	97,81			0	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	23.330.903.182	100%	20.267.175.956	100%	35.062.961.250	100%	32.208.625.833	100	91,86	100%	32.208.625.833,00	100	138,05		Tercapai
8.	4.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	1.474.610.000	0 Paket	1.249.779.900	2 Paket	2.765.083.000	1 Paket	2.726.388.275	50	98,6	1 Paket	3.976.168.175,00	0	269,64	SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Tercapai
9.	4.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Paket	3.203.244.030	0 Paket	9.272.229.060	1 Paket	11.782.942.450	1 Paket	11.255.405.900	100	95,52	1 Paket	20.527.634.960,00	0	640,84	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
10.	4.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket	1.536.455.015	0 Paket	3.769.693.100	1 Paket	8.182.815.000	1 Paket	8.127.973.400	100	99,33	1 Paket	11.897.666.500,00	0	774,36	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
11.	4.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket	4.124.670.000	0 Paket	959.792.000	1 Paket	1.082.009.800	1 Paket	1.078.904.400	100	99,71	1 Paket	2.038.696.400,00	0	49,43	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
12.	4.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	1.350.080.845	0 Paket	609.886.250	1 Paket	1.566.642.000	1 Paket	1.468.204.000	100	93,72	1 Paket	2.078.090.250,00	0	153,92	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
13.	4.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan	11.641.843.292	0 Laporan	4.405.795.646	467 Laporan	9.683.469.000	467 Laporan	7.551.749.858	100	77,99	467 Laporan	11.957.545.504,00	0	102,71	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		91,67	94,14			0	331,82		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	23.213.334.987	12 Bulan	7.155.277.511	12 Bulan	11.258.956.400	12 Bulan	10.445.723.891	100	92,78	12 Bulan	10.445.723.891,00	16,67	45		Tercapai
14.	4.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0 Laporan	13.457.141.869	0 Laporan	2.614.932.311	12 Laporan	3.729.000.000	12 Laporan	3.166.645.961	100	84,92	12 Laporan	5.781.578.272,00	0	42,96	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
15.	4.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0 Laporan	1.949.261.312	0 Laporan	2.082.706.200	12 Laporan	3.537.560.400	12 Laporan	3.288.373.230	100	92,96	12 Laporan	5.371.079.430,00	0	275,54	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
16.	4.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	7.806.931.806	0 Laporan	2.457.639.000	12 Laporan	3.992.396.000	12 Laporan	3.990.704.700	100	99,96	12 Laporan	6.448.343.700,00	0	82,6	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,61			0	133,7		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	35.318.372.368	12 Bulan	23.469.684.520	12 Bulan	32.878.942.723	12 Bulan	30.597.740.336	100	93,06	12 Bulan	30.597.740.336,00	16,67	86,63		Tercapai
17.	4.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	0 Unit	7.174.353.513	0 Unit	2.358.542.470	50 Unit	18.912.843.950	50 Unit	17.500.073.004	100	92,53	50 Unit	17.500.073.004,00	0	243,93	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
18.	4.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0 Unit	1.961.815.977	0 Unit	484.690.000	20 Unit	805.509.000	20 Unit	770.795.000	100	95,69	20 Unit	770.795.000,00	0	39,29	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
19.	4.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	16.438.094.474	0 Unit	17.647.461.550	3 Unit	7.944.367.273	3 Unit	7.677.139.832	100	96,64	3 Unit	7.677.139.832,00	0	46,7	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
20.	4.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	7.119.515.954	0 Unit	1.659.216.500	3 Unit	2.292.275.000	3 Unit	2.107.190.000	100	91,93	3 Unit	2.107.190.000,00	0	29,6	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
21.	4.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	2.624.592.450	0 Unit	1.319.774.000	3 Unit	2.923.947.500	3 Unit	2.542.542.500	100	86,96	3 Unit	2.542.542.500,00	0	96,87	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,75			0	91,28		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase pimpinan yang dilayani administrasi keuangannya	100%	5.466.482.595	100%	1.795.152.673	100%	2.385.197.800	100%	2.207.784.807	100	92,56	100%	2.207.784.807,00	100	40,39		Tercapai
22.	4.01.01.2.11.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang / Bulan	1.698.177.995	0 Orang / Bulan	164.435.673	2 Orang / Bulan	261.157.800	1 Orang / Bulan	83.784.807	50	32,08	1 Orang / Bulan	83.784.807,00	0	4,93	SEKRETARIAT DAERAH	Tidak Tercapai
23.	4.01.01.2.11.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	0 Paket	737.305.000	0 Paket	1.231.617.000	1 Paket	1.724.040.000	1 Paket	1.724.000.000	100	100	1 Paket	2.955.617.000,00	0	400,87	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
24.	4.01.01.2.11.04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	0 Orang / Bulan	3.030.999.600	0 Orang / Bulan	399.100.000	2 Orang / Bulan	400.000.000	2 Orang / Bulan	400.000.000	100	100	2 Orang / Bulan	799.100.000,00	0	26,36	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		83,33	77,36			0	144,06		Tidak Tercapai

											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase SKPD yang memiliki nilai budaya kerja baik (SKPD)	50%	6.439.812.272	58%	1.089.279.627	33.33 %	3.007.121.000	37,50%	2.973.020.905	112,51	98,87	37.5 %	2.973.020.905,00	75	46,17		Melebihi Target
			Nilai laporan kinerja Pemda	15 Nilai		12.8 Nilai		14.26 Nilai		14,26 Nilai		100		14 Nilai		95,07			Tercapai
			Persentase SKPD dengan kualifikasi nilai SAKIP BB	100%		66.67 %		63.33 %		76%		120,01		76%		76			Melebihi Target
			Persentase SKPD dengan dokumen jabatan lengkap (anjab, abk evajab)	100%		100%		100%		100%		100		100%		100			Tercapai
			Persentase SKPD yang melaksanakan tata laksana dengan baik	100%		100%		100%		100%		100		100%		100			Tercapai
			Nilai IPP SKPD Sampel	100 Nilai		100 Nilai		100 Nilai		100 Nilai		100		100 Nilai		100			Tercapai
			Nilai Komposit Kelembagaan	84 Nilai		0 Nilai		78.4 Nilai		78,4 Nilai		100		78 Nilai		93,33			Tercapai
			Nilai IKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan non UPP yang bernilai Baik	88 Nilai		0 Nilai		84 Nilai		84 Nilai		100		84 Nilai		95,45			Tercapai
25.	4.01.01.2.13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	0 Dokumen	2.412.136.151	0 Dokumen	477.586.095	65 Dokumen	592.333.000	65 Dokumen	577.636.414	100	97,52	65 Dokumen	1.055.222.509,00	0	43,75	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
26.	4.01.01.2.13.02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	0 Laporan	2.024.808.431	0 Laporan	312.894.143	4 Laporan	486.223.000	4 Laporan	477.984.528	100	98,31	4 Laporan	790.878.671,00	0	39,06	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
27.	4.01.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	0 Dokumen	2.002.867.690	0 Dokumen	298.799.389	4 Dokumen	1.928.565.000	4 Dokumen	1.917.399.963	100	99,42	4 Dokumen	2.216.199.352,00	0	110,65	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,42			0	64,49		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase Kebijakan Bidang Ke Protokolan Komunikasi Pimpinan dan Dokumentasi yang Terlaksana	100%	9.393.265.478	0%	1.933.265.833	100%	2.025.674.300	100%	1.927.840.590	100	95,17	100%	1.927.840.590,00	100	20,52		Tercapai
28.	4.01.01.2.14.01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	0 Laporan	4.754.282.678	0 Laporan	943.738.588	1 Laporan	670.786.500	1 Laporan	646.718.570	100	96,41	1 Laporan	1.590.457.158,00	0	33,45	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
29.	4.01.01.2.14.02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	0 Laporan	1.092.549.030	0 Laporan	422.054.949	1 Laporan	683.716.000	1 Laporan	640.444.902	100	93,67	1 Laporan	1.062.499.851,00	0	97,25	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
30.	4.01.01.2.14.03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	0 Laporan	3.546.433.770	0 Laporan	567.472.296	5 Laporan	671.171.800	5 Laporan	640.677.118	100	95,46	5 Laporan	1.208.149.414,00	0	34,07	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,18			0	54,92		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	102,03	52,3			38,02	41,04		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)**	**100%**	**123.465.735.168**	**100%**	**38.038.282.353**	**100%**	**91.135.547.100**	**75%**	**86.330.173.497**	**75**	**94,73**	**75%**	**86.330.173.497,00**	**75**	**69,92**		**Tidak Tercapai**
			Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	100%		100%		100%		75%		75		75,00%		75			Tidak Tercapai
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Kebijakan di Bidang Pemerintahan yang diimplementasikan /diterapkan oleh SKPD	100%	4.594.253.913	0%	1.001.233.078	100%	1.622.780.300	100%	1.554.465.925	100	95,79	100%	2.555.699.003,00	100	55,63		Tercapai
31.	4.01.02.2.01.01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	0 Dokumen	1.995.195.918	0 Dokumen	526.173.620	4 Dokumen	797.109.600	4 Dokumen	760.669.059	100	95,43	4 Dokumen	1.286.842.679,00	0	64,5	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
32.	4.01.02.2.01.02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	0 Dokumen	1.511.554.200	0 Dokumen	245.048.000	2 Dokumen	455.851.700	2 Dokumen	445.142.129	100	97,65	2 Dokumen	690.190.129,00	0	45,66	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
33.	4.01.02.2.01.03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	0 Dokumen	1.087.503.795	0 Dokumen	230.011.458	3 Dokumen	369.819.000	3 Dokumen	348.654.737	100	94,28	3 Dokumen	578.666.195,00	0	53,21	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,79			0	54,46		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Kebijakan Bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat yang Terlaksana	100%	114.345.105.591	0%	35.441.051.943	100%	87.986.094.800	100%	83.430.656.675	100	94,82	100%	118.871.708.618,00	100	103,96		Tercapai
34.	4.01.02.2.02.01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	0 Dokumen	76.930.615.008	0 Dokumen	9.563.807.821	5 Dokumen	13.749.878.200	5 Dokumen	13.436.374.244	100	97,72	5 Dokumen	23.000.182.065,00	0	29,9	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
35.	4.01.02.2.02.02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	0 Dokumen	36.451.363.765	0 Dokumen	25.768.549.706	3 Dokumen	67.874.205.600	3 Dokumen	64.876.373.777	100	95,58	3 Dokumen	90.644.923.483,00	0	248,67	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
36.	4.01.02.2.02.03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	0 Dokumen	963.126.818	0 Dokumen	108.694.416	2 Dokumen	6.362.011.000	2 Dokumen	5.117.908.654	100	80,44	2 Dokumen	5.226.603.070,00	0	542,67	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	91,25			0	273,75		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum, Bantuan Hukum dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah	100%	4.147.805.666	0%	1.168.791.704	100%	1.149.842.000	100%	1.010.816.697	100	87,91	100%	2.179.608.401,00	100	52,55		Tercapai
37.	4.01.02.2.03.01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	0 Dokumen	2.365.749.193	0 Dokumen	597.972.526	500 Dokumen	603.479.000	500 Dokumen	597.047.730	100	98,93	500 Dokumen	1.195.020.256,00	0	50,51	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
38.	4.01.02.2.03.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	0 Kasus	1.118.756.000	0 Kasus	338.697.500	10 Kasus	364.601.000	10 Kasus	236.761.762	100	64,94	10 Kasus	575.459.262,00	0	51,44	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
39.	4.01.02.2.03.03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	0 Dokumen	663.300.473	0 Dokumen	232.121.678	500 Dokumen	181.762.000	500 Dokumen	177.007.205	100	97,38	500 Dokumen	409.128.883,00	0	61,68	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	87,09			0	54,54		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokume kesepakatan kerjasama daerah yang ditindaklanjuti	60 Dokumen	378.569.998	0 Dokumen	427.205.628	10 Dokumen	376.830.000	10 Dokumen	334.234.200	100	88,7	10 Dokumen	761.439.828,00	16,67	201,14		Tercapai
40.	4.01.02.2.04.01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	0 Dokumen	378.569.998	0 Dokumen	427.205.628	10 Dokumen	376.830.000	10 Dokumen	334.234.200	100	88,7	10 Dokumen	761.439.828,00	0	201,14	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	88,7			0	201,14		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	91,8			79,17	103,32		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
3.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Persentase kebijakan di bidang Perekonomian dan Pembangunan yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD**	**100%**	**9.150.603.435**	**100%**	**2.223.747.458**	**100%**	**4.197.285.350**	**75%**	**3.273.556.435**	**75**	**77,99**	**75%**	**3.273.556.435,00**	**75**	**35,77**		**Tidak Tercapai**
			Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi	100%		100%		100%		75%		75		75,00%		75			Tidak Tercapai
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	100%	2.428.699.666	0%	817.016.260	100%	1.373.991.500	100%	958.994.479	100	69,8	100%	1.776.010.739,00	100	73,13		Tercapai
41.	4.01.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	0 Dokumen	381.935.608	0 Dokumen	65.021.878	4 Dokumen	226.820.000	4 Dokumen	150.891.002	100	66,52	4 Dokumen	215.912.880,00	0	56,53	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
42.	4.01.03.2.01.02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	0 Laporan	912.673.498	0 Laporan	372.022.859	4 Laporan	536.541.500	4 Laporan	462.161.919	100	86,14	4 Laporan	834.184.778,00	0	91,4	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai

43.	4.01.03.2.01.03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	0 Dokumen	467.964.997	0 Dokumen	228.534.573	1 Dokumen	459.300.000	1 Dokumen	252.820.491	100	55,04	1 Dokumen	481.355.064,00	0	102,86	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
44.	4.01.03.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	0 Dokumen	666.125.563	0 Dokumen	151.436.950	1 Dokumen	151.330.000	1 Dokumen	93.121.067	100	61,54	1 Dokumen	244.558.017,00	0	36,71	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	67,31			0	71,88		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Bahan Kebijakan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program dan Evaluasi Pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	1.945.718.563	0%	401.538.894	100%	1.040.072.000	100%	689.911.062	100	66,33	100%	1.091.449.956,00	100	56,09		Tercapai
45.	4.01.03.2.02.01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	0 Dokumen	734.309.250	0 Dokumen	112.369.894	4 Dokumen	493.999.000	4 Dokumen	311.388.291	100	63,03	4 Dokumen	423.758.185,00	0	57,71	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
46.	4.01.03.2.02.02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	0 Laporan	773.820.890	0 Laporan	159.841.000	1 Laporan	209.240.000	1 Laporan	131.006.891	100	62,61	1 Laporan	290.847.891,00	0	37,59	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
47.	4.01.03.2.02.03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	0 Laporan	437.588.423	0 Laporan	129.328.000	4 Laporan	336.833.000	4 Laporan	247.515.880	100	73,48	4 Laporan	376.843.880,00	0	86,12	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	66,38			0	60,47		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah		
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks Tata Kelola PBJ	52 Nilai	3.720.226.391	0 Nilai	902.149.520	50 Nilai	1.567.661.650	50 Nilai	1.431.880.088	100	91,34	50 Nilai	2.334.029.608,00	96,15	62,74		Tercapai
48.	4.01.03.2.03.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	0 Dokumen	1.269.776.058	0 Dokumen	253.537.204	1 Dokumen	399.249.000	1 Dokumen	379.330.921	100	95,01	1 Dokumen	632.868.125,00	0	49,84	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
49.	4.01.03.2.03.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	0 Dokumen	1.180.581.688	0 Dokumen	337.906.374	1 Dokumen	340.918.750	1 Dokumen	313.879.975	100	92,07	1 Dokumen	651.786.349,00	0	55,21	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
50.	4.01.03.2.03.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	0 Orang	1.269.868.645	0 Orang	310.705.942	6 Orang	827.493.900	6 Orang	738.669.192	100	89,27	6 Orang	738.669.192,00	0	58,17	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,12			0	54,41		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Kebijakan Bidang Pembinaan BUMD, BLUD Perekonomian dan SDA yang Terlaksana	100%	1.055.958.815	0%	103.042.784	100%	215.560.200	100%	192.770.806	100	89,43	100%	295.813.590,00	100	28,01		Tercapai
51.	4.01.03.2.04.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	0 Dokumen	269.382.813	0 Dokumen	0	1 Dokumen	58.199.000	1 Dokumen	47.311.332	100	81,29	1 Dokumen	47.311.332,00	0	17,56	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
52.	4.01.03.2.04.02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	0 Dokumen	504.262.814	0 Dokumen	103.042.784	1 Dokumen	95.632.000	1 Dokumen	91.445.574	100	95,62	1 Dokumen	194.488.358,00	0	38,57	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
53.	4.01.03.2.04.03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	0 Dokumen	282.313.188	0 Dokumen	0	1 Dokumen	61.729.200	1 Dokumen	54.013.900	100	87,5	1 Dokumen	54.013.900,00	0	19,13	SEKRETARIAT DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	88,14			0	25,09		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		101,36	79,22			99,04	54,99		
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		80	87,29			50	31,73		
										Predikat Kinerja (Program)		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**98,11**	**92,4**			**0**	**129,86**		
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**203.756.090.549**			**188.264.767.019**						

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	*Peraturan Bupati Balangan Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengganggaran,Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 2.Tersedianya SK Bupati tentang Daftar
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD**	**75 Baik**	**35.203.670.816**	**63.15 Baik**	**29.305.867.063**	**70 Baik**	**37.608.214.776**	**72,2 Baik**	**32.430.508.942**	**103,14**	**86,23**	**72.2 Baik**	**32.430.508.942,00**	**96,27**	**92,12**		**Melebihi Target**
			Prosentase pemenuhan administrasi laporan keuangan	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100,00 Persen		100			Tercapai
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100,00 Persen		100			Tercapai
			Prosentase Pemenuhan Administrasi Sarana dan Prasarana	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100,00 Persen		100			Tercapai
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen dan Laporan Perencanaan dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100 Persen	530.213.800	100 Persen	290.823.800	100 Persen	437.908.000	100 Persen	331.425.269	100	75,68	100 Persen	331.425.269,00	100	62,51		Tercapai
1.	4.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	40 Dokumen	61.545.000	4 Dokumen	69.125.000	3 Dokumen	70.009.800	3 Dokumen	64.170.000	100	91,66	7 Dokumen	133.295.000,00	17,5	216,58	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
2.	4.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	80 Dokumen	81.131.300	6 Dokumen	75.824.800	2 Dokumen	30.319.600	2 Dokumen	26.716.500	100	88,12	8 Dokumen	102.541.300,00	10	126,39	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
3.	4.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	59.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	40.352.000	1 Dokumen	21.688.500	100	53,75	1 Dokumen	21.688.500,00	33,33	36,76	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
4.	4.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	202.537.500	6 Laporan	145.874.000	3 Laporan	199.669.300	3 Laporan	143.664.369	100	71,95	9 Laporan	289.538.369,00	75	142,96	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	76,37			33,96	130,67		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Terfasilitasinya administrasi dan pelaporan keuangan SOPD	72 bulan	3.018.157.288	12 bulan	2.599.512.149	12 bulan	3.491.563.546	12 bulan	3.320.377.977	100	95,1	24 bulan	5.919.890.126,00	33,33	196,14		Tercapai
5.	4.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	56.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	36.401.200	2 Dokumen	32.183.800	100	88,41	2 Dokumen	32.183.800,00	33,33	57,47	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
6.	4.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	47.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	54.000.800	1 Dokumen	35.954.600	100	66,58	1 Dokumen	35.954.600,00	33,33	76,5	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
7.	4.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 Dokumen	23.000.000	0 Dokumen	0	6 Dokumen	7.155.300	6 Dokumen	7.047.500	100	98,49	6 Dokumen	7.047.500,00	33,33	30,64	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
8.	4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang / Bulan	2.892.111.288	21 Orang / Bulan	2.554.562.149	23 Orang / Bulan	3.426.961.946	22 Orang / Bulan	3.274.827.577	95,65	95,56	43 Orang / Bulan	5.829.389.726,00	28,67	201,56	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
9.	4.02.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	31.000.000	0 Dokumen	0	4 Dokumen	17.366.500	4 Dokumen	16.131.000	100	92,89	4 Dokumen	16.131.000,00	33,33	52,04	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai

10.	4.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	47.080.000	4 Laporan	14.280.000	1 Laporan	15.676.700	1 Laporan	13.661.000	100	87,14	5 Laporan	27.941.000,00	83,33	59,35	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
11.	4.02.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	16.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	5.023.600	1 Dokumen	4.898.400	100	97,51	1 Dokumen	4.898.400,00	33,33	30,62	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
12.	4.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	70 Laporan	31.966.000	6 Laporan	30.670.000	3 Laporan	26.534.800	3 Laporan	10.860.000	100	40,93	9 Laporan	41.530.000,00	12,86	129,92	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		99,46	83,44			36,44	79,76		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentse Tersedianya administrasi perangkat daerah	100 Persen	659.120.000	100 Persen	719.726.576	100 Persen	939.272.000	100 Persen	642.837.364	100	68,44	100 Persen	642.837.364,00	100	97,53		Tercapai
13.	4.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	12 Paket	88.000.000	2 Paket	80.000.000	2 Paket	281.974.000	2 Paket	268.131.000	100	95,09	4 Paket	348.131.000,00	33,33	395,6	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
14.	4.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	348 Orang/Kegiatan	571.120.000	68 Orang/Kegiatan	639.726.576	75 Orang/Kegiatan	657.298.000	50 Orang/Kegiatan	374.706.364	66,67	57,01	118 Orang/Kegiatan	1.014.432.940,00	33,91	177,62	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		83,33	76,05			33,62	286,61		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu pelaksanaan administrasi umum	72 Bulan	5.693.977.900	12 Bulan	3.951.059.029	12 Bulan	4.651.806.800	12 Bulan	4.515.523.330	100	97,07	24 Bulan	8.466.582.359,00	33,33	148,69		Tercapai
15.	4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	19 Paket	55.018.700	4 Paket	74.595.000	3 Paket	75.205.100	3 Paket	74.622.579	100	99,23	7 Paket	149.217.579,00	36,84	271,21	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
16.	4.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 paket	232.540.000	4 paket	558.946.760	7 paket	1.036.286.700	7 paket	990.359.900	100	95,57	11 paket	1.549.306.660,00	55	666,25	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
17.	4.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	15 Paket	860.000.000	0 Paket	0	4 Paket	95.830.800	4 Paket	93.264.000	100	97,32	4 Paket	93.264.000,00	26,67	10,84	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
18.	4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket	1.250.000.000	0 Paket	0	6 Paket	684.720.600	6 Paket	683.078.750	100	99,76	6 Paket	683.078.750,00	30	54,65	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
19.	4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	30 paket	85.800.000	4 paket	91.730.000	7 paket	108.377.100	7 paket	108.143.800	100	99,78	11 paket	199.873.800,00	36,67	232,95	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
20.	4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen	161.315.000	10 Dokumen	262.750.000	12 Dokumen	214.658.500	12 Dokumen	211.136.000	100	98,36	22 Dokumen	473.886.000,00	44	293,76	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
21.	4.02.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8 Paket	432.000.000	0 Paket	0	4 Paket	135.888.000	4 Paket	110.185.625	100	81,09	4 Paket	110.185.625,00	50	25,51	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
22.	4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan	500.000.000	0 Laporan	0	21 Laporan	199.600.000	20 Laporan	190.000.000	95,24	95,19	20 Laporan	190.000.000,00	33,33	38	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
23.	4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKP	1500 Laporan	2.117.304.200	235 Laporan	2.963.037.269	260 Laporan	2.101.240.000	250 Laporan	2.054.732.676	96,15	97,79	485 Laporan	5.017.769.945,00	32,33	236,99	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		99,04	96,01			38,32	203,35		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan barang milik daerah yang di sediakan	n/a	0	n/a	0	n/a	5.000.000.000	n/a	2.252.049.000	0	0	n/a	2.252.049.000	0	0		Tidak Tercapai
24.	4.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas / oprasional lapangan yanggi sediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	700.000.000	1 Unit	0	100	0	1 Unit	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
25.	4.02.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel yang di sediakan	0 Paket	0	0 Paket	0	3 Paket	830.000.000	3 Paket	0	100	0	3 Paket	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
26.	4.02.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	0 Unit	0	0 Unit	0	12 Unit	970.000.000	12 Unit	0	100	0	12 Unit	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	0			0	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 Bulan	2.822.639.170	12 Bulan	2.098.659.419	12 Bulan	3.277.850.900	12 Bulan	2.794.368.043	100	85,25	24 Bulan	4.893.027.462,00	33,33	173,35		Tercapai
30.	4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	795.300.220	12 Laporan	320.273.931	12 Laporan	491.100.000	12 Laporan	373.966.386	100	76,15	24 Laporan	694.240.317,00	40	87,29	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
31.	4.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Laporan	560.000.000	0 Laporan	0	6 Laporan	145.495.400	6 Laporan	102.375.000	100	70,36	6 Laporan	102.375.000,00	33,33	18,28	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
32.	4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1.467.338.950	12 Laporan	1.778.385.488	12 Laporan	2.641.255.500	12 Laporan	2.318.026.657	100	87,76	24 Laporan	4.096.412.145,00	33,33	279,17	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	78,09			35,56	128,25		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Bulan	5.348.403.000	12 Bulan	4.406.559.599	12 Bulan	2.089.294.100	12 Bulan	2.045.739.222	100	97,92	24 Bulan	6.452.298.821,00	200	120,64		Tercapai
33.	4.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100 Unit	227.788.000	20 Unit	434.226.049	6 Unit	231.664.600	6 Unit	229.395.589	100	99,02	26 Unit	663.621.638,00	26	291,33	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
34.	4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit	1.100.000.000	0 Unit	0	20 Unit	436.340.500	20 Unit	428.712.746	100	98,25	20 Unit	428.712.746,00	50	38,97	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
35.	4.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit	270.000.000	0 Unit	0	20 Unit	194.265.000	20 Unit	181.250.000	100	93,3	20 Unit	181.250.000,00	50	67,13	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
36.	4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 Unit	3.750.615.000	12 Unit	3.972.333.550	6 Unit	1.227.024.000	6 Unit	1.206.380.887	100	98,32	18 Unit	5.178.714.437,00	72	138,08	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	97,22			49,5	133,88		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	125 Bulan	16.211.804.298	25 Bulan	13.977.916.741	25 Bulan	15.969.369.530	25 Bulan	14.959.575.124	100	93,68	50 Bulan	28.937.491.865,00	40	178,5		Tercapai
37.	4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD Yang menerima hak dan keuangan DPRD	125 Orang / Bulan	15.375.504.298	25 Orang / Bulan	13.319.615.141	25 Orang / Bulan	15.140.823.630	25 Orang / Bulan	14.212.165.124	100	93,87	50 Orang / Bulan	27.531.780.265,00	40	179,06	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
38.	4.02.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	21 Paket	586.300.000	5 Paket	622.771.600	5 Paket	800.545.900	5 Paket	747.410.000	100	93,36	10 Paket	1.370.181.600,00	47,62	233,7	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
39.	4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	75 Orang	250.000.000	17 Orang	35.530.000	25 Orang	28.000.000	0 Orang	0	0	0	17 Orang	35.530.000,00	22,67	14,21	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		66,67	62,41			36,76	142,32		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Waktu Penyediaan Layanan keuangan dan Kesejahteraan DPRD	72 Bulan	919.355.360	12 Bulan	1.261.609.750	12 Bulan	1.751.149.900	12 Bulan	1.568.613.613	100	89,58	24 Bulan	2.830.223.363,00	33,33	307,85		Tercapai
40.	4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	20 Paket	919.355.360	4 Paket	1.261.609.750	7 Paket	1.751.149.900	7 Paket	1.568.613.613	100	89,58	11 Paket	2.830.223.363,00	55	307,85	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	89,58			55	307,85		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		80	70,27			57,33	128,52		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi		
2.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Peningkatan Nilai Indeks Kepuasan Masyrakat (IKM)**	**85 IKM**	**14.612.961.527**	**84.88 IKM**	**14.304.649.255**	**73 IKM**	**27.536.147.700**	**82,87 IKM**	**23.146.694.214**	**113,52**	**84,06**	**82.87 IKM**	**23.146.694.214,00**	**97,49**	**158,4**		**Melebihi Target**
			PRESENTASE RAPERDA YANG TELAH DIBAHAS OLEH DPRD DAN DISAMPAIKAN KE BAGIAN HUKUM	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100,00 Persen		100			Tercapai

			PRESENTASE KEGIATAN DPRD YANG TERPUBLIKASI DAN TERAKSES OLEH PUBLIK	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100,00 Persen		100			Tercapai
			PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100,00 Persen		100			Tercapai
			PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAANKEUANGAN DAERAH	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100,00 Persen		100			Tercapai
			PRESENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIR(DI BAHAS) OLEH DPRD	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100,00 Persen		100			Tercapai
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Presentase Raperda yang telah di bahas oleh DPRD dan telah di sampaikan ke bagian hukum	100 Persen	4.958.304.560	100 Persen	4.921.547.803	100 Persen	9.647.213.300	100 Persen	8.073.020.208	100	83,68	100 Persen	8.073.020.208,00	100	162,82		Tercapai
41.	4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	15 Dokumen	881.483.240	3 Dokumen	610.575.630	7 Dokumen	2.116.761.000	7 Dokumen	1.769.091.113	100	83,58	10 Dokumen	2.379.666.743,00	66,67	269,96	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
42.	4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	39 Dokumen	3.681.671.400	12 Dokumen	3.765.741.467	20 Dokumen	5.686.224.500	20 Dokumen	4.783.183.152	100	84,12	32 Dokumen	8.548.924.619,00	82,05	232,2	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
43.	4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	17 Dokumen	188.162.920	5 Dokumen	206.665.906	7 Dokumen	1.325.147.800	7 Dokumen	1.026.665.943	100	77,48	12 Dokumen	1.233.331.849,00	70,59	655,46	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
44.	4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	11 Dokumen	206.987.000	5 Dokumen	338.564.800	6 Dokumen	519.080.000	6 Dokumen	494.080.000	100	95,18	11 Dokumen	832.644.800,00	100	402,27	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	85,09			79,83	389,97		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	PRESENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	100 Persen	338.255.280	100 Persen	158.404.800	100 Persen	205.156.800	100 Persen	195.322.000	100	95,21	100 Persen	195.322.000,00	100	57,74		Tercapai
			PERSENTASE PEMENUHAN DOKUMEN PERENCANAANKEUANGAN DAERAH	100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100 Persen		100			Tercapai
45.	4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	14 Dokumen	50.776.000	2 Dokumen	11.240.000	1 Dokumen	15.968.800	1 Dokumen	13.500.000	100	84,54	3 Dokumen	24.740.000,00	21,43	48,72	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
46.	4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	13 Dokumen	48.510.000	2 Dokumen	3.960.000	1 Dokumen	12.452.200	1 Dokumen	12.000.000	100	96,37	3 Dokumen	15.960.000,00	23,08	32,9	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
47.	4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	23 Dokumen	90.359.280	2 Dokumen	68.924.800	1 Dokumen	85.456.800	1 Dokumen	84.966.000	100	99,43	3 Dokumen	153.890.800,00	13,04	170,31	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
48.	4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	23 Dokumen	79.475.000	2 Dokumen	70.480.000	1 Dokumen	82.889.000	1 Dokumen	79.856.000	100	96,34	3 Dokumen	150.336.000,00	13,04	189,16	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
49.	4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	22 Dokumen	20.460.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	2.942.800	0 Dokumen	0	0	0	1 Dokumen	0	4,55	0	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
50.	4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	13 Dokumen	48.675.000	2 Dokumen	3.800.000	1 Dokumen	5.447.200	1 Dokumen	5.000.000	100	91,79	3 Dokumen	8.800.000,00	23,08	18,08	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		83,33	78,08			16,37	76,53		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	prosentase Rapat kerja yang difasilitasi dengan baik	100 Persen	1.361.619.577	100 Persen	135.340.000	100 Persen	166.545.400	100 Persen	152.104.000	100	91,33	100 Persen	152.104.000,00	100	11,17		Tercapai
51.	4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	20 Laporan	245.619.920	3 Laporan	27.060.000	3 Laporan	21.087.600	3 Laporan	18.587.600	100	88,14	6 Laporan	45.647.600,00	30	18,58	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
52.	4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	20 Laporan	217.412.969	3 Laporan	26.990.000	3 Laporan	19.716.400	3 Laporan	19.016.400	100	96,45	6 Laporan	46.006.400,00	30	21,16	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
53.	4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	20 Laporan	218.695.040	0 Laporan	0	4 Laporan	18.042.000	4 Laporan	17.500.000	100	97	4 Laporan	17.500.000,00	20	8	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
54.	4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	20 Laporan	217.412.969	0 Laporan	25.200.000	3 Laporan	16.035.200	3 Laporan	15.500.000	100	96,66	3 Laporan	40.700.000,00	15	18,72	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
55.	4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	20 Laporan	33.209.000	0 Laporan	0	1 Laporan	7.866.400	1 Laporan	7.500.000	100	95,34	1 Laporan	7.500.000,00	5	22,58	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
56.	4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	5 Dokumen	55.800.614	0 Dokumen	0	1 Dokumen	2.904.600	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
57.	4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	20 Dokumen	196.617.452	4 Dokumen	23.170.000	3 Dokumen	20.539.200	3 Dokumen	14.000.000	100	68,16	7 Dokumen	37.170.000,00	35	18,9	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
58.	4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	10 Laporan	176.851.613	2 Laporan	32.920.000	2 Laporan	60.354.000	2 Laporan	60.000.000	100	99,41	4 Laporan	92.920.000,00	40	52,54	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		87,5	80,15			21,88	20,06		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang mendapat sertifikat Peningkatan Kapasitas	100 Persen	2.112.049.500	100 Persen	2.127.236.004	100 Persen	3.549.129.200	100 Persen	2.714.356.830	100	76,48	100 Persen	2.714.356.830,00	100	128,52		Tercapai
59.	4.02.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	375 Dokumen	961.620.000	75 Dokumen	928.378.803	75 Dokumen	1.326.361.000	58 Dokumen	793.234.130	77,33	59,81	133 Dokumen	1.721.612.933,00	35,47	179,03	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
60.	4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	65 Dokumen	808.104.000	13 Dokumen	991.477.201	75 Dokumen	1.928.178.200	60 Dokumen	1.679.661.700	80	87,11	73 Dokumen	2.671.138.901,00	112,31	330,54	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
61.	4.02.02.2.04.06	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	60 Dokumen	135.850.000	12 Dokumen	87.760.000	12 Dokumen	88.675.000	9 Dokumen	81.311.000	75	91,7	21 Dokumen	169.071.000,00	35	124,45	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
62.	4.02.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	16 Dokumen	206.475.500	4 Dokumen	119.620.000	5 Dokumen	205.915.000	5 Dokumen	160.150.000	100	77,77	9 Dokumen	279.770.000,00	56,25	135,5	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		83,08	79,1			59,76	192,38		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi		
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	PRESENTASE ASPIRASI MASYARAKAT YANG DAPAT DI AKOMODIR(DI BAHAS) OLEH DPRD	100 Persen	1.130.770.300	100 Persen	1.063.652.750	100 Persen	2.474.596.300	100 Persen	2.395.656.200	100	96,81	100 Persen	2.395.656.200,00	100	211,86		Tercapai
63.	4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	250 Laporan	62.700.000	57 Laporan	34.364.750	57 Laporan	57.150.000	57 Laporan	37.745.000	100	66,05	114 Laporan	72.109.750,00	45,6	115,01	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
64.	4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	10 Dokumen	43.120.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	59.717.300	2 Dokumen	49.530.400	100	82,94	4 Dokumen	49.530.400,00	40	114,87	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
65.	4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	375 Dokumen	1.024.950.300	75 Dokumen	1.029.288.000	75 Dokumen	2.357.729.000	75 Dokumen	2.308.380.800	100	97,91	150 Dokumen	3.337.668.800,00	40	325,64	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	82,3			41,87	185,17		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Dokumen Kerja sama antar daerah yang di setujui	100 Persen	322.932.500	100 Persen	156.634.432	100 Persen	503.263.600	100 Persen	295.692.059	100	58,75	100 Persen	295.692.059,00	100	91,56		Tercapai
66.	4.02.02.2.07.02	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	350 Dokumen	322.932.500	100 Dokumen	156.634.432	70 Dokumen	503.263.600	36 Dokumen	295.692.059	51,43	58,75	136 Dokumen	452.326.491,00	38,86	140,07	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		51,43	58,75			38,86	140,07		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase fasilitasi Tugas dan Fungsi DPRD	100 Persen	4.389.029.810	100 Persen	5.741.833.466	100 Persen	10.990.243.100	100 Persen	9.320.542.917	100	84,81	100 Persen	9.320.542.917,00	100	212,36		Tercapai
67.	4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	500 Dokumen	3.913.483.310	85 Dokumen	5.456.423.466	25 Dokumen	10.591.737.800	19 Dokumen	9.025.517.917	76	85,21	104 Dokumen	14.481.941.383,00	20,8	370,05	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
68.	4.02.02.2.08.02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	210 Laporan	57.821.500	42 Laporan	42.490.000	40 Laporan	88.797.100	38 Laporan	48.325.000	95	54,42	80 Laporan	90.815.000,00	38,1	157,06	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai
69.	4.02.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	60 Dokumen	90.750.000	12 Dokumen	32.800.000	12 Dokumen	67.600.000	12 Dokumen	56.200.000	100	83,14	24 Dokumen	89.000.000,00	40	98,07	SEKRETARIAT DPRD	Tercapai
70.	4.02.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	225 Dokumen	326.975.000	40 Dokumen	210.120.000	45 Dokumen	242.108.200	40 Dokumen	190.500.000	88,89	78,68	80 Dokumen	400.620.000,00	35,56	122,52	SEKRETARIAT DPRD	Tidak Tercapai

												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		89,97	75,36			33,61	186,93		
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		88,89	73,38			87,5	109,5		
												Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		92,42	84,93			19,38	25,05		
												Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**84,93**	**85,31**			**34,85**	**137,31**		
												Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
								Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**65.144.362.476**		**55.577.203.156**										
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Ketersediaan dana yang mencukupi memfasilitasi kegiatan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD serta capaian terget kinerja yang tercapai.																		
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		- Rencana kerja perjalanan dinas DPRD yang sering berubah tujuan, sehingga dana perjalanan dinas yang silpa nya cukup besar karena prediksi perencanaan awal dengan tujuan perjalanan dinas menggunakan penerbangan.																		
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Akan lebih memperhitungkan kebutuhan fasilitasi anggaran Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
1.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Inspektorat**	**74 Nilai**	**68.490.740.438**	**76.02 Nilai**	**10.449.907.530**	**72 Nilai**	**18.971.538.960**	**73,95 Nilai**	**15.748.603.169**	**102,71**	**83,01**	**149.97 Nilai**	**26.198.510.699,00**	**202,66**	**38,25**		**Melebihi Target**
			Nilai IKM Inspektorat	88.3 Nilai		0 Nilai		88.87 Nilai		88,87 Nilai		100		88,87 Nilai		100,65			Tercapai
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang Disampaikan Dengan Baik	100 Persen	373.439.580	100 Persen	70.228.424	100 Persen	97.762.400	100 Persen	62.168.220	100	63,59	200 Persen	132.396.644,00	200	35,45		Tercapai
1.	6.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	226.096.970	2 Dokumen	46.925.924	2 Dokumen	23.978.400	2 Dokumen	6.708.400	100	27,98	4 Dokumen	53.634.324,00	33,33	23,72	INSPEKTORAT	Tercapai
2.	6.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	24 Laporan	147.342.610	4 Laporan	23.302.500	4 Laporan	73.784.000	4 Laporan	55.459.820	100	75,17	8 Laporan	78.762.320,00	33,33	53,46	INSPEKTORAT	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	51,57			33,33	38,59		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	30.814.979.700	100 Persen	5.972.822.230	100 Persen	9.601.306.610	100 Persen	7.687.059.098	100	80,06	200 Persen	13.659.881.328,00	200	44,33		Tercapai
3.	6.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3805 orang	30.814.979.700	630 orang	5.972.822.230	678 orang	9.601.306.610	594 orang	7.687.059.098	87,61	80,06	1224 orang	13.659.881.328,00	32,17	44,33	INSPEKTORAT	Tidak Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		87,61	80,06			32,17	44,33		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	16.305.310.520	100 Persen	440.729.059	100 Persen	3.043.543.000	100 Persen	2.610.223.366	100	85,76	200 Persen	3.050.952.425,00	200	18,71		Tercapai
4.	6.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	14 paket	485.125.000	3 paket	124.050.000	5 paket	102.503.000	5 paket	92.160.000	100	89,91	8 paket	216.210.000,00	57,14	44,57	INSPEKTORAT	Tercapai
5.	6.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	240 pegawai	4.277.058.490	25 pegawai	316.679.059	54 pegawai	1.039.095.000	65 pegawai	857.529.632	120,37	82,53	90 pegawai	1.174.208.691,00	37,5	27,45	INSPEKTORAT	Melebihi Target
6.	6.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	110 pegawai	11.543.127.030	0 pegawai	0	60 pegawai	1.901.945.000	86 pegawai	1.660.533.734	143,33	87,31	86 pegawai	1.660.533.734,00	78,18	14,39	INSPEKTORAT	Melebihi Target
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		121,23	86,58			57,61	28,8		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	10.105.074.242	100 Persen	1.404.158.037	100 Persen	2.673.209.900	100 Persen	2.618.868.435	100	97,97	200 Persen	4.023.026.472,00	200	39,81		Tercapai
7.	6.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket	5.990.805.730	4 Paket	319.521.580	9 Paket	1.334.179.800	9 Paket	1.317.574.000	100	98,76	13 Paket	1.637.095.580,00	44,83	27,33	INSPEKTORAT	Tercapai
8.	6.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	239.991.126	2 paket	26.120.000	2 paket	51.295.600	2 paket	51.057.200	100	99,54	4 paket	77.177.200,00	33,33	32,16	INSPEKTORAT	Tercapai
9.	6.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	720 dokumen	61.122.840	120 dokumen	7.080.000	120 dokumen	6.748.500	120 dokumen	6.748.500	100	100	240 dokumen	13.828.500,00	33,33	22,62	INSPEKTORAT	Tercapai
10.	6.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	325 Laporan	3.813.154.546	60 Laporan	1.051.436.457	60 Laporan	1.280.986.000	83 Laporan	1.243.488.735	138,33	97,07	143 Laporan	2.294.925.192,00	44	60,18	INSPEKTORAT	Melebihi Target
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		109,58	98,84			38,87	35,57		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 Persen	4.293.862.000	100 Persen	1.293.050.000	100 Persen	2.175.585.800	100 Persen	2.109.294.681	100	96,95	200 Persen	3.402.344.681,00	200	79,24		Tercapai
11.	6.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	2.100.000.000	n/a	497.400.000	n/a	1.485.500.000	n/a	1.421.510.000	0	95,69	n/a	1.918.910.000,00	0	91,38	INSPEKTORAT	Tidak Tercapai
12.	6.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit gedung kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	19 Unit	2.193.862.000	3 Unit	795.650.000	4 Unit	690.085.800	4 Unit	687.784.681	100	99,67	7 Unit	1.483.434.681,00	36,84	67,62	INSPEKTORAT	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50	97,68			18,42	79,5		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	72 Bulan	1.910.589.226	12 Bulan	271.459.783	12 Bulan	393.191.450	12 Bulan	307.568.850	100	78,22	24 Bulan	579.028.633,00	33,33	30,31		Tercapai
13.	6.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	62 Laporan	37.812.285	24 Laporan	4.314.000	12 Laporan	10.003.500	12 Laporan	6.552.000	100	65,5	36 Laporan	10.866.000,00	58,06	28,74	INSPEKTORAT	Tercapai
14.	6.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	841.685.880	12 Laporan	117.020.850	12 Laporan	185.451.450	12 Laporan	144.030.970	100	77,67	24 Laporan	261.051.820,00	33,33	31,02	INSPEKTORAT	Tercapai
15.	6.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1.031.091.061	12 Laporan	150.124.933	12 Laporan	197.736.500	12 Laporan	156.985.880	100	79,39	24 Laporan	307.110.813,00	33,33	29,79	INSPEKTORAT	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	74,18			41,58	29,85		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	4.687.485.170	100 Persen	997.459.997	100 Persen	986.939.800	100 Persen	353.420.519	100	35,81	200 Persen	1.350.880.516,00	200	28,82		Tercapai
16.	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	1.206.735.170	37 unit	201.809.997	37 unit	360.520.100	64 unit	344.207.900	172,97	95,48	101 unit	546.017.897,00	45,5	45,25	INSPEKTORAT	Melebihi Target
17.	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	1.206.735.170	37 unit	201.809.997	37 unit	360.520.100	64 unit	344.207.900	172,97	95,48	101 unit	546.017.897,00	45,5	45,25	INSPEKTORAT	Melebihi Target
18.	6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3.480.750.000	1 unit	795.650.000	1 unit	626.419.700	1 unit	9.212.619	100	1,47	2 unit	804.862.619,00	33,33	23,12	INSPEKTORAT	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		148,65	64,14			41,44	37,87		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen	4.687.485.170	100 Persen	997.459.997	100 Persen	986.939.800	100 Persen	353.420.519	100	35,81	200 Persen	1.350.880.516,00	200	28,82		Tercapai
19.	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	1.206.735.170	37 unit	201.809.997	37 unit	360.520.100	64 unit	344.207.900	172,97	95,48	101 unit	546.017.897,00	45,5	45,25	INSPEKTORAT	Melebihi Target

20.	6.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	222 unit	1.206.735.170	37 unit	201.809.997	37 unit	360.520.100	64 unit	344.207.900	172,97	95,48	101 unit	546.017.897,00	45,5	45,25	INSPEKTORAT	Melebihi Target
21.	6.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 unit	3.480.750.000	1 unit	795.650.000	1 unit	626.419.700	1 unit	9.212.619	100	1,47	2 unit	804.862.619,00	33,33	23,12	INSPEKTORAT	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	148,65	64,14			41,44	37,87		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	71,77			179,17	38,19		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Prosentase SKPD yang selesai TLHP**	**65 SKPD**	**8.943.662.480**	**0 SKPD**	**1.548.019.455**	**50 SKPD**	**4.572.441.000**	**66 SKPD**	**4.318.913.370**	**132**	**94,46**	**66 SKPD**	**5.866.932.825,00**	**101,54**	**65,6**		**Melebihi Target**
			Persentase perangkat daerah yang memiliki kematangan mitigasi risiko yang baik	80 Persen		0 Persen		50 Persen		0 Persen		0		0,00 Persen		0			Tidak Tercapai
			'Prosentase SKPD yang menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi internal SAKIP lebih dari 80 %	80 Persen		0 Persen		50 Persen		57 Persen		114		57,00 Persen		71,25			Melebihi Target
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah SKPD yang menindaklanjuti LHE	27 SKPD	4.780.805.615	0 SKPD	378.115.600	15 SKPD	3.854.953.000	17 SKPD	3.671.493.950	113,33	95,24	17 SKPD	4.049.609.550,00	62,96	84,71		Melebihi Target
			Jumlah rekomendasi temuan yang bersifat administrasi dan keuangan yang selesai ditindaklanjuti	240 rekomendasi		0 rekomendasi		150 rekomendasi		71 rekomendasi		47,33		71 rekomendasi		29,58			Tidak Tercapai
22.	6.01.02.2.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	198 Laporan	957.367.350	33 Laporan	114.290.000	33 Laporan	375.620.000	84 Laporan	305.860.000	254,55	81,43	117 Laporan	420.150.000,00	59,09	43,89	INSPEKTORAT	Melebihi Target
23.	6.01.02.2.01.02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	50 Laporan	1.175.231.750	8 Laporan	116.090.000	10 Laporan	325.050.000	56 Laporan	222.635.000	560	68,49	64 Laporan	338.725.000,00	128	28,82	INSPEKTORAT	Melebihi Target
24.	6.01.02.2.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	12 Laporan	271.125.950	2 Laporan	22.290.000	2 Laporan	18.800.000	2 Laporan	17.655.000	100	93,91	4 Laporan	39.945.000,00	33,33	14,73	INSPEKTORAT	Tercapai
25.	6.01.02.2.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	0 Laporan	557.001.900	0 Laporan	2.850.000	0 Laporan	2.600.000	1 Laporan	2.475.000	0	95,19	1 Laporan	5.325.000,00	0	0,96	INSPEKTORAT	Tidak Tercapai
26.	6.01.02.2.01.05	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	36 Laporan	631.900.000	2 Laporan	42.810.000	6 Laporan	3.105.600.000	7 Laporan	3.001.862.750	116,67	96,66	9 Laporan	3.044.672.750,00	25	481,83	INSPEKTORAT	Melebihi Target
27.	6.01.02.2.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	24 Dokumen	1.188.178.665	4 Dokumen	79.785.600	4 Dokumen	27.283.000	4 Dokumen	121.006.200	100	443,52	8 Dokumen	200.791.800,00	33,33	16,9	INSPEKTORAT	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	188,54	146,53			46,46	97,85		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditangani	100 Persen	4.162.856.865	100 Persen	1.169.903.855	100 Persen	717.488.000	100 Persen	647.419.420	100	90,23	200 Persen	1.817.323.275,00	200	43,66		Tercapai
			Nilai Penjaminan Kualitas atas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	4.6 Nilai		0 Nilai		4.0279 Nilai		4,028 Nilai		100		4 Nilai		87,57			Tercapai
28.	6.01.02.2.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang ditangani	12 Laporan	438.630.700	2 Laporan	670.468.855	2 Laporan	263.638.000	2 Laporan	196.334.420	100	74,47	4 Laporan	866.803.275,00	33,33	197,62	INSPEKTORAT	Tercapai
29.	6.01.02.2.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	438 Laporan	3.724.226.165	116 Laporan	499.435.000	73 Laporan	453.850.000	88 Laporan	451.085.000	120,55	99,39	204 Laporan	950.520.000,00	46,58	25,52	INSPEKTORAT	Melebihi Target
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	110,27	86,93			39,95	111,57		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	90,17	46,37			65,74	32,09		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Prosentase OPD yang diusulkan ke TPN ZI WBK/WBBM**	**31 Persen**	**5.635.777.103**	**0 Persen**	**1.615.552.628**	**20 Persen**	**1.171.396.400**	**20 Persen**	**989.890.765**	**100**	**84,51**	**20 Persen**	**2.605.443.393,00**	**64,52**	**46,23**		**Tercapai**
			'Prosentase tindak lanjut rekomendasi hasil koordinasi pelaksanaan RB	95 Persen		0 Persen		80 Persen		0 Persen		0		0,00 Persen		0			Tidak Tercapai
			'Nilai MCP	94 Persen		90 Persen		91 Persen		94 Persen		103,3		184,00 Persen		195,74			Melebihi Target
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Jumlah unit kerja yang diusulkan untuk mendapatkan predikat ZI menuju WBK/WBBM	31 SKPD	5.635.777.103	0 SKPD	1.615.552.628	20 SKPD	1.171.396.400	20 SKPD	989.890.765	100	84,51	20 SKPD	2.605.443.393,00	64,52	46,23		Tercapai
			Presentase rekomendasi RB yang ditindaklanjuti	95 Persen		0 Persen		80 Persen		67 Persen		83,75		67 Persen		70,53			Tidak Tercapai
			Prosentase Indikator MCP yang terjawab/terpenuhi	94 Persen		90 Persen		91 Persen		95 Persen		104,4		95 Persen		101,06			Melebihi Target
30.	6.01.03.2.02.01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	180 Perangkat Daerah	834.369.515	30 Perangkat Daerah	35.840.000	30 Perangkat Daerah	27.500.000	30 Perangkat Daerah	21.375.000	100	77,73	60 Perangkat Daerah	57.215.000,00	33,33	6,86	INSPEKTORAT	Tercapai
31.	6.01.03.2.02.02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah Yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	196 Perangkat Daerah	661.169.340	30 Perangkat Daerah	1.075.006.628	30 Perangkat Daerah	122.800.000	30 Perangkat Daerah	82.930.000	100	67,53	60 Perangkat Daerah	1.157.936.628,00	30,61	175,13	INSPEKTORAT	Tercapai
32.	6.01.03.2.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	18 kegiatan	3.230.008.728	3 kegiatan	440.775.000	3 kegiatan	973.606.000	3 kegiatan	868.795.765	100	89,23	6 kegiatan	1.309.570.765,00	33,33	40,54	INSPEKTORAT	Tercapai
33.	6.01.03.2.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	186 Perangkat Daerah	910.229.520	30 Perangkat Daerah	63.931.000	30 Perangkat Daerah	47.490.400	22 Perangkat Daerah	16.790.000	73,33	35,35	52 Perangkat Daerah	80.721.000,00	27,96	8,87	INSPEKTORAT	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	93,33	67,46			31,31	57,85		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	96,59	28,17			21,51	15,41		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	81,5	87,86			46,09	18,76		
											Predikat Kinerja (Program)	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**124,44**	**85,2**			**40,04**	**53,83**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Rendah**		
											Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**24.715.376.360**							**21.057.407.304**
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		- Komitmen Pimpinan di dalam pencapaian kinerja - Tim kerja yang solid di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya - Dukungan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas - Evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh pimpinan secara berkala																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		- Banyaknya permintaan pengawasan dari eksternal kepada APIP sehingga berpengaruh terhadap program kerja pengawasan yang sudah ditetapkan - Belum optimalnya kepatuhan SKPD di dalam melaksanakan rekomendasi yang di berikan khususnya oleh															
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		- Meningkatkan koordinasi dengan seluruh SKPD dalam rangka meningkatkan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum sesuai dengan rekomendasi yang diberikan															

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kelancaran pelayanan Administrasi dan Jasa Perkantoran**	**100%**	**48.173.740.314**	**100%**	**5.401.851.602**	**100%**	**8.432.293.148**	**100%**	**7.690.403.548**	**100**	**91,2**	**200%**	**13.092.255.150,00**	**200**	**27,18**		**Tercapai**
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan keuangan perangkat daerah yang disusun	5 dokumen	1.053.888.157	5 dokumen	86.460.000	5 dokumen	236.140.400	5 dokumen	203.199.068	100	86,05	10 dokumen	289.659.068,00	200	27,48		Tercapai
1.	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	21.339.600	0 Dokumen	0	4 Dokumen	108.498.400	4 Dokumen	99.609.068	100	91,81	4 Dokumen	99.609.068,00	100	466,78	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
2.	1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	5.100.000	100	85	1 Dokumen	5.100.000,00	100	85	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
3.	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.026.548.557	1 Laporan	86.460.000	1 Laporan	121.642.000	1 Laporan	98.490.000	100	80,97	2 Laporan	184.950.000,00	200	18,02	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	85,92			133,33	189,93		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tingkat kelancaran pelayanan Administrasi perangkat daerah	100%	19.045.803.733	100%	3.221.815.222	100%	4.640.575.388	100%	4.306.360.390	100	92,8	200%	7.528.175.612,00	200	39,53		Tercapai
4.	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan tunjangan ASN	14 Orang/Bulan	18.782.607.230	12 Orang/Bulan	3.201.815.222	14 Orang/Bulan	4.614.535.388	12 Orang/Bulan	4.290.760.390	85,71	92,98	24 Orang/Bulan	7.492.575.612,00	171,43	39,89	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Tercapai
5.	1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	3.000.000	1 Laporan	2.000.000	0 Laporan	0	0	0	1 Laporan	3.000.000,00	100	30	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Tercapai
6.	1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan?semesteran SKPD dan Lap[oran Koordinasi Penyusun Laporan Keunagan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2 Laporan	253.196.503	2 Laporan	17.000.000	2 Laporan	24.040.000	2 Laporan	15.600.000	100	64,89	4 Laporan	32.600.000,00	200	12,88	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		61,9	52,63			157,14	27,59		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Sumber Daya Aparatur yang Mendapat Peningkatan Disiplin dan Kapasitas	100%	658.275.365	100%	255.753.225	100%	421.077.100	100%	332.102.138	100	78,87	200%	587.855.363,00	200	89,3		Tercapai
7.	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	46 Paket	86.379.670	46 Paket	21.700.000	46 Paket	53.499.100	46 Paket	45.699.100	100	85,42	92 Paket	67.399.100,00	200	78,03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
8.	1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknik Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	30 Orang	571.895.695	20 Orang	234.053.225	30 Orang	367.578.000	35 Orang	286.403.038	116,67	77,92	55 Orang	520.456.263,00	183,33	91,01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melebihi Target
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		108,33	81,67			191,67	84,52		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	TINGKAT KELANCARAN PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	100%	2.267.983.342	100%	521.505.779	100%	1.121.738.000	100%	997.581.681	100	88,93	100%	997.581.681,00	100	43,99		Tercapai
9.	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disedakan	12 paket	117.923.882	12 paket	13.941.600	12 paket	13.275.100	12 paket	13.275.100	100	100	24 paket	27.216.700,00	200	23,08	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
10.	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	1.088.506.757	5 Paket	254.429.000	5 Paket	502.122.200	5 Paket	435.626.000	100	86,76	10 Paket	690.055.000,00	200	63,39	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
11.	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	154.521.643	12 Paket	29.361.150	12 Paket	52.486.900	12 Paket	51.769.000	100	98,63	24 Paket	81.130.150,00	200	52,5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
12.	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	155.246.435	12 Dokumen	15.600.000	12 Dokumen	11.995.200	12 Dokumen	11.860.000	100	98,87	24 Dokumen	27.460.000,00	200	17,69	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
13.	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan	751.784.625	25 Laporan	208.174.029	25 Laporan	541.858.600	80 Laporan	485.051.581	320	89,52	105 Laporan	693.225.610,00	420	92,21	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melebihi Target
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		144	94,76			244	49,78		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang / aset yang diadakan	12 Bulan	173.000.000	12 Bulan	223.316.000	12 Bulan	824.514.300	12 Bulan	806.169.031	100	97,78	24 Bulan	1.029.485.031,00	200	595,08		Tercapai
14.	1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	2 Unit	173.000.000	2 Unit	0	2 Unit	375.000.000	15 Unit	359.850.000	750	95,96	17 Unit	359.850.000,00	850	208,01	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melebihi Target
15.	1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yng Disediakan	1 Unit	0	1 Unit	223.316.000	1 Unit	449.514.300	1 Unit	446.319.031	100	99,29	2 Unit	669.635.031,00	200	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		425	97,62			525	104		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat kelancaran pelayanan adaministrasi perkantoran	100%	3.512.167.470	100%	236.761.993	100%	377.024.760	100%	323.487.722	100	85,8	200%	560.249.715,00	200	15,95		Tercapai
16.	1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.958.080.047	12 Laporan	81.720.000	12 Laporan	112.907.600	12 Laporan	110.307.600	100	97,7	24 Laporan	192.027.600,00	200	9,81	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
17.	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikas, Sumberdaya Air dan Listrik yang DIsediakan	12 Laporan	1.083.527.750	12 Laporan	105.595.113	12 Laporan	167.998.000	12 Laporan	123.275.562	100	73,38	24 Laporan	228.870.675,00	200	21,12	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
18.	1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	470.559.673	12 Laporan	49.446.880	12 Laporan	96.119.160	12 Laporan	89.904.560	100	93,53	24 Laporan	139.351.440,00	200	29,61	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	88,2			200	20,18		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pelayanan Jasa Perkantoran	100%	21.462.622.247	100%	856.239.383	100%	811.223.200	100%	721.503.518	100	88,94	200%	1.577.742.901,00	200	7,35		Tercapai
19.	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabtan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	15 Unit	20.496.534.488	15 Unit	249.952.383	15 Unit	264.682.800	15 Unit	188.062.270	100	71,05	30 Unit	438.014.653,00	200	2,14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
20.	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit	114.997.675	12 Unit	8.240.000	12 Unit	16.000.000	12 Unit	10.195.000	100	63,72	24 Unit	18.435.000,00	200	16,03	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
21.	1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dDipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	0	1 Unit	223.166.000	3 Unit	382.249.600	2 Unit	377.079.648	66,67	98,65	3 Unit	600.245.648,00	100	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Tercapai
22.	1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	851.090.084	20 Unit	374.881.000	20 Unit	148.290.800	15 Unit	146.166.600	75	98,57	35 Unit	521.047.600,00	175	61,22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		85,42	83			168,75	19,85		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	88,45			185,71	116,95		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Prosentase Desa Siaga Bencana, Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana, Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan**	**100%**	**473.596.427.183**	**100%**	**5.128.481.904**	**100%**	**6.141.272.450**	**100%**	**5.262.276.340**	**100**	**85,69**	**200%**	**10.390.758.244,00**	**200**	**2,19**		**Tercapai**
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80 Desa	84.663.364.338	80 Desa	1.633.146.000	80 Desa	822.220.000	120 Desa	790.092.772	150	96,09	200 Desa	2.423.238.772,00	250	2,86		Melebihi Target
23.	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kajian Resiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	44.316.682.169	1 Dokumen	828.881.000	1 Dokumen	97.000.000	1 Dokumen	91.384.351	100	94,21	2 Dokumen	920.265.351,00	200	2,08	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
24.	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	400 Orang	40.346.682.169	400 Orang	804.265.000	400 Orang	725.220.000	610 Orang	698.708.421	152,5	96,34	1010 Orang	1.502.973.421,00	252,5	3,73	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melebihi Target
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		126,25	95,28			226,25	2,9		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlatihnya Aparatur Yang menangani sub urusan bencana dan warga yang berada dikawasan rawan bencana	100%	275.643.443.975	100%	3.242.804.807	100%	4.823.819.750	100%	4.020.348.956	100	83,34	100%	4.020.348.956,00	100	1,46		Tercapai
25.	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralataan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	5 Unit	138.573.800.864	1 Unit	1.680.568.251	5 Unit	2.773.820.100	19 Unit	2.134.170.987	380	76,94	20 Unit	3.814.739.238,00	400	2,75	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melebihi Target
26.	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Anlisis Risiko Berncana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	1 Dokumen	44.316.682.169	1 Dokumen	24.616.000	1 Dokumen	62.713.050	1 Dokumen	44.935.933	100	71,65	2 Dokumen	69.551.933,00	200	0,16	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
27.	1.05.03.2.02.07	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Cakupan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	79.241.509.959	100%	225.536.400	100%	523.585.400	100%	518.539.236	100	99,04	200%	744.075.636,00	200	0,94	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai

28.	1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pesonil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	90 Orang	13.364.246.383	90 Orang	1.312.084.156	90 Orang	1.307.046.600	147 Orang	1.207.482.300	163,33	92,38	237 Orang	2.519.566.456,00	263,33	18,85	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melebihi Target
29.	1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	100 Orang	147.204.600	0 Orang	0	100 Orang	156.654.600	90 Orang	115.220.500	90	73,55	90 Orang	115.220.500,00	90	78,27	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	166,67	82,71			230,67	20,19		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Tersedianya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 paket	113.289.618.870	50 paket	252.531.097	50 paket	495.232.700	108 paket	451.834.612	216	91,24	158 paket	704.365.709,00	316	0,62		Melebihi Target
30.	1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sk Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 jam Berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	91.100.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	47.159.000	1 Dokumen	19.360.000	100	41,05	1 Dokumen	19.360.000,00	100	21,25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Tercapai
31.	1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50 orang	113.198.518.870	50 orang	252.531.097	50 orang	448.073.700	108 orang	432.474.612	216	96,52	158 orang	685.005.709,00	316	0,61	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melebihi Target
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	158	68,79			208	10,93		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	155,33	90,22			222	1,65		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana**	**100%**	**169.210.887.880**	**100%**	**571.450.175**	**100%**	**16.437.513.800**	**100%**	**16.023.891.958**	**100**	**97,48**	**200%**	**16.595.342.133,00**	**200**	**9,81**		**Tercapai**
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Kegiatan	162.376.895.580	15 Kegiatan	459.111.175	15 Kegiatan	16.339.181.300	24 Kegiatan	15.933.359.458	160	97,52	39 Kegiatan	16.392.470.633,00	260	10,1		Melebihi Target
32.	1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	15 Laporan	162.376.895.580	15 Laporan	459.111.175	15 Laporan	16.339.181.300	24 Laporan	15.933.359.458	160	97,52	39 Laporan	16.392.470.633,00	260	10,1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melebihi Target
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	160	97,52			260	10,1		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Tersedianya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	200 Orang	6.833.992.300	200 Orang	112.339.000	200 Orang	98.332.500	500 Orang	90.532.500	250	92,07	700 Orang	202.871.500,00	350	2,97		Melebihi Target
33.	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumnlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	200 Orang	6.833.992.300	200 Orang	112.339.000	200 Orang	98.332.500	500 Orang	90.532.500	250	92,07	700 Orang	202.871.500,00	350	2,97	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Melebihi Target
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	250	92,07			350	2,97		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	131,33	94,79			305	6,53		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	100	91,46			200	13,06		
											Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**157,13**	**93,44**			**225,2**	**47,28**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
								Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**31.011.079.398**		**28.976.571.846**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Respontime dalam penanganan bencana																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Belum maksimalnya pembentukan masyarakat tangguh bencana																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Melaksanakan agenda kinerja yang telah direncanakan																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**75 nilai**	**51.077.304.463**	**70.95 nilai**	**9.213.878.008**	**70 nilai**	**10.759.208.566**	**70,95 nilai**	**9.968.991.534**	**101,36**	**92,66**	**70.95 nilai**	**9.968.991.534,00**	**94,6**	**19,52**		**Melebihi Target**
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.107.914.125	100%	153.698.600	100%	154.222.400	100%	151.222.400	100	98,05	100%	151.222.400,00	100	13,65		Tercapai
1.	5.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	"Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	124.758.775	5 Dokumen	36.054.350	2 Dokumen	16.728.000	2 Dokumen	16.728.000	100	100	7 Dokumen	52.782.350,00	50	42,31	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
2.	5.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	"Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24 Dokumen	310.712.150	8 Dokumen	54.284.700	4 Dokumen	44.547.200	4 Dokumen	41.947.200	100	94,16	12 Dokumen	96.231.900,00	50	30,97	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
3.	5.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23 Dokumen	672.443.200	7 Dokumen	63.359.550	4 Dokumen	92.947.200	4 Dokumen	92.547.200	100	99,57	11 Dokumen	155.906.750,00	47,83	23,19	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,91			49,28	32,15		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	33.681.459.229	100%	4.731.002.723	100%	6.203.460.066	100%	5.607.825.721	100	90,4	100%	5.607.825.721,00	100	16,65		Tercapai
4.	5.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	198 orang	33.219.198.196	66 orang	4.621.676.749	33 orang	6.129.291.066	33 orang	5.538.280.650	100	90,36	99 orang	10.159.957.399,00	50	30,58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
5.	5.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	"Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 dokumen	358.003.582	24 dokumen	77.447.124	12 dokumen	62.960.000	12 dokumen	58.336.071	100	92,66	36 dokumen	135.783.195,00	50	37,93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
6.	5.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 laporan	53.117.408	4 laporan	15.289.400	1 laporan	5.604.500	1 laporan	5.604.500	100	100	5 laporan	20.893.900,00	62,5	39,34	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
7.	5.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	"Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 laporan	51.140.043	4 laporan	16.589.450	1 laporan	5.604.500	1 laporan	5.604.500	100	100	5 laporan	22.193.950,00	62,5	43,4	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,75			56,25	37,81		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	2.549.827.645	100%	1.093.444.950	100%	155.180.000	100%	152.680.000	100	98,39	100%	152.680.000,00	100	5,99		Tercapai
8.	5.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	558.975.000	2 paket	42.750.000	1 paket	30.000.000	1 paket	30.000.000	100	100	3 paket	72.750.000,00	50	13,01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
9.	5.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	"Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	198 orang	1.990.852.645	66 orang	1.050.694.950	33 orang	125.180.000	33 orang	122.680.000	100	98	99 orang	1.173.374.950,00	50	58,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99			50	35,98		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	5.011.475.049	100%	1.266.346.090	100%	1.406.667.300	100%	1.373.850.564	100	97,67	100%	1.373.850.564,00	100	27,41		Tercapai

10.	5.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	72 paket	144.003.333	24 paket	50.257.000	12 paket	21.556.900	12 paket	21.543.800	100	99,94	36 paket	71.800.800,00	50	49,86	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
11.	5.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	24 paket	1.542.071.478	8 paket	388.019.800	4 paket	560.105.800	4 paket	552.856.000	100	98,71	12 paket	940.875.800,00	50	61,01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
12.	5.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 paket	546.543.528	24 paket	147.831.600	12 paket	102.598.800	12 paket	102.402.400	100	99,81	36 paket	250.234.000,00	50	45,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
13.	5.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 dokumen	80.632.600	24 dokumen	13.440.000	12 dokumen	9.435.200	12 dokumen	9.206.400	100	97,58	36 dokumen	22.646.400,00	50	28,09	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
14.	5.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 laporan	2.698.224.110	24 laporan	666.797.690	12 laporan	712.970.600	12 laporan	687.841.964	100	96,48	36 laporan	1.354.639.654,00	50	50,2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,5			50	46,99		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.436.025.900	100%	76.250.000	100%	1.017.000.000	100%	993.750.000	100	97,71	100%	993.750.000,00	100	69,2		Tercapai
15.	5.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	550.000.000	0 Unit	0	1 Unit	550.000.000	1 Unit	541.700.000	100	98,49	1 Unit	541.700.000,00	100	98,49	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
16.	5.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	21 Unit	886.025.900	3 Unit	76.250.000	18 Unit	467.000.000	18 Unit	452.050.000	100	96,8	21 Unit	528.300.000,00	100	59,63	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	97,64			100	79,06		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	4.708.740.470	100%	726.060.438	100%	927.091.800	100%	858.986.300	100	92,65	100%	858.986.300,00	100	18,24		Tercapai
17.	5.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	1.297.299.600	24 laporan	243.590.838	12 laporan	217.222.200	12 laporan	209.448.100	100	96,42	36 laporan	453.038.938,00	50	34,92	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
18.	5.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	3.411.440.870	24 laporan	482.469.600	12 laporan	709.869.600	12 laporan	649.538.200	100	91,5	36 laporan	1.132.007.800,00	50	33,18	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	93,96			50	34,05		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	2.581.862.045	100%	1.167.075.207	100%	895.587.000	100%	830.676.549	100	92,75	200%	1.997.751.756,00	200	77,38		Tercapai
19.	5.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kemdaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di pelihara dan di bayarkan pajak dan perizinanya	218 unit	1.558.975.650	46 unit	304.181.707	43 unit	267.459.100	43 unit	215.310.549	100	80,5	89 unit	519.492.256,00	40,83	33,32	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
20.	5.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 unit	1.022.886.395	4 unit	862.893.500	2 unit	628.127.900	2 unit	615.366.000	100	97,97	2 unit	615.366.000,00	14,29	60,16	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	89,24			27,56	46,74		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	95,38			114,29	32,65		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (kinerja program/kinerja urusan)**	**100%**	**14.236.740.174**	**100%**	**3.092.207.369**	**100%**	**2.157.619.000**	**95%**	**2.101.705.811**	**95**	**97,41**	**95%**	**2.101.705.811,00**	**95**	**14,76**		**Tidak Tercapai**
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase hasil penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan nilai baik	100 Persentase	10.694.397.327	100 Persentase	2.415.474.720	100 Persentase	1.737.580.600	100 Persentase	1.690.183.420	100	97,27	100 Persentase	1.690.183.420,00	100	15,8		Tercapai
21.	5.01.02.2.01.02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan dokumen perencanaan pembangunan daerah	14 Dokumen	866.591.840	4 Dokumen	146.865.000	3 Dokumen	136.960.000	3 Dokumen	119.104.220	100	86,96	7 Dokumen	265.969.220,00	50	30,69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
22.	5.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	8 Dokumen	2.904.575.880	2 Dokumen	27.320.000	2 Dokumen	109.720.000	2 Dokumen	104.458.000	100	95,2	4 Dokumen	131.778.000,00	50	4,54	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
23.	5.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	8 Dokumen	2.809.835.820	2 Dokumen	213.875.500	1 Dokumen	186.600.000	1 Dokumen	177.837.000	100	95,3	3 Dokumen	391.712.500,00	37,5	13,94	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
24.	5.01.02.2.01.07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	15 Dokumen	4.113.393.787	5 Dokumen	2.027.414.220	2 Dokumen	1.304.300.600	2 Dokumen	1.288.784.200	100	98,81	7 Dokumen	3.316.198.420,00	46,67	80,62	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	94,07			46,04	32,45		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase data dan informasi perencanaan dan pembangunan daerah yang tervalidasi	80%	1.871.808.099	100%	407.382.244	72%	145.630.000	100%	140.731.391	138,89	96,64	100%	140.731.391,00	125	7,52		Melebihi Target
25.	5.01.02.2.02.01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	6 Dokumen	502.819.158	2 Dokumen	139.361.644	1 Dokumen	87.710.000	1 Dokumen	83.984.000	100	95,75	3 Dokumen	223.345.644,00	50	44,42	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
26.	5.01.02.2.02.03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil pembangunan daerah yang diterbitkan	6 Buku	1.368.988.941	2 Buku	268.020.600	1 Buku	57.920.000	1 Buku	56.747.391	100	97,98	3 Buku	324.767.991,00	50	23,72	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	96,86			50	34,07		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi pengendalian dan evaluasi yang ditindaklanjuti	100 Persentase	1.670.534.748	100 Persentase	269.350.405	100 Persentase	274.408.400	100 Persentase	270.791.000	100	98,68	100 Persentase	270.791.000,00	100	16,21		Tercapai
27.	5.01.02.2.03.01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	9 Laporan	1.156.101.110	1 Laporan	0	2 Laporan	219.830.000	2 Laporan	216.859.100	100	98,65	3 Laporan	216.859.100,00	33,33	18,76	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
28.	5.01.02.2.03.03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	58 Laporan	514.433.638	18 Laporan	269.350.405	10 Laporan	54.578.400	10 Laporan	53.931.900	100	98,82	28 Laporan	323.282.305,00	48,28	62,84	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,73			40,8	40,8		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		112,96	97,53			108,33	13,18		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik Bidang Ekonomi dan Infrastruktur**	**96.8 %**	**15.859.849.880**	**100%**	**2.742.292.092**	**93.4 %**	**3.381.281.900**	**100%**	**3.190.715.860**	**107,07**	**94,36**	**100%**	**3.190.715.860,00**	**103,31**	**20,12**		**Melebihi Target**
			Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan Nilai Baik bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	96.8 %		100%		93.4 %		100%		107,07		100,00%		103,31			Melebihi Target
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik (pakor pemerintahan dan pembangunan manusia)	327 dokumen	7.397.057.989	115 dokumen	1.263.814.976	44 dokumen	1.740.176.700	41 dokumen	1.583.239.843	93,18	90,98	156 dokumen	2.847.054.819,00	47,71	38,49		Tidak Tercapai

29.	5.01.03.2.01.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 bahan	2.484.857.421	5 bahan	480.227.851	2 bahan	549.909.400	2 bahan	490.528.686	100	89,2	7 bahan	970.756.537,00	46,67	39,07	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
30.	5.01.03.2.01.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	280 laporan	1.041.250.909	95 laporan	230.634.620	38 laporan	211.589.900	38 laporan	164.287.300	100	77,64	133 laporan	394.921.920,00	47,5	37,93	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
31.	5.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	480 Laporan	442.890.855	152 Laporan	134.865.281	76 Laporan	97.439.200	76 Laporan	81.155.934	100	83,29	228 Laporan	216.021.215,00	47,5	48,78	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
32.	5.01.03.2.01.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	280 laporan	1.449.655.540	95 laporan	75.228.892	38 laporan	567.890.000	38 laporan	553.570.798	100	97,48	133 laporan	628.799.690,00	47,5	43,38	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
33.	5.01.03.2.01.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 Dokumen	464.663.864	5 Dokumen	136.573.300	2 Dokumen	59.116.800	2 Dokumen	47.916.800	100	81,05	7 Dokumen	184.490.100,00	46,67	39,7	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
34.	5.01.03.2.01.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	42 laporan	252.792.600	15 laporan	45.015.806	6 laporan	48.154.400	6 laporan	45.626.200	100	94,75	21 laporan	90.642.006,00	50	35,86	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
35.	5.01.03.2.01.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	72 Laporan	247.024.300	24 Laporan	54.749.700	12 Laporan	59.703.000	12 Laporan	55.113.044	100	92,31	36 Laporan	109.862.744,00	50	44,47	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
36.	5.01.03.2.01.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	42 laporan	1.013.922.500	15 laporan	106.519.526	6 laporan	146.374.000	6 laporan	145.041.081	100	99,09	6 laporan	145.041.081,00	14,29	14,3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	89,35			43,76	37,94		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik (gakor ekonomi dan SDA)	77 dokumen	4.462.076.795	25 dokumen	813.695.194	10 dokumen	653.729.600	10 dokumen	631.427.172	100	96,59	35 dokumen	1.445.122.366,00	45,45	32,39		Tercapai
37.	5.01.03.2.02.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	JJumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 dokumen	1.132.269.138	5 dokumen	173.688.850	2 dokumen	122.106.800	2 dokumen	121.011.259	100	99,1	7 dokumen	294.700.109,00	46,67	26,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
38.	5.01.03.2.02.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	49 laporan	240.055.802	15 laporan	44.692.530	6 laporan	39.910.400	6 laporan	38.746.800	100	97,08	21 laporan	83.439.330,00	42,86	34,76	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
39.	5.01.03.2.02.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	84 laporan	138.613.848	24 laporan	25.160.000	12 laporan	23.282.400	12 laporan	23.232.400	100	99,79	36 laporan	48.392.400,00	42,86	34,91	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
40.	5.01.03.2.02.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	40 laporan	397.199.676	6 laporan	127.791.807	6 laporan	106.211.800	6 laporan	104.945.194	100	98,81	12 laporan	232.737.001,00	30	58,59	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
41.	5.01.03.2.02.05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 dokumen	854.388.044	5 dokumen	137.806.959	2 dokumen	159.295.400	2 dokumen	150.960.725	100	94,77	7 dokumen	288.767.684,00	46,67	33,8	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
42.	5.01.03.2.02.06	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	28 laporan	1.063.441.857	10 laporan	147.456.050	4 laporan	52.361.200	4 laporan	44.085.500	100	84,19	14 laporan	191.541.550,00	50	18,01	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
43.	5.01.03.2.02.07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	48 laporan	371.844.202	16 laporan	45.792.100	8 laporan	32.353.600	8 laporan	31.136.800	100	96,24	24 laporan	76.928.900,00	50	20,69	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
44.	5.01.03.2.02.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	22 laporan	264.264.228	4 laporan	111.306.898	4 laporan	118.208.000	4 laporan	117.308.494	100	99,24	8 laporan	228.615.392,00	36,36	86,51	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	96,15			43,18	39,16		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah dengan nilai kualitas perencanaan baik (gakor infrastruktur dan Kewilayahan)	42 dokumen	4.000.715.096	15 dokumen	664.781.922	6 dokumen	987.375.600	6 dokumen	976.048.845	100	98,85	21 dokumen	1.640.830.767,00	50	41,01		Tercapai
45.	5.01.03.2.03.01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	15 dokumen	933.121.408	5 dokumen	168.031.050	2 dokumen	164.881.000	2 dokumen	163.996.700	100	99,46	7 dokumen	332.027.750,00	46,67	35,58	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
46.	5.01.03.2.03.02	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	42 laporan	93.990.006	15 laporan	43.198.900	6 laporan	9.426.000	6 laporan	6.026.000	100	63,93	21 laporan	49.224.900,00	50	52,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
47.	5.01.03.2.03.03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	72 laporan	202.301.040	24 laporan	148.706.500	12 laporan	30.268.000	12 laporan	30.258.000	100	99,97	36 laporan	178.964.500,00	50	88,46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
48.	5.01.03.2.03.04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	22 laporan	1.130.836.758	4 laporan	304.845.472	4 laporan	303.104.000	4 laporan	299.608.625	100	98,85	8 laporan	604.454.097,00	36,36	53,45	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
49.	5.01.03.2.03.08	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	17 dokumen	1.640.465.884	0 dokumen	0	2 dokumen	479.696.600	2 dokumen	476.159.520	100	99,26	2 dokumen	476.159.520,00	11,76	29,03	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,29			38,96	51,78		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		97,73	95,47			47,72	37,3		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan**	**100%**	**9.091.274.600**	**100%**	**3.926.958.386**	**100%**	**4.758.426.600**	**100%**	**4.710.167.584**	**100**	**98,99**	**100%**	**4.710.167.584,00**	**100**	**51,81**		**Tercapai**
			Nilai Inovasi SKPD	57 nilai		0 nilai		50 nilai		58,77 nilai		117,54		58,77 nilai		103,11			Melebihi Target
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan/policy paper	15 dokumen	2.871.988.600	7 dokumen	732.336.965	3 dokumen	643.835.600	3 dokumen	624.749.476	100	97,04	10 dokumen	1.357.086.441,00	66,67	47,25		Tercapai
50.	5.05.02.2.01.02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi penelitian dan pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	6 dokumen	1.370.020.000	5 dokumen	591.014.399	2 dokumen	452.740.000	2 dokumen	447.615.295	100	98,87	7 dokumen	1.038.629.694,00	116,67	75,81	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai

51.	5.05.02.2.01.12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah data kelitbangan dan peraturan yang terkelola dengan baik	6 laporan	1.501.968.600	2 laporan	141.322.566	1 laporan	191.095.600	1 laporan	177.134.181	100	92,69	3 laporan	318.456.747,00	50	21,2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
												100	95,78			83,33	48,51		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah ringkasan penelitian dan pengembangan tahunan/policy paper	17 Dokumen	4.753.536.000	10 Dokumen	2.898.248.566	13 Dokumen	3.036.588.000	13 Dokumen	3.026.831.090	100	99,68	23 Dokumen	5.925.079.656,00	135,29	124,65		Tercapai
52.	5.05.02.2.03.03	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan pengembangan badan usaha milik Daerah	3 Dokumen	531.760.000	0 Dokumen	405.420.000	2 Dokumen	386.840.000	2 Dokumen	386.639.216	100	99,95	2 Dokumen	792.059.216,00	66,67	148,95	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
53.	5.05.02.2.03.04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	3 Dokumen	775.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	369.320.000	1 Dokumen	367.783.108	100	99,58	1 Dokumen	367.783.108,00	33,33	47,46	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
54.	5.05.02.2.03.05	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	212.950.000	1 Dokumen	116.526.000	1 Dokumen	94.320.000	1 Dokumen	92.650.294	100	98,23	2 Dokumen	209.176.294,00	100	98,23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
55.	5.05.02.2.03.07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	106.420.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	298.520.000	2 Dokumen	298.080.808	100	99,85	2 Dokumen	298.080.808,00	200	280,1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
56.	5.05.02.2.03.09	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	7 Dokumen	1.927.076.000	6 Dokumen	1.859.288.566	3 Dokumen	1.117.618.000	3 Dokumen	1.115.573.885	100	99,82	9 Dokumen	2.974.862.451,00	128,57	154,37	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
57.	5.05.02.2.03.10	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	1 Dokumen	250.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	94.320.000	1 Dokumen	93.014.000	100	98,62	1 Dokumen	93.014.000,00	100	37,21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
58.	5.05.02.2.03.12	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil penelitian dan pengembangan penataan ruang dan pertanahan	3 Dokumen	950.330.000	1 Dokumen	517.014.000	3 Dokumen	675.650.000	1 Dokumen	673.089.779	33,33	99,62	2 Dokumen	1.190.103.779,00	66,67	125,23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tidak Tercapai
												90,48	99,38			99,32	127,36		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah inovasi dan teknologi yang dijaring	6 dokumen	1.465.750.000	2 dokumen	296.372.855	1 dokumen	1.078.003.000	1 dokumen	1.058.587.018	100	98,2	3 dokumen	1.354.959.873,00	50	92,44		Tercapai
59.	5.05.02.2.04.03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi jenis, prosedur dan Metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersifat Inovatif	6 laporan	1.465.750.000	2 laporan	296.372.855	1 laporan	1.078.003.000	1 laporan	1.058.587.018	100	98,2	3 laporan	1.354.959.873,00	50	92,44	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Tercapai
												100	98,2			50	92,44		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	102,00	98,3			83,99	88,11		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	104,67	96,13			65,48	17,7		
											Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**98,87**	**94,85**			**55,02**	**52,72**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Rendah**	**Rendah**		
									21.056.536.066		**Jumlah Anggaran dari seluruh Program**		**19.971.580.789**						
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Kompetinsi SDM sesuai dengan yang dibutuhkan 2. Manajemen waktuyang di rencanakan secara efektif 3. Pelaksanaan kegiatan sesuai tim schendule yang direncanakan berdasarkan agenda perencanaan permendagri No.86 Thn 2017 4. Tim kerja yang solid																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Ketersediaan SDM yang masih belum teerpenuhi sesuai Anjab 2. Sarana dan prasarana yang masih belum terpenuhi secara optimal 3. Banyaknya SDM yang masih baru sehingga perlu penyesuaian terhadap pelaksananaan pekerjaan. 4. Adanya jabatan																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1. Perlunya Diklat Teknis perencanaan di lingkup Bapperida 2. Perlunya keterisian jabatan fungsional yang memiliki kompetensi memadai.																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub Output)	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu (2022)		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Berjalan 2023 yang dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72**	**42.772.721.173**	**75.79**	**8.199.930.997**	**67**	**7.835.044.462**	**71,55**	**7.068.728.798**	**106,79**	**90,22**	**71.55**	**7.068.728.798,00**	**99,38**	**16,53**		**Melebihi Target**
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	550.385.500	100%	127.028.888	100%	230.758.850	100%	81.408.742	100	35,28	100%	81.408.742,00	100	14,79		Tercapai
1.	5.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	48 dokumen	249.567.800	16 dokumen	83.912.680	8 dokumen	27.827.000	8 dokumen	26.884.135	100	96,61	24 dokumen	110.796.815,00	50	44,4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
2.	5.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 dokumen	148.668.700	8 dokumen	24.506.750	4 dokumen	19.030.000	4 dokumen	17.030.857	100	89,49	12 dokumen	41.537.607,00	50	27,94	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
3.	5.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18 dokumen	152.149.000	6 dokumen	18.609.458	3 dokumen	183.901.850	3 dokumen	37.493.750	100	20,39	9 dokumen	56.103.208,00	50	36,87	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
												100	68,83			50	36,4		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	31.908.384.929	97.22 %	5.726.965.318	100%	5.929.160.874	100%	5.664.999.621	100	95,54	100%	5.664.999.621,00	100	17,75		Tercapai
4.	5.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	40 orang	31.359.412.229	36 orang	5.600.369.844	37 orang	5.848.871.974	37 orang	5.585.939.056	100	95,5	37 orang	5.585.939.056,00	92,5	17,81	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
5.	5.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4371 dokumen	427.007.150	1371 dokumen	102.689.648	750 dokumen	68.948.900	1058 dokumen	68.035.427	141,07	98,68	2429 dokumen	170.725.075,00	55,57	39,98	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Melebihi Target
6.	5.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 laporan	121.965.550	5 laporan	23.905.826	5 laporan	11.340.000	5 laporan	11.025.138	100	97,22	10 laporan	34.930.964,00	33,33	28,64	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
												113,69	97,13			60,47	28,81		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	3.086.946.048	100%	729.744.762	100%	433.108.088	99%	379.053.620	99	87,52	99%	379.053.620,00	99	12,28		Tidak Tercapai
7.	5.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 paket	979.024.000	5 paket	220.750.500	4 paket	75.527.800	3 paket	47.339.530	75	62,68	8 paket	268.090.030,00	33,33	27,38	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Tercapai
8.	5.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	216 dokumen	211.784.948	72 dokumen	23.980.000	36 dokumen	44.599.488	36 dokumen	20.960.000	100	47	108 dokumen	44.940.000,00	50	21,22	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
9.	5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	508 laporan	1.896.137.100	118 laporan	485.014.262	90 laporan	312.980.800	84 laporan	310.754.090	93,33	99,29	202 laporan	795.768.352,00	39,76	41,97	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Tercapai
												89,44	69,65			41,03	30,19		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	1.837.224.286	50%	196.515.000	100%	321.053.800	61,67%	315.627.350	61,67	98,31	111.67 %	512.142.350,00	111,67	27,88		Tidak Tercapai
10.	5.03.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	62 unit	1.837.224.286	2 unit	196.515.000	15 unit	321.053.800	11 unit	315.627.350	73,33	98,31	13 unit	512.142.350,00	20,97	27,88	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Tercapai
												73,33	98,31			20,97	27,88		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100%	3.139.614.400	100%	603.830.015	100%	506.838.400	100%	448.790.626	100	88,55	200%	1.052.620.641,00	200	33,53		Tercapai

11.	5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 laporan	1.315.317.700	24 laporan	156.752.515	12 laporan	183.300.000	12 laporan	167.003.626	100	91,11	36 laporan	323.756.141,00	50	24,61	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
12.	5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 laporan	1.824.296.700	24 laporan	447.077.500	12 laporan	323.538.400	12 laporan	281.787.000	100	87,1	36 laporan	728.864.500,00	50	39,95	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	89,1			50	32,28		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100%	2.250.166.010	100%	815.847.014	100%	414.124.450	92,50%	178.848.839	92,5	43,19	192.5 %	994.695.853,00	192,5	44,21		Tidak Tercapai
13.	5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 unit	832.060.300	18 unit	127.190.014	20 unit	128.424.450	17 unit	106.938.639	85	83,27	35 unit	234.128.653,00	175	28,14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Tercapai
14.	5.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	1.418.105.710	1 unit	688.657.000	1 unit	285.700.000	1 unit	71.910.200	100	25,17	1 unit	71.910.200,00	100	5,07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	92,5	54,22			137,5	16,6		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	92,2	74,73			133,86	25,07		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Nilai Implementasi Manajemen Talenta Pegawai ASN**	**80%**	**39.328.926.000**	**0%**	**10.980.807.184**	**0%**	**8.231.657.600**	**0%**	**7.799.079.670**	**0**	**94,74**	**0%**	**7.799.079.670,00**	**0**	**19,83**		**Tidak Tercapai**
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pemenuhan Pegawai sesuai Kebutuhan Beban Kerja	62%	6.110.564.850	38.33 %	3.401.640.298	54%	765.713.700	54,38%	729.684.389	100,7	95,29	54.38 %	729.684.389,00	87,71	11,94		Melebihi Target
15.	5.03.02.2.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	6 dokumen	3.819.319.600	2 dokumen	3.120.083.999	1 dokumen	139.382.000	1 dokumen	129.877.664	100	93,18	3 dokumen	3.249.961.663,00	50	85,09	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
16.	5.03.02.2.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	6 dokumen	354.908.000	2 dokumen	40.493.000	1 dokumen	71.413.000	1 dokumen	60.759.100	100	85,08	3 dokumen	101.252.100,00	50	28,53	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
17.	5.03.02.2.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 lembaga	455.461.200	1 lembaga	108.575.777	1 lembaga	58.580.800	1 lembaga	56.835.200	100	97,02	1 lembaga	56.835.200,00	100	12,48	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
18.	5.03.02.2.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	5 laporan	1.480.876.050	1 laporan	132.487.522	1 laporan	496.337.900	1 laporan	482.212.425	100	97,15	2 laporan	614.699.947,00	40	41,51	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	93,11			60	41,9		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Jabatan Pimpinan dan Administrasi yang Terisi	100%	1.251.225.900	97.13 %	224.994.829	100%	193.950.000	99,04%	219.213.127	99,04	113,03	99.04 %	219.213.127,00	99,04	17,52		Tidak Tercapai
			Persentase Jabatan Fungsional yang Terisi sesuai Prioritas Aktual Reformasi Birokrasi	37%		30.5 %		32%		32,18%		100,56		32%		86,97			Melebihi Target
19.	5.03.02.2.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	6 dokumen	627.100.700	2 dokumen	140.299.300	1 dokumen	102.727.600	1 dokumen	90.967.727	100	88,55	3 dokumen	231.267.027,00	50	36,88	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
20.	5.03.02.2.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 dokumen	624.125.200	4 dokumen	84.695.529	2 dokumen	91.222.400	2 dokumen	128.245.400	100	140,59	6 dokumen	212.940.929,00	50	34,12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	114,57			50	35,5		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pegawai yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal (aspek kompetensi manajerial, teknis, dan fungsional - di luar tenaga pendidik dan tenaga kesehatan)	35%	29.962.397.200	17.57 %	7.084.673.300	23%	6.891.460.900	64,03%	6.494.634.390	278,39	94,24	64.03 %	6.494.634.390,00	182,94	21,68		Melebihi Target
21.	5.03.02.2.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	6 dokumen	2.125.996.100	2 dokumen	745.323.855	1 dokumen	305.638.900	1 dokumen	170.279.000	100	55,71	3 dokumen	915.602.855,00	50	43,07	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
22.	5.03.02.2.03.03	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	6 Dokumen	13.926.114.850	2 Dokumen	2.009.925.607	1 Dokumen	4.249.496.000	1 Dokumen	4.197.725.521	100	98,78	3 Dokumen	6.207.651.128,00	50	44,58	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
23.	5.03.02.2.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	58 orang	5.349.132.150	10 orang	2.841.733.848	3 orang	454.162.800	2 orang	320.395.406	66,67	70,55	12 orang	3.162.129.254,00	20,69	59,11	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tidak Tercapai
24.	5.03.02.2.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	260 orang	1.784.443.950	46 orang	212.479.700	52 orang	370.760.800	52 orang	350.979.904	100	94,66	98 orang	563.459.604,00	37,69	31,58	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
25.	5.03.02.2.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	909 orang	6.776.710.150	12 orang	1.275.210.290	217 orang	1.511.402.400	217 orang	1.455.254.559	100	96,29	229 orang	2.730.464.849,00	25,19	40,29	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	93,33	83,2			36,71	43,73		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pegawai Berkinerja Minimal Kategori Baik	100%	2.004.738.050	99.4 %	269.498.757	100%	380.533.000	99,40%	355.547.764	99,4	93,43	99.4 %	355.547.764,00	99,4	17,74		Tidak Tercapai
26.	5.03.02.2.04.03	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 laporan	646.170.700	2 laporan	158.954.039	1 laporan	124.168.000	1 laporan	113.682.326	100	91,56	3 laporan	272.636.365,00	50	42,19	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
27.	5.03.02.2.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	21 orang	456.926.200	0 orang	0	3 orang	103.675.000	3 orang	99.849.921	100	96,31	3 orang	99.849.921,00	14,29	21,85	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
28.	5.03.02.2.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	1109 orang	290.994.150	309 orang	25.924.700	200 orang	55.380.000	283 orang	52.694.967	141,5	95,15	592 orang	78.619.667,00	53,38	27,02	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Melebihi Target
29.	5.03.02.2.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	6 laporan	335.690.000	2 laporan	62.850.018	1 laporan	70.290.000	1 laporan	63.482.350	100	90,31	3 laporan	126.332.368,00	50	37,63	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
30.	5.03.02.2.04.09	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dikeluarkan	5 dokumen	274.957.000	1 dokumen	21.770.000	1 dokumen	27.020.000	1 dokumen	25.838.200	100	95,63	2 dokumen	47.608.200,00	40	17,31	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	108,3	93,79			41,53	29,2		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	135,62	79,2			93,82	13,77		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Nilai Implementasi Manajemen Talenta Pegawai ASN**	**80%**	**13.609.368.100**	**0%**	**2.137.894.544**	**0%**	**3.101.675.000**	**0%**	**2.930.486.701**	**0**	**94,48**	**0%**	**2.930.486.701,00**	**0**	**21,53**		**Tidak Tercapai**
	5.04.02.2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Pegawai yang Memenuhi Kualifikasi dan Kompetensi Minimal (aspek kompetensi kepemimpinan dan latsar CPNS/orientasi PPPK)	70%	13.609.368.100	35.08 %	2.137.894.544	55%	3.101.675.000	78,43%	2.930.486.701	142,6	94,48	78.43 %	2.930.486.701,00	112,04	21,53		Melebihi Target
31.	5.04.02.2.02.07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	12 laporan	13.609.368.100	4 laporan	2.137.894.544	2 laporan	3.101.675.000	2 laporan	2.930.486.701	100	94,48	6 laporan	5.068.381.245,00	50	37,24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	94,48			50	37,24		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	114,49	94,48			112,04	21,53		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	35,6	93,15			33,13	19,3		
											Predikat Kinerja (Program)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**99,22**	**92,85**			**52,64**	**33,95**		

												Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**		
								Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**19.168.377.062**		**17.798.295.169**									
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1) manajemen/tata kelola internal organisasi yang terbangun cukup baik dan lingkungan kerja yang relatif kondusif; 2) sumber daya yang tersedia (khususnya SDM dan anggaran); serta 3) komunikasi dan koordinasi yang terjalin/terbangun cukup baik dengan para																		
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1) belum optimalnya implementasi tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang manajemen ASN dan pengembangan SDM Aparatur; 2) kemampuan adaptasi SDM Aparatur tidak merata untuk menghadapi perubahan yang disruptif; 3) belum adanya																		
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1) melakukan konsolidasi internal dan meningkatkan kompetensi SDM Aparatur secara berkesinambungan; 2) mengoptimalkan sumber daya yang tersedia; 3) proaktif melakukan pencarian informasi terkait pengukuran Nilai Implementasi Manajemen Talenta ASN.																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nllai SAKIP)**	**80 (BB) Nilai**	**152.110.003.710**	**70.04 (BB) Nilai**	**14.807.143.763**	**72 (BB) Nilai**	**28.865.630.842**	**69,95 (BB) Nilai**	**20.222.029.541**	**97,15**	**70,06**	**69.95 (BB) Nilai**	**20.222.029.541,00**	**87,44**	**13,29**		**Tidak Tercapai**
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500%	1.548.213.617	100%	144.376.300	100%	266.957.800	100%	228.186.000	100	85,48	100%	228.186.000,00	20	14,74		Tercapai
1.	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	302.113.257	2 Dokumen	23.862.200	2 Dokumen	52.021.800	2 Dokumen	39.986.800	100	76,87	4 Dokumen	63.849.000,00	40	21,13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
2.	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	861.585.844	6 Laporan	86.622.100	6 Laporan	134.483.400	6 Laporan	130.546.600	100	97,07	12 Laporan	217.168.700,00	40	25,21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
3.	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	384.514.516	1 Laporan	33.892.000	1 Laporan	80.452.600	1 Laporan	57.652.600	100	71,66	2 Laporan	91.544.600,00	40	23,81	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	81,87			40	23,38		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	500%	78.329.374.278	100%	7.694.492.471	100%	14.436.428.742	100%	10.216.750.499	100	70,77	100%	10.216.750.499,00	20	13,04		Tercapai
4.	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3480 Orang/Bulan	75.188.981.931	696 Orang/Bulan	7.622.408.721	696 Orang/Bulan	13.908.897.342	696 Orang/Bulan	9.820.107.574	100	70,6	1392 Orang/Bulan	17.442.516.295,00	40	23,2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
5.	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	30 Dokumen	650.428.397	6 Dokumen	24.513.100	6 Dokumen	146.795.000	6 Dokumen	130.161.500	100	88,67	12 Dokumen	154.674.600,00	40	23,78	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
6.	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30 Laporan	355.751.745	6 Laporan	21.365.900	6 Laporan	70.736.700	6 Laporan	49.559.800	100	70,06	12 Laporan	70.925.700,00	40	19,94	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
7.	5.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	30 Laporan	2.134.212.205	6 Laporan	26.204.750	6 Laporan	309.999.700	6 Laporan	216.921.625	100	69,97	12 Laporan	243.126.375,00	40	11,39	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	74,83			40	19,58		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	500%	15.171.375.788	100%	2.803.009.538	100%	1.667.447.400	100%	1.101.258.404	100	66,04	100%	1.101.258.404,00	20	7,26		Tercapai
8.	5.02.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	5 Paket	807.490.368	1 Paket	35.098.000	1 Paket	233.648.000	1 Paket	191.170.000	100	81,82	1 Paket	191.170.000,00	20	23,67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
9.	5.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1000 Orang	372.832.420	200 Orang	9.916.500	200 Orang	350.799.400	200 Orang	34.616.800	100	9,87	400 Orang	44.533.300,00	40	11,94	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
10.	5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	320 Orang	13.991.053.000	320 Orang	2.757.995.038	320 Orang	1.083.000.000	320 Orang	875.471.604	100	80,84	640 Orang	3.633.466.642,00	200	25,97	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	57,51			86,67	20,53		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Lancarnya kegiatan administrasi Umum Perangkat Daerah	500%	10.299.675.437	100%	2.082.596.394	100%	4.515.732.700	100%	2.097.036.983	100	46,44	100%	2.097.036.983,00	20	20,36		Tercapai
11.	5.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket	546.235.518	1 Paket	31.855.000	1 Paket	142.989.200	1 Paket	63.936.100	100	44,71	1 Paket	63.936.100,00	20	11,7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
12.	5.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	7.628.264.052	1 Paket	1.553.406.357	1 Paket	2.363.718.500	1 Paket	1.681.630.000	100	71,14	1 Paket	1.681.630.000,00	20	22,04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
13.	5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	82.648.502	1 Paket	2.750.000	1 Paket	33.213.000	1 Paket	31.766.800	100	95,65	1 Paket	31.766.800,00	20	38,44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
14.	5.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	360 Dokumen	153.191.350	360 Dokumen	0	360 Dokumen	31.500.000	90 Dokumen	2.400.000	25	7,62	450 Dokumen	2.400.000,00	125	1,57	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tidak Tercapai
15.	5.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1730 Laporan	1.889.336.015	346 Laporan	494.585.037	346 Laporan	1.944.312.000	346 Laporan	317.304.083	100	16,32	692 Laporan	811.889.120,00	40	42,97	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	85	47,09			45	23,34		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	500%	27.799.590.000	100%	0	100%	4.990.000.000	100%	4.872.324.200	100	97,64	100%	4.872.324.200,00	20	17,53		Tercapai
16.	5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100 Unit	27.799.590.000	9 Unit	0	38 Unit	4.990.000.000	30 Unit	4.872.324.200	78,95	97,64	39 Unit	4.872.324.200,00	39	17,53	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	78,95	97,64			39	17,53		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500%	6.238.728.849	100%	446.155.532	100%	1.320.063.600	100%	808.643.031	100	61,26	100%	808.643.031,00	20	12,96		Tercapai
17.	5.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	3.122.688.488	12 Laporan	383.681.932	12 Laporan	701.968.000	12 Laporan	451.422.231	100	64,31	24 Laporan	835.104.163,00	40	26,74	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
18.	5.02.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Laporan	797.501.361	12 Laporan	54.520.000	12 Laporan	172.921.000	12 Laporan	39.015.000	100	22,56	24 Laporan	93.535.000,00	40	11,73	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
19.	5.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Laporan	2.318.539.000	12 Laporan	7.953.600	12 Laporan	445.174.600	12 Laporan	318.205.800	100	71,48	24 Laporan	326.159.400,00	40	14,07	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	52,78			40	17,51		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Lancarnya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500%	12.723.045.741	100%	1.636.513.528	100%	1.669.000.600	100%	897.830.424	100	53,79	100%	897.830.424,00	20	7,06		Tercapai
20.	5.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100 Unit	3.960.546.887	20 Unit	287.569.172	20 Unit	999.791.400	20 Unit	416.962.624	100	41,7	40 Unit	704.531.796,00	40	17,79	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
21.	5.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	4.609.089.740	0 Unit	0	10 Unit	57.500.000	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tidak Tercapai
22.	5.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit	4.153.409.114	20 Unit	1.348.944.356	20 Unit	611.709.200	20 Unit	480.867.800	100	78,61	40 Unit	1.829.812.156,00	200	44,06	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	66,67	40,11			80	20,61		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	68,77			20	13,28		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**90%**	**1.698.368.101.032**	**87%**	**247.724.568.922**	**87%**	**322.987.754.375**	**78,74%**	**202.901.992.321**	**90,5**	**62,82**	**78738%**	**202.901.992.321,00**	**87,49**	**11,95**		**Tidak Tercapai**
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	500%	14.933.547.670	100%	1.469.554.622	100%	2.987.984.900	100%	2.307.977.200	100	77,24	100%	2.307.977.200,00	20	15,45		Tercapai
23.	5.02.02.2.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	772.198.820	2 Dokumen	88.510.115	2 Dokumen	145.743.000	2 Dokumen	79.341.116	100	54,44	4 Dokumen	167.851.231,00	40	21,74	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai

24.	5.02.02.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	10 Dokumen	769.547.570	2 Dokumen	87.005.600	2 Dokumen	113.810.000	2 Dokumen	76.589.170	100	67,3	4 Dokumen	163.594.770,00	40	21,26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
25.	5.02.02.2.01.03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	150 Dokumen	4.996.377.253	30 Dokumen	452.065.958	30 Dokumen	973.853.000	30 Dokumen	784.993.908	100	80,61	60 Dokumen	1.237.059.866,00	40	24,76	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
26.	5.02.02.2.01.05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA SKPD yang Diverifikasi	150 Dokumen	195.927.260	30 Dokumen	23.112.900	30 Dokumen	82.321.000	30 Dokumen	64.974.488	100	78,93	60 Dokumen	88.087.388,00	40	44,96	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
27.	5.02.02.2.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	10 Dokumen	1.806.755.800	2 Dokumen	184.878.873	2 Dokumen	421.780.000	2 Dokumen	264.952.145	100	62,82	4 Dokumen	449.831.018,00	40	24,9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
28.	5.02.02.2.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	10 Dokumen	1.795.637.670	2 Dokumen	184.351.400	2 Dokumen	245.926.000	2 Dokumen	204.058.219	100	82,98	4 Dokumen	388.409.619,00	40	21,63	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
29.	5.02.02.2.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	10 Dokumen	4.597.103.297	2 Dokumen	449.629.776	2 Dokumen	1.004.551.900	2 Dokumen	833.068.154	100	82,93	4 Dokumen	1.282.697.930,00	40	27,9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	72,86			40	26,73		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Meningkatnya Sistem Perbendaharaan Daerah	500%	15.342.804.176	100%	1.369.596.691	100%	3.989.670.800	100%	3.464.195.171	100	86,83	100%	3.464.195.171,00	20	22,58		Tercapai
30.	5.02.02.2.02.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen	2.442.651.990	12 Dokumen	183.826.300	12 Dokumen	377.590.000	12 Dokumen	254.464.696	100	67,39	24 Dokumen	438.290.996,00	200	17,94	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
31.	5.02.02.2.02.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	661.724.117	12 Dokumen	227.872.131	12 Dokumen	197.571.400	12 Dokumen	178.653.308	100	90,42	24 Dokumen	406.525.439,00	40	61,43	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
32.	5.02.02.2.02.06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	500 Dokumen	1.914.561.012	0 Dokumen	0	100 Dokumen	1.262.972.000	100 Dokumen	1.097.045.434	100	86,86	100 Dokumen	1.097.045.434,00	20	57,3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
33.	5.02.02.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	15 Laporan	1.629.608.253	3 Laporan	0	3 Laporan	429.991.000	3 Laporan	337.286.498	100	78,44	6 Laporan	337.286.498,00	40	20,7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
34.	5.02.02.2.02.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	60 Dokumen	2.004.884.637	12 Dokumen	229.364.000	12 Dokumen	466.668.500	12 Dokumen	457.802.596	100	98,1	24 Dokumen	687.166.596,00	40	34,27	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
35.	5.02.02.2.02.10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen	2.203.494.023	2 Dokumen	728.534.260	2 Dokumen	340.101.700	2 Dokumen	299.130.313	100	87,95	4 Dokumen	1.027.664.573,00	40	46,64	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
36.	5.02.02.2.02.11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	4.485.880.144	0 Orang	0	100 Orang	914.776.200	100 Orang	839.812.326	100	91,81	100 Orang	839.812.326,00	20	18,72	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	85,85			57,14	36,72		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Lancarnya kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	500%	12.883.720.222	0%	1.263.969.154	100%	3.532.745.300	100%	2.906.295.203	100	82,27	100%	2.906.295.203,00	20	22,56		Tercapai
37.	5.02.02.2.03.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	3840 Dokumen	1.811.742.441	0 Dokumen	0	768 Dokumen	482.367.600	768 Dokumen	385.095.198	100	79,83	768 Dokumen	385.095.198,00	20	21,26	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
38.	5.02.02.2.03.03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	90 Laporan	626.075.076	18 Laporan	95.447.352	18 Laporan	157.291.000	18 Laporan	98.151.000	100	62,4	36 Laporan	193.598.352,00	40	30,92	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
39.	5.02.02.2.03.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3040 Laporan	624.389.967	608 Laporan	117.761.890	608 Laporan	127.463.100	608 Laporan	87.406.393	100	68,57	1216 Laporan	205.168.283,00	40	32,86	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
40.	5.02.02.2.03.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	5 Dokumen	1.764.570.956	1 Dokumen	176.459.350	1 Dokumen	316.528.300	1 Dokumen	266.868.700	100	84,31	2 Dokumen	443.328.050,00	40	25,12	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
41.	5.02.02.2.03.08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	5 Dokumen	3.045.217.617	1 Dokumen	772.822.665	1 Dokumen	444.414.100	1 Dokumen	364.774.964	100	82,08	2 Dokumen	1.137.597.629,00	40	37,36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
42.	5.02.02.2.03.11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	500 Orang	5.011.724.165	100 Orang	101.477.897	100 Orang	2.004.681.200	100 Orang	1.703.998.948	100	85	200 Orang	1.805.476.845,00	40	36,03	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	77,03			36,67	30,59		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan kelancaran penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah	500%	1.655.208.028.964	100%	243.621.448.455	100%	312.477.353.375	100%	194.223.524.747	100	62,16	100%	194.223.524.747,00	20	11,73		Tercapai
43.	5.02.02.2.04.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	30 Laporan	1.510.917.078.384	6 Laporan	241.043.447.300	6 Laporan	305.046.166.000	6 Laporan	191.363.763.800	100	62,73	12 Laporan	432.407.211.100,00	40	28,62	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
44.	5.02.02.2.04.09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	30 Laporan	134.716.754.261	6 Laporan	1.203.971.500	6 Laporan	5.603.265.908	6 Laporan	1.034.500.000	100	18,46	12 Laporan	2.238.471.500,00	40	1,66	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
45.	5.02.02.2.04.10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	30 Laporan	9.574.196.319	6 Laporan	1.374.029.655	6 Laporan	1.827.921.467	6 Laporan	1.825.260.947	100	99,85	12 Laporan	3.199.290.602,00	40	33,42	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	60,35			40	21,23		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	77,12			20	18,08		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH**	**3 angka**	**17.124.197.273**	**2.6 angka**	**1.940.640.213**	**2.7 angka**	**3.656.389.400**	**2,7 angka**	**3.291.292.316**	**100**	**90,01**	**2.7 angka**	**3.291.292.316,00**	**90**	**19,22**		**Tercapai**
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	INDEKS PENGELOLAAN ASET DAERAH	3 angka	17.124.197.273	2.6 angka	1.940.640.213	2.7 angka	3.656.389.400	2,7 angka	3.291.292.316	100	90,01	2.7 angka	3.291.292.316,00	90	19,22		Tercapai
46.	5.02.03.2.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	10 Dokumen	1.228.642.996	2 Dokumen	120.129.500	2 Dokumen	238.774.800	2 Dokumen	236.640.900	100	99,11	4 Dokumen	356.770.400,00	40	29,04	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
47.	5.02.03.2.01.03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	300 Dokumen	3.579.330.467	60 Dokumen	72.036.400	60 Dokumen	755.971.400	60 Dokumen	736.913.640	100	97,48	120 Dokumen	808.950.040,00	40	22,6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
48.	5.02.03.2.01.04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	10 Dokumen	931.392.304	2 Dokumen	268.636.037	2 Dokumen	128.336.200	2 Dokumen	124.227.590	100	96,8	4 Dokumen	392.863.627,00	40	42,18	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
49.	5.02.03.2.01.06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	150 Laporan	624.788.424	30 Laporan	107.253.500	30 Laporan	379.899.100	30 Laporan	356.484.498	100	93,84	60 Laporan	463.737.998,00	40	74,22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai

50.	5.02.03.2.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	150 Laporan	2.910.921.320	30 Laporan	483.505.870	30 Laporan	601.170.500	30 Laporan	580.419.365	100	96,55	60 Laporan	1.063.925.235,00	40	36,55	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
51.	5.02.03.2.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	150 Laporan	281.073.651	30 Laporan	50.031.405	30 Laporan	49.641.500	30 Laporan	39.986.710	100	80,55	60 Laporan	90.018.115,00	40	32,03	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
52.	5.02.03.2.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	150 Dokumen	2.565.941.556	30 Dokumen	322.976.850	30 Dokumen	462.858.200	30 Dokumen	313.789.092	100	67,79	60 Dokumen	636.765.942,00	40	24,82	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
53.	5.02.03.2.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	150 Laporan	4.449.111.956	30 Laporan	443.081.587	30 Laporan	943.926.000	30 Laporan	830.639.821	100	88	60 Laporan	1.273.721.408,00	40	28,63	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
54.	5.02.03.2.01.13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	450 Orang	552.994.599	90 Orang	72.989.064	90 Orang	95.811.700	90 Orang	72.190.700	100	75,35	180 Orang	145.179.764,00	40	26,25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	88,38			40	35,15		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	90,01			90	19,22		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
4.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase PBB P-2 BPHTB, Persentase Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB, dan Persentase Pendapatan non PAD**	**500%**	**16.065.765.629**	**100%**	**1.684.605.668**	**100%**	**4.011.163.200**	**100%**	**3.118.013.762**	**100**	**77,73**	**100%**	**3.118.013.762,00**	**20**	**19,41**		**Tercapai**
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Lancarnya kegiatan pengelolaan pendapatan daerah	500%	16.065.765.629	100%	1.684.605.668	100%	4.011.163.200	100%	3.118.013.762	100	77,73	100%	3.118.013.762,00	20	19,41		Tercapai
55.	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	1.715.629.713	2 Dokumen	358.918.028	2 Dokumen	383.337.800	2 Dokumen	339.356.313	100	88,53	4 Dokumen	698.274.341,00	40	40,7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
56.	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	15 Laporan	3.964.090.516	3 Laporan	123.697.015	3 Laporan	1.043.001.800	2 Laporan	663.249.800	66,67	63,59	5 Laporan	786.946.815,00	33,33	19,85	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tidak Tercapai
57.	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	5 Laporan	2.273.728.450	1 Laporan	205.578.517	1 Laporan	619.194.200	1 Laporan	543.263.190	100	87,74	2 Laporan	748.841.707,00	40	32,93	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
58.	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	210000 Objek Pajak	1.234.661.195	42000 Objek Pajak	205.994.201	42000 Objek Pajak	328.996.400	42000 Objek Pajak	267.018.334	100	81,16	84000 Objek Pajak	473.012.535,00	40	38,31	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
59.	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindak Lanjuti dan Belum Ditindak Lanjuti	3500 Laporan	2.126.621.372	3500 Laporan	240.946.107	3500 Laporan	949.593.000	3500 Laporan	702.459.014	100	73,97	7000 Laporan	943.405.121,00	200	44,36	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
60.	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	60 Dokumen	528.222.957	12 Dokumen	94.979.850	12 Dokumen	91.693.600	12 Dokumen	85.686.500	100	93,45	24 Dokumen	180.666.350,00	40	34,2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
61.	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertagihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak	60 Dokumen SSPD	1.362.164.403	12 Dokumen SSPD	221.529.300	12 Dokumen SSPD	261.714.200	12 Dokumen SSPD	236.820.700	100	90,49	24 Dokumen SSPD	458.350.000,00	40	33,65	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
62.	5.02.04.2.01.12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindak Lanjuti	60 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	977.121.334	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	82.831.950	12 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	142.852.800	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	119.115.850	8,33	83,38	13 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	201.947.800,00	21,67	20,67	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tidak Tercapai
63.	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan	60 Dokumen LHP	1.883.525.689	12 Dokumen LHP	150.130.700	12 Dokumen LHP	190.779.400	12 Dokumen LHP	161.044.061	100	84,41	24 Dokumen LHP	311.174.761,00	40	16,52	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		86,11	82,97			55	31,24		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	77,73			20	19,41		
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		96,91	75,16			71,23	15,97		
										Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**94,9**	**63,84**			**48,24**	**27,74**		
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
									359.520.937.817		**229.533.327.940**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Pelaksanaan semua kegiatan mencapai 100%																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Masih ada sub kegiatan yang tidak terealisasi di triwulan IV																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		-																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**	**78.2 Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**34.644.941.281**	**75.84 Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**6.791.510.477**	**72.4 Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**9.956.811.549**	**73,6 Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**9.122.300.744**	**101,66**	**91,62**	**73.6 Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**9.122.300.744,00**	**94,12**	**26,33**		**Melebihi Target**
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen (%)	600.121.953	100 Persen (%)	212.545.210	100 Persen (%)	232.838.000	100 Persen (%)	210.525.852	100	90,42	100 Persen (%)	210.525.852,00	100	35,08		Tercapai
1.	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	445.430.600	2 Dokumen	145.198.610	2 Dokumen	130.734.400	2 Dokumen	121.157.152	100	92,67	4 Dokumen	266.355.762,00	40	59,8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
2.	1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan	50.659.078	1 Laporan	20.541.600	1 Laporan	35.765.200	1 Laporan	32.760.200	100	91,6	2 Laporan	53.301.800,00	40	105,22	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
3.	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	104.032.275	1 Laporan	46.805.000	1 Laporan	66.338.400	1 Laporan	56.608.500	100	85,33	2 Laporan	103.413.500,00	40	99,41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	89,87			40	88,14		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen (%)	30.481.094.893	100 Persen (%)	5.051.906.344	100 Persen (%)	6.535.809.949	100 Persen (%)	5.984.634.717	100	91,57	100 Persen (%)	5.984.634.717,00	100	19,63		Tidak Tercapai
4.	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/ bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang/bulan	30.481.094.893	43 orang/bulan	5.051.906.344	43 orang/bulan	6.535.809.949	39 orang/bulan	5.984.634.717	90,7	91,57	82 orang/bulan	11.036.541.061,00	190,7	36,21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		90,7	91,57			190,7	36,21		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen (%)	1.101.406.992	100 Persen (%)	609.150.699	100 Persen (%)	1.277.584.600	100 Persen (%)	1.198.829.101	100	93,84	100 Persen (%)	1.198.829.101,00	100	108,85		Tercapai
5.	1.05.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas danfungsi	100 orang	921.804.392	20 orang	515.522.299	20 orang	701.534.600	20 orang	640.207.201	100	91,26	40 orang	1.155.729.500,00	40	125,38	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
6.	1.05.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 orang	179.602.600	20 orang	93.628.400	20 orang	576.050.000	20 orang	558.621.900	100	96,97	40 orang	652.250.300,00	40	363,16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	94,12			40	244,27		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen (%)	1.373.478.962	100 Persen (%)	351.304.860	100 Persen (%)	426.513.000	100 Persen (%)	413.808.344	100	97,02	100 Persen (%)	413.808.344,00	100	30,13		Tercapai
7.	1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	60 paket	252.137.400	12 paket	50.565.600	12 paket	61.834.300	12 paket	53.849.200	100	87,09	24 paket	104.414.800,00	40	41,41	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
8.	1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 paket	93.517.500	12 paket	16.936.500	12 paket	21.608.700	12 paket	21.557.900	100	99,76	24 paket	38.494.400,00	40	41,16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
9.	1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	60 dokumen	32.842.062	12 dokumen	8.520.000	12 dokumen	8.580.000	12 dokumen	8.470.000	100	98,72	24 dokumen	16.990.000,00	40	51,73	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
10.	1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 laporan	994.982.000	12 laporan	275.282.760	12 laporan	334.490.000	12 laporan	329.931.244	100	98,64	24 laporan	605.214.004,00	40	60,83	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	96,05			40	48,78		Tercapai

											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100 Persen (%)	261.925.883	100 Persen (%)	239.504.000	100 Persen (%)	887.164.800	100 Persen (%)	772.412.271	100	87,07	100 Persen (%)	772.412.271,00	100	294,9		Tercapai
11.	1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	125.000.000	5 Unit	119.560.000	100	95,65	5 Unit	119.560.000,00	0	0		
12.	1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	15 unit	261.925.883	3 unit	239.504.000	3 unit	762.164.800	3 unit	652.852.271	100	85,66	6 unit	892.356.271,00	40	340,69	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	90,65			20	170,35		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100 Persen (%)	531.909.015	100 Persen (%)	84.150.364	100 Persen (%)	134.814.700	100 Persen (%)	95.616.769	100	70,92	100 Persen (%)	95.616.769,00	100	17,98		Tercapai
13.	1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	531.909.015	12 laporan	84.150.364	12 laporan	134.814.700	12 laporan	95.616.769	100	70,92	24 laporan	179.767.133,00	40	33,8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	70,92			40	33,8		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100 Persen (%)	295.003.583	100 Persen (%)	242.949.000	100 Persen (%)	462.086.500	100 Persen (%)	446.473.690	100	96,62	100 Persen (%)	446.473.690,00	100	151,35		Tercapai
14.	1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	225 unit	261.925.883	45 unit	239.504.000	45 unit	446.986.500	45 unit	431.438.690	100	96,52	90 unit	670.942.690,00	40	256,16	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
15.	1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	405 unit	33.077.700	81 unit	3.445.000	81 unit	15.100.000	81 unit	15.035.000	100	99,57	162 unit	18.480.000,00	40	55,87	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,05			40	156,01		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	89,64			100	93,99		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum**	**3750 Kegiatan**	**29.415.134.323**	**750 Kegiatan**	**5.492.792.760**	**750 Kegiatan**	**7.574.102.560**	**750 Kegiatan**	**7.442.635.433**	**100**	**98,26**	**1500 Kegiatan**	**12.935.428.193,00**	**40**	**43,98**		**Tercapai**
			Jumlah SDM Satpol PP yang Terdidik dan Teratih	100 Orang		40 Orang		20 Orang		20 Orang		100		60,00 Orang		60			Tercapai
			Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitanya	100 Persen (%)		100 Persen (%)		100 Persen (%)		100 Persen (%)		100		100,00 Persen (%)		100			Tercapai
			Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	100 Persen (%)		0 Persen (%)		100 Persen (%)		100 Persen (%)		100		100,00 Persen (%)		100			Tercapai
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Temuan pelanggaran trantibum yang di tindak lanjuti	50 kasus	27.003.188.063	66 kasus	5.388.650.760	60 kasus	7.022.460.760	60 kasus	6.909.009.887	100	98,38	126 kasus	12.297.660.647,00	252	45,54		Tercapai
			Persentase SDM Satpol PP yang tersertifikasi kompetensi	100 Persen (Persen)		60 Persen (Persen)		75 Persen (Persen)		75 Persen (Persen)		100		75 Persen (Persen)		75			Tercapai
			Jumlah Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitanya	11775 Orang		2355 Orang		2355 Orang		2355 Orang		100		2.355 Orang		20			Tercapai
			persentase dukungan kerjasama SKPD Pengampu Perda	100 Persen (%)		60 Persen (%)		70 Persen (%)		70 Persen (%)		100		70 Persen (%)		70			Tercapai
16.	1.05.02.2.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	37500 kasus	23.745.196.900	7500 kasus	5.008.833.460	7500 kasus	6.372.939.760	7500 kasus	6.263.758.159	100	98,29	15000 kasus	11.272.591.619,00	40	47,47	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
17.	1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	40 Dokumen	999.428.500	8 Dokumen	278.290.400	8 Dokumen	497.976.000	8 Dokumen	494.004.628	100	99,2	16 Dokumen	772.295.028,00	40	77,27	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
18.	1.05.02.2.01.07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatandan ketertiban Umum	20 Dokumen	2.258.562.663	4 Dokumen	101.526.900	4 Dokumen	151.545.000	4 Dokumen	151.247.100	100	99,8	8 Dokumen	252.774.000,00	40	11,19	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,1			40	45,31		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada yang di Tegakkan	120 Perda	2.411.946.260	24 Perda	104.142.000	24 Perda	551.641.800	24 Perda	533.625.546	100	96,73	48 Perda	637.767.546,00	40	26,44		Tercapai
			Jumlah temuan yang di tindaklanjuti sampai ke persidangan	50 Kasus		10 Kasus		10 Kasus		10 Kasus		100		10 Kasus		20			Tercapai
19.	1.05.02.2.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/	40 laporan	379.110.600	8 laporan	52.071.000	8 laporan	119.551.800	8 laporan	113.780.000	100	95,17	16 laporan	165.851.000,00	40	43,75	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
20.	1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	120 laporan	2.032.835.660	24 laporan	52.071.000	24 laporan	432.090.000	24 laporan	419.845.546	100	97,17	48 laporan	471.916.546,00	40	23,21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,17			40	33,48		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	32,52			48,67	12		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	100,33	96,94			26,82	14,06		
											Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**99,53**	**94,49**			**45,53**	**93,69**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**17.530.914.109**								**16.564.936.177**
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. - Mekanisme kerja yang baik diantara unit kerja Satuan Polisi Pamong Praja 2. - Upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. 3. - Upaya peningkatan sarana dan prasarana penunjang ketugasan kantor dan kedinasan di luar kantor.4. -																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1.Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang bersertifikasi/ memiliki keahlian khusus seperti Intelijen, PPNS, maupun Pengadaan barang/ Jasa 2.□ Terbatasnya																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kelengkapan Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bal;angan yang refresentatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 2. 3. Melakukan koordinasi secara intensif bersama instansi dan OPD di																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Rasio penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang terpenuhi**	**1%**	**2.451.470.612**	**10.14 %**	**957.181.050**	**1%**	**654.655.600**	**1,50%**	**651.918.599**	**150**	**99,58**	**1.5 %**	**651.918.599,00**	**150**	**26,59**		**Melebihi Target**
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan yang tersedia	8 Unit	2.451.470.612	9 Unit	957.181.050	3 Unit	654.655.600	3 Unit	651.918.599	100	99,58	12 Unit	1.609.099.649,00	150	65,64		Tercapai
1.	2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah lumbung pangan yang tersedia	6 Unit	1.771.315.600	2 Unit	397.146.250	1 Unit	345.856.000	1 Unit	344.580.799	100	99,63	3 Unit	741.727.049,00	50	41,87	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
2.	2.09.02.2.01.03	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	4 Unit	680.155.012	1 Unit	560.034.800	2 Unit	308.799.600	2 Unit	307.337.800	100	99,53	3 Unit	867.372.600,00	75	127,53	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,58			62,5	84,7		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Tinggi		Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,58			150	65,64		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Tercapai

2.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Skor PPH Konsumsi**	**87.8 %**	**5.144.777.542**	**82.43 %**	**4.102.311.408**	**87.5 %**	**1.376.588.900**	**89,60%**	**1.312.136.161**	**102,4**	**95,32**	**89.6 %**	**1.312.136.161,00**	**102,05**	**25,5**		**Melebihi Target**
			Skor PPH Ketersediaan	85.6		0		85.45		85,78		100,39		85,78		100,21			Melebihi Target
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	9 Dokumen	2.157.633.462	25 Dokumen	1.136.376.419	0 Dokumen	627.734.500	15 Dokumen	609.887.000	0	97,16	40 Dokumen	1.746.263.419,00	444,44	80,93		Tidak Tercapai
			Jumlah kegiatan pendampingan pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	8 Kegiatan		0 Kegiatan		2 Kegiatan		2 Kegiatan		100		2 Kegiatan		25			Tercapai
			Jumlah dokumen pendukung stabilitas pasokan dan harga pangan yang tersedia	48 Dokumen		0 Dokumen		12 Dokumen		12 Dokumen		100		12 Dokumen		25			Tercapai
3.	2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	39 Dokumen	439.944.370	13 Dokumen	78.443.189	13 Dokumen	73.187.800	13 Dokumen	72.821.800	100	99,5	26 Dokumen	151.264.989,00	66,67	34,38	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
4.	2.09.03.2.01.02	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan berbasis sumber daya lokal yang tersedia	4 Laporan	1.295.044.100	1 Laporan	138.805.080	1 Laporan	87.322.100	1 Laporan	87.108.600	100	99,76	2 Laporan	225.913.680,00	50	17,44	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
5.	2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Terpantaunya perkembangan harga pangan pokok Kabupaten (laporan)	64 Laporan	207.199.146	12 Laporan	863.996.250	12 Laporan	420.340.300	12 Laporan	403.350.300	100	95,96	24 Laporan	1.267.346.550,00	37,5	611,66	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
			Jumlah Operasi Pasar dan Pasar Murah tang Terlaksana	11 Kali		5 Kali		5 Kali		40 Kali		800		40		363,64			Tercapai
6.	2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok PUPM yang Dibina	20 Kelompok	215.445.846	4 Kelompok	55.131.900	4 Kelompok	46.884.300	4 Kelompok	46.606.300	100	99,41	8 Kelompok	101.738.200,00	40	47,22	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	240	78,92			38,83	142,14		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Melebihi Target
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersalurkan (ton)	316 Ton	676.163.820	10 Ton	1.127.750.142	37 Ton	481.358.100	8,914 Ton	443.193.930	24,09	92,07	18.914 Ton	1.570.944.072,00	5,99	232,33		Tidak Tercapai
			Jumlah Ketersediaan Pangan Utama	66657.1 Ton		0 Ton		12950 Ton		12857 Ton		99,28		12.857 Ton		19,29			Tidak Tercapai
7.	2.09.03.2.02.03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	jumlah cadangan pangan pemerintah yang tersedia	316 Ton	676.163.820	10 Ton	1.127.750.142	37 Ton	481.358.100	37,415 Ton	443.193.930	101,12	92,07	47,415 Ton	1.570.944.072,00	15	232,33	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Melebihi Target
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	101,12	92,07			15	232,33		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		Melebihi Target
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Jumlah dokumen Penentuan perumusan dan rekomendasi terkait harga minimum pangan pokok lokal	3 Dokumen	770.656.160	9 Dokumen	159.136.400	1 Dokumen	64.446.600	1 Dokumen	64.442.600	100	99,99	10 Dokumen	223.579.000,00	333,33	29,01		Tercapai
8.	2.09.03.2.03.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal	12 Laporan	770.656.160	9 Laporan	159.136.400	4 Laporan	64.446.600	4 Laporan	64.442.600	100	99,99	13 Laporan	223.579.000,00	108,33	29,01	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,99			108,33	29,01		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Tercapai
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Direktori konsumsi pangan Kabupaten	4 Dokumen	1.540.324.100	11 Dokumen	1.679.048.447	1 Dokumen	203.049.700	1 Dokumen	194.612.631	100	95,84	12 Dokumen	1.873.661.078,00	300	121,64		Tercapai
9.	2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target konsumsi pangan per kapita per tahun	4 Dokumen	245.280.000	1 Dokumen	66.593.000	1 Dokumen	23.648.000	1 Dokumen	23.457.000	100	99,19	2 Dokumen	90.050.000,00	50	36,71	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
10.	2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	16 Laporan	1.295.044.100	10 Laporan	1.612.455.447	4 Laporan	179.401.700	4 Laporan	171.155.631	100	95,4	14 Laporan	1.783.611.078,00	87,5	137,73	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,3			68,75	87,22		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	74,77	55,01			154,82	66,27		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase penanganan desa rentan pangan**	**80%**	**695.262.844**	**3.18 %**	**221.369.900**	**27.78 %**	**183.944.000**	**17%**	**168.742.900**	**138,8**	**91,74**	**17%**	**168.742.900,00**	**178,75**	**24,27**		**Melebihi Target**
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	4 Dokumen	296.994.558	1 Dokumen	83.044.700	1 Dokumen	135.382.800	1 Dokumen	122.359.300	100	90,38	2 Dokumen	205.404.000,00	50	69,16		Tercapai
11.	2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	4 Dokumen	296.994.558	1 Dokumen	83.044.700	1 Dokumen	135.382.800	1 Dokumen	122.359.300	100	90,38	2 Dokumen	205.404.000,00	50	69,16	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	90,38			50	69,16		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan penanganan kerawanan pangan dan gizi yang terlaksana	1 Dokumen	398.268.286	1 Dokumen	138.325.200	1 Dokumen	48.561.200	1 Dokumen	46.383.600	100	95,52	2 Dokumen	184.708.800,00	200	46,38		Tercapai
12.	2.09.04.2.02.02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan , pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	4 Dokumen	398.268.286	2 Dokumen	138.325.200	1 Dokumen	48.561.200	1 Dokumen	46.383.600	100	95,52	3 Dokumen	184.708.800,00	75	46,38	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,52			75	46,38		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	92,95			125	57,77		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
4.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan**	**90%**	**465.679.103**	**100%**	**79.456.700**	**100%**	**32.699.400**	**100%**	**32.477.000**	**100**	**99,32**	**100%**	**32.477.000,00**	**111,11**	**6,97**		**Tercapai**
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen pangan segar asal tumbuhan (PSAT) yang di uji mutu dan keamanannya	24 Dokumen	465.679.103	24 Dokumen	79.456.700	12 Dokumen	32.699.400	12 Dokumen	32.477.000	100	99,32	36 Dokumen	111.933.700,00	150	24,04		Tercapai
13.	2.09.05.2.01.05	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	56 Kali	465.679.103	24 Kali	79.456.700	24 Kali	32.699.400	24 Kali	32.477.000	100	99,32	48 Kali	111.933.700,00	85,71	24,04	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,32			85,71	24,04		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,32			150	24,04		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)**	**6%**	**0**	**0%**	**0**	**3%**	**13.949.400**	**2,50%**	**5.640.000**	**83,33**	**40,43**	**2.5 %**	**5.640.000,00**	**41,67**	**0**		**Tidak Tercapai**
			Persentase peningkatan produktivitas perikanan tangkap (%)	6%		0%		3%		2,50%		83,33		2,50%		41,67			Tidak Tercapai
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah produksi perikanan tangkap (Ton)	1009.2 Ton	0	0 Ton	0	980.7 Ton	13.949.400	810 Ton	5.640.000	82,59	40,43	810 Ton	5.640.000,00	80,26	0		Tidak Tercapai
14.	3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	16 Dokumen	0	0 Dokumen	0	4 Dokumen	13.949.400	4 Dokumen	5.640.000	100	40,43	4 Dokumen	5.640.000,00	25	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	40,43			25	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	82,59	40,43			80,26	0		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)**	**61%**	**4.804.390.249**	**9.18 %**	**16.023.800.319**	**30.4 %**	**29.176.039.900**	**34,20%**	**27.562.001.386**	**112,5**	**94,47**	**34.2 %**	**27.562.001.386,00**	**56,07**	**573,68**		**Melebihi Target**

			Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%)	4.5 %		0%		2.25 %		1,10%		48,89		1,10%		24,44			Tidak Tercapai
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelembagaan Kelompok Perikanan yang meningkat kelasnya (kelompok)	46 kelompok	197.342.446	5 kelompok	102.254.800	6 kelompok	286.445.500	4 kelompok	263.326.238	66,67	91,93	9 kelompok	365.581.038,00	19,57	185,25		Tidak Tercapai
15.	3.25.04.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	30 Kelompok	143.324.204	5 Kelompok	87.155.700	5 Kelompok	80.979.500	5 Kelompok	72.259.500	100	89,23	10 Kelompok	159.415.200,00	33,33	111,23	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
16.	3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	40 Kelompok	54.018.242	1 Kelompok	15.099.100	8 Kelompok	205.466.000	8 Kelompok	191.066.738	100	92,99	9 Kelompok	206.165.838,00	22,5	381,66	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	91,11			27,92	246,44		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	924.7 ton	4.607.047.803	976 ton	15.921.545.519	904.8 ton	28.889.594.400	1298,7 ton	27.298.675.148	143,53	94,49	2274.7 ton	43.220.220.667,00	245,99	938,13		Melebihi Target
			Jumlah produksi perikanan budidaya berdasarkan produktivitas (Ton)	0 Ton		0 Ton		904.8 Ton		1648,75 Ton		182,22		1.649 Ton		inf			Melebihi Target
17.	3.25.04.2.04.02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Produksi Bibit ikan Unggul (ekor)	1600000 Ekor	1.282.241.822	752400 Ekor	1.278.884.220	1200000 Ekor	1.163.349.800	927700 Ekor	1.053.992.256	77,31	90,6	1680100 Ekor	2.332.876.476,00	105,01	181,94	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
18.	3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	57 Unit	3.267.236.704	99 Unit	14.619.293.299	120 Unit	27.662.331.600	120 Unit	26.200.838.744	100	94,72	219 Unit	40.820.132.043,00	384,21	1.249,38	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
19.	3.25.04.2.04.04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	24 Dokumen	57.569.277	4 Dokumen	23.368.000	4 Dokumen	63.913.000	4 Dokumen	43.844.148	100	68,6	8 Dokumen	67.212.148,00	33,33	116,75	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	92,44	84,64			174,18	516,02		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	130,81	62,14			88,52	374,46		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi		
7.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Peningkatan Kawasan Perikanan Lestari (%)**	**24%**	**144.236.387**	**4%**	**100.141.100**	**12%**	**296.866.200**	**12%**	**283.987.850**	**100**	**95,66**	**16%**	**384.128.950,00**	**66,67**	**266,32**		**Tercapai**
	3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Luas kawasan perikanan lestari yang terawasi (Ha)	334.8 Ha	144.236.387	280.8 Ha	100.141.100	302.4 Ha	296.866.200	302,4 Ha	283.987.850	100	95,66	302.4 Ha	283.987.850,00	90,32	196,89		Tercapai
20.	3.25.05.2.01.01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota (Dokumen)	16 Dokumen	144.236.387	0 Dokumen	100.141.100	4 Dokumen	296.866.200	4 Dokumen	283.987.850	100	95,66	4 Dokumen	384.128.950,00	25	266,32	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,66			25	266,32		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	95,66			90,32	196,89		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
8.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**	**Rasio peningkatan diversifikasi produk olahan hasil perikanan (%)**	**100%**	**322.930.300**	**17.1 %**	**336.236.950**	**57%**	**681.708.900**	**57%**	**646.069.714**	**100**	**94,77**	**57%**	**646.069.714,00**	**57**	**200,06**		**Tercapai**
	3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang terstandar	7 Produk	247.529.150	0 Produk	321.886.950	4 Produk	353.248.700	4 Produk	336.270.714	100	95,19	4 Produk	336.270.714,00	57,14	135,85		Tercapai
21.	3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	6 Unit	247.529.150	9 Unit	321.886.950	1 Unit	353.248.700	1 Unit	336.270.714	100	95,19	10 Unit	658.157.664,00	166,67	265,89	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,19			166,67	265,89		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan yang diberikan fasilitas (Unit Usaha)	6 Unit	75.401.150	1 Unit	14.350.000	1 Unit	328.460.200	1 Unit	309.799.000	100	94,32	2 Unit	324.149.000,00	33,33	429,9		Tercapai
22.	3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	60 Pelaku Usaha	75.401.150	1 Pelaku Usaha	14.350.000	10 Pelaku Usaha	328.460.200	10 Pelaku Usaha	309.799.000	100	94,32	11 Pelaku Usaha	324.149.000,00	18,33	429,9	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	94,32			18,33	429,9		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	94,76			45,24	282,88		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
9.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**75 BB**	**271.839.787.524**	**69.96 BB**	**19.628.080.193**	**72 BB**	**31.455.768.846**	**72,7 BB**	**26.235.055.838**	**100,97**	**83,4**	**142.66 BB**	**45.863.136.031,00**	**190,21**	**16,87**		**Melebihi Target**
			Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	85		0		82		85,75		104,57		85,75		100,88			Melebihi Target
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, pengganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	232.858.997.700	100%	909.627.262	100%	649.056.100	100%	566.850.068	100	87,33	100%	566.850.068,00	100	0,24		Tercapai
23.	3.27.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	30 Dokumen	232.813.201.325	11 Dokumen	905.807.262	3 Dokumen	564.868.700	15 Dokumen	494.958.194	500	87,62	26 Dokumen	1.400.765.456,00	86,67	0,6	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Melebihi Target
24.	3.27.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	30 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	0	1 Dokumen	0	33,33	0	1 Dokumen	0	3,33	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
25.	3.27.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100	0	1 Dokumen	0	25	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
26.	3.27.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100	0	1 Dokumen	0	25	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
27.	3.27.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100	0	1 Dokumen	0	25	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
28.	3.27.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	24 Laporan	0	0 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	100	0	4 Laporan	0	16,67	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
29.	3.27.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	20 Laporan	45.796.375	4 Laporan	3.820.000	3 Laporan	84.187.400	4 Laporan	71.891.874	133,33	85,4	8 Laporan	75.711.874,00	40	165,32	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Melebihi Target
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	152,38	24,72			31,67	23,7		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	30.054.125.918	100%	13.718.371.652	100%	20.710.689.546	100%	17.466.327.618	100	84,33	100%	17.466.327.618,00	100	58,12		Tercapai
30.	3.27.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	137 Orang	29.943.626.214	100 Orang	13.698.693.620	132 Orang	20.474.293.546	130 Orang	17.245.135.064	98,48	84,23	130 Orang	17.245.135.064,00	94,89	57,59	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai

31.	3.27.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	110.499.704	100 Dokumen	19.678.032	0 Dokumen	236.396.000	100 Dokumen	221.192.554	0	93,57	100 Dokumen	221.192.554,00	833,33	200,17	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		49,24	88,9			464,11	128,88		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	898.125.295	100%	345.521.000	100%	1.201.975.000	100%	904.395.000	100	75,24	100%	904.395.000,00	100	100,7		Tercapai
32.	3.27.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut (Paket)	11 Paket	520.679.670	260 Paket	105.195.000	3 Paket	433.975.000	3 Paket	377.395.000	100	86,96	263 Paket	482.590.000,00	2.390,91	92,68	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
33.	3.27.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis (Orang)	110 Orang	377.445.625	31 Orang	240.326.000	4 Orang	20.000.000	4 Orang	19.500.000	100	97,5	35 Orang	259.826.000,00	31,82	68,84	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,23			1.211,36	80,76		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	2.432.390.583	100%	844.147.561	100%	2.401.102.300	100%	2.079.636.227	100	86,61	100%	2.079.636.227,00	100	85,5		Tercapai
34.	3.27.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	7 Paket	66.776.625	12 Paket	13.168.400	1 Paket	60.502.900	1 Paket	52.116.500	100	86,14	13 Paket	65.284.900,00	185,71	97,77	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
35.	3.27.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	8 paket	0	0 paket	0	3 paket	1.448.132.400	3 paket	1.171.926.500	100	80,93	3 paket	1.171.926.500,00	37,5	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
36.	3.27.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	12 Paket	510.402.992	12 Paket	72.792.900	2 Paket	106.804.000	2 Paket	77.700.300	100	72,75	14 Paket	150.493.200,00	116,67	29,49	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
37.	3.27.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12 Dokumen	39.684.346	12 Dokumen	7.320.000	2 Dokumen	10.184.000	2 Dokumen	7.560.000	100	74,23	14 Dokumen	14.880.000,00	116,67	37,5	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
38.	3.27.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	460 Laporan	1.815.526.620	12 Laporan	750.866.261	100 Laporan	775.479.000	100 Laporan	770.332.927	100	99,34	112 Laporan	1.521.199.188,00	24,35	83,79	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	82,68			96,18	49,71		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	3.207.367.030	100%	2.974.036.550	100%	5.353.904.500	100%	4.238.359.476	100	79,16	200%	7.212.396.026,00	200	224,87		Tercapai
39.	3.27.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	170 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	0	100	0	2 Unit	0	1,18	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
40.	3.27.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	336 Unit	0	0 Unit	0	276 Unit	0	276 Unit	0	100	0	276 Unit	0	82,14	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
41.	3.27.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	62 Unit	0	0 Unit	0	37 Unit	0	37 Unit	0	100	0	37 Unit	0	59,68	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
42.	3.27.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	13 Unit	0	0 Unit	0	8 Unit	0	8 Unit	0	100	0	8 Unit	0	61,54	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
43.	3.27.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	224 Unit	3.207.367.030	12 Unit	2.974.036.550	150 Unit	5.353.904.500	8 Unit	4.238.359.476	5,33	79,16	20 Unit	7.212.396.026,00	8,93	224,87	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		81,07	15,83			42,69	44,97		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	72%	2.371.180.998	12%	356.853.918	12%	455.395.000	12%	385.300.027	100	84,61	24%	742.153.945,00	33,33	31,3		Tercapai
44.	3.27.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	72 Laporan	61.701.083	12 Laporan	12.457.630	12 Laporan	14.995.000	12 Laporan	14.518.200	100	96,82	24 Laporan	26.975.830,00	33,33	43,72	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
45.	3.27.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	72 Laporan	2.309.479.915	12 Laporan	344.396.288	12 Laporan	440.400.000	12 Laporan	370.781.827	100	84,19	24 Laporan	715.178.115,00	33,33	30,97	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
46.	3.27.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	72 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	0	12 Laporan	0	100	0	12 Laporan	0	16,67	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	60,34			27,78	24,9		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	72%	17.600.000	12%	479.522.250	12%	683.646.400	12%	594.187.422	100	86,91	24%	1.073.709.672,00	33,33	6.100,62		Tercapai
47.	3.27.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	526 Unit	17.600.000	12 Unit	479.522.250	526 Unit	634.821.700	526 Unit	553.039.922	100	87,12	538 Unit	1.032.562.172,00	102,28	5.866,83	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
48.	3.27.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	526 Unit	0	0 Unit	0	526 Unit	48.824.700	526 Unit	41.147.500	100	84,28	526 Unit	41.147.500,00	100	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
49.	3.27.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Terpelihara (Unit)	5 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	0	1 Unit	0	100	0	1 Unit	0	20	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
50.	3.27.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	23 Unit	0	0 Unit	0	8 Unit	0	8 Unit	0	100	0	8 Unit	0	34,78	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	42,85			64,27	1.466,71		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	83,46			95,24	943,05		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
10.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan**	**6%**	**94.588.269.964**	**9.11 %**	**29.207.232.715**	**1%**	**72.001.854.774**	**0,60%**	**63.621.566.996**	**60**	**88,36**	**9.71 %**	**92.828.799.711,00**	**161,83**	**98,14**		**Tidak Tercapai**
			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	35%		18.24 %		5%		5,93%		118,6		5,93%		16,94			Melebihi Target
			Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	24%		17.4 %		6%		6%		100		23,40%		97,5			Tercapai
			Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	1.15 %		33.77 %		1%		1,31%		131		35,08%		3.050,43			Melebihi Target
			Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura	1.15 %		3.14 %		1%		1,26%		126		4,40%		382,61			Melebihi Target
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah luas peremajaan karet dan luas diversifikasi tanaman perkebunan	415 ha	52.516.858.330	100 ha	26.119.913.506	175 ha	62.299.069.974	158,5 ha	55.239.263.217	90,57	88,67	258.5 ha	81.359.176.723,00	62,29	154,92		Tidak Tercapai
			Jumlah Sarana Produksi untuk Pemeliharaan Kebun Daerah	4 Paket		260 Paket		1 Paket		0 Paket		0		0 Paket		0			Tidak Tercapai
			Jumlah Sarana Tanaman Pangan yang tersedia	56 paket		152 paket		14 paket		14 paket		100		14 paket		25			Tercapai
			Jumlah Sarana Hortikultura yang tersedia	40 Paket		2 Paket		10 Paket		10 Paket		100		10 Paket		25			Tercapai
			Jumlah Bibit atau Benih Padi BD dan BP yang berserfitikat	26 Ton		21 Ton		2 Ton		0 Ton		0		0 Ton		0			Tidak Tercapai
51.	3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	12 Laporan	1.785.590.350	9872 Laporan	175.393.100	0 Laporan	0	0 Laporan	0	0	0	9872 Laporan	175.393.100,00	82.266,67	9,82	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
52.	3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	16 Laporan	50.731.267.980	40321 Laporan	25.944.520.406	4 Laporan	62.299.069.974	4 Laporan	55.239.263.217	100	88,67	40325 Laporan	81.183.783.623,00	252.031,25	160,03	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
			Jumlah Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	16 Laporan		0 Laporan		4 Laporan		4 Laporan		100		4		25			Tercapai
			Jumlah Pendampingan penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	14 Laporan		0 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		100		2		14,29			Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		75	22,17			83.574,48	42,46		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kelahiran ternak hasil IB	660 Ekor	10.626.270.275	0 Ekor	1.997.702.854	0 Ekor	5.842.584.900	115 Ekor	5.321.775.931	0	91,09	115 Ekor	7.319.478.785,00	17,42	68,88		Tidak Tercapai

53.	3.27.02.2.02.01	Pembangunan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman (VUB)	3 VUB	6.378.420.437	2122.5 VUB	1.281.793.715	3 VUB	5.264.089.300	2 VUB	4.967.799.610	66,67	94,37	2124,5 VUB	6.249.593.325,00	70.816,67	97,98	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
54.	3.27.02.2.02.02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	36 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
55.	3.27.02.2.02.03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG hewan/Tanaman (Dokumen)	6 Dok	4.247.849.838	0 Dok	715.909.139	1 Dok	578.495.600	0 Dok	353.976.321	0	61,19	0 Dok	1.069.885.460,00	0	25,19	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
												22,22	51,85			23.605,56	41,06		Tidak Tercapai
												Sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pakan yang beredar	166 Ton	909.403.620	4 Ton	101.700.000	47 Ton	196.163.200	51 Ton	149.378.875	108,51	76,15	55 Ton	251.078.875,00	33,13	27,61		Tercapai
56.	3.27.02.2.03.02	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	48 Laporan	909.403.620	1 Laporan	101.700.000	12 Laporan	196.163.200	12 Laporan	149.378.875	100	76,15	13 Laporan	251.078.875,00	27,08	27,61	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
												100	76,15			27,08	27,61		Tercapai
												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih Ternak yang Beredar	624 Dosis	30.535.737.739	7750 Dosis	987.916.355	300 Dosis	3.664.036.700	300 Dosis	2.911.148.973	100	79,45	8050 Dosis	3.899.065.328,00	1.290,06	12,77		Tercapai
			Jumlah Bibit Ternak yang Beredar	505 Ekor		0 Ekor		243 Ekor		219 Ekor		90,12		219 Ekor		43,37			Tidak Tercapai
			Jumlah kelahiran ternak di Sentra Kawasan dan Perbibitan Peternakan	7 Ekor		0 Ekor		1 Ekor		1 Ekor		100		1 Ekor		14,29			Tercapai
57.	3.27.02.2.05.01	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar	72 Laporan	27.447.684.012	0 Laporan	234.141.000	12 Laporan	2.373.616.400	12 Laporan	1.818.182.073	100	76,6	12 Laporan	2.052.323.073,00	16,67	7,48	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
58.	3.27.02.2.05.05	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia (Laporan)	72 Laporan	3.088.053.727	8 Laporan	753.775.355	12 Laporan	1.290.420.300	12 Laporan	1.092.966.900	100	84,7	12 Laporan	1.092.966.900,00	16,67	35,39	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
												100	80,65			16,67	21,44		Tercapai
												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah penambahan populasi ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain	29650 Ekor	0	0 Ekor	0	6580 Ekor	0	0 Ekor	0	0	0	0 Ekor	0	0	0		Tidak Tercapai
59.	3.27.02.2.06.01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ekor)	37713 Ekor	0	0 Ekor	0	0 Ekor	0	0 Ekor	0	0	0	0 Ekor	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
60.	3.27.02.2.06.02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1478 Dosis	0	0 Dosis	0	0 Dosis	0	0 Dosis	0	0	0	0 Dosis	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
												0	0			0	0		Tidak Tercapai
												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												62,66	30,49			127,54	24,02		Tidak Tercapai
												Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
11.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Produksi Peternakan**	**120%**	**41.224.868.601**	**20%**	**32.929.854.400**	**4%**	**51.432.911.810**	**13,82%**	**48.498.460.454**	**345,5**	**94,29**	**33.82 %**	**81.428.314.854,00**	**28,18**	**197,52**		**Melebihi Target**
			Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	120%		18.46 %		20%		19%		95		37,46%		31,22			Tidak Tercapai
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan	90 Pekerjaan	0	0 Pekerjaan	0	18 Pekerjaan	0	18 Pekerjaan	0	100	0	18 Pekerjaan	0	20	0		Tercapai
												0	0			0	0		Tidak Tercapai
												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Tercapai
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpenuhi	219 Unit	32.067.606.002	178 Unit	28.909.391.200	39 Unit	48.941.634.600	237 Unit	46.597.730.684	607,69	95,21	415 Unit	75.507.121.884,00	189,5	235,46		Melebihi Target
61.	3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit)	21 Unit	5.587.286.820	132 Unit	388.009.800	6 Unit	1.214.853.500	6 Unit	1.199.676.737	100	98,75	138 Unit	1.587.686.537,00	657,14	28,42	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
62.	3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	17 Unit	947.417.401	7840 Unit	352.930.000	6 Unit	786.165.300	4 Unit	765.248.200	66,67	97,34	7844 Unit	1.118.178.200,00	46.141,18	118,02	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
63.	3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	100 Unit	15.546.421.210	18000 Unit	26.238.794.850	20 Unit	44.256.698.200	209 Unit	42.187.791.056	1.045,00	95,33	18209 Unit	68.426.585.906,00	18.209,00	440,14	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Melebihi Target
64.	3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	40 Unit	9.986.480.571	6 Unit	1.929.656.550	7 Unit	2.683.917.600	18 Unit	2.445.014.691	257,14	91,1	24 Unit	4.374.671.241,00	60	43,81	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Melebihi Target
												367,2	95,63			16.266,83	157,6		Melebihi Target
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	3.27.03.2.03	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kelahiran ternak hasil IB	1025 Ekor	9.157.262.599	24 Ekor	4.020.463.200	165 Ekor	2.491.277.210	115 Ekor	1.900.729.770	69,7	76,3	139 Ekor	5.921.192.970,00	13,56	64,66		Tidak Tercapai
65.	3.27.03.2.03.01	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan (Laporan)	72 Laporan	9.157.262.599	24 Laporan	4.020.463.200	12 Laporan	2.491.277.210	12 Laporan	1.900.729.770	100	76,3	36 Laporan	5.921.192.970,00	50	64,66	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
												100	76,3			50	64,66		Tercapai
												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
												259,13	57,17			74,35	100,04		Melebihi Target
												Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
12.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**100%**	**2.945.100.588**	**9.5 %**	**584.426.899**	**100%**	**1.066.689.600**	**100%**	**942.628.000**	**100**	**88,37**	**100%**	**942.628.000,00**	**100**	**32,01**		**Tercapai**
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kecamatan yang dilakukan surveilans pada Hewan	8 Kecamatan	1.199.909.332	0 Kecamatan	376.872.750	0 Kecamatan	612.117.200	0 Kecamatan	496.778.200	0	81,16	0 Kecamatan	873.650.950,00	0	72,81		Tidak Tercapai
66.	3.27.04.2.01.01	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelayanan Vaksinasi Pengobatan Ternak	3400 Ekor	520.320.335	395 Ekor	240.136.750	400 Ekor	397.091.800	325 Ekor	300.096.000	81,25	75,57	720 Ekor	540.232.750,00	21,18	103,83	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
			Jumlah obat - obatan dan vaksinasi ternak yang tersedia	72 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		9 Bulan		75		9		12,5			Tidak Tercapai
67.	3.27.04.2.01.03	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan)	900 Laporan	679.588.997	150 Laporan	136.736.000	12 Laporan	215.025.400	12 Laporan	196.682.200	100	91,47	162 Laporan	333.418.200,00	18	49,06	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
												85,42	55,68			13,06	50,96		Tidak Tercapai
												Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah peningkatan SDM masyarakat dan petugas terhadap kesahatan masyarakat veteriner	7580 Orang	1.310.063.903	15 Orang	89.825.000	2160 Orang	102.989.200	7 Orang	99.359.500	0,32	96,48	22 Orang	189.184.500,00	0,29	14,44		Tidak Tercapai
68.	3.27.04.2.04.01	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah pameran peternakan yang diikuti	10 Kegiatan	686.620.500	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	0	0	0	0 Kegiatan	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
69.	3.27.04.2.04.02	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	3 Laporan	623.443.403	5 Laporan	89.825.000	1 Laporan	102.989.200	1 Laporan	99.359.500	100	96,48	6 Laporan	189.184.500,00	200	30,35	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
												50	48,24			100	15,17		Tidak Tercapai
												Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan	600 orang	435.127.353	100 orang	117.729.149	100 orang	351.583.200	550 orang	346.490.300	550	98,55	650 orang	464.219.449,00	108,33	106,69		Melebihi Target
70.	3.27.04.2.05.01	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan	600 Orang	435.127.353	100 Orang	117.729.149	100 Orang	351.583.200	550 Orang	346.490.300	550	98,55	650 Orang	464.219.449,00	108,33	106,69	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Melebihi Target
												550	98,55			108,33	106,69		Melebihi Target
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
												183,44	92,06			36,21	64,65		Melebihi Target
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		

13.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase luas wilayah yang terdampak bencana Perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan**	**100%**	**2.805.767.743**	**24%**	**433.199.638**	**100%**	**4.926.059.550**	**100%**	**4.632.799.002**	**100**	**94,05**	**100%**	**4.632.799.002,00**	**100**	**165,12**		**Tercapai**
			Persentase Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	100%		5.09 %		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Perkebunan	55 Ha	2.805.767.743	1800 Ha	433.199.638	10 Ha	4.926.059.550	2280 Ha	4.632.799.002	22.800,00	94,05	4080 Ha	5.065.998.640,00	7.418,18	180,56		Melebihi Target
			Jumlah luasan bencana perkebunan yang dapat ditanggulangi dan di kendalikan	6940 Ha		0 Ha		3050 Ha		0 Ha		0		0 Ha		0			Tidak Tercapai
71.	3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (Ha)	55 Ha	2.805.767.743	0 Ha	433.199.638	10 Ha	4.926.059.550	10 Ha	4.632.799.002	100	94,05	10 Ha	5.065.998.640,00	18,18	180,56	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	6940 Ha		176 Ha		1550 Ha		2280 Ha		147,1		2.280,00		32,85			Melebihi Target
72.	3.27.05.2.01.03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (ha)	300 Ha	0	0 Ha	0	0 Ha	0	20 Ha	0	0	0	20 Ha	0	6,67	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
73.	3.27.05.2.01.05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan Perkebunan (Laporan)	0 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	0	100	0	1 Laporan	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		86,77	23,51			6,21	45,14		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		11.400,00	47,02			3.709,09	90,28		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
14.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani**	**19%**	**8.758.614.395**	**100%**	**1.834.569.690**	**19%**	**7.762.045.900**	**19%**	**7.634.871.548**	**100**	**98,36**	**19%**	**7.634.871.548,00**	**100**	**87,17**		**Tercapai**
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	79 kelompok	8.758.614.395	270 kelompok	1.834.569.690	220 kelompok	7.762.045.900	220 kelompok	7.634.871.548	100	98,36	490 kelompok	9.469.441.238,00	620,25	108,12		Tercapai
74.	3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	9577 Unit	2.370.734.936	11 Unit	518.142.100	2355 Unit	251.867.000	157 Unit	247.849.600	6,67	98,4	168 Unit	765.991.700,00	1,75	32,31	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
75.	3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit)	636 Unit	2.653.622.765	0 Unit	211.240.150	157 Unit	4.866.928.500	220 Unit	4.864.891.700	140,13	99,96	220 Unit	5.076.131.850,00	34,59	191,29	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Melebihi Target
76.	3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit)	1023 Unit	3.734.256.694	87 Unit	1.105.187.440	236 Unit	2.643.250.400	157 Unit	2.522.130.248	66,53	95,42	244 Unit	3.627.317.688,00	23,85	97,14	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
77.	3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi (Unit)	6320 Unit	0	0 Unit	0	1570 Unit	0	0 Unit	0	0	0	0 Unit	0	0	0	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		53,33	73,45			15,05	80,18		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		607,01	98,36			620,25	108,12		
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		102,6	80,56			60,15	71,68		
										Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**109,47**	**90,63**			**6.193,98**	**172,84**		
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**201.061.782.780**	**182.228.355.448**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		-Adanya penganggaran untuk saprodi pertanian seperti Herbisida, NPK, PHC, Pestisida baik Hibah maupun barang persediaan - Salah satu kampung/desa yang memproduksi ikan gabus dan memiliki poklahsar yang memproduksi olahan hasil perikanan dari ikan																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		- Pengiriman barang pengadaan berupa saprodi pertanian yang lambat - Kondisi alam di desa tersebut yang apabila musim penghujan dapat terancam banjir - Adanya serangan penyakit tanaman, dimana sejak tahun 2019 akhir hingga 2023 ini serabgan penyakit																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		- Agar Pelaksanaan pengadaan di percepat lagi - Telah dilakukan kajian mengenai kampung budidaya ikan dan didapatkan hasil bahwa desa tersebut memiliki potensi untuk didirikan kampung budidaya - Pelaksanaan pengendalian OPT secara maksimal melalui																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
1.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		**0 Persen**	**38.879.405.137**	**0 Persen**	**5.853.559.348**	**76.4 Persen**	**7.880.122.216**	**74,4 Persen**	**7.293.521.203**	**97,38**	**92,56**	**74.4 Persen**	**7.293.521.203,00**	**0**	**18,76**		**Tidak Tercapai**
			Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	0 Persen		0 Persen		100 Persen		100 Persen		100		100,00 Persen		0			Tercapai
			Nilai IKM Perangkat Daerah	0 Nilai IKM		0 Nilai IKM		88,3 Nilai IKM		84,05 Nilai IKM		95,19		84,05 Nilai IKM		0			Tidak Tercapai
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Persen	1.036.966.300	0 Persen	21.980.000	100 Persen	21.200.400	100 Persen	17.716.000	100	83,56	100 Persen	39.696.000,00	0	3,83		Tercapai
1.	2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	64 Dokumen	634.950.000	12 Dokumen	11.930.000	2 Dokumen	10.170.400	2 Dokumen	8.682.000	100	85,37	2 Dokumen	8.682.000,00	3,13	1,37	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
2.	2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Reasilisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	64 Laporan	402.016.300	12 Laporan	10.050.000	5 Laporan	11.030.000	5 Laporan	9.034.000	100	81,9	5 Laporan	9.034.000,00	7,81	2,25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	83,63			5,47	1,81		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Baik	0 Persen	29.025.638.437	0 Persen	4.907.401.704	100 Persen	6.526.071.666	100 Persen	6.000.354.147	100	91,94	100 Persen	10.907.755.851,00	0	37,58		Tercapai
3.	2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/Bulan	27.801.289.137	14 Orang/Bulan	4.727.822.674	546 Orang/Bulan	6.253.775.666	526 Orang/Bulan	5.744.381.747	96,34	91,85	526 Orang/Bulan	5.744.381.747,00	796,97	20,66	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Tercapai
4.	2.17.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	64 Dokumen	1.224.349.300	12 Dokumen	179.579.030	12 Dokumen	272.296.000	12 Dokumen	255.972.400	100	94,01	12 Dokumen	255.972.400,00	18,75	20,91	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		98,17	92,93			407,86	20,78		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	0 Persen	5.645.781.700	0 Persen	483.235.511	100 Persen	692.564.000	100 Persen	680.257.100	100	98,22	100 Persen	1.163.492.611,00	0	20,61		Tercapai
5.	2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	64 Paket	406.663.600	12 Paket	22.161.000	1 Paket	71.290.300	1 Paket	71.061.000	100	99,68	1 Paket	71.061.000,00	1,56	17,47	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
6.	2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	0 Paket	725.100.000	0 Paket	24.500.000	4 Paket	116.336.800	4 Paket	110.005.000	100	94,56	4 Paket	110.005.000,00	0	15,17	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
7.	2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	64 Paket	476.717.400	12 Paket	39.277.000	2 Paket	32.894.500	2 Paket	32.858.000	100	99,89	2 Paket	32.858.000,00	3,13	6,89	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
8.	2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	64 Dokumen	45.770.000	12 Dokumen	9.510.000	1 Dokumen	8.267.700	1 Dokumen	8.100.000	100	97,97	1 Dokumen	8.100.000,00	1,56	17,7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
9.	2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Laporan	3.991.530.700	12 Laporan	387.787.511	1 Laporan	463.774.700	1 Laporan	458.233.100	100	98,81	1 Laporan	458.233.100,00	1,56	11,48	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,18			1,56	13,74		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	0 Persen	0	0 Persen	0	100 Persen	57.779.200	100 Persen	57.745.500	100	99,94	100 Persen	57.745.500,00	0	0		Tercapai
10.	2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	60 Unit	0	0 Unit	0	9 Unit	57.779.200	9 Unit	57.745.500	100	99,94	9 Unit	57.745.500,00	15	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	99,94			15	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	0 Persen	1.618.756.800	0 Persen	293.234.233	100 Persen	361.991.300	100 Persen	342.673.456	100	94,66	100 Persen	635.907.689,00	0	39,28		Tercapai
11.	2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 Laporan	758.396.500	0 Laporan	106.452.133	1 Laporan	132.302.200	1 Laporan	125.310.656	100	94,72	1 Laporan	125.310.656,00	1,39	16,52	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
12.	2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	860.360.300	0 Laporan	186.782.100	1 Laporan	229.689.100	1 Laporan	217.362.800	100	94,63	1 Laporan	217.362.800,00	1,39	25,26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	94,67			1,39	20,89		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	0 Persen	1.552.261.900	0 Persen	147.707.900	100 Persen	220.515.650	100 Persen	194.775.000	100	88,33	100 Persen	342.482.900,00	0	22,06		Tercapai
13.	2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72 Unit	1.214.361.900	12 Unit	124.718.900	50 Unit	198.595.050	38 Unit	172.999.000	76	87,11	38 Unit	172.999.000,00	52,78	14,25	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Tercapai
14.	2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Masin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	337.900.000	12 Unit	22.989.000	170 Unit	21.920.600	170 Unit	21.776.000	100	99,34	170 Unit	21.776.000,00	236,11	6,44	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		88	93,23			144,44	10,35		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	92,78			0	20,56		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase Koperasi Aktif**	**0 Persen**	**1.109.869.098**	**0 Persen**	**53.237.550**	**63.69 Persen**	**72.167.600**	**63,72 Persen**	**71.492.700**	**100,05**	**99,06**	**63.72 Persen**	**71.492.700,00**	**0**	**6,44**		Melebihi Target
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Koperasi Taat Peraturan	0 Persen	1.109.869.098	0 Persen	53.237.550	6 Persen	72.167.600	6 Persen	71.492.700	100	99,06	6 Persen	71.492.700,00	0	6,44		Tercapai
15.	2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	26 Unit Usaha	815.595.578	22 Unit Usaha	23.017.550	6 Unit Usaha	22.824.800	6 Unit Usaha	22.564.800	100	98,86	6 Unit Usaha	22.564.800,00	23,08	2,77	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
16.	2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	36 Unit Usaha	294.273.520	6 Unit Usaha	30.220.000	23 Unit Usaha	49.342.800	20 Unit Usaha	48.927.900	86,96	99,16	20 Unit Usaha	48.927.900,00	55,56	16,63	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		93,48	99,01			39,32	9,7		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Tidak Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	99,06			0	6,44		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Tidak Tercapai
3.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentae Peserta Pelatihan yang Lulus Kompetensi Koperasi**	**0 Persen**	**459.785.989**	**0 Persen**	**232.334.800**	**100 Persen**	**39.046.400**	**100 Persen**	**38.970.400**	**100**	**99,81**	**100 Persen**	**38.970.400,00**	**0**	**8,48**		**Tercapai**
			Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Dilaksanakan	0 Kegiatan		0 Kegiatan		100 Kegiatan		100 Kegiatan		100		100,00 Kegiatan		0			Tercapai
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Koperasi yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	0 Persen	459.785.989	0 Persen	232.334.800	21.13 Persen	39.046.400	13,39 Persen	38.970.400	63,37	99,81	13.39 Persen	38.970.400,00	0	8,48		Tidak Tercapai
17.	2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	350 Orang	459.785.989	85 Orang	232.334.800	60 Orang	39.046.400	30 Orang	38.970.400	50	99,81	30 Orang	38.970.400,00	8,57	8,48	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50	99,81			8,57	8,48		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		63,37	99,81			0	8,48		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)		Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Usaha Mikro yang Memenuhi Kualifikasi Standar Kompetensi Usaha**	**0 Persen**	**2.461.545.012**	**0 Persen**	**371.644.400**	**65 Persen**	**444.850.200**	**100 Persen**	**439.771.900**	**153,85**	**98,86**	**100 Persen**	**811.416.300,00**	**0**	**32,96**		Melebihi Target
			Persentase Usaha Mikro yang Menerapkan E-Comerce	0 Persen		0 Persen		0.15 Persen		0,32 Persen		213,33		0,32 Persen		0			Melebihi Target
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang Memperoleh Pendidikan dan Pelatihan Usaha mikro	0 Persen	2.461.545.012	0 Persen	371.644.400	0.37 Persen	444.850.200	1,31 Persen	439.771.900	354,05	98,86	1.31 Persen	811.416.300,00	0	32,96		Melebihi Target
			Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru	0 Persen		0 Persen		3.7 Persen		4,15 Persen		112,16		4 Persen		0			Melebihi Target
			Persentase Usaha Mikro yang Bermitera	0 Persen		0 Persen		0.15 Persen		0,16 Persen		106,67		0 Persen		0			Melebihi Target
18.	2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan , penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota	0 Unit Usaha	910.673.047	0 Unit Usaha	141.333.100	11567 Unit Usaha	142.642.900	10904 Unit Usaha	142.331.500	94,27	99,78	10904 Unit Usaha	283.664.600,00	0	31,15	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Tercapai
19.	2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	120 Unit Usaha	839.693.184	12 Unit Usaha	230.311.300	16 Unit Usaha	94.564.200	17 Unit Usaha	93.287.100	106,25	98,65	17 Unit Usaha	93.287.100,00	14,17	11,11	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melebihi Target
20.	2.17.07.2.01.04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	298 Unit Usaha	711.178.781	40 Unit Usaha	0	40 Unit Usaha	207.643.100	114 Unit Usaha	204.153.300	285	98,32	114 Unit Usaha	204.153.300,00	38,26	28,71	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melebihi Target
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		161,84	98,92			17,47	23,65		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		190,96	32,95			0	10,99		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase usaha mikro yang skala usahanya bertambah**	**0.38 %**	**3.685.673.059**	**0.3 %**	**778.298.450**	**4.38 %**	**2.074.138.700**	**4,44%**	**2.055.959.600**	**101,37**	**99,12**	**4.44 %**	**2.055.959.600,00**	**1.168,42**	**55,78**		Melebihi Target
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase Usaha Mikro yang Skala Usahanya Meningkat	0 Persen	3.685.673.059	0 Persen	778.298.450	4.38 Persen	2.074.138.700	4,44 Persen	2.055.959.600	101,37	99,12	4.44 Persen	2.834.258.050,00	0	76,9		Melebihi Target
21.	2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dalam dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	69 Unit Usaha	3.685.673.059	65 Unit Usaha	778.298.450	509 Unit Usaha	2.074.138.700	494 Unit Usaha	2.055.959.600	97,05	99,12	494 Unit Usaha	2.055.959.600,00	715,94	55,78	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		97,05	99,12			715,94	55,78		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		101,37	99,12			0	76,9		Melebihi Tetget
												Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		

6.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase Pelaku Usaha Perdagangan yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan**	**0 Persen**	**212.544.050**	**0 Persen**	**38.627.000**	**12 Persen**	**60.510.000**	**16,8 Persen**	**53.360.000**	**140**	**88,18**	**16.8 Persen**	**91.987.000,00**	**0**	**43,28**		**Melebihi Target**
			Persentase Jumlah Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi , Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Dilaksanakan	0 Persen		0 Persen		0 Persen		0 Persen		0		0,00 Persen		0			Tidak Tercapai
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang dikeluarkan	0 Buah	212.544.050	0 Buah	27.447.000	10 Buah	38.730.000	0 Buah	35.320.000	0	91,2	0 Buah	62.767.000,00	0	29,53		Tidak Tercapai
22.	3.30.02.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100 Dokumen	212.544.050	50 Dokumen	27.447.000	1 Dokumen	38.730.000	1 Dokumen	35.320.000	100	91,2	1 Dokumen	35.320.000,00	1	16,62	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	91,2			1	16,62		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Dalam Negeri	0 Buah	0	0 Buah	11.180.000	7 Buah	21.780.000	0 Buah	18.040.000	0	82,83	0 Buah	29.220.000,00	0	0		Tidak Tercapai
23.	3.30.02.2.03.01	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Warlaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	45 Dokumen	0	20 Dokumen	11.180.000	30 Dokumen	21.780.000	0 Dokumen	18.040.000	0	82,83	0 Dokumen	18.040.000,00	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	0	82,83			0	0		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	0	87,01			0	14,77		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase Pasar di Kabupaten Balangan yang Memenuhi Standar Kelayakan Pasar**	**0 Persen**	**4.690.966.050**	**0 Persen**	**1.894.573.719**	**0 Persen**	**3.241.612.900**	**0 Persen**	**2.954.158.663**	**0**	**91,13**	**0 Persen**	**4.848.732.382,00**	**0**	**103,36**		**Tidak Tercapai**
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Pasar yang direvitalisasi	0 Persen	4.690.966.050	0 Persen	1.844.951.719	75 Persen	3.005.218.900	70 Persen	2.805.528.513	93,33	93,36	70 Persen	4.650.480.232,00	0	99,14		Tidak Tercapai
24.	3.30.03.2.01.01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	6 Unit	1.905.256.650	2 Unit	1.267.114.019	3 Unit	1.755.624.200	3 Unit	1.637.289.900	100	93,26	3 Unit	1.637.289.900,00	50	85,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
25.	3.30.03.2.01.02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit	2.785.709.400	4 Unit	577.837.700	4 Unit	1.249.594.700	5 Unit	1.168.238.613	125	93,49	5 Unit	1.168.238.613,00	62,5	41,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melebihi Target
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	112,5	93,37			56,25	63,94		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase Pedagang yang Berjualan pada Tempatnya	0 Persen	0	0 Persen	49.622.000	40 Persen	236.394.000	63,36 Persen	148.630.150	158,4	62,87	63.36 Persen	198.252.150,00	0	0		Melebihi Target
26.	3.30.03.2.02.01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2000 Dokumen	0	300 Dokumen	20.970.000	1 Dokumen	159.987.600	1 Dokumen	89.900.750	100	56,19	1 Dokumen	89.900.750,00	0,05	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
27.	3.30.03.2.02.02	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian Kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1000 Dokumen	0	100 Dokumen	28.652.000	1 Dokumen	76.406.400	1 Dokumen	58.729.400	100	76,86	1 Dokumen	58.729.400,00	0,1	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	66,53			0,08	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	125,87	78,11			0	49,57		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
8.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok**	**6.8 %**	**897.079.680**	**7.8 %**	**248.579.550**	**7.6 %**	**564.145.600**	**7,51%**	**552.866.739**	**98,82**	**98**	**7.51 %**	**552.866.739,00**	**110,44**	**61,63**		**Tidak Tercapai**
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan pengendalian Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	224 Kali	897.079.680	54 Kali	248.579.550	60 Kali	564.145.600	60 Kali	552.866.739	100	98	60 Kali	552.866.739,00	26,79	61,63		Tercapai
			Jumlah Pelaksanaan Pasar Murah	0 Kali		0 Kali		42 Kali		42 Kali		100		42 Kali		inf			Tercapai
28.	3.30.04.2.02.02	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Pedagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Pedagangan	244 Laporan	571.568.380	54 Laporan	62.600.200	12 Laporan	101.437.300	12 Laporan	90.841.300	100	89,55	12 Laporan	90.841.300,00	4,92	15,89	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
29.	3.30.04.2.02.03	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	40 Laporan	325.511.300	32 Laporan	185.979.350	1 Laporan	462.708.300	1 Laporan	462.025.439	100	99,85	1 Laporan	462.025.439,00	2,5	141,94	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	94,7			3,71	78,92		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	49			13,39	30,81		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
9.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Persentase Peningkatan Pelaku Usaha Ekspor**	**0 Persen**	**1.970.821.050**	**0 Persen**	**276.981.800**	**30 Persen**	**2.419.079.800**	**10 Persen**	**2.119.003.756**	**33,33**	**87,6**	**10 Persen**	**2.395.985.556,00**	**0**	**121,57**		**Tidak Tercapai**
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Tujuan Ekspor	0 Persen	1.970.821.050	0 Persen	276.981.800	0 Persen	2.419.079.800	0 Persen	2.119.003.756	0	87,6	0 Persen	2.395.985.556,00	0	121,57		Tidak Tercapai
			Jumlah Calon Pelaku Usaha Ekspor yang Memenuhi Syarat	0 Orang		0 Orang		7 Orang		0 Orang		0		0 Orang		0			Tidak Tercapai
30.	3.30.05.2.01.02	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	12 Pelaku Usaha	1.704.088.050	0 Pelaku Usaha	276.981.800	10 Pelaku Usaha	2.279.517.900	10 Pelaku Usaha	2.010.536.471	100	88,2	10 Pelaku Usaha	2.010.536.471,00	83,33	117,98	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
31.	3.30.05.2.01.06	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	13 Pelaku Usaha	266.733.000	0 Pelaku Usaha	0	3 Pelaku Usaha	139.561.900	1 Pelaku Usaha	108.467.285	33,33	77,72	1 Pelaku Usaha	108.467.285,00	7,69	40,67	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	66,67	82,96			45,51	79,32		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	0	43,8			0	60,79		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah		
10.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Jumlah Kegiatan Metrologi Legal Dilaksanakan**	**0 Persen**	**1.447.833.630**	**0 Persen**	**213.312.300**	**61.53 Persen**	**217.792.200**	**61,11 Persen**	**216.738.900**	**99,32**	**99,52**	**61.11 Persen**	**430.051.200,00**	**0**	**29,7**		**Tidak Tercapai**
			Pesrsentase Jumlah Kegiatan Pengawasan Metrologi Legal Dilaksanakan	0 Persen		0 Persen		20.83 Persen		20,69 Persen		99,33		20,69 Persen		0			Tidak Tercapai
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah SDM Kemetrologian yang memperoleh sertifikasi teknis	0 Orang	1.447.833.630	0 Orang	213.312.300	2 Orang	217.792.200	2 Orang	216.738.900	100	99,52	2 Orang	430.051.200,00	0	29,7		Tercapai
			Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda Tera Sah	0 Buah		0 Buah		1200 Buah		1034 Buah		86,17		1.034 Buah		0			Tidak Tercapai
			Jumlah Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) dan BDKT yang diawasi dan sesuai ketentuan	0 Buah		0 Buah		100 Buah		98 Buah		98		98 Buah		0			Tidak Tercapai

32.	3.30.06.2.01.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	0 Unit	928.372.500	0 Unit	135.193.100	1200 Unit	147.689.400	1034 Unit	146.942.100	86,17	99,49	1034 Unit	146.942.100,00	0	15,83	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tidak Tercapai
33.	3.30.06.2.01.02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	0 Orang	519.461.130	0 Orang	78.119.200	50 Orang	70.102.800	51 Orang	69.796.800	102	99,56	51 Orang	69.796.800,00	0	13,44	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melebihi Target
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	94,08	99,53			0	14,63		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	94,72	33,17			0	9,9		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
11.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Peningkatan Nilai Produk Lokal**	**0 Persen**	**0**	**0 Persen**	**0**	**0 Persen**	**137.310.000**	**0 Persen**	**52.376.700**	**0**	**38,14**	**0 Persen**	**52.376.700,00**	**0**	**0**		**Tidak Tercapai**
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Nilai Transaksi Promosi Perdagangan	0 Rupiah	0	0 Rupiah	0	1279200000 Rupiah	137.310.000	706972000 Rupiah	52.376.700	55,27	38,14	706972000 Rupiah	52.376.700,00	0	0		Tidak Tercapai
			Persentase Produk Lokal Perdagangan yang Berkualitas	0 Persen		0 Persen		20 Persen		58,33 Persen		291,65		58 Persen		0			Melebihi Target
34.	3.30.07.2.01.02	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	260 UMKM	0	0 UMKM	0	10 UMKM	137.310.000	19 UMKM	52.376.700	190	38,14	19 UMKM	52.376.700,00	7,31	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Melebihi Target
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	190	38,14			7,31	0		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	173,46	19,07			0	0		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
12.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Persentase IKM yang menerapkan teknologi industri**	**64.1 %**	**1.110.445.400**	**10%**	**635.309.340**	**12%**	**1.108.923.400**	**12,39%**	**1.020.087.585**	**103,25**	**91,99**	**12.39 %**	**1.020.087.585,00**	**19,33**	**91,86**		Melebihi Target
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki SDM yang Bersertifikasi Sesuai Kebutuhan	0 IKM	1.110.445.400	0 IKM	635.309.340	0 IKM	1.108.923.400	0 IKM	1.020.087.585	0	91,99	0 IKM	1.655.396.925,00	0	149,08		Tidak Tercapai
			Jumlah IKM yang Memiliki Teknologi	0 IKM		0 IKM		300 IKM		300 IKM		100		300 IKM		inf			Tercapai
35.	3.31.02.2.01.05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	85 Dokumen	1.110.445.400	10 Dokumen	635.309.340	1 Dokumen	1.108.923.400	1 Dokumen	1.020.087.585	100	91,99	1 Dokumen	1.020.087.585,00	1,18	91,86	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	91,99			1,18	91,86		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	50	45,99			0	74,54		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
13.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pertumbuhan IKM**	**0 Persen**	**512.381.600**	**0 Persen**	**34.137.200**	**1.68 Persen**	**140.238.300**	**1,68 Persen**	**70.719.300**	**100**	**50,43**	**1.68 Persen**	**104.856.500,00**	**0**	**20,46**		**Tercapai**
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang Memiliki Izin	0 IKM	512.381.600	0 IKM	34.137.200	42 IKM	140.238.300	42 IKM	70.719.300	100	50,43	42 IKM	104.856.500,00	0	20,46		Tercapai
36.	3.31.03.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	80 Dokumen	512.381.600	6 Dokumen	34.137.200	1 Dokumen	140.238.300	1 Dokumen	70.719.300	100	50,43	1 Dokumen	70.719.300,00	1,25	13,8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	50,43			1,25	13,8		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	50,43			0	20,46		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
14.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase Skala Usaha IKM yang Berkembang**	**0 Persen**	**1.005.348.000**	**0 Persen**	**1.106.638.249**	**0.58 Persen**	**1.170.589.500**	**0,58 Persen**	**999.076.152**	**100**	**85,35**	**0.58 Persen**	**2.105.714.401,00**	**0**	**209,45**		**Tercapai**
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai Pemasaran Produk IKM	0 Rupiah	1.005.348.000	0 Rupiah	1.106.638.249	263.187 Rupiah	1.170.589.500	252,757 Rupiah	999.076.152	96,04	85,35	252.757 Rupiah	2.105.714.401,00	0	209,45		Tidak Tercapai
			Jumlah Produk IKM Bersertifikasi	0 IKM		0 IKM		135 IKM		135 IKM		100		135 IKM		0			Tercapai
37.	3.31.04.2.01.01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	2615 Dokumen	1.005.348.000	2589 Dokumen	91.064.900	1 Dokumen	180.424.800	1 Dokumen	178.690.200	100	99,04	1 Dokumen	178.690.200,00	0,04	17,77	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
38.	3.31.04.2.01.02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	129 Dokumen	0	15 Dokumen	1.015.573.349	1 Dokumen	990.164.700	1 Dokumen	820.385.952	100	82,85	1 Dokumen	820.385.952,00	0,78	0	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	90,95			0,41	8,89		
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	97,216	42,67			0	104,73		
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	91,76	89,56			64,91	40,19		
												Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**100,75**	**91,66**			**58,4**	**24,86**		
												Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**19.570.526.816**	**17.938.103.598**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	-																	
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	-																	
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	-																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik**	**99**	**44.475.236.089**	**85.22**	**5.686.409.366**	**90.8**	**8.555.896.409**	**90,8**	**7.427.578.110**	**100**	**86,81**	**90.8**	**7.427.578.110,00**	**91,72**	**16,7**		**Tercapai**
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Lengkap, Valid dan Reliabel	100%	452.696.715	100%	66.003.400	100%	64.180.700	100%	62.568.500	100	97,49	100%	62.568.500,00	100	13,82		Tercapai
1.	2.16.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36 Dokumen	396.585.312	6 Dokumen	54.820.000	6 Dokumen	54.731.900	6 Dokumen	54.728.500	100	99,99	6 Dokumen	54.728.500,00	16,67	13,8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
2.	2.16.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan	56.111.403	0 Laporan	0	2 Laporan	9.448.800	2 Laporan	7.840.000	100	82,97	2 Laporan	7.840.000,00	25	13,97	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	91,48			20,83	13,89		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tertib dan Akuntabel	100%	26.960.300.222	100%	3.392.678.553	100%	5.349.257.709	100%	4.286.104.362	100	80,13	100%	4.286.104.362,00	100	15,9		Tercapai

3.	2.16.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 Orang/Bulan	26.960.300.222	12 Orang/Bulan	3.392.678.553	12 Orang/Bulan	5.349.257.709	12 Orang/Bulan	4.286.104.362	100	80,13	12 Orang/Bulan	4.286.104.362,00	16,67	15,9	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	80,13			16,67	15,9		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Baik	100%	1.637.801.500	100%	336.000.000	100%	338.230.500	100%	335.600.000	100	99,22	100%	335.600.000,00	100	20,49		Tercapai
4.	2.16.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket	212.801.500	1 Paket	21.000.000	2 Paket	68.230.500	2 Paket	66.800.000	100	97,9	2 Paket	66.800.000,00	20	31,39	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
5.	2.16.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	286 Orang	1.425.000.000	63 Orang	315.000.000	54 Orang	270.000.000	54 Orang	268.800.000	100	99,56	54 Orang	268.800.000,00	18,88	18,86	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,73			19,44	25,13		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Baik	100%	10.068.902.512	100%	1.122.947.690	100%	1.798.173.300	100%	1.772.973.391	100	98,6	100%	1.772.973.391,00	100	17,61		Tercapai
6.	2.16.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	94.050.090	1 Paket	13.897.050	1 Paket	13.279.900	1 Paket	13.279.900	100	100	1 Paket	13.279.900,00	16,67	14,12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
7.	2.16.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	2.564.943.333	0 Paket	0	4 Paket	196.642.600	4 Paket	171.769.700	100	87,35	4 Paket	171.769.700,00	25	6,7	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
8.	2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	166.542.760	1 Paket	38.400.000	1 Paket	20.930.800	1 Paket	20.898.400	100	99,85	1 Paket	20.898.400,00	16,67	12,55	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
9.	2.16.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	18 Dokumen	99.888.000	3 Dokumen	13.710.000	3 Dokumen	18.720.000	3 Dokumen	18.660.000	100	99,68	3 Dokumen	18.660.000,00	16,67	18,68	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
10.	2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	7.143.478.329	12 Laporan	1.056.940.640	12 Laporan	1.548.600.000	12 Laporan	1.548.365.391	100	99,98	12 Laporan	1.548.365.391,00	16,67	21,68	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,37			18,33	14,74		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang baik	100%	2.532.104.927	100%	443.901.254	100%	420.298.800	100%	396.387.640	100	94,31	100%	396.387.640,00	100	15,65		Tercapai
11.	2.16.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	392.334.500	12 Laporan	35.200.000	12 Laporan	67.894.500	12 Laporan	67.603.500	100	99,57	12 Laporan	67.603.500,00	16,67	17,23	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
12.	2.16.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	461.228.227	12 Laporan	74.810.221	12 Laporan	66.898.000	12 Laporan	58.246.907	100	87,07	12 Laporan	58.246.907,00	16,67	12,63	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
13.	2.16.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1.678.542.200	12 Laporan	333.891.033	12 Laporan	285.506.300	12 Laporan	270.537.233	100	94,76	12 Laporan	270.537.233,00	16,67	16,12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	93,8			16,67	15,33		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah yang Baik	100%	2.823.430.213	100%	324.878.469	100%	585.755.400	100%	573.944.217	100	97,98	100%	573.944.217,00	100	20,33		Tercapai
14.	2.16.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	2.004.110.213	30 Unit	324.878.469	30 Unit	270.755.400	30 Unit	263.603.139	100	97,36	60 Unit	588.481.608,00	193,55	29,36	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
15.	2.16.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	819.320.000	0 Unit	0	1 Unit	315.000.000	1 Unit	310.341.078	100	98,52	1 Unit	310.341.078,00	100	37,88	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,94			146,77	33,62		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	94,62			100	17,3		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**2.16.02**	**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)**	**100%**	**55.953.981.852**	**10%**	**6.427.191.985**	**40%**	**10.776.501.700**	**40%**	**10.618.840.046**	**100**	**98,54**	**40%**	**10.618.840.046,00**	**40**	**18,98**		**Tercapai**
			Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarluaskan Informasi Publik	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang Menyebarluaskan Informasi secara Berkala	100%	55.953.981.852	100%	6.427.191.985	100%	10.776.501.700	100%	10.618.840.046	100	98,54	100%	10.618.840.046,00	100	18,98		Tercapai
			Jumlah Peningkatan Masyarakat yang Mengakses Informasi Publik	10500 Orang		0 Orang		9500 Orang		11282 Orang		118,76		11.282 Orang		107,45			Melebihi Target
			Persentase Sengketa Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat yang Terselesaikan	100%		100%		100%		100%		100		100%		100			Tercapai
16.	2.16.02.2.01.02	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	72 Dokumen	1.104.771.876	12 Dokumen	103.415.600	12 Dokumen	542.165.100	12 Dokumen	508.331.100	100	93,76	12 Dokumen	508.331.100,00	16,67	46,01	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
17.	2.16.02.2.01.04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	72 Dokumen	933.831.750	12 Dokumen	114.900.000	12 Dokumen	176.820.000	12 Dokumen	160.400.000	100	90,71	12 Dokumen	160.400.000,00	16,67	17,18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
18.	2.16.02.2.01.05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	72 Dokumen	1.073.295.400	12 Dokumen	150.765.646	12 Dokumen	215.680.000	12 Dokumen	209.333.500	100	97,06	12 Dokumen	209.333.500,00	16,67	19,5	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
19.	2.16.02.2.01.06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	72 Dokumen	893.488.750	12 Dokumen	271.189.000	12 Dokumen	116.040.000	12 Dokumen	114.255.590	100	98,46	12 Dokumen	114.255.590,00	16,67	12,79	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
20.	2.16.02.2.01.07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	65 Layanan	50.014.995.226	40 Layanan	5.633.644.138	49 Layanan	9.333.708.800	57 Layanan	9.276.876.802	116,33	99,39	57 Layanan	9.276.876.802,00	87,69	18,55	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Melebihi Target
21.	2.16.02.2.01.11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	48 Dokumen	746.493.550	0 Dokumen	0	12 Dokumen	122.137.800	12 Dokumen	96.989.800	100	79,41	12 Dokumen	96.989.800,00	25	12,99	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
22.	2.16.02.2.01.12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	72 Dokumen	1.187.105.300	12 Dokumen	153.277.601	12 Dokumen	269.950.000	12 Dokumen	252.653.254	100	93,59	12 Dokumen	252.653.254,00	16,67	21,28	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	102,33	93,2			28	21,19		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	106,25	32,85			33,33	6,33		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.	**2.16.03**	**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan Internet Diskominfosan**	**100%**	**41.526.410.603**	**59%**	**5.958.921.134**	**73%**	**7.131.285.752**	**66%**	**5.398.861.531**	**90,41**	**75,71**	**66%**	**5.398.861.531,00**	**66**	**13**		**Tidak Tercapai**
			Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayani Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	100%		53%		53%		53%		100		53,00%		53			Tercapai
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terhubung dengan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	100%	6.741.376.656	53%	1.121.677.974	53%	1.718.459.200	53%	805.366.910	100	46,87	53%	805.366.910,00	53	11,95		Tercapai
23.	2.16.03.2.01.03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	30 Unit	1.764.160.938	16 Unit	560.838.987	16 Unit	794.879.600	16 Unit	383.220.000	100	48,21	16 Unit	383.220.000,00	53,33	21,72	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	48,21			53,33	21,72		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Rendah		
	2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Pengembangan Jaringan Koneksi Internet pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot	100%	34.785.033.947	59%	4.837.243.160	73%	5.412.826.552	66%	4.593.494.621	90,41	84,86	66%	4.593.494.621,00	66	13,21		Tidak Tercapai
24.	2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 Dokumen	1.617.284.600	0 Dokumen	69.075.000	1 Dokumen	382.747.600	1 Dokumen	360.820.000	100	94,27	1 Dokumen	360.820.000,00	100	22,31	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai

25.	2.16.03.2.02.08	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	1 Layanan	33.167.749.347	1 Layanan	4.768.168.160	1 Layanan	5.030.078.952	1 Layanan	4.232.674.621	100	84,15	1 Layanan	4.232.674.621,00	100	12,76	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
												100	89,21			100	17,54		Tercapai
												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
												95,21	65,86			59,5	12,58		Tidak Tercapai
												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Rendah		
4.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Presentase Data Sektoral yang Terakses**	**100%**	**1.873.714.274**	**100%**	**158.310.800**	**100%**	**231.856.000**	**100%**	**223.987.800**	**100**	**96,61**	**100%**	**223.987.800,00**	**100**	**11,95**		**Tercapai**
			Presentase Data Sektoral yang Valid	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Sektoral yang Dipublikasi	100%	1.873.714.274	100%	158.310.800	100%	231.856.000	100%	223.987.800	100	96,61	100%	223.987.800,00	100	11,95		Tercapai
26.	2.20.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi, Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 Dokumen	1.450.602.774	3 Dokumen	158.310.800	3 Dokumen	190.390.000	3 Dokumen	190.144.000	100	99,87	3 Dokumen	190.144.000,00	100	13,11	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
27.	2.20.02.2.01.06	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	10 Dokumen	423.111.500	0 Dokumen	0	10 Dokumen	41.466.000	10 Dokumen	33.843.800	100	81,62	10 Dokumen	33.843.800,00	100	8	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
												100	90,74			100	10,55		Tercapai
												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
												100	96,61			100	11,95		Tercapai
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Persentase Gangguan yang Terselesaikan**	**100%**	**503.298.560**	**100%**	**29.600.000**	**100%**	**32.134.800**	**100%**	**29.094.700**	**100**	**90,54**	**100%**	**29.094.700,00**	**100**	**5,78**		**Tercapai**
			Persentase Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Aman	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data yang Terpulihkan dan Terback-Up secara Berkala	100%	503.298.560	100%	29.600.000	100%	32.134.800	100%	29.094.700	100	90,54	100%	29.094.700,00	100	5,78		Tercapai
			Persentase Perangkat Lunak yang Terjamin Keamanannya	100%		100%		100%		100%		100		100%		100			Tercapai
28.	2.21.02.2.01.03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	72 Laporan	503.298.560	12 Laporan	29.600.000	12 Laporan	32.134.800	12 Laporan	29.094.700	100	90,54	12 Laporan	29.094.700,00	16,67	5,78	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	Tercapai
												100	90,54			16,67	5,78		
												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												100,66	45,27			50	2,89		
												Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												98,93	89,95			44,19	7,38		
												Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												100,58	**88,67**			**42,8**	**18,32**		
												Sangat Tinggi	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
									26.727.674.661		**23.698.362.187**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Adanya sinkronisasi manajemen Teknologi Informasi pemerintah daerah.																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Terbatasnya anggaran dalam memberikan pelayanan Teknologi Informasi kepada OPD dan Pemerintah Desa.																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Melakukan koordinasi untuk sinkronisasi manajemen Teknologi Informasi pemerintah daerah.																

No	**Kode**	**Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub**	**Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode**		**Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu**		**Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun**		**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**Keterangan**
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**70 Nilai**	**38.826.709.888**	**77.73 Nilai**	**5.150.535.312**	**78 Nilai**	**7.297.059.911**	**78 Nilai**	**6.760.523.041**	**100**	**92,65**	**78 Nilai**	**6.760.523.041,00**	**111,43**	**17,41**		**Tercapai**
	2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	874.474.850	100%	106.161.850	100%	116.904.800	100%	116.838.200	100	99,94	100%	116.838.200,00	100	13,36		Tercapai
1.	2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	848.574.850	2 Dokumen	103.461.850	2 Dokumen	113.904.800	2 Dokumen	113.838.200	100	99,94	2 Dokumen	113.838.200,00	15,38	13,42	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
2.	2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72 Laporan	25.900.000	12 Laporan	2.700.000	12 Laporan	3.000.000	12 Laporan	3.000.000	100	100	12 Laporan	3.000.000,00	16,67	11,58	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
												100	99,97			16,03	12,5		Tercapai
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	23.907.726.070	100%	3.756.887.773	100%	4.809.514.181	100%	4.355.112.836	100	90,55	100%	4.355.112.836,00	100	18,22		Tercapai
3.	2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang	23.148.628.120	30 Orang	3.686.113.681	31 Orang	4.708.414.181	31 Orang	4.268.430.780	100	90,66	31 Orang	4.268.430.780,00	88,57	18,44	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
4.	2.15.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	759.097.950	12 Dokumen	70.774.092	12 Dokumen	101.100.000	12 Dokumen	86.682.056	100	85,74	12 Dokumen	86.682.056,00	16,67	11,42	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
												100	88,2			52,62	14,93		Tercapai
												Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.221.049.000	100%	188.224.800	100%	167.189.000	100%	164.919.699	100	98,64	100%	164.919.699,00	100	13,51		Tercapai
5.	2.15.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	125 Orang	1.221.049.000	40 Orang	188.224.800	50 Orang	167.189.000	57 Orang	164.919.699	114	98,64	57 Orang	164.919.699,00	45,6	13,51	DINAS PERHUBUNGAN	Melebihi Target
												114	98,64			45,6	13,51		Melebihi Target
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.775.765.850	100%	451.093.760	100%	947.083.300	100%	938.467.824	100	99,09	100%	938.467.824,00	100	24,86		Tercapai
6.	2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	84.645.100	1 Paket	49.281.800	2 Paket	18.014.300	2 Paket	17.925.000	100	99,5	2 Paket	17.925.000,00	33,33	21,18	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
7.	2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	441.400.000	1 Paket	8.150.000	3 Paket	79.576.600	3 Paket	71.894.500	100	90,35	3 Paket	71.894.500,00	16,67	16,29	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
8.	2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	254.814.100	12 Paket	23.540.900	12 Paket	32.442.800	12 Paket	32.162.700	100	99,14	12 Paket	32.162.700,00	16,67	12,62	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
9.	2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen	62.400.000	120 Dokumen	4.800.000	120 Dokumen	4.800.600	120 Dokumen	4.540.000	100	94,57	120 Dokumen	4.540.000,00	16,67	7,28	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
10.	2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	758 Laporan	2.932.506.650	235 Laporan	365.321.060	443 Laporan	812.249.000	451 Laporan	811.945.624	101,81	99,96	451 Laporan	811.945.624,00	59,5	27,69	DINAS PERHUBUNGAN	Melebihi Target
												100,36	96,7			28,57	17,01		Melebihi Target
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	5.305.503.000	100%	0	100%	81.309.200	100%	79.452.000	100	97,72	100%	79.452.000,00	100	1,5		Tercapai
11.	2.15.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	28 Unit	5.125.503.000	0 Unit	0	2 Unit	53.440.000	2 Unit	51.592.000	100	96,54	2 Unit	51.592.000,00	7,14	1,01	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
12.	2.15.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Unit	180.000.000	0 Unit	0	2 Unit	27.869.200	2 Unit	27.860.000	100	99,97	2 Unit	27.860.000,00	25	15,48	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
												100	98,25			16,07	8,24		Tercapai
												Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	1.587.072.950	100%	272.573.868	100%	334.483.780	100%	306.487.831	100	91,63	100%	306.487.831,00	100	19,31		Tercapai
13.	2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	271.680.000	12 Laporan	7.750.000	12 Laporan	10.000.000	12 Laporan	9.750.000	100	97,5	12 Laporan	9.750.000,00	16,67	3,59	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
14.	2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	656.024.000	12 Laporan	121.436.468	12 Laporan	159.012.480	12 Laporan	143.327.231	100	90,14	12 Laporan	143.327.231,00	16,67	21,85	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
15.	2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	659.368.950	12 Laporan	143.387.400	12 Laporan	165.471.300	12 Laporan	153.410.600	100	92,71	12 Laporan	153.410.600,00	16,67	23,27	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	93,45			16,67	16,23		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	2.155.118.168	100%	375.593.261	100%	840.575.650	100%	799.244.651	100	95,08	100%	799.244.651,00	100	37,09		Tercapai
16.	2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	1.653.078.168	6 Unit	245.933.261	6 Unit	339.195.650	6 Unit	300.513.701	100	88,6	6 Unit	300.513.701,00	33,33	18,18	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
17.	2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	502.040.000	2 Unit	129.660.000	2 Unit	501.380.000	2 Unit	498.730.950	100	99,47	2 Unit	498.730.950,00	100	99,34	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	94,03			66,67	58,76		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	96,09			100	18,26		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**	**Persentase moda transportasi yang laik jalan**	**100%**	**44.847.464.150**	**80.95 %**	**8.604.262.241**	**86%**	**30.450.206.550**	**49,09%**	**29.361.507.576**	**57,08**	**96,42**	**49.09 %**	**29.361.507.576,00**	**49,09**	**65,47**		**Tidak Tercapai**
			Persentase wilayah (desa/kecamatan) yang terlayani moda transportasi	100%		36.8 %		66.7 %		36,80%		55,17		36,80%		36,8			Tidak Tercapai
			Persentase jalan yang tertib manajemen lalu lintas	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
			Jumlah pelanggaran moda transportasi	10 Pelanggaran		6 Pelanggaran		13 Pelanggaran		10 Pelanggaran		123,08		10,00 Pelanggaran		100			Melebihi Target
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan yang berkeselamatan	100%	30.446.618.600	31.25 %	6.063.328.485	50%	26.950.666.100	50%	26.137.558.441	100	96,98	50%	26.137.558.441,00	50	85,85		Tercapai
18.	2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	126198 Unit	3.690.664.000	85 Unit	1.603.984.700	1311 Unit	21.514.400.000	1311 Unit	21.137.437.195	100	98,25	1311 Unit	21.137.437.195,00	1,04	572,73	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
19.	2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	800 Unit	26.755.954.600	400 Unit	4.459.343.785	500 Unit	5.436.266.100	500 Unit	5.000.121.246	100	91,98	500 Unit	5.000.121.246,00	62,5	18,69	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	95,11			31,77	295,71		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terminal Penumpang Tipe C yang berfungsi sesuai standar	100%	1.291.530.000	100%	52.634.000	100%	280.916.000	100%	269.958.574	100	96,1	100%	269.958.574,00	100	20,9		Tercapai
20.	2.15.02.2.03.01	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	6 Dokumen	655.000.000	0 Dokumen	0	2 Dokumen	203.440.000	2 Dokumen	202.629.500	100	99,6	2 Dokumen	202.629.500,00	33,33	30,94	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
21.	2.15.02.2.03.05	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi	15 Orang	636.530.000	1 Orang	52.634.000	2 Orang	77.476.000	2 Orang	67.329.074	100	86,9	2 Orang	67.329.074,00	13,33	10,58	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	93,25			23,33	20,76		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase kawasan parkir yang tertib/tertata	100%	1.709.480.000	100%	156.850.000	100%	202.199.800	100%	160.364.000	100	79,31	100%	160.364.000,00	100	9,38		Tercapai
22.	2.15.02.2.04.01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	14 Dokumen	1.709.480.000	10 Dokumen	156.850.000	11 Dokumen	202.199.800	11 Dokumen	160.364.000	100	79,31	11 Dokumen	160.364.000,00	78,57	9,38	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	79,31			78,57	9,38		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase moda transportasi yang lulus uji	100%	4.422.474.450	80.95 %	519.286.376	86%	767.559.000	50%	729.097.361	58,14	94,99	50%	729.097.361,00	50	16,49		Tidak Tercapai
			Persentase sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor yang berfungsi sesuai standar	100%		100%		100%		100%		100		100%		100			Tercapai
23.	2.15.02.2.05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan Prasarana Pengujian Berkala kendaraan bermotor yang tersedia	13 Unit	2.543.700.000	1 Unit	248.700.000	2 Unit	381.220.000	2 Unit	368.967.300	100	96,79	2 Unit	368.967.300,00	15,38	14,51	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
24.	2.15.02.2.05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	10 Orang	100.000.000	1 Orang	9.704.856	2 Orang	43.126.000	2 Orang	43.064.711	100	99,86	2 Orang	43.064.711,00	20	43,06	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
25.	2.15.02.2.05.03	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1814 Kendaraan	796.224.450	1475 Kendaraan	133.489.950	1568 Kendaraan	152.989.100	895 Kendaraan	136.599.100	57,08	89,29	895 Kendaraan	136.599.100,00	49,34	17,16	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Tercapai
26.	2.15.02.2.05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Dokumen	260.000.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	50.220.000	1 Dokumen	45.000.000	100	89,61	1 Dokumen	45.000.000,00	16,67	17,31	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
27.	2.15.02.2.05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	60 Unit	722.550.000	10 Unit	127.391.570	10 Unit	140.003.900	9 Unit	135.466.250	90	96,76	9 Unit	135.466.250,00	15	18,75	DINAS PERHUBUNGAN	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		89,42	94,46			23,28	22,16		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jaringan jalan yang tertib manajemen rekayasa Lalu Lintas	100%	4.277.251.100	100%	1.280.544.800	100%	1.686.312.650	100%	1.644.020.000	100	97,49	100%	1.644.020.000,00	100	38,44		Tercapai
28.	2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	1200 Laporan	4.019.814.850	204 Laporan	1.253.900.000	200 Laporan	1.542.763.850	205 Laporan	1.509.010.000	102,5	97,81	205 Laporan	1.509.010.000,00	17,08	37,54	DINAS PERHUBUNGAN	Melebihi Target
29.	2.15.02.2.06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	21 Laporan	257.436.250	1 Laporan	26.644.800	6 Laporan	143.548.800	6 Laporan	135.010.000	100	94,05	6 Laporan	135.010.000,00	28,57	52,44	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		101,25	95,93			22,83	44,99		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	2.700.110.000	10 Unit	531.618.580	10 Unit	562.553.000	10 Unit	420.509.200	100	74,75	10 Unit	420.509.200,00	71,43	15,57		Tercapai
30.	2.15.02.2.09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	14 Unit	2.700.110.000	10 Unit	531.618.580	10 Unit	562.553.000	10 Unit	420.509.200	100	74,75	10 Unit	420.509.200,00	71,43	15,57	DINAS PERHUBUNGAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	74,75			71,43	15,57		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		90,54	77,09			67,35	26,66		
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		72,56	76,38			32,1	16,58		
										Predikat Kinerja (Program)		Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**93,22**	**95,69**			**32,11**	**39,83**		
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
									37.747.266.461	**Jumlah Anggaran dari seluruh Program**	**36.122.030.617**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Adanya Komitmen yang tinggi dan Koordinasi yang baik di dalam unit kerja dalam hal pengawalan target kinerja dan pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		- Adanya aturan ODOL (Overload dan Overdimensi) banyak kendaraan yang ditolak karena dimensi berlebih sehingga realisasi kendaraan yang laik uji tidak mencapai target - Kurangnya penegakan hukum di lapangan oleh Satlantas dan Dinas Perhubungan																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		- Karena aturan ODOL merupakan aturan dari Kementrian Perhubungan, Dinas Perhubungan selalu mensosialisasikan ke masyarakat untuk merubah dimensi kendaraannya sesuai aturan - Meningkatkan frekuensi penegakan hukum bersama Satlantas dan Dinas																
No	**Kode**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) /**	**Target Renstra Perangkat Daerah**		**Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Target Kinerja dan Anggaran Renja**			**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi**	**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra**			**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung**	**Keterangan**

No	Kode	Daerah dan Program/Kegiatan	Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**73%**	**1.584.686.569.087**	**64.46 %**	**214.281.032.605**	**71.6 %**	**264.195.598.596**	**71,60%**	**218.019.436.494**	**100**	**82,52**	**71.6 %**	**218.019.436.494,00**	**101,92**	**13,76**		**Tercapai**
			Nilai IKM Perangkat Daerah	86.5 %		84.5 %		85%		85%		100		169,50%		195,95			Tercapai
			Sample	0%		0%		0%		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	4.958.002.787	100%	796.032.000	100%	947.637.000	100%	463.069.849	100	48,87	100%	463.069.849,00	100	9,34		Tercapai
1.	1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	31 Dokumen	1.071.888.975	6 Dokumen	224.144.000	4 Dokumen	121.767.200	4 Dokumen	45.475.600	100	37,35	10 Dokumen	269.619.600,00	32,26	25,15	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
2.	1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Laporan	1.943.056.906	5 Laporan	285.944.000	7 Laporan	342.666.000	5 Laporan	174.884.220	71,43	51,04	10 Laporan	460.828.220,00	43,48	23,72	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		85,71	44,19			37,87	24,44		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.439.239.293.147	100%	199.026.826.139	100%	225.217.075.006	100%	194.055.926.403	100	86,16	100%	194.055.926.403,00	100	13,48		Tercapai
3.	1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/Bulan	1.423.351.583.066	12 Orang/Bulan	197.601.559.739	12 Orang/Bulan	222.000.649.606	12 Orang/Bulan	191.675.762.206	100	86,34	24 Orang/Bulan	389.277.321.945,00	200	27,35	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
4.	1.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	32 Dokumen	15.887.710.081	3 Dokumen	1.425.266.400	10 Dokumen	3.216.425.400	10 Dokumen	2.380.164.197	100	74	13 Dokumen	3.805.430.597,00	40,63	23,95	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	80,17			120,31	25,65		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	100%	6.436.020.000	100%	813.000.000	100%	1.978.355.000	100%	1.534.887.033	100	77,58	100%	1.534.887.033,00	100	23,85		Tercapai
5.	1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	577.320.000	0 Dokumen	0	6 Dokumen	144.330.000	6 Dokumen	69.597.471	100	48,22	6 Dokumen	69.597.471,00	25	12,06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
6.	1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	3.976.920.000	2 Laporan	813.000.000	1 Laporan	790.980.000	1 Laporan	512.896.000	100	64,84	3 Laporan	1.325.896.000,00	30	33,34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
7.	1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	33 Laporan	1.881.780.000	0 Laporan	0	9 Laporan	1.043.045.000	9 Laporan	952.393.562	100	91,31	9 Laporan	952.393.562,00	27,27	50,61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	68,12			27,42	32		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Yang Baik	100%	6.436.020.000	100%	813.000.000	100%	1.978.355.000	100%	1.534.887.033	100	77,58	100%	1.534.887.033,00	100	23,85		Tercapai
8.	1.01.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	24 Dokumen	577.320.000	0 Dokumen	0	6 Dokumen	144.330.000	6 Dokumen	69.597.471	100	48,22	6 Dokumen	69.597.471,00	25	12,06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
9.	1.01.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	10 Laporan	3.976.920.000	2 Laporan	813.000.000	1 Laporan	790.980.000	1 Laporan	512.896.000	100	64,84	3 Laporan	1.325.896.000,00	30	33,34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
10.	1.01.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	33 Laporan	1.881.780.000	0 Laporan	0	9 Laporan	1.043.045.000	9 Laporan	952.393.562	100	91,31	9 Laporan	952.393.562,00	27,27	50,61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	68,12			27,42	32		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	90.552.624.078	100%	5.759.190.000	100%	15.443.596.500	100%	12.110.943.429	100	78,42	100%	12.110.943.429,00	100	13,37		Tercapai
11.	1.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1261 Paket	712.826.000	277 Paket	107.100.000	405 Paket	260.898.500	405 Paket	250.000.000	100	95,82	682 Paket	357.100.000,00	54,08	50,1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
12.	1.01.01.2.05.11		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11790 Orang	89.839.798.078	722 Orang	5.652.090.000	1995 Orang	15.182.698.000	1995 Orang	11.860.943.429	100	78,12	2717 Orang	17.513.033.429,00	23,04	19,49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
13.	1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11790 Orang	89.839.798.078	722 Orang	5.652.090.000	1995 Orang	15.182.698.000	1995 Orang	11.860.943.429	100	78,12	2717 Orang	17.513.033.429,00	23,04	19,49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	84,02			33,39	29,69		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	18.685.364.825	100%	3.850.186.800	100%	6.754.734.000	100%	6.411.294.403	100	94,92	100%	6.411.294.403,00	100	34,31		Tercapai
14.	1.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	189 Paket	407.001.918	23 Paket	50.515.000	50 Paket	69.093.200	50 Paket	68.522.000	100	99,17	73 Paket	119.037.000,00	38,62	29,25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
15.	1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	43 Paket	2.008.545.630	15 Paket	1.060.800.000	10 Paket	1.831.997.400	10 Paket	1.757.946.563	100	95,96	25 Paket	2.818.746.563,00	58,14	140,34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
16.	1.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	68 Paket	528.924.804	25 Paket	423.344.000	8 Paket	31.801.700	8 Paket	30.084.000	100	94,6	33 Paket	453.428.000,00	48,53	85,73	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
17.	1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	71 Paket	2.856.018.915	27 Paket	479.987.800	25 Paket	544.502.500	25 Paket	476.176.250	100	87,45	52 Paket	956.164.050,00	73,24	33,48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
18.	1.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3018 Dokumen	4.593.973.732	441 Dokumen	35.280.000	937 Dokumen	974.383.200	937 Dokumen	951.130.000	100	97,61	1378 Dokumen	986.410.000,00	45,66	21,47	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
19.	1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	55 Laporan	8.290.899.826	11 Laporan	1.800.260.000	4 Laporan	3.302.956.000	4 Laporan	3.127.435.590	100	94,69	15 Laporan	4.927.695.590,00	27,27	59,43	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	94,91			48,58	61,62		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	12.369.002.039	100%	1.297.000.000	100%	10.287.661.300	100%	208.516.600	100	2,03	200%	1.505.516.600,00	200	12,17		Tercapai
20.	1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	0	n/a	648.500.000	n/a	0	n/a	0	0	0	n/a	648.500.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Tercapai
21.	1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	194.532.039	0 Unit	0	40 Unit	228.541.300	40 Unit	208.516.600	100	91,24	40 Unit	208.516.600,00	86,96	107,19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50	45,62			43,48	53,59		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah		
	1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah sesuai ketentuan	100%	12.369.002.039	100%	1.297.000.000	100%	10.287.661.300	100%	208.516.600	100	2,03	200%	1.505.516.600,00	200	12,17		Tidak Tercapai
22.	1.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	n/a	0	n/a	648.500.000	n/a	0	n/a	0	0	0	n/a	648.500.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Tercapai
23.	1.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	46 Unit	194.532.039	0 Unit	0	40 Unit	228.541.300	40 Unit	208.516.600	100	91,24	40 Unit	208.516.600,00	86,96	107,19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50	45,62			43,48	53,59		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah		
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	5.764.168.541	100%	1.236.694.700	100%	963.825.800	100%	825.858.075	100	85,69	100%	825.858.075,00	100	14,33		Tercapai
24.	1.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah bulan ketersedian jasa surat menyurat	15 Laporan	1.268.575.504	3 Laporan	273.695.700	2 Laporan	230.240.600	2 Laporan	211.009.000	100	91,65	5 Laporan	484.704.700,00	33,33	38,21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
25.	1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan ketersedian Jasa Komunikasi, Sumber DayaAir dan Listrik	25 Laporan	4.495.593.037	4 Laporan	962.999.000	4 Laporan	733.585.200	4 Laporan	614.849.075	100	83,81	8 Laporan	1.577.848.075,00	32	35,1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	87,73			32,67	36,65		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	6.682.093.670	100%	1.502.102.966	100%	2.602.713.990	100%	2.408.940.702	100	92,55	100%	2.408.940.702,00	100	36,05		Tercapai

26.	1.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	190 Unit	3.001.863.386	43 Unit	206.430.000	30 Unit	675.710.350	30 Unit	612.527.102	100	90,65	73 Unit	818.957.102,00	38,42	27,28	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
27.	1.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	78 Unit	2.035.691.296	13 Unit	442.248.500	13 Unit	279.847.700	13 Unit	243.190.000	100	86,9	26 Unit	685.438.500,00	33,33	33,67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
28.	1.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	198 Unit	822.025.488	33 Unit	325.664.500	33 Unit	77.887.300	33 Unit	76.915.700	100	98,75	66 Unit	402.580.200,00	33,33	48,97	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
29.	1.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit	822.513.500	0 Unit	0	3 Unit	1.569.268.640	3 Unit	1.476.307.900	100	94,08	3 Unit	1.476.307.900,00	25	179,49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,59			32,52	72,35		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	64,58			120	19,29		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**APK PAUD**	**79.87 %**	**458.280.537.247**	**70.89 %**	**87.178.326.113**	**72.22 %**	**118.889.594.900**	**72,22%**	**99.606.258.462**	**100**	**83,78**	**143.11 %**	**186.784.584.575,00**	**179,18**	**40,76**		**Tercapai**
			APK SD/sederajat	99.79 %		98.35 %		98.8 %		98,80%		100		197,15%		197,56			Tercapai
			APM SD/sederajat	93,45 %		90.42 %		90.94 %		90,94%		100		181,36%		194,07			Tercapai
			APK SMP/ sederajat	84.36 %		79.97 %		80.26 %		80,26%		100		160,23%		189,94			Tercapai
			APM SMP/ sederajat	68.08 %		64.88 %		65.13 %		65,13%		100		130,01%		190,97			Tercapai
			Angka melanjutkan SD ke SMP	80.67 %		75,75 %		76.48 %		76,48%		100		152,23%		188,71			Tercapai
			Angka melanjutkan SMP ke SMA	99.27 %		97.85 %		98.45 %		98,45%		100		196,30%		197,74			Tercapai
			Persentase ketersediaan kelompok belajar pada PKBM dikecamatan	100%		0%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
			Nilai rata-rata literasi SD	70.56 %		53,47 %		67,74 %		67,74%		100		121,21%		171,78			Tercapai
			Nilai Rata-rata litersasi SMP	63.9 %		51.16 %		61,08 %		61,08%		100		112,24%		175,65			Tercapai
			Nilai rata-rata numerasi SD	53.28 %		25.69 %		51%		51%		100		76,69%		143,94			Tercapai
			Nilai Rata-rata Numerasi SMP	45.69 %		41.83 %		39.9 %		39,90%		100		81,73%		178,88			Tercapai
			Indeks iklim keamanan SD	79.36 %		64.08 %		67.9 %		67,90%		100		131,98%		166,31			Tercapai
			Indeks iklim keamanan SMP	71.17 %		68.95 %		67.84 %		67,84%		100		136,79%		192,2			Tercapai
			indeks iklim kebhinekaan SD	75,7 %		58.66 %		68,17 %		68,17%		100		126,83%		167,54			Tercapai
			indeks iklim kebhinekaan SMP	75.37 %		58.85 %		67.84 %		67,84%		100		126,69%		168,09			Tercapai
			indeks iklim inklusivitas SD	66.78 %		51.5 %		55,32 %		55,32%		100		106,82%		159,96			Tercapai
			indeks iklim inklusivitas SMP	62.17 %		51.41 %		54.1 %		54,10%		100		105,51%		169,71			Tercapai
			Indeks SPM	72%		0%		66.65 %		66,65%		100		66,65%		92,57			Tercapai
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	0%	225.586.989.159	0%	45.433.101.269	0%	65.049.673.900	0%	54.660.473.459	0	84,03	0%	100.093.574.728,00	0	44,37		Tidak Tercapai
			Persentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase sekolah mendapatkan BOS daerah	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase sekolah yang mendapatkan pendampingan	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
30.	1.01.02.2.01.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	14 Ruang	2.844.050.000	4 Ruang	900.350.000	2 Ruang	405.080.000	2 Ruang	400.846.002	100	98,95	6 Ruang	1.301.196.002,00	42,86	45,75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
31.	1.01.02.2.01.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	0 Ruang	0	0 Ruang	0	20 Ruang	0	20 Ruang	0	100	0	20 Ruang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
32.	1.01.02.2.01.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	11 Ruang	1.089.284.000	0 Ruang	0	2 Ruang	196.364.000	2 Ruang	195.336.551	100	99,48	2 Ruang	195.336.551,00	18,18	17,93	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
33.	1.01.02.2.01.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	991.732.000	0 Ruang	0	1 Ruang	245.272.000	1 Ruang	210.714.000	100	85,91	1 Ruang	210.714.000,00	25	21,25	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
34.	1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	91 Unit	16.436.357.550	10 Unit	1.367.050.000	42 Unit	8.036.637.550	42 Unit	7.445.529.548	100	92,64	52 Unit	8.812.579.548,00	57,14	53,62	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
35.	1.01.02.2.01.08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	97 Ruang	32.143.433.450	18 Ruang	6.093.174.000	40 Ruang	11.823.705.450	40 Ruang	11.096.038.725	100	93,85	58 Ruang	17.189.212.725,00	59,79	53,48	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
36.	1.01.02.2.01.09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	35 Ruang	5.652.902.000	9 Ruang	1.061.350.000	14 Ruang	2.349.112.000	14 Ruang	2.146.364.717	100	91,37	23 Ruang	3.207.714.717,00	65,71	56,74	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
37.	1.01.02.2.01.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	20 Ruang	3.018.000.000	0 Ruang	0	5 Ruang	762.700.000	5 Ruang	755.937.061	100	99,11	5 Ruang	755.937.061,00	25	25,05	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
38.	1.01.02.2.01.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	0 Unit	0	0 Unit	660.000.000	2 Unit	200.000.000	2 Unit	197.127.000	100	98,56	2 Unit	857.127.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
39.	1.01.02.2.01.14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	0 Paket	0	0 Paket	20.000.000	2500 Paket	4.100.000.000	2500 Paket	3.979.794.000	100	97,07	2500 Paket	3.999.794.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
40.	1.01.02.2.01.16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	267 Paket	13.871.231.200	0 Paket	0	2 Paket	250.000.000	2 Paket	247.940.000	100	99,18	2 Paket	247.940.000,00	0,75	1,79	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
41.	1.01.02.2.01.17	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0 Unit	0	0 Unit	101.400.000	5348 Unit	2.271.360.000	5291 Unit	989.478.000	98,93	43,56	5291 Unit	1.090.878.000,00	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Tercapai
42.	1.01.02.2.01.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	18 Paket	12.792.200.000	4 Paket	7.661.600.000	6 Paket	750.000.000	6 Paket	746.490.000	100	99,53	10 Paket	8.408.090.000,00	55,56	65,73	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
43.	1.01.02.2.01.23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	176 Satuan	1.307.710.000	176 Satuan	395.350.000	176 Satuan	470.400.000	176 Satuan	451.163.000	100	95,91	176 Satuan	451.163.000,00	100	34,5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
44.	1.01.02.2.01.24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	176 Satuan	1.108.760.000	176 Satuan	694.300.000	176 Satuan	145.420.000	176 Satuan	131.452.500	100	90,4	176 Satuan	131.452.500,00	100	11,86	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
45.	1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	1583 Peserta Didik	1.865.401.500	427 Peserta Didik	559.764.600	400 Peserta Didik	626.336.900	400 Peserta Didik	519.882.490	100	83	827 Peserta Didik	1.079.647.090,00	52,24	57,88	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
46.	1.01.02.2.01.26	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	5270 Orang	54.173.650.000	0 Orang	0	1310 Orang	18.568.800.000	1310 Orang	13.104.700.000	100	70,57	1310 Orang	13.104.700.000,00	24,86	24,19	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
47.	1.01.02.2.01.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	0 Orang	0	0 Orang	0	2000 Orang	0	2000 Orang	0	100	0	2000 Orang	0	0	0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
48.	1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	176 Jumlah	18.748.851.800	176 Jumlah	12.652.398.800	176 Jumlah	484.717.000	176 Jumlah	194.199.278	100	40,06	352 Jumlah	12.846.598.078,00	200	68,52	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
49.	1.01.02.2.01.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	176 Satuan	58.741.985.659	176 Satuan	13.266.363.869	176 Satuan	11.663.409.000	176 Satuan	11.663.409.000	100	100	176 Satuan	11.663.409.000,00	100	19,86	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
50.	1.01.02.2.01.30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	235 Orang	801.440.000	0 Orang	0	50 Orang	200.360.000	50 Orang	184.071.587	100	91,87	50 Orang	184.071.587,00	21,28	22,97	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		99,95	79,57			45,16	27,67		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase kemudahan dan akses layanan pendidikan	0%	98.000.120.538	0%	19.659.013.244	0%	21.697.352.000	0%	16.544.437.917	0	76,25	0%	36.203.451.161,00	0	36,94		Tidak Tercapai
			Persentase guru atau tenaga kependidikan bersertifikasi	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase guru yang lulus sebagai guru penggerak	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai

			Persentase sekolah mendapatkan BOS daerah	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase sekolah yang telah mengupdate data Dapodik	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase sekolah menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase Pendidik yang menggunakan id pembelajaran	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
			Persentase sekolah yang mendapatkan pendampingan	n/a		n/a		n/a		n/a		0		n/a		0			Tidak Tercapai
51.	1.01.02.2.02.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	15 Ruang	3.127.209.150	0 Ruang	0	6 Ruang	1.709.708.050	6 Ruang	1.653.306.789	100	96,7	6 Ruang	1.653.306.789,00	40	52,87	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
52.	1.01.02.2.02.03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.450.964.950	0 Ruang	0	1 Ruang	520.454.950	1 Ruang	410.043.847	100	78,79	1 Ruang	410.043.847,00	25	28,26	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
53.	1.01.02.2.02.04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	4 Ruang	1.263.814.000	0 Ruang	0	1 Ruang	306.304.000	1 Ruang	283.860.629	100	92,67	1 Ruang	283.860.629,00	25	22,46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
54.	1.01.02.2.02.06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5 Ruang	2.708.786.150	0 Ruang	0	1 Ruang	706.554.000	1 Ruang	538.176.500	100	76,17	1 Ruang	538.176.500,00	20	19,87	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
55.	1.01.02.2.02.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	25 Unit	6.235.380.000	0 Unit	0	9 Unit	1.885.040.000	9 Unit	1.860.073.852	100	98,68	9 Unit	1.860.073.852,00	36	29,83	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
56.	1.01.02.2.02.27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1294 Paket	11.750.496.800	0 Paket	0	1282 Paket	3.277.320.000	1252 Paket	2.026.360.000	97,66	61,83	1252 Paket	2.026.360.000,00	96,75	17,24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Tercapai
57.	1.01.02.2.02.32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	5019 Peserta Didik	16.113.250.000	673 Peserta Didik	5.519.500.000	1415 Peserta Didik	1.443.000.000	1415 Peserta Didik	1.130.491.500	100	78,34	2088 Peserta Didik	6.649.991.500,00	41,6	41,27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
58.	1.01.02.2.02.36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar dan Ujian	14277 Peserta Didik	1.372.040.000	2337 Peserta Didik	158.510.000	2400 Peserta Didik	221.150.000	2400 Peserta Didik	170.670.100	100	77,17	4737 Peserta Didik	329.180.100,00	33,18	23,99	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
59.	1.01.02.2.02.37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	26 Satuan	759.510.000	26 Satuan	24.400.000	26 Satuan	101.080.000	26 Satuan	83.665.700	100	82,77	26 Satuan	83.665.700,00	100	11,02	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
60.	1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2960 Peserta Didik	2.419.190.000	500 Peserta Didik	339.392.000	515 Peserta Didik	456.068.000	515 Peserta Didik	383.259.000	100	84,04	1015 Peserta Didik	722.651.000,00	34,29	29,87	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
61.	1.01.02.2.02.39	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2557 Orang	23.168.100.000	0 Orang	0	636 Orang	8.022.000.000	636 Orang	5.025.450.000	100	62,65	636 Orang	5.025.450.000,00	24,87	21,69	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
62.	1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	26 Satuan	7.849.443.000	26 Satuan	5.047.400.000	26 Satuan	69.593.000	0 Satuan	0	0	0	26 Satuan	5.047.400.000,00	100	64,3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Tercapai
63.	1.01.02.2.02.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	26 Satuan	19.781.936.488	26 Satuan	3.388.693.244	26 Satuan	2.979.080.000	26 Satuan	2.979.080.000	100	100	26 Satuan	2.979.080.000,00	100	15,06	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		92,13	76,14			52,05	29,06		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase jumlah PAUD yang berakredetasi minimal B	67.96 %	104.041.528.550	47.26 %	17.481.989.600	46.5 %	27.917.320.000	46,50%	24.589.466.576	100	88,08	46.5 %	24.589.466.576,00	68,42	23,63		Tercapai
			Persentase lembaga PAUD yang telah dinegerikan	28.57 %		11.72 %		28.57 %		28,57%		100		29%		100			Tercapai
			Persentase pendidik PAUD yang S-1 dan D4	93.09 %		73.24 %		93.09 %		93,09%		100		93%		100			Tercapai
			Persentase lembaga PAUD mendapatkan BOP Daerah	100%		0%		0%		0%		0		0%		0			Tidak Tercapai
			persentase lembaga PAUD yang telah valid dan updating data Dapodik PAUD	100%		100%		100%		100%		100		100%		100			Tercapai
64.	1.01.02.2.03.01	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	59 Ruang	17.616.581.950	18 Ruang	2.519.040.000	20 Ruang	5.260.801.950	20 Ruang	4.932.367.608	100	93,76	38 Ruang	7.451.407.608,00	64,41	42,3	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
65.	1.01.02.2.03.02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	56 Unit	11.987.739.550	14 Unit	1.633.580.000	25 Unit	3.932.489.050	25 Unit	3.777.475.858	100	96,06	39 Unit	5.411.055.858,00	69,64	45,14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
66.	1.01.02.2.03.03	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	24 Unit	4.575.072.250	7 Unit	1.045.365.000	7 Unit	1.531.080.000	7 Unit	1.428.857.617	100	93,32	14 Unit	2.474.222.617,00	58,33	54,08	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
67.	1.01.02.2.03.09	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	17 Paket	1.899.211.300	6 Paket	206.711.300	2 Paket	700.902.000	2 Paket	183.123.700	100	26,13	8 Paket	389.835.000,00	47,06	20,53	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
68.	1.01.02.2.03.12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	105 Paket	1.365.200.000	8 Paket	202.300.000	4 Paket	1.379.882.000	4 Paket	1.294.396.000	100	93,8	12 Paket	1.496.696.000,00	11,43	109,63	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
69.	1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	2652 Peserta Didik	2.535.381.250	439 Peserta Didik	475.775.650	439 Peserta Didik	296.305.600	439 Peserta Didik	294.709.166	100	99,46	878 Peserta Didik	770.484.816,00	33,11	30,39	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
70.	1.01.02.2.03.15	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	3022 Orang	34.704.149.850	572 Orang	5.492.099.850	650 Orang	7.624.050.000	650 Orang	6.363.340.000	100	83,46	650 Orang	6.363.340.000,00	21,51	18,34	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
71.	1.01.02.2.03.16	Peningkatan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Sekolah Penggerak/Promosi	430 Orang	4.441.701.600	86 Orang	1.199.602.000	86 Orang	3.003.304.400	86 Orang	2.658.021.788	100	88,5	172 Orang	3.857.623.788,00	40	86,85	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
72.	1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	145 Satuan	1.114.780.800	145 Satuan	430.675.800	145 Satuan	324.105.000	145 Satuan	146.624.839	100	45,24	290 Satuan	577.300.639,00	200	51,79	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
73.	1.01.02.2.03.18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	1017 Satuan	23.801.710.000	235 Satuan	4.258.290.000	243 Satuan	3.864.400.000	228 Satuan	3.510.550.000	93,83	90,84	228 Satuan	3.510.550.000,00	22,42	14,75	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		99,38	81,06			56,79	47,38		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase jumlah sarana dan prasarana kejar paket a, b dan c	100%	30.651.899.000	99.59 %	4.604.222.000	100%	4.225.249.000	100%	3.811.880.510	100	90,22	100%	3.811.880.510,00	100	12,44		Tercapai
			Persentase peserta didik paket a, b dan c	88.55 %		81.75 %		83.45 %		83,45%		100		83%		94,24			Tercapai
74.	1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	3163 Peserta Didik	7.368.670.000	704 Peserta Didik	1.219.212.000	459 Peserta Didik	1.189.210.000	459 Peserta Didik	1.188.614.186	100	99,95	1163 Peserta Didik	2.407.826.186,00	36,77	32,68	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
75.	1.01.02.2.04.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	1736 Orang	7.712.320.000	278 Orang	1.000.800.000	387 Orang	1.365.520.000	387 Orang	1.274.270.324	100	93,32	665 Orang	2.275.070.324,00	38,31	29,5	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
76.	1.01.02.2.04.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	12 Satuan Pendidikan	514.349.000	12 Satuan Pendidikan	0	12 Satuan Pendidikan	64.349.000	12 Satuan Pendidikan	7.266.000	100	11,29	24 Satuan Pendidikan	7.266.000,00	200	1,41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
77.	1.01.02.2.04.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	12 Satuan	15.056.560.000	12 Satuan	1.434.210.000	11 Satuan	1.606.170.000	11 Satuan	1.341.730.000	100	83,54	23 Satuan	2.775.940.000,00	191,67	18,44	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	72,02			116,69	20,51		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		26,09	14,72			7,32	5,1		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**	**Nilai rata-rata literasi SD**	**70.56 %**	**593.813.000**	**53.47 %**	**174.862.000**	**67.74 %**	**115.951.000**	**67,74%**	**105.748.400**	**100**	**91,2**	**121.21 %**	**280.610.400,00**	**171,78**	**47,26**		**Tercapai**
			Nilai Rata-rata litersasi SMP	63.9 %		51.16 %		61.08 %		61,08%		100		112,24%		175,65			Tercapai
			Nilai rata-rata numerasi SD	53.28 %		25.69 %		51%		51%		100		76,69%		143,94			Tercapai
			Nilai Rata-rata Numerasi SMP	45.69 %		41.83 %		39.9 %		39,90%		100		81,73%		178,88			Tercapai
	1.01.03.2.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Sekolah yang mendapatkan Buku Teks dan Alat Peraga Edukasi	100%	593.813.000	100%	174.862.000	100%	115.951.000	100%	105.748.400	100	91,2	100%	105.748.400,00	100	17,81		Tercapai
78.	1.01.03.2.01.01	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	8 Dokumen	18.890.000	1 Dokumen	3.740.000	1 Dokumen	3.930.000	1 Dokumen	3.840.000	100	97,71	2 Dokumen	7.580.000,00	25	40,13	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
79.	1.01.03.2.01.02	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	8 Dokumen	18.890.000	1 Dokumen	3.740.000	1 Dokumen	3.930.000	1 Dokumen	3.927.000	100	99,92	2 Dokumen	7.667.000,00	25	40,59	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
80.	1.01.03.2.01.03	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	2500 Buku	163.600.000	500 Buku	50.000.000	500 Buku	28.400.000	500 Buku	25.380.000	100	89,37	1000 Buku	75.380.000,00	40	46,08	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
81.	1.01.03.2.01.04	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	418 Orang	392.433.000	100 Orang	117.382.000	18 Orang	79.691.000	18 Orang	72.601.400	100	91,1	118 Orang	189.983.400,00	28,23	48,41	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	94,53			29,56	43,8		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	91,2			100	17,81		Tercapai

											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten**	**0%**	**3.566.204.000**	**0%**	**1.807.904.000**	**58%**	**8.843.030.000**	**58%**	**7.612.255.001**	**100**	**86,08**	**58%**	**9.420.159.001,00**	**0**	**264,15**		**Tercapai**
			Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompeten	26.41 %		13%		19.41 %		19,41%		100		32,41%		122,72			Tercapai
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100%	3.566.204.000	62.91 %	1.807.904.000	100%	8.843.030.000	100%	7.612.255.001	100	86,08	100%	7.612.255.001,00	100	213,46		Tercapai
82.	1.01.04.2.01.01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	43 Dokumen	2.326.614.000	15 Dokumen	1.350.204.000	6 Dokumen	8.558.550.000	6 Dokumen	7.370.033.533	100	86,11	21 Dokumen	8.720.237.533,00	48,84	374,8	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
83.	1.01.04.2.01.02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	47 Laporan	1.239.590.000	8 Laporan	457.700.000	9 Laporan	284.480.000	9 Laporan	242.221.468	100	85,15	17 Laporan	699.921.468,00	36,17	56,46	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	85,63			42,5	215,63		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	86,08			100	213,46		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**	**Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya**	**100%**	**292.080.000**	**99.08 %**	**205.000.000**	**100%**	**73.020.000**	**100%**	**25.930.000**	**100**	**35,51**	**100%**	**25.930.000,00**	**100**	**8,88**		**Tercapai**
	1.01.05.2.02	Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal yang Diupdate Perizinannya	100%	292.080.000	99.08 %	205.000.000	100%	73.020.000	100%	25.930.000	100	35,51	100%	25.930.000,00	100	8,88		Tercapai
84.	1.01.05.2.02.02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Non Formal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	24 Dokumen	292.080.000	6 Dokumen	0	6 Dokumen	73.020.000	3 Dokumen	25.930.000	50	35,51	9 Dokumen	25.930.000,00	37,5	8,88	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50	35,51			37,5	8,88		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	35,51			100	8,88		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase kebudayaan yang dikembangkan**	**100%**	**676.500.000**	**12%**	**0**	**28%**	**396.500.000**	**68%**	**396.480.000**	**242,86**	**99,99**	**80%**	**396.480.000,00**	**80**	**58,61**		**Tercapai**
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pembinaan lembaga adat lokal	100%	676.500.000	20%	0	40%	396.500.000	40%	396.480.000	100	99,99	60%	396.480.000,00	60	58,61		Tercapai
85.	2.22.02.2.03.01	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	16 Objek	676.500.000	0 Objek	0	3 Objek	396.500.000	3 Objek	396.480.000	100	99,99	3 Objek	396.480.000,00	18,75	58,61	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,99			18,75	58,61		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,99			60	58,61		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Rendah		
7.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**	**Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan**	**100%**	**5.719.085.000**	**66.67 %**	**548.175.000**	**80%**	**2.070.955.000**	**80%**	**2.052.907.912**	**100**	**99,13**	**146.67 %**	**2.601.082.912,00**	**146,67**	**45,48**		**Tercapai**
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase event kesenian tradisional	100%	5.719.085.000	20%	548.175.000	40%	2.070.955.000	40%	2.052.907.912	100	99,13	60%	2.601.082.912,00	60	45,48		Tercapai
86.	2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton secara langsung pertunjukan seni	800 Orang	4.783.965.000	100 Orang	548.175.000	100 Orang	1.403.835.000	100 Orang	1.397.474.802	100	99,55	200 Orang	1.945.649.802,00	25	40,67	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
87.	2.22.03.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	34 Lembaga	935.120.000	0 Lembaga	0	5 Lembaga	667.120.000	5 Lembaga	655.433.110	100	98,25	5 Lembaga	655.433.110,00	14,71	70,09	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,9			19,85	55,38		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,13			60	45,48		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
8.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase sejarah lokal yang dilestarikan**	**100%**	**5.632.987.500**	**11%**	**834.845.000**	**43%**	**4.873.682.000**	**43%**	**4.346.144.306**	**100**	**89,18**	**54%**	**5.180.989.306,00**	**54**	**91,98**		**Tercapai**
	2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal Kab/Kota	100%	5.632.987.500	33%	834.845.000	50%	4.873.682.000	67%	4.346.144.306	134	89,18	100%	5.180.989.306,00	100	91,98		Tercapai
88.	2.22.04.2.01.01	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	640 Orang	438.250.000	0 Orang	0	120 Orang	138.250.000	120 Orang	138.089.906	100	99,88	120 Orang	138.089.906,00	18,75	31,51	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
89.	2.22.04.2.01.03	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi peninggalan sejarah	1100 Orang	5.194.737.500	100 Orang	834.845.000	150 Orang	4.735.432.000	150 Orang	4.208.054.400	100	88,86	250 Orang	5.042.899.400,00	22,73	97,08	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	94,37			20,74	64,29		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	134	89,18			100	91,98		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
9.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik**	**100%**	**5.572.182.000**	**66.67 %**	**455.410.000**	**73.33 %**	**644.941.000**	**73,33%**	**638.551.408**	**100**	**99,01**	**140%**	**1.093.961.408,00**	**140**	**19,63**		**Tercapai**
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang ditetapkan	100%	2.259.331.000	80%	0	85%	219.331.000	85%	217.206.708	100	99,03	165%	217.206.708,00	165	9,61		Tercapai
90.	2.22.05.2.01.01	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	98 Objek	666.181.000	0 Objek	0	18 Objek	26.181.000	18 Objek	24.581.000	100	93,89	18 Objek	24.581.000,00	18,37	3,69	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
91.	2.22.05.2.01.02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	85 Objek	1.593.150.000	0 Objek	0	15 Objek	193.150.000	15 Objek	192.625.708	100	99,73	15 Objek	192.625.708,00	17,65	12,09	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,81			18,01	7,89		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100%	3.312.851.000	66.67 %	455.410.000	73.33 %	425.610.000	73,33%	421.344.700	100	99	140%	876.754.700,00	140	26,47		Tercapai
92.	2.22.05.2.02.01	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dilindungi	70 Objek	1.827.146.000	9 Objek	176.500.000	11 Objek	220.100.000	11 Objek	219.661.400	100	99,8	20 Objek	396.161.400,00	28,57	21,68	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
93.	2.22.05.2.02.02	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	4 Objek	726.530.000	0 Objek	0	1 Objek	126.530.000	1 Objek	123.062.000	100	97,26	1 Objek	123.062.000,00	25	16,94	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
94.	2.22.05.2.02.03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya dimanfaatkan	22 Objek	759.175.000	2 Objek	278.910.000	3 Objek	78.980.000	3 Objek	78.621.300	100	99,55	5 Objek	357.531.300,00	22,73	47,09	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,87			25,43	28,57		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	60,85	99,01			152,5	18,04		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	98,27	79,82			29,5	17,89		
											Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**95,87**	**83,18**			**46,33**	**41,04**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**400.103.272.496**			**332.803.711.983**					
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		ada beberapa platform pelaporan dari Kementrian Pendidikan membantu menyediakan data akurat untuk pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pendidikan																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		faktor gegrafis Daerah Kabupaten Balangan, masih ada daerah terpencil, mengakibatkan susah akses internet																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		-																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13

1.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja**	**100%**	**43.368.190.367**	**100%**	**4.888.080.130**	**62%**	**8.723.111.656**	**15%**	**7.291.932.525**	**24,19**	**83,59**	**15%**	**7.291.932.525,00**	**15**	**16,81**		**Tidak Tercapai**
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	256.555.379	100%	114.825.250	100%	480.381.100	23%	450.558.800	23	93,79	23%	450.558.800,00	23	175,62		Tidak Tercapai
1.	2.23.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	176.696.582	1 Dokumen	96.363.000	1 Dokumen	418.095.500	4 Dokumen	404.768.800	400	96,81	5 Dokumen	501.131.800,00	83,33	283,61	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Melebihi Target
2.	2.23.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan Dokumen RKA - SKPD	100 Dokumen	50.508.230	2 Dokumen	13.465.000	2 Dokumen	31.382.800	2 Dokumen	22.000.000	100	70,1	4 Dokumen	35.465.000,00	4	70,22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
3.	2.23.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtiar realisasi kinerja SKPD	100 Laporan	29.350.567	100 Laporan	4.997.250	2 Laporan	30.902.800	2 Laporan	23.790.000	100	76,98	102 Laporan	28.787.250,00	102	98,08	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		200	81,3			63,11	150,64		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi		
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	39.626.523.149	100%	3.634.579.616	100%	5.274.156.412	100%	4.287.365.766	100	81,29	100%	4.287.365.766,00	100	10,82		Tercapai
4.	2.23.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	0 Bulan	39.461.020.601	12 Bulan	3.546.371.316	12 Bulan	5.055.349.212	12 Bulan	4.093.224.866	100	80,97	24 Bulan	7.639.596.182,00	0	19,36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
5.	2.23.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen penatausahaan dan pengujii/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	123.803.894	1 Dokumen	79.388.300	1 Dokumen	210.668.800	1 Dokumen	190.284.100	100	90,32	2 Dokumen	269.672.400,00	33,33	217,82	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
6.	2.23.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	6 laporan	19.674.718	1 laporan	5.070.100	1 laporan	3.941.200	1 laporan	340.000	100	8,63	2 laporan	5.410.100,00	33,33	27,5	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
7.	2.23.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semestaran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	12 Laporan	22.023.936	2 Laporan	3.749.900	2 Laporan	4.197.200	2 Laporan	3.516.800	100	83,79	4 Laporan	7.266.700,00	33,33	32,99	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	65,93			25	74,42		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	288.431.280	100%	36.000.000	100%	395.599.300	25%	386.301.600	25	97,65	25%	386.301.600,00	25	133,93		Tidak Tercapai
8.	2.23.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	160 Paket	56.381.280	120 Paket	36.000.000	3 Paket	315.759.300	3 Paket	307.182.000	100	97,28	123 Paket	343.182.000,00	76,88	608,68	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
9.	2.23.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan teknis implemintasi peraturan perundang undangan	46 Orang	232.050.000	0 Orang	0	6 Orang	79.840.000	6 Orang	79.119.600	100	99,1	6 Orang	79.119.600,00	13,04	34,1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,19			44,96	321,39		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	995.259.974	100%	583.705.100	100%	917.633.900	100%	890.559.269	100	97,05	100%	890.559.269,00	100	89,48		Tercapai
10.	2.23.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	12 Paket	50.286.229	2 Paket	24.086.300	2 Paket	135.106.600	2 Paket	134.322.500	100	99,42	4 Paket	158.408.800,00	33,33	315,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
11.	2.23.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100 Paket	139.473.191	89.87 Paket	23.102.900	2 Paket	41.821.200	2 Paket	34.325.600	100	82,08	91,87 Paket	57.428.500,00	91,87	41,18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
12.	2.23.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	jumlah Dokumen bahan bacaan dan perundang undangan yang disediakan	324 Dokumen	28.190.640	34 Dokumen	2.610.000	12 Dokumen	14.490.700	12 Dokumen	2.760.000	100	19,05	46 Dokumen	5.370.000,00	14,2	19,05	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
13.	2.23.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 Laporan	777.309.914	98.85 Laporan	533.905.900	12 Laporan	726.215.400	12 Laporan	719.151.169	100	99,03	110,85 Laporan	1.253.057.069,00	110,85	161,2	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	74,89			62,56	134,11		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Sangat Tinggi		
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	72 bulan	981.377.258	12 bulan	252.593.714	12 bulan	817.044.594	12 bulan	638.321.167	100	78,13	24 bulan	890.914.881,00	33,33	90,78		Tercapai
14.	2.23.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	0 Laporan	576.726.462	0 Laporan	115.478.570	12 Laporan	244.615.950	12 Laporan	133.787.253	100	54,69	12 Laporan	249.265.823,00	0	43,22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
15.	2.23.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 laporan	80.754.438	12 laporan	26.680.000	12 laporan	230.535.300	12 laporan	211.930.500	100	91,93	24 laporan	238.610.500,00	33,33	295,48	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
16.	2.23.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	0 Laporan	323.896.358	0 Laporan	110.435.144	0 Laporan	341.893.344	0 Laporan	292.603.414	0	85,58	0 Laporan	403.038.558,00	0	124,43	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		66,67	77,4			11,11	154,38		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah (Bulan)	12 bulan	1.220.043.327	12 bulan	266.376.450	12 bulan	838.296.350	12 bulan	638.825.923	100	76,21	24 bulan	905.202.373,00	200	74,19		Tercapai
17.	2.23.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas oprasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	12 Unit	961.800.033	12 Unit	154.751.150	25 Unit	276.150.050	24 Unit	223.462.623	96	80,92	36 Unit	378.213.773,00	300	39,32	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tidak Tercapai
18.	2.23.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 unit	258.243.294	12 unit	111.625.300	8 unit	562.146.300	8 unit	415.363.300	100	73,89	20 unit	526.988.600,00	166,67	204,07	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		98	77,4			233,33	121,7		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		74,67	87,35			80,22	95,8		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
2.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**	**22%**	**2.765.266.862**	**13%**	**1.191.169.400**	**13%**	**2.568.185.400**	**13%**	**2.291.975.448**	**100**	**89,24**	**13%**	**2.291.975.448,00**	**59,09**	**82,88**		**Tercapai**
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	18%	2.496.792.127	13%	1.080.976.600	13%	1.871.840.800	13%	1.615.466.948	100	86,3	13%	1.615.466.948,00	72,22	64,7		Tercapai
19.	2.23.02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan Tik berbasis ISO20000(ITSM : Informasi Technology Service	5 Layanan	206.731.360	1 Layanan	36.800.000	2 Layanan	193.673.400	2 Layanan	171.979.650	100	88,8	3 Layanan	208.779.650,00	60	100,99	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
20.	2.23.02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan pendidikan dasar dan yang dilakukan pembinan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	0 Perpustakaan	0	0 Perpustakaan	0	2 Perpustakaan	134.241.400	2 Perpustakaan	105.461.400	100	78,56	2 Perpustakaan	105.461.400,00	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
21.	2.23.02.2.01.06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kepastiannya dan mendapat sertifikat tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota	125 Orang	214.021.283	25 Orang	70.271.150	5 Orang	282.203.500	5 Orang	152.323.498	100	53,98	30 Orang	222.594.648,00	24	104,01	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
22.	2.23.02.2.01.07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan rujukan yang dikembangkan tingkat kabupaten/kota melalui peningkatan koleksi	370000 Layanan	1.454.402.102	33084 Layanan	650.679.950	6 Layanan	949.422.000	6 Layanan	881.622.000	100	92,86	33090 Layanan	1.532.301.950,00	8,94	105,36	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
23.	2.23.02.2.01.08	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	26 Eksemplar	430.372.699	4 Eksemplar	272.179.000	1000 Eksemplar	216.154.500	950 Eksemplar	212.734.400	95	98,42	954 Eksemplar	484.913.400,00	3.669,23	112,67	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tidak Tercapai
24.	2.23.02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan perpustakaan yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	19050 Eksemplar	191.264.683	1500 Eksemplar	51.046.500	1000 Eksemplar	96.146.000	1000 Eksemplar	91.346.000	100	95,01	2500 Eksemplar	142.392.500,00	13,12	74,45	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai

												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	99,17	84,6			629,22	82,91		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tingkat kegemaran membaca masyarakat	70%	268.474.735	77.54 %	110.192.800	77.55 %	696.344.600	60%	676.508.500	77,37	97,15	60%	676.508.500,00	85,71	251,98		Tidak Tercapai
25.	2.23.02.2.02.01	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	30 Lokus	268.474.735	3 Lokus	110.192.800	3 Lokus	373.995.900	3 Lokus	357.717.000	100	95,65	6 Lokus	467.909.800,00	20	174,28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
26.	2.23.02.2.02.02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terbangunnya sarana dan prasarana perpustakaan	0 paket	0	0 paket	0	2 paket	299.909.200	2 paket	296.852.000	100	98,98	2 paket	296.852.000,00	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
27.	2.23.02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah duta baca tingkat daerah kabupaten/kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	0 Orang	0	0 Orang	0	3 Orang	22.439.500	3 Orang	21.939.500	100	97,77	3 Orang	21.939.500,00	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,47			6,67	58,09		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	88,68	91,73			78,97	158,34		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
3.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan**	**60%**	**464.100.000**	**10%**	**151.539.600**	**20%**	**250.483.600**	**20%**	**196.683.600**	**100**	**78,52**	**20%**	**196.683.600,00**	**33,33**	**42,38**		**Tercapai**
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pelestarian naskah kuno	60%	464.100.000	10%	151.539.600	20%	250.483.600	20%	196.683.600	100	78,52	20%	196.683.600,00	33,33	42,38		Tercapai
28.	2.23.03.2.01.01	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang berperan serta dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian, dan pendaftaran naskah kuno	9 Orang	232.050.000	1 Orang	3.960.350	2 Orang	4.399.000	2 Orang	4.399.000	100	100	3 Orang	8.359.350,00	33,33	3,6	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
29.	2.23.03.2.01.02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dimiliki oelh masyarakat yang dikembangkan untuk di lestariakan dan didayagunakan	5 Eksemplar	232.050.000	1 Eksemplar	147.579.250	2 Eksemplar	246.084.600	4 Eksemplar	192.284.600	200	78,14	5 Eksemplar	339.863.850,00	100	146,46	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	150	89,07			66,67	75,03		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	78,52			33,33	42,38		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Prosentase revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya kearifan lokal**	**91%**	**1.335.972.049**	**0%**	**604.017.000**	**10%**	**947.389.100**	**10%**	**888.045.100**	**100**	**93,74**	**10%**	**888.045.100,00**	**10,99**	**66,47**		**Tercapai**
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Presentasi pengelolaan arsip dinamis pencipta arsip	100%	998.037.340	100%	422.727.500	100%	526.669.000	100%	511.541.000	100	97,13	100%	511.541.000,00	100	51,25		Tercapai
30.	2.24.02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang diciptakan dan digunakan	20 Berkas	293.828.692	20 Berkas	240.396.500	5 Berkas	434.934.600	5 Berkas	421.031.000	100	96,8	25 Berkas	661.427.500,00	125	225,11	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
31.	2.24.02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah naskah dinas yang dilakukan pemeliharaan dan penyusutan	20 Berkas	411.145.802	20 Berkas	91.165.500	5 Berkas	42.731.200	5 Berkas	42.285.000	100	98,96	25 Berkas	133.450.500,00	125	32,46	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
32.	2.24.02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil pengawasan arsip dinamis kewenangan Kabupaten/Kota	20 Laporan	293.062.846	20 Laporan	91.165.500	1 Laporan	49.003.200	1 Laporan	48.225.000	100	98,41	21 Laporan	139.390.500,00	105	47,56	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,06			118,33	101,71		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah arsip terjaga dan arsipnstatis sebagai warisan budaya yang dipreservasi	10%	293.886.834	0%	114.750.000	2%	224.087.500	2%	201.245.100	100	89,81	2%	201.245.100,00	20	68,48		Tercapai
33.	2.24.02.2.02.01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	0 Arsip	88.094.575	0 Arsip	69.285.000	2 Arsip	168.672.400	2 Arsip	162.332.400	100	96,24	2 Arsip	231.617.400,00	0	262,92	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
34.	2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsipstatis yang dilakukan akusisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis	10 Arsip	205.792.259	2 Arsip	45.465.000	10 Arsip	55.415.100	10 Arsip	38.912.700	100	70,22	12 Arsip	84.377.700,00	120	41	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	83,23			60	151,96		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Tinggi		
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa	100%	44.047.875	100%	66.539.500	100%	196.632.600	100%	175.259.000	100	89,13	100%	175.259.000,00	100	397,88		Tercapai
35.	2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Salinan otentik naskah asli arsip terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI	2250 Pengguna	29.365.250	400 Pengguna	27.740.000	8 Pengguna	68.156.100	8 Pengguna	57.825.000	100	84,84	408 Pengguna	85.565.000,00	18,13	291,38	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
36.	2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	jumlah laporan hasil pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota	15 Laporan	14.682.625	1 Laporan	38.799.500	1 Laporan	128.476.500	1 Laporan	117.434.000	100	91,41	2 Laporan	156.233.500,00	13,33	1.064,07	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	88,12			15,73	677,73		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	92,02			73,33	172,54		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
5.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Persentase perlindungan dan penyelamatan arsip Daerah**	**50%**	**117.607.826**	**0%**	**84.104.700**	**10%**	**631.632.700**	**10%**	**600.343.800**	**100**	**95,05**	**10%**	**600.343.800,00**	**20**	**510,46**		**Tercapai**
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang terdaftar diselamatkan/dilindungi	5 Arsip	73.559.951	0 Arsip	51.824.750	1 Arsip	247.088.000	1 Arsip	239.575.400	100	96,96	1 Arsip	291.400.150,00	20	396,14		Tercapai
37.	2.24.03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	5 Arsip	73.559.951	1 Arsip	51.824.750	1 Arsip	247.088.000	1 Arsip	239.575.400	100	96,96	2 Arsip	291.400.150,00	40	396,14	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,96			40	396,14		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah yang terdaftar penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan yang terdaftar	5 daftar	44.047.875	0 daftar	32.279.950	1 daftar	384.544.700	1 daftar	360.768.400	100	93,82	1 daftar	393.048.350,00	20	892,32		Tercapai
38.	2.24.03.2.03.02	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah daftar Arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan penilaian serta penyerahan atau pemusnahan arsip bagi penggabungan perangkat daerah kabupaten/kota	0 Daftar	0	0 Daftar	0	1 Daftar	73.299.600	1 Daftar	67.963.600	100	92,72	1 Daftar	67.963.600,00	0	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
39.	2.24.03.2.03.03	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah daftar arsip yang dilakukan pendampingan penyelamatan arsip bagi pemekaran daerah kecamatan	5 Arsip	44.047.875	1 Arsip	32.279.950	1 Arsip	311.245.100	1 Arsip	292.804.800	100	94,08	2 Arsip	325.084.750,00	40	738,03	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	93,4			20	369,01		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	95,39			20	644,23		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
6.	**2.24.04**	**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Prosentasi pelayanan perijinan dan penggunaan Arsip**	**100%**	**14.682.625**	**0%**	**41.674.950**	**20%**	**138.826.800**	**20%**	**112.516.400**	**100**	**81,05**	**20%**	**112.516.400,00**	**20**	**766,32**		**Tercapai**
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah pengguna yang terdaftar pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di lembar kearsipan daerah	5 Pengguna	14.682.625	0 Pengguna	41.674.950	1 Pengguna	138.826.800	1 Pengguna	112.516.400	100	81,05	1 Pengguna	154.191.350,00	20	1.050,16		Tercapai
40.	2.24.04.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP pengguna arsip yang bersipat tertutup yang disusun dan ditetapkan	5 SOP	14.682.625	1 SOP	41.674.950	1 SOP	138.826.800	1 SOP	112.516.400	100	81,05	2 SOP	154.191.350,00	40	1.050,16	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	81,05			40	1.050,16		
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	88,36	81,05			20	1.050,16		

											Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		87,37	86,87			26,4	247,56		
											Predikat Kinerja (Program)		Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**107,28**	**85,84**			**142,12**	**190,15**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
										Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**13.259.629.256**		**11.381.496.873**						
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja																				
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja																				
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																				

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai akuntabilitas kinerja (Nilai SAKIP) DISDUKCAPIL**	**78.2 Nilai**	**29.388.950.012**	**76.8 Nilai**	**5.333.206.506**	**74 Nilai**	**5.666.159.488**	**73,85 Nilai**	**5.505.709.566**	**99,8**	**97,17**	**73.85 Nilai**	**5.505.709.566,00**	**94,44**	**18,73**		**Tidak Tercapai**
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	387.453.388	100%	55.440.000	100%	65.563.200	100%	65.495.200	100	99,9	200%	120.935.200,00	200	31,21		Tercapai
1.	2.12.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	387.453.388	2 Dokumen	55.440.000	2 Dokumen	65.563.200	2 Dokumen	65.495.200	100	99,9	4 Dokumen	120.935.200,00	33,33	31,21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,9			33,33	31,21		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	19.532.032.491	100%	3.313.783.433	100%	3.843.286.488	100%	3.709.178.477	100	96,51	100%	3.709.178.477,00	100	18,99		Tercapai
2.	2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19514900000 Orang/ bulan	19.514.877.358	3309060000 Orang/ bulan	3.309.062.615	3743390000 Orang/ bulan	3.838.390.488	23 Orang/ bulan	3.705.312.619	0	96,53	23 Orang/ bulan	3.705.312.619,00	0	18,99	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tidak Tercapai
3.	2.12.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	17.155.133	2 Dokumen	4.720.818	2 Dokumen	4.896.000	2 Dokumen	3.865.858	100	78,96	4 Dokumen	8.586.676,00	33,33	50,05	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50	87,75			16,67	34,52		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	721.273.800	100%	39.700.000	100%	140.962.400	100%	139.716.000	100	99,12	100%	139.716.000,00	100	19,37		Tercapai
4.	2.12.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	304 Lembar	270.160.300	0 Lembar	0	76 Lembar	26.592.400	76 Lembar	26.524.000	100	99,74	76 Lembar	26.524.000,00	25	9,82	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
5.	2.12.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54 Orang	451.113.500	8 Orang	39.700.000	42 Orang	114.370.000	42 Orang	113.192.000	100	98,97	50 Orang	152.892.000,00	92,59	33,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,36			58,8	21,86		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	5.722.204.441	100%	831.761.650	100%	782.606.850	100%	775.369.849	100	99,08	100%	775.369.849,00	100	13,55		Tercapai
6.	2.12.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 Paket	157.184.646	5 Paket	14.426.000	5 Paket	11.995.300	5 Paket	11.724.000	100	97,74	10 Paket	26.150.000,00	33,33	16,64	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
7.	2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	42 Paket	3.006.472.906	7 Paket	450.712.250	8 Paket	226.509.850	8 Paket	219.880.600	100	97,07	15 Paket	670.592.850,00	35,71	22,3	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
8.	2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	140.344.899	8 Paket	16.132.500	8 Paket	18.436.700	8 Paket	18.341.900	100	99,49	16 Paket	34.474.400,00	33,33	24,56	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
9.	2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	445 Laporan	2.418.201.990	85 Laporan	350.490.900	202 Laporan	525.665.000	183 Laporan	525.423.349	90,59	99,95	268 Laporan	875.914.249,00	60,22	36,22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	97,65	98,56			40,65	24,93		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72 bulan	1.426.849.301	12 bulan	230.848.323	12 bulan	205.725.950	12 bulan	197.028.190	100	95,77	24 bulan	427.876.513,00	33,33	29,99		Tercapai
10.	2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	702.044.624	12 Laporan	88.334.723	12 Laporan	115.619.750	12 Laporan	107.096.590	100	92,63	24 Laporan	195.431.313,00	33,33	27,84	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
11.	2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	724.804.677	12 Laporan	142.513.600	12 Laporan	90.106.200	12 Laporan	89.931.600	100	99,81	24 Laporan	232.445.200,00	33,33	32,07	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,22			33,33	29,95		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	72 Bulan	1.599.136.591	12 Bulan	861.673.100	12 Bulan	628.014.600	12 Bulan	618.921.850	100	98,55	24 Bulan	1.480.594.950,00	33,33	92,59		Tercapai
12.	2.12.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	891.499.226	21 Unit	179.488.100	21 Unit	281.508.400	21 Unit	273.510.650	100	97,16	21 Unit	273.510.650,00	87,5	30,68	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
13.	2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	72 Unit	132.567.348	12 Unit	14.975.000	45 Unit	18.000.000	45 Unit	17.860.000	100	99,22	57 Unit	32.835.000,00	79,17	24,77	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
14.	2.12.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	575.070.017	1 Unit	667.210.000	1 Unit	328.506.200	1 Unit	327.551.200	100	99,71	1 Unit	327.551.200,00	100	56,96	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,7			88,89	37,47		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	98,15			94,44	34,28		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk**	**96.67 %**	**1.800.072.039**	**87.62 %**	**566.094.466**	**100%**	**611.798.000**	**89,11%**	**573.239.276**	**89,11**	**93,7**	**89.11 %**	**573.239.276,00**	**92,18**	**31,85**		**Tidak Tercapai**
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen Pendaftaran Penduduk	100%	1.167.715.509	99%	482.763.566	100%	587.438.100	89,11%	549.219.376	89,11	93,49	89.11 %	549.219.376,00	89,11	47,03		Tidak Tercapai
15.	2.12.02.2.01.02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	911.622.903	0 Dokumen	434.262.066	28000 Dokumen	520.975.500	25372 Dokumen	482.846.776	90,61	92,68	25372 Dokumen	917.108.842,00	0	100,6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tidak Tercapai
16.	2.12.02.2.01.05	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	0 Dokumen	256.092.606	0 Dokumen	48.501.500	4000 Dokumen	66.462.600	2513 Dokumen	66.372.600	62,83	99,86	2513 Dokumen	114.874.100,00	0	44,86	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	76,72	96,27			0	72,73		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	90%	632.356.530	63.85 %	83.330.900	75%	24.359.900	67,80%	24.019.900	90,4	98,6	67.8 %	24.019.900,00	75,33	3,8		Tidak Tercapai
17.	2.12.02.2.03.02	Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	0 Dokumen	632.356.530	0 Dokumen	83.330.900	6000 Dokumen	24.359.900	4287 Dokumen	24.019.900	71,45	98,6	4287 Dokumen	107.350.800,00	0	16,98	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	71,45	98,6			0	16,98		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	89,76	96,05			82,22	25,42		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Rata-rata persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil**	**100%**	**1.522.334.566**	**99.16 %**	**357.711.428**	**100%**	**262.561.100**	**99,36%**	**246.664.200**	**99,36**	**93,95**	**99.36 %**	**246.664.200,00**	**99,36**	**16,2**		**Belum Tecapai**
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	100%	1.177.416.213	97.5 %	257.065.000	98%	246.101.500	99,36%	230.424.600	101,39	93,63	99.36 %	230.424.600,00	99,36	19,57		Melebihi Target
18.	2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah DOkumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	33875 Dokumen	379.975.624	5493 Dokumen	106.930.000	5500 Dokumen	42.070.100	6269 Dokumen	42.036.600	113,98	99,92	11762 Dokumen	148.966.600,00	34,72	39,2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Melebihi Target
19.	2.12.03.2.01.02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	5 Layanan	797.440.589	5 Layanan	150.135.000	5 Layanan	204.031.400	5 Layanan	188.388.000	100	92,33	5 Layanan	188.388.000,00	100	23,62	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	106,99	96,13			67,36	31,41		Melebihi Target

											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah pelaksanaan penyelenggaraan Pencatatan sipil	100 kali	344.918.353	100 kali	100.646.428	1 kali	16.459.600	1 kali	16.239.600	100	98,66	1 kali	16.239.600,00	1	4,71		Tercapai
20.	2.12.03.2.02.01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/ Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	300 Laporan	344.918.353	25 Laporan	100.646.428	50 Laporan	16.459.600	52 Laporan	16.239.600	104	98,66	77 Laporan	116.886.028,00	25,67	33,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	104	98,66			25,67	33,89		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100,69	96,15			50,18	12,14		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase jumlah data kependudukan yang dimanfaatkan**	**100%**	**1.418.860.237**	**100%**	**713.332.200**	**100%**	**415.316.400**	**100%**	**380.566.177**	**100**	**91,63**	**100%**	**380.566.177,00**	**100**	**26,82**		**Tercapai**
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan	10 OPD	546.536.366	5 OPD	68.962.200	8 OPD	66.587.800	5 OPD	63.534.800	62,5	95,42	5 OPD	63.534.800,00	50	11,62		Tidak Tercapai
21.	2.12.04.2.01.01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	12 Dokumen	193.739.967	2 Dokumen	38.881.000	2 Dokumen	30.633.400	2 Dokumen	30.504.800	100	99,58	4 Dokumen	69.385.800,00	33,33	35,81	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
22.	2.12.04.2.01.02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	22 Dokumen	352.796.399	5 Dokumen	30.081.200	8 Dokumen	35.954.400	5 Dokumen	33.030.000	62,5	91,87	10 Dokumen	63.111.200,00	45,45	17,89	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	81,25	95,72			39,39	26,85		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	4 Laporan	872.323.871	0 Laporan	644.370.000	1 Laporan	348.728.600	1 Laporan	317.031.377	100	90,91	1 Laporan	317.031.377,00	25	36,34		Tercapai
23.	2.12.04.2.03.03	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	650.616.233	1 Laporan	580.339.500	1 Laporan	237.153.800	1 Laporan	221.391.377	100	93,35	2 Laporan	801.730.877,00	33,33	123,23	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
24.	2.12.04.2.03.05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	6 Laporan	221.707.638	0 Laporan	64.030.500	1 Laporan	111.574.800	1 Laporan	95.640.000	100	85,72	1 Laporan	159.670.500,00	16,67	72,02	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	89,54			25	97,62		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	81,25	93,16			37,5	23,98		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**Persentase pengelolaan profil kependudukan**	**100%**	**91.332.232**	**100%**	**18.377.500**	**100%**	**6.862.500**	**100%**	**6.252.500**	**100**	**91,11**	**100%**	**6.252.500,00**	**100**	**6,85**		**Tercapai**
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	Persentase Penyusunan Profil Kependudukan	100%	91.332.232	100%	18.377.500	100%	6.862.500	100%	6.252.500	100	91,11	100%	6.252.500,00	100	6,85		Tercapai
25.	2.12.05.2.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang Tersusun	6 Dokumen	91.332.232	1 Dokumen	18.377.500	1 Dokumen	6.862.500	1 Dokumen	6.252.500	100	91,11	2 Dokumen	24.630.000,00	33,33	26,97	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	91,11			33,33	26,97		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	95,65	91,11			100	6,85		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	97,654	93,51			97,2	20,09		
											Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**91,39**	**96,41**			**40,11**	**38,04**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**6.962.697.488**		**6.712.431.719**						
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Ada layanan online melalui aplikasi Galuh Sanggam; Layanan terintegrasi (layanan 3 in 1); Tersedianya layanan adminduk di desa.																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Kurangnya SDM yang kompeten; Tidak tersedianya sarana untuk layanan mobile; Belum berjalannya penggunaan Buku Pokok Kematian; Belum optimalnya pelaporan kelahiran di RS untuk penerbitan Akta Kelahiran; Terbatasnya SDM dan waktu untuk pelayanan																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Mengajukan Telaahan Staf peminjaman mobil untuk layanan keliling; melaksanakan pelatihan operator SIAK; Melaksanakan pelatihan bagi Operator Desa; Secara aktif menghubungi Ditjen Dukcapil terkait permohonan pemanfaatan data kependudukan yang telah																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber DayaAparatur; Nilai SAKIP SKPD**	**100%**	**46.386.538.185**	**100%**	**5.852.318.043**	**100%**	**10.257.870.370**	**100%**	**8.402.750.887**	**100**	**81,92**	**100%**	**8.402.750.887,00**	**100**	**18,11**		**Tercapai**
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	1.085.980.531	100%	194.555.100	100%	539.596.248	100%	523.500.483	100	97,02	200%	718.055.583,00	200	66,12		Tercapai
1.	2.19.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah yang Disusun	42 Dokumen	68.870.941	7 Dokumen	9.247.750	7 Dokumen	336.320.248	7 Dokumen	324.588.780	100	96,51	7 Dokumen	324.588.780,00	16,67	471,3	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
2.	2.19.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Prencanaan dan Realisasi Keuangan	15 Dokumen	1.017.109.590	2 Dokumen	185.307.350	3 Dokumen	203.276.000	3 Dokumen	198.911.703	100	97,85	5 Dokumen	384.219.053,00	33,33	37,78	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,18			25	254,54		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan PD Tepat Waktu	100%	37.839.305.479	100%	4.287.323.542	100%	6.412.018.972	100%	4.824.747.002	100	75,25	100%	4.824.747.002,00	100	12,75		Tercapai
3.	2.19.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	37.822.505.479	12 Bulan	4.254.003.742	12 Bulan	6.323.735.772	12 Bulan	4.737.130.652	100	74,91	12 Bulan	4.737.130.652,00	100	12,52	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
4.	2.19.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	LaporJumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Dokumen	16.800.000	1 Dokumen	33.319.800	2 Dokumen	88.283.200	2 Dokumen	87.616.350	100	99,24	2 Dokumen	87.616.350,00	33,33	521,53	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	87,08			66,67	267,03		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksana Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	540 orang	1.409.750.000	90 orang	139.332.800	90 orang	191.504.800	90 orang	177.353.500	100	92,61	90 orang	177.353.500,00	16,67	12,58		Tercapai
			Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Jumlah Pakaian Kedaerahan	270 Stel		45 Stel		45 Stel		45 Stel		100		45 Stel		16,67			Tercapai
5.	2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya, Jumlah Pakaian Kedaerahan	270 Stel	404.370.000	45 Stel	55.500.000	114 Stel	67.984.800	114 Stel	67.883.500	100	99,85	114 Stel	67.883.500,00	42,22	16,79	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
6.	2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	270 Orang	1.005.380.000	45 Orang	83.832.800	16 Orang	123.520.000	16 Orang	109.470.000	100	88,63	16 Orang	109.470.000,00	5,93	10,89	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	94,24			24,07	13,84		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Administrasi umum perangkat daerah	100%	2.325.505.700	100%	365.166.400	100%	939.309.400	100%	897.136.646	100	95,51	100%	897.136.646,00	100	38,58		Tercapai
7.	2.19.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	283.109.476	12 Bulan	29.052.000	12 Bulan	79.560.200	12 Bulan	62.571.700	100	78,65	12 Bulan	62.571.700,00	16,67	22,1	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
8.	2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Unit	301.609.100	5 Unit	40.900.000	5 Unit	151.818.300	5 Unit	143.838.000	100	94,74	5 Unit	143.838.000,00	100	47,69	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai

9.	2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2000 Lembar	403.687.904	2000 Lembar	47.176.600	2000 Lembar	73.246.200	2000 Lembar	72.785.600	100	99,37	2000 Lembar	72.785.600,00	100	18,03	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
10.	2.19.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	42 Jenis	63.945.900	7 Jenis	9.000.000	7 Jenis	39.318.900	7 Jenis	39.220.000	100	99,75	7 Jenis	39.220.000,00	16,67	61,33	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
11.	2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30000 Orang	1.273.153.320	3000 Orang	239.037.800	5584 Orang	595.365.800	5584 Orang	578.721.346	100	97,2	5584 Orang	578.721.346,00	18,61	45,46	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	93,94			50,39	38,92		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Ketersediaan Waktu Pengadaan BMD yang Diadministrasi PD Sesuai Standar	12 Bulan	0	12 Bulan	0	12 Bulan	972.580.600	12 Bulan	961.086.900	100	98,82	12 Bulan	961.086.900,00	100	0		Tercapai
12.	2.19.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor / Bangunan Lainnya	0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	972.580.600	2 Unit	961.086.900	100	98,82	2 Unit	961.086.900,00	0	0	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,82			0	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	60 Bulan	1.304.344.375	12 Bulan	507.769.651	12 Bulan	467.219.600	12 Bulan	412.939.406	100	88,38	12 Bulan	412.939.406,00	20	31,66		Tercapai
13.	2.19.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	283.109.476	12 Bulan	156.960.451	12 Bulan	191.999.000	12 Bulan	149.088.406	100	77,65	12 Bulan	149.088.406,00	100	52,66	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
14.	2.19.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan	1.021.234.899	12 Bulan	350.809.200	12 Bulan	275.220.600	12 Bulan	263.851.000	100	95,87	12 Bulan	263.851.000,00	100	25,84	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	86,76			100	39,25		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dipeihara	100%	2.421.652.100	100%	358.170.550	100%	735.640.750	100%	605.986.950	100	82,38	100%	605.986.950,00	100	25,02		Tercapai
15.	2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	30 Unit	1.237.760.040	5 Unit	166.090.550	5 Unit	508.840.750	5 Unit	379.186.950	100	74,52	5 Unit	379.186.950,00	16,67	30,63	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
16.	2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30 Buah	1.183.892.060	5 Buah	192.080.000	5 Buah	226.800.000	5 Buah	226.800.000	100	100	5 Buah	226.800.000,00	16,67	19,16	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	87,26			16,67	24,9		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	78,74			79,58	23,34		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	**Persentase wira usaha muda**	**30%**	**4.156.358.335**	**15%**	**1.200.756.088**	**20%**	**2.415.471.100**	**20%**	**2.377.998.685**	**100**	**98,45**	**20%**	**2.377.998.685,00**	**66,67**	**57,21**		**Tercapai**
			Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan	60%		30%		40%		40%		100		40,00%		66,67			Tercapai
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda Pelopor, wirausaha muda pemula dan pemuda kader	600 orang	2.016.271.335	100 orang	915.060.263	110 orang	1.561.321.100	116 orang	1.527.905.964	105,45	97,86	116 orang	1.527.905.964,00	19,33	75,78		Melebihi Target
17.	2.19.02.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPP) yang Terpilih	8 KUPP	338.238.553	4 KUPP	49.804.000	4 KUPP	427.728.000	4 KUPP	414.820.000	100	96,98	4 KUPP	414.820.000,00	50	122,64	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
18.	2.19.02.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Pemuda yang Difasilitasi dalam Kegiatan Pemberdayaan Kepemudaan	600 Orang	411.543.667	100 Orang	54.592.600	100 Orang	27.918.000	110 Orang	26.901.572	110	96,36	110 Orang	26.901.572,00	18,33	6,54	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
19.	2.19.02.2.01.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terselenggaranya Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	155 Orang	1.266.489.115	31 Orang	810.663.663	31 Orang	1.105.675.100	31 Orang	1.086.184.392	100	98,24	31 Orang	1.086.184.392,00	20	85,76	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	103,33	97,19			29,44	71,65		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	1275 orang	2.140.087.000	200 orang	285.695.825	200 orang	854.150.000	210 orang	850.092.721	105	99,52	210 orang	850.092.721,00	16,47	39,72		Tercapai
20.	2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan yang Difasilitasi dalam Workshop Standarisasi OKP	38 Organisasi	2.140.087.000	5 Organisasi	285.695.825	6 Organisasi	854.150.000	6 Organisasi	850.092.721	100	99,52	6 Organisasi	850.092.721,00	15,79	39,72	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,52			15,79	39,72		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	105,23	98,69			17,9	57,75		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	**Persentase prestasi olahraga yang diraih**	**70%**	**11.779.982.565**	**40%**	**13.598.724.768**	**50%**	**18.083.687.700**	**24%**	**17.025.952.633**	**48**	**94,15**	**24%**	**17.025.952.633,00**	**34,29**	**144,53**		**Tidak Tercapai**
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang Berbakat dan Berprestasi yang di Bina pada SKO, PPLP dan PPLM	105 Orang	6.474.952.920	20 Orang	4.523.610.090	20 Orang	7.290.269.000	15 Orang	6.415.556.553	75	88	15 Orang	6.415.556.553,00	14,29	99,08		Tidak Tercapai
21.	2.19.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Kegiatan / Orang Dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pelajar Berkebutuhan Khusus untuk Mengikuti Kejuaraan Tingkat Provinsi	100 Orang	869.530.000	20 Orang	272.104.720	20 Orang	547.786.600	15 Orang	498.461.100	75	91	15 Orang	498.461.100,00	15	57,33	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Tercapai
22.	2.19.03.2.01.03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah SARPRAS Olahraga yang Dibangun dan Dipelihara	54 Buah	5.605.422.920	9 Buah	4.251.505.370	37 Buah	6.742.482.400	35 Buah	5.917.095.453	94,59	87,76	35 Buah	5.917.095.453,00	64,81	105,56	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	84,8	89,38			39,91	81,44		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan yang Diikuti pada Event Olahraga Prestasi Tingkat Daerah	9 Kejuaraan	2.909.746.400	1 Kejuaraan	6.917.348.000	2 Kejuaraan	5.619.678.100	2 Kejuaraan	5.592.066.880	100	99,51	2 Kejuaraan	5.592.066.880,00	22,22	192,18		Tercapai
23.	2.19.03.2.02.02	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Terfasilitasinya Kegiatan POPDA	60 CABOR	2.909.746.400	10 CABOR	6.917.348.000	10 CABOR	5.619.678.100	10 CABOR	5.592.066.880	100	99,51	10 CABOR	5.592.066.880,00	16,67	192,18	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,51			16,67	192,18		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Atlet yang Diikutsertakan Pada Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Tingkat Daerah	661 Orang	410.293.245	100 Orang	55.236.200	110 Orang	113.054.000	100 Orang	49.911.000	90,91	44,15	100 Orang	49.911.000,00	15,13	12,16		Tidak Tercapai
24.	2.19.03.2.03.02	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	140 Orang	410.293.245	25 Orang	55.236.200	25 Orang	113.054.000	15 Orang	49.911.000	60	44,15	40 Orang	105.147.200,00	28,57	25,63	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	60	44,15			28,57	25,63		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi	0 Organisasi	300.000.000	0 Organisasi	0	10 Organisasi	4.050.000.000	10 Organisasi	4.050.000.000	100	100	10 Organisasi	4.050.000.000,00	0	1.350,00		Tercapai
25.	2.19.03.2.04.02	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan	0 Organisasi	300.000.000	0 Organisasi	0	1 Organisasi	4.050.000.000	1 Organisasi	4.050.000.000	100	100	1 Organisasi	4.050.000.000,00	0	1.350,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			0	1.350,00		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	12 Kegiatan	1.684.990.000	2 Kegiatan	2.102.530.478	2 Kegiatan	1.010.686.600	2 Kegiatan	918.418.200	100	90,87	2 Kegiatan	918.418.200,00	16,67	54,51		Tercapai

26.	2.19.03.2.05.02	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	15 Kegiatan	400.000.000	2 Kegiatan	1.125.092.378	5 Kegiatan	796.334.100	5 Kegiatan	718.860.700	100	90,27	5 Kegiatan	718.860.700,00	33,33	179,72	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
27.	2.19.03.2.05.05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Kegiatan Lomba Olahraga	22 Kegiatan	1.284.990.000	2 Kegiatan	977.438.100	5 Kegiatan	214.352.500	5 Kegiatan	199.557.500	100	93,1	7 Kegiatan	1.176.995.600,00	31,82	91,6	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	91,68			32,58	135,66		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	93,18	84,51			13,66	341,59		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	**Persentasi partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan**	**60%**	**607.891.657**	**60%**	**570.186.000**	**60%**	**756.674.600**	**60%**	**747.421.800**	**100**	**98,78**	**60%**	**747.421.800,00**	**100**	**122,95**		**Tercapai**
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan (KWARAN) yang Difasilitasi Dalam Pengembangan Organisasi	40 KWARAN	607.891.657	8 KWARAN	570.186.000	8 KWARAN	756.674.600	8 KWARAN	747.421.800	100	98,78	8 KWARAN	747.421.800,00	20	122,95		Tercapai
28.	2.19.04.2.01.02	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Gugus Depan Pramuka yang Difasilitasi dalam Peningkatan Kpasitas Organisasi Kepramukaan	8 KWARAN	607.891.657	8 KWARAN	570.186.000	8 KWARAN	756.674.600	8 KWARAN	747.421.800	100	98,78	8 KWARAN	747.421.800,00	100	122,95	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,78			100	122,95		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	98,78			20	122,95		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
5.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**Presentase Kunjungan Wisata**	**100 Persen**	**7.268.710.825**	**20 Persen**	**1.031.444.400**	**40 Persen**	**1.333.401.100**	**35 Persen**	**1.255.507.690**	**87,5**	**94,16**	**35 Persen**	**1.255.507.690,00**	**35**	**17,27**		**Tidak Tercapai**
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kunjungan Wisata	44306 Orang	7.268.710.825	40147 Orang	1.031.444.400	40500 Orang	1.333.401.100	40000 Orang	1.255.507.690	98,77	94,16	40000 Orang	1.255.507.690,00	90,28	17,27		Tidak Tercapai
29.	3.26.02.2.03.03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata	20 Objek Wisata	5.790.636.520	10 Objek Wisata	830.445.600	12 Objek Wisata	1.137.839.000	11 Objek Wisata	1.067.133.540	91,67	93,79	11 Objek Wisata	1.067.133.540,00	55	18,43	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Tercapai
30.	3.26.02.2.03.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Wisata	30 Objek Wisata	673.025.840	10 Objek Wisata	70.028.800	8 Objek Wisata	109.113.500	6 Objek Wisata	109.108.500	75	100	6 Objek Wisata	109.108.500,00	20	16,21	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Tercapai
31.	3.26.02.2.03.06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Pokdarwis Kab. Balangan	40 Orang	805.048.465	20 Orang	130.970.000	24 Orang	86.448.600	20 Orang	79.265.650	83,33	91,69	20 Orang	79.265.650,00	50	9,85	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	83,33	95,16			41,67	14,83		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	98,77	94,16			90,28	17,27		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**RATA-RATA LAMA KUNJUNGAN WISATA**	**2 Hari**	**2.527.516.810**	**1 Hari**	**306.380.000**	**2 Hari**	**1.147.130.000**	**1 Hari**	**1.053.237.635**	**50**	**91,82**	**1 Hari**	**1.053.237.635,00**	**50**	**41,67**		**Tidak Tercapai**
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana di Dalam dan di Luar Negeri	45 Event	2.527.516.810	5 Event	306.380.000	10 Event	1.147.130.000	10 Event	1.053.237.635	100	91,82	10 Event	1.053.237.635,00	22,22	41,67		Tercapai
32.	3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Promosi	5 Kegiatan	457.882.500	1 Kegiatan	74.340.000	4 Kegiatan	191.563.500	4 Kegiatan	189.636.616	100	98,99	4 Kegiatan	189.636.616,00	80	41,42	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
33.	3.26.03.2.01.02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Event	45 Event	2.069.634.310	5 Event	232.040.000	5 Event	955.566.500	5 Event	863.601.019	100	90,38	5 Event	863.601.019,00	11,11	41,73	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	94,68			45,56	41,57		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	91,82			22,22	41,67		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PERSENTASE PENINGKATAN SDM SEKTOR PARIWISATA**	**100%**	**1.611.224.715**	**20%**	**174.181.000**	**20%**	**909.763.200**	**20%**	**857.247.525**	**100**	**94,23**	**20%**	**857.247.525,00**	**20**	**53,2**		**Tercapai**
			PERSENATSE PRODUK KREASI UNGGULAN	60%		20%		20%		20%		100		20,00%		33,33			Tercapai
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM dalam Pembekalan Sektor Kepariwisataan	100 Orang	1.611.224.715	20 Orang	174.181.000	20 Orang	909.763.200	20 Orang	857.247.525	100	94,23	20 Orang	857.247.525,00	20	53,2		Tercapai
34.	3.26.05.2.01.05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM dalam Pembinaan Usaha Sektor Pariwisata	100 Orang	699.886.440	20 Orang	54.249.000	20 Orang	794.483.200	20 Orang	750.760.525	100	94,5	20 Orang	750.760.525,00	20	107,27	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
35.	3.26.05.2.01.06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Kompeten	100 Orang	911.338.275	20 Orang	119.932.000	20 Orang	115.280.000	20 Orang	106.487.000	100	92,37	20 Orang	106.487.000,00	20	11,68	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	93,43			20	59,48		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	98,69	94,23			20	53,2		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	87,28	94,02			45,11	50,55		Tercapai
											Predikat Kinerja (Program)	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**96,19**	**90,88**			**39,06**	**114,85**		Tercapai
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**34.903.998.070**	**31.720.116.855**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		"- Semua kegiatan dilaksanakan sesuai anggaran kas yang telah ditetapkan "- Semua kegiatan dilaksanakan dengan lancar karena didukung anggaran dan sumber daya manusia yang menguasai																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		"- Kegaiatan fisik sedikit terkendala karena kurangnya koordinasi penyedia yang sudah ditetapkan sebagai pemenang dengan PPTK "- Beberapa kegiatan fisik terlaksana di akhir tahun anggaran sehingga proses monitoring kurang maksimal karena berkejaran																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		"- Tindak lanjut di tahun anggaran baru semoga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai jadwal anggaran kas sehingga tidak tertumpuk di akhir tahun anggaran "- Menambah SDM di bidang teknis sehingga pelaksanaan perkerjaan fisik cepat selesai dan																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP) Dinkes,PPKB**	**74 Angka/Nilai**	**174.065.922.816**	**78.74 Angka/Nilai**	**137.461.100.360**	**72 Angka/Nilai**	**160.589.139.215**	**72,1 Angka/Nilai**	**145.914.268.624**	**100,14**	**90,86**	**72.1 Angka/Nilai**	**145.914.268.624,00**	**97,43**	**83,83**		**Melebihi Target**
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	375.126.756	100%	339.776.685	100%	1.120.323.400	100%	845.847.485	100	75,5	100%	845.847.485,00	100	225,48		Tercapai
1.	1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	178.739.946	0 Dokumen	216.842.600	4 Dokumen	760.598.400	4 Dokumen	703.771.685	100	92,53	4 Dokumen	703.771.685,00	100	393,74	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
2.	1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen	196.386.810	0 Dokumen	122.934.085	4 Dokumen	359.725.000	4 Dokumen	142.075.800	100	39,5	4 Dokumen	142.075.800,00	100	72,34	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	66,01			100	233,04		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Tercapai
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	91.534.355.497	100%	57.332.674.214	100%	80.881.149.822	100%	69.169.686.358	100	85,52	100%	69.169.686.358,00	100	75,57		Tercapai
3.	1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	600 Orang	91.264.257.188	0 Orang	57.105.454.114	563 Orang	80.331.960.622	563 Orang	68.640.568.558	100	85,45	563 Orang	68.640.568.558,00	93,83	75,21	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
4.	1.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	270.098.309	0 Dokumen	227.220.100	4 Dokumen	549.189.200	4 Dokumen	529.117.800	100	96,35	4 Dokumen	529.117.800,00	100	195,9	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	90,9			96,92	135,55		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tingkat pengembangan kapasitas sumber daya aparatur	100%	409.823.568	100%	5.037.061.885	100%	10.201.840.000	100%	8.302.571.587	100	81,38	100%	8.302.571.587,00	100	2.025,89		Tercapai

5.	1.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	40 Orang	409.823.568	0 Orang	5.037.061.885	1566 Orang	10.201.840.000	1285 Orang	8.302.571.587	82,06	81,38	1285 Orang	8.302.571.587,00	3.212,50	2.025,89	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		82,06	81,38			3.212,50	2.025,89		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	100%	772.936.621	100%	1.015.044.132	100%	1.719.003.100	100%	1.643.645.899	100	95,62	100%	1.643.645.899,00	100	212,65		Tercapai
6.	1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	2 Paket	13.224.588	0 Paket	8.263.000	2 Paket	12.690.000	2 Paket	12.662.200	100	99,78	2 Paket	12.662.200,00	100	95,75	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
7.	1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3 Paket	125.918.100	0 Paket	438.788.126	9 Paket	1.065.670.000	9 Paket	1.015.421.550	100	95,28	9 Paket	1.015.421.550,00	300	806,41	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
8.	1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	61.185.358	0 Paket	46.022.400	3 Paket	41.124.100	3 Paket	40.026.900	100	97,33	3 Paket	40.026.900,00	100	65,42	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
9.	1.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1440 Dokumen	30.124.710	0 Dokumen	18.670.000	12 Dokumen	18.899.000	12 Dokumen	18.760.000	100	99,26	12 Dokumen	18.760.000,00	0,83	62,27	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
10.	1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	542.483.865	0 Laporan	503.300.606	158 Laporan	580.620.000	158 Laporan	556.775.249	100	95,89	158 Laporan	556.775.249,00	105,33	102,63	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	97,51			121,23	226,5		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	736.037.119	12 Bulan	440.967.513	12 Bulan	591.159.400	12 Bulan	546.345.546	100	92,42	12 Bulan	546.345.546,00	100	74,23		Tercapai
11.	1.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan	130.317.264	0 Laporan	61.760.000	24 Laporan	105.600.000	24 Laporan	100.900.000	100	95,55	24 Laporan	100.900.000,00	100	77,43	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
12.	1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	397.040.426	0 Laporan	163.543.063	48 Laporan	216.422.800	48 Laporan	185.201.546	100	85,57	48 Laporan	185.201.546,00	100	46,65	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
13.	1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	48 Laporan	208.679.429	0 Laporan	215.664.450	48 Laporan	269.136.600	48 Laporan	260.244.000	100	96,7	48 Laporan	260.244.000,00	100	124,71	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,61			100	82,93		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	542.643.255	12 Bulan	1.144.636.037	12 Bulan	2.454.896.500	12 Bulan	2.433.493.236	100	99,13	12 Bulan	2.433.493.236,00	100	448,45		Tercapai
14.	1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70 Unit	291.651.822	0 Unit	218.959.185	63 Unit	360.154.000	57 Unit	347.360.536	90,48	96,45	57 Unit	347.360.536,00	81,43	119,1	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
15.	1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	31.878.000	0 Unit	788.180.352	13 Unit	1.991.376.800	13 Unit	1.986.403.600	100	99,75	13 Unit	1.986.403.600,00	325	6.231,27	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
16.	1.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Knator atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	219.113.433	0 Unit	137.496.500	10 Unit	103.365.700	10 Unit	99.729.100	100	96,48	10 Unit	99.729.100,00	100	45,51	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		96,83	97,56			168,81	2.131,96		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	79.695.000.000	81.88 %	72.150.939.894	90%	63.620.766.993	82,50%	62.972.678.513	91,67	98,98	82.5 %	62.972.678.513,00	91,67	79,02		Tidak Tercapai
			Angka penggunaan tempat tidur (BOR)	60%		69%		60%		83,90%		139,83		84%		139,83			Melebihi Target
			Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,736111111		0.76 : 1000		0,736111111		0,74 : 1000		74		0,736111111		74			Tidak Tercapai
			Tingkat Capaian Akreditasi Rumah sakit	2 Paripurna		2 Paripurna		2 Paripurna		5 Paripurna		250		5 Paripurna		250			Tercapai
17.	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	100 Unit Kerja	79.695.000.000	0 Unit Kerja	72.150.939.894	1 Unit Kerja	63.620.766.993	1 Unit Kerja	62.972.678.513	100	98,98	1 Unit Kerja	62.972.678.513,00	1	79,02	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,98			1	79,02		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		115,55	62,85			69,17	314,13		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
2.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase ibu hamil dengan risiko tinggi**	**0%**	**76.111.184.139**	**0%**	**83.074.373.068**	**100%**	**107.077.503.316**	**100%**	**97.704.387.982**	**100**	**91,25**	**100%**	**97.704.387.982,00**	**0**	**128,37**		**Tercapai**
			Persentase bayi dengan BBLR	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
			Prevalensi Gizi Buruk yang mendapatkan pelayanan tatalaksana gizi buruk	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
			Persentase Wasting	3%		0%		6%		4%		133,33		4,00%		66,67			Melebihi Target
			Persentase Ibu Hamil KEK	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
			Persentase Ibu Hamil Anemia	72%		68%		100%		100%		100		100,00%		61,11			Tercapai
			Persentase Remaja Putri Anemia	18%		8%		10%		10%		100		10,00%		144,44			Tercapai
			Persentase desa yang mencapai ODF	1%		2%		1%		1%		100		1,00%		100			Tercapai
			Indeks SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	70		57.5		100		100		100		100		142,86			Tercapai
			Cakupan desa UCI	18%		38%		4%		4%		100		4,00%		22,22			Tercapai
			Persentase deteksi dini dan respon penyakit potensial KLB/Wabah	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
			Persentase gedung Fasyankes yang Layak	8%		2%		6.4 %		4,66%		72,81		4,66%		58,25			Tidak Tercapai
			MoU antara Pemerintah Daerah dan BPJS, RS daerah dan provinsi	97 MoU		95 MoU		100 MoU		100 MoU		100		100,00 MoU		103,09			Teracapai
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nilai Komulatif Pemenuhan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (SPA) diFasilitas Kesehatan	78%	6.983.136.524	66.17 %	19.171.990.264	70%	31.790.071.850	66,78%	26.703.237.643	95,4	84	66.78 %	26.703.237.643,00	85,62	382,4		Tidak Tercapai
18.	1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	351.933.120	0 Unit	430.219.000	15 Unit	3.291.010.000	13 Unit	2.787.299.544	86,67	84,69	13 Unit	2.787.299.544,00	1.300,00	792	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
19.	1.02.02.2.01.10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas kesehatan lainnya	10 Unit	1.385.848.233	0 Unit	4.038.563.150	11 Unit	3.021.950.000	11 Unit	2.757.074.000	100	91,23	11 Unit	2.757.074.000,00	110	198,94	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
20.	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	12 Unit	3.115.977.536	0 Unit	11.654.867.238	8 Unit	17.600.556.593	8 Unit	14.958.549.586	100	84,99	8 Unit	14.958.549.586,00	66,67	480,06	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
21.	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang Disediakan	5 Unit	0	0 Unit	0	5 Unit	3.736.735.350	5 Unit	2.797.131.486	100	74,85	5 Unit	2.797.131.486,00	100	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
22.	1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat Vaksin yang Disediakan	45 Paket	596.109.674	0 Paket	1.441.391.507	45 Paket	1.494.695.507	45 Paket	1.160.539.811	100	77,64	45 Paket	1.160.539.811,00	100	194,69	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
23.	1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	3 Paket	975.323.266	0 Paket	1.101.421.369	4 Paket	1.718.685.600	4 Paket	1.406.475.916	100	81,83	4 Paket	1.406.475.916,00	133,33	144,21	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
24.	1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	10 Unit	21.501.711	0 Unit	186.454.000	12 Unit	671.650.000	12 Unit	639.242.500	100	95,17	12 Unit	639.242.500,00	120	2.972,98	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai

25.	1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	12 Unit	455.696.010	0 Unit	258.030.000	18 Unit	77.541.600	18 Unit	76.609.000	100	98,8	18 Unit	76.609.000,00	150	16,81	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
26.	1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	12 Puskesmas	80.746.974	0 Puskesmas	61.044.000	12 Puskesmas	177.247.200	12 Puskesmas	120.315.800	100	67,88	12 Puskesmas	120.315.800,00	100	149	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		98,52	84,12			242,22	549,85		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian SPM kesehatan ibu	0%	68.984.318.511	0%	63.376.696.804	100%	73.576.033.266	86%	69.338.122.605	86	94,24	86%	69.338.122.605,00	0	100,51		Tidak Tercapai
			Persentase persalinan di failitas kesehatan	0%		0%		100%		96%		96		96%		inf			Tidak Tercapai
			Persentase capaian SPM kesehatan bayi	0%		0%		100%		98%		98		98%		inf			Tidak Tercapai
			Persentase capaian SPM Bayi Baru Lahir	0%		0%		100%		98%		98		98%		inf			Tidak Tercapai
			Persentase capaian SPM kesehatan balita	0%		0%		100%		100%		100		100%		inf			Tercapai
			Persentase capaian SPM ibu	0%		0%		100%		86%		86		86%		inf			Tidak Tercapai
			Persentase remaja putri yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0%		0%		100%		100%		100		100%		inf			Tercapai
			Persentase rumah tangga yang mencapai SBS	0%		0%		94%		96,81%		102,99		97%		inf			Melebihi Target
			Persentase capaian SPM pencegahan dan pengendalian penyakit	0%		0%		100%		70%		70		70%		inf			Tidak Tercapai
			Persentase bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap	0%		0%		94.5 %		90%		95,24		90%		inf			Tidak Tercapai
			Persentase penyakit yang berpotensi wabah ditangani sesuai standar	0%		0%		100%		100%		100		100%		inf			Tercapai
			Persentase operasional pelayanan kesehatan	0%		0%		100%		100%		100		100%		inf			Tercapai
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100		4 Dokumen		inf			Tercapai
27.	1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2231 Orang	115.121.021	0 Orang	508.139.050	2167 Orang	683.180.700	1866 Orang	649.789.394	86,11	95,11	1866 Orang	649.789.394,00	83,64	564,44	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
			Jumlah calon pengantin yang diskrining kesehatan	0 Orang		0 Orang		1068 Orang		925 Orang		86,61		925		0			Tidak Tercapai
28.	1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2065 Orang	98.981.190	0 Orang	193.626.950	2005 Orang	140.725.600	1924 Orang	102.420.000	95,96	72,78	1924 Orang	102.420.000,00	93,17	103,47	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
			Jumlah Ibu Nifas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang		2005 Orang		1924 Orang		95,96		1.924,00		0			Tidak Tercapai
29.	1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2022 Orang	48.621.920	0 Orang	96.108.800	1945 Orang	280.339.600	1901 Orang	170.386.206	97,74	60,78	1901 Orang	170.386.206,00	94,02	350,43	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
			Jumlah Bayi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	0 Orang		0 Orang		1945 Orang		1901 Orang		97,74		1.901,00		0			Tidak Tercapai
30.	1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	8362 Orang	99.060.885	0 Orang	151.953.625	8085 Orang	163.363.600	8085 Orang	147.740.600	100	90,44	8085 Orang	147.740.600,00	96,69	149,14	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
31.	1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20263 Orang	229.904.136	0 Orang	285.694.000	20134 Orang	75.085.000	19857 Orang	67.085.000	98,62	89,35	19857 Orang	67.085.000,00	98	29,18	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
			Jumlah remaja putri yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	0		0		5809		5809		100		5.809,00		0			Tercapai
32.	1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	73386 Orang	134.812.062	0 Orang	393.207.150	70538 Orang	679.217.800	44611 Orang	420.603.800	63,24	61,92	44611 Orang	420.603.800,00	60,79	311,99	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
33.	1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	9588 Orang	142.379.899	0 Orang	236.390.400	9321 Orang	305.442.800	9319 Orang	299.562.800	99,98	98,07	9319 Orang	299.562.800,00	97,19	210,4	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
34.	1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14868 Orang	59.532.165	0 Orang	288.090.300	14292 Orang	95.319.700	13226 Orang	65.758.812	92,54	68,99	13226 Orang	65.758.812,00	88,96	110,46	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
35.	1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita Diabetes Melitus Yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	4195 Orang	59.532.165	0 Orang	321.075.100	4033 Orang	135.719.700	3748 Orang	109.379.100	92,93	80,59	3748 Orang	109.379.100,00	89,34	183,73	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
36.	1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	200 Orang	0	0 Orang	139.935.600	261 Orang	515.423.000	236 Orang	392.870.701	90,42	76,22	236 Orang	392.870.701,00	118	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
37.	1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	2740 Orang	259.781.792	0 Orang	234.390.500	2360 Orang	235.307.200	1114 Orang	221.853.852	47,2	94,28	1114 Orang	221.853.852,00	40,66	85,4	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
38.	1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	3612 Orang	258.689.970	0 Orang	187.933.900	3120 Orang	197.409.600	3120 Orang	196.577.750	100	99,58	3120 Orang	196.577.750,00	86,38	75,99	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
39.	1.02.02.2.02.14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Sesuai Standar	12 Dokumen	120.073.587	0 Dokumen	227.015.449	12 Dokumen	231.723.050	12 Dokumen	199.008.700	100	85,88	12 Dokumen	199.008.700,00	100	165,74	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
40.	1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 Dokumen	431.723.754	0 Dokumen	1.310.328.620	12 Dokumen	917.988.100	12 Dokumen	712.745.542	100	77,64	12 Dokumen	712.745.542,00	100	165,09	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah balita gizi kurang dan balita gizi buruk, ibu hamil KEK/Anemia, bayi BBLR yang mendapatkan PMT	0 Orang		0 Orang		685 Orang		687 Orang		100,29		687		0			Melebihi Target
41.	1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	26 Dokumen	101.236.559	0 Dokumen	118.036.000	26 Dokumen	178.136.100	26 Dokumen	109.899.737	100	61,69	26 Dokumen	109.899.737,00	100	108,56	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Persentase jemaah haji yang diukur kebugaran jasmani	0%		0%		90%		98%		108,89		98		0			Melebihi Target
			Jumlah Pos UKK yang dibina	0		0		13		12		92,31		12		0			Tidak Tercapai
42.	1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4 Dokumen	243.117.567	0 Dokumen	809.189.498	4 Dokumen	371.832.800	4 Dokumen	327.271.100	100	88,02	4 Dokumen	327.271.100,00	100	134,61	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah sarana air minum yang diperiksa/diawasi	0		0		110		69		62,73		69		0			Tidak Tercapai
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaksanakan pengelolaan limbah medis	0		0		13		13		100		13		0			Tercapai
			Jumlah TFU yang memenuhi syarat	0		0		57		26,41		46,33		26,41		0			Tidak Tercapai
43.	1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	3 Dokumen	102.649.200	3 Dokumen	81.031.400	100	78,94	3 Dokumen	81.031.400,00	75	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
44.	1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	15 Dokumen	65.554.000	0 Dokumen	3.952.839.925	9 Dokumen	647.855.700	9 Dokumen	550.398.150	100	84,96	9 Dokumen	550.398.150,00	60	839,61	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah bayi usia 0 - 11 yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	0		0		2288		2060		90,03		2.060,00		0			Tidak Tercapai
45.	1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	7 Dokumen	392.038.035	0 Dokumen	1.057.114.400	8 Dokumen	1.516.583.800	8 Dokumen	1.460.371.778	100	96,29	8 Dokumen	1.460.371.778,00	114,29	372,51	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai

46.	1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	12 Dokumen	310.200.833	0 Dokumen	742.255.100	10 Dokumen	348.852.700	10 Dokumen	297.851.150	100	85,38	10 Dokumen	297.851.150,00	83,33	96,02	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
47.	1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen	44.566.144.678	0 Dokumen	31.434.583.505	12 Dokumen	33.843.331.100	12 Dokumen	32.656.471.963	100	96,49	12 Dokumen	32.656.471.963,00	100	73,28	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
48.	1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	50 Orang	68.856.480	0 Orang	42.077.850	4780 Orang	49.630.000	4330 Orang	35.206.000	90,59	70,94	4330 Orang	35.206.000,00	8.660,00	51,13	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tidak Tercapai
49.	1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen	141.378.930	0 Dokumen	0	1 Dokumen	80.620.000	1 Dokumen	34.169.600	100	42,38	1 Dokumen	34.169.600,00	100	24,17	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
50.	1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	4 Dokumen	21.037.576.883	0 Dokumen	19.158.464.630	4 Dokumen	29.966.203.776	4 Dokumen	28.561.376.971	100	95,31	4 Dokumen	28.561.376.971,00	100	135,76	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
51.	1.02.02.2.02.33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	0	0 Dokumen	1.488.246.452	12 Dokumen	1.485.273.040	12 Dokumen	1.165.895.949	100	78,5	12 Dokumen	1.165.895.949,00	100	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
52.	1.02.02.2.02.39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Persentase orang positif malaria di berikan pengobatan OAM	0	0	0	0	95	328.819.600	100	302.396.550	105,26	91,96	100	302.396.550,00	0	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Melebihi Target
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	93,01	57,37			292,96	117,33		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase puskesmas yang menerapkan aplikasi layanan pengelolaan data dan informasi berbasis elektronik terintegrasi	100%	105.555.199	100%	100.742.800	100%	825.160.000	100%	804.180.634	100	97,46	100%	804.180.634,00	100	761,86		Tercapai
53.	1.02.02.2.03.01	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	3 Dokumen	105.555.199	0 Dokumen	100.742.800	3 Dokumen	825.160.000	3 Dokumen	804.180.634	100	97,46	3 Dokumen	804.180.634,00	100	761,86	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,46			100	761,86		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Melaksanakan Pelayanan sesuai Standar	100%	38.173.905	100%	424.943.200	100%	886.238.200	100%	858.847.100	100	96,91	100%	858.847.100,00	100	2.249,83		Tercapai
			Jumlah Puskesmas dengan Kategori Akreditasi Paripurna	3 Puskesmas		0 Puskesmas		6 Puskesmas		4 Puskesmas		66,67		4 Puskesmas		133,33			Tidak Tercapai
54.	1.02.02.2.04.03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas kesehatan yang dilakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan kesehatan	1 Puskesmas	38.173.905	0 Puskesmas	424.943.200	12 Puskesmas	886.238.200	12 Puskesmas	858.847.100	100	96,91	12 Puskesmas	858.847.100,00	1.200,00	2.249,83	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,91			1.200,00	2.249,83		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	93,78	21,92			16,8	205,56		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
3.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio SDM Kesehatan**	**0**	**10.187.209.584**	**0**	**9.452.851.785**	**22**	**11.359.858.500**	**27,5**	**10.736.614.187**	**125**	**94,51**	**27.5**	**10.736.614.187,00**	**0**	**105,39**		**Melebihi Target**
			Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi	37%		15%		38.5 %		38,50%		100		38,50%		104,05			Tercapai
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Puskesmas yang terpenuhi Kebutuhan SDMK	100%	9.546.823.440	100%	9.132.436.685	100%	9.901.965.600	100%	9.503.446.025	100	95,98	100%	9.503.446.025,00	100	99,55		Tercapai
55.	1.02.03.2.02.02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	14 Orang	9.546.823.440	0 Orang	9.132.436.685	13 Orang	9.901.965.600	13 Orang	9.503.446.025	100	95,98	13 Orang	9.503.446.025,00	92,86	99,55	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,98			92,86	99,55		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	72%	640.386.144	68%	320.415.100	100%	1.457.892.900	100%	1.233.168.162	100	84,59	100%	1.233.168.162,00	138,89	192,57		Tercapai
56.	1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Sesuai Standar	0 Orang	640.386.144	0 Orang	320.415.100	100 Orang	1.457.892.900	100 Orang	1.233.168.162	100	84,59	100 Orang	1.233.168.162,00	0	192,57	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	0 Orang		0 Orang		207 Orang		207 Orang		100		207		0			Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	42,29			0	96,28		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	90,28			119,44	146,06		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan**	**0%**	**57.571.668**	**0%**	**53.419.660**	**100%**	**393.746.200**	**100%**	**247.987.890**	**100**	**62,98**	**100%**	**247.987.890,00**	**0**	**430,75**		**Tercapai**
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah sarana P-IRT (Produksi pangan Industri Rumah tangga) yang bersertifikat yang diawasi	18 IRT	57.571.668	8 IRT	53.419.660	10 IRT	393.746.200	10 IRT	247.987.890	100	62,98	10 IRT	247.987.890,00	55,56	430,75		Tercapai
57.	1.02.04.2.03.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	24 Dokumen	57.571.668	0 Dokumen	53.419.660	10 Dokumen	393.746.200	10 Dokumen	247.987.890	100	62,98	10 Dokumen	247.987.890,00	41,67	430,75	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	62,98			41,67	430,75		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	62,98			55,56	430,75		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Rendah	Sangat Tinggi		
5.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Keluarga yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**	**70%**	**309.683.931**	**57.5 %**	**516.217.869**	**55%**	**875.048.700**	**55%**	**777.401.526**	**100**	**88,84**	**55%**	**777.401.526,00**	**78,57**	**251,03**		**Tercapai**
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan yang Berwawasan Kesehatan	1 Kebijakan	223.974.828	2 Kebijakan	275.679.169	1 Kebijakan	244.448.000	1 Kebijakan	241.106.526	100	98,63	1 Kebijakan	241.106.526,00	100	107,65		Tercapai
58.	1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	4 Dokumen	223.974.828	0 Dokumen	275.679.169	4 Dokumen	244.448.000	4 Dokumen	241.106.526	100	98,63	4 Dokumen	241.106.526,00	100	107,65	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah desa yang menerapkan GERMAS	0 Desa		0 Desa		8 Desa		0 Desa		0		0		0			
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	50	49,32			50	53,82		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah		
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga (RT) yang telah disurvei PHBS (%)	70%	85.709.103	57.5 %	240.538.700	100%	387.233.200	100%	344.452.800	100	88,95	100%	344.452.800,00	142,86	401,89		Tercapai

59.	1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen	85.709.103	0 Dokumen	240.538.700	4 Dokumen	387.233.200	4 Dokumen	344.452.800	100	88,95	4 Dokumen	344.452.800,00	400	401,89	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah desa yang mendapatkan promosi kesehatan tentang PHBS	0 Desa		0 Desa		45 Desa		45 Desa		100		45		0			Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				200	200,94		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0%	0	0%	0	32%	243.367.500	32%	191.842.200	100	78,83	32%	191.842.200,00	0	0		Tercapai
60.	1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	243.367.500	1 Dokumen	191.842.200	100	78,83	1 Dokumen	191.842.200,00	25	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah UKBM yang mendapatkan bimbingan teknis sesuai standar	0		0		32		32		100		32		0			Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	39,41		12,5	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	88,8		80,95	169,84		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi		Tinggi	Sangat Tinggi		
6.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Indeks Pembangunan Keluarga**	**0**	**186.204.300**	**0**	**192.541.850**	**58.11**	**4.568.752.000**	**58,11**	**4.547.408.948**	**100**	**99,53**	**58.11**	**4.547.408.948,00**	**0**	**2.442,16**		**Tercapai**
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah regulasi daerah/dokumen perencanaan yang memanfaatkan GDPK	18 Dokumen	81.204.300	38 Dokumen	161.252.900	4 Dokumen	370.652.700	4 Dokumen	363.380.800	100	98,04	4 Dokumen	363.380.800,00	22,22	447,49		Tercapai
61.	2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1 Dokumen	0	0 Dokumen	48.052.900	4 Dokumen	163.238.900	4 Dokumen	161.217.100	100	98,76	4 Dokumen	161.217.100,00	400	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah Tahapan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	0		0		4		4		100		4		0			Tercapai
62.	2.14.02.2.01.07	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	4 Dokumen	20.817.500	0 Dokumen	78.240.000	4 Dokumen	66.126.600	4 Dokumen	63.574.300	100	96,14	4 Dokumen	63.574.300,00	100	305,39	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah Organisasi Yang memanfaatkan Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		100		4		0			Tercapai
63.	2.14.02.2.01.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	18 Satuan Pendidikan	45.000.000	0 Satuan Pendidikan	34.960.000	8 Satuan Pendidikan	83.695.000	8 Satuan Pendidikan	82.463.800	100	98,53	8 Satuan Pendidikan	82.463.800,00	44,44	183,25	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
64.	2.14.02.2.01.12	Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	0 Organisasi	15.386.800	0 Organisasi	0	2 Organisasi	57.592.200	2 Organisasi	56.125.600	100	97,45	2 Organisasi	56.125.600,00	0	364,76	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	65,15		90,74	142,23		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	100%	105.000.000	100%	31.288.950	100%	4.198.099.300	100%	4.184.028.148	100	99,66	100%	4.184.028.148,00	100	3.984,79		Tercapai
65.	2.14.02.2.02.08	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang Dibentuk	157 Unit	50.000.000	0 Unit	9.575.000	15 Unit	82.375.000	15 Unit	80.084.129	100	97,22	15 Unit	80.084.129,00	9,55	160,17	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
66.	2.14.02.2.02.12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	12 Laporan	55.000.000	0 Laporan	21.713.950	12 Laporan	2.818.324.300	12 Laporan	2.814.384.454	100	99,86	12 Laporan	2.814.384.454,00	100	5.117,06	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
67.	2.14.02.2.02.14	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Program Bangga Kencana	8 Laporan	0	0 Laporan	0	8 Laporan	1.297.400.000	8 Laporan	1.289.559.565	100	99,4	8 Laporan	1.289.559.565,00	100	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,82		69,85	1.759,08		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	98,85		61,11	2.216,14		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Rendah	Sangat Tinggi		
7.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase Contraceptive Prevalence Rate (CPR)**	**0%**	**668.000.000**	**0%**	**1.356.343.357**	**72%**	**2.416.264.600**	**83,47%**	**2.302.953.020**	**115,93**	**95,31**	**83.47 %**	**2.302.953.020,00**	**0**	**344,75**		**Melebihi Target**
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase Unmet Need	8%	265.000.000	2%	343.969.969	6.4 %	588.173.200	4,66%	542.739.474	72,81	92,28	4.66 %	542.739.474,00	141,75	204,81		Tidak Tercapai
68.	2.14.03.2.01.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Program Keluarga, Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	7 Laporan	65.000.000	0 Laporan	10.520.000	7 Laporan	76.043.200	8 Laporan	74.123.200	114,29	97,48	8 Laporan	74.123.200,00	114,29	114,04	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Melebihi Target
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	0		0		7		8		114,29		8		0			Melebihi Target
69.	2.14.03.2.01.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	8 Laporan	200.000.000	0 Laporan	333.449.969	7 Laporan	512.130.000	8 Laporan	468.616.274	114,29	91,5	8 Laporan	468.616.274,00	100	234,31	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Melebihi Target
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	114,29	62,99		71,43	116,11		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah		Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB/PLKB yang didaya gunakan perangkat daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	97%	73.000.000	95%	766.282.000	100%	101.460.400	100%	98.140.510	100	96,73	100%	98.140.510,00	103,09	134,44		Tercapai
70.	2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	0 Laporan	38.000.000	0 Laporan	3.496.000	12 Laporan	55.558.000	12 Laporan	53.928.900	100	97,07	12 Laporan	53.928.900,00	0	141,92	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
71.	2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	12 Orang	35.000.000	0 Orang	762.786.000	780 Orang	45.902.400	780 Orang	44.211.610	100	96,32	780 Orang	44.211.610,00	6.500,00	126,32	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai

											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,69			3.250,00	134,12		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan ketersediaan kontrasepsi sesuai kebutuhan	100%	291.000.000	100%	208.775.388	100%	1.624.318.200	100%	1.561.253.636	100	96,12	100%	1.561.253.636,00	100	536,51		Tercapai
72.	2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13 Laporan	50.000.000	0 Laporan	60.746.000	12 Laporan	154.140.000	14 Laporan	148.659.805	116,67	96,44	14 Laporan	148.659.805,00	107,69	297,32	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
			Jumlah Laporan Stok Alkon dan Jumlah Laporan SBBK Alkon ke Fasilitas Kesehatan	0		0		12		12		100		12		0			Tercapai
73.	2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	110 Orang	150.000.000	0 Orang	74.316.588	105 Orang	231.726.000	105 Orang	187.001.099	100	80,7	105 Orang	187.001.099,00	95,45	124,67	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
74.	2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	26 Unit	0	0 Unit	0	26 Unit	1.136.014.000	26 Unit	1.123.294.532	100	98,88	26 Unit	1.123.294.532,00	100	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
75.	2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	13 Laporan	48.000.000	0 Laporan	41.842.800	7 Laporan	42.648.000	8 Laporan	42.508.000	114,29	99,67	8 Laporan	42.508.000,00	61,54	88,56	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Melebihi Target
			Jumlah pelaksanaan pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	0		0		7		8		114,29		8		0			Melebihi Target
76.	2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	130 Orang	43.000.000	0 Orang	31.870.000	130 Orang	59.790.200	204 Orang	59.790.200	156,92	100	204 Orang	59.790.200,00	156,92	139,05	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Melebihi Target
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	114,59	67,96			74,52	92,8		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase perangkat daerah (Dinas atau Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	37%	39.000.000	15%	37.316.000	38.5 %	102.312.800	38,50%	100.819.400	100	98,54	38.5 %	100.819.400,00	104,05	258,51		Tercapai
77.	2.14.03.2.04.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah kampung KB yang memiliki peningkatan klasifikasi	15 Kampung	39.000.000	0 Kampung	37.316.000	15 Kampung	102.312.800	15 Kampung	100.819.400	100	98,54	15 Kampung	100.819.400,00	100	258,51	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,54			100	258,51		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	93,2	95,92			112,22	283,57		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
8.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka Kelahiran remaja usia 15 - 19 tahun (ASFR)**	**0%**	**272.000.000**	**0%**	**433.566.000**	**20.58 %**	**3.679.143.700**	**20,80%**	**3.262.296.745**	**98,93**	**88,67**	**20.8 %**	**3.262.296.745,00**	**0**	**1.199,37**		**Tidak Tercapai**
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang dibina	20.2 %	166.000.000	30%	211.545.000	19.94 %	1.333.586.700	57,49%	1.290.921.100	288,31	96,8	57.49 %	1.290.921.100,00	284,6	777,66		Melebihi Target
78.	2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang Dibentuk	145 Kelompok	71.000.000	0 Kelompok	28.584.000	165 Kelompok	46.206.000	165 Kelompok	42.113.000	100	91,14	165 Kelompok	42.113.000,00	113,79	59,31	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
79.	2.14.04.2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	10 Unit	45.000.000	0 Unit	8.500.000	3 Unit	112.350.000	3 Unit	109.829.000	100	97,76	3 Unit	109.829.000,00	30	244,06	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
80.	2.14.04.2.01.04	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader yang Mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	40 Kader	50.000.000	0 Kader	174.461.000	20 Kader	39.830.700	20 Kader	26.390.700	100	66,26	20 Kader	26.390.700,00	50	52,78	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
81.	2.14.04.2.01.05	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	504 Kader	0	0 Kader	0	504 Kader	1.058.400.000	504 Kader	1.048.233.400	100	99,04	504 Kader	1.048.233.400,00	100	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
82.	2.14.04.2.01.06	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	8 Kelompok	0	0 Kelompok	0	8 Kelompok	76.800.000	8 Kelompok	64.355.000	100	83,8	8 Kelompok	64.355.000,00	100	0	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	87,6			78,76	71,23		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		Tercapai
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan aktif dalam pembangunan keluarga	0.67 %	106.000.000	2%	222.021.000	100%	2.345.557.000	100%	1.971.375.645	100	84,05	100%	1.971.375.645,00	14.925,37	1.859,79		Tercapai
83.	2.14.04.2.02.02	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan	38.000.000	0 Laporan	174.461.000	4 Laporan	2.180.941.400	4 Laporan	1.810.116.700	100	83	4 Laporan	1.810.116.700,00	80	4.763,47	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
84.	2.14.04.2.02.03	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2 Laporan	68.000.000	0 Laporan	47.560.000	2 Laporan	164.615.600	2 Laporan	161.258.945	100	97,96	2 Laporan	161.258.945,00	100	237,15	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	90,48			90	2.500,31		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Tinggi	Sangat Tinggi		

												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	105,14	90,42			7.604,99	1.318,73		
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	62,57	55,91			8,38	237,41		
												Predikat Kinerja (Program)	Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**99,24**	**91,25**			**341,22**	**442,44**		
												Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
										Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**290.959.456.231**		**265.493.318.922**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Dukungan dana APBD yang selalu tersedia tiap tahun karena komitmen kepala daerah beserta DPRD dalam memastikan seluruh penduduk Kabupaten Balangan memiliki jaminan kesehatan. 2. Cakupan UHC dan Keaktifan Peserta di Kabupaten Balangan. 3.																			
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Masih adanya Peserta BPJS yang tidak aktif walaupun sudah terdaftar. 2. Pelayanan Kesehatan khususnya masyarakat tidak mampu sudah tercover melalui pembiayaan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah daerah, namun terkait biaya pendamping																	
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1. Koordinasi dengan pihak BPJS setempat terkait adanya peserta yang masih tidak aktif. 2. Adanya kebijakan baik tingkat pusat maupun daerah untuk mengakomodir biaya pendamping pasien (keluarga) apabila pasien dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai (Predikat) Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**76.52 nilai**	**191.691.543**	**70.92 nilai**	**10.066.237.316**	**76.49 nilai**	**13.219.799.030**	**72,25 nilai**	**12.221.086.369**	**94,46**	**92,45**	**72.25 nilai**	**12.221.086.369,00**	**94,42**	**6.375,39**		**Tidak Tercapai**
			Persentase Pencatatan Aset Dalam Kondisi Baik	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penggganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	191.691.543	100%	148.288.666	100%	265.005.400	100%	255.392.031	100	96,37	100%	255.392.031,00	100	133,23		Tercapai
1.	1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	0	2 Dokumen	76.406.800	2 Dokumen	142.700.000	2 Dokumen	140.416.731	100	98,4	4 Dokumen	216.823.531,00	30,77	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
2.	1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	191.691.543	2 Laporan	71.881.866	2 Laporan	122.305.400	2 Laporan	114.975.300	100	94,01	4 Laporan	186.857.166,00	33,33	97,48	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	96,2			32,05	48,74		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	0	100%	6.523.936.903	100%	8.945.233.098	100%	8.124.186.732	100	90,82	100%	8.124.186.732,00	100	0		Tercapai
3.	1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan	0	53 Orang/bulan	6.523.936.903	53 Orang/bulan	8.853.953.098	53 Orang/bulan	8.033.246.432	100	90,73	53 Orang/bulan	8.033.246.432,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
4.	1.06.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	59.905.000	2 Laporan	59.793.000	100	99,81	4 Laporan	59.793.000,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
5.	1.06.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan	0	2 Laporan	0	2 Laporan	31.375.000	2 Laporan	31.147.300	100	99,27	4 Laporan	31.147.300,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	96,61			55,56	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0	100%	194.163.000	100%	230.400.000	100%	226.400.000	100	98,43	100%	226.400.000,00	100	0		Tercapai
6.	1.06.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	550 Paket	0	110 Paket	15.663.000	100 Paket	80.000.000	160 Paket	78.400.000	160	98	270 Paket	94.063.000,00	49,09	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
7.	1.06.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	103 Orang	0	36 Orang	178.500.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	148.000.000	100	98,67	66 Orang	326.500.000,00	64,08	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		130	98,33			56,58	0		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	0	100%	1.239.924.446	100%	2.393.215.800	100%	2.374.869.014	100	99,23	100%	2.374.869.014,00	100	0		Tercapai
8.	1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	0	1 Paket	30.539.400	1 Paket	11.114.300	1 Paket	11.114.300	100	100	2 Paket	41.653.700,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
9.	1.06.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	0	0 Paket	463.728.100	1 Paket	123.650.500	1 Paket	118.930.000	100	96,18	1 Paket	582.658.100,00	16,67	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
10.	1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	0	1 Paket	49.815.950	1 Paket	65.574.400	1 Paket	65.457.805	100	99,82	2 Paket	115.273.755,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
11.	1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	0	3 Dokumen	2.850.000	3 Dokumen	13.200.000	3 Dokumen	2.760.000	100	20,91	6 Dokumen	5.610.000,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
12.	1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64 Laporan	0	0 Laporan	692.990.996	12 Laporan	2.179.676.600	12 Laporan	2.176.606.909	100	99,86	12 Laporan	2.869.597.905,00	18,75	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	83,35			93,75	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana yang diadakan	100%	0	100%	249.204.000	0%	0	0%	0	0	0	100%	249.204.000,00	100	0		Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0	0			0	0		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 Bulan	0	12 Bulan	1.299.030.949	12 Bulan	739.417.532	12 Bulan	628.808.031	100	85,04	24 Bulan	1.927.838.980,00	37,5	0		Tercapai
13.	1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	64 Laporan	0	12 Laporan	164.793.973	12 Laporan	284.100.000	12 Laporan	191.333.427	100	67,35	24 Laporan	356.127.400,00	37,5	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
14.	1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	64 Laporan	0	12 Laporan	1.134.236.976	12 Laporan	455.317.532	12 Laporan	437.474.604	100	96,08	24 Laporan	1.571.711.580,00	37,5	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	81,71			37,5	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64 Bulan	0	12 Bulan	411.689.352	12 Bulan	646.927.200	12 Bulan	611.430.561	100	94,51	24 Bulan	1.023.119.913,00	37,5	0		Tercapai
15.	1.06.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	0	2 Unit	0	2 Unit	286.802.100	2 Unit	257.718.208	100	89,86	4 Unit	257.718.208,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai

16.	1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	0	7 Unit	411.689.352	7 Unit	360.125.100	7 Unit	353.712.353	100	98,22	14 Unit	765.401.705,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	94,04			200	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		85,71	80,63			82,14	19,03		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Persentase PSKS yang aktif**	**90%**	**0**	**0%**	**481.046.050**	**78%**	**4.202.610.200**	**0%**	**4.195.445.200**	**0**	**99,83**	**0%**	**4.195.445.200,00**	**0**	**0**		**Tidak Tercapai**
	1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	PersentaseKomunitas Adat Terpencil (KAT) yang berdaya	100%	0	14.55 %	93.355.050	14.55 %	15.300.000	14,55%	15.280.000	100	99,87	14.55 %	15.280.000,00	14,55	0		Tercapai
17.	1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Keluarga	0	0 Keluarga	83.805.050	30 Keluarga	15.300.000	54 Keluarga	15.280.000	180	99,87	54 Keluarga	99.085.050,00	180	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Melebihi Target
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		180	99,87			180	0		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga/yayasan yang memiliki izin pelaksanaan Pengumpulan Uang atau Barang	10 Buah	0	2 Buah	4.405.000	0 Buah	0	0 Buah	0	0	0	2 Buah	4.405.000,00	20	0		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0	0			0	0		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang Terpenuhi Kapasitasnya	90%	0	79.3 %	383.286.000	81%	4.187.310.200	81%	4.180.165.200	100	99,83	81%	4.180.165.200,00	90	0		Tercapai
18.	1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	0	0 Orang	78.108.000	40 Orang	219.200.000	40 Orang	219.190.000	100	100	40 Orang	297.298.000,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
19.	1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Orang	0	8 Orang	77.252.200	8 Orang	69.250.000	8 Orang	64.650.000	100	93,36	16 Orang	141.902.200,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
20.	1.06.02.2.03.03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	2996 Keluarga	0	0 Keluarga	195.374.800	2996 Keluarga	112.700.000	2996 Keluarga	112.700.000	100	100	2996 Keluarga	112.700.000,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
21.	1.06.02.2.03.04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Lembaga	0	0 Lembaga	32.551.000	9 Lembaga	3.786.160.200	9 Lembaga	3.783.625.200	100	99,93	9 Lembaga	3.816.176.200,00	75	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,32			118,75	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		66,67	66,57			41,52	0		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase PPKS yang terpulihkan fungsi sosialnya**	**100%**	**0**	**0%**	**939.505.200**	**100%**	**394.108.200**	**100%**	**333.356.600**	**100**	**84,59**	**100%**	**333.356.600,00**	**100**	**0**		**Tercapai**
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sosial	100%	0	0%	939.505.200	100%	394.108.200	100%	333.356.600	100	84,59	100%	333.356.600,00	100	0		Tercapai
22.	1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	3000 Orang	0	0 Orang	202.926.400	350 Orang	100.097.500	36 Orang	62.856.700	10,29	62,8	36 Orang	265.783.100,00	1,2	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
23.	1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	0 Orang	0	10 Orang	48.167.600	0 Orang	48.069.200	0	99,8	0 Orang	48.069.200,00	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
24.	1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	925 Orang	0	0 Orang	120.944.900	16 Orang	51.324.800	0 Orang	44.577.600	0	86,85	0 Orang	165.522.500,00	0	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
25.	1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	0	0 Orang	358.981.100	10 Orang	34.072.900	1 Orang	23.082.500	10	67,74	1 Orang	382.063.600,00	10	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
26.	1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	63 Orang	0	0 Orang	164.113.850	63 Orang	88.536.800	28 Orang	84.200.000	44,44	95,1	28 Orang	248.313.850,00	44,44	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
27.	1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	160 Orang	0	0 Orang	92.538.950	23 Orang	11.214.900	8 Orang	10.344.900	34,78	92,24	8 Orang	102.883.850,00	5	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
28.	1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	0	0 Orang	0	10 Orang	60.693.700	28 Orang	60.225.700	280	99,23	28 Orang	60.225.700,00	18,67	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Melebihi Target
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		54,22	86,25			11,33	0		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	84,59			100	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Persentase data PPKS yang valid**	**75%**	**0**	**0%**	**4.417.317.400**	**67%**	**2.515.651.537**	**67%**	**2.208.682.000**	**100**	**87,8**	**67%**	**2.208.682.000,00**	**89,33**	**0**		**Tercapai**
			Persentase PPKS yang terpenuhi perlindungan sosialnya	0%		0%		100%		100%		100		100,00%		0			Tercapai
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	persentase data fakir miskin yang terverifikasi	12089%	0	0%	4.417.317.400	1200%	2.515.651.537	1572%	2.208.682.000	131	87,8	1572%	2.208.682.000,00	13	0		Tercapai
			persentase keluarga miskin yang memiliki usaha ekonomi aktif	0%		0%		1%		0,44%		44		0%		0			Tidak Tercapai
29.	1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	1200 Keluarga	0	0 Keluarga	169.162.100	1200 Keluarga	119.071.000	727 Keluarga	117.744.000	60,58	98,89	727 Keluarga	286.906.100,00	60,58	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
30.	1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1200 Keluarga	0	0 Keluarga	4.092.210.000	1200 Keluarga	1.779.464.437	1002 Keluarga	1.474.922.500	83,5	82,89	1002 Keluarga	5.567.132.500,00	83,5	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
31.	1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	0	0 Orang	155.945.300	50 Orang	617.116.100	54 Orang	616.015.500	108	99,82	54 Orang	771.960.800,00	108	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		84,03	93,86			84,03	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		87,5	43,9			6,5	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

5.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana yang terpulihkan kembali**	**100%**	**0**	**100%**	**524.246.200**	**100%**	**566.993.600**	**100%**	**554.873.800**	**100**	**97,86**	**100%**	**554.873.800,00**	**100**	**0**		**Tercapai**
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	500 KK	0	0 KK	400.380.500	500 KK	249.804.800	58 KK	244.844.800	11,6	98,01	58 KK	645.225.300,00	11,6	0		Tidak Tercapai
32.	1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang	0	0 Orang	400.380.500	500 Orang	249.804.800	200 Orang	244.844.800	40	98,01	200 Orang	645.225.300,00	40	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	40	98,01			40	0		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase taruna siaga bencana (tagana) yang ikut berpartisipasi dalam Penanganan Bencana	100%	0	100%	123.865.700	100%	317.188.800	100%	310.029.000	100	97,74	100%	310.029.000,00	100	0		Tercapai
33.	1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	73 Orang	0	0 Orang	123.865.700	31 Orang	317.188.800	31 Orang	310.029.000	100	97,74	31 Orang	433.894.700,00	42,47	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,74			42,47	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	55,8	97,88			55,8	0		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
6.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase makam pahlawan dalam kondisi baik**	**100%**	**0**	**100%**	**49.300.000**	**100%**	**89.297.600**	**100%**	**84.916.800**	**100**	**95,09**	**100%**	**84.916.800,00**	**100**	**0**		**Tercapai**
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase taman makam pahlawan yang terpenuhi pemeliharaannya	100%	0	100%	49.300.000	100%	89.297.600	100%	84.916.800	100	95,09	100%	84.916.800,00	100	0		Tercapai
34.	1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Makam	0	1 Makam	0	1 Makam	89.297.600	1 Makam	84.916.800	100	95,09	2 Makam	84.916.800,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,09			200	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	95,09			100	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
7.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten**	**21.2 %**	**0**	**28.65 %**	**950.382.075**	**21.05 %**	**851.929.700**	**17%**	**778.859.124**	**80,76**	**91,42**	**17%**	**778.859.124,00**	**80,19**	**0**		**Tidak Tercapai**
			Persentase keterwakilan perempuan dalam jabatan pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi	2.64 %		0%		1.3 %		1,30%		100		1,30%		49,24			Tercapai
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang memiliki Focal Point dan anggaran Berbasis Gender	30 Lembaga Pemerintah	0	30 Lembaga Pemerintah	97.919.075	30 Lembaga Pemerintah	108.393.400	30 Lembaga Pemerintah	105.035.400	100	96,9	60 Lembaga Pemerintah	202.954.475,00	200	0		Tercapai
35.	2.08.02.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0	1 Dokumen	19.980.000	1 Dokumen	24.736.400	1 Dokumen	23.112.400	100	93,43	2 Dokumen	43.092.400,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
36.	2.08.02.2.01.03	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk Perencaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Perangkat Daerah	0	30 Perangkat Daerah	77.939.075	30 Perangkat Daerah	83.657.000	30 Perangkat Daerah	81.923.000	100	97,93	60 Perangkat Daerah	159.862.075,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,68			116,67	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perempuan yang diberdayakan dan terlibat dibidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi, pada organisasi kemasyarakatan	0 Orang	0	0 Orang	852.463.000	25 Orang	743.536.300	25 Orang	673.823.724	100	90,62	25 Orang	673.823.724,00	0	0		Tercapai
37.	2.08.02.2.02.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Organisasi	0	3 Organisasi	836.193.000	3 Organisasi	743.536.300	3 Organisasi	673.823.724	100	90,62	6 Organisasi	1.510.016.724,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	90,62			200	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	93,76			100	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
8.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan TPPO (Per 100,000 Penduduk Perempuan)**	**0 Nilai**	**0**	**17.4 Nilai**	**63.908.500**	**13.9 Nilai**	**72.244.400**	**6,63 Nilai**	**63.941.700**	**152,3**	**88,51**	**6.63 Nilai**	**63.941.700,00**	**0**	**0**		**Melebihi Target**
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	6 Dokumen	0	1 Dokumen	42.020.000	1 Dokumen	44.019.600	1 Dokumen	38.606.900	100	87,7	2 Dokumen	80.626.900,00	33,33	0		Tercapai
38.	2.08.03.2.01.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daera yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Perangkat Daerah	0	0 Perangkat Daerah	42.020.000	12 Perangkat Daerah	44.019.600	12 Perangkat Daerah	38.606.900	100	87,7	12 Perangkat Daerah	38.606.900,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	87,7			100	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang dirujuk	100%	0	100%	21.888.500	100%	28.224.800	100%	25.334.800	100	89,76	100%	25.334.800,00	100	0		Tercapai
39.	2.08.03.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	30 Orang	0	0 Orang	21.888.500	3 Orang	28.224.800	3 Orang	25.334.800	100	89,76	3 Orang	47.223.300,00	10	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	89,76			10	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	88,73			66,67	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
9.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun**	**13.86 %**	**0**	**0%**	**183.410.750**	**17.26 %**	**159.045.900**	**17,26%**	**158.815.900**	**100**	**99,86**	**17.26 %**	**158.815.900,00**	**75,47**	**0**		**Tercapai**
	2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Ketahanan Keluarga (Rata-rata)	65 Nilai	0	0 Nilai	117.502.750	61 Nilai	99.973.100	82,99 Nilai	99.793.100	136,05	99,82	82.99 Nilai	99.793.100,00	127,68	0		Melebihi Target
40.	2.08.04.2.01.03	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0	0 Dokumen	117.502.750	1 Dokumen	99.973.100	1 Dokumen	99.793.100	100	99,82	1 Dokumen	217.295.850,00	16,67	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,82			16,67	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	2.08.04.2.03	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan PUSPAGA	86%	0	94.72 %	65.908.000	79%	59.072.800	95,27%	59.022.800	120,59	99,92	95.27 %	59.022.800,00	110,78	0		Melebihi Target
41.	2.08.04.2.03.01	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	3 Layanan	0	3 Layanan	65.908.000	3 Layanan	59.072.800	3 Layanan	59.022.800	100	99,92	6 Layanan	124.930.800,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,92			200	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	128,32	99,87			119,23	0		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
10.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Jumlah orang yang dapat memanfaatkan data informasi tentang gender dan anak**	**30 Orang**	**0**	**30 Orang**	**91.466.416**	**30 Orang**	**62.182.400**	**30 Orang**	**58.739.200**	**100**	**94,46**	**60 Orang**	**150.205.616,00**	**200**	**0**		**Tercapai**
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah profil gender dan anak yang dipublikasikan	6 Dokumen	0	1 Dokumen	91.466.416	1 Dokumen	62.182.400	1 Dokumen	58.739.200	100	94,46	2 Dokumen	150.205.616,00	33,33	0		Tercapai
42.	2.08.05.2.01.01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	6 Dokumen	0	1 Dokumen	60.786.416	1 Dokumen	34.959.200	1 Dokumen	34.739.200	100	99,37	2 Dokumen	95.525.616,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
43.	2.08.05.2.01.02	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0	1 Dokumen	30.680.000	1 Dokumen	27.223.200	1 Dokumen	24.000.000	100	88,16	2 Dokumen	54.680.000,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	93,77			33,33	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	94,46			33,33	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
11.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Nilai Kabupaten Layak Anak**	**680 Nilai**	**0**	**0 Nilai**	**250.013.672**	**655 Nilai**	**157.283.200**	**655 Nilai**	**153.643.600**	**100**	**97,69**	**655 Nilai**	**153.643.600,00**	**96,32**	**0**		**Tercapai**
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga (pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha) yang memberikan pelayanan Pemenuhan Hak Anak	100%	0	100%	100.419.772	100%	89.531.200	100%	88.241.200	100	98,56	100%	88.241.200,00	100	0		Tercapai
44.	2.08.06.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	6 Organisasi	0	0 Organisasi	74.931.022	6 Organisasi	89.531.200	6 Organisasi	88.241.200	100	98,56	6 Organisasi	163.172.222,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,56			100	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang mendapat penguatan	100%	0	100%	149.593.900	100%	67.752.000	100%	65.402.400	100	96,53	100%	65.402.400,00	100	0		Tercapai
45.	2.08.06.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0	1 Dokumen	100.727.900	1 Dokumen	51.836.000	1 Dokumen	50.756.000	100	97,92	2 Dokumen	151.483.900,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
46.	2.08.06.2.02.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0	1 Dokumen	14.021.000	1 Dokumen	15.916.000	1 Dokumen	14.646.400	100	92,02	2 Dokumen	28.667.400,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	94,97			33,33	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	97,55			100	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
12.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase Anak Korban Kekerasan yang ditangani**	**100%**	**0**	**100%**	**112.006.950**	**100%**	**90.027.200**	**100%**	**73.124.874**	**100**	**81,23**	**100%**	**73.124.874,00**	**100**	**0**		**Tercapai**
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah media massa yang bekerja sama dengan perangkat daerah untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak	13 Buah	0	1 Buah	17.080.000	1 Buah	17.346.400	1 Buah	17.346.400	100	100	1 Buah	17.346.400,00	7,69	0		Tercapai
47.	2.08.07.2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Perangkat Daerah	0	1 Perangkat Daerah	17.080.000	1 Perangkat Daerah	17.346.400	1 Perangkat Daerah	17.346.400	100	100	2 Perangkat Daerah	34.426.400,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			200	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan yang telah memiliki standar pelayanan minimal	4 Lembaga	0	4 Lembaga	51.936.850	4 Lembaga	62.404.400	4 Lembaga	45.502.074	100	72,91	8 Lembaga	97.438.924,00	200	0		Tercapai
48.	2.08.07.2.02.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang	0	0 Orang	51.936.850	10 Orang	62.404.400	6 Orang	45.502.074	60	72,91	6 Orang	97.438.924,00	15	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	60	72,91			15	0		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan pelatihan	1 Lembaga	0	1 Lembaga	42.990.100	1 Lembaga	10.276.400	1 Lembaga	10.276.400	100	100	2 Lembaga	53.266.500,00	200	0		Tercapai
49.	2.08.07.2.03.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	6 Dokumen	0	1 Dokumen	42.990.100	1 Dokumen	10.276.400	1 Dokumen	10.276.400	100	100	2 Dokumen	53.266.500,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			33,33	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	90,97			135,9	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
13.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Persentase kerjasama desa yang teriimplementasi**	**20%**	**0**	**3.26 %**	**2.347.729.475**	**3.26 %**	**9.075.229.800**	**3,26%**	**8.082.165.615**	**100**	**89,06**	**3.26 %**	**8.082.165.615,00**	**16,3**	**0**		**Tercapai**
	2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Persentase desa yang memiliki MoU/kerjasama	100%	0	20%	2.347.729.475	20%	9.075.229.800	20%	8.082.165.615	100	89,06	20%	8.082.165.615,00	20	0		Tercapai
50.	2.13.03.2.01.03	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	0	1 Dokumen	162.179.400	1 Dokumen	9.075.229.800	1 Dokumen	8.082.165.615	100	89,06	2 Dokumen	8.244.345.015,00	40	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	89,06			40	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	89,06			20	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
14.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**100%**	**0**	**0%**	**2.255.339.164**	**80%**	**8.011.038.500**	**80%**	**7.686.172.900**	**100**	**95,94**	**80%**	**7.686.172.900,00**	**80**	**0**		**Tercapai**
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase SDM pemerintah desa yang kompeten	100%	0	0%	2.255.339.164	30%	8.011.038.500	30%	7.686.172.900	100	95,94	30%	7.686.172.900,00	30	0		Tercapai
			Persentase Desa yang memiliki laporan penyelenggaraan desa yang baik	0%		80%		85%		85%		100		85%		inf			Tercapai
51.	2.13.04.2.01.01	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	154 Dokumen	0	154 Dokumen	1.402.909.420	154 Dokumen	5.056.128.000	154 Dokumen	5.013.414.000	100	99,16	308 Dokumen	6.416.323.420,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
52.	2.13.04.2.01.02	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	154 Dokumen	0	154 Dokumen	31.985.400	154 Dokumen	34.008.000	154 Dokumen	33.754.800	100	99,26	308 Dokumen	65.740.200,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
53.	2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	154 Dokumen	0	154 Dokumen	160.827.600	154 Dokumen	179.984.800	154 Dokumen	179.584.800	100	99,78	308 Dokumen	340.412.400,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
54.	2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	4 Dokumen	0	4 Dokumen	463.720.800	4 Dokumen	440.339.600	4 Dokumen	431.609.600	100	98,02	8 Dokumen	895.330.400,00	200	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
55.	2.13.04.2.01.09	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	1 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	1.391.084.800	1 Laporan	1.186.607.200	100	85,3	1 Laporan	1.186.607.200,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
56.	2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	1 Laporan	0	0 Laporan	0	1 Laporan	175.516.400	1 Laporan	125.938.400	100	71,75	1 Laporan	125.938.400,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
57.	2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	2 Dokumen	0	0 Dokumen	65.143.600	2 Dokumen	51.634.800	2 Dokumen	43.834.800	100	84,89	2 Dokumen	108.978.400,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
58.	2.13.04.2.01.15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	153 Desa	0	0 Desa	0	25 Desa	659.342.100	71 Desa	656.429.300	284	99,56	71 Desa	656.429.300,00	46,41	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Melebihi Target
59.	2.13.04.2.01.18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	9 Dokumen	0	0 Dokumen	61.076.000	9 Dokumen	23.000.000	9 Dokumen	15.000.000	100	65,22	9 Dokumen	76.076.000,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	120,44	89,21			138,49	0		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	47,97			15	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
15.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase Desa yang memiliki pemberdayaan aktif**	**70%**	**0**	**0%**	**3.064.058.588**	**50%**	**4.685.312.300**	**50%**	**4.438.765.391**	**100**	**94,74**	**50%**	**4.438.765.391,00**	**71,43**	**0**		**Tercapai**
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LKD yang kompeten	60%	0	0%	3.064.058.588	60%	4.685.312.300	60%	4.438.765.391	100	94,74	60%	4.438.765.391,00	100	0		Tercapai
			Jumlah desa yang memiliki pengembangan usaha ekonomi	50 Desa		0 Desa		27 Desa		27 Desa		100		27 Desa		54			Tercapai
60.	2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1 Lembaga	0	0 Lembaga	396.709.495	1 Lembaga	675.734.300	1 Lembaga	672.871.841	100	99,58	1 Lembaga	1.069.581.336,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
61.	2.13.05.2.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	6 Dokumen	0	1 Dokumen	904.933.955	1 Dokumen	2.188.944.300	1 Dokumen	2.037.034.300	100	93,06	2 Dokumen	2.941.968.255,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
62.	2.13.05.2.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	6 Laporan	0	1 Laporan	119.937.000	1 Laporan	94.627.000	1 Laporan	87.357.000	100	92,32	2 Laporan	207.294.000,00	33,33	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
63.	2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen	0	5 Dokumen	1.642.478.138	5 Dokumen	1.726.006.700	5 Dokumen	1.641.502.250	100	95,1	5 Dokumen	1.641.502.250,00	100	0	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,01			66,67	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	92,22	47,37			50	0		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	81,96	81,88			66,86	354,19		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Program)	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**97,71**	**93,07**			**84,94**	**1,55**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Tinggi**	**Sangat Rendah**		
									44.152.753.567		**41.092.589.073**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		"																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		"																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		"																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip SKPD**	**70 angka**	**88.436.663.037**	**78.27 angka**	**20.448.024.431**	**66 angka**	**23.410.019.073**	**72,85 angka**	**20.634.094.021**	**110,38**	**88,14**	**72.85 angka**	**20.634.094.021,00**	**104,07**	**23,33**		**Melebihi Target**
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penggganggaran dan evaluasi kinerja	13 Dokumen	414.825.336	2 Dokumen	26.310.300	2 Dokumen	189.284.000	2 Dokumen	156.111.750	100	82,47	4 Dokumen	182.422.050,00	30,77	43,98		Tercapai
1.	1.03.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	13 dok	214.825.336	3 dok	26.310.300	2 dok	96.248.000	2 dok	77.936.050	100	80,97	5 dok	104.246.350,00	38,46	48,53	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai

2.	1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	8 dok	200.000.000	0 dok	0	2 dok	93.036.000	2 dok	78.175.700	100	84,03	2 dok	78.175.700,00	25	39,09	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	82,5			31,73	43,81		Tercapai
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Administrasi Pembayaran Gaji PNS dan Laporan Keuangan	74 bulan	52.357.786.861	12 bulan	7.457.348.353	14 bulan	10.658.932.023	14 bulan	9.922.090.326	100	93,09	26 bulan	17.379.438.679,00	35,14	33,19		Tercapai
3.	1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	250 orang	51.310.625.167	56 orang	7.322.990.477	64 orang	9.995.910.111	64 orang	9.421.031.156	100	94,25	120 orang	16.744.021.633,00	48	32,63	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
4.	1.03.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	60 dok	205.003.856	12 dok	4.041.576	12 dok	20.501.912	12 dok	10.306.071	100	50,27	24 dok	14.347.647,00	40	7	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
5.	1.03.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	20 laporan	842.157.838	5 laporan	130.316.300	3 laporan	642.520.000	3 laporan	490.753.099	100	76,38	8 laporan	621.069.399,00	40	73,75	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	73,63			42,67	37,79		Tercapai
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan disiplin aparatur	100 Persen	2.447.514.686	100 Persen	927.243.310	100 Persen	594.399.000	100 Persen	462.749.543	100	77,85	200 Persen	1.389.992.853,00	200	56,79		Tercapai
6.	1.03.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	15 lembar	552.500.000	3 lembar	324.181.000	180 lembar	58.500.000	180 lembar	46.880.000	100	80,14	183 lembar	371.061.000,00	1.220,00	67,16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
7.	1.03.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	273 orang	1.895.014.686	78 orang	603.062.310	76 orang	535.899.000	53 orang	415.869.543	69,74	77,6	131 orang	1.018.931.853,00	47,99	53,77	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			84,87	78,87			633,99	60,46		Tidak Tercapai
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi perangkat daerah yang dilaksanakan	100 persen	8.742.105.459	100 persen	2.158.194.831	100 persen	2.368.842.100	100 persen	1.889.965.119	100	79,78	200 persen	4.048.159.950,00	200	46,31		Tercapai
8.	1.03.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18 paket	115.798.095	11 paket	985.993.241	15 paket	595.627.600	15 paket	475.654.000	100	79,86	26 paket	1.461.647.241,00	144,44	1.262,24	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
9.	1.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	64 paket	314.787.400	4 paket	46.762.000	600 paket	164.760.000	600 paket	157.942.000	100	95,86	604 paket	204.704.000,00	943,75	65,03	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
10.	1.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	64 paket	1.809.884.209	14 paket	214.512.900	12 paket	500.558.500	12 paket	240.477.400	100	48,04	26 paket	454.990.300,00	40,63	25,14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
11.	1.03.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	64 eks	83.661.200	12 eks	9.480.000	12 eks	24.400.000	12 eks	15.200.000	100	62,3	24 eks	24.680.000,00	37,5	29,5	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
12.	1.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	64 laporan	6.417.974.555	12 laporan	901.446.690	12 laporan	1.083.496.000	12 laporan	1.000.691.719	100	92,36	24 laporan	1.902.138.409,00	37,5	29,64	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	75,68			240,76	282,31		Tercapai
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	14.300.000.000	100 Persen	8.261.164.000	100 Persen	5.838.167.800	100 Persen	5.331.602.000	100	91,32	200 Persen	13.592.766.000,00	200	95,05		Tercapai
13.	1.03.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang disediakan	15 unit	3.500.000.000	11 unit	2.493.914.000	1 unit	550.000.000	1 unit	506.100.000	100	92,02	12 unit	3.000.014.000,00	80	85,71	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
14.	1.03.01.2.07.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah unit alat besar yang disediakan	5 unit	10.000.000.000	3 unit	5.750.000.000	3 unit	4.650.000.000	3 unit	4.513.070.000	100	97,06	6 unit	10.263.070.000,00	120	102,63	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
15.	1.03.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	6 Paket	800.000.000	1 Paket	17.250.000	4 Paket	319.083.900	4 Paket	0	100	0	5 Paket	17.250.000,00	83,33	2,16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	63,02			94,44	63,5		Tercapai
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Rendah		
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pelayanan, sarana dan prasarana SOPD	100 persen	6.083.383.632	100 persen	1.207.947.895	100 persen	1.881.986.900	100 persen	1.450.733.934	100	77,09	200 persen	2.658.681.829,00	200	43,7		Tercapai
16.	1.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	64 laporan	3.952.995.080	12 laporan	348.231.495	12 laporan	619.730.000	12 laporan	392.776.034	100	63,38	24 laporan	741.007.529,00	37,5	18,75	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
17.	1.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	64 laporan	2.130.388.552	12 laporan	859.716.400	12 laporan	1.262.256.900	12 laporan	1.057.957.900	100	83,81	24 laporan	1.917.674.300,00	37,5	90,02	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			100	73,6			37,5	54,38		
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Rendah		
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100 persen	4.091.047.063	100 persen	409.815.742	100 persen	1.878.407.250	100 persen	1.420.841.349	100	75,64	200 persen	1.830.657.091,00	200	44,75		Tercapai
18.	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	45 unit	2.601.873.229	9 unit	258.310.742	8 unit	654.257.450	8 unit	515.038.899	100	78,72	17 unit	773.349.641,00	37,78	29,72	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
19.	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	331.412.650	1 Paket	19.655.000	7 Paket	142.467.500	7 Paket	28.481.050	100	19,99	8 Paket	48.136.050,00	160	14,52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
20.	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Paket	1.157.761.184	1 Paket	131.850.000	4 Paket	1.081.682.300	3 Paket	877.321.400	75	81,11	4 Paket	1.009.171.400,00	80	87,17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
									Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)			91,67	59,94			92,59	43,8		Tidak Tercapai
									Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)			Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Pemeliharaan sarana dan prasarana SOPD	100 persen	4.091.047.063	100 persen	409.815.742	100 persen	1.878.407.250	100 persen	1.420.841.349	100	75,64	200 persen	1.830.657.091,00	200	44,75		Tercapai

21.	1.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	45 unit	2.601.873.229	9 unit	258.310.742	8 unit	654.257.450	8 unit	515.038.899	100	78,72	17 unit	773.349.641,00	37,78	29,72	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
22.	1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	5 Paket	331.412.650	1 Paket	19.655.000	7 Paket	142.467.500	7 Paket	28.481.050	100	19,99	8 Paket	48.136.050,00	160	14,52	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
23.	1.03.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5 Paket	1.157.761.184	1 Paket	131.850.000	4 Paket	1.081.682.300	3 Paket	877.321.400	75	81,11	4 Paket	1.009.171.400,00	80	87,17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		91,67	59,94			92,59	43,8		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	81,61			158,24	51,07		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
2.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**	**Persentase jaringan irigasi yang berfungsi baik**	**44.39 persen**	**74.953.388.720**	**30.43 persen**	**18.191.468.745**	**31.57 persen**	**51.186.460.100**	**51,6 persen**	**49.423.169.371**	**163,45**	**96,56**	**51.6 persen**	**49.423.169.371,00**	**116,24**	**65,94**		**Melebihi Target**
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tebing rusak	14.9 persen	40.018.589.720	13.68 persen	15.924.215.445	14.68 persen	33.251.550.400	6,3 persen	32.002.466.527	42,92	96,24	6.3 persen	32.002.466.527,00	42,28	79,97		Tercapai
24.	1.03.02.2.01.06	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang dibangun	20 buah	2.973.600.000	5 buah	870.967.000	19 buah	4.910.250.000	19 buah	4.409.171.500	100	89,8	24 buah	5.280.138.500,00	120	177,57	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
25.	1.03.02.2.01.10	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang bangunan perkuatan tebing yang dibangun	6799 meter	32.649.382.520	1612 meter	14.604.255.360	3420 meter	26.762.788.000	3420 meter	26.195.713.727	100	97,88	5032 meter	40.799.969.087,00	74,01	124,96	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
26.	1.03.02.2.01.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah pintu air/bendung pengendali banjir yang direhabilitasi	5 buah	620.000.000	1 buah	109.084.000	4 buah	1.155.120.000	4 buah	1.142.748.000	100	98,93	5 buah	1.251.832.000,00	100	201,91	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
27.	1.03.02.2.01.61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan dan pemberdayaan kelembagaan pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota	250 orang	3.775.607.200	50 orang	339.909.085	100 orang	423.392.400	100 orang	254.833.300	100	60,19	150 orang	594.742.385,00	60	15,75	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	86,7			88,5	130,05		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik	44.39 persen	34.934.799.000	30.43 persen	2.267.253.300	31.57 persen	17.934.909.700	51,6 persen	17.420.702.844	163,45	97,13	51.6 persen	17.420.702.844,00	116,24	49,87		Melebihi Target
28.	1.03.02.2.02.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan	4916 meter	23.780.280.000	500 meter	1.303.052.300	3480 meter	6.991.590.000	3401 meter	6.760.496.500	97,73	96,69	3901 meter	8.063.548.800,00	79,35	33,91	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
29.	1.03.02.2.02.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi	7455 meter	6.918.819.000	0 meter	0	3420 meter	5.717.980.000	3420 meter	5.601.571.000	100	97,96	3420 meter	5.601.571.000,00	45,88	80,96	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
30.	1.03.02.2.02.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	800 meter	4.235.700.000	400 meter	964.201.000	1320 meter	5.225.339.700	1320 meter	5.058.635.344	100	96,81	1720 meter	6.022.836.344,00	215	142,19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		99,24	97,16			113,41	85,69		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		103,18	96,69			79,26	64,92		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Rendah		
3.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase rumah tangga yang terakses air bersih layak**	**86.27 Persen**	**34.674.149.000**	**84.05 Persen**	**5.213.480.000**	**86.89 Persen**	**16.814.803.000**	**87,76 Persen**	**15.411.140.800**	**101**	**91,65**	**87.76 Persen**	**15.411.140.800,00**	**101,73**	**44,45**		**Melebihi Target**
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang terhubung dengan air perpipaan	31179 Rumah Tangga	34.674.149.000	31279 Rumah Tangga	5.213.480.000	100 Rumah Tangga	16.814.803.000	100 Rumah Tangga	15.411.140.800	100	91,65	100 Rumah Tangga	15.411.140.800,00	0,32	44,45		Tercapai
31.	1.03.03.2.01.05	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Peningkatan kapasitas SPAM IKK/perkotaan atau SPAM tematik tertentu	15000 liter/detik	6.568.500.000	0 liter/detik	0	5000 liter/detik	9.431.750.000	5000 liter/detik	8.396.140.800	100	89,02	5000 liter/detik	8.396.140.800,00	33,33	127,82	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
32.	1.03.03.2.01.19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perdesaan atau SPAM Tematik Tertentu	6075 SR	28.105.649.000	1006 SR	5.213.480.000	1257 SR	7.383.053.000	1257 SR	7.015.000.000	100	95,01	2263 SR	12.228.480.000,00	37,25	43,51	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,02			35,29	85,67		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	91,65			0,32	44,45		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**	**Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan yang baik**	**100 persen**	**2.500.000.000**	**0 persen**	**0**	**80 persen**	**1.924.500.000**	**80 persen**	**1.904.000.000**	**100**	**98,93**	**80 persen**	**1.904.000.000,00**	**80**	**76,16**		**Tercapai**
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pembangunan bangunan persampahan	100 Persen	2.500.000.000	0 Persen	0	80 Persen	1.924.500.000	80 Persen	1.904.000.000	100	98,93	80 Persen	1.904.000.000,00	80	76,16		Tercapai
33.	1.03.04.2.01.03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1500 RT	2.500.000.000	0 RT	0	600 RT	1.924.500.000	600 RT	1.904.000.000	100	98,93	600 RT	1.904.000.000,00	40	76,16	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,93			40	76,16		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	98,93			80	76,16		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Tinggi		
5.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi layak**	**96.76 Persen**	**22.317.610.000**	**98.85 Persen**	**10.808.310.513**	**99.98 Persen**	**13.071.528.400**	**98,75 Persen**	**12.365.652.698**	**98,77**	**94,6**	**98.75 Persen**	**12.365.652.698,00**	**102,06**	**55,41**		**Tidak Tercapai**
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang limbah domestik terkelola dengan baik	96.76 persen	22.317.610.000	98.85 persen	10.808.310.513	99.98 persen	13.071.528.400	98,75 persen	12.365.652.698	98,77	94,6	98.75 persen	12.365.652.698,00	102,06	55,41		Tidak Tercapai
34.	1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	2473 rumah tangga	20.334.930.000	786 rumah tangga	10.571.359.077	501 rumah tangga	12.712.786.000	501 rumah tangga	12.040.005.040	100	94,71	1287 rumah tangga	22.611.364.117,00	52,04	111,19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
35.	1.03.05.2.01.10	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah unit sistem pengelolaan air limbah domestik yang dioperasikan dan dipelihara	6 unit	1.982.680.000	1 unit	236.951.436	1 unit	358.742.400	1 unit	325.647.658	100	90,77	2 unit	562.599.094,00	33,33	28,38	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,74			42,69	69,79		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		98,77	94,6			102,06	55,41		Tidak Tercapai

											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
6.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan/gedung sesuai standart**	**89.93 Persen**	**76.956.890.158**	**90.11 Persen**	**26.104.750.842**	**89.6 Persen**	**99.969.547.000**	**92,34 Persen**	**77.758.936.401**	**103,06**	**77,78**	**92.34 Persen**	**77.758.936.401,00**	**102,68**	**101,04**		**Melebihi Target**
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase bangunan/gedung publik dalam kondisi baik	42 Persen	76.956.890.158	38 Persen	26.104.750.842	89.6 Persen	99.969.547.000	92,34 Persen	77.758.936.401	103,06	77,78	130.34 Persen	103.863.687.243,00	310,33	134,96		Melebihi Target
36.	1.03.08.2.01.02	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pemanfaatan bangunan gedung daerah Kabupaten/Kota	32 dok	59.893.014.703	15 dok	15.595.348.310	140 dok	50.200.144.600	125 dok	39.175.494.511	89,29	78,04	140 dok	54.770.842.821,00	437,5	91,45	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
37.	1.03.08.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan bangunan gedung negara daerah kabupaten/kota	64 dok	960.403.216	12 dok	161.654.236	12 dok	514.300.400	12 dok	436.854.000	100	84,94	24 dok	598.508.236,00	37,5	62,32	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
38.	1.03.08.2.01.12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah kabupaten/kota yang dilakukan rehabilitasi, renovasi dan ubah suai	10 buah	16.103.472.239	23 buah	10.347.748.296	32 buah	49.255.102.000	29 buah	38.146.587.890	90,63	77,45	52 buah	48.494.336.186,00	520	301,14	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	93,3	80,14			331,67	151,64		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	103,06	77,78			310,33	134,96		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
7.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Jumlah Bangunan yang ditata**	**5 buah**	**8.000.000.000**	**0 buah**	**0**	**6 buah**	**28.397.765.100**	**5 buah**	**23.756.599.821**	**83,33**	**83,66**	**5 buah**	**23.756.599.821,00**	**100**	**296,96**		**Tidak Tercapai**
	1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan yang ditata	5 Buah	8.000.000.000	0 Buah	0	6 Buah	28.397.765.100	5 Buah	23.756.599.821	83,33	83,66	5 Buah	23.756.599.821,00	100	296,96		Tidak Tercapai
39.	1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah pemeliharaan bangunan dan lingkungan dikawasan cagar budaya dan tradisional bersejarah, kawasan pariwisata, kawasan sistem perkotaan nasional dan kawasan strategis lainnya	5 buah	8.000.000.000	0 buah	0	24 buah	28.397.765.100	21 buah	23.756.599.821	87,5	83,66	21 buah	23.756.599.821,00	420	296,96	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	87,5	83,66			420	296,96		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	83,33	83,66			100	296,96		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
8.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Persentase kerusakan jalan**	**26.53 Persen**	**515.901.399.617**	**46.53 Persen**	**154.470.871.901**	**41.53 Persen**	**216.028.055.950**	**37,79 Persen**	**164.874.040.231**	**90,99**	**76,32**	**37.79 Persen**	**164.874.040.231,00**	**142,44**	**31,96**		**Tidak Tercapai**
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang Jalan yang diselenggarakan	270.68 KM	515.901.399.617	49.97 KM	154.470.871.901	21.75 KM	216.028.055.950	12 KM	164.874.040.231	55,17	76,32	61.97 KM	319.344.912.132,00	22,89	61,9		Tidak Tercapai
40.	1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang dilakukan rekonstruksi jalan	115.79 km	248.575.061.373	49.71 km	102.383.462.520	19 km	171.157.482.450	12 km	129.124.562.598	63,16	75,44	61,71 km	231.508.025.118,00	53,29	93,13	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
41.	1.03.10.2.01.09	Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang direhabilitasi	76.99 km	165.312.580.300	4.08 km	31.244.998.072	2 km	1.437.990.000	2 km	1.169.241.800	100	81,31	6,08 km	32.414.239.872,00	7,9	19,61	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
42.	1.03.10.2.01.11	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	4.5 km	3.640.332.640	0.25 km	253.148.160	0.5 km	1.400.066.000	0,25 km	403.267.000	50	28,8	0,5 km	656.415.160,00	11,11	18,03	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
43.	1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	742 meter	95.173.425.304	250 meter	19.353.198.149	400 meter	32.585.930.000	300 meter	25.905.848.335	75	79,5	550 meter	45.259.046.484,00	74,12	47,55	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
44.	1.03.10.2.01.18	Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan rehabilitasi	250 meter	1.550.000.000	24 meter	1.190.810.000	180 meter	9.194.180.000	170 meter	8.230.678.498	94,44	89,52	194 meter	9.421.488.498,00	77,6	607,84	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
45.	1.03.10.2.01.19	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang dilakukan pemeliharaan secara rutin	35 meter	1.650.000.000	5 meter	45.255.000	10 meter	252.407.500	5 meter	40.442.000	50	16,02	10 meter	85.697.000,00	28,57	5,19	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	72,1	61,77			42,1	131,89		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	55,17	76,32			22,89	61,9		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Rendah	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
9.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase jasa konstruksi yang terampil**	**60 Persen**	**18.511.549.440**	**0 Persen**	**147.784.382**	**20.8 Persen**	**4.942.696.000**	**19,8 Persen**	**3.854.690.296**	**95,19**	**77,99**	**19.8 Persen**	**3.854.690.296,00**	**33**	**20,82**		**Tidak Tercapai**
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tenaga terampil konstruksi yang bersertifikat	480 Orang	2.311.549.440	0 Orang	147.784.382	100 Orang	584.167.000	95 Orang	240.660.486	95	41,2	95 Orang	240.660.486,00	19,79	10,41		Tidak Tercapai
46.	1.03.11.2.01.06	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi jabatan operator dan teknisi atau analis yang tersertifikasi	480 orang	2.311.549.440	0 orang	147.784.382	100 orang	584.167.000	95 orang	240.660.486	95	41,2	95 orang	388.444.868,00	19,79	16,8	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	95	41,2			19,79	16,8		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai capaian SPM SIPJAKI Kab/Kota	100 angka	1.200.000.000	75 angka	0	85 angka	140.069.000	85 angka	48.360.440	100	34,53	85 angka	48.360.440,00	85	4,03		Tercapai
47.	1.03.11.2.02.01	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah laporan penyelenggaraan dukungan manajemen sistem informasi jasa konstruksi	6 laporan	1.200.000.000	0 laporan	0	2 laporan	140.069.000	2 laporan	48.360.440	100	34,53	2 laporan	48.360.440,00	33,33	4,03	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	34,53			33,33	4,03		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi	6 dokumen	15.000.000.000	0 dokumen	0	1 dokumen	4.218.460.000	1 dokumen	3.565.669.370	100	84,53	1 dokumen	3.565.669.370,00	16,67	23,77		Tercapai
48.	1.03.11.2.04.03	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	6 dok	15.000.000.000	0 dok	0	1 dok	4.218.460.000	1 dok	3.565.669.370	100	84,53	1 dok	3.565.669.370,00	16,67	23,77	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	84,53			16,67	23,77		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	98,33	53,42			40,49	12,74		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
10.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang**	**85 Persen**	**7.907.522.272**	**42 Persen**	**1.714.428.235**	**56 Persen**	**2.034.639.200**	**56 Persen**	**1.861.270.442**	**100**	**91,48**	**56 Persen**	**1.861.270.442,00**	**65,88**	**23,54**		**Tercapai**
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase kawasan yang memiliki RDTR	20 Persen	3.154.522.272	4 Persen	662.568.700	85 Persen	952.369.800	85 Persen	802.498.139	100	84,26	85 Persen	802.498.139,00	425	25,44		Tercapai
49.	1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan perda /perkada selain RTRW kabupaten/kota	8 dok	3.154.522.272	4 dok	662.568.700	6 dok	952.369.800	6 dok	802.498.139	100	84,26	10 dok	1.465.066.839,00	125	46,44	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	84,26			125	46,44		Tercapai

											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan persetujuan kesesuian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berusaha	15 dok	1.603.000.000	4 dok	486.773.916	1 dok	461.289.600	1 dok	457.682.026	100	99,22	1 dok	457.682.026,00	6,67	28,55		Tercapai
50.	1.03.12.2.03.02	Sistem Informasi Penataan Ruang	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Ruang	15 dok	1.603.000.000	4 dok	486.773.916	1 dok	461.289.600	1 dok	457.682.026	100	99,22	5 dok	944.455.942,00	33,33	58,92	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,22			33,33	58,92		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen substansi sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang	24 dok	3.150.000.000	3 dok	565.085.619	6 dok	620.979.800	6 dok	601.090.277	100	96,8	6 dok	601.090.277,00	25	19,08		Tercapai
51.	1.03.12.2.04.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan penataan ruang	10 dok	3.150.000.000	3 dok	565.085.619	6 dok	620.979.800	6 dok	601.090.277	100	96,8	9 dok	1.166.175.896,00	90	37,02	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,8			90	37,02		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	93,43			152,22	24,36		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
11.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni**	**100 persen**	**4.951.301.731**	**100 persen**	**739.010.100**	**100 persen**	**549.098.600**	**100 persen**	**504.397.385**	**100**	**91,86**	**200 persen**	**1.243.407.485,00**	**200**	**25,11**		**Tercapai**
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Data rumah layak huni yang rusak akibat korban bencana	5 dok	1.013.658.753	1 dok	147.746.100	1 dok	212.079.000	1 dok	207.420.260	100	97,8	2 dok	355.166.360,00	40	35,04		Tercapai
52.	1.04.02.2.01.01	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data rumah dilokasi rawan bencana dan lokasi yang berpotensi terkena relokasi program Kabupaten/Kota	5 dok	1.013.658.753	1 dok	147.746.100	1 dok	212.079.000	1 dok	207.420.260	100	97,8	2 dok	355.166.360,00	40	35,04	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,8			40	35,04		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah rusak akibat korban bencana yang telah direhab dan dibangun	77 unit	3.937.642.978	17 unit	591.264.000	8 unit	337.019.600	8 unit	296.977.125	100	88,12	25 unit	888.241.125,00	32,47	22,56		Tercapai
53.	1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi	51 unit	2.049.475.965	11 unit	293.951.000	5 unit	161.430.000	5 unit	137.910.000	100	85,43	16 unit	431.861.000,00	31,37	21,07	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
54.	1.04.02.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/kota yang terbangun	26 unit	1.888.167.013	6 unit	297.313.000	3 unit	175.589.600	3 unit	159.067.125	100	90,59	9 unit	456.380.125,00	34,62	24,17	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	88,01			32,99	22,62		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	92,96			36,23	28,8		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
12.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Luas kawasan kumuh yang tertangani**	**100 Ha**	**8.536.354.468**	**78.49 Ha**	**1.533.751.892**	**3 Ha**	**4.603.709.900**	**3 Ha**	**4.437.524.539**	**100**	**96,39**	**81.49 Ha**	**5.971.276.431,00**	**81,49**	**69,95**		**Tercapai**
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Luas kawasan kumuh yang tertangani	12.35 Ha	1.329.623.056	2.1 Ha	174.711.134	3 Ha	628.890.400	3 Ha	611.233.740	100	97,19	5.1 Ha	785.944.874,00	41,3	59,11		Tercapai
55.	1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	5 dok	1.329.623.056	1 dok	174.711.134	1 dok	628.890.400	1 dok	611.233.740	100	97,19	2 dok	785.944.874,00	40	59,11	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,19			40	59,11		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang tertangani	100 Persen	7.206.731.412	78.49 Persen	1.359.040.758	84.78 Persen	3.974.819.500	84,78 Persen	3.826.290.799	100	96,26	163.27 Persen	5.185.331.557,00	163,27	71,95		Tercapai
56.	1.04.03.2.03.03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah dokumen kesepakatan kerja sama dalam perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU	55 dok	7.206.731.412	6 dok	1.359.040.758	16 dok	3.974.819.500	16 dok	3.826.290.799	100	96,26	22 dok	5.185.331.557,00	40	71,95	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,26			40	71,95		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	96,73			102,28	65,53		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
13.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Persentase rumah tidak layak huni**	**0 Persen**	**13.843.979.706**	**0 Persen**	**2.320.522.700**	**5.02 Persen**	**5.712.487.700**	**4,98 Persen**	**5.653.921.211**	**99,2**	**98,97**	**4.98 Persen**	**7.974.443.911,00**	**0**	**57,6**		**Tidak Tercapai**
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tidak layak huni pulih kembali	1112 Unit	13.843.979.706	112 Unit	2.320.522.700	262 Unit	5.712.487.700	260 Unit	5.653.921.211	99,24	98,97	372 Unit	7.974.443.911,00	33,45	57,6		Tidak Tercapai
57.	1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	550 unit	13.843.979.706	112 unit	2.320.522.700	262 unit	5.712.487.700	260 unit	5.653.921.211	99,24	98,97	372 unit	7.974.443.911,00	67,64	57,6	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	99,24	98,97			67,64	57,6		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	99,24	98,97			33,45	57,6		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
14.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU**	**93 Persen**	**299.776.887.091**	**86.9 Persen**	**71.899.913.514**	**87 Persen**	**103.756.753.600**	**87,61 Persen**	**102.283.847.997**	**100,7**	**98,58**	**174.51 Persen**	**174.183.761.511,00**	**187,65**	**58,1**		**Melebihi Target**
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase kawasan yang memiliki PSU sesuai standar	93 Persen	299.776.887.091	86.9 Persen	71.899.913.514	87 Persen	103.756.753.600	87,61 Persen	102.283.847.997	100,7	98,58	174.51 Persen	174.183.761.511,00	187,65	58,1		Melebihi Target
58.	1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	5 dok	779.529.694	1 dok	123.915.000	1 dok	471.250.000	1 dok	468.576.000	100	99,43	2 dok	592.491.000,00	40	76,01	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
59.	1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan nyang disediakan PSU yang menunjang fungsi hunian	50 lokasi	298.997.357.397	20 lokasi	71.775.998.514	20 lokasi	103.285.503.600	20 lokasi	101.815.271.997	100	98,58	40 lokasi	173.591.270.511,00	80	58,06	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99			60	67,03		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	94,54	98,58			187,65	58,1		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	96,40	90,21			101,23	67,88		
											Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**96,95**	**84,68**			**115,71**	**94,8**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**572.402.063.623**		**484.723.285.213**						
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Anggaran tersedia, direspon positif oleh masyarakat penerima manfaat																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		'Waktu pelaksanaan abt singkat, Sudah memasuki perubahan cuaca sehingga pekerjaan sulit dilaksanakan sesuai rencana																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Pelaksanaan sebelum musim penghujan, tidak direkomendasikan adanya pekerjaaan abt dalam pelaksanaan infrastuktur yang sangat dipengaruhi oleh fluktuasi cuaca																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
1.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**	**Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja**	**30%**	**321.422.000**	**30%**	**117.699.208**	**100%**	**52.598.600**	**100%**	**46.528.500**	**100**	**88,46**	**100%**	**46.528.500,00**	**333,33**	**14,48**		**Tercapai**
	2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam RTK	70%	321.422.000	70%	117.699.208	80%	52.598.600	80%	46.528.500	100	88,46	80%	46.528.500,00	114,29	14,48		Tercapai
1.	2.07.02.2.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen	321.422.000	1 Dokumen	117.699.208	1 Dokumen	23.569.800	1 Dokumen	20.600.000	100	87,4	2 Dokumen	138.299.208,00	200	43,03	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
2.	2.07.02.2.01.02	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK Mikro	50 Perusahaan	0	0 Perusahaan	0	10 Perusahaan	29.028.800	10 Perusahaan	25.928.500	100	89,32	10 Perusahaan	25.928.500,00	20	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									100	88,36			110	21,51		Tercapai
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)									Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)									100	88,46			114,29	14,48		Tercapai
			Predikat Kinerja (Kegiatan)									Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang kompeten/ bersertifikat kompetensi**	**100%**	**36.715.697.734**	**26.33 %**	**2.453.616.799**	**65%**	**14.119.215.100**	**65%**	**13.847.971.207**	**100**	**98,08**	**65%**	**13.847.971.207,00**	**65**	**37,72**		**Tercapai**
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan Kualifikasi Klaster	100%	35.820.547.734	87.5 %	2.286.296.999	24%	3.430.970.100	97%	3.172.802.016	404,17	92,48	97%	3.172.802.016,00	97	8,86		Melebihi Target
3.	2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada Tahun N	1344 Orang	14.166.241.384	224 Orang	731.672.999	224 Orang	2.722.240.100	224 Orang	2.469.328.361	100	90,71	448 Orang	3.201.001.360,00	33,33	22,6	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
4.	2.07.03.2.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga	2.079.000.000	3 Lembaga	277.399.000	4 Lembaga	708.730.000	4 Lembaga	703.473.655	100	99,26	7 Lembaga	980.872.655,00	70	47,18	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									100	94,98			51,67	34,89		Tercapai
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPKS yang terakreditasi	100%	511.450.000	100%	90.844.200	100%	3.289.160.000	100%	3.282.927.968	100	99,81	100%	3.282.927.968,00	100	641,89		Tercapai
5.	2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS terakreditasi	10 LPK	511.450.000	2 LPK	90.844.200	2 LPK	3.289.160.000	2 LPK	3.282.927.968	100	99,81	4 LPK	3.373.772.168,00	40	659,65	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
			Jumlah LPKS yang Dibina	35 Lembaga		2 Lembaga		35 Lembaga		35 Lembaga		100		35		100			Tercapai
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									100	49,91			20	329,82		Tercapai
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)									Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas	100%	383.700.000	97.31 %	76.475.600	100%	95.085.000	100%	89.329.723	100	93,95	100%	89.329.723,00	100	23,28		Tercapai
6.	2.07.03.2.04.01	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	50 Perusahaan	383.700.000	10 Perusahaan	76.475.600	22 Perusahaan	95.085.000	22 Perusahaan	89.329.723	100	93,95	32 Perusahaan	165.805.323,00	64	43,21	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									100	93,95			64	43,21		Tercapai
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang diukur kompetensi dan produktivitasnya	3000 orang	0	0 orang	0	1220 orang	7.304.000.000	1212 orang	7.302.911.500	99,34	99,99	1212 orang	7.302.911.500,00	40,4	0		Tidak Tercapai
7.	2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	4 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	7.304.000.000	1 Dokumen	7.302.911.500	100	99,99	1 Dokumen	7.302.911.500,00	25	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									100	99,99			25	0		Tercapai
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
			Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)									175,88	96,55			84,35	168,51		Melebihi Target
			Predikat Kinerja (Kegiatan)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Tinggi		
3.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri**	**65%**	**1.357.872.500**	**65.71 %**	**218.652.404**	**65%**	**1.215.582.900**	**63,27%**	**1.211.502.771**	**97,34**	**99,66**	**63.27 %**	**1.211.502.771,00**	**97,34**	**89,22**		**Tidak Tercapai**
	2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan pelayanan Antar Kerja	100%	1.357.872.500	65.71 %	218.652.404	100%	1.087.193.600	100%	1.113.152.071	100	102,39	165.71 %	1.331.804.475,00	165,71	98,08		Tercapai
8.	2.07.04.2.01.02	Pelayanan antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui Layanan AKAD dan AKL	600 Orang	760.282.500	10 Orang	127.229.806	60 Orang	112.234.200	60 Orang	106.131.100	100	94,56	70 Orang	233.360.906,00	11,67	30,69	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
9.	2.07.04.2.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan jabatan	100 Orang	0	0 Orang	0	331 Orang	701.448.000	331 Orang	699.232.715	100	99,68	331 Orang	699.232.715,00	331	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
10.	2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja Disabilitas yang mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	25 Orang	298.195.000	5 Orang	33.690.800	5 Orang	27.500.800	5 Orang	21.589.100	100	78,5	10 Orang	55.279.900,00	40	18,54	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
11.	2.07.04.2.01.05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	100 Orang	299.395.000	20 Orang	57.731.798	40 Orang	246.010.600	40 Orang	286.199.156	100	116,34	60 Orang	343.930.954,00	60	114,88	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									100	97,27			110,67	41,03		Tercapai
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)									Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase LPTKS yang memiliki Izin/terdaftar di Kabupaten Balangan	100 LPTKS	0	0 LPTKS	0	100 LPTKS	11.428.800	100 LPTKS	2.750.000	100	24,06	100 LPTKS	2.750.000,00	100	0		Tercapai
12.	2.07.04.2.02.02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan pengawasan dan pengendalian sesuai dengan aturan yang berlaku	8 Lembaga	0	0 Lembaga	0	2 Lembaga	11.428.800	2 Lembaga	2.750.000	100	24,06	2 Lembaga	2.750.000,00	25	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									100	24,06			25	0		Tercapai
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)									Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase dokumen informasi pasar kerja	100%	0	0%	0	100%	97.379.300	25%	78.724.700	25	80,84	25%	78.724.700,00	25	0		Tidak Tercapai
13.	2.07.04.2.03.01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja Online	48 Dokumen	0	0 Dokumen	0	12 Dokumen	12.105.700	12 Dokumen	10.575.600	100	87,36	12 Dokumen	10.575.600,00	25	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
14.	2.07.04.2.03.03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	40 Orang	0	0 Orang	0	10 Orang	85.273.600	10 Orang	68.149.100	100	79,92	10 Orang	68.149.100,00	25	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
			Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)									100	83,64			25	0		Tercapai
			Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)									Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI/CPMI/Masyarakat yang mendapatkan layanan	100%	0	0%	0	100%	19.581.200	100%	16.876.000	100	86,18	100%	16.876.000,00	100	0		Tercapai

15.	2.07.04.2.04.01	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang dilindungi dan ditingkatkan kompetensinya	40 Orang	0	0 Orang	0	10 Orang	14.141.200	10 Orang	11.464.000	100	81,07	10 Orang	11.464.000,00	25	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
16.	2.07.04.2.04.03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang diberdayakan	60 Orang	0	0 Orang	0	0 Orang	5.440.000	0 Orang	5.412.000	0	99,49	0 Orang	5.412.000,00	0	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50	90,28			12,5	0		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		81,25	73,37			97,68	24,52		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase PPHI yang difasilitasi**	**100%**	**2.113.240.000**	**100%**	**350.253.585**	**100%**	**4.267.296.100**	**100%**	**4.105.114.992**	**100**	**96,2**	**100%**	**4.105.114.992,00**	**100**	**194,26**		**Tercapai**
			Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	100%	649.160.000	100%	107.885.679	100%	3.889.885.400	100%	3.732.068.003	100	95,94	100%	3.732.068.003,00	100	574,91		Tercapai
17.	2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	5 Laporan	649.160.000	1 Laporan	107.885.679	1 Laporan	3.889.885.400	1 Laporan	3.732.068.003	100	95,94	2 Laporan	3.839.953.682,00	40	591,53	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	95,94			40	591,53		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	100%	1.464.080.000	100%	242.367.906	100%	377.410.700	100%	373.046.989	100	98,84	100%	373.046.989,00	100	25,48		Tercapai
18.	2.07.05.2.02.01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	3 Perkara	1.241.850.000	3 Perkara	205.417.506	3 Perkara	195.145.000	3 Perkara	194.451.338	100	99,64	3 Perkara	194.451.338,00	100	15,66	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
19.	2.07.05.2.02.02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Teselesaikan	3 Perkara	222.230.000	3 Perkara	36.950.400	3 Perkara	16.690.000	3 Perkara	16.096.322	100	96,44	6 Perkara	53.046.722,00	0	23,87	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
20.	2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	4 Lembaga	0	0 Lembaga	0	1 Lembaga	165.575.700	1 Lembaga	162.499.329	100	98,14	1 Lembaga	162.499.329,00	25	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,08			41,67	13,18		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	97,39			100	300,19		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
5.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**75 (BB)**	**56.938.049.930**	**71.19 (BB)**	**8.859.841.297**	**71.2 (BB)**	**12.891.289.529**	**0 (BB)**	**12.505.385.993**	**0**	**97,01**	**0 (BB)**	**12.505.385.993,00**	**0**	**21,96**		**Tidak Tercapai**
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, pengganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	100%	614.483.748	100%	102.201.922	100%	149.601.800	100%	126.207.045	100	84,36	100%	126.207.045,00	100	20,54		Tercapai
21.	2.18.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	75.717.500	2 Dokumen	18.893.272	2 Dokumen	23.185.000	2 Dokumen	22.390.409	100	96,57	4 Dokumen	41.283.681,00	33,33	54,52	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
22.	2.18.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	82.886.621	1 Dokumen	12.830.000	1 Dokumen	17.185.000	1 Dokumen	13.919.000	100	81	2 Dokumen	26.749.000,00	33,33	32,27	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
23.	2.18.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6 Dokumen	61.106.925	1 Dokumen	7.784.800	1 Dokumen	17.635.000	1 Dokumen	16.893.000	100	95,79	2 Dokumen	24.677.800,00	33,33	40,38	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
24.	2.18.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	283.623.470	2 Laporan	38.143.000	2 Laporan	54.105.000	2 Laporan	49.773.833	100	91,99	4 Laporan	87.916.833,00	33,33	31	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
25.	2.18.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	36.322.654	2 Laporan	12.310.850	2 Laporan	37.491.800	2 Laporan	37.149.803	100	99,09	4 Laporan	49.460.653,00	200	136,17	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,89			66,67	58,87		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		Tercapai
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	100%	46.173.496.862	100%	6.540.074.413	100%	8.797.640.778	100%	8.483.381.911	100	96,43	100%	8.483.381.911,00	100	18,37		Tercapai
26.	2.18.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	44.075.162.928	43 Orang/Bulan	6.008.206.749	44 Orang/Bulan	7.331.662.778	42 Orang/Bulan	7.066.075.394	95,45	96,38	85 Orang/Bulan	13.074.282.143,00	170	29,66	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tidak Tercapai
27.	2.18.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	1.879.440.547	12 Dokumen	495.651.264	12 Dokumen	1.386.968.000	12 Dokumen	1.376.084.317	100	99,22	24 Dokumen	1.871.735.581,00	200	99,59	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
28.	2.18.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6 Dokumen	45.132.229	1 Dokumen	6.224.000	1 Dokumen	35.005.000	1 Dokumen	34.463.800	100	98,45	2 Dokumen	40.687.800,00	33,33	90,15	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
29.	2.18.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	50.882.229	1 Laporan	8.104.400	1 Laporan	44.005.000	1 Laporan	41.222.200	100	93,68	2 Laporan	49.326.600,00	33,33	96,94	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		98,86	96,93			109,17	79,09		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.292.534.702	100%	414.687.253	100%	351.932.500	100%	327.373.600	100	93,02	100%	327.373.600,00	100	25,33		Tercapai
30.	2.18.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	279.788.046	50 Paket	45.250.000	50 Paket	161.282.500	50 Paket	158.683.200	100	98,39	100 Paket	203.933.200,00	200	72,89	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai

31.	2.18.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	1.012.746.656	43 Orang	369.437.253	44 Orang	0	44 Orang	0	100	0	44 Orang	0	88	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	49,19			144	36,44		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Tercapai
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	100%	1.882.477.432	100%	552.480.436	100%	1.404.687.850	100%	1.346.101.123	100	95,83	100%	1.346.101.123,00	100	71,51		Tercapai
32.	2.18.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	133.673.497	1 Paket	20.205.400	1 Paket	45.639.100	1 Paket	45.639.100	100	100	2 Paket	65.844.500,00	200	49,26	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
33.	2.18.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	58.730.500	1 Paket	40.000.000	1 Paket	670.387.150	1 Paket	620.951.400	100	92,63	2 Paket	660.951.400,00	200	1.125,40	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
34.	2.18.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	242.175.477	1 Paket	71.138.100	1 Paket	76.471.100	1 Paket	74.244.700	100	97,09	2 Paket	145.382.800,00	200	60,03	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
35.	2.18.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	1 Dokumen	26.110.400	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	100	0	2 Dokumen	4.000.000,00	200	15,32	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
36.	2.18.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600 Laporan	1.421.787.558	75 Laporan	417.136.936	75 Laporan	592.324.200	75 Laporan	585.399.623	100	98,83	150 Laporan	1.002.536.559,00	25	70,51	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	77,71			165	264,1		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		Tercapai
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang yang terpenuhi	100%	0	100%	0	100%	111.446.200	100%	223.706.200	100	200,73	100%	223.706.200,00	100	0		Tercapai
37.	2.18.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	10 Unit	0	0 Unit	0	7 Unit	43.000.000	7 Unit	155.260.000	100	361,07	7 Unit	155.260.000,00	70	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
38.	2.18.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	68.446.200	2 Unit	68.446.200	100	100	2 Unit	68.446.200,00	20	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	230,53			45	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	4.339.973.704	12 Bulan	764.898.997	12 Bulan	923.333.501	12 Bulan	880.570.973	100	95,37	12 Bulan	880.570.973,00	16,67	20,29		Tercapai
39.	2.18.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	2.377.165.455	12 Laporan	355.561.497	12 Laporan	412.196.401	12 Laporan	373.903.873	100	90,71	24 Laporan	729.465.370,00	33,33	30,69	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
40.	2.18.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1.962.808.249	12 Laporan	409.337.500	12 Laporan	511.137.100	12 Laporan	506.667.100	100	99,13	24 Laporan	916.004.600,00	33,33	46,67	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	94,92			33,33	38,68		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	2.635.083.482	12 Bulan	485.498.276	12 Bulan	1.152.646.900	12 Bulan	1.118.045.141	100	97	12 Bulan	1.118.045.141,00	16,67	42,43		Tercapai
41.	2.18.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit	2.055.726.088	31 Unit	377.258.276	31 Unit	395.596.900	33 Unit	375.717.363	106,45	94,97	64 Unit	752.975.639,00	206,45	36,63	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
42.	2.18.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	579.357.394	2 Unit	108.240.000	2 Unit	757.050.000	2 Unit	742.327.778	100	98,06	4 Unit	850.567.778,00	200	146,81	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		103,23	96,52			203,23	91,72		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	108,96			76,19	28,35		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**	**Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota**	**100%**	**658.776.107**	**100%**	**49.305.880**	**100%**	**195.951.400**	**25%**	**157.785.291**	**25**	**80,52**	**125%**	**207.091.171,00**	**125**	**31,44**		**Tidak Tercapai**
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	1 Dokumen	280.374.381	1 Dokumen	29.288.680	1 Dokumen	55.902.400	0 Dokumen	39.752.091	0	71,11	1 Dokumen	69.040.771,00	100	24,62		Tidak Tercapai
			PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		0 Dokumen		0		0 Dokumen		0			Tidak Tercapai
			Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	6 Dokumen		0 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen		100		1 Dokumen		16,67			Tercapai
43.	2.18.02.2.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	6 Dokumen	280.374.381	0 Dokumen	29.288.680	1 Dokumen	6.859.600	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	29.288.680,00	0	10,45	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tidak Tercapai
44.	2.18.02.2.01.02	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	25 Kegiatan Usaha	0	25 Kegiatan Usaha	0	25 Kegiatan Usaha	49.042.800	25 Kegiatan Usaha	39.752.091	100	81,06	50 Kegiatan Usaha	39.752.091,00	200	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50	40,53			100	5,22		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen Peta Potensi	378.401.726	0 Dokumen Peta Potensi	20.017.200	1 Dokumen Peta Potensi	140.049.000	1 Dokumen Peta Potensi	118.033.200	100	84,28	1 Dokumen Peta Potensi	138.050.400,00	100	36,48		Tercapai
45.	2.18.02.2.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	294.863.750	0 Dokumen	7.420.000	1 Dokumen	7.510.000	0 Dokumen	0	0	0	0 Dokumen	7.420.000,00	0	2,52	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tidak Tercapai
46.	2.18.02.2.02.02	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	1 Dokumen	83.537.976	0 Dokumen	12.597.200	1 Dokumen	132.539.000	1 Dokumen	118.033.200	100	89,06	1 Dokumen	130.630.400,00	100	156,37	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		50	44,53			50	79,44		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		50	38,85			50	15,28		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
7.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**	**Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi**	**1100000000000 Rupiah**	**385.511.643**	**443424000000 Rupiah**	**262.450.510**	**210000000000 Rupiah**	**3.639.849.000**	**417359000000 Rupiah**	**3.437.896.150**	**1.987,42**	**94,45**	**4617014000000 Rupiah**	**3.700.346.660,00**	**419,73**	**959,85**		**Tercapai**
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan pameran penanaman modal	5 Kegiatan	385.511.643	1 Kegiatan	262.450.510	1 Kegiatan	3.639.849.000	1 Kegiatan	3.437.896.150	100	94,45	2 Kegiatan	3.700.346.660,00	40	959,85		Tercapai

			Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	10 Kegiatan		1 Kegiatan		2 Kegiatan		0 Kegiatan		0		0 Kegiatan		0			Tidak Tercapai
47.	2.18.03.2.01.01	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	97.788.603	1 Dokumen	12.362.300	1 Dokumen	127.758.000	1 Dokumen	123.832.180	100	96,93	2 Dokumen	136.194.480,00	200	139,27	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
48.	2.18.03.2.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	1 Dokumen	287.723.040	1 Dokumen	250.088.210	2 Dokumen	3.512.091.000	2 Dokumen	3.314.063.970	100	94,36	3 Dokumen	3.564.152.180,00	300	1.238,74	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	95,64			250	689,01		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		50	47,23			20	479,93		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
8.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP**	**100%**	**812.187.224**	**100%**	**130.326.000**	**100%**	**617.437.750**	**100%**	**600.643.099**	**100**	**97,28**	**100%**	**600.643.099,00**	**100**	**73,95**		**Tercapai**
			Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%		100%		100%		100%		100		100,00%		100			Tercapai
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	12 Kegiatan	812.187.224	12 Kegiatan	130.326.000	72 Kegiatan	617.437.750	78 Kegiatan	600.643.099	108,33	97,28	90 Kegiatan	730.969.099,00	750	90		Tercapai
			Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	700 Izin		673 Izin		700 Izin		572 Izin		81,71		572 Izin		81,71			Tidak Tercapai
49.	2.18.04.2.01.01	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	700 Pelaku Usaha	82.222.700	673 Pelaku Usaha	14.000.000	700 Pelaku Usaha	213.337.050	572 Pelaku Usaha	198.768.709	81,71	93,17	1245 Pelaku Usaha	212.768.709,00	177,86	258,77	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tidak Tercapai
50.	2.18.04.2.01.02	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	700 Kegiatan Usaha	137.438.599	673 Kegiatan Usaha	22.490.000	700 Kegiatan Usaha	20.248.400	572 Kegiatan Usaha	19.256.400	81,71	95,1	1245 Kegiatan Usaha	41.746.400,00	177,86	30,37	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tidak Tercapai
51.	2.18.04.2.01.03	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	100 Orang	332.591.365	76 Orang	49.090.000	100 Orang	334.084.800	78 Orang	333.114.990	78	99,71	154 Orang	382.204.990,00	154	114,92	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tidak Tercapai
52.	2.18.04.2.01.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	700 Kegiatan Usaha	259.934.560	673 Kegiatan Usaha	44.746.000	700 Kegiatan Usaha	49.767.500	572 Kegiatan Usaha	49.503.000	81,71	99,47	1245 Kegiatan Usaha	94.249.000,00	177,86	36,26	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		80,79	96,86			171,89	110,08		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		95,02	48,64			375	45		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
9.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**	**Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**	**100%**	**813.196.532**	**100%**	**319.573.200**	**100%**	**535.380.800**	**25%**	**397.844.366**	**25**	**74,31**	**25%**	**397.844.366,00**	**25**	**48,92**		**Tidak Tercapai**
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan realisasi penanaman modal	24 Laporan	813.196.532	4 Laporan	319.573.200	4 Laporan	535.380.800	4 Laporan	397.844.366	100	74,31	8 Laporan	717.417.566,00	33,33	88,22		Tercapai
53.	2.18.05.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Kegiatan Usaha	105.968.781	25 Kegiatan Usaha	13.665.200	35 Kegiatan Usaha	14.486.400	41 Kegiatan Usaha	13.816.400	117,14	95,37	66 Kegiatan Usaha	27.481.600,00	264	25,93	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Melebihi Target
54.	2.18.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	25 Pelaku Usaha	391.984.368	25 Pelaku Usaha	237.005.100	300 Pelaku Usaha	395.735.600	323 Pelaku Usaha	283.021.851	107,67	71,52	348 Pelaku Usaha	520.026.951,00	1.392,00	132,67	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Melebihi Target
55.	2.18.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	25 Kegiatan Usaha	315.243.383	25 Kegiatan Usaha	68.902.900	35 Kegiatan Usaha	125.158.800	41 Kegiatan Usaha	101.006.115	117,14	80,7	66 Kegiatan Usaha	169.909.015,00	264	53,9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Melebihi Target
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		113,98	82,53			640	70,83		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	74,31			33,33	88,22		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi		
10.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal**	**100%**	**810.737.720**	**100%**	**142.522.203**	**100%**	**406.463.400**	**100%**	**401.328.145**	**100**	**98,74**	**100%**	**401.328.145,00**	**100**	**49,5**		**Tercapai**
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Updating Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	810.737.720	100%	142.522.203	100%	406.463.400	100%	401.328.145	100	98,74	100%	401.328.145,00	100	49,5		Tercapai
56.	2.18.06.2.01.01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	6 Dokumen	810.737.720	6 Dokumen	142.522.203	6 Dokumen	406.463.400	6 Dokumen	401.328.145	100	98,74	12 Dokumen	543.850.348,00	200	67,08	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,74			200	67,08		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	98,74			100	49,5		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Tercapai
11.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase warga transmigrasi yang terampil**	**100%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**112.275.500**	**100%**	**110.759.893**	**100**	**98,65**	**100%**	**110.759.893,00**	**100**	**0**		**Tercapai**
	3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga transmigrasi yang terampil	80 Orang	0	0 Orang	0	20 Orang	112.275.500	20 Orang	110.759.893	100	98,65	20 Orang	110.759.893,00	25	0		Tercapai
57.	3.32.03.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan inkronisasi kerja sama pembangunan transmigran yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	0	1 Laporan	0	1 Laporan	14.985.000	1 Laporan	14.298.000	100	95,42	2 Laporan	14.298.000,00	200	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
58.	3.32.03.2.01.02	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	97.290.500	1 Dokumen	96.461.893	100	99,15	2 Dokumen	96.461.893,00	200	0	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	97,28			200	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	98,65			25	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Tercapai
12.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Persentase lahan usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi**	**19.5 %**	**1.751.681.400**	**18.84 %**	**223.711.400**	**19.05 %**	**200.142.600**	**18,84%**	**197.762.700**	**98,9**	**98,81**	**18.84 %**	**197.762.700,00**	**96,62**	**11,29**		**Tidak Tercapai**
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah satuan permukiman yang dibina	1 Satuan Permukiman	1.751.681.400	1 Satuan Permukiman	223.711.400	1 Satuan Permukiman	200.142.600	1 Satuan Permukiman	197.762.700	100	98,81	2 Satuan Permukiman	421.474.100,00	200	24,06		Tercapai
59.	3.32.04.2.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang dibina	54 Kepala Keluarga	116.347.400	54 Kepala Keluarga	49.003.000	54 Kepala Keluarga	15.132.600	54 Kepala Keluarga	14.435.700	100	95,39	108 Kepala Keluarga	63.438.700,00	200	54,53	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai

60.	3.32.04.2.01.02	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Pemukiman yang dikembangkan dalam rangka penguatan infrastruktur sosial, ekonomi dan kelembagaan	1 Satuan Pemukiman	1.635.334.000	1 Satuan Pemukiman	174.708.400	1 Satuan Pemukiman	185.010.000	1 Satuan Pemukiman	183.327.000	100	99,09	2 Satuan Pemukiman	358.035.400,00	200	21,89	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	97,24			200	38,21		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		97,29	98,81			200	24,06		
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		216,69	93,98			111,57	109,47		
										Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**94,11**	**96,78**			**133,56**	**103,66**		
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**		
								Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**38.253.482.679**		**37.020.523.107**								

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76.6 Nilai**	**19.100.519.175**	**67.93 Nilai**	**3.610.034.247**	**73.8 Nilai**	**5.141.468.006**	**73,8 Nilai**	**4.769.521.388**	**100**	**92,77**	**73.8 Nilai**	**4.769.521.388,00**	**96,34**	**24,97**		**Tercapai**
			Nilai IKM Perangkat Daerah	88 Nilai		80.58 Nilai		84.7 Nilai		84,7 Nilai		100		165,28 Nilai		187,82			Tercapai
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	439.727.400	100%	87.705.600	100%	162.987.900	100%	162.288.600	100	99,57	100%	162.288.600,00	100	36,91		Tercapai
1.	8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	279.314.000	2 Dokumen	71.939.700	2 Dokumen	105.256.000	2 Dokumen	104.736.000	100	99,51	4 Dokumen	176.675.700,00	30,77	63,25	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
2.	8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	18.950.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	8.933.200	2 Dokumen	8.933.200	100	100	4 Dokumen	8.933.200,00	33,33	47,14	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
3.	8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DKA-SKPD	12 Dokumen	18.950.000	2 Dokumen	0	2 Dokumen	3.384.600	2 Dokumen	3.384.600	100	100	4 Dokumen	3.384.600,00	33,33	17,86	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
4.	8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	122.513.400	2 Laporan	15.765.900	2 Laporan	45.414.100	2 Laporan	45.234.800	100	99,61	4 Laporan	61.000.700,00	33,33	49,79	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	99,78			32,69	44,51		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	14.926.963.625	100%	2.462.657.019	100%	3.414.718.306	100%	3.096.946.653	100	90,69	100%	3.096.946.653,00	100	20,75		Tercapai
5.	8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang	14.657.918.925	17 Orang	2.396.178.319	17 Orang	3.318.640.306	17 Orang	3.001.457.643	100	90,44	17 Orang	3.001.457.643,00	100	20,48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
6.	8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6 Laporan	13.345.500	1 Laporan	1.162.000	1 Laporan	1.739.500	1 Laporan	1.739.500	100	100	2 Laporan	2.901.500,00	33,33	21,74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
7.	8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	108 Laporan	255.699.200	18 Laporan	65.316.700	18 Laporan	94.338.500	18 Laporan	93.749.510	100	99,38	36 Laporan	159.066.210,00	33,33	62,21	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	96,61			55,56	34,81		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Yang Baik	100%	611.693.000	100%	124.173.810	100%	113.188.300	100%	110.526.600	100	97,65	100%	110.526.600,00	100	18,07		Tercapai
8.	8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	16 Paket	90.013.000	4 Paket	39.060.000	2 Paket	35.108.300	2 Paket	34.865.000	100	99,31	6 Paket	73.925.000,00	37,5	82,13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
9.	8.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	60 Orang	521.680.000	10 Orang	85.113.810	10 Orang	78.080.000	10 Orang	75.661.600	100	96,9	20 Orang	160.775.410,00	33,33	30,82	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,1			35,42	56,47		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Baik	100%	1.187.383.100	100%	532.738.650	100%	869.746.400	100%	862.555.359	100	99,17	100%	862.555.359,00	100	72,64		Tercapai
10.	8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	47.219.200	1 Paket	9.466.500	1 Paket	7.368.600	1 Paket	7.270.300	100	98,67	2 Paket	16.736.800,00	33,33	35,44	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
11.	8.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"	30 Paket	170.340.000	5 Paket	168.483.000	10 Paket	245.768.700	10 Paket	239.032.500	100	97,26	15 Paket	407.515.500,00	50	239,24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
12.	8.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	74.490.200	1 Paket	10.347.150	1 Paket	10.739.400	1 Paket	10.738.800	100	99,99	2 Paket	21.085.950,00	33,33	28,31	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
13.	8.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	6 Dokumen	20.311.200	1 Dokumen	2.520.000	1 Dokumen	3.057.600	1 Dokumen	2.760.000	100	90,27	2 Dokumen	5.280.000,00	33,33	26	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
14.	8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"	1870 Laporan	875.022.500	250 Laporan	341.922.000	620 Laporan	602.812.100	620 Laporan	602.753.759	100	99,99	870 Laporan	944.675.759,00	46,52	107,96	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	97,24			39,3	87,39		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang baik	100%	1.194.897.950	100%	184.078.006	100%	301.698.200	100%	264.896.671	100	87,8	100%	264.896.671,00	100	22,17		Tercapai
15.	8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Laporan	322.373.350	12 Laporan	39.040.000	12 Laporan	72.480.000	12 Laporan	72.480.000	100	100	24 Laporan	111.520.000,00	33,33	34,59	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
16.	8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	502.506.150	12 Laporan	62.772.898	12 Laporan	120.400.000	12 Laporan	93.492.123	100	77,65	24 Laporan	156.265.021,00	33,33	31,1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
17.	8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Laporan	25.564.000	12 Laporan	12.550.000	12 Laporan	14.916.500	12 Laporan	14.785.000	100	99,12	24 Laporan	27.335.000,00	33,33	106,93	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
18.	8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	344.454.450	12 Laporan	69.715.108	12 Laporan	93.901.700	12 Laporan	84.139.548	100	89,6	24 Laporan	153.854.656,00	33,33	44,67	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	91,59			33,33	54,32		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Perangkat Daerah Yang Baik	100%	739.854.100	100%	218.681.162	100%	279.128.900	100%	272.307.505	100	97,56	100%	272.307.505,00	100	36,81		Tercapai
19.	8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit	475.546.400	24 Unit	133.036.162	24 Unit	207.240.100	24 Unit	200.873.505	100	96,93	48 Unit	333.909.667,00	200	70,22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
20.	8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	264.307.700	2 Unit	85.645.000	2 Unit	71.888.800	2 Unit	71.434.000	100	99,37	4 Unit	157.079.000,00	200	59,43	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,15			200	64,82		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	95,41			100	34,56		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Suku,Ras/Etnis dan antar Golongan yang tertangani**	**6 Angka**	**2.926.214.658**	**1 Angka**	**1.576.380.800**	**1 Angka**	**6.219.370.600**	**1 Angka**	**6.213.864.647**	**100**	**99,91**	**2 Angka**	**7.790.245.447,00**	**33,33**	**266,22**		**Tercapai**

	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Forum / Gerakan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang Aktif	4 Forum	2.926.214.658	1 Forum	1.576.380.800	2 Forum	6.219.370.600	2 Forum	6.213.864.647	100	99,91	3 Forum	7.790.245.447,00	75	266,22		Tercapai
21.	8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	348 Orang (unsur)	2.781.134.658	58 Orang (unsur)	1.576.380.800	58 Orang (unsur)	6.129.824.000	58 Orang (unsur)	6.126.428.647	100	99,94	116 Orang (unsur)	7.702.809.447,00	33,33	276,97	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
22.	8.01.02.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	18 laporan	145.080.000	3 laporan	0	3 laporan	89.546.600	3 laporan	87.436.000	100	97,64	6 laporan	87.436.000,00	33,33	60,27	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,79			33,33	168,62		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	99,91			75	266,22		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
3.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Parpol yang aktif**	**100%**	**5.616.307.800**	**81%**	**910.367.600**	**100%**	**19.665.433.960**	**100%**	**19.244.250.762**	**100**	**97,86**	**100%**	**19.244.250.762,00**	**100**	**342,65**		**Tercapai**
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Parpol yang Aktif melaporkan kegiatan	9 Parpol	5.616.307.800	9 Parpol	910.367.600	9 Parpol	19.665.433.960	9 Parpol	19.244.250.762	100	97,86	18 Parpol	20.154.618.362,00	200	358,86		Tercapai
23.	8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	4064 Orang	565.557.000	100 Orang	67.319.600	2664 Orang	483.189.600	2650 Orang	474.765.550	99,47	98,26	2750 Orang	542.085.150,00	67,67	95,85	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tidak Tercapai
24.	8.01.03.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	814 Orang	598.200.800	100 Orang	73.100.000	214 Orang	18.399.069.460	214 Orang	17.989.336.160	100	97,77	314 Orang	18.062.436.160,00	38,57	3.019,46	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
25.	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	54 Laporan	4.452.550.000	9 Laporan	769.948.000	9 Laporan	783.174.900	9 Laporan	780.149.052	100	99,61	18 Laporan	1.550.097.052,00	33,33	34,81	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		99,82	98,55			46,53	1.050,04		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	97,86			200	358,86		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
4.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Ormas yang aktif**	**100%**	**676.162.050**	**100%**	**136.618.100**	**100%**	**490.155.100**	**100%**	**309.054.310**	**100**	**63,05**	**100%**	**309.054.310,00**	**100**	**45,71**		**Tercapai**
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Ormas yang melaporkan Kegiatan Penanganan Potensi Konflik	61 Ormas	676.162.050	2 Ormas	136.618.100	9 Ormas	490.155.100	9 Ormas	309.054.310	100	63,05	11 Ormas	445.672.410,00	18,03	65,91		Tercapai
26.	8.01.04.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1468 Orang	409.222.150	200 Orang	87.600.300	468 Orang	121.993.600	468 Orang	121.508.810	100	99,6	668 Orang	209.109.110,00	45,5	51,1	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
27.	8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	18 Laporan	266.939.900	3 Laporan	49.017.800	3 Laporan	368.161.500	3 Laporan	187.545.500	100	50,94	6 Laporan	236.563.300,00	33,33	88,62	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	75,27			39,42	69,86		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	63,05			18,03	65,91		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Angka Potensi Konflik sosial berlatar belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani**	**6 Angka**	**389.485.900**	**1 Angka**	**84.766.500**	**1 Angka**	**305.576.400**	**1 Angka**	**291.023.606**	**100**	**95,24**	**2 Angka**	**375.790.106,00**	**33,33**	**96,48**		**Tercapai**
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Forum yang aktif melaksanakan Kegiatan Penanganan Konflik	2 Forum	389.485.900	2 Forum	84.766.500	2 Forum	305.576.400	2 Forum	291.023.606	100	95,24	4 Forum	375.790.106,00	200	96,48		Tercapai
28.	8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	210 Orang (unsur)	281.123.400	35 Orang (unsur)	67.090.000	35 Orang (unsur)	229.719.200	35 Orang (unsur)	215.370.506	100	93,75	70 Orang (unsur)	282.460.506,00	33,33	100,48	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
29.	8.01.05.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah"	6 Laporan	108.362.500	1 Laporan	17.676.500	1 Laporan	75.857.200	1 Laporan	75.653.100	100	99,73	2 Laporan	93.329.600,00	33,33	86,13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	96,74			33,33	93,3		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	95,24			200	96,48		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		

6.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase potensi konflik yang terselesaikan**	**100%**	**6.761.909.500**	**100%**	**1.012.043.597**	**100%**	**1.316.438.000**	**100%**	**1.285.328.248**	**100**	**97,64**	**100%**	**1.285.328.248,00**	**100**	**19,01**		**Tercapai**
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Forum Kewaspadaan dan Penanganan Konflik yang Aktif	34 Forum	6.761.909.500	5 Forum	1.012.043.597	7 Forum	1.316.438.000	7 Forum	1.285.328.248	100	97,64	12 Forum	2.297.371.845,00	35,29	33,98		Tercapai
30.	8.01.06.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	30 Dokumen	129.000.000	5 Dokumen	0	5 Dokumen	43.933.300	5 Dokumen	43.327.700	100	98,62	10 Dokumen	43.327.700,00	33,33	33,59	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
31.	8.01.06.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	192 Orang (unsur)	1.679.759.750	32 Orang (unsur)	319.895.100	32 Orang (unsur)	987.143.000	32 Orang (unsur)	972.205.748	100	98,49	64 Orang (unsur)	1.292.100.848,00	33,33	76,92	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
32.	8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1200 Orang (unsur)	1.211.849.200	200 Orang (unsur)	204.791.877	200 Orang (unsur)	107.822.000	200 Orang (unsur)	107.160.000	100	99,39	400 Orang (unsur)	311.951.877,00	33,33	25,74	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
33.	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	24 Laporan	2.150.400.550	4 Laporan	426.771.020	4 Laporan	69.732.800	4 Laporan	69.099.600	100	99,09	8 Laporan	495.870.620,00	33,33	23,06	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
34.	8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	6 Dokumen	1.590.900.000	1 Dokumen	60.585.600	1 Dokumen	107.806.900	1 Dokumen	93.535.200	100	86,76	2 Dokumen	154.120.800,00	33,33	9,69	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	96,47			33,33	33,8		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	97,64			35,29	33,98		
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		100	91,32			66,14	113,58		
										Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**99,98**	**96,91**			**47,55**	**151,82**		
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Tinggi**		
									33.138.442.066	**Jumlah Anggaran dari seluruh Program**	**32.113.042.961**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		1. Anggaran yang cukup memadai 2. Kerjasama dan Koordinasi yg baik antara Pimpinan dan Jajaran di bawahnya 3, Koordinasi yang baik dengan lintas sektor / mitra kerja																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Anggaran yg belum bisa mensupport 100% kebutuhan program 2. Sarana dan Prasarana Pendukung yang belum memadai 3. Kurang optimalnya koordinasi dengan lintas sektor/mitra kerja 4. Masih kurangnya anggaran sosialisasi keormasan 5. Belum																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1. Perencanaan dan Persiapan Program yg cukup untuk kegiatan berikutnya 2. Inventarisirisasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pendukung yg dibutuhkan 3. Inventarisasi/ Mitigasi Permasalahan sbeleum pelaksanaan kegiatan,. 4. Memaksimalkan koordinasi																

No	**Kode**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub**	**Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode**		**Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu**		**Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun**		**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**Keterangan**
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**2.10.04**	**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**0**	**100%**	**306.677.100**	**100%**	**281.067.100**	**100**	**91,65**	**100%**	**281.067.100,00**	**100**	**281,07**		**Tercapai**
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100.000.000	100%	0	100%	306.677.100	100%	281.067.100	100	91,65	100%	281.067.100,00	100	281,07		Tercapai
1.	2.10.04.2.01.01	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	306.677.100	1 Dokumen	281.067.100	100	91,65	2 Dokumen	281.067.100,00	40	281,07	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	91,65			40	281,07		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	91,65			100	281,07		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
2.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase redistribusi tanah dan ganti kerugian kelebihan tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee**	**100%**	**18.000.000**	**100%**	**3.560.000**	**100%**	**10.500.000**	**100%**	**8.030.000**	**100**	**76,48**	**100%**	**8.030.000,00**	**100**	**44,61**		**Tercapai**
	2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Kelebihan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	100%	18.000.000	100%	3.560.000	100%	10.500.000	100%	8.030.000	100	76,48	100%	8.030.000,00	100	44,61		Tercapai
2.	2.10.06.2.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka kegiatan Redistribusi Tanah	5 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	3.560.000	1 Dokumen	10.500.000	1 Dokumen	8.030.000	100	76,48	2 Dokumen	11.590.000,00	40	64,39	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	76,48			40	64,39		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	76,48			100	44,61		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**2.10.09**	**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase pengelolaan izin membuka tanah**	**100%**	**797.380.000**	**100%**	**141.069.080**	**100%**	**262.247.200**	**100%**	**203.898.900**	**100**	**77,75**	**100%**	**203.898.900,00**	**100**	**25,57**		**Tercapai**
	2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100%	797.380.000	100%	141.069.080	100%	262.247.200	100%	203.898.900	100	77,75	100%	203.898.900,00	100	25,57		Tercapai
3.	2.10.09.2.01.02	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	5 Dokumen	797.380.000	1 Dokumen	141.069.080	1 Dokumen	262.247.200	1 Dokumen	203.898.900	100	77,75	2 Dokumen	344.967.980,00	40	43,26	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	77,75			40	43,26		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	77,75			100	25,57		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4.	**2.10.10**	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase Penatagunaan Tanah**	**100%**	**69.980.000**	**100%**	**16.847.000**	**100%**	**52.702.000**	**100%**	**52.612.000**	**100**	**99,83**	**100%**	**52.612.000,00**	**100**	**75,18**		**Tercapai**
	2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	69.980.000	100%	16.847.000	100%	52.702.000	100%	52.612.000	100	99,83	100%	52.612.000,00	100	75,18		Tercapai
4.	2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan dan Penggunaan Tanah dalam (satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	69.980.000	1 Laporan	16.847.000	1 Laporan	52.702.000	1 Laporan	52.612.000	100	99,83	2 Laporan	69.459.000,00	40	99,26	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	99,83			40	99,26		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	99,83			100	75,18		Tercapai

												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**37.400.000.000**	**100%**	**8.335.409.440**	**100%**	**11.218.549.750**	**100%**	**10.378.482.142**	**100**	**92,51**	**100%**	**10.378.482.142,00**	**100**	**27,75**		**Tercapai**
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang di sampaikan Tepat Waktu	100%	2.000.000.000	100%	86.080.000	100%	102.738.000	100%	91.096.000	100	88,67	100%	91.096.000,00	100	4,55		Tercapai
5.	2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	1.000.000.000	2 Dokumen	58.090.000	2 Dokumen	62.838.000	2 Dokumen	58.998.000	100	93,89	4 Dokumen	117.088.000,00	40	11,71	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
6.	2.11.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasi Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 Laporan	1.000.000.000	4 Laporan	27.990.000	4 Laporan	39.900.000	4 Laporan	32.098.000	100	80,45	8 Laporan	60.088.000,00	40	6,01	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	66,67	58,11			26,67	5,91		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	24.600.000.000	100%	6.054.537.980	100%	7.335.054.650	100%	7.033.193.004	100	95,88	100%	7.033.193.004,00	100	28,59		Tercapai
7.	2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang Yang Menerima Gajih dan Tunjangan ASN	250 Orang	23.600.000.000	45 Orang	5.984.860.880	45 Orang	7.280.954.650	45 Orang	6.989.243.204	100	95,99	90 Orang	12.974.104.084,00	36	54,98	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
8.	2.11.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah LLaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Laporan	500.000.000	1 Laporan	49.782.100	1 Laporan	30.400.000	1 Laporan	21.449.900	100	70,56	2 Laporan	71.232.000,00	40	14,25	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
9.	2.11.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	20 Laporan	500.000.000	4 Laporan	19.895.000	4 Laporan	23.700.000	4 Laporan	22.499.900	100	94,94	8 Laporan	42.394.900,00	40	8,48	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	87,16			38,67	25,9		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	500.000.000	100%	89.000.000	100%	48.000.000	100%	44.000.000	100	91,67	100%	44.000.000,00	100	8,8		Tercapai
10.	2.11.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	500.000.000	16 Orang	89.000.000	10 Orang	48.000.000	8 Orang	44.000.000	80	91,67	24 Orang	133.000.000,00	48	26,6	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	80	91,67			48	26,6		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	6.300.000.000	100	1.609.057.168	100	2.501.906.600	75	2.207.944.562	75	88,25	75	2.207.944.562,00	75	35,05		Tidak Tercapai
11.	2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	500.000.000	3 Paket	48.505.955	13 Paket	474.283.100	13 Paket	453.812.361	100	95,68	16 Paket	502.318.316,00	80	100,46	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
12.	2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	500.000.000	1 Paket	15.887.100	1 Paket	15.914.900	1 Paket	15.914.800	100	100	2 Paket	31.801.900,00	40	6,36	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
13.	2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen	500.000.000	1 Dokumen	5.620.000	1 Dokumen	8.356.600	1 Dokumen	6.620.000	100	79,22	2 Dokumen	12.240.000,00	40	2,45	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
14.	2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan	4.800.000.000	1 Laporan	1.539.044.113	494 Laporan	2.003.352.000	450 Laporan	1.731.597.401	91,09	86,44	451 Laporan	3.270.641.514,00	9.020,00	68,14	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	97,77	90,33			2.295,00	44,35		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2.500.000.000	100%	238.687.082	100%	627.262.500	100%	461.867.811	100	73,63	100%	461.867.811,00	100	18,47		Tercapai
15.	2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	500.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	32.515.200	1 Laporan	19.875.000	100	61,13	2 Laporan	25.875.000,00	40	5,18	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
16.	2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	1.000.000.000	1 Laporan	105.949.982	12 Laporan	152.242.600	12 Laporan	125.339.867	100	82,33	13 Laporan	231.289.849,00	260	23,13	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
17.	2.11.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Laporan	500.000.000	1 Laporan	11.780.000	12 Laporan	44.077.400	12 Laporan	24.911.644	100	56,52	13 Laporan	36.691.644,00	260	7,34	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
18.	2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan	500.000.000	1 Laporan	114.957.100	12 Laporan	398.427.300	12 Laporan	291.741.300	100	73,22	13 Laporan	406.698.400,00	260	81,34	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	68,3			205	29,25		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1.500.000.000	100%	258.047.210	100%	603.588.000	100%	540.380.765	100	89,53	100%	540.380.765,00	100	36,03		Tercapai
19.	2.11.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	500.000.000	4 Unit	203.015.990	15 Unit	340.331.800	15 Unit	280.192.805	100	82,33	19 Unit	483.208.795,00	76	96,64	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
20.	2.11.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitas	15 Unit	1.000.000.000	3 Unit	55.031.220	4 Unit	263.256.200	4 Unit	260.187.960	100	98,83	7 Unit	315.219.180,00	46,67	31,52	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	90,58			61,33	64,08		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Rendah	Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	95,83	87,94			95,83	21,92		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup**	**100%**	**2.900.000.000**	**100%**	**211.600.000**	**100%**	**595.430.000**	**100%**	**588.103.000**	**100**	**98,77**	**100%**	**588.103.000,00**	**100**	**20,28**		**Tercapai**
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) kabupaten/Kota	100%	2.900.000.000	100%	211.600.000	100%	595.430.000	100%	588.103.000	100	98,77	100%	588.103.000,00	100	20,28		Tercapai
21.	2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	12 Dokumen	1.400.000.000	1 Dokumen	211.600.000	2 Dokumen	211.860.000	2 Dokumen	207.960.000	100	98,16	3 Dokumen	419.560.000,00	25	29,97	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
22.	2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun.	5 Dokumen	1.500.000.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	383.570.000	1 Dokumen	380.143.000	100	99,11	2 Dokumen	380.143.000,00	40	25,34	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,63			32,5	27,66		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	98,77			100	20,28		
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
7.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan**	**69.38 %**	**9.700.000.000**	**67.83 %**	**721.236.884**	**68.02 %**	**1.068.015.300**	**68,24%**	**969.986.530**	**100,32**	**90,82**	**68.24 %**	**969.986.530,00**	**98,36**	**10**		**Melebihi Target**
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	69.38 %	7.500.000.000	67.83 %	636.859.884	68.02 %	977.778.900	68,24%	884.069.730	100,32	90,42	68.24 %	884.069.730,00	98,36	11,79		Melebihi Target
23.	2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air dan Udara, dan Laut	20 Dokumen	1.500.000.000	4 Dokumen	101.469.800	4 Dokumen	152.815.500	4 Dokumen	117.245.200	100	76,72	8 Dokumen	218.715.000,00	40	14,58	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
24.	2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokuman Hasil koordinasi dan sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	5 Dokumen	1.000.000.000	1 Dokumen	74.999.900	1 Dokumen	58.189.800	1 Dokumen	55.063.800	100	94,63	2 Dokumen	130.063.700,00	40	13,01	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
25.	2.11.03.2.01.03	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	20 Dokumen	5.000.000.000	4 Dokumen	460.390.184	4 Dokumen	766.773.600	4 Dokumen	711.760.730	100	92,83	8 Dokumen	1.172.150.914,00	40	23,44	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai

												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	88,06			40	17,01		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	69.38 %	1.500.000.000	67.83 %	43.015.000	68.02 %	45.300.000	68,24%	42.314.100	100,32	93,41	68.24 %	42.314.100,00	98,36	2,82		Melebihi Target
26.	2.11.03.2.02.01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	5 Laporan	1.500.000.000	1 Laporan	43.015.000	1 Laporan	45.300.000	1 Laporan	42.314.100	100	93,41	2 Laporan	85.329.100,00	40	5,69	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	93,41			40	5,69		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	2.11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Indeks Kualitas Udara, Air dan Tutupan Lahan	69.38 %	700.000.000	67.83 %	41.362.000	68.02 %	44.936.400	68,24%	43.602.700	100,32	97,03	68.24 %	43.602.700,00	98,36	6,23		Melebihi Target
27.	2.11.03.2.03.04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah dokumen Hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitas	5 Dokumen	700.000.000	1 Dokumen	41.362.000	1 Dokumen	44.936.400	1 Dokumen	43.602.700	100	97,03	2 Dokumen	84.964.700,00	40	12,14	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,03			40	12,14		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100,32	93,62			98,36	6,95		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
8.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**		**100**	**13.000.000.000**	**54**	**2.060.912.116**	**100**	**6.673.715.400**	**100**	**5.478.958.775**	**100**	**82,1**	**100**	**5.478.958.775,00**	**100**	**42,15**		**Tercapai**
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Dalam Kondisi Yang Terpelihara Dengan Baik	100%	13.000.000.000	54%	2.060.912.116	100%	6.673.715.400	100%	5.478.958.775	100	82,1	100%	5.478.958.775,00	100	42,15		Tercapai
28.	2.11.04.2.01.03	Pengelolaan Kebun Raya	Luas kebun raya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	8.4 Ha	3.500.000.000	8.4 Ha	303.218.979	8.4 Ha	555.327.800	8,4 Ha	515.726.796	100	92,87	16,8 Ha	818.945.775,00	200	23,4	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
29.	2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	112.221 Ha	9.500.000.000	50 Ha	1.757.693.137	112.221 Ha	6.118.387.600	186,84 Ha	4.963.231.979	166,49	81,12	236,84 Ha	6.720.925.116,00	211,05	70,75	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Melebihi Target
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	133,25	86,99			205,52	47,07		Melebihi Target
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	82,1			100	42,15		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
9.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)**	**100%**	**1.170.000.000**	**100%**	**72.665.000**	**100%**	**67.145.700**	**100%**	**66.789.300**	**100**	**99,47**	**100%**	**66.789.300,00**	**100**	**5,71**		**Tercapai**
	2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	550.000.000	100%	36.985.000	100%	35.629.900	100%	35.393.500	100	99,34	100%	35.393.500,00	100	6,44		Tercapai
30.	2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara Limbah B3	8 Laporan	550.000.000	1 Laporan	36.985.000	4 Laporan	35.629.900	4 Laporan	35.393.500	100	99,34	5 Laporan	72.378.500,00	62,5	13,16	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,34			62,5	13,16		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	620.000.000	100%	35.680.000	100%	31.515.800	100%	31.395.800	100	99,62	100%	31.395.800,00	100	5,06		Tercapai
31.	2.11.05.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limba B3 yang sesuai dengan kewenangan	5 Dokumen	620.000.000	1 Dokumen	35.680.000	1 Dokumen	31.515.800	1 Dokumen	31.395.800	100	99,62	2 Dokumen	67.075.800,00	40	10,82	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,62			40	10,82		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,48			100	5,75		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
10.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan**	**100%**	**810.000.000**	**100%**	**37.003.300**	**100%**	**108.492.700**	**100%**	**107.337.200**	**100**	**98,93**	**100%**	**107.337.200,00**	**100**	**13,25**		**Tercapai**
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	100%	810.000.000	100%	37.003.300	100%	108.492.700	100%	107.337.200	100	98,93	100%	107.337.200,00	100	13,25		Tercapai
32.	2.11.06.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah koordinasi dan/atau persetujuan Teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	6 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	52.399.900	1 Dokumen	51.254.600	100	97,81	1 Dokumen	51.254.600,00	16,67	0	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
33.	2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin Lingkungan, Persetujuan lingkungan, Surat kelayakan operasi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	90 Laporan	810.000.000	7 Laporan	37.003.300	7 Laporan	56.092.800	7 Laporan	56.082.600	100	99,98	14 Laporan	93.085.900,00	15,56	11,49	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,9			16,11	5,75		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	98,93			100	13,25		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
11.	**2.11.07**	**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait dengan PPLH**	**100%**	**800.000.000**	**100%**	**12.283.700**	**100%**	**20.186.500**	**100%**	**7.350.000**	**100**	**36,41**	**100%**	**7.350.000,00**	**100**	**0,92**		**Tercapai**
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat, Kearifan Lokal dan MHA Yang Terkait Dengan PPLH	100%	800.000.000	100%	12.283.700	100%	20.186.500	100%	7.350.000	100	36,41	100%	7.350.000,00	100	0,92		Tercapai
34.	2.11.07.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data, dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	5 Dokumen	800.000.000	1 Dokumen	12.283.700	1 Dokumen	20.186.500	1 Dokumen	7.350.000	100	36,41	2 Dokumen	19.633.700,00	40	2,45	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	36,41			40	2,45		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	36,41			100	0,92		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		

12.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat**	**100%**	**100.000.000**	**100%**	**14.029.000**	**100%**	**25.338.000**	**100%**	**1.346.400**	**100**	**5,31**	**100%**	**1.346.400,00**	**100**	**1,35**		**Tercapai**
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Masyarakat	100%	100.000.000	100%	14.029.000	100%	25.338.000	100%	1.346.400	100	5,31	100%	1.346.400,00	100	1,35		Tercapai
35.	2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/kelompok masyarakat/pelaku usaha/kegiatan yang terlibat	500 Orang	100.000.000	100 Orang	14.029.000	140 Orang	25.338.000	140 Orang	1.346.400	100	5,31	240 Orang	15.375.400,00	48	15,38	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	5,31			48	15,38		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	5,31			100	1,35		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
13.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**	**100%**	**1.050.000.000**	**100%**	**87.294.000**	**100%**	**127.957.000**	**100%**	**104.788.000**	**100**	**81,89**	**100%**	**104.788.000,00**	**100**	**9,98**		**Tercapai**
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	1.050.000.000	100%	87.294.000	100%	127.957.000	100%	104.788.000	100	81,89	100%	104.788.000,00	100	9,98		Tercapai
36.	2.11.09.2.01.01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	30 Entitas	1.050.000.000	3 Entitas	87.294.000	5 Entitas	127.957.000	4 Entitas	104.788.000	80	81,89	7 Entitas	192.082.000,00	23,33	18,29	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	80	81,89			23,33	18,29		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	81,89			100	9,98		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
14.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**	**100%**	**990.000.000**	**100%**	**38.300.000**	**100%**	**42.480.000**	**100%**	**42.465.000**	**100**	**99,96**	**100%**	**42.465.000,00**	**100**	**4,29**		**Tercapai**
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100%	990.000.000	100%	38.300.000	100%	42.480.000	100%	42.465.000	100	99,96	100%	42.465.000,00	100	4,29		Tercapai
37.	2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	7 Dokumen	990.000.000	1 Dokumen	38.300.000	1 Dokumen	42.480.000	3 Dokumen	42.465.000	300	99,96	4 Dokumen	80.765.000,00	57,14	8,16	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	300	99,96			57,14	8,16		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,96			100	4,29		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
15.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Persentase Pengelolaan Persampahan**	**100%**	**31.100.000.000**	**92.38 %**	**8.796.369.804**	**99%**	**14.197.697.880**	**92,42%**	**13.779.422.777**	**93,35**	**97,05**	**92.42 %**	**13.779.422.777,00**	**92,42**	**44,31**		**Tidak Tercapai**
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Persampahan	100%	31.100.000.000	92.38 %	8.796.369.804	99%	14.197.697.880	92,42%	13.779.422.777	93,35	97,05	92.42 %	13.779.422.777,00	92,42	44,31		Tidak Tercapai
38.	2.11.11.2.01.02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	60 Laporan	4.700.000.000	12 Laporan	643.809.700	12 Laporan	917.919.600	12 Laporan	882.025.212	100	96,09	24 Laporan	1.525.834.912,00	40	32,46	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
39.	2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilih, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	84000 Ton	17.500.000.000	14.7825 Ton	3.535.739.970	14.58 Ton	5.458.999.980	15,116 Ton	5.404.432.081	103,68	99	29,8985 Ton	8.940.172.051,00	0,04	51,09	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Melebihi Target
40.	2.11.11.2.01.07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemprosesan akhir	20 Unit	8.900.000.000	8 Unit	4.616.820.134	214 Unit	7.820.778.300	214 Unit	7.492.965.484	100	95,81	222 Unit	12.109.785.618,00	1.110,00	136,07	DINAS PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	101,23	96,97			383,35	73,21		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	93,35	97,05			92,42	44,31		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
16.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100%**	**0**	**100**	**0**	**100%**	**0**	**100**	**0**		**Tercapai**
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	98,67	0			0	0		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	99,6	76,81			99,42	37,9		
											Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**105,53**	**92,22**			**316,4**	**38,76**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**		
									34.777.134.530		**32.070.637.124**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		"1.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang telah mengamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk RTH, dimana 20%																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		1. Tidak ada penambahan luasan RTH 2. Kesadaran pengunjung untuk menjaga fasilitas umum masih kurang 3. Kesadaran masyarakat untuk memilah sampah masih kurang 4. Sarana dan Prasarana Persampahan masih terbatas 5. SDM bidang teknis terbatas																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		1. Penambahan luasan RTH 2. Sosialisasi/ Papan Himbauan untuk pengunjung untuk menjaga fasilitas umum 3. Sosialisasi kepada masyarakat untuk memilah sampah 4. Penambahan Sarana dan Prasarana Persampahan 5. Peningkatan Kapasitas SDM																

No	**Kode**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub**	**Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode**		**Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu**		**Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun**		**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**Keterangan**
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja SKPD (SAKIP)**	**100%**	**20.413.916.073**	**100%**	**3.355.077.063**	**100%**	**4.129.568.570**	**100%**	**3.969.598.048**	**100**	**96,13**	**100%**	**3.969.598.048,00**	**100**	**19,45**		**Tercapai**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah Yang disampaikan Tepat Waktu	100%	54.594.000	100%	7.974.000	100%	14.902.900	100%	14.902.900	100	100	100%	14.902.900,00	100	27,3		Tercapai
1.	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	12 Dokumen	21.138.000	2 Dokumen	2.398.000	2 Dokumen	9.985.300	2 Dokumen	9.985.300	100	100	4 Dokumen	12.383.300,00	33,33	58,58	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
2.	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA dan DPA SKPD	12 Dokumen	15.456.000	2 Dokumen	2.576.000	2 Dokumen	2.217.600	2 Dokumen	2.217.600	100	100	4 Dokumen	4.793.600,00	33,33	31,01	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
3.	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan Capaian Kinerja dan Keuangan	12 Dokumen	18.000.000	2 Dokumen	3.000.000	2 Dokumen	2.700.000	2 Dokumen	2.700.000	100	100	4 Dokumen	5.700.000,00	33,33	31,67	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			33,33	40,42		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%	17.115.828.000	100%	2.559.777.995	100%	3.016.680.970	100%	2.897.889.945	100	96,06	100%	2.897.889.945,00	100	16,93		Tercapai
4.	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang / Bulan	16.819.260.000	25 Orang / Bulan	2.509.629.995	25 Orang / Bulan	2.930.603.470	25 Orang / Bulan	2.814.612.445	100	96,04	50 Orang / Bulan	5.324.242.440,00	33,33	31,66	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
5.	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	282.600.000	24 Dokumen	47.820.000	12 Dokumen	84.400.000	12 Dokumen	81.600.000	100	96,68	36 Dokumen	129.420.000,00	50	45,8	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
6.	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	13.968.000	4 Laporan	2.328.000	2 Laporan	1.677.500	2 Laporan	1.677.500	100	100	6 Laporan	4.005.500,00	50	28,68	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,57			44,44	35,38		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%	73.875.000	100%	0	100%	12.500.000	100%	12.500.000	100	100	100%	12.500.000,00	100	16,92		Tercapai
7.	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120 Paket	73.875.000	80 Paket	0	40 Paket	12.500.000	40 Paket	12.500.000	100	100	120 Paket	12.500.000,00	100	16,92	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			100	16,92		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah sesuai peraturan yang berlaku	100%	1.376.194.073	100%	304.449.300	100%	441.389.600	100%	441.080.202	100	99,93	100%	441.080.202,00	100	32,05		Tercapai
8.	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 Paket	98.105.200	24 Paket	15.304.500	12 Paket	16.968.300	12 Paket	16.900.000	100	99,6	36 Paket	32.204.500,00	50	32,83	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
9.	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72 Paket	446.015.373	24 Paket	73.696.500	12 Paket	114.840.200	12 Paket	114.805.000	100	99,97	36 Paket	188.501.500,00	50	42,26	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
10.	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	121.174.000	24 Paket	19.642.300	12 Paket	19.919.100	12 Paket	19.900.000	100	99,9	36 Paket	39.542.300,00	50	32,63	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
11.	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1028 Laporan	710.899.500	329 Laporan	195.806.000	277 Laporan	289.662.000	277 Laporan	289.475.202	100	99,94	606 Laporan	485.281.202,00	58,95	68,26	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,85			52,24	44		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase unit pengadaan Barang Milik Daerah	100%	593.299.600	100%	333.428.560	100%	370.243.300	100%	348.050.500	100	94,01	100%	348.050.500,00	100	58,66		Tercapai
12.	7.01.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	18 Unit	409.000.000	1 Unit	267.900.000	5 Unit	139.000.000	5 Unit	130.090.000	100	93,59	6 Unit	397.990.000,00	33,33	97,31	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
13.	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	211 Unit	184.299.600	95 Unit	65.528.560	26 Unit	231.243.300	11 Unit	217.960.500	42,31	94,26	106 Unit	283.489.060,00	50,24	153,82	KECAMATAN AWAYAN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	71,15	93,92			41,79	125,56		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	476.419.200	100%	59.956.388	100%	147.669.300	100%	134.441.901	100	91,04	100%	134.441.901,00	100	28,22		Tercapai
14.	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	318.458.000	24 Laporan	37.503.388	12 Laporan	57.669.200	12 Laporan	44.441.901	100	77,06	36 Laporan	81.945.289,00	50	25,73	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
15.	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	157.961.200	24 Laporan	22.453.000	12 Laporan	90.000.100	12 Laporan	90.000.000	100	100	36 Laporan	112.453.000,00	50	71,19	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	88,53			50	48,46		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100%	723.706.200	100%	89.490.820	100%	126.182.500	100%	120.732.600	100	95,68	100%	120.732.600,00	100	16,68		Tercapai
16.	7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit	368.431.100	13 Unit	34.570.820	13 Unit	67.351.900	13 Unit	62.032.600	100	92,1	26 Unit	96.603.420,00	200	26,22	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
17.	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	300 Unit	103.000.000	100 Unit	16.500.000	50 Unit	20.104.600	50 Unit	20.000.000	100	99,48	150 Unit	36.500.000,00	50	35,44	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
18.	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	252.275.100	2 Unit	38.420.000	2 Unit	38.726.000	2 Unit	38.700.000	100	99,93	4 Unit	77.120.000,00	200	30,57	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,17			150	30,74		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	96,67			100	28,11		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan**	**100%**	**381.810.000**	**100%**	**129.255.000**	**100%**	**120.932.500**	**100%**	**120.400.000**	**100**	**99,56**	**100%**	**120.400.000,00**	**100**	**31,53**		**Tercapai**
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	87.75 Nilai	381.810.000	87.01 Nilai	129.255.000	87 Nilai	120.932.500	87,66 Nilai	120.400.000	100,76	99,56	87.66 Nilai	120.400.000,00	99,9	31,53		Melebihi Target
19.	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72 Laporan	381.810.000	24 Laporan	129.255.000	12 Laporan	120.932.500	12 Laporan	120.400.000	100	99,56	36 Laporan	249.655.000,00	50	65,39	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,56			50	65,39		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100,76	99,56			99,9	31,53		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat desa**	**100%**	**1.315.078.800**	**100%**	**257.240.000**	**100%**	**117.972.000**	**100%**	**116.054.210**	**100**	**98,37**	**100%**	**116.054.210,00**	**100**	**8,82**		**Tercapai**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan desa	100%	1.315.078.800	100%	257.240.000	100%	117.972.000	100%	116.054.210	100	98,37	100%	116.054.210,00	100	8,82		Tercapai
20.	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	1.315.078.800	4 Laporan	257.240.000	2 Laporan	117.972.000	2 Laporan	116.054.210	100	98,37	6 Laporan	373.294.210,00	50	28,39	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,37			50	28,39		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	98,37			100	8,82		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan Awayan**	**100%**	**94.990.000**	**100%**	**12.340.000**	**100%**	**78.916.600**	**100%**	**78.910.000**	**100**	**99,99**	**100%**	**78.910.000,00**	**100**	**83,07**		**Tercapai**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	94.990.000	100%	12.340.000	100%	78.916.600	100%	78.910.000	100	99,99	100%	78.910.000,00	100	83,07		Tercapai
21.	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	94.990.000	4 Laporan	12.340.000	2 Laporan	78.916.600	2 Laporan	78.910.000	100	99,99	6 Laporan	91.250.000,00	50	96,06	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,99			50	96,06		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,99			100	83,07		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Tinggi		
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Terselenggaranya urusan pemerintahan umum**	**100%**	**1.602.940.000**	**100%**	**139.950.000**	**100%**	**334.602.600**	**100%**	**328.854.500**	**100**	**98,28**	**100%**	**328.854.500,00**	**100**	**20,52**		**Tercapai**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum kecamatan Awayan	100%	1.602.940.000	100%	139.950.000	100%	334.602.600	100%	328.854.500	100	98,28	100%	328.854.500,00	100	20,52		Tercapai
22.	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	48 Dokumen	1.602.940.000	16 Dokumen	139.950.000	4 Dokumen	334.602.600	4 Dokumen	328.854.500	100	98,28	20 Dokumen	468.804.500,00	41,67	29,25	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,28			41,67	29,25		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	98,28			100	20,52		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Pesentase desa dengan administasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik kecamatan Awayan**	**100%**	**491.140.000**	**100%**	**81.610.000**	**100%**	**166.768.200**	**100%**	**165.216.700**	**100**	**99,07**	**100%**	**165.216.700,00**	**100**	**33,64**		**Tercapai**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa sesuai aturan	100%	491.140.000	100%	81.610.000	100%	166.768.200	100%	165.216.700	100	99,07	100%	165.216.700,00	100	33,64		Tercapai

23.	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	72 Dokumen	369.500.000	24 Dokumen	63.100.000	12 Dokumen	133.600.000	12 Dokumen	132.048.500	100	98,84	36 Dokumen	195.148.500,00	50	52,81	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
24.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	121.640.000	2 Dokumen	18.510.000	1 Dokumen	33.168.200	1 Dokumen	33.168.200	100	100	3 Dokumen	51.678.200,00	50	42,48	KECAMATAN AWAYAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	99,42			50	47,65		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		92,37	99,07			100	33,64		
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		85,71	98,57			100	32,84		
										Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**97,60**	**96,57**			**61,15**	**48,96**		
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Rendah**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**4.779.033.458**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tepat waktu																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Adanya kelebihan penganggaran pada belanja gaji dan tunjangan pegawai																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA**	**Nilai LAKIP**	**75 Nilai**	**24.216.690.375**	**70 Nilai**	**3.227.212.327**	**70 Nilai**	**4.527.424.991**	**70 Nilai**	**4.247.339.055**	**100**	**93,81**	**70 Nilai**	**4.247.339.055,00**	**93,33**	**17,54**		**Tercapai**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	209.909.750	100%	29.827.000	100%	66.183.600	100%	66.133.600	100	99,92	100%	66.133.600,00	100	31,51		Tercapai
1.	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	161.047.425	4 Dokumen	15.947.500	4 Dokumen	44.784.500	4 Dokumen	44.784.500	100	100	4 Dokumen	44.784.500,00	16,67	27,81	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
2.	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30 Laporan	48.862.325	5 Laporan	13.879.500	4 Laporan	21.399.100	4 Laporan	21.349.100	100	99,77	4 Laporan	21.349.100,00	13,33	43,69	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	99,88			15	35,75		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	21.353.749.645	100%	2.491.808.627	100%	3.577.931.391	100%	3.314.765.685	100	92,64	100%	3.314.765.685,00	100	15,52		Tercapai
3.	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	84 Orang / Perbulan	21.353.749.645	14 Orang / Perbulan	2.491.808.627	24 Orang / Perbulan	3.577.931.391	24 Orang / Perbulan	3.314.765.685	100	92,64	24 Orang / Perbulan	3.314.765.685,00	28,57	15,52	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	92,64			28,57	15,52		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	188.230.000	50%	14.000.000	0%	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0		Tidak Tercapai
4.	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	28 Orang	188.230.000	4 Orang	14.000.000	0 Orang	0	0 Orang	0	0	0	0 Orang	0	0	0	KECAMATAN LAMPIHONG	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		0	0			0	0		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya pelaksanaan administrasi umum	100%	653.575.835	75%	221.328.000	100%	338.262.100	100%	338.046.555	100	99,94	100%	338.046.555,00	100	51,72		Tercapai
5.	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	72 Paket	21.966.500	12 Paket	10.920.400	1 Paket	18.180.700	1 Paket	18.180.700	100	100	1 Paket	18.180.700,00	1,39	82,77	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
6.	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	631.609.335	100 Laporan	210.407.600	4 Laporan	320.081.400	4 Laporan	319.865.855	100	99,93	4 Laporan	319.865.855,00	4	50,64	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	99,97			2,69	66,7		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya penyediaan jasa urusan pemerintahan daerah	100%	1.328.294.260	100%	403.011.281	100%	395.775.200	100%	384.756.890	100	97,22	100%	384.756.890,00	100	28,97		Tercapai
7.	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	519.860.300	11 Laporan	37.064.123	12 Laporan	59.396.800	12 Laporan	52.698.656	100	88,72	12 Laporan	52.698.656,00	16,67	10,14	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
8.	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100 Laporan	121.456.625	100 Laporan	208.879.000	4 Laporan	13.765.500	4 Laporan	13.765.500	100	100	4 Laporan	13.765.500,00	4	11,33	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
9.	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	686.977.335	12 Laporan	157.068.158	4 Laporan	322.612.900	4 Laporan	318.292.734	100	98,66	4 Laporan	318.292.734,00	5,56	46,33	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	95,79			8,74	22,6		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	482.930.885	100%	67.237.419	100%	149.272.700	100%	143.636.325	100	96,22	200%	210.873.744,00	200	43,67		Tercapai
10.	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	84 Unit	439.955.280	14 Unit	58.337.419	18 Unit	127.272.700	18 Unit	121.636.325	100	95,57	18 Unit	121.636.325,00	21,43	27,65	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
11.	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100 Unit	42.975.605	100 Unit	8.900.000	3 Unit	22.000.000	3 Unit	22.000.000	100	100	3 Unit	22.000.000,00	3	51,19	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	97,79			12,21	39,42		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		83,33	80,99			100	28,56		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase terlaksananya program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**	**100%**	**389.318.930**	**100%**	**72.931.500**	**100%**	**72.529.500**	**100%**	**72.518.500**	**100**	**99,98**	**100%**	**72.518.500,00**	**100**	**18,63**		**Tercapai**
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100%	389.318.930	100%	72.931.500	100%	72.529.500	100%	72.518.500	100	99,98	100%	72.518.500,00	100	18,63		Tercapai
12.	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	100 Laporan	389.318.930	100 Laporan	72.931.500	13 Laporan	72.529.500	13 Laporan	72.518.500	100	99,98	13 Laporan	72.518.500,00	13	18,63	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	99,98			13	18,63		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	99,98			100	18,63		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan**	**100%**	**1.906.864.190**	**100%**	**324.365.000**	**100%**	**245.312.100**	**100%**	**242.826.522**	**100**	**98,99**	**100%**	**242.826.522,00**	**100**	**12,73**		**Tercapai**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	persentase jumlah kegiatan koordinasi pemberdayaan desa dan kelurahan	100%	1.906.864.190	75%	324.365.000	100%	69.703.000	100%	69.692.000	100	99,98	100%	69.692.000,00	100	3,65		Tercapai
13.	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	1.906.864.190	90 Laporan	324.365.000	4 Laporan	69.703.000	4 Laporan	69.692.000	100	99,98	4 Laporan	69.692.000,00	4	3,65	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	99,98			4	3,65		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	0%	0	0%	0	100%	175.609.100	100%	173.134.522	100	98,59	100%	173.134.522,00	0	0		Tercapai
14.	7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 Keluarga	0	0 Keluarga	0	100 Keluarga	175.609.100	100 Keluarga	173.134.522	100	98,59	100 Keluarga	173.134.522,00	0	0	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,59			0	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	99,29			50	1,83		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase terlaksananya program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum**	**100%**	**179.604.540**	**75%**	**43.127.000**	**100%**	**82.870.600**	**100%**	**82.870.600**	**100**	**100**	**100%**	**82.870.600,00**	**100**	**46,14**		**Tercapai**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Presentase Perda penegakan keamanan dan ketertiban umum yang dilaksanakan	100%	179.604.540	100%	43.127.000	100%	82.870.600	100%	82.870.600	100	100	100%	82.870.600,00	100	46,14		Tercapai
15.	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100 Laporan	179.604.540	100 Laporan	43.127.000	4 Laporan	82.870.600	4 Laporan	82.870.600	100	100	4 Laporan	82.870.600,00	4	46,14	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	100			4	46,14		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	100			100	46,14		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase terlaksananya program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum**	**100%**	**898.006.700**	**90%**	**160.805.200**	**100%**	**315.721.400**	**100%**	**315.721.400**	**100**	**100**	**100%**	**315.721.400,00**	**100**	**35,16**		**Tercapai**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	100%	898.006.700	90%	160.805.200	100%	315.721.400	100%	315.721.400	100	100	100%	315.721.400,00	100	35,16		Tercapai
16.	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	21 Dokumen	898.006.700	5 Dokumen	160.805.200	12 Dokumen	315.721.400	12 Dokumen	315.721.400	100	100	12 Dokumen	315.721.400,00	57,14	35,16	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	100			57,14	35,16		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	100			100	35,16		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase terlaksananya program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa**	**100%**	**269.232.015**	**100%**	**42.603.500**	**100%**	**155.716.700**	**100%**	**153.835.300**	**100**	**98,79**	**100%**	**153.835.300,00**	**100**	**57,14**		**Tercapai**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase akomodasi usulan hasil Musrenbang Kecamatan	100%	269.232.015	100%	42.603.500	100%	155.716.700	100%	153.835.300	100	98,79	100%	153.835.300,00	100	57,14		Tercapai
17.	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	27 Dokumen	45.516.500	27 Dokumen	43.681.100	100	95,97	27 Dokumen	43.681.100,00	0	0	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
18.	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	100 Dokumen	186.834.640	100 Dokumen	34.178.000	12 Dokumen	96.458.800	12 Dokumen	96.458.800	100	100	12 Dokumen	96.458.800,00	12	51,63	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
19.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	100 Dokumen	82.397.375	100 Dokumen	8.425.500	2 Dokumen	13.741.400	2 Dokumen	13.695.400	100	99,67	2 Dokumen	13.695.400,00	2	16,62	KECAMATAN LAMPIHONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,54			4,67	22,75		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		91,67	98,79			100	57,14		
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		100	98,6			98,89	31,22		
										Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**91,67**	**94,73**			**10,88**	**28,36**		
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
									5.399.575.291		**5.115.111.377**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Alokasi dana sudah maksimal																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Keterlambatannya pengumpulan spj sehingga memperlambat proses GU																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya																		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) Kecamatan Halong**	**75.4 Nilai**	**20.684.630.350**	**71.63 Nilai**	**2.951.718.160**	**68.2 Nilai**	**4.210.511.020**	**70,15 Nilai**	**3.852.771.838**	**102,86**	**91,5**	**70.15 Nilai**	**3.852.771.838,00**	**93,04**	**18,63**		**Melebihi Target**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	111.377.450	100%	44.852.000	100%	31.947.800	100%	31.574.300	100	98,83	100%	31.574.300,00	100	28,35		Tercapai
1.	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	31.834.000	2 Dokumen	3.956.000	2 Dokumen	31.438.200	2 Dokumen	31.323.000	100	99,63	2 Dokumen	31.323.000,00	16,67	98,39	KECAMATAN HALONG	Tercapai
2.	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	16.768.450	2 Dokumen	2.221.000	2 Dokumen	271.400	2 Dokumen	144.000	100	53,06	2 Dokumen	144.000,00	16,67	0,86	KECAMATAN HALONG	Tercapai
3.	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	62.775.000	2 Laporan	38.675.000	2 Laporan	238.200	2 Laporan	107.300	100	45,05	2 Laporan	107.300,00	20	0,17	KECAMATAN HALONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	65,91			17,78	33,14		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai Ketentuan yang Berlaku	72 Bulan	18.666.820.900	12 Bulan	2.542.911.488	12 Bulan	3.427.991.370	12 Bulan	3.122.980.850	100	91,1	12 Bulan	3.122.980.850,00	16,67	16,73		Tercapai
4.	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	138 Orang / Bulan	17.964.802.900	23 Orang / Bulan	2.449.866.100	22 Orang / Bulan	3.257.735.370	21 Orang / Bulan	2.953.237.852	95,45	90,65	21 Orang / Bulan	2.953.237.852,00	15,22	16,44	KECAMATAN HALONG	Tidak Tercapai
5.	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	702.018.000	4 Dokumen	93.045.388	4 Dokumen	170.256.000	4 Dokumen	169.742.998	100	99,7	4 Dokumen	169.742.998,00	16,67	24,18	KECAMATAN HALONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		97,73	95,18			15,94	20,31		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum	72 Bulan	810.665.000	12 Bulan	187.419.356	12 Bulan	337.401.200	12 Bulan	333.079.970	100	98,72	12 Bulan	333.079.970,00	16,67	41,09		Tercapai
6.	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18 Paket	58.846.000	3 Paket	5.730.800	3 Paket	16.106.200	3 Paket	14.916.700	100	92,61	3 Paket	14.916.700,00	16,67	25,35	KECAMATAN HALONG	Tercapai
7.	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	751.819.000	12 Laporan	181.688.556	12 Laporan	321.295.000	12 Laporan	318.163.270	100	99,03	12 Laporan	318.163.270,00	16,67	42,32	KECAMATAN HALONG	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	95,82			16,67	33,83		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Waktu Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0 Bulan	0	0 Bulan	0	3 Bulan	156.201.200	3 Bulan	143.928.000	100	92,14	3 Bulan	143.928.000,00	0	0		Tercapai
8.	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0 Unit	0	0 Unit	0	2 Unit	80.000.000	2 Unit	74.928.000	100	93,66	2 Unit	74.928.000,00	0	0	KECAMATAN HALONG	Tercapai

9.	7.01.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		0 Unit	0	0 Unit	0	12 Unit	76.201.200	12 Unit	69.000.000	100	90,55	12 Unit	69.000.000,00	0	0	KECAMATAN HALONG	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	92,1			0	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	698.629.000	12 Bulan	103.331.699	12 Bulan	135.378.400	12 Bulan	121.004.176	100	89,38	12 Bulan	121.004.176,00	16,67	17,32		Tercapai
10.	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	217.315.000	12 Laporan	17.930.699	12 Laporan	32.900.000	12 Laporan	19.375.976	100	58,89	12 Laporan	19.375.976,00	16,67	8,92	KECAMATAN HALONG	Tercapai
11.	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	481.314.000	12 Laporan	85.401.000	12 Laporan	102.478.400	12 Laporan	101.628.200	100	99,17	12 Laporan	101.628.200,00	16,67	21,11	KECAMATAN HALONG	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	79,03			16,67	15,02		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 Bulan	397.138.000	12 Bulan	73.203.617	12 Bulan	121.591.050	12 Bulan	100.204.542	100	82,41	12 Bulan	100.204.542,00	16,67	25,23		Tercapai
12.	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	73 Unit	291.640.000	11 Unit	55.603.617	12 Unit	86.452.050	12 Unit	65.104.542	100	75,31	12 Unit	65.104.542,00	16,44	22,32	KECAMATAN HALONG	Tercapai
13.	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 Unit	105.498.000	3 Unit	17.600.000	3 Unit	35.139.000	3 Unit	35.100.000	100	99,89	3 Unit	35.100.000,00	16,67	33,27	KECAMATAN HALONG	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	87,6			16,55	27,8		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	92,1			27,78	21,45		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase PATEN yang Terlayani sesuai Standar Pelayanan**	**100%**	**732.822.000**	**100%**	**134.795.000**	**100%**	**173.156.400**	**100%**	**173.151.000**	**100**	**100**	**100%**	**173.151.000,00**	**100**	**23,63**		**Tercapai**
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	100%	732.822.000	100%	134.795.000	100%	173.156.400	100%	173.151.000	100	100	100%	173.151.000,00	100	23,63		Tercapai
14.	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72 Laporan	732.822.000	12 Laporan	134.795.000	12 Laporan	173.156.400	12 Laporan	173.151.000	100	100	12 Laporan	173.151.000,00	16,67	23,63	KECAMATAN HALONG	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			16,67	23,63		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	100			100	23,63		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Desa**	**100%**	**1.773.200.000**	**100%**	**327.925.000**	**100%**	**116.419.500**	**100%**	**115.371.920**	**100**	**99,1**	**100%**	**115.371.920,00**	**100**	**6,51**		**Tercapai**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	1.698.200.000	100%	327.925.000	100%	0	100%	0	100	0	100%	0	100	0		Tercapai
15.	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	1.698.200.000	12 Laporan	327.925.000	12 Laporan	0	12 Laporan	0	100	0	12 Laporan	0	20	0	KECAMATAN HALONG	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	0			20	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	75.000.000	0%	0	100%	116.419.500	100%	115.371.920	100	99,1	100%	115.371.920,00	100	153,83		Tercapai
16.	7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	35 Keluarga	75.000.000	0 Keluarga	0	35 Keluarga	116.419.500	35 Keluarga	115.371.920	100	99,1	35 Keluarga	115.371.920,00	100	153,83	KECAMATAN HALONG	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,1			100	153,83		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	49,55			100	76,91		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Tinggi	Tinggi		
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor**	**100%**	**53.115.000**	**100%**	**8.684.000**	**100%**	**2.886.400**	**100%**	**2.440.000**	**100**	**84,53**	**100%**	**2.440.000,00**	**100**	**4,59**		**Tercapai**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Waktu Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	60 Bulan	53.115.000	12 Bulan	8.684.000	12 Bulan	2.886.400	12 Bulan	2.440.000	100	84,53	12 Bulan	2.440.000,00	20	4,59		Tercapai
17.	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	60 Laporan	53.115.000	12 Laporan	8.684.000	12 Laporan	2.886.400	12 Laporan	2.440.000	100	84,53	12 Laporan	2.440.000,00	20	4,59	KECAMATAN HALONG	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	84,53			20	4,59		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	84,53			20	4,59		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa**	**100%**	**993.890.000**	**100%**	**149.110.000**	**100%**	**226.528.400**	**100%**	**219.819.000**	**100**	**97,04**	**100%**	**219.819.000,00**	**100**	**22,12**		**Tercapai**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100%	993.890.000	100%	149.110.000	100%	226.528.400	100%	219.819.000	100	97,04	100%	219.819.000,00	100	22,12		Tercapai
18.	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	32 Dokumen	993.890.000	4 Dokumen	149.110.000	5 Dokumen	226.528.400	4 Dokumen	219.819.000	80	97,04	4 Dokumen	219.819.000,00	12,5	22,12	KECAMATAN HALONG	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	80	97,04			12,5	22,12		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	97,04			100	22,12		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa**	**100%**	**799.279.400**	**100%**	**95.556.600**	**100%**	**192.080.800**	**100%**	**185.908.750**	**100**	**96,79**	**100%**	**185.908.750,00**	**100**	**23,26**		**Tercapai**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa	100%	799.279.400	100%	95.556.600	100%	192.080.800	100%	185.908.750	100	96,79	100%	185.908.750,00	100	23,26		Tercapai
19.	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	24 Dokumen	354.984.400	0 Dokumen	0	2 Dokumen	39.984.400	3 Dokumen	34.458.750	150	86,18	3 Dokumen	34.458.750,00	12,5	9,71	KECAMATAN HALONG	Melebihi Target
20.	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	18 Dokumen	393.885.000	3 Dokumen	88.020.000	96 Dokumen	143.400.000	96 Dokumen	143.400.000	100	100	96 Dokumen	143.400.000,00	533,33	36,41	KECAMATAN HALONG	Tercapai
21.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	11 Dokumen	50.410.000	2 Dokumen	7.536.600	1 Dokumen	8.696.400	1 Dokumen	8.050.000	100	92,57	1 Dokumen	8.050.000,00	9,09	15,97	KECAMATAN HALONG	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	116,67	92,92			184,97	20,69		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	96,79			100	23,26		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	100,48	94,83			98,84	16,46		
											Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**99,53**	**92,44**			**43,29**	**26,65**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		

			Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**4.921.582.520**		**4.549.462.508**												
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Sumber Daya Manusia dan Tambahan Pagu pada Anggaran Perubahan																	
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Tidak Selarasnya antara Belanja dengan Indikator Kinerja dan Target Capaian Kinerja pada sebagian Sub Kegiatan																	
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Untuk Tahun 2024, dengan Pohon Kinerja dan Cascading Terbaru, diharapkan dapat lebih meningkatkan Kinerja SKPD																	

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**60.48 Nilai**	**17.892.443.402**	**60.48 Nilai**	**3.270.836.248**	**60.48 Nilai**	**5.113.400.573**	**69,65 Nilai**	**4.886.877.961**	**115,16**	**95,57**	**69.65 Nilai**	**4.886.877.961,00**	**115,16**	**27,31**		**Melebihi Target**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang disusun	24 Dokumen	5.650.000	3 Dokumen	4.640.000	4 Dokumen	10.552.500	4 Dokumen	10.552.500	100	100	4 Dokumen	10.552.500,00	16,67	186,77		Tercapai
1.	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	24 Dokumen	5.650.000	3 Dokumen	4.640.000	4 Dokumen	10.552.500	4 Dokumen	10.552.500	100	100	4 Dokumen	10.552.500,00	16,67	186,77	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			16,67	186,77		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi keuangan yang dilaksanakan	100%	15.423.600.452	100%	2.843.870.910	100%	3.773.725.123	95,51%	3.598.996.306	95,51	95,37	95.51 %	3.598.996.306,00	95,51	23,33		Tidak Tercapai
2.	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang dilaksanakan	84 Bulan	15.005.660.452	14 Bulan	2.728.432.110	14 Bulan	3.332.300.923	14 Bulan	3.182.540.486	100	95,51	14 Bulan	3.182.540.486,00	16,67	21,21	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
3.	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	72 Bulan	412.290.000	12 Bulan	108.500.000	12 Bulan	428.190.500	12 Bulan	403.242.120	100	94,17	12 Bulan	403.242.120,00	16,67	97,81	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
4.	7.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	24 Dokumen	5.650.000	5 Dokumen	6.938.800	4 Dokumen	13.233.700	4 Dokumen	13.213.700	100	99,85	4 Dokumen	13.213.700,00	16,67	233,87	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,51			16,67	117,63		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kelancaran pelayanan administrasi kantor	100%	434.800.000	98.21 %	31.330.000	100%	112.745.000	86,70%	97.745.000	86,7	86,7	86.7 %	97.745.000,00	86,7	22,48		Tidak Tercapai
5.	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Terlaksananya pemenuhan jumlah pakaian pakaian/kain	175 stel	112.500.000	40 stel	24.500.000	50 stel	38.345.000	50 stel	38.345.000	100	100	50 stel	38.345.000,00	28,57	34,08	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
6.	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang undangan	75 kali	322.300.000	1 kali	6.830.000	1 kali	74.400.000	1 kali	59.400.000	100	79,84	1 kali	59.400.000,00	1,33	18,43	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	89,92			14,95	26,26		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perkantoran	100%	1.070.743.450	100%	237.488.852	100%	457.580.000	99,34%	454.550.626	99,34	99,34	99.34 %	454.550.626,00	99,34	42,45		Tidak Tercapai
7.	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72 Bulan	20.210.000	12 Bulan	2.625.000	12 Bulan	11.415.400	12 Bulan	11.406.600	100	99,92	12 Bulan	11.406.600,00	16,67	56,44	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
8.	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	3 Buah	66.300.000	3 Buah	35.000.000	2 Buah	55.446.100	2 Buah	52.799.300	100	95,23	2 Buah	52.799.300,00	66,67	79,64	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
9.	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Makan Minum Rapat	72 bulan	326.416.000	12 bulan	48.925.200	12 bulan	90.334.600	12 bulan	90.304.300	100	99,97	12 bulan	90.304.300,00	16,67	27,67	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
10.	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	72 Bulan	106.367.450	12 Bulan	13.232.500	12 Bulan	39.368.900	12 Bulan	39.308.600	100	99,85	12 Bulan	39.308.600,00	16,67	36,96	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
11.	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	900 Orang/Perjalanan	551.450.000	150 Orang/Perjalanan	137.706.152	150 Orang/Perjalanan	261.015.000	150 Orang/Perjalanan	260.731.826	100	99,89	150 Orang/Perjalanan	260.731.826,00	16,67	47,28	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,97			26,67	49,6		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72 Bulan	585.789.500	12 Bulan	96.327.760	12 Bulan	175.516.300	12 Bulan	156.088.129	100	88,93	12 Bulan	156.088.129,00	16,67	26,65		Tercapai
12.	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	72 Bulan	427.800.000	12 Bulan	71.885.760	12 Bulan	135.800.000	12 Bulan	116.375.429	100	85,7	12 Bulan	116.375.429,00	16,67	27,2	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
13.	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 Bulan	157.989.500	12 Bulan	24.442.000	12 Bulan	39.716.300	12 Bulan	39.712.700	100	99,99	12 Bulan	39.712.700,00	16,67	25,14	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	92,84			16,67	26,17		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang dilaksanakan	100%	371.860.000	100%	57.178.726	100%	583.281.650	97,54%	568.945.400	97,54	97,54	97.54 %	568.945.400,00	97,54	153		Tidak Tercapai
14.	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	72 Bulan	241.600.000	12 Bulan	39.178.726	12 Bulan	275.448.400	12 Bulan	262.976.500	100	95,47	12 Bulan	262.976.500,00	16,67	108,85	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
15.	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	65.713.100	3 Unit	65.083.100	100	99,04	3 Unit	65.083.100,00	0	0	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
16.	7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	72 Bulan	130.260.000	12 Bulan	18.000.000	12 Bulan	242.120.150	12 Bulan	240.885.800	100	99,49	12 Bulan	240.885.800,00	16,67	184,93	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98			11,11	97,92		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	96,52	94,65			68,74	75,78		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); Persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu**	**72 bulan**	**689.951.736**	**12 bulan**	**113.656.500**	**12 bulan**	**20.919.700**	**12 bulan**	**15.601.600**	**100**	**74,58**	**12 bulan**	**15.601.600,00**	**16,67**	**2,26**		**Tercapai**
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	100%	689.951.736	100%	113.656.500	100%	20.919.700	74,58%	15.601.600	74,58	74,58	74.58 %	15.601.600,00	74,58	2,26		Tidak Tercapai
17.	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Tercapainya Indek Kepuasan Masyarakat yang ditargetkan terhadap Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	72 Bulan	689.951.736	12 Bulan	113.656.500	12 Bulan	20.919.700	12 Bulan	15.601.600	100	74,58	12 Bulan	15.601.600,00	16,67	2,26	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	74,58			16,67	2,26		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	74,58	74,58			74,58	2,26		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Memfasilitasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan keagamaan untuk meningkatkan cinta tanah air serta keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa**	**72 bulan**	**1.730.975.400**	**12 bulan**	**271.250.000**	**12 bulan**	**118.704.200**	**12 bulan**	**117.186.000**	**100**	**98,72**	**12 bulan**	**117.186.000,00**	**16,67**	**6,77**		**Tercapai**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	108 desa	1.730.975.400	18 desa	271.250.000	18 desa	34.604.200	18 desa	33.670.000	100	97,3	18 desa	33.670.000,00	16,67	1,95		Tercapai
18.	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	18.604.200	1 Dokumen	17.700.000	100	95,14	1 Dokumen	17.700.000,00	0	0	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
19.	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat diwilayah Kecamatan	72 Bulan	1.730.975.400	12 Bulan	271.250.000	12 Bulan	16.000.000	12 Bulan	15.970.000	100	99,81	12 Bulan	15.970.000,00	16,67	0,92	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,48			8,33	0,46		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		

	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0%	0	0%	0	100%	84.100.000	98,72%	83.516.000	98,72	99,31	98.72 %	83.516.000,00	0	0		Tidak Tercapai
20.	7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	0 keluarga	0	0 keluarga	0	1 keluarga	84.100.000	1 keluarga	83.516.000	100	99,31	1 keluarga	83.516.000,00	0	0	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,31			0	0		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	99,36	98,3			8,33	0,97		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Pelayanan adminstrasi kependudukan kecamatan**	**6 Kegiatan**	**82.950.000**	**2 Kegiatan**	**8.230.000**	**2 Kegiatan**	**11.584.800**	**2 Kegiatan**	**11.584.800**	**100**	**100**	**2 Kegiatan**	**11.584.800,00**	**33,33**	**13,97**		**Tercapai**
	7.01.04.2.03	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	82.950.000	2 Kegiatan	8.230.000	2 Kegiatan	11.584.800	2 Kegiatan	11.584.800	100	100	2 Kegiatan	11.584.800,00	33,33	13,97		Tercapai
21.	7.01.04.2.03.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	82.950.000	2 Kegiatan	8.230.000	2 Kegiatan	11.584.800	2 Kegiatan	11.584.800	100	100	2 Kegiatan	11.584.800,00	33,33	13,97	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			33,33	13,97		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	100			33,33	13,97		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa**	**100%**	**961.612.000**	**100%**	**152.477.500**	**100%**	**332.019.500**	**98,73%**	**327.816.200**	**98,73**	**98,73**	**98.73 %**	**327.816.200,00**	**98,73**	**34,09**		**Tidak Tercapai**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	100%	961.612.000	100%	152.477.500	100%	332.019.500	98,73%	327.816.200	98,73	98,73	98.73 %	327.816.200,00	98,73	34,09		Tidak Tercapai
22.	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase pelaksanaan pembinaan wawasan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerintahan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	100%	0	100%	0	100%	188.019.500	98,76%	185.687.000	98,76	98,76	98,76%	185.687.000,00	98,76	0	KECAMATAN BATUMANDI	Tidak Tercapai
23.	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Kegiatan Kemasyarakatan yang dilaksanakan	36 kegiatan	961.612.000	6 kegiatan	152.477.500	6 kegiatan	144.000.000	6 kegiatan	142.129.200	100	98,7	6 kegiatan	142.129.200,00	16,67	14,78	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	99,38	98,73			57,71	7,39		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	98,73	98,73			98,73	34,09		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa**	**100%**	**173.550.000**	**100%**	**26.510.000**	**100%**	**118.049.200**	**96,18%**	**113.545.000**	**96,18**	**96,18**	**96.18 %**	**113.545.000,00**	**96,18**	**65,42**		**Tidak Tercapai**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	173.550.000	100%	26.510.000	100%	118.049.200	96,18%	113.545.000	96,18	96,18	96.18 %	113.545.000,00	96,18	65,42		Tidak Tercapai
24.	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	25.805.600	1 Dokumen	25.770.000	100	99,86	1 Dokumen	25.770.000,00	0	0	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
25.	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	108 desa	98.300.000	18 desa	16.870.000	18 desa	18.301.400	18 desa	17.980.000	100	98,24	18 desa	17.980.000,00	16,67	18,29	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
26.	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	0 Dokumen	0	0 Dokumen	0	1 Dokumen	8.298.000	1 Dokumen	6.060.000	100	73,03	1 Dokumen	6.060.000,00	0	0	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
27.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan	12 kegiatan	75.250.000	2 kegiatan	9.640.000	2 kegiatan	17.244.200	2 kegiatan	15.950.000	100	92,49	2 kegiatan	15.950.000,00	16,67	21,2	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
28.	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa	0 dokumen	0	0 dokumen	0	1 dokumen	48.400.000	1 dokumen	47.785.000	100	98,73	1 dokumen	47.785.000,00	0	0	KECAMATAN BATUMANDI	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	92,47			6,67	7,9		
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	95,61	96,18			96,18	65,42		
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	101,68	93,96			62,79	24,97		
												Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**99,95**	**95,76**			**18,29**	**44,92**		
												Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
									5.714.677.973		**5.472.611.561**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Penyesuaian capaian target dan sasaran kegiatan serta sumber daya manusia kantor kecamatan batumandi yang mendukung keberhasilan kinerja tersebut																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Kesalahan kode rekening dan tidak terealisasinya sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Lebih Memaksimalkan Realisasi Keuangan dan Kinerja																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**68.65 nilai**	**21.248.004.227**	**70.22 nilai**	**5.710.727.882**	**67 nilai**	**3.825.463.341**	**72,7 nilai**	**3.466.709.276**	**108,51**	**90,62**	**72.7 nilai**	**3.466.709.276,00**	**105,9**	**16,32**		**Melebihi Target**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	36 dokumen	322.180.725	12 dokumen	101.256.700	6 dokumen	91.990.700	6 dokumen	91.240.700	100	99,18	18 dokumen	192.497.400,00	50	59,75		Tercapai
1.	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	258.858.715	4 Dokumen	93.130.000	2 Dokumen	75.588.600	2 Dokumen	75.578.600	100	99,99	6 Dokumen	168.708.600,00	50	65,17	KECAMATAN JUAI	Tercapai
2.	7.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12 Dokumen	23.663.775	4 Dokumen	3.066.700	2 Dokumen	5.879.600	2 Dokumen	5.659.600	100	96,26	6 Dokumen	8.726.300,00	50	36,88	KECAMATAN JUAI	Tercapai
3.	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Dokumen	39.658.235	4 Dokumen	5.060.000	2 Dokumen	10.522.500	2 Dokumen	10.002.500	100	95,06	6 Dokumen	15.062.500,00	50	37,98	KECAMATAN JUAI	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,1			50	46,68		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	72 Bulan	18.489.579.784	24 Bulan	4.608.465.570	12 Bulan	2.905.008.991	12 Bulan	2.617.065.144	100	90,09	36 Bulan	7.225.530.714,00	50	39,08		Tercapai
4.	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	22 Orang Per Bulan	18.050.515.282	20 Orang Per Bulan	4.198.548.970	22 Orang Per Bulan	2.798.827.791	17 Orang Per Bulan	2.514.300.984	77,27	89,83	17 Orang Per Bulan	2.514.300.984,00	77,27	13,93	KECAMATAN JUAI	Tidak Tercapai
5.	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24 Dokumen	439.064.502	8 Dokumen	409.916.600	4 Dokumen	106.181.200	4 Dokumen	102.764.160	100	96,78	12 Dokumen	512.680.760,00	50	116,77	KECAMATAN JUAI	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	88,64	93,31			63,64	65,35		Tidak Tercapai

											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	72 bulan	326.788.232	24 bulan	101.580.000	12 bulan	81.600.000	12 bulan	80.921.800	100	99,17	36 bulan	182.501.800,00	50	55,85		Tercapai
6.	7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 Orang	326.788.232	30 Orang	101.580.000	15 Orang	81.600.000	32 Orang	80.921.800	213,33	99,17	62 Orang	182.501.800,00	68,89	55,85	KECAMATAN JUAI	Melebihi Target
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	213,33	99,17			68,89	55,85		Melebihi Target
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Rendah		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 Bulan	1.197.439.523	24 Bulan	516.406.402	12 Bulan	323.247.400	12 Bulan	314.932.800	100	97,43	36 Bulan	831.339.202,00	50	69,43		Tercapai
7.	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	48.376.874	2 Paket	12.537.500	1 Paket	1.460.900	1 Paket	1.460.900	100	100	3 Paket	13.998.400,00	50	28,94	KECAMATAN JUAI	Tercapai
8.	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	407.345.629	2 Paket	352.345.000	1 Paket	116.057.500	1 Paket	107.742.900	100	92,84	3 Paket	460.087.900,00	50	112,95	KECAMATAN JUAI	Tercapai
9.	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	168.200.298	2 Paket	39.969.500	1 Paket	125.640.000	1 Paket	125.640.000	100	100	3 Paket	165.609.500,00	50	98,46	KECAMATAN JUAI	Tercapai
10.	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Laporan	573.516.722	24 Laporan	111.554.402	12 Laporan	80.089.000	12 Laporan	80.089.000	100	100	36 Laporan	191.643.402,00	50	33,42	KECAMATAN JUAI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,21			50	68,44		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	505.017.536	24 Bulan	170.725.160	12 Bulan	213.705.900	12 Bulan	156.376.132	100	73,17	36 Bulan	327.101.292,00	50	64,77		Tercapai
11.	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan	55.552.392	2 Laporan	27.600.000	1 Laporan	70.536.100	1 Laporan	50.536.100	100	71,65	3 Laporan	78.136.100,00	50	140,65	KECAMATAN JUAI	Tercapai
12.	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	380.024.654	24 Laporan	131.215.160	12 Laporan	135.336.000	12 Laporan	98.040.032	100	72,44	36 Laporan	229.255.192,00	50	60,33	KECAMATAN JUAI	Tercapai
13.	7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan	69.440.490	2 Laporan	11.910.000	1 Laporan	7.833.800	1 Laporan	7.800.000	100	99,57	3 Laporan	19.710.000,00	50	28,38	KECAMATAN JUAI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	81,22			50	76,45		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Tinggi		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	72 Bulan	406.998.427	24 Bulan	212.294.050	12 Bulan	209.910.350	12 Bulan	206.172.700	100	98,22	36 Bulan	418.466.750,00	50	102,82		Tercapai
14.	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	13 Unit	268.117.447	13 Unit	112.810.550	13 Unit	90.346.350	13 Unit	86.608.700	100	95,86	13 Unit	86.608.700,00	100	32,3	KECAMATAN JUAI	Tercapai
15.	7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	138.880.980	2 Unit	99.483.500	2 Unit	119.564.000	2 Unit	119.564.000	100	100	2 Unit	119.564.000,00	100	86,09	KECAMATAN JUAI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,93			100	59,2		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	92,88			50	65,28		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan**	**100%**	**1.079.180.567**	**100%**	**206.658.600**	**100%**	**96.238.100**	**100%**	**96.238.100**	**100**	**100**	**100%**	**96.238.100,00**	**100**	**8,92**		**Tercapai**
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase capaian penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	100%	319.011.666	100%	0	100%	86.217.700	100%	86.217.700	100	100	100%	86.217.700,00	100	27,03		Tercapai
16.	7.01.02.2.02.03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	319.011.666	2 Laporan	0	1 Laporan	86.217.700	1 Laporan	86.217.700	100	100	3 Laporan	86.217.700,00	50	27,03	KECAMATAN JUAI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			50	27,03		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase capaian pelaksanaan urusan pemerintah yang dilimpahkan kepada camat	100%	760.168.901	100%	206.658.600	100%	10.020.400	100%	10.020.400	100	100	100%	10.020.400,00	100	1,32		Tercapai
17.	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6 Laporan	760.168.901	2 Laporan	206.658.600	1 Laporan	10.020.400	1 Laporan	10.020.400	100	100	3 Laporan	216.679.000,00	50	28,5	KECAMATAN JUAI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	100			50	28,5		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	100			100	14,17		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase fasilitasi pelaksanaan musrenbang desa**	**100%**	**784.585.976**	**100%**	**32.887.200**	**100%**	**199.160.300**	**100%**	**199.130.300**	**100**	**99,98**	**100%**	**199.130.300,00**	**100**	**25,38**		**Tercapai**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi pemberdayaan masyarakat desa	100%	293.176.939	100%	32.887.200	100%	74.046.600	100%	74.036.600	100	99,99	100%	74.036.600,00	100	25,25		Tercapai
18.	7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	24 Lembaga Kemasyarakatan	23.804.618	8 Lembaga Kemasyarakatan	0	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.129.200	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.119.200	100	99,81	4 Lembaga Kemasyarakatan	5.119.200,00	16,67	21,51	KECAMATAN JUAI	Tercapai
19.	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6 Dokumen	185.291.461	2 Dokumen	0	1 Dokumen	63.087.400	1 Dokumen	63.087.400	100	100	3 Dokumen	63.087.400,00	50	34,05	KECAMATAN JUAI	Tercapai
20.	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	84.080.860	2 Laporan	32.887.200	1 Laporan	5.830.000	1 Laporan	5.830.000	100	100	3 Laporan	38.717.200,00	50	46,05	KECAMATAN JUAI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,94			38,89	33,87		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	491.409.037	100%	0	100%	125.113.700	100%	125.093.700	100	99,98	100%	125.093.700,00	100	25,46		Tercapai
21.	7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	300 Keluarga	491.409.037	100 Keluarga	0	50 Keluarga	125.113.700	50 Keluarga	125.093.700	100	99,98	150 Keluarga	125.093.700,00	50	25,46	KECAMATAN JUAI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,98			50	25,46		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,99			100	25,35		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan lintas sektor**	**100%**	**348.591.259**	**100%**	**56.060.000**	**100%**	**119.878.800**	**100%**	**119.478.800**	**100**	**99,67**	**100%**	**119.478.800,00**	**100**	**34,27**		**Tercapai**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	100%	348.591.259	100%	56.060.000	100%	119.878.800	100%	119.478.800	100	99,67	100%	119.478.800,00	100	34,27		Tercapai
22.	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	348.591.259	2 Laporan	56.060.000	1 Laporan	119.878.800	1 Laporan	119.478.800	100	99,67	3 Laporan	175.538.800,00	50	50,36	KECAMATAN JUAI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,67			50	50,36		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,67			100	34,27		Tercapai

												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase desa tertib administrasi umum**	**100%**	**1.874.607.846**	**100%**	**307.565.000**	**100%**	**341.236.500**	**100%**	**339.053.100**	**100**	**99,36**	**100%**	**339.053.100,00**	**100**	**18,09**		**Tercapai**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	1.874.607.846	100%	307.565.000	100%	341.236.500	100%	339.053.100	100	99,36	100%	339.053.100,00	100	18,09		Tercapai
23.	7.01.05.2.01.01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	450 orang	337.619.756	450 orang	0	450 orang	143.414.100	450 orang	143.304.900	100	99,92	450 orang	143.304.900,00	100	42,45	KECAMATAN JUAI	Tercapai
24.	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen	1.536.988.090	2 Dokumen	307.565.000	1 Dokumen	197.822.400	1 Dokumen	195.748.200	100	98,95	3 Dokumen	503.313.200,00	50	32,75	KECAMATAN JUAI	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,44			75	37,6		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,36			100	18,09		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa**	**100%**	**694.146.486**	**100%**	**6.729.999.800**	**100%**	**230.672.300**	**100%**	**211.587.500**	**100**	**91,73**	**100%**	**211.587.500,00**	**100**	**30,48**		**Tercapai**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	694.146.486	100%	6.729.999.800	100%	230.672.300	100%	211.587.500	100	91,73	100%	211.587.500,00	100	30,48		Tercapai
25.	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	268.784.908	2 Dokumen	0	1 Dokumen	89.563.900	1 Dokumen	70.479.100	100	78,69	3 Dokumen	70.479.100,00	50	26,22	KECAMATAN JUAI	Tercapai
26.	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	321.278.000	2 Dokumen	6.695.020.000	1 Dokumen	88.390.200	1 Dokumen	88.390.200	100	100	3 Dokumen	6.783.410.200,00	50	2.111,38	KECAMATAN JUAI	Tercapai
27.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	104.083.578	2 Dokumen	34.979.800	1 Dokumen	52.718.200	1 Dokumen	52.718.200	100	100	3 Dokumen	87.698.000,00	50	84,26	KECAMATAN JUAI	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	92,9			50	740,62		
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	92,86	91,73			100	30,48		
												Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	86,93	96,89			100,98	22,24		
												Predikat Kinerja (Program)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**100,14**	**92,09**			**56,03**	**128,82**		
												Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Tinggi**			**Rendah**	**Sangat Tinggi**		
								Jumlah Anggaran dari seluruh Program		**4.812.649.341**				**4.432.197.076**						
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		- meningkatnya SDM pelaku/pengelola keuangan atas penatausahaan keuangan di Kecamatan Juai - meningkatnya koordinasi antar pelaksana kegiatan sehingga mempermudah pengawasan dan pencapaian target kegiatan melalui pelaksanaan rapat koordinasi																	
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		- Anggaran penyediaan gaji dan tunjangan tersisa Rp. 284.526.807 sedangkan gaji desember dan TPP november sudah direalisasikan. - Kelebihan penyediaan anggaran di belanja pajak dan bea perizinan kendaraan dinas roda 2 dan 4 serta anggaran belanja air,																	
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		-meningkatkan pengawasan internal atas pelaksanaan penatausahaan keuangan dan monitoring pencapaian target kinerja secara berkala - melakukan rapat evaluasi dengan masing-masing PPTK mengenai evaluasi pelaksanaan kegiatan dan realisasi SPJ sub																	

No	**Kode**	**Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan**	**Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub**	**Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode**		**Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu**		**Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun**		**Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun**		**Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023**		**Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah**		**Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab**	**Keterangan**
1	2	3	4	5		6		7		12		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		16	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**78.2**	**25.224.825.439**	**70.65**	**5.203.067.569**	**70.65**	**6.788.051.966**	**71,1**	**6.156.671.618**	**100,64**	**90,7**	**71.1**	**6.156.671.618,00**	**90,92**	**24,41**		**Melebihi Target**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentasi dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang disampaikan tepat waktu	100%	75.041.723	70.67 %	9.030.000	100%	18.753.000	100%	18.503.000	100	98,67	170.67 %	27.533.000,00	170,67	36,69		Tercapai
1.	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	75.041.723	1 Laporan	9.030.000	1 Laporan	18.753.000	1 Laporan	18.503.000	100	98,67	2 Laporan	27.533.000,00	33,33	36,69	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	98,67			33,33	36,69		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	204 Orang/ Bulan	20.927.171.841	34 Orang/ Bulan	4.060.720.924	34 Orang/ Bulan	5.043.186.716	34 Orang/ Bulan	4.469.407.971	100	88,62	68 Orang/ Bulan	8.530.128.895,00	33,33	40,76		Tercapai
2.	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	204 Orang/ Bulan	20.927.171.841	34 Orang/ Bulan	4.060.720.924	34 Orang/ Bulan	5.043.186.716	34 Orang/ Bulan	4.469.407.971	100	88,62	68 Orang/ Bulan	8.530.128.895,00	33,33	40,76	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	88,62			33,33	40,76		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	terlaksananya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	72 bulan	82.222.700	12 bulan	39.650.000	12 bulan	70.755.700	12 bulan	67.987.900	100	96,09	24 bulan	107.637.900,00	33,33	130,91		Tercapai
3.	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	240 Paket	82.222.700	40 Paket	39.650.000	45 Paket	70.755.700	5 Paket	67.987.900	11,11	96,09	45 Paket	107.637.900,00	18,75	130,91	KECAMATAN PARINGIN	Tidak Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	11,11	96,09			18,75	130,91		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan pelaksanaan administrasi umum	72 bulan	1.419.991.903	12 bulan	546.310.050	12 bulan	706.964.600	12 bulan	697.891.486	100	98,72	24 bulan	1.244.201.536,00	33,33	87,62		Tercapai
4.	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	72 Paket	29.647.744	12 Paket	12.447.000	12 Paket	16.013.900	12 Paket	15.793.200	100	98,62	24 Paket	28.240.200,00	33,33	95,25	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
5.	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	72 Paket	207.215.887	12 Paket	88.505.000	12 Paket	57.799.200	12 Paket	57.032.300	100	98,67	24 Paket	145.537.300,00	33,33	70,23	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
6.	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	124.848.710	4 Paket	34.621.050	4 Paket	31.963.800	4 Paket	29.015.500	100	90,78	8 Paket	63.636.550,00	33,33	50,97	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
7.	7.01.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 Dokumen	22.552.512	12 Dokumen	8.550.000	12 Dokumen	7.467.600	12 Dokumen	6.720.000	100	89,99	24 Dokumen	15.270.000,00	33,33	67,71	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
8.	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72 Bulan	1.035.727.050	12 Bulan	402.187.000	12 Bulan	593.720.100	12 Bulan	589.330.486	100	99,26	24 Bulan	991.517.486,00	33,33	95,73	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	95,46			33,33	75,98		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	cakupan pelaksanaan pengadaan barang milik daerah	100%	77.524.260	99.3 %	28.480.000	100%	28.439.000	100%	28.408.000	100	99,89	199.3 %	56.888.000,00	199,3	73,38		Tercapai
9.	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	55 Paket	77.524.260	6 Paket	28.480.000	20 Paket	28.439.000	20 Paket	28.408.000	100	99,89	26 Paket	56.888.000,00	47,27	73,38	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,89			47,27	73,38		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktupenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	72 bulan	2.378.705.102	12 bulan	447.242.515	12 bulan	739.440.850	12 bulan	701.424.947	100	94,86	24 bulan	1.148.667.462,00	33,33	48,29		Tercapai
10.	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	542.066.700	12 Laporan	105.810.435	12 Laporan	144.276.550	12 Laporan	133.174.467	100	92,3	24 Laporan	238.984.902,00	33,33	44,09	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
11.	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1.836.638.402	12 Laporan	341.432.080	12 Laporan	595.164.300	12 Laporan	568.250.480	100	95,48	24 Laporan	909.682.560,00	33,33	49,53	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	93,89			33,33	46,81		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	waktu pemeliharaan bararng milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	72 bulan	264.167.910	12 bulan	71.634.080	12 bulan	180.512.100	12 bulan	173.048.314	100	95,87	24 bulan	244.682.394,00	33,33	92,62		Tercapai

12.	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32 Unit	264.167.910	32 Unit	71.634.080	32 Unit	110.560.100	2 Unit	103.303.114	6,25	93,44	34 Unit	174.937.194,00	106,25	66,22	KECAMATAN PARINGIN	Tidak Tercapai
13.	7.01.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	18 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	69.952.000	3 Unit	69.745.200	100	99,7	3 Unit	69.745.200,00	16,67	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	53,13	96,57			61,46	33,11		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Rendah	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	96,1			76,66	72,9		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Tinggi	Sangat Rendah		
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Kecamatan Paringin**	**100%**	**443.055.845**	**86.65 %**	**63.891.000**	**86.65 %**	**108.196.000**	**86,65%**	**108.034.000**	**100**	**99,85**	**86.65 %**	**108.034.000,00**	**86,65**	**24,38**		**Tercapai**
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Publik Sesuai SOP	100%	443.055.845	95.23 %	63.891.000	100%	108.196.000	100%	108.034.000	100	99,85	195.23 %	171.925.000,00	195,23	38,8		Tercapai
14.	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	72 Laporan	443.055.845	12 Laporan	63.891.000	12 Laporan	108.196.000	12 Laporan	108.034.000	100	99,85	24 Laporan	171.925.000,00	33,33	38,8	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	99,85			33,33	38,8		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,85			195,23	38,8		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa Dengan Pemberdayaan Masyarakat Yang Aktif**	**100%**	**1.443.302.038**	**100%**	**2.182.848.648**	**100%**	**3.464.228.800**	**100%**	**2.844.528.379**	**100**	**82,11**	**200%**	**5.027.377.027,00**	**200**	**348,32**		**Tercapai**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100%	1.443.302.038	88.68 %	251.448.000	100%	105.907.200	100%	105.467.200	100	99,58	188.68 %	356.915.200,00	188,68	24,73		Tercapai
15.	7.01.03.2.01.02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	72 Dokumen	0	12 Dokumen	0	12 Dokumen	8.707.200	12 Dokumen	8.277.200	100	95,06	24 Dokumen	8.277.200,00	33,33	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
16.	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72 Laporan	1.443.302.038	12 Laporan	251.448.000	12 Laporan	97.200.000	12 Laporan	97.190.000	100	99,99	24 Laporan	348.638.000,00	33,33	24,16	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	97,53			33,33	12,08		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100%	0	87%	1.931.400.648	100%	3.204.374.500	100%	2.619.258.455	100	81,74	187%	4.550.659.103,00	187	0		Tercapai
17.	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	0	12 Unit	1.405.830.248	12 Unit	2.469.105.100	12 Unit	1.921.759.455	100	77,83	24 Unit	3.327.589.703,00	200	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
18.	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Jumlah Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	72 Bulan	0	12 Bulan	525.570.400	12 Bulan	735.269.400	12 Bulan	697.499.000	100	94,86	24 Bulan	1.223.069.400,00	33,33	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	86,35			116,67	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	n/a	n/a	0	n/a	0	n/a	125.118.300	n/a	119.802.724	0	0	n/a	119.802.724	0	0		Tidak Tercapai
19.	7.01.03.2.06.05	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang kepemilikan rumah	0%	0	0%	0	100%	14.414.400	100%	13.920.000	100	96,57	100%	13.920.000,00	0	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
20.	7.01.03.2.06.07	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	0%	0	0%	0	100%	14.414.400	100%	12.612.000	100	87,5	100%	12.612.000,00	0	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
21.	7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Menuju Keluarga Berkualitas	0%	0	0%	0	100%	96.289.500	100%	93.270.724	100	96,86	100%	93.270.724,00	0	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	93,64			0	0		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	66,67	60,44			125,23	8,24		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Rendah			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Kecamatan Paringin**	**100%**	**44.928.833**	**100%**	**10.030.000**	**100%**	**175.025.200**	**100%**	**174.580.000**	**100**	**99,75**	**200%**	**184.610.000,00**	**200**	**410,89**		**Tercapai**
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	100%	44.928.833	100%	10.030.000	100%	165.810.800	100%	165.640.000	100	99,9	200%	175.670.000,00	200	391		Tercapai
22.	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan	44.928.833	4 Laporan	10.030.000	4 Laporan	165.810.800	1 Laporan	165.640.000	25	99,9	5 Laporan	175.670.000,00	20,83	391	KECAMATAN PARINGIN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	25	99,9			20,83	391		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah	100%	0	0%	0	100%	9.214.400	100%	8.940.000	100	97,02	100%	8.940.000,00	100	0		Tercapai
23.	7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan PerundangUndangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	9.214.400	1 Laporan	8.940.000	25	97,02	5 Laporan	8.940.000,00	20,83	0	KECAMATAN PARINGIN	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	25	97,02			20,83	0		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	98,46			150	195,5		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kecamatan Paringin**	**100%**	**687.117.485**	**100%**	**115.969.000**	**100%**	**230.975.100**	**100%**	**222.925.500**	**100**	**96,51**	**200%**	**338.894.500,00**	**200**	**49,32**		**Tercapai**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Semua Urusan Pemerintahan Yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	100%	687.117.485	100%	115.969.000	100%	230.975.100	100%	222.925.500	100	96,51	200%	338.894.500,00	200	49,32		Tercapai
24.	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	6 Dokumen	687.117.485	1 Dokumen	115.969.000	1 Dokumen	230.975.100	1 Dokumen	222.925.500	100	96,51	2 Dokumen	338.894.500,00	33,33	49,32	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	100	96,51			33,33	49,32		Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	96,51			200	49,32		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik Kecamatan Paringin**	**100%**	**88.697.738**	**100%**	**17.820.000**	**100%**	**131.136.200**	**100%**	**127.284.200**	**100**	**97,06**	**200%**	**145.104.200,00**	**200**	**163,59**		**Tercapai**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Desa dan Kelurahan di Wilayah Kecamatan	100%	88.697.738	100%	17.820.000	100%	131.136.200	100%	127.284.200	100	97,06	200%	145.104.200,00	200	163,59		Tercapai

25.	7.01.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6 Documen	0	1 Documen	0	1 Documen	11.001.800	1 Documen	10.501.800	100	95,46	2 Documen	10.501.800,00	33,33	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
26.	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	16.119.600	1 Dokumen	14.790.000	100	91,75	2 Dokumen	14.790.000,00	33,33	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
27.	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	14.740.300	1 Dokumen	14.540.300	100	98,64	2 Dokumen	14.540.300,00	33,33	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
28.	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	6 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	12.940.000	1 Dokumen	11.590.000	100	89,57	2 Dokumen	11.590.000,00	33,33	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
29.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	88.697.738	1 Dokumen	17.820.000	1 Dokumen	19.406.500	1 Dokumen	19.320.100	100	99,55	2 Dokumen	37.140.100,00	33,33	41,87	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
30.	7.01.06.2.01.15	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	6 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	56.928.000	1 Dokumen	56.542.000	100	99,32	2 Dokumen	56.542.000,00	33,33	0	KECAMATAN PARINGIN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	95,72			33,33	6,98		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		93,33	97,06			200	163,59		
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)		100,11	94,33			162,93	170,15		
										Predikat Kinerja (Program)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)		**80,95**	**88,4**			**36,58**	**45,55**		
										Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)		**Tinggi**	**Tinggi**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
								Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**10.897.613.266**		**9.634.023.697**								
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		SDM SKPD Kecamatan Paringin/ Kelurahan																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan pada Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang masih rendah realisasi anggarannya, dikarenakan adanya rincian belanja yang masih ada kesalahan dalam pembuatan RAB sehingga tidak dapat																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Kedepan akan menganalisa lagi perencanaan dalam pengganggaran/ pembuatan RAB																

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Sampai Dengan Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai SAKIP)**	**71.48 Nilai**	**38.580.749.306**	**71.42 Nilai**	**3.895.604.405**	**71.42 Nilai**	**6.439.752.294**	**71,45 Nilai**	**5.523.646.442**	**100,04**	**85,77**	**71.45 Nilai**	**5.523.646.442,00**	**99,96**	**14,32**		**Melebihi Target**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	26 Dokumen	28.551.483	4 Dokumen	3.502.500	4 Dokumen	6.687.500	4 Dokumen	6.687.500	100	100	8 Dokumen	10.190.000,00	30,77	35,69		Tercapai
1.	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 Dokumen	28.551.483	4 Dokumen	3.502.500	4 Dokumen	6.687.500	4 Dokumen	6.687.500	100	100	8 Dokumen	10.190.000,00	33,33	35,69	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	100			33,33	35,69		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan yang Berlaku	84 Bulan	30.590.945.148	14 Bulan	3.349.885.332	14 Bulan	4.689.508.694	14 Bulan	3.908.027.816	100	83,34	28 Bulan	7.257.913.148,00	33,33	23,73		Tercapai
2.	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	124 Orang/Bulan	30.209.907.148	14 Orang/Bulan	3.269.045.332	25 Orang/Bulan	4.639.127.094	25 Orang/Bulan	3.857.686.216	100	83,16	39 Orang/Bulan	7.126.731.548,00	31,45	23,59	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
3.	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Dokumen	381.038.000	12 Dokumen	80.840.000	12 Dokumen	50.381.600	12 Dokumen	50.341.600	100	99,92	24 Dokumen	131.181.600,00	33,33	34,43	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	91,54			32,39	29,01		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	72 Bulan	474.105.454	12 Bulan	2.750.000	12 Bulan	59.743.300	12 Bulan	54.544.000	100	91,3	24 Bulan	57.294.000,00	33,33	12,08		Tercapai
4.	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	18 Paket	474.105.454	1 Paket	2.750.000	1 Paket	59.743.300	1 Paket	54.544.000	100	91,3	2 Paket	57.294.000,00	11,11	12,08	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	91,3			11,11	12,08		
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	72 Bulan	2.423.390.680	12 Bulan	170.361.564	12 Bulan	704.047.300	12 Bulan	693.390.914	100	98,49	24 Bulan	863.752.478,00	33,33	35,64		Tercapai
5.	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6 Paket	67.712.915	1 Paket	11.532.800	1 Paket	10.324.700	1 Paket	5.719.700	100	55,4	2 Paket	17.252.500,00	33,33	25,48	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
6.	7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket	116.491.000	0 Paket	0	9 Paket	63.991.000	9 Paket	60.296.000	100	94,23	9 Paket	60.296.000,00	100	51,76	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
7.	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	266.718.525	1 Paket	25.104.000	1 Paket	40.284.600	1 Paket	38.242.000	100	94,93	2 Paket	63.346.000,00	33,33	23,75	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
8.	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	1.972.468.240	1 Laporan	133.724.764	1 Laporan	589.447.000	1 Laporan	589.133.214	100	99,95	2 Laporan	722.857.978,00	33,33	36,65	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	86,13			50	34,41		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80 Unit	1.942.983.104	9 Unit	11.000.000	12 Unit	413.005.800	12 Unit	402.239.900	100	97,39	21 Unit	413.239.900,00	26,25	21,27		Tercapai
9.	7.01.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	10 Unit	308.950.000	0 Unit	0	5 Unit	125.000.000	5 Unit	119.560.000	100	95,65	5 Unit	119.560.000,00	50	38,7	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
10.	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	992.338.850	8 Unit	11.000.000	8 Unit	91.896.000	8 Unit	91.121.600	100	99,16	8 Unit	91.121.600,00	27,59	9,18	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
11.	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	641.694.254	0 Unit	0	4 Unit	196.109.800	4 Unit	191.558.300	100	97,68	4 Unit	191.558.300,00	13,33	29,85	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	97,49			30,31	25,91		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	2.315.932.637	12 Bulan	303.202.009	12 Bulan	421.511.900	12 Bulan	366.365.612	100	86,92	24 Bulan	669.567.621,00	33,33	28,91		Tercapai
12.	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	72 Laporan	616.128.800	12 Laporan	71.602.733	12 Laporan	153.070.000	12 Laporan	107.668.097	100	70,34	24 Laporan	179.270.830,00	33,33	29,1	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
13.	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	1.699.803.837	12 Laporan	231.599.276	12 Laporan	268.441.900	12 Laporan	258.697.515	100	96,37	24 Laporan	490.296.791,00	33,33	28,84	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	83,35			33,33	28,97		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161 Unit	804.840.800	12 Unit	54.903.000	53 Unit	145.247.800	39 Unit	92.390.700	73,58	63,61	51 Unit	147.293.700,00	31,68	18,3		Tidak Tercapai
14.	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	120 Unit	765.250.800	12 Unit	54.903.000	15 Unit	127.847.800	15 Unit	82.790.700	100	64,76	27 Unit	137.693.700,00	22,5	17,99	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
15.	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	39.590.000	0 Unit	0	41 Unit	17.400.000	24 Unit	9.600.000	58,54	55,17	24 Unit	9.600.000,00	58,54	24,25	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		79,27	59,96			40,52	21,12		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Tinggi	Rendah			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		96,23	88,72			31,72	25,09		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**IKM Kecamatan Paringin Selatan**	**88 Nilai**	**342.699.200**	**85.31 Nilai**	**104.912.000**	**87 Nilai**	**74.000.000**	**87,55 Nilai**	**74.000.000**	**100,63**	**100**	**87.55 Nilai**	**74.000.000,00**	**99,49**	**21,59**		**Melebihi Target**
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan PATEN yang Terlayani Sesuai Standar Pelayanan	3 Laporan	342.699.200	1 Laporan	104.912.000	1 Laporan	74.000.000	1 Laporan	74.000.000	100	100	2 Laporan	178.912.000,00	66,67	52,21		Tercapai

16.	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	342.699.200	1 Laporan	104.912.000	1 Laporan	74.000.000	1 Laporan	74.000.000	100	100	2 Laporan	178.912.000,00	66,67	52,21	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				100	100													66,67	52,21		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													Sangat Rendah	Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)				100	100													66,67	52,21		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													Sangat Rendah	Rendah		
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Kecamatan**	**100%**	**8.034.569.074**	**100%**	**480.036.750**	**100%**	**1.715.693.500**	**18,80%**	**1.662.422.700**	**18,8**	**96,9**	**18.8 %**	**1.662.422.700,00**	**18,8**	**20,69**		**Tidak Tercapai**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	577.475.000	100%	2.665.000	100%	94.800.000	99,47%	94.300.000	99,47	99,47	99.47 %	94.300.000,00	99,47	16,33		Tidak Tercapai
17.	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	35 Laporan	577.475.000	1 Laporan	2.665.000	1 Laporan	94.800.000	1 Laporan	94.300.000	100	99,47	2 Laporan	96.965.000,00	5,71	16,79	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				100	99,47													5,71	16,79		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Desa dan Kelurahan	100%	7.345.781.574	100%	477.371.750	100%	1.502.661.000	13,08%	1.453.960.200	13,08	96,76	13.08 %	1.453.960.200,00	13,08	19,79		Tidak Tercapai
18.	7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	24 Lembaga Kemasyarakatan	189.368.820	0 Lembaga Kemasyarakatan	0	6 Lembaga Kemasyarakatan	297.800.000	6 Lembaga Kemasyarakatan	293.220.000	100	98,46	6 Lembaga Kemasyarakatan	293.220.000,00	25	154,84	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
19.	7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana kelurahan yang Terbangun	12 Unit	4.612.131.600	2 Unit	197.688.000	2 Unit	785.770.400	2 Unit	785.486.400	100	99,96	4 Unit	983.174.400,00	33,33	21,32	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
20.	7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	15 Pokmas / Ormas	2.120.639.454	1 Pokmas / Ormas	104.775.000	4 Pokmas / Ormas	320.370.600	4 Pokmas / Ormas	276.533.800	100	86,32	5 Pokmas / Ormas	381.308.800,00	33,33	17,98	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
21.	7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	9 Laporan	423.641.700	1 Laporan	174.908.750	1 Laporan	98.720.000	1 Laporan	98.720.000	100	100	2 Laporan	273.628.750,00	22,22	64,59	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				100	96,19													28,47	64,68		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													Sangat Rendah	Rendah		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100%	111.312.500	0%	0	100%	118.232.500	96,56%	114.162.500	96,56	96,56	96.56 %	114.162.500,00	96,56	102,56		Tidak Tercapai
22.	7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10 Keluarga	111.312.500	0 Keluarga	0	10 Keluarga	118.232.500	10 Keluarga	114.162.500	100	96,56	10 Keluarga	114.162.500,00	100	102,56	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				100	96,56													100	102,56		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)				69,7	97,6													69,7	46,23		Tidak Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)				Sangat Rendah	Sangat Tinggi													Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan Ketentraman dan Ketertiban dengan Lintas Sektor**	**100%**	**26.620.000**	**0%**	**0**	**100%**	**33.600.000**	**100%**	**33.600.000**	**100**	**100**	**100%**	**33.600.000,00**	**100**	**126,22**		**Tercapai**
	7.01.04.2.04	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100%	26.620.000	0%	0	100%	33.600.000	100%	33.600.000	100	100	100%	33.600.000,00	100	126,22		Tercapai
23.	7.01.04.2.04.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perndang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	26.620.000	0 Laporan	0	1 Laporan	33.600.000	1 Laporan	33.600.000	100	100	1 Laporan	33.600.000,00	100	126,22	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				100	100													100	126,22		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)				100	100													100	126,22		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa**	**100%**	**530.694.100**	**100%**	**153.735.000**	**100%**	**165.329.100**	**100%**	**165.329.100**	**100**	**100**	**100%**	**165.329.100,00**	**100**	**31,15**		**Tercapai**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100%	530.694.100	100%	153.735.000	100%	165.329.100	100%	165.329.100	100	100	100%	165.329.100,00	100	31,15		Tercapai
24.	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan Oleh Instansi Vertikal	3 Dokumen	530.694.100	1 Dokumen	153.735.000	1 Dokumen	165.329.100	1 Dokumen	165.329.100	100	100	2 Dokumen	319.064.100,00	66,67	60,12	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				100	100													66,67	60,12		Tercapai
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													Sangat Rendah	Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)				100	100													100	31,15		Tercapai
												Predikat Kinerja (Kegiatan)				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi													Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Tertib Administrasi Keuangan dan Aset Desa**	**100%**	**1.918.735.980**	**100%**	**226.102.500**	**100%**	**108.450.000**	**82,62%**	**89.600.000**	**82,62**	**82,62**	**82.62 %**	**89.600.000,00**	**82,62**	**4,67**		**Tidak Tercapai**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	1.918.735.980	100%	226.102.500	100%	108.450.000	82,62%	89.600.000	82,62	82,62	82.62 %	89.600.000,00	82,62	4,67		Tidak Tercapai
25.	7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 Dokumen	625.665.000	1 Dokumen	213.840.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	100	100	2 Dokumen	263.840.000,00	33,33	42,17	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
26.	7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	14.520.000	0 Dokumen	0	1 Dokumen	18.000.000	1 Dokumen	18.000.000	100	100	1 Dokumen	18.000.000,00	100	123,97	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
27.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6 Dokumen	1.278.550.980	1 Dokumen	12.262.500	1 Dokumen	40.450.000	1 Dokumen	21.600.000	100	53,4	2 Dokumen	33.862.500,00	33,33	2,65	KECAMATAN PARINGIN SELATAN	Tercapai
												Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)				100	84,47													55,56	56,26		
												Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)				Sangat Tinggi	Tinggi													Rendah	Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)				90,38	82,62													82,62	4,67		
												Predikat Kinerja (Kegiatan)				Tinggi	Tinggi													Tinggi	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)				83,68	94,21													83,48	36,44		
												Predikat Kinerja (Program)				Tinggi	Sangat Tinggi													Tinggi	Sangat Rendah		
												Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)				**98,52**	**88,42**													**43,24**	**44,69**		
												Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)				**Sangat Tinggi**	**Tinggi**													**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
												Jumlah Anggaran dari seluruh Program			**8.536.824.894**		**7.548.598.242**																

	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Adanya Kesesuaian Terhadap Capaian Target dan Sasaran Kegiatan
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Kurangnya SDM yang Berdayaguna, Lambatnya Berkas SPJ Dari Bidang-bidang dan Adanya Ketidaksesuaian Anggaran Kas
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya	Memaksimalkan Semua Kegiatan Yang Ada Agar Dapat Dilaksanakan Sesuai Target dan Meninda klanjuti keterlambtan SPJ yang Masuk Ke Bidang Keuangan serta Melakukan Penyesuaian Aliran Kas

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output) / Sub Kegiatan (Sub	Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Pada Tahun 2026 Akhir Periode		Realisasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun Lalu		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tahun		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2023 yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah Kabupaten s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah		Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Keterangan
1	2	3	4	5		6		7		8		13=12/7x100%		14=6+12		15=14/5x100%		12	13
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran; Tingkat Pemenuhan Kebutuhaan Sarana dan Prasarana Aparatur yang baik; Tingkat Disiplin Aparatur; Tingkat Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; Nilai SAKIP SKPD**	**100%**	**16.373.065.278**	**120%**	**2.321.651.390**	**100%**	**3.427.564.600**	**100%**	**3.061.971.052**	**100**	**89,33**	**220%**	**5.383.622.442,00**	**220**	**32,88**		**Tercapai**
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	31 Dokomen	115.919.400	5 Dokomen	23.922.000	5 Dokomen	90.552.500	5 Dokomen	89.084.300	100	98,38	10 Dokomen	113.006.300,00	32,26	97,49		Tercapai

1.	7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokomen perencanaan perangkat daerah	8 Dokumen	44.429.200	2 Dokumen	11.283.000	5 Dokumen	7.223.000	2 Dokumen	7.132.900	40	98,75	4 Dokumen	18.415.900,00	50	41,45	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tidak Tercapai
2.	7.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokomen DPA -SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokomen DPA-SKPD	6 Dokumen	40.390.850	2 Dokumen	6.319.500	2 Dokumen	6.199.500	1 Dokumen	6.119.500	50	98,71	3 Dokumen	12.439.000,00	50	30,8	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tidak Tercapai
3.	7.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6 Laporan	31.099.350	2 Laporan	6.319.500	4 Laporan	77.130.000	1 Laporan	75.831.900	25	98,32	3 Laporan	82.151.400,00	50	264,16	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tidak Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		38,33	98,59			50	112,13		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Tinggi		
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	12 Bulan	12.186.944.453	12 Bulan	1.861.944.408	12 Bulan	2.581.418.600	12 Bulan	2.257.545.797	100	87,45	24 Bulan	4.119.490.205,00	200	33,8		Tercapai
4.	7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan gaji dan tunjangan	12 Orang/bulan	12.186.944.453	12 Orang/bulan	1.861.944.408	15 Orang/bulan	2.530.718.600	14 Orang/bulan	2.206.905.797	93,33	87,2	26 Orang/bulan	4.068.850.205,00	216,67	33,39	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tidak Tercapai
5.	7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokomen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	20 Dokumen	0	4 Dokumen	0	4 Dokumen	50.700.000	4 Dokumen	50.640.000	100	99,88	8 Dokumen	50.640.000,00	40	0	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		96,67	93,54			128,33	16,69		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	703 Stel	244.204.000	0 Stel	40.500.000	137 Stel	20.000.000	137 Stel	20.000.000	100	100	137 Stel	60.500.000,00	19,49	24,77		Tercapai
6.	7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	600 Paket	244.204.000	47 Paket	40.500.000	2 Paket	20.000.000	2 Paket	20.000.000	100	100	49 Paket	60.500.000,00	8,17	24,77	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	100			8,17	24,77		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	76303 Buah	1.017.334.600	338 Buah	165.697.760	11068 Buah	284.040.300	11000 Buah	277.241.795	99,39	97,61	11338 Buah	442.939.555,00	14,86	43,54		Tidak Tercapai
7.	7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 Paket	9.959.900	0 Paket	0	1 Paket	2.250.000	1 Paket	2.250.000	100	100	1 Paket	2.250.000,00	16,67	22,59	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
8.	7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	27 Paket	53.348.000	0 Paket	0	5 Paket	4.335.200	5 Paket	4.264.000	100	98,36	5 Paket	4.264.000,00	18,52	7,99	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
9.	7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	72 Paket	276.812.400	0 Paket	29.780.500	1 Paket	42.842.600	12 Paket	42.723.400	1.200,00	99,72	12 Paket	72.503.900,00	16,67	26,19	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
10.	7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang cetakan dan Penggandaan yang disediakan	75794 Paket	96.045.400	700 Paket	8.206.250	1 Paket	12.082.500	1 Paket	11.182.500	100	92,55	701 Paket	19.388.750,00	0,92	20,19	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
11.	7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	278 Laporan	581.168.900	0 Laporan	127.711.010	30 Laporan	222.530.000	30 Laporan	216.821.895	100	97,43	30 Laporan	344.532.905,00	10,79	59,28	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		320	97,61			12,71	27,25		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50 Buah	780.059.250	2 Buah	4.750.000	17 Buah	130.013.800	17 Buah	125.401.500	100	96,45	19 Buah	130.151.500,00	38	16,68		Tercapai
12.	7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	n/a	n/a	456.797.700	n/a	4.750.000	n/a	0	n/a	0	0	0	n/a	4.750.000,00	n/a	1,04		Tidak Tercapai
13.	7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang disediakan	35 Unit	323.261.550	3 Unit	0	2 Unit	74.409.000	4 Unit	70.301.500	200	94,48	7 Unit	70.301.500,00	20	21,75	KECAMATAN TEBING TINGGI	Melebihi Target
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		200	94,48			20	22,79		Melebihi target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		Tercapai
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	36 Bulan	1.037.751.950	24 Bulan	122.201.643	72 Bulan	174.288.600	12 Bulan	162.992.649	16,67	93,52	36 Bulan	285.194.292,00	100	27,48		Tidak Tercapai
14.	7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72 Bulan	394.406.150	12 Bulan	56.246.100	12 Bulan	72.842.000	12 Bulan	72.842.000	100	100	24 Bulan	129.088.100,00	33,33	32,73	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
15.	7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	122.224.050	12 Bulan	16.667.843	12 Bulan	30.400.000	12 Bulan	19.116.049	100	62,88	24 Bulan	35.783.892,00	33,33	29,28	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
16.	7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 Bulan	521.121.750	12 Bulan	49.287.700	12 Bulan	71.046.600	12 Bulan	71.034.600	100	99,98	24 Bulan	120.322.300,00	33,33	23,09	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	87,62			33,33	28,37		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198 Buah	990.851.625	17 Buah	102.635.579	46 Buah	147.250.800	46 Buah	129.705.011	100	88,08	63 Buah	232.340.590,00	31,82	23,45		Tercapai
17.	7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dlnas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit	720.734.528	10 Unit	78.580.579	15 Unit	102.025.800	14 Unit	87.917.011	93,33	86,17	24 Unit	166.497.590,00	133,33	23,1	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tidak Tercapai
18.	7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	168 Unit	85.471.400	7 Unit	4.245.000	10 Unit	6.600.000	10 Unit	5.788.000	100	87,7	17 Unit	10.033.000,00	10,12	11,74	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
19.	7.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	184.645.697	2 Unit	19.810.000	1 Unit	38.625.000	4 Unit	36.000.000	400	93,2	6 Unit	55.810.000,00	50	30,23	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		197,78	89,02			64,48	21,69		Melebihi Target
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		88,01	94,5			62,35	38,17		Tidak Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Tinggi	Sangat Tinggi			Rendah	Sangat Rendah		
2.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)**	**100%**	**753.343.800**	**75%**	**88.359.200**	**100%**	**64.674.000**	**100%**	**63.960.000**	**100**	**98,9**	**175%**	**152.319.200,00**	**175**	**20,22**		**Tercapai**
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	72 Bulan	753.343.800	9 Bulan	88.359.200	12 Bulan	64.674.000	12 Bulan	63.960.000	100	98,9	21 Bulan	152.319.200,00	29,17	20,22		Tercapai
20.	7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	72 Laporan	753.343.800	12 Laporan	88.359.200	12 Laporan	64.674.000	12 Laporan	63.960.000	100	98,9	24 Laporan	152.319.200,00	33,33	20,22	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	98,9			33,33	20,22		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	98,9			29,17	20,22		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
3.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif**	**0%**	**0**	**0%**	**165.910.000**	**100%**	**287.578.000**	**25%**	**255.048.500**	**25**	**88,69**	**25%**	**420.958.500,00**	**0**	**0**		**Tidak Tercapai**
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif	0 Kegiatan	0	0 Kegiatan	165.910.000	2 Kegiatan	195.674.500	2 Kegiatan	184.664.000	100	94,37	2 Kegiatan	350.574.000,00	0	0		Tercapai
21.	7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat diwilayah Kecamatan	0 Laporan	0	12 Laporan	165.910.000	12 Laporan	195.674.500	12 Laporan	184.664.000	100	94,37	24 Laporan	350.574.000,00	0	0	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	94,37			0	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatana kesaderan Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	100 Keluarga	0	0 Keluarga	0	20 Keluarga	91.903.500	20 Keluarga	70.384.500	100	76,59	20 Keluarga	70.384.500,00	20	0		Tercapai
22.	7.01.03.2.06.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam keterlibatan Perencanaan menuju Keluarga Berkualitas	100 keluarga	0	0 keluarga	0	20 keluarga	91.903.500	20 keluarga	70.384.500	100	76,59	20 keluarga	70.384.500,00	20	0	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
										Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)		100	76,59			20	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
										Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)		100	85,48			10	0		Tercapai
										Predikat Kinerja (Kegiatan)		Sangat Tinggi	Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
4.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Koordinasi SInergitas dan Harmonisasi urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**0%**	**0**	**0%**	**0**	**100%**	**45.998.000**	**100%**	**45.798.000**	**100**	**99,57**	**100%**	**45.798.000,00**	**0**	**0**		**Tercapai**

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikel diwilayah Kecamatan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	45.998.000	3 Laporan	45.798.000	25	99,57	3 Laporan	45.798.000,00	0	0		Tidak Tercapai
23.	7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia ,Tentara Nasional Indonesia dan Intasi Vertikel diWilayah Kecamatan	0 Laporan	0	0 Laporan	0	12 Laporan	45.998.000	3 Laporan	45.798.000	25	99,57	3 Laporan	45.798.000,00	0	0	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	25	99,57			0	0		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	25	99,57			0	0		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
5.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Persentase kegiatan pemerintahan umum dan sosial kemasyarakatan**	**100%**	**1.859.122.500**	**80%**	**195.886.000**	**100%**	**135.080.200**	**100%**	**134.004.200**	**100**	**99,2**	**180%**	**329.890.200,00**	**180**	**17,74**		**Tercapai**
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	30 Kegiatan	1.859.122.500	4 Kegiatan	195.886.000	5 Kegiatan	135.080.200	5 Kegiatan	134.004.200	100	99,2	9 Kegiatan	329.890.200,00	30	17,74		Tercapai
24.	7.01.05.2.01.07	Pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokomen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikel	30 Dokumen	1.859.122.500	9 Dokumen	195.886.000	12 Dokumen	135.080.200	5 Dokumen	134.004.200	41,67	99,2	14 Dokumen	329.890.200,00	46,67	17,74	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tidak Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	41,67	99,2			46,67	17,74		Tidak Tercapai
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	100	99,2			30	17,74		Tercapai
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
6.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan tepat waktu**	**100%**	**540.424.800**	**19%**	**114.719.000**	**100%**	**149.472.200**	**100%**	**143.328.000**	**100**	**95,89**	**119%**	**258.047.000,00**	**119**	**47,75**		**Tercapai**
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	72 Bulan	540.424.800	9 Bulan	114.719.000	12 Bulan	149.472.200	12 Bulan	143.328.000	100	95,89	21 Bulan	258.047.000,00	29,17	47,75		Tercapai
25.	7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokomen yang difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen	419.887.350	0 Dokumen	93.228.000	24 Dokumen	73.086.000	12 Dokumen	72.480.000	50	99,17	12 Dokumen	165.708.000,00	100	39,46	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tidak Tercapai
26.	7.01.06.2.01.13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokomen Fasilitasi dalam Rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	1 Dokumen	120.537.450	0 Dokumen	21.491.000	1 Dokumen	76.386.200	1 Dokumen	70.848.000	100	92,75	1 Dokumen	92.339.000,00	100	76,61	KECAMATAN TEBING TINGGI	Tercapai
											Rata-rata Capaian Kinerja (Sub Kegiatan) (%)	75	95,96			100	58,04		
											Predikat Kinerja (Sub Kegiatan)	Sangat Rendah	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Kegiatan) (%)	87,77	95,89			29,17	47,75		
											Predikat Kinerja (Kegiatan)	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Rendah	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Program) (%)	87,5	95,26			115,67	19,77		
											Predikat Kinerja (Program)	Tinggi	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	Sangat Rendah		
											Rata-rata Capaian Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan) (%)	**139,17**	**90,12**			**41,99**	**32,95**		
											Predikat Kinerja (Seluruh Sub Kegiatan)	**Sangat Tinggi**	**Sangat Rendah**			**Sangat Rendah**	**Sangat Rendah**		
									Jumlah Anggaran dari seluruh Program	**4.110.367.000**		**3.704.109.752**							
	Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja		Tersedianya Anggaran yang mencukupi																
	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja		Minimnya Anggaran untuk SKPD, sehingga terlambatnya pencapaian Kinerja, dan masih kurangnya SDM dalam pelaksanaan kegiatan tersebut																
	Tindak Lanjut yang diperlukan dalam Triwulan berikutnya		Penambahan anggaran dan penambahan SDM bagi pelaksana kegiatan yang ada di SKPD																

Lampiran

Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Berdasarkan Hasil Asistensi Pohon Kinerja dan Cascading oleh KEMENPAN RB Tahun 2023

Indikasi Rencana Program Prioritas Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 Berdasarkan Hasil Asistensi Pohon Kinerja dan Cascading oleh KEMENPAN RB

Kode	Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Data capaian pada Tahun 2020	RPJMD								Bidang Urusan pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	RENSTRA												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra 2026			Unit Kerja PD Penanggung jawab
				Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	2	3					9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		19
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																													
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	685.004.183.301	100%	710.344.053.026	100%	731.576.070.114	100%	771.243.497.341	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	Semua PD
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
01.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**				97.019.001.679		102.130.737.676		106.584.722.460		112.027.853.164	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**			46.155.102.350		89.947.592.113		126.556.112.800		222.467.371.890		649.617.400.292		869.382.695.645				
01:01:02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam PAUD	66,55	72,85	95.714.990.507	74,95	100.719.325.387	77,05	105.056.168.942	79,15	110.371.444.294	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APK PAUD	n/a	45.883.102.350	70	87.759.826.113	70.27	117.524.112.800	75.87	215.986.230.390	77.87	643.104.080.292	79.87	862.599.375.645	79.87	1.972.856.727.590		Dinas Pendidikan & Kebudayaan
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dalam pendidikan dasar	90,09	95,49		97,29		99,09		100			APK SD/sederajat	n/a		98.35		98.78		99.05		99.52		99.79		99.79			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun dalam pendidikan menengah pertama	72,86	77,96		79,66		81,36		83,06			APM SD/sederajat	n/a		90.42		90.94		91.25		92.35		93.45		93.45			
		Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan kesetaraaan	80,36	85,46		87,16		88,86		90,56			APK SMP/ sederajat	n/a		79.97		80.26		82.12		83.24		84.36		84.36			
													APM SMP/ sederajat	n/a		64.88		65.13		66.08		67.13		68.08		68.08			
													Angka melanjutkan SD ke SMP	n/a		75.75		76.48		78.89		79.77		80.67		80.67			
																97.85		98.45		98.75		99.01		99.27		99.27			
													Angka melanjutkan SMP ke SMA	n/a		100		100		100		100		100		100			
													Nilai rata-rata literasi SD	n/a		55.57		68.00		68.67		69.61		70.56		70.56			
													Nilai Rata-rata litersasi SMP	n/a		52.25		61.88		62.01		62.95		63.90		63.90			
													Nilai rata-rata numerasi SD	n/a		24.55		51.55		51.75		52.51		53.28		53.28			
													Nilai Rata-rata Numerasi SMP	n/a		40.08		40.92		41.83		43.76		45.69		45.69			
													Indeks iklim keamanan SD	n/a		65.98		68.75		71.72		75.51		79.36		79.36			
													Indeks iklim keamanan SMP	n/a		69		69.1		68.95		70.06		71.17		71.17			
													indeks iklim kebhinekaan SD	n/a		60.65		69.35		70.68		73.19		75.7		75.7			
													indeks iklim kebhinekaan SMP	n/a		61.78		68.67		70.35		72.86		75.37		75.37			
													indeks iklim inklusivitas SD	n/a		52.75		56.78		59.14		62.96		66.78		66.78			
													indeks iklim inklusivitas SMP	n/a		52.68		55.78		56.79		59.48		62.17		62.17			
01:01:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentase pengembangan	100%	100%	120.000.000	100%	125.000.000	100%	130.000.000	100%	135.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Nilai rata-rata literasi SD	n/a	0	55.57	174.862.000	68.00	115.950.000	68.67	502.308.600	69.61	505.000.000	70.56	525.000.000	70.56	1.823.120.600		Dinas Pendidikan & Kebudayaan
													Nilai Rata-rata litersasi SMP	n/a		52.25		61.88		62.01		62.95		63.9		63.9			
													Nilai rata-rata numerasi SD	n/a		24.55		51.55		51.75		52.51		53.28		53.28			
													Nilai Rata-rata Numerasi SMP	n/a		40.08		40.92		41.83		43.76		45.69		45.69			
01:01:04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Guru Sertifikasi	83.26%	86%	974.011.172	87%	1.071.412.289	88%	1.178.553.518	89%	1.296.408.870	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang kompeten	n/a	67.000.000	n/a	1.807.904.000	58	8.843.030.000	60	5.720.512.900	65	5.750.000.000	70	6.000.000.000	70	28.188.446.900		Dinas Pendidikan & Kebudayaan
													Persentase pendidik dan tenaga kependidikan PAUD yang kompe	n/a		n/a		19.41		20.41		22.41		26.41		26.41			
01:01:05	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Pengendalian Perizinan Pendidikan	100%	100%	210.000.000	100%	215.000.000	100%	220.000.000	100%	225.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Non Formal ya	100%	205.000.000	100%	205.000.000	100%	73.020.000	100%	258.320.000	100%	258.320.000	100%	258.320.000	100%	1.257.980.000		Dinas Pendidikan & Kebudayaan
01.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**			334,62	67.461.429.518	341,93	71.454.020.531	349,24	74.842.966.597	355,66	79.213.195.374	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**																	
01:02:02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Angka Kematian Ibu (AKI)/100.000 kelahiran hidup	89	176	62.286.077.908	132	65.772.947.420	131	68.608.557.361	130	72.368.251.432	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase ibu hamil dengan risiko tinggi					20%	103.598.187.092	20%	151.830.855.810	20%	156.053.733.466	20%	169.156.807.847	20%	580.639.584.215		Dinas Kesehatan
		Angka Kematian Bayi (AKB)/1000 kelahiran hidup	7	13		12		11		10			Persentase bayi dengan BBLR					3%		2,50%		2,50%		2,50%		2,50%			
		Prevalensi Stunting	25.70%	17%		16%		15%		14%			Prevalensi Gizi Buruk yang mendapatkan pelayanan tatalaksana gizi buruk					87%		90%		90%		90%		90%			
													Persentase Wasting					7,30%		7%		7%		7%		7%			
													Persentase Ibu Hamil KEK					20%		20%		20%		20%		20%			
													Persentase Ibu Hamil Anemia					20%		20%		20%		20%		20%			
													Persentase Remaja Putri Anemia					30%		28%		28%		28%		28%			
													Persentase desa yang mencapai ODF					63%		70%		76%		85%		85%			
													Indeks SPM Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit					0,33		0,33		0,33		0,33		0,33			
													Cakupan desa UCI					80		81		82		83		83			
													Persentase deteksi dini dan respon penyakit potensial KLB/Wabah					100		100		100		100		100			
													Persentase gedung Fasyankes yang Layak					100%		100%		100%		100%		100%			
													MoU antara Pemerintah Daerah dan BPJS, RS daerah dan provinsi					1 MoU		1 MoU		1 MoU		1 MoU		1 MoU			
01:02:03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	87%	100%	4.750.210.410	100%	5.225.231.451	100%	5.747.754.596	100%	6.322.530.056	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio SDM Kesehatan					22	11.359.858.500	23	12.746.310.300	24	14.856.504.806	24	15.153.634.901	24	54.116.308.507		Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar	100%	100%		100%		100%		100%			Persentase SDM Kesehatan yang Bersertifikasi					100%		100%		100%		100%		100%			
01:02:04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan	100%	100%	37.926.000	100%	41.718.600	100%	45.890.460	100%	50.479.506	PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Fasilitas pelayanan kefarmasian (Apotek, dan toko obat) yang memenuhi standar dan persyaratan perizinan					100%	82.828.200	100%	269.872.000	100%	214.565.450	100%	203.116.778	100%	770.382.428		Dinas Kesehatan
01:02:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga Yang Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	43%	55%	387.215.200	60%	414.123.060	65%	440.764.180	70%	471.934.380	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga yang Melaksanakan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)					55%	875.048.700	60%	694.849.320	65%	764.334.252	70%	840.767.677	70%	3.174.999.949		
01:03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**				151.879.700.500		158.585.902.550		156.858.092.805		180.517.902.086	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**																	
01:03:10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan dalam kondisi mantap	48.30%	73.67%	91.750.000.000	79.31%	79.200.000.000	85.24%	83.000.000.000	88.47%	82.900.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan dalam kondisi mantap	52,32%	116.247.013.280	62,91%	146.086.784.304	70,51%	91.750.000.000	76,15%	79.200.000.000	82,08%	83.000.000.000	85,31%	82.900.000.000	85,31%	571.625.000.000		Dinas PUPR PERKIM
		Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap	76.90%	82.08%	1.800.000.000	84.61%	9.000.000.000	87.39%	13.800.000.000	90.17%	42.400.000.000		Persentase jalan dalam kondisi baik	78,42%		80,06%		82,08%		84,61%		87,39%		90,17%		90,17%			Dinas PUPR PERKIM
01:03:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai kewenangan daerah yang	11.29%	13.03%	4.450.000.000	13.65%	5.650.000.000	14.27%	4.050.000.000	14.90%	7.350.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan d	23,09	14.428.880.104	24,2	9.254.410.000	28,31	14.948.880.000	34,55	19.350.000.000	39,24	19.310.000.000	44,39	16.070.000.000	44,39	93.362.170.104		Dinas PUPR PERKIM
		Persentase Luas jaringan daerah irigasi permukaan kewenangan daerah dalam kondisi baik	21.53%	28.31%	10.498.880.000	34.55%	13.700.000.000	39.24%	15.260.000.000	44.39%	8.720.000.000		Persentase panjang infrastruktur pengendali banjir wilayah sungai	11,79		12,41		13,03		13,65		14,27		14,9		14,9			Dinas PUPR PERKIM
01:03:03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga yang dapat mengakses air bersih yang layak	78.65%	83.27%	5.000.000.000	84.27%	5.000.000.000	85.27%	5.000.000.000	86.27%	5.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih yang	81,27	3.318.559.000	82,27	200.000.000	83,27	5.000.000.000	84,27	5.000.000.000	85,27	5.000.000.000	86,27	5.000.000.000	86,27	36.402.798.700		Dinas PUPR PERKIM
01:03:05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air limbah domestik	91.88%	93.76%	3.240.000.000	94.76%	3.864.000.000	95.76%	3.264.000.000	96.76%	3.290.400.000	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang dapat mengakses air limbah domestik	92,4	1.146.385.000	92,75	1.969.406.000	93,76	3.240.000.000	94,76	3.864.000.000	95.76	3.264.000.000	96,76	3.290.400.000	96,76	16.678.400.000		Dinas PUPR PERKIM
01:03:07	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah Permukiman yang dikembangkan	89.85%	90.52%	10.110.820.500	90.85%	11.121.902.550	91.19%	12.234.092.805	91.52%	13.457.502.086	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Jumlah permukiman yang dikembangkan	2	1.418.800.032	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	2	2.000.000.000	12	9.418.800.033		Dinas PUPR PERKIM
01:03:09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah Bangunan yang ditata (buah)	-	1	2.500.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	1.500.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Jumlah bangunan yang ditata	-	-	1	1.631.072.000	1	2.500.000.000	1	4.000.000.000	1	4.000.000.000	1	1.500.000.000	1	13.500.000.000		Dinas PUPR PERKIM
01:03:08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89.27%	89.60%	16.150.000.000	89.71%	20.150.000.000	89.82%	9.150.000.000	89.93	9.150.000.000	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung/publik dalam kondisi baik	89,39	14.241.039.247	89,49	11.845.539.912	89,6	16.150.000.000	89,71	20.150.000.000	89,82	9.150.000.000	89,93	9.150.000.000	89,93	63.854.000.000		Dinas PUPR PERKIM
01:03:11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM Jasa Konstruksi dan BUJK yang dibina	34.6%	60.0%	1.030.000.000	72.5%	1.150.000.000	85.0%	1.150.000.000	95.0%	1.350.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase SDM jasa konstruksi dan BUJK yang dibina	40%	108.797.024	50%	500.000.000	60%	1.030.000.000	72,50%	1.150.000.000	85%	1.150.000.000	95%	1.350.000.000	95%	5.288.797.024		Dinas PUPR PERKIM
01:03:12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penataan ruang	10%	56%	5.350.000.000	75%	5.750.000.000	89%	5.950.000.000	100%	5.400.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketersediaan dokumen NSPK penyelenggaraan penat	27%	462.802.272	42%	1.000.000.000	56%	5.350.000.000	75%	5.750.000.000	89%	5.950.000.000	100%	5.400.000.000	100%	28.748.959.816		Dinas PUPR PERKIM
01:04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**				7.399.437.895		8.215.944.385		9.086.369.523		10.021.575.675	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**																	
01:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	1.109.919.000	100%	1.266.469.000	100%	1.422.144.000	100%	1.582.319.000	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rum	100	61.080.000	100	816.406.000	100	898.046.600	100	987.851.260	100	1.086.636.386	100	1.195.300.025	100	5.045.320.271		Dinas PUPR PERKIM
01:04:04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,28%	95%	667.609.000	96%	767.609.000	96%	867.609.000	97%	967.609.000	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	-	-	95	467.609.000	95	614.369.900	96	565.806.890	96	622.387.579	97	684.626.337	97	2.854.799.706		Dinas PUPR PERKIM
01:04:03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yang tertangani	71.40%	84.78%	1.546.536.695	91.71	1.701.190.365	98.00	1.871.309.401	100%	2.058.440.341	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan yang	74,08	49.540.000	78,49	1.405.942.450	84,78	1.546.536.695	91,71	1.701.190.365	98	1.871.309.401	100	2.058.440.341	100	8.633.059.251		Dinas PUPR PERKIM
01:04:05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	84%	87%	4.075.373.200	89%	4.480.676.020	91%	4.925.307.122	93%	5.413.207.334	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU	85	23.230.711.000	85	15.501.987.000	87	17.254.405.700	89	18.979.846.270	91	20.877.830.897	93	22.965.613.987	93	118.810.394.854		Dinas PUPR PERKIM
01:05	**KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**				6.241.302.250		6.865.432.475		7.551.975.723		8.307.173.295	**KETENTRAMAN KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**																	
01:05:02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	29	20	4.162.131.750	18	4.578.344.925	16	5.036.179.418	14	5.539.797.359	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase terbentuknya kelompok budaya Masyarakat taat Perda	30%	4.006.395.000	40%	4.006.395.000	50%	4.206.714.750	60%	4.627.386.225	85%	5.090.124.847	90%	5.599.137.332	90%	23.529.758.154		SATPOL PP
													Persentase SDM Satpol PP yang Terdidik dan Terlatih	65%		70%		75%		80%		90%		100%		100%			
													Jumlah Kegiatan Penangan Trantibum	750 Kegiatan		750 Kegiatan		750 Kegiatan		750 Kegiatan		750 Kegiatan		750 Kegiatan		3750 Kegiatan			
													Persentase Anggota Satlinmas yang di tingkatkan Kapasitanya	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			

01:05:04	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana dan Prosentase Desa Siaga Bencana	100%	100%	330.000.000	100%	363.000.000	100%	399.300.000	100%	439.230.000	PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN																	BPBD
01:05:03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Desa Siaga Bencana Respon Time dalam Penanganan Kedaruratan Bencana Respon Time dalam Penyaluran Logistik dan Prosentase Sarana dan Prasarana yang dipulihkan	100%	100%	1.749.170.500	100%	1.924.087.550	100%	2.116.496.305	100%	2.328.145.936	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA																	BPBD
01.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**				5.913.803.808		6.505.184.189		7.155.702.608		7.871.272.867	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**																	
01:06:02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial	100%	81%	434.411.250	84%	477.852.375	87%	525.637.613	90%	578.201.373	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL																	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
01:06:07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase makam yang terawat	100%	100%	36.750.000	100%	40.425.000	100%	44.467.500	100%	48.914.250	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN																	
01:06:04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	prosentase cakupan ppks (lansiaDisabilitasAnak Terlantar Korban Nafza dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi) yang mendapatkan pelayanan sosial	100%	100%	525.961.275	100%	578.557.403	100%	636.413.143	100%	700.054.457	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																	
01:06:05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang difasilitasi bantuan sosial	100%	69%	4.632.802.233	71%	5.096.082.456	73%	5.605.690.702	75%	6.166.259.772	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL																	
01:06:06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	283.879.050	100%	312.266.955	100%	343.493.651	100%	377.843.015	PROGRAM PENANGANAN BENCANA																	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																													
02:07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**				9.750.000.000		10.376.500.000		11.518.000.000		10.832.750.000	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**																	
02.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana Tenaga Kerja	8.73%	30.00%	100.000.000,00	30.00%	100.000.000,00	30.00%	100.000.000,00	30.00%	100.000.000,00	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada renc	30 %	121.422.000	30%	100.000.000	30%	100.000.000	30%	100.000.000	30%	100.000.000	30%	100.000.000	30%	521.422.000		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
													Rasio Ketersediaan Tenaga Kerja Terhadap Kebutuhan Tenaga Kerja							100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	110.000.000	100%			
02.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ besertifikat kompetensi	6.95%	4.00%	7.991.000.000,00	4.00%	8.568.500.000,00	4.00%	9.643.500.000,00	4.00%	8.884.000.000,00	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS	Persentase tenaga kerja yang kompeten/ bersertifikat kompetensi	4%	150.052.634	4%	1.878.645.100	4%	7.991.000.000	4%	8.568.500.000	4%	9.643.500.000	4%	8.884.000.000	4%	37.115.697.734		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
													Persentase Tenaga Kerja Terampil Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja							90%	8.448.500.000	90%	9.523.500.000	90%	8.774.000.000	90%	36.439.247.734		
02.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja didalam dan luar negeri	64.26%	65.%	1.035.000.000,00	65%	1.035.000.000,00	65%	1.035.000.000,00	65%	1.035.000.000,00	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Tenaga Kerja di dalam dan luar negeri	65%	35.750.000	65%	222.122.500	55%	1.035.000.000	60%	1.035.000.000	65%	1.035.000.000	65%	1.035.000.000	65%	4.397.872.500		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
													Persentase Kesempatan Kerja yang Terpenuhi	100%		100%		100%		90%	1.035.000.000	90%	1.035.000.000	90%	1.035.000.000	90%	4.397.872.500		
02.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase PPHI yang difasilitasi	100.00%	100.00%	624.000.000,00	100.00%	673.000.000,00	100.00%	739.500.000,00	100.00%	813.750.000,00	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase PPHI yang difasilitasi	100%	56.560.000	100%	366.680.000	100%	624.000.000	100%	673.000.000	100%	739.500.000	100%	813.750.000	100%	3.273.490.000		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
		Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100.00%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%			Persentase perusahaan yang memiliki sarana hubungan industrial	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			
													Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Terselesaikan							100%	673.000.000	100%	739.500.000	100%	813.750.000	100%	3.273.490.000		
02:08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**				1.671.462.100		1.747.380.960		1.832.119.058		1.925.330.963	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**																	
02:08:02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di	12.35%	21.05%	1.005.000.000	21.10%	1.015.500.000	21.15%	1.027.050.001	21.20%	1.039.755.000	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase ARG di SKPD/Lembaga/Instansi di Kabupaten	18	60,025,000	21.00	87,470,000	45433	87,291,750	45586	96,020,925	21.15	105,623,018	21.20	116,185,319	21.20	552,616,012		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	69:55:00	73:02:00		74:04:00		75		76			IDG (Indeks Pemberdayaan Gender)	70.77	600,000,000	72	916,865,000	73.02	917,708,250	74.04	919,479,075	75	921,426,983	76	923,569,681	76	5,199,048,989		
		IPG (Indeks Pembangunan gender)	92:12:00	92.77		92:08:00		92.83		92.86			IPG (Indeks Pembangunan gender)	92.71		92.74		92.77		92.80		92.83		92.86		92.86			
02:08:03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	68.358.150	100%	75.193.965	100%	82.713.362	100%	90.984.698	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan termasuk Tindak Pidan	100	40,466,400	100	65,103,000	100	68,358,150	100	75,193,965	100	82,713,362	100	90,984,698	100	422,819,574		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin yang umur perkawinan pertamanya dibawah 18 tahun	18.36%	16.56%	176.335.000	15.76%	193.968.500	14.86%	213.365.350	13.86%	234.701.885	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase perempuan berumur 20-24 tahun yang pernah kawin y	17.86	87,345,800	17.26	173,937,300	16.56	176,335,000	15.76	193,968,500	14.86	213,365,350	13.86	234,701,885	13.86	992,308,035		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem data gender dan anak	100%	100%	99.167.250	100%	109.083.975	100%	119.992.373	100%	131.991.610	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase lembaga yang berkontribusi pada penyusunan sistem	100	62,227,300	100	94,445,000	100	99,167,250	100	109,083,975	100	119,992,373	100	131,991,610	100	616,907,507		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	IPA (Indeks Perlindungan Anak	0	68:25:00	217.587.000	68:50:00	238.611.450	68.75	262.472.595	69	288.719.855	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa Layak Anak	0	120,534,800	68	207,540,000	68.25	217,587,000	68.50	238,611,450	68.75	169,852,273	69.00	186,837,496	68.50	1,140,963,019		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:08:07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang mendapatkan penanganan secara komprehensif	100%	100%	105.014.700	100%	115.023.070	100%	126.525.377	100%	139.177.915	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Cakupan Penanganan kasus kekerasan terhadap anak yang m**	100	34,684,800	100	102,614,000	100	105,014,700	100	115,023,070	100	126,525,377	100	139,177,915	100	623,039,862		Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**				1.291.547.192		1.316.178.333		1.335.194.200		1.368.945.642	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**																	
02:09:02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	10	13%	303.735.600	14%	309.810.400	15%	316.006.700	15%	322.326.912	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rasio penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandiri	0	11.500.000	0	147.790.000	1%	500.000.000	1%	700.000	1%	710.000	1%	720.500.000	1%	3.928.290.000		Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
02:09:03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	87,4	87,5	711.554.988	87,6	724.586.196	87,7	731.769.900	87,8	753.452.724	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Skor PPH KetersedianSkor PPH Konsumsi	86,30% 87,20%	123.015.000	87,59% 88,51%	337.729.700	87,81% 88.73%	993.607.915	88.03% 88.94%	4.805.000	88,24% 89,16%	444.520.000	88,46% 89,36%	4.592.512.500	88<46% 89,38%	15.297.115.113		Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
02:09:04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase daerah rentan rawan pangan	5	5	168.687.200	5	172.060.944	5	175.502.300	5	179.012.400	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganandesa rentan pangan	0		0		20%	400.000	20%	715.000.000	20%	750.750.000	20%	788.287.500	80%	2.606.750.000		Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
02:09:05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentasepangan segar asaltumbuhan yang memenuhipersyaratanmutu dan keamananpangan	90%	80%	107.569.404	80%	109.720.793	80%	111.915.300	80%	114.153.606	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan tumbuhanyang memen	90%	22.320.000	90%	105.355.000	90%	107.569.404	90%	700.000.000	90%	735.000.000	90%	771.750.000	90%	2.441.994.404		Dinas KetahananPangan Pertanian&Perikanan
02:10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**				312.600.000		312.600.000		312.600.000		312.600.000	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	920.000.000	100%	3.680.000.000		
02:10:02	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi	100%	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	100%	25.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Pengelolaan Izin Lokasi					100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	400.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	100%	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	100%	50.000.000	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan					100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee	100%	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	100%	3.600.000	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Persentase Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee					100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:09	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Pengelolaan Izin Membuka Tanah	100%	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	PERSENTASE PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	220.000.000	100%	880.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:10:10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase Penatagunaan Tanah	100%	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	PERSENTASE PENATAGUNAAN TANAH					100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	800.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**				11.058.100.000		11.053.800.000		11.593.400.000		12.377.200.000	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						100%	50.994.432.081	100%	52.620.000.000	100%	52.340.000.000	100%	53.670.000.000	100%	209.624.432.081		
02:11:02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup	100%	100%	1.200.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.000.000.000	100%	1.200.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Perencanaan Lingkungan Hidup					100%	2.400.000.000	100%	2.400.000.000	100%	1.900.000.000	100%	2.400.000.000	100%	9.100.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100%	100%	1.900.000.000	100%	1.900.000.000	100%	1.900.000.000	100%	1.900.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Status Mutu Lingkungan Hidup					100%	8.500.000.000	100%	8.500.000.000	100%	8.500.000.000	100%	8.500.000.000	100%	34.000.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pengelolaan keanekaragaman hayati dalam kondisi yang terpelihara baik	100%	100%	330.000.000	100%	355.000.000	100%	380.000.000	100%	405.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Peningkatan Keanekaragaman Hayati					100%	14.500.000.000	100%	14.500.000.000	100%	14.500.000.000	100%	14.500.000.000	100%	58.000.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100%	100%	170.500.000	100%	178.200.000	100%	191.200.000	100%	205.400.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penurunan Jumlah Limbah B3					100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	3.000.000.000	100%	12.000.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan.	100%	100%	166.400.000	100%	173.200.000	100%	185.400.000	100%	198.800.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pelaku usaha/kegiatan yang taat terhadap ijin lingkungan					100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	800.000.000	100%	3.200.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup

02:11:07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat Kearifan lokal dan MHA yang terkait dengan PPLH.	100%	100%	161.600.000	100%	168.000.000	100%	179.900.000	100%	192.700.000	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH					100%	470.000.000	100%	500.000.000	100%	520.000.000	100%	550.000.000	100%	2.040.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100%	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					100%	620.000.000	100%	620.000.000	100%	620.000.000	100%	620.000.000	100%	2.480.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	100%	150.400.000	100%	156.300.000	100%	167.700.000	100%	179.700.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat					100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	300.000.000	100%	1.200.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	100%	100%	79.200.000	100%	83.100.000	100%	89.200.000	100%	95.600.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup					100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	2.500.000.000	100%	10.000.000.000		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:11:11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	72.55%	99%	6.600.000.000	99%	6.740.000.000	100%	7.200.000.000	100%	7.700.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase pengelolaan sampah					99	17.904.432.081	99	19.500.000.000	100	19.700.000.000	100	20.500.000.000	100	77.604.432.081		Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup
02:12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**				1.014.116.460		1.115.528.106		1.227.080.917		1.349.789.008	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**																	
02:12:02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	-KK 100% - KTP-el 9895% - KIA 2329%	-KK 100% - KTP-el 9895% - KIA 40%	307.020.000	-KK 100% - KTP-el 100% - KIA 50%	337.722.000	-KK 100% - KTP-el 100% - KIA 60%	371.494.200	-KK 100% - KTP-el 100% - KIA 70%	408.643.620	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Pendudu	KK 100% KTP EL 98.95% KIA 23.29%	266.262.000	KK 100% KTP EL 100% KIA 30%	236.302.000	KK 100% KTP EL 100% KIA 70%	277.130.800	KK 100% KTP EL 100% KIA 75%	641.364.900	KK 100% KTP EL 100% KIA 80%	705.501.390	KK 100% KTP EL 100% KIA 85%	776.051.529	KK 100% KTP EL 100% KIA 85%	2.902.612.619		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	64,17%	75%	370.565.160	78%	407.621.676	80%	448.383.844	83%	493.222.228	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rata-rata Persentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	100,00%	180.173.200	73%	177.979.000	75%	315.797.310	78%	347.377.041	80%	382.114.745	83%	420.326.220	83%	1.823.765.516		
02:12:04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	100%	321.579.300	100%	353.737.230	100%	389.110.953	100%	428.022.048	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Jumlah Data Kependudukan yang Dimanfaatkan	100%	625.810.000	100%	657.100.500	100%	689.955.525	100%	758.951.078	100%	834.846.185	100%	918.330.804	100%	4.484.994.092		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
02:12:05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pengelolaan profil kependudukan	100%	100%	14.952.000	100%	16.447.200	100%	18.091.920	100%	19.901.112	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persent ase Pengelolaan Profil Kependudukan	100%	23.836.000	100%	25.027.800	100%	26.279.190	100%	28.907.109	100%	31.797.820	100%	34.977.602	100%	170.825.521		Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil
02:13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**				12.129.550.000		11.565.600.000		13.875.315.000		9.477.985.500	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**																	
02:13:05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapatkan Biaya Operasional dan Persentase BUMDes yang Berkembang	40%	55%	5.601.640.000	60%	6.688.690.000	65%	5.616.405.000	70%	5.634.075.500	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa(LKD) yang Mendapat	45%	3,691,075,250	50%	5,260,403,700	55%	5,601,640,000	60%	6,688,690,000	65%	5,616,405,000	70%	5,634,075,500	70%	32.492.289.450		Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:13:05	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan	Program baru di 2021	1 Kerjasama	330.000.000	1 Kerjasa ma	360.000.000	1 Kerjasama	365.000.000	1 Kerjasama	380.000.000	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA	Jumlah kerjasama yang disepakati di pedesaan		1,523,780,000	1 Kerjasam a	112,280,300	1 Kerjasama	330,000,000	1 Kerjasa m a	360,000,000	1 Kerjasama	365,000,000	1 Kerjasa m a	380,000,000	5 Kerjasama	3.071.060.300		Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:13:04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	Program baru di 2021	85%	6.197.910.000	90%	4.516.910.000	95%	7.893.910.000	100%	3.463.910.000	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang menyampaikan LPPD tepat waktu	75 %	2,486,763,900	80%	2,327,316,000	85%	6,197,910,000	90%	4,516,910,000	95%	7,893,910,000	100%	3,463,910,000	100%	26,886,719,900		Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**				1.634.864.800		2.065.375.600		2.036.481.800		2.211.204.300	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**																	
02:14:02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	01:17	01:08	457.864.800	01:07	729.375.600	01:06	596.481.800	01:05	645.204.300	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,12	23,024,000	1,09	129,720,000	1,06	457,864,800	1,02	729,375,600	0,99	596,481,800	0,98	645,204,300				Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:14:03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	81.21%	81.29%	788.000.000	81.30%	907.000.000	81.31%	984.000.000	81.33%	1.082.000.000	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif (CPR)	75	2,144,292,500	76	467,180,000	76,5	788,000,000	76,9	907,000,000	77	77	77,5	1,082,000,000				Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
02:14:04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000	24.71	20:58	389.000.000	20:32	429.000.000	20:03	456.000.000	19:32	484.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 p	23	26,216,000	21	181,598,000	19.00	389,000,000	17.00	429,000,000	15.00	457,000,000	13.00	485,000,000				Dinas PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,81%	0.70%		0,69%		0,68%		0,67%			Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 ta	0,71%	6,326,000	0,71 %	36,670,000	0.70%	40,000,000	0,69 %	45,000,000	0,68%	48,000,000	0,67 %	50,000,000				
02:15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**				8.301.213.000		8.556.544.000		8.163.888.000		9.711.225.500	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**																	
02:15:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	78%	86%	8.301.213.000	91%	8.556.544.000	95%	8.163.888.000	100%	9.711.225.500	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Kendaraan BermotorLaik Jalan	78%	7,105,559,500	82%	6,888,774,600	86%	8,301,213,000	91%	8,556,544,000	95%	8,163,888,000	100%	9,711,225,500	100%	48,727,204,600		Dinas Perhubungan
		Persentase Prasarana Perlengkapan Jalan	19.48%	57.95%		85.97%		91.18%		100%			Persentase Prasarana PerlengkapanJalan	23.42%		39.48%		57.95%		85.97%		91.18%		100%		100%			
		Presentase Sarana Prasarana terminal yang memadai	20.00%	36.67%		53.33%		76.67%		100.00%			Presentase Sarana Prasaranaterminal yang memadai	20%		26.67%		36.67%		53.33%		76.67%		100%		100%			
		Presentase Sarana Prasarana Perparkiran yang memadai	33.33%	66.67%		77.78%		88.89%		100%			Presentase Sarana PrasaranaPerparkiran yang memadai	44.44%		55.56%		66.67%		77.78%		88.89%		100%		100%			
		Presentase Desa terlayani angkutan yang menjadi lintasan	15.8%	100%		100%		100%		100%			Presentase Desa terlayani angkutanyang menjadi lintasan trayek	36.8%		66.7%		100%		100%		100%		100%		100%			
		Indeks Tingkat Pelayanan Jalan (VCR)	0,28	0,35		0,39		0,42		0,47			Indeks Tingkat Pelayanan Jalan(VCR)	0.29		0.32		0.35		0.39		0.42		0.47		0.47			
02:16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**				3.994.957.531		4.385.099.754		4.813.487.288		5.283.378.467	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**																	
02:16:02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Informasi Publik yang disediakan dan diumumkan oleh Dinas Kominfosan tentang Keterbukaan Informasi	0%	82%	3.103.957.531	84%	3.404.999.754	86%	3.735.377.288	88%	4.097.457.467	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)			10%		40%		60%		80%		100%		100%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas konten informasi publik Pemerintah Daerah	75%	85%		90%		95%		100%			Persentase Kanal Media yang Aktif Menyebarluaskan Informasi Pu	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02:16:03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	62%	40%	891.000.000	60%	980.100.000	80%	1.078.110.000	100%	1.185.921.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Desa Blankspot yang Terhubung Layanan In			59%		73%		83%		93%		100%		100%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
		Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	0%	18%		18%		23%		23%			Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang Terlayan	15%		53%		53%		67%		87%		100%		100%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02:17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**				1.504.618.060		1.655.079.866		1.820.587.852		2.002.646.639	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**																	
02:17:03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Berkualitas	2,72	4,00 %	220.889.614.00	5,00 %	242.978.575.40	6,00%	267.276.432.94	7,00%	1.109.869.098.57	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif (%)	0	-	63,39 %	55.470.300	63,69 %	72.167.600	64 %	112.099.300	65 %	182.245.200	66 %	200.500.000	66 %	622.482.400		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02:17:05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Memperoleh Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	8,18	10,18	76.753.930.00	10,18	84.429.323.00	10,18	92.872.255.30	10,18	102.159.480.83	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peserta Pelatihan Yang Lulus Kompetensi Koperasi (%	100 %	25.000.000	100 %	421.455.000	100 %	39.046.400	90 %	46.330.000	90 %	60.000.000	90 %	66.000.000	90 %	469.321.400		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02:17:07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH	Persentase Usaha Mikro yang labanya meningkat	26,64	29.00	441.526.096.00	30.00	485.678.706.00	31.00	534.246.576.16	32.00	587.671.234.78	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH	Persentase Usaha Mikro Yang Memenuhi Kualifikasi Standar Kom	55 %	34.680.000	60 %	388.447.600	65 %	444.850.200	70 %	728.510.000	75 %	654.212.000	80 %	707.064.400	80 %	3.057.754.200		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
													Persentase Usaha Mikro Yang Menerapkan E-Comerce (%)	0,14 %		0,14 %		0,15 %		0,17 %		0,2 %		0,23 %		0,23 %			
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang skala usahanya bertambah	0,43	0.32	382.724.210.00	0.34	420.996.631.00	0.36	463.096.294.00	0.38	509.405.924.00	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro Yang Skala Usahanya Bertambah (%)	2,53 %	1.780.000	0,63 %	795.549.850	4,38 %	2.074.138.700	2,67 %	1.745.930.000	0,64 %	338.173.000	0,73 %	371.990.300	0,73 %	7.105.781.850		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
02:18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**				564.116.500		620.528.150		682.581.765		750.839.062	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**																	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	100%	2	131.277.000,00	2	144.404.700,00	2	158.845.970,00	2	174.729.687,00	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Kerjasama Pemberdayaan Dunia Usaha	2 kerjasama	219.200.000	2 kerjasama	62.370.000	2 kerjasama	131.277.000										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
													Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk	1 Potensi Investasi Daerah		1 Potensi Investasi Daerah		1 Potensi Investasi Daerah											
		Jumlah Potensi Investasi Daerah yang dapat dikembangkan untuk dipromosikan		1		1		1		1			Jumlah Sektor Potensi Investasi Baru							1 Potensi	144.404.700	1 Potensi	158.845.170	1 Potensi	174.729.687	3 Potensi	890.826.557		
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi (Milyar Rupiah)	100%	210	68.923.000,00	220	75.815.300,00	230	83.396.830,00	240	91.736.513,00	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Nilai Persetujuan Investasi / Rencana Investasi	200 M	0	200 M	65.640.000	210 M	68.923.000	220 M	220.000.000	400 M	242.000.000	400 M	266.200.000	700 M	728.200.000		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	92.252.000,00	100%	101.477.200,00	100%	111.624.920,00	100%	122.787.412,00	PROGRAM PENGENDALIAN	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	289.225.000	100%	95.830.000	100%	92.252.000										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

	PELAKSANAAN	Pelaksanaan Penanaman Modal										PELAKSANAAN	Presentase Pelaku Usaha yang Menyampaikan LKPM							90%	101.477.200	90%	111.624.920	90%	122.787.412	90%	335.889.532		Terpadu Satu Pintu
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP		100%	132.744.500,00	100%	146.018.950,00	100%	160.620.845,00	100%	176.682.929,50	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai SOP	100%	62.720.000	100%	133.400.000	100%	132.744.500							100%	836.798.725		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100%	100%		100%		100%		100%			Persentase Pelayanan Konsultasi dan Pengaduan sesuai SOP	100%		100%		100%								100%			Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
													Nilai Survey Indeks Kepuasan Masyarakat							88,5	146.018.950	88,7	160.620.845	88,9	176.682.930				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	100%	138.920.000,00	100%	152.812.000,00	100%	168.093.200,00	100%	184.902.520,00	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal	100%	20.100.000	100%	145.910.000	100%	138.920.000										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
													Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Penanaman Modal yang Dikelola Secara Elektronik							100%	152.812.000	100%	168.093.200	100%	184.902.520	100%	505.807.720		
02:19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**				2.188.971.686		2.407.868.855		2.648.655.741		2.913.521.314	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**																	
02:19:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Persentase wira usaha muda	-	15%	645.965.100	20%	710.561.610	25%	781.617.771	30%	859.779.548	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemu	0	-	0	637,315,000	0	645,965,000.00	30%	710,561,500.00	35 %	781,617,650.00	40%	859,779,415.00 40	40%	3,635,238,565.00 Bidang		Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
		Persentase pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan		30%		40%		50%		60%																			
02:19:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase prestasi olahraga yang diraih	-	40%	1.460.504.936	50%	1.606.555.430	60%	1.767.210.973	70%	1.943.932.070	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pertumbuhan atletyang berprestasi	30%	4,611,840,200	40%	2,757,731,760	50%	3,033,504,936.00	60%	3,336,855,429.60	70&	3,670,540,972.56	70%	4,037,595,069.82	70%	21,448,068,367.98		Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
02:19:04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentasi partisipasi pemuda dalam organisasi kepramukaan	-	60%	82.501.650	60%	90.751.815	60%	99.826.997	60%	109.809.696	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase organisasi kepramukaan yang aktif	60%	150,000,000	60%	225,001,500.00	60%	82,501,650.00	60%	90,751,815.00	60%	99,826,996.50	60%	109,809,696.15	60%	757,891,657.65		Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
02:02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**				979.880.000		1.077.868.000		1.185.654.800		236.352.325	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**																	
02:20:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase data yang tersedia untuk mengukur target kinerja	0%	65%	979.880.000	80%	1.077.868.000	90%	1.185.654.800	100%	236.352.325	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Sektoral yang Terakses	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
													Persentase Data Sektoral yang Valid	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02:21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**				120.531.840		132.585.024		145.843.526		160.427.879	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**																	
02:21:02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase pengelolaan keamanan informasi perangkat daerah	0%	22%	120.531.840	26%	132.585.024	28%	145.843.526	32%	160.427.879	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK	Persentase Gangguan yang Terselesaikan	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
													Persentase Keamanan Informasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%			Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
02:22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				2.285.000.000		2.755.000.000		3.165.000.000		3.600.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			1.622.157.500		1.838.430.000		7.986.078.000		14.670.594.700		3.165.000.000		3.540.000.000		32.822.260.200		
02:22:02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase kebudayaan yang dikembangkan	33.33%	60.00%	440.000.000	80.00%	500.000.000	86.67%	500.000.000	100.00%	560.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Lembaga Adat yang Dibina Dengan Baik	n/a	0	n/a	0	40%	396.500.000	48%	2.758.940.000	72%	500.000.000	100%	500.000.000	100%	4.155.440.000		Dinas Pendidikan dan kebudayaan
02:22:03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	0.00%	62.50%	420.000.000	75.00%	590.000.000	87.50%	760.000.000	100.00%	930.000.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	46.67%	1.188.483.000	66.67%	548.175.000	80%	2.070.955.000	86.67%	5.700.501.000	93.33%	760.000.000	100%	930.000.000	100%	11.198.114.000		Dinas Pendidikan dan kebudayaan
		Persenatase Kesenian tradisional yang dikembangkan	62.50%	75.00%		81.25%		87.50%		100.00%																			
02:22:04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase peningkatan kegiatan pembinaan sejarah Lokal kab/kota	0.00%	50.00%	380.000.000	66.67%	425.000.000	83.33%	470.000.000	100.00%	520.000.000	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	4%	179.460.500	11%	834.845.000	43%	4.873.682.000	67%	3.063.085.900	80%	470.000.000	100%	520.000.000	100%	9.941.073.400		Dinas Pendidikan dan kebudayaan
02:22:05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentasi cagar budaya terlestarikan dan terkelola dengan baik	53.33%	73.33%	1.045.000.000	80.00%	1.240.000.000	86.66%	1.435.000.000	100.00%	1.590.000.000	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase kegiatan pelestarian cagar budaya	60%	254.214.000	66.7%	455.410.000	73.33%	644.941.000	80%	3.148.067.800	86.67%	1.435.000.000	100%	1.590.000.000	100%	7.527.632.800		Dinas Pendidikan dan kebudayaan
02:23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**				686.109.900		754.720.890		830.192.979		913.212.277	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**																	
02:23:02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	13%	17%	494.382.000	20%	543.820.200	22%	598.202.220	25%	658.022.442	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	0		49		50	2.291.975.448	51	4.303.261.600	70	4.733.587.760	71	5.206.946.536	71	19.854.752.430		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02:23:03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	10%	30%	191.727.900	40%	210.900.690	50%	231.990.759	60%	255.189.835	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Cakupan Peningkatan Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang D	100		100		100	196.683.600	100	318.049.400	100	349.854.340	100	384.839.774	600	1.515.528.114		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02:24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**				262.500.000		288.750.000		317.625.001		349.387.500	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**																	
02:24:03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip daerah	gram baru di :	20%	21.026.250	30%	23.128.875	40%	25.441.763	50%	27.985.939	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Daerah	100		100		100	307.539.000	100	632.056.000	100	695.261.600	100	764.787.760	600	3.613.811.660		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
######	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase revitalisasi arsip dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	gram baru di :	16.67%	238.848.750	30%	262.733.625	46.67%	289.006.988	66.67%	317.907.686	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Revitalisasi Arsip dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kea	100		100		100	888.045.100	100	963.335.000	100	1.059.668.500	100	1.165.635.350	600	4.674.200.217		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
02:24:04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penggunaan Arsip	gram baru di :	40%	2.625.000	60%	2.887.500	80%	3.176.250	100%	3.493.875	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Pelayanan Perizinan dan Penggunaan Arsip	100		100		100	112.516.400	100	4.673.000	100	5.140.000	100	5.654.330	600	133.234.030		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	URUSAN PILIHAN PEMERINTAH DAERAH											**URUSAN PILIHAN PEMERINTAH DAERAH**																	
03:25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN**				4.191.398.750		4.610.538.626		5.071.592.487		5.578.751.736	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN PERIKANAN**																	
03:25:03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	39,67	10,20%	110.250.000,00	10,20%	121.275.000,00	10,20%	133.402.500,00	10,20%	146.742.750,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi perikanan (%) Persentase Peningkatan Produktivitas perikanan tangkap(%)	1%1%	0	2%2%	0	3%3%	110.250.000	4%4%	40.897.560	5%5%	44.987.316	6%6%	49.486.048	6%6%	245.620.924		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:25:04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)	884,92	10,20%	3.642.159.503,00	10,20%	4.006.375.454,00	10,20%	4.407.012.999,00	10,20%	4.847.714.299,00	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produktivitas Perikanan Budidaya (%) Persentase Peningkatan Produktivitas perikanan Budidaya(%)	10%0,75%	771.865.600	20,20%1,50%	3.476.375.437	30,40%2,25%	3.650.194.208	0,60%3%	17.679.089.652	0,80%3,75%	22.427.105.243	1%4,50%	27.947.933.054	61%4,50%	75.952.583.194		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:25:05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	270 Ha	4,00%	196.366.933,00	4,00%	216.003.626,00	4,00%	237.603.988,00	4,00%	261.364.387,00	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Peningkanan Kawasan Perikanan Lestari (%)	4%	9.856.900	8%	187.016.126	12%	196.360.933	16%	328.522.260	20%	3.613.744.888	24%	397.511.935	24%	589.352.640		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:25:06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	46,44	20,00%	242.622.314,00	23%	266.884.546,00	26,00%	293.573.000,00	29,00%	322.930.300,00	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Rasio peninfkatan diverifikasi produk olahan hasil perikanan (%)	29%	117.802.000	43	231.068.871	57%	242.622.314	71%	576.944.200	86%	834.638.620	100%	698.102.482	100%	2.501.178.487		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**				2.055.364.300		2.260.900.330		2.486.989.220		2.735.685.500	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**																	
03:26:02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	Persentase Kunjungan Wisata	83.69	100%	1.309.656.700,00	100%	1.440.622.370,00	100%	1.584.683.755,00	100%	1.743.151.000,00	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK WISATA	Persentase Destinasi Wisata yang mempunyai Daya Tarik	10%	768,194,000	20%	1,190,597,000	40%	1,309,656,700	60%	1,440,622,370	80%	1,584,683,755	100%	1,743,151,000	100%	7,268,710,825		Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
03:26:03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Rata-rata lama kunjungan wisata	-	2 hari	455.401.100,00	2 hari	500.941.210,00	2 hari	551.035.000,00	2 hari	606.138.500,00	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan promosi pariwisata	0	765,495,000	0	414,001,000	0	455,401,100	10 %	911,132,420	20 %	1,002,245,000	30 %	1,102,469,500	30%	3,885,249,020		Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
03:26:05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentasi Peningkatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	25%	20%	290.306.500,00	20%	319.336.750,00	20%	351.270.465,00	20%	386.396.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kelompok sadar Wisata dan Persentase Produk Kreasi Unggulan	0%	202,356,400	0	263,915,000	10%	290,306,500	20%	319,336,750	30%	351,270,465	40%	386,396,000	40%	1,611,224,715		Dinas Kepemudaan Olahraga & Pariwisata
03:27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**				26.153.789.551		27.461.479.028		28.834.552.979		30.276.280.628	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**																	
		Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	1000 Kg/Ha	14,00%		16,00%		18,00%		20,00%			Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan	1%		1%		1%		1,85%		1,10%		1,15%		1,15%			Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	4,37 Ton/Ha	17,00%		18,00%		19,00%		20,00%			Persentase Peningkatan Populasi Ternak	0		0		5%		10%		10%		10%		35%			Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	8,8 Ton/Ha	17,00%		18,00%		19,00%		20,00%			Persentase Pelayanan Inseminasi Buatan	0		0		6%		6%		6%		6%		24%			Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	140 Orang	52%	17.188.399.883,00	53%	18.047.819.877,00	54%	18.950.210.870,00	55%	19.897.721.414,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan	1%		1%		1%	27.703.579.174	1,05%	34.542.117.223	1,10%	36.684.987.121	1,15%	38.776.637.754	1,15%	137.707.321.272		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Produksi Daging	1.933.289Kg	3,50%		3,50%		3,50%		3,50%			Persentase Peningkatan Produktifitas Hortikultura	1%		1%		1%		1,05%		1,10%		1,15%		1,15%			Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	140 ekor	6%		6%		6%		6%																			Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:27:02		Persentase Peningkatan sarana Pertanian	2824 unit	25%		25%		25%		25%																			Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:27:03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	46	20%	6.083.644.308,00	20,00%	6.387.826.523,00	20%	6.707.217.850,00	20,00%	7.042.578.742,00	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Peningkatan Produksi Peternakan	8%	14.787.296.000	8%	10.507.480.420	4%	13.393.341.279	8%	10.913.008.343	8%	11.458.658.760	44%	211.406.795.410				Dinas KetahananPangan Pertanian & Perikanan
		Persentase Peningkatan Prasarana Peternakan	80 buah	10%		10%		10%		10%			Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	20%		20%		20%		20%		20%		120%					Dinas KetahananPangan Pertanian & Perikanan
03:27:04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian Hewan Menular	99	10,00%	420.024.245,00	10,00%	441.025.457,00	10,00%	463.076.730,00	10,00%	486.230.566,00	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	tase Pelayanan Kesehatan Hewandan Kesehatan Masyarakatt Vet	0		0		100%	518.207.000	100%	1.398.908.300	100%	1.644.320.010	100%	1.829.157.011	100%	5.390.592.321		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan	1000 Ha	13%	512.508.255	18%	538.133.668	23%	565.040.351	30%	593.292.369	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase luas Wilayah yang terdampak bencana perkebunan yang dapat ditanggulangi dan dikendalikan	100%	108.690.000	100%	488.103.100	100%	512.506.255	100%	565.040.351	100%	593.282.369	100%	2.805.787.743				Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:27:05		Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	4000 Ha	7%		8%		9%		10%			Persentase luasan Pengendalian terhadap bencana alam, DPI dan Serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	0%		0%		100%		100%		100%		100%					Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	220 Poktan	100,00%	1.949.212.860,00	100,00%	2.046.673.503,00	100,00%	2.149.007.178,00	100%	2.256.457.537,00	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	19%	1.081.630.000	19%	1.111.589.650	4,2%	5.247.434.900	4,2%	5.412.802.500	4,2%	6.382.014.797	4,2%	7.115.000.000	69,6%	24.157.252.197		Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:27:07		Persentasi Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Bokar yang memperoleh Sertifikat	4400	31,60%		42,90%		54,20%		65,50%																			Dinas Ketahanan Pangan Pertanian & Perikanan
03:30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**				1.459.569.300		1.386.650.500		1.726.327.450		1.882.861.160	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**																	
03:30:03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	Persentase Peningkatan Sapras	50.00	60.00	742.171.500	70.00	816.388.700	80.00	898.027.650	90.00	987.830.550	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI	PERSENTASE PASAR DI KABUPATEN BALANGAN YANG MEME	0	470,900,400	0	2,119,842,680	0	3,241,612,900	10.00	13,654,872,700	10.00	18,695,232,970	10.00	2,317,082,497	30.00	40,499,544,147		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:30:05	PENGEMBANGAN EKSPOR	Persentase peningkatan pendapatan pelaku usaha setelah	15.00	29.05	238.533.100	57.00	62.386.450	59.00	288.625.100	68.00	317.487.700	PROGRAM PENGEMBANGAN	PERSENTASE PENINGKATAN PELAKU USAHA EKSPOR (%)	0	605,421,700	0	277,402,900	30	2,419,079,800	50	1,973,984,500	70	200,000,000	100	200,000,000	100	5,675,888,900		Dinas Perindustrian dan Perdagangan

03:30:07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Peningkatan Jumlah produk yang dipasarkan melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga	20.00	27.00	45.000.000	30.00	49.500.000	33.00	54.450.000	35.00	59.895.000	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	PERSENTASE PENINGKATAN NILAI PRODUK LOKAL (%)		-		33,200,000	0	137,310,000	7.88	50,600,000	21.74	1,000,000,000	25.00	1,000,000,000	25.00	2,221,110,000		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:30:06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Barang Beredar Yang Diawasi yang sesuai dengan	74.00	78.00	238.578.000	79.00	242.559.900	80.00	248.927.600	81.00	257.720.930	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN METROLOGI LEGAL DILAKSA	61.53	152,228,800	69.23	213,703,800	61.53	217,792,200	69.23	578,639,200	76.92	500,000,000	84.61	721,104,300	84.61	2,383,468,300		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase alat – alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	17.00	22.00		24.00		26.00		28.00			PERSENTASE JUMLAH KEGIATAN PENGAWASAN METROLOGI LEGAL DILAKSANAKAN (%)	0		0		20.83		25.00		29.16		33.33		33.33			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:30:04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	08.08	7.60	129.966.950	7.40	142.963.700	7.00	157.260.150	6.80	172.986.280	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	PERSENTASE STABILITAS DAN JUMLAH KETERSEDIAAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK (%)	7.85	78,057,200	6.10	256,339,550	7.60	564,145,600	7.40	757,219,200	7.00	428,618,110	6.80	492,910,920	6.80	2,577,290,580		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:30:02	DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Dengan	4.80	12.00	65.319.750	15.00	72.851.750	18.00	79.036.950	20.00	86.940.700	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN	PERSENTASE PELAKU USAHA PERDAGANGAN YANG MEMPEROLEH IZIN SESUAI DENGAN KETENTUAN (%)	8.42	11,540,000	9.84	38,735,000	12.00	60,510,000	15.15	276,750,000	18.42	333,425,000	20.00	476,267,500	20.00	1,197,227,500		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**				1.238.750.000		1.263.750.000		1.312.500.000		1.346.750.000	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**																	
03:31:02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Ikm Yang Menerapkan Teknologi Industri	4.10	10.00	321.750.000	10.00	331.750.000	10.00	365.500.000	10.00	375.500.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	PERSENTASE IKM YANG MENERAPKAN TEKNOLOGI INDUSTR	6.81	46,180,000	10.00	657,627,300	12.00	1,108,923,400	13.00	4,037,611,600	14.00	1,200,000,000	15.00	1,320,000,000	15.00	8,370,342,300		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:31:03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Produk Industri Yang Bersertifikat Halal	5.83	8.71	215.750.000	10.10	225.750.000	11.31	235.750.000	12.61	245.750.000	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	PERSENTASE PERTUMBUHAN IKM (%)	-9.20	13,500,000	1.36	34,807,200	1.68	140,238,300	1.98	125,530,600	2.11	250,000,000	2.18	325,000,000	2.18	889,076,100		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:31:04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Profil Ikm Yang Berkembang	-	0.58	701.250.000	1.58	706.250.000	2.58	711.250.000	3.58	725.500.000	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	PERSENTASE SKALA USAHA IKM YANG BERKEMBANG (%)		-	0.42	1,143,639,750	0.58	1,170,589,500	1.58	1,055,900,400	2.58	1,270,000,000	3.58	1,375,000,000	3.58	6,015,129,650		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
03:32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**				480.800.000		507.380.000		536.618.000		1.186.446.800	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**																	
3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	0	16%	265.800.000,00	16%	292.380.000,00	16%	321.618.000,00	16%	353.779.800,00	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase warga transmigrasi yang terampil	8%	12.522.400	0	0	16%	265.800.000	16%%	292.380.000	16%	321.618.000	16%	353.779.800	72%	1.246.100.200		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	18,76%	19,05%	215.000.000,00	19,20%	215.000.000,00	19,35%	215.000.000,00	19,50%	832.667.000,00	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Lahan Usaha yang dikelola oleh warga transmigrasi	19,12%	47.557.400	18,91%	226.457.000	19,05%	215.000.000	19,20%	215.000.000	19,35%	215.000.000	19,50%	832.667.000	19,50%	1.751.681.400		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																													
04:01	**SEKRETARIAT DAERAH**				17.133.215.940		17.482.786.656		17.846.504.265		18.125.742.950	**SEKRETARIAT DAERAH**																	
04:01:02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase kebijakan di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang diimplementasikan/diterapkan oleh SKPD (%)	-	100%	15,475,473,310	100%	15,675,473,310	100%	15,875,473,310	100%	15,975,473,310	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejal	100	19,638,398,000	100	17,934,266,900	100	91,135,547,100	100	125,556,079,700	100	149,796,884,300	100	149,796,884,300	100	553,858,060,300		Sekretariat Daerah
		Rata-rata Capaian Kinerja SKPD dan Unit Kerja garis koordinasi (%)	-	100%		100%		100%		100%			Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terlaksana	100		100		100		100		100		100		100			
													Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100		100		100		100		100		100		100			
04:01:03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD bidang perekonomian bidang sumber daya alam terlaksana dan berkualitas	-	100%	1,657,742,630	100%	1,807,313,346	100%	1,971,030,955	100%	2,150,269,640	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Pemerintahan dan Kesejal	100	1,386,081,500	100	1,204,469,800	100	4,197,285,350	100	4,624,344,400	100	6,310,313,300	100	6,310,313,300	100	24,032,807,650		Sekretariat Daerah
		Persentase kebijakan di bidang pengelolaan PBJ bidang Pengelolaan LPSE bidang Pembinaan dan advokasi PBJ yang terlaksana dan berkualitas	-	100%		100%		100%		100%			Persentase Realisasi Kebijakan Bidang Perekonomian dan Pemba	100		100		100		100		100		100		100			
		Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program evaluasi serta pelaporan yang terlaksana dan berkualitas	-	100%		100%		100%		100%			Rata-rata capaian kinerja SKPD dan Unit Kerja Garis Koordinasi	100		100		100		100		100		100		100			
04:02	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**				9.127.224.480		10.039.946.928		11.043.941.621		12.148.335.783	**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**																	
04:02:02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Tingkat pelayanan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	_	M minimal B	9.127.224.480	M minimal	10.039.946.928	M minimal B	11.043.941.621	M minimal Baik		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Terlaksananya rapat Pembahasan Raperda	100	12.280.659.386	100	14.612.961.527	100	12.309.211.900	100	38.465.007.183	100		100		100			Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
													Persentase Terlaksananya Rencana Kerja DPRD	100		100		100		100		100		100		100			
													Persentase Anggota DPRD yang mengikuti Pengembangan Kapas	100		100		100		100		100		100		100			
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																													
06:01	**INSPEKTORAT DAERAH**				2.244.902.000		2.469.392.200		2.743.765.420		3.018.141.962	**INSPEKTORAT DAERAH**																	
06.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	95%	78%	1.364.880.000	80%	1.501.368.000	82%	1.678.938.800	85%	1.846.832.680	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Prosentase penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	75%	1.353.843.000	75%	1.197.050.000	80%	1.364.880.000	83%	1.501.368.000	85%	1.678.938.800	88%	1.846.832.680	88%			Inspektorat
06:01:03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	0	WBK :1	880.022.000	WBK :2	968.024.200	WBK :2	1.064.826.620	WBK :3	1.171.309.282	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Jumlah Unit Kerja yang Mendapat Predikat WBK / WBBM	13 %	751.575.000	13 %	800.020.000	WBK :1	880.022.000	WBK :2	968.024.200	WBK : 3	1.064.826.620	WBK :3	1.171.309.282	WBK :3			Inspektorat
		Level Maturitas SPIP	100	3 (3,05)		3 (3,1)		3 (3,15)		3 (3,2)			Level Maturitas SPIP	3		3		3 (2,8)		3 (2,9)		3 (3,0)		3 (3,1)		3 (3,1)			
		Level kapabilitas APIP	100	3		3		3		3			Level kapabilitas APIP	3		3		3		3		3		3		3			
		Indeks Integritas	77,28	79		80		81		82			Indeks Integritas	78		78		75		80		85		90		90			
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																													
05:01	**PERENCANAAN**				5.220.933.080		5.743.026.358		6.317.328.993		6.949.061.892	**PERENCANAAN**																	
05:01:02	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Pembangunan (Nasional Provinsi Kabupaten)		99%	3.251.473.280,00	98,8%	425.368.340.000,00	99%	3.934.282.635,00	99,2%	4.327.710.898,00	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1. Keselarasan muatan RKPD dengan muatan RPJMD 2. Persentase proritas daerah dengan prioritas Nasional					100%	3.251.473.280,00	100%	425.368.340.000,00	100%	3.934.282.635,00	100%	4.327.710.898,00				Bapperida
05:01:03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKORONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi		93,40%	1.969.459.800,00	94,20%	3.753.168.400,00	95%	2.383.046.358,00	96,80%	2.621.350.994,00	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKORONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang ekonomi & infrastruktur dengan nilai baik					93,40%	1.969.459.800,00	94,20%	3.753.168.400,00	95%	2.383.046.358,00	96,80%	2.621.350.994,00				Bapperida
		Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik		93,40%		94,20%		95%		96,80%			Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah bidang pemerintahan & pembangunan manusia dengan nilai baik					93,40%		94,20%		95%		96,80%					
05:02	**KEUANGAN**				205.972.788.551		206.271.427.977		206.898.570.776		207.588.427.853	**KEUANGAN**																	
05:02:02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	87	87	203.324.295.863	88	203.490.510.656	89	203.839.561.722	90	204.223.517.894	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	50,939	64.520.374.523	78,738	261.412.047.481	80	322.987.754.375	85	469.975.378.253	88	516.972.916.078	90	568.670.207.686	90	648.920.176.379		BPKPAD
05:02:03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset Daerah	38	42	1.493.748.478	45	1.568.435.901	48	1.725.279.492	52	1.897.807.441	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Indeks Pengelolaan Aset	2,5	799.787.100	2,55	2.257.355.250	2,6	3.656.389.400	2,65	4.203.459.500	2,7	4.623.805.450	2,75	5.086.185.995	2,75	6.713.531.750		BPKPAD
05:02:04	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase penerimaan PBB P-2 dan BPHTB % Penerimaan PAD selain PBB -P2 dan BPHTB dan Persentase Pendapatan non PAD	100%	100%	1.154.744.210	100%	1.212.481.420	100%	1.333.729.562	100%	1.467.102.518	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	optimalisasi Pendapatan	100%	615.803.560	100%	1.875.260.250	!00%	4.011.163.200	100%	3.933.361.400	!00%	4.326.697.540	!00%	4.759.367.294	100%	6.502.227.010		BPKPAD
05:03	**KEPEGAWAIAN**				2.766.022.500		2.766.022.500		2.766.022.500		2.766.022.500	**KEPEGAWAIAN**																	
05:03:02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83.71	90	2.766.022.500	90	2.766.022.500	90	2.766.022.500	90	2.766.022.500	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85	2.524.227.200	90	5.375.980.100	90	2.766.022.500	90	2.766.022.500	90	2.766.022.500	90	2.766.022.500				BKPSDM
		Indeks Profesionalitas (IP) ASN	67:06:00	80		85		86		87			Indeks Profesionalitas (IP) ASN	69		75		80		85		86		87					
		Indeks Sistem Merit	257	270		275		300		325			Indeks Sistem Merit	257		265		270		275		300		325					
		Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	-	60		65		70		75			Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	64		65		67		69		71		72					
05:04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**				2.646.658.140		2.699.591.303		2.753.583.129		2.808.654.791	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**																	
05:04:02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	57%	75%	2.646.658.140	80%	2.699.591.303	85%	2.753.583.129	90%	2.808.654.791	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural					75%	2.646.658.140	80%	2.699.591.303	85%	2.753.583.129	90%	2.808.654.791				BKPSDM
		Persentasi Calon ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Latsar	100%	100%		100%		100%		100%			Persentasi Calon ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Latsar					100%		100%		100%		100%					
05:05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**				1.236.135.890		1.359.749.479		1.495.724.426		1.645.296.868	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**																	
05:05:02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi	1.616	50	1.236.135.890	52	2.680.000.000	55	1.495.724.426	57	1.645.296.868	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi					50	1.236.135.890	52	2.680.000.000	55	1.495.724.426	57	1.645.296.868				Bapperida
		Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)	70	100%		100%		100%		100%			Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (%)					100%		100%		100%		100%					
UNSUR KEWILAYAHAN																													
07.01	**KECAMATAN**				6.281.781.990		6.895.046.276		8.899.714.131		8.080.693.300	**KECAMATAN**							-		-		-		-				
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		100; 100 Persen;	54.771.780,00	0 Persen;	63.118.000,00	100 Persen; P	69.429.800,00	00 Persen; I	76.372.750,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan	72.529.500	1 Laporan	163,399,000.00	1 Laporan	199,248,800.00	1 Laporan		4 Laporan			Kec. Lampihong
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85%	86%	79.210.740	87%	87.131.814	88%	95.844.995	89%	105.429.495		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	100%	126.096.200	100%	75.438.800	100%	87.131.814	1 Laporan	152.618.540	1 Laporan	160.249.467	1 Laporan	168.261.940	3 Laporan	481.129.947		Kec. Paringin
		Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan		88	110.000.000	88,5	120.000.000	89	125.000.000	89,5	135.000.000																				Kec. Batumandi
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		80%	108.375.850,00	80%	119.213.435,00	80%	836.261.976,00	80%	144.248.256,35		Jumlah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pu							1 Laporan	255.998.100	1 Laporan	281.597.910	1 Laporan	309.757.701	3 Laporan	1.150.280.411		Kec. Juai
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85 Nilai	87 Nilai	123.306.750	88 Nilai	135.637.425	89 Nilai	149.201.168	90 Nilai	164.121.284		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan P	85	193.704.200	86	105.435.000	87	74.000.000	88	248.913.300	89	273.804.630	90	301.185.093	90	301.185.093		Kec. Paringin Selatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	83	113.850.000	84	125.250.000	85	137.775.000	86	151.550.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan	153.850.000	1 Laporan	460.000.000	1 Laporan	506.000.000	1 Laporan	556.600.000	4 Laporan	1.676.450.000		Kec. Halong
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN)		100%	154.340.350	100%	169.774.400	100%	186.751.850	100%	205.427.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP	100%	89.176.850	100%	94.329.200	1 Laporan	64.674.000	1 Laporan	65.979.000	1 Laporan	72.576.900	1 Laporan	79.834.590	4 Laporan	466.570.540		Kec. Tebing Tinggi
		Persentase PATEN yang terlayani sesuai standar pelayanan	100%	100%	56.185.000	100%	65.185.000	100%	66.185.000	100%	76.185.000																				Kec. Awayan

07.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100	100%	329.673.040,00	100%	380.139.450,00	100%	418.153.400,00	100%	459.968.700,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					1 laporan		1 laporan	371.274.300	1 laporan	256.107.500	1 Laporan		1 Laporan	4 Llaporan			Kec. Lampihong							
		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100%100%	100%	258.037.500	100%	283.841.250	100%	312.225.375	100%	343.447.913	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 laporan	2.594.272.100	1 laporan	1.906.349.600	1 laporan	2.001.667.080	1 laporan	2.101.750.434		4 Llaporan			Kec. Paringin							
		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan		100%	270.000.000	100%	280.000.000	100%	315.000.000	100%	330.000.000																		Kec. Batumandi							
		Persentase kegiatan pemberdayaan desa dan kelurahan		60%	11.987.250,00	65%	13.185.975,00	70%	524.723.457,50	75%	15.955.029,75		Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							1 laporan	191.594.900	1 laporan	203.170.240	1 laporan	215.903.114	3 Laporan	610.668.254			Kec. Juai							
		Persentase Akomodasi Usulan Hasil Musrenbang Desa		100%	1.083.752.350	100%	1.117.303.479	100%	1.118.715.082	100%	1.120.267.844		Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan							2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan		2 Laporan				Kec. Paringin Selatan							
		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif		100%	328.860.000	100%	361.750.000	100%	361.750.000	100%	437.700.000		Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan	471.419.500	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	275.000.000	1 Laporan	302.500.000	4 Laporan	1.298.919.500			Kec. Halong							
		Persentase desa dengan pemberdayaan masyarakat aktif											Jumlah Laporan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporam	287.578.000	1 Laporan	383.382.300	1 Laporan	371.720.530	1 Laporan	425.067.116	4 laporan	1.636.613.446			Kec. Tebing Tinggi							
		Persentase akomodasi usulan hasil musrenbang kecamatan	100%	100%	267.740.000	100%	267.740.000	100%	267.740.000	100%	267.740.000																		Kec. Awayan							
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diakomodasi		100%	30.353.190,00	100%	34.978.500,00	100%	38.476.300,00	100%	42.323.950,00	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum ya					1 Laporan		1 Laporan	88.154.800,00	1 Laporan	63.864.800,00	1 Laporan		4 Laporan				Kec. Lampihong							
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan		100%	8.032.500	100%	8.835.750	100%	9.719.325	100%	10.691.258		Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan	175.025.200	1 Laporan	289.152.220	1 Laporan	303.609.831	1 Laporan	318.790.323	4 Laporan				Kec. Paringin							
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan pemerintahan umum dan tanpa	0	100%	12.000.000	100%	13.500.000	100%	15.000.000	100%	17.500.000																		Kec. Batumandi							
		Penurunan jumlah pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman dan keindahan	1 keg	1 keg	49.698.000,00	1 keg	54.667.800,00	1 keg	60.134.580,00	1 keg	66.148.038,00		Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum							1 Laporan	125.284.600	1 Laporan	137.813.060	1 Laporan	151.594.366	3 Laporan	414.692.026			Kec. Juai							
		Persentase Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi Urusan ketentraman dan ketertiban																											Paringin Selatan							
		Penurunan jumlah pelanggaran K3 ketertiban, ketentraman dan keindahan		100%	9.500.000	100%	10.450.000	100%	11.500.000	100%	12.650.000		Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan	12.500.000	1 Laporan	70.000.000	1 Laporan	77.000.000	1 Laporan	84.700.000	4 Laporan	244.200.000			Kec. Halong							
		Persentase koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum yang diakomodasi											Jumlah Laporan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan	45.998.000	1 Laporan	72.810.000	1 Laporan	80.091.000	1 Laporan	88.100.100	4 laporan	286.999.100			Kec. Tebing Tinggi							
		Persentase koordinasi sinergitas dan harmonisasi urusan ketentraman dan ketertiban dengan	100%	100%	12.590.000	100%	17.590.000	100%	17.590.000	100%	20.590.000																		Kec. Awayan							
07.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	meningkatnya Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	–	100%	137.940.600,00	100%	158.960.200,00	100%	174.856.500,00	100%	192.341.800,00	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan		1 laporan	192.236.500,00	1 laporan	215.943.800,00	1 laporan		4 laporan				Kec. Lampihong							
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	100%	122.844.750	100%	135.129.225	100%	148.642.148	100%	163.506.362							1 Laporan											Kec. Paringin							
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa		100%	145.000.000	100%	159.500.000	100%	195.000.000	100%	225.000.000																		Kec. Batumandi							
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	219.125.500,00	100%	241.038.050,00	100%	510.218.885,00	100%	291.656.040,50		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum							1 Laporan	132.636.600	1 Laporan	145.900.260	1 Laporan	160.490.286	3 Laporan	439.027.146			Kec. Juai							
		Persentase Penyelenggaraan Administrasi Umum Pemerintahan Desa	100%	100%	244.377.000	100%	268.814.700	100%	295.696.170	100%	325.265.787																		Paringin Selatan							
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100%	100%	160.000.000	100%	175.000.000	100%	195.000.000	100%	215.000.000		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan	160.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	44.000.000	1 Laporan	48.400.000	4 Laporan	292.400.000			Halong							
		Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum		100%	304.519.600	100%	334.971.560	100%	368.468.716	100%	405.315.588		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan	135.080.200	1 Laporan	243.147.200	1 Laporan	267.563.920	1 Laporan	294.320.312	4 Laporan	1.355.313.632			Kec. Tebing Tinggi							
		Persentase penyelenggaraan administrasi umum pemerintahan desa	100%	100%	195.300.000	100%	220.850.000	100%	250.850.000	100%	280.850.000																		Kec. Awayan							
07.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase usulan musrenbang yang di akomodir; Persentase RT yang menyampaikan laporan,Persentase jumlah desa yang menyampaikan laporan	–	100%	50.608.715,00	100%	57.830.100,00	100%	62.913.200,00	100%	68.504.400,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1 laporan		1 laporan	179.277.000	1 laporan	770.388.000	1 laporan		4 laporan				Kec. Lampihong							
		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa	100%	100%	84.984.375	100%	93.482.813	100%	102.831.094	100%	113.114.203		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 laporan	141.135.200	laporan	185.959.000	1 laporan	151.254.560	laporan	146.814.898	4 laporan				Kec. Paringin							
		Persentase desa tertib administrasi keuangan dan aset desa		100%	25.500.000	100%	27.500.000	100%	32.500.000	100%	37.500.000																		Kec. Batumandi							
		Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik		100%	202.543.000,00	100%	222.797.300,00	100%	245.077.030,00	100%	269.584.733,00		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa							1 Laporan	258.044.000	1 Laporan	283.848.400	1 Laporan	312.233.240	3 Laporan	854.125.640			Kec. Juai							
		Persentase desa tertib administrasi keuangan desa tangan	100%	100%	287.028.000	100%	315.730.800	100%	347.303.880	100%	382.034.268																		Kec. Paringin Selatan							
		Persentase desa dengan administrasi pencatatan pengelolaan keuangan desa baik	100%	100%	68.115.000	100%	74.950.000	100%	82.445.000	100%	90.700.000		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					1 Laporam	68.450.000	Laporam	420.000.000	1 Laporan	490.500.000	Laporam	559.050.000	4 Laporan	1.538.000.009			KecHalong							
		Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN); persentase desa yang ikut dalam lomba desa dan jumlah desa yang menyampaikan laporan keuangan		100%	547.681.150	100%	602.449.250	100%	662.694.200	100%	728.963.600		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang Disusun Tepat Waktu dan Sesuai SOP					1 Laporan	149.472.200	1 Laporan	327.993.300	1 Laporan	360.792.630	1 Laporan	395.871.900	4 Laporan	1.424.565.835			Kec.Tebing Tinggi							
		Persentase pengelolaan keuangan dan aset desa	100%	100%	73.750.000	100%	76.750.000	100%	88.040.000	100%	88.040.000																		Kec. Awayan							
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																																					
08.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**				2.366.170.000		2.541.885.000		2.754.521.500		3.015.871.650	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**																									
08.01.02	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PROGRAM	Persentase Peran Aktif Kelompok Masyarakat	100%	100%	93.900.000	100%	103.290.000	100%	113.619.000	100%	124.980.900	PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PROGRAM	Angka potensi Konflik sosial berlatar belakang suku, rasi/etnis dan antar golongan yang tertangani	1	2.429.574.758	1	60.850.000	1	4.748.115.600	1	8.110.146.300	1	8.621.160.930	1	9.183.277.023	6	33.153.124.611			Badan Kesbangpol							
08.01.03	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN	Persentase Parpol yang aktif	100%	100%	968.820.000	100%	991.300.000	100%	1.016.028.000	100%	59.034.069.307	PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN PROGRAM	Persentase Parpol yang Aktif	100%	803.635.000	100%	833.870.000	100%	1.679.629.300	100%	49.060.514.300	100%	53.789.519.370	100%	59.034.069.307	100%	165.201.237.277			Badan Kesbangpol							
08.01.04	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Ormas yang aktif	100%	100%	105.050.000	100%	115.555.000	100%	127.110.500	100%	139.821.550	PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN	Persentase Ormas yang Aktif	100%	88.625.000	100%	100.000.000	100%	255.675.100	100%	222.020.600	100%	244.222.660	100%	268.644.926	100%	1.179.188.286			Badan Kesbangpol							
08.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI	Persentase Ormas Keagamaan yang Aktif	100%	100%	51.900.000	100%	57.090.000	100%	62.799.000	100%	69.078.900	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI	Angka Potensi Konflik Sosial Berlatar Belakang Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama yang Tertangani	1	98.615.000	1	50.003.000	1	232.206.400	1	276.491.000	1	294.631.900	1	314.586.890	6	1.266.534.190			Badan Kesbangpol							
08.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Persentase Potensi Konflik Sosial yang ditindaklanjuti	100%	100%	1.146.500.000	100%	1.274.650.000	100%	1.434.965.000	100%	1.638.761.500	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN	Persentase Potensi Konflik yang Terselesaikan	100%	489.463.000	100%	777.570.000	100%	1.262.478.000	100%	1.239.288.000	100%	1.308.838.830	100%	1.462.233.915	100%	6.539.871.745			Badan Kesbangpol							